Danantara Indonesia

WIKA BETON

Driving Value Creation Through Sustainable Innovation

Mendorong Penciptaan Nilai Melalui Inovasi Berkelanjutan



Annual Report

2025

Laporan Tahunan

PT Wijaya Karya Beton Tbk


Danantara Indonesia
WIKA BETON
Driving Value Creation Through Sustainable Innovation
Mendorong Penciptaan Nilai Melalui Inovasi Berkelanjutan
2025

Penjelasan Tema
Theme Explanation

Driving Value Creation Through Sustainable Innovation

Mendorong Penciptaan Nilai Melalui Inovasi Berkelanjutan

WIKA Beton memaknai penciptaan nilai pada 2025 sebagai kemampuan mengubah tantangan industri menjadi peluang kinerja melalui inovasi yang relevan dan terukur. Perolehan kontrak baru yang tetap tumbuh hingga Rp4 triliun dan keberhasilan pengiriman perdana produk tunnel lining untuk Metro Manila Subway menunjukkan bahwa inovasi tidak berhenti pada laboratorium, tetapi hadir pada eksekusi, kualitas, dan ketepatan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Arah ini memperkuat daya saing karena keandalan delivery dan kapabilitas teknis biasanya menjadi penentu utama pada proyek infrastruktur dan pasar regional.

WIKA Beton defines value creation in 2025 as the ability to turn industry challenges into performance opportunities through relevant and measurable innovation. The continued growth in new contracts to Rp4 trillion and the successful first delivery of tunnel lining products for the Metro Manila Subway show that innovation does not stop in the laboratory, but is present in execution, quality, and the accuracy of meeting customer needs. This direction strengthens competitiveness because delivery reliability and technical capabilities are usually the main determinants in infrastructure projects and regional markets.

Inovasi berkelanjutan ditempatkan sebagai sumber diferensiasi, bukan sekadar kewajiban kepatuhan. Sertifikasi Environmental Product Declaration (EPD) dan capaian penurunan jejak karbon produk hingga 26,4% memberi dasar yang dapat diuji untuk membangun kredibilitas produk rendah emisi, sekaligus membuka ruang peningkatan efisiensi biaya melalui perbaikan proses dan material substitusi. Pemanfaatan panel surya, konsep Zero Sludge Waste, serta inisiatif logistik yang lebih bersih memperlihatkan orientasi operasional yang menginternalisasi agenda dekarbonisasi ke dalam cara kerja sehari-hari.

Sustainable innovation is positioned as a source of differentiation, not merely a compliance obligation. Environmental Product Declaration (EPD) certification and a 26.4% reduction in the carbon footprint of products provide a verifiable basis for building the credibility of low-emission products, while also opening up opportunities for cost efficiency improvements through process improvements and material substitution. The use of solar panels, the Zero Sludge Waste concept, and cleaner logistics initiatives demonstrate an operational orientation that internalizes the decarbonization agenda into everyday work practices.

Penguatan tata kelola memperjelas bahwa inovasi yang dikejar harus tetap kredibel dan rendah risiko. Sertifikasi ISO 37001:2016 memposisikan integritas sebagai prasyarat pengambilan peluang bisnis, terutama pada aktivitas tender dan rantai pasok yang sensitif. Kolaborasi dekarbonisasi berbasis teknologi juga memperkuat akuntabilitas pengukuran dan pengambilan keputusan lingkungan.

Strengthening governance makes it clear that the innovations pursued must remain credible and low risk. ISO 37001:2016 certification positions integrity as a prerequisite for seizing business opportunities, especially in sensitive tendering and supply chain activities. Technology-based decarbonization collaboration also strengthens accountability for environmental measurement and decision-making.

Perusahaan mengikat kinerja, ESG, dan tata kelola dalam satu arah yang konsisten, sekaligus menjaga kesinambungan roh penguatan fondasi periode sebelumnya. Atas dasar itu, tema **"Mendorong Penciptaan Nilai Melalui Inovasi Berkelanjutan"** menegaskan inovasi sebagai sumber nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan.

The company aligns performance, ESG, and governance in a consistent direction, while maintaining the continuity of the spirit of strengthening the foundations of the previous period. On that basis, the theme of **"Driving Value Creation Through Sustainable Innovation"** affirms innovation as a source of long-term value for stakeholders.

Kesinambungan Tema Laporan Tahunan
Continuity of Annual Report Theme



Strengthening Business Through Sustainable Solution

Menguatkan Bisnis Melalui Solusi Berkelanjutan.

PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) terus memperkuat daya saingnya di tengah dinamika industri dengan fokus pada efisiensi operasional, ekspansi pasar, dan inovasi berkelanjutan sepanjang 2024. Melalui penggunaan material ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, serta digitalisasi proses bisnis, perusahaan meningkatkan kualitas operasional dan responsivitas terhadap kebutuhan pasar. Optimalisasi rantai pasok, pengembangan produk inovatif seperti EcoConcrete, serta perluasan kerja sama strategis di tingkat nasional dan internasional semakin memperkokoh posisi WIKA Beton sebagai pemimpin industri beton pracetak. Dengan tema "Menguatkan Bisnis Melalui Solusi Berkelanjutan," Laporan Tahunan 2024 menegaskan komitmen perusahaan dalam menghadapi tantangan industri sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan.

PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) continues to strengthen its competitiveness amid an increasingly dynamic industry by focusing on operational efficiency, market expansion, and sustainable innovation throughout 2024. Through the use of environmentally friendly materials, the adoption of renewable energy, and the digitalization of business processes, the company enhances operational quality and its responsiveness to market needs. The optimization of its supply chain, the development of innovative products such as EcoConcrete, and the expansion of strategic partnerships at both national and international levels further reinforce WIKA Beton's position as a leader in the precast concrete industry. With the theme "Strengthening Business Through Sustainable Solutions," the 2024 Annual Report affirms the company's commitment to addressing industry challenges while creating long-term value for stakeholders.

2024

2023



Reinforcing Quality, Affirming Sustainability

Memantapkan Keunggulan, Menegaskan Keberlanjutan

2022



Winning the Competition

Memenangkan Persaingan

2021



Energi Transformasi

The Energy of Transformation

Tentang Laporan Ini
About This Report

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk dengan tema "**Mendorong Penciptaan Nilai Melalui Inovasi Berkelanjutan**". Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis Perseroan sepanjang tahun 2025 serta masa depan keberlanjutan bisnis Perseroan.

Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun 2025 menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja Perseroan dalam setahun. Informasi tersebut memuat dokumentasi lengkap yang menggambarkan profil Perseroan; kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan; informasi tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi Perseroan yang menerapkan konsep best practices dan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perseroan kepada otoritas terkait serta menjadi buku tahunan yang turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara karyawan. Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya tentang Perseroan, melalui penyediaan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan.

Laporan Tahunan ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di situs web resmi Perseroan yaitu www.wika-beton.co.id.

Welcome to the 2025 Annual Report of PT Wijaya Karya Beton Tbk with the theme "**Driving Value Creation Through Sustainable Innovation**". This theme is chosen based on in-depth analysis and study on the facts and business developments of the Company throughout 2025, as well as the Company's business continuity in the future.

The 2025 Annual Report of PT Wijaya Karya Beton Tbk is a comprehensive source of documentation and information on the Company's performance for one year. The information contained in this report includes the profile of the Company; operational, marketing and financial performance; as well as duties, roles, and structural functions of the Company's organization that applies the concepts of best practices and principles of corporate governance.

The primary objective of this Annual Report is to optimize the disclosure of Company's information to relevant authorities and to become an annual book that brings forth employee's pride and solidarity. This Annual Report also aims to build understanding and trust of shareholders and other stakeholders about the Company, through the provision of appropriate, balanced, and relevant information.

This Annual Report is presented in both Indonesian Language and English, and uses clear and legible font type and size. Aside from being printed on paper with good quality, this Annual Report can also be read and downloaded at the Company's official website, www.wika-beton.co.id.

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer

Laporan Tahunan ini berisikan pernyataan-pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pengertian perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis.

Pernyataan-pernyataan tersebut bersifat prospektif yang memiliki risiko dan ketidakpastian serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang tertulis dalam pernyataan-pernyataan tersebut. Pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perseroan serta lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa segala tindakan yang telah diambil untuk memastikan keabsahan dokumen ini akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan ini juga memuat kata "Perseroan" dan "WIKA Beton" atau yang didefinisikan sebagai PT Wijaya Karya Beton Tbk.

This Annual Report contains financial conditions, operation results, projections, plans, strategies, policies, as well as the Company's objectives, classified as forward-looking statements in the implementation of the prevailing laws and regulations, excluding historical matters.

Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors which can cause actual results to differ materially from expected results. Prospective statements in this Annual Report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company, and the business environment where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that all valid documents presented will bring specific results as expected.

This Annual Report contains the words "the Company" and "WIKA Beton" which hereinafter shall be referred to as PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Daftar Isi
Table of Contents

Penjelasan Tema 3
Theme Explanation
Kesinambungan Tema Laporan Tahunan 4
Continuity of Annual Report Theme
Tentang Laporan Ini 5
About This Report
Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab 6
Disclaimer
Daftar Isi 7
Table of Contents

Ikhtisar Kinerja
Performance Highlights

Ikhtisar Kinerja 10
Performance Highlights
Ikhtisar Keuangan 16
Financial Highlights
Ikhtisar Operasional 22
Operational Highlights
Ikhtisar Saham 24
Share Overview
Aksi Korporasi 27
Corporate Action
Penghentian Sementara Perdagangan Saham dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham 28
Temporary Stock Trading Suspension and/or Delisting
Temporary Stock Trading Suspension and/or Delisting
Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi 28
Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds Highlights
Peristiwa Penting 29
Significant Events
Penghargaan dan Sertifikasi 43
Awards and Certifications

Laporan Manajemen
Management Report

Laporan Direksi 52
Board of Director's Report
Laporan Dewan Komisaris 70
Board of Commissioner's Report

Profil Perusahaan
Company Profile

Identitas Perusahaan 84
Company's Identity
Riwayat Singkat Perusahaan 85
Company at a Glance
Informasi Perubahan Nama Perseroan 89
Information on Company Name Change
Jejak Langkah 90
Milestones
Visi, Misi dan Nilai-Nilai Budaya Kerja Perusahaan 94
Vision, Mission, and Company Work Culture Values

Makna dan Penjelasan Logo Perseroan 99
Logo Explanation
Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar Terakhir 101
Business Activity According to the Last Articles of Association
Produk dan Jasa yang Dihasilkan 111
Products and Services Produced
Wilayah Kerja dan Peta Operasional 114
Work Area and Operational Map
Wilayah Penjualan 116
Sales Area
Struktur Organisasi Perusahaan 120
Company Organization Structure
Keanggotaan Organisasi/Asosiasi 122
Membership in Associations/Organizations
Jumlah Karyawan dalam Tahun Buku 123
Number of the Employee in the Financial Year
Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) 129
Information on the Employment of Public Accountant Services (AP) and Public Accounting Firm (KAP)
Riwayat Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) 129
History of Using Public Accountant Services (AP) and Public Accounting Firm (KAP)
Informasi Lembaga dan/atau Profesi Penunjang 130
Information on Supporting Institutions and/or Professions
Profil Direksi 132
Board of Directors Profile
Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya 139
Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and Reasons for Changes
Perubahan Komposisi Anggota Direksi yang Terjadi Setelah Berakhirnya Tahun Buku Sampai dengan Disampaikannya Laporan Tahunan 139
Changes in the Composition of Members of the Board of Directors After the End of the Financial
Profil Dewan Komisaris 140
Board of Commissioners Profile
Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya 144
Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners and Reasons for Changes
Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris yang Terjadi Setelah Berakhirnya Tahun Buku Sampai dengan Disampaikannya Laporan Tahunan 145
Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners and Reasons for Changes
Pejabat Eksekutif 146
Executive Officers
Informasi Kepemilikan Saham Oleh Pejabat Executive 149
Information on Share Ownership by Executive Officers
Nama Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan pada Awal dan Akhir Tahun Buku 150
Name of Shareholders and Percentage of Ownership in Early and Ended of the Financial Year
Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perusahaan, Baik langsung maupun Tidak Langsung 154
Information on Major and Controlling Shareholders of the Company, Either Directly or Indirectly
Struktur Grup Perusahaan 156
Corporate Structure
Informasi Entitas Anak dan Ventura Bersama 157
Information on Subsidiaries and Joint Venture

Kronologi Pencatatan Saham 162
Share Listing Chronology
Kronologi Pencatatan Efek Lainnya 164
Other Securities Listing Chronology
Informasi pada Situs Web Perseroan 165
Information on Company's Website
Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan 167
Intern Training and/or Educational Activities of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit

Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Overview

Sumber Daya Manusia 174
Human Capital
Teknologi Informasi 195
Information Technology

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tinjauan Umum 208
General Overview
Kinerja Operasi Per Segmen Usaha 222
Performance Review Per Business Segment
Tinjauan Keuangan 240
Financial Overview
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 259
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Kinerja Perusahaan Anak 274
Subsidiaries Performance
Kemampuan Membayar Utang 281
Solvency
Tingkat Kolektibilitas Piutang 284
Receivables Collectibility Rate
Rasio Keuangan Lainnya 286
Other Financial Ratios
Struktur Modal 288
Capital Structure
Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal 291
Material Commitments For Capital Goods Investment
Bahasan Mengenai Investasi Barang Modal yang Direalisasikan dalam Tahun Buku 292
Discussion on Capital Expenditures Realized in the Fiscal Year
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan 293
Material Information and Fact Subsequent to Balance Sheet Date
Peningkatan atau Penurunan yang Material dari Penjualan atau Pendapatan 294
Material Increase or Decrease from Sales or Revenue
Dampak Perubahan Harga Terhadap Pendapatan 295
Impact of Price Change on Revenues
Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing 296
Material Increase or Decrease from Sales or Revenue
Prospek Usaha 297
Business Prospects
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024 300
Comparison between 2024 Targets and Realization
Proyeksi Tahun 2025 305
Projection for the Year 2025
Aspek Pemasaran 309
Marketing Aspects
Uraian Mengenai Dividen 311
Description of Dividends
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 313
Realization of Use of Proceeds from Public Offering
Pembayaran Pajak 314
Tax Payment
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal 315
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/ Consolidation, Acquisition, and Capital/Debt Restructuring
Informasi Material Mengenal Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan 318
Material Information Knowing Affiliate Transactions and Transactions Containing Conflicts of Interest
Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa Dan Jarang Terjadi 319
Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Alasan dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan 324
Changes in Accounting Policies, Reasons, and Their Impact on Financial Statements

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan 328
Corporate Governance
Penilaian Implementasi Tata Kelola (Governansi) Perusahaan 342
Corporate Governance Assessment
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 345
General Meeting Of Shareholders (GMS)
Direksi 378
The Board Of Directors
Dewan Komisaris 410
The Board Of Commissioners
Dewan Pengawas Syariah 452
Sharia Supervisory Board
Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris 453
Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners
Transparansi Dewan Komisaris dan Direksi 462
Transparency of the Board of Commissioners and the Board of Directors
Komite Audit 469
Audit Committee
Komite Nominasi, Remunerasi, & Pemantau Risiko 483
Nomination, Remuneration & Risk Oversight Committee
Komite Tata Kelola Terintegrasi & Good Corporate Governance 502
Integrated Governance & Good Corporate Governance Committee
Komite ESG 518
ESG Committee
Sekretaris Perusahaan 522
Corporate Secretary
Satuan Pengawasan Intern 528
Internal Control
Sistem Pengendalian Internal 542
Internal Control System
Sistem Manajemen Risiko 548
Risk Management System
Perkara Hukum Yang Berdampak Material 566
Legal Cases With Material Impact
Informasi Tentang Sanksi Administratif 566
Information About Administrative Sanctions

Kode Etik dan Budaya Perseroan 567
Code Of Conduct And Corporate Culture

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen 570
Employee and/or Management Stock Option Plan MSOP/ESOP

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi 571
Share Ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors

Sistem Pelaporan Pelanggaran 572
Whistleblowing System

Kebijakan Anti Korupsi, Anti Gratifikasi dan Donasi 580
Anti-Corruption, Anti-Gratification And Donation Policy

Kebijakan Insider Trading 585
Insider Trading Policy

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 586
Procurement of Goods and Services Policy

Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur 591
Policy On Fulfillment of Creditor Rights

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 593
Anti Bribery Management System (SMAP)Insider Trading Policy

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 595
Implementation Of The Application Of Aspects and Principles Of Governance Of The Company In Accordance With The Provisions Of The Financial Services Authority

Referensi PUGKI 2021 600
2021 PUGKI Reference

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 622
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan
Social & Environment Responsibility

Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) 648
Corporate Social & Environmental Responsibility

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun 2025 652
Statement Letter from the Board of Commissioners for the Responsibility of the 2025 Annual Report of PT Wijaya Karya Beton Tbk

Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun 2025 653
Statement Letter from the Board of Directors for the Responsibility of the 2025 Annual Report of PT Wijaya Karya Beton Tbk

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perseroan Publik 656
SEOJK Reference Number 16/SEOJK.04/2021: Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies

Kriteria Annual Report Award 678
Annual Report Award Criteria

Lampiran Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk Dan Entitas Anak Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 697
Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Beton Tbk and Its Subsidiary for The Year Ended December 31, 2025

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan
Overview of Sustainability

Ikhtisar Ekonomi
Economic Performance



Laba Bersih
Net Profit

4,12
(miliar I billion)

Pendapatan Usaha
Operating Revenue

3,59
(triliun I trillion)

1.030 atau sekitar **99%** dari total pemasok WIKA Beton adalah pemasok lokal dengan kontribusi alokasi anggaran sebesar Rp2.246 miliar.

1,030 or approximately 99% of WIKA Beton's total suppliers are local suppliers, with a budget allocation contribution of Rp2,246 billion.

Ikhtisar Sosial dan Kemasyarakatan
Social and Community Performance

1.340.573
(Karyawan I Employee)
9.830.872
(Kontraktor I Contractor)

Jam Kerja Selamat
Safe Working Hours

85,1%
(dalam % I in %)

Survei Keterikatan Karyawan
Employee Engagement Survey

5,96%
(dalam % I in %)

Persentase Karyawan Perempuan
Percentage of Female Employees

Rp995,75
(Juta I Million)

Realisasi Dana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial
Realization of Corporate Social Responsibility (CSR) Fund Allocation

Ikhtisar Lingkungan
Environmental Performance

Proper BIRU
PT Wijaya Karya Beton Tbk
Pabrik Produk Beton Lampung Plant Lampung Selatan
Lampung Concrete Products Plant, South Lampung

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Reduction in Greenhouse Emissions

Cakupan 1 Scope 1	Cakupan 2 Scope 2	Cakupan 3 Scope 3
25,36%	22,70%	33,55%

Ikhtisar Tata Kelola
Governance Performance



71 **S&P Global**
ESG Score WIKA Beton

Skor Rata-rata Industri
Industry Average Score **38**

Sektor: Material Konstruksi
Sector: Construction Materials

Lingkungan Evnvironmental	70
Sosial Social	80
Tata Kelola & Ekonomi Governance & Economic	63

97,59 **ASEAN** Corporate Governance Scorecard
"Very Good"

Ikhtisar Kinerja
Performance Highlights

Total Aset
Total Assets

6.290,47
(Dalam Rp Miliar) I (In Rp Billion)

12,57%

Penyaluran Dana CSR
CSR Fund Disbursement

995,75
(Dalam Rp Juta) I (In Rp Million)

20,84%

Pendapatan Usaha
Operating Revenues

3.585,86
(Dalam Rp Miliar) I (In Rp Billion)

26,76%

Survei Keterikatan Karyawan
Employee Engagement Survey

85,10%
(Dalam %) I (In %)

4,90%



Kapasitas Produksi Ready Mix
Ready Mix Production Capacity

6.142.205
(Dalam Ton) I (In Rp Tones)

13,41%

Kapasitas Produksi Beton Pracetak
Precast Production Capacity

4.782.500
(Dalam Ton) I (In Tones)

5,82%

Inovasi Produk Berkelanjutan
Sustainable Product Innovation

W-Home

W-Home menegaskan kapasitas WIKA Beton menghadirkan inovasi yang cepat, presisi, dan relevan dengan kebutuhan nasional. Dengan sistem modular pracetak, hunian tipe 36 dapat dirakit dalam sekitar 48 jam tanpa alat berat, tetap mengedepankan mutu, efisiensi, dan ketahanan gempa. W-Home bukan sekadar produk, melainkan sinyal kepemimpinan WIKA Beton dalam solusi hunian masa depan yang adaptif dan berkelanjutan.

WIKA Beton is strengthening its capability through W-Home innovation. Through its modular precast system, a Type 36 housing unit can be assembled in approximately 48 hours without the use of heavy equipment expected to be faster, precise, and highly relevant to national needs, still maintaining quality, efficiency, and earthquake resilience. W-Home is a clear reflection of WIKA Beton's leadership in shaping adaptive and sustainable housing solutions for the future.



Concrete Reef Unit (CRU)

Concrete Reef Unit (CRU) memperlihatkan bahwa inovasi WIKA Beton tidak berhenti pada infrastruktur darat, tetapi juga menjangkau keberlanjutan ekosistem laut. Dengan desain kubus berongga sebagai habitat buatan biota laut dan media tumbuh terumbu karang, CRU merepresentasikan arah bisnis yang visioner. Produksi sekitar 5.500 unit dan instalasi perdana di Gili Meno menegaskan kapasitas WIKA Beton menggabungkan teknologi, dampak, dan tanggung jawab lingkungan.

Concrete Reef Unit (CRU) demonstrates that WIKA Beton's innovation is beyond land-based infrastructure, but also into the sustainability of marine ecosystems. Featuring a hollow cubic design that functions as an artificial habitat for marine life and a growth medium for coral reefs, CRU reflects the Company's forward-looking business direction. The production of approximately 5,500 units and the initial installation in Gili Meno underscore WIKA Beton's capability to integrate technology, impact, and environmental responsibility.



Tiang Pancang EPD

Sebagai produsen beton pertama di Indonesia yang meraih sertifikasi internasional Environmental Product Declaration (EPD) untuk produk PC Spun Pile, WIKA Beton menunjukkan transparansi jejak lingkungan produknya sekaligus menarik perhatian kawasan, termasuk melalui kunjungan delegasi Singapore Green Building Council ke PPB Bogor. Pencapaian ini menempatkan WIKA Beton sebagai representasi inovasi beton Indonesia yang kian diperhitungkan dalam ekosistem konstruksi berkelanjutan di Asia Tenggara.

As the first concrete producer in Indonesia to obtain the international Environmental Product Declaration (EPD) certification for its PC Spun Pile products, WIKA Beton demonstrates transparency in the environmental footprint of its products while also attracting regional attention, including through a visit by the Singapore Green Building Council delegation to PPB Bogor. This achievement positions WIKA Beton as a representation of Indonesia's concrete innovation, increasingly recognized within the sustainable construction ecosystem in Southeast Asia.







2025 Laporan Tahunan
Annual Report



Ikhtisar Kinerja
Performance Highlight

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

Ikhtisar Keuangan
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah I in million Rupiah)

Keterangan Description	2021	2022	2023	2024	2025	YoY %	CAGR %
Pendapatan Usaha Operating Revenues	4.458.987	6.003.788	4.203.171	4.896.024	3.585.862	(26,76)	(5,30)
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(4.221.917)	(5.486.630)	(3.880.251)	(4.522.338)	(3.328.961)	(26,39)	(5,77)
Laba Bruto Gross Profit	237.070	517.158	322.920	373.686	256.901	(31,25)	2,03
Beban Usaha Operating Expenses	(117.560)	(117.294)	(131.578)	(160.277)	(150.550)	(6,07)	6,38
Laba Usaha Operating Income	119.510	399.864	191.342	213.409	106.351	(50,17)	(2,71)
Pendapatan (Beban) Bunga Interest Income (Expenses)	(74.645)	(78.139)	(58.352)	(32.111)	(14.680)	(54,28)	(33,41)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	36.480	(72.219)	(90.157)	(93.818)	(72.232)	(23,01)	24,09
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	81.345	249.506	42.833	87.481	19.861	(77,30)	(29,71)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Income Tax Benefit (Expense)	2.699	(78.446)	(23.016)	(23.281)	(15.738)	(32,40)	55,40
Dampak Penyesuaian Proforma Atas Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Impact of Proforma Adjustment on Restructuring Transaction of Entities under Common Control	(2.610)		-	-	-	-	-
Laba Tahun Berjalan Net Income for the Year	81.434	171.060	19.817	64.200	4.122	(93,58)	(52,57)
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Expenses)	1.511	(81)	1.173	3.361	1.676	(50,12)	2,63
Laba Komprehensif Comprehensive Income	82.945	170.979	20.989	67.560	5.799	(91,42)	(48,58)
Laba yang Dapat Diatribusikan kepada: **Income Attributable to:**							
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	82.908	162.916	34.126	65.004	40.020	(38,44)	(16,65)
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	(1.474)	8.144	(14.309)	(805)	(35.897)	4.360,50	122,15
Jumlah Laba Tahun Berjalan Total Income for the Year	81.434	171.060	19.817	64.200	4.122	(93,58)	(52,57)
Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: **Comprehensive Income Attributable to:**							
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	84.366	162.820	35.307	68.361	41.701	(39,00)	(16,15)
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	(1.421)	8.159	(14.317)	(801)	(35.902)	4.382,48	124,20
Jumlah Laba Komprehensif Total Comprehensive Income	82.945	170.979	20.989	67.560	5.799	(91,42)	(48,58)
Laba Bersih per Saham (dalam Rupiah penuh) Earnings per Share (in full amount of Rupiah)	9,51	18,69	3,92	7,46	4,59	(38,47)	(16,65)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statements of Financial Position

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Keterangan Description	2021	2022	2023	2024	2025	YoY %	CAGR %
Aset **Assets**							
Aset Lancar Current Assets	5.650.194	6.149.561	4.384.893	3.929.811	3.167.862	(19,39)	(13,47)
Aset Tetap - Bersih Fixed Assets - Net	3.183.937	3.045.751	3.003.465	3.007.716	2.889.091	(3,94)	(2,84)
Properti Investasi Investment Property	125.806	187.622	188.963	191.558	194.141	1,35	11,46
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	24.692	25.500	34.367	50.874	22.656	(55,47)	(2,13)
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	32.306	7.332	9.123	2.802	-	(100,00)	(100,00)
Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint ventures	7.613	6.864	3.483	1.952	10.575	441,87	8,56
Jumlah Aset Total Assets	9.082.511	9.447.529	7.631.671	7.194.688	6.290.467	(12,57)	(8,77)
Liabilitas **Liabilities**							
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	5.055.794	5.472.903	3.727.678	3.042.007	2.429.047	(20,15)	(16,74)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	541.906	336.805	277.883	465.915	175.409	(62,35)	(24,57)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	5.597.700	5.809.708	4.005.561	3.507.923	2.604.456	(25,76)	(17,41)
Ekuitas **Equity**							
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.484.811	3.637.821	3.626.110	3.686.766	3.686.012	(0,02)	1,41
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada: **Equity Attributable to:**							
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	3.420.383	3.528.497	3.531.121	3.592.597	3.627.761	0,98	1,48
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	64.428	109.323	94.989	94.169	58.251	(38,14)	(2,49)
Modal Kerja Bersih Net Working Capital	594.400	676.658	657.216	887.804		(100,00)	

Laporan Arus Kas
Statement of Cash Flows

(dalam jutaan Rupiah I in million Rupiah)

Keterangan Description	2021	2022	2023	2024	2025	YoY %	CAGR %
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Cash Flows Provided by Operating Activities	35.051	34.700	95.469	262.019	123.446	(52,89)	36,99
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Cash Flows Used for Investing Activities	(183.935)	(155.037)	(81.710)	(107.308)	(12.878)	(88,00)	(48,56)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flows Provided by (Used for) Financing Activities	313.062	(108.356)	(1.144.623)	35.120	(297.217)	(946,28)	(1,29)
Dampak Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun Effect of Foreign Exchange on Cash and Cash Equivalent at end of the Year	25	782	(232)	508	821	61,68	138,37
Saldo Awal Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Beginning Balance of Cash and Cash Equivalent	1.602.044	1.766.221	1.538.312	407.215	597.554	46,74	(21,85)
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Ending Balance of Cash and Cash Equivalent	1.766.221	1.538.312	407.215	597.554	411.726	(31,10)	(30,52)

Rasio Kinerja Keuangan & Pertumbuhan
Financial Performance & Growth Ratio

(dalam jutaan Rupiah I in million Rupiah)

Keterangan Description	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan Unit
Rasio Likuiditas **Liquidity Ratio**						
Rasio Kas Cash Ratio	34,93	28,11	10,92	19,64	16,95	%
Rasio Cepat Quick Ratio	91,92	92,76	91,87	105,34	102,26	%
Rasio Lancar Current Ratio	111,76	112,36	117,63	129,18	130,42	%
Modal Kerja Bersih Net Working Capital	13,33	11,27	15,64	18,13	20,60	%
Rasio Aktivitas **Activity Ratio**						
Periode Pengumpulan Collection Period	66,06	48,55	83,19	68,49	77,97	Hari Days
Perputaran Persediaan Inventory Turnover	82,09	65,23	83,39	54,07	73,95	Hari Days
Perputaran Aset Lancar Current Asset Turnover	0,79	0,98	0,96	1,25	1,13	Kali Times
Perputaran Aset Tetap Fixed Asset Turnover	1,37	1,96	1,40	1,63	1,24	Kali Times
Perputaran Total Aset Total Asset Turnover	0,5	0,64	0,55	0,68	0,57	Kali Times
Perputaran Modal Kerja Working Capital Turnover	7,50	8,87	6,40	5,51	4,85	Kali Times

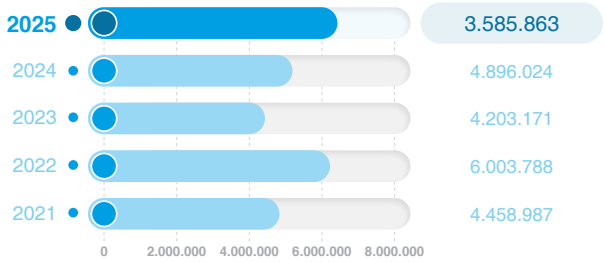
(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Keterangan Description	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan Unit
Rasio *Leverage* **Leverage Ratio**						
Rasio Total Utang terhadap Aset Debt to Asset Ratio	61,63	61,49	52,49	48,76	41,40	%
Rasio Solvabilitas **Solvability Ratio**						
Rasio Total Utang terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	160,63	159,70	110,46	95,15	70,66	%
Rasio Rentabilitas **Rentability Ratio**						
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	5,32	8,61	7,68	7,63	7,16	%
Margin EBITDA EBITDA Margin	7,07	8,61	5,89	7,07	6,69	%
Rasio Produksi Production Ratio	97,32	93,34	95,45	95,64	97,03	%
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	1,83	2,85	0,47	1,31	0,11	%
Rasio Pengemballian atas Investasi Return On Investment (ROI)	3,53	5,50	3,25	3,51	2,66	%
Rasio Pengembalian atas Ekuitas Return On Equity (ROE)	2,38	4,85	0,56	1,79	0,11	%
Rasio Pengembalian atas Aset Return On Assets (ROA)	0,93	1,81	0,26	0,89	0,07	%



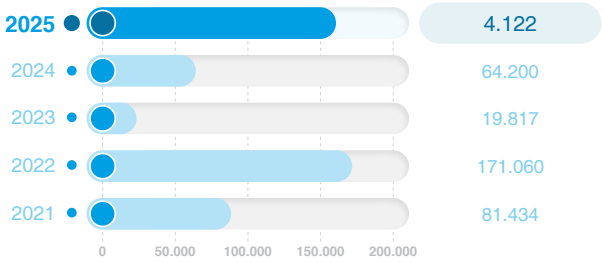
Grafik Ikhtisar Keuangan
Chart of Financial Highlights

Pendapatan Usaha
Operating Revenues



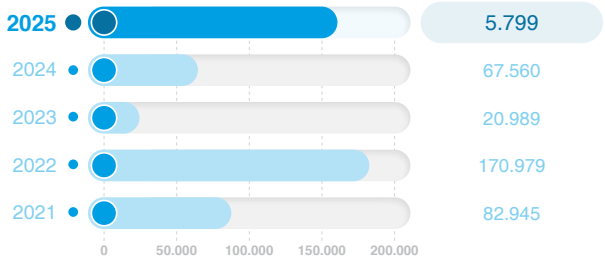
(Dalam jutaan Rupiah I In million Rupiah)

Laba Bersih Tahun Berjalan
Net Profit for the Year



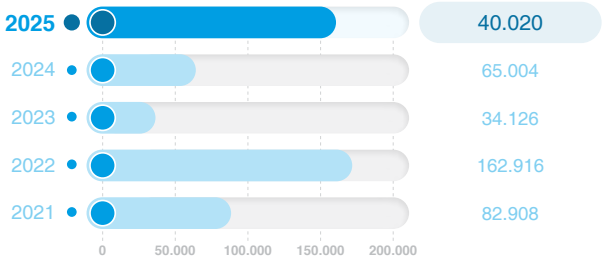
(Dalam jutaan Rupiah I In million Rupiah)

Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Comprehensive Income for the Year



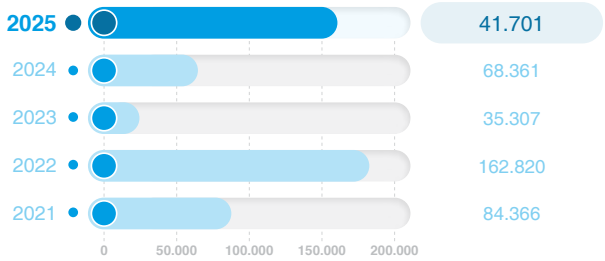
(Dalam jutaan Rupiah I In million Rupiah)

Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity



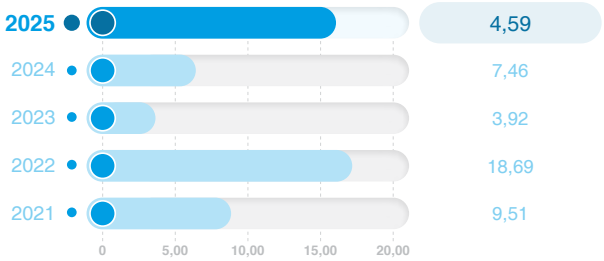
(Dalam jutaan Rupiah I In million Rupiah)

Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Comprehensive Income for the Year



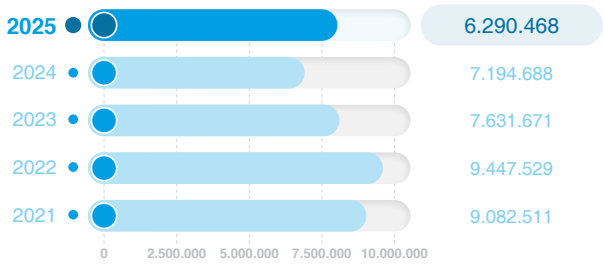
(Dalam jutaan Rupiah I In million Rupiah)

Laba Bersih per Saham Dasar
Basic Earning per Share



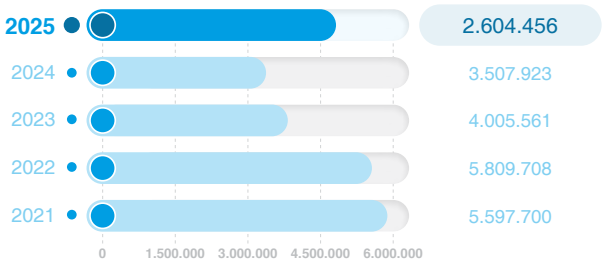
(Dalam jutaan Rupiah I In million Rupiah)

Jumlah Aset
Total Assets



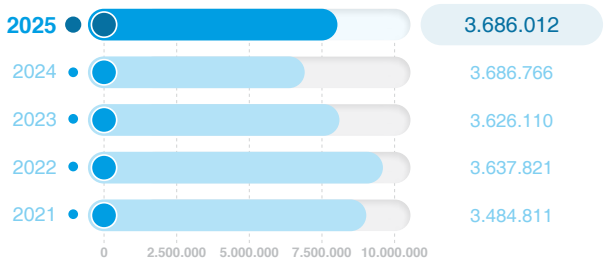
(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Jumlah Liabilitas
Total Liabilities



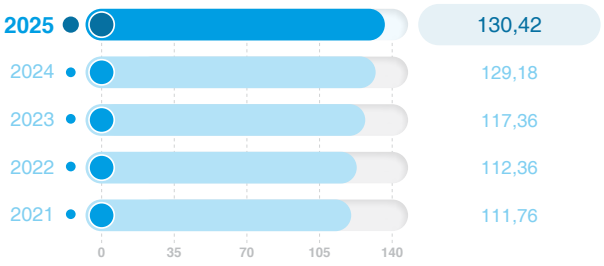
(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Jumlah Ekuitas
Total Equity



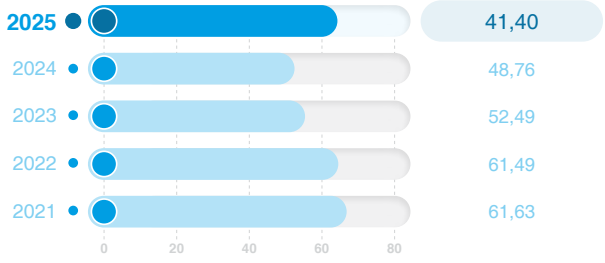
(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Rasio Lancar
Current Ratio



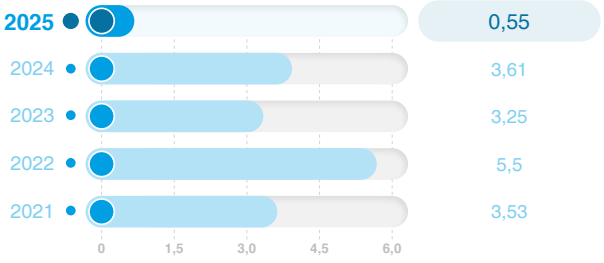
Ratio Lancar 2021-2025 dalam % | Current Ratio 2021-2025 in %

Rasio Total Utang terhadap Aset
Debt to Asset Ratio



Ratio Lancar 2021-2025 dalam % | Current Ratio 2021-2025 in %

Rasio Pengembalian atas Investasi
Return on Investment (ROI)



Ratio Lancar 2021-2025 dalam % | Current Ratio 2021-2025 in %

Ikhtisar Operasional
Operational Highlights

Kapasitas Produksi Beton Pracetak
Precast Production Capacity

(dalam ton | in tonnes)

2021	2022	2023	2024	2025
4.660.000	5.406.000	5.014.500	5.078.250	4.782.500

Kapasitas Produksi *Ready Mix*
Ready Mix Production Capacity

(dalam ton | in tonnes)

2021	2022	2023(*)	2024	2025
3.258.077	4.688.071	5.958.000	5.545.232	6.142.205

Catatan I Note:
(*) Terdapat penyesuaian pada tahun 2023 untuk konsistensi dalam pelaporan kapasitas produksi Ready Mix.
(*) There was an adjustment in 2023 for consistency in reporting the Ready Mix production capacity.

Kapasitas Produksi *Quarry*
Quarry Production Capacity

(dalam m^3 | in m^3)

2021	2022	2023(*)	2024	2025
1.540.305	1.264.322	1.146.600	756.976	637.000

Catatan I Note:
(*) Terdapat penyesuaian pada tahun 2023, dari satuan ton menjadi m^3 untuk konsistensi dalam pelaporan kapasitas produksi quarry.
(*) There was an adjustment in 2023, from tons to m^3, for consistency in reporting the quarry production capacity.

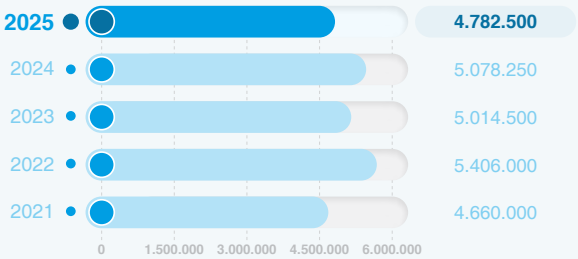
Jasa (jumlah pekerjaan)
Service (project number)

(dalam proyek | in project)

Deskripsi Description	2021	2022	2023	2024	2025
Pemancangan Inner Bore	19	25	23	4	1
Instalasi Installation	269	251	204	7	8
Jasa Konstruksi Construction Services	7	19	7	3	15

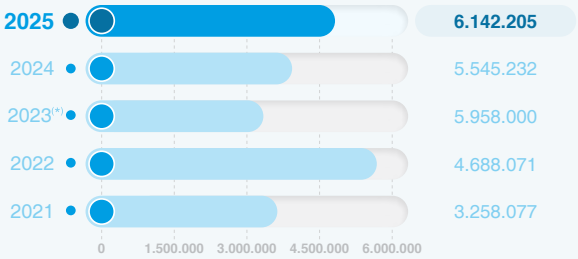
Kapasitas Produksi
Production Capacity

Kapasitas Produksi Beton Pracetak
Precast Production Capacity



(dalam ton | in tonnes)

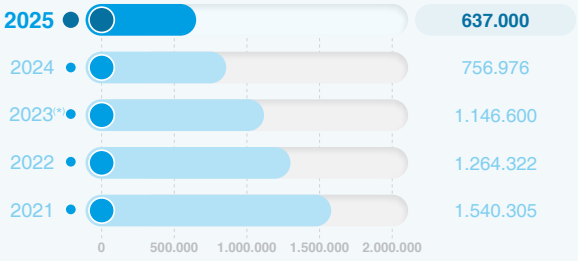
Kapasitas Produksi *Ready Mix*
Ready Mix Production Capacity



(dalam ton | in tonnes)

(*) Terdapat penyesuaian pada tahun 2023 untuk konsistensi dalam pelaporan kapasitas produksi Ready Mix.
(*) There was an adjustment in 2023 for consistency in reporting the Ready Mix production capacity.

Kapasitas Produksi *Quarry*
Quarry Production Capacity

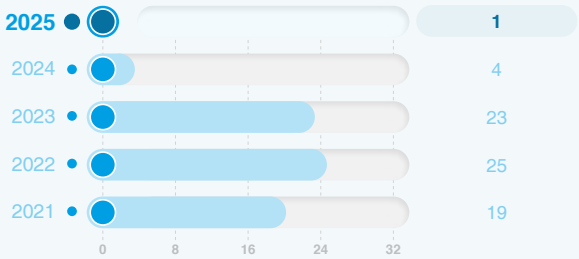


(dalam m^3 | in m^3)

(*) Terdapat penyesuaian pada tahun 2023, dari satuan ton menjadi m^3 untuk konsistensi dalam pelaporan kapasitas produksi quarry.
(*) There was an adjustment in 2023, from tons to m^3, for consistency in reporting the quarry production capacity.

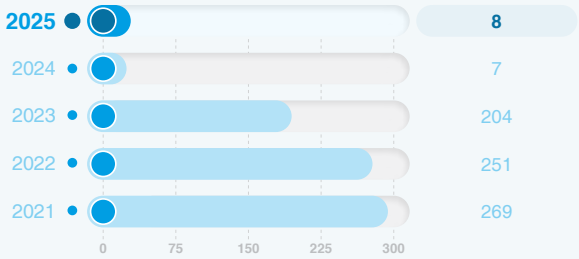
Jasa
Service

Pemancangan
Inner-bore



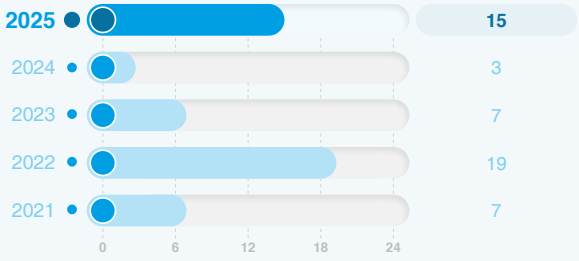
(dalam proyek | in project)

Instalasi
Installation



(dalam proyek | in project)

Jasa Kontruksi
Construction Service



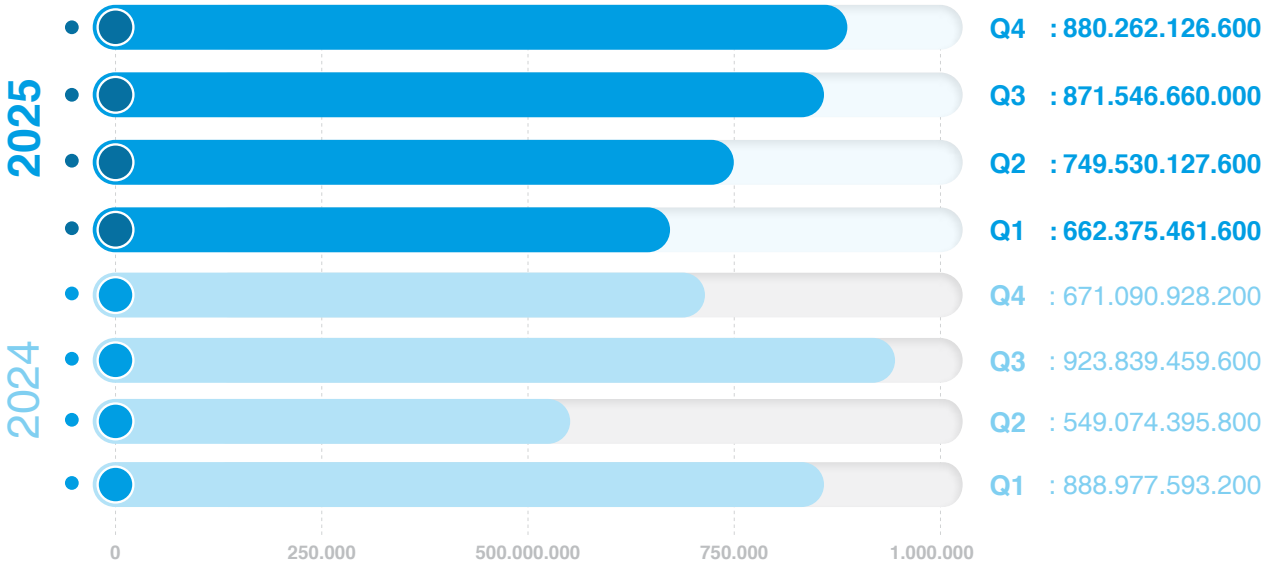
(dalam proyek | in project)

Ikhtisar Saham
Share Overview

Harga, Volume, Nilai, dan Kapitalisasi Saham WTON
WTON Share Price, Volume, Value, and Capitalization

Periode Period	Jumlah Saham Beredar Total Outstanding Shares	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization Rp	Harga Pembukaan Opening Price Rp	Harga Tertinggi Highest Price Rp	Harga Terendah Lowest Price Rp	Harga Penutupan Closing Price Rp	Volume Transaksi (saham) Transaction Volume (shares)
2025							
Kuartal I Quarter I	8.715.466.600	662.375.461.600	78	94	56	76	488.449.100
Kuartal II Quarter II		749.530.127.600	71	99	65	86	686.574.500
Kuartal III Quarter III		871.546.660.000	87	124	84	100	2.093.552.900
Kuartal IV Quarter IV		880.262.126.600	100	116	94	101	1.678.201.000
2024							
Kuartal I Quarter I	8.715.466.600	888.977.593.200	108	134	96	102	479.200.200
Kuartal II Quarter II		549.074.395.800	102	103	50	63	325.073.600
Kuartal III Quarter III		923.839.459.600	63	130	62	106	2.766.573.900
Kuartal IV Quarter IV		671.090.928.200	106	112	73	77	463.595.900

Grafik Kapitalisasi Pasar WTON 2024-2025
Chart of WTON Market Capitalization 2024-2025

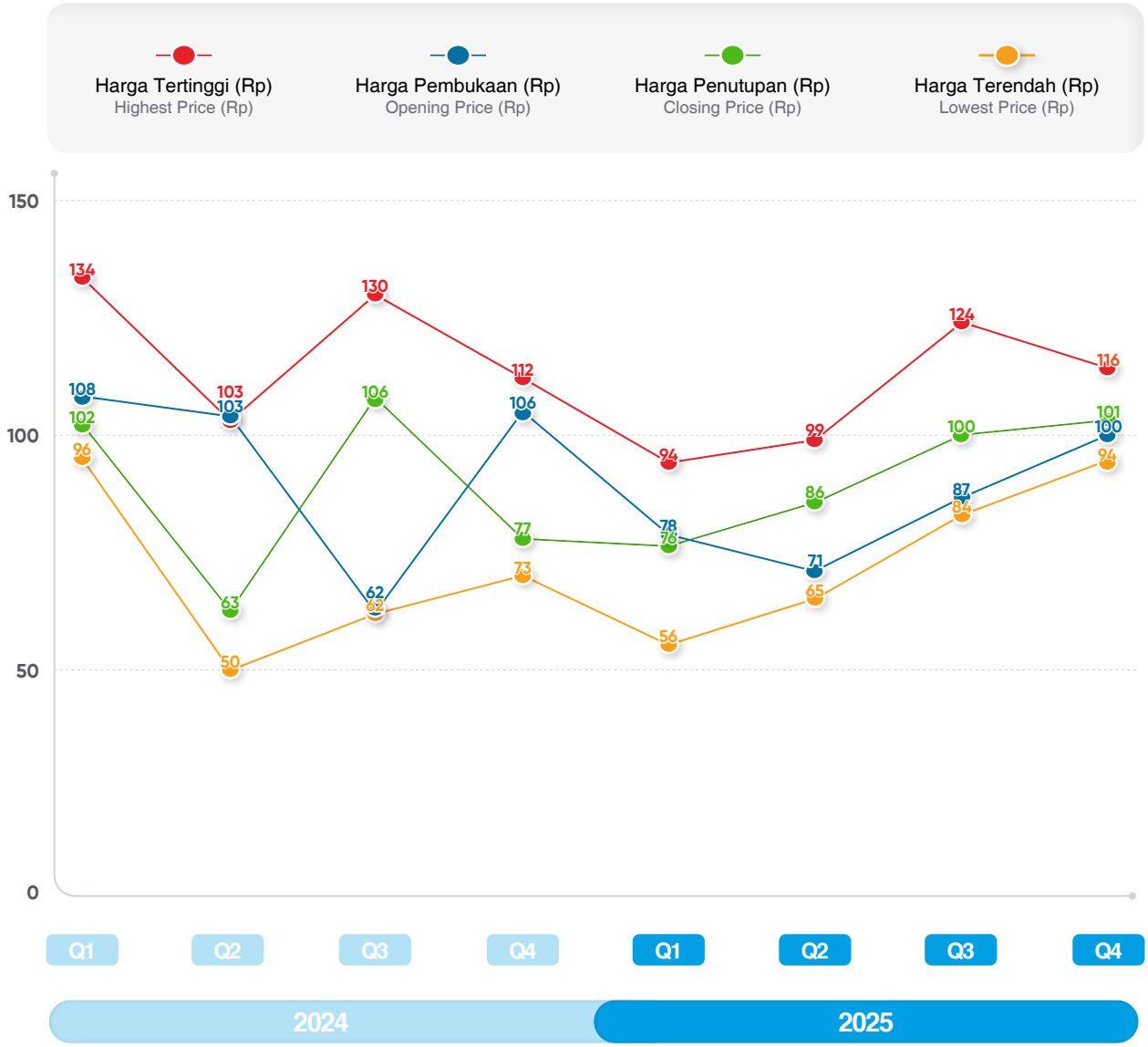


(Dalam jutaan Rupiah I In million Rupiah)

Tabel dan Grafik Harga Saham WTON 2024-2025
Table and Chart of WTON Share Price 2024-2025

Keterangan Description	2024				2025			
	Q1 (Jan-Mar)	Q2 (Apr-Jun)	Q3 (Jul-Sep)	Q4 (Oct-Dec)	Q1 (Jan-Mar)	Q2 (Apr-Jun)	Q3 (Jul-Sep)	Q4 (Oct-Dec)
Harga Pembukaan (Rp) Opening Price (Rp)	108	102	63	106	78	71	87	100
Harga Tertinggi (Rp) Highest Price (Rp)	134	103	130	112	94	99	124	116
Harga Terendah (Rp) Lowest Price (Rp)	96	50	62	73	56	65	84	94
Harga Penutupan (Rp) Closing Price (Rp)	102	63	106	77	76	86	100	101

Grafik Harga Saham WTON 2024-2025
Chart of WTON Share Price 2024-2025



Informasi Saham Perseroan Sejak Penawaran Umum Perdana (IPO) Hingga 31 Desember 2025

Pada tahun 2014, WIKA Beton melaksanakan aksi korporasi dalam bentuk Penawaran Umum Perdana Saham *(Initial Public Offering/IPO)*. Pada momentum ini, sejumlah 2.045.466.600 saham biasa dilepas ke masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp100/saham dan ditawarkan dengan harga sebesar Rp590/saham. Pada tanggal 26 Maret 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pernyataan efektif terkait transaksi ini. Perseroan pun secara resmi memulai perdagangan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tanggal 8 April 2014.

Berikut riwayat perkembangan harga saham selama 5 (lima) tahun terakhir.

Information on Company's Shares since Initial Public Offering (IPO) until December 31, 2025

In 2014, WIKA Beton executed a corporate action in the form of an Initial Public Offering (IPO). During this pivotal moment, a total of 2,045,466,600 ordinary shares were released to the public with a nominal value of Rp100 per share, presented at an offering price of Rp590 per share. On March 26, 2014, the Financial Services Authority (OJK) issued an effective statement regarding this transaction. Consequently, the Company officially commenced the trading of its shares on the Indonesia Stock Exchange (BEI) on April 8, 2014.

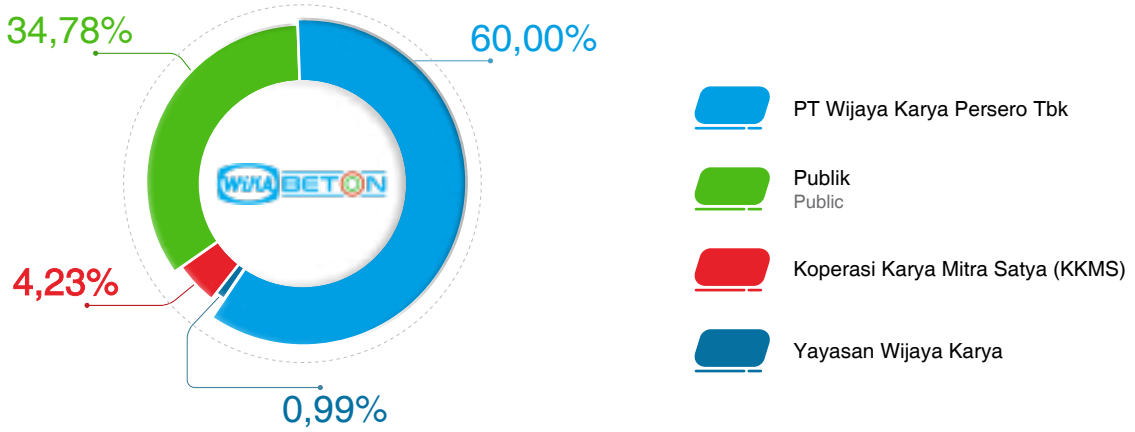
Here is the share price history over the past 5 (five) years.

Informasi Saham Perseroan Sejak Penawaran Umum Perdana (IPO) Hingga 31 Desember 2025
Information on Company's Shares since Initial Public Offering (IPO) until December 31, 2025

Keterangan Description	2021	2022	2023	2024	2025
Harga Tertinggi (Rp) Highest Price (Rp)	525	262	200	134	124
Harga Terendah (Rp) Lowest Price (Rp)	218	189	102	50	56
Harga Penutupan (Rp) Closing Price (Rp)	246	191	108	77	101
Nilai Buku per Saham (Rp) Book Value per Share (Rp)	399,84	417,4	416,05	423,45	422,93
Price to Book Value (%)	0,62	0,46	0,26	0,18	0,24
Price to Earnings Ratio (%)	25,87	10,22	27,55	10,32	22,00
Jumlah Saham Beredar Total Outstanding Shares	8.715.466.600	8.715.466.600	8.715.466.600	8.715.466.600	8.715.466.600

Catatan I Note:
(*) Jumlah saham sejak *Initial Public Offering (IPO)* yaitu 8.715.466.600 saham
(*) The total number of shares since the Initial Public Offering (IPO) is 8,715,466,600.

Pie Chart Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2025
Pie Chart of Shareholder Composition as of December 31, 2025



Aksi Korporasi
Corporate Action

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melakukan Aksi Korporasi yang berkaitan dengan pemecahan saham *(stock split)*, penggabungan saham *(reverse stock)*, dividen saham, saham bonus, penurunan nilai nominal saham, penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)*, dan penghapusan pencatatan saham *(delisting)*.

Throughout 2025, the Company did not conduct Corporate Action related to stock split, reverse stock, stock dividend, bonus stock, decline in nominal value of stock, suspension, and delisting.

Dividen Tunai

Distribusi dividen tunai rutin bagi Pemegang Saham mengindikasikan performa Perseroan yang positif sekaligus mencerminkan upaya Perseroan untuk mengupayakan kemakmuran Pemegang Saham. Pada tahun 2024 dan 2025, nominal pembagian Dividen Tunai Perseroan adalah sebagai berikut:

Cash Dividend

Cash dividend distribution regularly for Shareholders indicating positive performance of the Company as well as reflecting the Company's effort to Shareholders prosperity. In 2024 and 2025, the nominal distribution of the Company's Cash Dividend is as follows:

Keterangan Description	2024	2025	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
Dividen kas yang dibagikan Cash dividend distributed	Rp6.885.218.614	Rp6.536.599.950	(Rp348.618.664,00)
Dividen per Saham Dividend per Share	Rp0,79	Rp0,75	(Rp0,04)
Rasio Pembagian Dividen Dividend Distribution Ratio	20,00%	10,18%	(9,82%)
Tanggal Pengumuman Announcement Date	17 Mei 2024 Mei 17, 2024	2 Juni 2025 June 2, 2025	
Tanggal Pembayaran Distribution Date	20 Juni 2024 June 20, 2024	4 Juli 2025 July 4, 2025	

Penghentian Sementara Perdagangan Saham dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham
Temporary Stock Trading Suspension and/or Delisting

Perseroan tidak pernah menerima sanksi penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)* dan/atau penghapusan pencatatan saham *(delisting)* sejak melakukan *Initial Public Offering (IPO)* pada 8 April 2014.

The Company did not receive suspension anda/or delisting since the Initial Public Offering (IPO) on April 8, 2014.

Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi
Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds Highlights

Perseroan belum menerbitkan sukuk atau obligasi konversi hingga 31 Desember 2025, sehingga tidak terdapat informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk.

The Company has not issued sukuk or conversion bonds as of December 31, 2025, thus there is no information about the number of bond/sukuk/conversion bond issued, interests/reward, maturity dates, and bond/sukuk rating.



Peristiwa Penting
Significant Events

WIKA Beton Menyelenggarakan Konvensi QEA 2025
WIKA Beton Held QEA Convention 2025



13 Januari 2025
January, 2025

Guna mewadahi inovasi-inovasi dari seluruh pegawai, WIKA Beton menyelenggarakan Konvensi QEA (*Quality Excellence Activity*) dengan 2 kategori inovasi yakni *Quality Control Circle* (QCC) dan *Quality Control Innovation* (QCI) dan mengusung tema "*Driving Digitalization & Continuous Innovation for Business Sustainability*" yang diselenggarakan pada 8-9 Januari 2025 di Jakarta. Perhelatan Konvensi QEA tahun ini turut dihadiri oleh *Co-Founder* & COO Ruangguru, yakni Bapak Iman Usman dan Direktur Operasi & Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry, yakni Bapak Rio Theodore Natalianto Lasse sebagai pembicara eksternal yang membagikan pengalaman inovasinya untuk menginspirasi insan WIKA Beton.

To accommodate innovations from all employees, WIKA Beton organized the QEA (Quality Excellence Activity) Convention featuring two innovation categories, namely the Quality Control Circle (QCC) and Quality Control Innovation (QCI) and adopted the theme "Driving Digitalization & Continuous Innovation for Business Sustainability" and was held on 8–9 January 2025 in Jakarta. This year's QEA Convention was also attended by the Co-Founder & COO of Ruangguru, Mr. Iman Usman, and the Director of Operations & Transformation of PT ASDP Indonesia Ferry, Mr. Rio Theodore Natalianto Lasse, who participated as external speakers and shared their innovation experiences to inspire the WIKA Beton community.

WIKA Beton Raih Padamitra Award
WIKA Beton Receive Padmamitra Award

PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) menerima Padmamitra Award 2024 untuk kategori Infrastruktur dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai apresiasi atas komitmen dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Padmamitra Award 2024 mengangkat tema "Semangat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Keberlanjutan dan Indonesia Maju", sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. WIKA Beton terus berinovasi dalam menghadirkan produk ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) received the 2024 Padmamitra Award in the Infrastructure category from the Provincial Government of DKI Jakarta. This award serves as appreciation for the company's commitment to Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR). The 2024 Padmamitra Award carried the theme "The Spirit of Social and Environmental Responsibility for Sustainability and an Advanced Indonesia," which aligns with President Prabowo's Asta Cita vision. WIKA Beton continues to innovate by providing eco-friendly products to support sustainable infrastructure development.



15 Januari 2025
January, 2025

WIKA BETON Dukung SDGs dan Program Asta Cita Melalui Dekarbonisasi
WIKA Beton Supported the SDGs and the Asta Cita Program through the Decarbonization



04 Februari 2025
February, 2025

Untuk mendukung target net *zero emissions* 2050, ekonomi hijau, dan transisi energi berkelanjutan, WIKA Beton menjalankan program dekarbonisasi melalui inovasi yang meminimalkan jejak karbon, salah satunya melalui kerja sama dengan Fairatmos. Langkah ini selaras dengan prinsip ESG, tujuan SDGs, dan Asta Cita Presiden Prabowo, sebagai komitmen perusahaan dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

To support the 2050 net-zero emissions target, the green economy, and a sustainable energy transition, WIKA Beton is implementing a decarbonization program through innovations that minimize its carbon footprint, including a collaboration with Fairatmos. This initiative aligns with ESG principles, the SDG goals, and President Prabowo's Asta Cita vision, reflecting the company's commitment to creating a greener and more sustainable future.

WIKA Beton Raih Gold Award GCG IX 2025
WIKA Beton Won the Gold Award at the GCG IX 2025



14 Februari 2025
February, 2025

WIKA Beton meraih *Gold Award (B) Excellent* dalam ajang The Best Indonesia GCG Award IX 2025 kategori *Public Company – Subsidiary of SOEs Company Asset* > Rp7 T yang diselenggarakan oleh Economic Review di Jakarta, 14 Februari 2025. Penghargaan ini menegaskan keberhasilan perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara transparan dan komprehensif berdasarkan penilaian atas kinerja keuangan, SDM, pemasaran, IT, dan operasional per Desember 2024.

WIKA Beton received the Gold Award (B) – Excellent at The Best Indonesia GCG Award IX 2025 in the Public Company – Subsidiary of SOEs with Assets Over Rp7 Trillion category. The event was organized by Economic Review in Jakarta on February 14, 2025. This award reaffirms the company's success in implementing Good Corporate Governance (GCG) transparently and comprehensively, based on assessments of its financial performance, HC, marketing, IT, and operations as of December 2024.

Direktur Utama WIKA Beton, Bapak Kuntjara Dinobatkan Sebagai Best CEO 2024
The President Director of WIKA Beton, Mr. Kuntjara, was Recognized as the Best CEO 2024

Direktur Utama WIKA Beton, Kuntjara, meraih penghargaan The Best CEO 2024 dari Majalah SWA dan Dunamis Organization Services di Jakarta, 14 Februari 2025. Penghargaan ini mencerminkan kepemimpinan transformatif beliau yang mendorong pertumbuhan dan inovasi WIKA Beton sebagai pelopor industri hijau, dengan raihan sertifikasi *Environmental Product Declaration* (EPD) dan *Greenship Solution Endorsement* (GSE) Platinum, serta komitmen kuat terhadap praktik ESG dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

The President Director of WIKA Beton, Kuntjara, received the Best CEO 2024 Award from SWA Magazine and Dunamis Organization Services in Jakarta on February 14, 2025. This award reflects his transformational leadership, which has driven WIKA Beton's growth and innovation as a pioneer in the green industry. Under his leadership, the company achieved Environmental Product Declaration (EPD) and Greenship Solution Endorsement (GSE) Platinum certifications, demonstrating a strong commitment to ESG practices and sustainable infrastructure development.



14 Februari 2025
February, 2025

WIKA Beton Tanam 1.800 Mangrove di Pulau Pari untuk Dekarbonisasi di Hari Sampah Nasional 2025
On National Waste Day 2025, WIKA Beton Planted 1,800 Mangrove Trees on Pari Island as part of the Decarbonization



19 Februari 2025
February, 2025

Dalam rangka Hari Sampah Nasional 2025, WIKA Beton menanam 1.800 bibit mangrove di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, serta memberikan santunan kepada anak yatim pada 19 Februari 2025. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan terhadap dekarbonisasi, pelestarian ekosistem pesisir, dan penerapan prinsip ESG, sekaligus mendukung upaya pembangunan ekonomi hijau dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

In commemoration of National Waste Day 2025, WIKA Beton planted 1,800 mangrove seedlings on Pari Island, Kepulauan Seribu, and provided donations to orphans on February 19, 2025. This activity demonstrates the company's strong commitment to decarbonization, coastal ecosystem preservation, and the implementation of ESG principles, while also supporting efforts to promote a green economy and environmental sustainability in Indonesia.

WIKA Beton Meraih Penghargaan PRIA (Public Relation Indonesia Awards) 2025

WIKA Beton Won the 2025 Public Relations Indonesia Awards (PRIA)

WIKA Beton raih 3 penghargaan Public Relations Indonesia Awards 2025, yaitu "*Gold Winner*" Kategori Program Komunikasi Social Responsibility Sub Kategori *Sustainability Business, "Gold Winner"* Kategori Program Komunikasi Social Responsibility Sub Kategori *Community Based Development,* dan *"Silver Winner"* Kategori Program *Public Relations* Sub Kategori *Digital Public Relations*. Penghargaan PRIA 2025 yang diraih oleh WIKA Beton merupakan bukti komitmen perusahaan dalam menjalankan komunikasi yang efektif dan transparan, serta kontribusinya yang signifikan terhadap perkembangan industri konstruksi di Indonesia.

WIKA Beton won three awards at the 2025 Public Relations Indonesia Awards (PRIA). These include "Gold Winner" in the Social Responsibility Communication Program category under the Sustainability Business sub-category, "Gold Winner" in the Social Responsibility Communication Program category under the Community-Based Development sub-category, and "Silver Winner" in the Public Relations Program category under the Digital Public Relations sub-category. The 2025 PRIA awards received by WIKA Beton serve as a testament to the company's commitment to effective and transparent communication, as well as its significant contribution to the development of Indonesia's construction industry.



26 Februari 2025
February, 2025

WIKA Beton Bersama Forum Jurnalis Berbagi dalam Kegiatan Berkah Ramadhan 2025

Together with the Journalist Forum, WIKA Beton Held the Berkah Ramadhan 2025 Charity Event



Dalam momentum Ramadhan 2025, WIKA Beton berpartisipasi dalam kegiatan Forum Jurnalis Berbagi (FJB) yang memberikan santunan kepada yatim piatu dan masyarakat kurang mampu di Jakarta. Dukungan ini mencerminkan semangat kepedulian sosial dan komitmen perusahaan untuk terus berbagi kebahagiaan serta menginspirasi kebaikan bagi sesama.

During Ramadan 2025, WIKA Beton participated in the Forum Jurnalis Berbagi (FJB) program, which provided donations to orphans and underprivileged communities in Jakarta. This support reflects the company's spirit of social responsibility and its commitment to sharing kindness and spreading joy while continuing to inspire good deeds within the community.

09 Maret 2025
Maret, 2025

WIKA Beton Gelar Halal Bi Halal 1446 H di PPB Subang, Pererat Silaturahmi dan Sinergi Karyawan

WIKA Beton Organized a Halal Bi Halal 1446 H Gathering at PPB Subang to Strengthen Employee Relationships and Collaboration

WIKA Beton menyelenggarakan Halal Bi Halal 1446H secara *hybrid* di Pabrik Produk Beton (PPB) Subang, Jawa Barat, yang dihadiri oleh jajaran Komisaris, Direksi, dan karyawan. Kegiatan ini mempererat silaturahmi pasca-Idul Fitri, memperkuat budaya kekeluargaan, serta menegaskan komitmen perusahaan dalam membangun sinergi dan kolaborasi internal guna mendukung transformasi berkelanjutan di seluruh lini kerja.

WIKA Beton held a Halal Bihalal 1446H event in a hybrid format at the Precast Concrete Plant (PPB) Subang, West Java, attended by the Board of Commissioners, Directors, and employees. The event aimed to strengthen relationships following Eid al-Fitr, foster a family-oriented corporate culture, and reaffirm the company's commitment to enhancing internal synergy and collaboration in support of sustainable transformation across all business lines.



09 April 2025
April, 2025

WIKA Beton Meraih Trusted Diamond Achievement in Emission Transparency

WIKA Beton Won Trusted Diamond Achievement in Emission Transparency



29 April 2025
April, 2025

WIKA Beton meraih Trusted Diamond Achievement in Emmision Transparency. Diperoleh dari ajang The Best Corporate Emission Reduction Transparency Awards 2025 yang digelar oleh Investortrust. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas berbagai inisiatif perusahaan dalam menekan emisi demi menjaga kelangsungan bumi beserta transparansi atas implementasinya selama setahun terakhir. Perolehan penghargaan ini menjadi bukti komitmen WIKA Beton dalam mendukung praktik bisnis berkelanjutan.

WIKA Beton has earned the Trusted Diamond Achievement in Emission Transparency at The Best Corporate Emission Reduction Transparency Awards 2025, hosted by Investortrust. This award recognizes the company's various initiatives to reduce emissions for the sake of the planet's sustainability, along with the transparency of their implementation over the past year. This achievement stands as a testament to WIKA Beton's commitment to supporting sustainable business practices.

WIKA Beton Perkuat Komitmen Transisi Energi Bersih melalui Pemasangan PLTS Atap dan Inovasi Industri Hijau

WIKA Beton Reaffirmed Commitment to Clean Energy Transition through the Installation of Rooftop Solar Panels and Green Industry Innovations.

WIKA Beton memperkuat komitmennya terhadap transisi energi bersih dengan memasang PLTS atap berkapasitas 682 kWP di pabrik Bogor dan Majalengka, bekerja sama dengan PT Agra Surya Energy. Inisiatif ini mampu mengurangi emisi karbon hingga 532 ton CO_2 per tahun dan konsumsi listrik PLN sebesar 15%. Selain itu, perusahaan juga menerapkan lampu solar cell, daur ulang air limbah, dan pemanfaatan *fly ash* sebagai bahan beton ramah lingkungan. Langkah ini sejalan dengan program dekarbonisasi WIKA Group dan Industri Hijau Kementerian Perindustrian, menegaskan posisi WIKA Beton sebagai pelopor praktik industri hijau berkelanjutan di Indonesia.

WIKA Beton strengthened its commitment to the clean energy transition by installing PLTS with a total capacity of 682 kWP at its Bogor and Majalengka plants, in collaboration with PT Agra Surya Energy. This initiative reduces carbon emissions by up to 532 tons of CO_2 per year and lowers electricity consumption from PLN by 15%. In addition, the company has implemented solar-powered lighting, wastewater recycling, and the use of fly ash as an environmentally friendly concrete material. These efforts align with the WIKA Group's decarbonization program and the Green Industry initiative of the Ministry of Industry, reinforcing WIKA Beton's position as a pioneer of sustainable green industry practices in Indonesia.



10 Mei 2025
May, 2025

WIKA Beton Membangun Masa Depan lewat WIKA Beton Mengajar

WIKA Beton Builds the Future through WIKA Beton Mengajar



17 Mei 2025
May, 2025

WIKA Beton berkolaborasi dengan Rumah Belajar UI untuk *sharing session* dalam kelas eksplorasi yang diselenggarakan pada 17 Mei 2025 di Auditorium Pusgiwa UI, Depok kepada sekitar 180 siswa-siswi mulai dari kelas 1 SD hingga kelas 9 SMP dan para siswa paket C. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memperluas akses pendidikan kepada para siswa yang ingin mendapatkan bimbingan belajar dengan mudah.

WIKA Beton collaborated with Rumah Belajar UI for a sharing session in an exploration class held on May 17, 2025, at the Pusgiwa UI Auditorium in Depok. The session was attended by approximately 180 students ranging from 1st grade elementary school to 9th grade junior high school, as well as students enrolled in the Package C program. Through this initiative, the program aims to expand access to education for students seeking convenient learning assistance.

WIKA Beton tampil dalam Nasional Seminar: CENS UI yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia

WIKA Beton participated in the National Seminar: CENS UI organized by the University of Indonesia

Bapak Verly Widiantoro, Direktur Teknik & Produksi sekaligus *Chief Transformation Officer* (CTO), dalam ajang nasional bergengsi *The 22nd Civil Engineering National Summit* (CENSUI) di Balai Purnomo, Universitas Indonesia memaparkan Visi dan Strategi Transformasi WIKA Beton, memperkenalkan kerangka besar Rumah Transformasi, serta menyoroti capaian nyata dari berbagai inisiatif strategis yang telah memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan.

Selain itu, Pak Verly juga memaparkan beberapa kerberhasilan program digitalisasi yg berdampak pada efisiensi seperti digitalisasi desain pada produk yg diimplementasikan pada 3D BIM serta digitalisasi manufaktur yang diwujudkan dalam CCMS (*Computer Control Machining System*) serta ditunjang dengan program *sustainable development* dalam program ESG dan EPD Certificate dalam mewujudkan *green product*.

Mr. Verly Widiantoro, Director of Engineering & Production as well as Chief Transformation Officer (CTO), presented WIKA Beton's Transformation Vision and Strategy at the prestigious national event, The 22nd Civil Engineering National Summit (CENS UI), held at Balai Purnomo, University of Indonesia. He introduced the overarching framework of the Transformation House and highlighted the tangible achievements of various strategic initiatives that have delivered positive impacts on the company's performance.

In addition, Mr. Verly also outlined several successful digitalization programs that have improved efficiency, such as digitalizing product design through the implementation of 3D BIM, and manufacturing digitalization through the development of the Computer Control Machining System (CCMS). These efforts are further supported by sustainable development initiatives under ESG programs and the acquisition of the EPD Certificate in advancing green product realization



24 Mei 2025
May, 2025

WIKA Beton meraih STAR 5 TOP CSR Awards 2025

WIKA Beton has been honored with the prestigious STAR 5 at the TOP CSR Awards 2025



11 Juni 2025
June, 2025

Perseroan meraih penghargaan TOP CSR Awards 2025 – #Star 5 (Ekselen) yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perseroan, Bapak Kuntjara, juga menerima penghargaan TOP Leader on CSR Commitment 2025. Penghargaan ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara berkelanjutan sesuai dengan standar internasional ISO 26000.

The Company received the TOP CSR Awards 2025 – #Star 5 (Excellent) organized by Top Business Magazine at Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta. On the same occasion, the Company's President Director, Mr. Kuntjara, was also honored with the TOP Leader on CSR Commitment 2025 award. This achievement reflects the Company's commitment to implementing Sustainable Social and Environmental Responsibility (SER) programs in accordance with the international standard ISO 26000.

Transformasi WIKA Beton: RUPSLB 2025 Setujui Penambahan Bidang Usaha Baru

Through the 2025 EGMS: WIKA Beton Approved the Addition of new Business Lines as part of the Transformation



26 Juni 2025
June, 2025

WIKA Beton menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di WIKA Tower 2, Jakarta, yang dihadiri oleh pemegang saham mewakili lebih dari 67% total saham. Rapat menyetujui penambahan bidang usaha instalasi listrik (KBLI 43211) serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja bisnis, memperluas portofolio usaha, dan mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan sejalan dengan dinamika industri konstruksi nasional.

WIKA Beton held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) at WIKA Tower 2, Jakarta, attended by shareholders representing more than 67% of its total shares. The meeting approved the addition of a new business line in electrical installation services (KBLI 43211) and amendments to the Company's Articles of Association. This strategic move aims to strengthen business performance, expand the company's portfolio, and support sustainable growth in line with the evolving dynamics of the national construction industry.

WIKA Beton Menyelenggarakan *Sharing Session* bertema *Building A Greener Future: Smart Housing Innovations and Sustainable Opportunities*

WIKA Beton held a Sharing Session themed Building a Greener Future: Smart Housing Innovations and Sustainable Opportunities

Dalam rangka memperkaya wawasan tentang rumah ramah lingkungan dan berkelanjutan, WIKA Beton menyelenggarakan *Sharing Session* bertema "*Building a Greener Future: Smart Housing Innovations and Sustainable Opportunities*" yang diselenggarakan di WIKA Tower I dengan narasumber Ir. Iwan Prijanto, MM, GP, IAI, Ketua Ahli GBCI dan CEO DEX Solusi Transit. Diharapkan, acara ini dapat memberikan wawasan baru tentang rumah ramah lingkungan yang berkelanjutan serta peluang pasar kedepannya agar WIKA Beton juga dapat berkontribusi dalam menciptakan desain rumah *precast* yang ramah lingkungan (*Green House*) dan berkelanjutan.

To broaden insights on environmentally friendly and sustainable housing, WIKA Beton held a Sharing Session themed "Building a Greener Future: Smart Housing Innovations and Sustainable Opportunities" at WIKA Tower I, the speaker Ir. Iwan Prijanto, MM, GP, IAI, Chair of GBCI Experts and CEO of DEX Solusi Transit. The event is expected to provide new perspectives on sustainable eco-friendly housing and future market opportunities, enabling WIKA Beton to contribute to the development of environmentally friendly and sustainable precast house designs (Green Houses)



30 Juni 2025
June, 2025

WIKA Beton Meraih Penghargaan IDX Channel Anugerah ESG 2025

WIKA Beton has been honored with the IDX Channel ESG Award 2025



04 Juli 2025
July, 2025

WIKA Beton meraih penghargaan IDX Channel Anugerah ESG 2025 yang digelar oleh IDX Channel, penghargaan ini diberikan sebagai Anugerah Utama di Sektor Infrastruktur atas keberhasilan implementasi program ESG yang berdampak dan berkelanjutan.

WIKA Beton has secured the 2025 IDX Channel ESG Award. Hosted by IDX Channel, this recognition was presented as the Grand Award in the Infrastructure Sector, honoring the company's success in implementing impactful and sustainable ESG programs.

Pemasangan Beton Porous: Teknologi Hijau untuk Masa Depan
Installation of Porous Concrete: Green Technology for the Future

WIKA Beton kembali menunjukkan komitmen nyata terhadap pembangunan berkelanjutan melalui pemasangan beton porous di Kota Bogor, yang menjadi lokasi kelima dalam tiga tahun terakhir. Beton inovatif ini mampu meresapkan air langsung ke dalam tanah, mencegah genangan, dan mendukung sistem drainase yang berkelanjutan. Inisiatif ini sejalan dengan SDG 11 & 13 serta misi pembangunan ekonomi hijau nasional.

WIKA Beton once again demonstrated its strong commitment to sustainable development through the installation of porous concrete in the City of Bogor, marking the fifth location in the past three years. This innovative concrete allows water to seep directly into the soil, preventing flooding and supporting a sustainable drainage system. This initiative aligns with SDG 11 & 13 as well as the national green economic development mission.



04 Juli 2025
July, 2025

WIKA Beton menyelenggarakan CTO Talk 2025: Navigating the Storm
WIKA Beton held CTO Talk 2025: Navigating the Storm



22 Juli 2025
July, 2025

Dalam acara CTO Talk kali ini dihadiri oleh Bapak Jatmiko K. Santosa, Direktur Utama PTPN IV PalmCo menyampaikan materi tentang bagaimana menciptakan cara baru untuk bertahan dan berkembang di Era BANI dalam beberapa poin, diantara lain yaitu strategi kunci transformasi di era BANI, langkah konkrit membangun kultur kinerja dan akuntabilitas, dan cara menggerakkan organisasi besar jadi lincah & berani berubah.

In this CTO Talk event, Mr. Jatmiko K. Santosa, President Director of PTPN IV PalmCo, delivered a presentation on how to create new ways to survive and grow in the BANI Era. Several key points were highlighted, including key transformation strategies in the BANI era, concrete steps to build a culture of performance and accountability, and methods to transform a large organization into one that is agile and courageous in embracing change.

WIKA Beton Resmi Pasok Produk Untuk Proyek Metro Manila Subway di Filipina
WIKA Beton Officially Supplying Products for the Metro Manila Subway Project in the Philippines

WIKA Beton mencatat capaian penting ekspansi internasional melalui pengiriman perdana produk *Precast Concrete Lining* (PC Lining) untuk proyek Metro Manila Subway Paket CP102 di Filipina, bekerja sama dengan Sta. Clara International Corporation. Pengiriman dari pabrik Angat, Bulacan ini menegaskan kapasitas WIKA Beton sebagai *Concrete Expert* berkelas global, dengan penerapan teknologi mutakhir, standarisasi produksi internasional, dan peningkatan kompetensi SDM lokal. Langkah ini memperkuat posisi WIKA Beton sebagai produsen beton pracetak terdepan di Asia Tenggara dan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperluas pasar global.

WIKA Beton achieved a significant milestone in its international expansion with the first shipment of Precast Concrete Lining (PC Lining) products for the Metro Manila Subway Project Package CP102 in the Philippines, in collaboration with Sta. Clara International Corporation. The shipment from the Angat Plant in Bulacan highlights WIKA Beton's capability as a world-class concrete expert, supported by advanced technology, international production standards, and the development of local human resources. This achievement strengthens WIKA Beton's position as a leading precast concrete manufacturer in Southeast Asia and reflects its ongoing efforts to expand its presence in global markets.



30 Juli 2025
July, 2025

WIKA Beton Kembali Hadir di Railway Tech Indonesia & Inamarine 2025
WIKA Beton Returns to the Railway Tech Indonesia & Inamarine 2025 Exhibition



WIKA Beton kembali menjadi *exhibitor* dalam ajang bergengsi RailwayTech Indonesia & Inamarine 2025. WIKA Beton menampilkan berbagai inovasi dan pengalaman di bidang perkeretaapian, mulai dari Produk Beton Pracetak & *Ready Mix*, teknologi instalasi Beton Pracetak, hingga solusi Infrastruktur Transportasi yang terintegrasi.

WIKA Beton once again participated as an exhibitor in the prestigious RailwayTech Indonesia & Inamarine 2025 event. WIKA Beton showcased various innovations and expertise in the railway sector, ranging from Precast Concrete and Ready-Mix products, precast installation technology, to integrated Transportation Infrastructure solutions.

01 Agustus 2025
August, 2025

WIKA Beton Sampai ke Shanghai: Menunjukkan Inovasi Beton Indonesia di Kancah Global
WIKA Beton Reached Shanghai: Showcasing Indonesia's Concrete Innovations on the Global Stage

WIKA Beton memperkuat kiprah internasionalnya melalui partisipasi pada *World of Concrete Asia* (WoCA) 2025 di Shanghai, Tiongkok, yang diikuti lebih dari 650 peserta pameran dari 52 negara. Diwakili oleh Festy Ratna Aditama, Manajer Divisi Transformasi, *Engineering & Quality*, WIKA Beton mempresentasikan berbagai inovasi seperti WB-SHMS, Precast Sabodam, *W-Home Precast Housing,* dan *Concrete Reef Unit*, yang mendukung proyek strategis nasional dan prinsip *resilience, sustainability,* serta *adaptability*. Kehadiran ini menegaskan posisi WIKA Beton sebagai pelopor industri pracetak Indonesia yang berdaya saing global dan berkomitmen pada pengembangan teknologi konstruksi berkelanjutan.

WIKA Beton strengthened its international presence by participating in the World of Concrete Asia (WoCA) 2025 held in Shanghai, China, which featured more than 650 exhibitors from 52 countries. Represented by Festy Ratna Aditama, Division Manager of Transformation, Engineering & Quality, WIKA Beton showcased several innovations, including WB-SHMS, Precast Sabodam, W-Home Precast Housing, and Concrete Reef Unit, all of which support national strategic projects and embody the principles of resilience, sustainability, and adaptability. This participation reaffirms WIKA Beton's position as a pioneer of Indonesia's precast industry with global competitiveness and a strong commitment to advancing sustainable construction technology.



15 Agustus 2025
August, 2025

WIKA Beton Luncurkan W-Home
WIKA Beton Launched W-Home



WIKA Beton meluncurkan inovasi hunian pracetak WIKA Beton Home (W-Home), rumah tipe 36 yang dapat dibangun hanya dalam 2 hari (48 jam) dengan sistem konstruksi modular tanpa alat berat. Produk ini telah teruji tahan gempa di 21 wilayah Indonesia dan memenuhi standar SNI beton struktural, menjamin keamanan dan kenyamanan penghuni. *Showcase* pembangunan W-Home di Pabrik *Precast* Bogor pada 10–29 Juni 2025 membuktikan efisiensi dan kualitas sistem ini. W-Home, yang telah memperoleh paten resmi, menjadi solusi inovatif untuk mendukung Program 3 Juta Rumah, menawarkan hunian cepat bangun, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat serta developer.

WIKA Beton introduced an innovative precast housing solution, the WIKA Beton Home (W-Home), a type-36 house that can be constructed in just two days (48 hours) using a modular construction system without heavy equipment. The product has been earthquake-tested in 21 regions across Indonesia and complies with the Indonesian National Standard (SNI) for structural concrete, ensuring both safety and comfort for residents. The showcase construction of W-Home at the Bogor Precast Plant from June 10 to 29, 2025, demonstrated the efficiency and quality of the system. W-Home serves as an innovative solution supporting the 3 Million Houses Program, offering fast-built, affordable, and high-quality housing for both the public and developers.

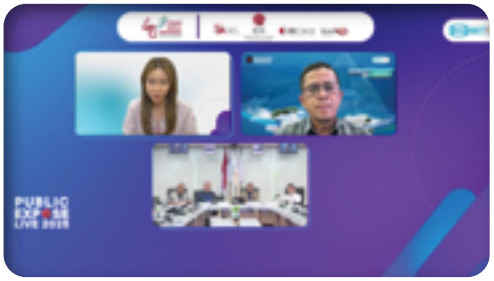
27 Agustus 2025
August, 2025

WIKA Beton Menggelar Public Expose Live 2025 bersama IDX

WIKA Beton Held the 2025 Public Expose Live in Collaboration with IDX

WIKA Beton bersama *Indonesia Stock Exchange* (IDX) kembali menggelar *Public Expose Live* Tahun 2025 yang dihadiri oleh 125 peserta dari investor hingga masyarakat umum pada tanggal 9 September 2025. Dalam *Public Expose Live* ini menegaskan komitmen WIKA Beton dalam mendorong transformasi berkelanjutan dan implementasi ESG menuju *Net Zero Emission* 2030.

WIKA Beton, together with the Indonesia Stock Exchange (IDX), once again held the 2025 Public Expose Live, which was attended by 125 participants ranging from investors to the general public on September 9, 2025. This Public Expose Live reaffirms WIKA Beton's commitment to driving sustainable transformation and implementing ESG initiatives toward achieving Net Zero Emissions by 2030.



09 September 2025
September, 2025

WIKA Beton Raih Tiga Penghargaan Bergengsi di Top GRC Awards 2025

WIKA Beton Won Three Prestigious Awards at the Top GRC Awards 2025.



09 September 2025
September, 2025

WIKA Beton meraih prestasi gemilang dengan menyabet tiga penghargaan sekaligus dalam Top GRC Awards 2025, yakni Top GRC #5 Stars (*Excellence*), The Most Committed GRC Leader 2025 untuk Direktur Utama Kuntjara, serta The High Performing Board of Commissioners on GRC 2025. Ajang bergengsi yang diikuti 134 perusahaan nasional ini menegaskan posisi WIKA Beton sebagai perusahaan dengan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) berstandar tinggi. Pencapaian ini menjadi bukti komitmen WIKA Beton dalam menerapkan praktik tata kelola berkelanjutan, memperkuat kepercayaan investor, dan menjadi *benchmark* nasional dalam mewujudkan transformasi menuju perusahaan berdaya saing global.

WIKA Beton achieved remarkable success by winning three awards at the Top GRC Awards 2025: Top GRC #5 Stars (Excellence), The Most Committed GRC Leader 2025, awarded to President Director Kuntjara, and The High Performing Board of Commissioners on GRC 2025. This prestigious event, which involved 134 national companies, reaffirmed WIKA Beton's position as a company with high standards in governance, risk management, and compliance (GRC). The achievement reflects WIKA Beton's strong commitment to implementing sustainable governance practices, strengthening investor confidence, and serving as a national benchmark in driving transformation toward a globally competitive company

WIKA Beton terus Berkomitmen Menciptakan Lingkungan Kerja yang Sehat dan Produktif bagi Seluruh Insan Perusahaan

WIKA Beton Remained Committed to Creating a Healthy and Productive Work Environment for All Members of the Company

WIKA Beton berkolaborasi dengan LIF menjalankan berbagai program kesehatan seperti Mini MCU, Karada *Check*, Senam Bersama, hingga aktivitas olahraga rutin yang dimonitor dengan Aplikasi LIF. Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara kinerja dan kesejahteraan seluruh insan WIKA Beton. Harapannya, program kesehatan ini meningkatkan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

WIKA Beton collaborates with LIF to implement various health programs, such as Mini Medical Check-Ups, Karada Checks, Group Exercise Sessions, and regular sports activities monitored through the LIF Application. This initiative is part of an ongoing effort to maintain a balance between performance and the well-being of all WIKA Beton personnel. It is hoped that these health programs will enhance the creation of a healthy and productive work environment.



11 September 2025
September, 2025

Kunjungan Singapore Green Building Council ke Pabrik Produksi Beton Bogor
Singapore Green Building Council Visit to Bogor Concrete Production Plant



16 September 2025
September, 2025

WIKA Beton mendapat kunjungan dari *Singapore Green Building Council* (SGBC) dalam rangkaian *Learning Trip* ke Indonesia. SGBC merupakan organisasi yang mendorong transformasi industri bangunan menuju keberlanjutan. Hal ini tidak lepas dari pencapaian WIKA Beton melalui produk *PC Spun Pile* yang telah mendapatkan *Greenship Solution Endorsement* dengan kategori platinum yang merupakan kategori tertinggi dari *Green Building Council Indonesia* (GBCI). Rekomendasi ini membuka peluang bagi WIKA Beton untuk berbagi pengalaman, praktik berkelanjutan, dan inovasi ramah lingkungan yang diterapkan dalam setiap proses produksi.

WIKA Beton received a visit from the Singapore Green Building Council (SGBC) as part of their Learning Trip to Indonesia. SGBC is an organization that advocates for the transformation of the building industry toward sustainability. This visit is closely related to WIKA Beton's achievement through its PC Spun Pile product, which has obtained the Greenship Solution Endorsement with a platinum rating—the highest category awarded by the Green Building Council Indonesia (GBCI). This endorsement provides WIKA Beton with the opportunity to share its experiences, sustainable practices, and environmentally friendly innovations implemented throughout its production processes.

PPB Bogor WIKA Beton Raih Gold Award pada ENSIA 2025
PPB Bogor WIKA Beton Won Gold Award at ENSIA 2025

Pada ajang Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA) 2025 yang digelar PT Sucofindo, PPB Bogor sukses meraih *Gold Award* untuk kategori Inovasi Lingkungan – Pengelolaan Sampah. Penghargaan ini diraih berkat inovasi dalam mengolah sampah organik menjadi kompos yang bermanfaat , serta terintegrasi dengan program *nursery* dan pengembangan ruang terbuka hijau. Upaya ini tidak hanya mengurangi timbulan sampah, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas udara.

At the 2025 Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA) hosted by PT Sucofindo, WIKA Beton's Bogor Concrete Product Plant (PBB Bogor) successfully secured the Gold Award in the Environmental Innovation – Waste Management category. This recognition was achieved through an innovation that converts organic waste into useful compost, integrated with nursery programs and the development of green open spaces. These efforts not only minimize waste generation but also foster environmental conservation and enhance air quality.



16 September 2025
September, 2025

Pengiriman Perdana BJR WIKA Beton untuk MRT Jakarta Phase 2 CP205
WIKA Beton's First Delivery of BJR Products for MRT Jakarta Phase 2 CP205



22 September 2025
September, 2025

Pada tanggal 22 September 2025, WIKA Beton melakukan pengiriman perdana produk Bantalan Jalan Rel (BJR) untuk proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta Phase 2 CP205. BJR yang diproduksi di Pabrik Produk Beton Majalengka ini akan digunakan pada proyek MRT yang akan menghubungkan Bundaran HI – Kota.

On September 22, 2025, WIKA Beton carried out the first delivery of its Rail Track Sleeper (BJR) products for the Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Phase 2 CP205 project. The sleepers, produced at the Majalengka Precast Concrete Plant, will be used for the MRT line connecting Bundaran HI to Kota.

QHSE Patrol ke Pabrik Produk Beton Bogor
QHSE Patrol to PPB Bogor

Pabrik Produk Beton Bogor menjadi tuan rumah QHSE Patrol pada 25 September 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, sekaligus dalam rangka *Management Walkthrough*. Kehadiran para pimpinan puncak menunjukkan komitmen kuat WIKA Beton untuk selalu mengedepankan mutu, keselamatan, serta inovasi berkelanjutan dalam setiap proses kerja. Melalui kegiatan ini, WIKA Beton juga menegaskan pentingnya budaya kerja aman, efisien, dan ramah lingkungan demi mendukung keberlangsungan bisnis serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

The Bogor Precast Concrete Plant recently hosted the QHSE Patrol on September 25, 2025. The event was attended directly by all members of the Board of Commissioners and Directors as part of the Management Walkthrough. The presence of top management demonstrates WIKA Beton's strong commitment to consistently prioritizing quality, safety, and sustainable innovation in every work process. Through this activity, WIKA Beton also reinforces the importance of a safe, efficient, and environmentally friendly work culture to support business sustainability and deliver added value to all stakeholders.



25 September 2025
September, 2025

Penyematan *Pin Change Leader & Change Agent* WIKA Beton 2025
WIKA Beton's 2025 Change Leader & Change Agent Pin Awarding Ceremony



07 Oktober 2025
October, 2025

Penyematan *Pin Change Agent* menjadi simbol komitmen Insan WIKA Beton untuk terus bergerak, beradaptasi, dan berinovasi. Dipandu oleh para *Change Leader*, para *Change Agent* berperan sebagai motor penggerak transformasi budaya kerja di seluruh lini perusahaan. Mereka bukan hanya teladan, tapi juga inspirasi — membawa semangat kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan untuk mewujudkan budaya unggul WIKA Beton.

The awarding of the Change Agent Pin symbolizes the commitment of WIKA Beton personnel to continue moving forward, adapting, and innovating. Guided by the Change Leaders, the Change Agents serve as the driving force behind the transformation of the company's work culture across all levels. They are not only role models but also sources of inspiration — bringing the spirit of collaboration, innovation, and sustainability to realize WIKA Beton's culture of excellence.

Executive Forum WIKA Beton 2025 mengusung tema "*One Vision, One Strength*"
WIKA Beton's 2025 Executive Forum Carries the Theme "One Vision, One Strength"

WIKA Beton resmi menggelar Executive Forum 2025, momentum strategis yang mempertemukan seluruh jajaran direksi dan manajemen di seluruh unit kerja dalam satu semangat kebersamaan untuk menyatukan arah, memperkuat kolaborasi, dan meneguhkan ketahanan menghadapi ketidakpastian. Forum ini menjadi tonggak transformasi kepemimpinan, memastikan setiap langkah organisasi bergerak selaras menuju masa depan yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing.

WIKA Beton officially held the 2025 Executive Forum, a strategic moment that brought together the entire board of directors and management across all work units in a shared spirit of unity to align direction, strengthen collaboration, and reinforce resilience in facing uncertainties. This forum serves as a milestone in leadership transformation, ensuring that every step of the organization moves in harmony toward a future that is resilient, innovative, and competitive.



23 Oktober 2025
October, 2025

WIKA Beton Meraih Penghargaan *Knowledge* Battle Terfavorit dalam Ajang *Knowledge Management Festival*

WIKA Beton Won the "Most Favorite Knowledge Battle" Award at the Knowledge Management Festival



29-30 Oktober 2025
October, 2025

Dalam kompetisi ini, WIKA Beton menampilkan inovasi W-Home – rumah pracetak ramah lingkungan dan tahan gempa. Penghargaan ini jadi bukti komitmen WIKA Beton untuk terus berinovasi dan menghadirkan solusi konstruksi yang berkelanjutan sekaligus menunjukkan kekompakan para insan WIKA Beton dalam berkreasi di ajang *Knowledge Management Festival*.

In this competition, WIKA Beton presented its innovation, W-Home — an environmentally friendly and earthquake-resistant precast housing solution. This award serves as proof of WIKA Beton's commitment to continuous innovation and the delivery of sustainable construction solutions, it's also reflects the strong collaboration and creativity of WIKA Beton personnel in the Knowledge Management Festival.

WIKA Beton Raih Most Progressive ESG Transparency & Leadership AAA oleh BGK Foundation

WIKA Beton Earned 'Most Progressive ESG Transparency & Leadership AAA' from BGK Foundation

WIKA Beton kembali menorehkan prestasi dengan meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesia ESG Leadership Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Bumi Global Karbon (BGK) Foundation. Dalam ajang tersebut, WIKA Beton memperoleh Special Award yakni Most Progressive ESG Transparency dan penghargaan kategori Leadership AAA - Advancing ESG Transparency Leadership yang menegaskan komitmennya dalam mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di seluruh lini operasional. Penghargaan ini memperkuat langkah strategis WIKA Beton dalam mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi hijau dan inklusif.

WIKA Beton has once again demonstrated its excellence by securing two prestigious awards at the 2025 Indonesia ESG Leadership Awards, organized by the Bumi Global Karbon (BGK) Foundation. The company received a Special Award for 'Most Progressive ESG Transparency' and was recognized in the 'Leadership AAA - Advancing ESG Transparency Leadership' category. These accolades underscore WIKA Beton's unwavering commitment to integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles across all operational lines, reinforcing its strategic steps in supporting Indonesia's transition toward a green and inclusive economy.



12 November 2025
November, 2025



WIKA Beton Lanjutkan IHDP dengan Health Talk oleh Vishal C. Dasani

WIKA Beton Continued the IHDP Series with a Health Talk featuring Vishal C. Dasani

WIKA Beton kembali melanjutkan rangkaian Program IHDP melalui kegiatan Half Check. Agenda ini menjadi kesempatan bagi pegawai untuk melihat perkembangan kesehatan, mendapatkan edukasi dari Health Talk bertema "Sleep & Rest for Better Stress Management" serta menerima apresiasi atas pencapaian terbaik mereka. Melalui program ini, WIKA Beton menegaskan komitmennya dalam menciptakan tempat kerja yang lebih sehat, aman, dan produktif bagi seluruh insan perusahaan.

WIKA Beton continues its IHDP (Integrated Health Development Program) series with the 'Half Check' session. This agenda provides employees the opportunity to monitor their health progress, attend an educational Health Talk titled 'Sleep & Rest for Better Stress Management,' and receive appreciation for their outstanding achievements. Through this program, WIKA Beton reaffirms its commitment to creating a healthier, safer, and more productive workplace for all its people.



18 November 2025
November, 2025

WIKA Beton Menorehkan Prestasi Gemilang di Ajang Temu Karya Mutu & Produktivitas Nasional (TKMPN) XXIX Batam

WIKA Beton Achieved Outstanding Success at the 29th National Quality & Productivity Convention (TKMPN XXIX) in Batam



24-28 November 2025
November, 2025

WIKA Beton kali ini mengirimkan 3 Perwakilan tim QCC (*Quality Control Circle*) yaitu tim QCC KENJI (Divisi *Transformation, Engineering & Quality*) berhasil meraih penghargaan *Diamond* sedangkan Tim QCC WASKAT (PPB Bogor) & Tim QCC KATO (PPB Pasuruan) berhasil meraih penghargaan Platinum di ajang ini. Ajang bergengsi ini diikuti oleh 663 tim/karya *improvement* dan inovasi dengan 2250 peserta yang ikut berpartisipasi dari 210 perusahaan di berbagai industri.

In this edition, WIKA Beton dispatched three Quality Control Circle (QCC) teams, all of whom delivered remarkable results. The QCC KENJI team (Transformation, Engineering & Quality Division) secured the prestigious Diamond Award, while the QCC WASKAT team (Bogor Plant) and QCC KATO team (Pasuruan Plant) both earned Platinum Awards. This prestigious event featured 663 improvement and innovation projects, with 2,250 participants representing 210 companies across various industries.



WIKA Beton Meraih ISDA Awards (Platinum)
WIKA Beton Achieved Platinum at the 2025 ISDA Awards



05 Desember 2025
December, 2025

Pada ajang ICA & ISDA Awards 2025 menegaskan komitmen terhadap implementasi SDGs. ISDA Awards (Platinum) Membangun Ekosistem Konstruksi Hijau: Sinergi Transisi *Environmental Product Declaration* dan Verifikasi *Greenship Solution Endorsement* untuk Indonesia Berkelanjutan diterima Bapak Verly Widiantoro, Direktur Teknik dan Produksi WIKA Beton.

At the 2025 ICA & ISDA Awards, WIKA Beton reaffirmed its commitment to the implementation of Sustainable Development Goals (SDGs). The company secured the Platinum ISDA Award for its initiative, 'Building a Green Construction Ecosystem: Synergy in Environmental Product Declaration Transition and Greenship Solution Endorsement Verification for a Sustainable Indonesia.' The award was officially received by Mr. Verly Widiantoro, Director of Engineering and Production at WIKA Beton.

Sustainability Report WIKA Beton Meraih Peringkat A+
WIKA Beton's Sustainability Report has Achieved an A+ Rating

WIKA Beton berhasil meraih peringkat A+ dalam Sustainability Report 2024 yang diselenggarakan oleh Moores Rowland Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, Walk Free Foundation, dan Minderoo Foundation. Pencapain ini menegaskan komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola dan praktik keberlanjutan khususnya melalui Laporan Keberlanjutan.

WIKA Beton has successfully achieved an A+ Rating for its 2024 Sustainability Report, as assessed by Moores Rowland Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, the Walk Free Foundation, and the Minderoo Foundation. This achievement underscores the company's commitment to strengthening corporate governance and sustainability practices, particularly through comprehensive sustainability reporting.



16 Desember 2025
December, 2025

Pemanfaatan AVAA Energy Storage
Implementation of AVAA Energy Storage



18 Desember 2025
December, 2025

WIKA Beton menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan PT Cipta Mugi Pratama terkait implementasi teknologi energi baru terbarukan (EBT) *Automatic Voltage Ampere Adjustment* (AVAA) *Energy Storage* di fasilitas produksi WIKA Beton. Kerja sama ini dilaksanakan dengan skema *Energy Service Company* (ESCO), di mana WIKA Beton tidak melakukan investasi namun tetap memperoleh manfaat berupa efisiensi biaya konsumsi energi hingga 25%.

WIKA Beton has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with PT Cipta Mugi Pratama regarding the implementation of the Automatic Voltage Ampere Adjustment (AVAA) Energy Storage technology at WIKA Beton's production facilities. This partnership is executed under an Energy Service Company (ESCO) scheme, allowing WIKA Beton to achieve energy consumption cost efficiencies of up to 25% with zero upfront investment.

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Penghargaan
Awards



No	Nama Penghargaan Awards Name	Tanggal Penghargaan Awards Date
1	Padmamitra Award Provinsi DKI Jakarta 2024 Kategori Infrastruktur. Diperoleh dari ajang Padmamitra Award 2024 Kategori Infrastruktur dengan program CSR Beton Porous yang digelar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padmamitra Award of DKI Jakarta Province 2024 in the Infrastructure Category. Received this award at the 2024 Padmamitra Awards event in the Infrastructure Category for the Porous Concrete CSR program, organized by the Provincial Government of DKI Jakarta.	15 Januari 2025 January 15, 2025
2	Best CEO 2024 yang dinobatkan kepada Direktur Utama WIKA Beton Bapak Kuntjara. Diperoleh dari ajang Indonesia Best CEO yang digelar oleh Majalah SWA dan Dunamis Organization Service. The Best CEO 2024 award was presented to the President Director of WIKA Beton, Mr. Kuntjara. This award was received at the Indonesia Best CEO event organized by SWA Magazine and Dunamis Organization Service.	14 Februari 2025 February 14, 2025
3	Gold Award GCG IX 2025 Kategori *Public Company - Subsidiary of State Owned Enterprises*. Diperoleh dari ajang The Best Indonesia GCG Award IX 2025 untuk Kategori *Public Company - Subsidiary of State Owned Enterprises* yang digelar oleh Media Online Economic Review. Gold Award GCG IX 2025 in the Public Company – Subsidiary of State-Owned Enterprises Category. Received at The Best Indonesia GCG Award IX 2025 event, Public Company – Subsidiary of State-Owned Enterprises Category, organized by the online media Economic Review.	14 Februari 2025 February 14, 2025
4	"*Gold Winner*" Kategori Program Komunikasi *Social Responsibility* Sub Kategori *Sustainability Business*. Diperoleh dari ajang Public Relation Indonesia Awards 2025 Kategori Program Komunikasi *Social Responsibility* Sub Kategori *Sustainability Business* yang digelar oleh Public Relation Indonesia (PRIA) "Gold Winner" in the Social Responsibility Communication Program Category, Sustainability Business Subcategory. Received at the Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2025 in the Social Responsibility Communication Program Category, Sustainability Business Subcategory, organized by Public Relations Indonesia.	26 Februari 2025 February 26, 2025



No	Nama Penghargaan Awards Name	Tanggal Penghargaan Awards Date
5	"*Gold Winner*" Kategori Program Komunikasi *Social Responsibility* Sub Kategori *Community Based Development*. Diperoleh dari ajang Public Relation Indonesia Awards 2025 Kategori Program Komunikasi *Social Responsibility* Sub Kategori *Community Based Development* yang digelar oleh Public Relation Indonesia (PRIA) "Gold Winner" in the Social Responsibility Communication Program Category, Community-Based Development Subcategory. Received at the Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2025 in the Social Responsibility Communication Program Category, Community-Based Development Subcategory, organized by Public Relations Indonesia.	26 Februari 2025 February 26, 2025
6	"*Silver Winner*" Kategori Program *Public Relations* Sub Kategori *Digital Public Relations*. Diperoleh dari ajang *Public Relation* Indonesia Awards 2025 Kategori Program *Public Relations* Sub Kategori *Digital Public Relations* yang digelar oleh Public Relation Indonesia (PRIA) "Silver Winner" in the Public Relations Program Category, Digital Public Relations Subcategory. Received at the Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2025 in the Public Relations Program Category, Digital Public Relations Subcategory, organized by Public Relations Indonesia.	26 Februari 2025 February 26, 2025
7	*Trusted Diamond Achievement in Emission Transparency*. Diperoleh dari ajang The Best Corporate Emission Reduction Transparency Awards 2025 yang digelar oleh Investortrust Trusted Diamond Achievement in Emission Transparency. Received at The Best Corporate Emission Reduction Transparency Awards 2025, organized by Investortrust.	29 April 2025 April 29, 2025
9	Star 5 (EXSELEN) - TOP CSR Awards 2025. Diperoleh dari ajang TOP CSR Awards 2025 yang digelar oleh Majalah Top Business 5-Star (EXSELEN) – TOP CSR Awards 2025. Received at the TOP CSR Awards 2025 event organized by Top Business Magazine.	11 Juni 2025 June 11, 2025



No	Nama Penghargaan Awards Name	Tanggal Penghargaan Awards Date
9	TOP Leader on CSR Commitment 2025 dinobatkan kepada Direktur Utama WIKA Beton Bapak Kuntjara. Diperoleh dari ajang TOP CSR Awards 2025 yang digelar oleh Majalah Top Business TOP Leader on CSR Commitment 2025 awarded to the President Director of WIKA Beton, Mr. Kuntjara. Received at the TOP CSR Awards 2025 organized by Top Business Magazine.	11 Juni 2025 June 11, 2025
10	IDX Channel Anugerah ESG 2025. Diperoleh dari ajang IDX Channel Anugerah ESG 2025 sebagai aksi nyata dari komitmen strategi keberlanjutan yang digelar oleh IDX Channel IDX Channel Anugerah ESG 2025. Received at the IDX Channel Anugerah ESG Awards 2025 as a tangible action from the commitment to sustainability strategy organized by IDX Channel.	4 Juli 2025 July 4, 2025
11	*The High Performing Board of Commissioners on GRC*. Diperoleh dari ajang Top GRC Awards 2025 yang digelar oleh Majalah Top Business The High Performing Board of Commissioners on GRC. Received at the Top GRC Awards 2025 organized by Top Business Magazine.	8 September 2025 September 8, 2025
12	Top Governance, Risk, & Compliance (GRC) Awards 2025 #5 Stars (Excellence). Diperoleh dari ajang Top GRC Awards 2025 yang digelar oleh Majalah Top Business. Top Governance, Risk & Compliance (GRC) Awards 2025 #5 Stars (Excellence). Received at the Top GRC Awards 2025 organized by Top Business Magazine.	8 September 2025 September 8, 2025



No	Nama Penghargaan Awards Name	Tanggal Penghargaan Awards Date
13	The Most Committed GRC Leader 2025 dinobatkan kepada Direktur Utama WIKA Beton Bapak Kuntjara. Diperoleh dari ajang Top GRC Awards 2025 yang digelar oleh Majalah Top Business. The Most Committed GRC Leader 2025 awarded to the President Director of WIKA Beton, Mr. Kuntjara. Received at the TOP GRC Awards 2025 organized by Top Business Magazine.	8 September 2025 September 8, 2025
14	Gold Award untuk kategori Inovasi Lingkungan - Pengelolaan Sampah - PPB Bogor. Diperoleh dari ajang Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA) 2025 yang digelar oleh PT Sucofindo Gold Award for Environmental Innovation category - Waste Management - PPB Bogor. Received at the Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA) 2025 organized by PT Sucofindo.	16 September 2025 September 16, 2025
15	*Most Progressive ESG Transparency* dan Penghargaan Kategori *Leadership AAA - Advancing ESG Transparency Leadership*. Diperoleh dari ajang Indonesia ESG Leadership Awards 2025 yang digelar oleh BGK Foundation Most Progressive ESG Trasparency and AAA Leadership Category Award - Advancing ESG Transparency Leadership. Received at the Indonesia ESG Leadership Awards 2025 Event organized by BGK Foundation.	12 November 2025 November 12, 2025
16	QCC KENJI (Divisi Transformation, Engineering & Quality) - Diamond Diperoleh dari ajang TKMPN XXIV yang digelar oleh WKM dan AMMPI QCC KENJI (Transformation, Engineering & Quality Division) – Diamond Award, obtained from the 24th TKMPN event organized by WKM and AMMPI.	24-28 November 2025 November 24-28, 2025



No	Nama Penghargaan Awards Name	Tanggal Penghargaan Awards Date
17	QCC WASKAT (PPB Bogor) - Platinum Diperoleh dari ajang TKMPN XXIV yang digelar oleh WKM dan AMMPI QCC WASKAT (PPB Bogor) – Platinum Award, obtained from the 24th TKMPN event organized by WKM and AMMPI.	24-28 November 2025 November 24-28, 2025
18	QCC KATO (PPB Pasuruan) - Platinum Diperoleh dari ajang TKMPN XXIV yang digelar oleh WKM dan AMMPI QCC KATO (PPB Pasuruan) – Platinum Award, obtained from the 24th TKMPN event organized by WKM and AMMPI.	24-28 November 2025 November 24-28, 2025
19	Rank: A+ 2024 Sustainability Reports of Public Companies in Indonesia Diperoleh dari ajang Sustainability Reports of Public Companies in Indonesia yang digelar oleh FIHRRST Rank: A+ 2024 Sustainability Reports of Public Companies in Indonesia, awarded in the Sustainability Reports of Public Companies in Indonesia event organized by FIHRRST.	16 Desember 2025 December 16, 2025
20	ISDA Awards: Pembangunan Ekosistem Konstruksi Hijau - Platinum Diperoleh dari ajang ICA & ISDA 2025 yang digelar oleh CFCD ISDA Awards: Development of a Green Construction Ecosystem – Platinum Award, obtained from the ICA & ISDA 2025 event organized by CFCD.	17 Desember 2025 December 17, 2025

Sertifikasi
Certifications

1


2


3


4


5


6


7


8


No	Nama Lembaga Institutions	Nama Unit Penerima Awardee	Nama Sertifikasi Certifications	Masa Berlaku Validity	
				Mulai Start	Habis Expiry
1	PT Sucofindo	Korporasi Corporate	ISO 9001:2015	1 Agustus 2025 August 1, 2025	31 Juli 2028 July 31, 2028
2	PT Sucofindo	Korporasi Corporate	ISO 45001:2018	13 September 2024 September 13, 2024	5 Mei 2027 May 5, 2027
3	PT Sucofindo	Korporasi Corporate	ISO 14001:2015	22 April 2025 April 22, 2025	24 Februari 2028 February 24, 2028
4	PT Sucofindo	Korporasi Corporate	ISO 27001:2022	22 April 2025 April 22, 2025	31 Juli 2026 July 31, 2026
5	PT Sucofindo	Korporasi Corporate	ISO 37001:2016	8 April 2025 April 8, 2025	7 April 2028 April 7, 2028
6	PT Sucofindo	PPB Sumatera Utara PPB North Sumatera	SMK3 PP50 Tahun 2012 SMK3 PP50 2012	8 Juni 2024 June 8, 2024	8 Juni 2027 June 8, 2027
7	PT Sucofindo	PPB Lampung PPB Lampung	SMK3 PP50 Tahun 2012 SMK3 PP50 2012	6 September 2023 September 6, 2023	6 September 2026 September 6, 2026
8	PT Sucofindo	PPB Lampung Selatan PPB South Lampung	SMK3 PP50 Tahun 2012 SMK3 PP50 2012	13 May 2025 May 13, 2025	13 May 2028 May 13, 2028

9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



No	Nama Lembaga Institutions	Nama Unit Penerima Awardee	Nama Sertifikasi Certifications	Masa Berlaku Validity	
				Mulai Start	Habis Expiry
9	PT Sucofindo	PPB Bogor PPB Bogor	SMK3 PP50 Tahun 2012 SMK3 PP50 2012	13 May 2025 May 13, 2025	13 May 2028 May 13, 2028
10	PT Sucofindo	PPB Subang PPB Subang	SMK3 PP50 Tahun 2012 SMK3 PP50 2012	6 September 2023 September 6, 2023	6 September 2026 September 6, 2026
11	PT Sucofindo	PPB Majalengka PPB Majalengka	SMK3 PP50 Tahun 2012 SMK3 PP50 2012	13 May 2025 May 13, 2025	13 May 2028 May 13, 2028
12	PT Sucofindo	PPB Pasuruan PPB Pasuruan	SMK3 PP50 Tahun 2012 SMK3 PP50 2012	8 Juni 2024 June 8, 2024	8 Juni 2027 June 8, 2027
13	PT Sucofindo	PPB Sulawesi Selatan PPB South Sulawesi	SMK3 PP50 Tahun 2012 SMK3 PP50 2012	6 September 2023 September 6, 2023	6 September 2026 September 6, 2026
14	PT Global Inspeksi Sertifikasi	Korporasi Corporate	SNI 6880:2016	17 Oktober 2024 October 17, 2024	16 Oktober 2028 October 16, 2028
15	PT Global Inspeksi Sertifikasi	Korporasi Corporate	SNI 9157:2023	17 Oktober 2024 October 17, 2024	16 Oktober 2028 October 16, 2028
16	Komite Akreditasi Nasional	Korporasi Corporate	ISO 17025:2017	24 Mei 2023 May 24, 2023	24 Mei 2028 May 24, 2028
17	PT Global Inspeksi Sertifikasi	Korporasi Corporate	SNI 9156:2023	19 Desember 2025 December 19, 2025	18 Desember 2029 December 18, 2029
18	PT Global Inspeksi Sertifikasi	Korporasi Corporate	SNI 4433:2016	19 Desember 2025 December 19, 2025	18 Desember 2029 December 18, 2029

2



2025 Laporan Tahunan
Annual Report



Laporan Manajemen
Management Report

Laporan Direksi
Board of Directors Report

Kami memimpin langkah Perseroan dengan fokus pada penguatan kualitas kinerja dan disiplin operasional, bukan sekadar volume. Strategi efisiensi dan adaptasi portofolio produk memastikan kami tetap unggul dan menjadi pemenang di tengah dinamika industri konstruksi.

We lead the Company's efforts by focusing on strengthening performance quality and operational discipline, not just on volume. Our strategy of efficiency and product portfolio adaptation ensures that we remain superior and come out on top amid the dynamics of the construction industry.



Kuntjara

Direktur Utama
President Director



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Shareholders and Stakeholders,

Atas rasa syukur dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk menyampaikan Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Tahun 2025 menjadi fase penting bagi Perseroan dalam memperkuat kualitas bisnis melalui konsolidasi kinerja, penguatan disiplin operasional, serta peneguhan arah transformasi jangka panjang yang berkelanjutan.

By gratitude and thanks to God Almighty, The Board of Directors of PT WIjaya Karya Beton Tbk hereby submits its Annual Report for the 2025 Fiscal Year to its shareholders and all stakeholders. The year of 2025 was crucial for the Company in strengthening its business quality through performance consolidation, strengthening operational discipline, and directing a sustainable long-term transformation.

Di tengah dinamika industri konstruksi yang semakin menuntut kehati-hatian, Perseroan memfokuskan langkah strategis pada peningkatan kualitas pendapatan, pengelolaan aset dan piutang yang lebih efektif, serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk membangun fondasi pertumbuhan yang sehat, terukur, dan berkelanjutan, bukan semata mengejar ekspansi jangka pendek.

Amidst the increasingly demanding dynamics of the construction industry, the Company is focusing its strategic steps on improving revenue quality, more effective asset and debt management, and strengthening governance and risk management. This approach reflects the Company's commitment to build a foundation for healthy, measurable, and sustainable growth, rather than merely pursuing short-term expansion.

Tahun 2025 menjadi fase konsolidasi kualitas bisnis, ketika pasar konstruksi semakin selektif dan ketahanan keuangan ditentukan oleh disiplin eksekusi, bukan sekadar penambahan kontrak. Direksi mengarahkan fokus pada kualitas pendapatan, kepastian pembayaran, dan percepatan konversi pekerjaan menjadi kas melalui disiplin administrasi proyek, penguatan pengendalian piutang, serta selektivitas proyek berbasis risiko. Arah ini menempatkan tata kelola dan manajemen risiko sebagai mekanisme kerja harian untuk menjaga likuiditas, memperbaiki kualitas backlog, dan menyiapkan ruang pertumbuhan yang lebih sehat pada 2026.

The year 2025 will be a phase of business quality consolidation, when the construction market becomes increasingly selective and financial resilience is determined by execution discipline, not just the addition of contracts. The Board of Directors is focusing on revenue quality, payment certainty, and accelerating the conversion of work into cash through project administration discipline, strengthening receivables control, and risk-based project selectivity. This direction places governance and risk management as daily working mechanisms to maintain liquidity, improve backlog quality, and prepare for healthier growth in 2026.

Kami menyadari bahwa pencapaian Perseroan sepanjang tahun 2025 tidak terlepas dari sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dewan Komisaris, manajemen, karyawan, mitra usaha, serta dukungan berkelanjutan dari para pemegang saham. Kolaborasi ini menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketahanan Perseroan di tengah perubahan lingkungan usaha.

We recognize that the Company's achievements throughout 2025 are inseparable from the collaboration of all stakeholders, including the Board of Commissioners, management, employees, business partners, and the continuous support of shareholders. This collaboration is a key strength in maintaining the Company's stability against changes in the business environment.

TINJAUAN MAKROEKONOMI 2025

Tahun 2025 menandai fase penyesuaian perekonomian global di tengah fragmentasi perdagangan, ketidakpastian kebijakan, dan risiko geopolitik yang tetap tinggi. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2% pada 2025, melambat dari 3,3% pada tahun sebelumnya, sehingga tekanan terhadap arus perdagangan dan keputusan investasi masih berlanjut.

Perekonomian Indonesia mempertahankan ketahanan dengan pertumbuhan 5,11% (c-to-c) pada 2025 menurut Badan Pusat Statistik (BPS). BPS mencatat pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha Jasa Lainnya (9,93%) dan pertumbuhan komponen Ekspor Barang dan Jasa (7,03%), sehingga aktivitas ekonomi tetap bergerak pada lintasan ekspansif. Stabilitas harga tetap terjaga karena BPS mencatat inflasi Desember 2025 sebesar 2,92% (y-on-y) dan 2,92% (y-to-d), dengan inflasi inti 2,38% (y-on-y).

Kinerja eksternal tetap solid karena BPS mencatat nilai ekspor Januari–Desember 2025 sebesar US$282,91 miliar dan impor sebesar US$241,86 miliar. Pemerintah juga melaporkan kurs Rupiah 2025 pada level 16.475 (ytd) dan 16.782 (eop) per 31 Desember 2025, sehingga volatilitas nilai tukar tetap perlu dikelola melalui disiplin lindung nilai dan pengendalian biaya.

Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneter dengan menurunkan BI-Rate menjadi 4,75% pada September 2025 dan mempertahankannya pada Desember 2025 untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Pemerintah menjaga ruang fiskal karena realisasi sementara defisit APBN 2025 tercatat 2,92% PDB, sehingga belanja prioritas dan infrastruktur tetap dapat didorong secara terukur.

MACROECONOMIC REVIEW 2025

The year 2025 marks a phase of global economic adjustment amid trade fragmentation, policy uncertainty, and persistently high geopolitical risks. The International Monetary Fund (IMF) projects global economic growth of 3.2% in 2025, slowing from 3.3% in the previous year, meaning that pressure on trade flows and investment decisions will continue.

The Indonesian economy maintained its resilience with 5.11% growth (c-to-c) in 2025, according to the Central Statistics Agency (BPS). BPS recorded the highest growth in the Other Services sector (9.93%) and growth in the Goods and Services Exports component (7.03%), keeping economic activity on an expansionary track. Price stability remains intact as the BPS recorded December 2025 inflation at 2.92% (y-on-y) and 2.92% (y-to-d), with core inflation at 2.38% (y-on-y).

External performance remained solid as BPS recorded exports from January to December 2025 at US$282.91 billion and imports at US$241.86 billion. The government also reported the 2025 Rupiah exchange rate at 16,475 (ytd) and 16,782 (eop) as of December 31, 2025, meaning that exchange rate volatility still needs to be managed through hedging discipline and cost control.

Bank Indonesia eased monetary policy by lowering the BI Rate to 4.75% in September 2025 and maintaining it in December 2025 to maintain stability while encouraging growth. The government maintained fiscal space as the provisional realization of the 2025 state budget deficit was recorded at 2.92% of GDP, so that priority spending and infrastructure could still be encouraged in a measured manner.

TINJAUAN INDUSTRI KONSTRUKSI 2025

Industri konstruksi nasional tetap memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Aktivitas pembangunan berjalan dengan

CONSTRUCTION INDUSTRY REVIEW 2025

The national construction industry continues to play a strategic role in driving economic growth, strengthening connectivity, and improving the quality of public services. Development activities are proceeding with a more

dinamika yang lebih selektif, sehingga keberhasilan pelaku usaha tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan proyek, tetapi terutama oleh disiplin eksekusi, pengendalian biaya, serta ketahanan arus kas.

Pemerintah tetap menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas belanja, dengan realisasi pembangunan infrastruktur hingga 30 September 2025 mencapai Rp170,1 triliun atau 42,3% dari pagu Rp402,4 triliun. Di tingkat pelaksana, Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp116,23 triliun dan realisasi keuangan mencapai 95,23% dari pagu DIPA efektif, disertai capaian fisik 95,17%.

Dari sisi pembiayaan, penurunan BI-Rate hingga 4,75% pada September 2025 membuka ruang perbaikan biaya dana, meskipun transmisi ke sektor konstruksi tetap dipengaruhi kualitas portofolio proyek dan kepastian pembayaran. Dari sisi biaya, IHPB Kelompok

Bangunan/Konstruksi pada Desember 2025 meningkat 2,06% (yoy). Secara keseluruhan, tahun 2025 menegaskan pentingnya penguatan tata kelola proyek, produktivitas, dan manajemen risiko untuk menjaga kinerja dan daya saing industri.

ANALISIS KINERJA 2025

Sepanjang 2025, WIKA Beton mendorong perbaikan kinerja melalui dua tugas utama: penjualan yang “bankable” dan disiplin eksekusi operasional. Dalam presentasi Komisaris Utama yang merekap 2025, manajemen menekankan pergeseran fokus dari sekadar mengejar volume penjualan menuju penjualan yang menghasilkan kas, dengan pengendalian piutang, optimalisasi aset, serta standardisasi proses kerja lintas fungsi sebagai prioritas eksekusi.

Pada akhir tahun 2025, Perseroan menghadapi tekanan kinerja yang tercermin dari penurunan pendapatan dan laba bersih dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp3,59 triliun dan laba bersih sebesar Rp4,12 miliar, menurun dari Rp4,90 triliun dan Rp64,20 miliar pada 2024. Meskipun profitabilitas tertekan, Perseroan tetap menjaga struktur keuangan dengan mencatat aset sebesar Rp6,29 triliun, liabilitas Rp2,60 triliun, ekuitas Rp3,69 triliun, serta kontrak baru sebesar Rp4,01 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Perseroan masih memiliki dasar keuangan dan prospek pekerjaan yang mendukung kesinambungan usaha.

selective dynamic, so that the success of business actors is not only determined by the availability of projects, but mainly by execution discipline, cost control, and cash flow resilience.

The government continues to prioritize infrastructure development in its spending, with infrastructure development realization as of September 30, 2025 reaching Rp170.1 trillion or 42.3% of the Rp402.4 trillion budget ceiling. At the implementation level, the Ministry of Public Works reported a 2025 budget ceiling of Rp116.23 trillion and financial realization reaching 95.23% of the effective DIPA ceiling, accompanied by a physical achievement of 95.17%.

From a financing perspective, the reduction in the BI Rate to 4.75% in September 2025 opens up room for improvement in funding costs, although transmission to the construction sector remains influenced by project portfolio quality and payment certainty. From a cost perspective, the IHPB for the

Construction Group in December 2025 increased by 2.06% (yoy). Overall, 2025 emphasizes the importance of strengthening project governance, productivity, and risk management to maintain the industry's performance and competitiveness.

PERFORMANCE ANALYSIS 2025

Throughout 2025, WIKA Beton improved its performance through two main tasks: “bankable” sales and disciplined operational execution. In the President Commissioner's presentation that recapped 2025, management emphasized a shift in focus from simply pursuing sales volume to sales that generate cash, with control of accounts receivable, optimization of assets, and standardization of cross-functional work processes as execution priorities.

By the end of 2025, the Company faced performance pressures reflected in a decline in revenue and net income compared to the previous year. The Company reported revenue of Rp3.59 trillion and net income of Rp4.12 billion, down from Rp4.90 trillion and Rp64.20 billion in 2024. Despite the pressure on profitability, the Company maintained its financial structure by recording assets of Rp6.29 trillion, liabilities of Rp2.60 trillion, equity of Rp3.69 trillion, and new contracts worth Rp4.01 trillion. These achievements indicate that the Company still possesses a solid financial foundation and a strong order pipeline that supports business continuity.

Stabilnya porsi infrastruktur yang didukung kontribusi swasta mengindikasikan strategi pipeline yang lebih selektif: Perseroan memburu proyek bernilai besar dengan kelancaran pembayaran, sembari memperluas basis pelanggan untuk menekan risiko konsentrasi permintaan.

Perseroan menegaskan fokus 2025 pada optimalisasi utilisasi pabrik dan efisiensi proses produksi tanpa menambah kapasitas, dengan total kapasitas terpasang 10.924.705 ton per tahun (precast 4.782.500 ton; ready mix 6.142.205 ton). Pada 27 Agustus 2025, Perseroan meluncurkan W-HOME sebagai inovasi hunian pracetak yang memperluas spektrum solusi berbasis beton. RUPSLB 26 Juni 2025 menyetujui penambahan bidang usaha instalasi listrik (KBLI 43211) sebagai langkah diversifikasi portofolio usaha. Di penghujung 2025, fasilitas Pelabuhan WIKA Beton juga mulai difungsikan sebagai pelabuhan kontingensi sejak 20 Desember 2025 untuk mendukung kelancaran mobilitas dan logistik saat lonjakan Nataru.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Strategi Perseroan sepanjang tahun 2025 diposisikan sebagai fase konsolidasi kualitas bisnis dan fondasi transformasi jangka panjang. Direksi menetapkan bahwa keberlanjutan kepemimpinan WIKA Beton di industri beton pracetak tidak lagi ditentukan oleh ekspansi kapasitas semata, melainkan oleh kekuatan eksekusi bisnis, kualitas pendapatan, dan ketahanan operasional. Oleh karena itu, strategi Perseroan diarahkan untuk memperkuat disiplin operasional, meningkatkan utilisasi aset yang telah ada, serta memastikan setiap aktivitas bisnis memiliki kontribusi langsung terhadap kesehatan keuangan dan keberlanjutan usaha.

Fokus utama strategi 2025 adalah penguatan eksekusi bisnis untuk mempertahankan posisi pasar. Perseroan menempatkan pengelolaan utilisasi pabrik, efisiensi operasi melalui konsep minimum operation, serta penataan organisasi sebagai kebijakan inti. Penyesuaian struktur kerja dan portofolio produk dilakukan agar Perseroan tetap adaptif terhadap kebutuhan proyek yang semakin beragam, sekaligus mampu menjaga daya saing di tengah tekanan pasar konstruksi yang fluktuatif. Dengan pendekatan ini, Perseroan menegaskan bahwa stabilitas kinerja operasional menjadi prasyarat utama sebelum melangkah pada agenda ekspansi yang lebih luas.

Strategi Perseroan juga diarahkan pada penguatan kualitas pendapatan. Seleksi proyek dilakukan secara lebih disiplin

The stable share of infrastructure supported by private contributions indicates a more selective pipeline strategy: the Company pursues high-value projects with smooth payments, while expanding its customer base to reduce the risk of demand concentration.

The Company confirms its focus for 2025 on optimizing factory utilization and production process efficiency without increasing capacity, with a total installed capacity of 10,924,705 tons per year (precast 4,782,500 tons; ready mix 6,142,205 tons). On August 27, 2025, the Company launched W-HOME as a precast housing innovation that expands the spectrum of concrete-based solutions. The Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 26, 2025 approved the addition of the electrical installation business (KBLI 43211) as a step to diversify the business portfolio. By the end of 2025, the WIKA Beton Port facility also began operating as a contingency port starting December 20, 2025, to support smooth mobility and logistics during the Christmas and New Year peak season.

STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES

The Company's strategy throughout 2025 is positioned as a phase of business quality consolidation and long-term transformation foundation. The Board of Directors has determined that WIKA Beton's continued leadership in the precast concrete industry is no longer determined solely by capacity expansion, but rather by business execution strength, revenue quality, and operational resilience. Therefore, the Company's strategy is directed at strengthening operational discipline, increasing the utilization of existing assets, and ensuring that every business activity contributes directly to financial health and business sustainability.

The main focus of the 2025 strategy is to strengthen business execution to maintain market position. The Company has placed factory utilization management, operational efficiency through the concept of minimum operation, and organizational restructuring as core policies. Adjustments to the work structure and product portfolio are made so that the Company remains adaptive to increasingly diverse project needs, while maintaining competitiveness amid fluctuating construction market pressures. With this approach, the Company emphasizes that operational performance stability is a key prerequisite before embarking on a broader expansion agenda.

The Company's strategy is also aimed at strengthening revenue quality. Project selection is carried out more

dengan mempertimbangkan kelayakan finansial, kepastian pembayaran, dan kontribusi terhadap arus kas. Pendekatan ini merupakan bentuk pergeseran kebijakan dari orientasi volume penjualan menuju kualitas transaksi bisnis. Dengan demikian, kontrak yang diperoleh tidak hanya memperbesar nilai penjualan, tetapi juga memperbaiki struktur kas dan menurunkan risiko piutang bermasalah.

rigorously by considering financial feasibility, payment certainty, and contribution to cash flow. This approach represents a shift in policy from a sales volume orientation to business transaction quality. Thus, the contracts obtained not only increase sales value but also improve cash structure and reduce the risk of bad debts.

Dalam aspek portofolio usaha, strategi 2025 menekankan diversifikasi produk dan layanan bernilai tambah. Pengembangan produk seperti W-HOME serta perluasan bidang usaha melalui penambahan kegiatan instalasi listrik merupakan bagian dari kebijakan untuk memperluas spektrum solusi yang ditawarkan Perseroan. Diversifikasi ini dimaksudkan agar Perseroan tidak semata bergantung pada proyek infrastruktur konvensional, tetapi juga mampu menangkap peluang pada sektor perumahan, jasa konstruksi terintegrasi, dan solusi bangunan berbasis teknologi beton.

In terms of business portfolio, the 2025 strategy emphasizes the diversification of value-added products and services. Product development, such as W-HOME, and business expansion through the addition of electrical installation activities are part of the policy to broaden the spectrum of solutions offered by the Company. This diversification is intended so that the Company does not solely rely on conventional infrastructure projects, but is also able to capture opportunities in the housing sector, integrated construction services, and technology-based concrete building solutions.

Keberlanjutan dan ESG diposisikan sebagai elemen strategis yang terintegrasi dalam pengambilan keputusan bisnis. ESG tidak diperlakukan sebagai kewajiban pelaporan semata, melainkan sebagai instrumen untuk mengarahkan investasi, inovasi produk, dan manajemen risiko. Dalam konteks lingkungan, strategi Perseroan mencakup percepatan dekarbonisasi berbasis material dan energi melalui peningkatan substitusi material ramah lingkungan, penguatan penggunaan energi terbarukan termasuk opsi skema ESCO, serta eksplorasi alternatif energi masa depan. Di sisi operasional, pengelolaan air dan limbah, termasuk pemanfaatan ulang air hujan dan air proses, menjadi bagian dari mitigasi risiko iklim yang berdampak langsung pada keberlangsungan produksi.

Sustainability and ESG are positioned as strategic elements that are integrated into business decision-making. ESG is not treated as a mere reporting obligation, but as an instrument to guide investment, product innovation, and risk management. In the environmental context, the Company's strategy includes accelerating material and energy-based decarbonization through increased substitution of environmentally friendly materials, strengthening the use of renewable energy, including ESCO scheme options, and exploring alternative future energy sources. On the operational side, water and waste management, including the reuse of rainwater and process water, is part of climate risk mitigation that directly impacts production sustainability.

Untuk mendukung implementasi ESG yang lebih terukur, Perseroan mengarahkan penguatan sistem pelaporan dan infrastruktur digital. Roadmap keberlanjutan disiapkan secara lebih terstruktur dengan target tahunan, indikator capaian, serta mekanisme pemantauan berbasis dashboard. Roadmap teknologi informasi diposisikan sebagai enabler utama dalam penyediaan data yang andal, terintegrasi, dan dapat diaudit, sehingga kualitas pelaporan dan pengambilan keputusan manajerial semakin meningkat.

To support more measurable ESG implementation, the Company is directing efforts toward strengthening its reporting systems and digital infrastructure. The sustainability roadmap is prepared in a more structured manner with annual targets, achievement indicators, and dashboard-based monitoring mechanisms. The information technology roadmap is positioned as the main enabler in providing reliable, integrated, and auditable data, thereby improving the quality of reporting and managerial decision-making.

Arah strategis 2025 diringkas dalam tiga pilar:

The strategic direction for 2025 is summarized in three pillars:

1. *Cash generation* melalui penyelesaian pekerjaan dan pengendalian piutang;
1. Cash generation through project completion and accounts receivable control;

2. *Operational excellence* melalui efisiensi proses, digitalisasi, dan produktivitas sumber daya;
3. *Portfolio diversification* dengan pengembangan produk dan perluasan segmen swasta.

Ketiga pilar ini menjadi jembatan antara hasil pada tahun sebelumnya yang sudah pulih dan fondasi menuju pertumbuhan yang lebih sehat di 2026.

Strategi 2025 diarahkan untuk memenangkan pasar secara selektif dengan mengutamakan kualitas transaksi, kepastian pembayaran, dan kecepatan eksekusi layanan end-to-end. Fokus pemasaran tidak diposisikan sebagai promosi, melainkan sebagai penguatan pipeline berbasis data, penajaman segmentasi pelanggan, serta penguatan proposisi nilai melalui layanan terintegrasi dari perencanaan hingga pemenuhan. Pendekatan ini memperkuat kredibilitas di pasar karena penawaran didukung bukti kinerja, standarisasi layanan, dan transparansi proses.

Untuk memperbaiki konversi pendapatan menjadi kas, pemasaran dikaitkan langsung dengan disiplin pemenuhan dokumen proyek, percepatan penyelesaian BAST (Berita Acara Serah Terima), dan penguatan manajemen piutang sebagai satu rangkaian proses komersial. Di saat yang sama, komunikasi merek diarahkan pada pembuktian (bukan janji), dengan konsistensi pesan lintas kanal, penguatan tata kelola merek, serta konten kepakaran yang menonjolkan inovasi beton ramah lingkungan dan praktik manufaktur yang semakin hijau melalui program publikasi tematik dan kolaborasi riset.

Secara keseluruhan, strategi dan kebijakan strategis WIKA Beton pada 2025 mencerminkan transisi menuju perusahaan yang menekankan kualitas eksekusi, ketahanan finansial, serta integrasi keberlanjutan dalam inti bisnis. Pendekatan ini menjadi fondasi penting untuk membangun pertumbuhan yang lebih sehat, terukur, dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, sekaligus memperkuat posisi Perseroan sebagai penyedia solusi beton yang adaptif terhadap tuntutan industri konstruksi modern.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) berperan aktif dalam merumuskan strategi dan kebijakan strategis Perseroan sepanjang tahun 2025 dengan menempatkan penguatan kualitas bisnis sebagai prioritas utama. Direksi secara berkala mengevaluasi kinerja keuangan, kualitas pendapatan, pengelolaan piutang, utilisasi aset, serta

2. Operational excellence through process efficiency, digitization, and resource productivity;
3. Portfolio diversification through product development and expansion into the private sector.

These three pillars serve as a bridge between the recovered results of 2024 and the foundation for healthier growth in 2026.

The 2025 strategy is aimed at selectively winning the market by prioritizing transaction quality, payment certainty, and speed of end-to-end service execution. The marketing focus is not positioned as promotion, but rather as strengthening the data-driven pipeline, sharpening customer segmentation, and strengthening the value proposition through integrated services from planning to fulfillment. This approach strengthens credibility in the market because the offerings are supported by performance evidence, service standardization, and process transparency.

To improve revenue conversion into cash, marketing is directly linked to project documentation compliance, accelerated Handover Report (BAST) completion, and strengthened accounts receivable management as a series of commercial processes. At the same time, brand communication is directed towards proof (not promises), with consistent cross-channel messaging, strengthened brand governance, and expert content that highlights environmentally friendly concrete innovations and increasingly green manufacturing practices through thematic publication programs and research collaborations.

Overall, WIKA Beton's strategy and strategic policies for 2025 reflect a transition towards a company that emphasizes quality execution, financial resilience, and the integration of sustainability into its core business. This approach serves as a crucial foundation for building healthier, measurable, and sustainable growth in the coming years, while strengthening the Company's position as an adaptive provider of concrete solutions tailored to the demands of the modern construction industry.

The Role of the Board of Directors in Formulating Strategy and Strategic Policy

The Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) plays an active role in formulating the Company's strategy and strategic policy throughout 2025 by placing business quality enhancement as the top priority. The Board of Directors regularly evaluates financial performance, revenue quality, accounts

efektivitas operasional untuk memastikan bahwa strategi yang disusun selaras dengan kondisi riil Perseroan dan dinamika pasar.

Dalam proses perumusan strategi, Direksi bekerja secara kolaboratif dengan Dewan Komisaris, manajemen puncak, serta kepala unit kerja untuk menghimpun masukan lintas fungsi, termasuk aspek komersial, operasional, keuangan, teknologi informasi, dan keberlanjutan. Setiap usulan dianalisis berdasarkan kelayakan bisnis, implikasi risiko, dan kontribusinya terhadap ketahanan jangka panjang Perseroan.

Setelah dirumuskan, strategi dan kebijakan strategis tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan, kemudian dikomunikasikan kepada seluruh jajaran manajemen dan pemegang saham sebagai pedoman pelaksanaan operasional Perseroan.

Proses yang Dilakukan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) memastikan implementasi strategi tahun 2025 berjalan efektif melalui proses pengendalian yang terstruktur, terukur, dan berkesinambungan. Direksi menempatkan pelaksanaan strategi sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja yang tidak terpisah dari aktivitas operasional sehari-hari. Setiap kebijakan strategis diterjemahkan ke dalam target kerja, indikator kinerja, serta rencana tindak lanjut yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja.

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan, Direksi menerapkan pendekatan pengendalian berbasis siklus *Plan, Do, Check*, dan *Action* (PDCA). Pada tahap perencanaan, strategi yang telah disetujui dijabarkan ke dalam program kerja, anggaran, serta target operasional yang jelas. Tahap pelaksanaan difokuskan pada eksekusi proyek, pengelolaan operasi, serta implementasi kebijakan efisiensi, optimalisasi aset, dan penguatan kualitas pendapatan. Tahap evaluasi dilakukan secara berkala melalui pemantauan capaian kinerja keuangan, operasional, serta indikator strategis lainnya. Selanjutnya, Direksi menetapkan langkah korektif dan penyesuaian strategi apabila ditemukan deviasi dari rencana yang telah ditetapkan.

Proses pengawasan implementasi strategi juga dilakukan melalui mekanisme rapat manajemen yang berjenjang dan terstruktur. Rapat Direksi Khusus, Rapat Direksi Terbatas,

receivable management, asset utilization, and operational effectiveness to ensure that the strategies formulated are in line with the Company's actual conditions and market dynamics.

In the strategy formulation process, the Board of Directors works collaboratively with the Board of Commissioners, top management, and work unit heads to gather cross-functional input, including commercial, operational, financial, information technology, and sustainability aspects. Each proposal is analyzed based on its business feasibility, risk implications, and contribution to the Company's long-term resilience.

Once formulated, the strategy and strategic policies are submitted to the Board of Commissioners for approval, then communicated to all levels of management and shareholders as guidelines for the Company's operational implementation.

Processes Implemented by the Board of Directors to Ensure Strategy Implementation

The Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) ensures the effective implementation of the 2025 strategy through a structured, measurable, and continuous control process. The Board of Directors places strategy implementation as part of the performance management cycle that is inseparable from daily operational activities. Each strategic policy is translated into work targets, performance indicators, and follow-up plans that serve as a reference for all work units.

To maintain consistency in implementation, the Board of Directors applies a Plan, Do, Check, and Action (PDCA) cycle-based control approach. At the planning stage, the approved strategy is translated into work programs, budgets, and clear operational targets. The implementation phase focuses on project execution, operations management, and the implementation of efficiency policies, asset optimization, and revenue quality enhancement. The evaluation phase is carried out periodically through monitoring of financial and operational performance achievements, as well as other strategic indicators. Furthermore, the Board of Directors determines corrective measures and strategy adjustments if deviations from the established plan are found.

The process of monitoring strategy implementation is also carried out through a structured, tiered management meeting mechanism. Special Board Meetings, Limited

serta Rapat Direksi dengan Manajer Divisi menjadi forum utama untuk mengevaluasi progres program kerja, membahas hambatan operasional, serta menyepakati langkah perbaikan yang diperlukan. Setiap keputusan dan komitmen hasil rapat didokumentasikan secara sistematis sebagai dasar pengendalian dan tindak lanjut.

Board Meetings, and Board Meetings with Division Managers serve as the main forums for evaluating work program progress, discussing operational obstacles, and agreeing on necessary corrective measures. Every decision and commitment resulting from these meetings is systematically documented as a basis for control and follow-up.

Melalui proses ini, Direksi memastikan bahwa strategi tidak berhenti pada tahap perumusan, tetapi benar-benar diimplementasikan secara disiplin, adaptif, dan selaras dengan tujuan penguatan kualitas bisnis serta keberlanjutan Perseroan.

Through this process, the Board of Directors ensures that the strategy does not stop at the formulation stage, but is actually implemented in a disciplined, adaptive manner that is in line with the objectives of strengthening the quality of the business and the sustainability of the Company.

Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

Comparison Between Achieved and Targeted Results

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan merupakan bagian penting dalam evaluasi kinerja Perseroan. Direksi secara konsisten membandingkan realisasi kinerja sepanjang tahun buku 2025 dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) yang telah ditetapkan di awal tahun sebagai dasar penilaian efektivitas strategi dan kualitas eksekusi.

The comparison between achieved and targeted results is an important part of the Company's performance evaluation. The Board of Directors consistently compares the performance realization throughout the 2025 fiscal year with the Company's Work Plan and Budget (RKAP) that was set at the beginning of the year as a basis for assessing the effectiveness of strategies and the quality of execution.

Sepanjang 2025, dinamika pasar dan pengetatan kualitas bisnis menyebabkan beberapa indikator kinerja tidak semata diukur dari pencapaian volume, melainkan dari kualitas pendapatan, ketahanan arus kas, serta efisiensi operasional. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya difokuskan pada selisih angka target dan realisasi, tetapi juga pada kesesuaian arah kinerja dengan strategi konsolidasi kualitas bisnis yang telah ditetapkan Direksi.

Throughout 2025, market dynamics and tightening business quality caused several performance indicators to be measured not only in terms of volume achievement, but also in terms of revenue quality, cash flow resilience, and operational efficiency. Therefore, the evaluation did not only focus on the difference between the target and actual figures, but also on the alignment of performance with the business quality consolidation strategy set by the Board of Directors.

Perbandingan detail antara target dan realisasi tahun 2025 disajikan pada bagian berikut sebagai dasar penilaian kinerja Perseroan.

A detailed comparison between the 2025 targets and actual results is presented in the following section as a basis for assessing the Company's performance.

Perbandingan Antara Target/Proyeksi Pada Awal Tahun Buku dengan Hasil yang Dicapai (Realisasi)
Comparison Between Targets/Projections at the Beginning Year of the Financial Year with Results Achieved (Realization)

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	Target/Proyeksi 2025 2025 Target/Projection	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)
Pendapatan/Penjualan Revenue/Sales	5.305.000	3.585.862	67,59
Laba (Rugi) Profit (Loss)	85.211	4.122	4,84
Liabilitas Liabilities	4.449.322	3.507.922	78,84
Ekuitas Equity	3.746.304	3.686.012	98,39
Dividen Dividend	20%	10,18%	50,91

Kendala yang Dihadapi dan Penyelesaiannya

Sepanjang tahun 2025, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) menghadapi tantangan yang mencerminkan perubahan karakter pasar konstruksi dari fase ekspansi menuju fase konsolidasi dan pengetatan kualitas bisnis. Salah satu kendala utama adalah tekanan terhadap pendapatan akibat melemahnya permintaan proyek pada beberapa segmen serta meningkatnya selektivitas pasar. Perseroan tidak lagi berhadapan dengan tantangan memperoleh kontrak semata, melainkan harus memastikan bahwa setiap kontrak yang diperoleh memiliki kualitas finansial yang memadai, terutama dari sisi kepastian pembayaran dan kontribusi terhadap arus kas. Kondisi ini menuntut perubahan pendekatan dari orientasi volume menuju orientasi kualitas transaksi bisnis.

Kendala berikutnya berkaitan dengan pengelolaan piutang dan konversi pendapatan menjadi kas. Karakter industri konstruksi yang memiliki siklus penagihan panjang tetap menjadi tantangan struktural. Pada 2025, isu ini menjadi semakin krusial karena tekanan pendapatan membuat setiap keterlambatan pembayaran berdampak langsung pada likuiditas dan fleksibilitas keuangan Perseroan. Kualitas kinerja tidak lagi cukup diukur dari pencapaian penjualan, tetapi dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan menagih hasil pekerjaan secara efektif.

Di sisi operasional, Perseroan juga menghadapi tantangan dalam menjaga utilisasi aset dan kapasitas produksi agar tetap optimal. Dengan kapasitas terpasang yang besar, rendahnya utilisasi akan langsung menurunkan efisiensi biaya dan meningkatkan beban tetap per unit produksi. Oleh karena itu, kendala utama bukan terletak pada

Obstacles Encountered and Its Adjustment

Throughout 2025, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) faced challenges that reflected changes in the nature of the construction market from a phase of expansion to a phase of consolidation and tightening of business quality. One of the main challenges was pressure on revenue due to weakening demand for projects in several segments and increasing market selectivity. The company no longer faces the challenge of simply obtaining contracts, but must ensure that each contract obtained has adequate financial quality, especially in terms of payment certainty and contribution to cash flow. This condition requires a change in approach from a volume orientation to a business transaction quality orientation.

The next obstacle relates to accounts receivable management and converting revenue into cash. The nature of the construction industry, which has a long billing cycle, remains a structural challenge. In 2025, this issue will become even more crucial as revenue pressures mean that any delay in payment will have a direct impact on the Company's liquidity and financial flexibility. Performance quality is no longer measured solely by sales achievements, but by the ability to complete work on time and collect payments effectively.

On the operational side, the Company also faces challenges in maintaining optimal asset utilization and production capacity. With large installed capacity, low utilization will directly reduce cost efficiency and increase fixed costs per unit of production. Therefore, the main obstacle is not limited capacity, but the ability

keterbatasan kapasitas, melainkan pada kemampuan mengelola volume produksi secara adaptif terhadap fluktuasi permintaan pasar. Tekanan biaya energi, bahan baku, dan logistik turut memperkuat urgensi untuk menjalankan operasi yang semakin efisien.

to manage production volume adaptively to market demand fluctuations. Pressure from energy, raw material, and logistics costs further reinforces the urgency to run increasingly efficient operations.

Tantangan lainnya muncul dari meningkatnya kompleksitas penerapan ESG. Pada 2025, ESG tidak lagi ditempatkan semata sebagai kewajiban pelaporan, tetapi telah masuk ke dalam ranah pengambilan keputusan bisnis, investasi, dan manajemen risiko. Perubahan ini membawa konsekuensi berupa kebutuhan data yang lebih akurat, sistem pelaporan yang lebih matang, serta kemampuan mengelola keseimbangan antara transparansi publik dan perlindungan informasi strategis perusahaan. Tanpa kesiapan sistem yang memadai, implementasi ESG berpotensi menjadi beban administratif, bukan alat penguat daya saing.

Another challenge arises from the increasing complexity of ESG implementation. By 2025, ESG will no longer be treated solely as a reporting obligation, but will have entered the realm of business decision-making, investment, and risk management. This change has consequences in the form of a need for more accurate data, more mature reporting systems, and the ability to manage the balance between public transparency and the protection of strategic company information. Without adequate system readiness, ESG implementation has the potential to become an administrative burden rather than a tool to strengthen competitiveness.

Untuk merespons kendala tersebut, Perseroan menerapkan serangkaian langkah penyelesaian yang terintegrasi. Dalam aspek komersial, Direksi memperketat seleksi proyek dengan mempertimbangkan kelayakan finansial, kepastian pembayaran, serta kontribusi terhadap kualitas arus kas. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa pertumbuhan kontrak baru tidak mengorbankan stabilitas likuiditas. Secara paralel, Perseroan memperkuat disiplin penyelesaian pekerjaan dan percepatan penagihan sebagai bagian dari penguatan kualitas pendapatan.

To respond to these obstacles, the Company has implemented a series of integrated solutions. In the commercial aspect, the Board of Directors has tightened project selection by considering financial feasibility, payment certainty, and contribution to cash flow quality. This approach aims to ensure that new contract growth does not sacrifice liquidity stability. In parallel, the Company is strengthening work completion discipline and accelerating billing as part of strengthening revenue quality.

Dalam konteks konstruksi, percepatan Berita Acara Serah Terima (BAST), dokumen formal serah terima yang menjadi prasyarat penagihan, menjadi tuas utama untuk memperpendek jeda dari penyelesaian pekerjaan menuju pencairan kas.

In the context of construction, accelerating the Handover Report (BAST), a formal handover document that is a prerequisite for billing, is the main lever for shortening the gap between completion of work and cash disbursement.

Dalam aspek operasional, Perseroan mengimplementasikan kebijakan minimum operation dan optimalisasi utilisasi pabrik. Fokus diarahkan pada efisiensi biaya, pengendalian konsumsi energi, serta peningkatan produktivitas per unit kapasitas. Optimalisasi aset eksisting, termasuk fasilitas logistik dan pelabuhan, juga dijadikan bagian dari strategi untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan menekan biaya distribusi.

In operational terms, the Company implements minimum operation policies and optimizes factory utilization. The focus is on cost efficiency, energy consumption control, and increased productivity per unit of capacity. Optimization of existing assets, including logistics and port facilities, is also part of the strategy to improve supply chain efficiency and reduce distribution costs.

Pada aspek keberlanjutan, Perseroan mengintegrasikan ESG ke dalam kebijakan bisnis melalui percepatan dekarbonisasi berbasis material dan energi, penguatan pengelolaan air dan limbah, serta eksplorasi penggunaan energi terbarukan. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan mulai menyiapkan roadmap keberlanjutan

In terms of sustainability, the Company integrates ESG into its business policies through the acceleration of material and energy-based decarbonization, strengthening water and waste management, and exploring the use of renewable energy. To support this, the Company has begun to prepare a more structured sustainability roadmap,

yang lebih terstruktur, termasuk kebutuhan akan sistem pelaporan, dashboard pemantauan, dan penguatan infrastruktur teknologi informasi sebagai enabler pengambilan keputusan berbasis data.

Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi WIKA Beton pada 2025 bukan semata bersifat teknis atau operasional, melainkan mencerminkan proses pendewasaan model bisnis. Melalui penguatan disiplin eksekusi, peningkatan kualitas pendapatan, optimalisasi aset, serta integrasi ESG ke dalam inti pengelolaan perusahaan, Perseroan membangun fondasi yang lebih kokoh untuk memastikan ketahanan usaha dan keberlanjutan kinerja pada periode mendatang.

GAMBARAN TENTANG PROSPEK USAHA

Prospek usaha WIKA Beton pada 2025–2026 ditentukan oleh dua penggerak utama, yaitu arah permintaan konstruksi domestik dan disiplin eksekusi proyek yang mengonversi backlog menjadi arus kas. Dari sisi makro, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 meningkat pada kisaran 4,9%–5,7%, yang didorong kenaikan permintaan domestik dan penguatan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Selaras dengan itu, KSSK juga menyampaikan prakiraan pertumbuhan 2026 yang meningkat, yang mengindikasikan ruang pemulihan aktivitas sektor riil tetap terbuka selama stabilitas sistem keuangan terjaga.

Pada level industri, kesinambungan belanja infrastruktur pemerintah tetap menjadi jangkar permintaan, meskipun prioritas dan ritme pelaksanaan dapat berfluktuasi mengikuti penajaman program pemerintahan. Dalam konteks 2026, indikator yang paling operasional untuk dibaca adalah pagu anggaran Kementerian PU 2026 sebesar Rp118,5 triliun, termasuk alokasi besar pada bina marga dan sumber daya air, yang merefleksikan keberlanjutan kebutuhan proyek jalan, konektivitas, dan ketahanan air/pangan. Di sisi fiskal, dokumen resmi RAPBN/Nota Keuangan 2026 menjadi rujukan primer untuk menarasikan arah belanja negara dan prioritas pembangunan yang mempengaruhi pipeline proyek.

Dengan latar tersebut, peluang WIKA Beton ditopang komposisi permintaan yang masih kuat pada sektor berbasis proyek besar. Data kontrak sepanjang tahun 2025 menunjukkan nilai Rp4,0 triliun, dengan eksposur utama pada infrastruktur dan kontribusi sektor lain seperti industri serta kelistrikan, sehingga basis permintaan

including the need for reporting systems, monitoring dashboards, and strengthening information technology infrastructure as enablers of data-driven decision making.

Overall, the challenges faced by WIKA Beton in 2025 are not merely technical or operational in nature, but rather reflect the maturing of its business model. Through strengthening execution discipline, improving revenue quality, optimizing assets, and integrating ESG into the core of corporate management, the Company is building a more solid foundation to ensure business resilience and sustainable performance in the coming period.

OVERVIEW OF BUSINESS PROSPECTS

WIKA Beton's business prospects for 2025–2026 are determined by two main drivers, namely the direction of domestic construction demand and disciplined project execution that converts backlog into cash flow. From a macro perspective, Bank Indonesia forecasts Indonesia's economic growth in 2026 to increase to a range of 4.9%–5.7%, driven by rising domestic demand and a stronger policy mix to maintain stability while promoting growth. In line with this, the KSSK also presented an increased growth forecast for 2026, indicating that there is still room for recovery in the real sector as long as financial system stability is maintained.

At the industry level, continued government infrastructure spending remains the anchor of demand, although priorities and implementation rhythms may fluctuate in line with the refinement of government programs. In the context of 2026, the most operational indicator to look at is the 2026 Ministry of Public Works budget ceiling of Rp118.5 trillion, including large allocations for roads and water resources, which reflects the continuing need for road, connectivity, and water/food security projects. On the fiscal side, the official 2026 Draft State Budget/Financial Note document is the primary reference for narrating the direction of state spending and development priorities that affect the project pipeline.

Against this background, WIKA Beton's opportunities are supported by strong demand in the large-scale project sector. Contract data for 2025 shows a value of Rp4.0 trillion, with the main exposure in infrastructure and contributions from other sectors such as industry and electricity, so that demand is not concentrated in just one

tidak bertumpu pada satu kelas proyek saja. Portofolio pelanggan juga menunjukkan sebaran pada BUMN/utilitas dan pelaku industri, yang dapat menjadi sumber *repeat order* ketika eksekusi proyek berjalan konsisten.

type of project. The customer portfolio also shows a spread across state-owned enterprises/utilities and industrial players, which can be a source of repeat orders when project execution is consistent.

Namun, Perusahaan tetap menegaskan "mesin eksekusi"-nya. RKAP menekankan bahwa konversi backlog dan eksekusi termin menjadi kunci kesinambungan pertumbuhan menuju 2026, terutama karena karakter realisasi yang dapat bersifat back-loaded. Karena itu, percepatan BAST (Berita Acara Serah Terima) menjadi langkah kritikal, sebab BAST (Berita Acara Serah Terima) adalah dasar pengakuan penjualan sekaligus lampiran penting pada dokumen penagihan. Penguatan *cash collection* ini sejalan dengan proyeksi perbaikan penerimaan kas pelanggan pada 2026 serta strategi efektivitas proyek untuk mengangkat kualitas arus kas operasi.

However, the Company continues to emphasize its "execution engine." The RKAP emphasizes that the conversion of backlog and execution of terms are key to sustained growth towards 2026, especially given the back-loaded nature of realization. Therefore, accelerating Handover Report (BAST) (Handover Reports) is a critical step, as Handover Report (BAST) is the basis for sales recognition and an important attachment to billing documents. Strengthening cash collection is in line with the projected improvement in customer cash receipts in 2026 and the project effectiveness strategy to improve the quality of operating cash flow.

Memasuki tahun 2026, Perusahaan telah menetapkan sejumlah target yang dituangkan dalam RKAP 2026, antara lain:

Entering 2026, the Company has set a number of targets as outlined in the 2026 RKAP, including:

Target/Proyeksi yang Ingin Dicapai Perusahaan Untuk 1 (Satu) Tahun Mendatang
Targets/Projections to be Achieved by the Company for the Next 1 (One) Year

Uraian Description	Proyeksi 2026 2026 Projection
Pendapatan/Penjualan Revenue/Sales	3.957.015
Laba (Rugi) Profit (Loss)	20.296
Liabilitas Liabilities	2.905.929
Ekuitas Equity	3.700.825
Kebijakan Dividen Dividend Policy	20,00%

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2025, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan usaha di tengah dinamika industri konstruksi yang semakin kompleks. Direksi memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab,

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Throughout 2025, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) continues to strengthen the implementation of good corporate governance as the main foundation in maintaining business sustainability amid the increasingly complex dynamics of the construction industry. The Board of Directors ensures that the principles of transparency,

kemandirian, dan kewajaran tidak hanya dipenuhi sebagai kewajiban kepatuhan, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasional Perseroan. Tata kelola diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menjaga kualitas bisnis, mengendalikan risiko, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.

accountability, responsibility, independence, and fairness are not only fulfilled as compliance obligations, but are truly internalized in the Company's decision-making and operational implementation processes. Corporate governance is positioned as a strategic instrument to maintain business quality, control risks, and strengthen stakeholder trust.

Pada 2025, Direksi semakin menekankan bahwa integritas merupakan elemen inti dalam strategi bisnis. Integritas tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai nilai dasar yang membentuk budaya kerja, hubungan kemitraan, dan pola interaksi dengan pelanggan maupun mitra usaha. Seluruh kebijakan operasional diarahkan agar sejalan dengan prinsip etika, profesionalisme, dan tanggung jawab jangka panjang terhadap pemegang saham serta masyarakat.

In 2025, the Board of Directors increasingly emphasized that integrity is a core element of business strategy. Integrity is not only interpreted as compliance with laws and regulations, but also as a fundamental value that shapes work culture, partnership relationships, and patterns of interaction with customers and business partners. All operational policies are directed to be in line with the principles of ethics, professionalism, and long-term responsibility to shareholders and the community.

Penerapan kode etik, sistem pengendalian internal, kebijakan anti-korupsi dan anti-gratifikasi, serta mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) terus diperkuat sebagai pilar utama tata kelola. WBS dipertahankan sebagai sarana pelaporan yang aman dan rahasia, sehingga memungkinkan pegawai dan pemangku kepentingan eksternal untuk menyampaikan dugaan pelanggaran tanpa rasa takut. Melalui sistem ini, Perseroan membangun lingkungan yang mendorong keterbukaan, pencegahan penyimpangan, dan penegakan etika secara konsisten.

The implementation of the code of ethics, internal control system, anti-corruption and anti-gratification policies, and Whistleblowing System (WBS) mechanism continues to be strengthened as the main pillars of governance. WBS is maintained as a secure and confidential reporting tool, enabling employees and external stakeholders to report alleged violations without fear. Through this system, the Company fosters an environment that encourages openness, prevents misconduct, and consistently enforces ethics.

Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas bisnis dan penerapan ESG, tata kelola Perseroan pada 2025 juga diarahkan untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam kerangka pengelolaan risiko. ESG tidak diposisikan terpisah dari tata kelola, melainkan menjadi bagian dari pertimbangan strategis dalam investasi, pengembangan produk, serta evaluasi risiko operasional dan reputasi. Dengan pendekatan ini, Direksi memastikan bahwa keputusan bisnis tidak hanya dinilai dari aspek finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola jangka panjang.

In line with increasing business complexity and ESG implementation, the Company's governance in 2025 will also be directed towards integrating sustainability aspects into the risk management framework. ESG is not positioned separately from governance, but rather as part of strategic considerations in investment, product development, and operational and reputational risk assessment. With this approach, the Board of Directors ensures that business decisions are not only evaluated from a financial perspective, but also from their impact on the environment, society, and long-term governance.

Untuk memastikan penguatan ESG tidak berhenti pada komitmen normatif, Perseroan menggunakan asesmen diagnostik berbasis kerangka S&P Global *Corporate Sustainability Assessment* (CSA) guna memetakan

To ensure that ESG strengthening does not stop at normative commitments, the Company uses a diagnostic assessment based on the S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) framework to map its

posisi, mengidentifikasi kesenjangan pengungkapan, dan menetapkan prioritas penguatan kebijakan dan program. Hasil asesmen tersebut mengarahkan fokus perbaikan pada penguatan struktur pengawasan keberlanjutan di bawah Dewan Komisaris, penguatan keterkaitan target material dengan mekanisme kinerja eksekutif, peningkatan konsistensi verifikasi pihak ketiga untuk metrik kunci dan rantai pasok, serta penajaman peta jalan iklim–energi–air–limbah agar target operasional dapat diukur dan diaudit secara lebih disiplin pada 2026.

Dalam aspek manajemen risiko, Perseroan melanjutkan penerapan Sistem Manajemen Risiko yang terintegrasi di seluruh unit kerja. Identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko dilakukan secara sistematis untuk memastikan setiap proyek dan aktivitas operasional selaras dengan risk appetite Perseroan. Pendekatan kehati-hatian ini mendukung kebijakan seleksi proyek yang lebih disiplin, sehingga hanya proyek dengan kualitas finansial dan risiko yang terkendali yang dapat dijalankan.

Tata kelola juga diperkuat melalui pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi informasi. Pada 2025, Direksi menempatkan penguatan roadmap IT sebagai enabler utama tata kelola berbasis data. Pengembangan dashboard manajemen, sistem pelaporan terintegrasi, serta penguatan kualitas data diarahkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif, terukur, dan dapat diaudit. Teknologi tidak hanya berfungsi meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjadi alat kontrol yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses bisnis.

Dalam kaitannya dengan kebijakan remunerasi dan evaluasi kinerja, Perseroan terus mengembangkan pendekatan yang menyeimbangkan aspek finansial dan non-finansial. Kinerja Direksi dievaluasi tidak hanya berdasarkan capaian keuangan, tetapi juga kontribusi terhadap penguatan tata kelola, keberlanjutan, efisiensi operasional, serta pengembangan organisasi. Meskipun sistem pengukuran kuantitatif keterkaitan langsung antara remunerasi variabel dan kinerja jangka panjang masih dalam tahap pengembangan, Perseroan berkomitmen untuk terus menyempurnakan mekanisme tersebut sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola.

Secara keseluruhan, penerapan tata kelola perusahaan pada 2025 mencerminkan proses pendewasaan WIKA Beton sebagai entitas bisnis yang semakin menekankan

position, identify disclosure gaps, and set priorities for policy and program strengthening. The assessment results direct the focus of improvement towards strengthening the sustainability oversight structure under the Board of Commissioners, strengthening the link between material targets and executive performance mechanisms, increasing the consistency of third-party verification for key metrics and supply chains, and refining the climate-energy-water-waste roadmap so that operational targets can be measured and audited more disciplined by 2026.

In terms of risk management, the Company continues to implement an integrated Risk Management System across all work units. Risk identification, measurement, and mitigation are carried out systematically to ensure that every project and operational activity is in line with the Company's risk appetite. This prudent approach supports a more disciplined project selection policy, so that only projects with financial quality and controlled risks can be implemented.

Governance is also strengthened through the development of information technology systems and infrastructure. In 2025, the Board of Directors placed the strengthening of the IT roadmap as the main enabler of data-based governance. The development of management dashboards, integrated reporting systems, and data quality enhancement are aimed at supporting more objective, measurable, and auditable decision-making. Technology not only serves to improve efficiency, but also acts as a control tool that ensures transparency and accountability in all business processes.

In relation to remuneration and performance evaluation policies, the Company continues to develop an approach that balances financial and non-financial aspects. The performance of the Board of Directors is evaluated not only based on financial achievements, but also on contributions to strengthening governance, sustainability, operational efficiency, and organizational development. Although the quantitative measurement system for the direct link between variable remuneration and long-term performance is still under development, the Company is committed to continuing to refine this mechanism as part of improving the quality of governance.

Overall, the implementation of corporate governance in 2025 reflects WIKA Beton's maturation as a business entity that increasingly emphasizes quality decisions,

kualitas keputusan, disiplin risiko, dan integritas operasional. Dengan menjadikan tata kelola sebagai pilar strategis, Perseroan membangun fondasi yang kuat untuk mendukung transformasi bisnis, integrasi keberlanjutan, serta pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan di masa depan.

risk discipline, and operational integrity. By making governance a strategic pillar, the Company is building a strong foundation to support business transformation, sustainability integration, and healthy and sustainable growth in the future.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Pada tahun 2025, komposisi anggota Direksi tidak mengalami perubahan, sehingga susunan anggota Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE REASONS FOR THE CHANGES

In 2025, there will be no changes in the composition of the Board of Directors, so the composition of the Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk as of December 31, 2025 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Kuntjara	Direktur Utama President Director
Syailendra Ogan	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management
Agus Pramono	Direktur Operasi dan Supply Chain Management Director of Operations and Supply Chain Management:
Rija Judaswara	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Development
Verly Widiantoro	Direktur Teknik dan Produksi Director of Engineering and Production

APRESIASI DAN PENUTUP

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pemegang saham, Dewan Komisaris, Insan WIKA Beton, mitra usaha, serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan, dan kolaborasi yang berkesinambungan sepanjang tahun 2025. Di tengah dinamika industri yang menuntut kehati-hatian dan disiplin tinggi, kontribusi seluruh pihak menjadi faktor penentu dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan Perseroan.

Penghargaan khusus kami sampaikan kepada seluruh karyawan yang telah menunjukkan komitmen, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Dedikasi Insan WIKA Beton dalam memperkuat kualitas eksekusi, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjaga nilai-nilai tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan dan membangun kepercayaan pasar.

APPRECIATION AND CLOSING REMARKS

The Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk would like to express its highest appreciation and gratitude to the shareholders, Board of Commissioners, WIKA Beton employees, business partners, and all stakeholders for their trust, support, and continuous collaboration throughout 2025. Amidst the dynamic industry that demands caution and high discipline, the contribution of all parties has been a determining factor in maintaining the Company's resilience and sustainability.

We would like to extend our special appreciation to all employees who have demonstrated commitment, integrity, and professionalism in carrying out their duties. The dedication of WIKA Beton employees in strengthening the quality of execution, improving operational efficiency, and maintaining good governance values has become the main foundation in facing challenges and building market confidence.

Capaian yang diraih sepanjang tahun 2025 merupakan hasil dari sinergi yang solid antara kepemimpinan yang bertanggung jawab, manajemen risiko yang disiplin, serta implementasi strategi yang konsisten. Direksi meyakini bahwa fondasi yang telah dibangun melalui konsolidasi kualitas bisnis dan penguatan tata kelola akan menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa depan.

Dengan optimisme dan komitmen yang kuat, Direksi menegaskan kesiapan Perseroan untuk melangkah ke tahap berikutnya, menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan, serta memperkokoh posisi PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagai penyedia solusi beton yang andal dan berdaya saing.

The achievements made throughout 2025 are the result of solid synergy between responsible leadership, disciplined risk management, and consistent strategy implementation. The Board of Directors believes that the foundation that has been built through business quality consolidation and governance strengthening will be an important asset to drive healthier and more sustainable growth in the future.

With optimism and strong commitment, the Board of Directors affirms the Company's readiness to move to the next stage, create sustainable added value, and strengthen PT Wijaya Karya Beton Tbk's position as a reliable and competitive concrete solution provider.

Atas Nama Direksi
Board of Directors



Kuntjara
Direktur Utama
President Director



Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

"Disiplin eksekusi bisnis yang kuat dan strategi keberlanjutan yang terarah, kami memimpin upaya Perseroan untuk menjaga kepemimpinan pasar beton pracetak. Integrasi ESG adalah komitmen dan fondasi kami untuk ketahanan usaha jangka panjang.

With strong business execution discipline and a focused sustainability strategy, we lead the Company's efforts to maintain its leadership in the precast concrete market. ESG integration is our commitment and foundation for long-term business resilience.



Wilan Oktavian

Komisaris Utama
President Commissioner



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Shareholders and Stakeholders,

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris menyampaikan pandangan atas perjalanan PT Wijaya Karya Beton Tbk sepanjang tahun 2025 yang ditandai oleh penguatan disiplin eksekusi bisnis dan peneguhan arah keberlanjutan usaha. Perseroan memfokuskan langkahnya pada upaya menjaga kepemimpinan pasar beton pracetak melalui pengelolaan utilisasi pabrik yang lebih terukur, penerapan efisiensi operasi berbasis *minimum operation*, serta penataan organisasi dan portofolio produk agar semakin adaptif terhadap kebutuhan proyek.

By the grace of Almighty God, the Board of Commissioners presents its views on the journey of PT Wijaya Karya Beton Tbk throughout 2025, which was marked by stronger discipline in business execution and a reaffirmed commitment to sustainable growth. The Company focused on maintaining its leadership in the precast concrete market through more measured plant utilization management, implementation of minimum-operation-based efficiency, and the restructuring of its organization and product portfolio to better adapt to project needs.

Pada saat yang sama, ESG telah diposisikan sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan bisnis, yang mempengaruhi investasi, pengembangan produk, dan manajemen risiko, dengan tetap menjaga keseimbangan antara transparansi pelaporan dan perlindungan informasi strategis Perseroan.

At the same time, ESG has been positioned as a crucial factor in business decision-making, influencing investment, product development, and risk management, while maintaining a balance between transparent reporting and protecting its strategic information.

Arah penguatan tema laporan juga menegaskan komitmen Perseroan dalam mengembangkan solusi bisnis berkelanjutan, termasuk percepatan dekarbonisasi berbasis material dan energi, serta kesiapan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pengungkapan sesuai praktik terbaik, termasuk penguatan aspek ACGS pada periode mendatang.

The strengthened reporting theme also reflects the Company's commitment to developing sustainable business solutions, including accelerated decarbonization through material and energy initiatives, as well as readiness to enhance governance quality and disclosure in line with best practices, including the strengthening of ACGS aspects in the coming period.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN PERUSAHAAN

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN MANAGING THE COMPANY

Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2025 Direksi telah menjalankan pengelolaan Perseroan secara adaptif, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan nilai jangka panjang. Di tengah dinamika industri yang semakin selektif, Direksi mampu menjaga arah pengelolaan Perseroan melalui penguatan disiplin eksekusi, optimalisasi portofolio usaha, peningkatan efisiensi operasional, serta pengelolaan utilisasi pabrik yang lebih terarah.

The Board of Commissioners assesses that throughout 2025, the Board of Directors has managed the Company in an adaptive, measured, and long-term value-oriented manner. Amid increasingly selective industry dynamics, the Board of Directors has been able to maintain the Company's management direction by strengthening execution discipline, optimizing the business portfolio, improving operational efficiency, and implementing more targeted factory utilization management.

Pendekatan tersebut mencerminkan fokus Direksi pada penguatan kualitas bisnis, bukan semata-mata pada pertumbuhan volume, sehingga Perseroan

This approach reflects the Board of Directors' focus on strengthening business quality, rather than merely pursuing volume growth, ensuring

tetap memiliki fondasi yang sehat untuk menjaga daya saing. Dewan Komisaris juga mencermati bahwa Direksi telah menempatkan manajemen risiko dan tata kelola sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan, termasuk melalui penguatan selektivitas proyek, efisiensi biaya, dan pengendalian kinerja berbasis data.

the Company maintains a sound foundation to sustain its competitiveness. The Board of Commissioners also notes that the Board of Directors has integrated risk management and corporate governance as critical components of the decision-making process, including through enhanced project selectivity, cost efficiency, and data-driven performance control.

Pada saat yang sama, integrasi aspek keberlanjutan ke dalam pengembangan produk, proses operasional, dan kualitas pengungkapan menunjukkan bahwa Direksi telah mengarahkan Perseroan pada pertumbuhan yang semakin bertanggung jawab, adaptif, dan prospektif. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris memandang kinerja Direksi dalam pengelolaan Perseroan selama tahun 2025 berada pada arah yang positif dan menjadi landasan yang baik bagi penguatan kinerja pada periode berikutnya.

At the same time, the integration of sustainability aspects into product development, operational processes, and the quality of disclosures demonstrates that the Board of Directors has steered the Company toward growth that is increasingly responsible, adaptive, and forward-looking. Overall, the Board of Commissioners views the Board of Directors' performance in managing the Company during 2025 as moving in a positive direction and serving as a solid foundation for strengthening performance in the coming period.

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI

SUPERVISION BY THE BOARD OF COMMISSIONERS OVER THE FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S STRATEGY BY THE BOARD OF DIRECTORS

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara aktif untuk memastikan bahwa strategi yang dirumuskan dan diimplementasikan Direksi tetap selaras dengan arah penguatan kualitas bisnis, ketahanan operasional, dan keberlanjutan usaha Perseroan.

The Board of Commissioners actively performs its supervisory functions to ensure that the strategies formulated and implemented by the Board of Directors remain aligned with the Company's objectives of enhancing business quality, operational resilience, and business sustainability.

Sepanjang tahun 2025, pengawasan Dewan Komisaris difokuskan pada konsistensi Direksi dalam menjaga utilisasi pabrik, meningkatkan efisiensi operasi, memperkuat selektivitas proyek, serta mengarahkan portofolio usaha pada peluang yang lebih adaptif dan bernilai tambah. Dewan Komisaris juga memberikan perhatian pada penguatan transformasi melalui manajemen risiko yang lebih terintegrasi, pengendalian kinerja berbasis data, serta pengembangan enabler strategis yang mendukung efektivitas operasional dan kualitas pengambilan keputusan.

Throughout 2025, the Board of Commissioners' oversight will focus on the Board of Directors' consistency in maintaining plant utilization, improving operational efficiency, strengthening project selectivity, and steering the business portfolio toward more adaptive and value-added opportunities. The Board of Commissioners also paid attention to strengthening transformation through more integrated risk management, data-driven performance control, and the development of strategic enablers that support operational effectiveness and the quality of decision-making.

Dalam aspek keberlanjutan, Dewan Komisaris mendorong agar integrasi ESG tercermin secara nyata dalam pengembangan produk, proses bisnis, dan tata kelola pengungkapan, sehingga memberikan nilai tambah bagi daya saing Perseroan sekaligus memperkuat kredibilitasnya di mata para pemangku kepentingan. Melalui pengawasan tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa strategi Perseroan telah berada pada arah yang tepat untuk menjaga resiliensi usaha dan membuka ruang pertumbuhan yang lebih sehat pada periode mendatang.

In terms of sustainability, the Board of Commissioners encourages the tangible integration of ESG into product development, business processes, and disclosure governance, thereby adding value to the Company's competitiveness while strengthening its credibility in the eyes of stakeholders. Through this oversight, the Board of Commissioners believes that the Company's strategy is on the right track to maintain business resilience and pave the way for healthier growth in the coming period.

No.	Topik Topic	Rekomendasi dan Tindakan Dewan Komisaris dalam Pengawasan Strategi Direksi 2025 Recommendations and Actions of the Board of Commissioners in Supervising the Board of Directors' Strategy for 2025
1	Pengawasan terhadap RKAP dan RJPP Supervision of the Company's Work Plan and Long-Term Plan	1. Menetapkan kebijakan pengawasan atas pelaksanaan RKAP/RJPP. 2. Menyusun rencana evaluasi kesesuaian program kerja dan anggaran. 3. Menyampaikan evaluasi dalam laporan pengawasan tahunan kepada RUPS. 1. Establish oversight policies for the Company's Work Plan and Long-Term Plan (RKAP/RJPP) implementation. 2. Develop evaluation plans to assess the alignment between work programs and budgets. 3. Submit the evaluation results as part of the annual supervisory report to the GMS.
2	Evaluasi Kinerja Direksi Evaluation of the Board of Directors' Performance	1. Melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individual berdasarkan KPI. 2. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Pemegang Saham melalui RUPS 1. Assess the performance of the Board of Directors, both collectively and individually, based on Key Performance Indicators (KPIs). 2. Report the evaluation results to the Shareholders through the GMS.
3	Tata Kelola Remunerasi dan Nominasi Governance of remuneration and Nomination	1. Menetapkan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi Direksi dan Komisaris. 2. Menyusun kriteria seleksi calon Direksi/Dewan Komisaris. 3. Mengevaluasi kesesuaian antara remunerasi dengan kinerja aktual. 1. Determine the structure, policies, and amount of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners. 2. Establish selection criteria for candidates for the Board of Directors and the Board of Commissioners. 3. Evaluate the alignment between actual performance and remuneration.
4	Pengawasan terhadap Kepatuhan Perusahaan Oversight of Corporate Compliance	1. Menelaah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. 2. Menilai komitmen perusahaan terhadap kesepakatan eksternal. 3. Menyampaikan hasil telaah kepada RUPS dalam laporan tahunan. 1. Review compliance with applicable laws, regulations, and the Company's Articles of Association. 2. Assess the Company's commitment to external agreements. 3. Report the findings to the GMS through the annual report.
5	Pengawasan atas Pengadaan Barang dan Jasa Supervision of Goods and Services Procurement	1. Menetapkan kebijakan pengawasan atas sistem pengadaan. 2. Memberikan nasihat strategis terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. 3. Menyusun rencana pembahasan pengadaan dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris. 1. Establish oversight policies for the procurement system. 2. Provide strategic advice on the implementation of procurement policies. 3. Develop discussion plans related to procurement as part of the Annual Work Plan of the Board of Commissioners.
6	Sistem Manajemen Risiko Risk Management System	1. Menyusun rencana pemantauan manajemen risiko. 2. Mengevaluasi efektivitas kebijakan mitigasi. 3. Memberikan masukan atas kebijakan risiko yang ditetapkan oleh Direksi. 1. Prepare a risk management monitoring plan. 2. Evaluate the effectiveness of mitigation policies. 3. Provide input on the risk policies formulated by the Board of Directors.
7	Efektivitas *Whistleblowing* dan Audit Effectiveness of the Whistleblowing and Audit	1. Memastikan pengelolaan sistem pengaduan berjalan efektif. 2. Mengevaluasi proses audit eksternal dan internal. 3. Memastikan kesiapan media dan personel dalam menindaklanjuti laporan pengaduan. 1. Ensure the complaint handling system is managed effectively. 2. Evaluate internal and external audit processes. 3. Ensure readiness of systems and personnel to follow up on complaint reports.
8	Penetapan Auditor Eksternal Appointment of External Auditors	1. Menyusun usulan Kantor Akuntan Publik yang akan diajukan ke RUPS. 2. Menilai besaran honorarium dan independensi auditor. 3. Mengacu pada rekomendasi Komite Audit untuk menetapkan auditor eksternal. 1. Prepare recommendations for the Public Accounting Firm to be proposed to the GMS. 2. Assess the appropriateness of the auditor's fees and ensure their independence. 3. Refer to the Audit Committee's recommendations when appointing the external auditor.
9	Sistem Informasi dan Teknologi Information and Technology Systems	1. Menetapkan kebijakan sistem informasi perusahaan. 2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan sistem tersebut. 3. Memberikan arahan untuk peningkatan sistem berbasis teknologi. 1. Establish the Company's information system policy. 2. Evaluate the effectiveness of the system's implementation. 3. Guide the improvement of technology-based systems.
10	Kinerja Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan Performance of Subsidiaries and Joint Ventures	1. Memberikan penilaian atas arah bisnis anak perusahaan dan perusahaan patungan. 2. Mengevaluasi proses pengangkatan Direksi/Dewan Komisaris anak perusahaan. 1. Assess the strategic direction of subsidiaries and joint ventures. 2. Evaluate the appointment process for Directors and Commissioners of subsidiaries.
11	Strategi dan Manajemen Bisnis Business Strategy and Management	1. Memberikan masukan strategis atas arah bisnis jangka panjang. 2. Mengawasi konsistensi strategi ekspansi, efisiensi, dan daya saing. 3. Memastikan kesinambungan visi dan misi Perseroan. 1. Provide strategic input on the Company's long-term business direction. 2. Oversee the consistency of strategies related to expansion, efficiency, and competitiveness. 3. Ensure alignment with the Company's vision and mission.
12	Manajemen Risiko (verifikasi tambahan) Risk Management (additional verification)	1. Menelaah profil risiko perusahaan secara berkala. 2. Memastikan sistem manajemen risiko terintegrasi dengan pengambilan keputusan strategis. 3. Menyesuaikan kebijakan risiko terhadap dinamika sektor industri. 1. Review the Company's risk profile regularly. 2. Ensure the risk management system is integrated into strategic decision-making. 3. Adapt risk policies in response to changes within the industry sector.
13	Audit dan Kepatuhan (verifikasi tambahan) Audit and Compliance (additional verification)	1. Mengawasi pelaksanaan sistem audit internal dan eksternal. 2. Mengevaluasi pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi. 3. Memastikan tindakan korektif atas temuan audit dilaksanakan dengan bertanggung jawab. 1. Monitor the implementation of both internal and external audit systems. 2. Evaluate financial reporting and compliance with applicable regulations. 3. Ensure timely and accountable corrective actions are taken on audit findings.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha Perseroan sebagaimana disusun oleh Direksi untuk periode mendatang tetap berada pada arah yang positif, dengan bertumpu pada penguatan posisi WIKA Beton sebagai pemimpin pasar beton pracetak di Indonesia. Keunggulan Perseroan yang berasal dari sebaran pabrik yang luas, kapasitas produksi yang memadai, serta portofolio produk yang beragam dipandang sebagai fondasi utama dalam menjaga daya saing di tengah dinamika industri konstruksi yang semakin selektif.

Dewan Komisaris memandang bahwa strategi Direksi dalam menjaga utilisasi pabrik melalui penerapan minimum operation, konsolidasi manajemen pabrik, serta penyesuaian organisasi merupakan langkah yang tepat untuk menekan inefisiensi dan menjaga produktivitas aset. Pendekatan ini tidak hanya mendukung efisiensi biaya, tetapi juga memastikan bahwa kapasitas terpasang Perseroan tetap memberikan kontribusi optimal terhadap kinerja keuangan, meskipun terjadi fluktuasi permintaan proyek.

Dalam aspek komersial, Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha Perseroan semakin diperkuat melalui pengembangan diferensiasi produk dan segmen berbasis teknologi serta kebutuhan proyek yang bersifat spesifik. Strategi ini membuka peluang pada pasar niche yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, sekaligus memperkuat kualitas pendapatan melalui proyek-proyek yang menuntut keunggulan teknis dan keandalan solusi.

Dewan Komisaris juga mencermati arah penguatan green mission Perseroan sebagai faktor penting dalam menjaga relevansi jangka panjang. Pengembangan strategi ESG yang terintegrasi dengan pengendalian biaya menunjukkan upaya Direksi untuk memastikan bahwa inisiatif keberlanjutan tetap memberikan manfaat nyata tanpa menimbulkan beban biaya yang tidak proporsional.

Prospek usaha Perseroan semakin diperkuat oleh kepercayaan pasar yang tercermin dari kinerja historis serta komunikasi kinerja dan posisi bisnis Perseroan melalui berbagai sumber eksternal, termasuk ringkasan eksekutif yang disampaikan kepada pemangku kepentingan. Dewan Komisaris meyakini bahwa dengan fondasi tersebut, Perseroan memiliki peluang yang kuat untuk mempertahankan kepemimpinan pasar dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

OUTLOOK ON THE COMPANY'S BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners considers that the Company's business outlook, as prepared by the Board of Directors for the upcoming period, remains positive. This outlook is supported by the strengthening of WIKA Beton's position as the market leader in the precast concrete industry in Indonesia. The Company's advantages, its wide plant network, adequate production capacity, and diverse product portfolio, are viewed as key foundations for maintaining competitiveness amid increasingly selective conditions in the construction industry.

We believe that the Board of Directors' strategy to maintain plant utilization through the implementation of minimum operation principles, plant management consolidation, and organizational adjustments is appropriate to reduce inefficiencies and maintain asset productivity. This approach not only supports cost efficiency but also ensures that the Company's installed capacity continues to contribute optimally to financial performance, despite fluctuations in project demand.

From a commercial perspective, we believe that the Company's business prospects are further strengthened by the development of product and segment differentiation based on technology and specific project requirements. This strategy opens opportunities in niche markets with higher added value, while enhancing revenue quality through projects that require technical excellence and reliable solutions.

We also observe the strengthening of the Company's green mission as an important factor in maintaining long-term relevance. The development of an ESG strategy that is integrated with cost control demonstrates the Board of Directors' effort to ensure that sustainability initiatives deliver tangible benefits without creating disproportionate cost burdens.

The Company's business prospects are further supported by market confidence, as reflected in its historical performance and the communication of its performance and business position through various external channels, including executive summaries presented to stakeholders. We believe that, with this foundation, the Company has strong potential to maintain market leadership and achieve sustainable growth.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris menempatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) sebagai pilar utama dalam menjaga keberlanjutan usaha Perseroan. Sepanjang tahun 2025, pengawasan Dewan Komisaris diarahkan untuk memastikan bahwa tata kelola tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan, tetapi juga sebagai fondasi pengambilan keputusan strategis yang berintegritas, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang. Dewan Komisaris memandang bahwa kualitas penerapan GCG menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat daya tahan Perseroan di tengah dinamika industri konstruksi.

Dalam konteks pelaporan, Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan telah berupaya menjaga keseimbangan antara transparansi informasi dan perlindungan terhadap informasi strategis yang bersifat sensitif secara kompetitif. Prinsip keterbukaan tetap menjadi landasan utama, namun disertai kehati-hatian agar informasi yang dipublikasikan tidak membuka aspek "dapur strategi" yang berpotensi melemahkan posisi Perseroan di pasar. Pendekatan ini dipandang penting agar laporan Perseroan tetap informatif, akuntabel, dan kredibel, tanpa mengorbankan kepentingan bisnis jangka panjang.

Dewan Komisaris juga mencermati adanya penguatan tata kelola ESG melalui pendekatan yang lebih sistematis, termasuk pelaksanaan *gap analysis* dan *benchmarking* terhadap praktik terbaik serta penilaian pihak ketiga. Upaya ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi ruang perbaikan kebijakan, prosedur, dan struktur pengelolaan ESG agar kualitas penerapan keberlanjutan Perseroan semakin meningkat dan sejalan dengan standar nasional maupun internasional. Dewan Komisaris memandang bahwa langkah ini merupakan bagian dari proses pendewasaan tata kelola ESG agar lebih terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai bagian dari penguatan *check and balance*, Dewan Komisaris menilai positif penguatan struktur dan enabler ESG, termasuk pengembangan mekanisme pengawasan keberlanjutan yang melibatkan fungsi pengawasan di tingkat Dewan Komisaris. Keberadaan struktur ini dipandang penting untuk memastikan bahwa agenda ESG tidak hanya menjadi domain operasional Direksi, tetapi juga mendapatkan

OUTLOOK ON IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Commissioners places the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as a key pillar in maintaining the Company's business sustainability. Throughout 2025, our oversight was directed at ensuring that governance functions not only as a compliance instrument, but also as a foundation for strategic decision-making that is conducted with integrity, accountability, and a long-term perspective. We believe that the quality of GCG implementation is a critical factor in maintaining the trust of shareholders and stakeholders, while strengthening the Company's resilience amid the dynamics of the construction industry.

In terms of reporting, we note that the Company has sought to maintain a balance between transparency and the protection of competitively sensitive strategic information. Transparency remains a key principle, supported by prudent judgment to ensure that disclosed information does not reveal strategic details that could weaken the Company's market position. This approach is considered important to ensure that the Company's reports remain informative, accountable, and credible, without compromising its long-term business interests.

We also observe the strengthening of ESG governance through a more systematic approach, including the implementation of gap analysis and benchmarking against best practices and third-party assessments. These efforts are intended to identify areas for improvement in ESG policies, procedures, and governance structures, so that the quality of the Company's sustainability practices continues to improve and aligns with national and international standards. We view this step as part of the maturation process of ESG governance, making it more measurable, consistent, and accountable.

As part of strengthening checks and balances, we positively acknowledge the enhancement of ESG structures and enablers, including the development of sustainability oversight mechanisms involving supervisory functions at the Board of Commissioners level. This structure is considered important to ensure that the ESG agenda is not solely the operational domain of the Board of Directors, but also

pengawasan strategis yang memadai dari sisi tata kelola. Dengan demikian, kebijakan keberlanjutan dapat berjalan seimbang antara kepentingan bisnis, kepatuhan regulasi, dan tanggung jawab terhadap lingkungan serta sosial.

receives adequate strategic oversight from a governance perspective. In this way, sustainability policies can be implemented in balance with business interests, regulatory compliance, and environmental and social responsibilities.

Dewan Komisaris juga mengaitkan kualitas penerapan GCG dengan pengakuan eksternal yang diterima Perseroan. Pencapaian penghargaan tata kelola serta keberhasilan dalam mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016, sebagaimana disampaikan dalam Ringkasan Eksekutif Perseroan, menjadi indikator bahwa praktik tata kelola yang dijalankan telah memperoleh pengakuan dari pihak independen. Apabila dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, capaian tersebut dapat tercermin, misalnya, dalam perolehan skor asesmen GCG sebesar 97,59 atau peringkat tata kelola pada kategori "*very good*". Meskipun demikian, Dewan Komisaris menekankan bahwa pengakuan eksternal bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk terus mendorong perbaikan berkelanjutan.

We also link the quality of GCG implementation with the external recognition received by the Company. The achievement of governance awards and the successful maintenance of the Anti-Bribery Management System certification based on ISO 37001:2016, as stated in the Company's Executive Summary, indicate that the governance practices implemented have received independent recognition. In quantitative terms, these achievements may be reflected, for example, in a GCG assessment score of 97.59 or a governance rating in the "very good" category. Nevertheless, the Board of Commissioners emphasizes that external recognition is not the ultimate objective, but rather a means to continuously drive improvement.

Dalam aspek tata kelola pelaporan keberlanjutan, Dewan Komisaris mendorong agar *roadmap sustainability* Perseroan semakin disusun secara terstruktur, dengan target per tahun, indikator capaian, serta narasi keberhasilan yang jelas. Penyusunan roadmap ini diharapkan berbasis kinerja nyata, namun tetap menjaga batasan informasi agar tidak mengungkap detail strategis yang bersifat kompetitif. Pendekatan ini akan meningkatkan kualitas *disclosure* ESG sekaligus memperkuat kredibilitas laporan kepada para pemangku kepentingan.

In terms of sustainability reporting governance, we encourage the Company to develop a more structured sustainability roadmap, including annual targets, performance indicators, and clear achievement narratives. This roadmap is expected to be based on actual performance while maintaining appropriate information boundaries to avoid disclosing competitively sensitive strategic details. This approach will enhance the quality of ESG disclosure and strengthen the credibility of reports to stakeholders.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan tata kelola perusahaan di WIKA Beton sepanjang tahun 2025 telah menunjukkan arah yang semakin matang. Upaya menjaga keseimbangan antara transparansi dan perlindungan informasi strategis, penguatan struktur ESG, peningkatan kualitas pelaporan, serta pengakuan eksternal atas praktik tata kelola menjadi fondasi yang kuat bagi Perseroan dalam membangun keberlanjutan usaha. Dewan Komisaris meyakini bahwa konsistensi dalam penguatan GCG akan terus mendukung pertumbuhan yang sehat, berintegritas, dan berdaya saing dalam jangka panjang.

Overall, we believe that the implementation of corporate governance at WIKA Beton throughout 2025 has shown increasing maturity. Efforts to maintain a balance between transparency and the protection of strategic information, strengthen ESG structures, improve reporting quality, and obtain external recognition for governance practices provide a strong foundation for the Company's business sustainability. We are confident that consistent strengthening of GCG will continue to support healthy, ethical, and competitive long-term growth.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS) DAN PERANAN DEWAN KOMISARIS DALAM WBS

OUTLOOK ON IMPLEMENTATION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM AND BOARD OF COMMISSIONERS ROLE'S IN WBS

Dewan Komisaris memandang bahwa *Whistleblowing System* (WBS) merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Perseroan. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris memastikan agar mekanisme WBS tetap berfungsi secara

The Board of Commissioners considers the Whistleblowing System (WBS) to be an important instrument in maintaining the integrity, transparency, and accountability of the Company's management. Throughout 2025, we ensured

efektif sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran, baik yang berkaitan dengan penyimpangan kebijakan, pelanggaran etika, maupun potensi fraud di lingkungan Perseroan. Sistem ini diposisikan tidak hanya sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai wujud komitmen Perseroan dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas.

that the WBS mechanism functioned effectively as a channel for reporting alleged violations, including policy deviations, ethical breaches, and potential fraud within the Company. The system is positioned not only as a control tool but also as a reflection of the Company's commitment to fostering a culture of integrity.

Dewan Komisaris menjalankan perannya dengan memastikan bahwa setiap kanal pelaporan WBS dapat diakses secara memadai, dikelola secara profesional, serta ditindaklanjuti secara objektif dan terlacak. Proses pengelolaan laporan dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur, sehingga setiap laporan yang masuk dapat diverifikasi, dianalisis, dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris menekankan pentingnya dokumentasi dan jejak audit yang jelas sebagai bagian dari akuntabilitas sistem.

We carried out our role by ensuring that WBS reporting channels are adequately accessible, professionally managed, and followed up in an objective and traceable manner. Reports are handled through a structured process, allowing each submission to be verified, analyzed, and resolved in accordance with applicable regulations. We emphasize the importance of proper documentation and a clear audit trail as part of system accountability.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit serta Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang berperan dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, serta integritas proses audit, termasuk yang berkaitan dengan WBS. Sinergi antara Dewan Komisaris, Komite Audit, dan SPI memastikan bahwa sistem pelaporan pelanggaran terintegrasi dengan kerangka pengendalian internal Perseroan secara menyeluruh.

In carrying out its supervisory function, we are supported by the Audit Committee and the Internal Audit Unit (SPI), which play a role in evaluating the effectiveness of internal controls, regulatory compliance, and the integrity of audit processes, including those related to the Whistleblowing System (WBS). The synergy among the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Internal Audit Unit ensures that the violation reporting system is fully integrated into the Company's overall internal control framework.

Dewan Komisaris juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pelapor serta kerahasiaan proses penanganan laporan. Jaminan kerahasiaan dan perlindungan dari potensi tindakan balasan dipandang sebagai faktor kunci untuk menjaga kepercayaan terhadap WBS. Dengan adanya perlindungan ini, Dewan Komisaris berharap seluruh insan Perseroan maupun pemangku kepentingan eksternal tidak ragu untuk memanfaatkan WBS sebagai sarana menjaga integritas dan kredibilitas Perseroan.

We also emphasize the importance of protecting whistleblowers and maintaining the confidentiality of the reporting process. Assurance of confidentiality and protection against potential retaliation are considered key factors in maintaining trust in the WBS. With such protection in place, the Board expects all employees and external stakeholders to feel confident in using the WBS as a means of safeguarding the Company's integrity and credibility.

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris melaksanakan peran pemberian nasihat dan arahan strategis kepada Direksi secara berkesinambungan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian Perseroan. Pemberian nasihat dilakukan terutama melalui rapat internal Dewan Komisaris serta rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, apabila diperlukan, Dewan Komisaris juga menyampaikan rekomendasi secara tertulis untuk menegaskan arahan strategis yang memerlukan tindak lanjut khusus dan terdokumentasi secara formal.

FREQUENCY AND ADVICE GIVEN TO THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2025, the Board of Commissioners continuously carried out its advisory and strategic guidance role to the Board of Directors as part of its supervisory and control functions. Advice was primarily provided through internal meetings of the Board of Commissioners and joint meetings with the Board of Directors. When necessary, we also issued written recommendations to formalize strategic directions that required specific follow-up and proper documentation.

Dalam forum-forum tersebut, Dewan Komisaris memberikan masukan yang berfokus pada isu-isu strategis Perseroan, antara lain kinerja operasional dan keuangan, pengelolaan risiko, keberlanjutan usaha, serta konsistensi implementasi strategi yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris juga memberikan perhatian terhadap arah penguatan ESG, kualitas pelaporan, serta penetapan target yang realistis dan terukur, sehingga strategi yang dijalankan Direksi tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan kepentingan jangka panjang Perseroan.

In these forums, we provided input on key strategic matters, including operational and financial performance, risk management, business sustainability, and the consistent implementation of established strategies. We also paid close attention to the strengthening of ESG initiatives, the quality of reporting, and the setting of realistic and measurable targets, to ensure that the strategies implemented by the Board of Directors remain aligned with prudence, good governance principles, and the Company's long-term interests.

Nasihat dan arahan Dewan Komisaris tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga proaktif, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas pengambilan keputusan, disiplin eksekusi, serta penguatan mekanisme pengendalian internal. Melalui rapat gabungan, Dewan Komisaris memperoleh pemahaman langsung mengenai tantangan operasional yang dihadapi Direksi, sehingga rekomendasi yang diberikan dapat bersifat kontekstual dan aplikatif.

The advice and guidance provided by the Board of Commissioners were not only evaluative but also proactive, particularly in encouraging improvements in decision-making quality, execution discipline, and the strengthening of internal control mechanisms. Through joint meetings, we gained direct insight into the operational challenges faced by the Board of Directors, enabling the recommendations provided to be contextual and practical.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menyelenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat internal dan 12 (dua belas) kali rapat gabungan dengan Direksi. Frekuensi, agenda, serta substansi rapat tersebut mengacu pada kalender kerja Dewan Komisaris dan dituangkan secara lengkap dalam notulen rapat yang menjadi dokumen resmi Perseroan. Notulen ini berfungsi sebagai dasar pemantauan tindak lanjut atas setiap nasihat dan rekomendasi yang diberikan.

Throughout 2025, we held 12 (twelve) internal meetings and 12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors. The frequency, agenda, and substance of these meetings were based on the Board of Commissioners' annual work plan and were fully recorded in official meeting minutes as part of the Company's formal documentation. These minutes serve as the basis for monitoring the follow-up of all advice and recommendations provided.

Seluruh arahan strategis yang dihasilkan dari rapat-rapat tersebut kemudian didokumentasikan melalui risalah rapat atau Surat Keputusan Dewan Komisaris apabila diperlukan. Pendekatan ini memastikan bahwa proses pemberian nasihat berjalan secara sistematis, akuntabel, serta dapat ditelusuri, sehingga mendukung efektivitas pengawasan dan keberlanjutan pengelolaan Perseroan.

All strategic directions resulting from these meetings were documented in the meeting resolutions or, when necessary, in formal Decrees of the Board of Commissioners. This approach ensures that the advisory process is conducted in a systematic, accountable, and traceable manner, thereby supporting effective supervision and the sustainable management of the Company.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE-KOMITE DALAM MENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, komite-komite di bawah Dewan Komisaris memberikan dukungan yang memadai terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan melalui pembahasan yang lebih terstruktur, penyampaian risalah dan rekomendasi, serta penelaahan atas isu-isu yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Dukungan tersebut memperkuat kualitas pengawasan dan membantu menjaga agar pengelolaan Perseroan tetap berjalan dalam koridor kehati-hatian, kepatuhan, dan tata kelola yang baik.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES IN SUPPORTING THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2025, the committees under the Board of Commissioners provided adequate support for the performance of oversight functions through more structured discussions, the submission of minutes and recommendations, and the review of issues requiring the Board of Commissioners' attention. This support strengthened the quality of oversight and helped ensure that the Company's management remained within the parameters of prudence, compliance, and good governance.

Peran Komite Audit tercermin dalam dukungannya terhadap pengawasan atas keandalan laporan keuangan, efektivitas proses audit, pengendalian internal, serta kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang berlaku. Melalui rapat berkala, pembahasan hasil audit, serta penyampaian risalah dan masukan kepada Dewan Komisaris, komite ini membantu memperdalam proses penelaahan atas aspek-aspek yang berpengaruh terhadap integritas pelaporan dan kualitas pengelolaan Perseroan.

The Audit Committee's role is reflected in its support for oversight of the reliability of financial statements, the effectiveness of the audit process, internal controls, and the Company's compliance with applicable regulations. Through regular meetings, discussions of audit results, and the submission of minutes and feedback to the Board of Commissioners, this committee helps deepen the review process of aspects that affect the integrity of reporting and the quality of the Company's management.

Kontribusi Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko tampak pada dukungannya terhadap pembahasan mengenai nominasi, remunerasi, evaluasi kinerja, dan pemantauan risiko secara lebih terintegrasi. Penyesuaian nomenklatur dan susunan komite pada tahun berjalan memberi landasan yang lebih fokus bagi pelaksanaan fungsi tersebut, sehingga pertimbangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris menjadi semakin relevan dalam menjaga keselarasan antara kebutuhan organisasi, prinsip kehati-hatian, dan arah pengelolaan risiko Perseroan.

The contributions of the Nomination, Compensation, and Risk Oversight Committee are evident in its support for a more integrated approach to discussions regarding nominations, compensation, performance evaluations, and risk oversight. Adjustments to the committee's nomenclature and composition during the current year provide a more focused foundation for the execution of these functions, ensuring that the recommendations presented to the Board of Commissioners are increasingly relevant in maintaining alignment between the organization's needs, the principle of prudence, and the Company's risk management direction.

Penguatan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi dan Good Corporate Governance juga didukung oleh peran Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance, yang pada tahun 2025 dibentuk melalui penyesuaian nomenklatur untuk memperjelas fokus pengawasan di bidang tersebut. Melalui evaluasi berkala, pemberian masukan profesional dan independen, serta monitoring atas implementasi tata kelola, etika perusahaan, dan tindak lanjut rekomendasi, komite ini memberikan dasar pertimbangan yang lebih memadai bagi Dewan Komisaris dalam mendorong penguatan tata kelola secara berkelanjutan di lingkungan Perseroan dan entitas anak.

Strengthened oversight of the implementation of integrated governance and Good Corporate Governance is also supported by the role of the Integrated Governance and Good Corporate Governance Committee, which was established in 2025 through a nomenclature adjustment to clarify the focus of oversight in this area. Through periodic evaluations, the provision of professional and independent input, and monitoring of the implementation of governance, corporate ethics, and follow-up on recommendations, this committee provides a more adequate basis for the Board of Commissioners to promote the continuous strengthening of governance within the Company and its subsidiaries.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 03 tanggal 2 Juni 2025, Susunan anggota Dewan Komisaris pada tahun 2025 mengalami 1 (satu) kali perubahan.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE REASONS FOR THE CHANGES

Based on the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 03 dated June 2, 2025, the composition of the Board of Commissioners in 2025 changed once.

Adapun komposisi Dewan Komisaris sebelum terjadi perubahan adalah sebagai berikut.

The composition of the Board of Commissioners before the change was as follows.

Sebelum Perubahan
Before Changes

Nama Name	Jabatan Position
Eko Sujiyanto	Komisaris Utama President Commissioner
R. Permadi Mulajaya	Komisaris Commissioner
Miftachul Munir	Komisaris Commissioner
Iswandi Imran	Komisaris Independen Independent Commissioner
Nita Prihutaminingrum	Komisaris Independen Independent Commissioner

Komposisi anggota Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk per 31 Desember 2025 setelah terjadi perubahan pada 2 Juni 2025 adalah sebagai berikut.

The composition of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Beton Tbk as of December 31, 2025, following the change on June 2, 2025, is as follows.

Setelah Perubahan
After Changes

Nama Name	Jabatan Position
Wilan Oktavian	Komisaris Utama President Commissioner
Tjia Marwan	Komisaris Commissioner
Dwi Gawan Islandhi H. B.	Komisaris Independen Independent Commissioner

APRESIASI DAN PENUTUP

Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh karyawan atas komitmen yang konsisten dalam menjaga keberlanjutan kinerja Perseroan sepanjang tahun 2025. Disiplin dalam eksekusi strategi, penguatan efisiensi operasi, serta pengelolaan utilisasi pabrik yang lebih terukur menjadi bukti nyata dedikasi seluruh jajaran dalam memperkuat kualitas bisnis Perseroan di tengah dinamika industri konstruksi yang semakin menuntut kehati-hatian dan ketepatan pengelolaan.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi langkah Direksi dalam memperkuat integrasi ESG ke dalam proses bisnis dan manajemen risiko. Inisiatif percepatan dekarbonisasi melalui pendekatan berbasis material, energi, serta pengelolaan air dan limbah yang lebih berkelanjutan menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak diposisikan sebagai pelengkap, melainkan

APPRECIATION AND CLOSING

The Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Beton Tbk sincerely appreciate the Board of Directors and all employees for their consistent commitment to maintain the Company's performance throughout 2025. Discipline in strategy execution, strengthening operational efficiency, and more measured management of factory utilization are clear evidence of the dedication of all ranks in strengthening the quality of the Company's business amid the dynamics of the construction industry, which increasingly demands caution and precision in management.

We also appreciate the Board of Directors' steps in strengthening ESG integration into business processes and risk management. The initiative to accelerate decarbonization through a material-based approach, energy, and more sustainable water and waste management shows that sustainability is not positioned as a complement, but as

sebagai bagian dari fondasi pengambilan keputusan strategis Perseroan. Pendekatan ini menjadi penting dalam membangun daya saing jangka panjang yang bertanggung jawab dan adaptif terhadap tuntutan global.

part of the foundation for the Company's strategic decision-making. This approach is important in building long-term competitiveness that is responsible and adaptive to global demands.

Selain itu, Dewan Komisaris menekankan pentingnya konsistensi tata kelola pelaporan keberlanjutan melalui penyusunan *roadmap* yang lebih terstruktur, didukung oleh *roadmap* teknologi informasi, ukuran *maturity*, serta pemanfaatan *dashboard* keberlanjutan sebagai basis pembuktian program dan capaian kinerja. Penguatan sistem ini akan meningkatkan kualitas transparansi, akuntabilitas, serta kredibilitas laporan Perseroan kepada seluruh pemangku kepentingan.

In addition, we emphasized the importance of consistency in sustainability reporting governance through the development of a more structured roadmap, supported by an information technology roadmap, maturity measures, and the use of sustainability dashboards as a basis for program verification and performance achievement. Strengthening this system will improve the quality of transparency, accountability, and credibility of the Company's reports to all stakeholders.

Dewan Komisaris mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memberikan dukungan terhadap transformasi Perseroan menuju pertumbuhan yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan menjaga keseimbangan yang tepat antara keterbukaan informasi dan perlindungan atas informasi strategis yang bersifat sensitif secara kompetitif.

We invite all stakeholders to continue supporting the Company's transformation towards competitive and sustainable growth, while maintaining the right balance between information disclosure and the protection of sensitive competitive strategic information.

Sebagai penutup, Dewan Komisaris menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara objektif, independen, dan bertanggung jawab, guna memastikan bahwa Perseroan tetap adaptif, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan industri secara berkelanjutan.

As a closing remark, the Board of Commissioners reaffirms its commitment to continue performing its supervisory and advisory functions objectively, independently, and responsibly, to ensure that the Company remains adaptive, integrity-driven, and capable of addressing industry challenges sustainably.

Atas Nama Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Wilan Oktavian
Komisaris Utama
President Commissioner

3



2025 Laporan Tahunan
Annual Report



Profil Perusahaan
Company's Profile

Identitas Perseroan
Corporate Identity



Nama Perusahaan
Company Name

PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton)

Kode Saham I Stock Code

WTON

Tanggal Pendirian
Company Name

11 Maret 1997
March 11, 1997

Tanggal Beroperasi
Date of Operations

11 Maret 1997
March 11, 1997

Pencatatan Saham di Bursa Saham
Listing on Stock Exchange

Bursa Efek Indonesia, 8 April 2014
Indonesia Stock Exchange, April 8, 2014

Bidang Usaha
Line of Business

Bidang perdagangan dan industri beton, jasa konstruksi, dan bidang usaha lain yang terkait.
Concrete industry and trading, construction service, and other related businesses.

Kepemilikan Saham Tahun 2024
Share Ownership in 2024

- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk: 60,00%
- Koperasi Karya Mitra Satya (KKMS): 4,23%
  Karya Mitra Satya (KKMS) Cooperative: 4,23%
- Yayasan Wijaya Karya: 0.99%
  Wijaya Karya Foundation: 0.99%
- Publik: 34,78%
  Public: 34,78%

Dasar Hukum Pendirian Legal
Basis of Establishment

Akta No. 44 tanggal 11 Maret 1997, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta; yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.02-12776.HT.01.01.TH.97 tanggal 9 Desember 1997.
Deed No. 44 dated March 11, 1997, prepared in the presence of Achmad Bajumi, S.H., Notary, as substitute of Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta; legalized through the Decree of Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. 02-12776.HT.01.01.TH.97 dated December 9, 1997.

Pencatatan Saham di Bursa Saham
Listing on Stock Exchange

Bursa Efek Indonesia, 8 April 2014
Indonesia Stock Exchange, April 8, 2014

Modal Ditempatkan
Issued Capital

Rp871.546.660.000,-

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp2.668.000.000.000,-

Jumlah Karyawan Tahun 2025
Total Employees In 2025

905 Karyawan I Employees

Riwayat Singkat Perseroan
Company at a Glance

PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut Perseroan atau WIKA Beton) telah mengukir sejarah panjang di sektor industri beton dan jasa konstruksi tanah air. Cikal bakal perjalanan bisnis Perseroan dimulai sebagai Divisi Produk Beton di bawah naungan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Terbukti mampu bertumbuh dengan pencapaian dan kapasitas mumpuni, Divisi Produk Beton kemudian diubah statusnya menjadi entitas anak WIKA dengan nama PT Wijaya Karya Beton. Perubahan diresmikan melalui Akta No. 44 tanggal 11 Maret 1997. WIKA Beton pun terus meningkatkan kiprahnya, memperluas kapasitas operasional, hingga kini telah berkembang menjadi perusahaan dengan empat entitas anak, yaitu:

1. PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKA KOBE) diakuisisi pada tahun 2012.
2. PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKA Kraton) diakuisisi pada tahun 2013.
3. PT Citra Lautan Teduh (CLT) diakuisisi pada tahun 2014.
4. PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG) diakuisisi pada tahun 2022.

PT Wijaya Karya Beton Tbk ("the Company" or WIKA Beton) has carved a long history in the concrete industry and construction services sector in Indonesia. The forerunner of the Company's business journey began as the Concrete Products Division under PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Proven able to grow with achievements and qualified capacity, the Concrete Products Division was then changed its status to a subsidiary of WIKA with the name PT Wijaya Karya Beton. The change was made official through Deed No. 44 dated March 11, 1997. WIKA Beton continues to improve its work, expand operational capacity, until now it has developed into a company with four subsidiaries, namely:

1. PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKA KOBE) was acquired in 2012.
2. PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKA Kraton) was acquired in 2013.
3. PT Citra Lautan Teduh (CLT) was acquired in 2014.
4. PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG) was acquired in 2022.

Logo Perusahaan
Company Logo

Entitas Anak
Subsidiaries

- PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKA KOBE)
- PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKA Kraton)
- PT Citra Lautan Teduh (CLT)
- PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG)

Jaringan Usaha dan Produksi
Business and Production Networks

6 Wilayah Penjualan, 13 Pabrik, 4 Unit Operasi, 3 Quarry, dan 3 Jetty
6 sales Areas, 13 Factories, 4 Operation Unit, 3 Quarries, and 3 Jetty

Maksud dan Tujuan Pendirian
Purposes and Objectives of Establishment

Berusaha dalam bidang perdagangan dan industri beton, jasa konstruksi, dan bidang usaha lain yang terkait.
To be a leading company in concrete trading and industry, construction services and other related businesses.

YUSHADI
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

- ***Email*** :
  sekper@wika-beton.co.id

SARAH REGINA SITOMPUL

Manajer Investor Relations & Public Relations
Investor Relations & Public Relations Manager

Website Perusahaan
Company Website

www.wika-beton.co.id

Riwayat Singkat Perseroan
Company at a Glance



PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut Perseroan atau WIKA Beton) telah mengukir sejarah panjang di sektor industri beton dan jasa konstruksi tanah air. Cikal bakal perjalanan bisnis Perseroan dimulai sebagai Divisi Produk Beton di bawah naungan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Terbukti mampu bertumbuh dengan pencapaian dan kapasitas mumpuni, Divisi Produk Beton kemudian diubah statusnya menjadi entitas anak WIKA dengan nama PT Wijaya Karya Beton. Perubahan diresmikan melalui Akta No. 44 tanggal 11 Maret 1997. WIKA Beton pun terus meningkatkan kiprahnya, memperluas kapasitas operasional, hingga kini telah berkembang menjadi perusahaan dengan empat entitas anak, yaitu:

1. PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKA KOBE) diakuisisi pada tahun 2012.
2. PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKA Kraton) diakuisisi pada tahun 2013.
3. PT Citra Lautan Teduh (CLT) diakuisisi pada tahun 2014.
4. PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG) diakuisisi pada tahun 2022.

PT Wijaya Karya Beton Tbk ("the Company" or WIKA Beton) has carved a long history in the concrete industry and construction services sector in Indonesia. The forerunner of the Company's business journey began as the Concrete Products Division under PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Proven able to grow with achievements and qualified capacity, the Concrete Products Division was then changed its status to a subsidiary of WIKA with the name PT Wijaya Karya Beton. The change was made official through Deed No. 44 dated March 11, 1997. WIKA Beton continues to improve its work, expand operational capacity, until now it has developed into a company with four subsidiaries, namely:

1. PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKA KOBE) was acquired in 2012.
2. PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKA Kraton) was acquired in 2013.
3. PT Citra Lautan Teduh (CLT) was acquired in 2014.
4. PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG) was acquired in 2022.

Sejalan dengan pencapaian prestasi yang memacu peningkatan kepercayaan publik, WIKA Beton merealisasikan komitmennya untuk menjadi entitas yang semakin besar. Pada tanggal 8 April 2014, WIKA Beton resmi menyandang status perusahaan publik dan mengalami perubahan nama menjadi PT Wijaya Karya Beton Tbk. Melalui aksi korporasi Penawaran Umum Saham Perdana *(Initial Public Offering/IPO)*, Perseroan menawarkan 2.045.466.000 saham dengan kode WTON kepada publik. Pencatatan menunjukkan bahwa saham perdana Perseroan mengalami kelebihan permintaan atau *oversubscribed* mencapai 17,13 kali lipat, sebuah indikasi bahwa investor memberikan kepercayaan yang tinggi terhadap potensi pertumbuhan WIKA Beton. Hingga kini, Perseroan secara rutin membagikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya.

In line with the achievements that encourage increased public trust, WIKA Beton realizes its commitment to be a bigger entity. On April 8, 2014, WIKA Beton officially assumed the status of a public company and changed its name to PT Wijaya Karya Beton Tbk. Through the corporate action of Initial Public Offering (IPO), the Company offered 2,045,466,000 shares with code WTON to the public. The listing shows that the Company's initial shares were oversubscribed 17.13 times, indicating investors' high confidence in WIKA Beton's growth potential. Until now, the Company has regularly distributed cash dividends to its shareholders.

WIKA Beton telah terlibat dalam berbagai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dari waktu ke waktu, inovasi memainkan peranan penting dalam perkembangan industri seraya memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Salah satu *stepping stone* inovasi WIKA Beton adalah Rumah WIKA Beton 01 (RWB01). RWB01 merupakan sistem rumah pracetak yang terdiri dari elemen struktural seperti balok, kolom, dan panel dinding (*wall panel*). Proses produksi elemen struktural rumah ini dilakukan di pabrik atau workshop, memastikan kualitas unggul pada setiap komponen struktural RWB01. Inisiatif pengembangan RWB01 berasal dari tim internal WIKA Beton di bagian Penelitian & Pengembangan serta Teknik sebagai bentuk kontribusi terhadap pelaksanaan Program Nasional Satu Juta Rumah.

WIKA Beton has been involved in several infrastructure developments in Indonesia. Over the years, innovation has played an important role in the development of the industry while giving added value to the community. One of the stepping stones of WIKA Beton's innovation is Rumah WIKA Beton 01 (RWB01). RWB01 is a precast house system with structural elements such as beams, columns, and wall panels. The production process of the structural elements of this house is carried out in a factory or workshop, ensuring superior quality in each structural component of RWB01. The RWB01 development initiative comes from WIKA Beton's internal team in Research & Development and Engineering as a form of contribution to the implementation of the One Million Houses National Program.

Sebagai pelopor industri beton di Indonesia, WIKA Beton juga mensinergikan kemampuan produksi dan teknologi pembuatan beton untuk mendorong pengembangan di bidang ilmu pengetahuan. Pada akhir 2017, WIKA Beton bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) berhasil menciptakan sebuah inovasi yang disebut *Reactive Powder Concrete (RPC)* atau Beton Bubuk Reaktif. Kerja sama dengan ITB ini merupakan *link and match* atau kolaborasi antara akademik dengan industri.

As a concrete industry pioneer in Indonesia, WIKA Beton also synergizes production capabilities and concrete manufacturing technology to encourage development in the field of science. At the end of 2017, WIKA Beton with the Bandung Institute of Technology (ITB) succeeded in creating an innovation called Reactive Powder Concrete (RPC). This collaboration with ITB is a link and match or collaboration between academics and industry.

WIKA Beton meyakini bahwa kinerja unggul untuk Perseroan berakar pada *continuous development* yang dilakukan oleh internal Perseroan. WIKA Beton melakukan pengembangan internal yang mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola, salah satunya dengan merancang dan mengimplementasikan Sistem Audit Internal berbasis *online*. Platform audit ini diciptakan untuk memastikan pelaksanaan audit internal rutin yang efektif dan *real-time*.

WIKA Beton believes that superior performance for the Company is rooted in continuous development conducted by the Company's internal. WIKA Beton conducts internal development by prioritizing governance principles, one of them is by designing and implementing an online-based Internal Audit System. The audit platform was created to ensure effective and real-time implementation of routine internal audits.

Sebagai bagian dari pengembangan internal lainnya, Perseroan memperkenalkan aplikasi Kontrol Kualitas Elektronik *(e-QC)* berbasis web dan Android. *e-QC* adalah suatu sistem informasi berbasis data digital yang bertujuan untuk mengendalikan mutu beton yang diproduksi baik itu beton pracetak atau *Ready Mix*. Sistem ini telah terintegrasi dalam *Enterprise Resource Planning (ERP)* WIKA Beton. Pada tahun 2019, Perseroan juga berhasil mengimplementasikan aplikasi *Good Corporate Governance (GCG)* yang dikenal sebagai SiTALA. Tujuan dari implementasi ini adalah untuk membentuk ekosistem *digital* yang mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan optimalisasi dalam pelaksanaan asesmen kinerja GCG Perseroan. Dengan demikian, Perseroan dapat melindungi aspirasi dan pemangku kepentingan dengan baik.

As part of other internal developments, the Company introduced the web and Android-based Electronic Quality Control (e-QC) application. E-QC is a digital data-based information system that aims to control the quality of concrete produced, whether it is precast or ready-mix concrete. This system has been integrated into WIKA Beton's Enterprise Resource Planning (ERP). In 2019, the Company also successfully implemented the Good Corporate Governance (GCG) application known as SiTALA. The purpose of this implementation is to form a digital ecosystem that supports the implementation of GCG principles, expected to increase productivity, efficiency, and optimization in the implementation of the Company's GCG performance assessment. Therefore, the Company can properly protect its aspirations and stakeholders.

Pada tahun 2020, Perseroan kembali mencatatkan inovasi signifikan dengan memelopori implementasi sistem terbaru yang dikenal sebagai *Structural Health Monitoring System (SHMS)* untuk proyek infrastruktur publik. Implementasi pertama kali dilakukan pada Proyek Jalan Tol Layang A.P Pettarani Makassar. Sebelumnya, sistem ini telah diperkenalkan kepada para praktisi dan akademisi di sektor konstruksi setelah melalui serangkaian penelitian dan uji coba yang cermat. SHMS, sebagai sebuah teknologi, memiliki kemampuan untuk mendeteksi kondisi kesehatan struktur beton pada konstruksi, serta memberikan peringatan dini terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi pada pengguna jalan, jembatan, dan bangunan. Selanjutnya, SHMS berhasil diimplementasikan pada proyek-proyek strategis seperti Jembatan Sei Alalak di Banjarmasin, Jalan Layang Kereta Api Kualanamu-Medan, dan *Light Rail Transit (LRT)* Kelapa Gading-Velodrome Jakarta. SHMS pun resmi terdaftar di Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta sebagai *Strategic Business Unit (SBU)* WIKA Beton.

In 2020, the Company recorded another significant innovation by pioneering the implementation of the latest system known as the Structural Health Monitoring System (SHMS) for public infrastructure projects. The first implementation was conducted at the Makassar A.P. Pettarani Elevated Toll Road Project. Previously, the system has been introduced to practitioners and academics in the construction sector after a series of careful research and trials. SHMS as a technology can detect the health condition of concrete structures in construction, and provide early warning of potential risks to road, bridge, and building users. Furthermore, SHMS was successfully implemented in strategic projects such as the Sei Alalak Bridge in Banjarmasin, Kualanamu-Medan Railway Overpass, and Jakarta's Kelapa Gading-Velodrome Light Rail Transit (LRT). SHMS is also officially registered at the DKI Jakarta Chamber of Commerce and Industry as a Strategic Business Unit (SBU) of WIKA Beton.

Memasuki tahun 2021, di mana percepatan dalam seluruh aspek digitalisasi menjadi keharusan, WIKA Beton telah memulai pelaksanaan komputerisasi peralatan produksi melalui implementasi *Computer Control Machining System (CCMS)* yang terintegrasi dengan *Enterprise Resource Planning (ERP)*. Pabrik Produk Beton (PPB) Pasuruan telah dipilih sebagai proyek percontohan CCMS, dan langkah ini diikuti dengan penerapan CCMS di seluruh fasilitas produksi WIKA Beton. Melalui beragam

Approaching 2021, where acceleration in all aspects of digitalization is a must, WIKA Beton has started the implementation of computerization of production equipment through the implementation of a Computer Control Machining System (CCMS) integrated with Enterprise Resource Planning (ERP). The Pasuruan Concrete Products Factory (PPB) has been selected as a CCMS pilot project, and this step is followed by the implementation of CCMS in all WIKA Beton production

produk digital yang dirancang untuk mendukung proses operasional, Perseroan beraspirasi untuk memupuk *IT Culture* dan mendorong akselerasi Transformasi Digital WIKA Beton. Melanjutkan aspirasi tersebut, pada tahun 2022 WIKA Beton mengadopsi teknologi *Augmented Reality (AR)* dalam kegiatan pemasaran digital dengan nama *Concrete Verse*. Melalui teknologi ini, Perseroan semakin memiliki nilai kompetitif, dengan menyatukan elemen visual, audio, video, dan grafis sebagai metode solutif untuk melihat dan berinteraksi dengan proyek berlangsung.

facilities. Through various digital products designed to support operational processes, the Company aspires to foster IT Culture and encourage the acceleration of WIKA Beton Digital Transformation. Continuing this aspiration, in 2022 WIKA Beton adopted Augmented Reality (AR) technology in digital marketing activities with the name Concrete Verse. Through this technology, the Company has more competitive value, by combining visual, audio, video, and graphic elements as a solution method to see and interact with the project.

Pada tahun 2023, WIKA Beton semakin menegaskan posisinya sebagai yang terdepan dalam inovasi, keunggulan, dan keberlanjutan. Di antaranya, WIKA Beton menjadi produsen pertama pipa bertekanan tinggi di Indonesia, menghadirkan sabo dan modular untuk atasi aliran sedimen dan lahar gunung berapi, serta menginisiasi konsep *green construction* untuk infrastruktur berkelanjutan. Selain itu, Laboratorium riset WIKA Beton berhasil meraih akreditasi standar internasional laboratorium pengujian dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) berdasarkan *Council* KAN 24 Mei 2023 setelah memenuhi standar SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Perolehan akreditasi ini menjadi manifes yang membuktikan kualitas WIKA Beton di kancah nasional dan internasional.

In 2023, WIKA Beton further emphasizes its position as the leader in innovation, excellence, and sustainability. Among other things, WIKA Beton is the first manufacturer of high-pressure pipes in Indonesia, presents modular sabo dams to overcome sediment flows and volcanic lava, and initiates the concept of green construction for sustainable infrastructure. In addition, the WIKA Beton research laboratory has successfully achieved international standard accreditation of testing laboratories from the National Accreditation Committee (KAN) based on the KAN Council of May 24, 2023, after meeting the SNI ISO / IEC 17025: 2017 standard on General Requirements for Competence of Testing and Calibration Laboratories. The achievement of this accreditation is a manifestation that proves the quality of WIKA Beton in the national and international arena.

Pada tahun 2024, PT Wijaya Karya Beton Tbk meluncurkan logo baru sebagai simbol transformasi dan inovasi perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memperbarui Visi, Misi, dan Moto-nya. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan pasar dan untuk menjaga daya saing di industri. Dengan perubahan ini, Perusahaan berharap dapat memperkuat citra sebagai entitas yang dinamis, inovatif, dan solutif.

In 2024, PT Wijaya Karya Beton Tbk launched a new logo as a Company's transformation symbol and innovation. In addition, the Company also upgraded its Vision, Mission, and Motto. This steps as a response towards market challenges and to maintain competitiveness in industry. With this change, the Company can affirm images as a dynamic, innovative, and solutive entity.

Informasi Perubahan Nama Perseroan
Information on Company Name Change

Pada tahun buku 2025 tidak terdapat adanya informasi maupun catatan terkait perubahan nama pada PT Wijaya Karya Beton Tbk.

In the 2025 financial year, there is no information or records regarding the name change at PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Jejak Langkah
Milestones

1960

Berdasarkan PP No. 2 tahun 1960 dan SK Menteri PUTL No. 5 tanggal 11 Maret 1960, PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA selaku entitas induk Perseroan, pertama kali didirikan dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja dengan kegiatan bisnis utamanya pada saat itu adalah pekerjaan instalasi listrik dan pipa air.

Based on PP Number 2 1960 and Decree of the Minister PUTL Number 5 March 11, 1960, PT Wijaya Karya (Persero) or WIKA as Holding Company entity, first established with the name of Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja with the main business field at the time is electrical and water pipe installations.

1978-1980

- WIKA mendirikan Pabrik Produk Beton (PPB) baru yang pertama di Bogor yang selanjutnya menjadi cikal bakal berdirinya WIKA Beton.
- Produk baru yang dihasilkan: Tiang Beton dan PC Panel.

- WIKA established its first new concrete plant in Bogor, henceforth WIKA Beton was established.
- New products: PC Poles and PC Panels.

1981-1984

- WIKA mendirikan Pabrik Produk Beton (PPB) yang kedua di Pasuruan, kemudian yang ketiga dan keempat masing-masing di Boyolali dan Majalengka.
- Produk baru yang dihasilkan: Tiang Beton dan PC Panel.

- WIKA established its second concrete product plant in Pasuruan, and then the third and fourth concrete plants in Boyolali and Majalengka, respectively.
- New products: PC Poles and PC Panels.

1986

WIKA mendirikan Pabrik Produk Beton (PPB) baru di Lampung sebagai pabrik kelima.

WIKA established a new Concentrate Product Factory (PPB) in Lampung as a fifth factory.

1997

Seiring dengan perkembangan usaha WIKA yang kian pesat, Divisi Produk Beton WIKA resmi dipisahkan dan menjadi entitas anak WIKA yang pertama dengan nama PT Wijaya Karya Beton.

Along with the rapid WIKA's business growth, WIKA Concentrate Product Division was officially separated and to be a first subsidiary of WIKA with the name PT Wijaya Karya Beton.

2010

Perseroan memulai produksi Tiang Pancang dengan diameter 1.000 mm.

The Company started production of piles with a diameter of 1.000 mm.

2011

- Perseroan dipilih oleh organisasi Internasional untuk Standardisasi di Jenewa sebagai referensi dalam studi kasus Standar Keuntungan Ekonomis.
- Perseroan mendirikan Pabrik Produk Beton (PPB) kedelapan di Karawang, Jawa Barat.
- Produk baru yang dihasilkan: Box Girder.

- The Company was chosen by the International Organization for Standardization in Jenewa as reference in Economical Profit Standard case studies.
- The Company established the eighth Concentrate Product Factory (PPB) in Karawang, West Java.
- Box Girder as a new product was manufactured.

2012

- Perseroan bekerja sama dengan PT Komponindo Beton jaya mendirikan entitas anak bernama PT Wijaya Karya Komponen Beton atau WIKA KOBE.
- Perseroan membentuk Unit Usaha *Post Tensioning*.

- The Company cooperated with PT Komponindo Betonjaya established a subsidiary with the name PT Wijaya Karya Komponen Beton or WIKA KOBE.
- The Company formed a Post Tensioning Business Unit.

2013

- Perseroan mendirikan entitas anak bernama PT Wijaya Karya Krakatau Beton atau WIKA Kraton.
- Perseroan mendirikan Pabrik Produk Beton (PPB) kesembilan di Lampung Selatan.
- Perseroan membuka lini bisnis usaha baru: pertambangan (pemrosesan sumber daya alam).
- Perseroan mengembangkan produk-produk baru: Hollow Core Slab, beton pracetak untuk kebutuhan bangunan gedung dan industri.

- The Company established a subsidiary with the name PT Wijaya Karya Krakatau Beton atau WIKA Kraton.
- The Company established a ninth Concentrate Product Factory (PPB) in South Lampung.
- The Company opened a new business line: mining (natural resources processing).
- The Company developed new products: Hollow Core Slab, precast concentrate for the building and industry necessary.

2014

- Perseroan resmi melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO) sehingga penulisan nama Perseroan berubah menjadi PT Wijaya Karya Beton Tbk dengan kode saham WTON.
- Perseroan resmi mengakuisisi PT Citra Lautan Teduh (CLT).
- Perseroan mengembangkan produk baru bernama Cylinder Pile diameter 800mm dan 2.000 mm.

- The Company officially Initial Public Offering/IPO so the Company's name changed to PT Wijaya Karya Beton Tbk with stock code WTON.
- The Company officially acquired PT Citra Lautan Teduh (CLT)
- The Company developed a new product called Cylinder Pile of diameter 800mm and 2.000 mm.

2015

- Perseroan meresmikan operasional *Crushing Plant Bogor.*
- Perseroan membentuk Biro Usaha Jasa Penunjang.
- Perseroan meresmikan Pabrik Produk Beton (PPB) Lampung Selatan.

- The Company inaugurated the operation of Crushing Plant Bogor.
- The Company established the Support Services Business Bureau.
- The Company inaugurated the South Lampung Concrete Products Plant (PPB).

2016

- Perseroan bekerja sama dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung mendirikan Perusahaan Patungan bernama PT Wijaya Karya Pracetak Gedung.
- Perseroan memulai *Ready Mix Concrete Business.*
- Perseroan mengeluarkan produk baru yaitu Circular Box Girder dengan panjang sampai dengan 80 meter, PC Wall for Retaining Wall, dan PC Bulb Tee.

- The Company cooperated with PT Wijaya Karya Bangunan Gedung to establish a Joint Venture Company named PT Wijaya Karya Pracetak Gedung.
- The Company started the Ready Mix Concrete Business.
- The Company launched new products namely Circular Box Girder with length up to 80 meters, PC Wall for Retaining Wall, and PC Bulb Tee.

2017

- Perusahaan mengubah visi menjadi Perusahaan Terkemuka di Bidang *Engineering, Production, Installation (EPI)* Industri Beton di Asia Tenggara.
- Pembangunan jalur putar pabrik modern di Pabrik Produk Beton (PPB) Lampung Selatan.

- The Company changed its vision to become a Leading Company in Engineering, Production, Installation (EPI) of Concrete Industry in Southeast Asia.
- Construction of a modern factory rotary line at the South Lampung Concrete Products Plant (PPB).

2018

- Peresmian jalur putar pabrik modern di Pabrik Produk Beton (PPB) Lampung Selatan.
- Perseroan menggarap Proyek Jalan Tol Layang A.P. Pettarani di Makassar sebagai wujud atas visi Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang EPI industri beton.

- The inauguration of a modern factory turning line at the South Lampung Concrete Products Plant (PPB).
- The Company worked on the A.P. Pettarani Elevated Toll Road Project in Makassar as a manifestation of the Company's vision as a company engaged in the EPI of the concrete industry.

2019

- Perseroan mengirimkan bantalan beton rel kereta sebagai material *test track* ke Filipina.
- Perseroan meluncurkan inovasi produk yang diberi nama Rumah WIKA Beton 01 (RWB 01).
- Selesai melaksanakan pekerjaan *Trackwork* untuk proyek LRT Jakarta Tahap 1 (Kelapa Gading-Velodrome).

- The Company sends railroad concrete pads as test track material to the Philippines.
- The Company launched a product innovation named Rumah WIKA Beton 01 (RWB 01).
- Completed the trackwork for the Jakarta LRT Phase 1 (Kelapa Gading-Velodrome) project.

2020

- Perseroan memperkenalkan sistem baru bernama *Structural Health Monitoring System (SHMS)* untuk mendeteksi kesehatan struktur beton pada konstruksi yang pertama kali diterapkan pada Proyek Jalan Tol Layang A.P. Pettarani Makassar.
- Pembangunan *Mobile Plant* di Bangkinang, Pekanbaru: Produksi Balok Girder untuk proyek Jalan Tol Pekanbaru-Padang.
- Meluncurkan nilai inti Perusahaan bertajuk "AKHLAK".
- Perseroan mengeluarkan produk baru yaitu Concrete Level Crossing.

- The Company introduced a new system named Structural Health Monitoring System (SHMS) to detect the health of concrete structures in construction which was first applied to the Makassar A.P. Pettarani Elevated Toll Road Project.
- Construction of Mobile Plant in Bangkinang, Pekanbaru: Production of Girder Beams for the Pekanbaru-Padang Toll Road project.
- Launched the Company's core value entitled "AKHLAK".
- The Company launched a new product, Concrete Level Crossing.

2021

- Penjajakan bisnis *Admixture* sebagai solusi efisiensi kebutuhan internal.
- Pengambilalihan aset WIKA Industri Konstruksi.
- Pengukuran pangsa pasar produk Beton Pracetak dan *Ready Mix* tahun 2020.
- Pembangunan jalur produksi produk pipa di Plant Karawang.
- Pengembangan aplikasi *Computer Control Machining System (CCMS).*
- Pengembangan ERP 2.0.
- Penjajakan proyek di Filipina.
- *E-Catalogue* Sumur Resapan.
- Penjajakan restrukturisasi dan tata kelola perusahaan entitas anak.

- Admixture business exploration as an efficiency solution for internal needs.
- Acquisition of WIKA Construction Industry assets.
- Measurement of market share of Precast Concrete and Ready Mix products in 2020.
- Construction of pipe product production lines at the Karawang Plant.
- Development of Computer Control Machining System (CCMS) application.
- ERP 2.0 development.
- Project exploration in the Philippines.
- Infiltration Well E-Catalogue.
- Exploration of restructuring and corporate governance of subsidiaries.

2022

- Memasuki bisnis *Admixture* untuk mendukung produksi Beton Pracetak.
- Perseroan mengambil alih saham WEGE atas WPG menjadi sebesar 51 persen atau sebanyak 255.000.000 saham agar dapat lebih optimal dalam menggarap pasar pracetak gedung dan perumahan.
- Optimalisasi pembangunan jalur produksi produk Tiang Pancang Pabrik Produk Beton (PPB) Lampung Selatan.
- Mendorong penerapan *Good Corporate Governance* melalui implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik WIKA Kraton dan WPG sebagai Entitas Anak Perseroan.
- Pembangunan *Mobile Plant* Palu.
- Melakukan perubahan Struktur Organisasi Perseroan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas SDM Perseroan.
- Sosialisasi & implementasi nilai-nilai AKHLAK.
- Pengembangan *Customer Relationship Management* untuk mendorong *customer satisfaction and loyalty.*
- Pengembangan produk Gravity Wall, Beton Porous, dan sistem sambungan Splice Sleeve.
- Pembentukan unit Wilayah Penjualan Luar Negeri untuk penetrasi pasar luar negeri khususnya Asia Tenggara.

- Entered the Admixture business to support Precast Concrete production.
- The Company acquired WEGE's shares in WPG to 51 percent or 255,000,000 shares to optimize the precast building and housing market.
- Optimizing the construction of the South Lampung Concrete Products Plant (PPB) pile production line.
- Encouraging the implementation of Good Corporate Governance through the good corporate governance of WIKA Kraton and WPG as subsidiaries of the Company.
- Construction of Palu Mobile Plant.
- Making changes to the Company's Organizational Structure to increase the effectiveness and productivity of the Company's Human Capital.
- Socialization & implementation of AKHLAK values.
- Development of Customer Relationship Management to encourage customer satisfaction and loyalty.
- Product development of Gravity Wall, Porous Concrete, and Splice Sleeve connection system.
- Establishment of an Overseas Sales Area unit to penetrate overseas markets, especially Southeast Asia.

2023

- Penggabungan Divisi Operasi dan Divisi Ready Mix dalam rangka penguatan struktur organisasi WIKA Beton.
- Pembentukan Bidang *Asset Management* dan Bidang *Transformation* Office.
- Pengaplikasian *Customer Relationship Management* di unit kerja WIKA Beton.
- Pengembangan produk Beton Pracetak pada *Strategic Business Unit Hydro* yakni dengan menggunakan Beton Porous dan pengembangan beton tahan benturan untuk produk Barrier.
- Penerapan *System Application* and *Product (SAP)*.
- Penjajakan *Joint Venture* untuk mengejar peluang dari kebutuhan beton pracetak yang terbuka dari proyek-proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

- The merger of the Operations Division and the Ready Mix Division to strengthen WIKA Beton's organizational structure.
- Establishment of Asset Management Division and Transformation Office Division.
- Application of Customer Relationship Management in WIKA Beton work units.
- Development of Precast Concrete products in the Hydro Strategic Business Unit, namely by using Porous Concrete and developing impact-resistant concrete for Barrier products.
- Implementation of System Application and Product (SAP).
- Exploration of Joint Venture to pursue opportunities from open precast concrete needs from development projects in the Nusantara Capital City (IKN).

2024

- Pengembangan produk innovasi Rumah Pracetak Sederhana tahan gempa
- Memperbaharui Visi dan Misi Perusahaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di Sektor Konstruksi
- Perubahan Logo Baru
- Perolehan Sertifikan EPD (*Green Product*) pada produk PC Spun Pile

- Development of Earthquake-Resistant Simple Precast House Innovation
- Changes in the Company's Vision and Mission in Line with Developments and Needs in the Construction Sector
- New Logo Change
- Earning EPD (Green Product) Certification on PC Spun Pile Products

2025

- Menambah bidang usaha baru yaitu jasa Instalasi Listrik berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Akta No. 05 tanggal 02 Juli 2025 serta telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-0043541.AH.01.02 tanggal 04 Juli 2025.
- WIKA Beton meluncurkan inovasi hunian pracetak W-Home tipe 36 yang dapat dibangun dalam 48 jam dengan sistem modular tanpa alat berat, telah teruji tahan gempa di 21 wilayah dan memenuhi standar SNI beton struktural. Produk berpaten ini menjadi solusi hunian cepat, terjangkau, dan berkualitas untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

- Adding a new business field, namely Electrical Installation Services, based on amendments to the Company's Articles of Association Deed No. 05 dated July 2, 2025, which has been accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter Number AHU-0043541.AH.01.02 dated July 4, 2025.
- WIKA Beton launched its innovative W-Home type 36 precast housing, which can be built in 48 hours using a modular system without heavy equipment. It has been tested for earthquake resistance in 21 regions and meets SNI structural concrete standards. This patented product is a fast, affordable, and high-quality housing solution to support the 3 Million Houses Program.

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Budaya Kerja Perusahaan
Vision, Mission, and Company Work Culture Values

Melalui pencanangan visi dan misi, Perseroan mendorong semua individu WIKA Beton untuk mencapai performa yang prima dan berkelanjutan. Visi dan misi Perseroan memiliki tujuan yang jelas, yakni untuk menjadi perusahaan global terpercaya berkelanjutan pemberi solusi di industri beton. Pada tahun 2024, Direksi dan Dewan Komisaris telah menyetujui perubahan Visi dan Misi Perseroan pada tanggal 15 Februari 2024 melalui Surat Keputusan No.SK.01.01/WB-0A.0021/2024. Perubahan visi dan misi tersebut telah melalui *review* yang mendalam dan disesuaikan dengan strategi jangka panjang Perusahaan.

Through the proclamation of vision and mission, the Company encourages all WIKA Beton individuals to achieve excellent and sustainable performance. The Company's vision and mission have a clear goal, namely to become a trusted global sustainable solution provider in the concrete industry. The vision initiated in 2024 is expected to be realized in February 15th, 2024, in which WIKA Beton continues to expand into the international market and brings sustainable innovation.

Penjelasan Visi

Visi Perseroan "Menjadi Perusahaan Global Terpercaya Berkelanjutan Pemberi Solusi di Industri Beton," merepresentasikan arah strategis WIKA Beton dalam memperluas cakupan bisnisnya, memperkuat kepercayaan pasar, dan berkontribusi terhadap keberlanjutan industri konstruksi. Sebagai bagian dari ekspansi global, Perseroan berupaya meningkatkan daya saingnya di tingkat internasional melalui diversifikasi proyek, standarisasi kualitas berbasis ISO, serta adopsi teknologi digital dalam rantai pasok dan produksi beton

Explanation of Vision:

The Company's vision, "To Become a Trusted Global Sustainable Solutions Provider in the Concrete Industry," represents WIKA Beton's strategic direction to expand its business reach, strengthen market trust, and contribute to the sustainability of the construction industry. As part of its global expansion, the Company aims to enhance its competitiveness internationally through project diversification, ISO-based quality standardization, and the adoption of digital technology in the supply chain and precast concrete production. This approach enables

Visi Vision

Menjadi Perusahaan Global Terpercaya Berkelanjutan Pemberi Solusi di Industri Beton.

To Become a Sustainable Trusted Global Company Providing Solutions in the Concrete Industry.

pracetak. Pendekatan ini memungkinkan WIKA Beton memperluas pasar, baik dalam proyek infrastruktur publik maupun sektor swasta, guna mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin industri di Asia Tenggara dan pasar global.

WIKA Beton to expand its market presence in public infrastructure projects and the private sector, solidifying its position as an industry leader in Southeast Asia and the global market.

Kepercayaan menjadi pilar utama dalam strategi bisnis WIKA Beton. Penguatan tata kelola Perseroan dilakukan melalui transparansi, digitalisasi, dan kepatuhan terhadap standar anti-penyuapan (ISO 37001). Selain itu, WIKA Beton terus berinovasi dalam menghadirkan solusi beton berkualitas tinggi dan teknologi berbasis AI serta IoT, yang memastikan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Implementasi sistem *Whistleblowing* dan optimalisasi manajemen risiko juga menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk menjaga integritas dan keunggulan kompetitif dalam industri.

Trust is a core pillar of WIKA Beton's business strategy. The company strengthens its governance on transparency, digitalization, and compliance with anti-bribery standards (ISO 37001). Additionally, WIKA Beton continues to innovate by providing high-quality concrete solutions and technology based on AI and IoT, ensuring operational efficiency and customer satisfaction. The Whistleblowing system implementation and optimized risk management are also part of the company's commitment to maintaining integrity and competitive excellence.

Keberlanjutan menjadi fokus utama dalam operasional Perseroan, dengan target *net zero emission* pada 2030 serta pengembangan beton ramah lingkungan dan efisiensi energi di pabrik produksi. WIKA Beton telah menerapkan berbagai inisiatif untuk mengurangi limbah konstruksi. Dengan kombinasi inovasi, digitalisasi, dan strategi keberlanjutan, WIKA Beton berkomitmen untuk menjadi penyedia solusi konstruksi yang tidak hanya andal, tetapi juga berkontribusi terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Sustainability is a key focus in the company's operations, with a target of achieving net zero emissions by 2030, along with the development of eco-friendly concrete and energy efficiency in production plants. WIKA Beton has implemented various initiatives to reduce construction waste. Through a combination of innovation, digitalization, and sustainability strategies, WIKA Beton is committed to being a reliable construction solutions provider that also contributes to the environment and sustainable development.

Misi Mission

Menyediakan produk dan jasa berskala global sebagai solusi atas kebutuhan pelanggan
To Provide products and services on global scale as solution to customer needs

Menjalankan *operational excellence* berkualifikasi perusahaan global berbasis manajemen risiko dan teknologi digital yang berwawasan lingkungan berkelanjutan untuk memenuhi aspirasi *Stakeholder*
To carry out operational excellent with global company qualifications based on risk management and digital technology with a sustainable environmental perspective to meet stakeholder aspiration

Menjalin kerjasama strategis dengan mitra kerja yang saling menguntungkan serta memberikan manfaat kepada lingkungan sosial
To establish strategic collaboration with working partners that mutually beneficial and provides benefit to the social environment

Mengembangkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai untuk peningkatan kinerja keberlanjutan
To develop employee competency and welfare for continuous performance improvement

Menerapkan manajemen keuangan yang sehat dan akuntabel.
To implement healthy and accountable financial management.

Nilai-Nilai Budaya Kerja

Dengan menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai AKHLAK, WIKA Beton didorong untuk terus mengembangkan karakter unggul secara konsisten, semangat berinovasi, dan bersinergi untuk keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, seluruh individu WIKA Beton diharapkan dapat terus meresapi dan mengaktualisasikan nilai-nilai AKHLAK dalam setiap aktivitasnya. Pendekatan yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur akan diterapkan dalam seluruh organ dan kegiatan Perseroan untuk memastikan keseluruhan proses berlangsung secara sinergis.

AKHLAK

A manah / Trust

Kalimat Afirmatif / Affirmative Statement
"Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan"
"We uphold the trust given"

Kata Kunci / Keywords
- Integritas / Integrity
- Tulus / Sincerity
- Konsisten / Consistency
- Dapat Dipercaya / Trustworthy

Panduan Perilaku / Behavior Guidance
- Memenuhi janji dan komitmen / Fulfilling promises and commitments.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan / Be responsible for duties, decisions, and actions carried out
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika / Uphold moral values and ethics

K ompeten / Competent

Kalimat Afirmatif / Affirmative Statement
"Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas"
"We continue to learn and develop capabilities"

Kata Kunci / Keyword
- Kinerja terbaik / Best performance
- Sukses / Success
- Keberhasilan / Accomplishment
- *Learning Agility* / Learning Agility
- Ahli di bidangnya / Expert in the field

Panduan Perilaku / Behavior Guidance
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah / Improve self competence to meet the dynamic challenges
- Membantu orang lain belajar / Assist one another
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik / Complete duties with the best quality

H armonis / Harmonius

Kalimat Afirmatif / Affirmative Statement
"Kami saling peduli dan menghargai perbedaan"
"We care for each other and respect the differences"

Kata Kunci
- Peduli / Care
- Perbedaan / Diversity

Panduan Perilaku
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya / Respect each other regardless of their background
- Suka menolong orang lain / Willing to help other people
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif / Build a conducive work environment

Corporate Culture and Values

Driven by the embodiment and implementation of AKHLAK values, WIKA Beton is committed to consistently fostering outstanding character, a spirit of innovation, and synergy for business sustainability. Therefore, it is anticipated that every individual within WIKA Beton shall continually internalize and actualize the values in all their activities. An extensive, systematic, and structured approach will be applied across all facets of the Company, ensuring that every process unfolds in a synergistic manner.

Loyal

Kalimat Afirmatif / Affirmative Statement
"Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara"
"We are dedicated and prioritize the interest of the nation and the country"

Kata Kunci / Keyword
- Komitmen / Commitment
- Dedikasi (rela berkorban) / Dedication (self-sacrificing)
- Kontribusi / Contribution

Panduan Perilaku
- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara / Maintain the reputation of other employees, leaders, SOEs, and the country
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar / Willing to sacrifice to reach greater objective
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika / Obey the leaders to the extent that the action does not contradict the laws and ethics

Adaptif

Kalimat Afirmatif / Affirmative Statement
"Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan"
"We continue to innovate and be enthusiastic in driving or facing change"

Kata Kunci / Keyword
- Inovasi / Innovation
- Antusias terhadap perubahan / Enthusiastic towards change
- Proaktif / Proactive

Panduan Perilaku / Behavior Guidance
- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik / Be quick in adapting to the environment to become a better individual
- Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi / Carry out continuous improvement in line with technology development
- Bertindak proaktif / Act in a proactive manner

Kolaboratif / Collaborative

Kalimat Afirmatif / Affirmative Statement
"Kami membangun kerja sama yang sinergis"
"We build synergistic cooperation"

Kata Kunci / Keyword
Kesediaan bekerja sama / Readiness to cooperate
Sinergi untuk hasil yang lebih baik / Synergy for better results

Panduan Perilaku / Behavior Guidance
Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi / Provide opportunities for various parties to contribute
Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah / Be open in cooperation to bring added values
Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama / Drive the utilization of various resources for common goals

Paradigma

- Transformasi adalah kebutuhan;
- Keberlanjutan menjadi tujuan;
- Pasar mendasari pengembangan bisnis
- Pelanggan adalah mitra strategis;
- Kepemimpinan penentu kinerja unggul;
- Proaktif menjadi kunci keberhasilan;
- Teknologi mendukung pertumbuhan usaha.

Paradigm

- Transformation is a necessity;
- Sustainability becomes the goal;
- The market underlies business development
- Customer are strategic partners;
- Leadership determines excellent performance;
- Proactivity is the key to success;
- Technology supports business growth.

Persetujuan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan oleh Manajemen Kunci

Pada tanggal 2 Desember 2025, Direksi telah mengeluarkan dan menyetujui Surat Keputusan No. SK.01.01/WB-0A.0074/2025 terkait Rumusan Budaya dan Employee Value Proposition (EVP) PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Approval of Corporate Culture by Key Management

On December 2, 2025, the Board of Directors issued and approved Decree No. SK.01.01/WB-0A.0074/2025 concerning the Formulation of Corporate Culture and the Employee Value Proposition (EVP) of PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Peran Strategis Visi dan Perusahaan dalam Menegakkan Prinsip Governansi dan Kepentingan *Stakeholders*

Dalam mewujudkan visinya sebagai perusahaan terkemuka dan berkelanjutan, WIKA Beton berkomitmen untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG). Seluruh organ perusahaan berperan strategis dalam memastikan bahwa setiap proses bisnis dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta senantiasa mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Visi WIKA Beton adalah menjadi perusahaan global terpercaya berkelanjutan pemberi solusi di industri beton, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan yang selaras dengan nilai-nilai GCG. Dalam mendukung kinerja yang berkelanjutan, seluruh organ Perseroan —Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-komite Pendukung— memastikan bahwa setiap kebijakan dan strategi bisnis dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

WIKA Beton menanamkan prinsip integritas dalam setiap keputusan yang diambil, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, pelanggan, mitra usaha, karyawan, masyarakat, dan pemerintah.

The Strategic Role of Vision and the Company in Upholding Governance Principles and Stakeholder Interests

In pursuing its vision to become a leading and sustainable company, WIKA Beton is committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG). All corporate organs play a strategic role in ensuring that every business process upholds the principles of integrity, transparency, and accountability, while consistently taking into account the interests of all stakeholders.

WIKA Beton's vision is to become a trusted global and sustainable company providing concrete industry solutions, by promoting sustainability principles aligned with GCG values. To support sustainable performance, all corporate organs — the Board of Commissioners, the Board of Directors, and supporting committees — ensure that every policy and business strategy is executed in a responsible, transparent, and accountable manner.

WIKA Beton embeds the principle of integrity into every decision-making process, while safeguarding the interests of all stakeholders, including shareholders, customers, business partners, employees, the community, and the government.

Makna dan Penjelasan Logo Perseroan
Logo Explanation

Pencitraan identitas dan tujuan Perseroan di dalam menjalankan aktivitas bisnis tercermin dalam logo perusahaan. Bertepatan dengan ulang tahun ke-27 pada tanggal 11 Maret 2024, PT Wijaya Karya Beton Tbk meluncurkan logo baru sebagai simbol transformasi dan inovasi perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memperbarui Visi, Misi, dan Moto-nya. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan pasar dan untuk menjaga daya saing di industri. Dengan perubahan ini, perusahaan berharap dapat memperkuat citra sebagai entitas yang dinamis, inovatif, dan solutif.

The Company's identity and purpose in conducting business activities are reflected in the Company's logo. Coinciding with its 27th anniversary on March 11, 2024, PT Wijaya Karya Beton Tbk launched a new logo as a symbol of the Company's transformation and innovation. In addition, the company also updated its Vision, Mission, and Motto. This step was taken in response to market challenges and to maintain competitiveness in the industry. With these changes, the company expects to strengthen its image as a dynamic, innovative, and solutive entity.





Bentuk Logo WIKA Beton berbentuk siluet Kunci yang dapat diartikan keamanan dan kepercayaan. Hal ini memiliki Filosofi bahwa Produk dan layanan yang dihasilkan WIKA Beton mengutamakan nilai-nilai Kepercayaan dan Komitmen kepada pelanggan.
The shape of the WIKA Beton logo is a key silhouette that can be interpreted as security and trust. This has the philosophy that the Products and services produced by WIKA Beton prioritize the values of Trust and Commitment to customers.



Dua garis yang tegas mengapit tulisan Beton, mewakili kekuatan dalam menguasai Pangsa pasar industri precast dan ketegasan dalam komitmen implementasi tata kelola perusahaan yang baik.
Two solid lines enclose the word Beton, representing the strength in dominating the market share of the precast industry and the firmness in the commitment to implement good corporate governance.



Lingkaran merah yang menembus garis diartikan sebagai simbol perubahan atau transformasi. Garis mewakili fase Perusahaan dengan praktik bisnis eksisting, sedangkan Lingkaran yang menembusnya menandakan perubahan menjadi perusahaan skala global.
The red circle penetrating the line is interpreted as a symbol of change or transformation. The line represents the Company's phase with existing business practices, while the Circle that penetrates it signifies the change to a global scale company. prioritize the values of Trust and Commitment to customers.



Ditambahkan dengan kata "BETON" untuk menunjukkan identitas secara langsung bahwa kegiatan usaha utama perusahaan ini bergerak di bidang industri beton.
Addition of the word "BETON" shows the Company's firsthand identity in which its main business activity is engaged in the concrete industry.

Warna Perusahaan
Corporate Color

#4CBB17

Warna Hijau adalah perwakilan dari warna alam yang paling dominan. Lingkaran hijau merupakan komitmen perusahaan kepada upaya perlindungan Lingkungan dan kehidupan sosial yang berkelanjutan.

The green is representative of nature's most dominant color, the green circle represents the company's commitment to environmental protection and sustainable social life.

#E62129

Warna Merah mewakili keberanian dan kepemimpinan. Lingkaran merah adalah wujud dari symbol keberanian menghadapi tantangan dalam memimpin dan menginspirasi industri *precast*.

The Red represents bravery and leadership. The red circle symbolizes the bravery to face challenges in leading and inspiring the precast industry.

#009EE3

Warna Biru Muda menggambarkan kecerdasan dan keterbukaan, mewakili kreativitas dan inovasi, sehingga pada logo WIKA Beton warna tersebut bermakna dapat dipercaya dan memberikan Layanan atau produk yang handal.

The Light Blue describes intelligence and openness, represents creativity and innovation, so in the WIKA Beton logo the color means trustworthy and provides reliable services or products.

Jenis Huruf
Font

Penggunaan *Font* pada tulisan Beton yang ramping dan tegas (*Slim & Sharp*) memiliki *Filosofi* bahwa perusahaan dijalankan dengan sistem operasi yang lean (*Lean Operation*).

The use of fonts in Beton writing is slim and sharp with the philosophy that the company is run with a lean operating system (Lean Operation).

Penggunaan Standar Logo
Logo Application Standard

Penggunaan standar logo Perusahaan yang dilengkapi "nama Perseroan" atau "moto Perseroan".

Standardized use of the Company's logo with "Company name" or "Company motto".

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Solution and Trust

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar Terakhir
Business Activity According to the Last Articles of Association



Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah pada tahun 2025. Perubahan dilakukan berdasarkan Akta No. 05 tanggal 02 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-0043541.AH.01.02 tanggal 04 Juli 2025. Mengacu pada Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan WIKA Beton adalah melakukan usaha dalam bidang perdagangan dan industri beton, jasa konstruksi dan bidang usaha lain yang terkait. Implementasi maksud dan tujuan tersebut dilakukan melalui kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang, serta kegiatan usaha lainnya, yaitu sebagai berikut:

The Company's Articles of Association were last amended in 2025. The amendment was made based on Deed No. 05 dated July 2, 2025, made before Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in South Jakarta, and receipt of notification of changes in the Company's data has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter Number AHU-0043541.AH.01.02 dated July 4, 2025. Referring to Article 3 of the Articles of Association, the purpose and objective of WIKA Beton is to conduct business in the trade and concrete industry, construction services, and other related business fields. The implementation of these purposes and objectives is conducted through the main business activities supporting business activities, and other business activities, as follows:

No.	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Company Position	Status	Keterangan Description
	Kegiatan Usaha Utama Main Business Activities		
1	Untuk mencapai maksud dan tujuan WIKA Beton, WIKA Beton dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: To achieve its purposes and objectives, WIKA Beton carries out the following primary business activities:		
A	Melakukan perencanaan, produksi, penjualan, pemasangan, dan pelaksanaan konstruksi seluruh produk-produk beton, antara lain: 1. Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi; 2. Pemasangan pondasi dan tiang pancang; 3. Industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung; 4. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan; 5. Industri bata, mortar, semen dan sejenisnya yang tahan api. Planning, producing, selling, installing, and undertaking construction of all concrete products, including: 1. Cement and lime industrial products for construction; 2. Foundation and piles installation; 3. Offshore and floating buildings industry; 4. Large trading/wholesaling for some types of building materials; 5. Brick, mortar, cement, and similar fireproof industries.	Telah dijalankan Implemented	WIKA Beton telah menjalankan proses produksi atas produk-produk yang tercatat dalam Unit Bisnis Strategis (SBU). Proses produksi dilaksanakan secara mandiri dengan penekanan utama pada aspek kualitas. Dalam hal perencanaan, WIKA Beton turut serta secara aktif dalam inisiatif yang melibatkan produk pracetak sesuai dengan lingkup SBU, kecuali untuk produk Tiang Listrik yang perencanaannya dilakukan oleh Pemberi Kerja. Berikut adalah rincian proyek perencanaan dan instalasi di mana Perseroan terlibat dalam pelaksanaannya: 1. OKI 3 Tissue Expansion (Spun Pile) 2. Jalan Tol IKN 3B (PCI Girder) 3. Shoring Protection Area Shiploader, Tanah Grogot (Spun Pile) 4. Akses Tol Patimban (PCU Girder) 5. Sekolah Rakyat Aceh (Square Pile) 6. Sekolah Rakyat Sumbagsel (Square Pile) 7. Tol Semarang - Demak Paket 1B (Spun Pile) 8. Pembangunan Bank BI Jambi (Spun Pile) 9. INTCO Medical Gloves Factory (Spun Pile) 10. Metro Manila Subway Project CP106 (Railway) WIKA Beton has executed the production processes for the products documented within our Strategic Business Unit (SBU). The production procedures are autonomously conducted, with a primary emphasis on quality aspects. Regarding planning, WIKA Beton actively participates in initiatives involving precast products within the scope of the SBU, except for Electrical Pole products, where planning is undertaken by the Employer. The following outlines the projects in planning and installation where the Company has been actively involved in their execution: 1. OKI 3 Tissue Expansion (Spun Pile) 2. IKN Toll Road Section 3B (PCI Girder) 3. Shoring Protection Area Shiploader, Tanah Grogot (Spun Pile) 4. Patimban Toll Access Road (PCU Girder) 5. Sekolah Rakyat Aceh (Square Pile) 6. Sekolah Rakyat Sumbagsel (Square Pile) 7. Semarang–Demak Toll Road Package 1B (Spun Pile) 8. Bank Indonesia Jambi Building Project (Spun Pile) 9. INTCO Medical Gloves Factory (Spun Pile) 10. Metro Manila Subway Project CP106 (Railway)

No.	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Company Position	Status	Keterangan Description
B	Melakukan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dalam bidang usaha: 1. Sipil; 2. Elektrikal; *3. Post Tensioning.* Carrying out planning, implementation, and supervision of construction in the following lines of business: 1. Civil Work; 2. Electrical; 3. Post Tensioning	Telah dijalankan Implemented	WIKA Beton telah menjalankan bisnis elektrikal pada proyek sebagai berikut: *1. MRT Jakarta Project CP205 (Trackwork, Signaling)* ; 2. Pembangunan Sinyal dan Telekomunikasi Jalur Ganda Kereta Api antara Mojokerto-Sepanjang Lintas Surabaya Solo (Persinyalan dan Telekomunikasi); 3. SHMS Tata Kawasan Bendungan Pamukkulu kab. Takalar ; 4. SHMS Jembatan Pulau Balang; 5. SHMS Jembatan Kali Kuto - Semarang; 6. Proyek SHMS Anutapura Medical Centre (AMC), Palu; 7. Proyek SHMS Tol Layang A.P. Pettarani, Makassar; 8. Proyek SHMS Terowongan Kereta Api Antara Mrawan-Kalibaru; 9. Proyek SHMS pada penggantian dan/atau duplikasi jembatan Callender Hamilton (CH) di pulau Jawa. Adapun terkait bidang usaha Sipil dan Post-Tensioning juga telah dijalankan di tahun 2024. WIKA Beton has carried out business activities in the following projects: 1. MRT Jakarta Project CP205 (Trackwork, Signaling) ; 2. Construction of Signaling and Telecommunications for the Double Track Railway between Mojokerto-Sepanjang Surabaya-Solo (Signaling and Telecommunications); 3. SHMS for the Pamukkulu Dam Area Planning, Takalar Regency; 4. SHMS for Pulau Balang Bridge; 5. SHMS for Kali Kuto Bridge - Semarang; 6. SHMS Project for Anutapura Medical Centre (AMC), Palu; 7. SHMS Project for A.P. Pettarani Elevated Toll Road, Makassar; 8. SHMS Project for the Railway Tunnel between Mrawan-Kalibaru; 9. SHMS Project for the replacement and/or duplication of the Callender Hamilton (CH) bridge on Java Island. WIKA Beton has also carried out the business related to Civil and Post-Tensioning in 2024.
C	Melakukan perencanaan, produksi dan penjualan produk/komponen bahan bangunan. Carrying out planning, production, and sales of building material products/ components.	Telah dijalankan Implemented	Kegiatan bisnis yang berkaitan dengan perencanaan, produksi dan penjualan produk/komponen bahan bangunan telah dilakukan dan menghasilkan diantaranya produk Quarry, beton pracetak/precast, dan beton siap pakai/Ready Mix. Business activities related to the planning, production and sales of building materials products/components have been carried out and produced quarry products, precast concrete, and ready-mix concrete.
D	Melakukan usaha impor dan ekspor yang terkait dengan kegiatan tersebut pada huruf A, B, dan C di atas. Carrying out import and export businesses related to the aforementioned A, B, and C points.	Telah dijalankan Implemented	WIKA Beton menjalankan aktivitas ekspor produk beton pracetak secara mandiri. Ekspor yang dilakukan ke pasar internasional diantaranya yaitu ke Taiwan melalui PT Citra Lautan Teduh (PT CLT) pada tahun 2021. WIKA Beton independently carries out export activities for precast concrete products. The Company's exported to international markets, namely to Taiwan through PT Citra Lautan Teduh (PT CLT) in 2021.

No.	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Company Position	Status	Keterangan Description
	Kegiatan Usaha Penunjang Supporting Business Activities		
2.	Untuk mencapai maksud dan tujuan WIKA Beton, WIKA Beton dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: To achieve its purposes and objectives, WIKA Beton carries out the following primary business activities:		
A	Melakukan Usaha Industri dan Perdagangan Bahan Produksi Beton: 1. Batu Hias dan Batu Bangunan; 2. Penggalian Kerikil (sirtu); 3. Penggalian Pasir; 4. Penggalian tanah dan tanah liat; 5. Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya; 6. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya; 7. Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api; 8. Industri Semen; 9. Industri Mortar atau Beton Siap Pakai; 10. Industri Barang dari Batu untuk Keperluan RumahTangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan; 11. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya; 12. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak; 13. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu. 14. Perdagangan Besar Berbagai Macam Materiał Bangunan; 15. Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam; 16. Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi; 17. Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu. Engaging in Industrial and Trade Efforts for Concrete Production, WIKA Beton covers the following areas: 1. Decorative Stones and Building Stones; 2. Gravel Excavation (sirtu); 3. Sand Excavation; 4. Soil and Clay Excavation; 5. Excavation of other stones, sand, and clay; 6. Supporting Activities for Mining and Other Excavations; 7. Fire-resistant Brick, Mortar, Cement, and Similar Industries; 8. Cement Industry; 9. Mortar or Ready-Mix Concrete Industry; 10. Stone Goods Industry for Household, Decorative, and Building Materials; 11. Wholesale Tradet of Land Transportation Equipment (excluding cars, motorcycles, etc.), spare parts, and accessories; 12. Wholesale Trade based on Service Fees or Contracts; 13. Wholesale Trade of Cement, Lime, Sand, and Stone. 14. Wholesale Trading of various Building Materials; 15. Wholesale Trading of Non-Metallic Minerals; 16. Retail Trading of Metal Goods for Construction Materials; 17. Retail Trading of Cement, Lime, Sand, and Stone.	Telah dijalankan Implemented	Bisnis konstruksi sipil telah dijalankan WIKA Beton, diantaranya pada proyek berikut: 1. Proyek Bendungan Cibeet Paket 3 2. Proyek Tol Betung Jambi Seksi 2B 3. Proyek Pembangunan Harbour Road 2 4. Proyek Pembangunan MMP Nickel Smelter 5. Proyek Bendungan Karangnongko 1 6. Proyek Pembangunan Jakarta Sewerage Sistem 7. Pembangunan Jalan dalam KIPP : Peningkatan Jalan Kawasan HPK 8. Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek Sisi Selatan 9. Proyek Pembangunan Chandra Asri Alkali 10. Proyek Pembangunan Jalan Tol Betung Jambi Seksi 4 11. "Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek Sisi Selatan Paket 2B " 12. Proyek Pembangunan Jalan Di Dalam KIPP : Peningkatan Jalan Kawasan Hankam dan Lingkar Sepaku 2 13. Proyek Pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 1B Segmen Bandara Sepinggan - Tol Balsam 14. Proyek Pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 15. Proyek Pembangunan Peningkatan Jalan Kawasan di KIPP Sepaku 16. Proyek Pembangunan Jalan Tol Probowangi 17. Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak WIKA Beton's civil engineering business has been carried out through various projects, including: 1. Cibeet Dam Project Package 3 2. Betung Jambi Toll Road Section 2B Project 3. Harbour Road 2 Construction Project 4. MMP Nickel Smelter Construction Project 5. Karangnongko Dam 1 Project 6. Jakarta Sewerage System Construction Project 7. Internal Road Construction in KIPP: Improvement of HPK Area Roads 8. Jakarta–Cikampek Toll Road South Side Project 9. Chandra Asri Alkali Construction Project 10. Betung Jambi Toll Road Section 4 Project 11. Jakarta–Cikampek Toll Road South Side Package 2B Project 12. Road Construction within KIPP: Improvement of Hankam Area Roads and Sepaku Ring Road 2 13. IKN Toll Road Section 1B Construction Project, Sepinggan Airport Segment – Balsam Toll Road 14. IKN Toll Road Section 3B-2 Construction Project 15. Road Improvement Project within KIPP Sepaku Area 16. Probowangi Toll Road Construction Project 17. Semarang–Demak Toll Road Construction Project

No.	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Company Position	Status	Keterangan Description
B	Melakukan Usaha Jasa Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi dalam bidang usaha: 1. Konstruksi Gedung Hunian; 2. Konstruksi Gedung Industri; 3. Konstruksi Gedung Kesehatan; 4. Konstruksi Gedung Pendidikan; 5. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; 6. Konstruksi Gedung Lainnya; 7. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung; 8. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; 9. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan Underpass; 10. Konstruksi Jalan Rel; 11. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase; 12. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; 13. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas; 14. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; 15. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi; 16. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah Lainnya; 17. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; 18. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; 19. Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai; 20. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi dan Industri Lainnya; 21. Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; 22. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; 23. Penyiapan Lahan; 24. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis; 25. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa. Engages in the business of Planning, Execution, and Supervision of Construction in the following sectors: 1. Residential Building Construction; 2. Industrial Building Construction; 3. Healthcare Building Construction; 4. Educational Building Construction; 5. Entertainment and Sports Venue Construction; 6. Other Building Construction; 7. Prefabricated Building Construction Services; 8. Civil Road Construction; 9. Civil Construction of Bridges, Overpasses, Flyovers, and Underpasses; 10. Railway Track Construction;	Telah dijalankan Implemented	1. Proyek Pembangunan Jembatan Akses Utama IKK 2. Proyek Pembangunan Jembatan Metland Cibitung 3. Proyek Sholder Pile Tanah Grogot 4. Proyek Pembangunan Harbour Road 2 5. Proyek Pembangunan Mainroad Kawasan Proyek Parkland Podomoro 6. Proyek Pembangunan Pabrik Barry Callebaut Indonesia Karawang 7. Proyek Pembangunan Jakarta Sewerage Sistem 8. Pekerjaan Pondasi Werehouse 3 (WH3) dan Cold Storage 4 (CS4) Narogong 9. Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Palembang - Betung 1. Main Access Bridge Construction Project for IKK 2. Metland Cibitung Bridge Construction Project 3. Tanah Grogot Shoulder Pile Project 4. Harbour Road 2 Construction Project 5. Main Road Construction Project in Parkland Podomoro Project Area 6. Barry Callebaut Indonesia Factory Construction Project, Karawang 7. Jakarta Sewerage System Construction Project 8. Foundation Works for Warehouse 3 (WH3) and Cold Storage 4 (CS4), Narogong 9. Palembang–Betung Toll Road Construction Project

No.	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Company Position	Status	Keterangan Description
	10. Irrigation and Drainage Network Construction; 11. Civil Construction for Clean Water Treatment Facilities; 12. Civil Construction for Infrastructure and Facilities Solid, Liquid, and Gas Waste Treatment Systems; 13. Electrical Civil Construction; 14. Telecommunication Civil Construction for Transportation Infrastructure; 15. Irrigation, Communication, and Other Waste Network Construction; 16. Civil Construction of Sports Facilities; 17. Other Civil Building Construction, etc.; 18. Coastal Protection Construction Services; 19. Civil Construction for Chemical, Petrochemical, Pharmaceutical, and Other Industrial Processing Facilities; 20. Specialized Civil Construction, etc.; 21. Prefabricated Civil Building Construction Services; 22. Land Preparation; 23. Engineering Activities and Technical Consultation; 24. Research and Development of Technology and Engineering.		
C	Melakukan Usaha Reparasi, Pabrikasi, Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan Konstruksi, seperti: 1. Instalasi Listrik; 2. Instalasi Telekomunikasi; 3. Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara; 4. Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api; 5. Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya; 6. Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl; 7. Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; 8. Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator; 9. Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl; 10. Jasa Pengujian Laboratorium; 11. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi. Engages in the following construction activities: 1. Electricity Installation; 2. Telecommunication Installation; 3. Construction Installation Services for Maritime, River, and Air Navigation; 4. Railway Signal and Telecommunication Installation; 5. Road Signal and Signage Installation; 6. Other Construction Installations, etc.; 7. Foundation and Piling Installation; 8. Construction Equipment Rental with Operators; 9. Other Specialized Construction, etc.; 10. Laboratory Testing Services; 11. Technical Installation Inspection Services.	Telah dijalankan Implemented	Sejak didirikan, WIKA Beton telah aktif terlibat dalam pekerjaan mekanikal elektrikal. Fokus utama dari kegiatan ini adalah pelaksanaan proyek instalasi tiang listrik dan tiang telekomunikasi. Setelah itu, di tahun 2021, WIKA Beton telah memasuki pasar sistem sinyal kereta api terintegrasi atau sistem signaling yang meliputi kegiatan *engineering, procurement*, hingga *installation*. Proyek *signaling* yang telah diperoleh WIKA Beton antara lain sebagai berikut : 1. MRT Jakarta Project CP205; 2. Proyek Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda Kereta Api antara Mojokerto Sepanjang Lintas Surabaya-Solo. Since its establishment, WIKA Beton has been actively involved in electrical and mechanical works. The main focus of these activities has been the implementation of electrical pole and telecommunication pole installation projects. In 2021, WIKA Beton expanded into the integrated railway signaling systems market, covering engineering, procurement, and installation activities. Some of the signaling projects acquired by WIKA Beton include the following: 1. MRT Jakarta Project CP205; 2. Construction of the Signaling and Telecommunications System for the Double Track Railway between Mojokerto-Sepanjang Surabaya-Solo.

No.	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Company Position	Status	Keterangan Description
D	Melakukan Usaha Penyewaan dan Penyediaan Jasa Dalam Bidang Peralatan Konstruksi, seperti: 1. Pemasangan Perancah *(Steiger)*; 2. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil. Engaging in Rental and Provision of Services in the Construction Equipment Sector, including: 1. Installation of Scaffolding (Steiger); 2. Rental and Operational Leasing without Option Rights for Machinery and Construction and Civil Engineering Equipment.	Telah dijalankan Implemented	Pada bidang Engineering, Production Installation (EPI) proyek WIKA Beton diantaranya yaitu: 1. MRT *Jakarta Project CP205 (Trackwork, Signaling)* ; 2. LRT *Jakarta Project Phase 1B (Trackwork)* ; 3. Pembangunan Pabrik Pusri III B Palembang (Tiang Pancang, Jasa Pemancangan) ; 4. JLKA Kualanamu-Medan - Binjai (*Pier Precast, Box Girder*, Jasa Pemasangan); 5. NCICD (Tiang Pancang, Jasa Pemancangan); 6. PLTU Batang (Tiang Pancang, Jasa Pemancangan, *U-Ditch*); 7. *Bogor Outer Ring Road* (*Box Girder*, Jasa Pemasangan); 8. LRT Kelapa Gading-Velodrome (*Box Girder* dan Pemasangan, *Track Work, Slab Track, Ready Mix, Wessel*, Tiang Pancang); 9. Tol Layang A.P. Pettarani (Jasa Konstruksi, Tiang Pancang, *Box Girder*); 10. Dermaga Kijing (Balok Jembatan, Tiang Pancang, dan Jasa Pemasangan); 11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan Konstruksi Layang Citeureup (*Pier Precast*); 12. Pengaman Muara Sungai Bogowonto (*Tetrapod*); 13. RDMP Balikpapan (Tiang Pancang, Jasa Pemancangan) In the Engineering, Production, and Installation (EPI), WIKA Beton's projects among others: 1. MRT Jakarta Project CP205 (Trackwork, Signaling); 2. LRT Jakarta Project Phase 1B (Trackwork); 3. Construction of Pusri III B Factory in Palembang (Pile Installation, Piling Services); 4. JLKA Kualanamu-Medan - Binjai (Pier Precast, Box Girder, Installation Services); 5. NCICD (Pile Installation, Piling Services); 6. Batang Power Plant (Pile Installation, Piling Services, U-Ditch); 7. Bogor Outer Ring Road (Box Girder, Installation Services); 8. Kelapa Gading-Velodrome LRT (Box Girder and Installation, Track Work, Slab Track, Ready Mix Concrete, Wessel, Pile Installation); 9. A.P. Pettarani Elevated Toll Road (Construction Services, Pile Installation, Box Girder); 10. Kijing Dock (Bridge Beams, Pile Installation, and Installation Services); 11. Construction Training Facility & Infrastructure Development in Citeureup (Pier Precast); 12. Bogowonto River Mouth Protection (Tetrapod); 13. RDMP Balikpapan (Pile Installation, Piling Services).

No.	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Company Position	Status	Keterangan Description
E	Melakukan Perencanan, Pelaksanaan, Pengelolaan, Penjualan, Pembelian, Sewa Menyewa dan Perdagangan Jasa Ekspedisi/ Usaha Angkutan Darat dan Laut, seperti: 1. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum; 2. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus; 3. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum; 4. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus; 5. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan; 6. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus; 7. Angkutan Penyeberangan Umum Antar Provinsi untuk Barang; 8. Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Provinsi untuk Barang; 9. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut; 10. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan; 11. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT); 12. Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD); 13. Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL). Engages in the planning, execution, management, sales, purchasing, leasing, and trading of expedition services/land and sea transportation businesses, including: 1. Motorized Transport for General Goods; 2. Motorized Transport for Specialized Goods; 3. Domestic Sea Transport for General Goods; 4. Domestic Sea Transport for Specialized Goods; 5. River and Lake Transport for General Goods and/ or Animals; 6. River and Lake Transport for Specialized Goods; 7. Inter-Provincial Public Crossings for Goods; 8. Inter-Provincial Pioneer Crossings for Goods; 9. Activities in Maritime Port Services; 10. Activities in Crossing Port Services; 11. Transportation Management Services (TMS); 12. Freight Expedition Activities for Rail and Land Transportation (EMKA & EAD); 13. Freight Expedition Activities for Ship Cargo (EMKL).	Telah dijalankan Implemented	Pada bidang instalasi, proyek konstruksi WIKA Beton diantaranya: 1. *MRT Jakarta Project CP205;* 2. *LRT Jakarta Project Phase 1B ;* 3. Pembangunan Pabrik Pusri III B Palembang 4. JLKA Kualanamu-Medan - Binjai; 5. Proyek NCICD; 6. PLTU Batang; 7. Proyek Bogor Outer Ring Road; 8. LRT Kelapa Gading-Velodrome; 9. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda; 10. Tol Layang A.P. Pettarani Makassar; 11. Dermaga Kijing-Mempawah; 12. Jakarta International Stadium; 13. Proyek Sumur Resapan di Lingkungan Wilayah Provinsi DKI Jakarta; 14. Proyek SHMS Terowongan Kereta Api Antara Mrawan-Kalibaru; 15. Proyek Elevated Road & Bridge Indah Kiat Karawang (IKK) Power Plant. In the product installation works, WIKA Beton's construction projects, among others: 1. MRT Jakarta Project CP205; 2. LRT Jakarta Project Phase 1B; 3. Construction of Pusri III B Factory in Palembang; 4. JLKA Kualanamu-Medan - Binjai; 5. NCICD Project; 6. Batang Power Plant; 7. Bogor Outer Ring Road Project; 8. Kelapa Gading-Velodrome LRT; 9. Balikpapan-Samarinda Toll Road; 10. A.P. Pettarani Elevated Toll Road Makassar; 11. Kijing-Mempawah Dock; 12. Jakarta International Stadium; 13. Recharge Well Project in the DKI Jakarta Province Area; 14. SHMS Project for the Railway Tunnel between Mrawan-Kalibaru; 15. Elevated Road & Bridge Project for Indah Kiat Karawang (IKK) Power Plant.
F	*Treatment* dan pembuangan limbah berbahaya. Treatment and disposal of hazardous waste.	Telah dijalankan Implemented	WIKA Beton secara aktif berpartisipasi dalam implementasi pengelolaan limbah berbahaya (B3) dengan memanfaatkan *Fly Ash* sebagai bahan substitusi sebagian semen pada campuran beton. Pemanfaatan *Fly Ash* telah dipergunakan di berbagai Pabrik Produk Beton (PPB) antara lain: PPB Bogor, PPB Subang, PPB Majalengka, PPB Pasuruan, serta telah diuji coba di pabrik-pabrik lainnya oleh WIKA Beton. WIKA Beton actively participates in implementing B3 waste management by utilizing Fly Ash as a partial substitution material for cement in the concrete mix. The use of Fly Ash has been utilized in several Concrete Plant (PPB), such as PPB Bogor, PPB Subang, PPB Majalengka, PPB Pasuruan, and WIKA Beton continues to test its utilization for other plants.
G	*Real Estate* yang Dimiliki Sendiri atau Disewa. Real Estate Owned or Leased.	Telah dijalankan Implemented	Hingga akhir tahun 2024, WIKA Beton telah melakukan pengelolaan atas aset baik untuk diperjualbelikan maupun disewakan kepada pihak lainnya. As of the end of 2024, WIKA Beton has managed assets for both sale and lease to third parties.

No.	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Company Position	Status	Keterangan Description
H	Aktivitas Kantor Pusat Head Office Activities.	Telah dijalankan Implemented	WIKA Beton menerapkan aktivitas Kantor Pusat berupa pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan dalam bentuk pengendalian operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Bentuk aplikasi dari aktivitas kantor pusat antara lain: 1. Pengendalian atau *controlling* mekanisme pembayaran dari pelanggan yang dilaksanakan oleh Divisi Keuangan. 2. Evaluasi dan monitoring kinerja hasil usaha berupa pencapaian omzet kontrak dan omzet penjualan oleh Divisi Penjualan. WIKA Beton implements Head Office activities such as supervision and management of company units through operational control and management of related operations unit. Implementation of Head Office activities, among others: 1. The Financial Division oversees the management of customer payment mechanisms. 2. The Sales Division conducts evaluations and monitors business performance through contract revenue and sales revenue achievements.
I	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya. Research and Development in Natural Sciences and Other Engineering Technologies.	Telah dijalankan Implemented	WIKA Beton secara aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang difokuskan pada pengembangan produk dan material baru atau alternatif yang dibutuhkan pasar dan berdaya saing. Produk dan material baru yang dihasilkan diantaranya produk pracetak dengan beton porous dan *concrete impact*. WIKA Beton actively engages in research and development activities focused on the creation of new or alternative products and materials demanded by the market while also enhancing competitiveness. Among the innovations are precast products with porous concrete and concrete impact.
J	Penelitian Pasar. Market Research.	Telah dijalankan Implemented	Sebagai upaya dalam mempertahankan dan memperluas pangsa pasar, WIKA Beton melakukan penelitian pasar secara komprehensif dan terperinci untuk mengetahui *Market Share, Positioning*, Potensi Pasar, serta mengetahui persepsi pelanggan terhadap merk, kualitas produk, kualitas harga, promosi, pelayanan, dan tingkat loyalitas pelanggan yang akan digunakan dalam menyusun strategi pemasaran. Melalui upaya ini, Perseroan secara konsisten menghasilkan berbagai inovasi yang menunjang proses operasional dan mengoptimalkan layanan bagi mitra bisnis Perseroan. In an effort to maintain and expand market share, WIKA Beton conducts comprehensive and detailed market research to understand Market Share, Positioning, Market Potential, and to grasp Customer perceptions regarding brand, product quality, price quality, promotion, service, and customer loyalty levels, which will be utilized in formulating marketing strategies. Through this endeavor, the Company consistently initiated various innovations that propel the Company's operational process and optimize services for business partners.



Produk dan Jasa yang Dihasilkan
Products and Services Produced

Keberhasilan WIKA Beton untuk menjadi yang terdepan pada lanskap persaingan ditentukan oleh kemampuan dalam menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Semangat tersebut mengiringi jejak langkah Perseroan untuk terus mempertahankan predikat sebagai produsen terbesar produk beton pracetak di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara.

The success of WIKA Beton to stay ahead in the competitive landscape is determined by the ability to produce quality products and services. This passion accompanies the footsteps of the Company to continuously maintain the title as the biggest producer of precast concrete products in Indonesia and Southeast Asia.

Perseroan memastikan kualitas produknya melalui implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan SNI 6880:2016. Pabrik proses produksi yang tersebar di seluruh Indonesia menerapkan standar kualitas internasional. Perseroan memastikan layanan yang andal dan mudah diakses sehingga memenuhi ekspektasi pelanggan dengan optimal.

The Company ensures the quality of its products through the implementation of Quality Management System ISO 9001:2015 and SNI 6880:2016. Production process plants across Indonesia implement international quality standards. The Company ensures reliable and accessible services that optimally fulfill customer expectations.

Hingga 31 Desember 2025, produk dan jasa yang ditawarkan Perseroan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025, products and services offered the Company is as follows:

Produk
Product

Tiang Beton
PC Poles
- Tiang Listrik Distribusi
  PC Poles for Electrical Distribution Line
- Tiang Listrik Transmisi
  Segmental PC Poles for Electrical Transmission Line
- Tiang Listrik Jalan Rel
  PC Catenary Poles
- Tiang Telepon
  PC Poles for Telecommunication Line
- Tiang Lampu
  Lighting PC Poles

Tiang Pancang
PC Piles
- Tiang Pancang Bulat Sentrifugal
  PC Spun Piles
- Tiang Pancang Segiempat
  PC Square Piles
- Tiang Pancang Segiempat Sentrifugal
  PC Spun Square Piles
- Tiang Pancang Segitiga
  PC Triangular Piles
- Cylinder Pile
  Cylinder Pile

Produk Beton Jalan Rel
Railway Concrete Products
- Bantalan Jalan KA
  PC Sleepers
- Slab Track
  Slab Track
- PC Turn Out Sleepers
  PC Turn Out Sleepers
- Concrete Level Crossing
  Concrete Level Crossing

Produk Beton untuk Jembatan
Bridge Concrete Products
- Balok-I (PC I Girder)
  Balok-I (PC I Girder)
- Balok-U (PC U Girder)
  Balok-U (PC U Girder)
- Balok-T (PC T Girder)
  Balok-T (PC T Girder)
- Bulb Tee
  Bulb Tee
- Balok Jembatan Berongga
  PC Voided Slab
- Diafragma Jembatan
  Bridge Diaphragms
- Pelat Lantai Jembatan
  Bridge Slabs
- Double Tee for Truss Bridge Floor
  Double Tee for Truss Bridge Floor
- Full Depth Slab for Concrete (Steel Bridge Floor)
  Full Depth Slab for Concrete (Steel Bridge Floor)
- PC Box Girder
  PC Box Girder
- Channel Girder
  Channel Girder

Produk
Product

Dinding Penahan Tanah
Retaining Wall
- Turap Beton Bergelombang
  Corrugated Prestressed Concrete Sheet Piles
- Turap Beton Persegi
  Flat Prestressed Concrete Sheet Piles
- Dinding Penyekat Beton
  PC Diafragma Wall
- *L Shape*
  L Shape
- *Gravity Wall Block*
  Gravity Wall Block

Produk Beton untuk Bangunan
Air Hydro Structure Concrete Products
- Pipa Beton
  Reinforced Concrete Pipes
- Pipa Silinder Beton
  Reinforced Concrete Cylinder Pipes
- Pipa Beton Bertekanan
  Pressure Concrete Pipes
- Saluran Terbuka
  Open Channel
- *Lining* Beton
  Concrete Lining
- *U-Ditch*
  U-Ditch
- Sumur Resapan
  Infiltration Well
- *Box Culvert*
  Box Culvert
- *Sabo Dam Precast*
  Sabo Dam Precast
- *Aquapond*
  Aquapond

Produk Beton untuk Bangunan Gedung dan Perumahan
Building and Housing Concrete Products
- Kolom Beton Gedung
  Concrete Columns
- Balok Beton Gedung
  Concrete Beams
- Pelat Lantai Beton Gedung
  Concrete Floor Slabs
- Tangga Beton Gedung
  Concrete Stairs
- *Modular* Pracetak
  Modular Precast
- Dinding Partisi
  Partition Wall
- *Hollow Core Slab*
  Hollow Core Slab
- Rumah *Precast*
  Precast Housing

Produk Beton untuk Dermaga
Marine Structure Concrete Products
- Balok Beton Dermaga
  Concrete Beams
- Plat Lantai Beton Dermaga
  Concrete Floor Slabs Breakwaters
- Beton Pemecah Gelombang
  Concrete Breakwaters
  - *Tetrapod*
    Tetrapod
  - *A-Jack*
    A-Jack
- Sistem Modular Pracetak Dermaga
  Modular System Precast Dock

Produk Beton Lain-Lain
Other Concrete Products
- Pagar
  Fences
- Saluran Beton Utilitas Bawah Tanah
  Concrete Underground Utility Ducting
- *Segment Tunneling*
  Segment Tunneling
- *Precast Pier Segmental*
  Precast Pier Segmental
- *Rigid Pavement*
  Rigid Pavement
- Dermaga Apung
  Floating Pontoon
- *Pipe Rack*
  Pipe Rack
- *Manhole*
  Manhole
- *Buttress Wall*
  Buttress Wall
- *Ready Mix*
  Ready Mix

Jasa
Services

- Jasa Pengiriman Produk Beton
  Precast Concrete Delivery Services
- *Post Tensioning (Stressing)*
  Post Tensioning (Stressing)
- Jasa Pemasangan Produk Beton
  Precast Concrete Installation Services
- *Trading Agency*
  Trading Agency
- Konstruksi
  Construction
- *Structural Health Monitoring System (SHMS)*
  Structural Health Monitoring System (SHMS)
- *Expertise*
  Expertise

Material
Material

Quarry
Quarry

- *Split*
  Split
- *Screening*
  Screening
- Abu Batu
  Fly Ash
- *Admixture*
  Admixture



Wilayah Kerja dan Peta Operasional
Work Area and Operational Map



Kantor Pusat
Head Office

1. ***Head Office***

Pabrik Produk Beton
Concrete Plant

2. *Concrete Plant North* Sumatra
3. *Concrete Plant* Lampung
4. *Concrete Plant* Lampung - *Plant South* Lampung
5. *Concrete Plant* Bogor
6. *Concrete Plant* Subang - *Plant* Karawang
7. *Concrete Plant* Subang
8. *Concrete Plant* Majalengka
9. *Concrete Plant* Pasuruan I & II
10. *Concrete Plant South* Sulawesi I & II

Wilayah Penjualan
Sales Area

11. *Sales Area Office* I Medan
12. *Sales Area Office* II Palembang
13. *Sales Area Office* III Jakarta
14. *Sales Area Office* IV Balikpapan
15. *Sales Area Office* V Surabaya
16. *Sales Area Office* VI *South* Sulawesi



Anak Perusahaan
Subsidiary

17. CLT (*Subsidiary*)
18. WIKA Kraton (*Subsidiary*)
19. WIKA Pracetak Gedung (*Subsidiary*)
20. WIKA KOBE (*Subsidiary*)

Unit Operasi
Operation Unit

21. *Operation Unit* I
22. *Operation Unit* II
23. *Operation Unit* III
24. *Operation Unit* IV

Kantor Representatif
Representative Office

28. *Representative Office* Pekanbaru
29. *Representative Office* Semarang
30. *Representative Office* Pontianak
31. *Representative Office* Manado

Quarry
Quarry

25. *Quarry* South Lampung
26. *Quarry* Cigudeg
27. *Quarry* Donggala

Jetty
Jetty

32. *Jetty* CLT
33. *Jetty South* Lampung
34. *Jetty South* Donggala

Wilayah Penjualan
Sales Area

Guna meningkatkan daya saing dan mobilisasi distribusi produk, WIKA Beton menjalankan roda bisnisnya melalui 6 (enam) Wilayah Penjualan (WP). Seluruhnya berjalan dengan skema rantai pasok dan efektif sehingga menjadi kekuatan Perseroan dalam meningkatkan pangsa pasarnya dari tahun ke tahun. Hingga 31 Desember 2025, WP Perseroan adalah sebagai berikut:

- Wilayah Penjualan I
  Cakupan area: Daerah Istimewa Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Riau dan Kepulauan Riau menjadi Wilayah Operasi PT Citra Lautan Teduh.
- Wilayah Penjualan II
  Cakupan area: Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung.
- Wilayah Penjualan III
  Cakupan area: DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
- Wilayah Penjualan IV
  Cakupan area: Pulau Kalimantan.
- Wilayah Penjualan V
  Cakupan area: Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- Wilayah Penjualan VI
  Cakupan area: Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.

To enhance competitiveness and mobilize product distribution, WIKA Beton runs its business through 6 (six) Sales Areas (WP). All of them run with a supply chain scheme and effectively become the Company's strength in increasing its market share from year to year. As of December 31, 2025, the Company's WPs are as follows:

- Sales Area I
  Coverage area: Special Region of Nanggroe Aceh Darussalam, North Sumatra Province, and West Sumatra Province. Riau Province and Riau Islands are PT Citra Lautan Teduh's Operation Area.
- Sales Area II
  Coverage area: South Sumatra, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, and Lampung.
- Sales Area III
  Coverage area: DKI Jakarta, Banten, and West Java.
- Sales Area IV
  Coverage area: Kalimantan Island.
- Sales Area V
  Coverage area: Central Java, D.I. Yogyakarta, East Java, Madura, Bali, West Nusa Tenggara, and East Nusa Tenggara.
- Sales Area VI
  Coverage area: Sulawesi, Maluku, and Papua Islands.



Nama dan Alamat Perusahaan Anak, Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan

Name and Address of Subsidiaries, Branch Offices and Representative Offices

Kantor Pusat / Head Office

PT Wijaya Karya Beton Tbk
Tamansari Hive Office Lt. 3-5,
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur 13340
Tel: 0218192802
Fax: 02185903872
e-Mail: sekper@wika-beton.co.id
Web: www.wikabeton.co.id

(*) Perubahan alamat Kantor Pusat Perseroan telah disampaikan pada website IDX melalui Surat No. SE.01.01/WB-0A.1236/2025 tanggal 22 Desember 2025.
(*) The change of the Company's Head Office address has been disclosed on the IDX website through Letter No. SE.01.01/WB-0A.1236/2025 dated 22 December 2025.

Unit Operasi / Operation Unit

Unit Operasi 1
Jl. M.T. Haryono No. 12 Kel. Cipinang Cempedak,
Kec. Jatinegara Jakarta 13340 DKI Jakarta
Email : marketing.ope01@gmail.com

Unit Operasi 2
Jl. Surya Madya III Kav. I-34 Kawasan Industri Surya Cipta, Karawang 41363
Email : marketing.op2wikabeton@gmail.com

Unit Operasi 3
Perumahan Taman Pinang Indah Blok D6 No. 3, Desa Banjarbendo Kec. Sidoarjo, Sidoarjo 61225
Email : marketing.operasi3@gmail.com

Unit Operasi 4
Grand City Ruko Palladium Blok H26
Jl. Sinar Mas Land Boulevard Kec. Balikpapan Utara
Balikpapan 76114
Email :
- unitibukotanegara@wika-beton.co.id
- witonikn@gmail.com

Pabrik pengolahan / Crushing Plant

Crushing Plant Bogor
Desa Mekar Jaya, Kec. Cigudeg Bogor 16660
Fax : (0251) 8680232

Crushing Plant Lampung Selatan
Jl. Wijaya Karya Beton (Jl. Lintas Timur Sumatera Km. 4)
Desa Sumur, Kec. Ketapang Lampung Selatan 35596
Tel : 0821 6577 9500
Email : mc01@wika-beton.co.id

Crushing Plant Donggala
Jl. Poros Palu Donggala Km. 23 Desa Loli Dondo,
Kec. Banawa Donggala 94351

Pabrik Produk Beton / Concrete Plant

PPB Sumatera Utara
Jl. Raya Binjai Km. 15,5 No. 1
Kel. Diski, Kec. Deli Serdang Medan 20351
Tel : (061) 8821543

PPB Subang
Jl. Raya Cipeundeuy - Pabuaran Km. 3,6 Desa Karang Mukti, Kec. Cipeundeuy Subang 41272
Tel : (0260) 7615584

PPB Pasuruan I
Jl. Raya Kajapanan No. 323 Kec. Gempol, Pasuruan 67155
Tel : (0343) 851488, 853161, 852130
Fax : (0343) 851480

PPB Pasuruan II
Jln. Raya By Pas, Desa/Kelurahan Winong, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

PPB Subang Plant Karawang
Jl. Surya Madya III Kav. I-34 Kawasan Industri Surya Cipta, Karawang 41363
Tel : (021) 89115167, (0267) 8630315
Fax : (0267) 8610259

PPB Sulawesi Selatan I
Jl. Kima Raya II Kav. S/4-5-6
Kawasan Industri Makassar
Makassar 90241
Tel : (0411) 511764

PPB Sulawesi Selatan II
Jl. Kima 20 Kav. EE/23
Kawasan Industri Makassar
Makassar 90241

PPB Lampung
Jl. Raya Tegineneng Km. 34,5
Desa Bumi Agung, Kec. Tegineneng
Lampung 35363

PPB Lampung Plant Lampung Selatan
Jl. Wijaya Karya Beton
(Jl. Lintas Timur Sumatra Km. 4)
Desa Sumur, Kec. Ketapang
Lampung Selatan 35596

PPB Bogor
Kawasan Industri WIKA, Jl. Raya Narogong KM 26,
Cileungsi – Kab. Bogor 16820.
Tel : (021) 8674010

PPB Majalengka
Jl. Raya Barat Brujul Kulon, Burujul Kulon, Kec. Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45454
Phone: (0233) 881425

Perusahaan Anak | Subsidiaries

PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKA KOBE)
Jl. Surya Madya III Kav. I-28Q Kawasan Industri Surya Cipta Karawang 41361 Jawa Barat
Tel : (0267) 8630416, 8630417, 8637597
Fax : (0267) 8630349
Email : marketing@wikakobe.com

PT Citra Lautan Teduh (CLT)
Jl. Hang Jebat Km. 1 Batu Besar Nongsa, Batam 29466
Tel : (0778) 761185, 761186
Web : http://wikaclt.co.id
Email : marketingwikaclt@gmail.com

PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKA Kraton)
Jl. Biru Laut X No. 20-21, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara Jakarta 13340 DKI Jakarta
Email : wikakrakatau.beton@gmail.com

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WIKA PRACETAK GEDUNG)
Menara MTH Lantai 15
Jl. M.T. Haryono Kav. 23 RT 2/RW 2 Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet Jakarta Selatan 12780 DKI Jakarta
Tel : (021) 22839380
Email : marketing@wikapracetak.co.id
Web : http://wikapracetak.co.id

Kantor Representatif | Representative Offices

Pekanbaru
Perkantoran Grand Sudirman Blok D-16, Jl. Parit Indah/ Datuk Setia Maharaja Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru 28282
Tel : (0761) 849909
Mobile : 0811 8000 408
Email : riau@wika-beton.co.id

Pontianak
Jl. Pak Benceng No. 18 Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat, 78113
Tel : (0542) 8527405
Email : wp4@wika-beton.co.id

Manado
Tamansari Metropolitan Blok A2 No. 3 Jl. A.A. Maramis, Kel. Paniki Bawah Kec. Mapanget, Manado, Sulawesi Utara
Tel : (0431) 7243812
Email : wilayah6@wika-beton.co.id
Email : wilayah6@wika-beton.co.id

Semarang
Perumahan Taman Setiabudi Banyumanik Blok F No.31, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50268.
Tel : (031) 99003395, 99003396
Fax : (031) 99003384
Email : wilayah5@wika-beton.co.id

Wilayah Penjualan | Sales Area

Wilayah Penjualan 1 | Sales Area 1
Jl. Gunung Krakatau No. 15 Medan 20239
Tel : (061) 6627577, 6626225
Fax : (061) 6628076
Email : wilayah1@wika-beton.co.id

Wilayah Penjualan 2 | Sales Area 2
Jl. Bambang Utoyo - Rama Kasih Raya No. 957 Palembang, 30115

Wilayah Penjualan 3 | Sales Area 3
Jl. M.T. Haryono No. 12 Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara Jakarta 13340 DKI Jakarta
Tel : (021) 8573466, 8193024
Email : wilayah3@wika-beton.co.id

Wilayah Penjualan 4 | Sales Area 4
Balikpapan Super Blok (BSB) / E-Walk Blok A No. 1
Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan Selatan 76114
Tel : (0542) 8527405
Email : wp4@wika-beton.co.id

Wilayah Penjualan 5 | Sales Area 5
Gedung Tamansari Papilio Lantai 5 Jl. Ahmad Yani No. 176-178 Surabaya, 60235
Tel : (031) 99003395, 99003396
Fax : (031) 99003384
Email : wilayah5@wika-beton.co.id

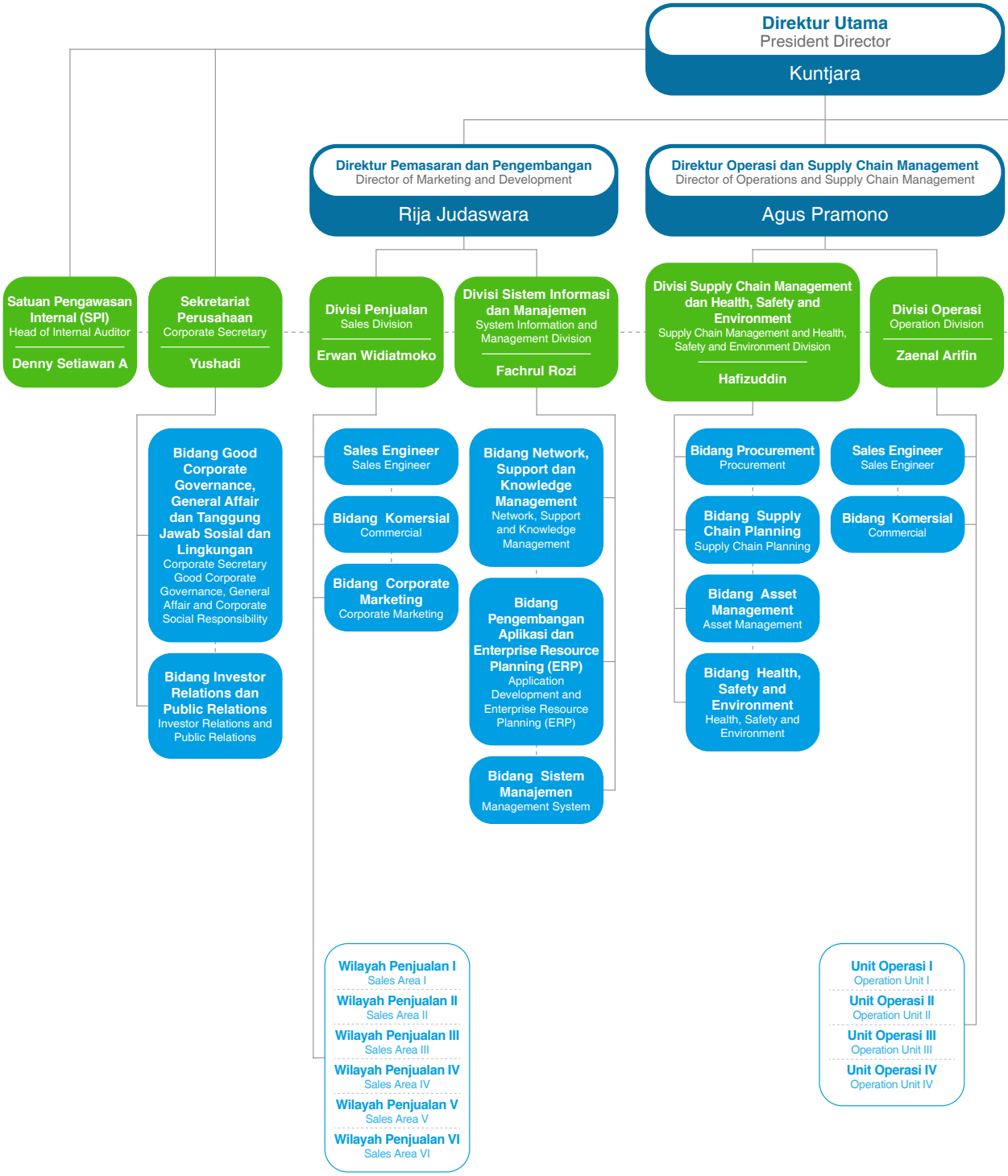
Wilayah Penjualan 6 | Sales Area 6
Jl. Kima Raya II Kav. S/4-5-6 Kawasan Industri Makassar, Makassar 90241
Tel : (0411) 511761, 4723100, 4723200
Fax : (0411) 511955, 4723166
Email : wilayah6@wika-beton.co.id

Sekretariat PPWB | PPWB Secretariat

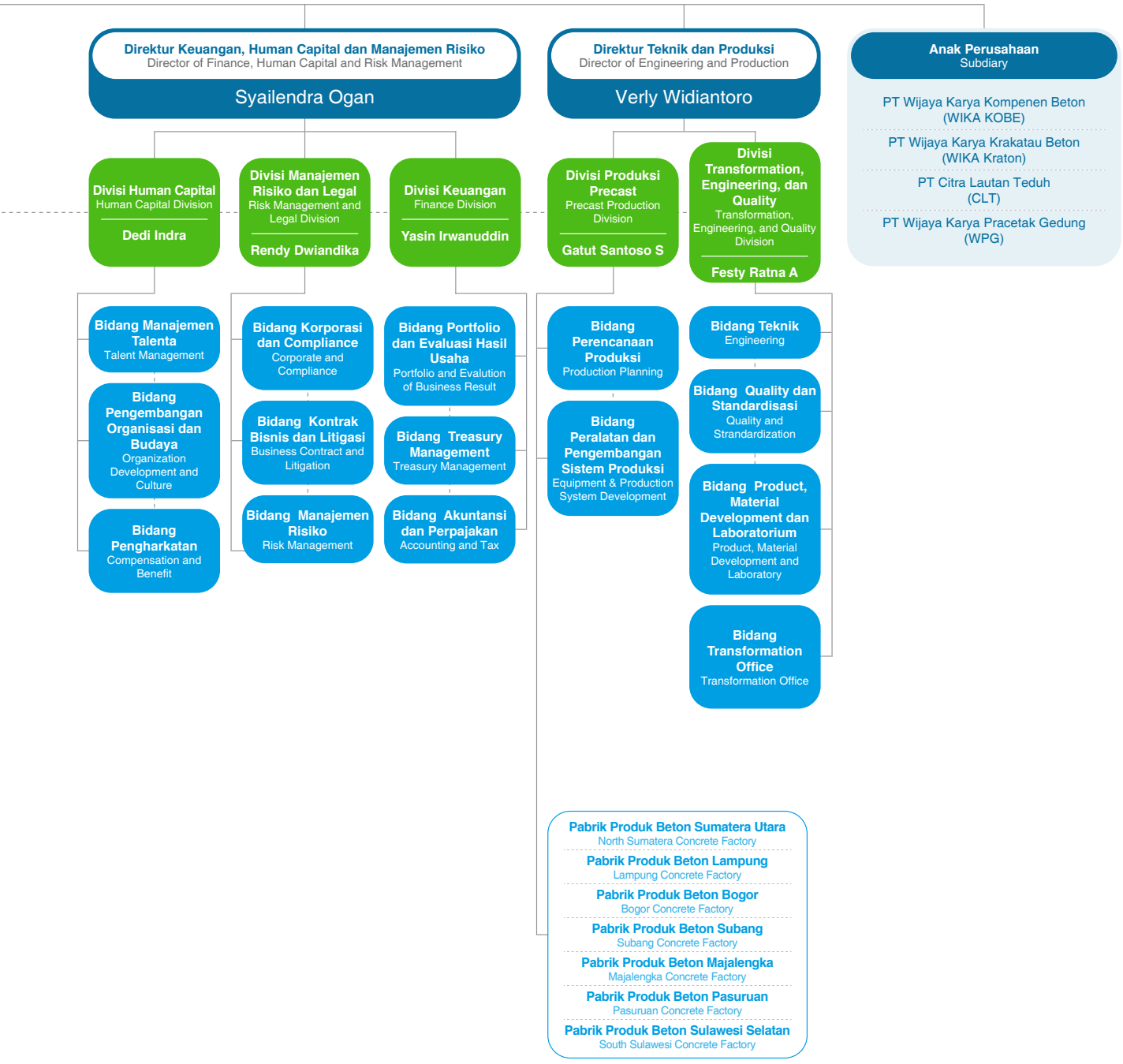
PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Gedung WIKA Tower 1 Lantai 2-5 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340 DKI Jakarta
Tel : (021) 8192802 (Hunting)
Email : ppwb@wika-beton.co.id

Struktur Organisasi Perusahaan
Company Organization Structure

Untuk meningkatkan daya saing Perusahaan dan mengadaptasi perubahan lingkungan usaha sesuai dengan visi dan misi, Manajemen Perusahaan telah menetapkan perubahan Struktur Organisasi Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.01.01/WB-0A.0010/2025 tentang Struktur Organisasi PT Wijaya Karya Beton Tbk pada tanggal 1 Juli 2025. Struktur Organisasi Perseroan dapat diuraikan sebagai berikut:



To improve the Company's competitiveness and adapt to changes in the business environment according to the vision and mission, the Company's Management has determined changes in the Company's Organizational Structure based on Decree Number SK.01.01/WB-0A.0010/2025 regarding the Organizational Structure of PT Wijaya Karya Beton Tbk on July, 1st 2025. The Company's Organizational Structure can be described as follows:



Keanggotaan Organisasi/Asosiasi
Membership in Associations/Organizations

Sebagai perusahaan yang selalu mengembangkan jaringan bisnis dan membangun hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, Perseroan aktif terlibat dalam beberapa asosiasi profesional dan organisasi. Partisipasi ini bukan hanya sebagai anggota, tetapi juga keterlibatan aktif. Keanggotaan ini memberikan Perseroan keuntungan dalam mengoptimalkan jaringan bisnis dan meningkatkan saluran komunikasi. Dengan terlibat dalam asosiasi dan organisasi tersebut, Perseroan mampu merespons isu-isu dengan efektif dan mengoptimalkan operasionalnya.

As a company consistently expanding its business network and cultivating relationships with various stakeholders, the Company actively participates in several professional associations and organizations. This engagement goes beyond membership, an active involvement. This membership provides the advantage of optimizing business networks and enhancing communication channels. By participating in these associations and organizations, the Company is able to effectively respond to issues and optimize its operations.

Berikut adalah rincian keanggotaan WIKA Beton dalam asosiasi dan organisasi:

Below are the details of WIKA BETON's membership in associations and organizations:

Nama Asosiasi/Perhimpunan Associations/Organizations Name	**Posisi di Asosiasi/ Perhimpunan** Position Associations/ Organizations	**Skala** Scale
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesian Chamber of Commerce and Industry	Anggota Member	Nasional National
Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) Indonesian Precast and Precast Concrete Association	Anggota Member	Nasional National
Asosiasi Produsen Tiang Beton Pratekan Indonesia (APTI) Asosiasi Produsen Tiang Beton Pratekan Indonesia (APTI)	Anggota Member	Nasional National
Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (ARDIN) Association of Indonesian Distributor, Agency and Industrial Goods Trading Companies (ARDIN INDONESIA)	Anggota Member	Nasional National
Asosiasi Kontraktor Mekanikal Elektrikal Indonesia (Akmelindo) Asosiasi Kontraktor Mekanikal Elektrikal Indonesia (Akmelindo)	Anggota Member	Nasional National
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Indonesian Issuers Association	Anggota Member	Nasional National
Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Anggota Member	Nasional National
Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI) Indonesian Society for Geotechnical Engineering (ISGE)	Anggota Member	Nasional National
Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia (IAPPI) Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia	Anggota Member	Nasional National
Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Indonesian Road Development Association (IRDA)	Anggota Member	Nasional National
Masyarakat Perkeretaapian (MASKA) Indonesia Railway Society	Anggota Member	Nasional National
Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) Indonesian Society of Civil and Structural Engineers	Anggota Member	Nasional National
Persatuan Insinyur Indonesia (PII) The Institution of Engineers Indonesia	Anggota Member	Nasional National

Jumlah Karyawan dalam Tahun Buku
Number of the Employee in the Financial Year

Performa dan strategi Perseroan menjadi acuan utama dalam menetapkan komposisi dan demografi pegawainya. Per 31 Desember 2025, WIKA Beton dan entitas anaknya memiliki total 905 karyawan, mengalami penurunan sebesar 14,7% dari 1.061 karyawan di tahun 2024. Penurunan jumlah karyawan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi organisasi dan optimalisasi sumber daya manusia yang dilakukan Perseroan, sejalan dengan penyesuaian kebutuhan operasional dan strategi penguatan produktivitas. Penyesuaian ini terutama dipengaruhi oleh pegawai yang memasuki masa pensiun, pemutusan hubungan kerja atas keputusan Perusahaan akibat dilakukannya penutupan pabrik, pegawai yang meninggal dunia, serta pegawai yang mengundurkan diri, tanpa mengurangi komitmen Perseroan dalam menjaga keberlangsungan operasional dan kualitas kinerja.

Dari segi tingkat pendidikan, mayoritas karyawan berasal dari lulusan SMA/sederajat sebesar 43,31%, diikuti oleh Strata-1 sebesar 40,55%, Strata-2 sebesar 6,08%, Diploma sebesar 5,41%, dan Strata-3 sebesar 0,11%. Sementara itu, karyawan dengan tingkat pendidikan di bawah SMA mencakup 0,88% dari total karyawan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, proporsi karyawan dengan pendidikan SMA mengalami penurunan dari 47,03% menjadi 43,31%, sementara proporsi karyawan dengan pendidikan Strata-1 dan Strata-2 menunjukkan peningkatan, mencerminkan upaya Perseroan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui tenaga kerja yang lebih terdidik.

Berdasarkan status kepegawaian, sebanyak 69,29% karyawan tergolong sebagai tenaga terampil, sedangkan 30,71% merupakan pegawai organik. Dari sisi kompetensi, 81,33% karyawan memiliki latar belakang teknik, sementara 18,67% berasal dari bidang non-teknik, hal ini menegaskan bahwa tenaga kerja di WIKA Beton masih didominasi oleh keahlian teknis.

Dari sisi usia, komposisi karyawan didominasi oleh kelompok usia produktif. Sebanyak 26,30% karyawan berada pada kelompok usia 36–40 tahun, diikuti oleh 23,65% pada usia 31–35 tahun, dan 20,33% pada usia 41–45 tahun. Sementara itu, karyawan berusia 25–30 tahun mencakup 1,88%. Di sisi lain, kelompok usia yang lebih senior relatif lebih kecil, dengan 11,71% pada usia 46–50 tahun, 11,82% pada usia 51–55 tahun, dan 0,66% di atas 55 tahun. Komposisi ini mencerminkan tenaga kerja yang didominasi oleh usia produktif dengan tingkat pengalaman kerja yang memadai.

The Company's performance and strategy serve as the primary reference in determining its workforce composition and demographics. As of December 31, 2025, WIKA Beton and its subsidiaries employed a total of 905 employees, representing a decrease of 14.7% from 1,061 employees in 2024. This reduction forms part of the Company's organizational efficiency initiatives and human capital optimization efforts, in line with adjustments to operational requirements and its strategy to enhance productivity. The workforce adjustment was mainly driven by employees entering retirement, terminations initiated by the Company following factory closures, employee fatalities, as well as voluntary resignations, without diminishing the Company's commitment to maintaining operational continuity and performance quality.

In terms of education level, the majority of employees are high school graduates or equivalent, making up 43,43%, followed by bachelor's degree holders at 42,98%, diploma holders at 5,57%, master's degree holders at 6,74%, and Doctoral degree holders at 0.11%. Meanwhile, employees with education below high school account for only 0.99% of the total workforce. Compared to the previous year, the percentage of employees with a high school education has slightly decreased to 43.43% from 48.54%, while the number of employees with higher education remains relatively stable.

Regarding employment status, 69.29% of employees are skilled workers, while 30.71% are permanent employees. In expertise, 81.33% of employees have a technical background, while 18.67% come from non-technical expertise, indicating that the workforce at WIKA Beton is still predominantly composed of technical expertise.

In terms of age, the workforce is dominated by the productive age group. A total of 26.30% of employees are in the 36–40 age group, followed by 23.65% in the 31–35 age group, and 20.33% in the 41–45 age group. Meanwhile, employees aged 25–30 account for 1.88%. On the other hand, the older age groups are relatively smaller, with 11.71% aged 46–50, 11.82% aged 51–55, and 0.66% over 55. This composition reflects a workforce dominated by individuals in the productive age group with sufficient work experience.

Secara keseluruhan, komposisi tenaga kerja WIKA Beton tahun 2025 menunjukkan adanya efisiensi jumlah karyawan, dominasi tenaga kerja teknis, serta fokus pada keberlanjutan tenaga kerja produktif. WIKA Beton berupaya meningkatkan efektivitas operasional serta pengelolaan sumber daya manusia secara strategis sesuai dengan kebutuhan bisnisnya.

Overall, the composition of WIKA Beton's workforce in 2025 shows an efficient number of employees, a dominance of technical workers, and a focus on maintaining a productive workforce. WIKA Beton strives to improve operational effectiveness and strategically manage human resources to meet its business needs.

Lebih lanjut, Perseroan melakukan klasifikasi pegawai berdasarkan berbagai kriteria, seperti tingkat pendidikan, level organisasi, status kepegawaian, kompetensi, kelompok usia, dan jenis kelamin.

Furthermore, the Company classifies its employees based on various criteria, such as educational level, organizational hierarchy, employment status, competencies, age groups, and gender.

Tabel perbandingan komposisi dan demografi pegawai selama dua tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

The table comparing the composition and demographics of employees in two years is as follows:

Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Composition based on Education Level

Tingkat Pendidikan Education Level	2025				2024			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	%	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	%
Perseroan **The Company**								
Strata 3 Doctorate	1	0	1	0,11	0	0	0	0.00
Strata 2 Postgraduate	48	7	55	6,08	41	6	47	4,90
Strata 1 Bachelors	327	40	367	40,55	347	46	393	37,79
Diploma Diploma	43	6	49	5,41	57	9	66	5,84
SMA dan Sederajat High School and Equivalent	391	1	392	43,31	511	2	513	47,03
Di bawah SMA Elementary	8	0	8	0,88	7	0	7	1,13
Subtotal **Subtotal**	**818**	**54**	**872**	**96,35**	**963**	**63**	**1.026**	**96,70**
Entitas Anak **Subsidiaries**								
Strata 3 Doctorate	0	0	0	0,00	0	0	0	0.00
Strata 2 Postgraduate	6	0	6	0,66	8	0	8	0,66
Strata 1 Bachelors	22	0	22	2,43	21	0	21	2,07
Diploma Diploma	3	0	3	0,33	4	0	4	0,38
SMA dan Sederajat High School and Equivalent	1	0	1	0,11	2	0	2	0,09
Di bawah SMA Elementary	1	0	1	0,11	0	0	0	0,00
Subtotal **Subtotal**	**33**	**0**	**33**	**3,65**	**35**	**0**	**35**	**3,30**
Jumlah **total**	**854**	**54**	**905**	**100,00**	**998**	**63**	**1.061**	**100,00**

Komposisi Pegawai berdasarkan Level Organisasi
Employee Composition based on Organizational Level

Level Organisasi Organizational Level	2025				2024			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	%	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	%
Perseroan **The Company**								
Manajer Divisi/ Ahli Utama I Division Manager/ Principal Expert I	11	1	12	1,33	12	1	13	1,23
Manajer Wilayah Penjualan/Manajer Pabrik Produk Beton/ Manajer Unit Operasi Sales Area Manager / Concrete Products Plant Manager / Operations Unit Manager	17	0	17	1,88	23	0	23	2,17
Manajer Bidang/Ahli Utama 2/Ahli Madya 1 Section Manager/Senior Expert 2/Middle Expert 1	35	5	40	4,42	33	4	37	3,49
Koordinator/Supervisor/ Kepala Seksi/Ahli Madya 2/ Ahli Muda Coordinator/ Supervisor/ Section Head/Middle Expert Coordinator 2/Junior Expert	146	17	163	18,01	152	21	173	16,31
Asisten Kepala Seksi Assistant Manager	46	3	49	5,41	48	4	52	4,90
Staf Staff	542	27	569	62,87	685	33	718	67,67
Masa Persiapan Pensiun Tidak Bekerja Pre-Retirement Period Not Employed	21	1	22	2,43	10	0	10	0,94
Subtotal **Subtotal**	**818**	**54**	**872**	**96,35**	**963**	**63**	**1.026**	**96,70**
Entitas Anak **Subsidiaries**								
Direktur Anak Perusahaan Subsidiaries' Board of Directors	4	0	4	0,44	4	0	4	0,38
Ahli Utama 1 Principal Expert I	1	0	1	0,11	0	0	0	
Manajer Manager	12	0	12	1,33	13	0	13	1,23
Kepala Seksi/Supervisor/ Koordinator/ Ahli Madya 2/ Ahli Muda Section Head/Supervisor/ Middle Expert Coordinator 2/ Junior Expert	12	0	12	1,33	15	0	15	1,41
Asisten Kepala Seksi Assistant Manager	0	0	0	0,00	**0**	0	0	0,00
Staf Staff	4	0	4	0,44	3	0	3	0,28
Masa Persiapan Pensiun Tidak Bekerja Pre-Retirement Period Not Employed	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Subtotal **Subtotal**	**33**	**0**	**33**	**3,65**	**35**	**0**	**35**	**3,30**
Jumlah **total**	**851**	**54**	**905**	**100,00**	**998**	**63**	**1.061**	**100,00**

Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian
Employee Composition based on Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2025				2024			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	%	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	%
Perseroan **The Company**								
Pegawai Organik Organic Employees	226	24	250	27,62	249	27	276	26,01
Pegawai Terampil Skilled Employees	592	30	622	68,73	714	36	750	70,69
Subtotal **Subtotal**	**818**	**54**	**872**	**96,35**	**963**	**63**	**1.026**	**96,70**
Entitas Anak **Subsidiaries**								
Pengurus (Masih Pegawai Perseroan) Administrator (The Company's Employees	4	0	4	0,44	4	0	4	0,38
Pegawai Organik Organic Employees	24	0	24	2,65	26	0	26	2,45
Pegawai Terampil Skilled Employees	5	0	5	0,55	5	0	5	0,47
Subtotal **Subtotal**	**33**	**0**	**33**	**3,65**	**35**	**0**	**35**	**3,30**
Jumlah **total**	**851**	**54**	**905**	**100,00**	**998**	**63**	**1.061**	**100,00**

Komposisi Pegawai berdasarkan Kompetensi
Employee Composition based on Competence

Status Kepegawaian Employment Status	2025				2024			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	%	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	%
Perseroan **The Company**								
Teknik Engineering	687	22	709	78,34	811	24	835	78,70
Non-Teknik Non-Engineering	131	32	163	18,01	152	39	191	18,00
Subtotal **Subtotal**	818	54	872	96,35	963	63	1.026	96,70
Entitas Anak **Subsidiaries**								
Teknik Engineering	27	0	27	2,98	28	0	28	2,64
Non-Teknik Non-Engineering	6	0	6	0,66	7	0	7	0,66
Subtotal **Subtotal**	**33**	**0**	**33**	**3,65**	**35**	**0**	**35**	**3,30**
Jumlah **total**	**851**	**54**	**905**	**100,00**	**998**	**63**	**1.061**	**100,00**

Komposisi Pegawai berdasarkan Kelompok Usia
Employee Composition based on Age Group

Kelompok Usia Age Group	2025				2024			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	%	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	%
Perseroan **The Company**								
> 55 tahun years old	6	0	6	0,66	4	1	5	0,47
51-55 tahun years old	105	2	107	11,82	146	5	151	14,23
46-50 tahun years old	105	1	106	11,71	105	2	107	10,08
41-45 tahun years old	178	6	184	20,33	180	5	185	17,44
36-40 tahun years old	218	20	238	26,30	245	11	256	24,13
31-35 tahun years old	190	24	214	23,65	218	30	248	23,37
25-30 tahun years old	16	1	17	1,88	65	9	74	6,97
Subtotal **Subtotal**	**818**	**54**	**872**	**96,35**	**963**	**63**	**1.026**	**96,70**
Entitas Anak **Subsidiaries**								
> 55 tahun years old	0	0	0	0,00	1	0	1	0,09
51-55 tahun years old	7	0	7	0,77	6	0	6	0,57
46-50 tahun years old	4	0	4	0,44	5	0	5	0,47
41-45 tahun years old	5	0	5	0,55	1	0	1	0,09
36-40 tahun years old	7	0	7	0,77	5	0	5	0,47
31-35 tahun years old	10	0	10	1,10	15	0	15	1,41
25-30 tahun years old	0	0	0	0,00	2	0	2	0,19
Subtotal **Subtotal**	**33**	**0**	**33**	**3,65**	**35**	**0**	**35**	**3,30**
Jumlah **total**	**851**	**54**	**905**	**100,00**	**998**	**63**	**1.061**	**100,00**

Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition based on Gender

Jenis Kelamin Gender	2025		2024	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Laki-Laki **Male**				
Perseroan The Company	818	90,39	963	90,76
Entitas Anak Subsidiaries	33	3,65	35	3,30
Subtotal **Subtotal**	**851**	**94,03**	**998**	**94,06**
Perempuan **Female**				
Perseroan The Company	54	5,97	63	5,94
Entitas Anak Subsidiaries	0	0,00	0	0,00
Subtotal **Subtotal**	**54**	**5,97**	**63**	**5,94**
Jumlah **total**	**905**	**100,00**	**1.061**	**100,00**

Berdasarkan jumlah sebagaimana tertera pada tabel-tabel di atas, pada periode 2024-2025 komposisi dan demografi pegawai Perseroan beserta Entitas Anak terangkum pada tabel berikut:

Based on the quantities as indicated in the above tables, the composition and demographic profile, including its Subsidiaries, during the 2024-2025 period are summarized in the following table:

Keterangan Description	2025				2024			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	%	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	%
Perseroan **The Company**								
PT Wijaya Karya Beton Tbk	818	54	872	96,35	963	63	1026	96,70
Entitas Anak **Subsidiaries**								
PT Wijaya Karya Komponen Beton	10	0	10	1,10	10	0	10	0,94
PT Wijaya Karya Krakatau Beton	4	0	4	0,44	3	0	3	0,28
PT Citra Lautan Teduh	11	0	11	1,22	10	0	10	0,94
PT Wika Pracetak Gedung	5	0	5	0,55	9	0	9	0,85
Entitas Asosiasi	3	0	3	0,33	3	0	3	0,28
Subtotal **Subtotal**	33	0	33	3,65	35	0	35	3,30
Jumlah **total**	**851**	**54**	**905**	**100,00**	**998**	**63**	**1.061**	**100,00**

Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Information on the Employment of Public Accountant Services (AP) and Public Accounting Firm (KAP)

Periode Penugasan Assignment Period	Nama dan Alamat Name and Address	Jasa yang Diberikan Services Provided	Biaya Fee
2025	Akuntan Publik (Signing Partner) Public Accountant (Signing Partner) **Maxson Hakim Wijaya** Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm **RSM Indonesia** Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan Alamat Address Plaza Asia, Level 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.59 Jakarta 12190 T: +62 21 5140 1340 F: +62 21 5140 1350 W: www.rsm.global	Audit 1. Audit laporan keuangan tahun buku 2025 2. Audit kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) 3. Evaluasi Kinerja/Key Performance Indicator 1. Audit of financial statements for the 2025 fiscal year 2. Audit of compliance with laws and regulations and internal controls (PSA 62) 3. Performance evaluation/Key Performance Indicators Non Audit –	Biaya Audit Audit Fee Rp524.000.000,- Biaya Non Audit Non-Audit Fee Rp0,-
2024	Akuntan Publik *(Signing Partner)* Public Accountant (Signing Partner) **Maxson Hakim Wijaya** Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm **RSM Indonesia** Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan Alamat Address Plaza Asia, Level 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.59, Jakarta 12190 T: +62 21 5140 1340 F: +62 21 5140 1350 W: www.rsm.global	**Audit** Audit laporan keuangan tahun buku 2024 Financial statement audit for the financial year 2024. **Non Audit** –	Biaya Audit Audit Fee Rp524.000.000,- Biaya Non Audit Non-Audit Fee Rp0,-
2023	Kantor Akuntan Publik *(Signing Partner)* Public Accounting Firm (Signing Partner) **Maxson Hakim Wijaya** Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm **RSM Indonesia** Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan Alamat Address Plaza Asia, Level 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.59, Jakarta 12190 T: +62 21 5140 1340 F: +62 21 5140 1350 W: www.rsm.global	**Audit:** Untuk Jasa Audit ada 3 Pekerjaan: 1. Audit Laporan Keuangan TB 2024 2. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) 3. Evaluasi Kinerja Tahun 2023 berdasarkan SK Menteri BUMN No. KEP-100/ MBU/2002 There are three audit tasks for the Audit Services: 1. Financial Statement Audit for the year 2024 2. Compliance Audit with Laws and Regulations and Internal Control (PSA 62) 3. Performance Evaluation for 2023 based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree No. KEP-100/ MBU/2002 **Non Audit** -	Biaya Audit: Audit Fee Rp499.089.656,- Biaya Non Audit: Non-Audit Fee Rp0,-

Periode Penugasan Assignment Period	Nama dan Alamat Name and Address	Jasa yang Diberikan Services Provided	Biaya Fee
2022	Kantor Akuntan Publik *(Signing Partner)* Public Accounting Firm (Signing Partner) **Maxson Hakim Wijaya** Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm **RSM Indonesia** Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan Alamat Address Plaza Asia, Level 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.59, Jakarta 12190 T: +62 21 5140 1340 F: +62 21 5140 1350 W: www.rsm.global	**Audit:** Untuk Jasa Audit ada 3 Pekerjaan: 1. Audit Laporan Keuangan TB 2024 2. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) 3. Evaluasi Kinerja Tahun 2023 berdasarkan SK Menteri BUMN No. KEP-100/ MBU/2002 There are three audit tasks for the Audit Services: 1. Financial Statement Audit for the year 2024 2. Compliance Audit with Laws and Regulations and Internal Control (PSA 62) 3. Performance Evaluation for 2023 based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree No. KEP-100/ MBU/2002. **Non Audit** -	Biaya Audit: Audit Fee Rp436.009.375,- Biaya Non Audit: Non-Audit Fee Rp0,-

Informasi Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Information on Supporting Institutions and/or Professions

Pemeringkat Efek Rating Agency	
Nama Perusahaan Company's Name	PT Pemeringkat efek Indonesia
Alamat Address	Equity Tower 30th Floor, Sudirman Central Business District Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia T: +62 21 509 684 69, F: +62 21 509 684 68, W: www.pefindo.com
Ruang Lingkup Pekerjaan Scope of Work	Jasa pemeringkatan perusahaan Company rating services
Periode Penugasan Assignment Period	2025
Biaya Fee	Rp170.000.000,-

Biro Administrasi Efek Share Registrar	
Nama Perusahaan Company's Name	PT Datindo entrycom
Alamat Address	Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt. 2, Jakarta 10120, T: +62 21 350 8077 F: +62 21 350 8078 E: corporatesecretary@datindo.com W: www.datindo.com

Biro Administrasi Efek
Share Registrar

Ruang Lingkup Pekerjaan Scope of Work	Administrasi Pasar Sekunder: 1. Pemeliharaan Data Pemegang Saham. 2. Bantuan Dalam Penyelenggaraan RUPS. 3. Menyiapkan Pembagian Dividen Saham dan Saham Bonus. 4. Membantu Program Investor Relations Secondary Market Administration: 1. Shareholder Data Maintenance. 2. Assistance in Organizing GMS. 3. Preparing the Distribution of Stock Dividends and Bonus Shares. 4. Assisting Investor Relations Program
Periode Penugasan Assignment Period	2025
Biaya Fee	1. Rp40.000.000 (Administrasi Saham Pasar Sekunder) 2. Rp20.000.000 (Penyelenggaraan RUPST) 3. Rp20.000.000 (Penyelenggaraan RUPSLB) 4. Rp134.810.000 (Cetak Blanko Dividen Tunai) 1. Rp40,000,000 (Secondary Market Share Administration) 2. Rp20,000,000 (Organization of AGMS) 3. Rp20,000,000 (Organization of EGMS) 4. Rp134,810,000 (Print Cash Dividend Blank)

Jasa Penilai
Appraiser

Nama Perusahaan Company's Name	KJPP Toto Suharto & Rekan KJPP Toto Suharto and Partners
Alamat Address	Jalan Hayam Wuruk No.1 RL DKI Jakarta, Indonesia T: +62 21 345 6783 F: +62 21 381 3419, +62 21 350 8168 E: tnr@tnr.co.id W: www.tnr.co.id
Ruang Lingkup Pekerjaan Scope of Work	1. Memberikan jasa konsultan penilaian aset untuk kepentingan Perseroan. 2. Menjelaskan metode-metode penilaian umum yang digunakan dan asumsi yang dipergunakan termasuk alasan penggunaan metode tersebut dalam penilaian aset yang dimiliki Perseroan. 3. Melakukan klarifikasi atas aset yang dinilai kepada Perseroan dan Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh Perseroan. 1. PProviding asset valuation consulting services for the benefit of the Company. 2. Explaining the general valuation methods used and the assumptions used, including the reasons for using these methods in the valuation of assets owned by the Company. 3. Clarifying the assets valued to the Company and the Legal Consultant appointed by the Company.
Periode Penugasan Assignment Period	Juni - September 2025 June - September 2025
Biaya Fee	Rp139.500.000

Informasi Perdagangan dan Pencatatan Saham
Information on Share Trading and Listing

Nama Perusahaan Company's Name	Bursa Efek Indonesia (BEI)
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia T: +62 21 515 0515 E: callcenter@idx.co.id W: www.idx.co.id

Direksi
Board of Directors



2 3 1 4 5

1 Kuntjara

Direktur Utama
President Director

2 Verly Widiantoro

Direktur Teknik dan Produksi
Director of Engineering and Production

3 Agus Pramono

Direktur Operasi dan Supply Chain Management
Director of Operation and Supply Chain Management

4 Syailendra Ogan

Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Human Capital and Risk Management

5 Rija Judaswara

Direktur Pemasaran dan Pengembangan
Director of Marketing and Development

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



① **Wilan Oktavian**
Komisaris Utama
President Commissioner

② **Tjia Marwan**
Komisaris
Commissioner

③ **Dwi Gawan Islandhi H.B.**
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Profil Direksi
Profile of the Board of Directors



KUNTJARA

Direktur Utama
President Director

Dasar Hukum Pengangkatan — Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 18 April 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 73 tanggal 25 April 2022.

Appointed as the Company's President Director on April 18, 2022, based on the Deed of GMS Resolutions No. 73 dated April 25, 2022.

Riwayat Pendidikan — Educational Background

- Magister (S2) Manajemen Pemasaran – Universitas Diponegoro (2007).
- Sarjana (S1) Teknik Sipil – Institut Teknologi Bandung (1995).
- Master's Degree in Marketing Management from Diponegoro University (2007).
- Bachelor's Degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (1995).

Pengalaman Kerja — Work Experiences

- Direktur Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk (2022-sekarang).
- Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT Wijaya Karya Beton Tbk (2020-2022).
- Komisaris PT Citra Lautan Teduh (2017-Juni 2022).
- Direktur Pemasaran PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017-2020).
- Manajer Biro Penjualan PT Wijaya Karya Beton Tbk (2013-2017).
- Manajer Wilayah Penjualan III PT Wijaya Karya Beton Tbk (2012-2013).
- President Director of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2022-present).
- Director of Marketing and Development of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2020-2022).
- Commissioner of PT Citra Lautan Teduh (2017-June 2022).
- Marketing Director of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017-2020).
- Director of Marketing Bureau of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2013-2017).
- Sales Manager of Area III of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2012-2013).

Tempat & Tanggal Lahir
Place & Date of Birth

Sukabumi, 4 Oktober 1970
Sukabumi, October 4, 1970

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile

Depok, Indonesia
Depok, Indonesia

Usia
Age

55 tahun per 31 Desember 2025
55 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan
Tenure

RUPST Tahun 2022-RUPST Tahun 2027
AGMS 2022-AGMS 2027

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi — Training and Competency Development

Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Pendidikan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Internal pada Laporan Tahunan ini.

The list of training activities is available on the sub-section of Training and/or Educational Activities of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit in this Annual Report.

Rangkap Jabatan — Concurrent Position

Tidak ada
None

Hubungan Afiliasi — Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Has no affiliation with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and Major and Controlling Shareholder.

Kepemilikan Saham di PT Wijaya Karya Beton Tbk — Share Ownership at PT Wijaya Karya Beton Tbk

Memiliki saham Perseroan sebesar 9.577.300 saham atau sebesar 0,1098886%.

Owns 9,577,300 shares of the Company or as many as 0.1098886%.



SYAILENDRA OGAN

Direktur Keuangan, Human Capital & Manajemen Risiko
Director of Finance, Human Capital & Risk Management

Dasar Hukum Pengangkatan — Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Keuangan, Human Capital & Manajemen Risiko berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 43 tanggal 17 Mei 2024.

Appointed as Director of Finance, Human Capital & Risk Management based on Deed of GMS Resolution No. 43 dated May 17, 2024.

Riwayat Pendidikan — Educational Background

- Magister (S2) Manajemen – Universitas Bina Nusantara (2023).
- Sarjana (S1) Akuntansi – Universitas Ibn Khaldun Bogor (2003).
- Master's Degree in Management from Bina Nusantara University (2023).
- Bachelor's Degree in Accounting from Universitas Ibn Khaldun Bogor (2003).

Pengalaman Kerja — Work Experiences

- Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk (2024-sekarang).
- Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2019-2024).
- General Manager Human Capital PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017 – 2019).
- Manajer Biro Keuangan Bangunan Gedung PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2014-2017).
- Director of Finance, Human Capital and Risk Management of PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2024-present).
- Director of Finance, Human Capital and Risk Management of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2019-2024).
- General Manager of Human Capital PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017-2019).
- Manager of Building Financial Berau of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2014-2017).

Tempat & Tanggal Lahir
Place & Date of Birth

Medan, 25 Oktober 1973
Medan, October 25, 1973

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile

Bogor, Indonesia
Bogor, Indonesia

Usia
Age

52 tahun per 31 Desember 2025
52 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan

Tenure

RUPST Tahun 2024-RUPST Tahun 2029
AGMS 2024-AGMS 2029

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi — Training and Competency Development

Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Pendidikan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Internal pada Laporan Tahunan ini.

The list of training activities is available on the sub-section of Training and/or Educational Activities of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit in this Annual Report.

Rangkap Jabatan — Concurrent Position

Tidak ada
None

Hubungan Afiliasi — Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Has no affiliation with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and Major and Controlling Shareholder.

Kepemilikan Saham di PT Wijaya Karya Beton Tbk — Share Ownership at PT Wijaya Karya Beton Tbk

Memiliki saham Perseroan sebesar 109.000 saham atau sebesar 0,0012507%.

Owns 109,000 shares of the Company or 0.0012507%.



AGUS PRAMONO

Direktur Operasi dan Supply Chain Management
Director of Operation and Supply Chain Management

Dasar Hukum Pengangkatan — Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management sejak berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 43 tanggal 17 Mei 2024.

Appointed as Director of Operations and Supply Chain Management since based on Deed of GMS Resolution No. 43 dated May 17, 2024.

Riwayat Pendidikan — Educational Background

Sarjana (S1) Teknik Sipil – Universitas Gadjah Mada (1995).

Bachelor's Degree in Civil Engineering from Gadjah Mada University (1995).

Pengalaman Kerja — Work Experiences

- Direktur Operasi dan Supply Chain Management – PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2024 - sekarang).
- Komisaris PT Wijaya Karya Krakatau Beton (2024-sekarang).
- Direktur Utama – PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi (2023).
- Direktur Produksi – PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi (2021 – 2023).
- Manajer Biro Supply Chain Management – PT Wijaya Karya Beton Tbk (2020 – 2021).
- Director of Operation and Supply Chain Management - PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2024 - present).
- Commissioner of PT Wijaya Karya Krakatau Beton (2024–present).
- President Director - PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi (2023).
- Director of Production - PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi (2021 - 2023).
- Manager of Supply Chain Management Bureau - PT Wijaya Karya Beton Tbk (2020 - 2021).

Tempat & Tanggal Lahir
Place & Date of Birth

Ngawi, 12 Agustus 1971
Ngawi, August 12, 1971

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile

Depok, Indonesia
Depok, Indonesia

Usia
Age

54 tahun per 31 Desember 2025
54 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan

Tenure

RUPST Tahun 2024-RUPST Tahun 2029
AGMS 2024-AGMS 2029

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi — Training and Competency Development

Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Pendidikan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Internal pada Laporan Tahunan ini.

The list of training activities is available on the sub-section of Training and/or Educational Activities of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit in this Annual Report.

Rangkap Jabatan — Concurrent Position

Komisaris PT Wijaya Karya Krakatau Beton (2024-sekarang)
Commissioner of PT Wijaya Karya Krakatau Beton (2024–present)

Hubungan Afiliasi — Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Has no affiliation with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and Major and Controlling Shareholder.

Kepemilikan Saham di PT Wijaya Karya Beton Tbk — Share Ownership at PT Wijaya Karya Beton Tbk

Memiliki saham Perseroan sebesar 3.529.500 saham atau sebesar 0,0404969%.

Owns 3,529,500 shares of the Company or 0.0404969%



RIJA JUDASWARA

Direktur Pemasaran dan Pengembangan
Director of Marketing and Development

Dasar Hukum Pengangkatan — Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Pemasaran & Pengembangan Perseroan sejak 18 April 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 73 tanggal 25 April 2022.

Appointed as the Company's Director of Marketing & Development on April 18, 2022, based on the Deed of GMS Resolutions No. 73 dated April 25, 2022.

Riwayat Pendidikan — Educational Background

Sarjana (S1) Teknik Sipil – Universitas Gadjah Mada (1995).

Bachelor's Degree in Civil Engineering from Gadjah Mada University (1995).

Pengalaman Kerja — Work Experiences

- Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT Wijaya Karya Beton Tbk (2022-sekarang).
- Komisaris PT Citra Lautan Teduh (2023-Sekarang).
- Manajer Biro Penjualan PT Wijaya Karya Beton Tbk (2019-2022).
- Manajer Wilayah Penjualan III PT Wijaya Karya Beton Tbk (2016-2019).
- Manajer Wilayah Penjualan II PT Wijaya Karya Beton Tbk (2013-2016).

- Director of Marketing and Development of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2022-present).
- Commissioner of PT Citra Lautan Teduh (2023-present).
- Manager of Marketing Bureau of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2019-2022).
- Sales Manager of Area III of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2016-2019).
- Sales Manager of Area II of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2013-2016).

Tempat & Tanggal Lahir
Place & Date of Birth

Purworejo, 16 Desember 1970
Purworejo, December 16, 1970

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile

Depok, Indonesia
Depok, Indonesia

Usia
Age

55 tahun per 31 Desember 2025
55 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan

Tenure

RUPST Tahun 2022-RUPST Tahun 2027
AGMS 2022-AGMS 2027

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi — Training and Competency Development

Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Pendidikan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Internal pada Laporan Tahunan ini.

The list of training activities is available on the sub-section of Training and/or Educational Activities of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit in this Annual Report.

Rangkap Jabatan — Concurrent Position

Komisaris PT Citra Lautan Teduh (2023-sekarang)

Commissioner of PT Citra Lautan Teduh (2023-present)

Hubungan Afiliasi — Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Has no affiliation with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and Major and Controlling Shareholder.

Kepemilikan Saham di PT Wijaya Karya Beton Tbk — Share Ownership at PT Wijaya Karya Beton Tbk

Memiliki saham Perseroan sebesar 2.339.700 saham atau sebesar 0,0268454%.

Owns 2,339,700 shares of the Company or as many as 0,0268454%.



VERLY WIDIANTORO

Direktur Teknik dan Produksi
Director of Engineering and Production

Dasar Hukum Pengangkatan — Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Teknik dan Produksi Perseroan sejak 9 Mei 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 17 tanggal 12 Mei 2023.

Appointed as the Company's Director of Engineering and Production on May 9, 2023 based on the Deed of GMS Resolution No. 17 dated May 12, 2023.

Riwayat Pendidikan — Educational Background

- Magister (S2) Administrasi Bisnis – Universitas Gadjah Mada (2022).
- Magister (S2) Teknik Sipil – Universitas Indonesia (2021).
- Sarjana (S1) Teknik Sipil – Universitas Gadjah Mada (2006).

- Master's Degree in Business Administration from Gadjah Mada University (2022).
- Master's Degree in Civil Engineering from the University of Indonesia (2021).
- Bachelor's Degree in Civil Engineering from Gadjah Mada University (2006).

Pengalaman Kerja — Work Experiences

- Direktur Teknik dan Produksi PT Wijaya Karya Beton Tbk (2023-sekarang).
- Komisaris PT Wijaya Karya Komponen Beton (2023-Sekarang).
- Manajer Pabrik Produk Beton Bogor PT Wijaya Karya Beton Tbk (2022-2023)
- Manajer Pabrik Produk Beton Subang PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017-2022).
- Manajer Proyek Pembangunan Pabrik Produk Beton Subang PT Wijaya Karya Beton Tbk (2016-2017).

- Director of Engineering and Production PT Wijaya Karya Beton Tbk (2023-present).
- Commissioner of PT Wijaya Karya Komponen Beton (2023-present).
- Manager of Bogor Concrete Product Factory Manager PT Wijaya Karya Beton Tbk (2022-2023).
- Manager of Subang Concrete Product Factory PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017-2022).
- Project Manager of Subang Concrete Product Factory Construction PT Wijaya Karya Beton Tbk (2016-2017).

Tempat & Tanggal Lahir
Place & Date of Birth

Pringsewu, 22 Desember 1982
Pringsewu, December 22, 1982

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile

Bogor, Indonesia
Bogor, Indonesia

Usia
Age

43 tahun per 31 Desember 2025
43 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan
Tenure

RUPST Tahun 2023-RUPST Tahun 2028
AGMS 2023-AGMS 2028

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi — Training and Competency Development

Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Pendidikan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Internal pada Laporan Tahunan ini.

The list of training activities is available on the sub-section of Training and/or Educational Activities of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit in this Annual Report.

Rangkap Jabatan — Concurrent Position

Komisaris PT Wijaya Karya Komponen Beton (2023-sekarang)
Commissioner of PT Wijaya Karya Komponen Beton (2023-present)

Hubungan Afiliasi — Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Has no affiliation with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and Major and Controlling Shareholder.

Kepemilikan Saham di PT Wijaya Karya Beton Tbk — Share Ownership at PT Wijaya Karya Beton Tbk

Memiliki saham Perseroan sebesar 2.000.000 saham atau sebesar 0,0229477%

Owns 2,000,000 shares of the Company or as many as 0.0229477%.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and Reasons for Changes

Hingga akhir tahun 2025, tidak terdapat perubahan pada susunan Anggota Direksi Perseroan. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

As of the end of 2025, there were no changes to the composition of the Company's Board of Directors. Accordingly, the composition of the Board of Directors as of December 31, 2025, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Kuntjara	Direktur Utama President Director
Syailendra Ogan	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management
Agus Pramono	Direktur Operasi dan Supply Chain Management Director of Operations and Supply Chain
Rija Judaswara	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Development
Verly Widiantoro	Direktur Teknik dan Produksi Director of Engineering and Production

Perubahan Komposisi Anggota Direksi yang Terjadi Setelah Berakhirnya Tahun Buku Sampai dengan Disampaikannya Laporan Tahunan

Changes in the Composition of Members of the Board of Directors After the End of the Financial Year Up to the Submission of the Annual Report

Selama periode berakhirnya tahun buku 2025 sampai dengan diterbitkannya Laporan Tahunan, tidak terdapat perubahan komposisi Anggota Direksi.

During the period from the end of the 2025 fiscal year until the issuance of this Annual Report, there were no changes in the composition of the Board of Director.

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile



WILAN OKTAVIAN

Komisaris Utama
President Commissioner

Dasar Hukum Pengangkatan — Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2 Juni 2025 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No.03 tanggal 02 Juni 2025.

Appointed as President Commissioner of the Company since June 2, 2025 based on the Deed of Statement of Resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) Number 03 dated June 2nd, 2025.

Riwayat Pendidikan — Educational Background

- Magister (S2) Kebijakan Publik – University of Southern California (2000).
- Sarjana (S1) Teknik Sipil – Institut Teknologi Bandung (1995).
- Master's Degree in Public Policy from the University of Southern California (2000).
- Bachelor's Degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (1995).

Pengalaman Kerja — Work Experiences

- Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (2024-2025) .
- Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (2023-2024) .
- Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (2021-2023) .
- Kepala Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020- 2021).
- Director of Toll Roads, Directorate General of Highways, Ministry of Public Works and Public Housing (2024–2025).
- Director of Road and Bridge Operations Systems and Strategy, Directorate General of Highways, Ministry of Public Works and Public Housing (2023–2024).
- Head of the National Road Implementation Bureau for Jakarta – West Java, Directorate General of Highways, Ministry of Public Works and Public Housing (2021–2023).
- Head of the Sub-Directorate for Strategy, Programs, and Budget, Directorate of Road and Bridge Operations Systems and Strategy, Directorate General of Highways, Ministry of Public Works and Public Housing (2020–2021).

Tempat & Tanggal Lahir
Place & Date of Birth

Bandung, 9 Oktober 1971
Bandung, October 9, 1971

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia
Age

54 tahun per 31 Desember 2025
54 years old as of December 31, 2025

Masa Jabatan
Tenure

RUPST Tahun 2025-RUPST Tahun 2030
AGMS 2025-AGMS 2030

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi — Training and Competency Development

Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Pendidikan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Internal pada Laporan Tahunan ini.

The list of training activities is available on the sub-section of Training and/or Educational Activities of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit in this Annual Report.

Rangkap Jabatan — Concurrent Position

1. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (2025-sekarang)
2. Ketua merangkap Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance (TKT & GCG) PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025-sekarang)

1. Head of the Toll Road Regulatory Agency, Directorate General of Highways, Ministry of Public Works (2025–present)
2. Chairman acting as Member of the Integrated Governance and Good Corporate Governance (TKT & GCG) Committee of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025–present)

Hubungan Afiliasi — Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.
Has no affiliation with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and Major and Controlling Shareholder.

Kepemilikan Saham di PT Wijaya Karya Beton Tbk — Share Ownership at PT Wijaya Karya Beton Tbk

Tidak Ada.
None.



TJIA MARWAN

Komisaris
Commissioner

Dasar Hukum Pengangkatan — Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2 Juni 2025 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No.03 tanggal 02 Juni 2025.

Appointed as the Company's Commissioner on June 2, 2025 based on the Deed of GMS Resolution Number 03 dated June 2nd, 2025.

Riwayat Pendidikan — Educational Background

Sarjana (S1) Ekonomi, Jurusan Manajemen – Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (1987).

Bachelor's Degree in Economics majoring in Management from Atma Jaya Catholic University of Indonesia (1987).

Pengalaman Kerja — Work Experiences

- *Chief Marketing Officer* - PT Dharmesta Swasti Mandiri (2023-2025).
- *Director & Executive Advisor* - PT Denso Sales Indonesia (2011-2022).
- *Chief Marketing* - PT Kayaba Indonesia (2008-2011).
- *Deputy* CEO - PT Astra Autoparts Tbk Divisi Astra Niaga (2004-2008).

- Chief Marketing Officer, PT Dharmesta Swasti Mandiri (2023–2025).
- Director and Executive Advisor, PT Denso Sales Indonesia (2011–2022).
- Chief Marketing, PT Kayaba Indonesia (2008–2011).
- Deputy CEO, Astra Niaga Division, PT Astra Autoparts Tbk (2004–2008).

Tempat & Tanggal Lahir
Place & Date of Birth

Dabo Singkep, 17 Agustus 1961
Dabo Singkep, August 17, 1961

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile

Banten, Indonesia
Banten, Indonesia

Usia
Age

64 tahun per 31 Desember 2025
64 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan

Tenure

2 Juni 2025 - 2 Juni 2030 (Periode Pertama)
June 2, 2025 - June 2, 2030 (First Period)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi — Training and Competency Development

Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Pendidikan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Internal pada Laporan Tahunan ini.

The list of training activities is available on the sub-section of Training and/or Educational Activities of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit in this Annual Report.

Rangkap Jabatan — Concurrent Position

1. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance (TKT & GCG) PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025-sekarang)
2. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko (NR & PR) PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025-sekarang)

1. Member of the Integrated Governance and Good Corporate Governance (TKT & GCG) Committee at PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025–present)
2. Member of the Nomination, Remuneration, and Risk Monitoring Committee (NR & PR) of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025–present)

Hubungan Afiliasi — Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Has no affiliation with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and Major and Controlling Shareholder.

Kepemilikan Saham di PT Wijaya Karya Beton Tbk — Share Ownership at PT Wijaya Karya Beton Tbk

Tidak Ada.

None.



DWI GAWAN ISLANDHI H. B.(*)

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Dasar Hukum Pengangkatan — Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2 Juni 2025 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No.03 tanggal 02 Juni 2025.

Appointed as the Company's Independent Commissioner on June 2, 2025 based on the Deed of GMS Resolution Number 03 dated June 2nd, 2025.

Riwayat Pendidikan — Educational Background

Sarjana (S1) Arsitektur – Universitas Pancasila (1990).

Bachelor's Degree in Architecture from Pancasila University (1990).

Pengalaman Kerja — Work Experiences

Arsitek - Individu (1991-Sekarang)

Architect - Independent (1991-Present)

Tempat & Tanggal Lahir
Place & Date of Birth

Surabaya, 6 Juni 1965
Surabaya, June 6th, 1965

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia
Age

60 tahun per 31 Desember 2025
60 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan
Tenure

2 Juni 2025 - 2 Juni 2030 (Periode Pertama)
June 2, 2025 - June 2, 2030 (First Period)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi — Training and Competency Development

Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Pendidikan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Internal pada Laporan Tahunan ini.

The list of training activities is available on the sub-section of Training and/or Educational Activities of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit in this Annual Report.

Rangkap Jabatan — Concurrent Position

1. Ketua merangkap anggota Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025-sekarang)
2. Ketua merangkap anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko (NR & PR) PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025-sekarang)

1. Chairman acting as Member of the Audit Committee of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025–present)
2. Chairman acting as Member of the Nomination, Remuneration, and Risk Monitoring Committee (NR & PR) of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025–present)

Hubungan Afiliasi — Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Has no affiliation with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and Major and Controlling Shareholder.

Kepemilikan Saham di PT Wijaya Karya Beton Tbk — Share Ownership at PT Wijaya Karya Beton Tbk

Tidak Ada.

None.

(*) Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen per 15 Februari 2026 karena meninggal dunia berdasarkan Surat Edaran No. SE.01.01/WB-0A.0167/2026.
(*) No longer serving as Independent Commissioner as of 15 February 2026 due to passing away, in accordance with Circular Letter No. SE.01.01/WB-0A.0167/2026.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen
Independence Statement of Independent Commissioners

Dengan memenuhi syarat-syarat independensi, anggota Komisaris Independen Perseroan dapat dipastikan tidak terlibat dalam benturan kepentingan dan memenuhi standar kemampuan dan latar belakang yang diperlukan. Pernyataan ini ditegaskan melalui penandatanganan surat pernyataan yang mencantumkan bahwa Komisaris Independen:

By fulfilling the independence criteria, members of the Independent Commissioners of the Company can be assured of their non-involvement in conflicts of interest and compliance with the required standards of competency and background. This declaration is affirmed through the signing of a statement letter that explicitly states that the Independent Commissioners:

Tidak mempunyai hubungan keluarga baik horizontal, vertikal maupun hubungan semenda (ipar) dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan jabatan sehubungan dengan penugasan/jabatan di Perseroan.

There is no family relations either horizontally, vertically, or by marriage (in-law) with members of the Board of Commissioners and Board of Directors;
There is no conflict of interest with positions related to assignments/positions in the Company.

Komisaris Independen telah menandatangani pakta integritas mereka pada tanggal 11 Juni 2025 sebagai komitmen menjaga integritas selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Independent Commissioners signed an integrity pact on June 11, 2025, affirming their commitment to uphold integrity throughout their tenure as Independent Commissioners.

Untuk Pernyataan Independensi anggota Komisaris lainnya dapat dilihat pada halaman web Perseroan: https://esg.wika-beton.co.id/governance

For other members of the Board of Commissioners' statement of ndependence can be seen on the Company's web page: https://esg.wika-beton.co.id/governance


SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN
STATEMENT OF INDEPENDENCE OF THE INDEPENDENT COMMISSIONER
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya

Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners and Reasons for Changes

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 03 tanggal 02 Juni 2025, Perseroan menetapkan perubahan susunan Dewan Komisaris. RUPS memberhentikan dengan hormat kepada:

- Bapak Eko Sujiyanto – Komisaris Utama
- Bapak R. Permadi Mulajaya – Komisaris
- Bapak Miftachul Munir – Komisaris
- Ibu Nita Prihutaminingrum – Komisaris Independen
- Bapak Iswandi Imran – Komisaris Independen

Dalam keputusan yang sama, RUPS menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru, yaitu:

- Bapak Wilan Oktavian – Komisaris Utama
- Bapak Tjia Marwan – Komisaris
- Bapak Dwi Gawan Islandhi H. B. – Komisaris Independen

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Based on the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) for the Fiscal Year 2024, as stated in Deed No. 03 dated June 2nd, 2025, the Company has approved changes to the composition of the Board of Commissioners. The GMS respectfully released from their duties:

- Mr. Eko Sujiyanto – President Commissioner
- Mr. R. Permadi Mulajaya – Commissioner
- Mr. Miftachul Munir – Commissioner
- Mrs. Nita Prihutaminingrum – Independent Commissioner
- Mr. Iswandi Imran – Independent Commissioner

In the same resolution, the GMS approved the appointment of new members of the Board of Commissioners, as follows:

- Mr. Wilan Oktavian – President Commissioner
- Mr. Tjia Marwan – Commissioner
- Mr. Dwi Gawan Islandhi H. B. – Independent Commissioner

Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2025, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Wilan Oktavian	Komisaris Utama President Commissioner
Tjia Marwan	Komisaris Commissioner
Dwi Gawan Islandhi H. B.	Komisaris Independen Independent Commissioner

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris yang Terjadi Setelah Berakhirnya Tahun Buku Sampai dengan Disampaikannya Laporan Tahunan

Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners and Reasons for Changes

Selama periode berakhirnya tahun buku 2025 sampai dengan diterbitkannya Laporan Tahunan, tidak terdapat perubahan komposisi Anggota Dewan Komisaris.

During the period from the end of the 2025 fiscal year until the issuance of this Annual Report, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners.



Pejabat Eksekutif
Executive Officers



Erwan Widiatmoko

Divisi Penjualan
Sales Division Manager

Menjabat sejak 21 Juli 2025. Bergabung di WIKA Beton sejak 21 Maret 2005. Memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2003. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Manajer Wilayah Penjualan III pada tahun 2022 - 2025.

Appointed on July 21, 2025. Joined WIKA Beton on March 21, 2005. Obtained a Bachelor of Engineering degree in Civil Engineering from Diponegoro University, Semarang, in 2003. Previously served as Regional Sales Manager III from 2022 to 2025.



Hafizuddin

Manajer Divisi Supply Chain Management & Health, Safety & Environment
Supply Chain Management and Health, Safety and Environment Division Manager

Menjabat sejak 21 Juli 2025. Bergabung di WIKA Beton sejak 02 Januari 2007. Memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Lampung pada 2004. Sebelumnya, pernah menjabat sebagai Manajer Pabrik Produk Beton Bogor pada 2023 - 2025

Appointed on July 21, 2025. Joined WIKA Beton on January 2, 2007. Obtained a Bachelor of Engineering degree in Civil Engineering from the University of Lampung in 2004. Previously served as Manager of the Bogor Concrete Products Factory from 2023 to 2025.



Gatut Santoso Subagiono

Manajer Divisi Produksi Precast
Production Precast Division Manager

Menjabat sejak 26 September 2022. Bergabung di WIKA sejak 20 Juli 1995. Memperoleh gelar Sarjana Teknik, Jurusan Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada 1995. Sebelumnya, pernah menjabat sebagai Manajer Biro Engineering pada 2019-2022.

Appointed on September 26th, 2022. Joined WIKA on July 20th, 1995. Holds a Bachelor's degree in Civil Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology, graduated in 1995. Previously served as Manager of the Engineering Bureau from 2019 to 2022.



Dedi Indra

Manajer Divisi Human Capital
Human Capital Division Manager

Menjabat sejak 8 Oktober 2024. Bergabung di WIKA Beton sejak 9 April 2003. Memperoleh gelar Sarjana Teknik, Jurusan Teknik Informatika dari Universitas Gunadarma pada 2003. Sebelumnya, pernah menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan pada 2022-2024.

Appointed on October 8th, 2024. Joined WIKA Beton on April 9th, 2003. Holds a Bachelor's degree in Computer Engineering from Gunadarma University, graduated in 2003. Previously served as Corporate Secretary from 2022 to 2024.



Denny Setiawan Ariwibowo

Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Unit

Menjabat sejak 21 Juli 2025. Bergabung di WIKA Beton sejak 31 Maret 2003. Memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Kristen Petra pada tahun 2002. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Manajer Divisi Pengendalian dan Manajemen Risiko pada 2023 - 2025.

Appointed on July 21, 2025. Joined WIKA Beton on March 31, 2003. Obtained a Bachelor of Engineering degree in Civil Engineering from Petra Christian University in 2002. Previously served as Manager of the Control and Risk Management Division from 2023 to 2025.



Yushadi

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Menjabat sejak 28 Oktober 2024. Bergabung di WIKA sejak 20 Oktober 1993. Memperoleh gelar Master of Business Administration, Jurusan Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada pada 2022. Sebelumnya, pernah menjabat sebagai Manajer Bidang *Investor Relation and Public Relation* pada 2014-2024.

Appointed on October 28th, 2024. Joined WIKA on October 20th, 1993. Holds a Master of Business Administration (MBA) in Management from Gadjah Mada University, graduated in 2022. Previously served as Manager of Investor Relations and Public Relations from 2014 to 2024.



Yasin Irwanuddin

Manajer Divisi Keuangan
Finance Division Manager

Menjabat sejak 23 Juli 2024. Bergabung di WIKA Beton sejak 4 Juni 2007. Memperoleh gelar Magister Manajemen, Jurusan Manajemen dari Universitas Bina Nusantara pada 2023. Sebelumnya, pernah menjabat sebagai Manajer Bidang Keuangan pada 2023.

Appointed on July 23th, 2024. Joined WIKA Beton on June 4th, 2007. Holds a Master's degree in Management from Bina Nusantara University, graduated in 2023. Previously served as Manager of the Finance Department in 2023.



Fachrul Rozi

Manajer Divisi Sistem Informasi & Manajemen
Information System & Management Division Manager

Menjabat sejak 22 Agustus 2022. Bergabung di WIKA Beton sejak 1 November 2004. Memperoleh gelar Magister Komputer, Jurusan Teknik Informatika, dari Universitas Bina Nusantara pada 2025. Sebelumnya, pernah menjabat sebagai Manajer Bidang Teknologi Informasi pada 2017-2022.

Appointed on August 22, 2022. Joined WIKA Beton on November 1, 2004. Holds a Master's Degree in Computer Science, majoring in Informatics Engineering, from Bina Nusantara University in 2025. He previously served as Manager of the Information Technology Department in 2017-2022.



Zaenal Arifin

Manajer Divisi Operasi
Operation Division Manager

Menjabat sejak 30 Juni 2023. Bergabung di WIKA sejak 20 Februari 1993. Memperoleh gelar Sarjana Teknik, Jurusan Teknik Sipil dari Universitas Amir Hamzah pada 2000. Sebelumnya, pernah menjabat sebagai Manajer Divisi Jasa Spesialis pada 2023.

Appointed on June 30th, 2023. Joined WIKA on February 20th, 1993. Holds a Bachelor's degree in Civil Engineering from Amir Hamzah University, graduated in 2000. Previously served as Manager of the Specialist Services Division in 2023.



Festy Ratna Aditama

Manajer Divisi Transformation, Engineering & Quality
Transformation, Engineering & Quality Division Manager

Menjabat sejak 21 Juli 2025 Bergabung di WIKA Beton sejak 20 Februari 2014. Memperoleh gelar Magister Teknik, Jurusan Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada 2024. Sebelumnya, pernah menjabat sebagai Deputy Manajer Unit Operasi 2 pada 2024.

Appointed on July 21, 2025 Joined WIKA Beton on February 20, 2014. Obtained a Master's degree in Engineering, majoring in Civil Engineering from the Sepuluh Nopember Institute of Technology in 2024. Previously served as Deputy Manager of Operations Unit 2 in 2024.



Rendy Dwiandika

Manajer Divisi Legal dan Manajemen Risiko
Manager of Legal and Risk Management Division

Menjabat sejak 21 Juli 2025, Bergabung di WIKA Sejak 01 Mei 2014. Memperoleh gelar Magister Hukum, jurusan Ilmu Hukum dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada 2020. Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Vice President Legal, Procurement & Corporate Secretary* di PT Bandara Internasional Batam (Asosiasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada 2023 - 2025.

Appointed on July 21, 2025, joined WIKA on May 1, 2014. Obtained a Master of Law degree in Law from Sultan Ageng Tirtayasa University in 2020. Previously served as Vice President of Legal, Procurement & Corporate Secretary at PT Bandara Internasional Batam (a subsidiary of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk) from 2023 to 2025.

Informasi Kepemilikan Saham Oleh Pejabat Executive
Information on Share Ownership by Executive Officers

Pada tahun 2025, kepemilikan saham oleh Pejabat Eksekutif tidak lagi diatur melalui program ESOP maupun MSOP, sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan Perseroan.

By 2025, stock ownership by executive officers will no longer be governed by the ESOP or MSOP programs, as part of the Company's policy adjustments.

Hingga tahun 2025, Pejabat Eksekutif yang memiliki saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of 2025, the Executive Officers who hold shares in the Company are as follows:

Nama Pemegang Saham Name of Shareholders	Jabatan Jabatan	2024		2025	
		Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage %	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage %
		Nilai nominal Saham = Rp100/saham Share Nominal Value = Rp100/share			
Erwan Widiatmoko	Manajer Divisi Penjualan Sales Division Manager	1.673.500	0,0192015	1.543.500	0,0177099
Hafizuddin	Manajer Divisi Supply Chain Management and Health, Safety and Environment Supply Chain Management and Health, Safety and Environment Division Manager	0	0	0	0
Gatut Santoso Subagiono	Manajer Divisi Produksi Precast Production Precast Division Manager	1.800.000	0,0206529	2.969.300	0,0340693
Dedi Indra	Manajer Divisi Human Capital Human Capital Division Manager	1.771.600	0,0203271	1.771.600	0,0203271
Denny Setiawan Ariwibowo	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	1.228.800	0,0140991	1.228.800	0,0140991
Yushadi	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	106.100	0,0012174	106.100	0,0012174
Yasin Irwanuddin	Manajer Divisi Keuangan Finance Division Manager	482.600	0,0055372	482.600	0,0055372
Fachrul Rozi	Manajer Divisi Sistem Informasi dan Manajemen Information System Division Manager	0	0	0	0
Zaenal Arifin	Manajer Divisi Operasi Operation Division Manager	160.000	0,0018358	160.000	0,0018358
Festy Ratna Aditama	Manajer Divisi Transformation, Engineering and Quality Transformation, Engineering and Quality Division Manager	0	0	0	0
Rendy Dwiandika	Manajer Divisi Legal dan Manajemen Risiko Legal and Risk Management Division Manager	0	0	0	0

Nama Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan pada Awal dan Akhir Tahun Buku

Name of Shareholders and Percentage of Ownership in Early and Ended of the Financial Year

Per tanggal 31 Desember 2025, secara umum, pemegang saham Perseroan memiliki komposisi sebagai berikut:

Broadly speaking, as of December 31, 2025, the Company's shareholders composition is as follows:

Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan

Berikut adalah detail pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan:

Shareholders with ownership of 5% or more of the shares of the Company

The following is the detail shareholder with ownership 5% or more of the shares of the Company:

Nama Pemegang Saham Name of Shareholders	2024			2025		
	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage %	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-in Capital Rp	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage %	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-in Capital Rp
	Nilai nominal Saham = Rp100/saham Share Nominal Value = Rp100/share					
Kepemilikan Saham 5% atau Lebih Share Ownership of 5% or More						
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	5.229.279.960	60,00	522.927.996.000	5.229.279.960	60,00	522.927.996.000
Kepemilikan Saham di Bawah 5% Share Ownership of Less than 5%						
Yayasan Wijaya Karya	86.043.040	0,99	8.604.304.000	86.043.040	0,99	8.604.304.000
Koperasi Karya Mitra Satya (KKMS)	400.282.249	4,59	40.028.224.900	368.474.349	4,23	36.847.434.900
Publik (masing-masing kepemilikan di bawah 5%) Public (each less than 5%)	2.999.861.351	34,42	299.986.135.100	3.031.669.251	34,78	303.166.925.100
Jumlah Total	**8.715.466.600**	**100**	**871.546.660.000**	**8.715.466.600**	**100,00**	**871.546.660.000**

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Memiliki Saham Perusahaan

Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas perusahaan terbuka baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners Owning Company Shares

Members of the Board of Directors or the Board of Commissioners are required to report to the Financial Services Authority regarding their ownership and any changes in their ownership of a public company, whether direct or indirect, as stipulated in the copy of Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.04/2017 concerning Reports on Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Companies.

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan melakukan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Desember 2025, terkait kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.

In accordance with Article 2, Paragraph 1 of Financial Services Authority Regulation No. 4 of 2024 regarding the Report on Ownership or Any Changes in Share Ownership of Publicly Listed Companies and the Report on Activities Pledging Shares of Publicly Listed Companies, the Company submits a Monthly Securities Holder Registration Report ending on December 31, 2025, regarding the share ownership of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

Berikut adalah detail kepemilikan saham yang dimiliki oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris:

The following is the detail shareholder with ownership by the members of the Board of Directors and Board of Commissioners:

Kepemilikan Saham WIKA Beton oleh Dewan Komisaris dan Direksi
Shares Ownership of WIKA Beton by Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	2024		2025	
		Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage %	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage %
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**					
Wilan Oktavian	Komisaris Utama President Commissioner	0	0	0	0
Tjia Marwan	Komisaris Commissioner	0	0	0	0
Dwi Gawan Islandhi H. B.	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0	0
Direksi **Board of Directors**					
Kuntjara	Direktur Utama President Director	9.577.300	0,11	9.577.300	0,11
Syailendra Ogan	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital and Risk Management	109.000	0,00	109.000	0,00
Agus Pramono	Direktur Operasi dan Supply Chain Management Director of Operation and Supply Chain Management	3.529.500	0,04	3.529.500	0,04
Verly Widiantoro	Direktur Teknik dan Produksi Director of Engineering and Production	2.000.000	0,02	2.000.000	0,02
Rija Judaswara	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Development	2.339.700	0,03	2.339.700	0,03

Persentase Kepemilikan Tidak Langsung atas Saham Perseroan oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Sampai dengan akhir tahun 2025, tidak terdapat kepemilikan tidak langsung atas saham yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Percentage of Indirect Company Shares Ownership by Members of the BOD and BOC

Until the end of the financial year 2025, there were no indirect Company shares owned by members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan berdasarkan Klasifikasi

Berikut adalah detail kepemilikan saham oleh institusi lokal dan asing serta oleh individu lokal dan asing:

Number of Shareholders and Percentage of Ownership based on Classification

The following is the details of share ownership by local and foreign institutions and individuals:

Nama Pemegang Saham Name of Shareholders	2024		2025	
	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage %	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage %
Kepemilikan Asing **Foreign Ownership**				
Individu Individual	2.446.400	0,03	2.296.500	0,03
Institusi Institution	81.614.960	0,94	90.482.960	1,04
Jumlah Kepemilikan Asing **Total Foreign Ownership**	**84.061.360**	**0,96**	**92.779.460**	**1,07**
Kepemilikan Lokal **Local Ownership**				
Individu Individual	2.314.091.545	26,55	2.284.560.845	26,21
Institusi Institution				
Perusahaan Terbatas Limited Company	5.308.570.231	60,91	5.373.449.506	61,65
Asuransi Insurance	28.167.300	0,32	26.217.300	0,30
Koperasi Cooperative	440.421.649	5,05	408.480.749	4,69
Reksa Dana Mutual Fund	18.789.800	0,22	18.789.800	0,22
Dana Pensiun Pension Fund	431.701.200	4,95	424.281.200	4,87
Yayasan Foundation	89.663.515	1,03	86.907.740	1,00
Jumlah Kepemilikan Lokal **Total Local Ownership**	**8.631.405.240**	**99,04**	**8.622.687.140**	**98,94**

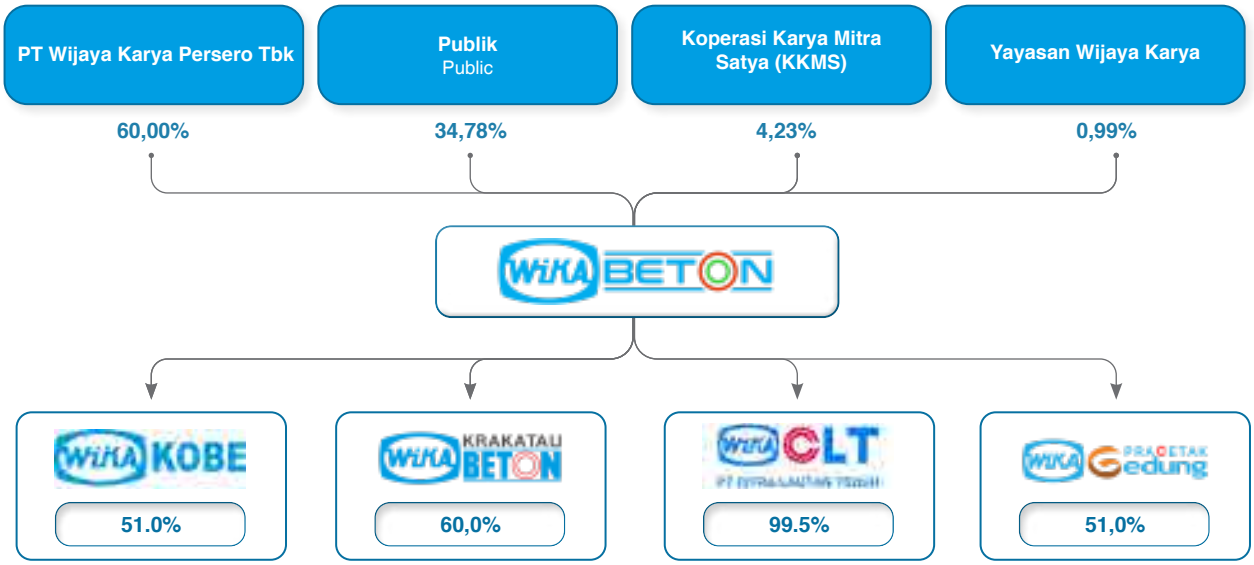
Daftar 20 Pemegang Saham Terbesar WIKA Beton per 31 Desember 2025

Top-20 Shareholder of WIKA Beton per December 31, 2025

No.	Nama Investor Investor Name	Status	Jumlah Saham Investor Name	Persentase Kepemillikan Ownership Percentage %
1	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Perseroan Terbatas Limited Liability Company	5.229.279.960	60,00
2	Koperasi Karya Mitra Satya (KKMS)	Koperasi Cooperative	368.474.349	4,23
3	DJS Ketenagakerjaan Program JHT	Dana Pensiun Pension Fund	242.727.156	2,79
4	PT Taspen (Asuransi) - FVTPL	Dana Pensiun Pension Fund	120.468.400	1,38
5	Yayasan Wijaya Karya	Yayasan Foundation	86.043.040	0,99
6	PT Panin Sekuritas	Perseroan Terbatas Limited Liability Company	69.341.300	0,80
7	PT Mitracomm Ekasarana	Perseroan Terbatas Limited Liability Company	55.881.100	0,64
8	Adika Ryanto	Perorangan Indonesia Indonesian Individual	47.865.000	0,55
9	Alexandry Sutejo	Perorangan Indonesia Indonesian Individual	44.963.600	0,52
10	Caceis Bank, Ireland Branch/Nichejungle	Badan Usaha Asing Foreign Business Entity	42.000.000	0,48
11	Koperasi Karyawan Beton Makmur Wijaya	Koperasi Cooperative	38.623.500	0,44
12	Agam Napitupulu	Perorangan Indonesia Indonesian Individual	21.000.000	0,24
13	Dana Pensiun BRI - Swakelola	Dana Pensiun Pension Fund	19.610.900	0,23
14	Ong Franky	Perorangan Indonesia Indonesian Individual	19.182.500	0,22
15	Reksa Dana Panin Dana Maksima -910334000	Reksadana Mutual Fund	18.789.800	0,22
16	Alga Agung	Perorangan Indonesia Indonesian Individual	18.008.900	0,21
`17	Eka Suhendra	Perorangan Indonesia Indonesian Individual	17.839.600	0,20
18	Eka Suhendra	Perorangan Indonesia Indonesian Individual	17.773.500	0,20
19	Susanto	Perorangan Indonesia Indonesian Individual	16.000.000	0,18
20	PT Reasuransi Nasional Indonesia	Asuransi Insurance	15.220.900	0,17

Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perusahaan, Baik langsung maupun Tidak Langsung

Information on Major and Controlling Shareholders of the Company, Either Directly or Indirectly

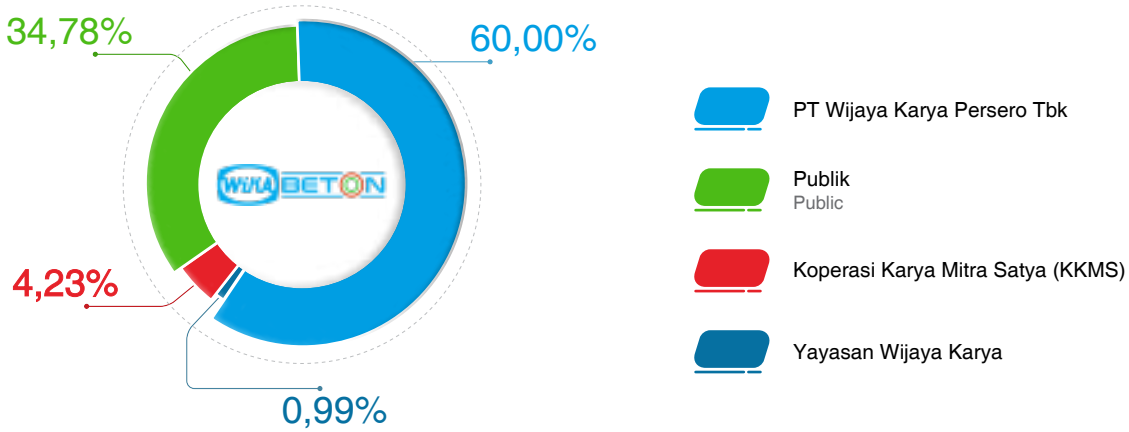


Pada bagan berikut, tergambar Komposisi Pemegang Saham WIKA Beton per 31 Desember 2025, berdasarkan detail yang tertera pada tabel di atas:

Below are the details of share ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of December 31, 2025:

Pie Chart Kepemilikan Saham Perseroan Tahun 2025

Pie Chart of Company Shares Ownership 2025



Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Pengendali (Pemegang Saham Mayoritas)

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur mengenai kepemilikan saham Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 2025, kepemilikan saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengalami perubahan berdasarkan surat dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor

Change In Controlling Shareholders Structure (Majority Shareholders)

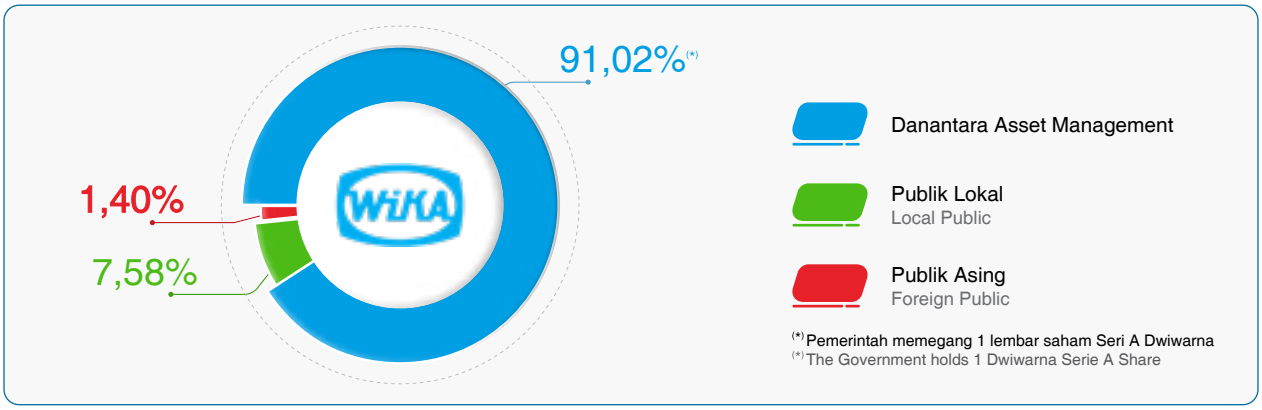
In line with Laws Number 16 of 2025 regulates the ownership of Government-Owned Shares on State-Owned Enterprises (SOEs). In 2025, the shareholding structure of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk changed based on a letter from PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Number B.07568/UM.209/KI-25 and a letter from the Ministry of State-Owned

B.07568/UM.209/KI-25 dan surat dari Kementerian BUMN Nomor S-255/MBU/03/2025 mengenai Permintaan Penyampaian Laporan Perubahan Kepemilikan Saham dan dalam rangka pengalihan hak atas seluruh saham Seri B PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik. Maka kepemilikan saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2025 menjadi sebagai berikut:

Enterprises Number S-255/MBU/03/2025 regarding the request for Submission of a Report of on changes in Share Ownership and in relation to the transfer of rights to all Series B Shares of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk to PT Birko Klasifikasi Indonesia (Persero), as well as to comply with the provisions of regulation of the Financial Service Authority of the Republic of Indonesia No 4 of 2024 and the Regulation of the Financial Service Authority no. 45 of 2024 regarding the development and strengthening of issuers and public companies. Therefore, the share ownership of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as of December 31, 2025 is as follows:

Kepemilikan saham WIKA per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025, WIKA's share ownership is as follows:



Dengan demikian, Pemilik Manfaat Akhir (Ultimate Beneficial Owner) dari PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 91,0%.

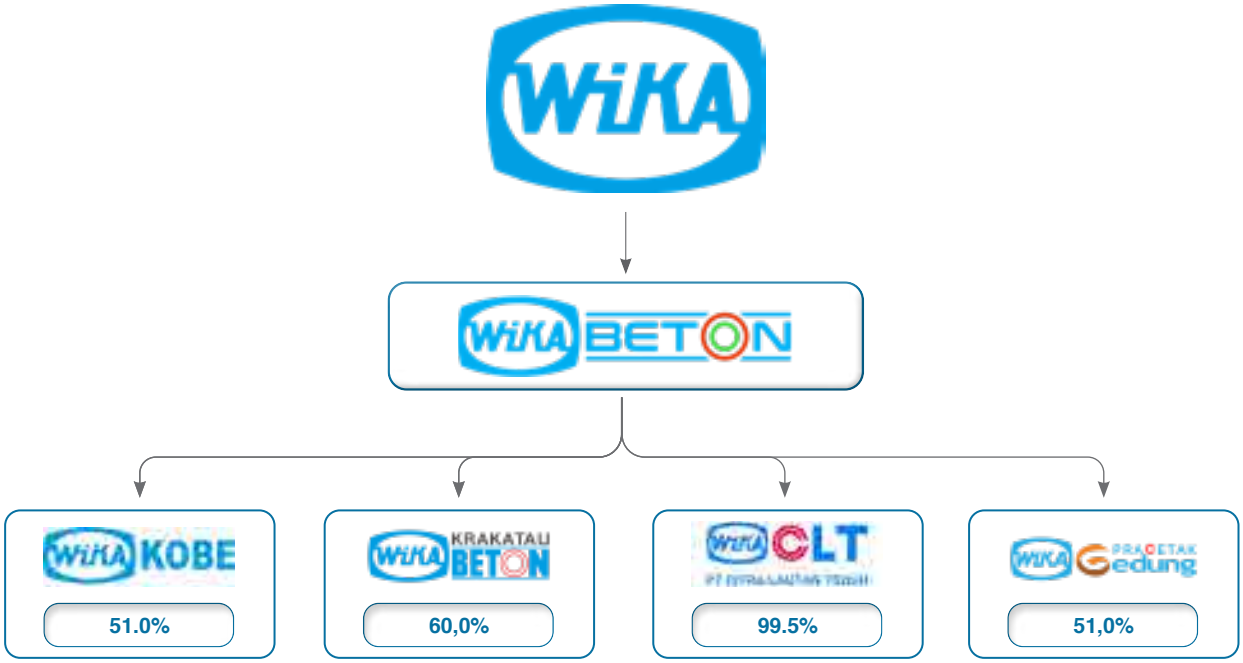
Therefore, the Ultimate Beneficial Owner of PT Wijaya Karya Beton Tbk is Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), which holds 91.0% shares of the Company.

Komposisi Kepemilikan Saham WIKA Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir (per 31 Desember di setiap tahunnya)
Composition of Share Ownership of WIKA in the Last 5 (Five) years (as of December 31 for each year)

Pemegang Saham Shareholders	2021	2022	2023	2024	2025
Pemerintah Government	65,05%	65,05%	65,05%	91,02%	0,00%(*)
Danantara Asset *Management*	-	-	-	-	91,02%
Publik **Public**					
Asing Foreign	6,70%	7,06%	3,00%	1,35%	1,40%
Lokal Local	28,25%	27,89%	31,95%	7,63%	7,58%

Catatan I Note:
(*) 1 Lembar Pemegang Saham Seri A
(*) 1 Dwiwarna Serie A Share

Struktur Grup Perusahaan
Corporate Structure





Informasi Entitas Anak dan Ventura Bersama
Information on Subsidiaries and Joint Venture

Keterangan Description	Perusahaan Anak Subsidiaries			
Nama Perusahaan Company Name	**PT Wijaya Karya Komponen Beton**	**PT Wijaya Karya Krakatau Beton**	**PT Citra Lautan Teduh**	**PT Wijaya Karya Pracetak Gedung**
Tahun Pendirian Establishment	2012	2013	1994 (Akuisisi pada Tahun 2014) 1994 (Acquisition in 2014)	2016 (Akuisisi pada tahun 2022) 2016 (Acquisition in 2022)
Domisili Domicile	Karawang, Jawa Barat West Java	Cilegon, Banten	Batam, Kepulauan Riau Batam, Riau Island	Jakarta Timur, DKI Jakarta East Jakarta, DKI Jakarta
Bidang Usaha Line of Business	Perindustrian, perdagangan, dan konstruksi. Industry, trade, and construction.	Perdagangan, industri, jasa, perbengkelan, transportasi dan pembangunan. Trade, industry, workshop services, transportation and buildings.	Perdagangan dan industri beton, jasa konstruksi dan bidang usaha lain yang terkait. Trade and concrete industry, construction services, and related business sectors.	Perindustrian, perdagangan, pracetak gedung, dan jasa konstruksi gedung. Industry, trade, building precast and building construction services.
Kepemilikan Saham WIKA Beton Share Ownership of WIKA Beton	51,0%	60,0%	99,5%	51,0%
Jumlah Aset Total Assets	Rp174.817 juta | million	Rp127.083 juta | million	Rp445.567 juta | million	Rp248.196 juta | million
Status	Beroperasi Operating	Beroperasi Operating	Beroperasi Operating	Beroperasi Operating
Alamat Address	Kawasan Industri Surya Cipta, Jl. Surya Madya III Kav I-28Q Karawang 41361, Jawa Barat. Surya Cipta Industrial Estate, Jl. Surya Madya III Kav I-28Q Karawang 41361, West Java.	Jalan Biru Laut X No. 20-21, Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340, DKI Jakarta Jalan Biru Laut X No. 20-21, Cipinang, Cempedak, Jatinegara, East Jakarta 13340, DKI Jakarta.	Jl. Hang Jebat KM. 1 Batu Besar, Nongsa, Kota Batam 29466, Kepulauan Riau. Jl. Hang Jebat KM. 1 Batu Besar, Nongsa, Batam City 29466, Riau Islands.	Head Office: WIKA Tower 1, Jl. D.I. Panjaitan, Kav. 9. Jakarta Timur

Informasi Entitas Anak
Information on Subsidiaries

PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKA KOBE)

Pada tahun 2012, Perseroan bersinergi dengan PT Komponindo Betonjaya (KOBE) untuk mendirikan PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKA KOBE). Pada tanggal 01 Oktober 2024, KOBE mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham WIKA KOBE kepada PS Construction Co., Ltd sebesar 45.815 saham atau 49,00%.

In 2012, the Company synergized with PT Komponindo Betonjaya (KOBE) to establish PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKA KOBE). October 01, 2024, KOBE transferred all shares ownership to PS Construction Co., Ltd of 45,815 shares or 49.00%.

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan memiliki 51,00% saham WIKA KOBE, sedangkan 49,00% sisanya dimiliki oleh KOBE. Pada 31 Desember 2025, susunan kepengurusan WIKA KOBE adalah sebagai berikut:

As of 2025, the Company has 51.00% shares of WIKA KOBE, while 49.00% owned by PS Construction Co., Ltd. In December 31, 2025, WIKA KOBE management composition is as follows:

Manajemen Kunci WIKA KOBE
Key Management of WIKA KOBE

Jabatan Position	Nama Name
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**	
Komisaris Utama President Commissioner	Kazuhiro Kobayashi
Komisaris Commissioner	Verly Widiantoro
Direksi **Board of Directors**	
Direktur Utama President Director	Noor Asyik
Direktur Director	Hirotake Koga

Ikhtisar Keuangan WIKA KOBE
Financial highlights of WIKA KOBE

Uraian Description	2024 (Rp juta) (Rp million)	2025 (Rp juta) (Rp million)
Jumlah Aset Total Assets	211.085	174.817
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	101.966	61.938
Jumlah Ekuitas Total Equity	109.118	112.879
Jumlah (Rugi) Laba Komprehensif Total Comprehensive Profit (Loss)	6.600	3.761

PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKA Kraton)

Pada tahun 2024, WIKA Beton, PT Krakatau Engineering (bagian dari Krakatau Steel Group) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk bekerjasama mendirikan *joint venture* yang melahirkan PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKA Kraton). Pada tanggal 12 April 2021, PT Krakatau Wajatama membeli saham PT Krakatau Engineering di WIKA Kraton sebesar 30%, selanjutnya pada tanggal 1 September 2021 PT Krakatau Wajatama secara resmi mengubah nama perusahaannya menjadi PT Krakatau Baja Konstruksi.

In 2024, WIKA Beton, PT Krakatau Engineering (part of Krakatau Steel group) and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk cooperated to establish joint venture that is PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKA Kraton). In April 12, 2021, PT Krakatau Wajatama buying a shares of PT Krakatau Engineering at WIKA Kraton of 30%, then on the September 1, 2021, PT Krakatau Wajatama officially changes the name its company to be PT Krakatau Baja Konstruksi.

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan menguasai 60,00% saham WIKA Kraton, sementara PT Krakatau Baja Konstruksi memiliki 30,00% kepemilikan saham, dan WIKA memiliki 10,00%. Pada 31 Desember 2025, susunan kepengurusan WIKA Kraton adalah sebagai berikut:

At the end of 2024, the Company owned 60.00% shares of WIKA Kraton, while PT Krakatau Baja Konstruksi had shares ownership 30.00%, and WIKA had a shares percentage of 10.00%. On December 31, 2025, the management structure of WIKA Kraton is as follows:

Manajemen Kunci WIKA Kraton
Key Management of WIKA Kraton

Jabatan Position	Nama Name
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**	
Komisaris Utama President Commissioner	Ika Maulid Nur Ahmad
Plt. Komisaris Acting as Commissioner	Agus Pramono
Direksi **Board of Directors**	
Plt. Direktur Acting as Director	F.X. Panggih Wijanarko

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, berikut adalah rincian kinerja utama WIKA Kraton:

In the last two years, the following outlines the key performance details of WIKA Kraton:

Ikhtisar Keuangan WIKA Kraton
Financial highlights of WIKA Kraton

Uraian Description	2024 (Rp juta) (Rp million)	2025 (Rp juta) (Rp million)
Jumlah Aset Total Assets	145.061	127.083
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	94.129	88.083
Jumlah Ekuitas Total Equity	50.932	39.000
Jumlah (Rugi) Laba Komprehensif Total Comprehensive Profit (Loss)	1.681	(11.932)

PT Citra Lautan Teduh (CLT)

Didirikan pada tahun 1994 di Batam, PT Citra Lautan Teduh (CLT) menjadi bagian integral dari Perseroan setelah diakuisisi saham secara bertahap. Pada tanggal 12 September 2014, Perseroan mengakuisisi 90% saham CLT, yang kemudian meningkat menjadi 99,50% pada 5 Desember 2014. Sebagai entitas anak, CLT mengkhususkan diri dalam pabrikasi tiang pancang beton putar pra-tekan, atau *pre-tensioned centrifugal precast concrete piles*. Produk ini menjadi komponen esensial dalam konstruksi pondasi dalam (*depth foundation*) untuk berbagai jenis bangunan, termasuk gedung, pelabuhan, jembatan, tangki minyak, dan lainnya.

Established in 1994 in Batam, PT Citra Lautan Teduh (CLT) has become an integral part of the Company following share acquisition phases. On September 12, 2014, the Company acquired 90% of CLT's shares, subsequently increasing its ownership to 99.50% on December 5, 2014. As a Subsidiary, CLT specializes in the fabrication of pre-tensioned centrifugal precast concrete piles. This product serves as an essential component in the construction of depth foundations for various types of constructions, including buildings, ports, bridges, oil tanks, and others.

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan memegang 99,50% saham CLT, sementara 0,50% sisanya dimiliki oleh Koperasi Karyawan Beton Makmur Wijaya. Pada tanggal 31 Desember 2025, susunan kepengurusan manajemen CLT adalah sebagai berikut:

As of the end of 2025, the Company holds 99.50% of CLT's shares, with the remaining 0.50% owned by the Beton Makmur Wijaya Employees Cooperative. As of December 31, 2025, the management structure of CLT is as follows:

Manajemen Kunci WIKA CLT
Key Management of WIKA CLT

Jabatan Position	Nama Name
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**	
Komisaris Utama President Commissioner	Rija Judaswara
Direksi **Board of Directors**	
Plt. Direktur Utama Acting as President Director	Bayu Setyowicaksono Soesanto
Direktur Director	Rohandi

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, berikut adalah rincian kinerja utama CLT:

In the last two years, the following outlines the key performance details of CLT:

Ikhtisar Keuangan WIKA CLT
Financial highlights of WIKA CLT

Uraian Description	2024 (Rp juta) (Rp million)	2025 (Rp juta) (Rp million)
Jumlah Aset Total Assets	465.650	445.567
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	91.726	62.415
Jumlah Ekuitas Total Equity	373.923	383.152
Jumlah (Rugi) Laba Komprehensif Total Comprehensive Profit (Loss)	15.371	12.332

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG)

Pada tahun 2016, Perseroan menjalin kerja sama dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) untuk mendirikan PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG) yang berfokus pada industri, perdagangan, dan jasa pemasangan beton pracetak gedung, komponen atau material gedung, perumahan, bangunan industri, dan pergudangan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta melakukan investasi.

In 2016, the Company entered into a strategic partnership with PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) in the establishment of PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG) which specializes in the industry, trade, and provision of precast concrete installation services for buildings, components or materials for buildings, residential, industrial buildings, and warehousing, both domestically and internationally, as well as engaging in investments.

Pada tahun 2022, Perseroan mengakuisisi saham WEGE sebesar 2% di WPG dengan nilai pembelian sebesar Rp270 per saham dan jumlah saham sebanyak 10 juta saham, senilai total Rp2,7 miliar. Hingga akhir tahun 2024, Perseroan memiliki 51,00% saham WPG, sedangkan WEGE memegang sisanya sebanyak 49,00%.

In 2022, the Company acquired a 2% stake in WPG from WEGE at a purchase price of Rp270 per share, totaling 10 million shares, with a transaction value of Rp2.7 billion. As of the end of 2024, the Company holds a 51.00% stake in WPG, while WEGE retains the remaining 49.00%.

Rincian komposisi manajemen WPG per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

A detailed breakdown of WPG's management composition as of December 31, 2025, is provided in the table below:

Manajemen Kunci WIKA WPG
Key Management of WIKA WPG

Jabatan Position	Nama Name
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**	
Plt. Komisaris Utama Acting as President Commissioner	Yasin Irwanuddin
Komisaris Commissioner	Liston Hutajulu
Komisaris Commissioner	Dwi Purnomo
Direksi **Board of Directors**	
Direktur Director	Yudiansyah

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, berikut adalah rincian kinerja utama WPG:

In the last two years, the following outlines the key performance details of WPG:

Ikhtisar Keuangan WPG
Financial highlights of WPG

Uraian Description	2024 (Rp juta) (Rp million)	2025 (Rp juta) (Rp million)
Jumlah Aset Total Assets	339.984	248.196
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	302.754	278.382
Jumlah Ekuitas Total Equity	37.230	(30.186)
Jumlah (Rugi) Laba Komprehensif Total Comprehensive Profit (Loss)	(9.764)	(67.416)

Kronologi Pencatatan Saham
Share Listing Chronology

Pada tahun 2014, WIKA Beton melaksanakan aksi korporasi dalam bentuk Penawaran Umum Perdana Saham *(Initial Public Offering/IPO)*. Pada momentum ini, sejumlah 2.045.466.600 saham biasa dilepas ke masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp100/saham dan ditawarkan dengan harga sebesar Rp590/saham. Pada tanggal 26 Maret 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pernyataan efektif terkait transaksi ini. Perseroan pun secara resmi memulai perdagangan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tanggal 8 April 2014. Rincian kronologis pencatatan saham Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut.

In 2014, WIKA Beton executed a corporate action in the form of an Initial Public Offering (IPO). During this pivotal moment, a total of 2,045,466,600 ordinary shares were released to the public with a nominal value of Rp100 per share, presented at an offering price of Rp590 per share. On March 26, 2014, the Financial Services Authority (OJK) issued an effective statement regarding this transaction. Consequently, the Company officially commenced the trading of its shares on the Indonesia Stock Exchange (BEI) on April 8, 2014. The chronological details of the Company's share listing are described in the following table.

Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Saham
Chronology of Share Issuance and Listing

Uraian Description	Pra Penawaran Umum Perdana Saham Pre-Initial Public Offering	Pasca Penawaran Umum Perdana Saham Post-Initial Public Offering
Aksi Korporasi Corporate Action	-	Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering
Tanggal Pencatatan Listing Date	-	8 April 2014 April 8, 2014
Bursa Tempat Penerbitan dan Pencatatan Saham Stock Exchange	-	Bursa Efek Indonesia (BEI) Indonesia Stock Exchange (IDX)
Kode Saham Ticker Code	-	WTON
Harga Penawaran Saham (Rp/saham) Offering Price (Rp/share)	-	590
Jumlah Penambahan Saham (saham) Total Additional Shares (share)	-	2.045.466.600
Akumulasi Saham (saham) Accumulated Shares (share)	6.670.000.000	8.715.466.600
Nilai Nominal Saham (Rp/saham) Nominal Value (Rp/share)	100	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Fully Paid-in Capital (Rp)	667.000.000.000	871.546.660.000

Kronologis Peristiwa Penawaran Umum Perdana Saham di Tahun 2014
Chronology of Initial Public Offering event in 2014

Peristiwa Event	Tanggal Date
Registrasi BEI dan KSEI Registration at IDX and KSEI	8 Januari 2014 January 8, 2014
Mini Expose di BEI Mini Expose at IDX	16 Januari 2014 January 16, 2014
Registrasi 1 OJK 1st Registration at OJK	23 Januari 2014 January 23, 2014
Registrasi 2 OJK 2nd Registration at OJK	13 Februari 2014 February 13, 2014
Surat Pra Efektif dan Izin Publikasi Pre-Effective Letter and Publication Permit	27 Februari 2014 February 27, 2014
Paparan Publik Public Expose	4 Maret 2014 March 4, 2014
Masa Bookbuilding Bookbuilding Period	4-17 Maret 2014 March 4-17, 2014
Registrasi 3 OJK 3rd Registration at OJK	20 Maret 2014 March 20, 2014
Perkiraan Surat Efektif dari OJK Estimated Effective Letter from OJK	26 Maret 2014 March 26, 2014
Pembayaran Kepada Emiten Payment for Issuers	28 Maret-2 April 2014 March 28-April 2, 2014
Masa Penawaran Offering Period	7 April 2014 April 7, 2014
Pencatatan di BEI Listing on IDX	8 April 2014 April 8, 2014

Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham di Tahun 2014

Berikut adalah rincian kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham pada periode 2014 hingga 31 Desember 2025:

Share Ownership Pre-Initial Public Offering and Post-Initial Public Offering in 2014

Here is the breakdown of the Company's share ownership before and after the Initial Public Offering during the period from 2014 to December 31, 2025:

Aksi Korporasi dan Peristiwa Corporate Action and Event	Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham Total Shares	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Fully Paid-in Capital (Rp)	Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Pra Penawaran Umum Perdana Saham Pre-Initial Public Offering	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	5.229.280.000	522.928.000.000	60,00%
	Koperasi Karya Mitra Satya	977.519.049	97.751.904.900	14,66%
	Yayasan Wijaya Karya	86.043.000	8.604.300.000	1,29%
	Publik (masing-masing kepemilikan di bawah 5%) Public (each less than 5%)	-	-	-
	Sub Jumlah Sub-Total	**6.292.842.049**	**629.284.204.900**	**94,35%**
	Saham yang Diperoleh Kembali Treasury Stock	377.157.951	37.715.795.100	5,65%
	Jumlah **Total**	**6.670.000.000**	**667.000.000.000**	**100,00%**

Aksi Korporasi dan Peristiwa Corporate Action and Event	Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham Total Shares	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Fully Paid-in Capital (Rp)	Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Pasca Penawaran Umum Perdana Saham (per 31 Desember 2014) Post-Initial Public Offering (As of December 31, 2014)	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	5.229.280.000	522.928.000.000	60,00%
	Koperasi Karya Mitra Satya	951.228.749	95.122.874.900	10,90%
	Yayasan Wijaya Karya	86.043.000	8.604.300.000	0,99%
	Publik (masing-masing kepemilikan di bawah 5%) Public (each less than 5%)	2.071.756.900	207.175.690.000	23,80%
	Sub Jumlah Sub-Total	**8.338.308.649**	**833.830.864.900**	**95,70%**
	Saham yang Diperoleh Kembali Treasury Stock	377.157.951	37.715.795.100	5,65%
	Jumlah Total	**6.670.000.000**	**667.000.000.000**	**100,00%**
Per 31 Desember 2025 As of December 31, 2025	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	5.229.279.960	522.927.996.000	60,00%
	Koperasi Karya Mitra Satya	368.474.349	36.847.434.900	4,23%
	Yayasan Wijaya Karya	86.043.040	8.604.304.000	0,99%
	Publik (masing-masing kepemilikan di bawah 5%) Public (each less than 5%)	3.031.669.251	303.166.925.100	34,78%
	Sub Jumlah Sub-Total	**8.715.466.600**	**871.546.660.000**	**100,00%**
	Saham yang Diperoleh Kembali Treasury Stock	0	0	0,00%
	Jumlah Total	**8.715.466.600**	**871.546.660.000**	**100,00%**

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology

Hingga 31 Desember 2025, sejak sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, Perseroan belum menerbitkan efek lainnya dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, dalam Laporan Tahunan ini, Perseroan tidak menyajikan informasi mengenai kronologis pencatatan efek, aksi korporasi, perubahan jumlah efek, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek.

Until December 31, 2025, since its shares were listed on the Indonesia Stock Exchange, the Company has not issued any other securities in any form. Therefore, in this Annual Report the Company does not provide information on the chronology of securities listing, corporate actions, changes in the number of securities, the name of the exchange where other securities are listed, and securities rating.

Informasi pada Situs Web Perseroan
Information on Company's Website



Dengan tujuan mengoptimalkan transparansi dan distribusi informasi kepada pemangku kepentingan, Perseroan secara cermat mengelola situs web resmi. Pengelolaan ini didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan mengacu pada ketentuan POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Situs web Perseroan tersedia dalam dua bahasa dan dapat diakses melalui tautan www.wika-beton.co.id. Dengan akses ke situs web Perseroan, para pemangku kepentingan dapat menemukan beragam informasi lengkap tentang Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Perusahaan
   Menyediakan informasi tentang sejarah singkat, visi dan misi, nilai & paradigma, struktur manajemen, struktur organisasi, struktur grup, struktur pemegang saham, profesi penunjang, Anggaran Dasar, serta penghargaan & sertifikasi.
2. Bisnis
   Menyediakan informasi tentang lini bisnis Perseroan, jasa yang ditawarkan, dan ragam produk Perseroan, lengkap dengan brosur yang dapat diunduh.
3. Produk & Jasa
   Menyediakan informasi ragam produk beton yang dihasilkan Perseroan dan jasa instalasi yang ditawarkan Perseroan.
4. CSR
   Menyediakan informasi tentang komitmen Perseroan dalam kewajibannya terhadap pemangku kepentingan, di antaranya meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya atas Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perseroan disertai dengan penyampaian Laporan Keberlanjutan Perseroan.

With the aim of optimizing transparency and information distribution to stakeholders, the Company meticulously manages its official website. This management is grounded in the principles of good corporate governance (GCG) and adheres to the provisions of POJK No. 8/POJK.04/2015 regarding the Websites of Issuers or Public Companies. The Company's website, accessible through the link www.wika-beton.co.id, available in two languages. Through access to the Company's website, stakeholders can discover comprehensive information about the Company, including but not limited to:

1. Company
   Provides information on brief history of the Company, vision and mission, values & paradigm, management structure, organization structure, group structure, shareholders composition, supporting professions, Articles of Association, and awards and certificates.
2. Business
   Provides information and description on the Company's business lines, services provided, and the Company's products, with downloadable brochures.
3. Product & Services
   Provides information on the Company's concrete product variants and installation services.
4. CSR
   Provides information and description on the Company's commitment towards its responsibility to the stakeholders, among others, policy, program type, and costs for Corporate Social & Environmental Program, accompanied by the Company's Sustainability Report.

5. Hubungan Investor
   Menyediakan informasi yang menerapkan nilai-nilai keterbukaan informasi bagi investor, diantaranya mencakup prospektus, laporan tahunan Perseroan, laporan keuangan Perseroan, ikhtisar keuangan, informasi Rapat Umum Pemegang Saham, informasi saham dan dividen, hingga paparan aksi korporasi.
6. Media
   Sumber informasi di mana pengunjung dapat mengakses berita terkini, *press release*, majalah internal WTON *Magazine*, hingga logo Perseroan.
7. GCG
   Memaparkan tentang komitmen Perseroan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, di antaranya mencakup Pedoman Tata Kelola, Komite Perusahaan, Kebijakan Tata Kelola, Satuan Pengawasan Intern, dan Sekretaris Perusahaan.
8. Portofolio
   Memaparkan informasi terkini tentang portofolio proyek yang pernah dan sedang dikerjakan oleh Perseroan.
9. Karier
   Sumber informasi terkait pengumuman seleksi calon pegawai, panggilan tes kesehatan, panggilan wawancara Direksi, dan program beasiswa Ikatan Dinas.

Portal digital resmi Perseroan ini menyediakan akses kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan transparansi informasi yang dibutuhkan. Informasi kunci yang tersedia pada situs web Perseroan diuraikan melalui poin-poin yang terstruktur dalam tabel berikut:

5. Investor Relations
   Providing information that implements the values of information disclosure for investors, including among others, the Company's prospectus, annual report, financial statements, financial highlights, General Meeting of Shareholders information, shares and dividends information, and corporate action or public expose.
6. Media
   Source of information where visitors can access the latest news, press releases, internal magazine WTON Magazine, to the company logo.
7. GCG
   Describes the Company's commitment on the implementation of good corporate governance, including among others Code of Corporate Governance, Committees, Corporate Governance Policy, Internal Audit, and Corporate Secretary.
8. Portfolio
   Provides updated information on the Company's current and completed projects portfolio.
9. Career
   Sources of information include those related to the results of the selection of prospective employees, calls for medical tests, calls for interviews with the Directors, and the Contracted Scholarship program.

The Company's official digital portal provides access to all stakeholders, facilitating the needs for essential information with transparency. Key information within the Company's website is described through the following table:

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Note
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu Information on shareholder until final individual shareholder	✓	Tersedia pada situs web Perseroan Available at Company's website
Struktur grup Perseroan Company group structure	✓	Tersedia pada situs web Perseroan Available at Company's website
Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir) Annual financial statements (last 5 years)	✓	Tersedia pada situs web Perseroan Available at Company's website
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profiles of Board of Commissioners and Board of Directors	✓	Tersedia pada situs web Perseroan Available at Company's website
Jumlah (Rugi) Laba Komprehensif Total Comprehensive Profit (Loss)	✓	Tersedia pada situs web Perseroan Available at Company's website

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawas Intern

Training and/or Educational Activities of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit

Secara berkesinambungan, seluruh elemen perseroan didorong untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas yang dimiliki. Pada tahun 2025, berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, dan lokakarya telah diikuti oleh jajaran Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern Perseroan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Continuously, all the Company's components are encouraged to enhance their competencies and capacities. In 2025, various educational activities, training sessions, seminars, and workshops have been attended by members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and the Internal Audit. The details are as follows:

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2025
Training and/or educational Activities of Board of Commissioners in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Wilan Oktavian	Komisaris Utama President Commissioner	Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV	Jakarta	27-28 Agustus 2025 August 27-28, 2025	PT RAP Academy
Tjia Marwan	Komisaris Commissioner	Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV	Jakarta	27-28 Agustus 2025 August 27-28, 2025	PT RAP Academy
Dwi Gawan Islandhi HB	Komisaris Commissioner	*Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV*	Jakarta	27-28 Agustus 2025 August 27-28, 2025	PT RAP Academy

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi Tahun 2025
Training and/or Educational Activities of Board of Directors in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Kuntjara	Direktur Utama President Director	*Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV*	Jakarta	19-20 Juni 2025 June 19-20, 2025	PT RAP Academy
Rija Judaswara	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Development	*Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV*	Jakarta	19-20 Juni 2025 June 19-20, 2025	PT RAP Academy

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Agus Pramono	Direktur Operasi dan *Supply Chain Management* Director of Operation and Supply Chain Management	*Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV*	Jakarta	18-19 November 2025 November 18-19, 2025	PT RAP Academy
Verly Widiantoro	Direktur Teknik dan Produksi Director of Engineering and Production	*Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV*	Jakarta	19-20 Juni 2025 June 19-20, 2025	PT RAP Academy
Verly Widiantoro	Direktur Teknik dan Produksi Director of Engineering and Production	Satria Luhur	Jakarta	14-15 November 2025 November 14-15, 2025	WIKASATRIAN

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Audit Tahun 2025
Training and/or Educational Activities of Audit and Business Risk Committee in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Ashuri	Komite Audit Audit Committee	*Certified Risk Management Professional (CRMP)*	Jakarta	08-11 Desember 2025 December 08-11, 2025	PT RAP Academy
Gunarto	Anggota Member	Certified Risk Management Professional (CRMP)	Jakarta	05-08 November 2025 November 05-08, 2025	PT RAP Academy

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* Tahun 2025
Training and/or Educational Activities of Integrated Governance and Good Corporate Governance Committee in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Agung Damiar	Komite Tata Kelola Terintegrasi dan GCG Integrated Governance and GCG Committee	*Certified Risk Management Professional (CRMP)*	Jakarta	08-11 Desember 2025 December 8-11, 2025	PT RAP Academy

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantauan Risiko Tahun 2025
Training and/or Educational Activities of Nomination, Remuneration and Risk Monitoring Committee in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Priatna Agus Setiawan	Komite Nominasi Remunerasi dan Pemantauan Risiko Nomination Remuneration and Risk Oversight Committee	*Certified Risk Management Professional (CRMP)*	Jakarta	08-11 Desember 2025 December 08-11, 2025	PT RAP Academy
Dedi Indra	Anggota Member	Certified Risk Management Professional (CRMP)	Jakarta	08-11 Desember 2025 December 08-11, 2025	PT RAP Academy

Pendidikan dan/atau Pelatihan Sekretaris Perusahaan Tahun 2025
Training and/or Educational Activities of Corporate Secretary in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Yushadi	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	*Measurement of The Implementation of Corporate Governance Based on ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)*	Jakarta	24 Januari 2025 January 24, 2025	PT DINAMIKA PASIFIK SOLUSINDO

Pendidikan dan/atau Pelatihan Satuan Pengawasan Internal Tahun 2025
Training and/or Educational Activities of Internal Audit in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Denny Setiawan Ariwibowo	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit	*Certified Risk Management Profesional (CRMP)*	Jakarta	04 Maret 2025 March 4, 2024	RAP Academy
Denny Setiawan Ariwibowo	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit	*Investment Strategies and Portfolio Management*	Jakarta	24 November 2025 November 24, 2025	The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)
Denny Setiawan Ariwibowo	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit	*Digital Forensic in Internal Audit*	Jakarta	31 Ocktober 2025 October 31, 2025	BPKP
Denny Setiawan Ariwibowo	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit	*Professional Recognition Program Qualified Internal Auditor (PRP QIA)*	Jakarta	3 Ocktober 2025 October 3, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA)
Denny Setiawan Ariwibowo	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit	*A Balance Between Power Purpose, and Principles*	Jakarta	26 Juni 2025 June 26, 2025	MRT Jakarta
Denny Setiawan Ariwibowo	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit	*Measurement of The Implementation of Corporate Governance Based on ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)*	Jakarta	23 Januari 2025 January 23, 2025	PT DINAMIKA PASIFIK SOLUSINDO
Halim	Kepala Pemeriksa Chief Examiner	Measurement of The Implementation of Corporate Governance Based on ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)	Jakarta	23 Januari 2025 January 23, 2025	PT DINAMIKA PASIFIK SOLUSINDO
Muhammad Iqbal	Kepala Pemeriksa Chief Examiner	*Measurement of The Implementation of Corporate Governance Based on ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)*	Jakarta	23 Januari 2025 January 23, 2025	PT DINAMIKA PASIFIK SOLUSINDO

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Triyono	Kepala Pemeriksa Chief Examiner	*Measurement of The Implementation of Corporate Governance Based on ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)*	Jakarta	23 Januari 2025 January 23, 2025	PT DINAMIKA PASIFIK SOLUSINDO
Triyono	Kepala Pemeriksa Chief Examiner	*Konferensi Audit Internal & Forum FKSPI*	Jakarta	2-3 Juli 2025 July 2-3, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA)

Pendidikan dan/atau Pelatihan Karyawan Tahun 2025
Training and/or Educational Activities of Employee in 2025

Nama Name	Tempat Location	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Date
An Overview of ESG	Jakarta	CRMS Indonesia	3	13 Juni 2025 June 13, 2025
Analisis Beban Kerja Workload Analysis	Jakarta	Value Consult	4	7 Februari 2025 February 7, 2025
Awareness ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, SMK3 PP50, Penanganan Dan Pengelolaan Limbah B3	Jakarta	PT Wijaya Karya BetonTbk	14	19 September 2025 September 19, 2025
BIM Tingkat Dasar Basic Level BIM Training	Jakarta	PT Wijaya Karya BetonTbk	41	17 September 2025 September 17, 2025
Build Your Team Agility	Jakarta	PT Wijaya Karya BetonTbk	7	22 Mei 2025 May 22, 2025
Building Business Relationships	Online	LinkedIn Learning	24	16 Oktober 2025 October 16, 2025
Building Skill to Become Powerhouse Negotiator	Online	LinkedIn Learning	3	30 Juni 2025 June 30, 2025
Business Benefits Realization Foundation	Online	LinkedIn Learning	6	30 Juni 2025 June 30, 2025
Certification Prep: Professional in Human Resources (PHR)	Online	LinkedIn Learning	1	24 Oktober 2025 October 24, 2025
Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV	Jakarta	RAP Academy	3	19 Juni 2025 June 19, 2025
Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV	Jakarta	RAP Academy	3	17 September 2025 September 17, 2025
Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV	Jakarta	RAP Academy	1	18 November 2025 November 18, 2025
Certified Risk Management Officer (CRMO)	Jakarta	RAP Academy	31	17 September 2025 September 17, 2025
Certified Risk Management Profesional (CRMP)	Jakarta	RAP Academy	6	8 Desember 2025 December 8, 2025
Corporate Finance	Jakarta	WIKASATRIAN	2	11 Novembere 2025 November 11, 2025
Data Processing & Report Visualisation	Jakarta	Sailendra Institute	3	20 Maret 2025 March 20, 2025
Enchancing Personal Creativity		LinkedIn Learning	9	21 Juli 2025 July 21, 2025
Engineering Session #18	Jakarta	PT Wijaya Karya BetonTbk	330	11 September 2025 September 11, 2025
Engineering Session #19	Jakarta	PT Wijaya Karya BetonTbk	321	9 Desember 2025 December 9, 2025

Nama Name	Tempat Location	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Date
Executive Leadership		LinkedIn Learning	18	30 Oktober 2025 October 30, 2025
How to create a budget		LinkedIn Learning	4	29 Oktober 2025 October 29, 2025
Investment Strategies and Portfolio Management	Jakarta	The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)	1	24 November 2025 November 24, 2025
Konferensi Audit Internal & Forum FKSPI Internal Audit Conference and FKSPI Forum	Jakarta	Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) Internal Auditor Education Foundation (YPIA)	1	2 Juli 2025 July 2, 2025
Lead Auditor ISO 9001:2015	Jakarta	Sucofindo	1	8 Desember 2025 December 8, 2025
Measurement of The Implementation of Corporate Governance Based on ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)	Jakarta	PT DINAMIKA PASIFIK SOLUSINDO	13	23 Januari 2025 January 23, 2025
Occupational Safety and Health	Jakarta	PT Indika JAya Pratama	5	15 April 2025 April 15, 2025
Essential Lesson For First Time Manager		LinkedIn Learning	8	8 April 2025 April 8, 2025
Penerapan Tata Cara Perhitungan TKDN 2025 Regulasi Terbaru & Implikasi Teknis Implementation of the 2025 TKDN Calculation Procedures Based on the Latest Regulations and Technical Implications	Jakarta	TUV Rheinland Indonesia	8	20 Agustus 2025 August 20, 2025
Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Sektor Keuangan The Role of GRC in Enhancing Investor Confidence and Financial Sector Stability	Jakarta	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)	10	10 Februari 2025 February 10, 2025
Professional Recognition Program Qualified Internal Auditor (PRP QIA)	Jakarta	Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) Internal Auditor Education Foundation (YPIA)	1	3 Oktober 2025 October 3, 2025
Satria Pratama	Jakarta	WIKASATRIAN	5	4 Februari 2025 February 4, 2025
Satria Luhur	Jakarta	WIKASATRIAN	1	14 November 2025 November 14, 2025
Seminar Pemantauan, Evaluasi, Remediasi dan Pelaporan dalam Implementasi ICOFR Seminar on Monitoring, Evaluation, Remediation, and Reporting in the Implementation of ICoFR	Jakarta	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Institute of Accountants (IAI)	5	27 September 2025 September 27, 2025
Sertifikasi Keahlian Konstruksi Construction Skills Certification	Jakarta	P3SM	6	19 Maret 2025 March 19, 2025
Workshop Manajemen Risiko Risk Management Workshop	Jakarta	PT Wijaya Karya BetonTbk	2	20 Februari 2025 February 20, 2025
			15	12 Agustus 2025 August 12, 2025
			3	20 Agustus 2025 August 20, 2025
Workshop Pengisian Form L0-L5 Workshop on Completing L0–L5 Forms	Jakarta	PT. Wijaya Karya Beton Tbk	24	12 Agustus 2025 August 12, 2025

4





Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Overview

Sumber Daya Manusia
Human Capital

Pengelolaan Sumber Daya Manusia terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan masyarakat dan peningkatan teknologi, dimana seluruh elemen harus bergerak cepat dan beradaptasi dengan sistem kerja yang baru. Seiring bergulirnya tahun 2025 dan aktivitas bisnis yang semakin menantang, korporasi semakin dituntut untuk mengimplementasikan beragam strategi dan kebijakan baru guna memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi yang unggul.

Human Capital Management continues to evolve in line with social progress and technological advancement, requiring all elements to move quickly and adapt to new working systems. As 2025 progresses and business activities become more challenging, corporations are increasingly required to implement various new strategies and policies to ensure that employees possess strong and competitive competencies.

Dengan optimisme, WIKA Beton siap menghadapi pergeseran dalam industri dengan cara yang optimal. Hal ini diperkuat dengan kesiapan yang telah dilakukan Perseroan terhadap sumber daya manusianya sejak awal proses rekrutmen, serta pendampingan yang berlangsung sepanjang perjalanan karier pegawai. Prinsip "*right man in the right place*" menjadi landasan Perseroan dalam menempatkan personilnya di bidang dan fungsi yang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

With optimism, WIKA Beton is prepared to face the shifts in the industry in an optimal manner. This is reinforced by the readiness that the Company has undertaken regarding its human capital since the early stages of recruitment, along with ongoing support throughout employees' career journeys. The principle of "right man in the right place" serves as the company foundation positions its personnel in fields and functions that align with their capacities.

Kebijakan Pengelolaan SDM WIKA Beton

WIKA Beton, dengan semangat *#ConcretExpert* sebagai ahlinya beton di Indonesia, gencar mengoptimalkan manajemen SDM melalui pendekatan yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, Perseroan menetapkan penempatan, tugas, dan tanggung jawab dengan cermat, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM. Semua ini direncanakan secara matang agar sejalan dengan visi, misi, dan strategi Perseroan, yang selaras dengan dinamika industri baik di tingkat nasional maupun global.

HC Management Policy

WIKA Beton, with the spirit of #ConcretExpert as the concrete specialist in Indonesia, is actively optimizing HC management through an effective approach. To achieve this goal, the Company carefully determines placements, tasks, and responsibilities, while enhancing the quantity and quality of HC. All of these are meticulously planned to align with the Company's vision, mission, and strategy, which are in harmony with the dynamics of the industry both at the national and global levels.

Pengelolaan SDM dilaksanakan dengan penuh perhatian terhadap kesetaraan dan sikap non-diskriminatif. Setiap individu di WIKA Beton memiliki hak yang setara untuk mengembangkan karir dan kompetensi mereka, mendapatkan penilaian kinerja yang transparan, dan berhak berserikat. Tidak ada diskriminasi berdasarkan gender, suku, ras, agama, atau golongan. Semua hak diberikan secara adil dan objektif, tanpa memandang latar belakang individu.

The management is carried out with utmost attention to equality and a non-discriminatory attitude. Each individual at WIKA Beton has an equal right to develop their career and competencies, receive transparent performance assessments, and have the right to associate. There is no discrimination based on gender, ethnicity, race, religion, or social group. All rights are granted fairly and objectively, regardless of their individual's background.

Perseroan secara berkelanjutan menyelaraskan kebijakan pengelolaan SDM dengan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang telah ditetapkan. Penyusunan RJP

The Company continuously aligns its HC management policies with the established Long-Term Plan. The formulation of this plan is based on a comprehensive

tersebut didasarkan pada analisis komprehensif terhadap berbagai aspek strategis meliputi peningkatan kompetensi, perencanaan suksesi yang optimal, internalisasi budaya, peningkatan *engagement*, dan persiapan masa purna bakti pegawai. Pendekatan perusahaan dalam mengelola SDM mencakup:

a. Melakukan pembinaan dan internalisasi budaya perusahaan.
b. Program Peningkatan dan Pemenuhan gap kompetensi pegawai melalui program pelatihan dan pengembangan pegawai per level jabatan.
c. Meningkatkan produktivitas pegawai dengan optimalisasi jumlah pegawai.
d. Mempersiapkan pegawai bertalenta yang sesuai dengan rencana suksesi.
e. Pengelolaan Pegawai Talenta BOD-1 dan BOD-2 sebagai suksesor BOD di masa yangakan datang, termasuk pengembangan untuk Talenta Perempuan dan Talenta Milenial.
f. Program peningkatan kompetensi pegawai yang masuk ke dalam *Nominated Talent* agar proses suksesi pegawai dapat berjalan dengan optimal.
g. Pengembangan Digitalisasi pelaksanaan *Human Capital Management*.
h. Meningkatkan tingkat keterikatan pegawai kepada Perseroan (*engagement level*) secara berkesinambungan.
i. Mengelola kerjasama dengan lembaga outsourcing dalam rangka pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia yang menekankan pada ketaatan pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Dengan menerapkan rangkaian strategi pengelolaan SDM yang terfokus, Perseroan akan memperoleh kekuatan yang signifikan. Pertumbuhan SDM akan terwujud melalui pengembangan keahlian baik dalam bidang teknis maupun non-teknis, menjadikan WIKA Beton sebagai entitas yang unggul, tangguh, dan gesit dalam menghadapi setiap perubahan.

Struktur dan Profil Pejabat Divisi Human Capital

Sepanjang tahun 2025, Divisi Human Capital berperan penting dalam memastikan pengelolaan SDM yang optimal untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

Divisi ini bertanggung jawab merancang dan menerapkan kebijakan strategis yang berfokus pada pengembangan SDM, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Divisi Human Capital didukung oleh tiga Bidang utama, yaitu:

analysis of various strategic aspects, including competency development, effective succession planning, cultural internalization, increased employee engagement, and preparation for employee retirement. The Company's approach to HC management includes:

a. Conduct employee development and internalize the Company's corporate culture.
b. Implement programs to improve and close employee competency gaps through training and development programs based on position levels.
c. Increase employee productivity by optimizing workforce size.
d. Prepare high-potential employees in line with the succession plan.
e. Manage BOD-1 and BOD-2 talent as future successors to the Board of Directors, including the development of female and millennial talent.
f. Implement competency development programs for employees included in the Nominated Talent pool to ensure an effective succession process.
g. Develop the digitalization of Human Capital Management processes.
h. Continuously enhance employee engagement with the Company.
i. Manage cooperation with outsourcing institutions to fulfill human capital needs, with a strong emphasis on compliance with applicable labor regulations.

By implementing focused management strategies, the Company will gain significant strength. Human Capital growth will be achieved through the development of both technical and non-technical skills, enabling WIKA Beton to become a strong, resilient, and agile organization in responding to change.

Structure and Profile of the Human Capital Division Officials

Throughout 2025, the Human Capital Division played a crucial role in ensuring optimal HC management to support the achievement of the company's goals.

This division is responsible for designing and implementing strategic policies focused on HC development, productivity improvement, and the creation of a conducive work environment. The Human Capital Division is supported by three main Departments, namely:

1. **Bidang Manajemen Talenta**
   Mengelola pemenuhan kebutuhan Human Capital berupa pengelolaan program rekrutmen dan seleksi calon pegawai baik yang sudah berpengalaman maupun belum berpengalaman, menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan dan strategi perusahaan, pengelolaan program pengembangan dan pelatihan pegawai baik di internal maupun eksternal, asesmen kompetensi, serta perencanaan jenjang karir suksesi pegawai, dan melakukan pengembangan manajemen talenta.

2. **Bidang Pengembangan Organisasi dan Budaya**

   Mengelola penyusunan rencana jangka panjang dan tahunan terkait fungsi Human Capital, strategi pengembangan organisasi, perencanaan kebutuhan Human Capital, pengelolaan budaya Perusahaan, penyusunan sistem dan prosedur serta perencanaan engagement perusahaan.

3. **Bidang Pengharkatan**
   Mengelola pengharkatan kepegawaian meliputi remunerasi penghargaan pegawai, pemeliharaan hubungan industrial, pelaksanaan penilaian kinerja dan pengolahan data informasi Human Capital.

Dengan struktur yang jelas, Divisi Human Capital berkomitmen untuk terus mendukung daya saing perusahaan melalui pengelolaan SDM yang profesional.

1. **Talent Management Department**
   Managing human capital requirements by administering recruitment and selection programs for both experienced and inexperienced candidates, placing employees based on company needs and strategies, administering internal and external employee development and training programs, conducting competency assessments, planning employee succession and career paths, and developing talent management.

2. **Organizational Development and Culture Department**
   Overseeing the formulation of long-term and annual plans related to the Human Capital function, including organizational development strategies, Human Capital workforce planning, corporate culture management, the development of systems and procedures, as well as corporate engagement planning.

3. **Compensation and Benefit Department**
   Managing employee compensation includes employee remuneration, maintaining industrial relations, conducting performance appraisals, and processing Human Capital data.

With a clear structure, the Human Capital Division is committed to continuously supporting the company's competitiveness through professional HC management.

Profil Manajemen Divisi Human Capital
Profile of Human Capital Division

Dedi Indra*

Manajer Divisi Human Capital merangkap PS Manajer Bidang Pengembangan Organisasi dan Budaya
Human Capital Division Manager and Acting Manager of Organizational and Cultural Development

Menjabat sebagai Manajer Divisi Human Capital sejak 8 Oktober 2024 dan Merangkap sebagai PS Manajer Bidang Pengembangan Organisasi dan Budaya sejak 1 Agustus 2025. Bergabung di WIKA Beton sejak 9 April 2003. Memperoleh gelar Sarjana Teknik, Jurusan Teknik Informatika dari Universitas Gunadarma pada 2003. Sebelumnya, pernah menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan pada 2022-2024.

Has served as Human Capital Division Manager since October 8, 2024, and concurrently as Acting Manager of Organizational and Cultural Development since August 1, 2025. Has been with WIKA Beton since April 9, 2003. Holds a Bachelor's degree in Engineering, majoring in Informatics Engineering, from Gunadarma University, obtained in 2003. Previously, served as Corporate Secretary from 2022 to 2024.

Ristianingtyas Ayu Bidari

Manajer Bidang Manajemen Talenta
Manager of Talent Management

Menjabat sejak 21 Juli 2025. Bergabung di WIKA sejak 1 Juli 2013. Memperoleh gelar Sarjana Psikologi, Jurusan Psikologi dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UNIKA) dan pernah menjabat sebagai Supervisor Rekrutmen dan Penempatan Divisi Human Capital.

Appointed on July 21, 2025. Joined WIKA on July 1, 2013. Holds a Bachelor's degree in Psychology from Atma Jaya Catholic University of Indonesia (UNIKA) and has previously served as Recruitment and Placement Supervisor in the Human Capital Division.

Rizki Yudo Pratomo

Manajer Bidang Pengharkatan
Manager of Compensation and Benefit

Menjabat sejak 1 Februari 2025. Bergabung di WIKA sejak 20 November 2008. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1), Jurusan Akuntansi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan gelar Magister (S2), Jurusan Business Administration dari Universitas Gadjah Mada. Pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Keuangan dan SDM Unit Operasi IV.

Appointed on February 1, 2025. Joined WIKA on November 20, 2008. Obtained a Bachelor's degree in Accounting from Syarif Hidayatullah State Islamic University and a Master's degree in Business Administration from Gadjah Mada University. Previously served as Head of Finance and Human Resources Section of Operation Unit IV.

Fungsi dan Peranan Divisi Human Capital

Dalam menjalankan fungsinya terkait pengelolaan SDM, Divisi Human Capital mengemban berbagai tugas esensial, antara lain:

1. Menyusun rencana strategis Pengembangan Organisasi (*Organization Development*) termasuk di dalamnya penetapan strategis mengenai *Human Capital* dan struktur organisasi Perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Melakukan pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Perseroan, baik melalui proses rekrutmen dan optimalisasi jumlah pegawai eksisting.
3. Meningkatkan daya saing Perseroan dengan melaksanakan program pengembangan untuk peningkatan kompetensi pegawai yang berkesinambungan.
4. Menentukan kebijakan-kebijakan hubungan industrial agar tercipta hubungan yang harmonis.
5. Menyusun kebijakan remunerasi pegawai yang kompetitif.

Function and Role of Human Capital Division

In fulfilling its role concerning HC management, the Human Capital Division undertakes various essential tasks, including:

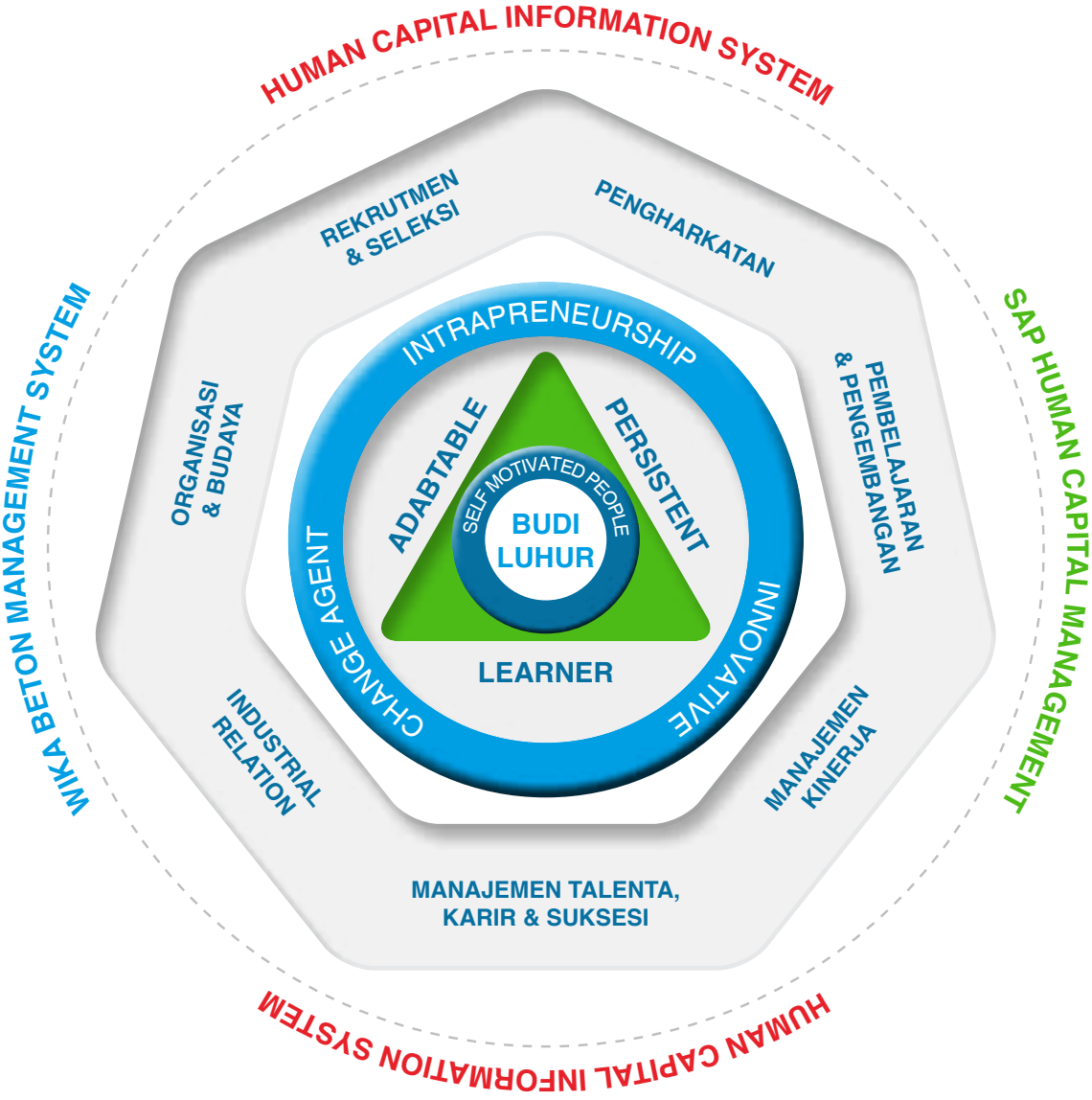
1. Organization Development includes strategic decisions regarding Human Capital and the Company's organizational structure, both in the short and long term.
2. Fulfilling employee requirements in accordance with the Company's needs, both through the recruitment process and the optimization of existing employee numbers.
3. Enhancing the Company's competitiveness by implementing development programs for the continuous improvement of employee competencies.
4. Determining industrial relations policies to create harmonious relationships.
5. Formulating competitive employee remuneration policies.

6. Mempersiapkan suksesor dengan memastikan jalannya kaderisasi yang optimal melalui program pengembangan dan pembinaan yang berkelanjutan.
7. Mempersiapkan pegawai yang akan memasuki masa purnabaktinya melalui program pelatihan.

Integrasi program *Human Capital* dilakukan melalui *Human Capital Information System* (HCIS), *Human Capital Management System* (HCMS) dan SAP. Program ini disusun untuk memberikan dukungan kepada organisasi atau perusahaan dalam merancang sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terencana, terstruktur, terintegrasi, dan efisien. Tujuan utama dari program ini adalah menciptakan kontribusi positif terhadap pencapaian target organisasi. Rincian mengenai proses bisnis *Human Capital* Perseroan dapat dilihat dalam ilustrasi berikut ini:

6. Preparing successors by ensuring optimal regeneration through continuous development and coaching programs.
7. Preparing employees who are approaching retirement through training programs.

Human Capital integration is carried out through the Human Capital Information System (HCIS), Human Capital Management System (HCMS), and SAP. This program is designed to support organizations or companies in designing a planned, structured, integrated, and efficient Human Resource (HR) management system. The main objective of this program is to make a positive contribution to the achievement of organizational targets. Details regarding the Company's Human Capital business processes can be seen in the following illustration:



Core Value Perusahaan
Company Core Value

Fokus Pengelolaan SDM WIKA Beton 2025

Penting untuk disebutkan bahwa tahun 2025 adalah tahun yang cukup menantang dalam proses manajemen SDM.

Pada tahun 2025, fokus pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) WIKA Beton diarahkan pada penguatan Program Pengembangan Pegawai dan Talent Management sebagai pilar utama dalam memastikan keberlanjutan organisasi dan kesiapan kepemimpinan di masa depan. Kebijakan ini dirancang secara terintegrasi untuk mendukung optimalisasi kinerja, pengembangan kompetensi, serta kesiapan suksesi pegawai di seluruh jenjang jabatan.

Dalam rangka memperkuat proses suksesi, Perseroan secara khusus mengimplementasikan program peningkatan kompetensi bagi pegawai yang tergabung dalam kelompok Nominated Talent. Program ini bertujuan untuk memastikan kesiapan talenta dalam mengisi posisi strategis, sehingga proses suksesi jabatan dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan juga melaksanakan program peningkatan dan pemenuhan kesenjangan kompetensi melalui pelatihan mandatori yang disesuaikan dengan masing-masing level jabatan, guna memastikan keselarasan antara kompetensi individu dan tuntutan jabatan.

Upaya pengembangan kompetensi pegawai dilakukan secara komprehensif melalui penyelenggaraan program pelatihan internal (in-house training) maupun pelatihan eksternal, serta diperkuat dengan kerja sama bersama mitra strategis yang memiliki keunggulan dan kapabilitas di bidang pengembangan SDM. Pendekatan ini memungkinkan Perseroan untuk mengadopsi praktik terbaik (best practices) serta memastikan relevansi pengembangan kompetensi dengan dinamika industri dan kebutuhan bisnis Perseroan.

Selain itu, untuk menghadapi situasi saat ini yang menantang, strategi yang dilakukan oleh Perseroan adalah dengan transformasi secara menyeluruh, khususnya dalam Pengelolaan SDM.

Transformasi Perseroan difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu Optimalisasi operasional, peningkatan profitabilitas, dan seleksi serta eksekusi proyek yang efektif. Perseroan melakukan pendekatan Lean Organization yang tidak hanya mengoptimalisasi proses bisnis agar lebih responsif terhadap dinamika industri, tetapi juga mengintegrasikan

Human Capital Management Focus in 2025

It is important to note that 2025 will be a challenging year in terms of HR management.

In 2025, WIKA Beton's human resource management will focus on strengthening the Employee Development Program and Talent Management as key pillars in ensuring organizational sustainability and future leadership readiness. This policy is designed in an integrated manner to support performance optimization, competency development, and employee succession readiness at all job levels.

In order to strengthen the succession process, the Company specifically implements a competency improvement program for employees who are members of the Nominated Talent group. This program aims to ensure the readiness of talent to fill strategic positions, so that the job succession process can run systematically, measurably, and sustainably. In line with this, the Company also implements a competency gap enhancement and fulfillment program through mandatory training tailored to each job level, to ensure alignment between individual competencies and job requirements.

Efforts to develop employee competencies are carried out comprehensively through internal training programs (in-house training) and external training, and are reinforced by cooperation with strategic partners who have advantages and capabilities in the field of human resource development. This approach allows the Company to adopt best practices and ensure the relevance of competency development to industry dynamics and the Company's business needs.

In addition, to face the current challenging situation, the strategy implemented by the Company is to undergo a comprehensive transformation, particularly in HR Management.

The Company's transformation focuses on three main pillars, namely operational optimization, increased profitability, and effective project selection and execution. The Company adopts a Lean Organization approach that not only optimizes business processes to be more responsive to industry dynamics, but also integrates

fungsi-fungsi yang relevan dalam struktur organisasi. Dalam konteks Human Capital, WIKA Beton fokus pada peningkatan performa dan program pengembangan kompetensi, sehingga setiap insan diberdayakan sesuai dengan keahlian, potensi, serta memiliki retensi yang kuat selaras dengan kebutuhan Perseroan. Melalui Transformasi Office, Perseroan memperkuat kapabilitas setiap insan untuk terus tumbuh dan berkontribusi secara optimal, menjadikan Human Capital sebagai garda terdepan dalam mendukung pertumbuhan WIKA Beton.

relevant functions within the organizational structure. In the context of Human Capital, WIKA Beton focuses on improving performance and competency development programs, so that each individual is empowered according to their expertise and potential, and has strong retention in line with the Company's needs. Through Office Transformation, the Company strengthens the capabilities of each individual to continue to grow and contribute optimally, making Human Capital the front line in supporting the growth of WIKA Beton.

Struktur dan Pengembangan Organisasi

Kondisi menantang yang harus dihadapi WIKA Beton di sepanjang tahun 2025 mendorong Perseroan untuk melakukan evaluasi terhadap Struktur Organisasi yang sedang berjalan. Upaya ini bertujuan untuk melihat potensi perbaikan alur kerja yang diharapkan dapat bermuara pada peningkatan efisiensi. Dengan alur kerja pengambilan keputusan yang lebih baik, Perseroan dapat meningkatkan efektivitas masing-masing fungsi kerja dan semakin mendorong peningkatan produktivitas.

Organizational Structure and Development

The challenging conditions encountered by WIKA Beton throughout 2025 prompted the Company to evaluate its existing organizational structure. This effort aims to identify potential workflow improvements that enhance efficiency expectations. With better decision-making processes, the Company can improve the effectiveness of each function and further drive productivity gains.

Pada tahun 2025, Struktur organisasi WIKA Beton mengalami perubahan yang dimaksudkan untuk menghadapi kondisi dan perkembangan usaha. Struktur organisasi terbaru ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK 01.01/WB-0A.0010/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Struktur Organisasi PT Wijaya Karya Beton Tbk .Berdasarkan Struktur Organisasi tersebut, Direktur Utama membawahi 4 (empat) Direktorat, yaitu Direktorat Pemasaran dan Pengembangan, Direktorat Operasi dan Supply Chain Management, Direktorat Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko, serta Direktorat Teknik dan Produksi, disamping itu Direktur Utama juga membawahi secara langsung Organ Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Sekretariat Perusahaan (Sekper). Direktorat Pemasaran dan Pengembangan membawahi Divisi Penjualan serta Divisi Sistem Informasi dan Manajemen. Direktorat Operasi dan Supply Chain Management membawahi Divisi Operasi, serta Divisi Supply Chain Management dan Health, Safety and Environment. Direktorat Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko membawahi Divisi Keuangan, Divisi Human Capital, serta Divisi Manajemen Risiko dan Legal. Direktorat Teknik dan Produksi membawahi Divisi Produksi Precast serta Divisi Transformation, Engineering

In 2025, WIKA Beton's organizational structure underwent changes intended to address business conditions and developments. This latest organizational structure was established through Board of Directors Decree No. SK 01.01/WB-0A.0010/2025 dated July 1, 2025, concerning the Organizational Structure of PT Wijaya Karya Beton Tbk. Based on this Organizational Structure, the President Director oversees four (4) Directorates, namely the Directorate of Marketing and Development, the Directorate of Operations and Supply Chain Management, the Directorate of Finance, Human Capital and Risk Management, and the Directorate of Engineering and Production. In addition, the President Director also directly oversees the Internal Audit Unit (SPI) and the Corporate Secretariat (Sekper). The Marketing and Development Directorate oversees the Sales Division and the Information Systems and Management Division. The Operations and Supply Chain Management Directorate oversees the Operations Division, as well as the Supply Chain Management and Health, Safety and Environment Division. The Finance, Human Capital and Risk Management Directorate oversees the Finance Division, the Human Capital Division, and the Risk Management and Legal Division. The Engineering and Production Directorate oversees the Precast Production

dan Quality. Selain itu WIKA Beton memiliki 4 (empat) Anak Perseroan, yaitu PT Wijaya Karya Komponen Beton, PT Wijaya Karya Krakatau Beton, PT Citra Lautan Teduh, dan PT Wijaya Karya Pracetak Gedung.

Struktur Organisasi Matriks yang diterapkan Perseroan memberikan dukungan besar untuk menciptakan insan Perseroan yang handal, karena Perseroan yakin bahwa dengan menggunakan struktur organisasi matriks dapat menjalankan proses bisnis sesuai yang ditetapkan oleh Perseroan. Di samping itu, pengelolaan *intangibles asset* yang baik merupakan bagian yang sangat penting untuk kelanjutan usaha Perseroan.

Pengembangan organisasi merupakan suatu langkah strategis untuk menyempurnakan dan mengembangkan organisasi sebagai tindakan antisipatif dari adanya perubahan lingkungan usaha yang berdampak pada perubahan keyakinan/nilai-nilai manajemen yang sudah melekat, visi, misi, strategi dan pola organisasi yang sudah berjalan. Pengembangan organisasi ini mengharuskan WIKA Beton untuk berbenah diri juga pada struktur organisasi sehingga mekanisme organisasi dari setiap unit usaha berjalan dengan lancar, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab menjadi lebih jelas, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efektif serta dapat mengakomodir akselerasi bisnis baru dan pencapaian target perseroan yang semakin meningkat.

Rekrutmen dan Seleksi

Kunci utama dalam menciptakan ekosistem SDM yang profesional terletak pada pelaksanaan proses rekrutmen yang optimal. Proses ini menjadi hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten, seraya meningkatkan reputasi Perseroan sebagai entitas berkualitas dan dinamis. Dalam implementasinya, WIKA Beton telah merancang langkah-langkah rekrutmen yang bersifat prosedural dan komprehensif. Pendekatan ini bertujuan untuk menarik individu berbakat, unggul, andal, dan tangguh, dengan memperhatikan kualifikasi yang sesuai dengan setiap posisi dan struktur organisasi terkait. Seluruh upaya ini dilaksanakan dengan berpegang teguh pada prinsip kesetaraan dan tanpa diskriminasi. Tahapan-tahapan tersebut secara rinci diuraikan dalam diagram berikut:

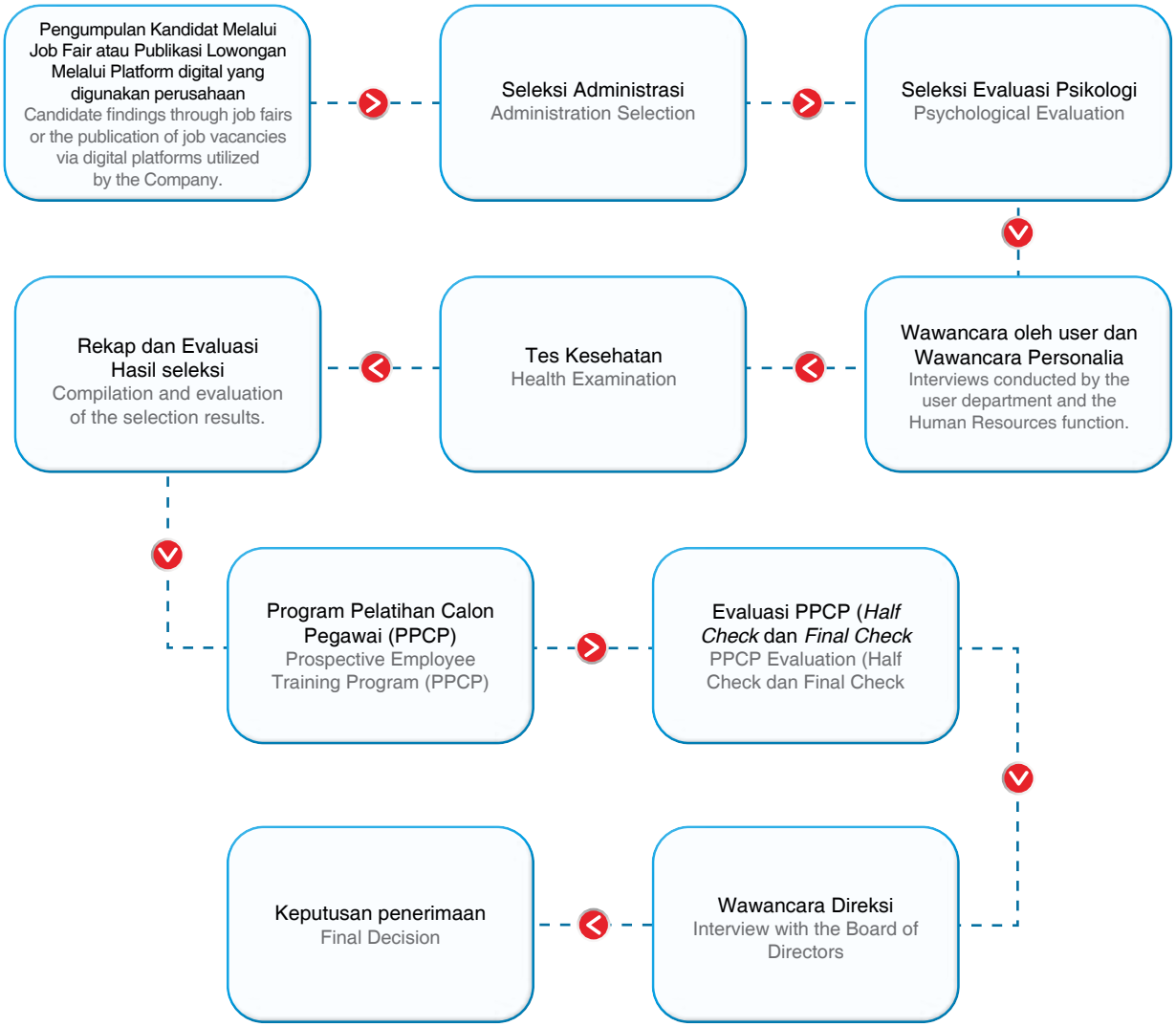
Division and the Transformation, Engineering and Quality Division. In addition, WIKA Beton has four subsidiaries, namely PT Wijaya Karya Komponen Beton, PT Wijaya Karya Krakatau Beton, PT Citra Lautan Teduh, and PT Wijaya Karya Pracetak Gedung.

The Matrix Organizational Structure implemented by the Company provides significant support for creating reliable Company personnel, as the Company believes that using a matrix organizational structure enables it to carry out business processes in accordance with those established by the Company. In addition, good management of intangible assets is a very important part of the Company's business continuity.

Organizational development is a strategic step to refine and develop the organization as an anticipatory measure against changes in the business environment that impact existing management beliefs/values, vision, mission, strategy, and organizational patterns. This organizational development requires WIKA Beton to also reform its organizational structure so that the organizational mechanisms of each business unit run smoothly, the division of tasks, authorities, and responsibilities become clearer, decision-making becomes faster and more effective, and it can accommodate new business acceleration and the achievement of the Company's increasingly high targets.

Recruitment and Selection

The key to establishing a professional Human Capital ecosystem lies in the optimal implementation of the recruitment process. This process is crucial to meeting the needs of competent Human Capital while enhancing the Company’s reputation as a quality and dynamic entity. In its implementation, WIKA Beton has designed procedural and comprehensive recruitment steps. This approach aims to attract talented, outstanding, reliable, and resilient individuals, considering qualifications that align with each position and related organizational structure. All these efforts are executed with a firm commitment to the principles of equality and non-discrimination. The detailed stages are outlined in the following diagram:



Perseroan memulai proses dengan tahapan pertama yaitu pengumpulan kandidat (sourcing). Dalam fase ini, calon kandidat ditarik melalui pemasangan iklan lowongan di berbagai platform karir online atau dengan pendekatan yang lebih luas, seperti mengadakan job fair di beberapa kampus. Lamaran pekerjaan yang masuk akan melalui proses seleksi administratif untuk menilai sejauh mana kesesuaian calon kandidat dengan kualifikasi yang diperlukan oleh Perseroan. Setelah melewati tahap administratif, para kandidat yang berhasil akan diarahkan untuk mengikuti evaluasi psikologi. Kolaborasi Perseroan dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang ini diharapkan dapat menghasilkan evaluasi yang dapat diandalkan. Bidang Manajemen Talenta kemudian bertanggung jawab untuk melaksanakan sesi wawancara teknis dan kepribadian guna memastikan bahwa kandidat memenuhi kriteria kapabilitas yang dibutuhkan dan memiliki karakter yang sejalan dengan nilai-nilai Perseroan. Jika berhasil melewati tahap ini, kandidat akan mengikuti Tes Kesahatan Fisik yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.

The Company initiates the process with the first phase, which is candidate sourcing. During this phase, potential candidates are attracted through job advertisements on various online career platforms or, on a broader scale, by organizing job fairs at several campuses. Job applications received undergo administrative selection to assess the extent of candidates' compatibility with the qualifications required by the Company. After passing the administrative stage, successful candidates will proceed to undergo psychological evaluations. The Company's collaboration with third parties possessing expertise in this field is expected to yield reliable evaluations. Talent Management Department is then responsible for conducting technical and personality interviews to ensure that candidates meet the required capability criteria and align with the Company's values. If successful in this stage, candidates will undergo a physical health examination conducted by an external party.

Setelah berhasil melewati serangkaian tahapan seleksi, para calon yang dinyatakan lulus akan menandatangani perjanjian untuk mengikuti Program Pelatihan Calon Pegawai (PPCP). Selama masa PPCP berlangsung, mereka akan mengikuti evaluasi yang lebih intensif melalui berbagai kegiatan, seperti program pelatihan, penyampaian materi indoor, kegiatan outbound, On the Job Training, Half Check, dan Final Check. Saat Final Check berlangsung, calon pegawai akan diuji untuk menunjukkan keahlian dan kontribusinya terhadap Perseroan. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap aspek biaya, kualitas, dan waktu existing Perseroan. Para calon akan diminta untuk menyajikan temuan mereka beserta solusi dan rekomendasi yang dapat memberikan dorongan untuk perbaikan Perseroan. Dari setiap tahap, penilaian yang diberikan kepada calon akan diakumulasikan untuk selanjutnya mengikuti tahap wawancara dengan Direksi. Setelah tahapan wawancara akan dilakukan rekap dan dilakukan evaluasi terhadap calon pegawai yang berhak lanjut untuk menjadi bagian dari wika beton.

After successfully passing the selection stages, candidates who are declared successful are required to sign an agreement to participate in the Prospective Employee Training Program (PPCP). During the PPCP period, participants undergo more intensive evaluations through various activities, including training programs, indoor learning sessions, outbound activities, On-the-Job Training, Half Check, and Final Check. During the Final Check stage, prospective employees are assessed on their ability to demonstrate their competencies and potential contributions to the Company. This includes conducting in-depth analysis on the Company's existing cost, quality, and time aspects. Candidates are required to present their findings along with proposed solutions and recommendations aimed at driving improvements within the Company. The evaluations from each stage are accumulated and form the basis for the subsequent interview with the Board of Directors. Following the interview stage, a final recap and evaluation are conducted to determine which candidates will proceed to become part of WIKA Beton.

Program Magang

Dalam rapat paripurna DPR, Presiden RI menjabarkan lima agenda utama dalam RAPBN 2023. Dari lima agenda utama, salah satunya adalah terkait upaya penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing.

Terkait hal ini, WIKA Beton turut memainkan peranannya melalui komitmen untuk mengembangkan potensi generasi muda Indonesia. WIKA Beton memberikan peluang kepada para siswa/i dan mahasiswa/i Indonesia untuk memperoleh pengalaman praktis dalam dunia kerja. Proses seleksi peserta magang dilakukan dengan mempertimbangkan jurusan yang relevan dengan kebutuhan Perseroan, dan pendaftaran magang harus diajukan satu hingga dua bulan sebelum pelaksanaan program. Dalam rentang waktu tidak lebih dari 3 bulan, peserta magang yang berhasil dipilih berkesempatan untuk menjelajahi berbagai aspek bisnis yang dijalankan oleh WIKA Beton. Mereka dapat menyesuaikan minat profesional mereka dengan bimbingan dari tim pengelola magang Perseroan.

Selain program magang, perusahaan ini juga memberikan peluang kepada siswa dan mahasiswa yang memiliki kebutuhan akademik untuk melakukan penelitian di lingkungan perusahaan. Pada tahun 2025, WIKA Beton telah membuka kesempatan magang bagi 309 siswa dan mahasiswa.

Internship Program

In a plenary session of the Indonesian Parliament, the President outlined five key agendas in the 2023 State Budget (RAPBN). One of these agendas focuses on efforts to strengthen the quality of human capital, aiming to create a productive, innovative, and competitive workforce.

In this regard, WIKA Beton plays its part through a commitment to developing the potential of Indonesia's youth. The company provides opportunities for Indonesian students to gain practical experience in the workforce. The selection process for internship participants is based on academic disciplines that align with the Company's needs, and internship applications must be submitted one to two months before the program starts. Within no more than three months, selected interns have the opportunity to explore various aspects of WIKA Beton's business operations. They can align their professional interests with guidance from the Company's internship management team.

In addition to the internship program, the company also offers opportunities for students with academic needs to conduct research within the company environment. In 2025, WIKA Beton opened internship opportunities for 309 students.

Kebijakan Pengembangan Karier

Perseroan telah menginisiasi program pengembangan karir sebagai sarana untuk memotivasi dan mendorong pegawai agar dapat meningkatkan posisi dan penghasilannya. Upaya ini bertujuan agar setiap pegawai tidak mengalami stagnasi dalam karirnya dan terus mengembangkan pencapaian yang lebih tinggi. Pengembangan karir dapat dilakukan secara vertikal melalui promosi jabatan atau secara horizontal melalui mutasi dalam bidang tertentu dengan tingkat jabatan setara.

Fokus Perseroan terhadap pengembangan karir menjadi jelas sebagai wujud dukungan untuk membuka peluang bagi pegawai dalam menggali potensi mereka. Pendekatan ini dilaksanakan secara terstruktur berdasarkan penilaian kinerja, kategori talenta, masa pembinaan, prestasi kerja, track record, dan catatan ketaatan terhadap peraturan Perusahaan. Melalui program pengembangan karir yang terencana, diharapkan motivasi dan produktivitas pegawai akan meningkat, bersamaan dengan tingkat kepuasan kerja. Dengan demikian, performa dan kontribusi pegawai akan meningkat ke arah yang lebih baik.

Perseroan juga memberikan dukungan konkrit terhadap pengembangan karir dengan menggelar berbagai program pelatihan dan pengembangan internal. Program ini mencakup acara *sharing experience/ sharing knowledge* dengan para ahli dan insinyur yang berpengalaman dari berbagai disiplin ilmu terkait dengan fokus bisnis Perseroan.

Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif secara keseluruhan terhadap kemajuan Perseroan, sekaligus mendorong para pegawai untuk berkontribusi lebih progresif. Hingga akhir tahun 2025, sebanyak 79 pegawai telah mendapatkan promosi jabatan, sementara 227 pegawai dimutasi/dirotasi, dan tidak terdapat pegawai yang mengalami demosi jabatan.

Career Development Policy

The Company has initiated a career development program to motivate and encourage employees to advance their positions and income. The goal is to prevent career stagnation and help employees continually achieve higher milestones. Career development can occur vertically through promotions or transfers to areas with equivalent job levels.

The Company's focus on career development reflects its commitment to opening opportunities for employees to unlock their full potential. This approach is implemented in a structured manner, based on performance evaluations, talent categories, development periods, work achievements, track records, and records of compliance with Company regulations.. Through this planned career development program, it is expected that employee motivation and productivity will improve, alongside job satisfaction. As a result, employee performance and contributions will move in a positive direction.

The Company also provides concrete support for career development by organizing various internal training and development programs. These programs include experience and knowledge-sharing sessions with experts and engineers from diverse disciplines, aligned with the Company's business focus.

This initiative is expected to have a positive overall impact on the Company's progress, while encouraging employees to contribute in a more proactive way. By the end of 2025, a total of 79 employees have received promotions, while 227 employees have been transferred/ rotated, and no employees have experienced demotion.

Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Di era saat teknologi semakin berkembang dan otomatisasi semakin gencar digunakan, keterampilan manusia seperti empati, kreativitas, dan kemampuan interpersonal semakin penting. Perseroan perlu mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut secara beriringan dengan peningkatan standar kompetensi di bidang masing-masing agar dapat bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

Competency Development Policy

In an era where technology is rapidly advancing and automation is increasingly being adopted, human skills such as empathy, creativity, and interpersonal abilities are becoming more important. The Company needs to develop these skills alongside raising competency standards in each field to remain competitive in an ever-evolving job market.

WIKA Beton mendukung pengembangan pegawai melalui penyediaan beragam program pelatihan, pendidikan tingkat lanjut, sertifikasi, dan *in-house training*. Semua ini dikelompokkan ke dalam enam kategori yang berbeda, sehingga para pegawai dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Ragam pengembangan kompetensi di Perseroan dapat dilihat pada bagan berikut:

WIKA Beton supports employee development by offering several training programs, advanced education, certifications, and in-house training. These are grouped into six different categories, allowing employees to gain knowledge and skills relevant to their roles and responsibilities. The range of competency development at the Company can be seen in the chart below:



Masing-masing poin pada diagram di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelatihan Pra-Kerja
   Pelatihan ini ditujukan bagi setiap pegawai baru, sebagai pembekalan pengetahuan umum mengenai proses bisnis, cara kerja, perangkat organisasi, nilai-nilai dan norma kerja yang berlaku di lingkungan Perseroan, termasuk mendapat penjelasan mengenai isi dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
2. Pelatihan Umum Dasar
   Pelatihan yang ditujukan bagi setiap pegawai, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dasar dan/atau teknik dasar pegawai, sekaligus untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan budaya Perseroan.

Each point in the diagram above can be explained as follows:

1. Pre-Employment Training
   This training is designed for new employees as an introduction to general knowledge about business processes, work practices, organizational structure, company values, and work norms. It also includes an explanation of the Collective Labor Agreement (CLA).

2. Basic General Training
   This training is aimed at all employees, to enhance basic skills and/or technical competencies, while also fostering attitudes and behaviors that align with the Company's culture.

3. Pelatihan Mandatori
   Pelatihan ini ditujukan bagi seluruh pegawai sesuai dengan level jabatan masing-masing. Pelatihan ini merupakan program pengembangan kompetensi yang wajib diikuti setiap pegawai berdasarkan standar kompetensi jabatan.
4. Pelatihan Kerja
   Pelatihan ini ditujukan bagi pegawai baru maupun pegawai lama yang baru dirotasi dan/atau dipromosikan ke pekerjaan/jabatan baru, melalui praktik langsung yang dilakukan sambil bekerja dengan sistem mentor.
5. Pendidikan Lanjutan
   Program ini ditujukan untuk para pegawai yang terpilih melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
6. Pelatihan Pra Purnabakti
   Pelatihan ini ditujukan bagi pegawai yang akan memasuki masa pensiun sehingga siap memasuki masa purna bakti dengan kesiapan mental yang baik.

Prinsip utama yang dipegang teguh oleh Perseroan adalah upaya berkelanjutan dalam mengurangi disparitas kompetensi pada seluruh insan WIKA Beton. Hal ini bertujuan agar seluruh SDM dapat secara sejajar berkontribusi dan membantu mencapai tujuan jangka panjang Perseroan. Berikut adalah rangkuman program pelatihan dan pengembangan SDM sepanjang tahun 2025:

3. Mandatory Training
   This training is required for all employees based on their job level. It is part of the competency development program that every employee must complete according to job competency standards.
4. Job Training
   This training is intended for new and existing employees who have been rotated and/or promoted to new positions. It involves hands-on practice while working, under a mentorship system.
5. Advanced Education
   This program is aimed at selected employees who continue their education at a higher level.
6. Pre-Retirement Training
   This training is for employees approaching retirement to ensure they are mentally prepared for this new phase of life.

The Company is committed to continuously reducing competency disparities across all employees at WIKA Beton. The goal is for all human capital to contribute equally and help achieve the Company's long-term objectives. Below is a summary of the training and development programs for human capital throughout 2025:

Level Jabatan Position Level	**Sasaran Program Pengembangan** Development Program Target	**Jumlah Peserta** Total Participant
Direksi Directors	Pengembangan Kompetensi *Directorship* Directorship Competency Development	5 Orang 5 People
Manajer Divisi/Direktur Anak Perusahaan/ Ahli Utama 1 Division Manager/Senior Expert 1	Pengembangan Kompetensi Strategis Manajer Divisi/ Setingkat serta persiapan jenjang BOD Development of Strategic Competences for Division Managers/Levels as well as preparation for BOD level	14 Orang 14 People
Manajer Wilayah Penjualan, & Pabrik dan Unit Operasi Area Sales Manager & Plant	Pengembangan Kompetensi Strategis Manajerial Managerial Strategic Competence Development	26 Orang 26 People
Manajer Bidang/Ahli Utama 2/Ahli Madya 1 Section Manager/Senior Expert 2/Middle Expert	Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Kepemimpinan Managerial and Leadership Competency Development	34 Orang 34 People
Koordinator/Supervisor/Kepala Seksi/Ahli Madya 2/Ahli Muda Coordinator/ Supervisor/Section Head/Middle Expert Coordinator 2/Junior Expert	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan *Problem Solving* Leadership and Problem Solving Competencies Development	139 Orang 139 People
Staf Staff	Pengembangan Kompetensi Teknis Bidang Field Technical Competency Development	93 Orang 93 People

Berikut adalah pencapaian pelatihan dan pengembangan SDM yang telah terlaksana sepanjang tahun 2025:

The following are the achievements of HC training and development carried out throughout 2025:

Jenis Program Pelatihan Type of Training Program	Jumlah Peserta Number of Participants		Jumlah Total
	Laki-Laki Men	Perempuan Female	
Konsultan SDM Human Capital Consultant	-	-	-
Pelatihan Dasar Basic Training	30	2	32
Kursus Manajemen Management Course	119	7	126
Kursus Teknis Technical Course	14	3	17
Kursus Penunjang Supporting Course	2	0	2
Seminar/Workshop Seminar/Workshop	4	10	14
Pendidikan Reguler Regular Training	542	34	586
Pendidikan Lanjutan Advanced Education	24	4	28
Jumlah **Total**	**735**	**60**	**805**

Penilaian Kinerja Pegawai

Untuk mendorong pencapaian optimal dari setiap insan WIKA Beton, Perseroan melaksanakan evaluasi kinerja secara objektif, transparan, dan adil. Dalam penilaian ini, aspek-aspek seperti integritas, tanggung jawab, sikap, kinerja, dan produktivitas setiap individu menjadi fokus utama. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, manajemen memiliki kemampuan untuk merencanakan arah pengembangan karier para pegawai, terutama terkait dengan promosi jabatan, peningkatan kompetensi, dan pengembangan karier. Selain itu, penilaian kinerja juga menjadi dasar untuk menentukan perubahan dalam tingkat jabatan dan grading pegawai, serta untuk menilai kenaikan kompensasi dan pendapatan. Metode-metode yang digunakan dalam penilaian kinerja pegawai mencakup:

A. *Key Performance Indicators* (KPI) *dan Key Behaviour Indicator* (KBI)

Penilaian kinerja pegawai organik dan terampil pada tingkat eselon V-VI diterapkan menggunakan metode ini. KPI dan KBI menjadi instrumen yang memastikan setiap anggota Perseroan menerima penilaian yang sepenuhnya objektif dan sesuai dengan tugas serta tanggung jawab individu. Perseroan menggunakan hasil penilaian KPI dan KBI sebagai panduan untuk

Employee Performance Appraisal

To foster optimal performance from every employee, the Company conducts performance evaluations objectively, transparently, and fairly. In this assessment, key aspects such as integrity, responsibility, attitude, performance, and productivity of each individual take center stage. Based on the conducted evaluations, the management gains insights to strategically plan the career development paths for employees, particularly concerning promotions, competency enhancement, and career progression. Furthermore, performance assessments serve as the foundation for determining changes in job levels and employee grading, as well as evaluating compensation and income increments. The methods utilized in employee performance evaluations include:

A. Key Performance Indicators (KPI) and Key Behaviour Indicator (KBI)

The assessment of the performance of organic and skilled employees at the V-VI echelon levels is conducted using this method. KPI and KBI serve as instruments ensuring that each member of the Company receives a fully objective evaluation aligned with individual tasks and responsibilities. The Company utilizes the results of KPI and KBI

menetapkan imbalan dan bonus yang layak bagi tiap pegawai. Objektivitas dan relevansi penilaian ini dijaga melalui penggunaan indikator yang disesuaikan dengan peran masing-masing pegawai.

B. Evaluasi Kompetensi (EK) dan Penilaian Karya (PK)

Penilaian kinerja pegawai eselon VII-X dilakukan dengan metode ini. Hasil dari evaluasi ini menjadi dasar penentuan untuk promosi jabatan, pengembangan karier, dan penyesuaian skala serta golongan pendapatan bagi setiap pegawai. Selain itu, *output* dari sistem penilaian ini juga menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kontribusi masing-masing pegawai terhadap Perseroan.

C. Assessment of Competency

Penilaian ini diterapkan pada semua pegawai dengan merujuk pada Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). Hasil evaluasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengembangan karier pegawai pada periode berikutnya.

Fasilitas dan Kesejahteraan Pegawai

Dengan memberikan prioritas pada kesejahteraan pegawai, Perseroan menegaskan tekadnya untuk tumbuh bersama seluruh insan WIKA Beton. Membaca dan memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan pegawai dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan semangat, yang pada gilirannya dapat mendorong produktivitas dan dedikasi.

Sebagai hasilnya, Perseroan memberikan apresiasi melalui pemberian kompensasi dan paket remunerasi yang seimbang, selaras dengan peraturan hukum dan regulasi yang berlaku (terutama yang terkait dengan pengupahan minimum di Provinsi/ Kabupaten/Kota yang berlaku di setiap lokasi kerja), serta bobot kerja dan jabatan yang dimiliki.

Berikut adalah rincian tunjangan dan fasilitas kesejahteraan yang disediakan untuk pegawai WIKA Beton:

- Jaminan kesehatan bahwa setiap pegawai telah diikutsertakan di dalam program BPJS Kesehatan terhitung mulai 1 Januari 2015 dan asuransi komersial dengan fasilitas perawatan kesehatan meliputi rawat inap, rawat jalan, kacamata, gigi, serta melahirkan.
- Jaminan Sosial Tenaga Kerja/BPJS Ketenagakerjaan

assessments as a guide for determining appropriate compensation and bonuses for each employee. The objectivity and relevance of these assessments are maintained through the use of indicators tailored to the roles of each employee.

B. Competency Evaluation (EK) and Work Assessment (PK)

Performance evaluations for VII-X echelon level employees are conducted using this method. The outcomes of this evaluation serve as the basis for decisions regarding job promotions, career development, and adjustments to the salary scale and income group for each employee. Additionally, the output from this assessment system is used for evaluating the implementation of human capital development and training programs, aiming to enhance the productivity and contribution of each employee to the Company.

C. Assessment of Competency

This assessment is applied to all employees, referencing the Competency Dictionary and Job Competency Standards (SKJ). The evaluation results will be utilized as a foundation for planning employee career development in the subsequent period.

Employee Facilities and Welfare

By prioritizing the well-being of employees, WIKA Beton reaffirms its commitment to grow together in one unison. Recognizing and addressing the needs and welfare of our employees is considered a strategic step to enhance morale, ultimately fostering productivity and dedication.

Consequently, the Company extends appreciation through the provision of balanced compensation and remuneration packages, in compliance with applicable legal regulations (especially those related to the minimum wage in the respective Province/District/City at each workplace location), as well as the weight of work and positions held.

Below is an outline of the allowances and welfare facilities provided for WIKA Beton employees:

- Health insurance that every employee has been included in the BPJS Kesehatan program starting January 1, 2015, and commercial insurance with healthcare facilities covering inpatient, outpatient, eyeglasses, teeth, and childbirth.
- Employment Social Security/BPJS Ketenagakerjaan

- *Medical check up* secara berkala.
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan.
- Imbalan pasca kerja/pesangon (PSAK 24) bagi pegawai yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
- Program Dana Pensiun.
- Asuransi Jiwa dan cacat total tetap.
- Tunjangan pendidikan.
- Tunjangan lokasi kerja.
- Tunjangan detasir.
- Tunjangan tempat tinggal.
- Tunjangan grading.
- Tunjangan kehadiran.
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR).
- Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh 21).
- Sumbangan sosial, seperti pernikahan pegawai, duka dan bencana alam.
- Fasilitas biaya komunikas.
- Fasilitas pakaian seragam kerja.
- *Employee gathering.*
- Jasa produksi.
- Uang cuti tahunan dan cuti besar 5 (lima) tahunan
- Tunjangan makan siang.
- Penghargaan masa kerja untuk pegawai yang telah mengabdi selama 10, 15, 20, 25, 30, dan 35 tahun di Perseroan.
- Penghargaan Mutu, HSE, Sistem Manajemen dan Karya Inovasi.

- Regular medical check-ups.
- Training and development facilities.
- Post-employment benefits/severance pay (PSAK 24) for employees appointed until December 31, 2013.
- Pension Fund Program.
- Life and permanent total disability insurance.
- Educational allowance.
- Work location allowance.
- Detasir allowance.
- Residence allowances.
- Grading allowance.
- Attendance allowance.
- Religious Holiday Allowance (THR).
- Income Tax Allowance (PPh 21).
- Social donations, such as employee weddings, bereavements, and natural disasters
- Communication fee facility.
- Work uniform.
- Employee gathering.
- Production service
- Annual leave and 5 (five) annual leave.
- Lunch facilities.
- Dedication awards for employees who have served for 10, 15, 20, 25, 30, and 35 years in the Company.
- Quality Award, HSE, Management System, and Innovation Works.

Program Pensiun

Perseroan berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan para pegawainya selama mereka meniti karir hingga memasuki masa purnabakti. Upaya ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan batas usia aktif pegawai atau masa kerja pegawai yang berstatus aktif di Perseroan, yang berlaku hingga mereka memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP). Di WIKA Beton, masa aktif pegawai ditetapkan berdasarkan usia, yaitu 55 hingga 56 tahun untuk pegawai dengan level BOD-1, BOD-2, dan BOD-3, dan 55 tahun untuk pegawai dengan level BOD-4.

Dalam menghadapi masa purna bakti, Perseroan memberikan pembekalan dan pelatihan khusus terkait program persiapan pensiun. Tujuan dari program ini adalah untuk mempersiapkan mental dan meningkatkan keterampilan para pensiunan, sehingga mereka tetap produktif setelah mengakhiri masa kerja mereka. Pensiunan Perseroan berhak mendapatkan berbagai manfaat, antara lain uang pesangon, manfaat pensiun, dan Program Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka selama bekerja untuk Perseroan.

Retirement Program

The Company is committed to safeguarding the well-being of its employees throughout their careers until they enter the retirement phase. This effort is undertaken by considering the stipulated age limits for active employees or the tenure of active employees in the Company, which applies until they enter the Retirement Preparation Period (MPP). At WIKA Beton, the active service period for employees is determined based on age: 55 to 56 years for employees at the BOD-1, BOD-2, and BOD-3 levels, as well as 55 years for employees at the BOD-4 level.

Facing retirement, the Company provides specific preparation and training related to retirement readiness programs. The purpose of this program is to prepare the mental and enhance the skills of retirees, ensuring their continued productivity after concluding their active work period. Retired employees are entitled to various benefits, including severance pay, pension benefits, and Old Age Insurance from BPJS Employment as a form of appreciation for their contributions during their tenure with the Company.

Pada tahun 2025, sebanyak 59 pegawai Perseroan mengakhiri masa kerja dan memasuki masa purnabakti, yang terdiri dari 57 pegawai yang memasuki pensiun normal dan 2 pegawai yang memasuki pensiun dini. Dana sebesar Rp41.300.000 dialokasikan untuk mendukung program ini.

In 2025, a total of 59 Company employees ended their employment and entered retirement, comprising 57 employees who reached the normal retirement age and 2 employees who took early retirement. An amount of Rp41,300,000 was allocated to support this program.

Hubungan Industrial

Membangun ikatan industri yang solid memegang peran krusial di lingkungan WIKA Beton untuk mencapai harmoni dan kelangsungan proses bisnis. Dalam upaya menciptakan iklim kerja yang kondusif, terbuka, positif, dan progresif, Perseroan secara konsisten berkomitmen menjalin hubungan industrial yang sehat dan adil.

Pada tahun 1999, Perhimpunan Pegawai WIKA Beton (PPWB) didirikan sebagai langkah konkret untuk menjamin hak dan kebebasan berserikat bagi seluruh pegawai. Pendaftaran PPWB dilakukan di Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Timur, dan terakhir tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dengan nomor bukti pencatatan 560/Reg.05/ PUK/FSPIB/HIJS/ III/2014, tanggal 24 Maret 2014. Pemahaman bahwa Perseroan dan pegawai telah memenuhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing menjadi dasar pendirian PPWB, dengan semangat saling menghormati, saling percaya, dan tekad untuk bekerja sama sebagai pilar utama.

Industrial Relations

Building a solid industrial bond plays a crucial role within the WIKA Beton environment to achieve harmony and sustain business processes. In the endeavor to create a conducive, open, positive, and progressive work atmosphere, the Company consistently commits to fostering a healthy and fair industrial relationship.

In 1999, the WIKA Beton Employee Association (PPWB) was established as a concrete step to ensure the rights and freedom of association for all employees. The registration of PPWB was carried out at the Office of the Department of Labor in East Jakarta Municipality, and the latest record is with the Labor Office of Bekasi City under registration number 560/Reg.05/PUK/FSPIB/ HIJS/III/2014, dated March 24, 2014. The understanding that the Company and employees have fulfilled their respective rights, obligations, and responsibilities forms the foundation of PPWB, driven by a spirit of mutual respect, trust, and a commitment to collaborate as a primary pillar.

Visi Vision

- Menjadi organisasi yang berperan aktif bagi peningkatan produktivitas sehingga dapat memengaruhi Perseroan dalam memberikan penghargaan yang sesuai dengan prestasi pegawai.
  Become an organization that plays an active role in increasing productivity to influence the Company in providing awards that are by employee performance.
- Menjadi organisasi yang berperan aktif bagi peningkatan pemahaman pegawai terhadap peraturan ketenagakerjaan dan peraturan Perseroan.
  Become an active organization in increasing employee understanding of labor regulations and Company regulations.
- Menjadi organisasi yang berperan aktif mendorong keikutsertaan pegawai dalam kepemilikan saham Perseroan.
  Become an organization that actively encourages employee participation in the Company's share ownership.

Misi Mission

Memperjuangkan terciptanya kesejahteraan, ketenangan, keadilan dan keamanan bekerja bagi setiap anggotanya melalui peran serta anggota dalam upaya meningkatkan daya saing Perseroan serta memiliki andil dalam pembangunan bangsa dan negara.
Strive for the creation of welfare, tranquillity, justice, and security at work for each of its members through the participation of members to increase the competitiveness of the Company and have a role in the development of the nation and state.

Pada akhir tahun 2025, Perseroan mencatat bahwa jumlah pegawai yang menjadi PPWB berjumlah 905 orang. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana tercatat sebanyak 1.061 individu yang tergabung dalam PPWB. Adapun penurunan jumlah pegawai tahun 2025 untuk Pegawai Organik berjumlah 33 orang dan Pegawai Terampil berjumlah 126 orang, sehingga total penurunan berjumlah 159 orang dengan rincian pensiun normal 57 orang, pensiun dini 2 orang mengundurkan diri 17 orang, meninggal dunia 3 orang, keputusan perseroan 78 orang, mutasi WIKA Group 2 orang.

At the end of 2025, the Company recorded 905 employees classified as PPWB. This figure represents a decrease compared to the previous year, when 1,061 individuals were recorded as PPWB. The reduction in the number of employees in 2025 included 33 Organic Employees and 126 Skilled Employees, resulting in a total decrease of 159 employees. This decrease consisted of 57 normal retirements, 2 early retirements, 17 resignations, 3 deaths, 78 terminations based on Company decisions, and 2 transfers within the WIKA Group.

Survei Keterikatan Pegawai

Faktor keterikatan pegawai, dikenal sebagai *Employee Engagement*, memiliki peran krusial dalam menentukan produktivitas pegawai dan tingkat minimnya *turnover*. Untuk mengeksplorasi pandangan pegawai mengenai upaya perbaikan dan pengembangan yang dapat diimplementasikan, Perseroan rutin melaksanakan Survei Keterikatan Pegawai. Melalui penyelenggaraan survei ini, perusahaan dapat mengidentifikasi unsur-unsur kunci dalam manajemen organisasi, terutama yang berkaitan dengan aspek *say, stay, strive,* sebagaimana dijabarkan pada bagan berikut:

Employee Engagement Survey

Employee engagement, recognized as a crucial factor, plays a pivotal role in determining employee productivity and minimizing turnover rates. To explore employees' perspectives on improvement and development efforts that can be implemented, WIKA Beton consistently conducts an Employee Engagement Survey. Through the execution of this survey, the company is able to identify key elements in organizational management, particularly those related to aspects of say, stay, strive, as outlined in the following diagram:

SAY

Pegawai yang *engaged* ditunjukan melalui ucapan atau ungkapan positif mereka terhadap organisasi kepada rekan kerja, talenta Perusahaan dan pelanggan.

Engaged employees are shown through their positive words or expressions towards the organization, colleagues, the Company's talents, and customers.

STAY

Pegawai yang *engaged* ditunjukan melalui keinginan yang mendalam untuk menjadi bagian dari organisasi.

Engaged employees demonstrated by employees through a deep desire to be part of the organization.

STRIVE

Pegawai yang *engaged* ditunjukan pegawai melalui usaha lebih dan keterikatan untuk berkontribusi dalam mencapai keberhasilan target usaha.

Engaged employees shown by employees through more effort and commitment to contribute to achieving business targets' success.

Survei Keterikatan Pegawai dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, dilakukan secara bergantian antara survei internal dan eksternal. Pada tahun 2025, survei keterikatan pegawai dilakukan secara internal. Hasil survei menunjukkan response rate 100% atau sebanyak 907 Pegawai yang dilakukan pada bulan Agustus 2025. Hasil survei keterikatan Pegawai memperoleh skor 85,1% sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat keterikatan pegawai terhadap perusahaan masuk dalam kategori "engaged (terikat)".

The Employee Engagement Survey is conducted annually, alternating between internal and external surveys. In 2025, the employee engagement survey was conducted internally. The survey achieved a 100% response rate, with 907 employees participating in August 2025. The survey results showed an engagement score of 85.1%, indicating that employee engagement with the company falls under the 'engaged' category.

Tenaga Kerja Lokal

Bersama-sama mendukung aspirasi BUMN sebagai pendorong ekonomi negara, Perseroan senantiasa

Local Workers

Together, in supporting the aspirations of state-owned enterprises as key drivers of the national economy, WIKA

memberikan prioritas kepada warga negara Indonesia untuk menjadi bagian dari SDM Perseroan. Proses rekrutmen dilaksanakan secara transparan, memberikan peluang sebesar-besarnya kepada tenaga kerja lokal untuk mengikuti proses seleksi. Prinsip kesetaraan dipegang teguh dalam rekrutmen, dimana penempatan didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh Perseroan.

Sistem Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan, Perseroan mengajak semua pegawai untuk berpartisipasi aktif. Adanya keluhan, kritik, atau saran terkait penerapan nilai-nilai ketenagakerjaan sangat dihargai, dan diharapkan agar setiap pegawai dapat menyampaikannya melalui sistem pengaduan ketenagakerjaan. Pengelolaan sistem pengaduan dilakukan dengan transparan dan adil oleh Divisi Human Capital, yang bertanggung jawab penuh untuk mengelolanya. Upaya ini dilakukan untuk mendeteksi dini potensi masalah yang mungkin timbul di kalangan pegawai. Mekanisme pengaduan dapat diakses melalui langkah-langkah berikut:

1. Atasan Langsung
2. Divisi Human Capital
3. Perhimpunan Pegawai WIKA Beton (PPWB)
4. Lembaga Bipartit

Pada tahun 2025, tidak terdapat pengaduan yang diterima oleh Divisi Human Capital, dan tidak terdapat surat peringatan yang dikeluarkan terkait sanksi pelanggaran disiplin untuk pegawai Perseroan.

Fokus Pengelolaan dan Pengembangan SDM Tahun 2026

Di tengah dinamika industri yang semakin kompetitif dan disruptif, serta dalam rangka memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan kinerja Perseroan, pengelolaan Sumber Daya Manusia diarahkan sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung pencapaian sasaran target bisnis Perseroan. Perubahan lingkungan usaha yang ditandai dengan percepatan transformasi digital, kompleksitas pasar, serta tuntutan efisiensi dan inovasi yang semakin tinggi, menuntut Perseroan untuk mengelola human capital yang adaptif, agile, dan berdaya saing tinggi.

Beton consistently prioritizes Indonesian citizens to be part of the Company's Human Capital The recruitment process is conducted transparently, providing maximum opportunities for local workforce to participate in the selection process. The principle of equality is firmly upheld in recruitment, wherein placements are based on the competencies and qualifications required by the Company.

Complaint System for Employment Issues

To foster a conducive and enjoyable work environment, WIKA Beton invites all employees to actively participate. The Company highly values any complaints, criticisms, or suggestions related to the implementation of labor values, and encourages each employee to convey them through the employee complaint system. The management of the system is conducted transparently and fairly by the Human Capital Division, which is fully responsible for its administration. These efforts aim to proactively identify potential issues that may arise among employees. The complaint mechanism can be accessed through the following steps:

1. Direct Superintendent
2. Human Capital Division
3. Perhimpunan Pegawai WIKA Beton (PPWB)
4. Bipartite Institutions

In 2025, the Human Capital Division received no complaints, and no warning letters were issued regarding disciplinary sanctions by employees.

Focus on HC Management and Development in 2026

Amid increasingly competitive and disruptive industry dynamics, and to ensure the sustainability and growth of the Company's performance, Human Capital management is positioned as a key pillar in supporting the achievement of the Company's business targets. Changes in the business environment, marked by accelerated digital transformation, increasing market complexity, and growing demands for efficiency and innovation, require the Company to manage human capital that is adaptive, agile, and highly competitive.

Sejalan dengan hal tersebut, strategi pengembangan SDM fokus pada hal berikut :

1. **Optimasi Pegawai Eksisting dan Rekrutmen.**

   Sesuai Kebutuhan 2026 Manajemen SDM akan dilakukan melalui optimalisasi komposisi pegawai eksisting berbasis kebutuhan unit kerja dan peta kompetensi jabatan. Proses rekrutmen akan mempertimbangkan produktivitas, efisiensi biaya, dan keberlanjutan organisasi.

2. **Penguatan Talenta BOD-1, BOD-2, dan Talent Pool Perempuan/Millenial.**

   Pengembangan talenta strategis dilakukan secara berkelanjutan melalui succession readiness bagi posisi kunci dan kritikal dan diarahkan pada peningkatan kemampuan transformasi organisasi, serta pengelolaan perubahan. Perusahaan juga berkomitmen memperkuat talent pipeline dari kalangan perempuan dan generasi milenial sebagai bagian dari strategi keberlanjutan kepemimpinan dan keberagaman (*diversity & inclusion*).

3. **Digitalisasi *Human Capital Management* & Budaya Kerja Produktif.**
   Proses digitalisasi HC akan diperluas melalui integrasi sistem manajemen SDM *end-to-end*, sehingga akan memberikan dampak pada budaya kerja produktif Perusahaan.

4. **Pengembangan IDP & IHDP**
   Implementasi *Individual Development Plan* (IDP) untuk masing-masing pegawai yang disusun berdasarkan hasil asesmen kompetensi dan kebutuhan jabatan yang meliputi *coaching, mentoring* dan penugasan strategis. Selain itu dilaksanakan juga program *Individual Health Development Plan* (IHDP) dengan tujuan membantu setiap pegawai mengembangkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental serta kebugaran kerja secara berkelanjutan, sehingga mendorong perubahan gaya hidup yang lebih sehat yang berdampak pada produktivitas kerja.

In line with this, the Human Capital development strategy focuses on the following areas:

1. **Optimization of existing employees and recruitment.**
   In accordance with the 2026 requirements, Human Capital management will be carried out by optimizing the composition of existing employees based on the needs of each work unit and the job competency framework. The recruitment process will take into account productivity, cost efficiency, and organizational sustainability.

2. **Strengthening talent at the BOD-1 and BOD-2 levels, as well as the female and millennial talent pool.**
   The development of strategic talent is carried out on an ongoing basis through succession readiness for key and critical positions and is focused on strengthening organizational transformation and change management capabilities. The Company is also committed to strengthening the talent pipeline from female employees and the millennial generation as part of its leadership sustainability, diversity, and inclusion strategy.

3. **Digitalization of Human Capital Management and the development of a productive work culture.**
   The digitalization of Human Capital processes will be expanded through the integration of end-to-end Human Capital Management systems, which is expected to have a positive impact on the Company's productive work culture.

4. **Development of IDP and IHDP**
   The Company implements an Individual Development Plan (IDP) for each employee, prepared based on the results of competency assessments and job requirements, and covering coaching, mentoring, and strategic assignments. In addition, the Company also implements an Individual Health Development Plan (IHDP) aimed at helping employees develop and maintain their physical health, mental well-being, and work fitness on a sustainable basis, thereby encouraging healthier lifestyles that positively impact work productivity.

5. **Fokus pada Pengembangan *Knowledge Management* dan *Learning Management System***
Pembelajaran organisasi akan diperkuat melalui pengembangan *Knowledge Management* (KM) yang terstruktur, sistematis, dan berorientasi pada penyebaran praktik terbaik antar unit. Ekosistem *Learning Management System* (LMS) akan terus dioptimalkan untuk menyediakan proses pembelajaran yang mandiri, relevan, mudah diakses.

6. **Efisiensi dan Optimalisasi Organisasi**
Struktur organisasi akan terus ditinjau untuk memastikan efektivitas tata kelola, kecepatan pengambilan keputusan, serta optimalisasi beban kerja dan biaya operasional. Langkah efisiensi dilakukan tanpa mengurangi kualitas layanan internal, dengan prinsip *lean organization*. Melalui strategi pengembangan SDM yang terarah, komprehensif, dan berbasis kapabilitas organisasi, fungsi *Human Capital* diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja perusahaan,memperkuat daya saing jangka panjang, serta menyiapkan talenta unggul untuk keberlanjutan bisnis di tahun 2026 dan seterusnya.

5. **Focus on the development of Knowledge Management and the Learning Management System.**
Organizational learning will be strengthened through the development of structured and systematic Knowledge Management (KM) that is focused on sharing best practices across units. The Learning Management System (LMS) ecosystem will continue to be optimized to provide independent, relevant, and easily accessible learning processes.

6. **Organizational efficiency and optimization.**
The organizational structure will continue to be reviewed to ensure effective governance, faster decision-making, and optimization of workload and operational costs. Efficiency measures will be implemented without reducing the quality of internal services, in line with lean organization principles. Through a focused, comprehensive, and capability-based HC development strategy, the Human Capital function is expected to support improved company performance, strengthen long-term competitiveness, and prepare high-quality talent to ensure business sustainability in 2026 and beyond.

Teknologi Informasi
Information Technology

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dibendung lagi. Dunia telah beralih ke era informasi yang kini melahirkan masyarakat informasi (*information society*). Laju pertumbuhan era informasi pun meningkat sangat cepat sehingga disrupsi terus mengubah cara kita berkomunikasi dan beroperasi.

The evolution of Information Technology (IT) is inevitable. The world has transitioned into the information age, giving rise to the information society. The rapid pace of information era growth leads to continuous disruptions, reshaping the way we communicate and operate.

Oleh karena itu, pemerataan pemahaman terhadap teknologi dan upaya implementasinya menjadi dasar berpijak bagi WIKA Beton. Dalam upaya akselerasi bisnis Perseroan, WIKA Beton menempatkan pengembangan TI sebagai salah satu fokus utama, mengingat peran krusialnya dalam semua aspek, mulai dari pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, hingga penyajian informasi. Perseroan pun secara aktif berupaya untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan terbaru dalam bidang TI, dengan tujuan meningkatkan relevansi proses bisnis dan mendukung percepatan pertumbuhan. Selain itu, upaya adaptasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi operasional Perseroan serta meningkatkan daya saingnya di lanskap kompetisi.

Therefore, fostering a widespread understanding of technology and its implementation efforts form the fundamental foundation for WIKA Beton. In the pursuit of accelerating the Company's business, WIKA Beton positions the development of IT as a primary focus, recognizing its crucial role in all aspects, from information acquisition, collection, processing, storage, distribution, to presentation. The Company actively endeavors to adapt to the latest developments in the IT field, aiming to enhance the relevance of business processes and support growth acceleration. Additionally, this adaptation effort is expected to contribute significantly to the operational efficiency of the Company and elevate its competitiveness in the competitive landscape.

Roadmap Pengembangan TI WIKA Beton
IT Development Roadmap

Dalam memulai perjalanan digitalisasi proses bisnis WIKA Beton, langkah pertama dilakukan melalui penerapan *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang terintegrasi, mencakup *Operating System* (OS), *Finance*, dan *Human Capital Information System* (HCIS). Transformasi ini melibatkan migrasi dari pendekatan administrasi manual/analog ke penggunaan TI sebagai dasar operasional. Hingga kini, sistem ERP terus dikembangkan secara berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Tim TI Perseroan, sebagai penanggung jawab utama dalam melaksanakan program dan inisiatif pengembangan TI, turut serta membangun *Wide Area Network* (WAN) berbasis *private cloud.* Jaringan ini menghubungkan semua unit kerja, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan produksi, dan menyederhanakan proses bisnis.

In embarking on the digitalization journey of WIKA Beton's business processes, the first step was taken through the implementation of an integrated Enterprise Resource Planning (ERP) system, encompassing Operating System (OS), Finance, and Human Capital Information System (HCIS). This transformation involved migrating from manual/analog administrative approaches to utilizing IT as the operational foundation. To date, the ERP system continues to be developed sustainably, aligned with the Company's evolving needs. The Company's IT team, as the primary custodian responsible for executing IT development programs and initiatives, actively contributes to constructing a Wide Area Network (WAN) based on a private cloud. This network interconnects all work units, aiming to enhance efficiency, optimize production, and streamline business processes.

Dalam rangka menjaga keterkaitan Sistem TI Perseroan dengan perkembangan industri dan tuntutan pelanggan, Perseroan telah merancang sebuah rencana

In order to uphold the alignment of the Company's IT System with industry advancements and customer demands, the Company has devised a development plan

pengembangan (*roadmap*) yang disusun berdasarkan prioritas Perseroan. Berikut adalah gambaran dari *roadmap* tersebut:

(roadmap) structured based on corporate priorities. The following provides an overview of this roadmap:

	2024	2025-2026	2027-2028
Tema	***Integrated WIKA Beton Group Core System***	***Machine Learning System***	***Manufacturing 4.0***
Arsitektur System Informasi	• *Integration of Core System of WIKA Beton Subsidiary using ERP WIKA Beton* • *SAP Surrounding Application Development* • *Machine Learning Initiation* • Integration of Core System of WIKA Beton Subsidiary using ERP WIKA Beton • SAP Surrounding Application Development • Machine Learning Initiation	• *Implementation & Optimization of Machine Learning* • *Initiation of Manufacturing Automation* • *Artificial Intelligence Systems* • *Initiation of Decision Support System (DSS)* • Implementation & Optimization of Machine Learning • Initiation of Manufacturing Automation • Artificial Intelligence Systems • Initiation of Decision Support System (DSS)	• *Operate Automation System* • *Implementasi Decision Support System* • Operate the Automation System • Implementation of the Decision Support System
Arsitektur Infrastruktur	• *Business Continuity ready DC-DRC facility* • *Hardware as needed SI Architecture* • *Continuous Integration and Continuous Delivery/Deployment DLP* • Business Continuity ready DC-DRC facility • Hardware as needed SI Architecture • Continuous Integration and Continuous Delivery/Deployment DLP	• *Enhancement of system security and early detection of cyber risk threats.* • *Adjustment of IT infrastructure capacity to support Machine Learning.* • *Implementation of a cloud-based Data Center and Disaster Recovery Center solution.* • Enhancement of system security and early detection of cyber risk threats. • Adjustment of IT infrastructure capacity to support Machine Learning. • Implementation of a cloud-based Data Center and Disaster Recovery Center solution.	• *Penyesuaian Kapasitas* • *Reevaluasi Infrastruktur TI* • Capacity Adjustment • Reevaluation of IT Infrastructure
Tata Kelola TI/Data	• *ISO 27001: 2013 Surveillance* • *IT Maturity COBIT 2019 3.1* • *Indi* 4.0 • ISO 27001: 2013 Surveillance • IT Maturity COBIT 2019 3.1 • Indi 4.0	• *Surveillance of ISO 27001:2022* • *IT Maturity Assessment with COBIT 2019 3.5* • *Initiation* of Cyber Security Maturity Level • Surveillance of ISO 27001:2022 • IT Maturity Assessment with COBIT 2019 3.5 • Initiation of Cyber Security Maturity Level	• *Surveillance ISO 27001:2022* • *IT Maturity COBIT 2019 3.7* • Surveillance of ISO 27001:2022 • IT Maturity Assessment with COBIT 2019 3.7

Perseroan terus mengembangkan *Roadmap* TI dan memastikan keselarasannya dengan perkembangan digitalisasi dan *Roadmap* Korporat. Pada tahun 2025 ini, pengembangan *Roadmap* dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Jangka Panjang (RJP) TI 2024-2028. Sebagaimana arahan *Roadmap* yang telah disusun, Perseroan secara periodik melakukan pembaruan dan peningkatan terhadap sistem dan infrastruktur TI. Inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan TI sebagai fungsi strategis yang dapat meningkatkan keunggulan dan daya saing Perseroan. Sebagai implementasinya, Perseroan telah melakukan langkah-langkah digitalisasi dan mengembangkan berbagai aplikasi, seperti pengembangan aplikasi *surrounding* SAP, Integrasi *core system* anak usaha WIKA Beton, dan sebagainya.

The Company continues to develop its IT Roadmap and ensure its alignment with the ongoing digitalization trends and the Corporate Roadmap. In 2025, the development of the Roadmap is based on the 2024-2028 Long-Term IT Plan (RJP). As outlined in the established Roadmap, the Company periodically updates and enhances its IT systems and infrastructure. This initiative aims to leverage IT as a strategic function to improve the Company's competitive edge and performance. As part of this implementation, the Company has taken steps toward digitalization and developed various applications, such as enhancements around SAP, integration of WIKA Beton's subsidiaries' core systems, and more.

Unit Pengelola Pengembangan TI WIKA Beton
IT Development Management Unit

Divisi Sistem Informasi dan Manajemen memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola program kerja digitalisasi, yang melibatkan pengembangan, implementasi, dan pengelolaan infrastruktur sistem TI. Kinerja optimal Divisi Sistem Informasi dan Manajemen didukung oleh tiga bagian kunci, yakni Bidang *Network, Support* dan KM, Bidang Pengembangan Aplikasi dan ERP dan Bidang Sistem Manajemen.

The IT and Management Division has primary responsibility for managing the digitization work program, which involves the development, implementation, and management of IT system infrastructure. The optimal performance of the Information Systems and Management Division is supported by three key sections, namely the Network, Support and KM Section, the Application and ERP Development Section, and the Management Systems Section.

Manajer Divisi Sistem Informasi dan Manajemen
Manager of Information Systems and Management Division

Manajer Bidang Pengembangan Aplikasi & Enterprise Resource Planning Manager of Application Development & Enterprise Resource Planning	Manajer Bidang Network, Support & KM Manager of Network, Support & KM	Manajer Bidang Sistem Manajemen Manager of Management Systems
Koordinator	Koordinator	Koordinator
Fullstack Developer	Network Admin	Project Planning
Aplikasi Supporting	System Admin	Supply Chain Information System
Electronic Data Processing (EDP)	Network Support	Software Requirements Specification
Fungsi Keuangan ERP	Technical Support	Manajemen Resiko
	Fungsi KM	Technical Writer
		System Manajemen

Profil Manajemen Divisi Sistem Informasi dan Manajemen
Profile of Information System and Management Division

Fachrul Rozi

Manajer Divisi Sistem Informasi dan Manajemen
Manager of the Information Technology and Management Department

Menjabat sejak 22 Agustus 2022. Bergabung di WIKA Beton sejak 1 November 2004. Memperoleh gelar Magister Komputer, Jurusan Teknik Informatika, dari Universitas Bina Nusantara pada 2025. Sebelumnya, pernah menjabat sebagai Manajer Bidang Teknologi Informasi pada 2017-2022.

Appointed on August 22, 2022. Joined WIKA Beton on November 1, 2004. Holds a Master's Degree in Computer Science, majoring in Informatics Engineering, from Bina Nusantara University in 2025. He previously served as Manager of the Information Technology Department in 2017-2022.

Akhmat Sofanul Adi

Manajer Bidang Network, Support, dan Knowledge Manajemen
Manager of the Network, Support, Knowledge Department

Menjabat sejak 1 Juli 2022. Bergabung di WIKA Beton sejak 6 November 2006. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari STT Telkom dan pernah menjabat sebagai Manajer Bagian *Network* dan *Support*.

Appointed on July 1, 2022. Joined WIKA Beton on November 6, 2006. Holds a Bachelor's degree in Engineering from STT Telkom and previously served as Manager of the Network and Support Department.

Ade Maksum

Manajer Bidang Pengembangan Aplikasi dan *Enterprise Resource Planning*
Manager of Application Development and Enterprise Resource Planning Field

Menjabat sejak 1 Juli 2022. Bergabung di WIKA Beton sejak 6 November 2006. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan pernah menjabat sebagai Manajer Bagian *Supply Chain Information System*.

Appointed on July 1, 2022, and joined WIKA Beton on November 6, 2006. Holds a Bachelor's degree in Engineering from Gadjah Mada University (UGM) and has previously served as Manager of the Supply Chain Information System Department.

Barra Hananta Suthan

Manajer Bidang Sistem Manajemen
Manager of Management System Department

Menjabat sejak 21 Juli 2025. Bergabung di WIKA Beton sejak 20 November 2008. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (UII) dan pernah menjabat sebagai Manajer Bagian Teknik Produksi Precast.

Appointed on July 21st, 2025. He joined WIKA Beton on November 20th, 2008. Holds a Bachelor's degree in Civil Engineering from the Islamic University of Indonesia (UII), Yogyakarta, and previously served as Manager of the Precast Production Engineering Department.

Tanggung Jawab Pengelolaan Informasi
Information Management Responsibilities

Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab pengelolaan teknologi informasi juga menjadi bagian dari tanggung jawab Divisi Sistem Informasi dan Manajemen. Khususnya, fokus utama terletak pada pelaksanaan teknis manajemen sistem informasi internal, melibatkan kegiatan pengendalian terhadap proses klarifikasi serta pengungkapan informasi kepada pihak eksternal.

In its implementation, the responsibility for information technology management is also part of the Information Systems and Management Division duties. Specifically, the primary focus lies in the technical execution of internal information system management, involving control activities over clarification processes and disclosure of information to external parties.

Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance

Perseroan menjaga kelangsungan operasionalnya dengan mengikuti pedoman tata kelola yang memberikan arahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pedoman ini melibatkan semua aspek operasional, termasuk penggunaan infrastruktur dan layanan TI.

The Company ensures the continuity of its operations by adhering to governance guidelines that provide the necessary direction to achieve established objectives. These guidelines encompass all operational aspects, including the utilization of infrastructure and IT services.

Menurut IT *Governance Institute* (ITGI), tata kelola TI berfokus pada dua aspek utama, yakni kontribusi nilai bisnis dari penggunaan TI dan manajemen risiko dalam implementasi TI. ITGI juga merinci tujuan tata kelola TI, yang bertujuan mengarahkan investasi TI untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk:

1. Kesesuaian TI dengan organisasi dan realisasi keuntungan yang dijanjikan;
2. Penggunaan TI memungkinkan organisasi memaksimalkan manfaat dan memperbesar peluang;
3. Pertanggungjawaban dalam penggunaan sumber daya TI;
4. Manajemen yang sesuai dengan risiko-risiko yang berkaitan dengan TI.

According to the IT Governance Institute (ITGI), IT governance focuses on two main aspects: the business value contribution of IT usage and risk management in IT implementation. ITGI also outlines the goals of IT governance, aiming to guide IT investments toward various objectives, including:

1. Compliance of IT with organizational requirements and realization of promised benefits;
2. Utilization of IT enabling organizations to maximize benefits and enlarge opportunities;
3. Accountability in the use of IT resources;
4. Management aligned with risks associated with IT.

Kriteria tata kelola standar COBIT 2019 digunakan oleh WIKA Beton untuk mengukur praktik terbaik dalam tata kelola TI Perseroan. Perencanaan, pengembangan, dan operasional TI dikelola dengan memperhatikan setiap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks yang lebih spesifik, seluruh anggota Perseroan diwajibkan untuk mematuhi isi Kebijakan Kepemilikan dan Kerahasiaan Informasi sebagai berikut:

1. Perseroan menguasai semua bentuk ciptaan dalam bentuk kepemilikan secara intelektual.
2. Selama periode bisnisnya, Perseroan mungkin berkecimpung dengan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga yang harus dijaga kerahasiaannya oleh Perseroan. Perseroan akan membatasi keterbukaan Informasi Rahasia tersebut dengan dasar *"need to know"*. Seluruh insan Perseroan wajib menjaga kerahasiaan kepemilikan Informasi ataupun Informasi Rahasia yang dipelajari dan disampaikan selama masa kerjanya. Dengan kepercayaan yang terbatas, seluruh insan Perseroan harus terus menerus berusaha menghindari keterbukaan yang disengaja maupun tidak disengaja.

WIKA Beton employs the COBIT 2019 standard governance criteria to measure best practices in the Company's IT governance. Planning, development, and operation of IT are managed in compliance with applicable regulations. In a more specific context, all Company members are obligated to adhere to the contents of the Information Ownership and Confidentiality Policy as follows:

1. The Company retains control over all forms of intellectual property.
2. During its business period, the Company may engage with Confidential Information to third parties, and confidentiality will be maintained by the Company. The Company will limit the disclosure of such Confidential Information based on a "need to know" basis. All Company personnel must maintain the confidentiality of ownership information or Confidential Information learned and conveyed during their employment. With limited trust, all Company personnel must continually strive to avoid intentional or unintentional disclosure.

3. Sebagaimana diatur di dalam *Code of Conduct,* bahwa setiap insan Perseroan sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya memiliki akses terhadap informasi Perseroan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia. Berkaitan dengan hal tersebut, insan WIKA Beton bertanggung jawab untuk:
   a. Melindungi informasi rahasia Perseroan baik saat masih aktif bekerja maupun pada saat sudah tidak bekerja atau tidak mempunyai ikatan kerja sama dengan Perseroan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Menggunakan informasi Perseroan, baik yang bersifat umum dan khusus hanya untuk kepentingan Perseroan; dan
   c. Penyebaran informasi yang bersifat rahasia baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak lain berupa perorangan, perusahaan, asosiasi, atau badan hukum lainnya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Perseroan.

3. As stipulated in the Code of Conduct, every Company personnel, in accordance with their authority and scope of work, has access to Company information, whether general or confidential. In this regard, WIKA Beton personnel are responsible for:
   a. Protecting Company confidential information during and after active employment, in accordance with applicable regulations;
   b. Using Company information, both general and specific, only for the benefit of the Company;
   c. Dissemination of confidential information, whether orally or in writing, to others, such as individuals, companies, associations, or other legal entities, is carried out by officials appointed by the Company.

Hasil Assessment IT Maturity

Assessment IT Maturity dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola Teknologi Informasi (TI) serta peningkatan efektivitas layanan TI dalam mendukung strategi bisnis perusahaan. Tujuan utama asesmen ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kematangan (maturity level) proses dan pengelolaan TI saat ini, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana pengembangan, prioritas investasi, serta program peningkatan kapabilitas di masa mendatang.

Hasil assessment IT Maturity tahun 2025 mengidentifikasi sebanyak 24 control objective yang menjadi prioritas Kementerian BUMN untuk diimplementasikan, dengan target tingkat kapabilitas minimal berada pada level 3. Dua puluh empat proses prioritas tersebut disusun mengacu pada kerangka kerja COBIT® 2019 dan dikelompokkan ke dalam lima domain utama tata kelola TI.

Pengorganisasian domain tata kelola TI menunjukkan bahwa pengelolaan TI yang terintegrasi diterapkan dari tahap perencanaan strategis hingga evaluasi berkelanjutan. Adapun peran masing-masing domain tata kelola Teknologi Informasi meliputi:

- Domain Evaluate, Direct, and Monitor (EDM) memastikan arah strategis, serta pengelolaan manfaat, risiko, sumber daya, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Assessment Result of IT Maturity

The IT Maturity Assessment is conducted as part of efforts to strengthen Information Technology (IT) governance and improve the effectiveness of IT services in supporting the Company's business strategy. The main objective of this assessment is to determine the current maturity level of IT processes and management, which serves as a basis for preparing development plans, setting investment priorities, and implementing future capability improvement programs.

The 2025 IT Maturity Assessment identified 24 control objectives that are prioritized by the Ministry of State-Owned Enterprises for implementation, with a minimum target capability level of Level 3. These 24 priority processes are developed based on the COBIT® 2019 framework and are grouped into five main IT governance domains.

The organization of IT governance domains demonstrates that integrated IT management is applied from the strategic planning stage through to continuous evaluation. The roles of each Information Technology governance domain include the following:

- The Evaluate, Direct, and Monitor (EDM) domain ensures strategic direction and the management of benefits, risks, resources, and stakeholder engagement.

- Domain Align, Plan, and Organize (APO) mendukung perencanaan dan pengelolaan strategi, arsitektur, keamanan, dan sumber daya TI.
- Domain Build, Acquire, and Implement (BAI) mengatur pembangunan dan penerapan solusi TI, termasuk perubahan dan proyek TI.
- Domain Deliver, Service, and Support (DSS) memastikan keberlangsungan operasional serta kualitas layanan TI.
- Domain Monitor, Evaluate, and Assess (MEA) menangani pemantauan kinerja, pengendalian internal, kepatuhan, serta jaminan.

Melalui pengelompokan ini, tata kelola TI di BUMN berjalan terintegrasi dari arah strategis hingga evaluasi keberlanjutan.

- The Align, Plan, and Organize (APO) domain supports the planning and management of IT strategy, architecture, security, and resources.
- The Build, Acquire, and Implement (BAI) domain governs the development and implementation of IT solutions, including IT changes and projects.
- The Deliver, Service, and Support (DSS) domain ensures operational continuity and the quality of IT services.
- The Monitor, Evaluate, and Assess (MEA) domain addresses performance monitoring, internal control, compliance, and assurance.

Through this structure, IT governance in State-Owned Enterprises is implemented in an integrated manner, from strategic direction to continuous evaluation.

Evaluate, Direct and Monitor (EDM)					Keterangan
EDM01 *Ensured Governance Framework Setting & Maintenance*	***EDM02*** *Ensured Benefits Delivery*	***EDM03*** *Ensured Risk Optimization*	***EDM04*** *Ensured Resource Optimization*	***EDM05*** *Ensured Stakeholder Engagement*	24 Proses Prioritas Implementasi Kerangka Kerja Penyelenggaraan TI (Surat BUMN No. S-562/MBU/DSI/10/2024)

Align, Plan and Organize (APO)							
APO01 *Managed the I&T Management*	***APO02*** *Managed Strategy*	***APO03*** *Managed Enterprise Architecture*	***APO04*** *Managed Innovation*	***APO05*** *Managed Portofolio*	***APO06*** *Managed Budget and Cost*	***APO07*** *Managed Human Resources*	*Monitor, Evaluate and Assess (MEA)*
APO08 *Managed Relationships*	***APO09*** *Managed Service Agreements*	***APO10*** *Managed Vendors*	***APO11*** *Managed Quality*	***APO12*** *Managed Risk*	***APO13*** *Managed Security*	***APO14*** *Manged Data*	***MEA01*** *Managed Performance and Conformance Monitoring*
Build, Acquire and Implement (BAI)							
BAI01 *Managed Programs*	***BAI02*** *Managed Requirements Defitinition*	***BAI03*** *Managed Solutions Identification & Build*	***BAI04*** *Managed Availability & Capacity*	***BAI05*** *Managed Organizational Change*	***BAI06*** *Managed IT Changes*	***BAI07*** *Managed IT Change Acceptance & Transitioning*	***MEA02*** *Managed System of Internal Control*
BAI08 *Managed Knowledge*	***BAI09*** *Managed Assets*	***BAI10*** *Managed Configuration*	***BAI11*** *Managed Projects*				***MEA03*** *Managed Compliance With External Requirements*
Deliver, Service and Support							
DSS01 *Managed Operations*	***DSS02*** *Managed Service Request & Incidents*	***DSS03*** *Managed Problems*	***DSS04*** *Managed Continuity*	***DSS05*** *Managed Security Services*	***DSS06*** *Managed Business Process Control*		***MEA04*** *Managed Assurance*

Pada tahun 2025 hasil asesmen tata kelola Teknologi Informasi, menunjukan bahwa fondasi pengelolaan TI sudah baik, hal ini dapat dilihat pada tingkat kematangan tata kelola TI perusahaan yang secara keseluruhan berada pada level 3,54.Hal ini berdasarkan penilaian

In 2025, the results of the Information Technology governance assessment showed that the foundation of IT management was already strong. This is reflected in the Company's overall IT governance maturity level of 3.54, based on the assessment of 24 key processes,

terhadap 24 proses utama, yang ditunjukkan oleh capaian hijau pada gambar di atas. Capaian ini menunjukkan bahwa proses TI telah mendukung aktivitas operasional perusahaan secara sistematis dan konsisten.

which are indicated by green ratings in the figure above. This achievement demonstrates that IT processes have supported the Company's operational activities systematically and consistently.

Perusahaan akan terus meningkatkan tata kelola TI melalui peningkatan kualitas proses, pemanfaatan teknologi secara lebih efisien, dan penyelarasan yang berkelanjutan antara TI dan kebutuhan bisnis.

The Company will continue to enhance IT governance by improving process quality, using technology more efficiently, and maintaining continuous alignment between IT and business needs.

Risiko Teknologi Informasi dan Mitigasinya
InformationTechnology Risks and Its Mitigation

Pengembangan TI yang menghadirkan spektrum luas tentunya terekspos pada berbagai risiko yang berpotensi menyebabkan *disruption* (gangguan). Dalam hal ini, *cyber security* (keamanan dunia maya) menjadi aspek yang sangat menentukan keamanan dalam utilisasi big data Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan telah menyusun upaya *disaster recovery* (pemulihan bencana) untuk memastikan semua risiko utama telah diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan pada pihak-pihak terkait di Perseroan.

The development of IT, encompassing a broad spectrum, is inherently exposed to various risks that have the potential to cause disruptions. In this regard, cyber security plays a crucial role in ensuring the security of the Company's utilization of big data. The Company has implemented disaster recovery efforts to ensure that all key risks are identified, managed, and reported to relevant parties within the Company.

Sebagai anak perusahaan BUMN di bidang produk pracetak beton, risiko-risiko TI yang dihadapi melibatkan aspek-aspek kritis dalam operasional dan pengelolaan data. Risiko utama termasuk potensi kehilangan data produksi, gangguan dalam rantai pasokan digital, dan serangan terhadap infrastruktur TI yang dapat mempengaruhi keberlanjutan produksi. Untuk memitigasi risiko tersebut, WIKA Beton menerapkan serangkaian langkah mitigasi yang melibatkan kombinasi teknologi dan kebijakan internal. Upaya ini mencakup penerapan sistem *backup* data yang terjadwal, penggunaan solusi keamanan siber terkini, dan pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk mengatasi kerentanan keamanan.

As a state-owned enterprise subsidiary specializing in precast concrete products, the IT risks faced involve critical aspects of operational and data management. Key risks include potential data production loss, disruptions in the digital supply chain, and attacks on IT infrastructure that could impact production sustainability. To mitigate these risks, WIKA Beton employs a series of mitigation measures involving a combination of technology and internal policies. These efforts include the implementation of scheduled data backup systems, the use of cutting-edge cybersecurity solutions, and regular software updates to address security vulnerabilities.

Penerapan kebijakan keamanan siber di Perseroan melibatkan manajemen identitas dan akses yang ketat, termasuk penggunaan otentikasi multi-faktor untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Selain itu, *firewall* dan sistem deteksi interupsi diterapkan untuk memantau dan mengatasi potensi ancaman dari luar. Karyawan juga dilibatkan dalam program *awareness* keamanan siber secara berkala untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap potensi risiko dan memberikan pemahaman tentang praktik keamanan yang aman.

The implementation of cybersecurity policies within the Company involves strict identity and access management, including the use of multi-factor authentication to ensure that only authorized parties can access sensitive data. Additionally, firewalls and intrusion detection systems are deployed to monitor and address potential external threats. Employees are also engaged in periodic cybersecurity awareness programs to enhance their awareness of potential risks and provide understanding of safe security practices.

Pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan industri juga diakui Perseroan. Untuk itu, Perseroan rutin melakukan audit keamanan dan pembaruan kebijakan sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan regulasi. Dengan pendekatan holistik ini, Perseroan memastikan bahwa data produksi, informasi pelanggan, dan elemen kritis lainnya terlindungi dengan baik sehingga menjaga keberlanjutan operasional dan kepercayaan pelanggan.

The importance of compliance with industry regulations and security standards is also acknowledged by the Company. As such, the Company routinely conducts security audits and updates policies in line with technological advancements and regulatory changes. With this holistic approach, the Company ensures that production data, customer information, and other critical elements are well-protected, maintaining operational continuity and customer trust.

Audit Teknologi Informasi
Information Technology Audit

Dengan pertumbuhan signifikan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), peningkatan pengawasan dan pengendalian atas implementasinya menjadi imperatif. Audit TI dapat difokuskan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan dan meningkatkan keamanan aset teknologi yang dimiliki. Dengan pendekatan ini, upaya perbaikan dapat dilakukan dengan terarah dan terencana berdasarkan umpan balik yang objektif dan akurat.

With significant growth in the utilization of Information Technology (IT), enhancing supervision and control over its implementation becomes imperative. IT audits can be focused on improving overall performance, identifying strengths, and enhancing the security of the Company's technological assets. Through this approach, targeted and planned improvement efforts can be implemented based on objective and accurate feedback.

Secara berkala, Divisi Sistem Informasi melakukan audit dan evaluasi efektivitas TI di Perseroan serta mempertimbangkan pencapaian efektivitas dan efisiensi dari setiap program kerja TI. Perseroan menjamin bahwa pelaksanaan program kerja TI selalu diukur dan dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan kualitasnya dan kesesuaian dengan etika bisnis.

Periodically, the Information Systems Division conducts audits and evaluates the effectiveness of IT within the Company, considering the achievement of effectiveness and efficiency in each IT work program. The Company ensures that the implementation of IT work programs is consistently measured and comprehensively evaluated to guarantee their quality and alignment with business ethics.

Dalam rangka memastikan kepatuhan, Perseroan tidak hanya mengandalkan mekanisme audit, tetapi juga meningkatkan peran TI sebagai alat untuk melaporkan pelanggaran dan penyalahgunaan informasi di lingkungan Perseroan melalui *Whistleblowing System*. Informasi terkait sistem pelaporan pelanggaran telah dijelaskan secara rinci dalam bagian Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan.

In ensuring compliance, the Company relies not only on audit mechanisms but also elevates the role of IT as a tool to report violations and misuse of information within the Company through the Whistleblowing System. Information related to the violation reporting system has been detailed in the Corporate Governance section of the Annual Report.

Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Tahun 2025
IT Development System in 2025

Dalam upaya mencapai korporasi yang andal secara digital dan selalu sesuai dengan perkembangan industri, Perseroan telah melaksanakan sejumlah pengembangan pada sistem TI di sepanjang tahun 2025. Pengembangan yang telah dilakukan antara lain:

1. Pengembangan *ERP & Workin'*
2. *SAP (MM & FM)*
3. Aplikasi CMMS (*Computerized Maintenance Management System*)
4. Aplikasi *Dashboard Management*

In the pursuit of becoming a digitally reliable corporation and continuously aligning with industry advancements, WIKA Beton has undertaken several IT system developments throughout the year 2025. Key developments include:

1. ERP & Workin' development
2. SAP (MM & FM)
3. CMMS (Computerized Maintenance Management System) application
4. Management Dashboard application

5. Aplikasi Analisa Risiko & Manajemen Proyek
6. Pengembangan Aplikasi *Digital Sign* (Peruri)
7. Pengembangan Aplikasi *Knowledge Management*
8. Aplikasi Inventaris IT
9. COBIT 2019 (nilai 3.5)
10. Audit ISO 27001:2022
11. Aplikasi *Finance* WIKA Kraton
12. Aplikasi *Stockyard Management System*

5. Risk Analysis & Project Management application
6. Digital Sign application development (Peruri)
7. Knowledge Management application development
8. IT Inventory application
9. COBIT 2019 (score 3.5)
10. ISO 27001:2022 audit
11. WIKA Kraton Finance application
12. Stockyard Management System application

Program Kerja Work Program	Periode Realisasi Realization Period
Pengembangan *ERP & Workin'* ERP & Workin' development	Juli 2025 July 2025
SAP (MM & FM) SAP (MM & FM)	Juli 2025 July 2025
Aplikasi CMMS (*Computerized Maintenance Management System*) CMMS (Computerized Maintenance Management System) application	April 2025 April 2025
Aplikasi *Dashboard Management* Management Dashboard application	Juli 2025 July 2025
Aplikasi Analisa Risiko & Manajemen Proyek Risk Analysis & Project Management application	Desember 2025 December 2025
Pengembangan Aplikasi *Digital Sign* (Peruri) Digital Sign application development (Peruri)	Agustus 2025 August 2025
Pengembangan Aplikasi *Knowledge Management* Knowledge Management application development	November 2025 November 2025
Aplikasi Inventaris IT IT Inventory application	November 2025 November 2025
COBIT 2019 (nilai 3.5) COBIT 2019 (score 3.5)	Juli 2025 July 2025
Audit ISO 27001:2022 ISO 27001:2022 audit	Februari 2025 February 2025
Aplikasi *Finance* WIKA Kraton WIKA Kraton Finance application	Januari 2025 January 2025
Aplikasi *Stockyard Management System* Stockyard Management System application	Oktober 2025 October 2025

Investasi Pengembangan TI Tahun 2025
Investment of IT Development 2025

Untuk berbagai pengembangan yang dilakukan di sepanjang tahun 2025, Perseroan mengalokasikan dana sebesar Rp6.987.000.000.

The Company has allocated Rp6,987,000,000 for several developments throughout 2025.

Pengembangan SDM di Bidang TI
HC Development in IT

Sebagai pilar utama yang menentukan optimalisasi TI melalui rancangan program yang efektif, Perseroan memprioritaskan fokus pada peningkatan SDM di sektor TI. Komitmen tersebut dibuktikan dengan penyelenggaraan berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM di bidang TI selama tahun 2025. Berikut adalah gambaran beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tersebut:

As a key pillar for optimizing IT through effective program design, the Company prioritizes the enhancement of human resources in the IT sector. This commitment is shown by the implementation of various training and competency development programs for IT staff throughout 2025. Below is an overview of some of the activities carried out to achieve this goal:

Pelatihan Training	Tanggal Pelatihan Training Date	Jumlah Peserta (orang) Total Participants (people)
Awareness Cyber Security	Februari 2025 February 2025	20

Perseroan mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk menginternalisasikan budaya sadar TI *(IT Culture)* kepada seluruh pegawai, termasuk yang berasal dari divisi lain selain Divisi TI. Dengan melibatkan berbagai divisi, pemahaman yang luas mengenai transformasi digital yang sedang dijalankan oleh Perseroan diharapkan tercipta serta partisipasi dari setiap individu di WIKA Beton dapat berjalan maksimal.

The Company organizes socialization and training activities to internalize an IT-aware culture across all employees, including those from divisions other than the IT Division. By involving various divisions, the goal is to foster a broad understanding of the digital transformation underway at the Company, ensuring maximum participation from every individual at WIKA Beton.

Rencana Pengembangan Teknologi Informasi
Development Plan of Information Technology

Industri terus berevolusi, sebagaimana terlihat pada adopsi luas teknologi digital, kecerdasan buatan, konektivitas, dan integrasi sistem dalam berbagai aspek produksi dan kehidupan manusia. Hal ini merupakan kelanjutan dari perkembangan industri sebelumnya dan mencakup transformasi besar-besaran dalam hal cara produksi, distribusi, dan interaksi manusia dengan teknologi. Dengan semakin melesatnya revolusi industri, optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi menjadi kian mendesak.

Industries continue to evolve, as seen in the widespread adoption of digital technology, artificial intelligence, connectivity, and system integration across various aspects of production and human life. This is a continuation of previous industrial developments and involves a massive transformation in production methods, distribution, and how humans interact with technology. As the industrial revolution accelerates, the optimization of Information Technology utilization becomes increasingly urgent.

Sesuai dengan arah yang diindikasikan dalam *Roadmap* Pengembangan TI, Perseroan telah merancang strategi pengembangan untuk memperkuat pelaksanaan TI di tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

1. *Application Managed Service*
2. *Infrastructure SAP*
3. *License SAP*
4. Pengelolaan dan peningkatan sistem *storage* dan *backup data*
5. Optimalisasi Infrastruktur Jaringan DRC (*Data Recovery Center*)
6. Pengembangan Aplikasi LMS (*Learning Management System*)
7. Penambahan Fitur Aplikasi *Knowledge Management*
8. *Software Proposal Stressing Postension*
9. Pengembangan Aplikasi Analisa Risiko Strategis
10. Re Sertifikasi *IT Maturity Cobit 2019*
11. Re Sertifikasi ISO 27001:2022

In line with the direction outlined in the IT Development Roadmap, the Company has designed a development strategy to strengthen the implementation of IT in 2026, as follows:

1. Application Managed Services
2. SAP Infrastructure
3. SAP Licensing
4. Management and enhancement of data storage and backup systems
5. Optimization of Data Recovery Center (DRC) network infrastructure
6. Development of the Learning Management System (LMS) application
7. Enhancement of Knowledge Management application features
8. Development of Stress Testing and Post-Tensioning Proposal software
9. Development of a Strategic Risk Analysis application
10. Re-certification of IT Maturity based on COBIT® 2019
11. Re-certification of ISO 27001:2022

5



2025 Laporan Tahunan
Annual Report



Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Discussion & Analysis

Tinjauan Umum
General Overview

TINJAUAN MAKROEKONOMI
MACROECONOMIC OVERVIEW

Tahun 2025 menempatkan perekonomian global pada fase penyesuaian yang kompleks karena ketidakpastian geopolitik, fragmentasi perdagangan, serta perbedaan arah kebijakan ekonomi antarnegara yang tetap lebar. Pelaku usaha global menghadapi biaya pendanaan yang masih relatif tinggi, volatilitas pasar keuangan, serta risiko gangguan rantai pasok yang dapat memengaruhi harga input dan keputusan investasi.

In 2025, the global economy entered a complex adjustment phase, driven by geopolitical uncertainty, trade fragmentation, and wide differences in economic policy directions across countries. Global businesses continue to face relatively high financing costs, financial market volatility, and supply chain disruption risks that may affect input prices and investment decisions.

Dana Moneter Internasional (IMF) melalui World Economic Outlook Oktober 2025 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 sebesar 3,2%, lebih rendah dibanding proyeksi tahun 2024 sebesar 3,3%, serta tetap berada di bawah rerata historis 2000–2019 sebesar 3,7%. IMF menilai perekonomian global bergerak pada lintasan yang lebih lemah dan lebih tidak pasti, seiring meningkatnya hambatan perdagangan dan tingginya ketidakpastian kebijakan di sejumlah negara.

According to the International Monetary Fund (IMF) in its October 2025 World Economic Outlook, global economic growth in 2025 is projected at 3.2%, slightly lower than the 2024 projection of 3.3%, and remaining below the historical average of 3.7% for the period 2000–2019. The IMF assesses that the global economy is moving on a weaker and more uncertain path, amid rising trade barriers and elevated policy uncertainty in several countries.

IMF juga menunjukkan perbedaan kinerja yang jelas antara kelompok negara maju dan berkembang. IMF memproyeksikan pertumbuhan negara maju pada 2025 sekitar 1,5%, sedangkan kelompok emerging market dan negara berkembang diproyeksikan tumbuh sekitar 4,2%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa daya dorong permintaan global bersifat tidak merata, sehingga risiko perlambatan pada beberapa pusat ekonomi tetap menjadi faktor penentu bagi perdagangan dan investasi lintas-batas.

The IMF also highlights a clear divergence in performance between advanced economies and emerging and developing economies. Growth in advanced economies is projected at around 1.5% in 2025, while emerging market and developing economies are expected to grow by approximately 4.2%. This divergence indicates uneven global demand momentum, with the risk of a slowdown in several major economic centers remaining a key factor for cross-border trade and investment.

Secara keseluruhan, tahun 2025 mendorong banyak otoritas ekonomi untuk memprioritaskan stabilitas, ketahanan rantai pasok, serta penguatan kebijakan domestik agar perekonomian tetap adaptif terhadap guncangan eksternal, termasuk melalui diversifikasi pasar dan peningkatan efisiensi produksi.

Overall, 2025 led many economic authorities to prioritize stability, supply chain resilience, and stronger domestic policies to ensure that economies remain adaptive to external shocks. These efforts include market diversification and improvements in production efficiency.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan ketahanan yang terjaga di tengah dinamika global. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sebesar 5,11% (c-to-c), dengan pertumbuhan Triwulan IV-2025 sebesar 5,39% (y-on-y).

Indonesia's economy in 2025 demonstrated sustained resilience amid global dynamics. Statistics Indonesia (BPS) recorded economic growth of 5.11% year-on-year for 2025, with growth of 5.39% year-on-year in the fourth quarter of 2025.

BPS mencatat penguatan pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha, termasuk Jasa Lainnya (9,93%) dan Transportasi dan Pergudangan (9,04%). Dari sisi pengeluaran, BPS mencatat pertumbuhan tertinggi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa (7,03%). Struktur ini menunjukkan bahwa kinerja 2025 tetap ditopang oleh kombinasi aktivitas domestik dan keterkaitan eksternal, meskipun tekanan global masih berlangsung.

BPS also reported stronger growth in several sectors, including Other Services at 9.93% and Transportation and Warehousing at 9.04%. From the expenditure side, the highest growth was recorded in Exports of Goods and Services at 7.03%. This structure indicates that economic performance in 2025 continued to be supported by a combination of domestic activity and external linkages, despite ongoing global pressures.

Dari sisi perdagangan internasional, BPS mencatat nilai ekspor Indonesia tahun 2025 sebesar US$282,91 miliar dan nilai impor sebesar US$241,86 miliar, sehingga Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan US$41,05 miliar. BPS juga mencatat surplus nonmigas sebesar US$60,75 miliar dan defisit migas sebesar US$19,70 miliar. Capaian tersebut mempertahankan ruang penyangga sektor eksternal, sekaligus mencerminkan dinamika kebutuhan impor yang tetap signifikan untuk mendukung aktivitas produksi dan investasi.

From the perspective of international trade, BPS recorded Indonesia's exports in 2025 at US$282.91 billion and imports at US$241.86 billion, resulting in a trade surplus of US$41.05 billion. BPS also reported a non-oil and gas surplus of US$60.75 billion and an oil and gas deficit of US$19.70 billion. These results helped maintain external sector buffers, while also reflecting continued import demand to support production and investment activities.

Stabilitas harga pada tahun 2025 tetap terkendali. BPS mencatat inflasi Desember 2025 sebesar 2,92% (y-on-y) dan 2,92% (y-to-d), dengan inflasi inti 2,38% (y-on-y). BPS juga menjelaskan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Desember 2025.

Price stability in 2025 remained well controlled. BPS recorded inflation in December 2025 at 2.92% year-on-year and 2.92% year-to-date, with core inflation at 2.38% year-on-year. BPS also noted that the food, beverages, and tobacco group was the largest contributor to monthly inflation in December 2025.

Kebijakan moneter pada tahun 2025 bergerak lebih akomodatif untuk menjaga keseimbangan stabilitas dan pertumbuhan. Bank Indonesia menurunkan BI-Rate secara bertahap dari 5,75% (Januari 2025) menjadi 5,50% (Mei 2025), 5,25% (Juli 2025), 5,00% (Agustus 2025), dan 4,75% (September 2025). Bank Indonesia juga menegaskan bahwa penurunan selama 2025 mencapai 125 bps, dan level BI-Rate 4,75% bertahan hingga setidaknya November–Desember 2025.

Monetary policy in 2025 became more accommodative to balance stability and economic growth. Bank Indonesia gradually reduced the BI-Rate from 5.75% in January 2025 to 5.50% in May 2025, 5.25% in July 2025, 5.00% in August 2025, and 4.75% in September 2025. Bank Indonesia stated that the cumulative rate cut in 2025 reached 125 basis points, with the BI-Rate maintained at 4.75% through at least November–December 2025.

Dari sisi stabilitas makro, publikasi Kementerian Keuangan mencatat nilai tukar Rupiah tahun 2025 berada pada kisaran yang menuntut pengelolaan stabilitas, dengan indikasi rata-rata (ytd) Rp16.475/US$ dan akhir-periode (eop) Rp16.782/US$ per 31 Desember 2025. Pemerintah juga menyampaikan bahwa realisasi sementara APBN 2025 mencatat defisit yang terkendali pada 2,92% PDB, yang menunjukkan ruang kebijakan fiskal tetap dijaga dalam batas kehati-hatian.

From a macroeconomic stability perspective, publications by the Ministry of Finance indicate that the Rupiah exchange rate in 2025 remained within a range that required active stability management, with an average year-to-date level of Rp16,475 per USD and an end-of-period level of Rp16,782 per USD as of December 31, 2025. The Government also reported that the preliminary realization of the 2025 State Budget recorded a controlled deficit of 2.92% of GDP, indicating that fiscal policy space was maintained within prudent limits.

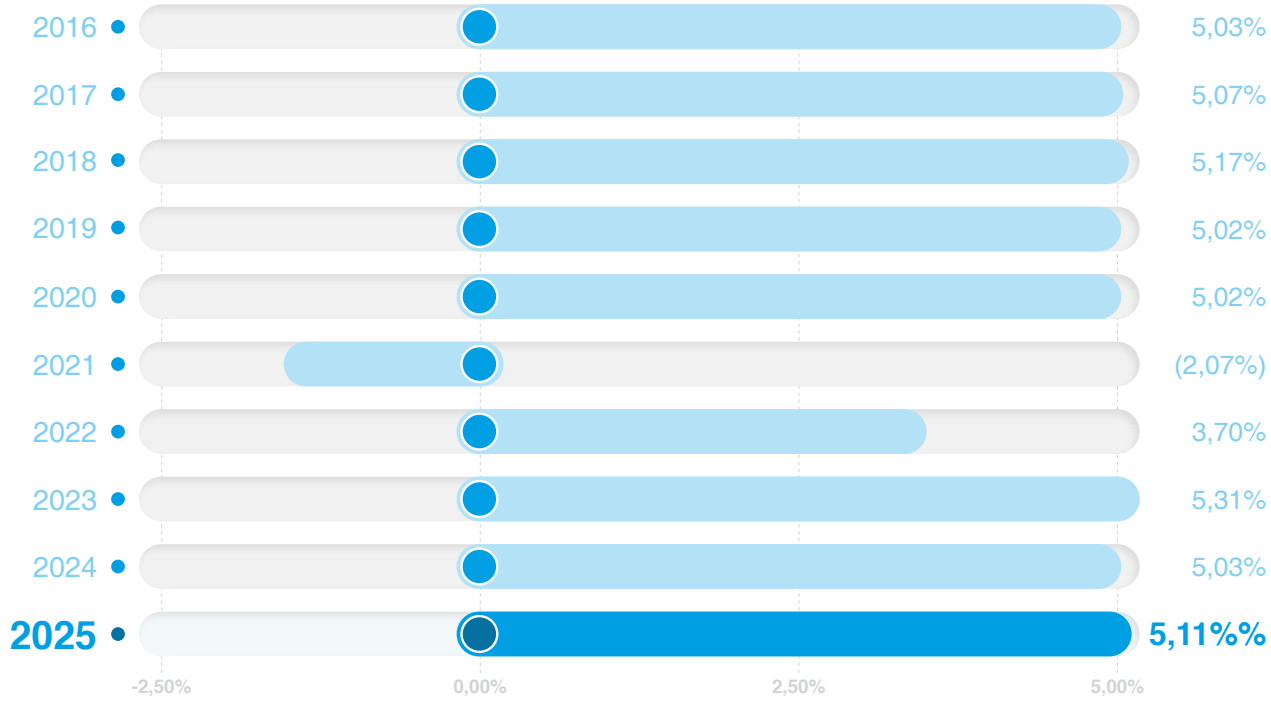
Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia tahun 2025 menunjukkan kombinasi yang relatif solid antara pertumbuhan yang terjaga, inflasi yang terkendali, dan sektor eksternal yang masih mencatat surplus. Kondisi

Overall, Indonesia's economy in 2025 demonstrated a relatively solid combination of sustained growth, controlled inflation, and an external sector that continued to record a surplus. These conditions provided a more

tersebut menyediakan landasan makro yang lebih terukur bagi dunia usaha untuk mengelola biaya, merencanakan investasi, dan menjaga kesinambungan kinerja pada tahun berikutnya, meskipun tekanan global tetap memerlukan disiplin manajemen risiko.

predictable macroeconomic foundation for businesses to manage costs, plan investments, and maintain performance continuity in the following year. Although the global pressures continue to require disciplined risk management.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir
Economic Growth of Indonesia in the Last 10 Years



(Dalam jutaan Rupiah I In million Rupiah)

TINJAUAN INDUSTRI KONSTRUKSI
CONSTRUCTION INDUSTRY OVERVIEW

Industri konstruksi Indonesia pada tahun 2025 tetap berperan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan fasilitator investasi. Namun, tahun 2025 memperlihatkan fase penyesuaian: proyek tetap berjalan, tetapi kualitas eksekusi, disiplin biaya, dan ketahanan arus kas menjadi penentu utama kinerja pelaku usaha. Dari sisi makro, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,11% pada 2025. Dalam struktur PDB menurut lapangan usaha, konstruksi mempertahankan posisi sebagai salah satu sektor utama; pada Triwulan II 2025 kontribusinya tercatat sekitar 9,48% terhadap PDB, sehingga perubahan kinerjanya cepat menjalar ke rantai pasok material, jasa, dan logistik.

The Indonesian construction industry in 2025 will continue to play a role as a driver of economic growth, job creation, and investment facilitator. However, 2025 will see a phase of adjustment: projects will continue, but the quality of execution, cost discipline, and cash flow resilience will be the main determinants of business performance. From a macro perspective, the Central Statistics Agency (BPS) recorded Indonesia's economy growing by 5.11% in 2025. In the GDP structure by business field, construction maintains its position as one of the main sectors; in the second quarter of 2025, its contribution was recorded at around 9.48% of GDP, so that changes in its performance quickly spread to the material, service, and logistics supply chains.

Permintaan konstruksi sepanjang 2025 terutama ditopang oleh tiga sumber: pembangunan dan preservasi infrastruktur, program perumahan serta fasilitas publik, dan proyek produktif seperti kawasan industri, utilitas,

Construction demand throughout 2025 was mainly supported by three sources: infrastructure development and preservation, housing and public facility programs, and productive projects such as industrial estates,

energi, serta logistik. Dari sisi fiskal, pemerintah tetap menempatkan infrastruktur sebagai belanja sektoral prioritas. Dalam publikasi APBN KiTa (Oktober 2025), realisasi pembangunan infrastruktur sampai dengan 30 September 2025 tercatat Rp170,1 triliun atau 42,3% dari pagu Rp402,4 triliun. Capaian tersebut perlu dipahami sebagai realisasi sampai triwulan ketiga, sehingga ritme penyerapan pada kuartal akhir tetap menjadi faktor penting bagi kontraktor dan pemasok material.

utilities, energy, and logistics. From a fiscal perspective, the government continues to prioritize infrastructure spending. In the APBN KiTa publication (October 2025), infrastructure development realization as of September 30, 2025, was recorded at IDR 170.1 trillion or 42.3% of the IDR 402.4 trillion ceiling. This achievement should be understood as realization up to the third quarter, so that the absorption rate in the final quarter remains an important factor for contractors and material suppliers.

Pada tingkat pelaksana, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan pagu anggaran 2025 sebesar Rp116,23 triliun. Realisasi keuangan dilaporkan mencapai sekitar 95,23% dari pagu DIPA efektif, dengan capaian fisik 95,17%. Fokus pelaksanaan diarahkan pada layanan publik dasar—konektivitas, sumber daya air, serta dukungan ketahanan pangan—seraya memperkuat pengendalian mutu dan keselamatan konstruksi. Pada sisi perumahan, skema pembiayaan seperti FLPP tetap relevan karena efek rambatnya cepat ke material bangunan, kontraktor skala kecil-menengah, dan penyerapan tenaga kerja.

At the implementation level, the Ministry of Public Works (PU) announced a budget ceiling of Rp116.23 trillion for 2025. Financial realization was reported to have reached around 95.23% of the effective DIPA ceiling, with physical realization at 95.17%. The focus of implementation is directed at basic public services—connectivity, water resources, and food security support—while strengthening quality control and construction safety. On the housing side, financing schemes such as FLPP remain relevant due to their rapid ripple effect on building materials, small-to-medium-sized contractors, and labor absorption.

Dari sisi pembiayaan, 2025 ditandai pelonggaran moneter. Bank Indonesia menurunkan BI-Rate secara bertahap hingga 4,75% pada September 2025, setelah sebelumnya berada di level yang lebih tinggi pada awal tahun. Secara teori, penurunan suku bunga memperbaiki kelayakan finansial proyek dan menurunkan biaya dana. Namun, transmisi kebijakan moneter ke sektor konstruksi tidak otomatis. Dampak riil tetap ditentukan oleh kualitas portofolio proyek, kepastian termin pembayaran, kemampuan kontraktor mengelola modal kerja, dan selera risiko perbankan terhadap pembiayaan proyek.

In terms of financing, 2025 will be marked by monetary easing. Bank Indonesia gradually lowered the BI Rate to 4.75% in September 2025, after previously being at a higher level at the beginning of the year. In theory, lower interest rates improve the financial viability of projects and reduce funding costs. However, the transmission of monetary policy to the construction sector is not automatic. The real impact is still determined by the quality of the project portfolio, payment certainty, contractors' ability to manage working capital, and banks' risk appetite for project financing.

Dinamika biaya pada 2025 relatif lebih terkendali, tetapi tetap menuntut pengadaan yang disiplin. BPS melaporkan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Kelompok Bangunan/Konstruksi pada Desember 2025 naik 2,06% (yoy), dipicu kenaikan harga komoditas seperti kerikil, batu pecahan, produk aluminium, pasir, dan sirtu. Survei perusahaan konstruksi BPS (Triwulan II 2025) menunjukkan indeks nilai konstruksi yang diselesaikan naik 3,39% (yoy), indeks hari-orang pekerja harian naik 1,90% (yoy), dan indeks balas jasa serta upah naik 3,52% (yoy). Kombinasi indikator ini menegaskan bahwa produktivitas, kepastian jadwal, dan kontrol biaya menjadi pengunci margin.

Cost dynamics in 2025 are relatively more controlled, but still require disciplined procurement. BPS reported that the Wholesale Price Index (IHPB) for the Building/Construction Group in December 2025 rose 2.06% (yoy), triggered by increases in the prices of commodities such as gravel, crushed stone, aluminum products, sand, and sand and gravel. The BPS construction company survey (Second Quarter 2025) shows that the index of completed construction value rose by 3.39% (yoy), the index of daily worker days rose by 1.90% (yoy), and the index of services and wages rose by 3.52% (yoy). This combination of indicators confirms that productivity, schedule certainty, and cost control are key to margins.

Subsektor material, khususnya semen, memberi sinyal tambahan mengenai komposisi permintaan. Rilis kinerja Kuartal III 2025 Indocement yang mengutip data asosiasi melaporkan pasar semen domestik periode 9 bulan 2025 turun 3,1%, terutama karena kontraksi volume semen curah 9,8% sementara semen kantong relatif stabil. Indikasi ini konsisten dengan pelemahan yang lebih tajam pada proyek skala besar dibanding segmen ritel dan perumahan, serta memperlihatkan peran ekspor sebagai katup penyeimbang ketika pasar domestik melambat.

The materials subsector, particularly cement, provides additional signals regarding the composition of demand. Indocement's Q3 2025 performance release, citing association data, reported that the domestic cement market declined by 3.1% in the first nine months of 2025, mainly due to a 9.8% contraction in bulk cement volume, while bagged cement remained relatively stable. This indication is consistent with a sharper slowdown in large-scale projects compared to the retail and housing segments, and highlights the role of exports as a balancing valve when the domestic market slows down.

Secara keseluruhan, 2025 menegaskan bahwa isu kunci industri bukan sekadar ketersediaan proyek, melainkan kualitas eksekusi dan ketahanan finansial rantai pasok. Ketidakpastian ritme belanja, disiplin arus kas, volatilitas input material dan logistik, produktivitas tenaga kerja, serta tata kelola proyek yang makin ketat menjadi faktor yang paling menentukan menjelang 2026.

Overall, 2025 confirms that the key issues for the industry are not just the availability of projects, but also the quality of execution and the financial resilience of the supply chain. Uncertainty in spending patterns, cash flow discipline, volatility in material and logistics inputs, labor productivity, and increasingly strict project governance will be the most decisive factors leading up to 2026.

KONTRIBUSI WIKA BETON TERHADAP INDUSTRI KONSTRUKSI NASIONAL

PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) tetap menunjukkan resiliensi dan dominasi di industri konstruksi nasional. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan perusahaan dalam berbagai proyek pembangunan strategis yang terus digalakkan oleh pemerintah. Dengan kapabilitas produksi yang luas, jaringan distribusi yang kuat, serta penerapan standar industri yang tinggi, WIKA Beton terus mendorong efisiensi dan efektivitas pembangunan nasional.

1. **Penyedia Utama Beton Pracetak untuk Infrastruktur Nasional**
   Sebagai produsen beton pracetak terbesar di Indonesia, WIKA Beton memainkan peran kunci dalam proyek infrastruktur strategis nasional, termasuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, jembatan, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Produk pracetak berkualitas tinggi dari WIKA Beton telah meningkatkan efisiensi waktu dan biaya konstruksi dalam berbagai proyek nasional. Selain itu, keterlibatan dalam proyek pengembangan energi dan transportasi, seperti kereta cepat, jalur LRT, dan pembangunan smelter, semakin mengukuhkan peran WIKA Beton dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

WIKA BETON'S CONTRIBUTION TO THE NATIONAL CONSTRUCTION INDUSTRY

PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) continues showing resilience and leadership in the national construction industry. This is evident through the company's involvement in various strategic development projects promoted by the government. With its extensive production capabilities, strong distribution network, and adherence to high industry standards, WIKA Beton consistently drives efficiency and effectiveness in national development.

1. **Primary Provider of Precast Concrete for National Infrastructure**
   As the largest producer of precast concrete in Indonesia, WIKA Beton plays a key role in national strategic infrastructure projects, including the construction of toll roads, ports, airports, bridges, and the Nusantara Capital City (IKN). WIKA BETON's high-quality precast products have improved construction time and cost efficiency in various national projects. Additionally, its involvement in energy and transportation projects of high-speed trains, LRT lines, and smelter development, further strengthens its role in supporting national economic growth.

Untuk memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur, WIKA Beton membagi area pemasaran dan penjualannya ke dalam tujuh Wilayah Penjualan (WP), yang mencakup seluruh Indonesia serta ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Wilayah ini meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara, dan pasar luar negeri. Dengan cakupan luas ini, WIKA Beton memastikan distribusi produk yang lebih efektif serta meningkatkan aksesibilitas pelanggan di berbagai wilayah.

To ensure the equitable distribution of infrastructure development, WIKA Beton divided its marketing and sales areas into seven Sales Regions (WP), covering all of Indonesia and expanding into Southeast Asia. These regions include Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara, and international markets. With this broad coverage, WIKA Beton ensures more effective product distribution and improved customer accessibility across various regions.

2. **Inovasi dalam Teknologi Konstruksi dan Efisiensi Proyek**

   WIKA Beton terus mendorong efisiensi sektor konstruksi nasional melalui inovasi teknologi, yang meliputi beton modular pracetak dan digitalisasi konstruksi.

   a. **Pengembangan Teknologi Pracetak Modular**

      Perusahaan mengembangkan sistem modular pracetak yang memungkinkan pembangunan infrastruktur lebih fleksibel, cepat, dan berkualitas tinggi. Teknologi ini telah diterapkan dalam proyek perumahan, infrastruktur energi, serta gedung bertingkat, memberikan solusi konstruksi yang lebih efisien.

   b. **Integrasi Digitalisasi dan Teknologi Cerdas**

      WIKA Beton mengadopsi *Building Information Modeling* (BIM) dan sistem berbasis *Internet of Things* (IoT) untuk meningkatkan pengelolaan proyek serta efisiensi rantai pasok. Digitalisasi ini membantu kontraktor dan pengembang dalam mempercepat proses konstruksi, mengurangi pemborosan material, serta meningkatkan ketepatan waktu proyek.

      Perusahaan juga mengintegrasikan tiga aspek utama *Engineering*, Produksi, dan Instalasi, yang memungkinkan *operational excellence* dan efisiensi tinggi dalam seluruh lini bisnisnya.

3. **Kontribusi terhadap Keberlanjutan dan Industri Hijau**

   Sejalan dengan tren pembangunan berkelanjutan, WIKA Beton berperan dalam mengurangi dampak lingkungan sektor konstruksi dengan menerapkan standar industri hijau dan inovasi material ramah lingkungan.

2. **Innovation in Construction Technology and Project Efficiency**

   WIKA Beton continues to drive efficiency in the national construction sector through technological innovations, including precast modular concrete and construction digitalization.

   a. **Development of Modular Precast Technology**

      The company has developed a modular precast system for more flexible, faster, and high-quality infrastructure construction. This technology has been applied in housing projects, energy infrastructure, and high-rise buildings, providing more efficient construction solutions.

   b. **Integration of Digitalization and Smart Technology**

      WIKA Beton adopts Building Information Modeling (BIM) and Internet of Things (IoT)-based systems to improve project management and supply chain efficiency. This digitalization helps contractors and developers speed up the construction process, reduce material waste, and improve project timelines.

      The company also integrates three key aspects Engineering, Production, and Installation enabling operational excellence and high efficiency across all its business operations.

3. **Contribution to Sustainability and the Green Industry**

   In line with the trend of sustainable development, WIKA Beton plays a role in reducing the environmental impact of the construction sector by applying green industry standards and innovative eco-friendly materials.

a. **Pengembangan Beton Ramah Lingkungan**
WIKA Beton memperkenalkan Green Concrete, produk inovatif dengan jejak karbon lebih rendah, pemanfaatan bahan daur ulang, dan peningkatan ketahanan material. Beton ini mendukung proyek-proyek yang mengedepankan konsep *Green Building* dan *Net Zero Emission* 2030.

b. **Efisiensi Energi dan Pengurangan Emisi Karbon**
Perusahaan menerapkan sistem produksi ramah lingkungan, termasuk pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di fasilitas produksinya. Inisiatif ini membantu mengurangi konsumsi energi berbasis fosil dan mendukung komitmen Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi karbon.

Selain itu, WIKA Beton berkomitmen untuk menerapkan manajemen keuangan yang sehat dan akuntabel, serta memperkuat kerja sama strategis dengan mitra bisnis guna menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

a. **Development of Eco-Friendly Concrete**
WIKA Beton introduces Green Concrete, an innovative product with a lower carbon footprint, the use of recycled materials, and improved material durability. This concrete supports projects that focus on Green Building concepts and the Net Zero Emission goal for 2030.

b. **Energy Efficiency and Carbon Emission Reduction**
The company implements an environmentally friendly production system, including Solar Power Plant (PLTS) usage at its production facilities. This initiative helps reduce fossil fuel energy consumption and supports Indonesia's commitment to achieving carbon emission reduction targets.

Additionally, WIKA Beton is committed to applying sound and accountable financial management while strengthening strategic partnerships with business partners to create added value for all stakeholders.

Sepanjang tahun, WIKA Beton terus menunjukkan kontribusi yang kuat dalam industri konstruksi nasional. Dengan menyediakan beton pracetak berkualitas tinggi, mengadopsi teknologi modular dan digitalisasi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan, perusahaan berperan aktif dalam mempercepat pertumbuhan infrastruktur nasional. Dengan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, WIKA Beton semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin industri beton di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Throughout the year, WIKA Beton has continued to make a strong contribution to the national construction industry. By providing high-quality precast concrete, adopting modular technology and digitalization, and supporting sustainable development, the company plays an active role in accelerating national infrastructure growth. With an integrated and sustainable strategy, WIKA Beton strengthens its position as a leader in the concrete industry in Indonesia and Southeast Asia.

SASARAN MUTU PRODUKSI BETON

PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) berkomitmen untuk menjaga standar kualitas produk guna mendukung proyek-proyek infrastruktur dan konstruksi yang berkelanjutan. Sasaran mutu produksi beton difokuskan pada peningkatan kualitas, efisiensi produksi, inovasi teknologi, serta kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional.

Beberapa prinsip utama yang diyakini dapat memberikan keunggulan lebih dari teknologi ini meliputi waktu, biaya, kualitas, *predictability*, kehandalan, produktivitas, kesehatan, keselamatan, lingkungan, koordinasi, inovasi, *reusability*, dan *relocatability*. Dengan prinsip ini, pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas industri beton pracetak dan prategang nasional.

QUALITY TARGETS FOR CONCRETE PRODUCTION

PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) is committed to maintaining high product quality standards to support sustainable infrastructure and construction projects. The production quality goals for concrete focus on improving quality, production efficiency, technological innovation, and compliance with national and international standards.

Several key principles believed to provide a competitive advantage in this technology include time, cost, quality, predictability, reliability, productivity, health, safety, environment, coordination, innovation, reusability, and relatability. With these principles, the government continues the growth of the national precast and prestressed concrete industry.

1. Peningkatan Kualitas Produk

Untuk memastikan setiap produk memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan, WIKA Beton menerapkan:

a. Kepatuhan terhadap Standar Nasional dan Internasional, termasuk SNI, ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001 guna memastikan keamanan, ketahanan, dan performa optimal beton pracetak.
b. Optimalisasi Komposisi Material, dengan pemilihan agregat dan semen berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan kekuatan tekan dan daya tahan beton.
c. Penerapan Sistem *Quality Control* Berbasis Teknologi, seperti *Building Information Modeling* (BIM) dan *Internet of Things* (IoT) untuk meningkatkan akurasi produksi serta mengurangi potensi cacat produk.

Demi mencapai target produksi, Perseroan selalu menjamin bahwa produk beton pracetak memenuhi standar dan spesifikasi yang telah disepakati bersama pelanggan. Untuk memverifikasinya, Perseroan melaksanakan kontrol mutu yang ketat guna menghindari produk yang tidak lolos pengawasan kualitas. Upaya pencegahan terhadap masalah mutu juga telah diimplementasikan dengan mengidentifikasi potensi penyebab *reject* sebelum proses produksi dimulai.

Apabila terdapat produk yang tidak memenuhi standar, Perseroan akan segera mengambil langkah korektif dan menganalisis akar permasalahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan setiap bahan baku.

2. Efisiensi Produksi dan Optimalisasi Rantai Pasok

Untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan sumber daya, WIKA Beton menargetkan

a. Pengurangan Waste Material hingga 15% melalui sistem *recycling* dan pemanfaatan bahan baku daur ulang dalam produksi beton pracetak.
b. Peningkatan Efisiensi Waktu Produksi, dengan implementasi proses manufaktur otomatis dan digitalisasi produksi guna mempercepat waktu pengerjaan proyek tanpa mengurangi kualitas.

1. Product Quality Improvement

To ensure that each product meets the required technical specifications, WIKA Beton implements:

a. Compliance with National and International Standards, including SNI, ISO 9001, ISO 14001, and ISO 45001, to ensure the safety, durability, and optimal performance of precast concrete.
b. Optimization of Material Composition, by selecting high-quality aggregates and cement to enhance the compressive strength and durability of concrete.
c. Implementation of Technology-Based Quality Control Systems, such as Building Information Modeling (BIM) and the Internet of Things (IoT), to improve production accuracy and reduce the potential for p roduct defects.

To meet production targets, the company ensures that precast concrete products comply with the standards and specifications agreed upon by customers. To verify this, the company implements strict quality control to prevent products that do not meet quality standards. Preventive measures have also been taken by identifying potential causes of defects before the production process begins.

If any products do not meet the standards, the company will take immediate corrective action and analyze the root cause to prevent similar issues. These steps also aim to improve the efficiency of raw material usage.

2. Production Efficiency and Supply Chain Optimization

To improve productivity and reduce resource waste, WIKA Beton targets:

a. Reduction of Material Waste by up to 15% through recycling systems and the use of recycled raw materials in precast concrete production.
b. Improvement of Production Time Efficiency, by implementing automated manufacturing processes and production digitalization to speed up project completion without compromising quality.

c. Integrasi *Supply Chain* Berbasis Digital, yang memungkinkan pemantauan *real-time* bahan baku serta distribusi beton ke berbagai wilayah, meningkatkan ketepatan waktu pengiriman.

Sasaran mutu produksi beton yang telah ditetapkan oleh Perseroan mencakup:

a. Tingkat cacat produk beton dalam setahun tidak lebih dari 0,25%.
b. Tingkat gagal produk beton dalam setahun tidak lebih dari 0,1%.
c. Biaya kegagalan internal dan eksternal terhadap nilai produksi dalam setahun tidak boleh lebih dari 0,13%.
d. Nilai indeks kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction Index*) berdasarkan hasil survei dalam setahun tidak boleh kurang dari angka 4 atau nilai BAIK dari pelanggan.
e. *Score* QMSL (*Quality Management System Level*) tidak boleh kurang dari 820.
f. *Score* QPASS (*Quality Product Assessment System*) tidak boleh kurang dari 95.

3. Inovasi Produk dan Keberlanjutan
Untuk mendukung perkembangan industri konstruksi yang lebih ramah lingkungan, WIKA Beton menargetkan:

a. Pengembangan Produk Beton Ramah Lingkungan dengan mengurangi penggunaan semen berbasis karbon tinggi serta mengganti bahan baku dengan material berkelanjutan.
b. Implementasi Teknologi Beton Modular, yang memungkinkan produksi lebih efisien dan fleksibel sesuai kebutuhan proyek tanpa mengurangi kekuatan dan daya tahan.
c. Peningkatan Durabilitas Beton, dengan pengembangan beton pracetak tahan cuaca ekstrem dan lingkungan agresif, seperti proyek di area pesisir atau lingkungan industri berat.

4. Kepatuhan Terhadap Regulasi dan Keselamatan
Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, WIKA Beton memastikan:

a. Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dalam seluruh tahapan produksi untuk melindungi pekerja dan memastikan keselamatan operasional.

c. Integration of a Digital-Based Supply Chain, which allows real-time monitoring of raw materials and concrete distribution to various regions, improving delivery timeliness.

The production quality targets set by the company include:

a. The product defect rate for concrete in a year should not exceed 0.25%.
b. The product failure rate for concrete in a year should not exceed 0.1%.
c. The cost of internal and external failures in production value for the year should not exceed 0,13%.
d. The Customer Satisfaction Index (CSI) based on survey results for the year should not be less than 4 or a "Good" rating from customers.
e. The Quality Management System Level (QMSL) score should not be less than 820.
f. The Quality Product Assessment System (QPASS) score should not be less than 95.

3. Product Innovation and Sustainability
To support the development of a more environmentally friendly construction industry, WIKA Beton targets:

a. Development of Eco-Friendly Concrete Products by reducing the use of high-carbon cement and replacing raw materials with sustainable materials.
b. Implementation of Modular Concrete Technology, which enables more efficient and flexible production based on project needs without compromising strength and durability.
c. Improvement of Concrete Durability by developing precast concrete that can withstand extreme weather and aggressive environments, such as projects in coastal areas or heavy industrial environments.

4. Compliance with Regulations and Safety
As part of good corporate governance, WIKA Beton ensures:

a. The implementation of the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) at all stages of production to protect workers and ensure operational safety.

b. Kepatuhan terhadap Regulasi Lingkungan, dengan penerapan sistem produksi berbasis ISO 14001 guna mengurangi dampak lingkungan dari limbah produksi beton.
c. Audit dan Evaluasi Berkala, dengan menerapkan sistem pengukuran dan pelaporan berkala guna memastikan pencapaian sasaran mutu dan peningkatan berkelanjutan.

WIKA Beton menetapkan sasaran mutu produksi beton yang berorientasi pada kualitas unggul, efisiensi operasional, inovasi produk, serta kepatuhan terhadap regulasi dan aspek keberlanjutan. Dengan penerapan teknologi modern dan penguatan standar produksi, perusahaan berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

MANAJEMEN BAHAN BAKU

Sebagai produsen beton pracetak terkemuka di Indonesia, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) menerapkan strategi manajemen bahan baku yang terintegrasi guna memastikan ketersediaan material berkualitas tinggi, efisiensi rantai pasok, serta keberlanjutan operasional. Manajemen bahan baku yang efektif menjadi elemen krusial dalam mendukung target produksi dan kualitas produk sepanjang tahun.

1. **Standar Operasional dan Prinsip *Prudent* dalam Pengadaan Bahan Baku**
   Demi menjamin optimalitas harga dan mutu, WIKA Beton memproduksi beton sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) berbasis ISO 9001:2015. Dalam pemilihan dan pengadaan bahan baku, perusahaan menerapkan prinsip *prudent*, dengan mempertimbangkan ketelitian dan kebijaksanaan tinggi guna memastikan ketersediaan stok minimal yang memadai di setiap pabrik.

   Perseroan juga menyusun penyimpanan bahan baku berdasarkan SOP yang memperhitungkan tingkat keawetan, keamanan, serta sifat khusus dari setiap bahan baku. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat menjaga kualitas bahan baku hingga tahap produksi, sekaligus mengoptimalkan efisiensi biaya penyimpanan dan distribusi.

b. Compliance with Environmental Regulations, by applying an ISO 14001-based production system to reduce the environmental impact of concrete production waste.
c. Regular Audits and Evaluations, by implementing periodic measurement and reporting systems to ensure quality targets are met and continuous improvement is achieved.

WIKA Beton set production goals focused on superior quality, operational efficiency, product innovation, and compliance with regulations and sustainability standards. By implementing modern technology and strengthening production standards, the company is committed to supporting the development of more efficient, environmentally friendly, and sustainable infrastructure.

RAW MATERIAL MANAGEMENT

As a leading precast concrete manufacturer in Indonesia, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) implements an integrated raw material management strategy to ensure the availability of high-quality materials, supply chain efficiency, and operational sustainability. Effective raw material management is a crucial element in supporting production targets and product quality throughout the year.

1. **Operational Standards and Prudent Principles in Raw Material Procurement**
   To ensure optimal pricing and quality, WIKA Beton manufactures concrete following Standard Operating Procedures (SOP) based on ISO 9001:2015. In the selection and procurement of raw materials, the company applies prudent principles, considering careful planning and high discretion to ensure sufficient minimum stock availability at each factory.

   The company also organizes raw material storage based on SOPs that account for durability, safety, and the specific properties of each material. This approach allows the company to maintain raw material quality throughout the production process while optimizing storage and distribution cost efficiency.

2. Efisiensi Rantai Pasok dan Diversifikasi Vendor

Untuk memastikan kesinambungan produksi, WIKA Beton menjalin kerja sama dengan berbagai pemasok/vendor yang telah melewati tahapan seleksi ketat berdasarkan kinerja, mutu, waktu pengiriman, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3L), serta konsistensi pasokan. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari ketergantungan pada satu pemasok tunggal serta menjaga stabilitas suplai bahan baku di seluruh pabrik Perseroan.

Sebagai bagian dari WIKA Group, WIKA Beton tetap memprioritaskan pasokan dari jaringan internal dengan mempertimbangkan kewajaran transaksi dan efisiensi biaya. Sementara itu, diversifikasi pemasok dilakukan guna memastikan stabilitas harga dan kualitas bahan baku di tengah dinamika pasar.

3. Optimalisasi Penggunaan dan Keberlanjutan Material

Dalam mendukung efisiensi dan keberlanjutan, WIKA Beton menerapkan sistem manajemen stok berbasis digital untuk pemantauan bahan baku secara *real-time*. Upaya ini mencakup:

a. Optimalisasi perencanaan pengadaan bahan baku guna memastikan ketersediaan material yang cukup tanpa terjadi kelebihan stok atau kekurangan pasokan.
b. Pemanfaatan material ramah lingkungan, termasuk agregat daur ulang, fly ash, dan slag guna mengurangi dampak lingkungan serta mendukung target *Net Zero Emission* 2030.
c. Implementasi sistem pengelolaan air sirkular, dengan mendaur ulang air limbah produksi untuk digunakan kembali dalam pencampuran beton dan pendinginan mesin.

Dengan kebijakan ini, WIKA Beton tidak hanya memastikan efisiensi operasional tetapi juga meningkatkan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan nasional dan internasional.

Persyaratan teknis untuk bahan baku utama yang Perseroan gunakan dalam proses produksi adalah sebagai berikut:

2. Supply Chain Efficiency and Vendor Diversification

To ensure production continuity, WIKA Beton collaborates with various suppliers/vendors who have passed a rigorous selection process based on performance, quality, delivery times, Occupational Health and Safety (OHS), and supply consistency. This policy aims to avoid reliance on a single supplier and maintain a stable supply of raw materials across all company factories.

As part of the WIKA Group, WIKA Beton continues to prioritize supply from its internal network, considering fair transactions and cost efficiency. Meanwhile, supplier diversification is carried out to ensure the stability of raw material prices and quality amidst market dynamics.

3. Optimization of Material Use and Sustainability

To support efficiency and sustainability, WIKA Beton implements a digital stock management system for real-time monitoring of raw materials. This effort includes:

a. Optimization of raw material procurement planning to ensure adequate material availability without overstocking or supply shortages.
b. Use eco-friendly materials, including recycled aggregates, fly ash, and slag, to reduce environmental impact and support the Net Zero Emission 2030 target.
c. Implementation of a circular water management system, by recycling production wastewater for reuse in concrete mixing and machine cooling.

With this policy, WIKA Beton not only ensures operational efficiency but also enhances compliance with national and international sustainability standards.

The technical requirements for the main raw materials used by the Company in the production process are as follows:

No	Hal Subject	Referensi Reference	Deskripsi Description	Spesifikasi Specification
1	*Aggregate*	SNI 8321:2016 ASTM C33-2003	*Standard Specification for Concrete Aggregates*	-
2	*Cement*	SNI 2049:2015 SNI 7064:2014	*Portland Cement, Portland Cement Composite*	*Standard Product Type I* *Special Order: Type II or V*
3	*Admixture*	ASTM C494/C494M-99a ASTM C494-2005	*Standard Specification for Chemical Admixture for Concrete*	*Type F: High Range Water Reducing Admixture*
4	*Concrete*	SNI 2834:2000 SNI 2493:2011 SNI 6880:2016	*Concrete Mix Design Making and Curing Concrete Sample, Structural Concrete Specification*	-
5	*PC Strand*	SNI 1154:2016	*Standard Specification for Steel Strand Uncoated Seven-Wire for Prestressed Concrete*	*Grade 270 (Low Relaxation Type) KBjP-P7 RB*
6	*PC Wire*	SNI 1155:2016	*Uncoated Stress-Relieved Steel Wires and Strands for Prestressed Concrete*	*SWPD 1 (Deformed Wire Type) KBjP-N*
7	*PC Bar*	SNI 7701:2016	*Small Size-Deformed Steel Bars for Prestressed Concrete*	*Grade D-Class 1-SBPD 1275/1420 KBjP-Q NI*
8	*Rebar*	SNI 2052:2017	*Reinforcement Steel for Concrete*	*Steel Class: BjTS 420 A/B (Deformed)* *Steel Class: BjTP 280 (Round)*
9	*Spiral Wire*	JIS G 3532:2011	*Low Carbon Steel Wires*	*SWM-P (Round Type Cold-reduced steel wire for the reinforcement of concrete and the manufacture of welded fabric)*
10	*Joint Plate*	JIS G 3101:2004	*Rolled Steels for General Structure*	*SS400 (Tensile Strength 400 N/mm²), Applicable steel product for steel plates and sheets, steel strip in coil, sections, flats and bars*
11	*Welding*	ANSI/AWS D1.1:201	*Structural Welding Code Steel*	*Structural Welding Code Steel AW A5.1/E6013 NIKKO STEEL RB 26/ RD 260, LION 26, or equivalent*

STRATEGI BISNIS TAHUN 2025
BUSINESS STRATEGY IN 2025

PT Wijaya Karya Beton Tbk menetapkan strategi bisnis tahun 2025 untuk menjaga pertumbuhan yang selektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat ketahanan finansial di tengah dinamika industri precast serta ketidakpastian eksternal. Perusahaan menjalankan strategi tersebut melalui penguatan ketahanan komersial, pengendalian biaya end-to-end, akselerasi digitalisasi, integrasi ESG dan TJSL berbasis nilai, serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko agar eksekusi berjalan konsisten dan terukur.

1. **Pertumbuhan dan Ketahanan Komersial**
   Perusahaan mengarahkan pertumbuhan tahun 2025 melalui ekspansi pasar domestik dan regional serta pengelolaan portofolio pelanggan dan sektor secara lebih disiplin. Unit komersial mengedepankan fokus pelanggan (*customer focus*) untuk meningkatkan relevansi solusi, mempercepat respons, dan memperbaiki kepastian pemenuhan kebutuhan pelanggan, sehingga peluang penjualan dapat ditangkap lebih efektif dan risiko kehilangan pasar dapat ditekan.

PT Wijaya Karya Beton Tbk has established its 2025 business strategy to maintain selective growth, improve operational efficiency, and strengthen financial resilience amid the dynamics of the precast industry and external uncertainties. The Company is implementing this strategy through strengthening commercial resilience, end-to-end cost control, accelerating digitalization, integrating value-based ESG and TJSL, as well as strengthening governance and risk management to ensure consistent and measurable execution.

1. **Growth and Commercial Resilience**
   The Company is steering its 2025 growth through domestic and regional market expansion as well as more disciplined management of its customer and sector portfolios. The commercial unit prioritizes customer focus to enhance the relevance of solutions, accelerate response times, and improve the certainty of meeting customer needs, thereby enabling sales opportunities to be captured more effectively and reducing the risk of market loss.

2. **Efisiensi Operasional dan Penguatan Margin**
Operasi produksi dan rantai pasok menjalankan efisiensi berkelanjutan melalui digitalisasi rantai pasok (*supply chain*), penerapan pemeliharaan prediktif (*predictive maintenance*), serta pemantauan biaya produksi secara real-time untuk menutup celah pemborosan dan memperkuat kontrol biaya. Integrasi ERP difungsikan sebagai pengungkit transparansi proses end-to-end agar perencanaan, pengadaan, produksi, logistik, dan pengendalian biaya bergerak dalam satu sumber data yang konsisten.

3. **Inovasi Produk dan Keunggulan Kerekayasaan**
Fungsi engineering memperkuat daya saing melalui penyelesaian desain produk/proyek beserta metode instalasi sesuai target waktu agar desain yang kompetitif dapat dihasilkan. Laboratorium mendukung kebutuhan pelanggan melalui kegiatan pengujian sesuai spesifikasi, sedangkan program rekayasa nilai (*value engineering*) diterapkan pada produk dan proses untuk menghasilkan *output* yang lebih efisien. Standardisasi dan sertifikasi produk dijalankan untuk memastikan kesesuaian spesifikasi terhadap persyaratan pelanggan serta memperkuat kepercayaan pasar.

4. **Transformasi Digital, Analitik, dan Tata Kelola TI**

Kapabilitas TI diarahkan untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis data melalui pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data yang lebih andal. Asesmen kematangan TI (*IT maturity*) digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas pengembangan, peta jalan kapabilitas, dan disiplin investasi teknologi agar layanan TI mendukung strategi bisnis secara terukur. Pemanfaatan perangkat lunak *engineering* (*software engineering*) diposisikan sebagai pendukung aktivitas keteknikan untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan konsistensi *output*.

5. **ESG dan Keberlanjutan sebagai Penguat Ketahanan Usaha**
Penerapan prinsip ESG ditempatkan sebagai strategi bisnis untuk memperkuat ketahanan finansial melalui efisiensi energi dan sumber daya, pengurangan limbah, serta penguatan tata kelola yang transparan. Implementasi *green factory* dan *circular economy* diarahkan untuk menurunkan paparan risiko lingkungan dan regulasi sekaligus meningkatkan daya saing pada segmen pasar yang semakin sensitif terhadap kinerja keberlanjutan.

2. **Operational Efficiency and Margin Enhancement**
Production operations and the supply chain drive continuous efficiency through supply chain digitization, the implementation of predictive maintenance, and real-time monitoring of production costs to eliminate waste and strengthen cost control. ERP integration serves as a lever for end-to-end process transparency, ensuring that planning, procurement, production, logistic, and cost control operate within a single, consistent data source.

3. **Product Innovation and Engineering Excellence**
The engineering function enhances competitiveness by completing product/project designs and installation methods within target timelines to produce competitive designs. Laboratories support customer needs through testing activities in accordance with specifications, while value engineering programs are applied to products and processes to generate more efficient outputs. Product standardization and certification are implemented to ensure compliance with customer requirements and strengthen market confidence.

4. **Digital Transformation, Analytics, and IT Governance**
IT capabilities are focused on strengthening data-driven decision-making through more reliable data collection, storage, and analysis. IT maturity assessments are used as the basis for setting development priorities, capability roadmaps, and technology investment discipline so that IT services support business strategies in a measurable way. The use of software engineering is positioned as a support for engineering activities to improve the accuracy, speed, and consistency of output.

5. **ESG and Sustainability as Drivers of Business Resilience**
The application of ESG principles is positioned as a business strategy to strengthen financial resilience through energy and resource efficiency, waste reduction, and the reinforcement of transparent governance. The implementation of green factories and the circular economy is aimed at reducing exposure to environmental and regulatory risks while enhancing competitiveness in market segments that are increasingly sensitive to sustainability performance.

6. **TJSL dan *Creating Shared Value***

   Program TJSL diposisikan sebagai bagian dari strategi bisnis melalui rujukan ISO 26000, GRI, POJK 51/2017, SEOJK 16/2021, serta SDGs. Pendekatan *Creating Shared Value* digunakan untuk mengintegrasikan inisiatif sosial dan lingkungan ke proses bisnis inti agar manfaat bagi masyarakat dan manfaat bisnis dapat tercipta secara simultan. Pengukuran dampak berbasis data diterapkan untuk memastikan pelaksanaan program dapat ditelusuri, dievaluasi, dan ditingkatkan secara objektif.

7. **Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Disiplin Keputusan**

   Sistem manajemen risiko diterapkan sebagai bagian integral strategi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani ketidakpastian internal maupun eksternal yang dapat menghambat target. Analisis PESTLE digunakan untuk memetakan peluang dan tantangan eksternal sebagai dasar strategi yang adaptif dan resilien. Mekanisme four-eyes principle dan check and balance diterapkan dalam pengambilan keputusan, sedangkan uji tuntas (*due diligence*) mitra kerja sama serta pengawasan melalui SPI diperkuat untuk menjaga kredibilitas, kepatuhan, dan kualitas mitigasi risiko.

8. **Ketahanan Keuangan, Arus Kas, dan Kelincahan Organisasi**

   Arus kas operasi diperkuat melalui perbaikan penagihan piutang (*collection*) untuk menjaga likuiditas dan menekan risiko keuangan. Restrukturisasi organisasi dijalankan untuk membentuk organisasi yang lebih lincah agar peluang pasar dapat ditangkap lebih cepat dan eksekusi dapat dilakukan lebih efisien. Evaluasi strategis atas kinerja 2025 digunakan untuk menajamkan perbaikan pada efisiensi operasional berbasis digital, penguatan arus kas, serta penyederhanaan struktur kerja agar efektivitas implementasi strategi meningkat.

Kinerja WIKA Beton menunjukkan bahwa perusahaan masih menjaga pertumbuhan positif pada sektor-sektor inti. Perusahaan menempatkan agenda perbaikan pada pengendalian biaya yang lebih disiplin, penguatan likuiditas berbasis kualitas arus kas, serta pembentukan organisasi yang lebih agile agar ketahanan usaha dan kapasitas eksekusi meningkat pada periode berikutnya.

6. **CSR and Creating Shared Value**

   The CSR program is positioned as part of the business strategy in accordance with ISO 26000, GRI, POJK 51/2017, SEOJK 16/2021, and the SDGs. The Creating Shared Value approach is used to integrate social and environmental initiatives into core business processes so that benefits for society and business can be created simultaneously. Data-driven impact measurement is applied to ensure that program implementation can be tracked, evaluated, and improved objectively.

7. **Governance, Risk Management, and Decision-Making Discipline**

   A risk management system is implemented as an integral part of the strategy to identify, analyze, and address internal and external uncertainties that could hinder objectives. PESTLE analysis is used to map external opportunities and challenges as the basis for an adaptive and resilient strategy. The four-eyes principle and checks and balances are applied in decision-making, while due diligence of partners and oversight through the SPI are strengthened to maintain credibility, compliance, and the quality of risk mitigation.

8. **Financial Resilience, Cash Flow, and Organizational Agility**

   Operating cash flow is strengthened through improved accounts receivable collection to maintain liquidity and mitigate financial risk. Organizational restructuring is being implemented to create a more agile organization so that market opportunities can be seized more quickly and executed more efficiently. A strategic evaluation of 2025 performance is used to refine improvements in digital-based operational efficiency, strengthen cash flow, and simplify work structures to enhance the effectiveness of strategy implementation.

WIKA Beton's performance indicates that the company continues to maintain positive growth in its core sectors. The company has prioritized initiatives focused on more disciplined cost control, strengthening liquidity through improved cash flow quality, and building a more agile organization to enhance business resilience and execution capacity in the coming period.

Kinerja Operasi Per Segmen Usaha
Performance Review Per Business Segment

Perseroan mengoperasikan bisnisnya melalui tiga segmen usaha utama, yakni Segmen Beton, Segmen *Quarry*, dan Segmen Jasa. Kegiatan inti Perseroan terfokus pada Segmen Beton yang bertanggung jawab atas produksi beton pracetak dan *Ready Mix*. Sementara itu, Segmen *Quarry*, sebagai bagian dari strategi *backward* dalam proses produksi beton, melibatkan kegiatan penambangan dan produksi material seperti split, screen, dan sebagainya melalui tiga *Crushing Plant* yang dimiliki oleh Perseroan. Di sisi lain, Segmen Jasa, sebagai bagian dari strategi *forward* Perseroan, menawarkan jasa layanan untuk menunjang bisnis Perseroan.

The Company operates its business through three main business segments: the Concrete Segment, the Quarry Segment, and the Services Segment. The Company's core activities focus on the Concrete Segment, which is responsible for the production of precast concrete and Ready Mix. Meanwhile, the Quarry Segment, as part of a backward integration strategy in the concrete production process, involves mining and producing materials such as split, screen, and others through the Company's three Crushing Plants. On the other hand, the Services Segment, as part of the Company's forward integration strategy, offers service solutions to support the Company's business.

Perseroan secara rutin mengevaluasi kinerja masing-masing segmen guna mencapai pengelolaan sumber daya yang optimal. Hasil evaluasi tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan pedoman PSAK 5 (Penyesuaian 2015) mengenai Segmen Operasi.

The Company regularly evaluates the performance of each segment to achieve optimal resource management. The results of this evaluation are reflected in the Company's Financial Statements, which have been audited by Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner in accordance with PSAK 5 (2015 Adjustment) regarding Operating Segments.

Pada tahun 2025, analisis kinerja tiap segmen usaha Perseroan, terutama yang terkait dengan aspek produksi seperti proses, kapasitas, perkembangan, pendapatan, dan profitabilitas, akan diuraikan secara rinci melalui penjabaran sebagai berikut:

In 2025, the performance analysis of each business segment, particularly related to production aspects such as processes, capacity, developments, revenue, and profitability, will be elaborated in detail as follows:

1. SEGMEN USAHA BETON

Dua kegiatan produksi utama yang dijalankan oleh Segmen Usaha Beton mencakup Beton Pracetak dan Beton *Ready Mix*.

A. Beton Pracetak

Perseroan memproduksi Beton Pracetak yang mencakup dua varian, yaitu beton pracetak putar dan beton pracetak non-putar. Untuk beton pracetak putar, proses produksinya mencakup persiapan cetakan, penulangan, pengecoran, penarikan tulangan baja prategang, dan pemadatan menggunakan sistem putar (*spinning*). Sementara itu, beton pracetak non-putar diproduksi melalui tahapan persiapan cetakan, penulangan, pengecoran, dan pemadatan menggunakan metode vibrasi (dengan vibrator eksternal atau internal).

1. CONCRETE BUSINESS SEGMENT

The two main production activities carried out by the Concrete Business Segment include Precast Concrete and Ready-Mix Concrete.

A. Precast Concrete

The Company produces Precast Concrete in two variants: spun precast concrete and non-spun precast concrete. For spun precast concrete, the production process includes mold preparation, reinforcement, casting, prestressed steel tendon tensioning, and compaction using a spinning system. Meanwhile, non-spun precast concrete is produced through mold preparation, reinforcement, casting, and compaction using vibration methods (with external or internal vibrators).

a. Beton Pracetak Putar

Dengan menggunakan metode pemadatan beton yang mengandalkan sistem putaran mesin spinning, Perseroan memproduksi beton pracetak putar. Produk beton pracetak yang dihasilkan oleh sistem ini meliputi:

- Tiang Beton, meliputi tiang listrik distribusi, tiang listrik transmisi, tiang telepon, tiang listrik jalan rel, dan tiang lampu;
- Tiang Pancang meliputi, tiang pancang bulat berongga, tiang pancang kotak berongga, dan cylinder pile;
- Dinding penahan tanah meliputi PC wall.

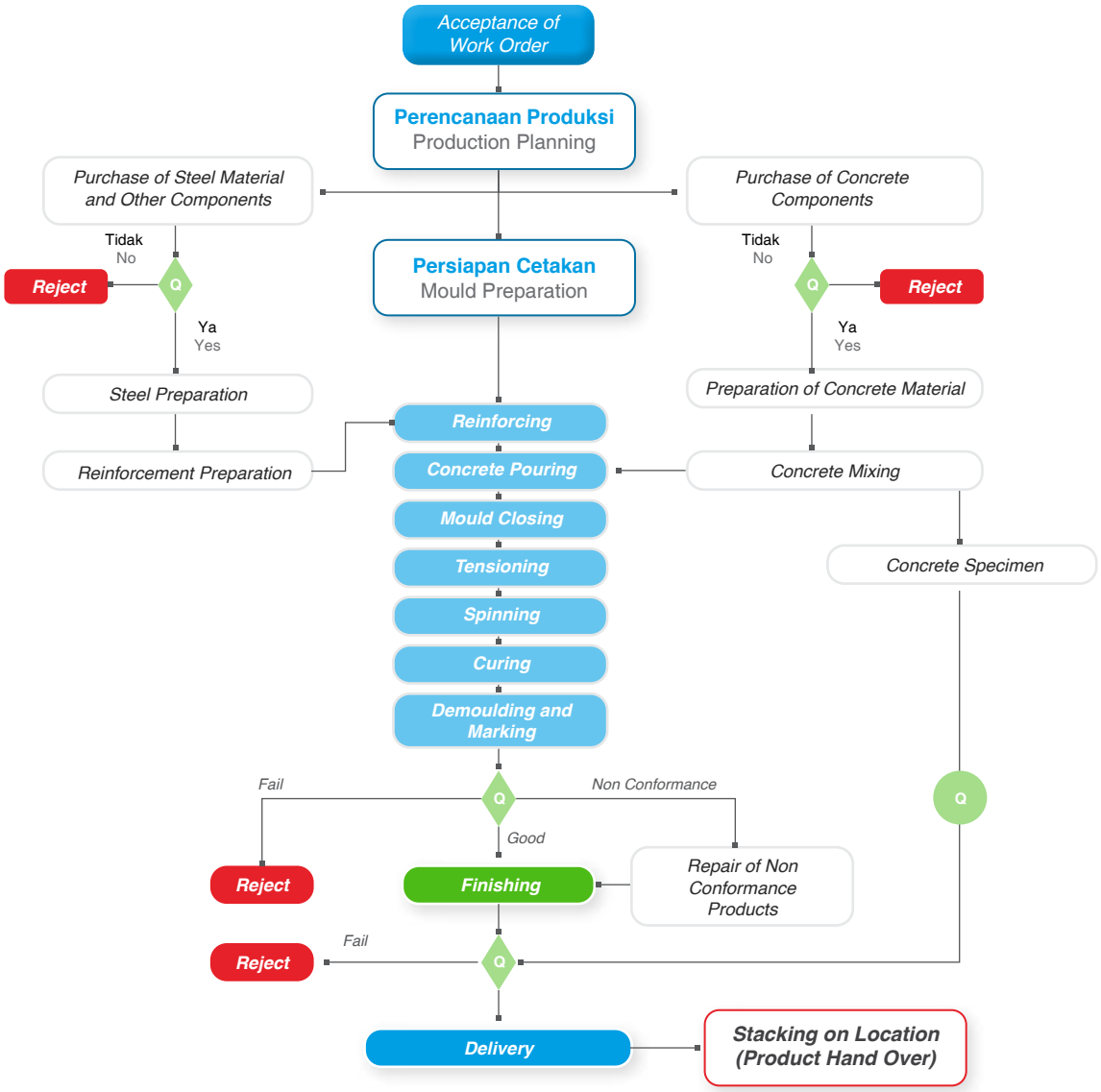
a. Spun Precast Concrete

Using a concrete compaction method that relies on a spinning machine system, the Company produces spun precast concrete. The precast concrete products manufactured through this system include:

- Concrete Poles, including distribution power poles, transmission power poles, telephone poles, railway power poles, and streetlight poles.
- Piles, including hollow round piles, hollow square piles, and cylinder piles.
- Retaining Walls, including PC walls.

Alur Proses Produksi Beton Pracetak Putar

Plot Production of Centrifugal Precast Concrete



b. Beton Pracetak Non-Putar

Metode pemadatan beton pada beton pracetak non-putar dilakukan melalui penggetaran/ vibrasi, baik itu secara internal, eksternal, atau kombinasi keduanya. Dengan menerapkan sistem ini, produk beton pracetak non-putar dapat dihasilkan dalam bentuk sebagai berikut:

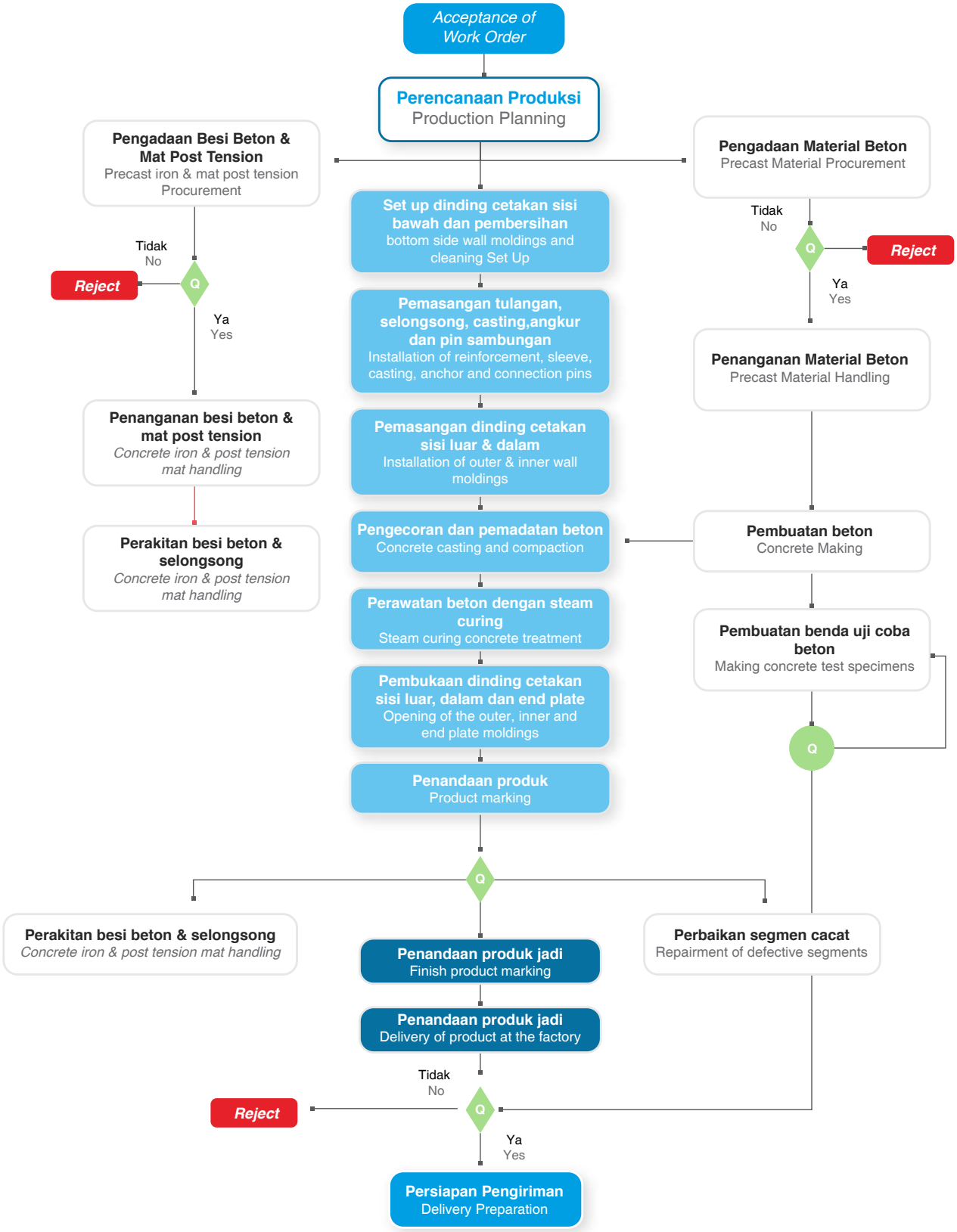
b. Non-Spun Precast Concrete

The compaction method for non-spun precast concrete is carried out through vibration, either internally, externally, or a combination of both. By applying this system, non-spun precast concrete products can be produced in the following forms:

Tiang Pancang PC Piles	• Tiang Pancang Segi Empat Masif | PC Square Pile • Tiang Pancang Segitiga | PC Triangular Pile
Bantalan Jalan Rel Railway Concrete Product	• Bantalan Jalan Rel | PC Sleepers • Bantalan Wessel | PC Turnout Sleepers • Perlintasan Sebidang Jalan Kereta Api | Concrete Level Crossing • Plat Beton Jalan Rel | Slab Track
Balok Jembatan Bridge Concrete Product	• Girder (I Girder, U Girder, Bulb Tee Girder, dan Box Girder) • Voided Slab • Double Tee • Full Depth Slab • Half Slab • Channel Girder
Dinding Penahan Tanah Retaining Wall Concrete Product	• Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) • Flat Prestressed Concrete Sheet Pile (FCSP) • Flat Reinforced Concrete Sheet Pile (FRC Sheet Pile)
Produk Beton Maritim Marine Structure Concrete Product	• Breakwater (Tetrapod, A-Jack) • Komponen Dermaga | Dock Component
Hydro Structure Concrete Product	• RC Cylinder Pipes • Reinforced Box Culvert • Reinforced U-ditch • Sabodam modular • Sumur Resapan | Precast Concrete Infiltration Well
Produk Beton Bangunan Gedung Building Construction Concrete Product	• Dinding Pracetak | Precast Wall • Hollow Core Slab • Plat lantai, Kolom, Balok, Tangga | Concrete Slab, Column, Beams Ladders • Rumah WIKA Beton |WIKA Beton House
Produk Beton Lainnya Other Concrete Product	• Precast Concrete Aquapond

Alur Proses Produksi Beton Pracetak Non-Putar

Plot Production of Non-Centrifugal Precast Concrete



B. Beton *Ready Mix*

Dalam mendiversifikasi produk guna mendukung berbagai proyek pembangunan infrastruktur, Perseroan juga menghasilkan *Ready Mix Concrete* sebagai bagian dari unit bisnisnya. Unit bisnis ini telah dibentuk untuk melengkapi produksi Beton Pracetak dengan menggunakan metode *mobile plant*, seperti *mobile plant* yang memproduksi berbagai jenis beton pracetak, termasuk tetrapod, U-Ditch, concrete barrier, dan produk beton lainnya yang bersifat *nonstressing*.

Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi alternatif terhadap metode *stationary plant* yang sudah dikembangkan sebelumnya. *Ready Mix*, sebagai produknya, dikembangkan dengan dukungan tenaga kerja profesional dan peralatan produksi yang mengadopsi teknologi terkini. Perseroan memasarkan *Ready Mix* dengan harga yang kompetitif, sehingga dapat hadir sebagai solusi pemenuhan kebutuhan beton di seluruh Indonesia.

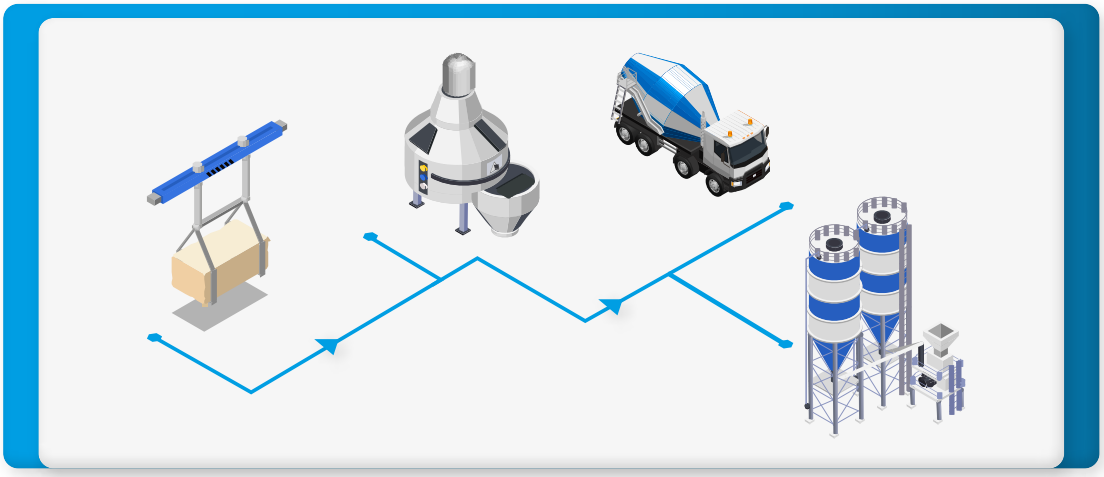
Berikut adalah langkah-langkah dalam proses produksi Ready Mix:

B. Ready-Mix Concrete

To diversify its products and support various infrastructure development projects, the Company also produces Ready-Mix Concrete as part of its business unit. This business unit has been established to complement Precast Concrete production by utilizing a mobile plant method, such as mobile plants that produce various types of precast concrete, including tetrapods, U-ditches, concrete barriers, and other non-stressing concrete products.

This approach is expected to serve as an alternative to the previously developed stationary plant method. Ready-Mix, as the product, is developed with the support of professional labor and production equipment that adopts the latest technology. The Company markets Ready-Mix at competitive prices, ensuring it serves as a concrete supply solution throughout Indonesia.

Below are the steps in the Ready-Mix production process:



Keterangan:
Description:
Material *Weighing*: Proses penimbangan material alam dari bin material.
Material Weighing: The process of weighing natural materials from the material bin.
Material *Loading*: Proses loading material dari bin material ke mesin mixer.
Material Loading: The process of loading materials from the material bin into the mixer machine.
Concrete *Mixing*: Proses mixing semua material Pasir, Split, Semen, Air dan Additive menggunakan mesin mixer.
Concrete Mixing: Mixing all materials sand, gravel, cement, water, and additives using a mixer machine.
Concrete *Loading*: Proses pengangkutan Beton Ready Mix hasil mixing dengan menggunakan truck mixer.
Concrete Loading: The process of transporting ready-mix concrete, produced from mixing, using a mixer truck.

Strategi Segmen Beton Tahun 2025

Berikut adalah beberapa kebijakan strategis yang diterapkan oleh Segmen Beton pada tahun 2025 untuk meningkatkan kinerja produksi dan produktivitasnya:

1. Kegiatan produksi yang berwawasan lingkungan dengan menggunakan energi terbarukan melalui penggunaan solar cell;
2. Penguatan SDM dalam industri beton pracetak melalui pelatihan soft skill dan hard skill;
3. Inovasi berbasis value engineering dan/atau IT dalam Quality Excellence Activity, pengaplikasian AI Productivity berupa VI (Vision Intelligence), Load Scanner;
4. Fleksibilitas jalur produksi dengan membangun sarana dan prasarana jalur produksi pipa centrifugal.

Concrete Segment Strategy for 2025

The following are several strategic policies implemented by the Concrete Segment in 2025 to enhance production performance and productivity:

1. Environmentally Friendly Production Activities by utilizing renewable energy through the use of solar cells.
2. Strengthening Human Resources in the precast concrete industry through soft skills and hard skills training.
3. Innovation Based on Value Engineering and/or IT in Quality Excellence Activities, including the application of AI Productivity such as Vision Intelligence (VI) and Load Scanner.
4. Production Line Flexibility by developing facilities and infrastructure for the centrifugal pipe production line.

Kapasitas Produksi Segmen Beton (dalam satuan ton)
Production Capacity of Concrete Segment (in tonnage)

Kapasitas Produksi Production Capacity	2025	2024	2023(*)	2022	2021
Beton Pracetak Precast Concrete	4.782.500	5.078.250	5.014.500	5.406.000	4.660.000
Beton Ready Mix Ready-Mix Concrete	6.142.205	5.415.872	5.242.961	4.688.071	3.258.077
Jumlah **Total**	**10.924.705**	**10.494.122**	**10.257.461**	**10.094.071**	**7.918.077**

Catatan I Note:
(*) Terdapat penyesuaian pada tahun 2023 untuk konsistensi dalam pelaporan kapasitas produksi Ready Mix.
(*) There was an adjustment in 2023 for consistency in reporting the Ready Mix production capacity.

Pada tahun 2025, kapasitas produksi Segmen Beton tercatat sebesar 10,92 juta ton, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 10,49 juta ton. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kesiapan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan pasar, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur di berbagai wilayah.

In 2025, the Concrete Segment production capacity reached 10.92 million tons, an increase from 10.49 million tons in 2024. This growth reflects the Company's improved readiness to meet market demand, particularly for infrastructure projects.

Kapasitas beton pracetak pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,78 juta ton, sedikit menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,08 juta ton. Penurunan ini sejalan dengan penyesuaian komposisi produksi terhadap kebutuhan proyek. Sementara itu, kapasitas beton ready-mix mengalami peningkatan menjadi 6,14 juta ton dari 5,42 juta ton pada tahun 2024, seiring meningkatnya kebutuhan beton cor di berbagai proyek konstruksi.

Precast concrete capacity was recorded at 4.78 million tons, slightly lower than 5.08 million tons in 2024, reflecting adjustments in production mix. Meanwhile, ready-mix concrete capacity increased to 6.14 million tons from 5.42 million tons in 2024, driven by higher demand across construction projects.

Secara keseluruhan, peningkatan kapasitas produksi pada tahun 2025 menunjukkan fleksibilitas Perseroan dalam mengoptimalkan lini produksi antara beton pracetak dan ready-mix guna menjaga keseimbangan permintaan pasar serta meningkatkan utilisasi fasilitas produksi.

Overall, the increase in total production capacity in 2025 demonstrates the Company's flexibility in optimizing production lines between precast and ready-mix concrete while maintaining utilization efficiency.

Pendapatan Segmen Beton Tahun 2024-2025
Revenues of Concrete Business Segment in 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025		2024	Pertumbuhan/(Penurunan) Growth/(Decrease)	
	Jumlah Pendapatan Total Revenue	Kontribusi Terhadap Jumlah Pendapatan Konsolidasian Contribution to Total Consolidated Revenues		(Rp)	(%)
Pendapatan Beton Concrete Revenue	3.100.577	63,33%	4.249.965	(1.149.388)	(27,04)

Pada tahun 2025, pendapatan Segmen Beton tercatat sebesar Rp3,10 triliun, menurun sebesar Rp1,15 triliun atau 27,04% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp4,25 triliun. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya volume proyek serta penyesuaian strategi penjualan pada beberapa wilayah operasional.

In 2025, revenue from the Concrete Segment was Rp3.10 trillion, decreasing by Rp1.15 trillion or 27.04% compared to Rp4.25 trillion in 2024. The decline was in line with reduced project volumes and adjustments in sales strategies across several operational regions.

Meskipun mengalami penurunan, Segmen Beton tetap menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan dengan kontribusi sebesar 63,33%, menunjukkan peran strategis segmen ini dalam struktur bisnis Perseroan.

Despite the decrease, the Concrete Segment remained the largest contributor to consolidated revenue, accounting for 63.33%, highlighting its strategic role in the Company's business structure.

Profitabilitas Segmen Beton Tahun 2024-2025
Profitability of Concrete Business Segment in 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Segmen Operasi Beton Concrete Segment	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Decrease	
			Nominal	%
Penjualan Bersih Net Sales	3.100.577	4.249.965	(1.149.388)	(27,04)
Beban Pokok Penjualan Cost Of Revenues	(2.878.443)	(3.928.222)	1.049.779	(26,72)
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Income for the year	3.564	54.283	(50.719)	(93,43)

Pada tahun 2025, penjualan bersih Segmen Beton tercatat sebesar Rp3,10 triliun, menurun 27,04% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4,25 triliun. Beban pokok penjualan turut menurun sebesar 26,72% menjadi Rp2,88 triliun dari Rp3,93 triliun pada tahun sebelumnya, mencerminkan upaya efisiensi biaya yang dilakukan Perseroan.

In 2025, net sales of the Concrete Segment reached Rp3.10 trillion, decreasing by 27.04% from Rp4.25 trillion in 2024. Cost of revenues also declined by 26.72% to Rp2.88 trillion from Rp3.93 trillion, reflecting cost efficiency initiatives.

Seiring dengan penurunan penjualan tersebut, laba bersih Segmen Beton turun signifikan menjadi Rp3,56 miliar, dibandingkan Rp54,28 miliar pada tahun 2024 atau menurun sebesar 93,43%. Penurunan ini menunjukkan bahwa penurunan volume penjualan tidak sepenuhnya dapat diimbangi oleh efisiensi biaya, sehingga memberikan tekanan terhadap profitabilitas Segmen Beton.

In line with the decline in sales, net income of the Concrete Segment decreased significantly to Rp3.56 billion, compared to Rp54.28 billion in 2024, representing a decline of 93.43%. This decrease indicates that the reduction in sales volume was not fully offset by cost efficiencies, resulting in pressure on the profitability of the Concrete Segment.

2. **SEGMEN USAHA QUARRY**

Melalui Segmen Usaha *Quarry*, Perseroan menjalankan kegiatan produksi yang mencakup kegiatan penambangan batu andesit untuk memproduksi material split, screening, abu batu dan turunannya. Produksi dilakukan melalui 3 (tiga) *Crushing Plant* Perseroan, yaitu:

1. *Crushing Plant* Bogor;
2. *Crushing Plant* Lampung Selatan;
3. *Crushing Plant* Donggala.

Dibentuk untuk mendukung bisnis di sektor hulu industri Pracetak Beton dan konstruksi, *Crushing Plant* menghasilkan produk yang bertujuan memenuhi kebutuhan material alam, seperti batu mineral alam yang dipecah menjadi batu split (dengan ukuran 1-2 dan 2-3 cm), screening, abu batu, dan material untuk kebutuhan pondasi jalan raya seperti agregat (kelas A dan kelas B).

Crushing Plant Perseroan dapat menghasilkan produk yang seragam dan kubikal. Guna mengoptimalkan potensi, Perseroan menambah fasilitas laboratorium agregat dan pelabuhan, seperti yang dilakukan di *Crushing Plant* Lampung Selatan, sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih besar di seluruh Indonesia.

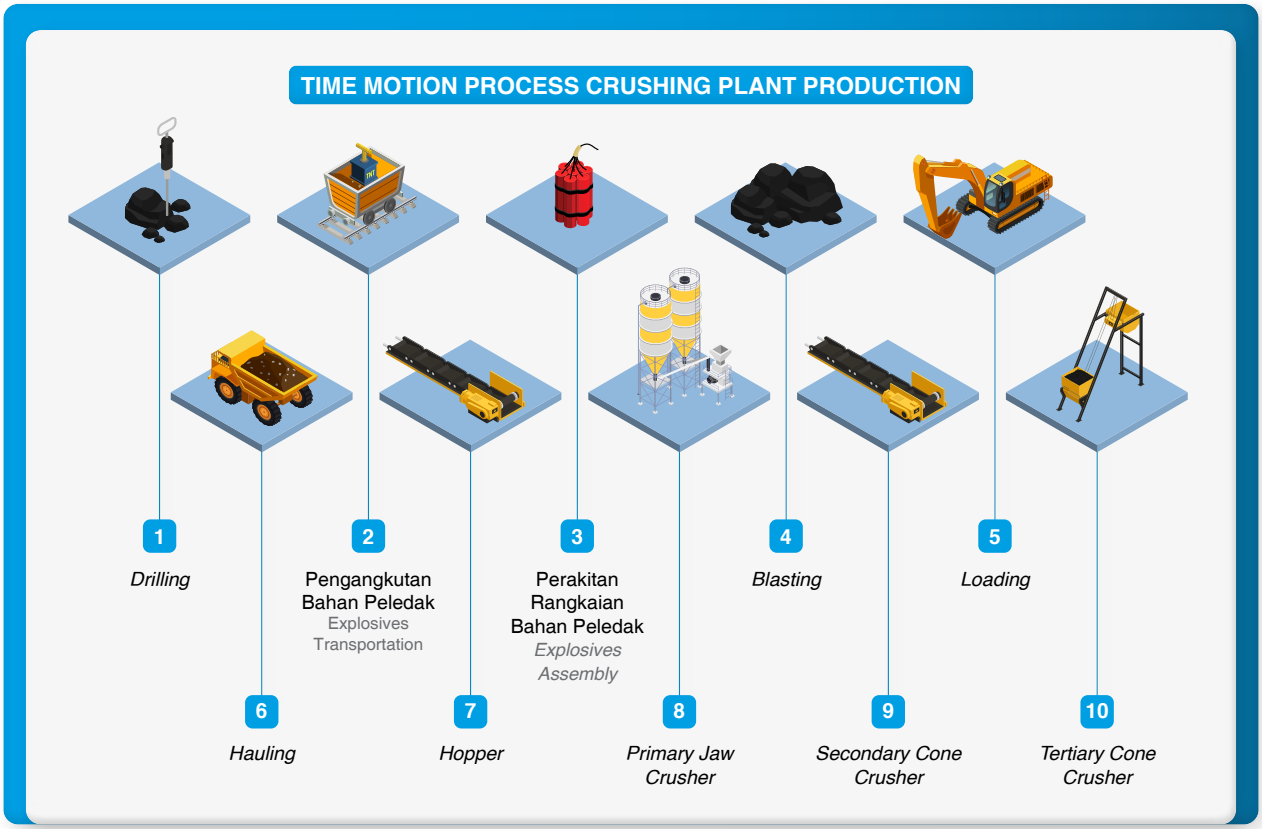
2. **QUARRY BUSINESS SEGMENT**

Through the Quarry Business Segment, the Company carries out production activities, including andesite stone mining to produce split stone, screening, stone dust, and their derivatives. Production is conducted through the Company's three Crushing Plants, namely:

1. Crushing Plant Bogor;
2. Crushing Plant South Lampung;
3. Crushing Plant Donggala.

Established to support upstream business in the Precast Concrete and construction industries, the Crushing Plant produces materials to meet the demand for natural stone, such as crushed mineral stone processed into split stone (sizes 1-2 cm and 2-3 cm), screening, stone dust, and materials for road foundation needs such as aggregate (Class A and Class B).

The Company's Crushing Plants are capable of producing uniform and cubical-shaped products. To maximize its potential, the Company has added aggregate laboratory and port facilities, such as those implemented at Crushing Plant South Lampung, enabling broader market reach across Indonesia.



Keterangan:

1. *Drilling*: proses pengeboran pada batuan untuk membentuk lubang bahan peledak.
2. Pengangkutan Bahan Peledak: proses pengangkutan bahan peledak yang telah ditentukan jumlah dan kebutuhannya, dari gudang penyimpanan menuju lokasi peledakan (*blasting*) sesuai prosedur yang terjamin keamanannya.
3. Perakitan Rangkaian Bahan Peledak: proses merangkai bahan peledak yang telah dimasukkan ke dalam lubang bor menggunakan kabel dan detonator.
4. *Blasting*: proses peledakan batuan dengan rangkaian bahan peledak pada area yang telah ditentukan untuk memecah dan mengurai batuan berukuran masif menjadi raw material berukuran lebih kecil.
5. *Loading*: proses pengangkutan raw material hasil *blasting* dengan menggunakan excavator ke dalam kendaraan angkut (*dumptruck*).
6. *Hauling*: proses pengangkutan raw material dengan menggunakan kendaraan angkut (dumptruck) dari lokasi loading menuju lokasi *crusher*.
7. *Hopper*: proses penumpukan raw material ke dalam *hopper* untuk persiapan *crushing* material.
8. Proses *Primary Jaw Crusher*: proses *crushing* material pertama kali menggunakan *primary jaw crusher*. Proses ini menghasilkan produk gudang batu dan sirdam.

Descriptions:

1. Drilling: The process of drilling rocks to create holes for explosives.
2. Explosives Transportation: The process of transporting predetermined amounts of explosives from the storage facility to the blasting site, following strict safety procedures.
3. Explosives Assembly: The process of assembling explosives inserted into boreholes using cables and detonators.
4. Blasting: The process of detonating explosives in designated areas to break down large rock formations into smaller raw materials.
5. Loading: The process of transporting raw materials from blasting sites into haul trucks using excavators.
6. Hauling: The transportation of raw materials via haul trucks from the loading area to the crusher location.
7. Hopper: The process of stockpiling raw materials into the hopper for crushing preparation.
8. Primary Jaw Crusher Process: The initial crushing of materials using a primary jaw crusher, producing stockpile stone and sirdam (a mix of sand and gravel).

9. Proses *Secondary Cone Crusher*: proses *crushing* material dari produk gudang batu.
10. Proses *Tertiary Cone Crusher*: proses *crushing* material dari produk *secondary cone crusher*. Proses ini menghasilkan produk split, screening dan abu batu.

9. Secondary Cone Crusher Process: The crushing of materials from the stockpile stone.
10. Tertiary Cone Crusher Process: The further crushing of materials from the secondary cone crusher, producing split stone, screening, and stone dust.

Strategi Segmen *Quarry* Tahun 2025

Berikut adalah beberapa kebijakan strategis yang diterapkan oleh Segmen Quarry pada tahun 2025 untuk meningkatkan kinerja produksi dan produktivitasnya:

1. Peningkatan utilisasi Crushing Plant dan Batching Plant.
2. Melakukan partnership dengan partner potensial.

Quarry Segment Strategy for 2025

The following are several strategic policies implemented by the Quarry Segment in 2025 to enhance production performance and productivity:

1. Increasing the Utilization of Crushing Plants and Batching Plants.
2. Establishing Partnerships with Potential Partners.

Kapasitas Produksi Segmen Quarry (dalam satuan m3)

Production Capacity of Quarry Segment (in m3)

Kapasitas Produksi Production Capacity	2025	2024	2023	2022	2021
Quarry Quarry	637.000	1.135.464	1.135.464	1.264.322	1.540.305

Pada tahun 2025, kapasitas produksi segmen quarry tercatat sebesar 0,64 juta m³, menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,14 juta m³. Penurunan ini sejalan dengan penyesuaian kapasitas operasional terhadap kebutuhan proyek yang berjalan serta optimalisasi penggunaan material.

In 2025, the production capacity of the quarry segment was recorded at 0.64 million m³, decreasing from 1.14 million m³ in 2024. The decline reflects adjustments in operational capacity in line with ongoing project requirements and optimization of material utilization.

Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, kapasitas produksi quarry mengalami tren menurun dari capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 1,54 juta m³, kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 1,26 juta m³ dan relatif stabil pada tahun 2023 dan 2024 sebelum turun lebih lanjut pada tahun 2025. Meski demikian, Perseroan tetap menjaga efisiensi operasional dan memastikan ketersediaan pasokan material quarry untuk mendukung kelancaran proyek-proyek konstruksi.

Over the past five years, quarry production capacity has shown a downward trend from its peak of 1.54 million m³ in 2021, declining to 1.26 million m³ in 2022 and remaining relatively stable in 2023–2024 before decreasing further in 2025. Nevertheless, the Company continues to maintain operational efficiency and ensure the availability of quarry materials to support ongoing construction projects.

Pendapatan Segmen Quarry

Revenues of Quarry Business Segment

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025		2024	Pertumbuhan/(Penurunan) Growth/(Decrease)	
	Jumlah Pendapatan Total Revenue	Kontribusi Terhadap Jumlah Pendapatan Konsolidasian Contribution to Total Consolidated Revenues		(Rp)	(%)
Pendapatan Quarry Quarry Revenue	1.793	0,04%	1.856	(63)	(3,38)

Pada tahun 2025, pendapatan segmen quarry turun 3,38%, dari Rp1,86 miliar di 2024 menjadi Rp1,79 miliar di 2025. Kontribusinya terhadap total pendapatan konsolidasian juga mengecil menjadi 0,04%. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya permintaan, volume penjualan, atau faktor eksternal seperti kebijakan industri dan harga bahan tambang.

In 2025, the revenue of the Quarry Segment dropped significantly by 89.28%, from Rp17.31 billion in 2023 to Rp1.86 billion in 2024. Its contribution to total consolidated revenue also shrank to 0.04%. This decline was likely caused by decreased demand, lower sales volume, or external factors such as industry policies and raw material prices.

Profitabilitas Segmen Quarry Tahun 2024-2025
Profitability of Quarry Business Segment in 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Segmen Operasi *Quarry* Quarry Segment	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Decrease	
			Nominal	%
Penjualan Bersih Net Sales	1.793	1.856	(63)	(3,38)
Beban Pokok Penjualan Cost Of Revenues	(1.664)	(1.710)	45	(2,65)
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Income for the year	2	25	(23)	(91,73)

Pada tahun 2025, penjualan bersih segmen quarry tercatat sebesar Rp1,79 miliar, menurun 3,38% dibandingkan Rp1,86 miliar pada tahun 2024. Sejalan dengan penurunan tersebut, beban pokok penjualan turut menurun sebesar 2,65% menjadi Rp1,66 miliar dari Rp1,71 miliar pada tahun sebelumnya.

In 2025, net sales of the quarry segment were recorded to Rp1.79 billion, decreasing by 3.38% from Rp1.86 billion in 2024. In line with this decline, cost of revenues also decreased by 2.65% to Rp1.66 billion from Rp1.71 billion in the previous year.

Dengan demikian, laba bersih segmen quarry tercatat sebesar Rp2 juta, turun signifikan sebesar 91,73% dibandingkan Rp25 juta pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa penurunan penjualan belum sepenuhnya dapat diimbangi oleh efisiensi biaya, sehingga memberikan tekanan terhadap profitabilitas segmen quarry.

Accordingly, net income of the quarry segment was recorded at Rp2 million, representing a significant decrease of 91.73% compared to Rp25 million in 2024. This decline indicates that the decrease in sales was not fully offset by cost efficiencies, resulting in pressure on the segment's profitability.

3. SEGMEN USAHA JASA

Dalam menjawab tantangan pasar konstruksi di Indonesia yang menuntut solusi terintegrasi, Perseroan telah membentuk Segmen Bisnis Operasi Jasa untuk memberikan kemudahan dan kecepatan kepada pelanggan. Segmen ini merupakan bagian inti dari bisnis EPI (*Engineering, Production & Installation*), dengan spesialisasi dalam instalasi penunjang produk pracetak beton dan proyek pekerjaan sipil.

Dengan lini bisnis ini, Perseroan mampu memahami perspektif dari dua sudut pandang, yaitu sisi produksi dan sisi pelanggan. Sehingga, Perseroan dapat terus bertransformasi menjadi entitas yang proaktif

3. SERVICE BUSINESS SEGMENT

In response to the challenges of the construction market in Indonesia, which demands integrated solutions, the Company has established the Service Operations Business Segment to provide convenience and speed for customers. This segment is an integral part of the EPI (Engineering, Production & Installation) business, specializing in supporting the installation of precast concrete products and civil construction projects.

Through this business line, the Company is able to understand perspectives from both the production and customer sides, allowing it to continuously transform into a proactive entity in delivering the best

dalam memberikan layanan terbaik, mulai dari tahap *Engineering*, Produksi, Distribusi, hingga Instalasi terpasang, serta pelayanan after sales produk. Seluruhnya bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pelanggan terkait jaminan atas produk dan layanan Perseroan.

services—ranging from Engineering, Production, Distribution, and Installation, to after-sales service. All of these efforts aim to instill customer confidence in the Company's products and services.

- **Unit Jasa Pemancangan**

  Untuk mendukung pemasangan produk tiang pancang pracetak beton, Perseroan telah membentuk Unit Jasa Pemancangan. Dengan menerapkan sistem produksi Jepang, Unit ini menggunakan Sistem Metode *Inner Bore* dan EASE (*Earth Auger Slurry Excavation*) Prebore yang ramah lingkungan. Sebagai pemegang lisensi pertama di Indonesia, Perseroan berupaya memaksimalkan daya dukung pondasi tiang pancang melalui kedua inovasi ini.

  Metode Inner Bore System merupakan cara pemasangan tiang pancang beton berdiameter besar dengan satu tahapan simultan antara penggalian dan penetrasi tiang pancang (*one step simultaneous*). Setelah itu, dilakukan proses solidifikasi atau pembentukan soket di ujung bawah tiang pancang dengan injeksi bahan semen sehingga diperoleh daya dukung ujung tiang pondasi yang optimal.

  Sementara metode EASE *Prebore* adalah varian pengembangan dari metode pemasangan tiang pancang yang memanfaatkan *Crane* Pancang (*Driving Rig*) yang sama dengan metode Inner Bore, dengan penggantian *attachment* alat galinya. Prinsipnya, metode ini merupakan kombinasi antara metode perbaikan tanah DCM (*Deep Cement Mixing*) dan pondasi tiang pancang (*Spun Pile*).

- **Piling Services Unit**

  To support the installation of precast concrete piles, the Company has established the Piling Services Unit. By adopting a Japanese production system, this unit utilizes the Inner Bore Method System and EASE (Earth Auger Slurry Excavation) Prebore Method, which are environmentally friendly. As the first license holder in Indonesia, the Company strives to maximize the load-bearing capacity of pile foundations through these two innovative methods.

  The Inner Bore Method System is a technique for installing large-diameter concrete piles through a one-step simultaneous process of excavation and pile penetration. Following this, a solidification process or socket formation is carried out at the bottom end of the pile by injecting cement-based materials, ensuring optimal end-bearing capacity for the foundation pile.

  Meanwhile, the EASE Prebore Method is a variation of the pile installation method that utilizes the same Driving Rig (Piling Crane) as the Inner Bore Method, but with a different excavation attachment. Essentially, this method is a combination of Deep Cement Mixing (DCM) technology and Spun Pile foundation installation.

- **Unit Penunjang Konstruksi (*Post Tension, Heavy Lifting*, SHMS)**

  Pada semester kedua tahun 2020, Unit Penunjang Konstruksi memperluas cakupan bisnisnya dengan memasuki ranah instalasi monitoring kesehatan struktur atau dikenal sebagai SHMS (*Structural Health Monitoring System*). Unit ini khususnya ahli dalam menerapkan sistem prestress pasca-tegang pada struktur pracetak beton dan bangunan sipil. Implementasinya melibatkan aplikasi SHMS yang dapat digunakan

- **Construction Support Unit (Post-Tension, Heavy Lifting, SHMS)**

  In the second half of 2020, the Construction Support Unit expanded its business scope into structural health monitoring installation, known as SHMS (Structural Health Monitoring System). This unit specializes in the post-tension prestressing system for precast concrete structures and civil buildings.Its implementation involves SHMS applications that can be used to monitor the structural health of civil engineering

untuk memantau kondisi kesehatan seluruh struktur bangunan sipil, termasuk jembatan, terowongan, bendungan, dan gedung. Tak hanya itu, Unit Penunjang Konstruksi juga menawarkan layanan pemasangan girder pracetak beton untuk komponen jembatan. Dengan dukungan dari tim profesional berpengalaman yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, Unit Penunjang Konstruksi dapat memberikan pelayanan terbaiknya di seluruh wilayah operasional Perseroan di Indonesia.

- **Unit-Unit Proyek**
  Dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai *core business* yang mampu mengakomodasi semua aspek dalam sektor konstruksi, Perseroan telah membentuk Unit Proyek-Proyek. Ruang lingkup pekerjaan mencakup berbagai bidang seperti konstruksi infrastruktur jalan layang dan non layang, pembangunan gedung, pelabuhan, serta proyek-proyek di sektor industri dan pembangkit. Unit Proyek ini terdiri dari berbagai organisasi yang bertugas di wilayah operasional Perseroan untuk menangani proyek-proyek konstruksi sipil yang melibatkan komponen pracetak beton dengan tingkat kompleksitas atau spesialisasi tertentu.

structures, including bridges, tunnels, dams, and buildings. Additionally, the Construction Support Unit provides installation services for precast concrete girders used in bridge components. Supported by a team of experienced professionals operating in major cities across Indonesia, the Construction Support Unit ensures the best service delivery across all of the Company's operational areas.

- **Project Units**
  With the aim of making it a core business capable of accommodating all aspects of the construction sector, the Company has established the Project Units. The scope of work includes various sectors such as: Elevated and non-elevated infrastructure construction,Building construction, Port construction, Industrial and power plant projects. The Project Units consist of various organizations operating within the Company's business areas, handling civil construction projects that involve precast concrete components with a certain level of complexity or specialization.

Strategi Segmen Jasa Tahun 2024

Berikut adalah beberapa kebijakan strategis yang diterapkan oleh Segmen Jasa pada tahun 2024 untuk meningkatkan kinerja produksi dan produktivitasnya:

1. Melakukan analisa *project selection* secara komprehensif meliputi aspek legal, aspek komersial, dan aspek teknis.
2. Memaksimalkan proyek yang menggunakan sumber daya yang telah dimiliki seperti material, alat, dan manajemen.
3. Menyasar Proyek Strategis Nasional.
4. Menjadikan Unit Operasi sebagai profit center.
5. Menyasar proyek yang mayoritas produknya dari hasil produksi WIKA Beton (*bundling*).

Service Segment Strategy in 2024

The following are several strategic policies implemented by the Service Segment in 2024 to improve production performance and productivity:

1. Conducting comprehensive project selection analysis, covering legal, commercial, and technical aspects.
2. Maximizing projects that utilize existing resources, such as materials, equipment, and management.
3. Targeting National Strategic Projects.
4. Positioning Operational Units as profit centers.
5. Focusing on projects where the majority of products come from WIKA Beton's own production (bundling).

Kapasitas Produksi Segmen Jasa
Production Capacity of Service Business Segment

Kapasitas Produksi Production Capacity	2025	2024	2023	2022	2021
Pemancangan Inner Bore	6	4	23	25	19
Instalasi Installation	3	7	204	251	269
Jasa Konstruksi Construction Service	24	3	7	19	7
Jumlah **Total**	**33**	**14**	**234**	**295**	**295**

Pada tahun 2025, kapasitas produksi segmen jasa tercatat sebanyak 33 proyek, meningkat dibandingkan 14 proyek pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan pada jasa konstruksi yang mencapai 24 proyek dibandingkan 3 proyek pada tahun sebelumnya, serta peningkatan aktivitas pemancangan dari 4 proyek menjadi 6 proyek. Sementara itu, kapasitas instalasi menurun dari 7 proyek pada tahun 2024 menjadi 3 proyek pada tahun 2025.

In 2025, the production capacity of the service business segment was recorded at 33 project units, increasing from 14 projects in 2024. The increase was primarily driven by construction services, which rose to 24 projects from 3 projects in the previous year, as well as higher innerbore activity from 4 projects to 6 projects. Meanwhile, installation capacity decreased from 7 projects in 2024 to 3 projects in 2025.

Dalam lima tahun terakhir, kapasitas produksi segmen jasa menunjukkan fluktuasi dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 295 proyek, sebelum menurun signifikan pada tahun 2023 dan 2024, kemudian meningkat kembali pada tahun 2025. Perseroan terus menyesuaikan fokus bisnis jasa dengan kebutuhan pasar serta ketersediaan sumber daya untuk menjaga efisiensi operasional.

Over the past five years, the production capacity of the service segment has fluctuated, reaching its peak at 295 projects in both 2021 and 2022, before declining significantly in 2023 and 2024, and then increasing again in 2025. The Company continues to align its service business focus with market demand and available resources to maintain operational efficiency.

Strategi Segmen Jasa Tahun 2025

Berikut adalah beberapa kebijakan strategis yang diterapkan oleh Segmen Jasa pada tahun 2025 untuk meningkatkan kinerja produksi dan produktivitasnya:

1. Melakukan analisa project selection secara komprehensif meliputi aspek legal, aspek komersial, dan aspek teknis.
2. Memaksimalkan proyek yang menggunakan sumber daya yang telah dimiliki seperti material, alat, dan manajemen.
3. Menyasar Proyek Strategis Nasional.
4. Menjadikan Unit Operasi sebagai profit center.
5. Menyasar proyek yang mayoritas produknya dari hasil produksi WIKA Beton (bundling).

Service Segment Strategy in 2025

The following are several strategic policies implemented by the Service Segment in 2025 to improve production performance and productivity:

1. Conducting comprehensive project selection analysis, covering legal, commercial, and technical aspects.
2. Maximizing projects that utilize existing resources, such as materials, equipment, and management.
3. Targeting National Strategic Projects.
4. Positioning Operational Units as profit centers.
5. Focusing on projects where the majority of products come from WIKA Beton's own production (bundling).

Pendapatan Segmen Jasa
Revenues of Service Business Segment

(dalam satuan proyek/in project units)

Uraian Description	2025		2024	Pertumbuhan/(Penurunan) Growth/(Decrease)	
	Jumlah Pendapatan Total Revenue	Kontribusi Terhadap Jumlah Pendapatan Konsolidasian Contribution to Total Consolidated Revenues		(Rp)	(%)
Pendapatan Jasa Service Revenue	483.492	9,88%	644.204	(160.711)	(24,95)

Pada tahun 2025, pendapatan segmen jasa mengalami penurunan 24,95%, dari Rp644,20 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp483,49 miliar. Kontribusinya terhadap total pendapatan konsolidasian tercatat sebesar 9,88%.

In 2025, revenue from the Service Segment was recorded at Rp483.49 billion, decreasing by 24.95% from Rp644.20 billion in 2024. The segment contributed 9.88% to total consolidated revenues.

Penurunan pendapatan tersebut mencerminkan penyesuaian volume pekerjaan jasa serta strategi selektivitas proyek yang dilakukan Perseroan guna menjaga efisiensi operasional dan kualitas pelaksanaan proyek.

The decline reflects adjustments in service project volume as well as the Company's selective project strategy to maintain operational efficiency and project quality.

Profitabilitas Segmen Jasa Tahun 2024-2025
Profitability of Service Business Segment in 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Segmen Operasi Quarry Quarry Segment	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Decrease	
			Nominal	%
Penjualan Bersih Net Sales	483.492	644.204	(160.711)	(24,95)
Beban Pokok Penjualan Cost Of Revenues	(448.853)	(592.406)	143.553	(24,23)
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Income for the year	556	9.891	(9.335)	(94,38)

Pada tahun 2025, penjualan bersih segmen jasa tercatat sebesar Rp483,49 miliar, menurun 24,95% dibandingkan Rp644,20 miliar pada tahun 2024. Sejalan dengan penurunan tersebut, beban pokok penjualan turut menurun 24,23% menjadi Rp448,85 miliar dari Rp592,41 miliar pada tahun sebelumnya.

In 2025, net sales of the Service Segment were recorded at Rp483.49 billion, decreasing by 24.95% from Rp644.20 billion in 2024. In line with this decline, cost of revenues also decreased by 24.23% to Rp448.85 billion from Rp592.41 billion in the previous year.

Laba bersih segmen jasa tercatat sebesar Rp556 juta, turun signifikan sebesar 94,38% dibandingkan Rp9,89 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa penurunan penjualan belum sepenuhnya diimbangi oleh efisiensi biaya, sehingga memberikan tekanan terhadap margin profitabilitas segmen jasa.

Net income of the Service Segment was recorded at Rp556 million, representing a significant decrease of 94.38% compared to Rp9.89 billion in 2024. This decline indicates that the decrease in sales was not fully offset by cost efficiencies, resulting in pressure on the segment's profitability.

4. SEGMEN GEOGRAFIS

Dalam rangka mengukur penetrasi pasar dan kinerja operasional, Perseroan telah melakukan pengelompokan berdasarkan segmen geografis, yang terdiri dari Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Informasi ini disusun untuk menunjukkan kontribusi aset dan hasil usaha dari setiap wilayah geografis. Dengan pendekatan ini, Perseroan dapat lebih efektif dalam merancang strategi bisnis yang sesuai dengan karakteristik pasar di masing-masing daerah, serta meningkatkan efisiensi operasional dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Strategi Segmen Geografis Tahun 2025

Berikut adalah beberapa kebijakan strategis yang diterapkan oleh Segmen Geografis pada tahun 2025 untuk meningkatkan kinerja produksi dan produktivitasnya:

a. Bersinergi dengan WIKA dan WTON Grup;
b. Meningkatkan sinergi Precaster Entitas Anak BUMN;
c. Aktif melakukan monitoring LPSE, E-katalog, dan E-proc;
d. Penetrasi pasar IKN, Tol Sumatera, Tol Jawa;
e. Create Project, Niche Project, Innovation Product, New Business & New Market;
f. Mengimplementasikan strategi pricing yang tepat;
g. Melakukan Project Selection dengan mempertimbangkan kondisi keuangan calon pelanggan;
h. Aktif melakukan monitoring penyerapan dan rencana penerbitan Alokasi dan Kontrak Rinci dari PT. PLN (Persero);
i. Mengupayakan keunggulan mutu dan ketepatan jadwal sesuai kontrak;
j. Melakukan monitoring terhadap proyek-proyek yang sudah diperoleh WIKA, yaitu:
   - Toll JAPEK II Selatan Paket 2A
   - Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur
   - Pengendalian Banjir Kencing Drain di Kudus
   - Akses Tol Patimban Paket
   - Pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3B-2, Segmen KKT Kariangau - Tempadung
   - Tol Bayung Lencir - Tempino Seksi 3
   - Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Paket 1B
   - Jakarta Sewerage System Paket 2 Dan 3 - Pipa, Hidro, Readymix
   - Jakarta Sewerage System Paket 1

4. GEOGRAPHICAL SEGMENTS

To measure market penetration and operational performance, the Company has categorized its operations based on geographical segments, consisting of Java Island and outside Java Island.

This information is structured to highlight the asset contribution and business performance of each geographical area. Through this approach, the Company can design more effective business strategies tailored to the market characteristics of each region, while also enhancing operational efficiency and ensuring sustainable growth.

Geographical Segment Strategy for 2025

The following are several strategic policies implemented by the Geographical Segment in 2025 to enhance its production performance and productivity:

a. Strengthening synergy with WIKA and WTON Group;
b. Enhancing collaboration with State-Owned Enterprises' precaster subsidiaries;
c. Actively monitoring procurement platforms such as LPSE, E-catalog, and E-proc;
d. Market penetration in key areas including the Nusantara Capital City (IKN), Sumatra Toll Road, and Java Toll Road;
e. Focusing on project creation, niche projects, innovative products, new business, and new markets;
f. Implementing effective pricing strategies;
g. Conducting project selection with consideration of the prospective client's financial condition;
h. Actively monitoring the absorption and planned issuance of Budget Allocations and Detailed Contracts from PT PLN (Persero);
i. Ensuring quality excellence and timely completion in accordance with contractual agreements;
j. Monitoring of key ongoing WIKA projects includes:
   - JAPEK II South Toll Road, Package 2A
   - LPG Refrigrated Terminal Development, East Java
   - Flood Control Project – Kencing Drain, Kudus
   - Patimban Access Toll Road, Package
   - IKN Toll Road Construction, Section 3B-2, KKT Kariangau – Tempadung Segment
   - Bayung Lencir – Tempino Toll Road, Section 3
   - Semarang – Demak Toll Road Construction, Package 1B
   - Jakarta Sewerage System Packages 2 and 3 – Pipelines, Hydraulics, Readymix
   - Jakarta Sewerage System Package 1

k. Melakukan koordinasi rutin terkait perkembangan sasaran proyek WIKA Grup melalui Corporate Marketing Division WIKA, terhadap proyek-proyek berikut:
   - Pembangunan Stadion Surajaya Kabupaten Lamongan
   - Kampus Politeknik Manufaktur Bandung – Majalengka
   - Akses Stasiun KCIC Karawang
   - RS PON – Jakarta Pembangunan
   - RDF Plant Jakarta
   - Tol Ruas Bandara Sepinggan - Tol Balsam
   - TBBM Padalarang - Sukabumi
   - Bendungan Pelosika, Kendari
   - Legok Nangka Waste to Energy , Bandung, Jawa Barat
   - MRT East West Phase 3 : CP 109 Depo Rorotan
   - Patimban Port Paket 7A

k. Routine coordination is carried out with WIKA Group's Corporate Marketing Division regarding the progress of targeted projects, including:
   - Surajaya Stadium Construction, Lamongan Regency
   - Bandung Manufacturing Polytechnic Campus – Majalengka
   - KCIC Karawang Station Access
   - PON Hospital – Jakarta
   - RDF Plant Development – Jakarta
   - Sepinggan Airport – Balsam Toll Road
   - TBBM Padalarang – Sukabumi
   - Pelosika Dam, Kendari
   - Legok Nangka Waste to Energy Plant, Bandung, West Java
   - MRT East-West Phase 3: CP 109 Rorotan Depot
   - Patimban Port, Package 7A

Pada tahun 2025, Pendapatan Usaha Perseroan masih didominasi oleh wilayah Jawa, dengan kontribusi yang lebih besar dibandingkan wilayah luar Jawa. Sejalan dengan hal tersebut, laba tahun berjalan juga lebih tinggi berasal dari wilayah Jawa dibandingkan luar Jawa. Berikut adalah komposisi Pendapatan Usaha dan Laba Tahun Berjalan berdasarkan segmen geografis:

In 2025, the Company's revenue was still dominated by the Java region, which contributed more than regions outside Java. In line with this, profit for the year was also higher from the Java region compared to outside Java. The following presents the composition of revenues and profit for the year by geographical segment:

Pendapatan Segmen Geografis
Revenues of Geographical Business Segment

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Segmen Geografis Geographical Segment	2025	2024	Pertumbuhan/(Penurunan) Increase/(Decrease) (%)
Pendapatan **Revenue**			
Jawa Java	1.927.117	2.631.225	(26,76)
Luar Jawa Outside Java	1.658.745	2.264.799	(26,76)
Jumlah **Total**	**3.585.862**	**4.896.024**	**(26,76)**
Laba Tahun Berjalan **Profit for the Year**			
Jawa Java	2.215	42.975	(94,84)
Luar Jawa Outside Java	1.907	21.224	(91,02)
Jumlah **Total**	**4.122**	64.200	(93,58)

Pendapatan Segmen Geografis dari Pulau Jawa

Pada tahun 2025, pendapatan usaha dari wilayah Pulau Jawa tercatat sebesar Rp1,93 triliun, menurun 26,76% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp2,63 triliun. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya aktivitas proyek konstruksi di wilayah Jawa selama tahun berjalan. Meskipun mengalami penurunan, wilayah Jawa tetap menjadi kontributor terbesar terhadap total pendapatan usaha Perseroan.

Geographical Segment Revenue from Java Island

In 2025, revenue from the Java region wasRp1.93 trillion, decreasing by 26.76% compared to Rp2.63 trillion in 2024. The decline was in line with reduced construction project activity in the Java region. Despite the decrease, Java remained the largest contributor to the Company's total revenue.

Pendapatan Segmen Geografis dari Luar Pulau Jawa

Pendapatan usaha dari luar Pulau Jawa pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,66 triliun, menurun 26,76% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp2,26 triliun. Penurunan ini mencerminkan perlambatan realisasi proyek di beberapa wilayah strategis luar Jawa, meskipun Perseroan tetap mempertahankan penetrasi pasar di kawasan tersebut.

Geographical Segment Revenue from Outside Java Island

Revenue from outside Java in 2025 reached Rp1.66 trillion, decreasing by 26.76% compared to Rp2.26 trillion in 2024. This decline reflects slower project realization across several strategic regions outside Java, although the Company maintained its market penetration.

Profitabilitas Segmen Geografis dari Pulau Jawa

Laba tahun berjalan dari wilayah Pulau Jawa pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp2,22 miliar, menurun signifikan sebesar 94,84% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp42,98 miliar. Penurunan ini sejalan dengan turunnya pendapatan usaha serta perubahan komposisi proyek yang berdampak pada margin keuntungan di wilayah Jawa.

Geographical Segment Profitability from Java Island

Profit for the year from the Java region in 2025 was Rp2.22 billion, decreasing significantly by 94.84% compared to Rp42.98 billion in 2024. The decline was in line with lower revenue and changes in project composition affecting margins in the Java region.

Profitabilitas Segmen Geografis dari Luar Pulau Jawa

Laba tahun berjalan dari luar Pulau Jawa pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,91 miliar, menurun 91,02% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp21,22 miliar. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya kontribusi laba dari proyek-proyek di luar Jawa selama tahun 2025.

Geographical Segment Profitability from Outside Java Island

Profit for the year from outside Java in 2025 was Rp1.91 billion, decreasing by 91.02% from Rp21.22 billion in 2024. This decline reflects lower profit contribution from projects outside Java during 2025.

Tinjauan Keuangan
Financial Overview

Dalam bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen, Perseroan menyajikan evaluasi terhadap kinerja keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025. Pembahasan mengenai kinerja keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk beserta entitas anaknya disajikan dengan mematuhi prinsip yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") Indonesia dan penjelasan yang terdapat pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian integral dari Laporan Tahunan ini.

In the Management Analysis and Discussion section, the Company presents an evaluation of financial performance for the period ending December 31, 2025. The discussion on the financial performance of PT Wijaya Karya Beton Tbk and its subsidiaries is presented in compliance with the principles set forth in the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK") and the explanations provided in the Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of this Annual Report.

Pembahasan dan analisis berikut mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (a member of the RSM Network) dalam laporannya tertanggal 26 Maret 2026.

The following analysis and discussion refer to the Company's Financial Statements for the years ending December 31, 2025, and 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (a member of the RSM Network) in their report dated March 26, 2026.

Pada 31 Desember 2025, Akuntan Publik memberikan opini bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan PT Wijaya Karya Beton Tbk dan entitas anaknya telah disusun dengan wajar dalam semua aspek yang bersifat materi, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Opini tersebut mencakup posisi keuangan konsolidasian, kinerja keuangan, dan arus kas konsolidasi untuk periode keuangan yang berakhir pada tanggal tersebut.

As of December 31, 2025, the Public Accountant issued an opinion stating that the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Beton Tbk and its subsidiaries were fairly presented in all material respects in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. This opinion covers the consolidated financial position, financial performance, and cash flows for the financial period ending on that date.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2024-2025
Consolidated Statements of Financial Position as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Aset **Assets**	**6.290.468**	**7.194.688**	**(904.220)**	**(12,57)**
Aset Lancar Current Assets	3.167.862	3.929.811	(761.949)	(19,39)
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	3.122.606	3.264.877	(142.271)	(4,36)
Liabilitas **Liabilities**	**2.604.456**	**3.507.922**	**(903.466)**	**(25,76)**
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2.429.047	3.042.006	(612.959)	(20,15)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	175.409	465.916	(290.507)	(62,35)
Ekuitas **Equity**	**3.686.012**	**3.686.766**	**(754)**	**(0,02)**

Pada tahun 2025, total aset Perseroan turun 12,57% atau Rp904,22 miliar, yang dipengaruhi oleh penurunan aset lancar dan aset tidak lancar dengan penurunan masing-masing sebesar 19,39% dan 4,36%.

Dari sisi liabilitas, terjadi penurunan 25,76% atau Rp903,47 miliar, dipengaruhi oleh turunnya liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang dengan penurunan masing-masing sebesar 20,15% dan 62,35%, yang mencerminkan pembayaran utang yang lebih baik baik dari sisi utang jangka pendek maupun utang jangka panjang.

Sementara itu, ekuitas tercatat mengalami penurunan sebesar 0,02% atau Rp754 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan adanya penyesuaian pada komponen ekuitas, namun secara keseluruhan posisi permodalan Perseroan tetap terjaga dengan baik untuk mendukung keberlangsungan operasional.

In 2024, the Company's total assets decreased by 5.73% or Rp436.98 billion, primarily due to a 10.38% decline in current assets, reflecting working capital optimization. Meanwhile, non-current assets increased slightly by 0.56%, indicating stable investments.

On the liabilities side, there was a 12.42% decrease, equivalent to Rp497.64 billion, mainly driven by an 18.39% reduction in current liabilities, which reflects improved debt repayment. However, non-current liabilities rose by 67.67%, indicating an increase in long-term funding for expansion.

Meanwhile, equity grew by 1.67% or Rp60.66 billion, reflecting a more stable financial performance and increased retained earnings. This demonstrates a healthier financial position and the Company's readiness to face future challenges.

ASET
ASET

Pada akhir tahun 2025, total Aset Konsolidasian Perseroan mencapai Rp6,29 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp904,22 miliar atau 12,57% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp7,19 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya jumlah aset lancar Perseroan selama tahun 2025.

At the end of 2025, the Company's Consolidated Total Assets reached Rp6.29 trillion. This represents a decrease of Rp904.22 billion or 12.57% compared to the previous year, which was recorded at Rp7.19 trillion. The decline was primarily due to a reduction in the Company's current assets during 2025.

Aset Lancar
Current Assets

Aset Lancar per 31 Desember 2024-2025
Current Assets as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	411.726	597.554	(185.828)	(31,10)
Piutang Usaha-Bersih Trade Receivables-Net	776.662	918.685	(142.023)	(15,46)
Piutang Retensi-Bersih Retention Receivables-Net	28.565	45.267	(16.702)	(36,90)
Pendapatan akan Diterima-Bersih Accrued Income-Net	577.619	923.356	(345.737)	(37,44)
Tagihan Bruto Pemberi Kerja-Net Gross Amount Due From Customer-Net	71.846	38.734	33.113	85,49
Piutang Lain-lain Other Receivables	12.456	13.099	(643)	(4,91)
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	196.170	246.483	(50.314)	(20,41)

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Persediaan Inventories	683.833	725.336	(41.503)	(5,72)
Uang Muka Advances	25.460	10.824	14.636	135,22
Biaya Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	156.249	215.583	(59.333)	(27,52)
Proyek dalam Pelaksanaan Project on Progress	227.274	194.890	32.384	16,62
Jumlah **Total**	**3.167.862**	**3.929.811**	**(761.950)**	**(19,39)**

Per 31 Desember 2025, Perseroan mencatatkan total Aset Lancar sebesar Rp3,17 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp761,95 miliar atau 19,39% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp3,93 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya nilai piutang usaha, piutang retensi, piutang yang belum ditagih, dan piutang lain-lain seiring dengan telah tertagihnya sebagian piutang-piutang tersebut. Selain itu, penurunan pada kas dan setara kas, pajak dibayar di muka, persediaan, dan biaya dibayar di muka turut berkontribusi terhadap penurunan total Aset Lancar Perseroan.

As of December 31, 2025, the Company recorded total Current Assets of Rp3.17 trillion, reflecting a decrease of Rp761.95 billion, or 19.39%, compared to the previous year's Rp3.93 trillion. This decline was driven by reductions in trade receivables, retention receivables, unbilled receivables, and other receivables following the collection of a portion of these balances. In addition, decreases in cash and cash equivalents, prepaid taxes, inventories, and prepaid expenses also contributed to the reduction in the Company's total Current Assets.

Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalent

Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024-2025
Cash and Cash Equivalent as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Kas Cash	240	343	(103)	(29,96)
Bank	92.116	216.582	(124.466)	(57,47)
Deposito Deposit	319.370	380.630	(61.260)	(16,09)
Jumlah **Total**	**411.726**	**597.554**	**(185.828)**	**(31,10)**

Hingga 31 Desember 2025, Kas dan Setara Kas Perseroan tercatat Rp411,73 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp185,83 miliar atau 31,10% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp597,55 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya saldo kas, kas pada bank, serta penempatan deposito seiring dengan penggunaan dana untuk mendukung kebutuhan operasional.

As of December 31, 2025, the Company's Cash and Cash Equivalents stood at Rp411.73 billion, representing a decrease of Rp185.83 billion, or 31.10%, compared to the position as of December 31, 2024, which was Rp597.55 billion. The decrease was driven by lower cash on hand, cash in banks, and time deposit placements following the utilization of funds to support operational requirements.

Piutang Usaha dan Retensi-Bersih
Trade and Retention Receivables-Net

Piutang Usaha-Bersih per 31 Desember 2024-2025
Trade Receivables-Net as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Piutang Usaha Pihak Berelasi Trade Receivables Related Parties	434.133	458.081	(23.947)	(5,23)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(8.780)	(40.245)	31.464	(78,18)
Piutang Usaha Pihak Berelasi Bersih **Trade Receivables Related Parties**	**425.353**	**417.836**	**7.517**	**1,80**
Piutang Usaha Pihak Ketiga Trade Receivables Third Parties	468.933	597.646	(128.712)	(21,54)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(117.624)	(96.796)	(20.827)	21,52
Piutang Usaha Pihak Ketiga-Bersih **Trade Receivables Third Parties-Net**	**351.309**	**500.849**	**(149.540)**	**(29,86)**
Jumlah **Total**	**776.662**	**918.685**	**(142.023)**	**(15,46)**

Hingga 31 Desember 2025, Piutang Usaha-Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp776,66 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp142,02 miliar atau 15,46% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 yang mencapai Rp918,69 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya nilai piutang usaha dari pihak ketiga.

As of December 31, 2025, the Company's Trade Receivables–Net were recorded at Rp776.66 billion, reflecting a decrease of Rp142.02 billion, or 15.46%, compared to the position as of December 31, 2024, which reached Rp918.69 billion. The decline was primarily attributable to lower trade receivables from third parties.

Piutang Usaha Pihak Berelasi-Bersih per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp425,35 miliar, naik Rp7,52 miliar atau 1,80% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp417,84 miliar. Peningkatan ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah piutang dari beberapa perusahaan relasi serta kerja sama operasi (KSO), antara lain PT Wijaya Karya (Persero), KSO China Road & Bridge Corporation, PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Related Party Trade Receivables–Net as of December 31, 2025 were recorded at Rp425.35 billion, increasing by Rp7.52 billion, or 1.80%, compared to the previous year's Rp417.84 billion. The increase was influenced by higher receivables from several related parties and joint operations (KSO), including PT Wijaya Karya (Persero), KSO China Road & Bridge Corporation, PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi, and PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Sementara itu, Piutang Usaha Pihak Ketiga-Bersih mengalami penurunan, tercatat Rp351,31 miliar per 31 Desember 2025, turun Rp149,54 miliar atau 29,86% dari Rp500,85 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama berasal dari telah tertagihnya piutang dari beberapa mitra, termasuk KSO PT Adhi Karya (Persero) Tbk - PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Marga Konstruksi Nusantara, KSO PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Guntur Satria Perkasa, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, KSO PT Hutama Karya (Persero)

Meanwhile, Third Party Trade Receivables–Net declined to Rp351.31 billion as of December 31, 2025, down by Rp149.54 billion, or 29.86%, from Rp500.85 billion in the previous year. The decrease mainly resulted from collections from several partners, including KSO PT Adhi Karya (Persero) Tbk - PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Marga Konstruksi Nusantara, KSO PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Guntur Satria Perkasa, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, KSO PT Hutama Karya (Persero) - PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Jaya Konstruksi

- PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk - PT Yasa Patria Perkasa, PT Basuki Rahmanta Putra, PT Rekagunatek Persada, PT Jakarta Propertindo, dan PT Karya Logistik Nusantara.

Manggala Pratama Tbk - PT Yasa Patria Perkasa, PT Basuki Rahmanta Putra, PT Rekagunatek Persada, PT Jakarta Propertindo, and PT Karya Logistik Nusantara.

Piutang Retensi-Bersih
Retention Receivables-Net

Piutang Retensi-Bersih per 31 Desember 2024-2025
Retention Receivables-Net as of December 31, 2024-2025

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Piutang Retensi Pihak Berelasi Retention Receivables Related Parties	4.336	15.174	(10.838)	(71,42)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(578)	(474)	(104)	21,82
Piutang Retensi Pihak Berelasi-Bersih **Retention Receivables Related Parties-Net**	**3.758**	**14.699**	**(10.941)**	**(74,43)**
Piutang Retensi Pihak Ketiga Retention Receivables Third Parties	26.662	33.624	(6.961)	(20,70)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(1.855)	(3.056)	1.200	(39,28)
Piutang Retensi Pihak Ketiga-Bersih **Retention Receivables Third Parties-Net**	**24.807**	**30.568**	**(5.761)**	**(18,85)**
Jumlah **Total**	**28.565**	**45.267**	**(16.702)**	**(36,90)**

Hingga 31 Desember 2025, Piutang Retensi-Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp28,57 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp16,70 miliar atau 36,90% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 yang mencapai Rp45,27 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh telah tertagihnya seluruh atau sebagian piutang retensi, baik dari pihak berelasi maupun pihak ketiga.

As of December 31, 2025, the Company's Net Retention Receivables were recorded at Rp28.57 billion, a decrease of Rp16.70 billion or 36.90% compared to Rp45.27 billion as of December 31, 2024. This decline was primarily due to the collection of full or partial retention receivables from both related parties and third parties.

Piutang yang Belum Ditagih-Bersih
Unbilled Receivables-Net

Piutang yang Belum Ditagih-Bersih per 31 Desember 2024-2025
Unbilled Receivables-Net as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Pihak Berelasi Related Parties	424.124	663.414	(239.290)	(36,07)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(4.330)	(2.732)	(1.598)	58,49
Pihak Berelasi-Bersih **Related Parties-Net**	**419.793**	**660.681**	**(240.888)**	**(36,46)**

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Pihak Ketiga Third Parties	159.124	264.966	(105.843)	(39,95)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(1.298)	(2.291)	993	(43,34)
Pihak Ketiga-Bersih **Third Parties-Net**	**157.826**	**262.675**	**(104.849)**	**(39,92)**
Jumlah **Total**	**577.619**	**923.356**	**(345.737)**	**(37,44)**

Hingga 31 Desember 2025, Piutang yang Belum Ditagih-Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp577,62 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp345,74 miliar atau 37,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp923,36 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh tertagihnya sebagian besar piutang atas pekerjaan yang telah diakui oleh pelanggan.

As of December 31, 2025, the Company's net uncollected receivables stood at Rp577.62 billion, a decrease of Rp345.74 billion, or 37.44%, compared to the previous year's figure of Rp923.36 billion. This decrease was primarily due to the collection of the majority of receivables related to work that had been recognized by customers.

Tagihan Bruto Pemberi Kerja-Bersih
Gross Amount Due from Customer-Net

Tagihan Bruto Pemberi Kerja-Bersih per 31 Desember 2024-2025
Gross Amount Due from Customer-Net as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Tagihan Bruto-Pihak Berelasi Gross-Related- Party Bills	11.469	21.535	(10.066)	(46,74)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(102)	0	(102)	(100,00)
Sub Jumlah **Sub-Total**	**11.367**	**21.535**	**(10.168)**	**(47,21)**
Tagihan Bruto-Pihak Ketiga Gross Billing-Third Party	61.459	17.903	43.556	243,29
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(979)	(705)	(274)	38,94
Sub Jumlah **Sub-Total**	**60.480**	**17.198**	**43.282**	**251,66**
Jumlah **Total**	**71.847**	**38.734**	**33.114**	**85,49**

Per 31 Desember 2025, Tagihan Bruto Pemberi Kerja-Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp71,85 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp33,11 miliar atau 85,49% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2024 yang mencapai Rp38,73 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya pengakuan progress pekerjaan kepada pelanggan atas pekerjaan segmen jasa, beberapa diantaranya adalah PT Hutama Karya Infrastruktur, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Fajar Putra Dinasti, PT Astakona Megahtama, Larsen & Toubro Ltd., dan PT Jakarta Propertindo.

As of December 31, 2025, the Company's gross employer-net receivables stood at Rp71.85 billion, an increase of Rp33.11 billion, or 85.49%, compared to the figure as of December 31, 2024, which was Rp38.73 billion. This increase was primarily driven by accelerated work for customers in the services segment, including PT Hutama Karya Infrastruktur, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Fajar Putra Dinasti, PT Astakona Megahtama, Larsen & Toubro Ltd., and PT Jakarta Propertindo.

Piutang Lain-lain
Other Receivables

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2024-2025
Other Receivables as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Pihak Berelasi Related Parties	9.170	11.983	(2.813)	(23,48)
Pihak Ketiga Third Parties	3.286	1.116	2.171	194,51
Jumlah **Total**	**12.456**	**13.099**	**(643)**	**(4,91)**

Per 31 Desember 2025, Piutang Lain-lain Perseroan tercatat sebesar Rp12,46 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp643 juta atau 4,91% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2024 yang mencapai Rp13,10 miliar. Penurunan Piutang lain lain berhubungan dengan berakhirnya kerja sama antara Perseroan dengan Pemangku Kepentingan. Perseroan berkomitmen untuk menjalin kerja sama dengan Pemangku kepentingan Perseroan seperti Koperasi Karyawan, Asuransi Pegawai, dan Dinas-dinas terkait dengan kegiatan usaha perseroan.

As of December 31, 2025, the Company's Other Receivables stood at Rp12.46 billion, a decrease of Rp643 million, or 4.91%, compared to the amount as of December 31, 2024, which was Rp13.10 billion. The decrease in Other Receivables is related to the termination of the cooperation between the Company and its stakeholders. The Company is committed to establishing partnerships with its stakeholders, such as the Employee Cooperative, Employee Insurance, and government agencies related to the Company's business activities.

Pajak Dibayar di Muka
Prepaid Taxes

Pajak Dibayar di Muka per 31 Desember 2024-2025
Prepaid Taxes as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Perusahaan **Company**				
PPh Pasal 4(2) Income Tax Article 4(2)	3.957	3.693	263	7,13
Pajak Pertambahan Nilai Value Added Tax	144.447	183.976	(39.528)	(21,49)
Sub Jumlah **Sub-Total**	**148.404**	**187.669**	**(39.265)**	**(20,92)**
Entitas Anak **Subsidiaries**				
PPh 28a Income Tax Article 28a	7.775	9.102	(1.327)	(14,58)
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	3.027	2.579	448	17,38
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	37	32	4	13,70
PPh Pasal 4(2) Income Tax Article 4(2)	1.915	1.611	304	18,84
Pajak Pertambahan Nilai Value Added Tax	35.012	45.490	(10.478)	(23,03)
Sub Jumlah **Sub-Total**	**47.766**	**58.814**	**(11.049)**	**(18,79)**
Jumlah **Total**	**196.170**	**246.483**	**(50.314)**	**(20,41)**

Per 31 Desember 2025, Pajak Dibayar di Muka Perseroan tercatat sebesar Rp196,17 miliar, mengalami penurunan Rp50,31 miliar atau 20,41% dibandingkan dengan Rp246,48 miliar pada 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya saldo Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

As of December 31, 2025, the Company's Prepaid Taxes were recorded at Rp196.17 billion, reflecting a decrease of Rp50.31 billion, or 20.41%, compared to Rp246.48 billion as of December 31, 2024. The decline was primarily attributable to lower balances of Value Added Tax (VAT).

Persediaan
Inventories

Persediaan per 31 Desember 2024-2025
Inventories as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Persediaan Barang Jadi di Gudang Finished Goods in Warehouse	476.201	447.089	29.112	6,51
Persediaan Bahan Baku Raw Materials	130.576	186.469	(55.892)	(29,97)
Persediaan Barang Jadi di Lapangan Finished Goods in the Field	48.194	56.364	(8.169)	(14,49)
Persediaan Suku Cadang dan Perlengkapan Spare Parts and Supplies Inventory	25.472	32.049	(6.577)	(20,52)
Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas Supplies of Fuel Oil and Lubricant	3.390	3.366	24	0,72
Jumlah **Total**	**683.833**	**725.336**	**(41.503)**	**(5,72)**

Per 31 Desember 2025, Perseroan mencatatkan nilai Persediaan sebesar Rp683,83 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp41,50 miliar atau 5,72% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp725,34 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya persediaan bahan baku untuk proses produksi, barang jadi yang masih dalam pengiriman, dan suku cadang dan perlengkapan.

As of December 31, 2025, the Company recorded Inventories of Rp683.83 billion, reflecting a decrease of Rp41.50 billion, or 5.72%, compared to Rp725.34 billion in the previous year. The decline was mainly attributable to lower inventories of raw materials for production processes, finished goods in transit, and spare parts and supplies.

Uang Muka
Advances

Uang Muka per 31 Desember 2024-2025
Advances as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Pemasok Suppliers	23.337	8.044	15.293	190,12
Subkontraktor Subcontractors	990	1.899	(909)	(47,84)
Persekot Pekerjaan Advance the work	1.133	881	252	28,62
Jumlah **Total**	**25.460**	**10.824**	**14.636**	**135,22**

Per 31 Desember 2025, Uang Muka Perseroan tercatat sebesar Rp25,46 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp14,64 miliar atau 135,22% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp10,82 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya uang muka kepada Pemasok seiring dengan pengadaan material.

As of December 31, 2025, the Company's advance payments totaled Rp25.46 billion, an increase of Rp14.64 billion, or 135.22%, compared to the previous year's figure of Rp10.82 billion. This increase was primarily due to higher advance payments to suppliers in connection with the procurement of materials.

Proyek dalam Pelaksanaan
Project in Progress

Proyek dalam Pelaksanaan per 31 Desember 2024-2025
Project in Progress as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Pihak Berelasi Related Parties	43.510	6.857	36.653	534,51
Pihak Ketiga Third Parties	183.764	188.033	(4.269)	(2,27)
Jumlah **Total**	**227.274**	**194.890**	**32.384**	**16,62**

Per 31 Desember 2025, nilai Proyek dalam Pelaksanaan tercatat sebesar Rp227,27 miliar, meningkat sebesar Rp32,38 miliar atau 16,62% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp194,89 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan proyek yang sedang dikerjakan untuk PT Hutama Karya Infrastruktur, STA. Clara, PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi, serta beberapa proyek lain yang masih dalam tahap pelaksanaan oleh pihak ketiga.

As of December 31, 2025, Projects in Progress were recorded at Rp227.27 billion, representing an increase of Rp32.38 billion, or 16.62%, compared to Rp194.89 billion in the previous year. The increase was primarily driven by additional ongoing projects for PT Hutama Karya Infrastruktur, STA. Clara, PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi, as well as several other projects still under execution by third parties.

Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2024-2025
Non-Current Assets as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	-	2.802	(2.802)	(100,00)
Investasi Ventura Bersama Investment in Joint Ventures	10.575	1.952	8.623	441,87
Properti Investasi Investment Property	194.141	191.558	2.583	1,35
Aset Hak Guna-Bersih Right-of-Use Assets-Net	-	7.476	(7.476)	(100,00)
Aset Tetap-Bersih Fixed Assets-Net	2.889.091	3.007.716	(118.625)	(3,94)

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Investasi Jangka Panjang Lainnya Other Long-Term Investment	6.143	2.500	3.643	145,70
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Asset	22.655	50.874	(28.219)	(55,47)
Jumlah **Total**	**3.122.605**	**3.264.877**	**(142.272)**	**(4,36)**

Per 31 Desember 2025, Aset Tidak Lancar Perseroan tercatat sebesar Rp3,12 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp142,27 miliar atau 4,36% dibandingkan dengan Rp3,26 triliun pada 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama berasal dari penyusutan tahunan atas aset tetap perseroan dan adanya pelepasan jaminan pada aset tidak lancar lainnya.

As of December 31, 2025, the Company's non-current assets totaled Rp3.12 trillion, a decrease of Rp142.27 billion, or 4.36%, compared to Rp3.26 trillion as of December 31, 2024. This decrease was primarily due to annual depreciation of the Company's fixed assets and the release of collateral on other non-current assets.

Aset Pajak Tangguhan

Per 31 Desember 2025, Perseroan tidak mencatat adanya Aset Pajak Tangguhan dibandingkan dengan Rp2,80 miliar pada 31 Desember 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh pelunasan kewajiban pajak yang dilakukan Perseroan pada periode sebelumnya, sehingga mengurangi saldo aset pajak tangguhan yang diakui.

Deferred Tax Assets

As of December 31, 2025, the Company did not record any Deferred Tax Assets, compared to Rp2.80 billion as of December 31, 2024. This was primarily attributable to the settlement of tax obligations in the previous period, which reduced the recognized balance of deferred tax assets.

Investasi Ventura Bersama
Investment in Joint ventures

Investasi Ventura Bersama per 31 Desember 2024-2025
Investment in Joint ventures as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
KSO Wijaya Karya Beton-Emrail	1.593	1.599	(5)	(0,34)
KSO PT WIjaya Karya Beton Tbk - WIKA	8.905	-	8.905	100,00
KSO Wijaya Karya Beton-Murni	9	287	(278)	(96,80)
KSO Wijaya Karya Beton-Kidoh	68	66	2	2,48
Jumlah **Total**	**10.575**	**1.952**	**8.623**	**441,87**

Investasi Ventura Bersama

Per 31 Desember 2025, Investasi Ventura Bersama tercatat sebesar Rp10,58 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp8,62 miliar atau 441,87% dibandingkan dengan Rp1,95 miliar pada 31 Desember 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya kerja sama operasi baru antara Wijaya Karya Beton dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atas pekerjaan penanganan longsor pada Jalan Tol Cisumdawu KM 177/ Bojongtotor dan KM 178/Mulyasari.

Joint Venture Investment

As of December 31, 2025, Joint Venture Investments were recorded at Rp10.58 billion, representing an increase of Rp8.62 billion, or 441.87%, compared to Rp1.95 billion as of December 31, 2024. The increase was driven by a new joint operation between Wijaya Karya Beton and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for landslide handling works on the Cisumdawu Toll Road at KM 177/Bojongtotor and KM 178/Mulyasari.

Properti Investasi

Per 31 Desember 2025, Properti Investasi Perseroan tercatat sebesar Rp194,14 miliar, meningkat Rp2,58 miliar atau 1,35% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp191,56 miliar. Peningkatan ini terutama berasal dari penambahan properti investasi yang diperoleh melalui konversi sebagian piutang usaha WPG kepada PT Samudra Bangun Raya. Konversi tersebut dilakukan dalam bentuk aset berupa ruko yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, yang selanjutnya dicatat sebagai bagian dari portofolio properti investasi Perseroan.

Aset Hak Guna-Bersih

Per 31 Desember 2025, Perseroan tidak mencatat adanya Aset Hak Guna-Bersih dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp7,48 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh Perjanjian sewa atas ruang kantor di WIKA Tower 1 Jakarta dan Wilayah Penjualan I Sumatera Utara berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tidak diperpanjang, sehingga Perusahaan tidak lagi menggunakan aset hak guna terkait sejak tanggal tersebut.

Aset Tetap-Bersih

Per 31 Desember 2025, Aset Tetap-Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp2,89 triliun, mengalami penurunan Rp118,63 miliar atau 3,94% dibandingkan dengan Rp3,01 triliun pada 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyusutan tahunan atas aset tetap Perseroan.

Investasi Jangka Panjang Lainnya

Investasi Jangka Panjang Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp6,14 miliar, meningkat Rp3,64 miliar jika dibandingkan Rp2,50 miliar pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya penambahan saldo utang kreditur konkuren dari PT Waskita Beton Precast Tbk yang dikonversi menjadi aset tidak lancar (Investasi Jangka Panjang Lainnya) sebesar Rp3,64 miliar.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Per 31 Desember 2025, Aset Tidak Lancar Lainnya tercatat sebesar Rp22,66 miliar, turun Rp28,22 miliar atau 55,47% dibandingkan Rp50,87 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya penempatan dana yang dibatasi penggunaannya pada rekening deposito terkait dengan fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Investment Property

As of December 31, 2025, the Company's Investment Properties were recorded at Rp194.14 billion, increasing by Rp2.58 billion, or 1.35%, compared to Rp191.56 billion in the previous year. The increase mainly resulted from the addition of investment property obtained through the conversion of a portion of WPG's trade receivables from PT Samudra Bangun Raya. The conversion was carried out in the form of shophouse assets located in Bogor, West Java, which were subsequently recorded as part of the Company's investment property portfolio.

Right-of-Use Assets - Net

As of December 31, 2025, the Company did not record any Right-of-Use Assets–Net, compared to Rp7.48 billion in the previous year. This was mainly due to the expiration of lease agreements for office space at WIKA Tower 1 Jakarta and the Sales Region I North Sumatra on December 31, 2025, which were not renewed. Accordingly, the Company no longer utilized the related right-of-use assets from that date.

Fixed Assets - Net

As of December 31, 2025, the Company's net fixed assets stood at Rp2.89 trillion, a decrease of Rp118.63 billion, or 3.94%, compared to Rp3.01 trillion as of December 31, 2024. This decrease was primarily due to annual depreciation of the Company's fixed assets

Other Long-Term Investments

Other Long-Term Investments as of December 31, 2025 were recorded at Rp6.14 billion, increasing by Rp3.64 billion compared to Rp2.50 billion in the previous year. The increase was influenced by the additional balance of concurrent creditor claims from PT Waskita Beton Precast Tbk, which were converted into non-current assets (Other Long-Term Investments) amounting to Rp3.64 billion

Other Non-Current Assets

As of December 31, 2025, Other Non-Current Assets were recorded at Rp22.66 billion, decreasing by Rp28.22 billion, or 55.47%, compared to Rp50.87 billion in the previous year. The decrease was mainly due to reduced restricted fund placements in time deposit accounts related to credit facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

LIABILITAS

Pada akhir tahun 2025, total Liabilitas Konsolidasian Perseroan tercatat sebesar Rp2,60 triliun, turun sebesar Rp903,47 miliar atau 25,76% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,51 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, mencerminkan peningkatan kemampuan Perseroan dalam mengelola kewajiban finansial.

LIABILITY

At the end of 2025, the Company's total Consolidated Liabilities were recorded at Rp2.60 trillion, decreasing by Rp903.47 billion, or 25.76%, compared to Rp3.51 trillion in the previous year. The decline was mainly attributable to reductions in both current liabilities and non-current liabilities, reflecting the Company's improved ability to manage its financial obligations.

Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2024-2025
Current Liabilities as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Pinjaman Jangka Pendek Short-Term Loan	10.017	0	10.017	100,00
Utang Usaha **Trade Payables**				
Pihak Berelasi Related Parties	307.155	423.068	(115.913)	(27,40)
Pihak Ketiga Third Parties	1.118.217	1.550.944	(432.727)	(27,90)
Utang Pajak Taxes Payables	63.124	65.090	(1.966)	(3,02)
Uang Muka dari Pelanggan Advances from Customer	209.682	214.280	(4.598)	(2,15)
Pendapatan Diterima Dimuka Unearned Revenue	61.829	158.598	(96.769)	(61,02)
Beban Akrual Accrued Expenses	587.333	582.020	5.313	0,91
Utang Lain-lain Other Payables	3.339	1.441	1.899	131,79
Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang **Current Portion of Long-Term Debt**				
Pinjaman Bank Bank Loan	68.351	40.000	28.351	70,88
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	-	6.566	(6.566)	(100,00)
Jumlah **Total**	**2.429.047**	**3.042.007**	**(612.960)**	**(20,15)**

Pada akhir tahun 2025, Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tercatat sebesar Rp2,43 triliun, turun Rp612,96 miliar atau 20,15% dibandingkan dengan Rp3,04 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha baik kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga, pembayaran utang pajak, penurunan uang muka pelanggan, serta pendapatan diterima di muka. Langkah ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam mengelola kewajiban keuangan secara efektif.

At the end of 2025, the Company's short-term liabilities stood at Rp2.43 trillion, down by Rp612.96 billion, or 20.15%, compared to Rp3.04 trillion in 2024. This decrease was primarily due to the repayment of trade payables to both related parties and third parties, the settlement of tax liabilities, a reduction in customer advances, and the recognition of deferred revenue. This reflects the Company's commitment to effectively managing its financial obligations.

Pinjaman Jangka Pendek

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan pinjaman jangka pendek sebesar Rp10,02 miliar. Pinjaman ini merupakan pinjaman dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) hasil perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) dengan PT Citra Lautan Teduh. Pencairan pinjaman baru di tahun berjalan sebesar Rp30,07 miliar. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp20,05 miliar, sehingga saldo pada 31 Desember 2025 adalah Rp10,02 miliar.

Short-Term Loans

In 2025, the Company recorded short-term borrowings of Rp10.02 billion. The borrowing represents a loan from the Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) under the Export Working Capital Credit Facility (KMKE) agreement with PT Citra Lautan Teduh. Loan disbursements during the year totaled Rp30.07 billion, while repayments during the year reached Rp20.05 billion, resulting in an outstanding balance of Rp10.02 billion as of December 31, 2025.

Utang Usaha
Trade Payables

Utang Usaha per 31 Desember 2024-2025
Trade Payables as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Utang Pemasok Supplier Payables	967.322	1.310.551	(343.228)	(26,19)
Utang Subkontraktor Subcontractor Payables	317.747	370.151	(52.404)	(14,16)
Utang Investasi Investment Payables	1.064	37.301	(36.236)	(97,15)
Utang Usaha Supply Chain Financing	139.238	256.009	(116.771)	(45,61)
Jumlah **Total**	**1.425.371**	**1.974.012**	**(548.641)**	**(27,79)**

Per 31 Desember 2025, Utang Usaha Perseroan tercatat sebesar Rp1,43 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp548,64 miliar atau 27,79% dibandingkan dengan Rp1,97 triliun pada 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran sebagian utang kepada pemasok atas pembelian bahan baku yang digunakan dalam pelaksanaan proyek, serta penyelesaian sebagian kewajiban kepada subkontraktor, utang investasi, dan utang usaha melalui skema Supply Chain Financing. Kondisi ini merupakan upaya Perseroan dalam mengelola kewajiban usaha secara lebih optimal dan menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan mitra bisnis.

As of December 31, 2025, the Company's Trade Payables were recorded at Rp1.43 trillion, reflecting a decrease of Rp548.64 billion, or 27.79%, compared to Rp1.97 trillion as of December 31, 2024. The decline was mainly attributable to partial payments to suppliers for raw material purchases used in project execution, as well as the settlement of a portion of obligations to subcontractors, investment payables, and trade payables through the Supply Chain Financing scheme. This condition reflects the Company's efforts to manage operating obligations more optimally while maintaining strong relationships with business partners.

Utang Pajak
Taxes Payables

Utang Pajak per 31 Desember 2024-2025
Taxes Payables as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Perusahaan **Company**				
PPh Pasal 4(2) Income Tax Article 4(2)	10.373	10.042	331	3,30
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	337	773	(437)	(56,46)
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	1.513	1.504	9	0,60
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	2.054	3.095	(1.040)	(33,61)
PPh pasal 25 Income Tax Article 25	-	296	(296)	(100,00)
PPh pasal 26 Income Tax Article 26	195	110	85	77,06
PPh Pasal 29 Income Tax Article 29	2.170	1.553	617	39,69
Pajak Pertambahan Nilai Wapu Wapu Value Added Tax	34.536	38.266	(3.729)	(9,75)
Sub jumlah **Sub-total**	**51.179**	**55.639**	**(4.460)**	**(8,02)**
Entitas Anak **Subsidiaries**				
PPh Pasal 4(2) Income Tax Article 4(2)	2.069	1.071	998	93,20
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	913	296	618	208,95
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	23	23	0	0,00
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	628	711	(83)	(11,67)
PPh pasal 25 Income Tax Article 25	236	461	(225)	(48,89)
PPh Pasal 29 Income Tax Article 29	-	55	(55)	(100,00)
Pajak Pertambahan Nilai Value Added tax	8.077	6.834	1.242	18,17
Sub jumlah **Sub-total**	**11.945**	**9.451**	**2.494**	**26,39**
Jumlah **Total**	**63.124**	**65.090**	**(1.966)**	**(3,02)**

Per 31 Desember 2025, utang pajak Perseroan tercatat sebesar Rp63,12 miliar, turun sebesar Rp1,97 miliar atau 3,02% dibandingkan Rp65,09 miliar pada 31 Desember 2024.

Penurunan ini disebabkan oleh Optimalisasi administrasi perpajakan yang dilakukan secara tepat waktu yaitu, PPN, PPh, dan Pajak Karyawan.

As of December 31, 2025, the Company's tax payables amounted to Rp63.12 billion, showing a decrease of Rp1,97 billion or 3.02% compared to Rp65.09 billion as of December 31, 2024.

This decrease was due to the timely optimization of tax administration, specifically regarding VAT, income tax, and payroll tax.

Uang Muka dari Pelanggan
Advances from Customer

Uang Muka dari Pelanggan per 31 Desember 2024-2025
Advances from Customer as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Pihak Berelasi Related Parties	61.523	28.806	32.717	113,58
Pihak Ketiga Third Parties	148.159	185.474	(37.315)	(20,12)
Jumlah **Total**	**209.682**	**214.280**	**(4.598)**	**(2,15)**

Per 31 Desember 2025, Uang Muka dari Pelanggan tercatat sebesar Rp209,68 miliar, turun Rp4,60 miliar atau 2,15% dibandingkan dengan Rp214,28 miliar pada 31 Desember 2024. Penurunan uang muka tersebut berasal dari kontrak pelanggan dan akan diperhitungkan secara bertahap seiring dengan penyelesaian progres pekerjaan. Kebijakan ini membantu meningkatkan arus kas operasional serta memastikan kelancaran pelaksanaan proyek.

As of December 31, 2025, customer advances totaled Rp209.68 billion, down Rp4.60 billion, or 2.15%, from Rp214.28 billion as of December 31, 2024. This decrease in advance payments stems from customer contracts and will be recognized gradually as work progresses. This policy helps improve operating cash flow and ensures the smooth execution of projects.

Pendapatan Diterima Di Muka
Unearned Revenue

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024-2025
Unearned Revenue as of December 31, 2024-2025

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Pihak Berelasi Related Parties	33.997	70.143	(36.146)	(51,53)
Pihak Ketiga Third Parties	27.832	88.455	(60.623)	(68,54)
Jumlah **Total**	**61.829**	**158.598**	**(96.769)**	**(61,02)**

Per 31 Desember 2025, Pendapatan Diterima di Muka tercatat sebesar Rp61,83 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp96,77 miliar atau 61,02% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp158,60 miliar. Jumlah tersebut merupakan kewajiban pengiriman pesanan yang harus dipenuhi sehubungan dengan tagihan kepada pelanggan telah dilaksanakan dan belum memenuhi kriteria pengakuan penjualan.

As of December 31, 2025, Unearned Revenue was recorded at Rp61.83 billion, reflecting a decrease of Rp96.77 billion, or 61.02%, compared to Rp158.60 billion in the previous year. The balance represents obligations to deliver orders for which billings to customers have been issued but the criteria for revenue recognition have not yet been met.

Beban Akrual
Accrued Expenses

Beban Akrual per 31 Desember 2024-2025
Accrued Expenses as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Beban Pelaksanaan Proyek Project Implementation Expenses	293.347	400.370	(107.023)	(26,73)
Utang dalam Proses Liabilities in Process	225.652	74.116	151.536	204,46
Beban Proyek Project Expenses	16.553	14.175	2.378	16,78
Beban Usaha Operating Expenses	34.656	66.013	(31.356)	(47,50)
Beban Produksi Production Expenses	17.125	27.346	(10.221)	(37,38)
Jumlah **Total**	**587.333**	**582.020**	**5.313**	**0,91**

Per 31 Desember 2025, beban akrual Perseroan tercatat sebesar Rp587,33 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp5,31 miliar atau 0,91% dibandingkan dengan Rp582,02 miliar pada 31 Desember 2024.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya utang dalam proses yang merupakan utang atas pesanan barang yang sudah diterima oleh Perusahaan berupa berita acara penerimaan barang, namun tagihannya masih dalam proses.

As of December 31, 2025, the Company's Accrued Expenses were recorded at Rp587.33 billion, representing an increase of Rp5.31 billion, or 0.91%, compared to Rp582.02 billion as of December 31, 2024.

The increase was mainly attributable to higher goods-in-transit payables, representing liabilities for goods already received by the Company as evidenced by goods receipt reports, however, the receivables are still in the process of collection

Utang Lain-lain
Other Payables

Utang Lain-lain per 31 Desember 2024-2025
Other Payables as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Utang Lain-lain Other Payables	3.339	1.441	1.899	131,79

Per 31 Desember 2025, Utang Lain-lain tercatat sebesar Rp3,34 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp1,90 miliar atau 131,79% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,44 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya kewajiban Perseroan terkait iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun Wijaya Karya, dan Indonesia Financial Group.

As of December 31, 2025, Other Payables were recorded at Rp3.34 billion, representing an increase of Rp1.90 billion, or 131.79%, compared to Rp1.44 billion in the previous year. The increase was mainly attributable to higher obligations related to contributions to BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun Wijaya Karya, and Indonesia Financial Group.

Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang

Per 31 Desember 2025, Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang tercatat sebesar Rp68,35 miliar, meningkat Rp21,79 miliar atau 46,78% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp46,57 miliar. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya kewajiban utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sejak tanggal pelaporan.

Current Portion of Long-Term Debt

As of December 31, 2025, the Current Portion of Long-Term Debt was recorded at Rp68.35 billion, increasing by Rp21.79 billion, or 46.78%, compared to Rp46.57 billion in the previous year. The increase reflects higher long-term debt obligations maturing within one year from the reporting date.

Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2024-2025
Non-Current Liabilities as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Utang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek **Long-Term Debt, Net of Current Portion**				
Pinjaman Bank Bank Loan	134.320	426.254	(291.934)	(68,49)
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	-	-	-	-
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	216	-	216	100,00
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefit Liabilities	32.693	31.495	1.199	3,81
Utang kepada Ventura Bersama Debt to Joint Ventures	8.180	8.167	13	0,16
Jumlah **Total**	**175.409**	**465.915**	**(290.506)**	**(62,35)**

Per 31 Desember 2025, Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tercatat sebesar Rp175,41 miliar, mengalami penurunan Rp290,51 miliar atau 62,35% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp465,92 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengelolaan arus kas yang efektif.

As of December 31, 2025, the Company's long-term liabilities stood at Rp175.41 billion, a decrease of Rp290.51 billion, or 62.35%, compared to the previous year's figure of Rp465.92 billion. This decrease was primarily due to effective cash flow management.

Utang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek

Per 31 Desember 2025, Utang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek tercatat sebesar Rp134,32 miliar, turun Rp291,93 miliar atau 68,49% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp426,25 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh komitmen perusahaan dalam menurunkan utang jangka panjangnya.

Long-Term Debt Net of Current Portion

As of December 31, 2025, long-term debt, net of current portion, stood at Rp134.32 billion, a decrease of Rp291.93 billion, or 68.49%, compared to the previous year's figure of Rp426.25 billion. This decrease was primarily due to the company's commitment to reducing its long-term debt.

Liabilitas Imbalan Kerja

Per 31 Desember 2025, Liabilitas Imbalan Kerja tercatat sebesar Rp32,69 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp1,20 miliar atau 3,81% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp31,50 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh komitmen Perusahaan dalam memberikan imbalan pensiun berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Employee Benefits Liabilities

As of December 31, 2025, Employee Benefits Liabilities were recorded at Rp32.69 billion, representing an increase of Rp1.20 billion, or 3.81%, compared to Rp31.50 billion in the previous year. This increase is primarily due to the Company's commitment to providing pension benefits based on employees' pensionable earnings and years of service.

Utang Ventura Bersama

Per 31 Desember 2025, Utang Ventura Bersama tercatat sebesar Rp8,18 miliar, mengalami peningkatan Rp13 juta atau 0,16% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp8,17 miliar. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya Kerja Sama Operasi baru antara PT Wijaya Karya Beton Tbk dengan STA. Clara dalam Proyek Metro Manila Subway Project CP-102.

Joint Venture Payables

As of December 31, 2025, Joint Venture Payables were recorded at Rp8.18 billion, increasing by Rp13 million, or 0.16%, compared to Rp8.17 billion in the previous year. The increase was influenced by a new joint operation between PT Wijaya Karya Beton Tbk and STA. Clara for the Metro Manila Subway Project CP-102.

EKUITAS
EQUITY

Ekuitas per 31 Desember 2024-2025
Equity as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	3.627.761	3.592.597	35.164	0,98
Kepentingan Nonpengendali Non-Controlling Interest	58.251	94.169	(35.918)	(38,14)
Jumlah **Total**	**3.686.012**	**3.686.766**	**(754)**	**(0,02)**

Per 31 Desember 2025, total Ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp3,69 triliun, mengalami penurunan Rp754 juta atau 0,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali seiring dengan penurunan laba tahun berjalan.

As of December 31, 2025, the Company's total Equity was recorded at Rp3.69 trillion, reflecting a decrease of Rp754 million, or 0.02%, compared to the previous year. The decline was mainly attributable to a decrease in equity attributable to non-controlling interests in line with lower profit for the year.

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebesar Rp35,16 miliar atau 0,98%, menjadi Rp3,63 triliun dari sebelumnya Rp3,59 triliun. Sementara itu, kepentingan non pengendali mengalami penurunan sebesar Rp35,92 miliar atau 38,14%, menjadi Rp58,25 miliar dari Rp94,17 miliar pada tahun sebelumnya.

Equity attributable to owners of the parent entity rose by Rp35.16 billion or 0.98%, reaching Rp3.63 trillion from Rp3.59 trillion. Meanwhile, non-controlling interest decreased by Rp35.92 billion or 38.14%, to Rp58.25 billion from Rp94.17 billion in the previous year.

Secara keseluruhan, struktur permodalan Perseroan tetap kuat. Rasio ekuitas terhadap total aset tercatat sebesar 58,60%, menunjukkan bahwa lebih dari setengah aset Perseroan didanai oleh modal sendiri. Hal ini mencerminkan ketergantungan yang terkendali terhadap liabilitas dan memberikan fleksibilitas keuangan yang baik dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan. Dengan posisi ekuitas yang stabil dan sehat, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Overall, the Company's capital structure remains solid. The equity-to-total-assets ratio stood at 58.60%, indicating that more than half of the Company's assets are financed by equity. This reflects a well-controlled reliance on liabilities and provides strong financial flexibility to face future business challenges. With a stable and healthy equity position, the Company is well-positioned to support sustainable growth.



Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2024-2025

Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income in 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha Revenues	3.585.862	4.896.024	(1.310.162)	(26,76)
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(3.328.961)	(4.522.338)	1.193.377	(26,39)
Laba Bruto Gross Profit	256.901	373.686	(116.785)	(31,25)
Beban Usaha **Operating Expenses**				
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(146.382)	(154.381)	7.999	(5,18)
Beban Pengembangan Bisnis Business Development Expenses	(3.430)	(4.700)	1.270	(27,02)
Beban Pemasaran Marketing Expenses	(738)	(1.196)	458	(38,32)
Jumlah Beban Usaha **Total Operating Expenses**	**(150.550)**	**(160.277)**	**9.727**	**(6,07)**
Laba Usaha Operating Income	106.351	213.409	(107.058)	(50,17)
Penghasilan (Beban) Lain-lain **Other Income (Expenses)**				
Beban Nilai Instrumen Keuangan Loss on Impairment of Financial Instruments	10.753	(2.156)	12.909	(598,71)
Pendapatan Bunga Interest Income	5.021	4.673	348	7,44
Laba atas Penjualan Aset Tetap Gain on Sale of Fixed Assets	1.002	1.478	(476)	(32,20)
Bagian atas Laba (Rugi) pada Ventura Bersama Share in Profit (Loss) from Joint Ventures	8.891	(1.426)	10.317	(723,33)
Laba (Rugi) Selisih Kurs Gain (Loss) on Foreign Exchange	821	508	313	61,68
Beban Pajak Final Final Income Tax	(21.044)	(28.788)	7.744	(26,90)
Beban Bunga Interest Expense	(19.701)	(36.784)	17.083	(46,44)
Beban Lain-lain Bersih Others Expenses - Net	(72.233)	(63.433)	(8.800)	13,87
Jumlah Beban Lain-Lain **Total Other Expenses**	**(86.490)**	**(125.929)**	**39.438**	**(31,32)**
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	19.861	87.481	(67.620)	(77,30)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(15.739)	(23.281)	7.542	(32,40)
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Income for the Year	4.122	64.200	(60.077)	(93,58)

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Penghasilan Komprehensif Lain **Other Comprehensive Income**				
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: **Items that will not be Reclassified Subsequently to Profit or Loss:**				
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti Remeasurement on Defined Benefit Liabilities	2.149	4.305	(2.157)	(50,09)
Pajak Penghasilan Terkait Related Tax	(472)	(945)	472	(49,99)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak **Total Other Comprehensive Income for the Year Net of Tax**	**1.676**	**3.361**	**(1.684)**	**(50,12)**
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan **Total Comprehensive Income for the Year**	**5.798**	**67.560**	**(61.762)**	**(91,42)**
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: **Income for the Year Attributable to:**				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	40.020	65.004	(24.985)	(38,44)
Kepentingan Nonpengendali Non-Controlling Interest	(35.898)	(805)	(35.092)	4.360,50
Jumlah **Total**	**4.122**	**64.200**	**(60.077)**	**(93,58)**
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: **Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:**				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	41.701	68.361	(26.660)	(39,00)
Kepentingan Nonpengendali Non-Controlling Interest	(35.903)	(801)	(35.101)	4.382,48
Jumlah **Total**	**5.798**	**67.560**	**(61.761)**	**(91,42)**
Laba Bersih Per Saham Dasar (Nilai Penuh) Basic Earning Per Share (Full Amount)	4,59	7,46	(2,87)	(38,47)

Pada tahun 2025, Pendapatan usaha mengalami penurunan yang diikuti dengan penurunan laba bruto dan laba usaha. Meskipun demikian, Perseroan terus melakukan berbagai upaya pengelolaan operasional dan strategi bisnis secara lebih optimal guna menjaga stabilitas kinerja serta memperkuat daya saing di tengah dinamika pasar.

In 2025, operating revenues declined, followed by decreases in gross profit and operating profit. Nevertheless, the Company continued to undertake various operational management efforts and optimize its business strategies to maintain performance stability and strengthen competitiveness amid market dynamics.

Pendapatan Usaha
Revenues

Pendapatan Usaha Tahun 2024-2025
Revenues in 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Produk Putar Spun Concrete	1.945.920	2.540.509	(594.589)	(23,40)
Produk Non Putar Precast Concrete	1.156.450	1.801.038	(644.588)	(35,79)
Sub Jumlah **Sub-Total**	**3.102.370**	**4.341.547**	**(1.239.177)**	**(28,54)**
Jasa Services	174.477	193.490	(19.013)	(9,83)
Konstruksi Construction	309.015	360.987	(51.972)	(14,40)
Jumlah **Total**	**3.585.862**	**4.896.024**	**(1.310.162)**	**(26,76)**

Sepanjang tahun 2025, Perseroan mencatat Pendapatan Usaha sebesar Rp3,59 triliun, turun Rp1,31 triliun atau 26,76% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,90 triliun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya penjualan produk pracetak, baik pada kategori produk putar maupun non-putar. Selain itu, kinerja pada segmen usaha jasa dan konstruksi juga mengalami penurunan, yang pada akhirnya turut memengaruhi penurunan pendapatan usaha Perseroan secara keseluruhan.

Throughout 2025, the Company recorded Operating Revenues of Rp3.59 trillion, decreasing by Rp1.31 trillion, or 26.76%, compared to Rp4.90 trillion in the previous year. The decline was mainly influenced by lower sales of precast products, both spun and non-spun categories. In addition, performance in the services and construction segment also declined, which ultimately contributed to the overall decrease in the Company's operating revenues.

Penjualan Produk Beton

Pada tahun 2025, Penjualan Produk Beton Perseroan mencapai Rp2,72 triliun, berkurang Rp1,11 triliun atau 28,99% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,84 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya penjualan terhadap produk beton, baik pada produk putar maupun produk non-putar yang dengan penurunan masing-masing sebesar 23,40% dan 35,79% dibandingkan tahun 2024.

Berikut adalah rincian Penjualan Produk Beton berdasarkan wilayah operasi untuk tahun 2025.

Concrete Product Sales

In 2025, the Company's Concrete Product Sales reached Rp2.72 trillion, decreasing by Rp1.11 trillion, or 28.99%, compared to Rp3.84 trillion in the previous year. The decline was driven by lower sales of concrete products in both spun and non-spun categories, which decreased by 23.40% and 35.79%, respectively, compared to 2024.

The following presents the breakdown of Concrete Product Sales by operating region for 2025.

Penjualan Produk Beton berdasarkan Wilayah Operasi Tahun 2024-2025
Sales of Concrete Products based on Operational Area in 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Wilayah Penjualan I-Sumatera Utara Sales Area I-North Sumatra	211.223	379.378	(168.155)	(44,32)
Wilayah Penjualan II Sumatera Selatan Sales Area II-South Sumatra	275.118	375.620	(100.502)	(26,76)
Wilayah Penjualan III-DKI Jakarta Sales Area III-DKI Jakarta	767.743	1.281.626	(513.883)	(40,10)
Wilayah penjualan IV - Kalimantan(*) Sales Area IV-Kalimantan	239.031	375.607	(136.577)	(36,36)
Wilayah Penjualan V-Jawa Timur Sales Area V-East Java	451.154	554.020	(102.866)	(18,57)
Wilayah Penjualan VI Sulawesi Selatan Sales Area VI -South Sulawesi	244.733	218.004	26.729	12,26
Divisi Operasi(**) Operation Division	535.634	652.697	(117.063)	(17,94)
Jumlah Penjualan Perusahaan **Total Sales of the Company**	**2.724.636**	**3.836.953**	**(1.112.316)**	**(28,99)**
Entitas Anak **Subsidiaries**				
PT Wijaya Karya Komponen Beton	72.106	83.128	(11.021)	(13,26)
PT Wijaya Karya Krakatau Beton	25.558	126.628	(101.070)	(79,82)
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	9.523	50.116	(40.593)	(81,00)
PT Citra Lautan Teduh	270.546	244.723	25.863	10.55
Jumlah Penjualan entitas Anak **Total Sales of Subsidiaries**	**377.734**	**504.595**	**(126.861)**	**(25,14)**
Jumlah **Total**	**3.102.370**	**4.341.547**	**(1.239.177)**	**(28,54)**

(*) Pada tahun 2021 pengelolaan Wilayah Penjualan IV - Semarang digabung ke Wilayah Penjualan V - Surabaya
(*) In 2021 the management of Sales Region IV - Semarang is merged into Sales Region V - Surabaya

Pada tahun 2025, Penjualan Produk Beton yang berasal dari Perusahaan Induk mencapai Rp2,72 triliun, turun Rp1,11 triliun atau 28,99% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,84 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya penjualan di beberapa wilayah, terutama Wilayah Penjualan III-DKI Jakarta yang mencatat penurunan Rp513,88 miliar atau 40,10%. Wilayah Penjualan I-Sumatera Utara juga mencatat penurunan sebesar Rp168,16 miliar atau 44,32%.

In 2025, Concrete Product Sales generated by the Parent Company reached Rp2.72 trillion, decreasing by Rp1.11 trillion, or 28.99%, compared to Rp3.84 trillion in the previous year. The decline was influenced by lower sales across several regions, particularly Sales Region III–DKI Jakarta, which recorded a decrease of Rp513.88 billion, or 40.10%. Sales Region I–North Sumatra also recorded a decrease of Rp168.16 billion, or 44.32%.

Wilayah lainnya juga mengalami penurunan penjualan, seperti :

- Wilayah Penjualan II-Sumatera Selatan yang turun Rp100,50 miliar atau turun 26,76%
- Wilayah Penjualan IV-Kalimantan turun Rp136,58 miliar atau turun 36,36%
- Wilayah Penjualan V-Jawa Timur turun Rp102,87 miliar atau turun 18,57%
- Divisi Operasi turun Rp117,06 miliar atau turun 17,94%.

Other regions also experienced declines in sales, including:

- Sales Region II–South Sumatra, down by Rp100.50 billion, or 26.76%
- Sales Region IV–Kalimantan, down by Rp136.58 billion, or 36.36%
- Sales Region V–East Java, down by Rp102.87 billion, or 18.57%
- Operations Division, down by Rp117.06 billion, or 17.94%

Penurunan ini terutama disebabkan oleh kebijakan project selection yang mewajibkan pelanggan memenuhi ketentuan pembayaran uang muka dan progres produksi.

The decline was mainly attributable to the project selection policy requiring customers to meet down payment and production progress payment terms.

Pada tahun 2025, Penjualan Produk Beton Perseroan masih didominasi oleh Wilayah Penjualan III-Jakarta dengan kontribusi terbesar, yaitu 28,18%. Divisi Operasi dan Wilayah Penjualan V - Jawa Timur juga menjadi salah satu kontributor terbesar pada penjualan produk beton dengan masing-masing kontribusi sebesar 19,66% dan 16,56%.

In 2025, the Company's Concrete Product Sales remained dominated by Sales Region III–Jakarta, which contributed the largest share at 28.18%. the Operations Division and Sales Region V–East Java were also among the largest contributors to concrete product sales, with contributions of 19.66% and 16.56%, respectively.

Sementara itu, Penjualan Produk Beton dari Entitas Anak tercatat sebesar Rp377,73 miliar, turun Rp126,86 miliar atau 25,14% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp504,60 miliar. Penurunan ini terutama didorong oleh penurunan penjualan sebesar 79,82% dari entitas anak, PT Wijaya Karya Krakatau Beton.

Meanwhile, Concrete Product Sales from Subsidiaries were recorded at Rp377.73 billion, decreasing by Rp126.86 billion, or 25.14%, compared to Rp504.60 billion in the previous year. The decline was primarily driven by a 79.82% decrease in sales from the subsidiary, PT Wijaya Karya Krakatau Beton.

Jasa
Services

Pendapatan Jasa berdasarkan Wilayah Operasi Tahun 2024-2025
Revenues from Services Business Unit based on Operational Area in 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Wilayah Penjualan I-Sumatera Utara Sales Area I-North Sumatra	14.885	74.877	(59.992)	(80,12)
Wilayah Penjualan II Sumatera Selatan Sales Area II-South Sumatra	22.233	4.961	17.272	348,19
Wilayah Penjualan III-DKI Jakarta Sales Area III-DKI Jakarta	69.787	4.128	65.658	1.590,49
Wilayah Penjualan V-Jawa Timur Sales Area V-East Java	-	16.350	(16.350)	(100,00)
Wilayah Penjualan VI Sulawesi Selatan Sales Area VI -South Sulawesi	13.270	65	13.205	20.164,90

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Wilayah Penjualan Cabang Filipina - DKI Jakarta Overseas Sales Filipina – DKI Jakarta	4.369	-	4.369	100,00
Divisi Operasi Operation Division	40.199	75.871	(35.673)	(47,02)
Jumlah Penjualan Perusahaan **Total Sales of the Company**	**164.743**	**176.253**	**(11.510)**	**(6,53)**
Entitas Anak **Subsidiaries**				
PT Citra Lautan Teduh	1.455	6.350	(4.895)	(77,09)
PT Wijaya Karya Komponen Beton	8.279	10.888	(2.609)	(23,96)
Jumlah Penjualan entitas Anak **Total Sales of Subsidiaries**	**9.734**	**17.237**	**(7.503)**	**(43,53)**
Jumlah **Total**	**174.477**	**193.490**	**(19.013)**	**(9,83)**

(*) Pada tahun 2021 pengelolaan Wilayah Penjualan IV - Semarang digabung ke Wilayah Penjualan V - Surabaya
(*) In 2021 the management of Sales Region IV - Semarang is merged into Sales Region V - Surabaya

Pada tahun 2025, Pendapatan Jasa Perseroan mencapai Rp174,48 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp19,01 miliar atau 9,83% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp193,49 miliar. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan di beberapa wilayah, termasuk Wilayah V-Jawa Timur, Wilayah Penjualan I-Sumatera Utara, PT Citra Lautan Teduh, Divisi Operasi, PT Wijaya Karya Komponen Beton, dengan penurunan masing-masing sebesar 100%, 80,12%, 77,09%, 47,02%, dan 23,96%.

Namun, beberapa wilayah mengalami peningkatan pendapatan jasa, di antaranya:

- Wilayah Penjualan II - Sumatera Selatan, naik 348,19% atau Rp17,27 miliar
- Wilayah III - DKI Jakarta naik 1.590,49% atau Rp65,66 miliar
- Wilayah Penjualan VI - Sulawesi Selatan, naik 20.164,90% atau Rp13,21 miliar
- Wilayah Penjualan Cabang Filipina - DKI Jakarta, naik 100% atu Rp4,37 miliar

Dari segi komposisi, Pendapatan Jasa yang dibukukan oleh Perusahaan Induk pada tahun 2025 didominasi oleh tiga wilayah utama:

- Wilayah Penjualan III - DKI Jakarta, dengan kontribusi terbesar sebesar 40,00%
- Divisi Operasi, sebesar 23,04%
- Wilayah Penjualan II - Sumatera Selatan, sebesar 12,74%

In 2025, the Company recorded Service Revenues of Rp174.48 billion, reflecting a decrease of Rp19.01 billion, or 9.83%, compared to Rp193.49 billion in the previous year. The decline was mainly influenced by lower revenues in several regions, including This decline was primarily driven by decreased revenue in several regions, including Region V–East Java, Sales Region I–North Sumatra, PT Citra Lautan Teduh, the Operations Division, and PT Wijaya Karya Komponen Beton, with respective declines of 100%, 80.12%, 77.09%, 47.02%, and 23.96%.

However, several regions recorded increases in service revenues, including:

- Sales Region II – South Sumatra, up by 348.19% or Rp17.27 billion
- Region III – DKI Jakarta, up by 1,590.49% or Rp65.66 billion
- Sales Region VI – South Sulawesi, up by 20,164.90% or Rp13.21 billion
- Overseas Sales Filipina – DKI Jakarta, up by 100% or Rp4.37 billion

In terms of composition, Service Revenues recognized by the Parent Company in 2025 were dominated by three main regions:

- Sales Region III – DKI Jakarta, contributing the largest share at 40.00%
- Operations Division, contributing 23.04%
- Sales Region II – South Sumatra, contributing 12.74%

Selain itu, PT Wijaya Karya Komponen Beton turut memberikan kontribusi sebesar 4,75% terhadap total pendapatan jasa, semakin memperkuat kinerja segmen jasa secara keseluruhan.

In addition, PT Wijaya Karya Komponen Beton contributed 4.75% to total service revenues, further strengthening the overall performance of the services segment.

Konstruksi
Construction

Pendapatan Konstruksi berdasarkan Wilayah Operasi Tahun 2024-2025
Revenues from Construction Business Unit based on Operational Area in 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Wilayah Penjualan III-DKI Jakarta Sales Area III- DKI Jakarta	58.829	50.758	8.071	15,90
Signaling Jalur Ganda Kereta Api	-	15.803	(15.803)	(100,00)
Divisi Operasi Operation Division	194.420	64.975	129.445	199,22
Jumlah **Total**	**253.249**	**131.536**	**121.713**	**92,53**
Entitas Anak **Subsidiaries**				
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	54.881	191.918	(137.037)	(71,40)
PT Wijaya Karya Komponen Beton	885	37.533	(36.647)	(97,64)
Jumlah Penjualan Entitas Anak Total Revenues of Subsidiaries	55.766	229.451	(173.685)	(75,70)
Jumlah **Total**	**309.016**	**360.987**	**(51.971)**	**(14,40)**

Pendapatan Konstruksi Tahun 2025

Pada tahun 2025, Pendapatan Konstruksi Perseroan mencapai Rp309,02 miliar, mengalami penurunan Rp51,97 miliar atau 14,40% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp360,99 miliar. Penurunan ini terutama berasal dari berakhirnya proyek Signaling Jalur Ganda Kereta Api serta berkurangnya pendapatan dari entitas anak baik PT Wijaya Karya Pracetak Gedung dan PT Wijaya Karya Komponen Beton dengan pengurangan masing-masing sebesar 71,40% dan 97,64%.

Namun beberapa wilayah penjualan mengalami peningkatan, diantaranya:
- Wilayah Penjualan III - DKI Jakarta, meningkat Rp8,07 miliar atau 15,90%
- Divisi Operasi, meningkat Rp129,45 miliar atau 199,22%.

Dari segi komposisi, Pendapatan Konstruksi yang dibukukan pada tahun 2025 didominasi oleh Divisi Operasi dengan kontribusi sebesar 62,92% dan didukung oleh entitas anak dengan kontribusi sebesar 18,05%.

Construction Revenue in 2025

In 2025, the Company's construction revenue reached Rp309.02 billion, a decrease of Rp51.97 billion, or 14.40%, compared to the previous year's figure of Rp360.99 billion. This decreased was primarily due to the completion of the Double-Track Railway Signaling project and reduced revenue from subsidiaries, namely PT Wijaya Karya Pracetak Gedung and PT Wijaya Karya Komponen Beton, with decreases of 71.40% and 97.64%.

However, several sales regions recorded increases, including:
- Sales Region III – DKI Jakarta, increasing by Rp8.07 billion, or 15.90%
- Operations Division, increasing by Rp129.45 billion, or 199.22%

In terms of composition, Construction Revenue recognized in 2025 was dominated by the Operations Division, which contributed 62.92%, and supported by subsidiaries with a contribution of 18.05%.

Secara keseluruhan, penurunan Pendapatan Konstruksi pada tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh berkurangnya kontribusi dari beberapa proyek utama serta penurunan pendapatan pada entitas anak. Meskipun demikian, peningkatan kinerja pada beberapa wilayah penjualan dan Divisi Operasi menunjukkan adanya upaya Perseroan dalam menjaga kontribusi pendapatan konstruksi melalui optimalisasi proyek dan aktivitas operasional.

Overall, the decline in Construction Revenue in 2025 was primarily influenced by lower contributions from several major projects and decreased revenue from subsidiaries. Nevertheless, improved performance in several sales regions and the Operations Division reflects the Company's efforts to maintain construction revenue contributions through project optimization and operational activities.

Beban Pokok Pendapatan
Cost of Revenues

Beban Pokok Pendapatan Tahun 2024-2025
Cost of Revenues in 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Persediaan Barang Jadi Awal Finished good at the Beginning	503.453	680.771	(177.319)	(26,05)
Produksi Barang Jadi Finished Good Production	2.127.038	2.780.016	(652.978)	(23,49)
Persediaan Barang Jadi Akhir Finished Good at the Ending	(524.395)	(503.453)	(20.942)	4,16
Subjumlah **Sub-Total**	**2.106.096**	**2.957.335**	**(851.239)**	**(28,78)**
Biaya Langsung Produksi **Direct Cost of Production**				
Biaya Pelaksanaan Proyek Project Implementation Cost	576.145	840.136	(263.991)	(31,42)
Biaya Material Materials Cost	77.927	100.362	(22.435)	(22,35)
Biaya Operasional Proyek Operational Project Cost	48.849	71.096	(22.248)	(31,29)
Biaya Upah Tenaga Kerja Labor Cost	4.232	2.839	1.393	49,07
Subjumlah **Sub-Total**	**707.153**	**1.014.434**	**(307.281)**	**(30,29)**
Biaya Tidak Langsung Produksi **Indirect Cost of Production**				
Biaya Penyusutan Depreciation Cost	113.935	116.243	(2.308)	(1,99)
Biaya Administrasi dan Umum Administrative and General Cost	95.138	79.806	15.332	19,21
Biaya Penelitian dan Pengembangan Research and Development Cost	13.140	15.953	(2.813)	(17,63)
Biaya Pemasaran dan Penjualan Marketing and Sales Cost	599	634	(35)	(5,49)
Subjumlah **Sub-Total**	**222.812**	**212.636**	**10.176**	**4,79**
Jasa Konstruksi **Construction**				
Biaya Material Materials Cost	129.198	167.044	(37.846)	(22,66)
Subkontraktor Subcontractor	90.753	90.036	717	0,80

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Biaya Upah Labor Cost	30.817	24.011	6.805	28,34
Biaya Tidak Langsung Overhead Cost	30.231	14.951	15.281	102,21
Biaya Peralatan Equipment Cost	11.901	41.892	(29.991)	(71,59)
Subjumlah **Sub-Total**	**292.900**	**337.933**	**(45.034)**	**(13,33)**
Jumlah **Total**	**3.328.961**	**4.522.338**	**(1.193.377)**	**(26,39)**

Pada tahun 2025, Beban Pokok Pendapatan Perseroan tercatat sebesar Rp3,33 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp1,19 triliun atau 26,39% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,52 triliun. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya volume produksi dan aktivitas penjualan Perseroan selama tahun berjalan.

In 2025, the Company's Cost of Revenues was recorded at Rp3.33 trillion, reflecting a decrease of Rp1.19 trillion, or 26.39%, compared to Rp4.52 trillion in the previous year. The decline was in line with lower production volumes and reduced sales activities during the year.

Penurunan utama berasal dari Produksi Barang Jadi yang mencapai Rp2,13 triliun, turun sebesar Rp652,98 miliar atau 23,49% dibandingkan tahun 2024. Perubahan nilai Persediaan Barang Jadi juga turut memengaruhi, di mana nilai persediaan akhir tahun yang lebih tinggi menyebabkan penurunan beban pokok secara keseluruhan.

The main decrease came from Finished Goods Production, which reached Rp2.13 trillion, down by Rp652.98 billion, or 23.49%, compared to 2024. Changes in Finished Goods Inventory also contributed, as higher year-end inventory levels led to an overall reduction in cost of revenues.

Biaya Langsung Produksi pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp707,15 miliar, menurun sebesar Rp307,28 miliar atau 30,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,01 triliun. Penurunan ini terutama sejalan dengan berkurangnya volume produksi dan aktivitas proyek selama tahun berjalan, yang berdampak pada menurunnya kebutuhan material serta biaya pelaksanaan proyek.

Direct Production Costs in 2025 were recorded at Rp707.15 billion, decreasing by Rp307.28 billion, or 30.29%, compared to Rp1.01 trillion in the previous year. The decline was mainly in line with lower production volumes and project activities during the year, which reduced material requirements and project execution costs.

Sementara itu, Biaya Tidak Langsung Produksi mengalami kenaikan sebesar Rp10,18 miliar atau 4,79%, menjadi Rp222,81 miliar dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp212,64 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban administrasi dan umum yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, termasuk biaya pengelolaan administrasi, dukungan manajemen, serta penunjang kelancaran proses produksi dan operasional perusahaan.

Meanwhile, Indirect Production Costs increased by Rp10.18 billion, or 4.79%, to Rp222.81 billion compared to Rp212.64 billion in 2024. The increase was primarily attributable to higher general and administrative expenses supporting the Company's operations, including administrative management costs, management support, and expenses related to maintaining the smooth execution of production and operational activities.

Di sisi lain, Biaya Jasa Konstruksi tercatat sebesar Rp292,90 miliar pada tahun 2025, turun Rp45,03 miliar atau 13,33% dibandingkan tahun sebelumnya yang

On the other hand, Construction Service Costs were recorded at Rp292.90 billion in 2025, decreasing by Rp45.03 billion, or 13.33%, compared to Rp337.93 billion

sebesar Rp337,93 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya biaya material dan biaya peralatan, meskipun terdapat peningkatan pada pos biaya subkontraktor, biaya upah dan biaya tidak langsung.

in the previous year. The decline was influenced by lower material and equipment costs, despite increases in subcontractor costs, labor costs, and indirect costs.

Secara keseluruhan, penurunan Beban Pokok Pendapatan mencerminkan adanya penyesuaian pada struktur biaya operasional Perseroan seiring dengan dinamika kegiatan usaha, sekaligus mencerminkan upaya Perseroan dalam pengelolaan biaya produksi dan operasional secara lebih efisien.

Overall, the decrease in Cost of Revenues reflects adjustments in the Company's operating cost structure in line with business activity dynamics, as well as the Company's efforts to manage production and operational costs more efficiently.

Laba Bruto

Pada tahun 2025, Perseroan membukukan Laba Bruto sebesar Rp256,90 miliar, turun Rp116,79 miliar atau 31,25% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp373,69 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya omzet penjualan di berbagai segmen usaha, termasuk produk beton, jasa, dan konstruksi, seiring dengan berkurangnya penjualan dan aktivitas proyek.

Penurunan Laba Bruto juga menunjukkan adanya penurunan pendapatan usaha serta dinamika biaya produksi dan jasa. Meskipun demikian, Perseroan terus berupaya mengelola biaya secara lebih efisien dan menjaga efektivitas operasional, sehingga kinerja usaha tetap terjaga dan menjadi dasar yang kuat untuk mendukung pertumbuhan Perseroan di masa mendatang.

Gross Profit

In 2025, the Company recorded Gross Profit of Rp256.90 billion, decreasing by Rp116.79 billion, or 31.25%, compared to Rp373.69 billion in the previous year. The decline was driven by lower sales turnover across various business segments, including concrete products, services, and construction, in line with reduced sales and project activities.

The decrease in Gross Profit also reflects lower operating revenues and changes in production and service cost dynamics. Nevertheless, the Company continues to improve cost efficiency and maintain operational effectiveness, ensuring that business performance remains stable and providing a solid foundation to support future growth.

Beban Usaha
Operating Expenses

Beban Usaha Tahun 2024-2025
Operating Expenses in 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Beban Administrasi dan Umum Administrative and General Expenses	146.382	154.381	(7.999)	(5,18)
Beban Pengembangan Usaha Business Development Expenses	3.430	4.700	(1.270)	(27,02)
Beban Pemasaran Marketing Expenses	738	1.196	(458)	(38,32)
Jumlah **Total**	**150.550**	**160.277**	**(9.727)**	**(6,07)**

Beban Usaha

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan Beban Usaha sebesar Rp150,55 miliar, turun sebesar Rp9,73 miliar atau 6,07% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp160,28 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya Beban Administrasi dan Umum, Beban Pengembangan Usaha, serta Beban Pemasaran.

Operating Expenses

In 2025, the Company recorded Operating Expenses of Rp150.55 billion, decreasing by Rp9.73 billion, or 6.07%, compared to Rp160.28 billion in the previous year. The decline was mainly attributable to lower General and Administrative Expenses, Business Development Expenses, and Marketing Expenses. The reduction across

Penurunan seluruh komponen beban ini mencerminkan upaya Perseroan dalam melakukan pengendalian biaya operasional secara lebih efisien serta menyesuaikan dengan aktivitas usaha serta kondisi operasional selama tahun berjalan.

these expense components reflects the Company's efforts to control operating costs more efficiently and align them with business activities and operational conditions during the year.

Laba Usaha

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan Laba Usaha sebesar Rp106,35 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp107,06 miliar atau 50,17% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp213,41 miliar. Penurunan ini sejalan dengan adanya penurunan pada pendapatan usaha selama tahun berjalan.

Operating Profit

In 2025, the Company recorded Operating Profit of Rp106.35 billion, decreasing by Rp107.06 billion, or 50.17%, compared to Rp213.41 billion in the previous year. The decline was in line with the decrease in operating revenues during the year.

Beban Lain-lain
Other Expenses

Penghasilan (Beban) Lain-lain Tahun 2024-2025
Other income (expenses) in 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Penghasilan (Beban) Lain-lain **Other Income (Expenses)**				
Beban Nilai Instrumen Keuangan Loss on Impairment of Financial Instruments	10.753	(2.156)	12.909	(598,71)
Pendapatan Bunga Interest Income	5.021	4.673	348	7,44
Laba atas Penjualan Aset Tetap Gain on Sale of Fixed Assets	1.002	1.478	(476)	(32,20)
Bagian atas Laba (Rugi) pada Ventura Bersama Share in Profit (Loss) from Joint Ventures	8.891	(1.426)	10.317	(723,33)
Laba (Rugi) Selisih Kurs Gain (Loss) on Foreign Exchange	821	508	313	61,68
Beban Pajak Final Final Income Tax	(21.044)	(28.788)	7.744	(26,90)
Beban Bunga Interest Expense	(19.701)	(36.784)	17.083	(46,44)
Beban Lain-lain Bersih Others Expenses- Net	(72.233)	(63.433)	(8.800)	13,87
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain **Total other income (expenses)**	**(86.490)**	**(125.929)**	**39.438**	**(31,32)**
Laba Sebelum Pajak **Profit Before Tax**	**19.861**	**87.481**	**(67.620)**	**(77,30)**
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(15.739)	(23.281)	7.543	(32,40)
Laba Bersih Tahun Berjalan **Net Income for the Year**	**4.122**	**64.200**	**(60.077)**	**(93,58)**

Pendapatan (Beban) lain-lain

Pada tahun 2025, Beban Lain-lain Perseroan tercatat sebesar Rp86,49 miliar, turun Rp39,44 miliar atau 31,32% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp125,93 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya beban nilai instrumen keuangan, beban bunga, serta adanya keuntungan dari nilai instrumen keuangan dan laba pada ventura bersama, yang mencerminkan strategi pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

Other Income (Expenses)

In 2025, the Company recorded Other Expenses of Rp86.49 billion, decreasing by Rp39.44 billion, or 31.32%, compared to Rp125.93 billion in the previous year. The decline was mainly attributable to lower financial instrument losses and interest expenses, as well as gains from financial instruments and profits from joint ventures, reflecting more effective and efficient financial management strategies.

Beban Pajak Penghasilan

Pada tahun 2025, Beban Pajak Penghasilan Perseroan tercatat sebesar Rp15,74 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp7,54 miliar atau 32,40% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp23,28 miliar. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya laba sebelum pajak, yang turut berdampak pada besarnya beban pajak yang harus diakui Perseroan.

Income Tax Expense

In 2025, the Company's Income Tax Expense was recorded at Rp15.74 billion, decreasing by Rp7.54 billion, or 32.40%, compared to Rp23.28 billion in the previous year. The decrease was in line with lower profit before tax, which affected the amount of tax expense recognized by the Company.

Laba Tahun Berjalan

Pada tahun 2025, Laba Tahun Berjalan Perseroan mencapai Rp4,12 miliar, turun sebesar Rp60,08 miliar atau 93,58% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp64,20 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan usaha.

Profit for the Year

In 2025, the Company recorded Profit for the Year of Rp4.12 billion, decreasing by Rp60.08 billion, or 93.58%, compared to Rp64.20 billion in 2024. The decline was influenced by lower operating revenues.

Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak

Pada tahun 2025, Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak Perseroan tercatat sebesar Rp1,68 miliar, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,36 miliar. Penurunan ini terutama berasal dari pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti.

Other Comprehensive Income for the Current Year After Tax

In 2025, the Company's Other Comprehensive Income for the Year, Net of Tax, was recorded at Rp1.68 billion, decreasing compared to Rp3.36 billion in the previous year. The decline mainly resulted from remeasurement of defined benefit liabilities.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2025, Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan mencapai Rp5,80 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp61,76 miliar atau 91,42% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp67,56 miliar. Meskipun demikian, Perseroan tetap berupaya menjaga stabilitas kinerja melalui pengelolaan operasional yang lebih efisien serta optimalisasi strategi bisnis guna mendukung kelangsungan usaha di masa mendatang.

Comprehensive Income for the Year

In 2025, the Company recorded Total Comprehensive Income for the Year of Rp5.80 billion, decreasing by Rp61.76 billion, or 91.42%, compared to Rp67.56 billion in 2024. Nevertheless, the Company continues to maintain performance stability through more efficient operational management and optimization of business strategies to support business sustainability in the future.

Laba Bersih per Saham Dasar

Pada tahun 2025, Laba Bersih per Saham Dasar Perseroan tercatat sebesar Rp4,59, turun sebesar Rp2,87 atau 38,47% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp7,46. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya laba bersih Perseroan sepanjang tahun berjalan.

Basic Earnings per Share (EPS)

In 2025, the Company's Basic Earnings per Share were recorded at Rp4.59, decreasing by Rp2.87, or 38.47%, compared to Rp7.46 in 2024. The decline was in line with lower net profit during the year.

LAPORAN ARUS KAS
Statements of Cash Flows

Laporan Arus Kas Konsolidasi per 31 Desember 2024-2025
Consolidated Statements of Cash Flows as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Flows Provided by Operating Activities	123.446	262.019	(138.574)	(52,89)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Flows Used for Investing Activities	(12.878)	(107.308)	94.429	(88,00)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows Used for Financing Activities	(297.217)	35.120	(332.338)	(946,28)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) Cash and Cash Equivalents	(186.649)	189.832	(376.481)	(198,32)
Dampak Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun Effect of Foreign Exchange on Cash and Cash Equivalent at End of Year	821	508	313	61,68
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun Beginning Balance of Cash and Cash Equivalents	597.554	407.215	190.340	46,74
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun Ending Balance of Cash and Cash Equivalents	411.726	597.554	(185.828)	(31,10)

Pada akhir tahun 2025, saldo Kas dan Setara Kas konsolidasian Perseroan tercatat sebesar Rp411,73 miliar, turun Rp185,83 miliar atau 31,10% dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2024 yang sebesar Rp597,55 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh arus kas keluar dari aktivitas pendanaan serta menurunnya arus kas dari aktivitas operasi, meskipun Perseroan mencatat penggunaan kas yang lebih rendah pada aktivitas investasi selama tahun berjalan.

At the end of 2025, the Company's consolidated Cash and Cash Equivalents balance was recorded at Rp411.73 billion, decreasing by Rp185.83 billion, or 31.10%, compared to the position at the end of 2024 of Rp597.55 billion. This decrease was mainly driven by cash outflows from financing activities and lower cash flows from operating activities, despite the Company recording lower cash usage in investing activities during the year.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Cash Flows from Operating Activities

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2024-2025
Cash Flows from Operating Activities as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Received from Customers	4.176.031	5.487.872	(1.311.841)	(23,90)
Pembayaran Kepada Pemasok Payment to Suppliers	(3.784.911)	(4.924.130)	1.139.218	(23,14)
Pembayaran Kas Kepada Direksi dan Karyawan Cash Payment for Director and Employee	(266.269)	(272.394)	6.125	(2,25)
Pembayaran Pajak-Pajak Penghasilan Final dan Non Final Payment of Final and Non Final of Taxes	(7.144)	(33.413)	26.268	(78,62)
Penerimaan Bunga Interest Received	5.739	4.083	1.656	40,56
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi **Net Cash Flows Provided by Operating Activities**	123.446	262.019	(138.573)	(52,89)

Pada tahun 2025, Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan mencapai Rp123,45 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp138,57 miliar atau 52,89% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp262,02 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya penerimaan kas dari pelanggan yang mencapai Rp4,18 triliun, turun sebesar Rp1,31 triliun atau 23,90% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5,49 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh dinamika permintaan pasar serta penyesuaian kebijakan penjualan Perseroan.

In 2025, the Company's Cash Flow from Operating Activities reached Rp123.45 billion, reflecting a decrease of Rp138.57 billion, or 52.89%, compared to the previous year, which was recorded at Rp262.02 billion. This decline was primarily driven by a reduction in cash receipts from customers, which stood at Rp4.18 trillion, down by Rp1.31 trillion, or 23.90%, from Rp5.49 trillion in 2024. The decrease was influenced by shifts in market demand as well as adjustments to the Company's sales policies.

Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi
Cash Flows for Investing Activities

Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2024-2025
Cash Flows for Investing Activities as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Pembelian Aset Tetap Acquisition of Fixed Assets	(14.353)	(108.838)	94.484	(86,81)
Penjualan Aset Tetap Disposal of Fixed Assets	1.194	1.530	(335)	100,00
Penyertaan Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture	281	0	281	100,00
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi **Net Cash Flows Used for Investing Activities**	**(12.878)**	**(107.308)**	**94.429**	**(88,00)**

Pada tahun 2025, Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan tercatat sebesar Rp12,88 miliar, turun Rp94,43 miliar atau 88,00% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp107,31 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pengeluaran untuk pembelian aset tetap, sejalan dengan penerapan belanja modal yang lebih selektif selama tahun berjalan. Kondisi tersebut mencerminkan upaya Perseroan dalam mengelola investasi secara lebih efisien dan terukur.

In 2025, the Company's Cash Flow used in Investing Activities was recorded at Rp12.88 billion, decreasing by Rp94.43 billion, or 88.00%, compared to the previous year's Rp107.31 billion. This decline was mainly due to reduced spending on the acquisition of fixed assets, in line with the implementation of more selective capital expenditures during the year. This condition reflects the Company's efforts to manage its investments more efficiently and prudently.

Arus Kas Untuk Aktivitas Pendanaan
Cash Flows for Financing Activities

Arus Kas Untuk Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2024-2025
Cash Flows for Financing Activities as of December 31, 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek Pihak Ketiga Proceed from Short Term Bank LoansThird Parties	30.066	0	30.066	100,00
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek Pihak Ketiga Payment of Short Term Bank LoansThird Parties	(20.049)	0	(20.049)	100,00
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek Pihak Berelasi Loans Received from Related Parties	0	19.585	(19.585)	(100,00)
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek Pihak Berelasi Proceed from Short Term Bank Loans Related Parties	0	(120.772)	120.772	(100,00)
Pembayaran Pinjaman pada Pihak Berelasi Loans Payment to Related Parties	(7)	0	(7)	(100,00)
Pembayaran Bunga Interest Paid	(29.959)	(38.429)	8.469	(22,04)
Pembayaran Liabilitas Sewa Payment of Lease Liabilities	(7.132)	(9.613)	2.481	(25,80)
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Panjang Receipt of Long-Term Bank Loans	0	320.000	(320.000)	100,00
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Panjang PPayment of Long Term Bank Loans	(263.583)	(128.746)	(134.837)	104,73
Pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham Payment of Dividend to the Company's Shareholders	(6.537)	(6.885)	349	(5,06)
Pembayaran Dividen kepada Kepentingan Nonpengendali Payment of Dividend to Non-Controlling Interest	(16)	(19)	4	(18,68)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan **Net Cash Provided by (Used in Financing Activities)**	**(297.217)**	**35.120**	**(332.338)**	**(946,28)**

Pada tahun 2025, arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan tercatat sebesar Rp297,22 miliar, berbalik dari tahun 2024 yang mencatat arus kas masuk sebesar Rp35,12 miliar. Perubahan ini terutama disebabkan oleh mengoptimalkan pembayaran pinjaman bank, khususnya pinjaman jangka panjang, serta tidak adanya penerimaan pinjaman baru dalam jumlah signifikan selama tahun berjalan. Kondisi tersebut mencerminkan upaya Perseroan dalam mengelola kewajiban dan memperbaiki struktur permodalan.

In 2025, the Company's cash flow used in financing activities was recorded at Rp297.22 billion, reversing from 2024, which recorded a cash inflow of Rp35.12 billion. This change was mainly due to increased repayments of bank loans, particularly long-term borrowings, as well as the absence of significant new loan proceeds during the year. This condition reflects the Company's efforts to manage its liabilities and improve its capital structure.

Kinerja Perusahaan Anak
Subsidiaries Performance

Perseroan memiliki beberapa entitas anak yang beroperasi dalam berbagai sektor pendukung bisnis, yaitu PT Citra Lautan Teduh (CLT), PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKA KOBE), PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKA Kraton), dan PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG). Berikut adalah penjelasan mengenai aktivitas usaha, deskripsi bisnis, dan kinerja entitas anak Perseroan selama tahun 2025.

The Company has several Subsidiaries engaging in various businesses that support the Company's operations, namely PT Citra Lautan Teduh (CLT), PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKA KOBE), PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKA Kraton) and PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG). The following is a description on the Subsidiaries' business, activities, and performance in 2025.

PT CITRA LAUTAN TEDUH (CLT)

Deskripsi Usaha

Pada tahun 1994, didirikanlah PT Citra Lautan Teduh (CLT) di Batam. Proses akuisisi saham CLT oleh Perseroan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan 90% pada tanggal 12 September 2014, dan meningkat menjadi 99,50% pada tanggal 5 Desember 2014. Sebagai entitas anak Perseroan, CLT berfokus pada kegiatan pabrikasi tiang pancang beton putar pra-tekan, yang juga dikenal sebagai *pre-tensioned centrifugal precast concrete piles*. Produk ini merupakan salah satu jenis material tiang pancang yang sering digunakan dalam konstruksi pondasi alam (*depth foundation*) untuk berbagai jenis bangunan, termasuk gedung, pelabuhan, jembatan, tangki minyak, dan struktur lainnya. Hingga akhir tahun 2025, kepemilikan saham Perseroan atas CLT mencapai 99,5%, sementara 0,5% sisanya dimiliki oleh Koperasi Karyawan Beton Makmur Wijaya.

Business Overview

Established in 1994 in Batam, PT Citra Lautan Teduh (CLT) underwent gradual acquisition by the Company, starting with 90% on September 12, 2014, and reaching 99.50% on December 5, 2014. As one of the Company's subsidiaries, CLT is focused in the field of manufacturing business of pre-tensioned centrifugal precast concrete piles. The product is one of the pile materials used for the construction of natural foundations (depth foundations) which are used for various types of buildings such as buildings, ports, bridges, oil tanks, and other buildings. As of the end of 2025, the Company owns 99.5% of CLT shares, and another 0.5% is owned by the Beton Makmur Wijaya Employee Cooperative.

Aktivitas Usaha

Performa positif CLT di tahun 2025 didukung oleh kebijakan dan langkah strategis sebagai berikut:

- Mencari informasi terkait pasar, menetapkan *pricing strategy* dan pengkinian informasi terkait kapasitas produksi.
- Memastikan fasilitas produksi dan lahan *stockyard*, konsisten terhadap mutu dan K3, dan memastikan ketersediaan material.
- Melakukan pengendalian atas biaya, selektif memilih mitra kerja, dan memitigasi kemungkinan risiko.
- Melakukan percepatan pencairan termin.
- Memanfaatkan fasilitas kredit perbankan.

Business Activities

The positive performance of CLT in 2025 was supported by the following policies and strategic initiatives:

- Observing market information, establishing a pricing strategy, and updating production capacity information.
- Ensuring consistent quality and safety standards for production facilities and stockyard land, and ensuring material availability.
- Implementing cost control, selectively choosing business partners, and mitigating potential risks.
- Accelerating payment term disbursement.
- Utilizing banking loan facilities.

Kinerja PT Citra Lautan Teduh Tahun 2024-2025
Performance of PT Citra Lautan Teduh in 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Aset Assets	445.567	465.650	(20.083)	(4,31)
Liabilitas Liabilities	62.416	91.726	(29.311)	(31,95)
Ekuitas Equity	383.152	373.923	9.228	2,47
Jumlah Laba Komprehensif **Total Comprehensive Income**	**12.332**	**15.371**	**(3.040)**	(19,78)

Pada tahun 2025, total aset CLT tercatat sebesar Rp445,57 miliar, turun sebesar Rp20,08 miliar atau 4,31% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp465,65 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya nilai aset lancar, seiring dengan optimalisasi penggunaan kas dan piutang usaha dalam mendukung aktivitas operasional.

In 2025, the total assets of PT Citra Lautan Teduh was Rp445.57 billion, a decrease of Rp20.08 billion or 4.31% compared to Rp465.65 billion in the previous year. This decline was mainly due to a reduction in current assets, in line with the optimized use of cash and trade receivables to support operational activities.

Total liabilitas pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp62,42 miliar, turun Rp29,31 miliar atau 31,95% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp91,73 miliar. Penurunan ini terutama berasal dari kewajiban jangka pendek, termasuk utang usaha dan pelunasan pinjaman yang telah jatuh tempo.

Total liabilities in 2025 stood at Rp62.42 billion, a decrease of Rp29.31 billion or 31.95% compared to Rp91.73 billion in 2024. The decline was primarily driven by lower short-term obligations, including trade payables and the settlement of matured loans.

Ekuitas perusahaan meningkat menjadi Rp383,15 miliar pada tahun 2025, naik sebesar Rp9,23 miliar atau 2,47% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp373,92 miliar. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan saldo laba akibat perolehan laba bersih tahun berjalan.

Equity increased to Rp383.15 billion in 2025, rising by Rp9.23 billion or 2.47% from the previous year's Rp373.92 billion. This increase was mainly attributed to higher retained earnings as a result of the net income generated during the year.

Laba komprehensif tahun berjalan pada 2025 tercatat sebesar Rp12,33 miliar, turun Rp3,04 miliar atau 19,78% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp15,37 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban operasional dan penyesuaian nilai aset keuangan.

Total comprehensive income for 2025 was recorded at Rp12.33 billion, representing a decline of Rp3.04 billion or 19.78% compared to Rp19.04 billion in previous year. This decline was primarily due to an increase in operating expenses and adjustments to the fair value of financial assets.

PT WIJAYA KARYA KOMPONEN BETON (WIKA KOBE)

Deskripsi Usaha

Pada tahun 2012, Perseroan bersinergi dengan PT Komponindo Betonjaya (KOBE) untuk membentuk PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKA KOBE). WIKA KOBE didirikan sesuai dengan Anggaran Dasar yang berlaku guna mengantisipasi permintaan produk

Business Description

In 2012, the Company synergized with PT Komponindo Betonjaya (KOBE) to establish PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKA KOBE). WIKA KOBE was founded based on its prevailing Articles of Association to meet the demand for

beton dari berbagai proyek yang dibiayai oleh Pemerintah Jepang, termasuk proyek MRT di Jakarta. Hingga akhir tahun 2025, Perseroan menguasai mayoritas saham WIKA KOBE, yaitu sebanyak 51%, sementara 49% sisanya dimiliki oleh PT Komponindo Beton Jaya.

concrete products from various projects financed by the Japanese Government, including the MRT project in Jakarta. As of the end of 2025, the Company owns a majority shares in WIKA KOBE, accounting for 51%, while the remaining 49% is owned by PT Komponindo Beton Jaya.

Aktivitas Usaha

Performa positif WIKA KOBE di tahun 2024 didukung oleh kebijakan dan langkah strategis sebagai berikut:

- Sinergi dengan *Holding Company* untuk perluasan pasar dalam rangka perolehan Omzet Kontrak dan mendongkrak Omzet Penjualan;
- Pengawalan terhadap proyek MRT Fase 2, untuk memastikan diperolehnya kontrak proyek *tunnel segment* dan produk beton lainnya;
- Pengelolaan *cash flow* yang penuh kehati-hatian dan fokus pada pengeluaran yang memberikan nilai tambah;
- Memastikan kapasitas produksi tercapai maksimal;
- Menjaga konsistensi mutu pelaksanaan produksi beton pracetak maupun proyek konstruksi;
- Pemilihan mitra kerja atau sub kontraktor yang andal dan berpengalaman; dan
- Melakukan *strategic partner* dengan *Holding Company* dan/ atau perusahaan lain untuk memperkuat dan memperluas jaringan bisnis.

Business Activities

WIKA KOBE's positive performance in 2024 was supported by the following strategic policies and actions:

- Synergy with the Holding Company to expand market share in order to earn Contract Revenue and boost Sales Revenue;
- Supervision on the MRT Phase 2 project to secure contracts for tunnel segments and other concrete products;
- Prudent cash flow management focusing on expenditures with added values;
- Ensuring maximum production capacity;
- Maintaining consistent quality in the execution of precast concrete production and construction projects;
- Selecting reliable and experienced business partners or subcontractors; and
- Strategic partnerships with the Holding Company and/or other companies to strengthen and expand the business network.

Kinerja PT Wijaya Karya Komponen Beton Tahun 2024-2025
Performance of PT Wijaya Karya Komponen Beton in 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Aset Assets	174.817	211.085	(36.268)	(17,18)
Liabilitas Liabilities	61.938	101.966	(40.028)	(39,26)
Ekuitas Equity	112.879	109.118	3.761	3,45
Jumlah Laba Komprehensif **Total Comprehensive Income**	**3.761**	**6.600**	**(2.840)**	**(43,02)**

Kinerja PT Wijaya Karya Komponen Beton Tahun 2024- 2025

Pada tahun 2025, WIKA KOBE mencatatkan total aset sebesar Rp174,82 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp36,27 miliar atau 17,18% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp211,09 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan sebagian piutang usaha selama tahun berjalan serta menurunnya aktivitas penjualan seiring berakhirnya kontrak proyek Tunnel Segment MRT.

In 2025, WIKA KOBE recorded total assets of Rp174.82 billion, representing a decrease of Rp36.27 billion, or 17.18%, compared to Rp211.09 billion in the previous year. This decline was mainly attributable to the partial collection of trade receivables during the year, as well as reduced sales activities following the completion of the MRT Tunnel Segment project.

Liabilitas juga mengalami penurunan sebesar Rp40,03 miliar atau 39,26% menjadi Rp61,94 miliar dari Rp101,97 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya kewajiban seiring penyelesaian proyek Tunnel Segment MRT, termasuk pengakuan dan penyelesaian biaya akrual terkait proyek tersebut.

Liabilities also decreased by Rp40.03 billion, or 39.26%, to Rp61.94 billion from Rp101.97 billion in 2024. The decrease was primarily driven by the reduction in obligations following the completion of the MRT Tunnel Segment project, including the recognition and settlement of related accrued expenses.

Di sisi lain, ekuitas perusahaan meningkat sebesar Rp3,76 miliar atau 3,45% menjadi Rp112,88 miliar dari Rp109,12 miliar pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya saldo laba yang dihasilkan dari kinerja keuangan Perseroan.

On the other hand, equity increased by Rp3.76 billion, or 3.45%, reaching Rp112.88 billion from Rp109.12 billion in the prior year. This increase reflects higher retained earnings generated from the Company's financial performance

Sementara itu, laba komprehensif tahun berjalan tercatat sebesar Rp3,76 miliar, menurun Rp2,84 miliar atau 43,02% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp6,60 miliar, sejalan dengan penurunan aktivitas operasional selama tahun berjalan.

Meanwhile, total comprehensive income for the year was recorded at Rp3.76 billion, decreasing by Rp2.84 billion, or 43.02%, compared to Rp6.60 billion in 2024, in line with the decline in operational activities during the year.

PT WIJAYA KARYA KRAKATAU BETON (WIKA Kraton)

Deskripsi Usaha

Pada tahun 2013, WIKA Beton, PT Krakatau Engineering (bagian dari Krakatau Steel Group) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk bekerjasama mendirikan joint venture yang melahirkan PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKA Kraton). Pada tanggal 12 April 2021, PT Krakatau Wajatama membeli saham PT Krakatau Engineering di WIKA Kraton sebesar 30%, selanjutnya pada tanggal 1 September 2021 PT Krakatau Wajatama secara resmi mengubah nama perusahaannya menjadi PT Krakatau Baja Konstruksi.

Business Description

In 2013, WIKA Beton, PT Krakatau Engineering (an entity of Krakatau Steel Group), and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk collaborated to establish a joint venture, PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKA Kraton). On April 12, 2021, PT Krakatau Wajatama acquired 30% of PT Krakatau Engineering's shares in WIKA Kraton, subsequently renaming itself to PT Krakatau Baja Konstruksi on September 1, 2021.

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan menguasai 60,00% saham WIKA Kraton, sementara PT Krakatau Baja Konstruksi memiliki 30,00% kepemilikan saham, dan WIKA memiliki 10,00%.

As of the end of 2025, the Company owns 60.00% of WIKA Kraton shares, while PT Krakatau Baja Konstruksi owns 30.00% of the shares, and WIKA owns 10.00%.

Aktivitas Usaha

Performa positif WIKA Kraton di tahun 2025 didukung oleh kebijakan dan langkah strategis sebagai berikut:

- WIKA Kraton berfokus pada trading atau penjualan produk dengan pencapaian laba yang tinggi;
- WIKA Kraton selektif memilih proyek dengan risiko yang rendah untuk menjaga keseimbangan *cash flow* Perusahaan; dan
- WIKA Kraton menggalakkan program *cost reduction* di berbagai lini bisnis Perusahaan.

Business Activities

The positive performance of WIKA Kraton in 2025 was supported by the following policies and strategic initiatives:

- WIKA Kraton focuses on trading or selling products with high profit margins;
- WIKA Kraton selectively chooses low risk projects to maintain the Company's cash flow balance; and
- WIKA Kraton promotes cost reduction programs across the Company's business lines.

Kinerja PT Wijaya Karya Krakatau Beton Tahun 2024-2025
Performance of PT Wijaya Karya Krakatau Beton in 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Aset Assets	127.083	145.061	(17.978)	(12,39)
Liabilitas Liabilities	88.083	94.129	(6.046)	(6,42)
Ekuitas Equity	39.000	50.932	(11.932)	(23,43)
Jumlah Laba Komprehensif **Total Comprehensive Income**	**(11.932)**	**1.681**	**(13.613)**	(809,77)

Pada tahun 2025, PT WIKA KRATON mencatat total aset sebesar Rp127,08 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp17,98 miliar atau 12,39% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp145,06 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya aktivitas penjualan yang berdampak pada berkurangnya persediaan, piutang pajak, dan biaya dibayar di muka.

In 2025, PT WIKA KRATON recorded total assets of Rp127.08 billion, representing a decrease of Rp17.98 billion, or 12.39%, compared to Rp145.06 billion in the previous year. This decline was primarily driven by reduced sales activities, which led to lower inventories, tax receivables, and prepaid expenses.

Liabilitas PT WIKA KRATON juga menurun sebesar Rp6,05 miliar atau 6,42% menjadi Rp88,08 miliar dari Rp94,13 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya aktivitas usaha yang berdampak pada penurunan utang usaha kepada pihak ketiga.

Liabilities also decreased by Rp6.05 billion, or 6.42%, to Rp88.08 billion from Rp94.13 billion in 2024. The decrease was in line with reduced business activities, which resulted in lower trade payables to third parties.

Di sisi lain, ekuitas perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp11,93 miliar atau 23,43% menjadi Rp39,00 miliar dari Rp50,93 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya kinerja operasional, terutama akibat turunnya penjualan ready mix seiring selesainya kontrak Proyek Jalan Tol Serang–Panimbang, serta berkurangnya kas yang dialokasikan untuk aktivitas trading.

Meanwhile, the Company's equity declined by Rp11.93 billion, or 23.43%, to Rp39.00 billion from Rp50.93 billion in the prior year. This decrease was attributable to weaker operational performance, particularly due to a significant decline in ready-mix sales following the completion of the Serang–Panimbang Toll Road Project, as well as reduced cash allocated for trading activities.

Laba komprehensif tahun berjalan mengalami perubahan dari laba sebesar Rp1,68 miliar pada tahun 2024 menjadi rugi komprehensif sebesar Rp11,93 miliar pada tahun 2025. Perubahan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan akibat selesainya proyek Jalan Tol Serang–Panimbang serta berkurangnya kontribusi dari aktivitas trading.

Total comprehensive income for the year shifted from a profit of Rp1.68 billion in 2024 to a comprehensive loss of Rp11.93 billion in 2025. This change was mainly driven by lower sales following the completion of the Serang–Panimbang Toll Road Project, along with reduced contribution from trading activities.

PT WIJAYA KARYA PRACETAK GEDUNG (WPG)

Deskripsi Usaha

Pada tahun 2016, Perseroan menjalin kerja sama dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) untuk mendirikan PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG) yang berfokus pada industri, perdagangan, dan jasa pemasangan beton pracetak gedung, komponen atau material gedung, perumahan, bangunan industri, dan pergudangan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta melakukan investasi.

Pada tahun 2022, Perseroan mengakuisisi saham WEGE sebesar 2% di WPG dengan nilai pembelian sebesar Rp270 per saham dan jumlah saham sebanyak 10 juta saham, senilai total Rp2,7 miliar. Hingga akhir tahun 2025, Perseroan memiliki 51,00% saham WPG, sedangkan WEGE memegang sisanya sebanyak 49,00%.

Business Description

In 2016, the Company entered into a strategic partnership with PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) in the establishment of PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG) which specializes in the industry, trade, and provision of precast concrete installation services for buildings, components or materials for buildings, residential, industrial buildings, and warehousing, both domestically and internationally, as well as engaging in investments.

In 2022, the Company acquired a 2% stake in WPG from WEGE at a purchase price of Rp270 per share, totaling 10 million shares, with a transaction value of Rp2.7 billion. As of the end of 2025, the Company holds a 51.00% stake in WPG, while WEGE retains the remaining 49.00%.

Aktivitas Usaha

Performa WPG di tahun 2025 didukung oleh kebijakan dan langkah strategis sebagai berikut:

- Melaksanakan *project selection* dan *project execution.*
- Menargetkan berbagai proyek *precast building* dan *precast industrial.*
- Menargetkan berbagai proyek *design build*, gedung perbankan, gedung pendidikan, dan gedung kesehatan.
- Menerapkan sistem sentralisasi komersial dan keuangan.
- Menyelesaikan piutang proyek, menjaga *cash flow* dalam kondisi sehat, dan memperkuat modal kerja yang diperoleh dari perbankan.

Business Activities

The performance of WPG in 2025 was supported by the following policies and strategic initiatives:

- Executing project selection and project execution.
- Targeting various precast building and precast industrial projects.
- Targeting various design-build projects, banking facilities, educational buildings, and healthcare facilities.
- Implementing a centralized commercial and financial system.
- Managing project receivables, maintaining healthy cash flows, and strengthening working capital from banking institutions.

Kinerja PT Wijaya Karya Pracetak Gedung Tahun 2024-2025
Performance of PT Wijaya Karya Pracetak Gedung in 2024-2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	%
Aset Assets	248.196	339.984	(91.788)	(27,00)
Liabilitas Liabilities	278.383	302.754	(24.372)	(8,05)
Ekuitas Equity	(30.186)	37.230	(67.416)	(181,08)
Jumlah Laba Komprehensif **Total Comprehensive Income**	**(67.416)**	**(9.764)**	**(57.652)**	590,45

Pada tahun 2025, total aset WPG tercatat sebesar Rp248,20 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp91,79 miliar atau 27,00% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp339,98 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyusutan nilai aset tetap serta menurunnya piutang usaha seiring dengan penyelesaian proyek-proyek yang sedang berjalan.

In 2025, WPG recorded total assets of Rp248.20 billion, representing a decrease of Rp91.79 billion, or 27.00%, compared to Rp339.98 billion in the previous year. This decline was primarily driven by the depreciation of fixed assets and a reduction in trade receivables in line with the completion of ongoing projects.

Liabilitas WPG mengalami penurunan sebesar Rp24,37 miliar atau 8,05% menjadi Rp278,38 miliar dari Rp302,75 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh pengakuan dan penyelesaian sebagian biaya akrual atas proyek-proyek yang telah selesai pada tahun 2025.

WPG's liabilities decreased by Rp24.37 billion, or 8.05%, to Rp278.38 billion from Rp302.75 billion in 2024. The decrease was mainly attributable to the recognition and settlement of a portion of accrued expenses related to completed projects during the year.

Ekuitas perusahaan tercatat mengalami defisit sebesar Rp30,19 miliar, menurun sebesar Rp67,42 miliar atau 181,08% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp37,23 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh akumulasi rugi tahun berjalan sebagai dampak dari melemahnya pasar infrastruktur pada tahun 2025, yang berimbas pada penurunan pendapatan WPG secara signifikan.

The Company recorded an equity deficit of Rp30.19 billion, declining by Rp67.42 billion, or 181.08%, from Rp37.23 billion in the previous year. This decline was caused by the accumulation of current-year losses, driven by the weakening infrastructure market in 2025, which significantly impacted WPG's revenue.

Pada tahun 2025, WPG masih mencatatkan rugi dengan rugi komprehensif sebesar Rp67,42 miliar, meningkat sebesar Rp57,65 miliar atau 590,45% dibandingkan rugi sebesar Rp9,76 miliar pada tahun 2024. Peningkatan kerugian ini sejalan dengan penurunan kinerja operasional akibat melemahnya pasar infrastruktur selama tahun berjalan.

In 2025, WPG continued to incur losses, with a comprehensive loss of Rp67.42 billion, widening by Rp57.65 billion, or 590.45%, compared to a loss of Rp9.76 billion in 2024. The increase in losses was in line with weaker operational performance amid the downturn in the infrastructure market during the year.

Kemampuan Membayar Utang
Solvency

Untuk memastikan struktur *cash flow* yang sehat, Perseroan perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai kemampuan pembayaran utangnya. Evaluasi dilakukan melalui Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas. Dengan menggunakan Rasio Likuiditas, Perseroan dapat menilai kemampuannya dalam menyelesaikan utang jangka pendek. Sementara itu, Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana Perseroan mampu melunasi seluruh utangnya dengan aset atau modal yang dimilikinya.

To ensure a healthy cash flow structure, the Company needs to have a good understanding of its debt repayment capabilities. This evaluation is carried out using Liquidity Ratios and Solvency Ratios. By using Liquidity Ratios, the Company can assess its ability to settle short-term debts. Meanwhile, Solvency Ratios are used to determine the extent to which the Company is able to repay all of its debts with its assets or capital.

Manajemen risiko likuiditas oleh Perseroan dilakukan dengan memonitor waktu jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan, menjaga saldo kas dan surat berharga yang memadai, dan memastikan kesiapan untuk mempertahankan nilai kompetitif. Selain itu, Perseroan berusaha untuk membayar utang tepat waktu dengan mencari berbagai fasilitas pembiayaan yang dapat diandalkan dari pemberi pinjaman. Tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan seperti utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang lainnya, dan pinjaman bank jangka pendek adalah kurang dari satu tahun.

The Company manages liquidity risk by monitoring loan maturities and funding sources, maintaining adequate cash and marketable securities balances, and ensuring readiness to maintain competitive value. In addition, the Company aims to repay its debts on time by seeking various reliable financing facilities from lenders. The contractual maturity dates for financial liabilities such as trade payables, accrued expenses, other payables, and short-term bank loans are less than one year.

Pada tahun 2025, kemampuan Perseroan dalam membayar utang jangka pendek dan jangka panjang dijelaskan dalam tabel berikut:

In 2025, the Company's ability to meet short-term and long-term obligations is presented in the following table:

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek
Short-Term Debt Solvability

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek Tahun 2024-2025
Short-Term Debt Solvability in 2024-2025

Uraian Description	Unit	2025	2024
Rasio Kas Cash Ratio	%	16,95	19,64
Rasio Cepat Quick Ratio	%	102,26	105,34
Rasio Lancar Current Ratio	%	130,42	129,18

Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas Perseroan tercatat sebesar 16,95%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 19,64%. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya kas dan setara kas.

Cash Ratio

The Company's cash ratio was recorded at 16.95%, decreasing from 19.64% in 2024. This decline was driven by a reduction in cash and cash equivalents.

Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio Cepat Perseroan mengalami penurunan menjadi 102,26% pada tahun 2025 dari 105,34% pada tahun sebelumnya. Mencerminkan adanya sedikit penurunan aset likuid selain persediaan, seperti piutang usaha yang dapat segera digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

Quick Ratio

The Company's quick ratio decreased to 102.26% in 2025 from 105.34% in the previous year, reflecting a slight decline in liquid assets excluding inventories, such as trade receivables that can be readily used to meet short-term obligations.

Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar Perseroan tercatat sebesar 130,42%, naik dari 129,18% pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan aset lancar, termasuk kas dan piutang, yang lebih besar dibandingkan peningkatan liabilitas jangka pendek, sehingga memperkuat struktur likuiditas Perseroan.

Kenaikan rasio-rasio ini menunjukkan peningkatan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengganggu arus kas operasional, yang selaras dengan prinsip pengelolaan risiko keuangan dalam ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

Current Ratio

The Company's current ratio stood at 130.42%, increasing from 129.18% in 2024. This improvement was primarily attributable to the growth in current assets, including cash and receivables, which outpaced the increase in short-term liabilities, thereby strengthening the Company's liquidity position.

The improvement in these liquidity ratios demonstrates the Company's enhanced ability to meet short-term obligations without disrupting operating cash flows, in line with financial risk management principles under the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang
Long-Term Debt Solvability

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang Tahun 2024-2025
Long-Term Debt Solvability in 2024-2025

Uraian Description	Unit	2025	2024
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) Debt to Equity Ratio (DER)	%	70,66	95,15
Rasio Liabilitas terhadap Aset (DAR) Debt to Assets Ratio (DAR)	%	41,40	48,76

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas

Pada tahun 2025, Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) Perseroan tercatat sebesar 70,66%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 95,15%. Penurunan ini mencerminkan strategi Perseroan dalam mengelola struktur pendanaan dengan lebih optimal, termasuk pengurangan liabilitas berbunga dan peningkatan ekuitas melalui laba ditahan.

Debt-to-Equity Ratio (DER)

In 2025, the Company's Debt to Equity Ratio (DER) was recorded at 70.66%, decreasing from 95.15% in 2024. This decline reflects the Company's strategy to optimize its financing structure, including the reduction of interest-bearing liabilities and the strengthening of equity through retained earnings.

Rasio Liabilitas terhadap Aset

Pada tahun 2025, Rasio Liabilitas terhadap Aset (DAR) Perseroan tercatat sebesar 41,40%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 48,76%. Penurunan ini mencerminkan strategi Perseroan dalam memperkuat struktur keuangan dengan mengurangi ketergantungan terhadap liabilitas dan meningkatkan porsi aset yang dibiayai oleh ekuitas.

Debt-to-Assets Ratio (DAR)

In 2025, the Company's Debt to Assets Ratio (DAR) was recorded at 41.40%, decreasing from 48.76% in 2024. This decline reflects the Company's efforts to strengthen its financial structure by reducing reliance on liabilities and increasing the proportion of assets financed by equity.

Dampak dan Prospek Pengelolaan Solvabilitas

Peningkatan likuiditas dan penurunan rasio utang mencerminkan komitmen Perseroan dalam mengelola keuangan secara efisien dan menjaga struktur modal yang sehat. Dampak dari strategi ini mencakup:

- **Meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor**
  Dengan posisi keuangan yang lebih kuat dan risiko utang yang lebih terkendali.
- **Memperkuat fleksibilitas keuangan**
  Hal ini memungkinkan Perseroan untuk berinvestasi dalam proyek ekspansi tanpa tekanan keuangan yang berlebihan.
- **Menjaga akses terhadap pendanaan dengan biaya yang lebih kompetitif**
  Seiring dengan penurunan rasio utang yang lebih rendah dibandingkan standar industri.

Sebagai langkah ke depan, Perseroan akan terus mengoptimalkan pengelolaan kas dan arus keuangan, serta mempertimbangkan strategi pembiayaan alternatif guna memastikan stabilitas jangka panjang, sesuai dengan praktik terbaik dalam ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

Hubungan dengan Kreditur

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik, Perseroan menjalin hubungan dengan kreditur berdasarkan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan tanggung jawab. Komitmen ini tercermin dalam penerapan kode etik berikut.

1. Mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif, dan adil dalam pemilihan sumber pendanaan dari pinjaman.
2. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif kepada kreditur.
3. Memilih kreditur yang memiliki kredibilitas yang baik.
4. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur.
5. Memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian antara Perusahaan dengan kreditur.

Impact and Prospects of Solvency Management

The increase in liquidity and decrease in debt ratios reflect the Company's commitment to efficient financial management and maintaining a healthy capital structure. The impact of this strategy includes:

- **Enhancing investor and creditor confidence**
  A stronger financial position and better-controlled debt risks contribute to greater trust from stakeholders.
- **Strengthening financial flexibility**
  This enables the Company to invest in expansion projects without excessive financial pressure.
- **Maintaining access to financing at more competitive costs**
  As debt ratios decline to levels lower than the industry standard, the Company secures more favorable funding opportunities.

Going forward, the Company will continue to optimize cash and financial flow management while exploring alternative financing strategies to ensure long-term stability, in line with best practices under the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Relationship with Creditors

As part of its commitment to good corporate governance, the Company maintains relationships with creditors based on the principles of prudence, transparency, and accountability. This commitment is reflected in the implementation of the following code of ethics.

1. Prioritize the principles of prudence, selectiveness, competitiveness and fairness in selecting funding sources for loans.
2. Providing actual and prospective information to creditors.
3. Select a creditor who has good credibility.
4. Provide transparent information about the use of funds to increase creditor confidence.
5. Fulfill rights and obligations in accordance with the agreement between the Company and creditors.

Tingkat Kolektibilitas Piutang
Receivables Collectibility Rate

Kolektibilitas Piutang Tahun 2024-2025
Receivables Collectibility in 2024-2025

Rasio Solvabilitas Solvability Ratio	Unit	2025	2024
Rata-rata Pengumpulan Piutang (*Collection Period*) Average Collection Period	Hari Day	77,79	68,49

Rata-rata periode penagihan piutang (collection period) Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar 77,79 hari, lebih lama 9,30 hari atau meningkat 13,58% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 68,49 hari. Peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan dalam pola penagihan serta dinamika pembayaran dari pelanggan.

The Company's average collection period in 2025 was recorded at 77.79 days, 9.30 days longer or an increase of 13.58% compared to 68.49 days in 2024. This increase reflects changes in collection patterns as well as the dynamics of customer payment behavior.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kolektibilitas piutang Perseroan pada tahun 2025 mengalami penyesuaian, yang mengindikasikan adanya peningkatan periode penagihan seiring dengan strategi ekspansi penjualan dan penyesuaian kebijakan kredit kepada pelanggan strategis.

This indicates that the Company's receivables collectibility level in 2025 experienced an adjustment, reflecting an extended collection period in line with the Company's sales expansion strategy and adjustments to its credit policies for strategic customers.

Rincian analisis umur piutang usaha dihitung sejak tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The details of the receivables aging analysis, calculated from the due date, are as follows:

Analisis Umur Piutang Tahun 2024-2025
Analysis of Receivables Maturity in 2024-2025

Analisis Umur Piutang Analysis of Receivables Maturity	2025	%	2024	%
Belum Jatuh Tempo Not yet Due	298.605	33,07	264.315	25,04
> 0-3 bulan > 0-3 months	205.115	22,71	341.174	32,32
> 3-6 bulan > 3-6 months	74.710	8,27	57.029	5,40
> 6-9 bulan > 6-9 months	58.441	6,47	102.396	9,70
> 9-12 bulan > 9-12 months	40.764	4,51	59.329	5,62
Di di atas 12 bulan above 12 months	225.432	24,96	231.483	21,93
Jumlah Total	903.066	100,00	1.055.726	100,00
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(126.404)		(137.041)	
Neto Net	776.662		918.685	

Pada tahun 2025, sebesar 33,07% atau Rp298,61 miliar dari total Piutang Usaha Perseroan masih Belum Jatuh Tempo, meningkat dari 25,04% atau Rp264,32 miliar pada tahun 2024.

In 2025, 33.07% or Rp298.61 billion of the Company's total trade receivables were not yet due, increasing from 25.04% or Rp264.32 billion in 2024.

Sementara itu, piutang dengan umur 0–3 bulan mengalami penurunan menjadi 22,71% atau Rp205,12 miliar, dibandingkan 32,32% atau Rp341,17 miliar pada tahun sebelumnya.

Meanwhile, receivables aged 0–3 months decreased to 22.71% or Rp205.12 billion, compared to 32.32% or Rp341.17 billion in the previous year.

Meskipun terdapat peningkatan pada piutang berumur di atas 6 bulan, termasuk segmen 6–9 bulan dan di atas 12 bulan, mayoritas piutang usaha Perseroan masih tergolong lancar. Hal ini mencerminkan kondisi perputaran modal kerja yang masih terjaga dengan baik.

Although there was an increase in receivables aged over 6 months, including the 6–9 months and over 12 months segments, the majority of the Company's receivables are still classified as current. This indicates that working capital turnover remains well-managed.

Secara keseluruhan, tingkat kolektibilitas piutang Perseroan tetap berada dalam kategori sehat, seiring dengan upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan strategi penagihan, memitigasi risiko kredit, serta memastikan kelancaran siklus kas operasional.

Overall, the collectibility level of the Company's receivables remains in a healthy category, supported by continuous efforts to optimize collection strategies, mitigate credit risk, and ensure smooth operational cash flow cycles.



Rasio Keuangan Lainnya
Other Financial Ratios

Rasio Keuangan Lainnya Tahun 2024-2025
Other Financial Ratios in 2024-2025

Analisis Umur Piutang Analysis of Receivables Maturity	Unit	2025	2024
Rasio Aktivitas **Activity Ratio**			
Periode Pengumpulan Collecting Period	Hari days	77,97	68,49
Perputaran Persediaan Inventory Turnover	Hari days	73,95	54,07
Perputaran Aset Lancar Current Assets Turnover	x (kali) x (times)	1,01	1,18
Perputaran Total Aset Total Assets Turnover	x (kali) x (times)	0,53	0,66
Perputaran Modal Kerja Working Capital Turnover	x (kali) x (times)	4,85	5,51
Rasio leverage **Leverage Ratio**			
Rasio Total Utang terhadap Aset Total Debt to Assets Ratio	%	41,40	48,76
Rasio Rentabilitas **Rentability Ratio**			
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	%	7,16	7,63
Margin EBITDA EBITDA Margin	%	6,69	7,07
Rasio Produksi Production Ratio	%	97,03	95,64
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	%	0,11	1,31
Rasio Pengembalian atas Investasi (ROI) Return on Investment (ROI)	%	0,55	3,52
Rasio Pengembalian atas Ekuitas (ROE) Return on Equity (ROE	%	0,11	1,79
Rasio Pengembalian atas Aset (ROA) Return on Assets (ROA)	%	0,07	0,89

Dari tabel di atas, kinerja keuangan Perseroan menunjukkan perbaikan di berbagai aspek utama, terutama dari sisi efisiensi operasional, struktur keuangan, serta profitabilitas.

1. **Efisiensi Operasional dan Aktivitas Perusahaan**
   - Periode Pengumpulan Piutang meningkat menjadi 77,79 hari dari 68,49 hari.
   - Perputaran persediaan menjadi 73,95 hari dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 54,07 hari. Peningkatan jumlah hari ini mencerminkan adanya penyesuaian dalam pengelolaan persediaan, di mana perusahaan menjaga ketersediaan stok pada tingkat yang lebih memadai untuk mendukung kelancaran operasional.

Based on the table above, the Company's financial performance improved across several key areas, particularly in operational efficiency, financial structure, and profitability.

1. **Operational Efficiency and Business Activities**
   - The Collection Period increased to 77.79 days from 68.49 days.
   - Inventory turnover increased to 73.95 days from 54.07 days in the previous year. The increase in the number of days reflects adjustments in inventory management, where the Company maintains a higher level of stock availability to support smooth operational activities.

- Perputaran Total Aset turun menjadi 0,53 kali dari 0,68 kali.

2. Struktur Keuangan dan Kemampuan Membayar Kewajiban

- Rasio Total Utang terhadap Aset turun menjadi 41,40% dari 48,76%, menunjukkan penurunan ketergantungan terhadap utang dan struktur keuangan yang lebih sehat.

3. Profitabilitas dan Pengembalian Investasi

- Margin Laba Bersih turun menjadi 0,11% dari 1,31%.
- Return on Equity (ROE) turun menjadi 0,11% dari 1,79%.
- Return on Assets (ROA) juga turun menjadi 0,07% dibandingkan 0,89% di tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Perseroan tetap menunjukkan fundamental yang solid di tengah dinamika yang memengaruhi beberapa rasio keuangan. Penurunan rasio tersebut merupakan bagian dari strategi ekspansi dan optimalisasi struktur permodalan yang dilakukan Perseroan untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang.

- Total Assets Turnover decreased to 0.53 times from 0.68 times.

2. Financial Structure and Debt Servicing Ability

- The Total Debt to Assets Ratio decreased to 41.40% from 48.76%, indicating reduced reliance on debt and stronger financial stability.

3. Profitability and Investment Returns

- Net Profit Margin down to 0.11% from 1.31%.
- Return on Equity (ROE) increased to 0.11% from 1.79%.
- Return on Assets (ROA) also decreased to 0.11% from 0.89%.

Overall, the Company's financial performance continues to reflect solid fundamentals amid dynamics affecting several financial ratios. The decline in these ratios forms part of the Company's expansion strategy and capital structure optimization aimed at supporting long-term growth.



Struktur Modal
Capital Structure

Struktur Modal Tahun 2024-2025
Capital Structure in 2024-2025

Uraian Description	2025		2024		Perubahan Change	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Liabilitas Liabilities	2.604.456	41,40	3.507.922	48,76	(903.465)	(25,76)
Ekuitas Equity	3.686.012	58,60	3.686.766	51,24	(754)	(0,02)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	6.290.468	100,00	7.194.687	100,00	(904.219)	(12,57)

Pada tahun 2025, struktur modal Perseroan terdiri dari 41,40% Liabilitas dan 58,60% Ekuitas. Komposisi ini menunjukkan perubahan positif dibandingkan tahun 2024, dimana Liabilitas tercatat sebesar 48,76% dan Ekuitas sebesar 51,24%. Secara nominal, Liabilitas menurun sebesar Rp903,47 miliar atau 25,76%, sementara Ekuitas turun sebesar Rp754 juta atau 0,02%.

Perubahan ini mencerminkan strategi pengelolaan permodalan yang lebih terarah pada penguatan ekuitas, di mana Perseroan berhasil mengurangi ketergantungan terhadap utang berbunga dan mengoptimalkan pendanaan internal untuk mendukung operasional serta ekspansi bisnis jangka panjang.

In 2025, the Company's capital structure consisted of 41.40% Liabilities and 58.60% Equity. This composition reflects a positive shift compared to 2024, where Liabilities accounted for 48.76% and Equity for 51.24%. In nominal terms, Liabilities decreased by Rp903.47 billion or 25.76%, while Equity decreased by Rp754 million or 0.02%.

This shift reflects a capital management strategy aimed at strengthening equity by reducing dependence on interest-bearing debt and optimizing internal funding to support business operations and long-term expansion.

Kebijakan Manajemen dan Dasar Penentuan Kebijakan Atas Struktur Modal

Perseroan mengelola struktur modal dengan tujuan untuk menjaga rasio permodalan yang sehat, mendukung keberlanjutan usaha, dan memaksimalkan imbal hasil bagi pemegang saham. Untuk menjaga fleksibilitas keuangan, Perseroan menerapkan strategi seperti penyesuaian dividen berdasarkan kinerja keuangan, penerbitan saham baru untuk memperkuat ekuitas, serta mengakses pendanaan melalui pinjaman dengan tetap menjaga struktur modal yang optimal.

Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Direksi secara berkala setidaknya satu kali dalam setahun melakukan peninjauan terhadap struktur modal dan utang Perseroan. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur permodalan yang diterapkan selaras dengan tujuan strategis jangka panjang serta tingkat toleransi risiko (*risk appetite*) yang telah ditetapkan.

Management Policy and Basis for Determining Capital Structure Policy

The Company manages its capital structure with the objective of maintaining a healthy capital ratio, supporting business sustainability, and maximizing returns for shareholders. To maintain financial flexibility, the Company implements strategies such as adjusting dividend payments based on financial performance, issuing new shares to strengthen equity, and accessing funding through loans while maintaining an optimal capital structure.

As part of good corporate governance, the Board of Directors conducts regular—at least annual—reviews of the Company's capital and debt structure. This review ensures alignment with long-term strategic objectives and the Company's defined risk appetite.

Hasil peninjauan tahunan oleh Dewan Direksi dilaporkan dan didokumentasikan dalam risalah rapat, serta diselaraskan dengan evaluasi risiko tahunan yang disusun oleh Komite Audit. Hasil ini menjadi dasar dalam penyesuaian strategi pendanaan, investasi, dan manajemen risiko di tahun berjalan.

The results of the Board's annual review are reported and documented in meeting minutes and aligned with the annual risk evaluation conducted by the Audit Committee. These serve as a basis for financial strategy, investment decisions, and risk management in the current year.

Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan juga telah mengalokasikan dana cadangan sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi eksternal.

In accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company has also allocated a mandatory reserve fund of 20% of its issued and fully paid capital as part of compliance with external regulatory requirements.

Implementasi Struktur Modal di Tahun 2025

Pada tahun 2025, struktur modal Perseroan tetap didominasi oleh ekuitas, dengan rasio utang terhadap ekuitas (*V*DER) yang terjaga di bawah batas perbankan, yaitu di bawah 3 kali. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi Perseroan dalam mengakses pembiayaan tanpa membebani struktur keuangan.

Implementation of Capital Structure in 2025

In 2025, the Company maintained a capital structure dominated by equity while keeping the Debt-to-Equity Ratio (DER) well below the banking threshold of 3 times. This approach ensures flexibility in accessing funding while maintaining financial stability.

Salah satu langkah strategis di tahun 2025 adalah pengurangan pinjaman jangka pendek serta peningkatan pinjaman jangka panjang dengan penurunan masing-masing sebesar 20,15% dan 62,35%. Perubahan ini merupakan bagian dari strategi pembiayaan yang bersumber dari modal sendiri dan restrukturisasi utang.

One of the strategic initiatives in 2025 was the reduction of short-term borrowings and long-term borrowings, which decreased by 20.15% and 62.35%, respectively. This change forms part of the Company's financing strategy, supported by internal funding and debt restructuring efforts.

Sebagai akibatnya, Gearing Ratio turun dari 13,16% pada tahun 2024 menjadi 3,98% pada tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan efisiensi dalam manajemen struktur utang.

As a result, the Gearing Ratio decreased from 13.16% in 2024 to 3.98% in 2025. This decline reflects improved efficiency in the management of the Company's debt structure.

Dengan demikian, strategi permodalan tahun 2025 menunjukkan komitmen Perseroan terhadap stabilitas keuangan, efisiensi utang, dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang sehat sesuai dengan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

This capital structure strategy demonstrates the Company's commitment to financial stability, efficient debt management, and adherence to good corporate governance practices, in line with the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Growth	
			Nominal	%
Pinjaman Jangka Pendek Short-Term Loans	10.017	0	10.017	100,00
Pinjaman Jangka Panjang Long-Term Loans	202.671	472.820	(270.149)	(57,14)
Jumlah **Total**	**212.688**	**472.820**	**(260.132)**	**(55,02)**
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Total Equity Attributable to Owner of the Parent Entity	3.627.761	3.592.597	35.164	0,98
Gearing Ratio **Total Liabilities and Equity**	**5,86%**	**13,16%**		

Dengan strategi permodalan yang telah diterapkan di tahun 2025, Perseroan menunjukkan komitmen terhadap stabilitas keuangan dan efisiensi dalam pengelolaan utang. Meskipun terdapat peningkatan dalam pinjaman jangka panjang, struktur modal tetap terkendali dengan komposisi ekuitas yang lebih dominan, memastikan bahwa Perseroan memiliki daya tahan finansial yang kuat untuk menghadapi dinamika industri ke depan.

Dengan demikian, strategi ini mencerminkan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang sehat, sesuai dengan regulasi yang berlaku serta praktik terbaik dalam *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

With the capital structure strategy implemented in 2025, the Company demonstrates its commitment to financial stability and debt management efficiency. Despite an increase in long-term loans, the capital structure remains well-managed, with a dominant equity composition, ensuring the Company's strong financial resilience to navigate future industry dynamics.

Thus, this strategy reflects the Company's commitment to sound financial governance, in compliance with applicable regulations and best practices under the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).



Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments For Capital Goods Investment

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak memiliki ikatan material yang berkaitan dengan investasi barang modal. Dengan demikian, tidak terdapat kontrak, perjanjian, atau komitmen jangka panjang yang mengikat Perseroan untuk pengadaan barang modal dalam bentuk apapun selama periode pelaporan ini.

Penjelasan tambahan sebagai berikut:

a. Tujuan Ikatan
Tidak ada ikatan material yang ditandatangani, sehingga tidak terdapat tujuan khusus yang dirancang terkait investasi barang modal pada tahun 2025.

b. Sumber Dana
Karena tidak terdapat ikatan, maka tidak ada sumber pendanaan yang dialokasikan atau direncanakan untuk keperluan investasi barang modal.

c. Mata Uang Denominasi
Tidak terdapat denominasi mata uang asing maupun domestik yang terkait dengan transaksi investasi barang modal pada tahun berjalan.

d. Perlindungan Risiko Valuta Asing
Seiring tidak adanya eksposur terhadap mata uang asing yang berasal dari ikatan investasi barang modal, tidak diperlukan langkah mitigasi risiko terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang.

Throughout 2025, the Company did not enter into any material commitments related to capital goods investments. As such, there were no contracts, agreements, or long-term obligations signed by the Company involving capital expenditures during the reporting period.

Further clarification:

a. Purpose of the Commitment
No material commitments were made; therefore, there was no specific investment objective related to capital goods in 2025.

b. Funding Sources
As there were no commitments, there were no funding sources allocated or planned for capital expenditure purposes.

c. Currency Denomination
There were no transactions denominated in any currency—foreign or local—pertaining to capital goods investments during the year.

d. Foreign Exchange Risk Mitigation
Since the Company had no foreign exchange exposure arising from capital goods commitments, no mitigation measures were required to manage currency risk.

Bahasan Mengenai Investasi Barang Modal yang Direalisasikan dalam Tahun Buku

Discussion on Capital Expenditures Realized in the Fiscal Year

Investasi Barang Modal merupakan salah satu langkah strategis Perseroan untuk mendukung ekspansi usaha dan memperkuat fondasi operasional jangka panjang. Secara umum, investasi ini meliputi pengeluaran dana untuk pengadaan aset atau infrastruktur yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa mendatang.

Jenis Investasi Barang Modal

Pada tahun 2025, sejalan dengan strategi penguatan kapasitas operasional, Perseroan merealisasikan investasi pada berbagai jenis aset, antara lain peralatan produksi, prasarana penunjang, perlengkapan kantor, dan cetakan produksi beton. Selain itu, Perseroan juga melakukan pengembangan pada pabrik yang telah ada, serta peningkatan sistem informasi melalui pengembangan SAP guna mendukung efisiensi dan integrasi proses bisnis.

Tujuan Investasi Barang Modal

Investasi yang direalisasikan pada tahun 2025 ditujukan untuk mendukung berbagai inisiatif strategis Perseroan, antara lain peningkatan kapasitas dan efisiensi operasional, percepatan digitalisasi, serta integrasi sistem informasi untuk memperkuat tata kelola dan proses bisnis. Di samping itu, investasi juga difokuskan pada penguatan infrastruktur penunjang produksi dan pengembangan fasilitas laboratorium internal, guna mendorong peningkatan kualitas serta inovasi produk secara berkelanjutan.

Nilai Investasi Barang Modal

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat realisasi investasi barang modal sebesar Rp8,33 miliar, turun sebesar 94,19% atau Rp135,18 miliar dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp143,51 miliar. Penurunan ini menunjukkan bahwa Perseroan melakukan penyesuaian strategi investasi dengan lebih selektif dan terarah, sejalan dengan prioritas penguatan likuiditas serta optimalisasi pemanfaatan aset yang telah dimiliki.

Capital Goods Investment is one of the Company's strategic initiatives to support business expansion and strengthen its long-term operational foundation. In general, such investment involves the disbursement of funds for the procurement of assets or infrastructure that are expected to generate future economic benefits.

Types of Capital Goods Investment

In 2025, in line with the strategy to enhance operational capacity, the Company realized investments in various asset categories, including production equipment, supporting infrastructure, office equipment, and concrete production molds. The Company also carried out development of existing plants and upgraded its information systems through the enhancement of SAP to improve operational efficiency and business process integration.

Objectives of Capital Goods Investment

The capital investments realized in 2025 were aimed at supporting several of the Company's strategic initiatives, including increasing capacity and operational efficiency, accelerating digitalization, and integrating information systems to strengthen corporate governance and business processes. In addition, the investments focused on reinforcing production support infrastructure and developing internal laboratory facilities to drive continuous improvement in product quality and innovation.

Value of Capital Goods Investment

In 2025, the Company recorded capital expenditure of Rp8.33 billion, decreasing by 94.19% or Rp135.18 billion compared to Rp143.51 billion in 2024. This decline indicates that the Company adjusted its investment strategy to be more selective and focused, in line with its priorities of strengthening liquidity and optimizing the utilization of existing assets.

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Jenis Investasi Barang Modal Types of Capital Goods Investment	Uraian Description	2025	2024	Perubahan Change (%)
Tanah Land	Pematangan Lahan Land Preparation	-	-	-
Tambang Mining	-	-	-	-
Prasarana Facilities	Prasarana Penunjang Pabrik Beton Supporting Facilities for Concrete Plant	3.053	3.986	(23,41)
Bangunan Building	-	-	841	(100,00)
Perlengkapan Kantor Office Equipment	Peralatan Penunjang SI (ERP & SAP) Supporting Equipment for Information System (ERP & SAP)	4.477	7.729	(42,08)
Peralatan Equipment	Peralatan Pabrik Produk Beton untuk optimalisasi kapasitas dan rekondisi serta investasi Divisi Engineering untuk Lab WIKA Beton. Optimizing the capacity of the Concrete Product Plant equipment, refurbishing, and investing in the Engineering Division for WIKA Beton's Laboratory	868	28.546	(96,96)
Cetakan Molds	Cetakan Produksi Beton Concrete Production Molds	418	102.407	(99,59)
Modal Capital	-	-	-	-
Total		**8.816**	**143.509**	**(93,86)**

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Fact Subsequent to Balance Sheet Date

Selama periode sejak akhir tahun 2025 hingga tanggal penerbitan laporan keuangan tahunan per 26 Maret 2026, tidak terdapat peristiwa, informasi, maupun fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan auditor yang dapat mempengaruhi posisi keuangan maupun kinerja Perseroan secara signifikan.

During the period from the end of 2025 up to the issuance date of the annual financial statements on 26 March 2026, there were no material events, information, or facts occurring after the date of the auditor's report that could significantly affect the Company's financial position or performance.

Peningkatan atau Penurunan yang Material dari Penjualan atau Pendapatan

Material Increase or Decrease from Sales or Revenue

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Segmen Operasi Operating Segment	2025	2024	Perubahan Change (%)
Beton Concrete	3.100.577	4.249.965	(27,04)
Quarry	1.793	1.856	(3,38)
Jasa Service	483.492	644.204	(24,95)
Jumlah **Total**	**3.585.862**	**4.896.024**	**(26,76)**

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat total pendapatan Rp3,59 triliun, turun 26,76% dari Rp4,90 triliun di 2024, dipengaruhi oleh penurunan segmen beton, quarry, dan jasa, sebagaimana dijelaskan berikut:

- Segmen Beton turun 27,04% menjadi Rp3,59 triliun, terutama karena berkurangnya permintaan beton putar maupun non putar.
- Segmen Jasa turun 24,95% menjadi Rp483,49 miliar, dipengaruhi oleh berkurangnya proyek layanan konstruksi dan efisiensi operasional.
- Segmen Quarry turun 3,38% menjadi Rp1,79 miliar, akibat perlambatan proyek infrastruktur dan optimalisasi rantai pasok yang mengurangi ketergantungan pada sumber material internal.

Ke depan, Perseroan akan mengembangkan segmen beton dan jasa, serta menerapkan strategi diversifikasi di segmen *Quarry* guna meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya.

In 2025, the Company recorded total revenue of Rp3.59 trillion, declining by 26.76% from Rp4.90 trillion in 2024, primarily affected by decreases in the concrete, quarry, and services segments, as outlined below:

- The Concrete segment declined by 27.04% to Rp3.59 trillion, mainly due to reduced demand for both spun and non-spun concrete.
- The Services segment decreased by 24.95% to Rp483.49 billion, influenced by fewer construction service projects and operational efficiency measures.
- The Quarry segment declined by 3.38% to Rp1.79 billion, driven by a slowdown in infrastructure projects and supply chain optimization, which reduced reliance on internal material sources.

Moving forward, the Company will continue to expand the concrete and services segments while implementing diversification strategies in the quarry segment to enhance operational efficiency and resource utilization.

Dampak Perubahan Harga Terhadap Pendapatan
Impact of Price Change on Revenues

Dalam tahun 2025, kenaikan harga komoditas dan bahan baku akibat kondisi makro ekonomi global telah meningkatkan biaya produksi, termasuk kenaikan harga minyak dan bahan bangunan. Fluktuasi ini menimbulkan tantangan bagi Perseroan, yang perlu dikelola secara efektif agar tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan dan profitabilitas.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Perseroan menerapkan strategi berikut:

1. Efisiensi biaya operasional dan optimasi rantai pasok guna mengendalikan dampak kenaikan harga bahan baku.
2. Meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan impor, sejalan dengan program Pemerintah dalam mendukung Produk Dalam Negeri (PDN).
3. Pemantauan tren harga komoditas secara proaktif untuk menyesuaikan strategi pembelian dan negosiasi harga dengan pemasok.

Dengan strategi ini, Perseroan berupaya mengantisipasi dampak inflasi dan volatilitas ekonomi global terhadap operasionalnya.

In 2025, the increase in commodity and raw material prices due to global macroeconomic conditions has raised production costs, including rising oil and building material prices. These fluctuations pose a challenge for the Company, requiring effective management to prevent significant impacts on revenue and profitability.

To address these challenges, the Company has implemented the following strategies:

1. Operational cost efficiency and supply chain optimization to control the impact of rising raw material prices.
2. Increased use of domestically sourced materials to reduce reliance on imported materials, in line with the Government's program to support Domestic Products (PDN).
3. Proactive monitoring of commodity price trends to adjust purchasing strategies and negotiate better prices with suppliers.

With these strategies, the Company aims to mitigate the effects of inflation and global economic volatility on its operations.

Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing
Material Increase or Decrease from Sales or Revenue

Risiko nilai tukar mata uang asing menjadi salah satu tantangan utama yang perlu diatasi oleh Perseroan. Potensi risiko ini muncul seiring perubahan nilai wajar arus kas di masa depan dari instrumen keuangan yang mengalami fluktuasi karena perubahan nilai tukar mata uang asing. Perseroan menghadapi risiko nilai tukar akibat fluktuasi kurs USD dan EURO, yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi nilai wajar arus kas, laba sebelum pajak, dan kewajiban keuangan Perseroan.

Foreign exchange rate risk is one of the key challenges that the Company must address. This risk arises from fluctuations in the fair value of future cash flows of financial instruments due to changes in foreign exchange rates. The Company is exposed to exchange rate risk primarily from fluctuations in the USD and EURO, which are used for the procurement of goods and services. Changes in exchange rates can impact the fair value of cash flows, profit before tax, and the Company's financial obligations.

Sebagai bagian dari manajemen risiko keuangan, Perseroan melakukan analisis sensitivitas terhadap perubahan nilai tukar sebesar 5% terhadap laba sebelum pajak, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Berdasarkan analisis, dampak perubahan kurs terhadap laba sebelum pajak adalah sebagai berikut:

As part of its financial risk management strategy, the Company conducts a sensitivity analysis on a 5% exchange rate fluctuation against profit before tax, assuming other variables remain constant. Based on this analysis, the impact of exchange rate changes on profit before tax is as follows:

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024
Kenaikan Increase	10.634.400.496	23.641.004.226
Penurunan Decrease	(10.634.400.496)	(23.641.004.226)

Untuk mengelola risiko ini, Perseroan menerapkan strategi mitigasi seperti pengelolaan eksposur mata uang asing dan pemantauan tren nilai tukar guna mengoptimalkan keputusan keuangan.

To manage this risk, the Company implements mitigation strategies such as foreign exchange exposure management and monitoring exchange rate trends to optimize financial decision-making.

Prospek Usaha
Business Prospects

Prospek usaha WIKA Beton pada tahun 2026 ditentukan oleh kesinambungan permintaan konstruksi domestik dan kemampuan Perseroan mengonversi portofolio pekerjaan menjadi arus kas yang sehat. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal untuk RAPBN 2026 menunjukkan proyeksi makro yang masih berada dalam kisaran pertumbuhan 5,2%–5,8%, inflasi 1,5%–3,5%, nilai tukar Rp16.500–Rp16.900/US$, dan suku bunga SBN 10 tahun 6,6%–7,2%, sehingga ruang permintaan domestik tetap terbuka namun disiplin biaya pada komponen sensitif kurs dan logistik tetap diperlukan.

Pada sisi stabilitas, otoritas dalam Kerangka KSSK menilai sistem keuangan tetap resilien dan memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2026 meningkat ke sekitar 5,4% yang ditopang permintaan domestik, sehingga prospek permintaan konstruksi tetap memiliki dasar makro yang memadai. Namun, realisasi permintaan konstruksi tetap bergantung pada prioritas fiskal, ritme belanja, dan disiplin pembayaran pada proyek-proyek bernilai besar.

Dari sisi industri, belanja infrastruktur pemerintah berpotensi tetap menjadi jangkar permintaan, meskipun komposisi program dapat berubah mengikuti prioritas pembangunan. Indikator yang relevan untuk membaca pipeline pekerjaan pada 2026 terlihat dari arah belanja Kementerian PU, termasuk fokus pada irigasi untuk swasembada pangan, dukungan konektivitas, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah, serta penyediaan air baku/SPAM, dengan pagu anggaran 2026 yang telah dibahas bersama DPR.

Pada tingkat perencanaan pembangunan, sinergi RKP dan APBN 2026 menekankan prioritas yang menonjol pada kedaulatan pangan, energi, dan air serta peningkatan produktivitas, sehingga segmen proyek terkait konektivitas, sumber daya air, dan penguatan basis produktif tetap berpeluang menjadi penggerak permintaan.

Pada tingkat Perseroan, prospek 2026 ditopang oleh basis pasar yang telah terbentuk pada tahun sebelumnya, terutama pada segmen infrastruktur dan industri. Diversifikasi pelanggan lintas sektor tetap membuka peluang, namun selektivitas proyek menjadi prasyarat utama untuk menjaga

WIKA Beton's business prospects in 2026 will be determined by the continuity of domestic construction demand and the Company's ability to convert its project portfolio into healthy cash flow. The Macroeconomic Framework and Fiscal Policy Priorities for the 2026 Draft State Budget show macroeconomic projections that remain within the range of 5.2%–5.8% growth, 1.5%–3.5% inflation, an exchange rate of Rp16,500–16,900/USD, and a 10-year SBN interest rate of 6.6%–7.2%, so that domestic demand remains open but cost discipline on exchange rate-sensitive and logistics components is still necessary.

On the stability side, authorities within the KSSK Framework assess that the financial system remains resilient and forecast that economic growth in 2026 will increase to around 5.4%, supported by domestic demand, so that the outlook for construction demand remains on a sound macroeconomic footing. However, the realization of construction demand remains dependent on fiscal priorities, spending rhythms, and payment discipline on large-value projects.

From an industrial perspective, government infrastructure spending has the potential to remain the anchor of demand, although the composition of programs may change in line with development priorities. Relevant indicators for reading the 2026 work pipeline can be seen from the direction of the Ministry of Public Works' spending, including a focus on irrigation for food self-sufficiency, connectivity support, the implementation of the Regional Road Presidential Instruction, and the provision of raw water/SPAM, with the 2026 budget ceiling having been discussed with the House of Representatives.

At the development planning level, the synergy between the 2026 National Development Plan (RKP) and State Budget (APBN) emphasizes priorities that highlight food, energy, and water sovereignty as well as increased productivity, so that project segments related to connectivity, water resources, and strengthening the productive base remain likely to drive demand.

At the corporate level, the 2026 outlook is supported by the market base that has been established in the previous year, particularly in the infrastructure and industrial segments. Cross-sector customer diversification continues to open up opportunities, but project selectivity is a key prerequisite

kualitas kontrak, margin, dan risiko pembayaran. Perseroan mengarahkan pemilihan proyek berdasarkan kepastian pendanaan, kesesuaian kapasitas produksi, serta kelayakan termin pembayaran agar pertumbuhan pendapatan tidak menghasilkan tekanan pada likuiditas.

for maintaining contract quality, margins, and payment risk. The Company directs project selection based on funding certainty, production capacity suitability, and payment term feasibility so that revenue growth does not put pressure on liquidity.

Risiko utama pada tahun 2026 diperkirakan muncul dari intensitas persaingan tender, dinamika jadwal proyek, serta volatilitas biaya yang dipengaruhi kurs, energi, dan logistik. Indikator stabilitas nilai rupiah dan pergerakan yield SBN yang dipublikasikan Bank Indonesia menjadi sinyal bahwa faktor pasar keuangan tetap perlu dimitigasi melalui disiplin pengadaan, pengendalian biaya, dan ketepatan eksekusi.

The main risks in 2026 are expected to arise from intense tender competition, project schedule dynamics, and cost volatility influenced by exchange rates, energy, and logistics. Indicators of rupiah stability and SBN yield movements published by Bank Indonesia signal that financial market factors still need to be mitigated through procurement discipline, cost control, and precise execution.

Perseroan menempatkan respons 2026 pada tiga pengungkit utama. Perseroan memperkuat operational excellence dan rantai pasok untuk memastikan kepastian mutu, ketepatan jadwal, serta efisiensi biaya. Perseroan memperluas diferensiasi portofolio melalui solusi bernilai tambah, termasuk produk modular dan inovasi yang selaras dengan tuntutan efisiensi serta keberlanjutan, agar strategi penjualan tidak terjebak pada kompetisi harga semata. Perseroan juga mempercepat konversi pekerjaan menjadi kas melalui Pengakuan BAST (Berita Acara Serah Terima) sebagai dasar penagihan, sehingga siklus tagihan dapat dipendekkan dan kualitas arus kas operasi dapat dijaga.

The Company is focusing its 2026 response on three key drivers. The Company is strengthening operational excellence and supply chains to ensure quality assurance, schedule accuracy, and cost efficiency. The Company is expanding its portfolio differentiation through value-added solutions, including modular products and innovations that are in line with efficiency and sustainability demands, so that its sales strategy is not trapped in price competition alone. The Company is also accelerating the conversion of work into cash by using the Handover Report (BAST) as the basis for billing, thereby shortening the billing cycle and maintaining the quality of operating cash flow.

Dengan disiplin selektivitas proyek, konsistensi eksekusi, dan percepatan arus kas, Perseroan memiliki ruang untuk menjaga daya saing dan memperkuat ketahanan finansial pada tahun 2026, sekaligus menyiapkan fondasi pertumbuhan yang lebih berkualitas pada periode berikutnya.

With project selectivity discipline, execution consistency, and cash flow acceleration, the Company has room to maintain competitiveness and strengthen financial resilience in 2026, while laying the foundation for higher-quality growth in the following period.

PROYEKSI TAHUN 2026
PROJECTION FOR THE YEAR 2026

Memasuki tahun 2026, prospek ekonomi global diperkirakan tetap bergerak dalam lingkungan yang tidak pasti, terutama akibat perubahan kebijakan perdagangan dan eskalasi risiko geopolitik yang dapat memengaruhi perdagangan, harga komoditas, serta biaya logistik. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global berada pada 3,3% pada tahun 2026, dengan inflasi global yang diperkirakan menurun, namun risiko penurunan tetap muncul dari ketegangan geopolitik dan perubahan ekspektasi investasi teknologi.

Entering 2026, the global economic outlook is expected to remain uncertain, mainly due to changes in trade policy and escalating geopolitical risks that could affect trade, commodity prices, and logistics costs. The International Monetary Fund (IMF) projects global economic growth to be at 3.3% in 2026, with global inflation expected to decline, but the risk of a decline remains due to geopolitical tensions and changes in technology investment expectations.

Dari sisi domestik, Perseroan menggunakan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2026 sebagai jangkar penyusunan RKAP dan proyeksi usaha. Asumsi APBN 2026 antara lain mencakup pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp16.500/US$, tingkat suku bunga SBN 10 tahun

Domestically, the Company uses the 2026 State Budget's macroeconomic assumptions as the anchor for the preparation of its Work Plan and Budget (RKAP) and business projections. The 2026 State Budget assumptions include economic growth of 5.4%, inflation of 2.5%, an exchange rate

6,9%, harga minyak US$70/barel, lifting minyak 610 ribu barel/hari, serta lifting gas 984 ribu boe/hari.

of Rp16,500/USD, a 10-year SBN interest rate of 6.9%, an oil price of USD 70/barrel, oil lifting of 610 thousand barrels/day, and gas lifting of 984 thousand boe/day.

No.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Macroeconomic Assumptions	APBN 2025 APBN 2025	RAPBN 2026 RAPBN 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi Economic Growth	5,2%	5,4%
2.	Tingkat Inflasi Inflation Rate	2,5%	2,5%
3.	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun 10-Year Government Bond Yield (SUN)	7,0%	6,9%
4.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD) Rupiah Exchange Rate (IDR/USD)	16.000	16.500
5.	Harga Minyak Mentah (USD/Barrel) Crude Oil Price (USD/Barrel)	82	70
6.	Lifting Minyak Mentah (ribu barrel/hari) Crude Oil Lifting (thousand barrels per day)	605	610
7.	Lifting Gas Bumi (ribu barrel setara minyak/hari) Natural Gas Lifting (thousand barrels of oil equivalent per day)	1.005	984

Struktur asumsi tersebut mengindikasikan ruang pertumbuhan yang tetap terbuka dengan inflasi yang ditargetkan terkendali, namun Perseroan tetap perlu menjaga disiplin biaya pada komponen yang sensitif terhadap kurs, energi, dan distribusi.

This assumption structure indicates that growth opportunities remain open with inflation under control, but the Company still needs to maintain cost discipline on components that are sensitive to exchange rates, energy, and distribution.

Prospek usaha tahun 2026 bertumpu pada kesinambungan permintaan konstruksi domestik, selektivitas proyek, serta disiplin eksekusi yang mengonversi kontrak menjadi penjualan dan kas. Perseroan memprioritaskan strategi komersial berbasis nilai untuk menghadapi kompetisi yang ketat, sehingga portofolio tender diarahkan pada proyek dengan kepastian pendanaan yang memadai, jadwal yang realistis, serta profil pembayaran yang sehat.

The business outlook for 2026 relies on continued domestic construction demand, project selectivity, and disciplined execution that converts contracts into sales and cash. The Company prioritizes a value-based commercial strategy to face intense competition, so that the tender portfolio is directed at projects with adequate funding certainty, realistic schedules, and healthy payment profiles.

Kualitas realisasi target 2026 ditopang oleh penguatan eksekusi end-to-end, terutama pada pengendalian mutu, ketepatan suplai, efisiensi biaya produksi dan distribusi, serta disiplin administrasi proyek. Perseroan menempatkan Pengakuan BAST (Berita Acara Serah Terima) sebagai pengungkit arus kas, karena BAST (Berita Acara Serah Terima) menjadi dasar penagihan dan mempercepat konversi penyelesaian pekerjaan menjadi penerimaan kas.

The quality of 2026 target achievement is supported by strengthened end-to-end execution, particularly in quality control, supply reliability, production and distribution cost efficiency, and project administrative discipline. The Company views the issuance of the BAST (Handover Report) as a cash flow driver, as the BAST serves as the basis for invoicing and accelerates the conversion of completed work into cash receipts.

Risiko utama pada tahun 2026 diperkirakan berasal dari kompetisi harga, ketidakpastian ritme proyek, serta volatilitas biaya yang dipengaruhi kurs dan logistik. Perseroan memitigasi risiko tersebut melalui selektivitas tender, penguatan klausul kontrak terkait mekanisme pembayaran, pengendalian biaya berbasis data, serta pemantauan risiko proyek sejak tahap pra-kontrak hingga tahap serah-terima.

The main risks in 2026 are expected to come from price competition, uncertainty in project rhythms, and cost volatility influenced by exchange rates and logistics. The company mitigates these risks through tender selectivity, strengthening contract clauses related to payment mechanisms, data-based cost control, and project risk monitoring from the pre-contract stage to the handover stage.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025
Comparison between 2025 Targets and Realization

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Sepanjang tahun 2025, pencapaian kinerja Perseroan mencakup berbagai aspek, termasuk Laba (Rugi) Konsolidasian, Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian, Struktur Modal, Pembagian Dividen, Kapasitas Produksi Segmen Usaha, serta Pendapatan Segmen Usaha. Adapun perbandingan realisasi terhadap RKAP 2025 disajikan sebagai berikut.

The Company remains committed to achieving the targets set in the Corporate Work Plan and Budget (RKAP). Throughout 2025, the Company's performance achievements covered various aspects, including Consolidated Profit (Loss), Consolidated Financial Position Statement, Consolidated Cash Flow Statement, Capital Structure, Dividend Distribution, Business Segment Production Capacity, and Business Segment Revenue. The comparison of actual performance against the 2025 RKAP is presented as follows:

Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Tahun 2025
Comparison between Targets and Realization of Consolidated Statements of Financial Position in 2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 RKAP 2025	Realisasi 2025 Realization in 2025	Pencapaian (%) Achievement (%)
Aset Assets	8.195.626	6.290.467	76,75
Aset Lancar Current Assets	4.946.278	3.929.811	79,45
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	3.249.348	3.264.877	100,48
Liabilitas Liabilities	4.449.322	3.507.922	78,84
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	4.160.894	3.042.007	73,11
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	288.428	465.915	161,54
Ekuitas Equity	3.746.304	3.686.012	98,39

Pada tahun 2025, realisasi Aset Perseroan mencapai 76,75% dari target RKAP. Pencapaian ini dipengaruhi oleh kebijakan seleksi proyek yang lebih ketat dalam menerima pesanan pelanggan guna meminimalkan risiko piutang macet. Sementara itu, Aset Tidak Lancar berhasil mencapai 100,48% dari target yang ditetapkan, seiring dengan kebijakan investasi yang lebih selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan strategis perusahaan.

In 2025, the Company's asset realization reached 76.75% of the RKAP target. This achievement was influenced by a stricter project selection policy when accepting customer orders to minimize the risk of bad debts. Meanwhile, Non-Current Assets achieved 100.48% of the target, in line with a more selective investment policy tailored to the Company's strategic needs.

Di sisi Liabilitas, realisasi tahun 2025 mencapai 78,84% dari target RKAP. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan, yang berdampak pada berkurangnya permintaan barang dan jasa kepada pemasok serta subkontraktor.

On the Liabilities side, the 2025 realization reached 78.84% of the RKAP target. This was primarily due to a decline in sales volume, which led to a reduced demand for goods and services from suppliers and subcontractors.

Sementara itu, realisasi Ekuitas mencapai 98,39% dari target RKAP. Kendati hampir mencapai target, sedikitnya pencapaian ini dipengaruhi oleh penurunan laba bersih tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Meanwhile, Equity realization reached 98.39% of the RKAP target. Although it was close to the target, this achievement was slightly impacted by a decrease in net income for the year compared to the previous year.

Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian Tahun 2025
Comparison between Targets and Realization of Consolidated Statements of Profit or Loss in 2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 RKAP 2025	Realisasi 2025 Realization in 2025	Pencapaian (%) Achievement (%)
Kontrak Baru New Contracts	6.000.000	4.006.798	66,78
Pendapatan Usaha Revenues	5.305.000	3.585.862	67,59
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	4.869.462	3.328.961	68,36
Laba Bruto Gross Profit	435.538	256.901	58,98
Beban Usaha Operating Expenses	176.219	150.550	85,43
Laba Usaha Operating Income	259.319	106.351	41,01
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	(149.356)	(86.490)	57,91
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	109.963	19.861	18,06
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	85.211	4.122	4,84
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	(85)	1.676	(1.972,02)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan **Total Comprehensive Income for the Year**	**85.126**	**5.799**	**6,81**

Pada tahun 2025, Pendapatan Usaha Perseroan terealisasi sebesar 67,59% dari target RKAP. Pencapaian ini dipengaruhi oleh kebijakan seleksi proyek yang lebih ketat dalam menerima pesanan pelanggan, dengan tujuan memitigasi risiko piutang usaha yang berpotensi tidak tertagih.

In 2025, the Company's Revenue was realized at 67.59% of the RKAP target. This achievement was influenced by a stricter project selection policy when accepting customer orders, aimed at mitigating the risk of uncollectible trade receivables.

Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Arus Kas Konsolidasian Tahun 2025
Comparison between Targets and Realization of Consolidated Statements of Cash Flows in 2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 RKAP 2025	Realisasi 2025 Realization in 2025	Pencapaian (%) Achievement (%)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Flows Provided by Operating Activities	99.735	123.446	123,77
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Flows Used for Investing Activities	(97.778)	(12.878)	13,17
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows Used for Financing Activities	(31.964)	(297.217)	929,85
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) Cash and Cash Equivalents	(33.920)	(186.650)	550,26
Dampak Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun Effect of Foreign Exchange on Cash and Cash Equivalent at End of Year	-	821	100,00
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun Beginning Balance of Cash and Cash Equivalents	547.906	597.554	109,06
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun Ending Balance of Cash and Cash Equivalents	581.826	411.726	70,76

Sepanjang tahun 2025, Perseroan mencatatkan realisasi arus kas bersih dari aktivitas operasi yang mencapai 123,77% dari target RKAP. Pencapaian yang signifikan ini mencerminkan efektivitas dalam mengelola penerimaan kas dari pelanggan serta efisiensi dalam pengelolaan arus kas operasional.

Throughout 2025, the Company recorded net cash flow from operating activities at 123.77% of the RKAP target. This significant achievement reflects the effectiveness in managing cash receipts from customers and efficiency in operational cash flow management.

Sementara itu, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terealisasi sebesar 13,17% dari target RKAP. Hal ini mencerminkan pendekatan selektif dalam belanja modal, di mana Perseroan memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan sejalan dengan kebutuhan bisnis dan strategi jangka panjang.

Meanwhile, net cash flow used for investing activities was realized at 13.17% of the RKAP target. This reflects a selective approach to capital expenditures, ensuring that each investment aligns with business needs and long-term strategy.

Adapun arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan mencatatkan capaian 929,85% dibandingkan target RKAP yang menetapkan penggunaan sebesar Rp31,96 miliar. Capaian tersebut mencerminkan fleksibilitas Perseroan dalam mengelola sumber pendanaan, baik melalui penyesuaian penarikan maupun pelunasan kewajiban, sehingga mampu mendukung kebutuhan operasional dan menjaga stabilitas likuiditas secara efektif.

Net cash flows from financing activities reached 929.85% of the RKAP target, which had projected a cash outflow of Rp31.96 billion. This achievement reflects the Company's flexibility in managing its funding sources, both through adjustments in drawdowns and repayments, enabling it to support operational needs while maintaining liquidity stability effectively.

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Keuangan Tahun 2025
Comparison between Targets and Realization on Financial Indicators in 2025

(Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 RKAP 2025	Realisasi 2025 Realization in 2025	Pencapaian (%) Achievement (%)
ROI (%)	2,83%	2.66%	19,43
ROE (%)	2,27%	0,11%	4,93
Cash Ratio (%)	10,71%	16,95%	158,26
Current Ratio (%)	118,88%	130,42%	109,70
Collection Period (hari) Collection Period (days)	122,56	77,79	63,62
Perputaran Persediaan (hari) Inventory Turnover (days)	62,77	73,95	117,81
Perputaran Total Aset (%) Total Assets Turnover (%)	64,83	53,18	82,03
Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (%) **Total Equity to Total Assets (%)**	**45,71**	**58,60**	**128,19**

Perseroan mencatatkan pencapaian yang tinggi pada realisasi Cash Ratio di tahun 2025 sebesar 158,26%. Selain itu, Current Ratio juga turut mencatatkan pencapaian sebesar 109,70% terhadap target yang telah ditetapkan.

The Company recorded a high achievement in the realization of the Cash Ratio in 2025, reaching 158.26%. Additionally, the Current Ratio also achieved 109.70% of the set target.

Sementara itu, penggunaan Ekuitas untuk menghasilkan Laba Tahun Berjalan dengan menggunakan acuan ROE di tahun 2025 hanya mampu mencapai 4,93%. Hal tersebut disebabkan oleh pencapaian laba tahun berjalan yang lebih rendah dari target.

Meanwhile, the utilization of equity to generate net income for the year, as measured by ROE, only reached 4.93% in 2025. This was due to the net income for the year falling below the target.

Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal Tahun 2025
Comparison between Targets and Realization on Capital Structure in 2025

(Dalam jutaan Rupiah I In million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 RKAP 2025	Realisasi 2025 Realization in 2025	Pencapaian (%) Achievement (%)
Liabilitas Liabilities	4.449.322	2.604.456	58,54
Ekuitas Equity	3.746.304	3.686.012	98,39
Jumlah Liabilitas dan ekuitas **Total Liabilities and equity**	**8.195.626**	**6.290.468**	**76,75**

Perseroan berhasil mencapai target struktur modal yang telah ditetapkan dalam RKAP 2025 pada jumlah Ekuitas dengan pencapaian target sebesar 98,39%. Realisasi Liabilitas juga berhasil mencatatkan pencapaian target yang cukup tinggi yaitu sebesar 58,54%. Secara keseluruhan, Jumlah Liabilitas dan Ekuitas yang telah direalisasikan berhasil mencapai target sebesar 76,75% dari RKAP.

The Company successfully achieved the targeted capital structure set in the 2025 RKAP, with Equity realization reaching 98.39% of the target. Liabilities also recorded a strong achievement, reaching 58.54% of the target. Overall, the total Liabilities and Equity realized successfully reached 76.75% of the RKAP target.

Realisasi Pembagian Dividen Tahun 2025
Realization on Dividend Distribution in 2025

Pada tahun 2025, Perseroan merealisasikan pembagian dividen tunai sebesar Rp6.537 juta atau setara dengan Rp0,75 per saham atas laba bersih Perseroan tahun 2024 dengan rasio pembagian dividen terhadap laba bersih sebesar 10,18%.

In 2025, the Company distributed a cash dividend of Rp6,537 million, equivalent to Rp0.75 per share, based on the Company's 2024 net income, with a dividend payout ratio of 10.18%.

Realisasi tersebut mencerminkan kebijakan Perseroan dalam menyeimbangkan antara pemberian imbal hasil kepada pemegang saham dan upaya memperkuat struktur permodalan guna mendukung keberlanjutan usaha di tengah dinamika industri.

This distribution reflects the Company's policy of balancing returns to shareholders with efforts to strengthen its capital structure to support business sustainability amid industry dynamics.

Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Segmen Usaha Tahun 2025
Comparison between Targets and Realization on Business Segment Revenue Performance in 2025

(Dalam jutaan Rupiah I In million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 RKAP 2025	Realisasi 2025 Realization in 2025	Pencapaian (%) Achievement (%)
Segmen Beton Concrete Segment	4.919.141	3.100.577	63,03
Segmen *Quarry* Quarry Segment	0	1.793	100
Segmen Jasa Service Segment	385.859	483.492	125,30
Jumlah **Total**	**5.305.000**	**3.585.862**	**67,59**

Realisasi pendapatan segmen usaha tahun 2025 tercatat sebesar Rp3,59 triliun, atau mencapai 67,59% dari target RKAP sebesar Rp5,31 triliun. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, terutama didorong oleh kontribusi utama dari Segmen Beton, yang berhasil mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp4,92 triliun atau 63,03% dari target.

Selain itu, Segmen Jasa turut mencatatkan kinerja impresif dengan pencapaian sebesar 125,30%, yang menunjukkan peningkatan signifikan dari proyeksi awal. Sementara itu, meskipun Segmen Quarry tidak memiliki target dalam RKAP awal, realisasi pendapatan tetap dicapai sebesar Rp1,79 miliar, menunjukkan adanya potensi baru dari lini bisnis ini.

Peningkatan pendapatan secara keseluruhan tidak terlepas dari strategi pengembangan bisnis sepanjang tahun 2025.

The realization of business segment revenue in 2025 reached Rp3.59 trillion, or 67.59% of the 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) target of Rp5.31 trillion. This achievement reflects a strong performance, primarily driven by the Concrete Segment, which recorded revenue realization of Rp4.92 trillion, equivalent to 63.03% of its target.

In addition, the Service Segment also delivered impressive performance with an achievement of 125.30%, indicating a significant increase from the initial projection. Meanwhile, although the Quarry Segment did not have a target set in the original RKAP, it still managed to record revenue of Rp1.79 billion, highlighting emerging potential from this business line.

The overall increase in revenue was strongly supported by the company's business development strategy implemented throughout 2025.



Proyeksi Tahun 2026
Projection for the Year 2026

Memasuki tahun 2026, prospek ekonomi global diperkirakan tetap bergerak dalam lingkungan yang tidak pasti, terutama akibat perubahan kebijakan perdagangan dan eskalasi risiko geopolitik yang dapat memengaruhi perdagangan, harga komoditas, serta biaya logistik. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global berada pada 3,3% pada tahun 2026, dengan inflasi global yang diperkirakan menurun, namun risiko penurunan tetap muncul dari ketegangan geopolitik dan perubahan ekspektasi investasi teknologi.

Entering 2026, the global economic outlook is expected to remain uncertain, mainly due to changes in trade policy and escalating geopolitical risks that could affect trade, commodity prices, and logistics costs. The International Monetary Fund (IMF) projects global economic growth to be at 3.3% in 2026, with global inflation expected to decline, but the risk of a decline remains due to geopolitical tensions and changes in technology investment expectations.

Dari sisi domestik, Perseroan menggunakan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2026 sebagai jangkar penyusunan RKAP dan proyeksi usaha. Asumsi APBN 2026 antara lain mencakup pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp16.500/US$, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9%, harga minyak US$70/barel, lifting minyak 610 ribu barel/hari, serta lifting gas 984 ribu boe/hari.

Domestically, the Company uses the 2026 State Budget's macroeconomic assumptions as the anchor for the preparation of its Work Plan and Budget (RKAP) and business projections. The 2026 State Budget assumptions include economic growth of 5.4%, inflation of 2.5%, an exchange rate of Rp16,500/USD, a 10-year SBN interest rate of 6.9%, an oil price of USD 70/barrel, oil lifting of 610 thousand barrels/day, and gas lifting of 984 thousand boe/day.

No.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Macroeconomic Assumptions	APBN 2025 APBN 2025	RAPBN 2026 RAPBN 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi Economic Growth	5,2%	5,4%
2.	Tingkat Inflasi Inflation Rate	2,5%	2,5%
3.	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun 0-Year Government Bond Yield (SUN)	7,0%	6,9%
4.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD) Rupiah Exchange Rate (IDR/USD)	16.000	16.500
5.	Harga Minyak Mentah (USD/Barrel) Crude Oil Price (USD/Barrel)	82	70
6.	Lifting Minyak Mentah (ribu barrel/hari) Crude Oil Lifting (thousand barrels per day)	605	610
7.	Lifting Gas Bumi (ribu barrel setara minyak/hari) Natural Gas Lifting (thousand barrels of oil equivalent per day)	1.005	984

Struktur asumsi tersebut mengindikasikan ruang pertumbuhan yang tetap terbuka dengan inflasi yang ditargetkan terkendali, namun Perseroan tetap perlu menjaga disiplin biaya pada komponen yang sensitif terhadap kurs, energi, dan distribusi.

This assumption structure indicates that growth opportunities remain open with inflation under control, but the Company still needs to maintain cost discipline on components that are sensitive to exchange rates, energy, and distribution.

Prospek usaha tahun 2026 bertumpu pada kesinambungan permintaan konstruksi domestik, selektivitas proyek, serta disiplin eksekusi yang mengonversi kontrak menjadi penjualan dan kas. Perseroan memprioritaskan strategi komersial berbasis nilai untuk menghadapi kompetisi yang ketat, sehingga portofolio tender diarahkan pada proyek dengan kepastian pendanaan yang memadai, jadwal yang realistis, serta profil pembayaran yang sehat.

The business outlook for 2026 relies on continued domestic construction demand, project selectivity, and disciplined execution that converts contracts into sales and cash. The Company prioritizes a value-based commercial strategy to face intense competition, so that the tender portfolio is directed at projects with adequate funding certainty, realistic schedules, and healthy payment profiles.

Kualitas realisasi target 2026 ditopang oleh penguatan eksekusi end-to-end, terutama pada pengendalian mutu, ketepatan suplai, efisiensi biaya produksi dan distribusi, serta disiplin administrasi proyek. Perseroan menempatkan akselerasi BAST (Berita Acara Serah Terima) sebagai pengungkit arus kas, karena BAST (Berita Acara Serah Terima) menjadi dasar penagihan dan mempercepat konversi penyelesaian pekerjaan menjadi penerimaan kas. Pengakuan progress BAST yang cepat diproyeksikan menurunkan friksi dokumen, memperpendek siklus tagihan, serta meningkatkan kepastian penerimaan kas pada tingkat proyek.

The quality of the 2026 target realization is supported by strengthening end-to-end execution, particularly in quality control, supply accuracy, production and distribution cost efficiency, and project administration discipline. The Company prioritizes the acceleration of BAST (Handover Reports) as a cash flow lever, as Handover Report (BAST) forms the basis for billing and accelerates the conversion of completed work into cash receipts. The timely recognition of BAST progress is projected to reduce documentation friction, shorten the billing cycle, and enhance cash collection certainty at the project level.

Risiko utama pada tahun 2026 diperkirakan berasal dari kompetisi harga, ketidakpastian ritme proyek, serta volatilitas biaya yang dipengaruhi kurs dan logistik. Perseroan memitigasi risiko tersebut melalui selektivitas tender, penguatan klausul kontrak terkait mekanisme pembayaran, pengendalian biaya berbasis data, serta pemantauan risiko proyek sejak tahap pra-kontrak hingga tahap serah-terima.

The main risks in 2026 are expected to come from price competition, uncertainty in project rhythms, and cost volatility influenced by exchange rates and logistics. The company mitigates these risks through tender selectivity, strengthening contract clauses related to payment mechanisms, data-based cost control, and project risk monitoring from the pre-contract stage to the handover stage.

Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Tahun 2026
Projection for Consolidated Statements of Financial Position in 2026

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Uraian Description	Proyeksi 2026 Projection for 2026
Aset Assets	6.616.735
Aset Lancar Current Assets	3.584.830
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	3.031.905
Liabilitas Liabilities	2.905.929
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2.840.560
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	65.369
Ekuitas Equity	3.710.806

Proyeksi Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian Tahun 2026
Projection for Consolidated Statements of Profit or Loss in 2026

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Uraian Description	Proyeksi 2026 Projection for 2026
Kontrak Baru New Contracts	3.888.000
Pendapatan Usaha Revenues	3.957.015
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(3.694.558)
Laba Bruto Gross Profit	262.457
Beban Usaha Operating Expenses	(150.070)
Laba Usaha Operating Income	112.387
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	(63.666)
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	48.721
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	20.296

Proyeksi Laporan Arus Kas Konsolidasian Tahun 2026
Projection for Consolidated Statements of Cash Flows in 2026

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Uraian Description	Proyeksi 2026 Projection for 2026
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi Net Cash Flows Provided by (Used for) Operating Activities	191.936
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi Net Cash Flows Provided by (Used for) Investing Activities	9.532
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows Provided by (Used for) Financing Activities	(1.649)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) Cash and Cash Equivalents	199.819
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun Beginning Balance of Cash and Cash Equivalents	279.510
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun Ending Balance of Cash and Cash Equivalents	479.329

Proyeksi Indikator Keuangan Tahun 2026
Projection for Financial Indicators in 2026

Uraian Description	Proyeksi 2026 Projection for 2026
ROA (%)	0,73%
ROE (%)	0,55%
Rasio Kas Cash Ratio (%)	16,87%
Rasio Lancar Current Ratio (x)	1,26
Collection Period (hari) Collection Period (days)	124
Perputaran Persediaan (hari) Inventory Turnover (days)	70

Proyeksi Struktur Modal Tahun 2026
Projection for Capital Structure in 2026

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Uraian Description	Proyeksi 2026 Projection for 2026
Liabilitas Liabilities	2.905.929
Ekuitas Equity	3.710.806
Jumlah Liabilitas dan ekuitas Total Liabilities and Equity	6.616.735

Kebijakan Dividen
Dividend Policy

Kebijakan Dividen Untuk tahun 2026, Perseroan memproyeksikan kebijakan dividen yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, posisi arus kas, serta kebutuhan pendanaan untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha. Perseroan berencana membagikan dividen tunai dengan rasio maksimal hingga 30% dari laba bersih, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlanjutan usaha.

Penetapan besaran dan waktu pembagian dividen akan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain tingkat laba yang dihasilkan, kebutuhan belanja modal, rencana investasi, serta kondisi ekonomi dan industri. Keputusan akhir mengenai pembagian dividen akan ditetapkan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

For 2026, the Company projects a dividend policy that continues to prioritize prudence by considering financial performance, cash flow position, and funding requirements to support operations and business development. The Company plans to distribute cash dividends with a maximum payout ratio of up to 30% of net profit, while taking into account its financial condition and business sustainability.

The determination of the dividend amount and timing will consider various factors, including profit levels, capital expenditure requirements, investment plans, as well as economic and industry conditions. The final decision on dividend distribution will be made through the GMS based on the Board of Directors' recommendation, in accordance with prevailing regulations.

Aspek Pemasaran
Marketing Aspects

Dalam menjaga ketahanan komersial serta pendekatan pengelolaan posisi kompetitif pada segmen usaha utama. Perseroan perlu merumuskan Strategi Pemasaran yang mengatur agenda perluasan pasar dan peningkatan efektivitas penjualan, serta Pangsa Pasar yang menggambarkan posisi Perseroan dan mekanisme pemutakhiran pengukurannya.

In maintaining commercial resilience and a competitive positioning approach in key business segments, the Company needs to formulate a Marketing Strategy that sets out the agenda for market expansion and increased sales effectiveness, as well as Market Share that describes the Company's position and the mechanism for updating its measurement.

STRATEGI PEMASARAN

Strategi pemasaran tahun 2025 diarahkan untuk menjaga ketahanan komersial di tengah persaingan proyek yang semakin ketat. Organisasi penjualan mengutamakan kualitas kontrak melalui prioritas pada proyek yang memiliki profil risiko terukur, kepastian eksekusi yang realistis, serta kejelasan mekanisme penagihan, sehingga pertumbuhan penjualan tidak mengorbankan disiplin margin dan stabilitas kas.

MARKETING STRATEGY

The 2025 marketing strategy is aimed at maintaining commercial resilience amid increasingly fierce project competition. The sales organization prioritizes contract quality by focusing on projects with measurable risk profiles, realistic execution certainty, and clear billing mechanisms, so that sales growth does not compromise margin discipline and cash stability.

Penguatan pemahaman pasar dijalankan untuk meningkatkan ketepatan pemetaan peluang, pemilihan segmen, dan perumusan strategi penawaran. Pemetaan tersebut digunakan untuk menajamkan proposisi nilai, menyesuaikan strategi harga berbasis risiko, dan meningkatkan peluang kemenangan tender secara selektif.

Market understanding is strengthened to improve the accuracy of opportunity mapping, segment selection, and bid strategy formulation. This mapping is used to sharpen the value proposition, adjust risk-based pricing strategies, and selectively increase the chances of winning tenders.

Keunggulan bersaing diperkuat melalui operational excellence dan penguatan rantai pasok. Kepastian mutu, ketepatan jadwal, serta ketersediaan pasokan dijadikan pendorong utama keputusan pelanggan, terutama pada proyek yang sensitif terhadap risiko keterlambatan dan ketidaksesuaian spesifikasi.

Competitive advantage is strengthened through operational excellence and supply chain reinforcement. Quality assurance, schedule accuracy, and supply availability are key drivers of customer decisions, especially on projects that are sensitive to delays and specification non-compliance.

Diferensiasi pemasaran diperkuat melalui penawaran solusi yang selaras dengan agenda efisiensi dan keberlanjutan, termasuk pengembangan produk modular dan inovasi yang menurunkan jejak lingkungan. Konsistensi pesan penawaran dijaga melalui standardisasi materi tender dan komunikasi digital berbasis bukti, sehingga kepercayaan pelanggan meningkat dan proses keputusan dapat dipercepat.

Marketing differentiation is strengthened through offering solutions that align with efficiency and sustainability agendas, including the development of modular products and innovations that reduce environmental footprints. Consistency in bidding messages is maintained through the standardization of tender materials and evidence-based digital communication, thereby increasing customer trust and accelerating the decision-making process.

Pembukuan realisasi penjualan melalui pengakuan BAST (Berita Acara Serah Terima) secara cepat dan tepat berdasarkan progress pekerjaan sebagai dasar penagihan. Progress BAST tersebut diposisikan untuk memperpendek siklus tagihan, meningkatkan kualitas piutang

Sales realization is recorded through the timely and accurate recognition of BAST (Handover Reports) based on work progress as the basis for billing. The BAST (Handover Reports) progress is positioned to shorten the billing cycle and improve the quality of receivables.

PANGSA PASAR

Pengukuran pangsa pasar Perseroan dilakukan melalui studi internal yang bersifat periodik sesuai siklus evaluasi segmen usaha. Studi tersebut menggunakan basis pengukuran yang ditetapkan dalam mekanisme evaluasi internal, sehingga angka pangsa pasar tidak selalu tersedia pada setiap tahun pelaporan. Referensi internal terakhir menunjukkan pangsa pasar segmen precast sebesar 47,90% (2022) dan segmen readymix sebesar 4,60% (2022), yang digunakan sebagai baseline pemantauan posisi kompetitif. Pembaruan angka pangsa pasar akan disampaikan kembali pada periode evaluasi berikutnya sesuai mekanisme pengukuran yang berlaku.

Pada tahun 2025, upaya pemeliharaan dan peningkatan posisi kompetitif difokuskan pada penguatan keandalan layanan, kualitas produk, dan disiplin biaya pada segmen inti. Pasar domestik tetap menjadi basis utama pada proyek infrastruktur strategis nasional, termasuk jalan tol, pelabuhan, dan jembatan, serta proyek strategis pemerintah. Penetrasi segmen swasta diperluas pada pertambangan, energi, properti, dan manufaktur untuk memperkuat diversifikasi permintaan terhadap produk pracetak yang andal.

Pemetaan peluang regional di Asia Tenggara diarahkan melalui kesiapan standar mutu dan kesiapan pemenuhan kebutuhan proyek lintas negara, termasuk pemenuhan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001 serta dukungan terhadap proyek yang mensyaratkan kriteria bangunan hijau. Standardisasi produk dan optimalisasi rantai pasok ditempatkan sebagai prasyarat untuk meningkatkan keberterimaan produk serta ketepatan pengiriman pada pasar luar negeri.

Diferensiasi produk diperkuat melalui pengembangan inovasi beton ramah lingkungan seperti EcoConcrete berbasis material daur ulang dan teknologi rendah karbon. Akses layanan pelanggan juga diperkuat melalui kanal digital, termasuk platform distribusi dan e-commerce B2B, sehingga proses pemesanan, pemenuhan, dan komunikasi layanan dapat berlangsung lebih cepat dan lebih efisien.

Perseroan menetapkan pembaruan pangsa pasar sebagai agenda evaluasi periodik, sehingga pengukuran posisi kompetitif dapat terus diperbarui dan digunakan sebagai dasar penajaman strategi pemasaran pada periode berikutnya.

MARKET SHARE

Market share measurements are conducted periodically in accordance with the business segment evaluation cycle, so market share figures are not always available for every reporting year. The latest internal reference shows a market share of 47.9% for Precast (2022) and 4.6% for Readymix (2022). Therefore, the 2025 approach emphasizes the agenda of maintaining and improving competitive position through project selectivity, strengthening market intelligence, product differentiation, strengthening the supply chain, and accelerating Handover Report (BAST), while stating that market share figures will be updated in accordance with the applicable evaluation mechanism.

In 2025, efforts to maintain and improve competitive positioning will focus on strengthening service reliability, product quality, and cost discipline in core segments. The domestic market remains the main base for national strategic infrastructure projects, including toll roads, ports, and bridges, as well as strategic government projects. Private sector penetration is being expanded in mining, energy, property, and manufacturing to strengthen the diversification of demand for reliable precast products.

Regional opportunity mapping in Southeast Asia is directed through quality standards readiness and readiness to meet cross-border project requirements, including compliance with ISO 9001 quality management system requirements and support for projects that require green building criteria. Product standardization and supply chain optimization are placed as prerequisites for increasing product acceptance and delivery accuracy in foreign markets.

Product differentiation is strengthened through the development of environmentally friendly concrete innovations such as EcoConcrete based on recycled materials and low-carbon technology. Customer service access is also strengthened through digital channels, including B2B distribution and e-commerce platforms, so that the ordering, fulfillment, and service communication processes can take place more quickly and efficiently.

The company has set market share renewal as a periodic evaluation agenda, so that competitive position measurements can be continuously updated and used as a basis for refining marketing strategies in the following period.

Uraian Mengenai Dividen
Description of Dividends

Kebijakan Dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham adalah suatu kebijakan yang diatur oleh Perseroan. Dalam menentukan nominal pembagiannya, Perseroan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk laba bersih, kondisi keuangan, kesehatan perusahaan, pertumbuhan usaha ke depan, dan rencana pengembangan usaha. Hal ini dilakukan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan untuk menentukan hal lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kondisi di mana Perseroan mencatat laba ditahan yang positif di akhir tahun buku, pengumuman pembagian dividen dapat dilakukan melalui RUPS. Selain itu, Perseroan juga berwenang untuk membagikan dividen interim sebelum akhir tahun buku. Apabila Perseroan berencana untuk memberikan dividen interim, keputusan tersebut dapat diambil oleh Direksi, dengan syarat diizinkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan tanpa menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen juga perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan ketentuan tentang penyisihan cadangan wajib sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian. Kegagalan pemegang saham dalam memenuhi kewajibannya mengembalikan dividen interim akan membuat Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Kewenangan Direksi melibatkan penentuan waktu, jumlah, dan bentuk pembayaran dividen. Keputusan Direksi Perseroan dalam merekomendasikan pembayaran dividen bergantung pada:

- Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan;
- Perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- Prospek usaha Perseroan di masa yang akan datang;

Dividend Policy

The distribution of dividends to shareholders is a policy regulated by the Company. In determining the dividend amount, the Company considers various factors, including net profit, financial condition, corporate health, future business growth, and business development plans. This is done without diminishing the rights of the Company's General Meeting of Shareholders (GMS) to determine other matters in accordance with the Company's Articles of Association and applicable regulations.

In circumstances where the Company records positive retained earnings at the end of the fiscal year, the announcement of dividend distribution can be made through the GMS. Additionally, the Company is authorized to distribute interim dividends before the end of the fiscal year. If the Company plans to provide interim dividends, the decision can be made by the Board of Directors, provided it is allowed by the Company's Articles of Association and without reducing the Company's net asset value below the sum of issued and paid-up capital plus mandatory reserves. Dividend distribution also requires approval from the Board of Commissioners and adherence to provisions regarding mandatory reserve allocations in accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Interim dividends that have been distributed must be returned by shareholders to the Company if the Company incurs a loss at the end of the fiscal year. Failure by shareholders to fulfill their obligation to return interim dividends will hold the Board of Directors and Board of Commissioners jointly liable for the Company's losses.

The Board of Directors has the authority to determine the time, amount and form of dividend payment. The decision of the Board of Directors of the Company in providing recommendations for dividend payments depends on:

- Results of the Company's business activities and cash flow;
- Estimations of the Company's financial performance and working capital requirements;
- Future business prospects of the Company;

- Belanja modal dan rencana investasi Perseroan lainnya;
- Perencanaan investasi dan pertumbuhan lainnya;
- Kondisi ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen berdasarkan perjanjian terkait.

Setelah keputusan pembayaran dividen diambil oleh Direksi, dividen akan dibayarkan dalam bentuk mata uang Rupiah. Pada tanggal pencatatan yang berlaku, pemegang saham memiliki hak untuk menerima dividen yang telah disetujui, dan mungkin akan dikenakan pajak penghasilan (*withholding tax*) sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia. Pemegang saham asing juga akan dikenai pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jika pemegang saham asing tersebut memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD), tarif pajak yang dikenakan akan mengikuti kesepakatan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sesuai dengan negara masing-masing pemegang saham. Hak-hak pemegang saham baru, termasuk hak atas pembagian dividen, setara dengan pemegang saham lainnya yang modal sahamnya telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Kebijakan dividen Perseroan adalah pernyataan itikad pada saat ini dan tidak memiliki ikatan hukum, karena kebijakan tersebut bergantung pada pertimbangan Direksi. Perseroan tidak memiliki kewajiban terhadap pihak tertentu yang dapat merugikan pemegang saham publik dengan syarat-syarat tertentu (*negative covenant*). Sejak Penawaran Umum Perdana, Perseroan konsisten dalam membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Meskipun demikian, tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan mampu membayarkan dividen pada masa mendatang.

Pembagian Dividen Tahun Buku 2024

Berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 03 Tanggal 2 Juni 2025, Perseroan telah menetapkan pembagian dividen untuk tahun buku 31 Desember 2024 sebesar Rp6.536.599.950.

- Capital expenditures and other investment plans of the Company;
- Investment planning and other growth;
- General economic and business conditions, along with other factors deemed relevant by the Company's Board of Directors, as well as the limitation provisions regarding dividend payment based on the related agreement.

Following the dividend payment decision by the Board of Directors, dividends will be disbursed in Indonesian Rupiah. On the applicable record date, shareholders are entitled to receive approved dividends, subject to Indonesian tax regulations, including withholding tax. Foreign shareholders will also be subject to income tax in accordance with Indonesian tax laws. If the foreign shareholder has a Certificate of Domicile (SKD), then the tax rate will be imposed according to the agreement on the Avoidance of Double Taxation (P3B) according to the country of each shareholder. The rights of new shareholders, including dividend entitlement, are equivalent to other shareholders who have fully subscribed and paid-up capital in the Company.

The dividend policy of the Company is a statement of current intent and is not legally binding because the policy is subject to changes in the discretion of the Board of Directors. The Company does not have obligations to certain parties that bind the Company with certain conditions (negative covenants) which can be detrimental to public shareholders. Since conducting the Initial Public Offering, the Company has never been absent from distributing dividends to its shareholders. However, there is no certainty that the Company will be able to pay dividends in the coming years.

Dividend Distribution for the 2024 Fiscal Year

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Number 03 dated June 2, 2025, the Company approved a dividend distribution for the fiscal year ended December 31, 2024, in the amount of Rp6,536,599,950.

Pembagian Dividen Tahun Buku 2023

Berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 43 Tanggal 17 Mei 2024, Perseroan telah menetapkan pembagian dividen untuk tahun buku 31 Desember 2023 sebesar Rp6.885.218.614.

Dividend Distribution for the 2023 Fiscal Year

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Number 43 dated May 17, 2024, the Company approved a dividend distribution for the fiscal year ended December 31, 2023, in the amount of Rp6,885,218,614.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2024

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp6.536.599.950,- (Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk dibagikan kepada Para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp0,75,- (Nol Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

SCHEDULE AND PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND PAYMENTS FOR THE 2024 FISCAL YEAR

In accordance with the decision of the Second Meeting Agenda, we hereby announce that the Company has determined a cash dividend from the Net Profit Attributable to Owners of the Parent Entity of the Company for the Fiscal Year ending on December 31, 2024, amounting to Rp6,536,599,950 (Six Billion Five Hundred Thirty-Six Million Five Hundred Ninety-Nine Thousand Nine Hundred Fifty Rupiah) to be distributed to the Shareholders, so that the Cash Dividend to be paid is Rp0.75 (Zero point Seventy-Five Rupiah) per share to be distributed to the Company's Shareholders according to the following schedule and procedures:

Pembagian Dividen Tahun Buku 2024 dan 2023
Dividend Distribution in 2024 and 2023 Fiscal Years

Uraian Description	Tahun Buku 2024 2024 Fiscal Year	Tahun Buku 2023 2023 Fiscal Year
Dividen Kas yang Dibagikan Cash Dividend Distributed	Rp6.536.599.950	Rp6.885.218.614
Dividen per Saham Dividend per Share	Rp0,75	Rp0,79
Rasio Pembagian Dividen Terhadap Laba Bersih Dividend Distribution to Net Profit Ratio	10,18%	20,00%
Tanggal Pengumuman Announcement Date	2 Juni 2025 June 2, 2025	17 Mei 2024 Mei 17, 2024
Tanggal Pembayaran Payment Date	4 Juli 2025 July 4, 2025	20 Juni 2024 June 20, 2024

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 16 Juni 2025 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 16 Juni 2025.

TERMS OF PAYMENT OF CASH DIVIDEND

1. Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders ("DPS") or recording date on June 16, 2025 and/or owners of company shares in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on closing of trading on the Indonesia Stock Exchange on June 16, 2025.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 4 Juli 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. For Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on July 4, 2025, into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities company and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, the cash dividend payment will be transferred to the Shareholders' account.
3. The cash dividends will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer ("WP Badan DN") and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividends paid to the Domestic Entity Taxpayer. the. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers ("WPOP DN") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPh") in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the WPOP DN concerned in accordance with with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
5. Shareholders can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and or custodian banks where shareholders open securities accounts, then shareholders must be responsible for reporting dividend receipts referred to in tax reporting for the tax year concerned in accordance with the applicable tax laws and regulations.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

6. Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use a rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submitting proof of record or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes, in accordance with the rules and regulations stipulated by KSEI, without the said document, cash dividends The amount paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of Use of Proceeds from Public Offering

Realisasi Penggunaan Dana Secara Kumulatif

Pada tahun 2017, Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil penawaran umum sebesar Rp1,17 triliun untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan. Penggunaan dana tersebut telah dilaporkan secara transparan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Surat No. KU.01.03/WB0A.2036/2017 tertanggal 7 Juli 2017. Laporan ini mencakup penggunaan dana yang telah digunakan secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku yang bersangkutan.

Perubahan Penggunaan Dana

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, Perseroan tidak melakukan perubahan terhadap penggunaan dana yang telah dilaporkan sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada perubahan yang perlu diinformasikan terkait penggunaan dana hasil penawaran umum pada tahun 2025.

Cumulative Realization of Fund Utilization

In 2017, the Company utilized the entire fund amounting to Rp1.17 trillion raised from the public offering to support its operational activities and business development. The utilization of these funds was transparently reported to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX) through Letter No. KU.01.03/WB0A.2036/2017 dated July 7, 2017. This report covers the fund utilization up to the end of the respective fiscal year.

Changes in Fund Utilization

In accordance with the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of use of funds from the public offering, the Company has not made any changes to the originally reported fund usage. Therefore, no changes need to be disclosed regarding the use of funds from the public offering in 2025.

Pembayaran Pajak
Tax Payment

Sebagai bagian dari upaya pembangunan Indonesia, BUMN aktif berkontribusi pada proyek-proyek strategis nasional. Kontribusi ini tidak hanya melalui partisipasi langsung, tetapi juga melalui pembayaran dividen, setoran pajak, dan sumbangan melalui Penerimaan Bukan Pajak lainnya, yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan negara, Perseroan berkomitmen untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu.

As an integral part of Indonesia's development efforts, State-Owned Enterprises (SOEs) actively support national strategic projects. These contributions are made through direct participation, tax deposits, dividend payments, and increasing contributions through Other Non-Tax Revenues annually. With significant contributions to the country's progress, the Company is committed to fulfilling its taxpayer obligations by making tax payments on time.

Berikut adalah rincian pembayaran pajak Perseroan untuk tahun 2025 dan tahun sebelumnya:

Here are the details of the Company's tax payments for 2025 and the previous year:

Uraian Description	2025	2024	2023
PPH Income Tax	64.847	112.521	83.974
PPN Value Added Tax	355.985	477.307	481.572
Jumlah **Total**	**420.832**	**589.828**	**565.546**

Pada tahun 2025, Perseroan membayar pajak sebesar Rp420,83 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp169,00 miliar atau 28,65% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp589,83 miliar. Setiap tahunnya, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

n 2025, the Company paid taxes of Rp420.83 billion, representing a decrease of Rp169.00 billion or 28.65% compared to Rp589.83 billion in 2024. The Company has consistently fulfilled all of its tax obligations each year.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/ Consolidation, Acquisition, and Capital/Debt Restructuring

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak terdapat Informasi Material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, maupun restrukturisasi utang/modal.

Throughout 2025, the Company had no material information regarding investments, expansions, divestitures, business mergers or consolidations, acquisitions, or debt/capital restructuring.

Namun demikian, Perseroan melakukan pelepasan aset tetap (asset disposal) berupa peralatan dan alat cetakan dalam rangka optimalisasi dan peremajaan aset. Pelepasan aset tetap tersebut mencatat nilai penjualan sebesar Rp1.194.371.873 dengan nilai buku sebesar Rp192.432.806, sehingga menghasilkan keuntungan penjualan aset tetap sebesar Rp1.001.939.067 yang diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

However, the Company disposed of fixed assets in the form of equipment and printing tools as part of its asset optimization and renewal efforts. The disposal of these fixed assets recorded sales proceeds of Rp1,194,371,873 against a book value of Rp192,432,806, resulting in a gain on the sale of fixed assets of Rp1,001,939,067, which was recognized in the current year's income statement.

Informasi Material Mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Material Information Knowing Affiliate Transactions and Transactions Containing Conflicts of Interest

Transaksi Material

Sepanjang tahun buku 2025, Perseroan tidak mencatat adanya transaksi material yang bersifat investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, atau restrukturisasi utang/modal yang wajib diungkapkan sesuai ketentuan OJK.

Namun demikian, terdapat transaksi dengan pihak berelasi yang bersifat material dan telah diungkapkan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada tahun 2025, Perseroan tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Hal ini menegaskan komitmen Perseroan dalam mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), transparansi, dan independensi dalam setiap pengambilan keputusan usaha.

Transaksi Dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi

Sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perseroan. Pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan diantaranya yaitu:

1. Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh menteri negara BUMN merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan induk. Oleh karena itu secara tidak langsung Perusahaan memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.
2. Grup memiliki dana dan memiliki pinjaman dana pada bank-bank pemerintah atau bank-bank yang dimiliki oleh BUMN dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana berlaku pada pihak ketiga.
3. Grup mengadakan perjanjian dalam rangka usaha Perusahaan dengan BUMN-BUMN lain maupun anak perusahan serta lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang.

Material Transactions

Throughout the fiscal year 2025, the Company did not record any material transactions related to investment, expansion, divestment, business mergers/consolidations, acquisitions, or debt/equity restructuring that are required to be disclosed in accordance with OJK (Financial Services Authority) regulations.

However, the Company did engage in material transactions with related parties, which have been disclosed in accordance with the provisions of PSAK No. 7 regarding "Related Party Disclosures."

Transactions Involving Conflict of Interest

In 2025, the Company did not conduct any transactions that involved a conflict of interest. This affirms the Company's commitment to upholding the principles of Good Corporate Governance (GCG), transparency, and independence in every business decision-making process.

Transactions with Affiliated or Related Parties

As defined in PSAK No. 7 regarding "Related Party Disclosures," a related party refers to individuals or entities that have a relationship with the Company. The related parties of the Company include:

1. The Government of the Republic of Indonesia, represented by the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN), is the majority shareholder of the parent company. Therefore, indirectly, the Company has an affiliation through government capital participation.
2. The Group holds funds and has loan agreements with state-owned banks or banks owned by SOEs under normal terms and interest rates applicable to third parties.
3. The Group enters into agreements in the course of its business operations with other SOEs, their subsidiaries, and relevant government institutions.

Sifat Hubungan Afiliasi dan/atau Berelasi

Sepanjang tahun buku 2025, Perseroan melakukan berbagai transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana diatur dalam PSAK 224. Transaksi tersebut mencakup hubungan dengan entitas induk serta afiliasi dalam kelompok usaha Perseroan dan merupakan bagian dari kegiatan operasional yang berulang serta berkelanjutan. Seluruh transaksi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Informasi lebih lanjut mengenai pihak-pihak berelasi dapat ditemukan dalam Catatan 37 Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk per 31 Desember 2025. Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Characteristics of Affiliate and/or Related Party Relationships

Throughout the 2025 fiscal year, the Company conducted various transactions with related parties as stipulated in PSAK 224. These transactions involved relationships with the parent entity and affiliates within the Company's business group and are part of the Company's recurring and continuous operational activities. All transactions were carried out with due diligence and in compliance with applicable regulations. Further details on related parties can be found in Note 37 of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Beton Tbk as of December 31, 2025. The breakdown of balances and transactions with related parties is as follows:

Uraian Description	2025		2024		Perubahan Change	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Aset **Assets**						
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	406.763.435.832	98,79	588.720.371.961	98,52	(181.956.936.129)	(30,91)
Piutang Usaha-Bersih Trade Receivables-Net	425.352.962.906	54,77	417.835.737.496	45,48	7.517.225.410	1,80
Piutang Retensi-Bersih Retention Receivables-Net	3.757.922.744	13,16	14.699.045.648	32,47	(10.941.122.904)	(74,43)
Piutang Lain-lain Other Receivable	9.169.644.118	73,62	11.983.119.623	91,48	(2.813.475.505)	(23,48)
Piutang yang Belum Ditagih - Bersih Accrued Income-Net	419.793.379.813	72,68	660.681.241.810	71,55	(240.887.861.997)	(36,46)
Tagihan Bruto-Bersih Gross Amount Due From Customer-net	11.367.704.864	15,82	21.535.434.206	55,60	(10.167.729.342)	(47,21)
Proyek dalam pelaksanaan Project on Progress	43.510.131.215	19,14	6.857.298.469	3,52	36.652.832.746	534,51
Liabilitas **Liabilities**						
Utang Pemasok Supplier Payable	147.528.883.053	15,25	107.680.168.584	8,22	39.848.714.469	37,01
Utang Subkontraktor Sub-contractor Payable	20.387.884.331	6,42	22.835.447.675	6,17	(2.447.563.344)	(10,72)
Utang Supply *Chain Financing* Supply Chain Financing Payable	122.901.498.310	88,27	256.009.269.094	100,00	(133.107.770.784)	(51,99)
Utang Bank Jangka Pendek Short-Term Bank Loans	202.671.000.000	100,00	291.254.000.000	62,47	(88.583.000.000)	(30,41)
Uang Muka dari Pelanggan Advances from Customers	61.523.086.128	29,34	28.805.858.471	13,44	32.717.227.657	113,58
Pendapatan Diterima di Muka Unearned Revenue	33.997.031.213	54,99	70.142.818.235	44,23	(36.145.787.022)	(51,53)
Utang Lain-lain Other Payables	2.180.554.712	65,30	178.527.143	12,39	2.002.027.569	1.121,41
Pendapatan **Revenues**						
Pendapatan Usaha Revenues	1.337.882.657.689	37,31	1.891.674.752.898	38,64	(553.792.095.209)	(29,28)

Alasan Dilakukan Transaksi Pihak Berelasi

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi yang dilakukan oleh Perseroan adalah transaksi dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan

Reasons for Transactions with Related Parties

The transactions conducted by the Company with related parties are third-party transactions aimed at meeting the operational and business development needs of the

operasional dan bisnis Perseroan. Jenis transaksi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- Transaksi perbankan yang meliputi penempatan rekening, pinjaman, dan deposito.
- Transaksi penjualan produk dan pembelian bahan baku yang tercatat sebagai piutang dan/atau utang.

Company. These transactions can be classified into two categories:

- Banking transactions, including account placements, loans, and deposits.
- Sales and purchase transactions, involving product sales and raw material purchases, which are recorded as receivables and/or payables.

Transaksi Rutin, Berulang, Dan/Atau Berkelanjutan

Beberapa transaksi, seperti saldo kas di bank, piutang premi, dan piutang investasi, merupakan bagian dari operasional bisnis yang berlangsung secara rutin, berulang, dan berkelanjutan. Transaksi ini dijalankan sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam memperoleh pendapatan usaha.

Routine, Recurring, and/or Ongoing Transactions

Certain transactions, such as bank account balances, premium receivables, and investment receivables, are part of the Company's routine, recurring, and ongoing business operations. These transactions are carried out as part of the Company's efforts to generate business revenue.

Penjelasan Kewajaran, Mekanisme *Review*, dan Pemenuhan Peraturan Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Sebagai bagian dari operasional bisnisnya, Perseroan menjalankan transaksi dengan pihak berelasi yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Seluruh transaksi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) dan merupakan bagian dari aktivitas usaha yang wajar. Perseroan memastikan bahwa setiap transaksi dengan pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan serta ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, mencerminkan transparansi, mekanisme *review* yang ketat, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Fairness Explanation, Review Mechanism, and Regulatory Compliance in Transactions with Related Parties

As part of its business operations, the Company conducts transactions with related parties that have ownership and/or management relationships. All transactions are carried out based on the arm's length principle, ensuring fairness and alignment with normal business practices. The Company ensures that every transaction with related parties complies with pre-agreed policies and regulations, reflecting transparency, a strict review mechanism, and adherence to applicable laws and regulations.

Transaksi dilakukan untuk tujuan komersial, antara lain:

- Penyimpanan dana dan perolehan fasilitas pinjaman dari bank Himbara;
- Pembelian bahan baku dan penjualan produk kepada entitas sepengendali;
- Kerja sama proyek strategis yang mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

These transactions are undertaken for commercial purposes, including but not limited to:

- Fund placement and loan facilities from Himbara banks;
- Purchase of raw materials and sale of products to entities under common control;
- Strategic project collaborations that support sustainable business growth.

Seluruh transaksi dilakukan menggunakan harga pasar atau tarif yang wajar, setara dengan pihak ketiga, dan tidak menimbulkan benturan kepentingan.

All transactions are executed using fair market prices or rates comparable to those offered to third parties and do not give rise to conflicts of interest.

Pernyataan Direksi

Direksi menyatakan bahwa transaksi berelasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip kewajaran (*armslength principle*).

Statement from the Board of Directors

The Board of Directors declares that related party transactions have undergone appropriate procedures to ensure that they are conducted in accordance with general business practices and meet the arm's length principle.

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Melakukan Prosedur Prinsip Transaksi yang Wajar

Dewan Komisaris bersama Komite Audit telah melaksanakan pengawasan terhadap transaksi ini guna memastikan kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku serta kesesuaiannya dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*).

Role of the Board of Commissioners and the Audit Committee in Ensuring Fairness of Transactions

The Board of Commissioners, along with the Audit Committee, has carried out oversight of these transactions to ensure compliance with applicable regulations and adherence to the arm's length principle.

Transaksi yang Disetujui oleh Pemegang Saham Independen

Sepanjang tahun buku 2025, tidak terdapat transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Transactions Approved by Independent Shareholders

Throughout the fiscal year 2025, there were no related party transactions or conflict of interest transactions that required the approval of independent shareholders in the General Meeting of Shareholders (GMS).

Pemenuhan Ketentuan Terkait

Dengan mengikuti peraturan dan ketentuan terkait, Perseroan telah mematuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Pada laporan keuangan Perseroan tahun 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, upaya pengungkapan PSAK 224 (revisi 2014) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Regulatory Compliance

By following relevant regulations and standards, the Company has complied with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK). In the Company's 2025 audited financial statements, disclosure efforts related to PSAK 224 (Revised 2014) on Related Party Disclosures have been made in accordance with applicable requirements.

Referensi Laporan Keuangan

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pihak-pihak berelasi dengan Perseroan beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Perseroan Sampai dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dapat dilihat pada laporan keuangan (catatan 37).

Financial Report Reference

For further information regarding related parties and the nature of transactions conducted by the Company up to the period ending December 31, 2025, please refer to the financial report (Note 37).

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Hingga 31 Desember 2025, tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

As of December 31, 2025, there was no financial information containing extraordinary and rare events.

Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan

Changes in Laws and Regulations with Significant Impact

Pada tahun 2025, terdapat beberapa perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada kebijakan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

In 2025, several regulatory changes impacted the Company's policy,either directly or indirectly, including:

Peraturan Regulation	Perubahan Changes	Dampak Impact
UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanggal 24 Februari 2025. Law No. 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN) dated February 24, 2025.	• Penguatan tata kelola dan reformasi BUMN: prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan Good Corporate Governance (GCG) menjadi arah yang lebih tegas. • Penguatan peran BUMN sebagai instrumen strategis pembangunan dan restrukturisasi/ harmonisasi kewenangan pemerintah dalam pembinaan BUMN. • Strengthening governance and reforming state-owned enterprises: the principles of economic democracy, equitable efficiency, sustainability, and good corporate governance (GCG) have become more clearly defined. • Strengthening the role of state-owned enterprises as strategic instruments for development and restructuring/harmonizing government authority in the supervision of state-owned enterprises.	• Tata kelola grup dan anak usaha semakin ketat revisi kebijakan internal: kepatuhan, manajemen risiko, audit, kontrol biaya. • Kebijakan procurement & kontrak cenderung diperketat (anti-fraud, due diligence vendor, conflict of interest). • Arah bisnis & penugasan proyek bisa lebih "top-down" mengikuti strategi holding/ negara, sehingga memengaruhi: - Prioritas proyek, - Mitigasi risiko piutang/ proyek, - Selektivitas proyek (bankability). • Group and subsidiary governance is becoming increasingly strict revision of internal policies: compliance, risk management, auditing, cost control. • Procurement & contract policies are likely to be tightened (anti-fraud, vendor due diligence, conflict of interest). • Business direction & project assignments may be more "top-down" following the holding/state strategy, thereby affecting: - Project priorities - Receivables/project risk mitigation - Project selectivity

Peraturan Regulation	Perubahan Changes	Dampak Impact
UU Nomor 16 Tahun 2025 – Perubahan Keempat UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanggal 06 Oktober 2025. Law No. 16 of 2025 Fourth Amendment to the Law on State-Owned Enterprises (BUMN) dated October 6, 2025.	Institusionalisasi dan perubahan struktur kelembagaan BUMN, termasuk pembentukan: • Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sebagai lembaga pengatur dan bukan lagi dalam bentuk kementerian. • Badan Pengelola Investasi (BPI) seperti Danantara yang mengelola investasi BUMN secara profesional. • Perubahan peran Kementerian BUMN — pos kementerian akhirnya diturunkan menjadi badan pengatur yang fokus pada kebijakan dan supervisi, bukan operasional. • Penegasan pembagian fungsi pengawasan, regulasi, dan operasional antara badan negara dengan unit pelaksana bisnis Institutionalization and changes to the institutional structure of state-owned enterprises, including the establishment of: • The State-Owned Enterprise Regulatory Agency (BP BUMN) as a regulatory body, rather than a ministry. • The Investment Management Agency (BPI), such as Danantara, which professionally manages state-owned enterprise investments • Changes to the role of the Ministry of SOEs— the ministry's position has ultimately been downgraded to a regulatory body that focuses on policy and supervision, rather than operation. • Affirmation of the division of supervisory, regulatory, and operational functions between state agencies and business implementation units.	• Struktur Kepemilikan & Pembinaan yang sebelumnya berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN melalui PT Wijaya Karya (Persero) Tbk kini akan dibina lewat cluster industri strategis konstruksi di bawah BP BUMN • UU BUMN yang baru menekankan akuntabilitas dan transparansi. WIKA Beton selaku anak perusahaan BUMN harus memperkuat pelaporan kinerja, terutama pada proyek-proyek berbasis APBN, untuk memenuhi standar audit integratif BP BUMN. • Transformasi Digital dan ESG, UU 16/2025 menekankan modernisasi BUMN, termasuk transformasi digital dan keberlanjutan (ESG). WIKA Beton akan terdorong memperkuat sistem pelacakan bahan baku, efisiensi produksi, dan pengelolaan lingkungan dalam operasinya. • The Ownership & Development Structure, which was previously under the supervision of the Ministry of State-Owned Enterprises through PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, will now be supervised through the strategic construction industry cluster under BP BUMN • The new SOE Law emphasizes accountability and transparency. WIKA Beton, as a subsidiary of SOEs, must strengthen its performance reporting, especially on projects based in the state budget, to meet the integrated audit standards of BP BUMN • Digital Transformation and ESG, Law 16/2025 emphasizes the modernization of BUMN, including digital transformation and sustainability (ESG). WIKA Beton will be encouraged to strengthen its raw material tracking system, production efficiency, and environmental management in its operations.

Peraturan Regulation	Perubahan Changes	Dampak Impact
Permen ATR/Kepala (Badan Pertanahan Nasional) BPN Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah tanggal 28 April 2025. ATR/Head (National Land Agency) BPN Regulation Number 5 of 2025 concerning the Delegation of Authority for the Determination of Land Rights and Land Registration Activities dated April 28, 2025.	Permen ini mengatur pelimpahan kewenangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN kepada pejabat di lingkungan kantor pertanahan maupun Direktorat Jenderal untuk melakukan: • Penetapan hak atas tanah (mis. pemberian hak, perpanjangan, pembaruan); • Kegiatan pendaftaran tanah; • Pemberian rekomendasi penetapan hak kembali setelah masa hak berakhir. Salah satu perubahan pokok adalah mekanisme delegasi (pelimpahan) kewenangan dari Menteri/ Kepala BPN ke pejabat lain di lingkungan ATR/BPN berdasarkan indikator tertentu seperti: • Luas bidang tanah, • Kondisi geografis & kepadatan penduduk, • Kondisi sosial masyarakat, • Jumlah layanan pendaftaran, • Nilai tanah, serta potensi sengketa. Untuk Ketentuan Rekomendasi Hak Kembali yaitu Permen ini menegaskan bahwa setelah hak atas tanah berakhir (misalnya HGB (Hak Guna Bangunan) atau HP (Hak Pakai) sudah habis masa berlakunya), pemberian rekomendasi untuk penetapan hak kembali dapat dilakukan oleh pejabat yang menerima delegasi kewenangan sesuai kategori hak dan ukuran tanah. This regulation governs the delegation of authority from the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ Head of the National Land Agency to officials within the land office and the Directorate General to carry out: • Determination of land rights (e.g., granting of rights, extension, renewal); • Land registration activities; • Provision of recommendations for the re-determination of rights after the rights period has expired. One of the main changes is the mechanism for delegating authority from the Minister/Head of the National Land Agency to other officials within the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency based on certain indicators such as: • Land area, • Geographical conditions & population density, • Social conditions of the community, • Number of registration services, • Land value, and potential disputes. Regarding the provisions for recommendations for the reinstatement of rights, this Ministerial Regulation stipulates that after the rights to the land expire (for example, HGB (Right to Build) or HP (Right of Use) have expired), recommendations for the reinstatement of rights can be made by officials who have been delegated authority in accordance with the category of rights and size of the land.	• Percepatan Pengurusan Hak Atas Tanah, proyek WIKA Beton, seperti pembangunan pabrik, batching plant, dan area stockyard di daerah, akan lebih cepat memperoleh HGB atau Hak Pakai karena kewenangan perizinan bisa diselesaikan di tingkat Kantor Wilayah BPN tanpa menunggu keputusan pusat. • Pengelolaan Aset Tanah BUMN, Sebagai anak usaha BUMN, WIKA Beton dapat menata ulang aset tanah dengan lebih mudah karena koordinasi dengan BPN daerah diperkuat. Ini juga memperkecil risiko tanah idle atau status hak yang kedaluwarsa. • Efisiensi Administratif, Permen ini memungkinkan pelayanan pertanahan di daerah strategis menjadi lebih efisien dalam perpanjangan HGB atau pembaruan hak. • Kemungkinan Sengketa Tanah Berkurang, dengan mekanisme rekomendasi hak kembali dan pelimpahan kewenangan, konflik antar - instansi atau penundaan pengesahan hak bisa diminimalkan. • Acceleration of Land Rights Administration, WIKA Beton projects, such as the construction of factories, batching plants, and stockyard areas in the region, will obtain HGB or Right of Use more quickly because licensing authority can be resolved at the Regional BPN Office level without waiting for a decision from the central government. • Management of State-Owned Enterprise Land Assets: As a subsidiary of a state-owned enterprise, WIKA Beton can reorganize its land assets more easily because coordination with the regional BPN has been strengthened. This also reduces the risk of idle land or expired rights. • Administrative Efficiency: This regulation enables more efficient land services in strategic areas for HGB extensions or rights renewals. • Reduced Potential for Land Disputes: With the mechanism for rights recommendations and authority delegation, conflicts between agencies or delays in rights approval can be minimized.

Peraturan Regulation	Perubahan Changes	Dampak Impact
Permen ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan ketentuan dalam Permen ATR/ Kepala BPN No. 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah tanggal 26 September 2025. ATR/Head of BPN Regulation Number 9 of 2025 concerning Amendments to the provisions of ATR/Head of BPN Regulation No. 5 of 2025 concerning the Delegation of Authority for the Determination of Land Rights and Land Registration Activities dated September 26, 2025.	Permen Permen ATR/ Kepala BPN No. 5 Tahun 2025 tidak dicabut seluruhnya, tetapi diperbarui melalui revisi sebagian yang dituangkan dalam Permen No. 9/2025 — sehingga masih berlaku tetapi dengan ketentuan yang telah disesuaikan/ditambah. Permen 9/2025 mengubah pasal-pasal tertentu untuk memberikan pembagian kewenangan yang lebih terstruktur, misalnya: • Penetapan Hak Milik dengan batasan luas tertentu; • Kewenangan Ditjen untuk hak atas tanah jenis tertentu; • Kewenangan Kepala Kanwil/ BPN untuk ukuran/ luasan tertentu; • Pengaturan yang lebih rinci pada HGB/ HGU/ Hak Pakai. Artinya ketentuan pelimpahan kewenangan tidak dihapus, tetapi diperdalam dengan penentuan batasan luas, jenis hak, dan level kewenangan yang lebih rinci. Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Regulation No. 5 of 2025 has not been revoked in its entirety, but has been updated through partial revisions set forth in Regulation No. 9/2025 — so it remains in effect but with adjusted/ additional provisions. Regulation No. 9/2025 amends certain articles to provide a more structured division of authority, for example: • Determination of ownership rights with certain area restrictions; • Authority of the Directorate General for certain types of land rights; • Authority of the Head of Regional Office/National Land Agency for certain sizes/areas; • More detailed regulations on HGB/HGU/Right of Use. This means that the provisions on the delegation of authority are not removed, but are further elaborated with more detailed provisions on area limits, types of rights, and levels of authority.	• Dengan kewenangan dilimpahkan ke tingkat Kanwil/Kantah, maka pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai untuk lahan pabrik, batching p dan stockyard di daerah bisa selesai tanpa menunggu persetujuan pusat (Menteri ATR/ BPN). • Kepastian Hukum Aset & Proyek Strategis, Permen 9/2025 menekankan kejelasan kewenangan, sehingga potensi tumpang tindih atau keterlambatan penerbitan hak tanah untuk proyek strategis nasional bisa berkurang. • Koordinasi Lintas Instansi lebih mudah karena Kanwil BPN diberi kewenangan penuh sesuai batas luas tertentu, WIKA Beton bisa langsung berkoordinasi dengan ATR/BPN di wilayah kerja tanpa menunggu persetujuan lintas kementerian di Jakarta. • Since authority has been delegated to the Regional Office/District Office level, the processing of Building Use Rights (HGB) or Use Rights for factory land, batching plants, and stockyards in the region can be completed without waiting for approval from the central government (Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency). • Legal Certainty for Assets & Strategic Projects, Regulation 9/2025 emphasizes clarity of authority, thereby reducing the potential for overlap or delays in the issuance of land rights for national strategic projects. • Inter-agency coordination is easier because Regional Offices of the National Land Agency (BPN) are granted full authority within certain area limits, allowing WIKA Beton to coordinate directly with ATR/BPN in their respective regions without waiting for inter-ministerial approval in Jakarta.

Peraturan Regulation	Perubahan Changes	Dampak Impact
PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tanggal 05 Juni 2025. Government Regulation No. 28 of 2025 regulates the Implementation of Risk-Based Business Licensing dated June 5, 2025.	PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk Based Approach) dan menggantikan PP No. 5 Tahun 2021 sebagai dasar hukum perizinan usaha di Indonesia. PP ini: • Membagi perizinan usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha (rendah, menengah, tinggi) sehingga jenis dan jumlah izin yang harus dipenuhi disesuaikan dengan tingkat risiko. • Mengintegrasikan semua proses perizinan melalui sistem OSS sehingga perizinan dasar dan perizinan teknis lainnya dilayani terpusat melalui OSS RBA. • Menetapkan batas waktu layanan (SLA) yang tegas untuk setiap tahap perizinan; jika instansi tidak memberi keputusan dalam waktu tertentu, izin dianggap disetujui otomatis (“fiktif positif”). • Menyederhanakan prosedur perizinan dengan proses digital penuh, memperkuat kepastian hukum, dan mengurangi tumpang tindih antar instansi. Government Regulation No. 28 of 2025 regulates the Implementation of Risk-Based Business Licensing (Risk Based Approach) and replaces Government Regulation No. 5 of 2021 as the legal basis for business licensing in Indonesia. This Government Regulation: • Classifies business licensing based on the level of business activity risk (low, medium, high) so that the type and number of licenses that must be fulfilled are adjusted to the level of risk. • Integrates all licensing processes through the OSS system so that basic licensing and other technical licensing are served centrally through OSS RBA. • Sets strict service level agreements (SLAs) for each stage of licensing; if an agency does not make a decision within a certain period of time, the license is considered automatically approved (“positive fiction”). • Simplify licensing procedures with a fully digital process, strengthen legal certainty, and reduce overlap between agencies.	Pengurusan Izin Usaha jadi lebih cepat & terintegrasi, WIKA Beton yang membutuhkan NIB dan berbagai izin teknis (misal KKPR, izin lingkungan, sertifikat bangunan/ operasional) kini harus mengajukan melalui satu platform OSS. • Kepastian Waktu Proses (SLA), proyek yang memerlukan izin berpotensi tidak terhambat oleh keterlambatan administratif, sehingga pelaksanaan proyek fisik bisa lebih tepat waktu. • Kewajiban Memenuhi Persyaratan Dasar Lebih Tegas, WIKA Beton harus melengkapi semua dokumen perizinan dasar sejak awal dan tidak bisa hanya mengandalkan NIB tanpa memenuhi ketentuan lingkungan. • Integrasi insentif dan Fasilitas InvestasiInvestas, dalam Keuntungan potensial bagi WIKA Beton akan lebih mudah mengakses insentif investasi terintegrasi dalam satu alur OSS ketika menjalankan proyek besar. • Business license processing is now faster and more integrated. WIKA Beton, which requires a Business Identification Number (NIB) and various technical permits (e.g., KKPR, environmental permits, building/ operational certificates), must now submit its applications through a single OSS platform. • Guaranteed processing time (SLA) means that projects requiring permits will not be hampered by administrative delays, allowing physical projects to be carried out more punctually. • Stricter Compliance with Basic Requirements: WIKA Beton must complete all basic licensing documents from the outset and cannot rely solely on the NIB without meeting environmental requirements. • Integration of Incentives and Investment Facilities: WIKA Beton will find it easier to access integrated investment incentives through a single OSS process when undertaking large projects.

Perubahan Kebijakan Akuntansi, Alasan dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan

Changes in Accounting Policies, Reasons, and Their Impact on Financial Statements

Pada tahun 2025, terdapat amendemen dan penyesuaian atas standar yang efektif berlaku untuk tahun yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran;
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK 109: Instrumen Keuangan;
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 216: Aset Tetap;
- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 232: Instrumen Keuangan: Penyajian;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;
- PSAK 238: Aset Takberwujud; dan
- PSAK 240: Properti Investasi.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak (selanjutnya disebut "Grup") tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

In 2025, there were amendments and adjustments to standards that became effective for financial years beginning on or after January 1, 2025, with early adoption permitted, namely:

- PSAK 117: Insurance Contract;
- Amendments PSAK 221: Foreign Exchange Rate regarding Lack of Exchangeability;
- Amendments PSAK 117: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 Comparative Information.

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:

- PSAK 117: Insurance Contract;
- PSAK 105: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;
- PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures;
- PSAK 109: Financial Instruments;
- PSAK 115: Income from Contracts with Customers;
- PSAK 201: Presentation of Financial Statements;
- PSAK 207: Statement of Cash Flows;
- PSAK 216: Fixed Assets;
- PSAK 219: Employee Benefits;
- PSAK 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;
- PSAK 232: Financial Instruments: Presentation;
- PSAK 236: Impairment of Assets;
- PSAK 237: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets;
- PSAK 238: Intangible Assets; and
- PSAK 240: Investment Property.

The implementation of these standards did not result in substantial changes to the Company's accounting policies, and the Group (the Company and its subsidiaries) did not experience any material impact on the financial statements for the current or previous years.

2025 Laporan Tahunan Annual Report



6



2025 Laporan Tahunan
Annual Report



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

Perusahaan melihat penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sebagai langkah penting untuk memastikan keberlanjutan usaha, mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan, serta membangun integritas perusahaan. Pedoman Tata Kelola Perusahaan disusun sebagai pedoman bagi pengelolaan bisnis, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG, yang berfungsi sebagai panduan bagi pengurus perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

The Company views the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as a vital step to ensure business sustainability, maintain stakeholder trust, and uphold corporate integrity. The Corporate Governance Guidelines serve as a reference for business management, based on GCG principles, and act as a guide for company leadership in carrying out business activities.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA (GOVERNANSI) PERUSAHAAN

WIKA Beton menyadari arti pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan akan berdampak positif bagi lingkungan internal maupun eksternal Perseroan dengan mengoptimalkan nilai-nilai perusahaan sehingga memiliki daya saing kuat, baik secara nasional maupun internasional secara berkelanjutan. Secara umum, WIKA Beton mengimplementasikan penerapan tata kelola Perusahaan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai Perseroan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan.
2. Meningkatkan kinerja Perseroan dengan proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan berhati-hati dengan selalu memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengendalikan risiko yang timbul, serta menghindari benturan kepentingan.
3. Meningkatkan profesionalisme dan pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan penilaian kinerja yang lebih objektif, transparan dan wajar, serta membangun struktur organisasi yang efisien dengan fungsi, sistem dan pertanggungjawaban yang jelas.
4. Memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara bijaksana dan terkendali, dan menyusun laporan keuangan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan suatu sistem pengendalian internal yang handal dan manajemen risiko yang sehat.

OBJECTIVES OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

WIKA Beton recognizes the importance of implementing Corporate Governance, as it brings positive impacts to both the internal and external environment of the Company. By optimizing corporate values, the Company aims to build strong competitiveness at both the national and international levels in a sustainable manner. In general, WIKA Beton implements corporate governance with the following objectives:

1. To enhance the Company's value and build strong competitiveness at both national and international levels, ensuring its long-term sustainability and ability to achieve its goals and objectives.
2. To improve the Company's performance by promoting better and more prudent decision-making processes, while ensuring compliance with applicable laws and regulations, managing potential risks, and avoiding conflicts of interest.
3. To strengthen professionalism and human capital development through more objective, transparent, and fair performance evaluations, as well as by establishing an efficient organizational structure with clear functions, systems, and accountability.
4. To ensure that financial management is conducted prudently and in a controlled manner, and that financial reports are prepared accurately and responsibly, supported by a reliable internal control system and sound risk management.

5. Meningkatkan kepercayaan investor, kreditur dan pemegang saham dengan selalu melakukan pemutakhiran data/informasi yang materiil dan relevan secara transparan, akurat, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Memperhatikan kepentingan Pemangku Kepentingan dengan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta melaksanakan hubungan usaha yang sehat dan bertanggung jawab.

Selain itu, Perseroan juga mengintegrasikan tata kelola Perusahaan dengan *Holding* Perseroan dengan diratifikasinya Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi No. WIKA-SUB-KP.01.01 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi melalui No. WIKA-SUB-QM.01.01 Revisi. 01 dengan tujuan sebagai berikut:

1. Dalam upaya mewujudkan aktivitas pengelolaan Anak Perusahaan yang harmonis guna mendukung sistem pengelolaan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
2. Sebagai pedoman prinsip yang mengatur hubungan antara WIKA Beton dengan Anak Perusahaan.
3. Menciptakan kerangka aturan dan acuan dalam Aktivitas Pengelolaan Anak Perusahaan baik bagi WIKA Beton dan Anak Perusahaan.
4. Membangun sinergi bisnis antara perusahaan di WIKA Beton Group dengan menggunakan budaya kinerja sebagai nilai tambah bagi WIKA Beton dan Anak Perusahaan yang berkelanjutan dengan tetap berpegang pada prinsip *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar dari masing-masing Anak Perusahaan, dengan:
   a. Menjaga tata kelola Perusahaan yang baik;
   b. Menerapkan Manajemen Risiko;
   c. Menetapkan perencanaan strategis kegiatan korporasi;
   d. Membangun budaya Perusahaan berbasis kinerja (*Performance Based Culture*);
   e. Membangun sinergi bisnis yang kuat antar WIKA Beton dengan Anak Perusahaan, dan/atau antar Anak Perusahaan WIKA Beton Group.

5. To strengthen the trust of investors, creditors, and shareholders by consistently updating material and relevant information in a transparent, accurate, high-quality, and accountable manner.
6. To uphold the interests of stakeholders by clearly defining the rights and responsibilities of each party and fostering responsible and ethical business relationships.

In addition, the Company has integrated its corporate governance practices with those of its Holding Company through the ratification of the Integrated Governance Policy No. WIKA-SUB-KP.01.01 and the Guideline on Subsidiary Management Principles and Integrated Governance, No. WIKA-SUB-QM.01.01 Revision 01. The objectives of this integration are as follows:

1. To establish a harmonized approach to subsidiary management that supports a well-planned, integrated, and sustainable governance system.
2. To serve as a set of guiding principles governing the relationship between WIKA Beton and its subsidiaries.
3. To create a regulatory framework and reference for subsidiary management activities, applicable to WIKA Beton and its subsidiaries.
4. To foster business synergy within the WIKA Beton Group by promoting a performance-driven culture as a source of added value for both WIKA Beton and its subsidiaries, while upholding the principles of Good Corporate Governance and the Articles of Association of each subsidiary, through:
   a. Maintaining good corporate governance practices;
   b. Implementing effective risk management;
   c. Establishing strategic planning for corporate activities;
   d. Developing a performance-based corporate culture;
   e. Building strong business synergies between WIKA Beton and its subsidiaries, and/or among the subsidiaries within the WIKA Beton Group.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA (GOVERNANSI) PERUSAHAAN

Sebagai anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), WIKA Beton memiliki tanggung jawab untuk menjadi entitas yang bermoral dan berintegritas. WIKA Beton mengimplementasikan struktur dan sistem tata kelola Perusahaan sebagai bagian implementasi *Check and Balance* dalam semua sektor Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan tunduk terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meliputi:

1. Undang-Undang:
   a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
   b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
   d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
   e. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
   f. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
   g. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Peraturan Menteri
   a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
   b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
   c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

As a subsidiary of a State-Owned Enterprise (SOE), WIKA Beton has a responsibility to operate as an entity with strong ethics and integrity. WIKA Beton implements a corporate governance structure and system as part of a comprehensive check-and-balance mechanism across all areas of the Company. In its implementation, the Company complies with all applicable laws and regulations in Indonesia, including:

1. Laws (Undang-Undang);
   a. Law No. 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOEs).;
   b. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
   c. Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market;
   d. Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption;
   e.
   f. Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure;
   g. Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering;
   h. Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions.

2. Ministerial Regulations
   a. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-13/MBU/09/2021 concerning the Sixth Amendment to Regulation No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining the Remuneration of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
   b. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
   c. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 on Governance Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

3. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, diantaranya:
   a. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
   b. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
   c. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
   d. Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
   e. Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
   f. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
   g. Peraturan OJK No.60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu;
   h. Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
   i. Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
   j. Peraturan OJK No.7/POJK.04/2018 Tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik;
   k. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
   l. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
   m. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
   n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan;
   o. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
   p. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;

3. Capital Market regulations, including but not limited to:
   a. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
   b. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
   c. OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 on the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;
   d. OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 on the Website of Issuers or Public Companies;
   e. OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 on Guidelines for Corporate Governance for Public Companies;
   f. OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies;
   g. OJK Regulation No. 60/POJK.04/2015 on Disclosure of Information by Certain Shareholders;
   h. OJK Regulation No. 29/POJK.04/2016 on the Annual Report of Issuers or Public Companies;
   i. OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 on the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities;
   j. OJK Regulation No. 7/POJK.04/2018 on the Submission of Reports through the Electronic Reporting System for Issuers or Public Companies;
   k. OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on Guidelines for Corporate Governance for Public Companies;
   l. OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders for Public Companies;
   m. OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders for Public Companies;
   n. OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliate Transactions and Conflicts of Interest;
   o. OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities;
   p. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.

q. Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
r. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

4. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* dari Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

q. OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 on the Format and Content of Annual Reports for Issuers or Public Companies;
r. Board of Directors Decision Letter of PT Indonesia Stock Exchange No. Kep-00066/BEI/09-2022 on Amendments to Regulation No. I-E on the Obligation to Submit Information.

4. The General Guidelines for Good Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

SOFT STRUCTURE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan mematuhi beberapa pedoman tata kelola perusahaan (*Soft Structure* GCG), selain peraturan dan regulasi perundang-undangan. Terkait dengan hal ini, aspek kebijakan GCG yang diterapkan di Perseroan mencakup:

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor: SK.01.01/WB-0A.0035/2024 tentang *Board Manual* PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal 6 September 2024;
3. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor: SK.01.01/WB-0A.0037/2024 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal 6 September 2024;
4. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor: SK.01.01/WB-0A.0034/2024 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Code of Corporate Governance*) PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal 6 September 2024;
5. Keputusan Direksi Diluar Rapat No. MJ.01.01/WB-0A.0169/2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Persetujuan Direksi atas Relevansi Pedoman GCG tahun 2024;
6. Piagam Komite Dewan Komisaris;
7. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, seperti:
   a. Kebijakan Keselamatan, Kesehatan, Kerja, dan Lingkungan (K3L)
   b. Kebijakan Stop Working Authority
   c. Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular di Lingkungan Kerja
   d. Kebijakan Larangan Menggunakan Minuman Beralkohol dan Obat-obatan Terlarang
   e. Kebijakan Whistleblowing System
   f. Kebijakan Etika Berusaha, Anti Korupsi, dan Donasi

SOFT STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE

The Company follows several corporate governance guidelines (Soft Structure GCG) in addition to laws and regulations. In this regard, the GCG policies implemented by the company include:

1. The Company's Articles of Association;
2. Joint Decision of the Board of Commissioners and Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.0035/2024 regarding the Board Manual of PT Wijaya Karya Beton Tbk, dated September 6, 2024;
3. Joint Decision of the Board of Commissioners and Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.0037/2024 regarding to the Code of Ethics and Conduct (Code of Conduct) of PT Wijaya Karya Beton Tbk, dated September 6, 2024;
4. Joint Decision of the Board of Commissioners and Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.0034/2024 regarding the to the Code of Corporate Governance of PT Wijaya Karya Beton Tbk, dated September 6, 2024;
5. Out-of-Meeting Board Resolution No. MJ.01.01/WB-0A.0169/2025 dated December 24, 2025 concerning the Board of Directors' Approval of the Relevance of the 2024 GCG Guidelines;
6. Charter of the Board of Commissioners Committees;
7. Corporate Governance policies, including:
   a. Occupational Health, Safety, and Environment (HSE) Policy
   b. Stop Work Authority Policy
   c. Policy on the Prevention and Control of Communicable Diseases in the Workplace
   d. Policy on the Prohibition of Alcoholic Beverages and Illegal Drugs
   e. Whistleblowing System Policy
   f. Business Ethics, Anti-Corruption, and Donations Policy

g. Kebijakan Seleksi dan Peningkatan Kemampuan Pemasok/ Vendor
h. Kebijakan Kepemilikan dan Kerahasian Informasi
i. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
j. Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
k. Kebijakan Manajemen Risiko
l. Kebijakan Pemenuhan Hak-hak Kreditur
m. Kebijakan Pengamanan Informasi dan Manajemen Layanan Teknologi Informasi
n. Kebijakan Insider Trading
o. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi
p. Kebijakan Keanekaragaman Hayati
q. Kebijakan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
r. Kebijakan Kesetaraan dan Inklusi Dewan Komisaris dan Direksi
s. Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Praktik Ketenagakerjaan
t. Kebijakan Lingkungan Kerja yang Saling Menghargai
u. Kebijakan Perpajakan
v. Kebijakan Kesetaraan dan Inklusi Dewan Komisaris dan Direksi
w. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

8. Kebijakan Operasi.

TEKAD PERUSAHAAN DALAM MENERAPKAN TATA KELOLA (GOVERNANSI) PERUSAHAAN TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN

Aktualisasi penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan menjadi dasar pembentukan struktur, sistem, dan budaya perusahaan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang bersifat kompetitif. Tujuan dari implementasi ini juga mencakup pembangunan sistem pengendalian internal yang kuat dan manajemen risiko yang dapat diandalkan. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

g. Supplier/Vendor Selection and Capability Enhancement Policy
h. Information Ownership and Confidentiality Policy
i. Gratification Control Policy
j. Anti-Bribery Management System Policy
k. Risk Management Policy
l. Policy on the Fulfillment of Creditors' Rights
m. Information Security and Information Technology Service Management Policy
n. Insider Trading Policy
o. Integrated Governance Policy
p. Biodiversity Policy
q. Stakeholder Engagement Policy
r. Diversity and Inclusion Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors
s. Human Rights and Employment Practices Policy
t. Respectful Workplace Policy
u. Tax Policy
v. Diversity and Inclusion Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors
w. Corporate Social and Environmental Responsibility Policy

8. Operational Policy.

THE COMPANY'S COMMITMENT TO IMPLEMENTING INTEGRATED AND SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE

Corporate governance principles implementation form the foundation for establishing the Company's structure, systems, and culture, enabling it to adapt to the competitive business environment. The goal of this implementation is also to develop a strong internal control system and reliable risk management. The principles of Good Corporate Governance refer to the Ministry of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Corporate Governance Guidelines and Significant Corporate Activities for State-Owned Enterprises.

Prinsip GCG GCG Principle	Definisi Definition	Implementasi Implementation
Transparansi Transparency	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material yang relevan, akurat, dan tepat waktu guna menjamin pemenuhan hak seluruh pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi yang transparan dilakukan oleh Perseroan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. The openness in implementing the decision making process and openness in disclosing relevant, accurate, and timely material information to ensure fulfilment of rights of stakeholders. The Company carries out transparent disclosure of information in compliance with applicable laws and regulations and in accordance with GCG principles. Transparansi juga mencakup hal-hal yang relevan dengan informasi yang dibutuhkan oleh publik berkaitan dengan produk dan aktivitas operasional Perseroan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku pemangku kepentingan. Transparency also includes matters relevant to the information required by the public in relation to the Company's products and operational activities that potentially influence stakeholder behavior.	• Penyusunan dan penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan; Creation and Explanation of the Company's Annual Budgeting (RKAP); • Pembuatan Laporan Tahunan; Annual Report preparation; • Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, semester, dan triwulan; Regular Financial Report (annual, half year, and quarterly); • Laporan keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) atas setiap aksi korporasi ataupun fakta material tentang Perseroan; Information Disclosure Report, submitted to Financial Services Authority (OJK) and Indonesia Stock Exchange (IDX) for each decision in corporate level or other materials facts regarding the Company; Pembuatan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report); Sustainability Report preparation; • Optimalisasi keberadaan situs web (www.wika-beton.co.id), media massa (media cetak atau media elektronik), aplikasi Workin', WTON Magazine, brosur, company profile, video profile dan lainnya sebagai platform untuk menyampaikan informasi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sebagaimana telah dimandatkan di dalam POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Optimization of website (www.wika-beton.co.id), mass media (print media or electronic media), Workin' application, WTON Magazine, brochure, company profile, video profile and other media used as the platforms to publish the information for our Shareholders or other Stakeholders, as regulated in POJK No.8/POJK.04/2015 concerning Website of Issuers or Public Company.
Akuntabilitas Accountability	Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. AvailaThe corporation can be held accountable for its performance in a transparent and fair manner. For this reason, corporations must be managed properly, measurably, and in accordance with corporate interests while taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a prerequisite needed to achieve sustainable performance.	• Pembagian tugas yang jelas untuk masing-masing organ Perseroan, termasuk dalam hal perincian tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, serta kinerjanya baik secara kolegial maupun individual. Clear job distribution to all components, including job desk on General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, Board of Directors, etc. (both collegially or individually). • Menerapkan *check and balance system*. Implementing check and balance system. • Memiliki standar kinerja untuk semua jajaran/level organisasi yang telah disepakati bersama, konsisten terhadap implementasi nilai-nilai Perseroan (*corporate values*), sasaran usaha, dan strategi Perseroan, serta memiliki sistem *reward and punishment*. Having standard of performance for all organizational level that has been agreed upon, consistent to the implementation of corporate values, targets and strategy, with reward and punishment system. • Memiliki sistem pelaporan berkala dan senantiasa mengevaluasi pencapaian serta kinerja Perseroan. Having a regular reporting system and always evaluate achievement and performance of the Company.

Prinsip GCG GCG Principle	Definisi Definition	Implementasi Implementation
Pertanggungjawaban Responsibility	Kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pertanggungjawaban diwujudkan dengan dipenuhinya kewajiban Perseroan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang terkait dengan bidang usaha korporasi, antara lain ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta persaingan usaha. Conformity in the management of the Company with the prevailing laws and regulations and the principles of sound corporations. The responsibility is realized by fulfilling the Company's obligations in carrying out the applicable laws and regulations of the Central and Regional Governments related to the field of corporate business, including provisions relating to employment, taxation, occupational health and safety, and business competition.	• Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta regulasi lainnya di bidang pasar modal, industri, konstruksi, dan lingkungan yang relevan bagi Perseroan. Complying with the Articles of Association and other applicable laws and regulations issued by regulators concerning capital market, industry, construction, and environment. • Melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk melakukan wajib pungut dengan baik dan tepat waktu. Fulfilling tax obligation, including compulsory levies in a proper and timely manner. • Menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Performing Corporate Social Responsibilities. • Menjalankan kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi sebagaimana diatur oleh OJK dan BEI. Conducting obligation of information disclosure based on regulations set by Financial Services Authority and Indonesian Stock Exchange.
Kemandirian Independency	Keadaan di mana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam pelaksanaannya, kemandirian dapat diwujudkan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang masing-masing organ. The state in which the Company is professionally managed without conflict of interest and influence/pressure from any party that is inconsistent with the prevailing laws and regulations and sound corporate principles. In its implementation, independence can be realized by always respecting the rights and obligations, duties and responsibilities, as well as the authority of each organ.	• Saling menghormati, hak, kewajiban, tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ Perseroan. Mutually respect the rights, obligations, duties, authorities and responsibilities among the Company's organs. • Baik pemegang saham maupun Dewan Komisaris Perseroan tidak diperbolehkan untuk mengintervensi dalam hal kepengurusan Perseroan. Shareholders and the Board of Commissioners do not intervene in the Company's management. • Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan di dalam setiap proses pengambilan keputusan dengan menandatangani pakta integritas. The Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees continuously avoid the conflict of interest in every decision-making process by signing an integrity pact. • Menerapkan kebijakan dan sistem yang dapat meminimalkan terjadinya benturan kepentingan. Implementation of policy and system, which minimizes the potential of conflict of interest.
Kewajaran Fairness	Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan Perseroan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dengan memberikan penghargaan dan pengharkatan sesuai dengan kinerjanya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising under the applicable laws and regulations. Fairness can be reflected in providing opportunities to parties concerned in providing input, suggestions and opinions for the interests of the Company, while equality can be realized by giving awards and rewards in accordance with their performance without differentiating ethnicity, religion, race, and gender.	• Pemegang Saham berhak menghadiri dan memberikan suara di dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Perseroan. Shareholders are entitled to attend and cast their votes in GMS based on applicable regulations and the Company's Articles of Association. • Perseroan memperlakukan seluruh rekanan secara adil dan transparan. The Company treats all partners fairly and transparently. • Perseroan berupaya untuk menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh karyawan sebagaimana telah tertuang di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya. The Company creates a favorable working environment to all employees based on the Collective Labor Agreement, and applicable laws and regulations.

Selain itu, penerapan Tata Kelola di WIKA Beton berpedoman pada prinsip-prinsip governansi yang tertuang dalam Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUG-KI) tahun 2021. Prinsip governansi

In addition, the implementation of governance at WIKA Beton follows the governance principles outlined in the 2021 Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUG-KI). These governance principles are based

ini didasarkan pada empat pilar utama, yang dikenal sebagai Pilar Governansi ETAK, yakni Perilaku Beretika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan. Keempat pilar ini menjadi landasan dalam memastikan pengelolaan perusahaan yang profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan.

on four main pillars, known as the ETAK Governance Pillars: Ethical Behavior, Transparency, Accountability, and Sustainability. These four pillars form the foundation for ensuring professional, integrated, and sustainable corporate management.

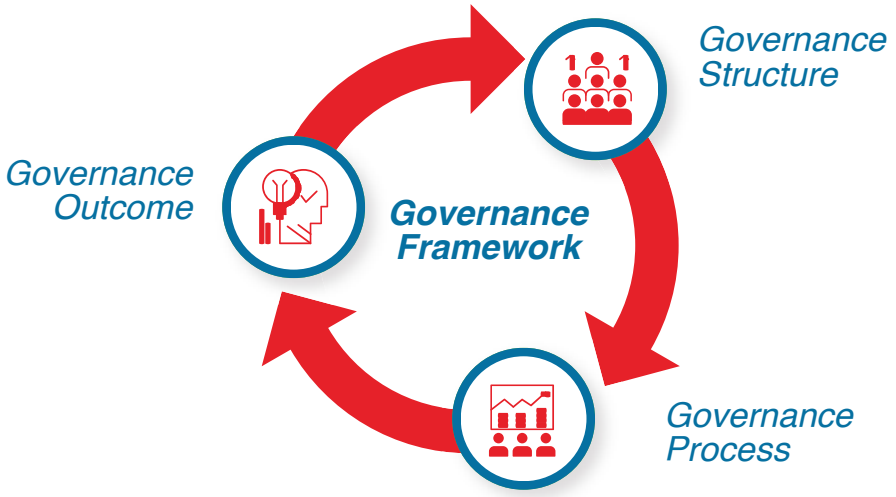
Pilar Governansi Korporat Corporate Governance Pillars	Implementasi Implementation
Perilaku Beretika Ethical Behavior	WIKA Beton berkomitmen untuk melaksanakan internalisasi prinsip-prinsip governansi korporat Indonesia pada nilai-nilai, budaya kerja, strategi, kebijakan operasional, serta sistem dan prosedur operasional. Komitmen tersebut tercermin dari penandatangan Pakta Integritas serta Komitmen Kepatuhan oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, serta seluruh insan WIKA Beton yang dilakukan secara berkala setiap awal tahun melalui aplikasi Workin', yaitu platform komunikasi dan informasi internal Perusahaan yang dapat diakses melalui telepon genggam oleh pegawai dimanapun berada. Di samping itu, bagi seluruh Pemegang Saham WIKA Beton termasuk Pemegang Saham Minoritas dan Pemegang Saham Asing diperlakukan setara. Seluruh Pemegang Saham diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi. Perlakuan ini diterapkan WIKA Beton dalam rangka pemberian informasi baik dalam rangka *Corporate Action* maupun dalam keterbukaan informasi yang diatur dalam ketentuan pasar modal. WIKA Beton is committed to implementing the principles of Indonesian corporate governance within its values, work culture, strategies, operational policies, and its systems and procedures. This commitment is reflected in the signing of the Integrity Pact and the Compliance Commitment by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all WIKA Beton employees. This is done annually at the beginning of each year through the Workin' application, an internal communication and information platform accessible to employees via their mobile phones, wherever they are. Additionally, WIKA Beton treats all shareholders equally, including minority and foreign shareholders. All shareholders are given the same opportunity to access information. This approach is applied by WIKA Beton in providing information for Corporate Actions and following the information disclosure regulations in the capital market.
Akuntabilitas Accountability	WIKA Beton mewajibkan seluruh pimpinan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar sehingga manajemen telah memiliki rincian peran dan tanggung jawab dari masing-masing organ dan karyawan secara jelas sesuai dengan visi, misi, sasaran, serta strategi Perusahaan. Selanjutnya, secara berkala WIKA Beton menyusun laporan tahunan yang merupakan pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam melakukan pengawasan dan pengurusan terhadap emiten atau Perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik. WIKA Beton requires all leaders to be accountable for their performance transparently and fairly, ensuring that management has clear details of the roles and responsibilities of each organ and employee in line with the company's vision, mission, goals, and strategy. Furthermore, WIKA Beton prepares an annual report, which serves as the accountability of the Board of Commissioners and the Board of Directors in overseeing and managing the company within the past year. This report is presented at the general meeting of shareholders and is prepared following the regulations set by the Financial Services Authority regarding the annual report of issuers or public companies.
Transparansi Transparency	WIKA Beton mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat antara lain melalui *website* Perusahaan yang dapat diakses oleh seluruh *stakeholders* melalui www.wika-beton.co.id. WIKA Beton provides timely, sufficient, clear, and accurate information through its website, which is accessible to all stakeholders at www.wika-beton.co.id.
Keberlanjutan Sustainability	WIKA Beton berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh operasionalnya melalui strategi ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dengan *tagline "Creating Better Future"*. Strategi ini mencerminkan komitmen jangka panjang WIKA Beton untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan yang baik. WIKA Beton is committed to integrating sustainability principles into all of its operations through an ESG (Environmental, Social, and Governance) strategy, with the tagline "Creating Better Future." This strategy reflects WIKA Beton's long-term commitment to creating a positive impact on the environment, society, and corporate governance.

KERANGKA KERJA TATA KELOLA WIKA BETON

Dengan tekad untuk menjalankan implementasi GCG dengan standar moral yang tinggi, Perseroan telah menyusun landasan kerangka kerja GCG. Kerangka ini menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan bisnis yang sehat. Terdapat tiga aspek utama dalam kerangka kerja GCG Perseroan, yaitu *Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome*, sebagaimana tercermin pada ilustrasi di bawah ini:

CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORKS OF WIKA BETON

With a firm commitment to executing the implementation of GCG with high moral standards, the Company has formulated the foundation of the GCG framework. This framework serves as the basis for conducting sound business activities. The Company's GCG framework encompasses three key aspects, namely Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome, as illustrated below:



STRUKTUR TATA KELOLA WIKA BETON

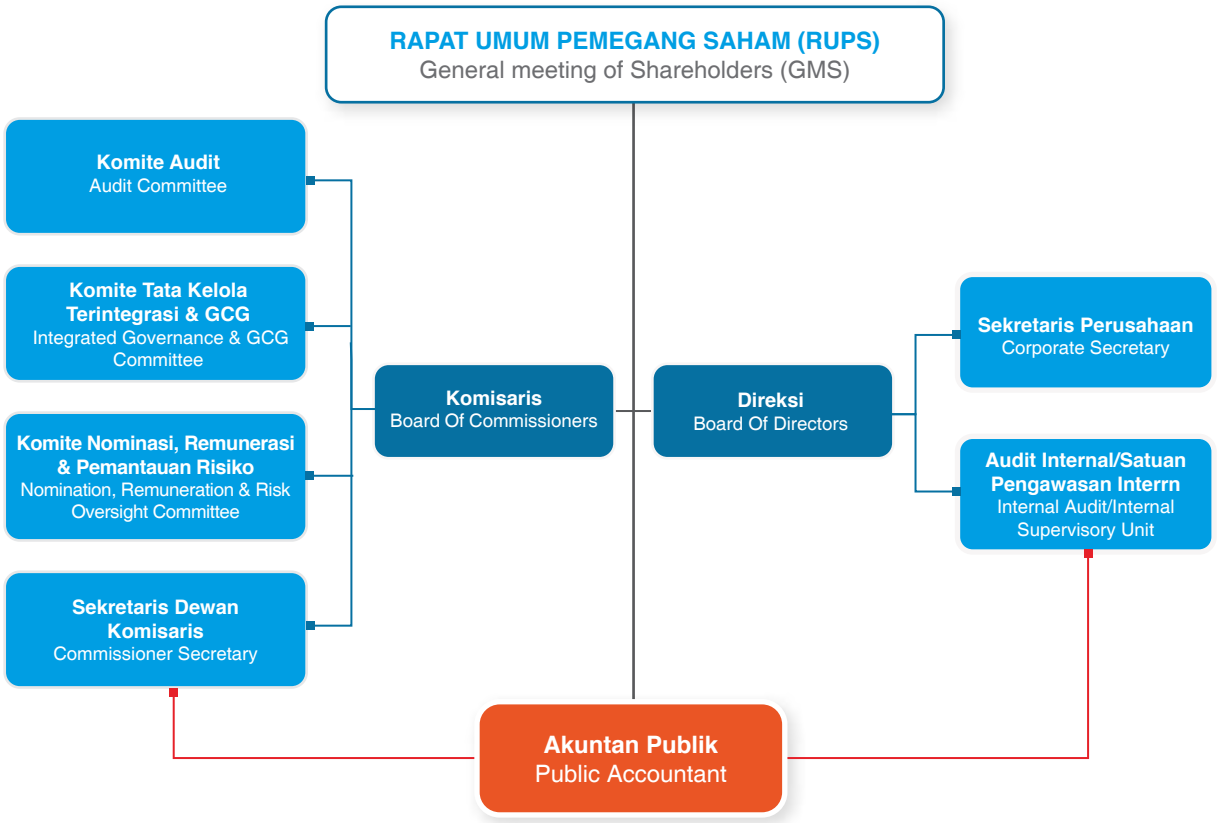
Struktur Tata Kelola, yang merupakan kerangka teratas, bertujuan untuk memandu sehingga hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan dapat dihasilkan oleh struktur dan infrastruktur GCG Perseroan.

Struktur GCG Perseroan melibatkan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Pendukung dibawah Dewan Komisaris, dan Satuan Kerja Direksi. Penjelasan mengenai struktur tata kelola WIKA Beton dapat dijelaskan pada bagan dibawah ini:

CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORKS OF WIKA BETON

With a firm commitment to executing the implementation of Good Corporate Governance (GCG) with high moral standards, the Company has formulated the foundation of the GCG framework. This framework serves as the basis for conducting sound business activities.

The Company's GCG framework encompasses three key aspects, namely Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome, as illustrated below:



Komitmen terhadap tata kelola yang baik diwujudkan melalui peran aktif seluruh organ perusahaan dalam menjaga integritas dan keterbukaan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan dengan prinsip kehati-hatian, serta menjadikan kepentingan pemangku kepentingan sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks ini, seluruh organ perusahaan memastikan bahwa praktik bisnis yang dijalankan sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, serta memberikan landasan yang kuat bagi terciptanya perusahaan yang berintegritas, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Proses Tata Kelola WIKA Beton

Dalam penerapannya, WIKA Beton berkomitmen untuk menyelaraskan kebijakan internal dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penyelarasan ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan selaras dengan standar hukum dan regulasi yang ada, sehingga dapat mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik dan berintegritas.

Selain itu, WIKA Beton juga mengadopsi prinsip *check and balance* dalam setiap proses bisnisnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam

The commitment to good corporate governance is manifested through the active role of all corporate organs in upholding integrity and transparency of information. The Board of Commissioners and the Board of Directors carry out their supervisory and management functions with prudence, while prioritizing the interests of stakeholders as an integral part of the decision-making process.

In this context, all corporate organs ensure that business practices are aligned with GCG principles and provide a solid foundation for the Company's sustainable development.

WIKA Beton's Governance Process

In its implementation, WIKA Beton's commitment is to align internal policies with the laws and regulations in force in Indonesia. This alignment ensures that every policy applied complies with existing legal standards and regulations, supporting the creation of good and ethical corporate governance.

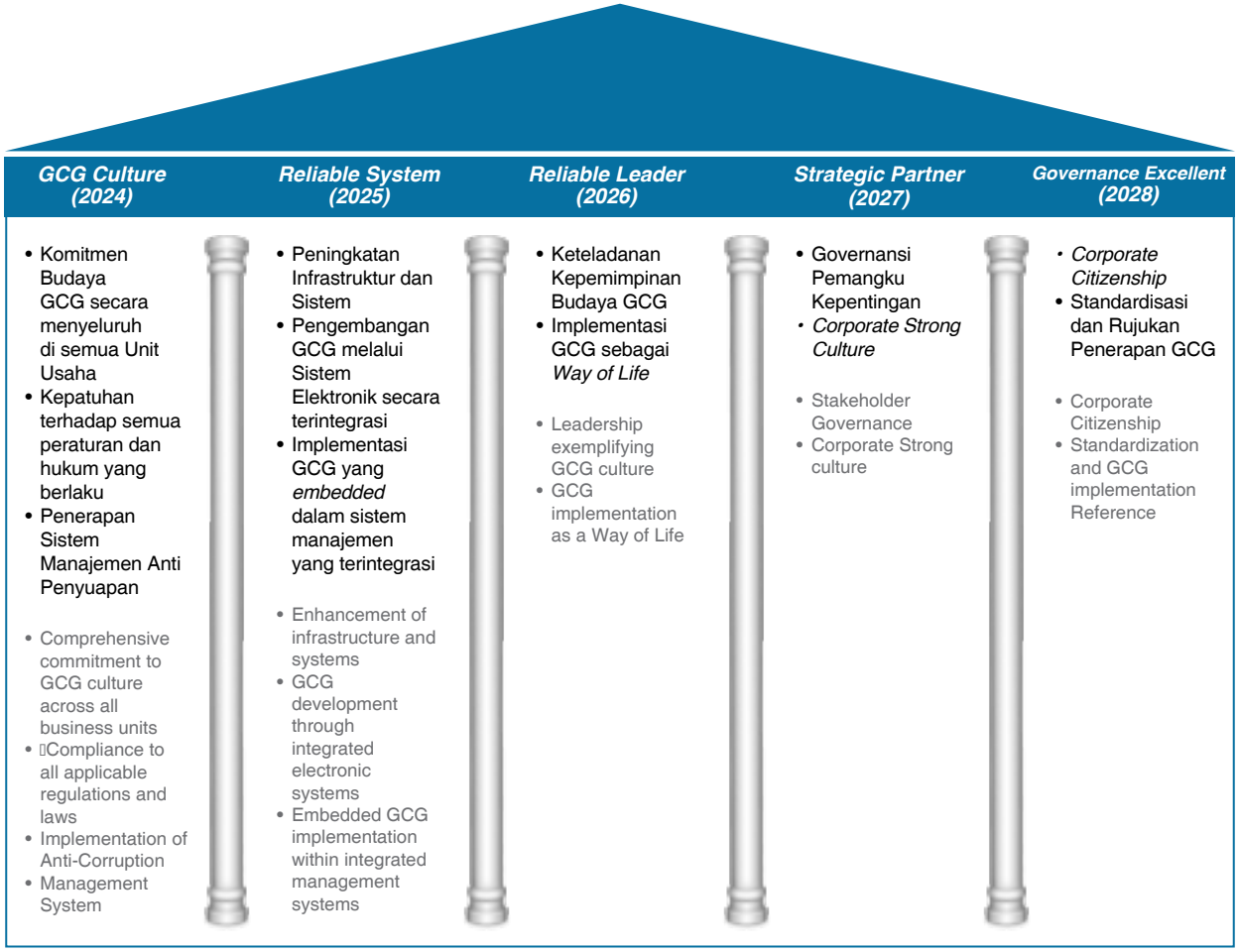
In addition, WIKA Beton adopts the principle of check and balance in every business process. This approach aims to create balance in decision-making, enhance

pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, serta mencegah adanya dominasi atau penyalahgunaan wewenang di dalam perusahaan. Dengan penerapan *check and balance* yang berimbang, setiap proses bisnis dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

transparency, and prevent any abuse of power within the Company. By implementing a fair check and balance system, each business process can run more effectively, accountably, and in line with good governance principles.

Untuk mendukung keberlanjutan tata kelola perusahaan, WIKA Beton telah menyusun *roadmap* yang jelas dalam penerapan tata kelola. *Roadmap* ini menjadi pedoman strategis bagi perusahaan dalam mengimplementasikan tata kelola secara bertahap dan berkelanjutan. Melalui *roadmap* ini, WIKA Beton memastikan bahwa setiap aspek tata kelola perusahaan diterapkan dengan baik untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

To support the sustainability of corporate governance, WIKA Beton has developed a clear roadmap for its implementation. This roadmap serves as a strategic guide for the company to implement governance gradually and sustainably. Through this roadmap, WIKA Beton ensures that every aspect of corporate governance is effectively applied to support long-term business growth and create value for all stakeholders.



Hasil Penerapan Tata Kelola WIKA Beton

Berdasarkan *Roadmap* yang telah dicanangkan, Perusahaan dapat menilai hasil dari proses implementasi tata kelola yang menyeluruh dan terintegrasi. Pada tahun 2025, Perusahaan mendapatkan hasil penerapan tata kelola WIKA Beton sebagai berikut:

Results of WIKA Beton's Governance Implementation

Based on the established roadmap, the Company can evaluate the results of the comprehensive and integrated governance implementation process. In 2025, the Company achieved the following results from its governance practices:

Implementasi Road Map 2025 2025 Roadmap Implementation	Proses Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Process	Hasil Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Result
Peningkatan Infrastruktur dan Sistem Enhancement of infrastructure and systems	Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur dan sistem pendukung tata kelola melalui modernisasi teknologi informasi, penguatan sistem keamanan informasi, serta digitalisasi dokumen kebijakan dan prosedur yang dapat diakses melalui aplikasi workin', knowledge management, ataupun website Perusahaan. Selain itu, Perseroan juga mengoptimalkan sistem Whistleblowing System (WBS) melalui sosialisasi secara berkala kepada pihak internal dan eksternal Perusahaan guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaporan. Perseroan juga memastikan penerapan mekanisme perlindungan pelapor yang menjamin kerahasiaan identitas, keamanan pelapor, serta perlindungan dari tindakan balasan. The Company is committed to improving infrastructure and governance support systems through the modernization of information technology, strengthening information security systems, and digitizing policy documents and procedures accessible via the workin' app, knowledge management, or the Company's website. Additionally, the Company is optimizing the Whistleblowing System (WBS) through regular awareness campaigns for both internal and external stakeholders to enhance understanding and reporting participation. The Company also ensures the implementation of whistleblower protection mechanisms that guarantee the confidentiality of identity, the safety of the whistleblower, and protection against retaliation.	Hasil dari implementasi ini menunjukkan peningkatan efektivitas dan keandalan sistem tata kelola perusahaan yang didukung oleh infrastruktur teknologi yang modern, aman, dan mudah diakses. Digitalisasi kebijakan dan prosedur melalui berbagai platform Perusahaan turut meningkatkan transparansi serta kemudahan akses informasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Optimalisasi Whistleblowing System (WBS) www.wbs.wika-beton.co.id melalui sosialisasi yang berkelanjutan telah mendorong peningkatan pemahaman dan partisipasi pelaporan yang memberikan rasa aman bagi pelapor, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pelaporan. Secara keseluruhan, hal ini berdampak pada penguatan pengendalian internal, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, serta pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, yang pada akhirnya mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. The results of this implementation demonstrate an increase in the effectiveness and reliability of the corporate governance system, supported by modern, secure, and easily accessible technology infrastructure. The digitization of policies and procedures across the Company's various platforms has also enhanced transparency and ease of access to information for all stakeholders. The optimization of the Whistleblowing System (WBS) www.wbs.wika-beton.co.id through continuous outreach has fostered greater understanding and reporting participation, providing a sense of security for reporters, thereby enhancing trust in the reporting system. Overall, this has strengthened internal controls, improved compliance with regulations, and facilitated the prevention and early detection of potential violations, ultimately supporting the establishment of transparent, accountable, and integrity-driven corporate governance.
Pengembangan GCG melalui Sistem Elektronik secara Terintegrasi GCG development through integrated electronic systems	Perseroan mengembangkan penerapan Tata Kelola Perusahaan melalui sistem elektronik dengan membangun dashboard GCG berdasarkan parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang digunakan dalam penilaian Asesmen GCG Tahun 2025 sebagai media penyediaan data dan dokumen pendukung secara terpusat. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses, kemudahan dalam penelusuran, serta kelengkapan informasi dalam proses asesmen GCG secara lebih efektif dan terdokumentasi. The Company is advancing the implementation of Corporate Governance through electronic systems by developing a GCG dashboard based on the parameters ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) used in the 2025 GCG Assessment as a centralized platform for providing data and supporting documents. This development aims to enhance ease of access, ease of searching, and the completeness of information in the GCG assessment process in a more effective and documented manner.	Implementasi ini menunjukkan peningkatan efektivitas pelaksanaan asesmen GCG melalui ketersediaan data dan dokumen pendukung yang terpusat, lengkap, dan mudah diakses. Dashboard GCG www.wika-beton.co.id/dashboard-acgs-system/ yang dikembangkan mampu mendukung proses asesmen yang lebih sistematis, terdokumentasi dengan baik, serta meningkatkan kemudahan dalam penelusuran informasi dalam penyajian data. Selain itu, kemudahan akses terhadap dokumen dan informasi yang relevan turut memperlancar proses evaluasi, meminimalkan kendala administratif, serta meningkatkan kualitas penyampaian evidence dalam penilaian GCG. Secara keseluruhan, hal ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hasil asesmen GCG dan memperkuat akuntabilitas tata kelola perusahaan. This implementation demonstrates improved effectiveness in conducting GCG assessments through the availability of centralized, comprehensive, and easily accessible data and supporting documents. The GCG Dashboard www.wika-beton.co.id/dashboard-acgs-system/ that has been developed is capable of supporting a more systematic assessment process, well-documented, and improving the ease of information retrieval in data presentation. Additionally, easy access to relevant documents and information further streamlines the evaluation process, minimizes administrative hurdles, and enhances the quality of evidence presentation in GCG assessments. Overall, this contributes to improving the quality of GCG assessment results and strengthens corporate governance accountability.

Implementasi Road Map 2025 2025 Roadmap Implementation	Proses Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Process	Hasil Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Result
Implementasi GCG yang embedded dalam sistem Manajemen yang terintegrasi Embedded GCG implementation within integrated management systems	Perseroan tengah mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG yang terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan melalui proses penyelarasan dengan Sistem Manajemen Mutu, Manajemen Risiko, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan, serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Implementasi ini masih dalam tahap pengembangan yang diawali dengan pelaksanaan audit internal dan audit eksternal secara terintegrasi sebagai langkah awal penguatan sistem manajemen terintegrasi. Selain itu, Perseroan telah melakukan penyelarasan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diintegrasikan dalam Pedoman Operasi Perusahaan menjadi satu kesatuan dokumen yang mudah diakses, guna mendukung konsistensi penerapan serta efektivitas implementasi Tata Kelola Perusahaan. The Company is currently implementing integrated GCG principles within its management system through a process of alignment with the Quality Management, Risk Management, Occupational Safety, Health, and Environment, as well as the Anti-Bribery Management System. This implementation is still the conduct of integrated internal and external audits as the initial step toward strengthening the integrated management system. In addition, the Company has aligned the Anti-Bribery Management System Guidelines, which have been integrated into the Company's Operational Guidelines, into a single, easily accessible document, to support the consistency of application and the effectiveness of Corporate Governance implementation.	Implementasi ini menunjukkan adanya penguatan awal dalam penerapan sistem manajemen terintegrasi, yang ditandai dengan pelaksanaan audit internal dan audit eksternal secara terintegrasi sebagai langkah awal harmonisasi antara Sistem Manajemen yang berlaku dan diterapkan Perseroan. Selain itu, penyelarasan pedoman dan kebijakan perusahaan ke dalam satu kesatuan dokumen yang terintegrasi dan mudah diakses telah mendukung peningkatan konsistensi penerapan serta kemudahan pemahaman bagi seluruh pihak terkait. Secara bertahap, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola perusahaan, memperkuat pengendalian internal, serta mendorong terciptanya sistem manajemen yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. This implementation demonstrates an initial strengthening in the application of the integrated management system, marked by the conduct of integrated internal and external audits as the first step toward harmonizing the management systems currently in force and applied by the Company. Furthermore, the alignment of corporate guidelines and policies into a single, integrated, and easily accessible document has supported greater consistency in application and enhanced understanding for all relevant parties. Gradually, these efforts are expected to enhance the effectiveness of corporate governance implementation, strengthen internal controls, and foster the creation of a more integrated and sustainable management system.

Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh Insan PT Wijaya Karya Beton Tbk menyatakan berkomitmen untuk melaksanakan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik dengan standar moral yang tinggi dengan mengacu pada praktik terbaik dan Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

The Board of Directors, Board of Commissioners, and all personnel of PT Wijaya Karya Beton Tbk are committed to implementing good corporate governance with high moral standards by referring to best practices and Good Corporate Governance Implementation Guidelines.

Penilaian Implementasi Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Assessment

Penilaian hasil penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai kualitas *governance outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan. Hasil penilaian ini mencerminkan kecukupan struktur dan infrastruktur GCG di Perseroan sehingga sangat diperlukan untuk mendapatkan *check* and *balance* guna memperbaiki implementasi GCG secara berkesinambungan.

The assessment of governance implementation aims to evaluate the quality of its execution to meet stakeholder expectations. The results of this evaluation reflect the adequacy of the GCG structure and infrastructure within the company, making it essential to establish checks and balances to continuously improve GCG implementation.

Perseroan melakukan penilaian secara berkala di lingkungan Perseroan dan Entitas Anak. Subjektivitas menjadi kunci utama untuk mendapat masukan dan rekomendasi penilaian yang konstruktif. Untuk itu Perseroan menyelenggarakan penilaian dengan dua metode berbeda, yaitu secara mandiri oleh internal Perseroan (*self-assessment*) dan oleh pihak independen (*external assessment*).

The Company conducts regular assessments within the Company and its subsidiaries. Subjectivity is key to obtaining constructive feedback and recommendations. To achieve this, the Company uses two different assessment methods: self-assessment by its internal team and external assessment by an independent party.

HASIL PENILAIAN, KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN YANG DIGUNAKAN

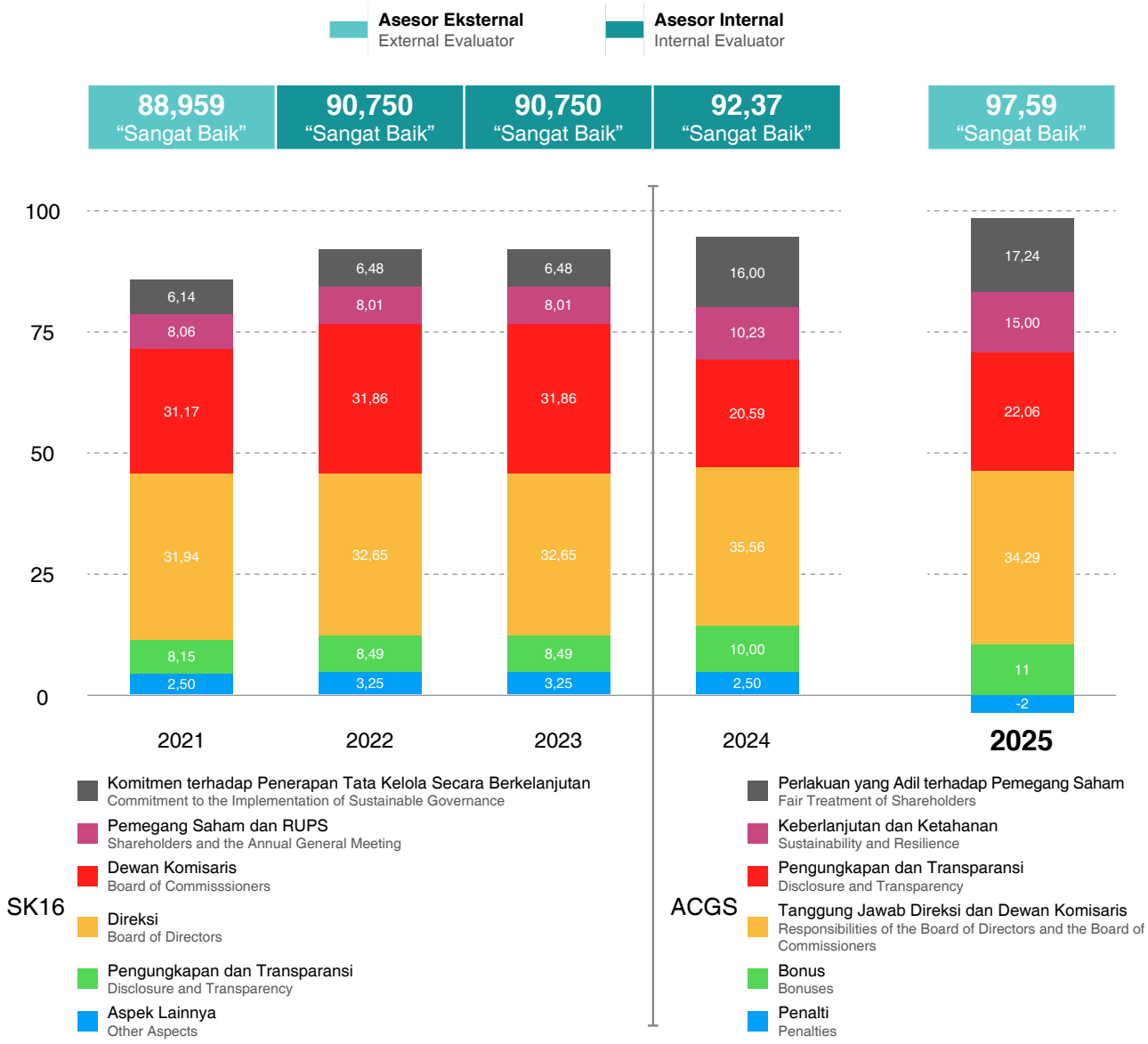
Sejak tahun 2014, PT Wijaya Karya Beton Tbk telah melakukan penilaian penerapan GCG (Asesmen GCG) secara konsisten untuk mengetahui tingkat kecukupan penerapan GCG di Perseroan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Asesor Independen. Selain itu, Asesmen GCG juga bertujuan untuk mengetahui poin-poin kelebihan dan kekurangan atas penerapan GCG yang berjalan saat ini, di mana terdapat rekomendasi dan saran dari hasil asesmen sebagai ruang-ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Perseroan.

ASSESSMENT RESULT, CRITERIA AND ASSESSMENT INDICATORS USED

Since 2014, PT Wijaya Karya Beton Tbk has consistently assessed the implementation of GCG (GCG Assessment) to determine the level of adequacy of GCG implementation in the Company, which is carried out by an Independent Assessor. In addition, the GCG Assessment also aims to find out the points of strengths and weaknesses of the current GCG implementation, where there are recommendations and suggestions from the assessment results as rooms for improvement that need to be followed up by the Company.

Seiring dengan pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN, WIKA Beton mulai mengadopsi standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) pada tahun 2024. ACGS merupakan standar untuk menilai dan meningkatkan praktik tata kelola perusahaan publik di kawasan ASEAN. Standar ini didasari pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang ditetapkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan harapan Perseroan dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan investor terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di ASEAN dengan tata kelola yang baik. Penerapan GCG di Perseroan semakin masif, di mana skor GCG mengalami peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya dengan detail sebagai berikut :

The GCG assessment uses the reference of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs and in its implementation cooperates and is supported by all Company personnel. The implementation of GCG in the Company is increasingly massive, where the GCG score has increased significantly each year with the following details:



Pada tahun 2025, Perusahaan kembali mengikuti penilaian tata kelola dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Evaluasi yang dilakukan mencerminkan perkembangan signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip g*ood corporate governance* (GCG), yang diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi Perusahaan baik di tingkat nasional maupun internasional.

In 2025, the Company once again participated in a governance assessment with a more comprehensive approach. The evaluation reflects significant progress in implementing the principles of GCG, which is expected to enhance the Company's credibility and reputation nationally and internationally.

Penilaian Tata Kelola berdasarkan ACGS

Perseroan menyadari pentingnya kepercayaan dan kredibilitas Perseroan dalam membangun citra sebagai entitas yang terpercaya (well-governed corporation). Perseroan melakukan initiative action untuk penilaian GCG dengan asesor independen. Penerapan penilaian tata kelola mengadopsi standar penilaian terbaik yaitu Asean Standard Scorecard. Kriteria penilaian ACGS terdiri dari 2 Level dengan rincian sebagai berikut:

Assessment of Governance Based on ACGS

The Company recognizes the importance of trust and credibility in building its image as a well-governed corporation. The Company has taken proactive steps to undergo GCG assessments with independent assessors. The implementation of governance assessments adopts the best assessment standards, namely the ASEAN Standard Scorecard. The ACGS assessment criteria consist of 2 Levels, with the following details:

1. Level 1 terdiri dari:
   a. Hak-hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham
   b. Keberlanjutan dan Ketangguhan
   c. Pengungkapan dan Transparansi
   d. Tanggung Jawab Dewan Direksi dan Komisaris
2. Level 2 Terdiri dari:
   a. Bonus
   b. Pinalti

1. Level 1 consists of:
   a. Rights and Equal Treatment of Shareholders
   b. Sustainability and Resilience
   c. Disclosure and Transparency
   d. Responsibilities of the Board of Directors and Commissioners
2. Level 2 consists of:
   a. Bonuses
   b. Penalties

PENILAIAN GCG 2025
2025 GCG ASSESSMENT

Penilaian penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan ASEAN CG Scorecard dilakukan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). Hasil assessment GCG berdasarkan ACGS tahun 2025 pada PT Wijaya Karya Beton Tbk dengan total capaian sebesar 97,59 dengan predikat "Sangat Baik" dengan rincian sebagai berikut:

The assessment of corporate governance implementation based on the ASEAN CG Scorecard is conducted by the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). The results of the GCG assessment based on the ACGS for 2025 at PT Wijaya Karya Beton Tbk show a total score of 97.59 with a rating of "Very Good," with the following details:

No	Aspek Governance Governance Aspect	Bobot Weight	Skor Score
1.	Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of Shareholders	20%	17,24
2.	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience	15%	15,00
3.	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	25%	22,06
4.	Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners	40%	34,29
		Sub Total Level 1	**88,59**
5.	*Bonus* Bonus		11
6.	Pinalti Penalty		-2
		Sub Total Level 2	**9**
		TOTAL	**97,59**
		Predikat	**Sangat Baik** Very Good

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting Of Shareholders (GMS)

Kewenangan tertinggi terletak pada RUPS, dimana para Pemegang Saham akan mempertimbangkan keputusan dengan cermat berdasarkan aspirasi bersama dan demi kepentingan jangka panjang Perseroan. RUPS memastikan bahwa setiap keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat yang wajar dan transparan. Walaupun memiliki kewenangan tertinggi, RUPS tidak memiliki hak untuk campur tangan dalam tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi. Setelah keputusan dibuat, RUPS kemudian menyerahkan semua tanggung jawab pengawasan dan pelaksanaan keputusan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dengan tetap mematuhi kewenangan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The GMS holds the highest authority in which the Shareholders will thoroughly consider their decisions based on shared aspirations and for the Company's long term growth. Decision-making in the GMS is always carried out fairly and transparently and is based on the long- term business interests. Despite so, the GMS cannot intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors. After a decision is ratified, the GMS will delegate all supervisory authority and implementation of the decision to the Board of Commissioners and the Board of Directors, without reducing the authority of the GMS in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM WIKA BETON

Pada akhir tahun 2025, kepemilikan saham Perseroan mencapai 60,00% dimiliki oleh Entitas Induk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang dianggap sebagai Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan. Pemegang Saham, baik perorangan maupun badan hukum, diartikan sebagai pihak yang sah memiliki satu atau lebih saham dalam perusahaan tersebut. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Adapun, Koperasi Karya Mitra Satya (KKMS) memiliki kepemilikan saham sebesar 4,59%, Yayasan Wijaya Karya memiliki 0,99%, dan saham publik mencapai 34,42%.

WIKA BETON SHAREHOLDER INFORMATION

As of the end of the year 2025, the Company's share ownership reached 60.00%, held by the Hodling Company, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, considered as the Controlling Entity of the Company. Shareholders, whether individuals or legal entities, are defined as duly authorized parties holding one or more shares in the Company. They possess rights and obligations that must be fulfilled in accordance with legal provisions and the Company's Articles of Association. Additionally, Koperasi Karya Mitra Satya (KKMS) holds a 4,59% stake, Yayasan Wijaya Karya holds 0.99%, and public shares constitute 34,42%.

Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Para Pemegang Saham Perseroan berhak untuk:
1. Menghadiri dan memberikan suara di dalam RUPS dengan ketentuan 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara;
2. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara tepat waktu dan teratur, agar setiap Pemegang Saham dapat membuat keputusan investasi yang tepat berdasarkan informasi yang dimilikinya;
3. Menerima bagian keuntungan dari Perseroan dalam bentuk dividen dan bentuk pembagian keuntungan lainnya;

Rights and Responsibilities of Shareholders

The Company's Shareholders are rightful to:
1. Attend and vote at the GMS provided that 1 (one) share has the right to cast one vote;
2. Obtain material information about the Company on a timely and regular basis so that each shareholder can make the right investment decisions based on their data;
3. Receive a share of profits from the company in dividends and other forms of profit sharing;

4. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa, setelah mendapat izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
5. Atas nama Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan permohonan melalui Pengadilan Negeri terhadap Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan;
6. Setiap Pemegang Saham berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;
7. Secara tertulis meminta penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan RUPS Luar Biasa apabila dipandang perlu.

Para Pemegang Saham Perseroan berhak untuk:

1. Tidak terlibat di dalam kegiatan pengawasan dan kepengurusan Perseroan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, Perseroan atau kelompok usahanya dengan tata cara yang bertentangan dengan perundang-undangan;
3. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi di dalam RUPS.

Kewenangan RUPS

Kewenangan RUPS telah diatur melalui Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
4. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan;
5. Melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan;
6. Menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
7. Menyetujui penggunaan laba bersih dan pembagian dividen Perseroan.

4. Conduct a GMS if the Board of Directors and/or the Board of Commissioners failed to convene the Annual GMS and/or Extraordinary GMS after obtaining permission from the Head of the local District Court;
5. On behalf of the Company, Shareholders who represent at least 1/10 (one-tenth) of the total shares with voting rights may apply to the District Court against Members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who due to their mistakes or negligence caused losses to the Company;
6. Each shareholder has the right to file a lawsuit against the company to the District Court if it is harmed due to the company's actions which are considered unfair and without reasonable reasons as a result of the decisions of the GMS, the Board of Directors, and/or the Board of Commissioners;
7. Write the request to hold the Board of Commissioners Meeting, Board of Directors Meeting, and Extraordinary GMS if deemed necessary.

On the other side, the Company's Shareholders are responsible to:

1. Not involved in the supervisory and management activities of the company, which are run by the Board of Commissioners and the Board of Directors;
2. Not use the company for personal, family, company, or business group interests in a spirit and procedure contrary to the laws and regulations;
3. Evaluate the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors in the GMS.

GMS Authority

GMS authority is stipulated in the Law and/or the Company's Articles of Association, namely:

1. Appoint and dismiss the Board of Commissioners and the Board of Directors;
2. Evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
3. Approve changes to the Company's Articles of Association;
4. Approve the Company's Annual Report and Financial Statements;
5. Appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements;
6. Determine the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors members;
7. Approve the use of the Company's net profit and dividend distribution.

Ketentuan Umum & Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Dua jenis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh Perseroan meliputi RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) (bila diperlukan). Dalam pelaksanaannya, Perseroan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Perseroan memiliki kewajiban untuk mengumumkan, memanggil, dan menyampaikan ringkasan risalah, dengan memastikan bahwa materi informasi terkait pelaksanaan RUPS disampaikan bersamaan dengan undangan RUPS sesuai peraturan tersebut. Meskipun demikian, jika terdapat kendala dalam penyampaian pada saat pemanggilan RUPS, informasi dapat langsung disampaikan saat RUPS berlangsung.

Perseroan menargetkan publikasi panggilan RUPS paling lambat 28 hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan. Perseroan mengendalikan pemenuhan target tersebut melalui kalender korporasi dan prosedur internal Sekretaris Perusahaan.

Ketentuan RUPST

Setiap tahunnya, RUPST diadakan paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun buku. Agenda yang wajib dilaksanakan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Direksi wajib menyampaikan:
   a. Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan dari RUPS;
   b. Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan dari RUPS;
2. Menyetujui penggunaan laba bersih dan pembagian dividen Perseroan;
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP);
4. Mengangkat atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Memutuskan hal-hal lain yang diajukan di dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Ketentuan RUPSLB

RUPSLB diselenggarakan dengan tujuan membicarakan dan memutuskan isu-isu yang perlu diatasi agar tidak menghambat kelancaran kegiatan bisnis. Oleh karena itu, penyelenggaraan RUPSLB dapat dilaksanakan kapan

General Provisions & Procedures for Conducting GMS

The Company conducts two types of General Meetings of Shareholders (GMS), namely the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) (when necessary). In its execution, the Company refers to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies, as well as Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies. The Company is obligated to announce, convene, and convey the summary of minutes, ensuring that information related to the execution of GMS is communicated concurrently with the GMS invitation in accordance with the regulations. Nevertheless, if there are constraints in conveying information during the GMS invitation, the information can be directly communicated during the GMS session.

The Company targets to publish the AGM invitation no later than 28 calendar days prior to the date of implementation. The Company controls the fulfillment of this target through the corporate calendar and internal procedures of the Corporate Secretary.

Provisions of AGMS

Annually, the AGMS is convened no later than six months following the conclusion of the fiscal year. The mandatory agenda items to be addressed during the GMS are as follows:

1. The Board of Directors is required to submit:
   a. Annual Report for approval from the GMS;
   b. Financial Statements for approval from the GMS;
2. Approval of the use of the Company's net profit;
3. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP);
4. Appointment or dismissal of members of the Board of Commissioners and Board of Directors;
5. Decide other matters proposed at the GMS with due regards to the provisions of the Articles of Association.

Provisions of EGMS

EGMS is convened with the purpose of discussing and resolving issues that require attention to ensure the unimpeded progress of business activities. Therefore, the organization of RUPSLB may be conducted at any time

saja sesuai kebutuhan atau kepentingan Perseroan. Peraturan pelaksanaannya adalah:

1. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPSLB;
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPSLB atas permintaan tertulis dari 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
3. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan beserta alasannya;
4. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atas permintaan dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPSLB apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSLB dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima oleh Direksi;
5. Apabila Dewan Komisaris lalai dalam melakukan pemanggilan RUPSLB setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terhitung sejak surat permintaan diterima, maka Pemegang Saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

as deemed necessary or in the interest of the Company. The procedural regulations are as follows:

1. The Board of Directors or the Board of Commissioners has the authority to conduct the EGMS;
2. The Board of Directors is required to notify and conduct EGMS at the written request of 1 (one) or more Shareholders who jointly represent 1/10 (one-tenth) of the total shares with valid voting rights;
3. The written request must be submitted by stating the proposed agenda and its consideration;
4. Taking into account the provisions of the laws and regulations in the Capital Market sector at the request of the Shareholders, the Board of Commissioners is obliged to summon and convene an EGMS if the Board of Directors does not gather the EGMS within 15 (fifteen) days after the date the Board of Directors receives the request;
5. If the Board of Commissioners is negligent in summoning the EGMS after the lapse of the period stipulated in the laws and regulations as the receipt of the request letter, the Shareholders concerned are entitled to convene the Meeting themselves at the expense of the Company after obtaining permission from the Chairman of the District Court. His jurisdiction covers the domicile of the Company.

Ketentuan Kuorum

Dalam penyelenggaraan RUPS, diperlukan kehadiran Pemegang Saham yang mewakili setidaknya setengah (1/2) dari total saham yang memiliki hak suara yang sah. Penetapan jumlah kuorum yang lebih besar dapat ditetapkan sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan Terbuka. Persyaratan ini diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) huruf a dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 mengenai Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Provisions of Quorum

In conducting of the GMS, the presence of Shareholders representing at least half (1/2) of the total shares with valid voting rights is required. The determination of a larger quorum may be established in accordance with the articles of association of the Public Company. These requirements are stipulated in Article 41 Paragraph (1) Subparagraph a of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies.

Ketentuan Lain-lain

1. 1. Melalui kanal Hubungan Investor, Perseroan mempublikasikan ringkasan pemungutan suara dan risalah RUPS sesegera mungkin setelah pelaksanaan RUPS. Perseroan memastikan tautan dokumen dapat diakses publik tanpa hambatan teknis dan tanpa pembatasan otorisasi.

Other provisions

1. 1. Through its Investor Relations channel, the Company publishes a summary of the voting results and the minutes of the GMS as soon as possible after the GMS is held. The Company ensures that the document links are accessible to the public without technical barriers and without authorization restrictions.

2. Perseroan menyusun agenda RUPS dengan prinsip satu keputusan untuk satu materi agar pemegang saham dapat menilai setiap usulan secara terpisah. Perseroan mendokumentasikan penerapan prinsip tersebut pada dokumen panggilan RUPS dan publikasi korporasi.
3. Dalam proses pemilihan dan/atau penunjukan kembali, Perseroan menyajikan profil kandidat Direksi dan Dewan Komisaris dalam dokumen berbahasa Inggris. Perseroan memuat sekurang-kurangnya informasi usia, kualifikasi, tanggal penunjukan pertama, pengalaman, dan jabatan pada perusahaan terbuka lain.
4. Perseroan mengungkapkan identitas auditor eksternal yang diusulkan, termasuk nama partner/penanggung jawab audit dan nama KAP, pada dokumen publik terkait RUPS. Perseroan menyajikan informasi tersebut untuk mendukung penilaian pemegang saham atas independensi dan kelayakan auditor.

2. The Company prepares the agenda for the GMS based on the principle of one decision per item so that shareholders can assess each proposal separately. The Company documents the application of this principle in the GMS invitation document and corporate publications.
3. In the selection and/or reappointment process, the Company presents the profiles of candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners in English documents. The Company includes at least information on age, qualifications, date of first appointment, experience, and positions in other public companies.
4. The company discloses the identity of the proposed external auditor, including the name of the partner/person in charge of the audit and the name of the public accounting firm, in public documents related to the GMS. The company presents this information to support shareholders' assessment of the auditor's independence and suitability.

PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 2025
IMPLEMENTATION OF 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2025

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk Tahun Buku 2024. RUPST tersebut dilaksanakan pada 2 Juni 2025 di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9–10, Jakarta Timur 13340, dan dihadiri oleh Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan yang menjabat sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPST dimaksud.

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2024 fiscal year. The AGMS took place on June 2, 2025, at WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9–10, East Jakarta 13340. The meeting was attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors, who were in office as of the date of the AGMS.

MEKANISME PELAKSANAAN RUPST
MECHANISM OF AGMS IMPLEMENTATION

No.	Kegiatan Activities	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Ketentuan Provision	Keterangan Description
1	Pemberitahuan mata acara RUPST kepada OJK AGMS Agenda Notification to OJK	17 April 2025 April 17, 2025	Pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPST. The notification of the Meeting agenda to the Financial Services Authority shall be made no later than 5 (five) working days prior to the announcement of the AGMS.	Pemberitahuan mata acara Rapat telah disampaikan melalui surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditandatangani oleh Direksi. Notification of the Meeting agenda has been submitted by letter to the Financial Services Authority (OJK) signed by the Board of Directors.

No.	Kegiatan Activities	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Ketentuan Provision	Keterangan Description
2	Pengumuman RUPST, setidaknya melalui: Announcement of AGMS, at least via: i. Situs web Bursa Efek Indonesia: IDX *website*: www.idx.co.id ii. Situs web Perseroan www. wika-beton.co.id dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, paling sedikit adalah Bahasa Inggris. iii. Situs Web Penyedia E-RUPS i. The Company's website www. wika-beton.co.id ii. In Indonesian and foreign languages, should at least be in English: www. wika-beton.co.id. iii. E-GMS Web Provider	24 April 2025 April 24, 2025	Pengumuman RUPST disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan. Announcement of the GMS shall be submitted no later than 14 (fourteen) days prior to the date of the summons for the GMS.	Pengumuman RUPS telah disampaikan dalam dua bahasa melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Perseroan, dan eASY.KSEI. The announcement of the AGMS has been delivered bilingually through the Website of Indonesia Stock Exchange, Company, and eASY.KSEI.
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS, pukul 14.31 WIB Recording date of Shareholders Register at 14.31 Pm	8 Mei 2025 May 8, 2025	Pemegang saham yang namanya tercatat pada DPS Perusahaan terbuka 1 hari kerja sebelum pemanggilan. Shareholders whose names are listed in the Pu blic Company's Shareholder Registry one business day prior to the summons.	DPS yang berhak hadir telah diumumkan melalui situs web eASY.KSEI. Shareholder Registry has been published through eASY.KSEI website.
4	Pemanggilan RUPST, setidaknya melalui: *AGMS summons, at least through*: i. Situs web Bursa Efek Indonesia: IDX *website*: www.idx.co.id ii. Situs web Perseroan www. wika-beton.co.id dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, paling sedikit adalah Bahasa Inggris. The Company's website www. wika-beton.co.id in Indonesian and foreign languages, should at least be in English: www. wika-beton.co.id. iii. Situs Web Penyedia E-RUPS E-GMS Web Provider	9 Mei 2025 May 9, 2025	Pemanggilan RUPST disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan. Summons to the AGMS are submitted no later than 21 (twentyone) days before the date of the GMS.	Pemanggilan RUPST telah disampaikan dalam dua bahasa melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Perseroan dan eASY.KSEI. Summons to the AGMS have been submitted bilingually through the Website of Indonesia Stock Exchange, the Company, and eASY. KSEI.
5	Pelaksanaan RUPST AGMS Implementation	2 Juni 2025 June 2, 2025	WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur 13340	Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.149.377.624 saham atau sebesar 70,557%. The meeting was attended by the shareholders or the Company's Authorized proxies, amounting to 6,149,377,624 shares or 70.557%.
6	Ringkasan Risalah RUPST, setidaknya melalui: AGMS summons, at least through:	4 Juni 2025 June 4, 2025	Ringkasan Risalah RUPST disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah Tanggal pelaksanaan. The summary of the minutes of the AGMS is submitted no later than 2 (two) days after the date of the AGMS.	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST dalam dua bahasa melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Perseroan, dan eASY.KSEI. Submission of the Summary of the Minutes of the AGMS, bilingually, through the Website of Indonesia Stock Exchange, the Company, and eASY.KSEI.
7	Penyampaian Risalah RUPST kepada OJK dan BEI serta melalui situs web Perseroan. Submission of the Minutes of the AGMS to the OJK and the IDX as well as through the Company's website.	18 Juni 2025 June 18, 2025	Risalah/Berita Acara RUPST disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan RUPST. The Minutes of the AGMS are submitted no later than 30 (thirty) days after the date of the AGMS.	Risalah RUPST telah disampaikan kepada OJK dan BEI serta melalui situs web Perseroan pada tanggal 18 Juni 2025. The minutes of the AGMS were submitted to the OJK and the IDX as well as through the Company's website on June 18, 2025.

KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM RUPST

Pada RUPST untuk Tahun Buku 2025 dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat hingga pelaksanaan rapat. Berikut daftar kehadirannya:

ATTENDANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN THE AGMS

The AGMS for Fiscal Year 2025 was attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors in office until the meeting. The following is the attendance list:

Nama Name	Jabatan Position
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**	
Eko Sujiyanto	Komisaris Utama President Commissioner
R. Permadi Mulajaya	Komisaris Commissioner
Miftachul Munir	Komisaris Commissioner
Iswandi Imran	Komisaris Independen Independent Commissioner
Nita Prihutaminingrum	Komisaris Independen Independent Commissioner
Direksi **Board of Directors**	
Kuntjara	Direktur Utama President Director
Syailendra Ogan	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital and Risk Management
Rija Judaswara	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Development
Agus Pramono	Direktur Operasi dan Supply Chain Management Director of Operation and Supply Chain Management
Verly Widiantoro	Direktur Teknik dan Produksi Director of Engineering and Production

Mata Acara Pertama
First Agenda

Mata Acara Agenda	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024. Approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2024 fiscal year, and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, as well as the granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the management of the Company and to the Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the 2024 fiscal year.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya dan/atau Berpendapat Number of Shareholders Who Asked Questions and/or Gave Opinions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat. No shareholders submitted any questions or opinions.

Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	6.146.494.149 saham 99,953% dari yang hadir 6.146.494.149 shares 99,953% of the attending parties	2.805.975 saham 0,046% dari yang hadir 2.805.975 shares 0.046% of the attending parties	77.500 saham 0,001% dari yang hadir 77,500 shares 0.001% of the attending parties

Keputusan Resolution	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai Laporan Nomor 00248/2.1030/AU.1/04/1680-4/1/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material". 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut di atas. 1. Approved the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Consolidated Financial Statements of the Company for the Fiscal Year 2024 ending on December 31, 2024. 2. Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2024 ending on December 31, 2024, which were audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) in accordance with Report Number 00248/2.1030/AU.1/04/1680-4/1/III/2025 dated March 20, 2025, with an opinion of "Fair in All Material Respects." 3. Granted full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions, and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the Fiscal Year 2024 ending on December 31, 2024, provided such actions do not constitute a criminal offense and are properly reflected in the reports mentioned above.
Status Implementasi Implementation Status	Direalisasikan Realized
Tindak Lanjut Manajemen Management Follow-Up	Telah dicatat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 03 tanggal 2 Juni 2025. It has been recorded in the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk, Deed No. 03 dated June 2, 2025.

Mata Acara Kedua
Seccond Agenda

Mata Acara Agenda	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024. Approval of the Use of the Company's Net Profit for the 2024 Fiscal Year.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya dan/atau Berpendapat Number of Shareholders Who Asked Questions and/or Gave Opinions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat. No shareholders submitted any questions or opinions .

Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	6.146.494.149 saham	2.805.975 saham	77.500 saham
	99,953% dari yang hadir	0,046% dari yang hadir	0,001% dari yang hadir

Keputusan Resolution	1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp65.004.281.962,- (Enam Puluh Lima Miliar Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sebagai berikut: a. Sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp6.536.599.950,- (Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp0,75,- (Nol Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah) per saham. b. Sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp58.467.682.012,- (Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Belas Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham. 1. Determined the use of Net Profit attributable to the Owners of the Parent Company for the financial year ended December 31, 2024, amounting to Rp65,004,281,962 (Sixty-Five Billion Four Million Two Hundred Eighty-One Thousand Nine Hundred Sixty-Two Rupiah), as follows: a. 10% (Ten Percent) of the Net Profit, or Rp6,536,599,950 (Six Billion Five Hundred Thirty-Six Million Five Hundred Ninety-Nine Thousand Nine Hundred Fifty Rupiah), is designated as Cash Dividends to Shareholders, or Rp0.75 (Zero Point Seventy-Five Rupiah) per share. b. 90% (Ninety Percent) of the Net Profit, or Rp58,467,682,012 (Fifty-Eight Billion Four Hundred Sixty-Seven Million Six Hundred Eighty-Two Thousand Twelve Rupiah), is designated as Other Reserves. 2. Granted authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to further regulate the procedures and implementation of the cash dividend distribution in accordance with applicable regulations, including rounding off the dividend payment per share.
Status Implementasi Implementation Status	Direalisasikan Realized
Tindak Lanjut Manajemen Management Follow-Up	Telah dicatat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 03 tanggal 2 Juni 2025. It has been recorded in the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk, Deed No. 03 dated June 2, 2025.

Mata Acara Ketiga
Third Agenda

Mata Acara Agenda	Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. Determination of the Public Accounting Firm Appointment to Audit the Company's Financial Statement in the 2025 Fiscal Year.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya dan/atau Berpendapat Number of Shareholders Who Asked Questions and/or Gave Opinions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat. No shareholders submitted any questions or opinions.

Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	6.146.494.149 saham 99,953% dari yang hadir	2.883.475 saham 0,047% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju. There were no dissenting votes.

Keputusan Resolution	1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025; 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Mayoritas untuk: a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut. 1. Approved the appointment of the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Partner (RSM Indonesia) to audit the Company's Consolidated Financial Statement and other reports for the 2025 Fiscal Year. 2. Granted authority and power to the Company's Board of Commissioners, upon obtaining before written approval from the Majority Shareholders to: a. The appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for other periods within the 2025 Fiscal Year for the purposes and interests of the Company; and b. The determination of audit fees and other requirements for the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as the appointment of a Substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm if the Public Accountant and/or Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner (RSM Indonesia), for any reason, is unable to complete the audit services for the Company's Consolidated Financial Statements and/or other periods within the 2025 Fiscal Year, including determining the audit fees and other requirements for such Substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Status Implementasi Implementation Status	Direalisasikan Realized
Tindak Lanjut Manajemen Management Follow-Up	Telah dicatat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 03 tanggal 2 Juni 2025. It has been recorded in the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk, Deed No. 03 dated June 2, 2025.

Mata Acara Keempat
Fourth Agenda

Mata Acara Agenda	Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2025 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Determination of Salaries/Honorariums, Allowances, and Other Benefits for 2025, as well as Tantiem for the 2024 Performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya dan/atau Berpendapat Number of Shareholders Who Asked Questions and/or Gave Opinions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat. No shareholders submitted any questions or opinions.

Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	6.146.479.149 saham 99,953% dari yang hadir	2.805.975 saham 0,046% dari yang hadir	92.500 saham 0,001% dari yang hadir

Keputusan Resolution	a. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Direksi: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025. 1. Approved the granting of authority and power to the Majority Shareholder to determine the remuneration for members of the Board of Commissioners: a. Performance Bonuses / Performance Incentives / Special Incentives for the 2024 Fiscal Year, in accordance with applicable regulations; and b. Honorarium including Facilities and Allowances for the 2025 Fiscal Year. 2. Approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners, upon obtaining prior written approval from the Majority Shareholder, to determine the remuneration for members of the Board of Directors: a. Performance Bonuses / Performance Incentives / Special Incentives for the 2024 Fiscal Year, in accordance with applicable regulations; and b. Salary including Facilities and Allowances for the 2025 Fiscal Year.
Status Implementasi Implementation Status	Direalisasikan Realized
Tindak Lanjut Manajemen Management Follow-Up	Telah dicatat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 03 tanggal 2 Juni 2025. It has been recorded in the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk, Deed No. 03 dated June 2, 2025.

Mata Acara Kelima
Fifth Agenda

Mata Acara Agenda	Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Approval of Changes to the Composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya dan/atau Berpendapat Number of Shareholders Who Asked Questions and/or Gave Opinions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat. No shareholders submitted any questions or opinions.

Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	6.146.571.649 saham 99,954% dari yang hadir	2.805.975 saham 0,046% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju. There were no dissenting votes.

Keputusan
Resolution

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
   a. Sdr. Eko Sujiyanto sebagai Komisaris Utama;
   b. Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;
   c. Sdr. Miftachul Munir sebagai Komisaris;
   d. Sdr. Nita Prihutaminingrum sebagai Komisaris Independen;
   e. Sdr. Iswandi Imran sebagai Komisaris Independen.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
   a. Sdr. Wilan Oktavian sebagai Komisaris Utama;
   b. Sdr. Tjia Marwan sebagai Komisaris;
   c. Sdr. Dwi Gawan Islandhi H. B. sebagai Komisaris Independen.
3. Bagi anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
4. Dengan adanya pemberhentian, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
   Dewan Komisaris:
   a. Sdr. Wilan Oktavian sebagai Komisaris Utama;
   b. Sdr. Tjia Marwan sebagai Komisaris;
   c. Sdr. Dwi Gawan Islandhi H.B. sebagai Komisaris Independen.

   Direksi:
   a. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
   b. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
   c. Sdr. Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management;
   d. Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
   e. Sdr. Verly Widiantoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi.
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kelima Fifth Agenda	
	1. Respectfully dismissed the individuals listed below from their positions as Members of the Company's Board of Commissioners: a. Mr. Eko Sujiyanto as President Commissioner; b. Mr. R. Permadi Mulajaya as Commissioner; c. Mr. Miftachul Munir as Commissioner; d. Mrs. Nita Prihutaminingrum as Independent Commissioner; e. Mr. Iswandi Imran as Independent Commissioner. 2. Appointed the individuals listed below as Members of the Company's Board of Commissioners as follows: a. Mr. Wilan Oktavian as President Commissioner; b. Mr. Tjia Marwan as Commissioner; c. Mr. Dwi Gawan Islandhi H. B. as Independent Commissioner. 3. For the members of the Board of Commissioners to be appointed as referred to in point 2, who currently hold other positions prohibited from concurrent holding under applicable laws and regulations for members of the Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises, they must resign or be dismissed from such positions. 4. With the dismissal and appointment of the Members of the Board of Commissioners as stated above, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors shall be as follows: **Board of Commissioners:** a. Mr. Wilan Oktavian as President Commissioner; b. Mr. Tjia Marwan as Commissioner; c. Mr. Dwi Gawan Islandhi H. B. as Independent Commissioner. **Board of Directors** a. Mr. Kuntjara as President Director; b. Mr. Rija Judaswara as Director of Marketing and Development; c. Mr. Agus Pramono as Director of Operations and Supply Chain Management; d. Mr. Syailendra Ogan as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management; e. Mr. Verly Widiantoro as Director of Engineering and Production. 5. Granted power and authority to the President Director and/or the other Directors of the Company, with the right of substitution, to carry out all necessary actions related to the decisions of this agenda item in accordance with the applicable laws and regulations, including to state these decisions in a separate Notarial Deed and to notify the Ministry of Law and Human Rights of the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with the prevailing requirements.
Status Implementasi Implementation Status	Direalisasikan Realized
Tindak Lanjut Manajemen Management Follow-Up	Telah dicatat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 03 tanggal 2 Juni 2025. It has been recorded in the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk, Deed No. 03 dated June 2, 2025.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2025

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB tersebut dilaksanakan pada 26 Juni 2025 di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9–10, Jakarta Timur 13340, dan dihadiri oleh Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan yang menjabat sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPSLB dimaksud.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company conducted the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). The EGMS was held on June 26, 2025 at WIKA Tower 2, D.I Panjaitan street Kavling 9-10, East Jakarta 13340, and attended by The Board of Commissioners and The Board of Directors of the Company who were still in the office until the date of the EGMS

MEKANISME PELAKSANAAN RUPSLB
MECHANISM OF EGMS IMPLEMENTATION

No.	Kegiatan Activities	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Ketentuan Provision	Keterangan Description
1	Pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK EGMS Agenda Notification to OJK	9 Mei 2025 May 9,2025	Pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPSLB. The notification of the Meeting agenda to the Financial Services Authority shall be made no later than 5 (five) working days prior to the announcement of the EGMS.	Pemberitahuan mata acara Rapat telah disampaikan melalui surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditandatangani oleh Direksi. Notification of the Meeting agenda has been submitted by letter to the Financial Services Authority (OJK) signed by the Board of Directors.

No.	Kegiatan Activities	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Ketentuan Provision	Keterangan Description
2	Pengumuman RUPSLB, setidaknya melalui: 1. Situs web Bursa Efek Indonesia: IDX website: www.idx.co.id 2. Situs web Perseroan www.wika-beton.co.id dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, paling sedikit adalah Bahasa Inggris. 3. Situs Web Penyedia E-RUPS Announcement of EGMS, at least via: 1. Indonesian Stock Exchange website: IDX website: www.idx.co.id 2. The Company's website www.wika-beton.co.id in Indonesian and foreign languages, should at least be in English: www. wika-beton.co.id. 3. E-GMS Web Provider	20 Mei 2025 May 20, 2025	Pengumuman RUPSLB disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan. Announcement of the GMS shall be submitted no later than 14 (fourteen) days prior to the date of the summons for the GMS.	Pengumuman RUPS telah disampaikan dalam dua bahasa melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Perseroan, dan eASY.KSEI. The announcement of the EGMS has been delivered bilingually through the Website of Indonesia Stock Exchange, Company, and eASY.KSEI.
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS, pukul 14.31 WIB Recording date of Shareholders Register at 14.31 Pm	3 Juni 2025 June 3, 2025	Pemegang saham yang namanya tercatat pada DPS Perusahaan terbuka 1 hari kerja sebelum pemanggilan. Shareholders whose names are listed in the Pu blic Company's Shareholder Registry one business day prior to the summons.	DPS yang berhak hadir telah diumumkan melalui situs web eASY.KSEI. Shareholder Registry has been published through eASY.KSEI website.
4	Pemanggilan RUPSLB, setidaknya melalui: 1. Situs web Bursa Efek Indonesia: IDX website: www.idx.co.id 2. Situs web Perseroan www.wika-beton.co.id dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, paling sedikit adalah Bahasa Inggris. 3. Situs Web Penyedia E-RUPS EGMS summons, at least through: 1. Indonesian Stock Exchange website: IDX website: www.idx.co.id 2. The Company's website www.wika-beton.co.id in Indonesian and foreign languages, should at least be in English: www. wika-beton.co.id. 3. E-GMS Web Provider	4 Juni 2025 June 4, 2025	Pemanggilan RUPSLB disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan. Summons to the EGMS are submitted no later than 21 (twentyone) days before the date of the GMS.	Pemanggilan RUPSLB telah disampaikan dalam dua bahasa melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Perseroan dan eASY.KSEI. Summons to the EGMS have been submitted bilingually through the Website of Indonesia Stock Exchange, the Company, and eASY. KSEI.
5	Pelaksanaan RUPSLB EGMS Implementation	26 Juni 2025 June 26, 2025	WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur 13340	Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 5.867.142.624 saham atau sebesar 67,319%. The meeting was attended by the shareholders or the Company's Authorized proxies, amounting to 5,867,142,624 shares or 67.319%.

No.	Kegiatan Activities	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Ketentuan Provision	Keterangan Description
6	Ringkasan Risalah RUPSLB, setidaknya melalui: 1. Situs web Bursa Efek Indonesia: IDX website: www.idx.co.id 2. Situs web Perseroan www.wika-beton.co.id dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, paling sedikit adalah Bahasa Inggris. 3. Situs Web Penyedia E-RUPS EGMS summons, at least through: 1. Indonesian Stock Exchange website: IDX website: www.idx.co.id 2. The Company's website www.wika-beton.co.id in Indonesian and foreign languages, should at least be in English: www. wika-beton.co.id. 3. E-GMS Web Provider	30 Juni 2025 June 30, 2025	Ringkasan Risalah RUPSLB disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah Tanggal pelaksanaan. The summary of the minutes of the EGMS is submitted no later than 2 (two) days after the date of the EGMS.	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB dalam dua bahasa melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Perseroan, dan eASY.KSEI. Submission of the Summary of the Minutes of the EGMS, bilingually, through the Website of Indonesia Stock Exchange, the Company, and eASY.KSEI.
7	Penyampaian Risalah RUPSLB kepada OJK dan BEI serta melalui situs web Perseroan. Submission of the Minutes of the EGMS to the OJK and the IDX as well as through the Company's website.	7 Juli 2025 July 7, 2025	Risalah/Berita Acara RUPSLB disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan RUPSLB. The Minutes of the EGMS are submitted no later than 30 (thirty) days after the date of the EGMS.	Risalah RUPSLB telah disampaikan kepada OJK dan BEI serta melalui situs web Perseroan pada tanggal 7 Juli 2025. The minutes of the EGMS were submitted to the OJK and the IDX as well as through the Company's website on July 7, 2025.

KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM RUPSLB

RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat hingga pelaksanaan rapat. Berikut daftar kehadirannya:

ATTENDANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN THE EGMS

The EGMS was attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors in office until the meeting. The following is the attendance list:

Nama Name	Jabatan Position
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**	
Tjia Marwan	Komisaris Utama President Commissioner
Dwi Gawan Islandhi H.B.	Komisaris Independen Independent Commissioner
Direksi **Board of Directors**	
Kuntjara	Direktur Utama President Director
Syailendra Ogan	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital and Risk Management
Rija Judaswara	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Development
Agus Pramono	Direktur Operasi dan Supply Chain Management Director of Operation and Supply Chain Management
Verly Widiantoro	Direktur Teknik dan Produksi Director of Engineering and Production

Mata Acara Satu-satunya
The only Agenda

Mata Acara Agenda	**Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.** Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: Mata Acara Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang di dalam mata acara tersebut meliputi: a. Pembahasan mengenai hasil Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yaitu Instalasi Listrik dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 43211. b. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menambahkan kegiatan usaha Instalasi Listrik dengan kode KBLI 43211 sesuai hasil studi kelayakan pada butir (a) di atas. **Approval of Amendments to the Company's Articles of Association.** The explanation of the Meeting Agenda is as follows: The Agenda for the Approval of Amendments to the Company's Articles of Association is carried out in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, which includes the following agenda items: a. Discussion of the results of the Feasibility Study on the Company's Plan to Add Business Activities, namely Electrical Installation with Indonesian Standard Industrial Classification ("KBLI") code 43211. b. Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association by adding the business activity of Electrical Installation with KBLI code 43211 in accordance with the results of the feasibility study in point (a) above.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya dan/atau Berpendapat Number of Shareholders Who Asked Questions and/or Gave Opinions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat. No shareholders submitted any questions or opinions.

Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	5.864.336.849 saham 99,952% dari yang hadir 5,864,336,849 shares 99.952% of those present	2.805.775 saham 0,048% dari yang hadir 2,805,775 shares 0.048% of those present	Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju. No one cast a dissenting vote.

Keputusan Resolution	1. Menerima dan Menyetujui Laporan Hasil Studi Kelayakan Atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Instalasi Listrik dengan Kode KBLI 43211 sebagaimana termuat dalam Laporan Studi Kelayakan yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Guntur, Eki, Andri dan Rekan. 2. Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan yaitu Instalasi Listrik dengan Kode KBLI 43211 ke dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya kegiatan usaha dimaksud dapat dijalankan oleh Perseroan. 3. Menyetujui untuk melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana yang telah ditayangkan. 4. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 3. 5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. 1. Accept and approve the Feasibility Study Report on the Plan to Add Electrical Installation Business Activities with KBLI Code 43211 as contained in the Feasibility Study Report prepared by the Public Appraisal Service Office ("KJPP") Guntur, Eki, Andri and Partners. 2. Approving the addition of supporting business activities, namely Electrical Installation with KBLI Code 43211, to the Company's Articles of Association, so that the Company may subsequently carry out the aforementioned business activities. 3. Agree to amend Article 3 of the Articles of Association as presented. 4. Agree to restate all provisions in the Articles of Association in connection with the amendments referred to in point 3. 5. Agree to grant power and authority to the President Director or other Directors with the right of substitution to take all actions related to the decisions of this Meeting Agenda into a notarial deed and submit it to the competent authority to obtain approval and/or acknowledgment of receipt of notification of amendments to the Company's Articles of Association, to do everything deemed necessary and useful for this purpose without exception, including making additions and/or amendments to the Articles of Association if required by the competent authority.
Status Implementasi Implementation Status	Direalisasikan Realized
Tindak Lanjut Manajemen Management Follow-Up	Telah dicatat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 88 tanggal 26 Juni 2025. It has been recorded in the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 88 dated June 26, 2025.

PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 2024
THE CONVENING OF THE 2024 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk Tahun Buku 2023. RUPST tersebut dilaksanakan pada 17 Mei 2024 di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9–10, Jakarta Timur 13340, dan dihadiri oleh Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan yang menjabat sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPST dimaksud.

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2023 Fiscal year. The AGMS was held in May 17, 2024 at WIKA Tower 2, D.I Panjaitan Street Kavling 9-10, East Jakarta 13340, and was attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who still in the office until the date of the AGMS

MEKANISME PELAKSANAAN RUPST
MECHANISM OF AGMS IMPLEMENTATION

No	Kegiatan Activities	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Ketentuan Provision	Keterangan Description
1	Pemberitahuan mata acara RUPST kepada OJK AGMS Agenda Notification to OJK	5 April 2024 April 5, 2024	Pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPST. The notification of the Meeting agenda to the Financial Services Authority shall be made no later than 5 (five) working days prior to the announcement of the AGMS.	Pemberitahuan mata acara Rapat telah disampaikan melalui surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditandatangani oleh Direksi. Notification of the Meeting agenda has been submitted by letter to the Financial Services Authority (OJK) signed by the Board of Directors.
2	Pengumuman RUPST, setidaknya melalui: 1. Situs web Bursa Efek Indonesia: IDX website: www.idx.co.id 2. Situs web Perseroan www. wika-beton.co.id dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, paling sedikit adalah Bahasa Inggris. 3. Situs Web Penyedia E-RUPS Announcement of AGMS, at least via: 1. Indonesian Stock Exchange website: IDX website: www.idx.co.id 2. The Company's website www. wika-beton.co.id in Indonesian and foreign languages, should at least be in English: www. wika-beton.co.id. 3. E-GMS Web Provider	25 April 2024 April 25, 2024	Pengumuman RUPST disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan. Announcement of the GMS shall be submitted no later than 14 (fourteen) days prior to the date of the summons for the GMS.	Pengumuman RUPS telah disampaikan dalam dua bahasa melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Perseroan, dan eASY.KSEI. The announcement of the AGMS has been delivered bilingually through the Website of Indonesia Stock Exchange, Company, and eASY.KSEI.
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS, pukul 14.31 WIB Recording date of Shareholders Register at 14.31 Pm	24 April 2024 April 24, 2024	Pemegang saham yang namanya tercatat pada DPS Perusahaan terbuka 1 hari kerja sebelum pemanggilan. Shareholders whose names are listed in the Public Company's Shareholder Registry one business day prior to the summons.	DPS yang berhak hadir telah diumumkan melalui situs web eASY.KSEI. Shareholder Registry has been published through eASY.KSEI website.

No	Kegiatan Activities	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Ketentuan Provision	Keterangan Description
4	Pemanggilan RUPST, setidaknya melalui: 1. Situs web Bursa Efek Indonesia: IDX website: www.idx.co.id 2. Situs web Perseroan www. wika-beton.co.id dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, paling sedikit adalah Bahasa Inggris. 3. Situs Web Penyedia E-RUPS AGMS summons, at least through: 1. Indonesian Stock Exchange website: IDX website: www.idx.co.id 2. The Company's website www. wika-beton.co.id in Indonesian and foreign languages, should at least be in English: www. wika-beton.co.id. 3. E-GMS Web Provider	7 Mei 2024 Mei 7, 2024	Pemanggilan RUPST disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan. Summons to the AGMS are submitted no later than 21 (twentyone) days before the date of the GMS.	Pemanggilan RUPST telah disampaikan dalam dua bahasa melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Perseroan dan eASY.KSEI. Summons to the AGMS have been submitted bilingually through the Website of Indonesia Stock Exchange, the Company, and eASY.KSEI.
5	Pelaksanaan RUPST AGMS Implementation	17 Mei 2024 May 17, 2024	WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur 13340	Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 5.916.014.049 saham atau sebesar 67,88%. The meeting was attended by the shareholders or the Company's Authorized proxies, amounting to 5,916,014,049 shares or 67.88%.
6	Ringkasan Risalah RUPST, setidaknya melalui: 1. Situs web Bursa Efek Indonesia: IDX website: www.idx.co.id 2. Situs web Perseroan www. wika-beton.co.id dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, paling sedikit adalah Bahasa Inggris. 3. Situs Web Penyedia E-RUPS AGMS summons, at least through: 1. Indonesian Stock Exchange website: IDX website: www.idx.co.id 2. The Company's website www. wika-beton.co.id in Indonesian and foreign languages, should at least be in English: www. wika-beton.co.id. 3. E-GMS Web Provider	20 Mei 2024 May 20, 2024	Ringkasan Risalah RUPST disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah Tanggal pelaksanaan. The summary of the minutes of the AGMS is submitted no later than 2 (two) days after the date of the AGMS.	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST dalam dua bahasa melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Perseroan, dan eASY.KSEI. Submission of the Summary of the Minutes of the AGMS, bilingually, through the Website of Indonesia Stock Exchange, the Company, and eASY.KSEI.
7	Penyampaian Risalah RUPST kepada OJK dan BEI serta melalui situs web Perseroan. Submission of the Minutes of the AGMS to the OJK and the IDX as well as through the Company's website.	5 Juni 2024 June 5, 2024	Risalah/Berita Acara RUPST disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan RUPST. The Minutes of the AGMS are submitted no later than 30 (thirty) days after the date of the AGMS.	Risalah RUPST telah disampaikan kepada OJK dan BEI serta melalui situs web Perseroan pada tanggal 5 Juni 2024. The minutes of the AGMS were submitted to the OJK and the IDX as well as through the Company's website on June 5, 2024.

KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM RUPST

Pada RUPST untuk Tahun Buku 2023 dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat hingga pelaksanaan rapat. Berikut daftar kehadirannya:

ATTENDANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN THE AGMS

The AGMS for Fiscal Year 2023 was attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors in office until the meeting. The following is the attendance list:

Nama Name	Jabatan Position
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**	
Hermawan Dhewayanto	Komisaris Utama President Commissioner
R. Permadi Mulajaya	Komisaris Commissioner
Miftachul Munir	Komisaris Commissioner
Priyo Suprobo	Komisaris Independen Independent Commissioner
Nita Prihutaminingrum	Komisaris Independen Independent Commissioner
Direksi **Board of Directors**	
Kuntjara	Direktur Utama President Director
Ahmad Fadli Kartajaya	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital and Risk Management
Rija Judaswara	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Development
Taufik Dwi Wibowo	Direktur Operasi dan Supply Chain Management Director of Operation and Supply Chain Management
Verly Widiantoro	Direktur Teknik dan Produksi Director of Engineering and Production

PENGGUNAAN PIHAK INDEPENDEN DALAM PERHITUNGAN SUARA RUPS

Perseroan melibatkan pihak independen dalam pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2023, yang berperan mengawasi proses perhitungan suara oleh Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Datindo Entrycom.

INDEPENDENT PARTY IN THE CALCULATION OF GMS VOTING

The Company engaged an independent party in the AGMS of Fiscal Year 2023, to oversee the vote counting process by the Securities Administration Bureau (BAE), PT Datindo Entrycom.

KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST untuk Tahun Buku 2023 dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 5.916.014.049 saham atau sebesar 67,88% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

QUORUM OF ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

The AGMS for Fiscal Year 2023 attended by 6.001.290.638 Shareholders or Authorized Proxies of the Shareholders of the Company, or 68,86% of all issued and fully paid shares in the Company.

KEPUTUSAN RUPST UNTUK TAHUN BUKU 2023

Berdasarkan Akta RUPST No. 43 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., penyelenggaraan RUPST telah menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

RESOLUTIONS OF THE AGMS FOR THE FINANCIAL YEAR 2023

Based on the AGMS Deed No. 43 on May 17, 2024, made before the Engineer Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the AGMS has resulted in the following resolutions:

Mata Acara Pertama
First Agenda

Mata Acara Agenda	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023. Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties for the Fiscal Year ended December 31, 2023, as well as Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ended December 31, 2023 as well as Providing Full Repayment and Release of Liability (volledig acquit et de charge) to the Directors regarding the actions of the Company's management and the Board of Commissioners regarding the company's supervisory actions that have been carried out during the 2023 financial year.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya dan/atau Berpendapat Number of Shareholders Who Asked Questions and/or Gave Opinions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat. No shareholders submitted any questions or opinions.

Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	5.910.887.649 saham 99,91% dari yang hadir 5,910,887,649 shares 99.91% of the attending parties	5.100.000 saham 0,09% dari yang hadir 5,100,000 shares 0.09% of the attending parties	26.400 saham 0,00% dari yang hadir 26,400 shares 0.00% of the attending parties

Keputusan Resolution	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00259/2.1030/AU.1/04/1680-3/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana serta tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan. 1. Approved the Company's Annual Report for the 2023 Fiscal Year including the Board of Commissioners' Supervision Report and ratified the Company's Consolidated Financial Report for the 2023 Fiscal Year which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Rekan as contained in their report Number 00259/2.1030/AU.1/04/1680-3/1/III/2024 dated 27 March 2024, with the opinion "Fair in All Material Matters", the consolidated financial position of PT Wijaya Karya Beton Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2023, as well as financial performance and its consolidated cash flows for the year ended on that date in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia. 2. Providing full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision actions during the Financial Year ended December 31, 2023 as long as these actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Company's Annual Report and Company's Consolidated Financial Statements of the Company.
Status Implementasi Implementation Status	Direalisasikan Realized
Tindak Lanjut Manajemen Management Follow-Up	Telah dicatat dalam Akta Risalah Berita Acara Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 43 tanggal 17 Mei 2024. Has been recorded in the Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 43 dated May 17, 2024.

Mata Acara Kedua
Seccond Agenda

Mata Acara Agenda	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023. Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2023 Financial Year.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya dan/atau Berpendapat Number of Shareholders Who Asked Questions and/or Gave Opinions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat. No shareholders submitted any questions or opinions.

Mata Acara Kedua
Seccond Agenda

Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	5.915.987.649 saham 100,00% dari yang hadir 5,915,987,649 shares 100.00% of the attending parties	Tidak ada yang memberikan suara abstain No one voted to abstain.	26.400 saham 0,00% dari yang hadir 26,400 shares 0.00% of the attending parties
Keputusan Resolution	1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp34.126.442.456,- (Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sebagai berikut: a. Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp6.885.218.614,- (Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp0,79,- (Nol Koma Tujuh Sembilan Rupiah) per saham. b. Sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp27.241.223.842,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham. 1. Determining the Use of the Net Profit attributable to the Owner of the Company's Parent Entity for the Financial Year ended December 31, 2023, namely Rp34,126,442,456,- (Thirty Four Billion One Hundred Twenty Six Million Four Hundred Forty Two Thousand Four Hundred and Fifty Six Rupiah) as follows: a. 20% (Twenty Percent) of Net Profit or Rp6,885,218,614,- (Six Billion Eight Hundred Eighty Five Million Two Hundred Eighteen Thousand Six Hundred and Fourteen Rupiah) is determined as Cash Dividends to Shareholders or the amount Rp0.79,- (Zero Point Seventy Nine Rupiah) per share. b. 80% (Eighty Percent) of Net Profit or Rp27,241,223,842,- (Twenty Seven Billion Two Hundred Forty One Million Two Hundred Twenty Three Thousand Eight Hundred Forty Two Rupiah) is designated as other reserves. 2. Granting authority and power to the Board of Directors with substitution rights to further regulate the procedures and implementation of cash dividend distribution in accordance with applicable regulations, including rounding for dividend payments per share.		
Status Implementasi Implementation Status	Direalisasikan Realized		
Tindak Lanjut Manajemen Management Follow-Up	Telah dicatat dalam Akta Risalah Berita Acara Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 43 tanggal 17 Mei 2024. Has been recorded in the Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 43 dated May 17, 2024.		

Mata Acara Ketiga
Third Agenda

Mata Acara Agenda	Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 Determination of the Appointment of the Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Financial Report for the 2024 Financial Year.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya dan/atau Berpendapat Number of Shareholders Who Asked Questions and/or Gave Opinions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat. No shareholders submitted any questions or opinions.		
Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	5.915.988.849 saham 100,00% dari yang hadir 5,915,988,849 shares 100.00% of the attending parties	Tidak ada yang memberikan suara abstain. No one voted to abstain.	25.200 saham 0,00% dari yang hadir 25,200 shares 0.00% of the attending parties.

Mata Acara Ketiga
Third Agenda

Keputusan Resolution	1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut. 1. Approved the re-appointment of the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) to audit/examine Company's Consolidated Financial Statements, Performance Evaluation Report Audit and Compliance Audit ending on December 31, 2024; 2. Granting delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of compensation for audit services, additional scope of work required and other reasonable requirements for the public accounting firm; 3. Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company by first obtaining approval from the Majority Shareholders to dismiss and appoint a replacement Public Accounting Firm and/or Public Accountant in the event that the appointed Public Accounting Firm and/or Public Accountant, for whatever reason, is unable to complete the audit of Company Financial Report for Fiscal Year 2024, including determining fees for audit services and other requirements for the replacement of Public Accounting Firm and/or Public Accountant.
Status Implementasi Implementation Status	Direalisasikan Realized
Tindak Lanjut Manajemen Management Follow-Up	Telah dicatat dalam Akta Risalah Berita Acara Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 43 tanggal 17 Mei 2024. Has been recorded in the Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 43 dated May 17, 2024.

Mata Acara Keempat
Fourth Agenda

Mata Acara Agenda	Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Determination of the amount of Salary/Honorarium, Allowances and Other Facilities for 2024 and Tantiem for Performance in 2023 for the Company's Directors and Board of Commissioners.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya dan/atau Berpendapat Number of Shareholders Who Asked Questions and/or Gave Opinions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat. No shareholders submitted any questions or opinions.		
Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	5.915.982.149 saham 100,00% dari yang hadir 5,915,982,149 shares 100.00% of the attending parties	Tidak ada yang memberikan suara abstain. No one voted to abstain.	31.900 saham 0,00% dari yang hadir 31,900 shares 0.00% of the attending parties
Keputusan Resolution	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan Komisaris Tahun Buku 2024. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2023 serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi Tahun Buku 2024. 1. Granting authority and power to the Majority Shareholders to determine the amount of the bonus for the 2023 Financial Year, as well as determine the honorarium, allowances and facilities for the Board of Commissioners for the 2024 Financial Year. 2. Granting authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Majority Shareholders to determine the amount of the bonus for the 2023 Fiscal Year and determine the salaries, allowances and facilities for the Directors for the 2024 Fiscal Year.		
Status Implementasi Implementation Status	Direalisasikan Realized		
Tindak Lanjut Manajemen Management Follow-Up	Telah dicatat dalam Akta Risalah Berita Acara Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 43 tanggal 17 Mei 2024. Has been recorded in the Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 43 dated May 17, 2024.		

Mata Acara Kelima
Fifth Agenda

Mata Acara Agenda	Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Approval of the Confirmation/Ratification of the Integrated Governance Policy and Guidelines for the Principles of Management of Subsidiaries and Integrated Governance of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya dan/atau Berpendapat Number of Shareholders Who Asked Questions and/or Gave Opinions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat. No shareholders submitted any questions or opinions.

Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	5.900.714.049 saham 99,74% dari yang hadir 5,900,714,049 shares 99.74% of the attending parties	Tidak ada yang memberikan suara abstain. No one voted to abstain.	15.300.000 saham 0,26% dari yang hadir 15,300,000 shares 0.26% of the attending parties

Keputusan Resolution	1. Menyetujui mengukuhkan/meratifikasi pemberlakuan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana Dokumen Nomor WIKA-SUB-KP.01.01 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana Dokumen Nomor WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01 berikut perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu sebagai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di Perseroan. 2. Meminta kepada Dewan Komisaris Perseroan melakukan pengawasan atas penerapan Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi, untuk selanjutnya hasil penerapan agar dilaporkan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas secara berkala. 1. Approved to confirm/ratify the implementation of the Integrated Governance Policy as in Document Number WIKA-SUB-KP.01.01 and the Guidelines for Principles of Subsidiary Management and Integrated Governance as in Document Number WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01 and its amendments from time to time as Guidelines for Integrated Governance in the Company; 2. Request to the Board of Commissioners of the Company to supervise the implementation of the Company's Integrated Governance Policies and Guidelines implemented by the Board of Directors, so that the results of the implementation are reported to PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as the Majority Shareholder periodically.
Status Implementasi Implementation Status	Direalisasikan Realized
Tindak Lanjut Manajemen Management Follow-Up	Telah dicatat dalam Akta Risalah Berita Acara Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 43 tanggal 17 Mei 2024. Has been recorded in the Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 43 dated May 17, 2024.

Mata Acara Keenam
Sixth Agenda

Mata Acara Agenda	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Approval of changes to the Company's Articles of Association.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya dan/atau Berpendapat Number of Shareholders Who Asked Questions and/or Gave Opinions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat. No shareholders submitted any questions or opinions.

Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	5.900.714.049 saham 99,74% dari yang hadir 5,900,714,049 shares 99.74% of the attending parties	Tidak ada yang memberikan suara abstain. No one voted to abstain.	15.300.000 saham 0,26% dari yang hadir 15,300,000 shares 0.26% of the attending parties

Mata Acara Keenam
Sixth Agenda

Keputusan Resolution	1. Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1. 3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. 1. Approved to make changes to the Company's Articles of Association; 2. Agree to restate all provisions in the Articles of Association in connection with the changes referred to in point 1; 3. Approve to grant power and authority to the President Director or other Directors with the right of substitution to carry out all actions taken in connection with the decisions on the agenda of this meeting in a notarial deed and submit it to the authorized agency to obtain approval and/or receipt of notification of changes to the Articles of Association The Company shall do everything deemed necessary and useful for these purposes with no exceptions, including making additions and/or changes to the Articles of Association if this is required by the authorized agency.
Status Implementasi Implementation Status	Direalisasikan Realized
Tindak Lanjut Manajemen Management Follow-Up	Telah dicatat dalam Akta Risalah Berita Acara Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 43 tanggal 17 Mei 2024. Has been recorded in the Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 43 dated May 17, 2024.

Mata Acara Ketujuh
Seventh Agenda

Mata Acara Agenda	Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Changes in the Composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya dan/atau Berpendapat Number of Shareholders Who Asked Questions and/or Gave Opinions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat. No shareholders submitted any questions or opinions.

Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	5.900.714.849 saham 99,74% dari yang hadir 5,900,714,849 shares 99.74% the attending parties	Tidak ada yang memberikan suara abstain. No one voted to abstain.	15.299.200 saham 0,26% dari yang hadir. 15,299,200 shares 0.26% of the attending parties

Mata Acara Ketujuh
Seventh Agenda

Keputusan
Resolution

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 21 Tanggal 9 April 2019, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta Selatan, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2019, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
   a. Hermawan Dhewayanto sebagai Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 17 Tanggal 12 Mei 2023, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta Selatan;
   b. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 4 Tanggal 3 Juni 2021, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta Selatan;
   c. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko yang diangkat berdasarkan Akta No. 73 Tanggal 25 April 2022, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta Selatan;

   terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
   a. Eko Sujiyanto sebagai Komisaris Utama
   b. Iswandi Imran sebagai Komisaris Independen
   c. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
   d. Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management

   sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
   Dewan Komisaris:
   a. Eko Sujiyanto sebagai Komisaris Utama
   b. R. Permadi Mulajaya
   c. Miftachul Munir
   d. Iswandi Imran sebagai Komisaris Independen
   e. Nita Prihutaminingrum sebagai Komisaris Independen.
   Direksi:
   a. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
   b. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
   c. Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management;
   d. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
   e. Verly Widiantoro sebagai Direktur Teknik dan Produk

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketujuh Seventh Agenda	
	1. Confirming the honorable dismissal of Priyo Suprobo as Independent Commissioner appointed based on Deed Number 21 dated April 9 2019, made in the presence of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., in South Jakarta, as of March 27 2019, with thanks for all the contributions of energy and thoughts provided by the person concerned while serving as Independent Commissioner of the Company. 2. Dismiss with honor the names below as the Management of the Company: a. Hermawan Dhewayanto as President Commissioner appointed based on Deed Number 17 dated May 12, 2023, made in the presence of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., in South Jakarta; b. Taufik Dwi Wibowo as Director of Operations and Supply Chain Management who was appointed based on Deed Number 4 dated 3 June 2021, made in the presence of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., in South Jakarta; c. Ahmad Fadli Kartajaya as Director of Finance, Human Capital and Risk Management who was appointed based on Deed No. 73 Dated April 25, 2022, made in the presence of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., in South Jakarta. starting from the closing of this GMS, with thanks for all the contributions of energy and thoughts given by the person concerned while serving as the Board of Commissioners and Directors of the Company. 3. To appoint the following names as the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows: a. Eko Sujiyanto as President Commissioner; b. Iswandi Imran as Independent Commissioner; c. Syailendra Ogan as Director of Finance, Human Capital and Risk Management; d. Agus Pramono as Director of Operations and Supply Chain Management; since the closing of this GMS with a term of office in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, taking into account the laws and regulations and without reducing the right of the GMS to dismiss at any time. 4. With the confirmation of the dismissal, dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners and Directors as mentioned above, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors is as follows: **Board of Commissioners:** a. Eko Sujiyanto as President Commissioner; b. R. Permadi Mulajaya as Commissioner; c. Miftachul Munir as Commissioner; d. Iswandi Imran as Independent Commissioner; e. Nita Prihutaminingrum as Independent Commissioner. **Board of Directors** a. Kuntjara as President Director; b. Syailendra Ogan as Director of Finance, Human Capital and Risk Management; c. Agus Pramono as Director of Operations and Supply Chain Management; d. Rija Judaswara as Director of Marketing and Development; e. Verly Widiantoro as Director of Engineering and Production. 5. Granting power and authority to the President Director or other Directors of the Company with the right of substitution to carry out all necessary actions related to the decisions on this agenda in accordance with applicable laws and regulations, including to declare in a separate Notarial Deed and notify the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with applicable regulations.
Status Implementasi Implementation Status	Direalisasikan Realized
Tindak Lanjut Manajemen Management Follow-Up	Telah dicatat dalam Akta Risalah Berita Acara Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 43 tanggal 17 Mei 2024. Has been recorded in the Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 43 dated May 17, 2024.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023

Berdasarkan keputusan Mata Acara Rapat Kedua, Perseroan telah menetapkan dividen tunai atas Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp6.885.218.614,- (Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) untuk dibagikan kepada Para Pemegang Saham sehingga dividen tunai per saham sebesar Rp0,79 per saham. Selanjutnya, dividen tunai tersebut akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

SCHEDULE AND TERMS OF PAYMENT OF CASH DIVIDEND FOR THE FISCAL YEAR 2023

Based on the resolution of the Second Agenda, the Company has determined the cash dividend on Net Profit Attributable to Owners of the Parent Entity of the Company for the Fiscal Year ended December 31, 2023 amounting to Rp6,885,218,614.- (Six Billion Eight Hundred Eighty Five Million Two Hundred Eighteen Thousand Six Hundred Fourteen Rupiah) to be distributed to the shareholders so that the Cash Dividend to be paid is Rp0.79 per share. Furthermore, the cash dividend will be distributed to the Company's shareholders with the following schedule and procedures:

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN
DIVIDEND DISTRIBUTION SCHEDULE

No	Keterangan Description	Tanggal Date
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) End of Stock Trading Period with the Dividend Right (Cum Dividen)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi Regular Market and Negotiation	29 Mei 2024 May 29, 2024
	• Pasar Tunai Cash Market	31 Mei 2024 May 31, 2024
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) Early Stock Trading Period with the Dividend Right (Ex Dividend)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi Regular Market and Negotiation	30 Mei 2024 May 30, 2024
	• Pasar Tunai Cash Market	3 Juni 2024 June 3, 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date) Date of Register of Shareholders entitling to have the Dividend (Recording Date)	31 Mei 2024 May 31, 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023 Date of Cash Dividend Payment for the Fiscal Year 2023	20 Juni 2024 June 20, 2024

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 31 Mei 2024 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 31 Mei 2024.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 20 Juni 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh Pemegang Saham

TERMS OF PAYMENT OF CASH DIVIDEND:

1. Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company’s Register of Shareholders (“DPS”) or recording date on May 31, 2024 and/or owners of company shares in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on closing of trading on the Indonesia Stock Exchange on May 31, 2024.
2. For Shareholders whose shares are deposited in KSEI’s collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on June 20, 2024, into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities company and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in KSEI’s collective custody, the cash dividend payment will be transferred to the Shareholders’ account.
3. The cash dividends will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer (“WP Badan DN”) and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividends paid to the Domestic Entity Taxpayer. the. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers (“WPOP DN”) will be excluded from the tax object as long as the dividends

wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPh") in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the WPOP DN concerned in accordance with with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.

5. Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

5. Shareholders can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and or custodian banks where shareholders open securities accounts, then shareholders must be responsible for reporting dividend receipts referred to in tax reporting for the tax year concerned in accordance with the applicable tax laws and regulations.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

6. Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use a rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submitting proof of record or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes, in accordance with the rules and regulations stipulated by KSEI, without the said document, cash dividends The amount paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2024

Pada tahun 2024, Perseroan tidak menyelenggarakan RUPSLB.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In 2024, the Company did not convene EGMS.

KEPUTUSAN RUPS PADA TAHUN BUKU DAN 1 (SATU) TAHUN SEBELUM TAHUN BUKU YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU

THE GMS RESOLUTION FOR THE FINANCIAL YEAR AND 1 (ONE) FINANCIAL YEAR PRIOR, REALIZED IN THE RELEVANT FINANCIAL YEAR

Pada tahun 2025, Perseroan telah merealisasikan seluruh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024.

In 2025, the Company fully implemented all resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2024 Financial Year.

Seluruh keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 telah direalisasikan sepenuhnya pada tahun buku 2024, sehingga tidak terdapat keputusan RUPS Tahun Buku 2024 yang realisasinya dilakukan pada tahun buku 2025.

All resolutions of the AGMS for the 2023 Financial Year were fully implemented in the 2024 financial year. Accordingly, there were no resolutions of the AGMS for the 2024 Financial Year that were implemented in the 2025 Financial Year.

KEPUTUSAN RUPS PADA TAHUN BUKU DAN 1 (SATU) TAHUN SEBELUM TAHUN BUKU YANG BELUM DIREALISASIKAN

UNREALIZED GMS RESOLUTIONS FOR THE FINANCIAL YEAR AND 1 (ONE) FINANCIAL YEAR PRIOR

Per 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 maupun Tahun Buku 2023 yang belum direalisasikan, sehingga seluruh keputusan RUPS telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

As of December 31, 2025, the Company had no unrealized resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 or 2023 financial years; therefore, all GMS resolutions have been duly implemented in accordance with the applicable provisions.

PIHAK INDEPENDEN DALAM PELAKSANAAN RUPS PADA TAHUN BUKU DAN 1 (SATU) TAHUN SEBELUM TAHUN BUKU

INDEPENDENT PARTIES IN THE IMPLEMENTATION OF THE GMS FOR THE FINANCIAL YEAR AND 1 (ONE) FINANCIAL YEAR PRIOR

Dalam penyelenggaraan RUPS, Perseroan melibatkan pihak independen/profesi penunjang guna memastikan proses rapat berjalan sesuai ketentuan serta mendukung akuntabilitas pelaksanaan rapat.

In conducting the GMS, the Company involves independent parties/supporting professionals to ensure that the meeting process runs in accordance with the provisions and supports the accountability of the meeting implementation.

Pihak independen tersebut mencakup notaris sebagai pejabat pembuat akta risalah rapat, Biro Administrasi Efek (BAE) untuk dukungan administrasi serta pengawasan dan/atau perhitungan suara, serta penyedia sarana penyelenggaraan RUPS secara elektronik melalui eASY. KSEI (KSEI) apabila rapat diselenggarakan dengan fasilitas elektronik.

These independent parties include a notary as the official who drafts the minutes of the meeting, the Securities Administration Bureau (BAE) for administrative support and supervision and/or vote counting, and a provider of electronic GMS facilities through eASY.KSEI (KSEI) if the meeting is held electronically.

Selama penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 dan Tahun Buku 2023, Perseroan melibatkan pihak independen yang berperan mengawasi proses perhitungan suara melalui Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom.

During the General Meetings of Shareholders (GMS) for the 2024 and 2023 Financial Years, the Company engaged an independent party to oversee the vote counting process through the Company's Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom.

Jenis Rapat Type of Meeting	Tanggal Date	Nama Pihak Independen Independent Party	Peran Role	Tugas plhak independen melakukan perhitungan suara Independent party are tasked with counting the votes
Rapat Umum Pemegang Saham 2025 **2025 General Meeting of Shareholders**				
RUPST AGMS	02 Juni 2025 June 02, 2025	Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.	Notaris (menyusun akta risalah) Notary (drafting deeds)	Tidak No
RUPST AGMS	02 Juni 2025 June 02, 2025	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) – eASY.KSEI	Penyedia sarana e-RUPS (platform eASY.KSEI) E-GMS facility provider (eASY. KSEI platform)	Tidak No

Jenis Rapat Type of Meeting	Tanggal Date	Nama Pihak Independen Independent Party	Peran Role	Tugas plhak independen melakukan perhitungan suara Independent party are tasked with counting the votes
RUPST AGMS	02 Juni 2025 June 02, 2025	PT Datindo Entrycom	BAE (dukungan administrasi, daftar hadir, dan/atau pengawasan/perhitungan suara) BAE (administrative support, attendance lists, and/or supervision/vote counting)	Ya Yes
RUPST AGMS	02 Juni 2025 June 02, 2025	Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)	Profesi penunjang/auditor (terkait agenda audit) Supporting professions/auditors (related to audit agenda)	Tidak No
RUPSLB EGMS	26 Juni 2025 June 26, 2025	Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.	Notaris (menyusun akta risalah) Notary (drafting minutes)	Tidak No
RUPSLB EGMS	26 Juni 2025 June 26, 2025	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) – eASY.KSEI	Penyedia sarana e-RUPS (platform eASY.KSEI) E-GMS facility provider (eASY. KSEI platform)	Tidak No
RUPSLB EGMS	26 Juni 2025 June 26, 2025	PT Datindo Entrycom	BAE (dukungan administrasi, daftar hadir, dan/atau pengawasan/perhitungan suara) BAE (administrative support, attendance lists, and/or supervision/vote counting)	Ya Yes
RUPSLB EGMS	26 Juni 2025 June 26, 2025	Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Guntur, Eki, Andri dan Rekan	Profesi penunjang (terkait Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha) Supporting professions/auditors (related to the audit agenda)	Tidak No
Rapat Umum Pemegang Saham 2024 **2024 General Meeting of Shareholders**				
RUPST AGMS	17 Mei 2024 May 17, 2024	Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.	Notaris (menyusun akta risalah) Notary (drafting deeds)	Tidak No
RUPST AGMS	17 Mei 2024 May 17, 2024	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) – eASY.KSEI	Penyedia sarana e-RUPS (platform eASY.KSEI) E-GMS facility provider (eASY.KSEI platform)	Tidak No
RUPST AGMS	17 Mei 2024 May 17, 2024	PT Datindo Entrycom	BAE (dukungan administrasi, daftar hadir, dan/atau pengawasan/perhitungan suara) BAE (administrative support, attendance list, and/or supervision/calculation of votes)	Ya Yes
RUPST AGMS	17 Mei 2024 May 17, 2024	Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)	Profesi penunjang/auditor (terkait agenda audit) Supporting professions/auditors (related to the audit agenda)	Tidak No

Direksi
The Board Of Directors

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa Direksi berfungsi sebagai salah satu organ perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam mengelola Perseroan demi kepentingan terbaik perusahaan sesuai dengan tujuan dan maksudnya. Direksi menjadi perwakilan Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, menjamin pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, dan memperhatikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas dan keputusan Direksi dilaksanakan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang mereka. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas tugas yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun pelaksanaan tugas tetap menjadi tanggung jawab bersama.

In Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is stipulated that the Board of Directors functions as one of the corporate body vested with authority and full responsibility for managing the Company in the best interest of the corporation in accordance with its objectives and purposes. The Board of Directors serves as the representative of the Company both within and outside the court, ensuring the implementation of the company's social responsibilities, and taking into consideration the interests of various stakeholders in accordance with applicable regulations. The duties and decisions of the Board of Directors are executed in accordance with the division of tasks and authorities. Each member of the Board of Directors is accountable for tasks within their respective fields, yet the execution of duties remains a collective responsibility.

Berikut rincian mengenai ketentuan terkait dengan Direksi Perseroan sesuai peraturan dan regulasi:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Akta Perubahan Pengurus Nomor 74 tanggal 30 Mei 2024;
4. Anggaran Dasar Perseroan Nomor 75 tanggal 30 Mei 2024;
5. Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.0060/2025 tanggal 01 Juli 2025 tentang Tugas dan Wewenang Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk.
6. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor. SK.01.01/WB-0A.0035/2024 tentang Board Manual PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal 6 September 2024.

Here are the details regarding the provisions related to the Company's Board of Directors in accordance with regulations and rules:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
3. The Deed of Change in Management Number 74 Dated May 30, 2024;
4. The Company's Articles of Association stated in Deed Number 75 Dated May 30, 2024;
5. Decree of the Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.0060/2025 dated July 1, 2025 regarding the Duties and Authorities of the Members of the Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk.
6. Joint Resolution of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.0035/2024 regarding the Board Manual of PT Wijaya Karya Beton Tbk, dated 6 September 2024.

KOMPOSISI DAN MASA JABATAN DIREKS
COMPOSITION AND TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Jumlah anggota Direksi sekurang-kurangnya adalah 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan anggota Direksi yang ditetapkan dalam RUPS. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS pemilihan anggota

The Board of Directors shall consist of at least two (2) members, comprising one President Director and other Directors as determined by the General Meeting of Shareholders (GMS). Members of the Board of Directors are appointed and

Direksi didasarkan pada pertimbangan terhadap aspek keahlian, keterampilan, dan integritas, sehingga visi, misi, dan tujuan Perseroan dapat terus terwujud.

dismissed by the GMS. The selection of Directors is based on considerations of expertise, skills, and integrity to ensure the continuous achievement of the Company's vision, mission, and objectives.

Perseroan menetapkan batas masa jabatan Direksi sesuai yang tertuang pada Board Manual yaitu 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan selanjutnya.

The Company stipulates the term of office of the Board of Directors in accordance with the Board Manual, whereby one term of office for each Director shall not exceed five (5) years and may be extended for one (1) additional term.

Pada tahun 2025, komposisi anggota Direksi tidak mengalami perubahan, sehingga susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

In 2025, there were no changes in the composition of the Board of Directors. Therefore, the composition of the Board of Directors is as follows:

Periode: 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
Period: January 1, 2025 - December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Basis of Appointment	Periode & Masa Jabatan Tenure
Kuntjara	Direktur Utama President Director	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 73 tanggal 25 April 2022. Deed of GMS Resolutions No. 73 dated April 25, 2022.	Periode ke-1 1st Period 2022-2027
Rija Judaswara	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Development	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 73 tanggal 25 April 2022. Deed of GMS Resolutions No. 73 dated April 25, 2022.	Periode ke-1 1st Period 2022-2027
Agus Pramono	Direktur Operasi dan Supply Chain Management Director of Operation and Supply Chain Management	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 74 tanggal 30 Mei 2024. Deed of GMS Resolution No. 74 dated May 30, 2024.	Periode ke-1 1st Period 2024-2029
Syailendra Ogan	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital and Risk Management	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 74 tanggal 30 Mei 2024. Deed of GMS Resolution No. 74 dated May 30, 2024.	Periode ke-1 1st Period 2024-2029
Verly Widiantoro	Direktur Teknik dan Produksi Director of Engineering and Production	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 17 tanggal 12 Mei 2023. Deed of GMS Resolutions No. 17 dated May 12, 2023.	Periode ke-1 1st Period 2023-2028

TUGAS DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DIREKSI

1. Kebijakan Umum
   a. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.
   b. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.
   c. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. General Policy
   a. Each member of the Board of Directors shall in good faith and with full responsibility perform duties for the interest and business of the Company.
   b. Comply with the provisions of the prevailing laws and regulations, Articles of Association, and resolutions of the GMS and ensure that all activities of the Company have been carried out in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations, Articles of Association, and resolutions of the GMS.
   c. Carry out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

d. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
e. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan.
f. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
g. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawas Intern.
h. Menyampaikan permintaan izin kepada Dewan Komisaris atas transaksi-transaksi yang pelaksanaannya wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

2. Tugas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Dalam hubungannya dengan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi wajib:
a. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan keuangan tahunan kepada RUPS.
b. Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal ada anggota Direksi menolak untuk menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.
c. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/ atau RUPS Luar Biasa. RUPS hendaknya direncanakan dengan matang dalam hal menentukan tempat, waktu penyelenggaraan, prosedur serta agenda rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Dalam pelaksanaannya sedapat mungkin dihindari adanya perubahan-perubahan yang dapat membingungkan para Pemegang Saham.
d. Menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat secara jelas dan rinci kepada OJK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum mengumumkan rencana rapat.
e. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal waktu penyampaian Risalah jatuh pada hari libur Perusahaan wajib menyampaikan risalah paling lambat pada hari kerja berikutnya.
f. Menyediakan bahan rapat RUPS dan diberikan cuma-cuma kepada Pemegang Saham.
g. Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS.

d. Represent the Company both inside and outside the court.
e. Implement Good Corporate Governance (GCG) consistently and continuously.
f. The division of duties and authority of each member of the Board of Directors is determined based on the decision of the Board of Directors.
g. Establish and adjust the organizational structure up to 1 (one) level under the Board of Directors, including appoint and dismiss the Corporate Secretary and the Internal Audit.
h. Submitting requests for permission to the Board of Commissioners for transactions whose implementation must obtain approval from the Board of Commissioners.

2. Duties in the General Meeting of Shareholders In relation to the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors shall:
a. Provide accountability and all information about the state and course of the Company in the form of an annual report including annual financial calculations to the GMS.
b. Sign the Annual Report, in the event that any member of the Board of Directors refuses to sign the Annual Report, the reason must be stated.
c. To summon and organize the Annual GMS and/or Extraordinary GMS. The GMS should be carefully planned in terms of determining the place, time, procedure and agenda of the meeting in accordance with the Company's Articles of Association. In its implementation, changes that can confuse the Shareholders should be avoided as much as possible.
d. Submit the meeting agenda clearly and in detail to OJK at the latest 7 (seven) days before announcing the meeting plan.
e. Minutes of the GMS must be submitted to OJK no later than 30 days after the GMS is held. In the event that the time for submission of the Minutes falls on a holiday, the Company must submit the minutes no later than the next business day.
f. Provide materials for the GMS meeting and provide them free of charge to the Shareholders.
g. Make an announcement of the GMS to the shareholders no later than 15 (fifteen) days as of the date of the request to hold the GMS.

h. Memberikan Risalah RUPS kepada Pemegang Saham jika diminta oleh Pemegang Saham.
i. Meminta persetujuan RUPS jika akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar.
j. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk oleh dan dari peserta RUPS.

h. Provide the Minutes of GMS to the Shareholders if requested by the Shareholders.
i. Seeking approval from the GMS if there will be an amendment to the Articles of Association.
j. The GMS shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. In the event that all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are absent or unable to attend, the GMS shall be chaired by a Shareholder present at the GMS appointed by and from the participants of the GMS.

3. Strategi dan Rencana Kerja
a. Menyusun menetapkan misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan. Pengkajian visi dan misi dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali atau setiap saat bila diperlukan penyesuaian.
b. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya strategi Perusahaan dalam rangka mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.
c. Menyiapkan rencana pengembangan Perusahaan serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan.
d. Menyusun dan menetapkan kebijakan, prosedur serta pedoman penyusunan RJPP dan RKAP.
e. Menyusun/menyiapkan RJPP.
f. Menyiapkan RKAP sebagai penjabaran rencana tahunan dari RJPP.
g. Mengupayakan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam RKAP.

3. Strategy and Work Plan
a. Establishing the Company's mission, business objectives, business strategies, policies detailed in each work program/activity budget. Review of the vision and mission is carried out at least once every 3 (three) years or at any time if adjustments are needed.
b. To endeavor and ensure the implementation of the Company's strategy in order to achieve the goals/objectives that have been set.
c. Prepare the Company's development plan and submit it to the Board of Commissioners and Shareholders for ratification.
d. Prepare and establish policies, procedures and guidelines for the preparation of RJPP and RKAP.
e. Develop/prepare RJPP.
f. Prepare the RKAP as an elaboration of the annual plan of the RJPP.
g. Strive to achieve the short-term targets stated in the RKAP.

4. Sistem Pengendalian Intern
a. Keaktifan dan ketertiban Direksi, Dewan Komisaris, dan para Manajer Wilayah Penjualan, Manajer Pabrik Produk Beton, dan unit kerja lainnya dalam berinteraksi secara wajar dalam seluruh proses manajemen.
b. Interaksi yang wajar antara SPI, Komite Audit, dan Auditor Eksternal dalam seluruh proses kerjanya dengan menggunakan metode yang layak, berkecukupan, dan dapat diterima.
c. Dalam melaksanakan peran pengawasan internal hendaknya tetap mempertahankan azas manfaat dan menjaga kewibawaan manajemen serta memperhatikan pandangan dari pihak pelaksana proses.

4. Internal Control System
a. Activeness and orderliness of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sales Area Managers, Concrete Product Plant Managers, and other work units in interacting reasonably in the entire management process.
b. Reasonable interaction between SPI, Audit Committee, and External Auditors in all their work processes by using appropriate, sufficient, and acceptable methods.
c. In carrying out the role of internal supervision, it should maintain the principle of benefit and maintain the authority of management and pay attention to the views of the process implementers.

5. Manajemen Risiko Direksi menerapkan manajemen risiko dan melaksanakan secara konsisten mencakup:
   a. Identifikasi risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis-jenis risiko yang relevan dan berpotensi akan terjadi.
   b. Pengukuran risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak, dan probabilitas dari risiko yang telah diidentifikasi.
   c. Pedoman penanganan risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menangani apabila terjadi suatu risiko tertentu.
   d. Pemantauan risiko, yaitu proses pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko, melakukan pengukuran dampak risiko yang terjadi dan melakukan koreksi terhadap Pedoman Penangan Risiko apabila dampak yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan.
   e. Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang dilakukan di dalam Perusahaan.
   f. Pelaporan dan pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem manajemen risiko yang dilaksanakan Perusahaan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
   g. Direksi membuat rencana kerja Perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.
   h. Dalam hal tindakan Perusahaan untuk menangani risiko yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi mengajukan usulan kepada Dewan Komisaris/RUPS.

6. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
   a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan, sesuai dengan peraturan OJK.
   b. Direksi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan atau disampaikan kepada Wali Amanat. Penawaran Umum tersebut meliputi saham, obligasi atau efek yang dapat dikonversikan menjadi saham.
   c. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK dan Wali Amanat sebagaimana dimaksud huruf b, dibuat secara berkala setiap triwulan (Maret, Juni, September, dan Desember). Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

5. Risk Management The Board of Directors implements risk management and consistently performs the following:
   a. Risk identification, which is a process to recognize the types of risks that are relevant and potentially will occur.
   b. Risk measurement, which is a process to measure the magnitude of impact, and probability of the risks that have been identified.
   c. Risk handling guidelines, which is a process to determine the efforts that must be made to handle if a certain risk occurs.
   d. Risk monitoring, which is the process of monitoring the implementation of risk management, measuring the impact of risks that occur and making corrections to the Risk Handling Guidelines if the impact that occurs is not as expected.
   e. Evaluation, which is the process of reviewing the overall adequacy of risk management activities carried out in the Company.
   f. Reporting and disclosure, which is the process to report the risk management system implemented by the Company along with its disclosure to related parties in accordance with applicable regulations.
   g. The Board of Directors shall develop the Company's work plan to implement the risk management policy.
   h. In terms of the Company's actions to handle risks that must be approved by the Board of Commissioners, the Board of Directors submits a proposal to the Board of Commissioners/RUPS.

6. Openness and Confidentiality of Information
   a. Business merger, share purchase, business consolidation, or establishment of joint venture, in accordance with OJK regulations.
   b. The Board of Directors must submit a report on the realization of the use of proceeds from the Public Offering to OJK. The realization of the use of proceeds from The realization of the use of proceeds from the Public Offering must also be accounted for at the Annual General Meeting of Shareholders, and or submitted to the Trustee. The Public Offering includes shares, bonds or securities that can be converted into shares.
   c. Accountability for the realization of the use of funds submitted to OJK and the Trustee as referred to in letter b, is made periodically every quarter (March, June, September and December). Submission of the report no later than the 15th of the following month.

d. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan secara berkala setiap tahun.
e. Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut Direksi wajib:
   1). Melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya.
   2). Perubahan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum Saham harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.
   3). Perubahan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum obligasi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui Rapat Umum Pemegang Obligasi.
   4). Dalam hal penggunaan dana tersebut dipinjamkan kepada Anak Perusahaan atau afiliasinya, agar dijelaskan alokasi penggunaan dana setelah dana tersebut dikembalikan kepada Perusahaan.
f. Perubahan penggunaan dana tersebut mencakup:
   1). Perubahan yang material dari masing-masing unsur penggunaan dana.
   2). Perubahan lokasi yang memiliki dampak ekonomis.
g. Dalam hal terdapat sisa dana perlu dijelaskan antara lain:
   1). Tempat dimana dana tersebut disimpan.
   2). Tingkat suku bunga yang diperoleh dan alokasinya.
   3). Hubungan afiliasi antara Perusahaan dengan tempat dimana dana tersebut disimpan, dan
   4). Jangka waktu penyimpanan.
h. Laporan realisasi penggunaan dana untuk pertama kalinya wajib disampaikan pada masa penyampaian laporan periode yang bersangkutan, meskipun penggunaan dananya belum mencakup 3 (tiga) bulan sejak penjatahan.
i. Realisasi penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk pertama kalinya wajib disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terdekat, meskipun penggunaan dananya belum mencakup 1 (satu) tahun sejak tanggal penjatahan.

d. Accountability for the realization of the use of funds at the Annual General Meeting of Shareholders is carried out periodically every year.
e. In the event of a change in the use of funds, the Board of Directors shall:
   1). Report in advance the plan to change the use of funds to OJK by stating the reasons and considerations.
   2). Changes in the use of funds originating from the Public Offering of Shares must obtain prior approval from the General Meeting of Shareholders.
   3). Changes in the use of funds from the Public Offering of bonds must obtain prior approval from the Trustee after being approved by the General Meeting of Bondholders.
   4). In the event that the use of funds is loaned to a Subsidiary or its affiliates, the allocation of the use of funds after the funds are returned to the Company must be explained.
f. Changes in the use of funds include:
   1). Material changes in each element of the use of funds.
   2). Changes in location that have an economic impact.
g. In the event that there are remaining funds, it is necessary to explain the following:
   1). The place where the funds are kept.
   2). The interest rate earned and its allocation.
   3). Affiliation relationship between the Company and the place where the funds are deposited, and
   4). Period of storage.
h. The report on the realization of the use of funds for the first time must be submitted during the period of submission of the relevant period report, even if the use of funds has not covered 3 (three) months since the allotment.
i. The realization of the use of funds accounted for in the Annual General Meeting of Shareholders for the first time must be submitted at the nearest Annual General Meeting of Shareholders, even though the use of funds has not covered 1 (one) year from the date of allotment.

j. Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif.

k. Direksi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, kreditur, dan Pemangku Kepentingan, antara lain mengenai:
   1). Tujuan, sasaran usaha, dan strategi Perusahaan.
   2). Status Pemegang Saham utama dan para Pemegang Saham lainnya serta informasi terkait mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Saham.
   3). Kepemilikan saham silang dan jaminan utang secara silang.
   4). Penilaian terhadap Perusahaan oleh Kantor Akuntan Publik, lembaga pemeringkat kredit, dan lembaga pemeringkat lainnya.
   5). Riwayat hidup anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan eksekutif kunci Perusahaan, serta gaji dan tunjangan mereka.
   6). Sistem pemberian honorarium untuk Kantor Akuntan Publik Perusahaan.
   7). Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk Auditor Internal, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi.
   8). Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko.
   9). Informasi material mengenai pegawai Perusahaan dan Pemangku Kepentingan.
   10). Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perusahaan.
   11). Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang berlangsung.
   12). Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

l. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.

m. Direksi harus aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip GCG dan masalah material yang dihadapi Perusahaan.

j. The Board of Directors shall disclose important information in the Company's Annual Report and Financial Statements to other parties in accordance with the prevailing laws and regulations in a timely, accurate, clear, and objective manner.

k. The Board of Directors must take the initiative to disclose not only matters required by laws and regulations but also matters that are important for decision making by Shareholders, the Board of Commissioners, creditors, and Stakeholders, among others regarding:
   1). The Company's objectives, business goals and strategies.
   2). Status of major shareholders and other shareholders and related information on the exercise of shareholders' rights.
   3). Cross-shareholding and cross-guarantee of debt.
   4). Assessment of the Company by the Public Accounting Firm, credit rating agencies, and other rating agencies.
   5). Curriculum vitae of members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and key executives of the Company, as well as their salaries and benefits.
   6). The honorarium system for the Company's Public Accounting Firm.
   7). The payroll and benefits system for the Internal Auditor, members of the Board of Commissioners, and the Board of Directors.
   8). Anticipated material risk factors, including management's assessment of the business climate and risk factors.
   9). Material information about the Company's employees and Stakeholders.
   10). Material claims filed by and/or against the Company, and cases before judicial bodies or arbitration bodies involving the Company.
   11). Conflicts of interest that may occur and/or are ongoing.
   12). Implementation of the Good Corporate Governance Guidelines.

l. The Board of Directors is obliged to submit a report to the Board of Commissioners first before it is submitted to the Shareholders.

m. The Board of Directors must actively disclose the implementation of Good Corporate Governance principles and material issues faced by the Company.

n. Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan Perusahaan dan memastikan agar informasi yang bersifat rahasia tidak diungkapkan sampai pengumuman mengenai hal tersebut diumumkan kepada masyarakat.

o. Anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung memuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perusahaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.

p. Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung.

q. Perusahaan wajib melaporkan kepada OJK atas setiap pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor dalam Perusahaan Terbuka.

r. Kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka untuk Pihak sebagaimana dimaksud pada huruf q berlaku atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari saham yang disetor dalam Perusahaan Terbuka baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi.

s. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf p dan q wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut.

t. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf p, q, dan r paling sedikit meliputi:
   1) Nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan.
   2). Nama saham Perusahaan Terbuka.
   3). Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah.
   4). transaksi Jumlah saham yang dibeli atau dijual.
   5). Harga pembelian atau penjualan per saham.
   6). Tanggal transaksi.
   7). Tujuan dari transaksi.
   8). Status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung).
   9). Dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung, diungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka untuk kepentingan pemilik manfaat.

n. The BOD is responsible for maintaining the confidentiality of the Company and ensuring that confidential information is not disclosed until an announcement regarding it is made to the public.

o. Members of the Board of Directors are prohibited, either directly or indirectly, from making false statements about material facts or failing to disclose material facts so that the statements made are not misleading about the state of the Company at the time the statements are made.

p. Members of the Board of Directors or Members of the Board of Commissioners must report to the Financial Services Authority on their ownership and any changes in their ownership of Public Company shares, either directly or indirectly. 111

q. The Company shall report to OJK on each party that owns shares, either directly or indirectly, of at least 5% (five percent) of the paid-up capital in a Public Company. 112

r. The obligation to report changes in ownership of Public Company shares for the Parties as referred to in letter q applies to any change in ownership of at least 0.5%(zero point five percent) of the paid-up shares in the Public Company either in 1 (one) or several transactions. 113

s. The report as referred to in letters p and q must be submitted no later than 10 (ten) days after the occurrence of ownership or change in ownership of the shares of the Public Listed Company. 114

t. The report as referred to in letters p, q, and r shall at least include:
   1). Name, residence, and citizenship.
   2). Name of the shares of the Public Listed Company.
   3). Number of shares and percentage of share ownership before and after the transaction.
   4). Number of shares purchased or sold.
   5). The purchase or sale price per share.
   6). Date of the transaction.
   7). Purpose of the transaction.
   8). Share ownership status (direct or indirect).
   9). In the case of indirect share ownership, disclose information regarding the shareholders recorded in the register of shareholders of the Public Listed Company for the benefit of the beneficial owner.

u. Anggota Direksi bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian Pemegang Saham sebagai akibat pelanggaran memberikan pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material sehingga menyesatkan mengenai keadaan Perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

v. Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas ketentuan sebagaimana dimaksud huruf u apabila anggota Direksi yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.

7. Etika Berusaha dan Anti Korupsi

a. Direksi berkewajiban untuk mengembangkan dan memimpin penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta melakukan pengukuran terhadap penerapannya.

b. Direksi berkewajiban memantau dan mendorong dilaksanakannya *Code of Conduct* oleh semua insan Perusahaan.

c. Anggota Direksi dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah dan atau pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Direksi berkewajiban untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi yang disebabkan adanya benturan kepentingan.

e. Direksi menetapkan kebijakan tentang kepatuhan pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

f. Direksi menetapkan kebijakan tentang pengendalian gratifikasi dan memantau pelaksanaannya.

g. Direksi menetapkan kebijakan tentang sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (*whistle blowing system*), menindaklanjuti setiap informasi/pengaduan yang diterima dan melindungi kerahasiaan pelapor.

h. Direksi berkewajiban untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi yang disebabkan adanya benturan kepentingan.

u. Members of the Board of Directors are individually and jointly liable for the loss of Shareholders as a result of the violation of giving untrue statements regarding material facts or not disclosing material facts so as to mislead about the condition of the Company in accordance with the prevailing laws and regulations.

v. Members of the Board of Directors cannot be held individually or jointly and severally liable for the provisions referred to in letter u if the member of the Board of Directors concerned has taken sufficient care in determining that the statement is true and not misleading.

7. Business Ethics and Anti-Corruption

a. The Board of Directors is obliged to develop and lead the implementation of Good Corporate Governance and to measure its implementation.

b. The Board of Directors is obliged to monitor and encourage the implementation of the Code of Conduct by all Company personnel.

c. Members of the Board of Directors are prohibited from giving or offering, or accepting, either directly or indirectly, anything of value to government officials and or other parties that may influence or in return for what they have done and other actions in accordance with applicable laws and regulations.

d. The Board of Directors is obliged to prevent personal gain due to conflict of interest.

e. The Board of Directors establishes a policy on compliance with the The State Official Wealth Report (LHKPN).

f. The Board of Directors establishes a policy on gratification control and monitors its implementation.

g. The Board of Directors establishes a policy on the reporting system for alleged irregularities in the Company (whistle blowing system), follows up on any information/complaints received and protects the confidentiality of the reporter.

h. The Board of Directors is obliged to prevent personal gain due to conflict of interest.

8. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
   a. Untuk meningkatkan hubungan dengan Pemangku Kepentingan, Direksi menetapkan kebijakan operasi Perusahaan yang mengatur hubungan dan kewajiban terhadap Pemangku Kepentingan sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
   b. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta bebas dari segala bentuk tekanan dan pelecehan/*harassment*.

9. Sistem Akuntansi dan Pembukuan
   a. Direksi wajib menyusun Laporan Keuangan Berkala dan menyampaikan kepada OJK paling sedikit 2 (dua) eksemplar, satu di antaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan salinan elektronik (*soft copy*). Laporan Keuangan Berkala yang dimaksud adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan Perusahaan yang terdiri dari:
      1). Laporan posisi keuangan (neraca).
      2). Laporan laba rugi komprehensif.
      3). Laporan perubahan ekuitas.
      4). Laporan arus kas.
      5). Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika Perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, wajib membuat penyajian kembali pos-pos dalam keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya, dan
      6). Catatan atas laporan keuangan.
   b. Dalam penyajian Laporan Keuangan Berkala harus dinyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan.
   c. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Berkala wajib mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Keuangan terkini sepanjang tidak dinyatakan lain oleh OJK.
   d. Apabila Perusahaan tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, maka Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada OJK wajib memuat informasi yang sama dengan Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain tersebut, dan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan. Apabila Bursa Efek di negara lain menetapkan batas waktu penyampaian dan pengumuman maka Perusahaan

8. Relationship with Stakeholders
   a. To improve relationships with Stakeholders, the Board of Directors establishes the Company's operating policies that regulate relationships and obligations to Stakeholders as stipulated in the Code of Corporate Governance.
   b. The Board of Directors shall provide a safe and healthy working environment that is free from all forms of pressure and harassment/harassment.

9. Accounting and Bookkeeping System
   a. The Board of Directors shall prepare Periodic Financial Statements and submit to OJK at least 2 (two) copies, one of which is in original form, and accompanied by an electronic copy report (soft copy). The Periodic Financial Statements referred to are the annual financial statements and semi-annual financial statements of the Company consisting of:
      1). Statement of financial position (balance sheet).
      2). Comprehensive income statement.
      3). Statement of changes in equity.
      4). Cash flow statement.
      5). Statement of financial position at the beginning of the comparative period, if the Company applies accounting policies retrospectively, is required to restate financial items or reclassify items in its financial statements, and
      6). Notes to the financial statements.
   b. In the presentation of Periodic Financial Statements, it must be stated that the notes to the financial statements are an integral part of the financial statements.
   c. The preparation of Periodic Financial Statements must follow the provisions of the latest Financial Accounting Standards as long as not stated otherwise by OJK.
   d. If the Company is listed on the Stock Exchange in Indonesia and the Stock Exchange in another country, the Periodic Financial Statements submitted to the OJK must contain the same information as the Periodic Financial Statements submitted to the capital market authorities in the other country, and at least fulfill the provisions as stipulated in the OJK regulations related to the presentation and disclosure of financial statements. If the Stock Exchange in another country sets a deadline for submission and announcement, the Company may submit Periodic Financial Statements following the provisions of the

dapat menyampaikan Laporan Keuangan Berkala mengikuti ketentuan otoritas pasar modal di negara lain tersebut dan tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada OJK paling lambat sama dengan tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada otoritas pasar modal di negara lain.

e. Laporan Keuangan Tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
f. Laporan Keuangan Tahunan wajib disertai dengan Laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.
g. Laporan Keuangan Tahunan wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan. Pengumuman Laporan Keuangan tahunan kepada masyarakat wajib dilakukan paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1). Laporan Keuangan Tengah Tahunan yang diumumkan paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan Opini Akuntan.
    2). Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) wajib sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada OJK.
    3). Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.
h. Laporan Keuangan Tengah Tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kecuali untuk laporan posisi keuangan (neraca) per akhir periode tengah tahunan yang diperbandingkan dengan laporan posisi keuangan (neraca) per akhir tahun buku sebelumnya.
i. Laporan Keuangan Tengah Tahunan wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu sebagai berikut:
    1). Paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal Laporan Keuangan Tengah Tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan;
    2). Paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal Laporan Keuangan Tengah Tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan

capital market authority in the other country and the date of submission and announcement of Periodic Financial Statements to OJK is no later than the date of submission and announcement of Periodic Financial Statements to the capital market authority in the other country.

e. Annual Financial Statements must be presented on a comparative basis with the same period of the previous year.
f. Annual Financial Statements must be accompanied by an Accountant's Report in order to audit the financial statements.
g. Annual Financial Statements must be submitted to OJK and announced to the public no later than the end of the third month after the date of the Annual Financial Statements. The announcement of the Annual Financial Statements to the public must be made in at least one daily newspaper in Indonesian language with national circulation, with the following provisions:
    1). The Annual Financial Statements announced include at least the statement of financial position (balance sheet), statement of comprehensive income, cash flow statement, and Accountant's Opinion.
    2). The form and content of the report as referred to in point 1) must be the same as that presented in the annual financial report submitted to OJK.
    3). Evidence of the announcement must be submitted to OJK no later than 2 (two) business days after the date of the announcement.
h. The Semi-Annual Financial Statements must be presented in comparison with the same period in the previous year, except for the statement of financial position (balance sheet) as of the end of the semi-annual period which is compared with the statement of financial position (balance sheet) as of the end of the previous fiscal year.
i. The Semi-Annual Financial Statements must be submitted to OJK and announced to the public within the following period:
    1). No later than the end of the first month after the date of the Semi-Annual Financial Statements, if not accompanied by an Accountant's report;
    2). No later than the end of the second month after the date of the Semi-Annual Financial Statements, if accompanied by an Accountant's report in the context of a limited review; and

3). Paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal Laporan Keuangan Tengah Tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.

j. Pengumuman Laporan Keuangan Tengah Tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf h wajib dilakukan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1). Laporan Keuangan Tengah Tahunan yang diumumkan paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas.
   2). Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) wajib sama dengan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tengah Tahunan yang disampaikan kepada OJK.
   3). Dalam hal Laporan Keuangan Tengah Tahunan disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan, maka pengumuman tersebut wajib memuat Opini Akuntan.
   4). Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.
k. Dalam hal Laporan Keuangan Berkala mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian, maka pengumuman laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan, wajib pula memuat paragraf penjelasan Akuntan atas opininya.
l. Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala jatuh pada hari libur, maka Laporan Keuangan Berkala wajib disampaikan pada satu hari kerja berikutnya.
m. Membuat Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dan bermeterai cukup dan dilekatkan pada laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuat termasuk kerugian yang mungkin ditimbulkan.
n. Menyusun sistem akuntansi dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern yang kuat, terutama dilakukan pemisahan antara fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.

3). No later than the end of the third month after the date of the Semi-Annual Financial Statements, if accompanied by an Accountant's report in the context of an audit of the financial statements.

j. Announcement of Semi-Annual Financial Statements as referred to in letter h must be made in at least one daily newspaper in Indonesian language with national circulation, with the following provisions:
   1). The announced Semi-Annual Financial Statements include at least the statement of financial position (balance sheet), statement of comprehensive income, and cash flow statement.
   2). The form and content of the report as referred to in point 1) must be the same as that presented in the Semi-Annual Financial Statements submitted to OJK.
   3). In the event that the Semi-Annual Financial Statements are accompanied by an Accountant's report in the context of an audit of the financial statements, the announcement must contain the Accountant's Opinion.
   4). Evidence of the announcement must be submitted to OJK no later than 2 (two) business days after the date of the announcement.
k. In the event that the Periodic Financial Statements receive an opinion other than unqualified, the announcement of the annual and semi-annual financial statements must also contain the Accountant's explanatory paragraph on the opinion.
l. In the event that the deadline for submission of Periodic Financial Statements falls on a holiday, the Periodic Financial Statements must be submitted on the next business day.
m. Make a Statement Letter of the Board of Directors Regarding Responsibility for Financial Statements in accordance with the provisions stipulated by OJK. The Statement Letter shall be signed by the President Director and a Director in charge of accounting or finance and shall bear sufficient seal and shall be attached to the financial statements submitted to OJK. The Board of Directors is jointly and severally liable for the statements made including any losses that may be incurred.
n. Prepare an accounting system based on Financial Accounting Standards and based on strong internal control principles, especially the separation between management, recording, storage, and supervision functions.

o. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi Perusahaan.

10. Tugas dan Kewajiban Lain
    a. Direksi berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara setelah diangkat sebagai anggota Direksi.
    b. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    c. Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris.
    d. Direksi menetapkan kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.
    e. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.

o. Organize and maintain the Company's bookkeeping and administration in accordance with the prevalence applicable to the Company.

10. Other Duties and Obligations
    a. Directors are obliged to submit the State Official's Asset Report after being appointed as a member of the Board of Directors.
    b. Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and those stipulated by the General Meeting of Shareholders based on.
    c. The Board of Directors shall report the implementation of the performance management system to the Board of Commissioners.
    d. The Board of Directors establishes policies regarding the Company's social and environmental responsibilities.
    e. The Board of Directors shall organize quality and effective internal supervision.



TUGAS MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF EACH MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Tugas dan tanggung jawab individu anggota Direksi telah dijelaskan dalam Surat Keputusan No.SK.01.01/WB-0A.0060/2025 tentang Tugas dan Wewenang Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2025. Maka, pembagian tugas Direksi menjadi sebagai berikut:

The duties and responsibilities of individual members of the Board of Directors have been outlined in Decree No. SK.01.01/WB-0A.0060/2025 concerning the Duties and Authorities of the Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk, issued on July 1, 2025. Accordingly, the division of duties of the Board of Directors is as follows:

No	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	
1	Nama Name	Kuntjara
	Jabatan Position	Direktur Utama President Director

Tugas:
Duties:

a. Menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang/Pendek (RJP) Perusahaan.
   Determining the Company's Budget Plan and Long & Short-term Plan.
b. Merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi perusahaan serta pemeliharaan dan peningkatan Citra Perusahaan untuk mendukung pencapaian Sasaran Perusahaan.
   Planning, developing, and implementing company's strategies, alongside maintaining and enhancing Corporate Image to support the achievement of Company's objectives.
c. Memastikan prosedur operasi, kebijakan dan standar perusahaan berjalan dengan optimal untuk mendukung pencapaian sasaran Perusahaan.
   Ensuring operational procedures, policies, and standards of the Company are effectively implemented to support the achievement of the Company's objectives.
d. Memastikan proses bisnis Perusahaan berjalan sesuai dengan Peraturan dan Kebijakan yang berlaku.
   Ensuring the business process of the Company in line with the prevailing regulation.
e. Memastikan target Perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
   Ensuring that the Company's determined target could be reached.
f. Menjamin keberlangsungan kepemimpinan dan kaderisasi (suksesi) di Perusahaan.
   Ensuring the leadership continuity and regeneration (succession) within the Company.
g. Menjamin tercapainya target Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR), Sistem Manajemen ISO, Manajemen Risiko, dan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Environmental, Social and Governance (ESG) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
   Ensuring the achievement of Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR), ISO Management System, Risk Management, Health, and Occupational Health, Safety, and Environmental Management Systems (SMK3L), Anti-Bribery Management System (ABMS), Environmental, Social, and Governance (ESG), and Information Security Management System.
h. Melaporkan Kinerja Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
   Reporting the performance of the Company to the Board of Commissioners and Shareholders in the General Meeting of Shareholders (GMS).

Tanggung Jawab:
Responsibilities:

a. Terlaksananya perencanaan strategi, kebijakan, dan sasaran Perusahaan.
   Planning strategies, policies, and targets for the Company.
b. Terlaksananya pengawasan/monitor secara periodik.
   Performing periodic supervision/monitoring.
c. Terlaksananya pengambilan keputusan akhir untuk kegiatan Perusahaan yang berskala besar.
   Ensuring the making of final decisions for the Company's large-scale.
d. Terlaksananya monitor hasil audit oleh SPI.
   Monitoring results of audits conducted by the Head of Internal Audit Unit .
e. Terlaksananya kegiatan kesekretariatan Perusahaan.
   Implementing effective corporate secretarial activities
f. Terkendalinya pencapaian kinerja organisasi pada fungsi Satuan Pengawasan Intern, Sekretariat Perusahaan, dan seluruh Direktorat, serta memastikan penerapan Good Corporate Governance (GCG), Sistem Manajemen ISO, Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L), Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Environmental, Social and Governance (ESG dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
   Ensuring the controlled achievement of organizational performance across the Internal Audit Unit, Corporate Secretariat, and all Directorates, while also ensuring the implementation of Good Corporate Governance (GCG), ISO Management Systems, Occupational Health, Safety and Environmental Management System (SMK3L), Risk Management System, Anti-Bribery Management System (ABMS), Environmental, Social and Governance (ESG), and Information Security Management System.

No	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	
2	Nama Name	Rija Judaswara
	Jabatan Position	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Development

Tugas:
Duties:

a. Menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang/Pendek (RJP) Perusahaan pada fungsi Pemasaran, Penjualan, Sistem Informasi, dan Manajemen sesuai dengan sasaran Perusahaan.
Formulating Work Plan and Budget (RKAP) and Long/Short Term Plan of the Company within the functions of Marketing, Sales, Information Systems, and Management in line with the Company's objectives.

b. Menetapkan Arah Pengembangan dan membuat keputusan strategis dalam fungsi Pemasaran, Penjualan, Sistem Informasi dan Manajemen sesuai dengan sasaran Perusahaan.
Establishing the direction of development and making strategic decisions in the functions of Marketing, Sales, Information Systems, and Management in line with the Company's objectives.

c. Menetapkan sasaran Jangka Panjang dan Jangka Pendek Perusahaan, Kebijakan dan Peraturan di fungsi Pemasaran, Penjualan, Sistem Informasi dan Manajemen.
Establishing long-term and short-term corporate goals, policies and regulations in the function of Marketing, Sales, Information Systems, and Management.

d. Mengembangkan strategi yang berkelanjutan dalam pengelolaan Pemasaran, Penjualan, Sistem Informasi dan Manajemen untuk mendukung pencapaian sasaran Perusahaan.
Developing sustainable strategies in managing Marketing, Sales, Information Systems, and Management to support the achievement of the Company's objectives.

e. Memastikan jalannya organisasi sesuai dengan arahan strategi yang telah ditetapkan.
Ensuring the organization operates in accordance with the established strategic direction.

f. Mengamankan penguasaan pasar, pemanfaatan informasi pasar dan potensinya untuk pengembangan bisnis Perusahaan serta tersedianya Sistem Informasi dan Manajemen yang tepat guna untuk mendukung pencapaian sasaran Perusahaan.
Securing market positioning, leveraging market intelligence and its potential for the Company's business development, and ensuring the availability of appropriate Information Systems and Management to support the achievement of the Company's objectives.

g. Memastikan jalannya kaderisasi yang optimal melalui pembinaan yang berkelanjutan dan terarah pada Direktoratnya.
Ensuring the effective implementation of succession planning through continuous and structured development within the Directorate.

h. Memastikan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif yang mendukung peningkatan profesionalisme dan produktivitas pegawai.
Ensuring the creation of a conducive work environment that supports the enhancement of employee professionalism and productivity.

i. Menjamin tercapainya target dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), Sistem Manajemen ISO, Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Environmental, Social and Governance (ESG) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
Ensuring the achievement of targets in implementing Good Corporate Governance (GCG), ISO Management Systems, Risk Management System, Anti-Bribery Management System (ABMS), Environmental, Social and Governance (ESG), and Information Security Management System.

j. Melaporkan Kinerja Perusahaan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Reporting the Company's performance to the President Director, the Board of Commissioners, and the Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS).

Tanggung Jawab:
Responsibilities:

a. Terlaksananya perencanaan strategi, kebijakan dan sasaran Perusahaan.
Strategic planning, Policy and Company's target.

b. Terlaksananya pengawasan/monitor secara periodik.
Periodic monitoring and supervision.

c. Terlaksananya pengambilan keputusan akhir untuk kegiatan Pemasaran, Penjualan, Sistem Informasi dan Manajemen Perusahaan.
Executing final decision-making for Marketing, Sales, Information Systems, and Corporate Management activities.

d. Terkendalinya pencapaian kinerja Pemasaran, Penjualan, Sistem Informasi dan Manajemen, serta memastikan penerapan Good Corporate Governance (GCG), Sistem Manajemen ISO, Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L), Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Environmental, Social and Governance (ESG) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
Ensuring the controlled achievement of performance in Marketing, Sales, Information Systems, and Management, while also ensuring the implementation of Good Corporate Governance (GCG), ISO Management Systems, Occupational Health, Safety and Environmental Management System (SMK3L), Risk Management System, Anti-Bribery Management System (ABMS), Environmental, Social and Governance (ESG), and Information Security Management System.

No	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	
3	Nama Name	Syailendra Ogan
	Jabatan Position	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital and Risk Management

Tugas:
Duties:

a. Menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang / Pendek (RJP) pada fungsi Keuangan, Human Capital, Manajemen Risiko dan Legal.
Establishing the Work Plan and Budget as well as Long-term and Short-term Plans of the Company within the functions of Finance, Human Capital, Risk Management, and Legal.
b. Menetapkan arah pengembangan dan membuat keputusan strategis dalam fungsi Keuangan, Human Capital, Manajemen Risiko dan Legal sesuai dengan sasaran Perusahaan.
Establishing the direction of development and making strategic decisions within the functions of Finance, Human Capital, Risk Management, and Legal in line with the Company's objectives.
c. Menetapkan Sasaran Jangka Panjang dan Jangka Pendek Perusahaan, Kebijakan dan Peraturan di fungsi Keuangan, Human Capital, Manajemen Risiko dan Legal.
Establishing long and short term goals for the Company, policies and regulations in the functions of Finance, Human Capital, Risk Management and Legal.
d. Mengembangkan Strategi yang berkelanjutan dalam fungsi Keuangan, Human Capital, Manajemen Risiko dan Legal Perusahaan.
Developing sustainable strategies within the Company's Finance, Human Capital, Risk Management, and Legal functions.
e. Memastikan jalannya organisasi sesuai dengan arahan strategis yang telah ditetapkan.
Ensuring the organization operates in accordance with the established strategic direction.
f. Memastikan jalannya strategi Keuangan yang optimal guna mendukung pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan, serta memastikan penerapan strategi Human Capital, Manajemen Risiko, dan Legal guna mendukung pencapaian sasaran Perusahaan.
Ensuring the effective implementation of financial strategies to support the Company's sustainable growth, while also ensuring the implementation of Human Capital, Risk Management, and Legal strategies to support the achievement of the Company's objectives.
g. Memastikan jalannya kaderisasi yang optimal melalui pembinaan yang berkelanjutan dan terarah pada Direktoratnya.
Ensuring the effective implementation of succession planning through continuous and structured development within the Directorate.
h. Memastikan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif yang mendukung peningkatan profesionalisme dan produktivitas pegawai.
Ensuring the creation of a conducive work environment that supports the enhancement of employee professionalism and productivity.
i. Menjamin tercapainya target dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), Sistem Manajemen ISO, Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Environmental, Social and Governance (ESG) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
Ensuring the achievement of targets in the implementation of Good Corporate Governance (GCG), ISO Management Systems, Risk Management System, Occupational Health, Safety and Environmental Management System (SMK3L), Anti-Bribery Management System (ABMS), Environmental, Social and Governance (ESG), and Information Security Management System.
j. Melaporkan Kinerja Perusahaan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Reporting the Company's performance to the President Director, the Board of Commissioners, and the Shareholders at the General Meeting of Shareholders.

Tanggung Jawab:
Responsibilities:

a. Terlaksananya perencanaan strategi, kebijakan dan sasaran Perusahaan
Implementing the Company's strategic planning, policies, and objectives.
b. Terlaksananya pengawasan/monitor secara periodik.
Implementing periodic supervisory/monitoring.
c. Terlaksananya pengambilan keputusan akhir untuk kegiatan Keuangan, Human Capital serta Manajemen Risiko dan Legal.
Implementing final decision-making for Finance, Human Capital, Risk Management, and Legal activities.
d. Terkendalinya pencapaian kinerja Keuangan, Human Capital, Manajemen Risiko, dan Legal, penerapan Good Corporate Governance (GCG), Sistem Manajemen ISO, Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Environmental, Social and Governance (ESG) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
Ensuring the controlled achievement of performance in Finance, Human Capital, Risk Management, and Legal, while also ensuring the implementation of Good Corporate Governance (GCG), ISO Management Systems, Occupational Health, Safety and Environmental Management System (SMK3L), Anti-Bribery Management System (ABMS), Environmental, Social and Governance (ESG), and Information Security Management System.

No	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
4	Nama / Name: Verly Widiantoro Jabatan / Position: Direktur Teknik dan Produksi / Director of Engineering and Production

Tugas:
Duties:

a. Menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang / Pendek (RJP) pada fungsi Transformation, Engineering, Quality, dan Produksi Precast.
Determining the Company's Annual Work Plan and Budget (RKAP) and Long/Short-Term Plan within the functions of Transformation, Engineering, Quality, and Precast Production.

b. Menetapkan arah pengembangan dan membuat keputusan strategis dalam fungsi Transformation, Engineering, Quality dan Produksi Precast.
Establishing the direction of development and making strategic decisions within the functions of Transformation, Engineering, Quality, and Precast Production.

c. Menetapkan sasaran jangka panjang dan jangka pendek Perusahaan, kebijakan dan peraturan di fungsi Transformation, Engineering, Quality, dan Produksi Precast.
Establishing the Company's long-term and short-term objectives, policies, and regulations within the functions of Transformation, Engineering, Quality, and Precast Production.

d. Mengembangkan strategi yang berkelanjutan dalam pengelolaan Transformation, Engineering, Quality dan Produksi Precast untuk mendukung pencapaian sasaran Perusahaan.
Developing sustainable strategies in managing Transformation, Engineering, Quality, and Precast Production to support the achievement of the Company's objectives.

e. Memastikan jalannya organisasi sesuai dengan arahan strategi yang telah ditetapkan.
Ensuring the organization aligned with the established strategic direction.

f. Memastikan jalannya strategi yang optimal dalam mengelola fungsi Transformation, Engineering, Quality dan Produksi Precast guna mendukung pencapaian sasaran Perusahaan.
Ensuring the effective implementation of strategies in managing Transformation, Engineering, Quality, and Precast Production to support the achievement of the Company's objectives.

g. Memastikan jalannya kaderisasi yang optimal melalui pembinaan yang berkelanjutan dan terarah pada Direktoratnya.
Ensuring the effective implementation of succession planning through continuous and structured development within the Directorate.

h. Memastikan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif yang mendukung peningkatan profesionalisme dan produktivitas pegawai.
Ensuring the creation of a conducive work environment that supports the enhancement of employee professionalism and productivity.

i. Menjamin tercapainya target dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), Sistem Manajemen ISO, Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Environmental, Social, and Governance (ESG) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
Ensuring the achievement of targets in the implementation of Good Corporate Governance (GCG), ISO Management Systems, Risk Management System, Occupational Health, Safety and Environmental Management System (SMK3L), Anti-Bribery Management System (ABMS), Environmental, Social, and Governance (ESG), and Information Security Management System.

j. Melaporkan kinerja Perusahaan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Reporting the Company's performance to the President Director, the Board of Commissioners, and the Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS).

Tanggung Jawab:
Responsibilities:

a. Terlaksananya perencanaan strategi, kebijakan, dan sasaran Perusahaan.
Implementing effective strategic planning, policies, and objectives of the Company.

b. Terlaksananya pengawasan/monitor secara periodik.
Implementing periodic supervisory/monitoring.

c. Terlaksananya pengambilan keputusan akhir untuk kegiatan Transformation, Engineering, Quality, dan Produksi Precast.
Implementing final decision-making for Transformation, Engineering, Quality, and Precast Production activities.

d. Terkendalinya pencapaian kinerja Transformation, Engineering, dan Quality, Produksi Precast penerapan Good Corporate Governance (GCG), Sistem Manajemen ISO, Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L), Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Environmental, Social and Governance (ESG) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
Ensuring the controlled achievement of performance in Transformation, Engineering, Quality, and Precast Production, as well as the implementation of Good Corporate Governance (GCG), ISO Management Systems, Occupational Health, Safety and Environmental Management System (SMK3L), Risk Management System, Anti-Bribery Management System (ABMS), Environmental, Social and Governance (ESG), and Information Security Management System.

No	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	
5	Nama Name	Agus Pramono
	Jabatan Position	Direktur Operasi dan Supply Chain Management Director of Operation and Supply Chain Management

Tugas:
Duties:

a. Menetapkan Rencana Kerja Anggaran Dasar Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang/Pendek (RJP) Perusahaan pada fungsi Operasi, Supply Chain Management dan Health, Safety and Environment.
Establishing the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Long-Term/Short-Term Plans (RJP) within the functions of Operations, Supply Chain Management, and Health, Safety, and Environment.

b. Menetapkan arah pengembangan dan membuat keputusan strategis dalam fungsi Operasi/Jasa, Pengelolaan Material, Supply Chain Management, Health, Safety and Environment.
Establishing the direction of development and making strategic decisions within the functions of Operations/Services, Material Management, Supply Chain Management, and Health, Safety, and Environment.

c. Menetapkan sasaran jangka panjang dan jangka pendek Perusahaan, Kebijakan, dan peraturan di fungsi Operasi, Supply Chain Management, dan Health, Safety and Environment.
Establishing the Company's long-term and short-term objectives, policies, and regulations within the functions of Operations, Supply Chain Management, and Health, Safety, and Environment.

d. Mengembangkan strategi yang berkelanjutan dalam pengelolaan mutu produk dan pelayanan yang meliputi Pengembangan Operasi, Supply Chain Management, dan Health, Safety, and Environment, untuk mendukung pencapaian sasaran Perusahaan.
Developing sustainable strategies in managing product quality and services, including Operations Development, Supply Chain Management, and Health, Safety, and Environment, to support the achievement of the Company's objectives.

e. Memastikan jalannya organisasi sesuai dengan arahan strategi yang telah ditetapkan.
Ensuring the organization aligned with the established strategic direction.

f. Memastikan strategi yang optimal dalam upaya efisiensi, konsistensi mutu, pelayanan dan efektivitas biaya jasa melalui penerapan sistem manajemen dan teknologi yang tepat guna untuk mendukung pencapaian sasaran Perusahaan.
Ensuring the optimal implementation of strategies to achieve efficiency, consistent quality, service excellence, and cost-effectiveness of services through the application of appropriate management systems and technologies to support the achievement of the Company's objectives.

g. Memastikan jalannya kaderisasi yang optimal melalui pembinaan yang berkelanjutan dan terarah pada Direktoratnya.
Ensuring the effective implementation of succession planning through continuous and structured development within the Directorate.

h. Memastikan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif yang mendukung peningkatan profesionalisme dan produktivitas pegawai.
Ensuring the creation of a conducive work environment that supports the enhancement of employee professionalism and productivity.

i. Menjamin tercapainya lingkungan kerja dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), Sistem Manajemen ISO, Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L), Environmental, Social and Governance (ESG) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
Ensuring the achievement of a conducive working environment through the implementation of Good Corporate Governance (GCG), ISO Management Systems, Risk Management System, Occupational Health, Safety and Environmental Management System (SMK3L), Environmental, Social and Governance (ESG), and Information Security Management System.

j. Melaporkan kinerja Perusahaan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Reporting the Company's performance to the President Director, the Board of Commissioners, and the shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).

Tanggung Jawab:
Responsibilities:

a. Terlaksananya perencanaan strategi dan pengambilan keputusan.
The implementation of strategic planning and decision making.

b. Terlaksananya pengawasan/monitor secara periodik.
Implementing periodic supervisory/monitoring.

c. Terlaksananya pengambilan keputusan akhir untuk kegiatan Operasi, Supply Chain Management, dan Health, Safety and Environment (HSE) Perusahaan, serta memastikan penerapan Good Corporate Governance (GCG), Sistem Manajemen ISO, dan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L), Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Environmental, Social and Governance (ESG) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
Implementing final decisions regarding the Company's operations, supply chain management, and health, safety, and environment (HSE) activities, while also ensuring the implementation of Good Corporate Governance (GCG), ISO Management Systems, Occupational Health, Safety and Environmental Management System (SMK3L), Risk Management System, Anti-Bribery Management System (ABMS), Environmental, Social and Governance (ESG), and Information Security Management System.

PERNYATAAN BAHWA DIREKSI MEMILIKI PEDOMAN ATAU PIAGAM (CHARTER) DIREKSI
STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS HAVING GUIDELINES OR CHARTER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Dalam menjalin hubungan yang baik dengan organ Perseroan lainnya terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki Tata Laksana Kerja (Board Manual) bagi Direksi, sebagai pedoman kerja Direksi yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.0035/2024 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual). Board Manual tersebut berisi panduan bagi Direksi yang berisikan, antara lain:

1. Persyaratan dan Komposisi Direksi
2. Tanggung Jawab Direksi
3. Tugas Dan Kewajiban Direksi
4. Kinerja Direksi
5. Hak dan Wewenang Direksi
6. Benturan Kepentingan Direksi
7. Independensi Direksi
8. Etika Jabatan
9. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perusahaan oleh Direksi
10. Pendelegasian Wewenang di antara Anggota Direksi Perusahaan
11. Pembagian Tugas Direksi
12. Rapat Direksi
13. Hubungan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan
14. Pengelolaan Keuangan Perusahaan
15. Sekretaris Perusahaan
16. Satuan Pengawasan Internal
17. Tim Direksi/Penggunaan Saran Profesional

Direksi dan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk menyatakan berkomitmen untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan standar moral yang tinggi serta mengacu pada praktik terbaik dan Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang dapat dilihat pada: https://www.wika-beton.co.id/pedoman-tata-kelola-perusahaan.

In maintaining good relationships with the Company's other governing organs in executing its duties and responsibilities, the Board of Directors has established a Board Manual as a working guideline. This Board Manual was approved through a Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.0035/2024 concerning the Guidelines for the Working Procedures of the Board of Commissioners and the Board of Directors (Board Manual). This Board Manual contains a guideline for the Board of Directors, is as follows:

1. Requirements and Composition of the Board of Directors
2. Responsibilities of the Board of Directors
3. Duties and Obligations of the Board of Directors
4. Performance of the Board of Directors
5. Rights and Authorities of the Board of Directors
6. Conflict of Interest of the Board of Directors
7. Independence of the Board of Directors
8. Code of Ethics
9. Establishment of Corporate Management Policies by the Board of Directors
10. Delegation of Authority among Members of the Board of Directors
11. Division of Duties of the Board of Directors
12. Board of Directors Meetings
13. Relationship with Subsidiaries and Joint Ventures
14. Corporate Financial Management
15. Corporate Secretary
16. Internal Audit Unit
17. Board Committees/Use of Professional Advisors

The Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Beton Tbk are committed to implementing Good Corporate Governance practices with high ethical standards, while adhering to best practices and the Guidelines for the Working Procedures of the Board of Commissioners and the Board of Directors, which can be accessed at: https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT DIREKSI, RAPAT DIREKSI BERSAMA DEWAN KOMISARIS, DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DALAM RAPAT TERSEBUT TERMASUK KEHADIRAN DALAM RUPS

POLICY AND IMPLEMENTATION OF BOARD OF DIRECTORS MEETING FREQUENCY, JOINT MEETINGS WITH THE BOARD OF COMMISSIONERS, AND ATTENDANCE RATE INCLUDING PARTICIPATION IN GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS (GMS

Perseroan menetapkan kebijakan yang jelas mengenai frekuensi dan pelaksanaan rapat internal Direksi maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran komunikasi dan koordinasi antara organ Perseroan, sehingga keputusan strategis yang diambil dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan dengan efektif.

Rapat internal Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris direncanakan dan disusun sebelum tahun buku berakhir untuk tahun berikutnya sebagai bagian dari *Key Performance Indicator* (KPI). Penjadwalan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak terkait dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mengalokasikan waktu yang cukup untuk membahas isu-isu strategis, operasional, dan kebijakan yang perlu dievaluasi atau diputuskan.

Kebijakan Rapat Direksi

Dalam pelaksanaan rapat internal Direksi maupun rapat bersama Dewan Komisaris, Direksi Perseroan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta penyelenggaraannya juga telah diatur dalam *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi. Board Manual mengatur Direksi setidaknya menyelenggarakan rapat internal Direksi setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Perseroan meninjau ketentuan kuorum pengambilan keputusan rapat Dewan agar selaras dengan praktik tata kelola terbaik. Perseroan mengungkapkan ketentuan kuorum yang berlaku pada board manual/piagam dewan yang dapat diakses publik.

Prosedur Penyelenggaraan Rapat Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin, paling tidak satu kali setiap bulan atau kapan pun dianggap perlu. Rapat tersebut dianggap sah dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari separuh dari total anggota Direksi yang sedang menjabat atau diwakili dalam pertemuan. Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi harus didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat, sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Manual Direksi dan Anggaran Dasar yang berlaku. Jika

The Company has established a clear policy regarding the frequency and implementation of internal meetings of the Board of Directors also joint meetings with the Board of Commissioners. This policy aims to ensure smooth communication and coordination between the Company's organs, thereby supporting the effective achievement of the Company's strategic objectives.

Internal meetings of the Board of Directors and joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners are planned and scheduled before the end of the financial year for the following year, as part of their Key Performance Indicators (KPI). This scheduling is intended to ensure that all relevant parties are well-prepared and able to allocate sufficient time to discuss strategic, operational, and policy matters that require evaluation or decision-making.

Board of Directors Meeting Policy

In conducting internal meetings of the Board of Directors and joint meetings with the Board of Commissioners, the Company's Board of Directors adheres to OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. The procedures for these meetings are also governed by the Board Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board Manual stipulates that the Board of Directors shall convene internal meetings at least once every month and joint meetings with the Board of Commissioners at least once every four months.

The Company reviews the quorum requirements for Board meeting decisions to ensure they are in line with best governance practices. The Company discloses the applicable quorum provisions in the board manual/charter, which is accessible to the public.

Board of Directors Meetings

The Board of Directors holds regular meetings at least once a month, or more frequently if necessary. A meeting is considered valid and has the authority to make binding decisions if more than half of the current Board members are present or represented. Decisions must be made based on consensus, in line with the guidelines stated in the Board Manual and the Company's Articles of Association. In the event of a tie in votes, the proposal is considered rejected. Each member has one vote and may cast an additional

terjadi persetujuan dan ketidaksetujuan yang seimbang, usulan dianggap ditolak. Setiap anggota Direksi memiliki hak untuk memberikan satu suara, dengan tambahan satu suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. Hasil rapat, termasuk pendapat yang berbeda jika ada, harus dicatat dalam risalah rapat, ditandatangani oleh pimpinan rapat, dan didokumentasikan dengan baik.

vote for each member they officially represent. The meeting outcomes, including any differing opinions, must be recorded in the meeting minutes, signed by the chairperson, and properly documented.

Pada tahun 2025, Direksi mengadakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan frekuensi dan tingkat kehadiran rapat sebagai berikut:

In 2025, the Board of Directors held a total of 21 (twenty one) internal meetings, with the following frequency and attendance rate:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Internal Direksi Pada Tahun Buku
Frequency and Attendance of Internal Board of Directors Meetings During the Fiscal Year

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Kuntjara	Direktur Utama President Director	21	20	(*)95.24%
Rija Judaswara	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Business Development	21	21	100%
Syailendra Ogan	Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	21	21	100%
Verly WIdiantoro	Direktur Teknik dan Produksi Director of Engineering and Production	21	21	100%
Agus Pramono	Direktur Operasi dan *Supply Chain Management* Director of Engineering and Production	21	21	100%

Catatan I Notes:
(*)Berhalangan hadir karena sakit pada tanggal 24 November 2025.
(*)Unable to attend due to illness on November 25, 2025

Mata Acara Rapat Internal Direksi
The Board of Directors Meeting Agenda

No	Nomor Risalah Minutes Number	Tanggal Date	Mata Acara Agenda
1	MJ.01.01/WB-0A.0001/2025	06 Januari 2025 January 06, 2025	Penyampaian update atas Environmental, Social, and Governance (ESG) dari Perusahaan S&P Global Presentation of the Company's Environmental, Social, and Governance (ESG) Update from S&P Global
2	MJ.01.01/WB-0A.0009/2025	08 Januari 2025 January 08, 2025	Penyampaian update Hasil Usaha Tahun 2024 Presentation of the 2024 Business Results Update
3	MJ.01.01/WB-0A.0019/2025	03 Februari 2025 February 03, 2025	1. Program Efisiensi Biaya Usaha Tahun 2025 2. Rencana Kerja Panitia HUT Ke-28 PT Wijaya Karya Beton Tbk 1. 2025 Business Cost Efficiency Program 2. Work Plan of the Committee for the 28th Anniversary of PT Wijaya Karya Beton Tbk
4	MJ.01.01/WB-0A.0024/2025	17 Februari 2025 February 17, 2025	Program Efisiensi Biaya Usaha Tahun 2025 2025 Business Cost Efficiency Program
5	MJ.01.01/WB-0A.0036/2025	03 Maret 2025 March 03, 2025	Stress Test PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun 2025 2025 Stress Test for PT Wijaya Karya Beton Tbk
6	MJ.01.01/WB-0A.0060/2025	21 April 2025 April 21, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi Bulan April 2025 2. Pembahasan Materi Management Review Pleno Triwulan 1 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 1. Follow-up on the April 2025 Board of Commissioners Meeting, which included the Board of Directors 2. Discussion of the Q1 Management Review Materials for PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
7	MJ.01.01/WB-0A.0070/2025	19 Mei 2025 May 19, 2025	Pembahasan Potensi Suplai Precast Concrete Sleeper di Manila Discussion on the Potential Supply of Precast Concrete Sleepers in Manila
8	MJ.01.01/WB-0A.0075/2025	05 Juni 2025 June 05, 2025	Pembahasan Materi Performance Review Mei 2025 Discussion of the May 2025 Performance Review Materials

No	Nomor Risalah Minutes Number	Tanggal Date	Mata Acara Agenda
9	MJ.01.01/WB-0A.0080/2025	10 Juni 2025 June 10, 2025	Finalisasi Materi Performance Review Mei 2025 Finalization of the May 2025 Performance Review Materials
10	MJ.01.01/WB-0A.0113/2025	28 Juli 2025 July 28, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi Bulan Juli 2025 2. Pembahasan Update Proyek Indah Kiat Karawang 2 1. Follow-up on the Board of Commissioners Meeting with the Board of Directors in July 2025 2. Discussion of the Indah Kiat Karawang 2 Project Update
11	MJ.01.01/WB-0A.0128/2025	25 Agustus 2025 August 25, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi Bulan Agustus 2025 2. Pembahasan Update Perkara Tanah Subang dan Piutang PT Waskita Beton Precast Tbk 1. Follow-up on the August 2025 Board of Commissioners Meeting, which included the Board of Directors 2. Discussion of the Subang Land Case and Receivables of PT Waskita Beton Precast Tbk
12	MJ.01.01/WB-0A.0130/2025	08 September 2025 September 8, 2025	Penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Zinc Cartridge PT Wijaya Karya Komponen Beton Addition of the Indonesian Standard Industrial Classification (KPI) for Zinc Cartridges at PT Wijaya Karya Concrete Components
13	MJ.01.01/WB-0A.0157/2025	15 September 2025 September 15, 2025	Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026 Draft of the 2026 Corporate Work Plan and Budget
14	MJ.01.01/WB-0A.0173/2025	13 Oktober 2025 October 13, 2025	1. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Zinc Cartridge PT Wijaya Karya Komponen Beton. 2. Perjanjian Penggunaan Tanah Industri KIMA 2 Pabrik Produk Beton Sulawesi Selatan. 3. Pembahasan Materi Rapat Direksi Khusus PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 1. Standard Classification of Indonesian Economic Activities: Zinc Cartridges, PT Wijaya Karya Concrete Components. 2. Industrial Land Use Agreement: KIMA 2 Concrete Products Factory, South Sulawesi. 3. Agenda for the Special Board of Directors Meeting of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
15	MJ.01.01/WB-0A.0174/2025	20 Oktober 2025 October 20, 2025	Pembahasan Materi Management Review Pleno Triwulan III 2025 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Discussion of the Materials for the Third Quarter 2025 Management Review Meeting of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
16	MJ.01.01/WB-0A.0175/2025	03 November 2025 November 03, 2025	Finalisasi Kualitatif Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026. Finalization of the Qualitative Aspects of the Company's 2026 Work Plan and Budget.
17	MJ.01.01/WB-0A.0176/2025	10 November 2025 November 10, 2025	1. Pembahasan Materi Performance Review Keuangan 2. Pembahasan Ambang Batas Risiko Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 3. Konsep Resizing Pabrik Produk Beton. 1. Discussion of Financial Performance Review Materials 2. Discussion of Risk Thresholds for the Company's Work Plan and Budget 3. Concept of Resizing the Concrete Products Plant.
18	MJ.01.01/WB-0A.0177/2025	17 November 2025 November 17, 2025	1. Tindak Lanjut Materi Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi November 2025. 2. Pembahasan Finalisasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan. 1. Follow-up on the Agenda of the Board of Commissioners Meeting with the Board of Directors, November 2025. 2. Discussion on Finalizing the Company's Long-Term Plan.
19	MJ.01.01/WB-0A.0178/2025	24 November 2025 November 24, 2025	1. Tindak Lanjut Materi Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi November 2025. 2. Pembahasan Materi Performance Review Oktober 2025. 1. Follow-up on the Agenda Items from the Board of Commissioners Meeting with the Board of Directors in November 2025. 2. Discussion on the October 2025 Performance Review.
20	MJ.01.01/WB-0A.0179/2025	08 Desember 2025 December 08, 2025	Pembahasan Materi Performance Review PT Wijaya Karya Pracetak Gedung Triwulan IV 2025 Discussion on the Q4 2025 Performance Review of PT Wijaya Karya Pracetak Gedung.
21	MJ.01.01/WB-0A.0180/2025	22 Desember 2025 December 22, 2025	1. Pembahasan Breakdown per bulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026. 2. Update Penyeberangan Merak – Pabrik Produk Beton Lampung Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026. 1. Monthly Breakdown of the Company's 2026 Work Plan and Budget. 2. Update on the Merak–Lampung Concrete Products Plant Ferry Service During the 2026 Christmas and New Year Holidays.

Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris

Dalam upaya mempererat koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi dan mendiskusikan isu terkini terkait Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyelenggarakan rapat gabungan rutin, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

Rapat-rapat ini mencakup pembahasan seperti kinerja operasional, manajemen risiko, strategi Perseroan, mendiskusikan pencapaian strategis, pengambilan keputusan, dan/atau memberikan arahan serta rekomendasi.

Board of Directors and Board of Commissioners Joint Meetings

To strengthen coordination between the Board of Commissioners and the Board of Directors and discuss current issues related to the Company, the Board of Commissioners and the Board of Directors hold regular joint meetings at least once a month.

These meetings cover operational performance, risk management, company strategy, progress on strategic goals, decision-making, and/or providing guidance and recommendations.

Frekuensi Pelaksanaan Rapat Direksi dan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris Termasuk Kehadiran Dalam RUPS

Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris termasuk kehadiran dalam RUPS terdokumentasi secara rinci dalam risalah rapat, yang mencatat agenda, pembahasan, dan keputusan yang diambil.

Sepanjang tahun 2025, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali. Dengan tingkat kehadiran dan agenda pembahasan masing-masing rapat disajikan dalam tabel di bawah ini.

Frequency of Board of Directors Meetings and Joint Meetings with the Board of Commissioners, Including Attendance at the GMS

The attendance of Board members at Board meetings, joint meetings with the Board of Commissioners, and the GMS is documented in the meeting minutes, which include the agenda, discussions, and decisions made.

In 2025, the Board of Directors held joint meetings with the Board of Commissioners 12 (twelve) times. The attendance rate and agenda for each meeting are presented in the table below.

Frekuensi Pelaksanaan dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris
Frequency and Attendance of Board of Directors Meetings with the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Direksi **Board of Directors**				
Kuntjara	Direktur Utama President Director	12	11	**91,57%
Rija Judaswara	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Business Development	12	12	100%
Agus Pramono	Direktur Operasi dan *Supply Chain Management* Director of Operations and Supply Chain Management	12	12	100%
Syailendra Ogan	Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	12	12	100%
Verly Widiantoro	Direktur Teknik dan Produksi Director of Engineering and Production	12	12	100%

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**				
Wilan Oktavian	Komisaris Utama President Commissioner	7	7	100%
Tjia Marwan	Komisaris Commissioner	7	7	100%
Dwi Gawan Islandhi H. B.	Komisaris Independen Independent Commissioner	7	7	100%
Eko Sujiyanto*	Komisaris Utama President Commissioner	5	5	100%
R. Permadi Mulajaya*	Komisaris Commissioner	5	5	100%
Miftachul Munir*	Komisaris Commissioner	5	5	100%
Iswandi Irman*	Komisaris Independen Independent Commissioner	5	5	100%
Nita Prihutaminingrum*	Komisaris Independen Independent Commissioner	5	5	100%

Catatan I Notes:
* Menjabat hingga 2 Juni 2025, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 25 tanggal 12 Juni 2025.
**Berhalangan hadir karena sakit pada tanggal 24 November 2025.
* Served until June 2, 2025, as stated in the Deed of Statement of the GMS Resolution No. 25 dated June 12, 2025.
**Unable to attend due to illness on November 25, 2025

Agenda Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris
Meeting Agenda of the Board of Directors with the Board of Commissioners

No	Nomor Risalah Minutes Number	Tanggal Date	Mata Acara Agenda
1	01/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	30 Januari 2025 January 30, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Desember 2024 3. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perusahaan Tahun 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk 4. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to December 2024 3. Approval of the 2025 Work Plan and Budget of PT Wijaya Karya Beton Tbk 4. Other Agenda Items
2	02/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	26 Februari 2025 February 26, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Januari 2025 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to January 2025 3. Other Agenda Items
3	03/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	20 Maret 2025 March 20, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Februari 2025 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to February 2025 3. Other Agenda Items
4	04/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	30 April 2025 April 30, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Maret 2025 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to March 2025 3. Other Agenda Items

No	Nomor Risalah Minutes Number	Tanggal Date	Mata Acara Agenda
5	05/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	28 Mei 2025 May 28, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d April 2025 3. Pengenalan Perusahaan kepada Dewan Komisaris 4. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to April 2025 3. Company's Introduction to the Board of Commissioners 4. Other Agenda Items
6	06/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	25 Juni 2025 June 25, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Mei 2025 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to May 2025 3. Other Agenda Items
7	07/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	31 Juli 2025 July 31, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Juni 2025 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to June 2025 3. Other Agenda Items
8	08/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	19 Agustus 2025 August 19, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Juli 2025 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to July 2025 3. Other Agenda Items
9	09/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	23 September 2025 September 23, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Agustus 2025 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to August 2025 3. Other Agenda Items
10	10/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	21 Oktober 2025 October 21, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d September 2025 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to September 2025 3. Other Agenda Items
11	11/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	24 November 2025 November 24, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Oktober 2025 3. Pembahasan RKAP Tahun 2025 & RJPP 4. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to October 2025 3. Discussion of 2025 RKAP & RJPP 4. Other Agenda Items
12	12/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	17 Desember 2025 December 17, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d November 2025 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to November 2025 3. Other Agenda Items

KEHADIRAN DIREKSI DALAM RUPS (RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM)

Kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025. Seluruh peserta yang hadir dalam rapat tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan dan tata cara pelaksanaan RUPS.

BOARD OF DIRECTORS ATTENDANCE IN GMS (GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS)

Attendance at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2024 Fiscal Year was held on June 2, 2025. All attendees were duly recorded in accordance with the applicable procedures and regulations governing the AGMS.

Kehadiran dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 2 Juni 2025
Attendance in Annual GMS for the Fiscal Year dated June 2, 2025

No	Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description
1	Kuntjara	Direktur Utama President Director	Hadir Secara Fisik Physically Attend
2	Syailendra Ogan	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital and Risk Management	Hadir Secara Fisik Physically Attend
3	Rija Judaswara	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Development	Hadir Secara Fisik Physically Attend
4	Agus Pramono	Direktur Operasi dan Supply Chain Management Director of Operation and Supply Chain Management	Hadir Secara Fisik Physically Attend
5	Verly Widiantoro	Direktur Teknik dan Produksi Director of Engineering and Production	Hadir Secara Fisik Physically Attend

Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa Tanggal 26 Juni 2025
Attendance in Extraordinary GMS dated June 26, 2025

No	Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description
1	Kuntjara	Direktur Utama President Director	Hadir Secara Fisik Physically Attend
2	Syailendra Ogan	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital and Risk Management	Hadir Secara Fisik Physically Attend
3	Rija Judaswara	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Development	Hadir Secara Fisik Physically Attend
4	Agus Pramono	Direktur Operasi dan Supply Chain Management Director of Operation and Supply Chain Management	Hadir Secara Fisik Physically Attend
5	Verly Widiantoro	Direktur Teknik dan Produksi Director of Engineering and Production	Hadir Secara Fisik Physically Attend

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DIREKSI
TRAINING AND/OR COMPETENCY IMPROVEMENT FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi Direksi melalui program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan, pengambilan keputusan strategis, serta pengetahuan industri guna memastikan Direksi tetap adaptif dan efektif dalam menghadapi dinamika bisnis.

The Company is committed to continuously enhancing the competencies of the Board of Directors through structured training and development programs tailored to their roles and responsibilities. These initiatives are designed to strengthen leadership capabilities, strategic decision-making skills, and industry knowledge, ensuring that the Board of Directors is agile and effective in navigating dynamic business challenges.

KEBIJAKAN PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DIREKSI

Perseroan menyadari bahwa Direksi memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan bisnis dan pencapaian kinerja yang optimal. Untuk mendukung efektivitas peran tersebut, Perseroan berkomitmen menyediakan berbagai program pengembangan kompetensi yang dirancang guna meningkatkan wawasan, keterampilan, dan kapabilitas kepemimpinan anggota Direksi. Program ini mencakup pelatihan, pendidikan, seminar, serta workshop yang berorientasi pada peningkatan pemahaman terhadap perkembangan industri, dinamika bisnis, serta perubahan regulasi yang berdampak pada operasional perusahaan.

Sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), kebijakan pelatihan dan peningkatan kompetensi Direksi disusun secara berkelanjutan agar sejalan dengan kebutuhan bisnis dan tantangan industri yang semakin kompleks. Melalui program ini, Direksi diberikan akses terhadap berbagai sumber pengetahuan terkini, baik dari dalam maupun luar negeri, guna memperkuat adaptabilitas mereka dalam menghadapi transformasi industri serta mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih tepat dan efektif.

Perseroan juga mendorong Direksi untuk secara aktif berpartisipasi dalam forum diskusi, lokakarya, dan sesi pengembangan yang relevan dengan bidang tugas mereka. Inisiatif ini bertujuan agar setiap anggota Direksi tidak hanya memahami lanskap bisnis yang terus berkembang, tetapi juga mampu mengimplementasikan strategi yang inovatif dalam rangka memaksimalkan nilai bagi pemangku kepentingan serta memastikan pertumbuhan berkelanjutan bagi Perseroan.

POLICY ON TRAINING AND/OR COMPETENCY IMPROVEMENT FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Company recognizes that the Board of Directors plays a strategic role in ensuring business sustainability and achieving optimal performance. To support the effectiveness of this role, the Company is committed to providing various competency development programs designed to enhance the knowledge, skills, and leadership capabilities of the Board of Directors members. These programs include training, education, seminars, and workshops focused on improving understanding of industry trends, business dynamics, and regulatory changes that affect the Company's operations.

As part of its commitment to good corporate governance, the policy for training and competency development for the Board of Directors is continuously updated to align with business needs and the increasingly complex challenges of the industry. Through this program, the Board is given access to up-to-date knowledge from both domestic and international sources to strengthen their adaptability in responding to industry transformations and to support more accurate and effective strategic decision-making.

The Company also encourages the Board of Directors to actively participate in relevant discussion forums, workshops, and development sessions related to their areas of responsibility. This initiative aims to ensure that each the Board of Directors member not only understands the evolving business landscape but is also able to implement innovative strategies to maximize value for stakeholders and ensure the Company's sustainable growth.

PROGRAM ORIENTASI BAGI ANGGOTA DIREKSI YANG BARU DIANGKAT

Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anggota Direksi yang baru diangkat dapat segera beradaptasi dan memahami lingkungan kerja, tata kelola, serta strategi bisnis Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan menyelenggarakan Program Orientasi Direksi sebagai bagian dari upaya untuk memperkenalkan berbagai aspek penting dalam pengelolaan perusahaan.

Program orientasi ini dirancang secara komprehensif untuk membekali anggota Direksi baru dengan pemahaman mendalam mengenai:

ORIENTATION PROGRAM FOR NEWLY APPOINTED MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Company is committed to ensuring that each newly appointed Board member can quickly adapt and understand the work environment, governance, and business strategy of the Company. Therefore, the Company organizes an Orientation Program for the Board of Directors as part of its efforts to introduce key aspects of company management.

This orientation program is designed comprehensively to equip new Board of Directors members with a thorough understanding of:

a. Profil dan Struktur Organisasi Perseroan, termasuk visi, misi, dan nilai-nilai inti perusahaan.
b. Strategi Bisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta rencana kerja yang telah disusun.
c. Tata Kelola Perusahaan, yang mencakup pedoman kerja Direksi, *Board Charter*, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direksi, *Code of Corporate Governance*, serta *Code of Conduct*.
d. Regulasi dan Kepatuhan, termasuk peraturan-peraturan terkait yang mengatur pelaksanaan tugas Direksi serta pembagian tanggung jawab dalam struktur kepemimpinan.
e. Manajemen Risiko dan Pengambilan Keputusan Strategis, guna memastikan bahwa Direksi baru dapat berkontribusi secara efektif dalam pengelolaan perusahaan.

a. The Company's profile and organizational structure, including its vision, mission, and core values.
b. Business strategy, both short-term and long-term, as well as the work plan that has been developed.
c. Corporate governance, including the Board of Directors work guidelines, Board of Directors Charter, Work and Budget Plan (RKA) for the Board of Directors, Code of Corporate Governance, and Code of Conduct.
d. Regulations and compliance, including relevant regulations governing the Board of Directors' duties and the distribution of responsibilities within the leadership structure.
e. Risk management and strategic decision-making, to ensure that new Board of Directors members can effectively contribute to the Company's management.

Dengan adanya program orientasi ini, Perseroan berharap agar anggota Direksi yang baru dapat segera menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal serta berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis perusahaan.

Through this orientation program, the Company hopes that new members of the Board of Directors can quickly carry out their duties and responsibilities effectively and contribute to achieving the Company's strategic goals.

PELATIHAN DIREKSI DALAM TAHUN BUKU

Dengan kebijakan ini, Perseroan berkomitmen untuk membangun kepemimpinan yang tangguh dan inovatif, yang mampu membawa organisasi menuju pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Maka, pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku 2025 adalah sebagai berikut.

BOARD OF DIRECTORS TRAINING IN FISCAL YEAR

Through this policy, the Company is committed to building strong and innovative leadership capable of driving the organization toward sustainable growth and delivering added value to all stakeholders. Therefore, the training and competency development programs attended by members of the Board of Directors in the 2025 financial year are as follows.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Diikuti anggota Direksi dalam Tahun Buku
Training and/or Competency Improvement Participated by Directors in the Financial Year

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Seminar/Sertifikas Training/Seminar/Certification	Tempat Place	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Kuntjara	Direktur Utama President Director	*Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV*	Jakarta	19-20 Juni 2025 June 19-20, 2025	PT RAP Academy
		Leadership Forum: "Strengthening People Leadership for Business Synergy and Shared Value Creation"	Jakarta	11 November 2025 November 11, 2025	HK
Syailendra Ogan	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital and Risk Management	*Leadership Forum: "Strengthening People Leadership for Business Synergy and Shared Value Creation"*	Jakarta	11 November 2025 November 11, 2025	HK
Rija Judaswara	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Development	*Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV*	Jakarta	19-20 Juni 2025 June 19-20, 2025	PT RAP Academy
		Leadership Forum: "Strengthening People Leadership for Business Synergy and Shared Value Creation"	Jakarta	11 November 2025 November 11, 2025	HK

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Seminar/Sertifikas Training/Seminar/Certification	Tempat Place	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Agus Pramono	Direktur Operasi dan Supply Chain Management Director of Operation and Supply Chain Management	*Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV*	Jakarta	18-19 November 2025 November 18-19, 2025	PT RAP Academy
		Leadership Forum: "Strengthening People Leadership for Business Synergy and Shared Value Creation"	Jakarta	11 November 2025 November 11, 2025	HK
Verly Widiantoro	Direktur Teknik dan Produksi Director of Engineering and Production	*Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV*	Jakarta	19-20 Juni 2025 June 19-20, 2025	PT RAP Academy
		Leadership Forum: "Strengthening People Leadership for Business Synergy and Shared Value Creation"	Jakarta	11 November 2025 November 11, 2025	HK

PENILAIAN DIREKSI TERHADAP KINERJA KOMITE DIBAWAH DIREKSI PADA TAHUN 2025
BOARD OF DIRECTORS' ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

Direksi melakukan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi komite dan organ pendukung yang berperan dalam menunjang pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta pengambilan keputusan Direksi sepanjang tahun buku 2025. Penilaian ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi pendukung manajemen berjalan secara optimal, akuntabel, dan selaras dengan arah strategis Perseroan. Aspek penilaian mencakup kualitas koordinasi, efektivitas pelaksanaan program kerja, ketepatan pelaporan, serta kontribusi terhadap penguatan tata kelola dan keberlanjutan bisnis Perseroan.

The Board of Directors conducted an assessment of the effectiveness of the functions of committees and supporting bodies that play a role in supporting the Board's performance of its duties, responsibilities, and decision-making throughout the 2025 fiscal year. This assessment was conducted as part of the Company's efforts to ensure that all management support functions operate optimally, accountably, and in alignment with the Company's strategic direction. The assessment covers the quality of coordination, the effectiveness of work program implementation, the accuracy of reporting, and contributions to strengthening the Company's governance and business sustainability.

Berdasarkan hasil evaluasi Direksi, Komite ESG telah menjalankan perannya secara memadai dalam mendukung implementasi agenda keberlanjutan Perseroan. Penilaian tersebut didasarkan pada pelaksanaan rapat yang berjalan secara berkala, penyampaian masukan dan rekomendasi terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta dukungan terhadap proses pelaporan keberlanjutan dan pengungkapan informasi ESG Perseroan. Direksi menilai bahwa keberadaan Komite ESG telah memberikan nilai tambah dalam memperkuat integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam strategi dan operasional perusahaan.

Based on the Board of Directors' evaluation, the ESG Committee has adequately fulfilled its role in supporting the implementation of the Company's of the Company. This assessment is based on the conduct of regular meetings, the provision of input and recommendations regarding environmental, social, and governance (ESG) aspects, as well as support for the Company's sustainability reporting process anddisclosure of ESG information. The Board of Directors assessesthat the existence of the ESG Committee has providedadded value in strengthening the integration of sustainability principlesinto the company's strategy and operations.

Penilaian Organ pendukung di bawah Direksi

Selain itu, Direksi juga menilai bahwa *Corporate Secretary* dan Satuan Pengawas Internal (SPI) telah menjalankan fungsi pendukungnya secara efektif sepanjang tahun pelaporan. Corporate Secretary berperan penting dalam mendukung komunikasi korporasi, kepatuhan terhadap peraturan pasar modal, serta pengelolaan hubungan

Assessment of Supporting Organs under the Board of Directors

In addition, the Board of Directors also assessed that the Corporate Secretaryand the Internal Audit Unit (SPI) have carried outtheir supporting functions effectively throughout thereporting year. The Corporate Secretary plays a key role insupporting corporate communications, compliance withcapital market regulations, and managing

dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Sementara itu, SPI dinilai telah melaksanakan fungsi pengawasan internal secara independen dan objektif melalui kegiatan audit, evaluasi pengendalian internal, serta pemberian rekomendasi perbaikan yang mendukung efektivitas operasional dan tata kelola Perseroan. Secara keseluruhan, Direksi memandang bahwa komite dan organ pendukung Direksi telah memberikan kontribusi yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi selama tahun buku 2025.

relationshipswith shareholders and stakeholders. Meanwhile, the SPI is deemed to have carried out itsinternal oversight functions independently and objectivelythrough audit activities, internal control evaluations,and the provision of improvement recommendations that supportthe Company's operational effectiveness and governance. Overall,the Board of Directors views that the committees andsupporting bodies of the Board have made a positivecontribution in supporting the Board's dutiesduring the 2025 fiscal year.

URAIAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI PADA TAHUN BUKU
BRIEF DESCRIPTION OF THE IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' DUTIES IN THE FINANCIAL YEAR

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah secara optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam aspek operasional, keuangan, dan dukungan bisnis. Seluruh keputusan serta kebijakan yang diterapkan oleh Direksi selama tahun tersebut dicatat secara resmi dalam bentuk Keputusan Direksi, Surat Edaran, dan Instruksi Direksi. Beberapa langkah strategis yang diambil oleh Direksi pada tahun 2025 mencakup:

1. Mengembangkan pasar dengan menerapkan cost leadership & create project, meningkatkan sinergi dengan WIKA Group, pelaksanaan Kerja sama Usaha (JV, JO dan KSO), memaksimalkan digital marketing, serta melakukan penetrasi pasar ASEAN;
2. Mengoptimalkan kapasitas produksi pabrik & Ready Mix Concrete, memperkuat penjualan produk non-precast, dan mempercepat penyerahan produk ke pelanggan;
3. Kerja sama strategis dengan mitra usaha, perusahaan, kontraktor dan pelanggan (pemerintah, swasta dan BUMN);
4. *Realignment* dan pengembangan usaha dengan memajukan *mobile plant*, optimalisasi pabrik yang ada (*existing*), dan realignment bisnis perusahaan anak;
5. Mengoptimalkan modal usaha, salah satunya dengan percepatan pencairan dan penyelesaian piutang bermasalah;
6. Peningkatan kompetensi dan optimalisasi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) melalui integrasi sistem Teknologi Informasi (TI) dan penerapan *supply chain management*;
7. Mempersiapkan arah strategis penguatan arus kas Perusahaan melalui pengembangan skema pembiayaan hijau (*green financing*)
8. Melakukan penguatan dan perluasan penetrasi pasar luar negeri melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk pengembangan kemitraan internasional, peningkatan daya saing produk dan layanan, serta eksplorasi peluang pasar global secara berkelanjutan untuk memperkuat posisi Perusahaan di kancah internasional.

Throughout 2025, the Board of Directors has diligently fulfilled its duties and responsibilities in operational, financial, and business support aspects. All decisions and policies implemented by the Board during the year have been officially documented in the form of Decree, Circulars, and Instructions. Strategic initiatives undertaken by the Board in 2025 include:

1. Developing markets through the implementation of cost leadership and project creation, enhancing synergy with WIKA Group, executing Joint Ventures (JV, JO and KSO), maximizing digital marketing, and initiating ASEAN market penetration;
2. Optimizing plant production capacity and Ready Mix Concrete, strengthening sales of non-precast products, and accelerating product delivery to customers;
3. Strategically collaborating with business partners, corporations, contractors, and customers (government, private, and state-owned enterprises);
4. Realignment and business development by advancing mobile plants, optimizing existing plants, and realigning subsidiaries' business;
5. Optimizing working capital, including expediting the resolution of problematic receivables;
6. Enhancing competencies and optimizing the number of Human Resources (HR) through Information Technology system integration and supply chain management implementation;
7. Preparing the strategic direction to strengthen the Company's cash flow through the development of green financing schemes.
8. Strengthening and expanding international market penetration through various strategic initiatives, including the development of international partnerships, enhancement of product and service competitiveness, and continuous exploration of global market opportunities to reinforce the Company's position in global market.

9. Melakukan implementasi *lean organization* dan *lean manufacturing* secara konsisten guna meningkatkan efisiensi organisasi.

9. Consistently implementing lean organization and lean manufacturing to improve organizational efficiency.

KEPUTUSAN DIREKSI DILUAR RAPAT

Merujuk pada Pasal 19 ayat (17) dan (18) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang sah tanpa harus menggelar Rapat Direksi. Ini dapat dilakukan dengan syarat bahwa seluruh anggota Direksi telah diberi pemberitahuan secara tertulis, dan semua anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan terhadap usulan yang diajukan, baik secara tertulis maupun dengan menandatangani keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara ini memiliki kekuatan yang setara dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Direksi.

Selama tahun 2025, Direksi telah menetapkan agenda melalui Keputusan Direksi Di luar Rapat (*Circular Resolution*). Rincian Keputusan Direksi tersebut dapat ditemukan dalam tabel berikut:

BOARD DECISIONS MADE OUTSIDE OF MEETINGS

In accordance with Article 19, paragraphs (17) and (18) of the Company's Articles of Association, the Board of Directors has the authority to make valid decisions without convening a formal Board meeting. This is permitted provided that all members of the Board have been given written notification and that all serving members give their approval to the proposed resolution, either in writing or by signing the decision. Decisions made through this method carry the same legal weight as those made during official Board meetings.

Throughout 2025, the Board of Directors made decisions through Circular Resolutions. The details of these resolutions are presented in the following table:

Keputusan Direksi Tahun 2025
Board of Director's Decision in 2025

No	Nomor Risalah Minutes Number	Tanggal Date	Mata Acara Agenda
1	MJ.01.01/WB-0A.0017/2025	31 Januari 2025 January 31, 2025	Penetapan Harga Tanah Donggala Donggala Land Valuation
2	MJ.01.01/WB-0A.0033/2025	20 Januari 2025 January 20, 2025	Perpanjangan CL NCL WIKA Kraton Extension of CL NCL WIKA Kraton
3	MJ.01.01/WB-0A.0004/2025	20 Februari 2025 February 20, 2025	Penggabungan PPB Lampung dan PPB Lampung Selatan Merger of PPB Lampung and PPB South Lampung
4	MJ.01.01/WB-0A.0063/2025	30 April 2025 April 30, 2025	Pembayaran Pengembalian Dewanto Duta KSO Refund Payment to Dewanto Duta KSO
5	MJ.01.01/WB-0A.0059/2025	21 April 2025 April 21, 2025	Perubahan Pengurus WIKA Kraton Change in WIKA Kraton Management
6	MJ.01.01/WB-0A.0058/2025	21 April 2025 April 21, 2025	Perubahan Pengurus CLT Changes to CLT Management
7	MJ.01.01/WB-0A.0076/2025	04 Juni 2025 June 04, 2025	Perpanjangan Kredit Mandiri Extension of Mandiri Credit
8	MJ.01.01/WB-0A.0090/2025	17 Juni 2025 June 17, 2025	Rasionalisasi Pegawai Employee Rationalization
9	MJ.01.01/WB-0A.0094/2025	20 Juni 2025 June 20, 2025	Penyewaan Aset Perseroan Leasing of Company Assets

No	Nomor Risalah Minutes Number	Tanggal Date	Mata Acara Agenda
10	MJ.01.01/WB-0A.0106/2025	23 Juni 2025 June 23, 2025	Perubahan Tagihan WTON kepada WSBP Changes to WTON Invoices to WSBP
11	MJ.01.01/WB-0A.0108/2025	15 Juli 2025 July 15, 2025	Perpanjangan Fasilitas Kredit BSI Extension of BSI Credit Facility
12	MJ.01.01/WB-0A.0118/2025	01 Agustus 2025 August 01, 2025	Penjualan Aset Tidak Produktif Sale of Non-Productive Assets
13	MJ.01.01/WB-0A.0121/2025	12 Agustus 2025 August 12, 2025	Sertifikasi Lahan Lampung Selatan & Penunjukan Notaris Syahirul Alim Land Certification in South Lampung & Appointment of Notary Syahirul Alim
14	MJ.01.01/WB-0A.0134/2025	04 September 2025 September 04, 2025	Penjualan Aset Tanah dan Bangunan Donggala tahun 2025 Sale of Land and Building Assets in Donggala in 2025
15	MJ.01.01/WB-0A.0138/2025	10 September 2025 September 10, 2025	Remunerasi dan Tantiem CLT Remuneration and Bonuses for CLT
16	MJ.01.01/WB-0A.0137/2025	10 September 2025 September 10, 2025	Remunerasi dan Tantiem WIKA KRATON Remuneration and Bonuses for WIKA KRATON
17	MJ.01.01/WB-0A.0140/2025	10 September 2025 September 10, 2025	Remunerasi dan Tantiem WPG Remuneration and Bonuses for WPG
18	MJ.01.01/WB-0A.0139/2025	10 September 2025 September 10, 2025	Remunerasi dan Tantiem WIKA KOBE Remuneration and Bonuses for WIKA KOBE
19	MJ.01.01/WB-0A.0141/2025	12 Agustus 2025 August 12, 2025	Penetapan Harga Penawaran Penjualan Aset Mess Sumut Determination of the Offering Price for the Sale of the North Sumatra Mess Assets
20	MJ.01.01/WB-0A.0132/2025	28 Agustus 2025 August 28, 2025	Sertifikasi Lahan Balikpapan & Penunjukan Konsultan Hukum Samudra Keadilan Land Certification in Balikpapan & Appointment of Legal Consultant Samudra Keadilan
21	MJ.01.01/WB-0A.0152/2025	16 Juni 2025 June 16, 2025	Perpanjangan SHGB dan SHMSRS Perseroan Extension of the Company's SHGB and SHMSRS
22	MJ.01.01/WB-0A.0160/2025	05 November 2025 November 05, 2025	Perpanjangan Sementara Kredit BNI 2025 Temporary Extension of BNI Credit 2025
23	MJ.01.01/WB-0A.0163/2025	14 November 2025 November 14, 2025	Penawaran Terbatas Aset Bulldozer PPB Lampung Selatan Limited Offering of PPB South Lampung Bulldozer Assets
24	MJ.01.01/WB-0A.0149/2025	06 Oktober 2025 October 06, 2025	Homologasi PT Seneca Indonesia Homologation of PT Seneca Indonesia
25	MJ.01.01/WB-0A.0169/2025	24 Desember 2025 December 24, 2025	Pemutakhiran Pedoman GCG Update of GCG Guidelines

Dewan Komisaris
The Board Of Commissioners

Fungsi pengawasan Direksi dan pemberian nasihat perbaikan dalam menjalankan manajemen Perseroan menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris sebagai suatu Organ Perseroan. Penilaian kinerja Direksi Perseroan mencakup hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan disampaikan secara rutin melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan setiap tahun.

The oversight function of the Board of Directors and the provision of improvement advice in managing the Company are the responsibilities and authorities of the Board of Commissioners as a corporate organ. The performance evaluation of the Company's Board of Directors encompasses the results of supervision conducted by the Board of Commissioners and is routinely communicated through the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) held annually.

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris mengacu pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, termasuk di antaranya:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Akta No. 05 tanggal 2 Juli 2025;
4. *Threshold* Perseroan sebagaimana Persetujuan Usulan Batasan dan/atau Kriteria Perbuatan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor 02A/DK/WB/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.
5. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor. SK.01.01/WB-0A.0035/2024 tentang Board Manual PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal 6 September 2024.

In carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners adheres to prevailing laws and regulations, including:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
3. The Company's Articles of Association stated in Deed No. 05 dated July 2, 2025;
4. The Company's threshold pertains to the Proposal Agreement on Limits and/or Criteria of Board of Directors' Actions, in accordance with the Articles of Association of PT Wijaya Karya Beton Tbk Number 02A/DK/WB/II/2022 dated February 7, 2022.
5. Joint Resolution of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.0035/2024 regarding the Board Manual of PT Wijaya Karya Beton Tbk, dated 6 September 2024.

Secara lebih spesifik, Dewan Komisaris Perseroan menjalankan 2 (dua) fungsi pengawasan, yaitu:

1. *Level Performance:*
   Memberi arahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberi masukan kepada RUPS.
2. *Level Conformance:*
   Memastikan bahwa seluruh masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris telah sepenuhnya dijalankan Direksi, serta mengawasi aspek kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi Perseroan.

Specifically, the Company's Board of Commissioners carries out 2 (two) supervisory functions, namely:

1. Performance Level:
   Provide direction and instructions to the Board of Directors and input the GMS.
2. Conformance Level:
   Ensuring that all inputs given by the Board of Commissioners have been fully implemented by the Board of Directors and overseeing the Company's compliance with the provisions of laws and regulations and the Company's Articles of Association have been fulfilled by the Company.

KOMPOSISI DAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS
COMPOSITION AND TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam menetapkan susunan dan jumlah Dewan Komisaris, Perseroan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang penetapan jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mengacu pada Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2024, yaitu:

a. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris;
b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen;
c. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang Anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh Anggota Dewan Komisaris;
d. Satu di antara Anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.

Perseroan menetapkan batas masa jabatan Dewan Komisaris sesuai yang tertuang pada Board Manual yaitu 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan selanjutnya.

Susunan anggota Dewan Komisaris pada tahun 2025 mengalami 1 (satu) kali perubahan yang terjadi pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 2 Juni 2025. Berikut adalah susunan Dewan Komisaris sebelum dan sesudah perubahan:

In determining the composition and number of the Board of Commissioners, the Company refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 33/POJK.04/2014 concerning the determination of the number of members of the Board of Commissioners. Additionally, the Company also adheres to the 2024 Board Manual, namely:

a. The Board of Commissioners consists of at least 2 (two) members;
b. In the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) Board of Commissioners members, 1 (one) of whom is an Independent Commissioner;
c. In the event that the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) members, the number of Independent Commissioners must be at least 30% (thirty percent) of the total number of members of the Board of Commissioners;
d. One of the members of the Board of Commissioners is appointed as President Commissioner.

The Company stipulates the term of office of the Board of Commissioners in accordance with the Board Manual, whereby one term of office for each member of the Board of Commissioners shall not exceed five (5) years and may be reappointed for one (1) subsequent term.

The composition of the Board of Commissioners in 2025 underwent one change, which took place during the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2024 fiscal year on June 2, 2025. The following presents the composition of the Board of Commissioners before and after the change:

Periode 1 Januari - 2 Juni 2025
January 1 - June 2, 2025 Period

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Basis of Appointment	Masa dan Periode Jabatan Tenure
Eko Sujiyanto	Komisaris Utama President Commissioner	Akta RUPS Tahunan No.43 tanggal 17 Mei 2024 Deed of Annual GMS No.43 dated May 17, 2024.	Periode ke-1 1st Period 2024-2025
R. Permadi Mulajaya	Komisaris Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No.4 tanggal 3 Juni 2021. Deed of GMS Resolution No.4 dated June 3, 2021.	Periode ke-1 1st Period 2021-2025
Miftachul Munir	Komisaris Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 17 tanggal 12 Mei 2023. Deed of GMS Resolution No. 17 dated May 12, 2023.	Periode ke-1 1st Period 2023-2025
Iswandi Imran	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta RUPS Tahunan No.43 tanggal 17 Mei 2024 Deed of Annual GMS No.43 dated May 17, 2023.	Periode ke-1 1st Period 2024-2025
Nita Prihutaminingrum	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 17 tanggal 12 Mei 2023. Deed of GMS Resolution No. 17 dated May 12, 2023.	Periode ke-1 1st Period 2023-2025

Periode 2 Juni - 31 Desember 2025
June 2 - December 31, 2025 Period

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Basis of Appointment	Masa dan Periode Jabatan Tenure
Wilan Oktavian	Komisaris Utama President Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 25 tanggal 12 Juni 2025. Deed of Statement of GMS Resolution No. 25 dated June 12, 2025	Periode ke-1 | 1st Period 2025-2030
Tjia Marwan	Komisaris Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 25 tanggal 12 Juni 2025. Deed of Statement of GMS Resolution No. 25 dated June 12, 2025	Periode ke-1 | 1st Period 2025-2030
Dwi Gawan Islandhi H. B.	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 25 tanggal 12 Juni 2025. Deed of Statement of GMS Resolution No. 25 dated June 12, 2025	Periode ke-1 | 1st Period 2025-2030

Catatan I Notes
Masa jabatan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2030
Term of office ending at the closing of Annual GMS 2030 Financial Year

TUGAS DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
DUTIES AND OBLIGATIONS OF MEMBERS THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Kebijakan Umum

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan kewajiban untuk:

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
b. Dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
d. Menetapkan kebijakan/mekanisme mengenai pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP dan RKAP.

1. General Policy

In connection with the implementation of supervision and providing advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners has the duties and obligations to:

a. Comply with the Articles of Association and Laws and the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.
b. In good faith, prudence, and responsibility carry out supervisory and advisory duties to the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.
c. Supervise the management policies of the Company and the Company's business conducted by the Board of Directors, including supervision of the implementation of the RJPP, RKAP and the provisions of the Articles of Association and GMS Decisions, as well as applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company and provide advice to the Board of Directors.
d. Determine the policy/mechanism regarding the approval/response/opinion of the Board of Commissioners on the draft RJPP and RKAP.

e. Dewan Komisaris wajib meneliti, menelaah, dan menandatangani serta memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap RKAP yang disiapkan oleh Direksi, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai.
f. Menyusun rencana untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan Direksi menjalankan pengurusan Perusahaan sesuai dengan RKAP dan/atau RJPP, dan memasukkannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.
g. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS dalam bentuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
h. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
i. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
j. Menetapkan kebijakan yang mengatur tentang pembahasan gejala menurunnya kinerja Perusahaan, pemberian saran kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada penurunan kinerja Perusahaan, jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan yang signifikan.
k. Menyampaikan laporan triwulanan mengenai kinerja Perusahaan termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada Pemegang Saham Mayoritas.
l. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain.
m. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
n. Menetapkan kebijakan/pedoman yang mengatur Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.
o. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris yang membahas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga serta memasukan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.

e. The Board of Commissioners shall examine, review, and sign and give approval or ratification to the RKAP prepared by the Board of Directors, no later than 60 (sixty) days before the new financial year begins.
f. Develop a plan to evaluate the compliance of the Board of Directors in managing the Company in accordance with the RKAP and/or RJPP, and include it in the Annual Work Plan of the Board of Commissioners.
g. Supervise the implementation of the Company's Annual Work Plan and Budget and submit the results of the assessment and opinion to the GMS in the form of the Board of Commissioners Supervisory Report.
h. Provide explanations, opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report, if requested.
i. Make Minutes of the Meeting of the Board of Commissioners and keep a copy.
j. Establish policies governing the discussion of symptoms of declining Company performance, providing advice to the Board of Directors to fix problems that have an impact on the decline in Company performance, if there are symptoms of a significant decline in Company performance.
k. Submit quarterly reports on the Company's performance including the realization of Key Performance Indicators to Majority Shareholders.
l. Reporting to the Company regarding his/her and/or his/her family's share ownership in the Company and other companies. 46
m. Provide a report on the supervisory duties that have been carried out during the past fiscal year to the General Meeting of Shareholders. 47
n. Establish policies/guidelines governing the Board of Commissioners to supervise the Company's compliance with laws and regulations, the Articles of Association, and agreements and commitments made by the Company with third parties.
o. Prepare a Board of Commissioners work plan that discusses the Board of Directors' compliance with laws and regulations, the Articles of Association, and agreements and commitments made by the Company with third parties and include it in the Annual Work Plan of the Board of Commissioners.

p. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham mayoritas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal.
q. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
r. Menetapkan kebijakan dan pedoman untuk memantau penerapan prinsip-prinsip GCG.
s. Menyusun rencana penelaahan prinsip-prinsip GCG dan memasukan dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.
t. Memantau dan memastikan efektivitas praktik GCG yang diterapkan Perusahaan.
u. Menetapkan kebijakan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang memadai, dan menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berikutnya.
v. Menetapkan secara tertulis kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris, mengevaluasi capaian kinerja Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan melaporkan penilaian kinerja tersebut dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

p. Provide explanations on all matters asked or requested by the majority shareholders with due observance of the laws and regulations, especially those applicable in the Capital Market.
q. Carry out other obligations in the context of supervision and advising, as long as it does not conflict with laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS resolutions.
r. Establish policies and guidelines to monitor the implementation of GCG principles.
s. Prepare a plan for reviewing GCG principles and include it in the Annual Work Plan of the Board of Commissioners.
t. Monitor and ensure the effectiveness of GCG practices implemented by the Company.
u. Establish policies regarding the preparation of an adequate annual work plan and budget for the Board of Commissioners, and prepare a work plan for the Board of Commissioners for the following year period.
v. Establish in writing a policy regarding the measurement and assessment of the performance of the Board of Commissioners, evaluate the performance achievements of the Board of Commissioners and set forth in the Minutes of the Board of Commissioners Meeting and report the performance assessment in the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners.

2. Pembagian Tugas

Untuk mengefektifkan peran Dewan Komisaris, dilakukan pembagian tugas di antara para Anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan pembagian tugas Direksi. Pembagian tugas di antara Anggota Dewan Komisaris ditujukan agar pelaksanaan tugas masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara teknis pada aspek yang dibidangi dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing sehingga terdapat kejelasan tentang peran Anggota Dewan Komisaris baik secara kolektif maupun secara perorangan. Komisaris Utama menetapkan kebijakan yang mengatur tentang kewajiban setiap Anggota Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas.

2. Division of Duties

To streamline the role of the Board of Commissioners, a division of duties is made among the Members of the Board of Commissioners by considering the division of duties of the Board of Directors. The division of duties among the Members of the Board of Commissioners is intended so that the implementation of the duties of each Member of the Board of Commissioners technically on the aspects in charge can run smoothly, effectively and efficiently in accordance with their respective responsibilities and authorities so that there is clarity about the role of the Members of the Board of Commissioners both collectively and individually. The President Commissioner establishes a policy that regulates the obligation of each Member of the Board of Commissioners to carry out the division of tasks.

Pembagian kerja di antara para Anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris. Pembagian tugas Dewan Komisaris ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris.

3. Tugas Pengawasan

a. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi. Dalam hal penjelasan diminta secara tertulis prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menyampaikan pertanyaan secara tertulis tentang suatu permasalahan yang terjadi kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris meneliti dan menelaah penjelasan tertulis yang disampaikan oleh Direksi dan jika diperlukan Dewan Komisaris mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Meminta penjelasan lebih lanjut dari Direksi.
   b. Mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas permasalahan tersebut lebih lanjut.
   c. Memberikan arahan dan nasihat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

b. Memberikan saran atau nasihat kepada Direksi dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau rapat-rapat lain yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dengan prosedur seperti tercantum dalam Rapat Dewan Komisaris. Apabila diperlukan Dewan Komisaris dapat melakukan kunjungan ke semua Wilayah Unit kerja dalam rangka memastikan pelaksanaan operasional Perusahaan berjalan secara efektif, baik dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya.

The division of duties among the Members of the Board of Commissioners is regulated by themselves, and may be assisted by a Secretary of the Board of Commissioners. The division of duties of the Board of Commissioners is determined by a Decree of the Board of Commissioners.

3. Supervisory Duties

a. Supervisory duties by the Board of Commissioners are carried out by requesting explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues concerning the management of the Company, knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors. In the event that an explanation is requested in writing the procedure is as follows:

1. The Board of Commissioners submits questions in writing about a problem that occurs to the Board of Directors.
2. The Board of Commissioners examines and reviews the written explanation submitted by the Board of Directors and if necessary the Board of Commissioners takes the following steps:
   a. Request further explanation from the Board of Commissioners .
   b. Hold a meeting with the Board of Directors to discuss the matter further.
   c. Provide direction and advice to resolve the existing problems.

b. Provide advice or counsel to the Board of Directors in the Board of Commissioners meeting with the Board of Directors or other meetings attended by the Board of Commissioners with procedures as stated in the Board of Commissioners Meeting. If necessary, the Board of Commissioners may conduct visits to all work unit areas in order to ensure the effective implementation of the Company's operations, either with or without prior notice to the Board of Directors.

c. Memberikan arahan tentang kebijakan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia, meliputi:
   1. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
   2. Menyusun rencana untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan berserta penerapan kebijakan tersebut.
   3. Melakukan pembahasan mengenai kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.

d. Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya. Memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut, meliputi:

   1. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.
   2. Menyusun rencana pembahasan kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya, dan memasukannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.
   3. Melakukan pembahasan terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya.
   4. Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya.
   5. Menetapkan mekanisme bagi Dewan Komisaris untuk merespon saran, permasalahan atau keluhan dari Pemangku Kepentingan dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan.

4. Tugas dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam hubungannya dengan RUPS, Dewan Komisaris bertugas dan berkewajiban untuk:

a. RUPS dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

c. Provide direction on policies and preparation of financial statements in accordance with generally accepted Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, including:
   1. Establish the Board of Commissioners' policy on supervision and advising on accounting policies and preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia.
   2. Develop a plan to supervise accounting policies and the preparation of financial statements along with the implementation of these policies.
   3. Conduct discussions on accounting policies and preparation of financial statements and their implementation.

d. Provide direction to the Board of Directors regarding accounting policies and preparation of financial statements and their application. Provide direction on quality and service policies and the implementation of these policies, including:
   1. Determine the Board of Commissioners' policy regarding supervision and advising on quality and service policies and the implementation of these policies.
   2. Develop a plan for the discussion of quality and service policies and their implementation, and include it in the Annual Work Plan of the Board of Commissioners.
   3. Discuss the quality and service policy and its implementation.
   4. Provide direction to the Board of Directors on quality and service policies and their implementation.
   5. Establish a mechanism for the Board of Commissioners to respond to suggestions, problems or complaints from Stakeholders and convey to the Board of Directors the necessary resolution suggestions.

4. Duties at the General Meeting of Shareholders

In relation to the GMS, the Board of Commssioners has the duty and obligation to:

a. The GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.

b. Dalam hal semua Anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk oleh dan dari peserta RUPS.

Dalam hal Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan akan hal yang diputuskan di dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Apabila semua Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi, dalam hal salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

5. Tugas dalam Permasalahan dan Keluhan dari Pemangku Kepentingan

Dalam menangani permasalahan dan keluhan dari Pemangku Kepentingan, Dewan Komisaris berkewajiban membuat mekanisme bagi Dewan Komisaris untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari Pemangku Kepentingan dan menyampaikannya kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan.

6. Tugas dalam Sistem Pengendalian Intern.

Dalam mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Intern, Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit mempunyai kewajiban untuk:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas

b. In the event that all Members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. In the event that all Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are absent or unable to attend, the GMS shall be chaired by a Shareholder present at the GMS appointed by and from the participants of the GMS.

In the event that a Member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners has a conflict of interest on a matter decided in the GMS, the GMS shall be chaired by another Member of the Board of Commissioners who does not have a conflict of interest, appointed by the Board of Commissioners.

If all members of the Board of Commissioners have a conflict of interest, then the GMS shall be chaired by one of the Directors appointed by the Board of Directors, in the event that one of the Directors appointed by the Board of Directors has a conflict of interest on the matter decided in the GMS, then the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors who does not have a conflict of interest.

If all members of the Board of Directors have a conflict of interest, the GMS shall be chaired by one of the non-controlling Shareholders appointed by the majority of the other Shareholders present at the GMS.

5. Duties in Problems and Complaints from Stakeholders

In handling problems and complaints from Stakeholders, the Board of Commissioners is obliged to create a mechanism for the Board of Commissioners to respond/follow up on suggestions, issues or complaints from Stakeholders and convey them to the Board of Directors about the necessary resolution suggestions.

6. Duties in the Internal Control System.

In evaluating the effectiveness of the Internal Control System, the Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, has the obligation to:

a. Review the financial information that will be issued by the Issuer or Public Company to the public and/or the authorities, including financial

antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.

c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.

e. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.

f. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.

g. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.

h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Tugas dalam Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Dewan Komisaris berkewajiban:

a. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko Perusahaan dan pelaksanaannya.

b. Menetapkan kriteria mengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha Perusahaan dan kinerja Perusahaan yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.

c. Menyusun rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan.

statements, projections, and other reports related to the financial information of the Issuer or Public Company.

b. Review the compliance with the Laws and Regulations related to the activities of the Issuer or Public Company.

c. Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the Accountant on the services provided.

d. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of the Accountant based on independence, scope of assignment, and fees. Reviewing the implementation of the audit by the Internal Auditor and overseeing the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the Internal Auditor.

e. Review the implementation of risk management activities carried out by the Board of Directors, if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners.

f. Review complaints relating to the Company's accounting and financial reporting processes.

g. Review and providing advice to the Board of Commissioners related to the potential conflict of interest of the Issuer or Public Company.

h. Maintain the confidentiality of documents, data and information of the Issuer or Public Company.

7. Duties in Risk Management

In the implementation of risk management, the Board of Commissioners is obliged to:

a. Establish the policy of the Board of Commissioners regarding supervision and advising on the Company's risk management policy and its implementation.

b. Establishing criteria regarding information on the business environment and its problems that are expected to have an impact on the Company's business and the Company's performance that needs the attention of the Board of Commissioners.

c. Develop the Board of Commissioners' plan on supervision and advising on the Company's risk management policy and implementation.

d. Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis asuransi serta jumlah asuransi yang ditutup oleh Perusahaan dalam hubungannya dengan risiko usaha.
e. Memberikan arahan dan evaluasi atas pedoman dan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan Direksi.
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko.
g. Memastikan keselarasan Visi, Misi, dan tujuan Perusahaan dengan mempertimbangkan risiko terkait.
h. Memonitor pengorganisasian risiko secara keseluruhan.

8. Tugas dalam Sistem Teknologi Informasi

a. Dalam pelaksanaan sistem teknologi informasi, Dewan Komisaris berkewajiban:

b. Menetapkan kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi Perusahaan dan pelaksanaannya.
c. Menyusun rencana pembahasan kebijakan sistem teknologi informasi Perusahaan dan pelaksanaannya dan memasukan dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.
d. Menelaah terhadap kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya.
e. Memberikan saran peningkatan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya kepada Direksi.

9. Tugas dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Dalam pengelolaan sumber daya manusia, Dewan Komisaris berkewajiban:

a. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di Perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di Perusahaan, dan pelaksanaan kebijakan tersebut.
b. Menyusun rencana pembahasan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di Perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi, dan demosi di Perusahaan serta pelaksanaan kebijakan tersebut. Selanjutnya, memasukkannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.

d. Conduct periodic assessments and provide recommendations on business risks and types of insurance as well as the amount of insurance covered by the Company in relation to business risks.
e. Provide direction and evaluation of the risk management guidelines and policies established by the Board of Directors.
f. Monitoring and evaluating the implementation of risk management.
g. Ensure the alignment of the Company's Vision, Mission, and objectives by considering related risks.
h. Monitor the overall risk organization.

8. Duties in Information Technology System

a. In the implementation of the information technology system, the Board of Commissioners is obliged to:
b. Establish policies regarding supervision and advising on the Company's information technology system policy and its implementation.

c. Prepare a plan to discuss the Company's information technology system policy and its implementation and include it in the Annual Work Plan of the Board of Commissioners.
d. Review the information technology system policy and its implementation.
e. Provide suggestions for improving the information technology system and its implementation to the Board of Directors.

9. Duties in Human Resources Management

In managing human resources, the Board of Commissioners is obliged to:

a. Establish a policy of the Board of Commissioners regarding supervision and advising on human resource management policies, particularly on career management in the Company, systems and procedures for promotion, transfer and demotion in the Company, and the implementation of such policies.
b. Prepare a discussion plan on human resource management, particularly on career management in the Company, systems and procedures for promotion, transfer and demotion in the Company and the implementation of such policies. Furthermore, include it in the Annual Work Plan of the Board of Commissioners.

c. Melakukan analisis atas kebijakan/rancangan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, serta rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi.
d. Memberikan saran peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di Perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi, serta demosi di Perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut kepada Direksi.

10. Tugas dalam Kebijakan Akuntansi

Dalam pelaksanaan kebijakan akuntansi, Dewan Komisaris berkewajiban:

a. Menetapkan kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
b. Menyusun rencana untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan tersebut.
c. Melakukan pembahasan mengenai kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan tersebut.
d. Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan berserta penerapannya.

11. Tugas dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Dewan Komisaris berkewajiban:

a. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya.
b. Menyusun rencana Dewan Komisaris pembahasan kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya, dan memasukan dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.
c. Melakukan pembahasan terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya.
d. Memberikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

c. Analyze the policy/design and implementation of the human resource management policy, as well as the promotion and mutation plan for one level of position under the Board of Directors.
d. Provide advice on improving human resource management policies, particularly on career management in the Company, systems and procedures for promotion, transfer, and demotion in the Company and the implementation of such policies to the Board of Directors.

10. Duties in Accounting Policy

In the implementation of accounting policies, the BOC is obliged to:

a. Establish policies regarding the supervision and provision of advice on accounting policies and the preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia.
b. Develop a plan to supervise the accounting policies and preparation of financial statements as well as the implementation of such policies.
c. Conduct discussions on accounting policies and preparation of financial statements and the application of these policies.
d. Provide direction to the Board of Directors regarding accounting policies and preparation of financial statements and their implementation.

11. Duties in Procurement of Goods and Services.

In the implementation of goods and services procurement, the Board of Commissioners is obliged to:

a. Establish a policy of the Board of Commissioners regarding the supervision and provision of advice on the procurement of goods and services and its implementation.
b. Prepare a plan for the Board of Commissioners to discuss the policy on procurement of goods and services and its implementation, and include it in the Annual Work Plan of the Board of Commissioners.
c. Discuss the policy on procurement of goods and services and its implementation.
d. Provide direction to the Board of Directors on procurement policy and its implementation.

12. Tugas dalam Kebijakan Mutu dan Pelayanan

a. Dewan Komisaris menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.
b. Dewan Komisaris menyusun rencana Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.
c. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya.

13. Tugas Pengawasan Terhadap Kepatuhan dalam Perundang - Undangan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kepatuhan dalam perundang-undangan, Dewan Komisaris berkewajiban:

a. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat atas kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.
b. Menyusun rencana Dewan Komisaris untuk membahas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.
c. Melakukan telaah atas kepatuhan Perusahaan terhadap Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian dengan pihak ketiga.
d. Melaporkan hasil evaluasi/telaah sebagaimana yang termaksud dalam huruf c kepada RUPS dalam Laporan Pengawasan tahunan.

14. Tugas Pengawasan terhadap Kepatuhan terhadap RKAP dan RJPP

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kepatuhan terhadap RKAP dan RJPP, Dewan Komisaris berkewajiban:

a. Menetapkan Kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemantauan terhadap kepatuhan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan terhadap RKAP dan/ atau RJPP.
b. Menyusun rencana Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKAP.

12. Duties in Quality and Service Policy

a. The Board of Commissioners establishes the Board of Commissioners' policy on supervising and advising on the quality and service policy and the implementation of the policy.
b. The BOC develops a plan for the BOC regarding the supervisory and advisory duties on quality and service policies and their implementation.
c. The BOC reviews the quality and service policy and its implementation.

13. Supervisory Duties on Compliance in Legislation

In carrying out its supervisory duties on compliance with legislation, the Board of Commissioners is obliged to:

a. Establish the Board of Commissioners' policy regarding supervision and advising on the Company's compliance with the prevailing laws and regulations and the Articles of Association as well as the Company's compliance with all agreements and commitments made by the Company with third parties.
b. Develop a plan for the BOC to discuss the Company's compliance with laws and regulations and agreements with third parties.\
c. Review the Company's compliance with the Articles of Association, laws and regulations, and agreements with third parties.
d. Report the results of the evaluation/review as referred to in letter c to the GMS in the annual Supervisory Report.

14. Supervisory Duties on Compliance with RKAP and RJPP

In carrying out its supervisory duties on compliance with the RKAP and RJPP, the Board of Commissioners is obliged to:

a. Establish a Board of Commissioners Policy regarding supervision and monitoring of the Board of Directors' compliance in carrying out the management of the Company with the RKAP and/or RJPP.
b. Develop a plan for the Board of Commissioners to evaluate the implementation of the RKAP.

c. Melakukan evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif Perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP.
d. Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan setelah dilakukan pembahasan.

15. Tugas dalam Pemberian Otorisasi

Dalam pemberian otorisasi, Dewan Komisaris berkewajiban:

a. Menetapkan mekanisme bagi Dewan Komisaris mengenai pemberian persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar.
b. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk membahas transaksi atau tindakan dalam lingkungan kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.
c. Memberikan otorisasi atau rekomendasi atas transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.

16. Tugas dalam Penetapan KAP

Berdasarkan usulan Komite Audit, Dewan Komisaris mengajukan calon-calon Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada RUPS yang dilengkapi dengan alasan pencalonan dan besarnya honorarium. Dalam hal pengajuan usul calon Auditor Eksternal, Dewan Komisaris mempunyai tugas:

a. Menetapkan kebijakan dan/atau prosedur Dewan Komisaris mengenai proses penunjukkan calon Auditor Eksternal dan/atau penunjukkan kembali Auditor Eksternal dan penyampaian usulan calon Auditor Eksternal kepada RUPS.
b. Menyusun rencana kerja penunjukkan dan anggaran biaya audit eksternal untuk calon Auditor, dan memasukkannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.
c. Mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

c. Evaluate the Company's achievements which include the suitability of the implementation of work programs (Company initiatives) and the budget set in the RKAP.
d. The Board of Commissioners signs the Annual Report after discussion.

15. Duties in Granting Authorization

In granting authorization, the BOC is obliged to:

a. Establish a mechanism for the Board of Commissioners regarding the approval/ recommendation of the Board of Commissioners for actions of the Board of Directors that require the recommendation/approval of the Board of Commissioners in accordance with the applicable provisions and/or the Articles of Association.
b. Develop a work plan for the Board of Commissioners to discuss transactions or actions within the authority of the Board of Commissioners or GMS.
c. Provide authorization or recommendation on transactions or actions of the Board of Directors within the scope of authority of the Board of Commissioners or GMS.

16. Duties in Determining KAP

Based on the proposal of the Audit, the Board of Commissioners shall propose candidates for Public Accounting Firm (KAP) to the GMS along with the reasons for the nomination and the amount of honorarium. In terms of submitting proposals for External Auditor candidates, the Board of Commissioners has the following duties:

a. Establish policies and/or procedures of the Board of Commissioners regarding the process of appointing External Auditor candidates and/or re-appointing External Auditors and submitting proposals for External Auditor candidates to the GMS.
b. Prepare a work plan for the appointment and budget for external audit fees for prospective Auditors, and include it in the Annual Work Plan of the Board of Commissioners.
c. Evaluate the performance of the External Auditor in accordance with the applicable provisions and standards.

17. Tugas dalam Sistem Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing*).

Dalam rangka *review* efektivitas sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing*) di lingkungan Perusahaan, Dewan Komisaris mempunyai tugas secara umum sebagai berikut:

a. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris tentang pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris.
b. Menyusun rencana Dewan Komisaris tentang pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris.
c. Memberikan arahan dan evaluasi atas pedoman dan/atau kebijakan pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan/pengaduan pelanggaran (*Whistle Blowing*) yang ditetapkan Direksi.
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan/pengaduan pelanggaran (*Whistle Blowing*).
e. Memonitor kesiapan instrumen yang digunakan sebagai media untuk menampung/menerima pengaduan dan kesiapan unit kerja/personil yang ditunjuk sebagai penerima, pengelola, dan pelaksana tindak lanjut pengaduan pelanggaran.
f. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut pengaduan pelanggaran.

18. Tugas dalam Pengawasan Kinerja Perusahaan

a. Dewan Komisaris menetapkan kebijakan dan prosedur Dewan Komisaris dalam hal:
    1. Pelaporan kepada RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
    2. Mekanisme pemberian saran segera kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada menurunnya kinerja Perusahaan tersebut.
    3. Mekanisme untuk membahas gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
b. Dewan Komisaris melakukan pembahasan tentang gejala menurunnya kinerja Perusahaan secara tepat waktu.

17. Duties in the Whistle Blowing Management and Follow-up System.

In order to review the effectiveness of the management system and follow-up of whistle blowing within the Company, the Board of Commissioners has the following general duties:

a. Establish the Board of Commissioners' policy on the supervision of the effectiveness of the implementation of external audit and internal audit, as well as the review of complaints related to the Company received by the Board of Commissioners.
b. Develop the Board of Commissioners' plan on the supervision of the effectiveness of the implementation of external audit and internal audit, as well as the review of complaints relating to the Company received by the Board of Commissioners.
c. Provide direction and evaluation of the guidelines and/or policies for the management and follow-up of whistle blowing as determined by the Board of Directors.
d. Monitor and evaluate the implementation of management policies and follow-up on whistle blowing.
e. Monitor the readiness of instruments used as a medium to accommodate/receive complaints and the readiness of work units/personnel appointed as recipients, managers, and implementers of follow-up on complaints of violations.
f. Monitoring the implementation of follow-up on violation complaints.

18. Duties in Supervision of Company Performance

a. The Board of Commissioners establishes policies and procedures of the Board of Commissioners in terms of:
    1. Reporting to the GMS if there are symptoms of declining Company performance.
    2. Mechanisms for providing immediate advice to the Board of Directors to fix problems that have an impact on the decline in the Company's performance.
    3. Mechanism to discuss symptoms of declining Company performance.
b. The Board of Commissioners discusses the symptoms of declining Company performance in a timely manner.

19. Tugas dalam Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

a. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham, dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan secara objektif.

b. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemilik modal/Pemegang Saham, kreditur, dan Pemangku Kepentingan, antara lain mengenai:
   1. Tujuan, sasaran usaha, dan strategi Perusahaan.
   2. Status Pemegang Saham utama dan para Pemegang Saham lainnya serta informasi terkait mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Saham.
   3. Kepemilikan saham silang dan jaminan utang secara silang. Penilaian terhadap Perusahaan oleh Kantor Akuntan Publik, lembaga pemeringkat kredit, dan lembaga pemeringkat lainnya.
   4. Riwayat hidup Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Eksekutif Kunci Perusahaan, serta gaji dan tunjangan mereka.
   5. Sistem pemberian honorarium untuk Kantor Akuntan Publik Perusahaan.
   6. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk Auditor Internal, Anggota Dewan Komisaris, dan Direksi.
   7. Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko.
   8. Informasi material mengenai pegawai Perusahaan dan Pemangku Kepentingan.
   9. Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perusahaan.
   10. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang berlangsung.

c. Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip GCG dan masalah material yang dihadapi.

19. Duties in Information Disclosure and Confidentiality

a. The Board of Commissioners oversees that the Board of Directors discloses important information in the Company's Annual Report and Financial Statements to Shareholders, and relevant Government Agencies in accordance with applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear, and objective manner.

b. The Board of Commissioners oversees that the Board of Directors takes the initiative to disclose not only matters required by laws and regulations but also matters that are important for decision making by capital owners/Shareholders, creditors, and Stakeholders, as follows:
   1. The Company's objectives, business goals, and strategies.
   2. Status of major shareholders and other shareholders and related information on the exercise of shareholders' rights.
   3. Cross-shareholdings and cross-debt guarantees. Assessment of the Company by the Public Accounting Firm, credit rating agencies, and other rating agencies.
   4. Curriculum vitae of the Company's Board of Commissioners, Directors and Key Executives, as well as their salaries and benefits.
   5. The honorarium system for the Company's Public Accounting Firm.
   6. Salary and allowance system for Internal Auditors, Members of the Board of Commissioners and Directors.
   7. Anticipated material risk factors, including management's assessment of the business climate and risk factors.
   8. Material information about the Company's employees and Stakeholders.
   9. Material claims filed by and/or against the Company, and matters before any judicial or arbitration body involving the Company.
   10. Potential and/or ongoing conflicts of interest.

c. In the implementation of Good Corporate Governance, the Board of Commissioners oversees that the Board of Directors actively discloses the implementation of GCG principles and material issues faced.

d. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan Perusahaan dan mengawasi agar informasi yang bersifat rahasia tidak diungkapkan sampai pengumuman mengenai hal tersebut diumumkan kepada masyarakat.
e. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Tugas dalam Pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan:

a. Dewan Komisaris menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan pelaksanaannya.
b. Dewan Komisaris menyusun rencana pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
c. Dewan Komisaris melakukan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, mencakup evaluasi terhadap arah dan visi pengembangan usaha dalam pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan dan kinerja Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.

21. Tugas dalam Pemilihan Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan:

a. Dewan Komisaris menetapkan kebijakan dan prosedur peran Dewan Komisaris dalam pengangkatan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
b. Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, serta memberi penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
c. Perseroan memastikan pemisahan peran Ketua Dewan Komisaris dan Direktur Utama sesuai prinsip checks and balances. Dalam hal Ketua Dewan Komisaris tidak independen, Perseroan menetapkan Lead/Senior Independent Commissioner serta mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan kewenangannya secara eksplisit pada dokumen tata kelola.

d. The Board of Commissioners is responsible for maintaining the confidentiality of the Company and overseeing that confidential information is not disclosed until it is made public.
e. Confidential information obtained while serving as a Member of the Board of Commissioners must remain confidential in accordance with the prevailing laws and regulations.

20. Duties in the Management of Subsidiaries/Joint Venture Companies:

a. The Board of Commissioners determines the policy of the Board of Commissioners regarding the supervision and provision of advice on the management policy of the Subsidiary/Joint Venture Company and its implementation.
b. The Board of Commissioners prepares a discussion plan regarding the management policy of the Subsidiary/Joint Venture Company.
c. The Board of Commissioners discusses the management policy of Subsidiaries/Joint Venture Companies, including an evaluation of the direction and vision of business development in the management of Subsidiaries/Joint Venture Companies and the performance of Subsidiaries/ Joint Venture Companies.

21. Duties in the Selection of Candidates for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Subsidiary/Joint Venture Company:

a. The Board of Commissioners establishes policies and procedures for the role of the Board of Commissioners in the appointment of Directors and Commissioners of Subsidiaries/ Joint Venture Companies.
b. The Board of Commissioners assesses the appointment process of the Board of Directors and Commissioners of the Subsidiary/Joint Venture Company, and provides a written determination (agree or disagree) to the appointment process of the Board of Directors and Commissioners of the Subsidiary/Joint Venture Company.
c. The Company ensures the separation of roles between the Chairman of the Board of Commissioners and the CEO in accordance with the principle of checks and balances. In the event that the Chairman of the Board of Commissioners is not independent, the Company appoints a Lead/Senior Independent Commissioner and explicitly defines their role, responsibilities, and authority in the governance document.

22. Tugas Menilai Kinerja Direksi

Dalam penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris berkewajiban:

a. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individual dan menyampaikan hasil penilaian kepada Pemegang Saham.

b. Menyusun rencana mengenai pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham.

c. Melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegial dan individu dengan realisasi pencapaian masing-masing.

d. Menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara tahunan.

22. Duty to Assess the Performance of the Board of Directors

In assessing the performance of the BOD, the BOC is obliged to:

a. Establish a policy of the Board of Commissioners regarding the assessment of the performance of the Board of Directors collegially and individually and submit the results of the assessment to the Shareholders.

b. Develop a plan for monitoring the performance of the BOD and reporting to the Shareholders.

c. Conduct performance assessment of the BOD based on key performance indicators included in the Management Contract of the BOD on a collegial and individual basis with the realization of their respective achievements.

d. Submit the results of the performance assessment of the Board of Directors collegially and individually to the GMS in the annual report of the Board of Commissioners' supervisory duties.

23. Tugas Menilai Kinerja Direksi

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko untuk melakukan tugasnya dalam hal menetapkan imbalan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris sesuai kedudukan, peran, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris berkewajiban:

a. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengusulan remunerasi Direksi.

b. Menyusun rencana Komisaris menelaah pengusulan remunerasi Direksi.

c. Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan bagi Dewan Komisaris.

d. Memberikan penjelasan lengkap kepada RUPS mengenai sistem untuk pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan bagi Dewan Komisaris serta rincian mengenai uang jasa dan tunjangan purna jabatan yang diterima oleh Dewan Komisaris yang sedang menjabat.

23. Asses The Board of Directors' Performance Duties

The Board of Commissioners is assisted by the Nomination, Remuneration and Risk Oversight Committee to perform its duties in terms of determining the remuneration given to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners in accordance with the position, role, duties, responsibilities and authority of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors, the Board of Commissioners is obliged to:

a. Establish the policy of the Board of Commissioners regarding the proposal of remuneration of the Board of Directors.

b. Develop a plan for the Board of Commissioners to review the proposed remuneration of the Board of Directors.

c. The Board of Commissioners may propose to the GMS regarding the system for providing service fees and post-employment benefits for the Board of Commissioners.

d. Provide a detailed explanation to the GMS regarding the system for the provision of service fees and after-office allowances for the Board of Commissioners as well as details regarding the service fees and after-office allowances received by the incumbent Board of Commissioners.

e. Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penggajian, fasilitas, dan/atau pemberian tunjangan bagi Direksi.
f. Memberikan penjelasan lengkap kepada RUPS mengenai sistem penggajian, fasilitas dan/atau pemberian tunjangan bagi Direksi serta rincian mengenai gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan yang diterima Direksi yang sedang menjabat.
g. Dewan Komisaris dapat merekomendasikan kepada RUPS mengenai sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai.

24. Tugas dalam Nominasi dan Seleksi Calon Direksi

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko terkait nominasi atau pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris. Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris antara lain:

a. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengusulan remunerasi Direksi.
b. Menyusun rencana Komisaris menelaah pengusulan remunerasi Direksi.
c. Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan bagi Dewan Komisaris.
d. Memberikan penjelasan lengkap kepada RUPS mengenai sistem untuk pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan bagi Dewan Komisaris serta rincian mengenai uang jasa dan tunjangan purna jabatan yang diterima oleh Dewan Komisaris yang sedang menjabat.
e. Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penggajian, fasilitas, dan/atau pemberian tunjangan bagi Direksi.
f. Memberikan penjelasan lengkap kepada RUPS mengenai sistem penggajian, fasilitas dan/atau pemberian tunjangan bagi Direksi serta rincian mengenai gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan yang diterima Direksi yang sedang menjabat. Dewan Komisaris dapat merekomendasikan kepada RUPS mengenai sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai.

e. The Board of Commissioners may propose to the GMS regarding the system of salary, facilities, and/or allowances for the Board of Directors.
f. Provide a complete explanation to the GMS regarding the payroll system, facilities and/or allowances for the Board of Directors as well as details regarding the salary, facilities and/or allowances received by the incumbent Board of Directors.
g. The Board of Commissioners may recommend to the GMS the compensation system and other benefits in the event of staff reduction.

24. Duties in Nomination and Selection of Candidates for the Board of Directors

The Board of Commissioners is assisted by the Nomination, Remuneration and Risk Oversight Committee regarding the nomination or proposal of a person to be appointed as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners. The duties and obligations of the Board of Commissioners include:

a. The Board of Commissioners establishes policies and selection criteria for candidates for the Board of Directors.
b. The Board of Commissioners conducts a review and/or research/examination of candidates for the Board of Directors proposed by the Board of Directors, before being submitted to the Shareholders.
c. The BOC proposes the new BOD candidates to the GMS.
d. Provide a full explanation to the GMS regarding the system for the provision of fees and post-employment benefits for the Board of Commissioners and details of the costs and post-employment benefits received by the incumbent Board of Commissioners.
e. The Board of Commissioners may propose to the GMS regarding the payroll system, facilities, and/or allowances for the Board of Directors.
f. Provide a complete explanation to the GMS regarding the payroll system, facilities, and/or allowances for the Board of Directors and details of the salary, facilities, and/or allowances received by the incumbent Board of Directors. The Board of Commissioners may recommend to the GMS regarding the compensation system and other benefits in the event of staff reduction.

PERNYATAAN BAHWA DEWAN KOMISARIS MEMILIKI PEDOMAN ATAU PIAGAM (CHARTER) DEWAN KOMISARIS
STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS HAVING GUIDELINES OR CHARTER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam menjalin hubungan yang baik dengan organ Perseroan lainnya terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki Tata Laksana Kerja (Board Manual) bagi Dewan Komisaris, sebagai pedoman kerja Dewan Komisaris yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.0035/2024 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual). Board Manual tersebut berisi panduan bagi Dewan Komisaris yang berisikan, antara lain:

1. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris
2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
4. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
5. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
6. Etika Jabatan
7. Rapat Dewan Komisaris
8. Hubungan Kerja dengan Direksi
9. Benturan Kepentingan Dewan Komisaris
10. Komite-Komite Dewan Komisaris
11. Sekretaris Dewan Komisaris.

In maintaining effective relationships with other corporate organs in executing its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has established a Board Manual as a working guideline. This Board Manual was approved through a Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.0035/2024 concerning the Guidelines for the Working Procedures of the Board of Commissioners and the Board of Directors (Board Manual). This Board Manual is contains guidelines for the Board of Commissioners, is as follows :

1. Requirements and Composition of the Board of Commissioners
2. Responsibilities of the Board of Commissioners
3. Duties and Obligations of the Board of Commissioners
4. Performance Evaluation of the Board of Commissioners
5. Rights and Authorities of the Board of Commissioners
6. Code of Ethics
7. Board of Commissioners Meetings
8. Working Relationship with the Board of Directors
9. Conflict of Interest of the Board of Commissioners
10. Board of Commissioners Committees
11. Secretary to the Board of Commissioners

Direksi dan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk menyatakan berkomitmen untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan standar moral yang tinggi serta mengacu pada praktik terbaik dan Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang dapat dilihat pada: https://www.wika-beton.co.id/pedoman-tata-kelola-perusahaan.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Beton Tbk are committed to implementing Good Corporate Governance with high ethical standards, while adhering to best practices and the Guidelines for the Working Procedures of the Board of Commissioners and the Board of Directors, which can be accessed at: https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT DEWAN KOMISARIS BERSAMA DIREKSI DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT TERMASUK KEHADIRAN DALAM RUPS
POLICY AND IMPLEMENTATION OF THE FREQUENCY OF BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS, JOINT MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS, AND THE LEVEL OF ATTENDANCE OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN THE MEETING INCLUDING ATTENDANCE AT THE GMS

Perseroan mengatur kebijakan mengenai frekuensi dan pelaksanaan rapat internal serta rapat gabungan dengan Direksi guna mendukung efektivitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat. Rapat-rapat tersebut dijadwalkan sebelum akhir tahun buku untuk tahun berikutnya dan menjadi bagian dari *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris, guna memastikan kesiapan serta alokasi waktu yang optimal dalam membahas isu-isu strategis, kinerja perusahaan, dan kebijakan tata kelola.

The Company has established a policy regarding the frequency and implementation of internal meetings as well as joint meetings with the Board of Directors to support the effectiveness of its supervisory and advisory functions. These meetings are scheduled before the end of the financial year for the following year and are incorporated into the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI), ensuring optimal preparation and time allocation for discussions on strategic issues, company performance, and governance policies.

KEBIJAKAN PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam Piagam Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) melalui pengukuhan/ratifikasi pemberlakuan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Nomor WIKA-SUB-KP.01.01 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi Nomor WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01 dalam memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi mengatur pelaksanaan rapat Dewan Komisaris antara lain:

1. Kewajiban Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris
   a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
   b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Quorum dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris maupun rapat bersama Direksi dan Komite-Komite Dewan Komisaris.
3. Tata tertib penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris maupun rapat bersama Direksi dan Komite-Komite Dewan Komisaris.
4. Pengambilan keputusan dalam rapat.
5. Pembuatan risalah rapat Dewan Komisaris maupun rapat bersama Direksi dan Komite-Komite Dewan Komisaris.

Perseroan memperkuat peran pengawasan Dewan Komisaris atas risiko dan peluang keberlanjutan melalui agenda rapat dan pelaporan berkala. Perseroan mengungkapkan ringkasan aktivitas pengawasan tersebut pada laporan dan/atau laman keberlanjutan.

Perseroan meninjau ketentuan kuorum pengambilan keputusan rapat Dewan agar selaras dengan praktik tata kelola terbaik. Perseroan mengungkapkan ketentuan kuorum yang berlaku pada board manual/piagam dewan yang dapat diakses publik.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING IMPLEMENTATION POLICY

The implementation of the Board of Commissioners meeting has been regulated in the Charter of the Board of Commissioners and Directors (Board Manual) through the confirmation/ratification of the enactment of the Integrated Governance Policy Number WIKA-SUB-KP.01.01 and Guidelines for Subsidiary Management Principles and Integrated Governance Number WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01 in fulfilling the Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 regarding the Implementation of Public Company Governance Guidelines.

The Board of Commissioners and Board of Directors Board Manual regulates the implementation of Board of Commissioners meetings, including:

1. Obligations of the Board of Commissioners Meeting
   a. Meetings of the Board of Commissioners shall be held periodically at least 1 (one) time in 1 (one) month.
   b. The Board of Commissioners shall hold a joint meeting with the Board of Directors periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months.
2. Quorum and procedures for organizing meetings of the Board of Commissioners and joint meetings of the Board of Directors and Committees of the Board of Commissioners.
3. Procedures for organizing meetings of the Board of Commissioners and joint meetings of the Board of Directors and Committees of the Board of Commissioners.
4. Decision-making in the meeting.
5. Minutes of meetings of the Board of Commissioners and joint meetings of the Board of Directors and Committees of the Board of Commissioners.

The Company strengthens the Supervisory Board's oversight role on sustainability risks and opportunities through meeting agendas and periodic reporting. The Company discloses a summary of these oversight activities in its reports and/or on its sustainability page

The Company reviews the quorum requirements for Board meeting decisions to ensure they are in line with best governance practices. The Company discloses the applicable quorum provisions in the board manual/charter, which is accessible to the public.

PELAKSANAAN RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

THE BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

During 2025, the Board of Commissioners held 12 (twelve) meetings with the following attendance details:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris

Frequency of Meetings and Attendance of Members of the Board of Commissioners in Internal Meetings of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Wilan Oktavian	Komisaris Utama President Commissioner	7	7	100%
Tjia Marwan	Komisaris Commissioner	7	7	100%
Dwi Gawan Islandhi H. B.	Komisaris Independen Independent Commissioner	7	7	100%
Eko Sujiyanto*	Komisaris Utama President Commissioner	5	5	100%
R. Permadi Mulajaya*	Komisaris Commissioner	5	5	100%
Miftachul Munir*	Komisaris Commissioner	5	5	100%
Iswandi Irman*	Komisaris Independen Independent Commissioner	5	5	100%
Nita Prihutaminingrum*	Komisaris Independen Independent Commissioner	5	5	100%

Catatan I Notes
* Menjabat hingga 2 Juni 2025, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 25 tanggal 12 Juni 2025.
* Served until June 2, 2025, as stated in the Deed of Statement of the GMS Resolution No. 25 dated June 12, 2025.

Mata Acara Rapat Internal Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Meeting Agenda

No	Nomor Risalah Minutes Number	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda/Pembahasan Rapat Meeting Agenda/Discussion
1	01/RIS-KOM/WIKABETON/2025	30 Januari 2025 January 30, 2025	1. Evaluasi Kinerja Hasil Usaha s.d Desember 2024 PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Agenda Lainnya 1. Business Performance Evaluation up to December 2024 – PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Other Agenda Items
2	02/RIS-KOM/WIKABETON/2025	26 Februari 2025 February 26, 2025	1. Evaluasi Kinerja Hasil Usaha s.d Januari 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Agenda Lainnya 1. Business Performance Evaluation up to January 2025 – PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Other Agenda Items
3	03/RIS-KOM/WIKABETON/2025	20 Maret 2025 March 20, 2025	1. Evaluasi Kinerja Hasil Usaha s.d Februari 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Agenda Lainnya 1. Business Performance Evaluation up to February 2025 – PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Other Agenda Items
4	04/RIS-KOM/WIKABETON/2025	30 April 2025 April 30, 2025	1. Evaluasi Kinerja Hasil Usaha s.d Maret 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Agenda Lainnya 1. Business Performance Evaluation up to March 2025 – PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Other Agenda Items

No	Nomor Risalah Minutes Number	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda/Pembahasan Rapat Meeting Agenda/Discussion
5	05/RIS-KOM/WIKABETON/2025	28 Mei 2025 May 28, 2025	1. Evaluasi Kinerja Hasil Usaha s.d April 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Agenda Lainnya 1. Business Performance Evaluation up to April 2025 – PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Other Agenda Items
6	06/RIS-KOM/WIKABETON/2025	25 Juni 2025 June 25, 2025	1. Evaluasi Kinerja Hasil Usaha s.d Mei 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Agenda Lainnya 1. Business Performance Evaluation up to May 2025 – PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Other Agenda Items
7	07/RIS-KOM/WIKABETON/2025	29 Juli 2025 July 29, 2025	1. Evaluasi Kinerja Hasil Usaha s.d Juni 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Agenda Lainnya 1. Business Performance Evaluation up to June 2025 – PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Other Agenda Items
8	08/RIS-KOM/WIKABETON/2025	21 Agustus 2025 August 21, 2025	1. Evaluasi Kinerja Hasil Usaha s.d Juli 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Agenda Lainnya 1. Business Performance Evaluation up to July 2025 – PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Other Agenda Items
9	09/RIS-KOM/WIKABETON/2025	19 September 2025 September 19, 2025	1. Evaluasi Kinerja Hasil Usaha s.d Agustus 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Agenda Lainnya 1. Business Performance Evaluation up to August 2025 – PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Other Agenda Items
10	10/RIS-KOM/WIKABETON/2025	17 Oktober 2025 October 17, 2025	1. Evaluasi Kinerja Hasil Usaha s.d September 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Pembahasan RKAP Tahun 2026 & RJPP 3. Agenda Lainnya 1. Business Performance Evaluation up to September 2025 – PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Discussion on the 2026 Work Plan and Budget (RKAP) and the Long-Term Corporate Plan (RJPP) 3. Other Agenda Items
11	11/RIS-KOM/WIKABETON/2025	18 November 2025 November 18, 2025	1. Evaluasi Kinerja Hasil Usaha s.d Oktober 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Agenda Lainnya 1. Business Performance Evaluation up to October 2025 – PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Other Agenda Items
12	12/RIS-KOM/WIKABETON/2025	16 Desember 2025 December 16, 2025	1. Evaluasi Kinerja Hasil Usaha s.d November 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Agenda Lainnya 1. Business Performance Evaluation up to November 2025 – PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Other Agenda Items

PELAKSANAAN FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS BERSAMA DIREKSI

Hingga 31 Desember 2025, Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan Rekapitulasi Tingkat Kehadiran dan Agenda Rapat Sebagai Berikut:

FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVEL OF BOARD OF COMMISSIONERS IN MEETINGS WITH THE BOARD OF DIRECTORS

As of December 31, 2025, the Board of Commissioners and the Board of Directors have held 12 (twelve) meetings with the following recapitulation of attendance and meeting agenda:

Pelaksanaan Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi
Frequency and Attendance Level of Board of Commissioners in Meetings with the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**				
Wilan Oktavian	Komisaris Utama President Commissioner	7	7	100%
Tjia Marwan	Komisaris Commissioner	7	7	100%
Dwi Gawan Islandhi H. B.	Komisaris Independen Independent Commissioner	7	7	100%
Eko Sujiyanto*	Komisaris Utama President Commissioner	5	5	100%
R. Permadi Mulajaya*	Komisaris Commissioner	5	5	100%
Miftachul Munir*	Komisaris Commissioner	5	5	100%
Iswandi Irman*	Komisaris Independen Independent Commissioner	5	5	100%
Nita Prihutaminingrum*	Komisaris Independen Independent Commissioner	5	5	100%
Direksi **Board of Directors**				
Kuntjara	Direktur Utama President Director	12	12	100%
Rija Judaswara	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Business Development	12	12	100%
Agus Pramono	Direktur Operasi dan *Supply Chain Management* Director of Operations and Supply Chain Management	12	12	100%
Syailendra Ogan	Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	12	12	100%
Verly Widiantoro	Direktur Teknik dan Produksi Director of Engineering and Production	12	12	100%

Catatan I Notes
* Menjabat hingga 2 Juni 2025, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 25 tanggal 12 Juni 2025.
* Served until June 2, 2025, as stated in the Deed of Statement of the GMS Resolution No. 25 dated June 12, 2025.

Mata Acara Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi
Agenda of the Board of Commissioners Meeting with the Board of Directors

No	Nomor Risalah Minutes Number	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda/Pembahasan Rapat Meeting Agenda/Discussion
1	01/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	30 Januari 2025 January 30, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Desember 2024 3. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perusahaan Tahun 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk 4. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to December 2024 3. Approval of the 2025 Work Plan and Budget of PT Wijaya Karya Beton Tbk 4. Other Agenda Items

No	Nomor Risalah Minutes Number	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda/Pembahasan Rapat Meeting Agenda/Discussion
2	02/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	26 Februari 2025 February 26, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Januari 2025 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to January 2025 3. Other Agenda Items
3	03/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	20 Maret 2025 March 20, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Februari 2025 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to February 2025 3. Other Agenda Items
4	04/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	30 April 2025 April 30, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Maret 2025 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to March 2025 3. Other Agenda Items
5	05/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	28 Mei 2025 May 28, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d April 2025 3. Pengenalan Perusahaan kepada Dewan Komisaris 4. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to April 2025 3. Company's Introduction to the Board of Commissioners 4. Other Agenda Items
6	06/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	25 Juni 2025 June 25, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Mei 2025 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to May 2025 3. Other Agenda Items
7	07/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	31 Juli 2025 July 31, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Juni 2025 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to June 2025 3. Other Agenda Items
8	08/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	19 Agustus 2025 August 19, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Juli 2025 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to July 2025 3. Other Agenda Items
9	09/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	23 September 2025 September 23, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Agustus 2025 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to August 2025 3. Other Agenda Items
10	10/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	21 Oktober 2025 October 21, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d September 2025 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to September 2025 3. Other Agenda Items

No	Nomor Risalah Minutes Number	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda/Pembahasan Rapat Meeting Agenda/Discussion
11	11/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	24 November 2025 November 24, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Oktober 2024 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to October 2025 3. Discussion of 2025 RKAP & RJPP 4. Other Agenda Items
12	12/RIS-KOMDIRSUS/WIKA BETON/2025	5 Desember 2025 December 5, 2025	Pembahasan RKAP Tahun RJPP 2026-2030 Discussion of 2026-2030 RJPP RKAP
13	12/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2025	17 Desember 2025 December 17, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Lalu 2. Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d November 2025 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on the Previous Month's Joint Meeting 2. Company Operating Performance up to November 2025 3. Other Agenda Items

KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DALAM RUPS (RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM)

Kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025. Seluruh peserta yang hadir dalam rapat tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan dan tata cara pelaksanaan RUPS.

BOARD OF COMMISSIONERS ATTENDANCE IN GMS (GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS)

Attendance at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2024 Fiscal Year was held on June 2, 2025. All attendees were duly recorded in accordance with the applicable procedures and regulations governing the AGMS.

Kehadiran dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 2 Juni 2025
Attendance in Annual GMS for the Fiscal Year dated June 2, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description
Eko Sujiyanto	Komisaris Utama President Commissioner	Hadir secara fisik Physically attend
R. Permadi Mulajaya	Komisaris Commissioner	Hadir secara fisik Physically attend
Miftachul Munir	Komisaris Commissioner	Hadir secara fisik Physically attend
Iswandi Imran	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir secara fisik Physically attend
Nita Prihutaminingrum	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir secara fisik Physically attend

Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa Tanggal 26 Juni 2025
Attendance in Extraordinary GMS dated June 26, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description
Tjia Marwan	Komisaris Commissioner	Hadir secara fisik Physically attend
Dwi Gawan Islandhi H.B.	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir secara fisik Physically attend

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
TRAINING AND/OR COMPETENCY IMPROVEMENT FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sebagaimana diatur dalam *Board Manual*, Dewan Komisaris diharapkan mempunyai kemampuan dan keahlian terhadap pengelolaan bisnis Perusahaan.

As stipulated in the Board Manual, members of the Board of Commissioners are expected to possess the necessary knowledge and expertise in managing the Company's

Agar menunjang hal tersebut, Perusahaan mewajibkan anggota Dewan Komisaris mengikuti program pelatihan serta perkembangan kompetensi yang cukup.

business. To support this, the Company requires members of the Board of Commissioners to participate in relevant training programs and continuous competency development.

Kebijakan Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan peran strategis Dewan Komisaris dalam mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan bisnis Perusahaan di industri beton. Perseroan memiliki kebijakan yang mengatur tentang pemberian kesempatan yang sama kepada insan WIKA Beton untuk mendapatkan penugasan, promosi, dan pemberhentian kerja termasuk pelatihan dalam Kode Etik Perseroan. Program peningkatan pengetahuan dan kompetensi secara rutin bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Program ini mencakup pelatihan, seminar, workshop, serta diskusi panel dengan pakar industri, regulator, dan akademisi guna memastikan bahwa Dewan Komisaris memiliki pemahaman yang selalu terkini terkait perkembangan industri beton, tren bisnis, serta perubahan regulasi yang dapat berdampak pada operasional dan strategi Perusahaan.

Policy on Training and/or Competency Improvement for Members of the Board of Commissioners

To ensure the effectiveness of the Board of Commissioners' oversight and strategic roles in supporting the growth and sustainability of the Company's business in the concrete industry, the Company has established a policy that provides equal opportunities for WIKA Beton employees to receive assignments, promotions, and terminations, including training in the Company's Code of Ethics. The Company also regularly implements programs to enhance the knowledge and competencies of all members of the Board of Commissioners. These programs include training, seminars, workshops, and panel discussions with industry experts, regulators, and academics to ensure that the Board remains up-to-date on the latest developments in the concrete industry, business trends, and regulatory changes that may impact the Company's operations and strategy.

Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris yang Baru Diangkat

Orientasi atau pengenalan menjadi prasyarat bagi anggota baru Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam *Board Manual*. Program tersebut bertujuan agar Dewan Komisaris, yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang beragam, dapat memahami dengan baik kegiatan dan kondisi perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan program pengenalan ini.

Orientation Program for Newly Appointed Members of the Board of Commissioners

Orientation is a requirement for new members of the Board of Commissioners, as outlined in the Board Manual. The program aims to help members, who come from diverse backgrounds and experiences, gain a thorough understanding of the Company's activities and conditions. The Corporate Secretary is responsible for implementing this orientation program.

Program orientasi Dewan Komisaris memuat antara lain:

1. Prinsip-prinsip GCG, pemahaman terhadap CoCG, dan CoC;
2. Gambaran umum visi dan misi, tujuan dan budaya Perseroan, struktur organisasi, RJPP dan RKAP, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Kewenangan Dewan Komisaris;
4. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;

The Board of Commissioners' orientation program includes, but is not limited to:

1. Principles of Good Corporate Governance (GCG), understanding the Code of Corporate Governance (CoCG) and Code of Conduct (CoC);
2. An overview of the Company's vision and mission, goals, culture, organizational structure, long-term and annual business plans (RJPP and RKAP), activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
3. The authority of the Board of Commissioners;
4. The duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors;

5. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kebijakan Perseroan, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Persaingan Usaha, Peraturan Menteri BUMN, dan lain-lain;
6. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan.

5. Relevant laws and regulations, as well as the Company's policies, such as the Limited Liability Company Law, the Corruption Eradication Law, the Competition Law, the Ministry of SOE Regulations, and others;
6. Other matters related to the Company's activities.

Di tahun 2025, Perseroan melaksanakan Program Orientasi untuk anggota Dewan Komisaris baru yang diberikan kepada :

1. Bapak Wilan Oktavian pada tanggal 25 Juni 2025.
2. Bapak Dwi Gawan Islandhi pada tanggal 25 Juni 2025
3. Bapak Tjia Marwan pada tanggal 25 Juni 2025

In 2025, the Company implemented an Orientation Program for new members of the Board of Commissioners, which was provided to:

1. Mr. Wilan Oktavian on June 25, 2025.
2. Mr. Dwi Gawan Islandhi on June 25, 2025
3. Mr. Tjia Marwan on June 25, 2025

Program tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan serta memberikan gambaran kondisi Perusahaan.

The program is expected to provide insight and an overview of the Company's condition.

Pelatihan Dewan Komisaris 2025

Pada tahun 2025, anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program pelatihan dan peningkatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Board of Commissioners Training 2025

In 2025, the members of the Board of Commissioners who participated in training and development programs are listed in the table below:

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Diikuti anggota Dewan Komisaris dalam Tahun Buku
Training and/or Competency Development Followed by members of the Board of Commissioners in Fiscal Year

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Seminar/ Sertifikasi Training/Seminar/ Certification	Tempat Place	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Wilan Oktavian	Komisaris Utama President Commissioner	Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV	Jakarta	27-28 Agustus 2025 August 27-28, 2025	PT RAP Academy
Tjia Marwan	Komisaris Commissioner	Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV	Jakarta	27-28 Agustus 2025 August 27-28, 2025	PT RAP Academy
Dwi Gawan Islandhi H. B.	Komisaris Independen Independent Commissioner	Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV	Jakarta	27-28 Agustus 2025 August 27-28, 2025	PT RAP Academy

KOMISARIS INDEPENDEN
INDEPENDENT COMMISSIONERS

Demi menciptakan suasana yang netral, bebas dari keterkaitan, dan memastikan keadilan, Perseroan mengangkat anggota Dewan Komisaris dari luar entitas perusahaan dan yang tidak memiliki afiliasi dengan Pemegang Saham Mayoritas, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Penunjukan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

To foster a neutral environment, free from affiliations, and ensure fairness, the Company appoints members of the Board of Commissioners from external entities not associated with the Majority Shareholder, members of the Board of Directors, or other members of the Board of Commissioners. Such appointments are made in accordance with the provisions outlined in the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Directors and Commissioners of Issuers or Public

("Peraturan OJK 33/2014"). Selain itu, Perseroan juga merujuk pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Companies ("OJK Regulation 33/2014"). Additionally, the Company adheres to the Minister of State-Owned Enterprise Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Tugas pengawasan atas operasional Perseroan secara umum diemban oleh Komisaris Independen, yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian seluruh aspek Perseroan dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku. Tanggung jawab khusus Komisaris Independen juga mencakup mewakili kepentingan Pemegang Saham Minoritas Perseroan.

The oversight responsibility for the Company's operations, in general, is undertaken by the Independent Commissioners, ensuring that all aspects of the Company's activities comply with relevant laws and regulations. The Independent Commissioners are also specifically accountable for representing the interests of the Company's Minority Shareholders.

Komposisi dan Masa Jabatan Komisaris Independen

Independen Saat ini, Perseroan memiliki 1 (satu) Komisaris Independen dan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mensyaratkan bahwa jumlah Komisaris Independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris.

Perseroan menetapkan batas masa jabatan Komisaris Independen sesuai yang tertuang pada Board Manual yaitu 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan selanjutnya.

Composition and Term of Office of Independent Commissioner

The Company currently has 1 (one) Independent Commissioner and has complied with POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which requires that Independent Commissioners represent at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners.

The Company stipulates the term of office of the Independent Commissioner in accordance with the Board Manual, whereby 1 (one) term of office for members of the Board of Commissioners is a maximum of 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) subsequent term.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria penentuan Komisaris Independen senantiasa mengacu pada POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain:

Criteria for Determining Independent Commissioners

The criteria for determining Independent Commissioners always refer to POJK No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, namely:

No	Kriteria Criteria	Komisaris Independen Independent Commissioners Dwi Gawan Islandhi H. B.	
		Ya Yes	Tidak No
1	Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan yang terafiliasi dengan PT Wijaya Karya Beton Tbk Does not serve as a Director in a Company affiliated with PT Wifaya Karya Beton Tbk	✓	-
2	Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk Departemen, Lembaga dan Kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Not working for the Government including departments, institutions and the military within the last three years	✓	-

No	Kriteria Criteria	Komisaris Independen Independent Commissioners Dwi Gawan Islandhi H. B.	
		Ya Yes	Tidak No
3	Tidak bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PT Wijaya Karya Beton Tbk kecuali dalam tugas saya sebagai Komisaris Independen Do not work or have the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of PT Wijaya Karya Beton Tbk except in my duties as an Independent Commissioner	✓	-
4	Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PT Wijaya Karya Beton Tbk Does not have any direct or indirect shares in PT Wijaya Karya Beton Tbk.	✓	-
5	Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Mayoritas PT Wijaya Karya Beton Tbk. Does not have an affiliation relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or Majority Shareholders of PT Maya Karya Beton Tbk.	✓	-
6	Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan anggota Komisaris Independen dan i kalangan di luar PT Wijaya Karya Beton Tbk untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup PT Wijaya Karya Beton Tbk. Free from interests and business activities or other relationships that may hinder or interfere with the ability of Independent Commissioners from outside PT Wijaya Karya Beton Tbk to act or think freely within the scope of PT Maya Karya Beton Tbk.	✓	-
7	Akan bertindak independen dalam melaksanakan aktivitas fungsi pengawasan operasional PT Wijaya Karya Beton Tbk selama saya menjabat sebagai Komisaris Independen termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Will act independently in carrying out the activities of the operational supervision function of PT Wijaya Karya Beton Tbk during my tenure as an Independent Commissioner, including in the decision-making process.	✓	-

URAIAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS TAHUN BUKU
BRIEF DESCRIPTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES IN FISCAL YEAR

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat Internal Dewan Komisaris bersama Organ Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi.
3. Menyelenggarakan Perjalanan Dinas Dewan Komisaris.
4. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris.
5. Bersama dengan Komite melaksanakan fungsi pengawasan.
6. Memberikan arahan, nasihat kepada Direksi, melakukan pengawasan terhadap keputusan-keputusan Perseroan.
7. Dewan Komisaris menetapkan kerangka rencana suksesi untuk Direktur Utama dan manajemen kunci guna memastikan kesinambungan kepemimpinan. Perseroan mengungkapkan kerangka suksesi, pihak yang bertanggung jawab, dan mekanisme peninjauan berkala pada laporan tahunan.

The Board of Commissioners carried out the following tasks throughout 2025:

1. Held internal meetings of the Board of Commissioners with the Board's supporting bodies.
2. Organized joint meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors.
3. Conducted business trips for the Board of Commissioners.
4. Organized education and training for the Board of Commissioners.
5. Worked with committees to carry out oversight functions.
6. Provided guidance and advice to the Board of Directors, and monitored the Company's decisions.
7. The Board of Commissioners establishes a succession plan framework for the President Director and key management to ensure leadership continuity. The Company discloses the succession framework, responsible parties, and periodic review mechanisms in its annual report.

Keputusan Dewan Komisaris Tahun Buku

Salah satu tugas utama Dewan Komisaris adalah memberikan rekomendasi dan keputusan terkait dengan jalannya aktivitas bisnis Perseroan. Hingga 31 Desember

Board of Commissioners' Decisions in Fiscal Year

One of the main duties of the Board of Commissioners is to provide recommendations and decisions regarding the Company's business activities. As of December 31, 2025,

2025, pelaksanaan tugas tersebut oleh Dewan Komisaris tercermin dalam perihal dan pengesahan sebagai berikut:

the Board of Commissioners' performance of this duty is reflected in the following matters and approvals:

No	Perihal Subject	Nomor Surat Keputusan Decree No
1.	Keputusan Pengangkatan Staf Sekretariat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk Decision on the Appointment of Secretariat Staff for the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Beton Tbk	SK.01/DK-WB/III/2025
2.	Keputusan Penunjukkan Pimpinan RUPST TB 2024 Decision on the Appointment of the Chair of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	SK.02/DK-WB/V/2025
3.	Keputusan Penunjukan Pimpinan RUPSLB 2025 Decision on the Appointment of the Chair of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders	SK.03/DK-WB/VI/2025
4.	Keputusan Pengangkatan Komite NR PR Decision on the Appointment of the NR PR Committee	SK.04/DK-WB/VII/2025
5.	Keputusan Pengangkatan Komite Audit Decision on the Appointment of the Audit Committee	SK.05/DK-WB/VII/2025
6.	Keputusan Pengangkatan Komite TKT & GCG Decision on the Appointment of the TKT & GCG Committee	SK.06/DK-WB/VII/2025
7.	Penentapan Charter Komite NR & PR Establishment of the NR & PR Committee Charter	SK.07/DK-WB/VII/2025
8.	Penetapan Charter Komite TKT dan GCG Establishment of the TKT and GCG Committee Chart	SK.08/DK-WB/VII/2025

PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SERTA MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS AND EACH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi telah diatur secara rinci dalam Board Manual, yang mencakup mekanisme penilaian kinerja secara kolektif maupun individu. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan strategis Perusahaan. Penilaian dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik konstruktif bagi pengembangan kompetensi dan efektivitas pengelolaan Perusahaan.

The performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is detailed in the Board Manual, covering the mechanisms for evaluating both collective and individual performance. This mechanism is intended to ensure that all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors perform their duties and responsibilities effectively, efficiently, and in alignment with the Company's strategic objectives. Assessments are conducted periodically to evaluate performance achievements and to provide constructive feedback for the development of competencies and the enhancement of the Company's management effectiveness.

Prosedur, Kriteria dan Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Secara garis besar, evaluasi kinerja Dewan Komisaris bergantung pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang tertera dalam perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan, serta arahan Pemegang Saham. Sejak awal masa jabatannya, kriteria penilaian resmi telah diinformasikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris.

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui beberapa mekanisme, termasuk RUPS, dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI). Kriteria yang dipergunakan dalam proses penilaian merujuk pada Surat

Performance Assessment Implementation Procedure & Criteria

Board of Commissioners Performance Assessment Broadly speaking, the Board of Commissioners' performance is determined based on the duties and obligations listed in the applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and Shareholders' aspiration. The formal evaluation criteria have been transparently described to the Board of Commissioners since their appointment.

Board of Commissioners' performance is assessed through the GMS, as well as Key Performance Indicator (KPI) achievements. The assessment criteria refers to the Circular Letter of the Financial Services Authority

Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 mengenai Panduan Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

a. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui Mekanisme RUPS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan evaluasi kolegial merupakan faktor krusial dalam pertimbangan Pemegang Saham/RUPS untuk melakukan pemecatan atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris terkait. Oleh karena itu, evaluasi kinerja ini dilaksanakan saat tanggung jawab laporan tahunan dibahas, yang membahas perkembangan Perseroan dan pencapaian yang telah diperoleh. Setelah itu, RUPS dapat mengumumkan dan memberikan pembebasan penuh tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris untuk kinerja dalam tahun berjalan. Selanjutnya, RUPS juga berhak menentukan skema remunerasi dan kompensasi bagi Dewan Komisaris.

No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.

a. Performance Assessment of the Board of Commissioners through the GMS Mechanism

Performance evaluation result of individual and collegial is one of the basic considerations for Shareholders/GMS to dismiss and/or reappoint the Member of the Board of Commissioners. Therefore, the assessment is included within the accountability report for the fiscal year which discusses the Company's performance and achievements. Afterwards, the GMS can declare and provide full discharge of accountability (acquit et de charge) to the Board of Commissioners for their performance in the current year. The GMS can also determine the remuneration and compensation scheme for the Board of Commissioners.

Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS
Board of Commissioners Performance tAssessment Procedure by the GMS

Pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris selama tahun buku dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan untuk kemudian memperoleh pernyataan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) bagi Dewan Komisaris atas tugas pengawasan sampai dengan berakhirnya tahun buku.
The implementation of supervisory duties carried out by the Board of Commissioners during the fiscal year is reported to the Shareholders through the Annual General Meeting of Shareholders to obtain a statement of full release (acquit et de charge) for the Board of Commissioners for their supervisory duties until the end of the fiscal year.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS
Criteria for the Assessment of the Board of Commissioners Performance by the GMS

RUPS menilai dan mengevaluasi kinerja pengawasan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan sebagai cerminan atas efektivitas pengawasan Dewan Komisaris secara kolegial.
The GMS assesses and evaluates the supervisory performance of the Board of Commissioners by considering the Company's performance as a reflection of the effectiveness of collegiate supervision of the Board of Commissioners.

Pihak yang Melakukan Assessment
Assessor

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam RUPS dilakukan oleh Pemegang Saham.
The performance evaluation of the Board of Commissioners at the GMS is carried out by the Shareholders.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS
Results of the Board of Commissioners Performance Assessment by the GMS

RUPS telah menilai kinerja pengawasan Dewan Komisaris secara kolegial dan menyatakan telah memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris atas pengawasan yang dilakukan hingga akhir tahun buku.
The GMS has assessed the supervisory performance of the Board of Commissioners collegially and stated that it has granted full release (acquit et de charge) to the Board of Commissioners for supervision carried out until the end of the fiscal year.

Berikut adalah penilaian Dewan Komisaris pada tahun 2025 berdasarkan KPI Dewan Komisaris:

The following is the Board of Commissioners' assessment for the year 2025 based on the Board of Commissioners' KPIs:

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris 2025
Board of Commissioners' Performance Assessment Results 2025

No	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Beton Tbk								Keterangan Description
		Jan–Jun 25 *) Jan–Jun 25					Jun–Des 25 *) Jun–Dec 25			
		ES	RPM	MM	NP	II	WO	DGI	TM	
1.	**Tingkat Kehadiran** **Attendance Level**									
	a. Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	5x *)	5x *)	5x *)	5x *)	5x *)	7x *)	7x *)	7x *)	Jumlah kehadiran Attendance Rate
	b. Rapat Gabungan Dekom & Direksi Joint Meeting of the BOC & BOD	5x *)	5x *)	5x *)	5x *)	5x *)	7x *)	7x *)	7x *)	
	c. Rapat Komite Dekom Committee's under Board of Commissioners Meeting	-	2x *)	2x *)	2x *)	2x *)	2x *)	2x *)	2x *)	
2.	**Kontribusi Pengawasan dan Pemberian Nasihat** **Oversight and Advisory Contributions**									
	a. Memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. Approve the proposed Long-Term Business Plan (RJPP) and Annual Work Plan and Budget (RKAP) submitted by the Board of Directors.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sudah dilakukan di awal tahun It was conducted at the beginning of the year
	b. Memberikan arahan dan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. Provide direction and supervision to the Board of Directors regarding the implementation of the company's plans and policies.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dilakukan minimal saat Rakomdir setiap bulan Conducted at least during the monthly meeting of the Board of Commissioners
	c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. Oversee the implementation of management policies for subsidiaries and joint venture companies.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Diskusi antara Dekom dengan Anak Perusahaan The Discussion between the Board of Commissioners and Subsidiaries
3.	**Keterlibatan dalam Penugasan Tertentu** **involvement in specific tasks**									
	a. Penugasan Khusus dari WIKA Group Special Assignments from WIKA Group									
	• Pembekalan Komisaris Internal WIKA, 25 Juni 2025 Orientation Briefing for WIKA Internal Board of Commissioners, June 25, 2025						Hadir	Hadir	Hadir	Tingkat kehadiran Dekom The Board of Commissioners attandance rate
	• Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV, 27-28 Agustus 2025 Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV, August 27–28, 2025						Hadir	Hadir	Hadir	
	• CEO Brief Townhall Meeting 2025, 18 November 2025 CEO Brief Townhall Meeting 2025, November 18, 2025						Hadir	Hadir	Hadir	
	b. Penugasan Khusus dari PT Wijaya Karya Beton Tbk Special Assignments from PT Wijaya Karya Beton Tbk									
	• QHSE Patrol di Pabrik Beton Majalengka, 27 Mei 2025 QHSE Patrol at Majalengka Concrete Plant, May 27, 2025	-	Hadir	Hadir	Hadir	-				
	• QHSE Patrol di Pabrik Beton Bogor, 25 September 2025 QHSE Patrol at Bogor Concrete Plant, September 25, 2025						Hadir	Hadir	Hadir	Tingkat kehadiran Dekom The Board of Commissioners attandance rate
	• QHSE Patrol di Pabrik Beton Pasuruan, 31 Oktober 2025 QHSE Patrol at Pasuruan Concrete Plant, October 31, 2025						-	Hadir	Hadir	
	• QHSE Patrol di Pabrik Beton Karawang, 11 Desember 2025 QHSE Patrol at Karawang Concrete Plant, December 11, 2025						-	Hadir	Hadir	
	• QHSE Patrol di WIKA Komponen Beton, 11 Desember 2025 QHSE Patrol at WIKA Komponen Beton, December 11, 2025						-	Hadir	Hadir	

No	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Beton Tbk								Keterangan Description
		Jan–Jun 25 *) Jan–Jun 25					Jun–Des 25 *) Jun–Dec 25			
		ES	RPM	MM	NP	II	WO	DGI	TM	
4.	**Komitmennya dalam Memajukan Kepentingan Perusahaan** **Commitment to Advancing the Company's Interests**									
	a. Berperan dalam pencalonan anggota Direksi Participate in the nomination of members of the Board of Directors.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dilakukan pada bulan April 2023 sebelum RUPS 2023 It Conducted in April 2023 before the 2023 GMS
	b. Menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) Evaluate the performance of the Board of Directors, both individually and collectively.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dilakukan setiap Rakomdir It conducted in every meetings of Board of Directors
	c. Mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi. Propose tantiem and performance incentives in accordance with applicable regulations, taking into account the performance of the Board of Directors.	Usulan tantiem/insentif kinerja disampaikan Komite NR & GCG ke Komisaris Utama dan dari Komisaris Utama Pemegang Saham pada bulan Mei 2025.								Dilakukan pada bulan April 2023 It was conducted in April 2023
5.	**Ketaatannya terhadap Peraturan yang Berlaku serta Kebijakan Perusahaan** **Compliance with Applicable Regulations and Company Policies**									
	a. Persetujuan dan Komitmen Bersama atas Kebijakan Anti Penyuapan Joint Approval and Commitment to the Anti-Bribery Policy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sudah dilakukan di bulan mulai bl September 2023 It was conducted starting in September 2023
	b. Persetujuan dan Komitmen Bersama atas Kebijakan Keanekaragaman Hayati Joint Approval and Commitment on Biodiversity Policy						✓	✓	✓	Dilakukan bersama Unit Legal & GCG Conducted jointly with Legal & GCG Unit
	c. Persetujuan dan Komitmen Bersama atas Kebijakan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Joint Approval and Commitment on Stakeholder Engagement Policy						✓	✓	✓	
	d. Persetujuan dan Komitmen Bersama atas Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Joint Apprival and Commitment on Occupational Safety, Health, and Environmental Policy						✓	✓	✓	
	e. Persetujuan dan Komitmen Bersama atas Kebijakan Lingkungan Kerja yang Saling Menghargai Joint Approval and Commitment on Mutually Respectful Work Environtment Policy						✓	✓	✓	
	f. Persetujuan dan Komitmen Bersama atas Kebijakan Pengamanan Informasi dan Manajemen Layanan Teknologi Informasi Joint Approval and Commitment on Information Security and Information Technology Service Management Policy						✓	✓	✓	
	g. Persetujuan dan Komitmen Perpajakan Taxation Agreement and Commitment						✓	✓	✓	
	h. Assessment ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Joint Approval and Commitment on Stakeholder Engagement Policy						✓	✓	✓	Dilakukan bersama Unit Legal & GCG Conducted jointly with Legal & GCG Unit

*) RUPS Penggantian Komisaris Wika Beton 2 Juni 2025
*) AGM for the Replacement of Wika Beton Commissioners on June 2, 2025

ES – Eko Sujianto
RPM – R. Permadi Mulajaya
MM – Miftachul Munir
II – Iswandi Imran
NP – Nita Prihutaminingrum
WO – Wilan Oktavoan
DGI – Dwi Gawan Islandhi
TM – Tjia Marwan

Prosedur dan Kriteria Penilaian Direksi

Penilaian kinerja Direksi memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Perseroan dengan cermat merancang kebijakan evaluasi kinerja untuk Direksi. Evaluasi

Board of Directors Performance Assessment

The assessment of the Board of Directors' performance has a significant impact on the overall performance of the Company. Therefore, the Company meticulously designs performance evaluation policies for the Board of

ini mengikuti pedoman yang berlaku sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, serta ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Metode evaluasi kinerja Direksi melibatkan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI).

a. Penilaian Kinerja Direksi melalui Mekanisme RUPS

Evaluasi kinerja Direksi melalui proses RUPS melibatkan persetujuan dan validasi Laporan Keuangan serta Laporan Tahunan sebagai manifestasi tanggung jawab terhadap pengelolaan Direksi sepanjang periode buku. Penilaian kinerja Direksi diterapkan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan pencapaian kolegial, yang merujuk pada kinerja perusahaan dan dicatat dalam persetujuan serta validitas Laporan Tahunan oleh RUPS. *Output* dari evaluasi kinerja Direksi oleh RUPS menjadi elemen integral dalam penentuan skema remunerasi dan kompensasi Direksi, serta keputusan mengenai penunjukan kembali Direksi, yang seluruhnya didasarkan pada persetujuan RUPS.

Directors. This evaluation adheres to applicable guidelines in accordance with prevailing regulations and laws, as well as provisions within the Company's Articles of Association. The method of evaluating the Board of Directors' performance involves mechanisms such as the General Meeting of Shareholders (GMS), and the attainment of Key Performance Indicators (KPIs).

a. Board of Directors Performance Assessment through GMS Mechanism

The performance evaluation of the Board of Directors through the GMS involves the approval and validation of Financial Statements and Annual Reports as a manifestation of responsibility for the Board's management throughout the fiscal period. The assessment of the Board's performance is applied comprehensively, considering collegial achievements that refer to the company's performance and are documented in the approval and validation of the Annual Reports by the RUPS. The output of the Board's performance evaluation by the GMS is an integral element in determining the remuneration and compensation schemes for the Directors, as well as decisions regarding the reappointment of the Board, all of which are entirely based on the approval of the GMS.

Prosedur Penilaian Kinerja Direksi oleh RUPS
Procedures for Board of Directors Performance Assessment by GMS

Pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan perusahaan yang dijalankan Direksi selama tahun buku dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan untuk kemudian memperoleh pernyataan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) sampai dengan berakhirnya tahun buku.
The management of the Company by the Board of Directors during the fiscal year is reported to the Shareholders through the Annual GMS to obtain a statement of full release (acquit et de charge) until the end of the fiscal year.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi oleh RUPS
Criteria for Board of Directors Performance Assessment by GMS

RUPS menilai dan mengevaluasi kinerja Direksi dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan sebagai cerminan atas efektivitas pengurusan dan pengelolaan Direksi secara kolegial.
The GMS assesses and evaluates the performance of the Board of Directors by considering the performance of the Company as a reflection of the effectiveness of the management of the Board of Directors collegially.

Pihak yang Melakukan Assessment
Assessor

Penilaian kinerja Direksi dalam RUPS dilakukan oleh Pemegang Saham.
The performance evaluation of the Board of Board of Directors in the GMS is carried out by the Shareholders.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi oleh RUPS
Results of Board of Directors Performance Assessment by GMS

RUPS telah menilai kinerja pengurusan Direksi secara kolegial dan menyatakan telah memberikan pembebasan pertanggungjawaban sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi atas pengurusan dan pengelolaan perusahaan yang dilakukan hingga akhir tahun buku.
The GMS has assessed the management performance of the Board of Directors collegially and stated that it has granted full release (acquit et de charge) to the Board of Directors for the management of the Company that has been carried out until the end of the fiscal year.

b. Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI)

Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja Direksi dengan pendekatan kolegial dan individual, dengan mengacu pada *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah dirancang dengan seksama. Detailnya adalah sebagai berikut:

b. Board of Directors Performance Assessment Based on Key Performance Indicator (KPI)

The Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Directors through a collegial and individual approach, referencing meticulously designed Key Performance Indicators (KPIs). The details are as follows:

Prosedur Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan KPI
Procedures for Board of Directors Performance Assessment Based on KPI

Penilaian kinerja Direksi berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) disampaikan kepada RUPS dengan mempertimbangkan pada capaian KPI dan RKAP yang telah ditetapkan pada awal tahun buku.
The assessment of the Board of Directors performance based on the Key Performance Indicator (KPI) is submitted to the GMS by taking into account the KPI and RKAP achievements that have been set at the beginning of the fiscal year.

Kriteria Penilaian KinerjaDewan Komisaris Berdasarkan KPI
Criteria for Board of Directors Performance Assessment Based on KPI

Kriteria penilaian kinerja Direksi yang termuat dalam KPI meliputi 5 (lima) aspek, yaitu Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan dan Teknologi, Peningkatan Investasi, dan Pengembangan Talenta.
The criteria for assessing the Board of Directors performance contained in the KPI include 5 (five) aspects, namely Economic and Social Values for Indonesia, Business Model Innovations, Leadership and Technology, Investment Improvement and Talent Development.

Pihak yang Melakukan Assessment
Assessor

Penilaian kinerja kolegial Direksi diukur berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk di dalamnya Kontrak Manajemen yang disahkan Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas Direksi selalu direncanakan pada awal tahun dan dituangkan ke dalam RKAP dan KPI.
The collegial assessment of the Board of Directors performance is measured based on the Company's Work Plan and Budget, including the Management Contract approved by the Board of Commissioners. The implementation of the duties of the Board of Directors is always planned at the beginning of the year and included into the RKAP and KPI.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan KPI
Results of Board of Directors Performance Assessment Based on KPI

Hasil penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI terlampir pada tabel di bawah ini.
The results of the Board of Directors performance assessment based on KPI can be seen below.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi berdasarkan KPI
Assessment Result of Board of Directors Performance Based on KPI

No	Indikator Kinerja Performance Indicator	Formula Formula	Satuan Unit	Jenis Type	Bobot Weight	Target RKAP 2025 2025 RKAP Target	s.d Desember 2025 until December 2025		Pencapaian Achievement	Nilai value	Skor Score
							(Ra)	(Ri)			
A - Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia **Economic and Social Value for Indonesia**					**50%**						**46.0%**
1	EBITDA	Operating Income* + Depresiasi + Amortisasi (periode tahun berjalan); *) Operating Income = Revenue – Cost of Goods Sold – Operating Expenses	Miliar Rp.	KN	5%	373.03	373.03	244.05	65.42%	7	3.5%
2	Sales/Penjualan	Penjualan Tahun Berjalan	Miliar Rp.	KN	10%	5.305,00	5.305,00	3.585,86	67.59%	7	7.00%
3	Efisiensi Biaya Usaha	Efisiensi Biaya Usaha (Actual Cost vs Budget)	%	KN	10%	1.00	1.00	14.60	1.457,00%	11	11.0%
4	Cashflow Operasi & Cashflow Investasi	Arus Kas Operasi + Arus Kas Investasi bernilai positif	Miliar Rp.	KN	10%	2.00	2.00	110.57	5.528,38%	11	11.0%
5	Perolehan Kontrak Baru	Perolehan Kontrak Baru	Miliar Rp.	KN	10%	6.000,00	6.000,00	4.007,31	66.79%	7	7.0%
6	Total Recordable Incident Rate (TRIR)	Realisasi TRIR = (Total Number of Recordable Incidents x 200000 / Total Number of Annual Work Hours)	Index	KL	5%	0.24	0.24	0.00	100.00%	11	5.5%
B - Inovasi Model Bisnis **Business Model Innovation**					**15%**						**16.0%**
7	Ketepatan Laporan	Penyampaian Laporan Keuangan (termasuk CALK kepada Induk) tidak lebih dari tanggal 15 bulan berikutnya (posisi Maret, Juni, September)	%	KL	5%	100.00	100.00	100.00	100.00%	11	5.5%
8	Risk Maturity Index	Penilaian Risk Maturity Index oleh SPI Induk	Index	KL	5%	2.10	2.10	2.21	105.24%	11	5.50%
9	GCG Level	Skor hasil assessment GCG	Skor	KN	5%	90.00	90.00	97.59	108.43%	11	5.5%
C - Kepemimpinan Teknologi **Technological Leadership**					**10%**						**11.0%**
10	Implementasi ERP	Implementasi ERP SAP integrated	%	KL	5%	100.00	100.00	100.00	100.00%	11	5.5%
11	IT Maturity Level	Pencapaian tingkat IT maturity level	Skor	KN	5%	3.50	3.50	3.54	101.14%	11	5.5%
D - Peningkatan Investasi **Increasing Investment**					**10%**						**10.0%**
12	Asset Recycling	Realisasi penjualan minimal 3 aset tidak produktif	Jumlah	KN	10%	3.00	3.00	3.00	200.00%	11	10.0%

No	Indikator Kinerja Performance Indicator	Formula Formula	Satuan Unit	Jenis Type	Bobot Weight	Target RKAP 2025 2025 RKAP Target	s.d Desember 2025 until December 2025		Pencapaian Achievement	Nilai value	Skor Score
							(Ra)	(Ri)			
E - Pengembangan Talenta **Talent Development**					**15%**						**16.0%**
13	Diversity	Average Diversity in Nominated Talent – (Pencapaian Rasio Nominated Talent Millenial <=42 tahun & Nominated Talent Perempuan pada Jabatan Level BOD-1) x 0.5	%	KL	10%	12.00	12.00	12.50	104.17%	11	11.0%
14	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	Minimal 95% Organ Pengelola Risiko memiliki sertifikasi	%	KN	5%	95.00	95.00	100.00	105.26%	11	5.0%
	Target Key Performance Indicator				100%						100.00%

Indikator Kuantitatif
Quantitative Indicators

Tata Cara Penilaian Assessment Procedures	
% Realisasi Terhadap Target Realization Against Target	Nilai Value
< = 60	6
> 60 - 70	7
> 70 - 80	8
> 80 - 90	9
> 90 -100	10
> 100	11

Indikator Kualitatif
Qualitative Indicator

Tata Cara Penilaian Assessment Procedures	
% Realisasi Terhadap Target Realization Against Target	Nilai Value
< 60	6
=> 60 - 70	7
=> 70 - 80	8
=> 80 - 90	9
=> 90 -100	10
=> 100	11

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA KOMITE YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS PADA TAHUN BUKU
ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ON THE PERFORMANCE OF THE SUPPORTING COMMITTEE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite yang berfungsi sebagai pendukung dalam menjalankan tugas pengawasan secara lebih terfokus dan mendalam. Pembentukan komite ini didasarkan pada fungsi dan fokus pengawasan yang strategis guna memperkuat penerapan tata kelola terintegrasi dalam Perusahaan.

The Board of Commissioners has established committees to support its oversight tasks in a more focused and thorough manner. These committees were formed based on their strategic oversight functions and focus, aiming to strengthen the implementation of integrated governance within the Company.

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA

Prosedur evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Self-Assessment yang berfokus pada capaian kinerja dan kontribusi dalam pengambilan keputusan strategis Dewan Komisaris.

PERFORMANCE EVALUATION PROCEDURES

The evaluation procedure conducted by the Board of Commissioners through Self-Assessment focuses on performance achievements and contributions to the Board of Commissioners' strategic decision-making.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN

Kriteria yang digunakan oleh Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris antara lain:

1. Aspek efektivitas pelaksanaan tugas;
2. Aspek kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan Board Manual Komite;
3. Tingkat kehadiran anggota dalam rapat internal Komite maupun rapat bersama dengan Dewan Komisaris;
4. Aspek independensi; dan
5. Aspek koordinasi dengan unit kerja terkait.

Sepanjang tahun buku 2025, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing komite, termasuk Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance, dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko .

Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance telah bekerja secara efektif. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan kinerja komite agar lebih optimal dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

CRITERIA USED

The criteria used by the Board of Commissioners to evaluate the performance of committees supporting its duties include:

1. Effectiveness in carrying out their tasks
2. Compliance with applicable regulations and the Committee's Board Manual
3. Attendance levels of members at internal committee meetings and joint meetings with the Board of Commissioners
4. Independence
5. Coordination with relevant work units

Throughout the 2025 fiscal year, the Board of Commissioners conducted evaluations of the performance of each committee, including the Audit Committee, the Integrated Governance and Good Corporate Governance Committee, and the Nomination, Remuneration and Risk Oversight Committee.

The Board of Commissioners has assessed that the Audit Committee, Nomination, Remuneration and Risk Oversight Committee, and Integrated Governance and Good Corporate Governance Committee have performed effectively. The results of this evaluation serve as a basis for the Board of Commissioners to identify areas for improvement and enhance the committees' performance to better support the implementation of good corporate governance.

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners



TRI PROBO PAMUNGKAS

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia
Age

47 tahun per 31 Desember 2025
47 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan Tenure

Sampai dengan pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris yang baru.
Until the appointment of the new Secretary to the Board of Commissioners.

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment

Surat Tugas No. ST.02.01/A.DIR.00080/2025
Letter of Assignment No. ST.02.01/A.DIR.00080/2025

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi Educational and/or Certification Background

- Magister (S2) Akuntansi – Universitas Trisakti (2025 – Sekarang).
- Sarjana (S1) Akuntansi – Universitas Gunadarma (2001).
- Master of Accounting from Trisakti University (2025 – Present).
- Bachelor's Degree in Accounting from Gunadarma University (2001).

Pengalaman Kerja Work Experiences

- Senior Manager of Joint Operation PT Wijaya karya (Persero) Tbk (2025-Sekarang) (Rangkap Jabatan).
- Expert 1 Treasury Dept. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2023-2025).
- Manajer Keuangan dan Human Capital Operasi 5 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2021-2023).
- Senior Manager of Joint Operation, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2025–Present) (Concurrent Position).
- Expert 1, Treasury Department, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2023–2025).
- Finance and Human Capital Manager, Operation 5, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2021–2023).

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Senior Manager of Joint Operation PT Wijaya karya (Persero) Tbk (2025-Sekarang)
Senior Manager of Joint Operation PT Wijaya karya (Persero) Tbk (2025-Present)

Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali langsung/tidak langsung.
Has no affiliation relationship with the Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, and direct/indirect controllers.

Berdasarkan PER-3/MBU/03/2023 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, individu yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris harus berasal dari luar Perseroan.

Tugas pokok dan fungsi utamanya adalah memberikan bantuan kepada Dewan Komisaris dalam bidang kegiatan kesekretariatan. Proses pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Board Manual.

Pertaining to PER-3/MBU/03/2023 Minister of State Owned Enterprises concerning the Organs and Human Resources of State Owned Enterprises, an individual serving as the Secretary to the Board of Commissioners must be sourced externally from the Company.

The primary duties and core functions involve providing assistance to the Board of Commissioners in the field of secretarial activities. The appointment and termination processes are carried out by the Board of Commissioners, and the Secretary of the Board of Commissioners holds direct responsibility to the Board of Commissioners in accordance with the provisions outlined in the Board Manual.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

Berdasarkan PER-3/MBU/03/2023 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, tugas serta tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris dalam Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan dalam Board Manual Perseroan diuraikan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas;
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
9. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
10. Berfungsi sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain;
11. Mengkoordinasikan kepengurusan dalam hal komunikasi serta penyelenggaraan kegiatan yang bersifat administratif dan kesekretariatan di lingkup Dewan Komisaris agar senantiasa sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip GCG;

Pertaining to PER-3/MBU/03/2023 Minister of State Owned Enterprises concerning the Organs and Human Resources of State Owned Enterprises, the duties and responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners in the Supporting Structure of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises and in the Company's Board Manual are delineated as follows:

1. Prepare the meeting, including the Board of Commissioners' briefing sheet;
2. Prepare the minutes of the Board of Commissioners' meeting by the provisions of the Company's articles of association;
3. Administering the documents of the Board of Commissioners, both incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings, and other documents;
4. Prepare the Draft Work Plan and Budget for the Board of Commissioners;
5. Prepare Draft Reports for the Board of Commissioners;
6. Carry out other duties of the Board of Commissioners;
7. Ensuring that the Board of Commissioners complies with the laws and regulations and applies the principles of GCG;
8. Provide information needed by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
9. Coordinate members of the Committee, if necessary to expedite the duties of the Board of Commissioners;
10. Serves as a liaison between the Commissioners and other parties;
11. Coordinate management in terms of communication and administrative and secretarial activities within the Board of Commissioners so that they are always by legal provisions and GCG principles;

12. Menyiapkan keputusan terhadap usulan perbuatan hukum Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris;
13. Menyiapkan materi awal mengenai nasihat yang akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi;
14. Menyiapkan pendapat dan saran (tanggapan) Dewan Komisaris yang akan disampaikan di dalam RUPS mengenai RJPP dan Laporan Tahunan;
15. Menyiapkan rincian tugas Dewan Komisaris saat menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan ke dalam RKAP;
16. Menyiapkan usulan Dewan Komisaris kepada RUPS mengenai penunjukan Akuntan Publik oleh Perseroan;
17. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyampaikan materi aslinya kepada Perseroan serta menyimpan salinannya;
18. Menyiapkan materi laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku kepada RUPS;
19. Menyiapkan panggilan rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama, lalu disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dan/ atau dalam periode waktu yang lebih singkat apabila berada dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggap rapat;
20. Membuat risalah rapat yang mencerminkan akuntabilitas setiap peserta rapat, serta penjelasan mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya;
21. Melaksanakan kewajiban lainnya yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris.

12. Prepare a decision on the proposed legal action of the Board of Directors, which requires the written approval of the Board of Commissioners;
13. Prepare initial materials regarding advice submitted by the Board of Commissioners to the Board of Directors;
14. Prepare opinions and suggestions (responses) of the Board of Commissioners to be submitted at the GMS regarding the RJPP and the Annual Report;
15. Prepare the details of the duties of the Board of Commissioners when compiling the annual work program and include it in the RKAP;
16. Prepare the proposal of the Board of Commissioners to the GMS regarding the appointment of a Public Accountant by the Company;
17. Prepare the minutes of the Board of Commissioners' meeting, submit the original material to the Company, and keep a copy;
18. Prepare reports on the supervisory duties carried out by the Board of Commissioners during the financial year to the GMS;
19. Prepare a written summons for a meeting of the Board of Commissioners, signed by the President Commissioner and/or a member of the Board of Commissioners, appointed by the President Commissioner. Then submitted to the Member of the Board of Commissioners within a period of no later than 3 (three) days before the meeting is held and/ or within the period shorter time if there is an urgent situation, without taking into account the date of the call and response to the meeting;
20. Make minutes of meetings that reflect the accountability of each meeting participant, as well as an explanation of the evaluation of the implementation of the decisions of the previous session;
21. Carry out other obligations assigned by the Board of Commissioners.

LAPORAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025
DUTIES OF THE SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2025

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan rapat internal Dewan Komisaris atau rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi adalah menyiapkan:

1. Panggilan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan/atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama (Undangan);
2. Agenda Rapat yang di dalamnya memuat pendapat atau saran yang akan disampaikan oleh Dewan Komisaris;

The responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners in facilitating internal meetings of the Board of Commissioners or joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors include the preparation of:

1. Written notification signed by the President Commissioner and/or by a member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner;
2. Meeting agenda contains opinions or suggestions to be submitted by the Board of Commissioners;

3. Membuat risalah rapat yang mencerminkan akuntabilitas setiap peserta rapat;
4. Menyiapkan penjelasan mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.

Sementara itu, terkait kegiatan RUPS, tugas Sekretaris Dewan Komisaris antara lain:

1. Menyiapkan pendapat dan saran (tanggapan) Dewan Komisaris yang akan disampaikan di dalam RUPS mengenai RJPP dan Laporan Tahunan;
2. Menyiapkan usulan Dewan Komisaris kepada RUPS mengenai penunjukan Akuntan Publik oleh Perseroan;
3. Menyiapkan materi laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku kepada RUPS.

Pentingnya peran Sekretaris Dewan Komisaris dalam menjaga koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris sangatlah besar. Dalam upaya ini, Sekretaris Dewan Komisaris selalu merinci materi awal terkait nasihat atau rekomendasi yang akan diberikan oleh Dewan Komisaris. Persiapannya melibatkan penyusunan materi dan nasihat yang akan disampaikan Dewan Komisaris selama kunjungan, serta pembuatan laporan terkait kunjungan tersebut. Pada tahun 2025, secara umum, Sekretaris Dewan Komisaris berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

3. Make minutes of meetings that reflect the accountability of each meeting participant;
4. Prepare an explanation regarding the evaluation of the decision implementation made in the previous meeting.

Meanwhile, in terms of GMS activities, the duties of the Secretary to the Board of Commissioners, among others:

1. Prepare the opinions and suggestions (responses) of the Board of Commissioners to be submitted at the GMS regarding the RJPP and the Annual Report;
2. Prepare the Board of Commissioners' recommendation to the GMS regarding the appointment of a Public Accountant;
3. Prepare report material on the Board of Commissioners' supervisory duties during the financial year to be submitted to the GMS.

The importance of the Secretary to the Board of Commissioners in maintaining coordination and communication during the implementation of Board of Commissioners activities is significant. In this effort, the Secretary of the Board of Commissioners consistently details the initial material related to advice or recommendations to be provided by the Board of Commissioners. The preparation involves the compilation of materials and advice that will be presented by the Board of Commissioners during visits, as well as the creation of reports related to such visits. In 2023, overall, the Secretary of the Board of Commissioners successfully executed their duties and responsibilities proficiently.

REMUNERASI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
REMUNERATION OF THE SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Penetapan remunerasi untuk Sekretaris Dewan Komisaris disesuaikan oleh Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan kualifikasi Perseroan. Komponen dan struktur remunerasi untuk Sekretaris Dewan Komisaris mencakup:

1. Honorarium;
2. Tunjangan;
3. Jasa Produksi.

The remuneration for the Secretary to the Board of Commissioners is adjusted by the Board of Commissioners, taking into consideration the qualifications of the Company. The components and structure of remuneration for the Secretary of the Board of Commissioners encompass:

1. Honorarium;
2. Allowance;
3. Production Services.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pada tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris mengikuti pelatihan, seminar, dan/atau workshop.

Throughout 2025, the Secretary to the Board of Commissioners attended training, seminars, and/or workshops.

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board



Perusahaan tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah karena kegiatan usaha atau bidang usaha Perusahaan tidak menjalankan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar sepanjang tahun 2025.

Oleh karena itu, persyaratan terkait Dewan Pengawas Syariah, seperti nama anggota, dasar hukum pengangkatan, periode penugasan, tugas dan tanggung jawab, serta mekanisme pemberian nasihat dan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah di pasar modal, tidak relevan untuk diterapkan pada Perusahaan.

Perusahaan memastikan bahwa governansi korporat tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku dan prinsip governansi korporat yang baik sesuai dengan kegiatan usahanya.

The Company has no Sharia Supervisory Board because the Company's business activities or line of business do not comply with sharia principles as stated in the articles of association throughout 2025.

Therefore, requirements related to the Sharia Supervisory Board, such as the names of members, legal basis for appointment, period of assignment, duties and responsibilities, and mechanism for providing advice and supervision on the fulfillment of sharia principles in the capital market, are not relevant to be applied to the Company.

The Company ensures that corporate governance remains in line with applicable regulations and good corporate governance principles in line with its business activities.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

KEBIJAKAN DAN PROSES NOMINASI/SUKSESI ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Suksesi Direksi dan Dewan Komisaris dirancang untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan strategis serta menjaga stabilitas operasional Perseroan. Proses suksesi dilakukan secara terencana dan transparan dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, serta rekam jejak calon, sejalan dengan kebutuhan jangka panjang perusahaan. Perseroan memastikan bahwa setiap pergantian kepemimpinan tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga mendukung tercapainya visi dan misi secara berkelanjutan. Perseroan juga telah menyusun rencana suksesi internal untuk posisi-posisi kunci sebagai bagian dari pengembangan talenta dan kaderisasi pimpinan masa depan.

Kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berlandaskan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan, penetapan kriteria dan tata cara pemilihan Dewan Komisaris merujuk pada Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) Tahun 2024.

Proses Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon Anggota Dewan Komisaris meliputi persyaratan formal dan persyaratan material. Persyaratan formal merupakan persyaratan yang bersifat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material merupakan persyaratan yang bersifat kualitas disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan.

a. Persyaratan Formal
   1. Orang Perseorangan.
   2. Cakap melaksanakan perbuatan hukum.
   3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

POLICY AND NOMINATION/SUCCESSION PROCESS OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

The succession of the Board of Directors and the Board of Commissioners is designed to ensure the continuity of strategic leadership and maintain the Company's operational stability. The succession process is carried out in a well-planned and transparent manner, taking into account the candidates' competencies, integrity, and track records, in line with the Company's long-term needs. The Company ensures that every leadership transition not only complies with regulatory requirements but also supports the sustainable achievement of its vision and mission. The Company has also developed an internal succession plan for key positions as part of its talent development and future leadership regeneration initiatives.

Policy of Nomination of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners

Based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (UU PT), POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, and the provisions contained in the Company's Articles of Association, the determination of criteria and procedures for the election of the Board of Commissioners refers to the 2024 Board Manual.

Nomination Process of the Board of Commissioners and Board of Directors

The requirements for a candidate to become a member of the Board of Commissioners include both formal and material requirements. The formal requirements are general criteria by applicable laws and regulations, while the material requirements are quality-based criteria tailored to the needs and nature of the Company's business.

a. Formal Requirement
   1. Individual Person:
   2. Capable of performing legal actions.
   3. Has not been declared bankrupt within 5 (five) years before nomination.

4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
6. Tidak boleh memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan jabatan lain pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
   b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Kepala Daerah, calon/anggota Legislatif, pengurus partai politik, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
7. Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai dalam rangka menjalankan fungsinya.

4. Has never served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners found guilty of causing a company to go bankrupt within 5 (five) years before nomination.
5. Has never been convicted of committing a criminal act that harmed state finances and/or is related to the financial sector within 5 (five) years before nomination.
6. Must not hold concurrent positions as:
   a. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and other positions in State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and Private Sector Companies that may lead to a conflict of interest.
   b. Other positions by relevant laws and regulations include regional heads, candidates/members of the legislature, political party officials, and other positions that may create a conflict of interest.
7. Committed to providing sufficient time to fulfill the role and responsibilities effectively.

b. Persyaratan Material

Persyaratan material merupakan persyaratan kualitas perorangan sesuai kebutuhan Perusahaan, sebagaimana berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
   a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
   b. Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
   c. Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

b. Material Requirement

Material requirements are individual quality requirements according to the Company's needs, as follows:

1. Possesses good ethics, morals, and integrity.
2. Has never served as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who, during their tenure:
   a. Has ever failed to hold an Annual General Meeting (AGM).
   b. Has had their accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners rejected by the AGM or has failed to provide their accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the AGM.
   c. Has ever caused a company, which holds a license, approval, or registration from the Financial Services Authority (OJK), to fail in meeting its obligations to submit the annual report and/or financial statements to the OJK.
3. Committed to complying with laws and regulations.

4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.
5. Memiliki pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
6. Dapat menyediakan waktu yang cukup.

Khusus sebagai Anggota Dewan Komisaris Independen terdapat persyaratan tambahan berupa kriteria independensi sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan tersebut.
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham utama Perusahaan.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan tersebut.

Selain persyaratan yang telah tertuang diatas calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi juga wajib melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Prosedur Pengangkatan, Pemilihan Ulang, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Pengangkatan, pemilihan ulang, dan pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme RUPS. Pelaksanaan langkah-langkahnya disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 yang mengatur Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perseroan telah mengadopsi ketentuan regulasi tersebut dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual*. Wewenang RUPS juga mencakup

4. Has knowledge and/or expertise in areas required by the Company.
5. Understands management issues related to one of the Company's management functions.
6. Can dedicate sufficient time.

Specifically, for Independent Board of Commissioners members, there are additional requirements regarding independence criteria as follows:

1. Must not be a person who has worked or held the authority and responsibility to plan, lead, control, or oversee the Company's activities within the last 6 (six) months, except if the reappointment as an Independent Commissioner for the next period.
2. Must not hold any shares directly or indirectly, in the Company.
3. Must not have any affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's major shareholders.
4. Must not have direct or indirect business relationships related to the Company's business activities.

In addition to the requirements mentioned above, prospective members of the Board of Commissioners or Board of Directors must also undergo a fit and proper test. Candidates who pass the fit and proper test are required to sign a management contract before their appointment as members of the Board of Commissioners and Board of Directors is finalized.

Procedures for Appointment, Re-election, and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors

The appointment, re-election, and dismissal of the Board of Commissioners are carried out through the General Meeting of Shareholders (GMS). The procedures for these actions are by the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as well as the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 33/POJK.04/2014, which regulates the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. The Company has adopted these regulatory provisions into its Articles of Association and Board Manual. The

keputusan terkait pemberhentian Dewan Komisaris apabila terbukti: (1) melakukan tindakan yang menyimpang, (2) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, (3) terindikasi terlibat dalam kecurangan yang dapat merugikan Perseroan, (4) melalaikan tanggung jawabnya, dan alasan-alasan lain yang mewajibkan Perseroan untuk memberhentikan anggota yang bersangkutan. Sementara itu, proses pemilihan Dewan Komisaris dimulai dari nominasi kandidat oleh Pemegang Saham Mayoritas. Kandidat-kandidat tersebut kemudian dibahas oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku perusahaan induk, dengan mempertimbangkan profil, kualifikasi, visi, misi, dan rencana strategis Perseroan. Akhirnya, RUPS menetapkan kandidat terpilih.

GMS also holds the authority to decide on the dismissal of members of the Board of Commissioners if they are found to have: (1) engaged in misconduct, (2) violated the Articles of Association, (3) been implicated in fraudulent activities that could harm the Company, (4) neglected their duties, or for other reasons that require the Company to remove the relevant member. Meanwhile, the process for selecting the Board of Commissioners begins with the nomination of candidates by the Majority Shareholders. These candidates are then discussed by Nomination, Remuneration and GCG Committee of PT Wijaya Karya (Persero) as a Holding of the Company, considering the candidates' profiles, qualifications, vision, mission, and the Company's strategic plans. Finally, the GMS will appoint the chosen candidate.

PROSEDUR DAN PELAKSANAAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka memberikan penghargaan yang sesuai dengan kinerja individu Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan telah menetapkan kebijakan dan proses remunerasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-13/MBU/09/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dimulai dengan Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko yang memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi ini dipertimbangkan dengan memperhitungkan berbagai indikator, termasuk kondisi Perseroan, regulasi, dan indikator lain yang relevan selama tahun buku. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan mengevaluasi dan mempertimbangkan usulan tersebut dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan. Proses ini dapat diilustrasikan dalam diagram berikut:

PROCEDURE AND IMPLEMENTATION OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

To provide appropriate recognition for the individual performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Company has established a remuneration policy and process by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-13/MBU/09/2021 concerning Guidelines for the Determination of the Salaries of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

The Procedure for Determining the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners

The process for determining the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners begins with the Nomination, Remuneration, and Risk Oversight Committee, which provides a recommendation to the Board of Commissioners. This recommendation is considered by considering various indicators, including the Company's conditions, regulations, and other relevant factors during the fiscal year. The Board of Commissioners will then evaluate and review the proposal at the General Meeting of Shareholders (GMS) to obtain approval from the Company's Shareholders. This process is illustrated in the following diagram:



Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar, Perseroan menetapkan indikator sebagai berikut:

1. Usulan dan penetapan Penghasilan berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan:
   - Pendapatan;
   - Total Aktiva;
   - Tingkat Kesehatan Perusahaan;
   - Skala usaha;
   - Kompleksitas usaha;
   - Tingkat inflasi;
   - Kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan;
   - Faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Usulan dan penetapan penghasilan yang berupa Tantiem/Insentif kinerja yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor-faktor lain yang relevan.
3. Perseroan mengungkapkan kebijakan dan praktik remunerasi Direksi dan CEO secara terstruktur, termasuk insentif jangka pendek, insentif jangka panjang, dan komponen berbasis kinerja. Perseroan menjelaskan indikator kinerja utama dan mekanisme evaluasi remunerasi pada dokumen publik yang relevan.
4. Perseroan mengevaluasi komposisi Dewan Komisaris untuk memastikan kecukupan Komisaris Independen sesuai ketentuan dan praktik terbaik tata kelola. Perseroan mengungkapkan hasil evaluasi dan langkah penyesuaian komposisi melalui mekanisme RUPS dan publikasi korporasi.
5. Perseroan menyusun standar remunerasi berbasis kinerja yang terukur untuk Direksi dan eksekutif senior guna menyelaraskan insentif dengan kepentingan jangka panjang. Perseroan mengkaji penerapan mekanisme deferred bonus dan/atau clawback beserta indikator kinerja yang digunakan, lalu mengungkapkannya pada dokumen publik.
6. Perseroan mengintegrasikan KPI keberlanjutan ke dalam kebijakan remunerasi Direksi sebagai bagian dari penyelarasan kinerja dan dampak jangka panjang. Perseroan mengungkapkan metodologi pengukuran dan tata cara evaluasi KPI tersebut pada dokumen publik.

Indicators for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

In determining the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as outlined in the Articles of Association, the Company establishes the following indicators:

1. Poposals and determinations of fixed compensation, including salaries or honorariums, allowances, and benefits, are made with consideration of:
   - Income;
   - Total Assets;
   - Company's health level;
   - Business scale;
   - Business complexity;
   - Inflation rate;
   - Company's condition and financial capability;
   - Other factors that are relevant and may not conflict with laws and regulations.
2. Proposals and determinations of variable compensation, such as bonuses/performance incentives, are made with consideration of performance factors, the company's financial capacity, and other relevant factors.
3. The Company discloses its remuneration policies and practices for the Board of Directors and CEO in a structured manner, including short-term incentives, long-term incentives, and performance-based components. The Company explains key performance indicators and remuneration evaluation mechanisms in relevant public documents.
4. The Company evaluates the composition of the Board of Commissioners to ensure the adequacy of Independent Commissioners in accordance with governance regulations and best practices. The Company discloses the results of the evaluation and adjustments to the composition through the GMS mechanism and corporate publications.
5. The Company develops measurable performance-based remuneration standards for the Board of Directors and senior executives to align incentives with long-term interests. The Company reviews the application of deferred bonus and/or clawback mechanisms and the performance indicators used, and discloses them in public documents.
6. The Company integrates sustainability KPIs into its Board of Directors' remuneration policy as part of aligning performance and long-term impact. The Company discloses the measurement methodology and evaluation procedures for these KPIs in public documents.

7. Perseroan menyampaikan pernyataan eksplisit mengenai kebijakan pemberian opsi saham, saham bonus, dan/atau bonus berbasis kinerja kepada Komisaris Independen. Dalam hal Perseroan tidak memberikan manfaat tersebut, Perseroan menyatakan ketiadaan praktik tersebut secara tegas pada dokumen publik agar transparansi dan independensi dapat diverifikasi.

7. The Company made an explicit statement regarding its policy on granting stock options, bonus shares, and/or performance-based bonuses to Independent Commissioners. In the event that the Company does not provide such benefits, the Company clearly stated the absence of such practices in public documents so that transparency and independence can be verified.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2025, struktur dan komponen remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Usulan Remunerasi Pengurus Tahun 2025 dan Tantiem Pengurus Tahun Buku 2024 PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor. 06A/DK-WB/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

REMUNERATION STRUCTURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2025, the structure and components of the remuneration provided to the Board of Commissioners, as outlined in the 2025 Management Remuneration Proposal and the 2024 Fiscal Year Management Bonus for PT Wijaya Karya Beton Tbk, No. 06A/DK-WB/V/2025 dated May 5, 2025, are as follows:

No	Jenis Pendapatan Types of Income	Pegawai Aktif WIKA Active Employee of WIKA	Di luar Pegawai Aktif WIKA Employee from outside WIKA
1	Honorarium Honorarium	45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama dan 90% (sembilan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama 45% (forty-five percent) of the President Director's salary and 90% (ninety percent) of the President Commissioner's honorarium	45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama dan 90% (sembilan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama 45% (forty-five percent) of the President Director's salary and 90% (ninety percent) of the President Commissioner's honorarium
2	**Tunjangan** **Allowances**		
	Tunjangan Keagamaan Religious Allowance	Tidak diberikan Not provided	1 (satu) kali honorarium One (1) time honorarium
	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Tidak diberikan Not provided	Premi Asuransi maksimal 25% (dua puluh lima persen) x Honorarium satu tahun dikurangi satu tahun dikurangi BPJS Ketenagakerjaan beban Perusahaan. The insurance premium is a maximum of 25% (twenty-five percent) of the annual honorarium, minus one year and excluding the Company's BPJS Employment contribution.
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% (dua puluh persen) dan (dari?) Honorarium per bulan jika tidak mendapat benefit pada jabatan lain 20% (twenty percent) of the monthly honorarium if no benefits are received from other positions	20% (dua puluh persen) dari Honorarium per bulan 20% (twenty percent) of the monthly honorarium
	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	Tidak ada Not provided	Tidak ada Not provided
	Tunjangan Pakaian Clothing Allowance	Sesuai Anggaran RKAP As per the RKAP Budget	Sesuai Anggaran RKAP As per the RKAP Budget
	Tunjangan Cuti Tahunan Annual Leave Allowance	Diberikan 12 Hari Kerja 12 working days provided	Diberikan 12 Hari Kerja 12 working days provided
3	**Fasilitas** **Facility**		
	BPJS Ketenagakerjaan BPJS Employment	Tidak diberikan Not provided	Sesuai peraturan BPJSTK yang berlaku jika tidak mendapat benefit pada jabatan lain. As per the applicable BPJS Ketenagakerjaan regulations, if no benefits are received from other position.
	Fasilitas Kesehatan: Health Facilities		
	Asuransi Kesehatan Health Insurance	Tidak diberikan Not provided	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan In the form of health insurance or reimbursement for medical expenses

No	Jenis Pendapatan Types of Income	Pegawai Aktif WIKA Active Employee of WIKA	Di luar Pegawai Aktif WIKA Employee from outside WIKA
	Medical Check Up	Tidak diberikan Not provided	MCU 1 (satu) kali/ tahun hanya untuk yang bersangkutan One (1) medical check-up per year, only for the individual concerned
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance	Disediakan oleh Perusahaan Not provided	Disediakan oleh perusahaan Provided by the Company
	Fasilitas Kendaraan Dinas Company Vehicle	Tidak diberikan Not provided	Tidak diberikan Not provided
4	**Tantiem**		
	Tantiem Tahun Buku 2024 2024 Fiscal Year Bonus (Tantiem)	Ditetapkan Tantiem tahun buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp1.740.430.000,- (maksimal 2x Gaji/Honorarium. The bonus (tantiem) for the 2024 fiscal year for the Board of Directors and the Board of Commissioners is set at Rp1.740.430.000 (a maximum of 2 times the salary/honorarium).	Ditetapkan Tantiem tahun buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp1.740.430.000,- (maksimal 2x Gaji/Honorarium. The bonus (tantiem) for the 2024 fiscal year for the Board of Directors and the Board of Commissioners is set at Rp1.740.430.000 (a maximum of 2 times the salary/honorarium).

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2025
Table of the Board of Commissioners Remuneration In 2025

Nama Name	Jabatan Position	Remunerasi dalam 1 (satu) Tahun Remuneration in 1 (one) Year		Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tantiem Tahun Buku 2024 Tantiem Fiscal Year 2024 Rp	Jumlah Pendapatan Income Total
		Honorarium Honorarium	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance			
Wilan Oktavian	Komisaris Utama President Commissioner	423.675.000	36.315.000	0	0	459.990.000
Tjia Marwan	Komisaris Commissioner	381.307.500	32.683.500	0	0	413.991.000
Dwi Gawan Islandhi H B	Komisaris Independen Independent Commissioner	381.307.500	32.683.500	0	0	413.991.000
Eko Sujianto*	Komisaris Utama President Commissioner	302.625.000	54.472.500	60.525.000	70.612.500	488.235.000
R. Permadi Mulajaya*	Komisaris Commissioner	272.362.500	49.025.250	54.472.500	108.945.000	484.805.250
Miftachul Munir*	Komisaris Commissioner	272.362.500	49.025.250	54.472.500	108.945.000	484.805.250
Nita Prihutaminingrum*	Komisaris Independen Commissioners Independent	272.362.500	49.025.250	54.472.500	108.945.000	484.805.250
Iswandi Imran*	Komisaris Independen Independent Commissioner	272.362.500	49.025.250	54.472.500	63.551.250	439.411.500

Catatan I Notes
*Sudah tidak menjabat sejak 2 Juni 2025 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 03 tanggal 02 Juni 2025.
*No longer in office since June 2, 2025 based on the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) for the Fiscal Year 2024, as stated in Deed No. 03 dated June 2nd, 2025.

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Pada tahun 2025, struktur dan komponen remunerasi yang diberikan kepada Direksi sebagaimana tercantum dalam Usulan Remunerasi Pengurus Tahun 2025 dan Tantiem Pengurus Tahun Buku 2024 PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor. 06A/DK-WB/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

REMUNERATION STRUCTURE OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2025, the structure and components of remuneration provided to the Board of Directors as stated in the Proposal for Management Remuneration for 2025 and Management Tantiem for the 2024 Fiscal Year of PT Wijaya Karya Beton Tbk, Number: 06A/DK-WB/V/2025 dated May 5, 2025, are as follows:

No	Jenis Pendapatan Types of Income	Direktur Utama President Director	Direktur Director
1	Gaji Salary	Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp134,500,000,- per bulan The President Director's salary is set at Rp134,500,000 per month.	Gaji anggota Direksi ditetapkan dengan faktor jabatan 85% (delapan puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama The salary of other members of the Board of Directors is determined based on a position factor of 85% (eighty-five percent) of the President Director's salary.
2	**Tunjangan** **Allowances**		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Allowance Religious Allowance	Sebesar 1 (satu) kali Gaji 1 (one) time salary	Sebesar 1 (satu) kali Gaji 1 (one) time salary
	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan perumahan ditetapkan Rp 25,000,000,- dan dibayarkan sebesar Rp 25,000,000,-. The housing allowance is set at Rp 25,000,000 and paid in full at Rp 25,000,000.	Tunjangan perumahan ditetapkan Rp 25,000,000,- dan dibayarkan sebesar Rp 25,000,000,-. The housing allowance is set at Rp 25,000,000 and paid in full at Rp 25,000,000.
	Asuransi Purna Jabatan (Aspurjab) Post-Employment Insurance	Premi asuransi maksimal 25% (dua puluh lima persen) x Gaji satu tahun dikurangi premi BPJS ketenagakerjaan beban perusahaan*). The insurance premium is a maximum of 25% (twenty-five percent) of one year's salary, minus the Company's BPJS Employment premium.	Premi asuransi maksimal 25% (dua puluh lima persen) x Gaji satu tahun dikurangi premi BPJS ketenagakerjaan beban perusahaan*). The insurance premium is a maximum of 25% (twenty-five percent) of one year's salary, minus the Company's BPJS Employment premium.
	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	Sebesar pemakaian (at cost). Based on actual usage (at cost).	Sebesar pemakaian (*at cost*). Based on actual usage (at cost).
	Tunjangan Pakaian Clothing Allowance	Sesuai Anggaran RKAP. As per the RKAP budget.	Sesuai Anggaran RKAP. As per the RKAP budget.
	Tunjangan Cuti Tahunan Annual Leave Allowance	Diberikan 12 Hari Kerja. 12 working days provided.	Diberikan 12 Hari Kerja. 12 working days provided.
	Tunjangan Cuti Hari Besar Long Leave Allowance	Tidak Ada. Not provided.	Tidak Ada. Not provided.
3	**Fasilitas** **Facility**		
	BPJS Ketenagakerjaan Employment BPJS	Sesuai peraturan BPJSTK yang berlaku. In accordance with the applicable BPJS Employment regulations.	Sesuai peraturan BPJSTK yang berlaku. In accordance with the applicable BPJS Employment regulations.
	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facility	Diberikan 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional, atau berupa *Car Ownership Program* (COP) *Cash Basis* sesuai kemampuan dan kondisi keuangan perusahaan. One (1) official vehicle is provided along with maintenance and operational costs, or a Car Ownership Program (COP) on a cash basis, depending on the company's financial capacity and condition.	Diberikan 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional, atau berupa *Car Ownership Program* (COP) *Cash Basis* sesuai kemampuan dan kondisi keuangan perusahaan. One (1) official vehicle is provided along with maintenance and operational costs, or a Car Ownership Program (COP) on a cash basis, depending on the company's financial capacity and condition.
	Fasilitas Kesehatan: Health Insurance		
	Asuransi Kesehatan Health Insurance	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. In the form of health insurance or reimbursement for medical expenses.	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. In the form of health insurance or reimbursement for medical expenses.
	Medical Check Up	MCU 1 (satu) kali/ tahun hanya untuk yang bersangkutan. One (1) medical check-up per year, only for the individual concerned.	MCU 1 (satu) kali/ tahun hanya untuk yang bersangkutan. One (1) medical check-up per year, only for the individual concerned.
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance	Disediakan oleh Perusahaan. Provided by the Company.	Disediakan oleh perusahaan. Provided by the Company.
	Fasilitas Kendaraan Dinas Official Residence Facility	Tidak diberikan. Not provided.	Tidak diberikan. Not provided.
4	**Tantiem**		
	Tantiem Tahun Buku 2024 2024 Fiscal Year Bonus (Tantiem)	Ditetapkan Tantiem tahun buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp1.740.430.000,- (maksimal 2 X Gaji/ Honorarium. The bonus (tantiem) for the 2024 fiscal year for the Board of Directors and the Board of Commissioners is set at Rp1.740.430.000 (a maximum of 2 times the salary/honorarium).	Ditetapkan Tantiem tahun buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp1.740.430.000,- (maksimal 2 X Gaji/Honorarium. The bonus (tantiem) for the 2024 fiscal year for the Board of Directors and the Board of Commissioners is set at Rp1.740.430.000 (a maximum of 2 times the salary/ honorarium).

Tabel Remunerasi Direksi Tahun 2025
Table of the Board of Directors Remuneration In 2025

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description		Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowances	Tantiem Tahun Buku 2024 Tantiem Fiscal Year 2024 Rp	Jumlah Pendapatan Income Total
		Gaji Salary	Tunjangan Perumahan Housing Allowances			
Kuntjara	Direktur Utama President Director	1.614.000.000	200.000.000	134.500.000	269.000.000	2.217.500.000
Syailendra Ogan	Direktur keuangan, Human Capital, & Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, & Risk Management	1.371.900.000	200.000.000	114.325.000	133.379.167	1.819.604.167
Agus Pramono	Direktur Operasi & supply Chain Management Director of Operation & Supply Chain Management	1.371.900.000	200.000.000	114.325.000	133.379.167	1.819.604.167
Rija Judaswara	Direktur Pemasaran & Pengembangan Director of Marketing & Development	1.371.900.000	200.000.000	114.325.000	228.650.000	1.914.875.000
Verly Widiantoro	Direktur Teknik & Produksi Director of Operation and Supply Chain Management	1.371.900.000	200.000.000	114.325.000	228.650.000	1.914.875.000

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris Tiga Tahun Terakhir
Board of Commissioners' Remuneration for the Last Three Years

Keterangan Description	2025	2024	2023
Imbalan Jangka Pendek Short-term Rewards	3.670.034.250	4.826.205.000	4.256.569.800
Imbalan Pasca Kerja Post-employment Rewards	1.343.655.000	835.245.000	798.156.000
Jumlah **Total**	**5.013.689.250**	**5.661.450.000**	**5.054.725.800**

Besaran Remunerasi Direksi Tiga Tahun Terakhir
Remuneration of the Board of Directors for the Last Three Years

Keterangan Description	2025	2024	2023
Imbalan Jangka Pendek Short-term Rewards	9.686.458.334	10.800.135.000	8.160.100.000
Imbalan Pasca Kerja Post-employment Rewards	1.775.400.000	1.775.400.000	1.710.732.500
Jumlah **Total**	**11.461.858.334**	**12.575.535.000**	**9.870.832.500**

Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi
Tantiem of the Board of Commissioners and Board of Directors

Keterangan Description	2025	2024	2023
Dewan Komisaris Board of Commissioners	460.998.750	538.614.000	671.684.917
Direksi Board of Directors	993.058.334	1.606.735.000	668.322.185
Jumlah **Total**	**1.454.057.084**	**2.145.349.000**	**1.340.007.102**

Transparansi Dewan Komisaris dan Direksi
Transparency of the Board of Commissioners and the Board of Directors

INDEPENDENSI DAN INTEGRITAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Independensi dan integritas Dewan Komisaris serta Direksi merupakan pondasi utama dalam Governansi Korporat. Keduanya berperan penting dalam memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Independensi Dewan Komisaris dan Direksi berarti bahwa mereka harus mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif, tanpa intervensi dari pihak eksternal atau kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Independensi ini bertujuan untuk:

1. **Mencegah konflik kepentingan**
   Dengan menjaga jarak dari kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, Dewan Komisaris dan Direksi dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar demi kemajuan perusahaan.

2. **Meningkatkan transparansi**
   Keputusan yang dibuat secara independen akan lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham serta publik.
3. **Menjaga keberlanjutan perusahaan**
   Dengan mempertimbangkan aspek jangka panjang, independensi dalam pengambilan keputusan akan mendukung keberlanjutan perusahaan di masa depan.

Selain independensi, integritas juga menjadi prinsip utama dalam kepemimpinan perusahaan. Integritas dalam konteks ini mengacu pada komitmen untuk bertindak dengan jujur, beretika, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa aspek penting dari integritas Dewan Komisaris dan Direksi meliputi:

1. **Kepatuhan terhadap peraturan**
   Setiap anggota harus menjalankan tugasnya dengan mengacu pada hukum, peraturan perusahaan, serta standar etika yang berlaku.
2. **Transparansi dalam pengambilan keputusan**
   Keputusan harus dibuat berdasarkan data dan pertimbangan objektif, tanpa ada unsur manipulasi atau kepentingan tersembunyi.

INDEPENDENCE AND INTEGRITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The independence and integrity of the Board of Commissioners and Board of Directors are the cornerstone of Corporate Governance. Their roles are vital in ensuring that the Company is managed transparently, accountably, and responsibly for the benefit of shareholders and other stakeholders.

The independence of the Board of Commissioners and the Board of Directors means that they must be able to carry out their duties and responsibilities objectively, free from external parties or personal interests that may influence decision-making. This independence aims to:

1. **Avoiding Conflict of Interest**
   By maintaining a clear distance from personal or group interests, the Board of Commissioners and the Board of Directors are able to ensure that every policy and decision is genuinely made for the advancement of the company.
2. **Increasing Transparency**
   Decisions made independently are not only more transparent, but also more accountable for both shareholders and the public.
3. **Sustaining Company's Long Term**
   By taking long-term aspects into account, independence in decision-making becomes a key driver in supporting the company's sustainability in the future.

Despite their independence, integrity also stands as a core principle of corporate leadership. In this context, integrity refers to the commitment to act with honesty, uphold ethical standards, and comply with prevailing regulations. Key aspects of integrity within the Board of Commissioners and the Board of Directors include:

1. **Compliance to regulations**
   Every member is expected to perform their duties guided by the law, corporate policies, and a strong commitment to ethical standards.
2. **Transparency in decision making**
   Sound decision-making should be grounded in data and objective consideration, free from manipulation or hidden agendas.

3. **Tanggung jawab dan akuntabilitas**
   Setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Setiap tahunnya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab mereka dengan penuh integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pakta ini berfungsi sebagai landasan moral dan hukum dalam penerapan Tata Kelola Korporat di Perusahaan.

HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pencapaian Perseroan sangat ditentukan oleh hubungan kerja, terutama antara Direksi dan Dewan Komisaris. Oleh karena itu, sangat penting untuk membentuk hubungan yang harmonis dalam menjalankan tugas, menguatkan prinsip kebersamaan, saling menghargai fungsi dan peran masing-masing, serta beroperasi sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan agar visi dan misi Perseroan dapat diwujudkan bersama-sama. Keberhasilan dalam mewujudkan hubungan kerja yang efektif dan efisien akan tercermin pada keberlanjutan bisnis Perseroan, terutama sebagai berikut:

1. Terpeliharanya serta tercapainya kesehatan perusahaan sesuai dengan *Key Performance Indicator* (KPI) dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN selaku regulator;
2. Tercapainya imbal hasil yang wajar bagi peningkatan nilai Pemegang Saham;
3. Terlindunginya kepentingan *stakeholders* lainnya;
4. Terlaksananya sistem dan prosedur kegiatan usaha yang berfungsi sebagai pengendalian dan pengelolaan risiko bagi kontinuitas manajemen Perseroan.

Direksi bertugas menjalankan kegiatan operasional Perusahaan dan Dewan Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direksi tersebut. Dalam menjaga hubungan kerja yang baik, Dewan Komisaris dan Direksi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengurus Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang- undangan;

3. **Responsibility and accountability**
   Every policy and action taken must be accountable to shareholders and other stakeholders.

Each year, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors sign an integrity pact, a formal commitment to carry out their duties and responsibilities with integrity, transparency, and full compliance with applicable regulations. This pact serves as both a moral and legal foundation for the implementation of Corporate Governance within the Company.

WORKING RELATIONS BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Company's achievement is greatly determined by the working relationship, particularly between the Board of Directors and the Board of Commissioners. Therefore, it is crucial to cultivate a harmonious relationship in carrying out duties, reinforcing the principle of togetherness, mutual respect for each other's functions and roles, and operating in accordance with the designated authorities. This is necessary to ensure the realization of the company's vision and mission together. Success in establishing an effective and efficient working relationship will be reflected in the sustainability of the company's business, especially in the following aspects:

1. A maintained and achieved corporate soundness in accordance with the Key Performance Indicator (KPI) and criteria set by the Ministry of SOE as the regulator;
2. Reasonable returns to improve shareholder value;
3. Protected interests of other stakeholders;
4. Implemented systems and procedures for business activities that function as risk control and management for the continuity of the Company's management.

The Board of Directors is in charge to carry out operational activities, while the Board of Commissioners is in charge to supervise its implementation. To maintain a decent working relation between the Board of Commissioners and the Board of Directors, the following principles shall be applied:

1. The Board of Commissioners respects the responsibilities and authorities of the Board of Directors in managing the Company as stipulated in the laws and regulations and the Company's Articles of Association;

2. Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perseroan;
3. Dalam rangka saling menghormati tanggung jawab dan wewenang Organ Perseroan lainnya, Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami tanggung jawab dan wewenang organ Perseroan lainnya;
4. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap hubungan kerja antara anggota Dewan Komisaris dengan Direktur harus diketahui oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direktur lainnya;
5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
6. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perseroan secara tepat waktu dan lengkap;
7. Dewan Komisaris berhak untuk mendapatkan laporan-laporan yang diperlukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Sekretaris Perusahaan dan Sekretaris Dewan Komisaris berfungsi sebagai pejabat penghubung antara Direksi dan Dewan Komisaris;
9. Organ yang membantu Dewan Komisaris pada saat berhubungan kerja dengan organ yang membantu Direksi harus sepengetahuan Dewan Komisaris;
10. Organ yang membantu Direksi pada saat berhubungan kerja dengan organ yang membantu Dewan Komisaris harus sepengetahuan Direksi;
11. Direksi berkewajiban hadir dalam rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris apabila diundang.

2. The Board of Directors respects the responsibility and authority of the Board of Commissioners to supervise and provide advice on the Company's management;
3. To respect the responsibilities and authorities of other organs, the Board of Commissioners and the Board of Directors understand the duties and authorities of other organs;
4. Every working relation between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a formal institutional relationship, in the sense that it must always be based on a standard mechanism or correspondence that can be accounted for, so that every working relation between members of the Board of Commissioners and Directors must be known by other Members;
5. Any informal working relations can be carried out by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors but cannot be used as a formal policy before going through an accountable mechanism or correspondence;
6. The Board of Commissioners has the right to obtain access to company information in a timely and complete manner;
7. The Board of Commissioners has the right to obtain the necessary reports periodically in accordance with applicable regulations;
8. The Corporate Secretary and the Secretary to the Board of Commissioners function as liaison officers between the Board of Directors and the Board of Commissioners;
9. Organs assisting the Board of Commissioners when working with organs assisting the Board of Directors must be informed to the Board of Commissioners;
10. Organs assisting the Board of Directors when working with organs assisting the Board of Commissioners must be informed to the Board of Directors;
11. If invited, the Board of Directors is obliged to attend the meeting held by the Board of Commissioners.

KEBIJAKAN PINJAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Peraturan mengenai pinjaman bagi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk menjaga independensi organ Perseroan, mencegah benturan kepentingan, serta memastikan bahwa setiap hubungan keuangan dijalankan dalam koridor tata kelola yang baik. Dalam kerangka tersebut, Perseroan senantiasa menjunjung objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pada setiap proses bisnis keuangan.

LOAN POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The regulation on loans for the Board of Commissioners and the Board of Directors forms part of the Company's efforts to preserve the independence of its governing organs, prevent conflicts of interest, and ensure that every financial relationship is conducted within the framework of good corporate governance. Within this framework, the Company consistently upholds objectivity, transparency, and accountability in every financial business process.

Sebagai bentuk penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah menetapkan dalam Pedoman Benturan Kepentingan bahwa penerimaan fasilitas pinjaman dari Perusahaan merupakan salah satu bentuk benturan kepentingan dalam proses bisnis keuangan. Peraturan ini menjadi acuan bagi Perseroan dalam menjaga integritas hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

As part of the implementation of these principles, the Company has stipulated in its Conflict of Interest Guidelines that receiving loan facilities from the Company constitutes one form of conflict of interest in the financial business process. This regulation serves as a guiding principle for the Company in maintaining the integrity of its financial relationships with members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Perseroan tidak memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi. Sehingga independensi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengurusan tetap terpelihara sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

The Company does not provide loan facilities to members of the Board of Commissioners or the Board of Directors. Thereby preserving the independence of the supervisory and management functions in line with the prudential principle and Good Corporate Governance.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
DIVERSITY IN THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

Dalam menetapkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Penentuan struktur Dewan Komisaris dan Direksi dipertimbangkan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan. Saat menjalani proses ini, Perseroan selalu menekankan keragaman dalam keahlian, pengetahuan, dan pengalaman saat memilih sumber daya manusia. Dengan merancang komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam, setiap individu memiliki potensi untuk membentuk organisasi yang diperkaya dengan berbagai perspektif. Dampaknya akan tercermin dalam aspek operasional dan bisnis yang terus berkembang dan inovatif. Melalui keberagaman di tingkat manajemen puncak, Perseroan juga berupaya untuk meningkatkan objektivitas dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja keseluruhan Perseroan.

In selecting and appointing the Board of Commissioners and Board of Directors, the Company complies to the provisions of the applicable laws and regulations, namely OJK Regulation No.34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies and SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 concerning Governance Guidelines for Public Company. Determination of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out by considering the Company's needs and complexities. The Company always prioritizes the diversity of expertise, knowledge, and experience in selecting its human resources. Through a diverse composition of the Board of Commissioners and Board of Directors, each individual can create an organization that is rich in perspectives thus manifested in advancing and innovative operational and business aspects. Through diverse top management, the Company also seeks to sharpen objective decision-making so as to improve the overall performance of the Company.

Perseroan menetapkan kebijakan keberagaman Dewan Komisaris yang memuat definisi diversitas, target kuantitatif, dan pelaporan progres tahunan. Perseroan mengungkapkan target dan capaian diversitas pada laporan tahunan.

The Company has established a Board of Commissioners diversity policy that includes a definition of diversity, quantitative targets, and annual progress reporting. The Company disclose its diversity targets and achievements in its annual report.

Nama Name	Jabatan Position	Kewarganegaraan Nationality	Keahlian Expertise	Latar Belakang Budaya Cultural Background	Umur Age	Jenis Kelamin Gender
Direksi **The Board of Directors**						
Kuntjara	Direktur Utama President Director	Indonesia	Teknik Sipil dan Pemasaran Civil Engineering and Marketing	Sunda	55	Pria Male
Syailendra Ogan	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	Indonesia	Akuntansi & Manajemen Accounting & Management	Melayu	52	Pria Male
Agus Pramono	Direktur Operasi dan Supply Chain Management Director of Operations and Supply Chain Management	Indonesia	Teknik Sipil Civil Engineering	Jawa	54	Pria Male
Rija Judaswara	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Development	Indonesia	Teknik Sipil Civil Engineering	Jawa	55	Pria Male
Verly Widiantoro	Direktur Teknik dan Produksi Director of Engineering and Production	Indonesia	Teknik Sipil dan Administrasi Bisnis Civil Engineering and Business Administration	Jawa	43	Pria Male
Dewan Komisaris **The Board of Commissioners**						
Wilan Oktavian	Komisaris Utama President Commissioner	Indonesia	Teknik Sipil dan Kebijakan Publik Civil Engineering and Public Policy	Sunda	54	Pria Male
Tjia Marwan	Komisaris Commissioner	Indonesia	Manajemen Ekonomi Economy Management	Tionghoa	64	Pria Male
Dwi Gawan Islandhi H B	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	Arsitektur Architecture	Jawa	60	Pria Male
Eko Sujianto*	Komisaris Utama President Commissioner	Indonesia	Teknik Sipil dan Manajemen Civil Engineering and Management	Jawa	49	Pria Male
R. Permadi Mulajaya*	Komisaris Commissioner	Indonesia	Ilmu Sosial dan Administrasi Publik Social Science and Public Administration	Jawa	59	Pria Male
Miftachul Munir*	Komisaris Commissioner	Indonesia	Teknik Sipil Civil Engineering	Jawa	62	Pria Male
Iswandi Imran*	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	Teknik Sipil Civil Engineering	Minang	62	Pria Male
Nita Prihutaminingrum*	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	Manajemen Ekonomi Economy Management	Jawa	60	Wanita Female

Catatan I Notes
*Sudah tidak menjabat sejak 2 Juni 2025 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 03 tanggal 02 Juni 2025.
*No longer in office since June 2, 2025 based on the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) for the Fiscal Year 2024, as stated in Deed No. 03 dated June 2nd, 2025.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Perseroan mengungkapkan informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada ketentuan POJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

The Company discloses information regarding the shareholdingsof the Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance withthe provisions of POJK No. 4 of 2024 concerning Reportson Shareholdings or Any Changes in Shareholdingsof Public Companies and Reports on Activities PledgingShares of Public Companies.

Kebijakan Perseroan atas Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi telah diatur dalam Board Manual Perseroan mengenai Benturan Kepentingan serta diatur dalam kebijakan insider trading Perseroan yang dapat diakses pada halaman web: https://www.wika-beton.co.id/kebijakan-tata-kelola-perusahaan/

Company Policy on Shareholdings of the Boardand Board of Directors

Share ownership by the Board of Commissioners and Board of Directorsis governed by the Company's Board Manual regardingConflictsofInterestandisregulatedbytheCompany's insidertrading policy, which can be accessed on the website: https://www.wika-beton.co.id/kebijakan-tata-kelola-perusahaan/

Sepanjang tahun buku 2025, tidak terdapat transaksi pembelian maupun penjualan saham Perseroan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

During 2025, there is no buying or selling transaction conducted by members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Per 1 Januari 2025 As of January 1, 2025		Per 31 Desember 2025 As of December 31, 2025	
		Jumlah Lembar Saham Total Share	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Lembar Saham Total Share	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
Direksi **The Board of Directors**					
Kuntjara	Direktur Utama President Director	9.577.300	0,11%	9.577.300	0,11%
Syailendra Ogan	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	109.000	0,00%	109.000	0,00%
Agus Pramono	Direktur Operasi dan Supply Chain Management Director of Operations and Supply Chain Management	3.529.500	0,04%	3.529.500	0,04%
Rija Judaswara	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Development	2.339.700	0,03%	2.339.700	0,03%
Verly Widiantoro	Direktur Teknik dan Produksi Director of Engineering and Production	2.000.000	0,02%	2.000.000	0,02%
Dewan Komisaris **The Board of Commissioners**					
Wilan Oktavian	Komisaris Utama President Commissioner	0	0	0	0
Tjia Marwan	Komisaris Commissioner	0	0	0	0
Dwi Gawan Islandhi H B	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0	0
Eko Sujianto*	Komisaris Utama President Commissioner	0	0	0	0
R. Permadi Mulajaya*	Komisaris Commissioner	0	0	0	0
Miftachul Munir*	Komisaris Commissioner	0	0	0	0
Nita Prihutaminingrum*	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0	0
Iswandi Imran*	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0	0

Catatan I Notes
*Sudah tidak menjabat sejak 2 Juni 2025 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 03 tanggal 02 Juni 2025.
*No longer in office since June 2, 2025 based on the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) for the Fiscal Year 2024, as stated in Deed No. 03 dated June 2nd, 2025.

Seluruh kepemilikan saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tabel diatas merupakan transaksi pribadi dan bukan hasil dari program MSOP/ ESOP. Perseroan juga melaporkan kepemilikan saham dan/atau transaksi atas saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui e-reporting IDX dan OJK sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menjaga integritas pasar dan kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan informasi.

All shareholdings held by the Boardof Commissioners and the Board of Directors in the table above arepersonal transactions and not the result of the MSOP/ESOP program. The Company also reports shareholdingsand/ or transactions involving shares held bythe Board of Commissioners and the Board of Directors through IDXand OJK e-reporting in line with the Company's commitment to maintaining market integrity and compliance with the principles of information disclosure.



Komite Audit
Audit Committee



*DWI GAWAN ISLANDHI H.B.

Ketua Merangkap Anggota
Chairman Acting Member

Kewarganegaraan
Citizenship
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia
Age
60 tahun per 31 Desember 2025
60 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan
Tenure
Periode ke-1 (2025–2030)
1st Period (2025–2030)

Dasar Hukum Penunjukan
Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.05/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025.
Letter of The Board of Commissioners Decree No. SK.05/DK-WB/VII/2025 dated July 17, 2025.

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi
Educational and/or Certification Background

Sarjana (S1) Arsitektur – Universitas Pancasila (1990).
Bachelor's Degree in Architecture from Pancasila University (1990).

Pengalaman Kerja
Work Experiences

- Arsitek dan Desainer Interior, Wiraswasta (2002–2025)
- Tenaga Ahli Arsitek, Museum Basoeki Abdullah, Jakarta (2018–2019)
- Tenaga Ahli Arsitek, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta (2015–2017)
- Architect and Interior Designer, Self-employed (2002–2025)
- Architectural Expert, Basoeki Abdullah Museum, Jakarta (2018–2019)
- Architectural Expert, Ministry of Public Works and Public Housing, Jakarta (2015–2017)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

- Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025–Sekarang)
- Komisaris Independen, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025–Sekarang)
- Chairman and Member of the Nomination and Remuneration Committee, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025–Present)
- Independent Commissioner, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025–Present)

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali langsung/tidak langsung.
Has no affiliation relationship with the Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, and direct/indirect controllers.

* Bapak Dwi Gawan Islandhi H.B. selaku Ketua Komite Audit tidak lagi menjabat karena meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Perseroan melalui Surat Pengumuman No. SE.01.01/WB-0A.0167/2026 tanggal 18 Februari 2025.
* Mr. Dwi Gawan Islandhi H.B., in his capacity as Chairman of Audit Committee of the Company has passed away, no longer serves in such position as announced by the Company through Announcement Letter No. SE.01.01/WB-0A.0167/2026 dated February 18, 2025



GUNARTO, S.E., AK., CA, CPA, CRMP

Anggota
Member

Kewarganegaraan
Citizenship
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia
Age
55 tahun per 31 Desember 2025
55 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan
Tenure
Periode ke-1 (2024–2029)
1st Period (2024–2029)

Dasar Hukum Penunjukan
Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.05/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025.
Letter of The Board of Commissioners Decree No. SK.05/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025.

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi
Educational and/or Certification Background

- Certified Risk Management Professional – RAP Learning Center (2025).
- Certified Public Accountant – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2020).
- Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) – Universitas Trisakti (2009).
- Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi – Universitas Merdeka Malang (1995).

- Certified Risk Management Professional – RAP Learning Center (2025).
- Certified Public Accountant – Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IICPA) (2020).
- Accounting Professional Education from Trisakti University (2009).
- Bachelor's Degree in Economics majoring in Accounting from University of Merdeka Malang (1995).

Pengalaman Kerja
Work Experiences

Akuntan, KAP HLB Hadori, Sugiarto & Rekan, Jakarta (1996-sekarang)
Accountant, HLB Hadori, Sugiarto & Rekan Public Accounting Firm, Jakarta (1996-present)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan.
No concurrent positions.

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali langsung/tidak langsung.
Has no affiliation relationship with the Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, and direct/indirect controllers.



ASHURI

Anggota
Member

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia
Age

57 tahun per 31 Desember 2025
57 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan

Tenure

Periode ke-1 (2025–2030)
1st Period (2025–2030)

Dasar Hukum Penunjukan — Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.05/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025.
Letter of The Board of Commissioners Decree No. SK.05/DK-WB/VII/2025 dated July 17, 2025.

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi — Educational and/or Certification Background

- Magister (S2) Manajemen Bisnis – BINUS Business School (2023).
- Sarjana (S1) Manajemen Keuangan – Universitas Amir Hamzah (2000).
- Master of Management in Business Management from BINUS Business School (2023).
- Bachelor's Degree in Financial Management from Universitas Amir Hamzah (2000).

Pengalaman Kerja — Work Experiences

- Senior Vice President, Divisi Keuangan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024–2025).
- Wakil Presiden Divisi Keuangan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2023–2024).
- Komisaris Utama, PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (2023).
- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, PT Wijaya Karya Industri Konstruksi (2022–2023).
- General Manager Treasury, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020–2022).
- Manajer Keuangan Korporasi, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017–2020).
- Manajer Pengendalian & Evaluasi SM & HU, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2016–2017).
- Senior Vice President, Finance Division, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024–2025).
- Vice President, Finance Division, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2023–2024).
- President Commissioner, PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (2023).
- Director of Finance and Risk Management, PT Wijaya Karya Industri Konstruksi (2022–2023).
- General Manager, Treasury, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020–2022).
- Corporate Finance Manager, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017–2020).
- Manager, SM & HU Control and Evaluation, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2016–2017).

Rangkap Jabatan — Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan.
No concurrent positions.

Hubungan Afiliasi — Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali langsung/tidak langsung.
Has no affiliation relationship with the Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, and direct/indirect controllers.

Pada tahun 2025, Komite Audit menjalankan fungsi pengawasan sesuai mandat dan pedoman kerja yang berlaku di Perseroan. Kerangka kerja tersebut mengacu pada restrukturisasi organ pendukung Dewan Komisaris yang ditetapkan pada tahun 2024, yaitu pemisahan fungsi Komite Audit dan fungsi Risiko Usaha menjadi dua komite yang berdiri sendiri untuk memperjelas fokus pengawasan dan memperkuat pengendalian internal serta pemantauan manajemen risiko. Restrukturisasi dimaksud ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.07/DK-WB/VI/2024 tentang Piagam Komite Audit.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Audit berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman tata kelola sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN.
2. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (terkait persyaratan Komisaris Independen dan Komite Audit).
6. Piagam Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk yang ditetapkan melalui SK Dewan Komisaris Nomor SK.07/DK-WB/VI/2024.

Pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Audit didasarkan pada hukum yang berlaku dan pedoman tata kelola di atas, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit.

In 2025, the Audit Committee will carry out its supervisory functions in accordance with the mandate and work guidelines applicable to the Company. This framework refers to the restructuring of the Board of Commissioners' supporting organs established in 2024, namely the separation of the Audit Committee and Business Risk functions into two independent committees to clarify the focus of supervision and strengthen internal control and risk management monitoring. The restructuring was stipulated through Board of Commissioners Decree Number SK.07/DK-WB/VI/2024 concerning the Audit Committee Charter.

BASIS FOR THE ESTABLISHMENT OF THE AUDIT COMMITTEE

The establishment and implementation of the Audit Committee's duties are based on the provisions of applicable laws and governance guidelines as follows:

1. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in State-Owned Enterprises.
2. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number KEP-117/M-MBU/2002 concerning the Implementation of GCG Practices in State-Owned Enterprises.
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/2006 concerning Audit Committees for State-Owned Enterprises.
4. Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Working Procedures of Audit Committees.
5. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies (regarding the requirements for Independent Commissioners and Audit Committees).
6. Audit Committee Charter of PT Wijaya Karya Beton Tbk as stipulated in the Board of Commissioners Decree Number SK.07/DK-WB/VI/2024.

The establishment and implementation of the Audit Committee's duties are based on the applicable laws and governance guidelines mentioned above, as further described in the Audit Committee Charter.

PERIODE DAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Ketua dan anggota Komite Audit diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal, dengan ketentuan bahwa masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh melampaui masa jabatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berhak memberhentikan setiap anggota Komite Audit sewaktu-waktu berdasarkan evaluasi kinerja, pelanggaran ketentuan, atau pertimbangan tata kelola lainnya.

TERM AND TENURE OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS

The Chairman and members of the Audit Committee are appointed for a maximum term of five (5) years and may be reappointed in accordance with the Company's Articles of Association and capital market regulations, provided that the term of office of the Audit Committee members shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners has the right to dismiss any member of the Audit Committee at any time based on performance evaluation, violation of regulations, or other governance considerations.

SUSUNAN KOMITE AUDIT
COMPOSITION OF THE AUDIT COMMITTEE

Komite Audit merupakan organ Dewan Komisaris yang keanggotaannya terdiri dari anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan dibantu oleh sekurang-kurangnya satu pihak independen dengan keahlian di bidang keuangan/akuntansi dan/atau manajemen/industri beton, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit dan POJK 55/2015. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen.

The Audit Committee is an organ of the Board of Commissioners whose membership consists of members of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner and assisted by at least one independent party with expertise in finance/accounting and/or management/concrete industry, as stipulated in the Audit Committee Charter and POJK 55/2015. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner.

Komite Audit terdiri dari tiga (3) anggota, yaitu satu Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan dua anggota yang merupakan pihak di luar Dewan Komisaris, di mana salah satu anggota memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, sesuai dengan Piagam Komite Audit dan peraturan yang relevan.

The Audit Committee consists of three (3) members, namely one Chair who is a member of the Board of Commissioners and two members who are parties outside the Board of Commissioners, where one member has expertise in accounting and finance, in accordance with the Audit Committee Charter and relevant regulations.

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris mengukuhkan pemberhentian Bapak Iswandi Imran (Ketua merangkap Anggota Komite Audit) dan Ibu Nita Prihutaminingrum (Anggota Komite Audit) terhitung mulai 2 Juni 2025, serta mengangkat susunan Komite Audit baru.

In 2025, the Board of Commissioners confirmed the dismissal of Mr. Iswandi Imran (Chairperson and Member of the Audit Committee) and Mrs. Nita Prihutaminingrum (Member of the Audit Committee), effective June 2, 2025, and appointed a new composition of the Audit Committee.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.05/DK-WB/V11/2025 tentang Pengangkatan Organ Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk, maka komposisi Komite Audit per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Based on the Board of Commissioners' Decree No. SK.05/DK-WB/V11/2025 on the Appointment of the Audit Committee Members of PT Wijaya Karya Beton Tbk, the composition of the Audit Committee as of December 31, 2025 is as follows:

Susunan Anggota Komite Audit
Composition of Audit Committee Member

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	Periode & Masa Jabatan Term of Office	Keahlian Expertise
1.	Dwi Gawan Islandhi H.B.	Ketua merangkap Anggota Chairman acting Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.05/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025. Letter of The Board of Commissioners Decree No. SK.05/DK-WB/VII/2025 dated July 17, 2025.	Periode ke-1 (2025–2030) 1st Period (2025–2030)	Arsitektur, Teknik Sipil Architecture and Civil Engineering
2.	Gunarto	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.07/DK-WB/IV/2022 jo. SK.05/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025. Letter of The Board of Commissioners Decree No. SK.07/DK-WB/IV/2022 jo. SK.05/DK-WB/VII/2025 dated July 17, 2025.	Periode ke-1 (2024–2029) 1st Period (2024–2029)	Akuntansi Accounting
3	Ashuri	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.05/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025. Letter of The Board of Commissioners Decree No. SK.05/DK-WB/VII/2025 dated July 17, 2025.	Periode ke-1 (2025–2030) 1st Period (2025–2030)	Keuangan Finance

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE INDEPENDENCE STATEMENT

Sebagai upaya untuk dapat menjaga independensi setiap anggota Komite, masing-masing anggota Komite memberikan pernyataan independensi dengan mengacu pada persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam POJK 55/2015, POJK 33/2014, dan Piagam Komite Audit. Untuk menjaga objektivitas, masing-masing anggota telah menyampaikan pernyataan independensi yang terdapat pada tabel Aspek Independensi.

As part of efforts to maintain the independence of each Committee member, every member has submitted an independence declaration referring to the independence requirements set out in POJK 55/2015, POJK 33/2014, and the Audit Committee Charter. To ensure objectivity, each member has provided an independence statement contained in the Independence Aspects table.

Semua anggota Komite Audit telah mengajukan pernyataan independensi yang mengkonfirmasi kepatuhan mereka terhadap kriteria independensi berbasis peraturan dan piagam, yang memungkinkan Komite Audit untuk melakukan tugas pengawasannya secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan apa pun.

All members of the Audit Committee have submitted independence declarations confirming their compliance with the regulatory and charter-based independence criteria, enabling the Audit Committee to carry out its supervisory duties objectively and free from any conflict of interest.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Dewan Komisaris menyimpulkan bahwa seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan independensi yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan dan Piagam Komite Audit.

Based on these declarations, the Board of Commissioners concludes that all members of the Audit Committee have met the independence requirements mandated by applicable laws and regulations and the Audit Committee Charter.

Aspek Independensi Independent Aspect	Dwi Gawan Islandhi H.B.		Ashuri		Gunarto	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not a person in the Public Accountant Office, Legal Consultant Office, Public Appraisal Service Office or other party that provides insurance services, non-insurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.	✓		✓		✓	
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for an Independent Commissioner.	✓		✓		✓	
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Do not have direct or indirect shares in the Company.	✓		✓		✓	
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan. Not affiliated with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's Major Shareholders.	✓		✓		✓	
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Not having a business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.	✓		✓		✓	

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI YANG TELAH DIIKUTI ANGGOTA KOMITE AUDIT DALAM TAHUN BUKU

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT PARTICIPATED BY AUDIT COMMITTEE MEMBER IN THE FISCAL YEAR

Komite Audit senantiasa meningkatkan kapasitasnya dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan secara formal maupun informal. Program pelatihan dan pendidikan yang diikuti Komite Audit disajikan dalam Laporan Tahunan, bab Profil Perusahaan, sub bab Pelatihan dan/atau Pendidikan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern.

The Audit Committee continuously enhances its competencies by participating in training and education programs, both formal and informal. Details of the training and education programs attended by the Audit Committee are presented in the Annual Report, in the Company Profile section, under Training and/or Education for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Workshop/Seminar Training/Workshop/Seminar	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Dwi Gawan Islandhi H.B.	Ketua merangkap Anggota Chairman acting Member	Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV	Jakarta	27-28 Agustus 2025 August 27-28, 2025	PT RAP Academy
Ashuri	Anggota Member	Certified Risk Management Professional (CRMP)	Jakarta	08-11 Desember 2025 December 08-11, 2025	PT RAP Academy
Gunarto	Anggota Member	Certified Risk Management Professional (CRMP)	Jakarta	05 - 08 November 2025 November 05-08, 2025	PT RAP Academy

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT
DESCRIPTION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

Komite Audit bertugas memberikan pendapat yang objektif, profesional, dan independent kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi serta mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut Dewan Komisaris.

The Audit Committee is responsible for providing objective, professional, and independent opinions to the Board of Commissioners on reports or matters reported by the Board of Directors, and for identifying issues that require the attention and subsequent action of the Board of Commissioners.

Komite Audit memfokuskan kegiatannya pada kegiatan - kegiatan yang bersifat strategis dan menghindari dari kegiatan harian yang bersifat eksekusi.

The Audit Committee focuses on strategic activities and avoids execution-based daily activities.

Komite Audit dapat melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Audit Committee may perform other dutiesassigned by the Board of Commissioners provided they remain within the scopeof the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in accordance withthe provisions of applicable laws and regulations.

Secara umum tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi empat bidang yaitu:

The duties and responsibilities of the Audit Committee generally cover four sectors, specifically:

1. Overview kredibilitas dan objektivitas Laporan Keuangan (Financial Reporting).

1. Overview of the credibility and objectivity of financial statements (Financial Reporting).

2. Overview Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance).
   a. Melakukan overview terhadap kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan-peraturan terkait dan etika Perusahaan.
   b. Memberdayakan fungsi audit internal dan memastikan independensi auditor eksternal dalam melaksanakan tugasnya.

2. Overview of Corporate Governance.
   a. Conduct an overview of the Company's adherence to relevant regulations and corporate ethics.
   b. Empowering the internal audit function and ensuring the independence of the external auditors in executing their duties.

3. Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan (Corporate Control).
   a. Melakukan overview terhadap proses pengawasan internal, dan atas pekerjaan auditor eksternal dalam melaksanakan tugasnya.
   b. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal dan internal auditor.
   c. Memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian dan pelaksanaan-nya.
   d. Memberikan masukan yang profesional dan independen atas hal-hal yang memerlukan perhatian dan atau yang dapat membantu pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

3. Corporate Supervision and Control
   a. Conduct an overview of the internal supervisory process, and the work of the external auditors in executing their duties.
   b. Ensure the effectiveness of the internal control system and the efficiency of the external and internal auditors' tasks.
   c. Provide recommendations for the improvement of the control system and its operations.
   d. Provide professional and independent advice on matters that require attention and/or may assist the decision-making of the Board of Commissioners.

RUANG LINGKUP DAN WEWENANG

Ruang Lingkup Tugas

1. Di bidang Pelaporan Keuangan
   Tanggung jawab Komite Audit di bidang ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya (kredibel dan objektif) tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen jangka Panjang. Lingkup tugasnya meliputi:
   a. Melakukan pengawasan proses pembuatan laporan keuangan dengan penekanan pada kepatuhan terhadap kebijakan, standar dan sistem akuntansi yang berlaku.
   b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
   c. Menilai kebijakan akuntansi dan keputusan-keputusan yang dibuat terkait dengan keuangan.
   d. Melakukan review dan penilaian atas laporan-laporan keuangan dan laporan hasil-hasil usaha secara berkala.

2. Di bidang Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan
   Tanggung jawab Komite Audit di bidang ini termasuk didalamnya memahami masalah dan hal-hal yang berpotensi serta mengandung risiko dalam persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian tugas pokok Perusahaan, sistem pengendalian dan pemantauan proses pengawasan dan pelaksanaan tugas Perusahaan. Lingkup tugasnya meliputi :
   a. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
   b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
   c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
   d. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
   e. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.

SCOPE OF DUTIES AND AUTHORITIES

Scope of Duties

1. Financial Reporting Area
   The Audit Committee's responsibility is to ensure that the financial statements issued by management provide a credible and objective representation of the financial condition, business results, long-term plans and commitments. The scope of duties includes:
   a. Supervising the financial reporting process with emphasis on compliance with applicable accounting policies, standards and systems.
   b. Reviewing the financial information to be issued by the Public Company or Issuer to the public and/or the authorities, including financial statements, projections, and other reports related to the financial information of the Issuer or Public Company.
   c. Assessing the accounting policies and decisions made related to finance.
   d. Reviewing and assessing financial reports and business results reports periodically.

2. Corporate Supervision and Control Area
   The Audit Committee's responsibilities in this area include understanding issues and potentially risky matters in the preparation, implementation and completion of the Corporation's main tasks, control systems and monitoring of the supervisory process and implementation of the Corporation's tasks. The scope of duties includes:
   a. Provide an independent opinion regarding any disagreement between the management and the accountant on the services rendered.
   b. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of accountants based on independence, scope of duties, and service remuneration.
   c. Conduct a review of the internal auditor's audit implementation and oversee the Board of Directors' follow-up on the internal auditor's findings.
   d. Review and provide advice to the Board of Commissioners related to the potential conflict of interest of the Issuer or Public Company.
   e. Review and provide advice to the Board of Commissioners related to the potential conflict of interest of the Issuer or Public Company.

f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.
g. Melakukan oversight terhadap independensi, cakupan, perencanaan dan kualitas temuan internal dan eksternal auditor.
h. Meyakini kompetensi dan integritas auditor eksternal.
i. Memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas pengawasan.
j. Memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas sarana dan prasarana kerja pengawasan dan pengendalian.
k. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya.
l. Memberikan rekomendasi akan penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal maupun auditor internal.
m. Melakukan pengawasan audit eksternal dan melakukan penilaian terhadap kualitas jasa audit yang dilakukan dan kepantasan fees yang dibebankan.
n. Memantau dan menilai kinerja serta hasil audit yang dilakukan auditor eksternal dan internal.
o. Melakukan review atas laporan auditor eksternal maupun internal.

3. Di bidang Perencanaan Keuangan adalah:
Melakukan kajian atas usulan Direksi mengenai kebijakan Keuangan Perusahaan.
a. Melakukan evaluasi rancangan perencanaan keuangan yang disusun oleh Direksi baik yang tercantum dalam rancangan RKAP maupun evaluasi setiap proyek dan program kegiatan yang diusulkan.
b. Melakukan evaluasi atas kemampuan leverage setiap proyek yang dijalankan dengan peningkatan kinerja saham dan keuangan Perusahaan.
c. Melakukan kajian atas efektivitas struktur organisasi manajemen Komite Perencanaan Keuangan di Perusahaan.

Kewenangan

Komite Audit diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris yang meliputi:

1. Mereview, memeriksa, dan menyelidiki khusus atas aktivitas Perusahaan dalam batas ruang lingkup tugasnya.

f. Maintain the confidentiality of documents, data and information of the Issuer or Public Company.
g. Oversight of the independence, scope, planning, and quality of internal and external auditor findings.
h. Assure the competence and integrity of the external auditor.
i. Examine and assess the adequacy and effectiveness of supervision.
j. Examine and assess the sufficiency and effectiveness of supervision in overseeing and controlling work infrastructure and facilities.
k. Provide recommendations on improving the management control system and its implementation.
l. Provide recommendations on the appointment and dismissal of external and internal auditors.
m. Supervise external audit and assess the quality of audit services rendered and appropriateness of any fees charged.
n. Monitor and assess the performance and results of audits completed by external and internal auditors.
o. Review the reports of external and internal auditors.

3. Financial Planning Area
Conduct a review of the Board of Directors' proposal regarding the Company's Financial policy.
a. Evaluate the draft financial planning arranged by the Board of Directors, both included in the draft CWPB and the evaluation of each proposed project and activities program.
b. Evaluate the leverage capability of each project undertaken by enhancing the Company's stock and financial performance.
c. Conduct a review on the effectiveness management organizational structure of the Financial Planning Committee in the Company.

Authorities

The Audit Committee is authorized by the Board of Commissioners including:

1. Reviewing, examining, and investigating specifically on the Company's activities within the scope of their duties.

2. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
3. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
4. Atas izin Komisaris dapat mengundang pihak luar (profesional) atau menunjuk pihak ketiga (outsources) untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit.
5. Dapat mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat Komite Audit.
6. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
7. Memberikan pendapat dan rekomendasi dalam pemilihan kepala auditor internal dan dalam penetapan auditor eksternal.
8. Dapat berkomunikasi langsung dan mengadakan pertemuan dengan internal auditor.
9. Dapat berkomunikasi langsung dan mengadakan pertemuan dengan eksternal auditor.
10. Memiliki komitmen dalam melaksanakan tugasnya serta menjamin kerahasiaan informasi dan data-data tentang Perusahaan yang di terima atau diketahui terhadap pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan tugasnya.
11. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2. Access the documents, data, and information of the Issuer or Public Company regarding employees, funds, assets, and company resources as required.
3. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and people in charge of internal audit functions, and accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.
4. Upon the permission of the Commissioner may invite external parties (professionals) or appoint third parties (outsources) to support the implementation of the Audit Committee's duties.
5. The Audit Committee may invite management to attend the Audit Committee meeting.
6. Involve independent parties external to the Audit Committee members as necessary to assist in the performance of duties (if required).
7. Advise and recommend in electing the chief internal auditor and in appointing the external auditor.
8. Directly communicate and organize meetings with the internal auditors.
9. Directly communicate and organize meetings with the external auditors.
10. Committed to do their duties and guarantee the confidentiality of information and data about the Company received or acknowledged to parties irrelevant to their duties.
11. Implement other authorities delegated by the Board of Commissioners.

PERNYATAAN BAHWA TELAH MEMILIKI PEDOMAN ATAU PIAGAM KOMITE AUDIT
STATEMENT OF HAVING AUDIT COMMITTEE GUIDELINES OR CHARTER

Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan menjadi pedoman pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit. Komite Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, sesuai Piagam Komite Audit.

The Audit Committee has an Audit Committee Charter established by the Board of Commissioners, which serves as a guideline for the implementation of the duties, responsibilities, and authorities of the Audit Committee. The Audit Committee is independent and reports directly to the Board of Commissioners, in accordance with the Audit Committee Charter.

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit yang ditetapkan melalui SK Dewan Komisaris Nomor SK.07/DK-WB/VI/2024. Piagam tersebut mengatur antara lain: pengertian Komite Audit; dasar pembentukan; tujuan; tugas dan tanggung jawab; ruang lingkup tugas dan kewenangan; struktur organisasi dan keanggotaan; pedoman kerja; hubungan kerja dengan Direksi, Manajemen, Satuan Pengawasan Intern, dan Auditor Eksternal; serta ketentuan rapat dan pelaporan.

The Audit Committee has a Charter established through the Board of Commissioners Decree No. SK.07/DK-WB/VI/2024. The Charter regulates, among other things: the definition of the Audit Committee; the basis for its establishment; objectives; duties and responsibilities; scope of authority; organizational structure and membership; working guidelines; working relations with the Board of Directors, Management, Internal Audit Unit, and External Auditor; as well as meeting and reporting procedures.

Piagam Komite Audit dapat diakses oleh publik melalui situs web Perseroan dan ditinjau secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan praktik GCG terkini.

The Audit Committee Charter is publicly accessible on the Company's website and is reviewed periodically to ensure alignment with regulatory developments and current GCG practices.

Piagam Komite Audit, yang diberlakukan oleh Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.07/DK-WB/VI/2024, berfungsi sebagai referensi formal untuk tugas, otoritas, organisasi, pedoman kerja, dan mekanisme pelaporan Komite, dan tersedia untuk umum di situs web Perusahaan.

The Audit Committee Charter, enacted through the Board of Commissioners Decree No. SK.07/DK-WB/VI/2024 serves as the formal reference for the Committee's duties, authority, organizational structure, working guidelines, and reporting mechanisms, and is publicly available on the Company's website.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT KOMITE AUDIT DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE AUDIT DALAM RAPAT TERSEBUT

POLICY AND IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE RATE OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS AT SUCH MEETINGS

Kebijakan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Kebijakan frekuensi dan tata cara rapat Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit dan Board Manual Dewan Komisaris. Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris, dengan peserta utama seluruh anggota Komite Audit dan pihak terkait lainnya yang diundang sesuai kebutuhan (antara lain anggota Dewan Komisaris lain, Direksi, Kepala SPI, dan Auditor Eksternal).

Audit Committee Meeting Policy

The frequency and procedures of Audit Committee meetings are regulated in the Audit Committee Charter and the Board Manual of the Board of Commissioners. The Audit Committee must hold regular meetings at least once every three (3) months, or at least equal to the minimum meeting requirements of the Board of Commissioners, with mandatory attendance by all Audit Committee members and other relevant parties invited as needed (including other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Head of Internal Audit, and the External Auditor).

Komite Audit diminta untuk mengadakan pertemuan rutin setidaknya sekali setiap tiga bulan, dengan keputusan yang valid yang dibuat oleh konsensus dan dicatat dalam risalah formal yang diajukan kepada Dewan Komisaris.

The Audit Committee is required to hold regular meetings at least once every three months, with valid decisions made through consensus and documented in formal minutes submitted to the Board of Commissioners.

Rapat Komite Audit sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota, dan keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Seluruh rapat didokumentasikan dalam risalah rapat yang memuat waktu, tempat, agenda, peserta, pokok bahasan, perbedaan pendapat (jika ada), dan keputusan rapat, yang selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

A meeting of the Audit Committee is considered valid if attended by more than half of its members, and decisions are made based on deliberation and consensus. All meetings are documented in minutes that include the date, venue, agenda, participants, discussion points, differing views (if any), and the decisions made, which are then submitted to the Board of Commissioners.

Pelaksanaan Rapat Komite Audit dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit

Berikut adalah rapat yang dilaksanakan oleh Komite Audit sepanjang tahun 2025:

Implementation of Audit Committee Meeting and Attendance Level of Audit Committee Members

The Audit Committee held the following meetings throughout 2025:

Frekuensi Rapat Komite Audit dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit
Audit Committee Meeting Frequency and Attendance Level of Audit Committee Members

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Dwi Gawan Islandhi H.B.	Ketua merangkap Anggota Chairman and Member	2	2	100%
Ashuri	Anggota Member	2	2	100%
Gunarto	Anggota Member	4	4	100%
Iswandi Imran*	Ketua merangkap Anggota Chairman and Member	2	2	100%
Nita Prihutaminingrum*	Anggota Member	2	2	100%

Catatan I Notes
* Menjabat hingga 2 Juni 2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.05/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025.
* Served until June 2, 2025, in accordance with the Board of Commissioners' Decree No. SK.05/DK-WB/VII/2025 dated July 17, 2025.

Mata Acara Rapat Komite Audit
Audit Committee Agenda

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Minutes Number	Mata Acara Agenda
1	23 Januari 2025 January 23, 2025	01/RIS-KARU/WIKA BETON/2025	Rapat Koordinasi Komite Audit TW IV - 2024 Audit Committee Coordination Meeting Q4 - 2024
2	24 April 2025 April 24, 2025	02/RIS-KARU/WIKA BETON/2025	Rapat Koordinasi Komite Audit TW I - 2025 Audit Committee Coordination Meeting Q1 - 2024
3	22 Juli 2025 July 22, 2025	03/RIS-KARU/WIKA BETON/2025	Rapat Koordinasi Komite Audit TW II - 2025 Audit Committee Coordination Meeting Q2 - 2024
4	23 October 2025 October 23, 2025	04/RIS-KARU/WIKA BETON/2025	Rapat Koordinasi Komite Audit TW III - 2025 Audit Committee Coordination Meeting Q3 - 2024

URAIAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT PADA TAHUN BUKU SESUAI DENGAN YANG DICANTUMKAN DALAM PEDOMAN ATAU PIAGAM (CHARTER) KOMITE AUDIT
A BRIEF DESCRIPTION OF IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE ACTIVITIES IN THE FINANCIAL YEAR AS OUTLINED IN THE AUDIT COMMITTEE'S TERMS OF REFERENCE

Sepanjang tahun buku 2025, Komite Audit menjalankan kegiatan pengawasan sesuai Piagam Komite Audit dan Rencana Kerja Dewan Komisaris, dengan fokus utama sebagai berikut:

1. Menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan SPI dan memantau tindak lanjut rekomendasi perbaikan oleh Manajemen.
2. Mengawasi proses audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP), termasuk penetapan ruang lingkup, pemantauan pelaksanaan, dan pembahasan hasil audit.
3. Menelaah laporan keuangan berkala serta kinerja operasional dan keuangan Perseroan dari perspektif pengendalian internal dan manajemen risiko.

Throughout the 2025 fiscal year, the Audit Committee carried out its supervisory activities in accordance with the Audit Committee Charter and the Work Plan of the Board of Commissioners, with the following key focus areas:

1. Reviewing Internal Audit (SPI) examination reports and monitoring Management's follow-up actions on improvement recommendations.
2. Supervising the audit process of the Company's consolidated financial statements conducted by the Public Accounting Firm (KAP), including determining the scope, monitoring implementation, and discussing audit results.
3. Reviewing periodic financial statements and the Company's operational and financial performance from an internal control and risk management perspective.

4. Melakukan koordinasi rutin selama siklus audit, termasuk kewajiban Auditor Eksternal menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada Komite Audit dan Manajemen, serta menyelenggarakan diskusi tripartit (Komisaris–Manajemen–Auditor) bila diperlukan.

4. Conducting regular coordination throughout the audit cycle, including ensuring that the External Auditor is required to present findings and recommendations to the Audit Committee and Management, and to hold tripartite discussions (Commissioners–Management–Auditor) when necessary.

Komite Audit memfokuskan kegiatannya dalam melakukan telaah laporan Audit Internal, mengawasi proses audit eksternal, menilai kinerja Perusahaan dari perspektif kontrol dan risiko, dan mempertahankan koordinasi reguler dengan Unit Audit Internal dan Auditor Eksternal.

The Audit Committee focuses its activities on reviewing Internal Audit reports, overseeing the external audit process, evaluating the Company's performance from a control and risk perspective, and maintaining regular coordination with the Internal Audit Unit and the External Auditor.

PENCAPAIAN KPI KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Komite Audit mengacu pada indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dewan Komisaris.

Berdasarkan evaluasi tahun buku 2025, seluruh indikator KPI Komite Audit dinyatakan "terlaksana" dengan tingkat pencapaian 100% untuk masing-masing indikator, sebagaimana tercermin dalam matriks evaluasi kinerja Komite Audit.

ACHIEVEMENT OF AUDIT COMMITTEE KPIs

In performing its supervisory functions, the Audit Committee refers to the Key Performance Indicators (KPIs) set out in the Work Plan of the Board of Commissioners.

Based on the evaluation of the 2025 financial year, all KPI indicators of the Audit Committee were declared "achieved," with a completion rate of 100% for each indicator, as reflected in the Audit Committee performance evaluation matrix.

Evaluasi Kinerja Komite Audit
Performance Evaluation of the Audit Committee

No	Indikator Indicator	Bobot Indikator Indicator Value	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement
1	Kegiatan penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern yang ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi Komite Audit dan Risiko Usaha dan SPI. The review activity of the Internal Audit Report findings is followed up with a Coordination Meeting of the Audit and Business Risk Committee and SPI.	Dilaksanakan Implemented	Dilaksanakan Implemented	100%
2	Kegiatan pengawasan atas capaian kinerja auditor eksternal (KAP) yang ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi Komite Audit dan Risiko Usaha bersama Manajemen WIKA Holding, SPI, dan KAP. The supervision activities concerning the performance achievement of external auditors (KAP) are followed up with a Coordination Meeting of the Audit and Business Risk Committee with WIKA Holding Management, SPI, and KAP.	Dilaksanakan Implemented	Dilaksanakan Implemented	100%
3	Kegiatan penelaahan hasil capaian kinerja Perusahaan yang ditindaklanjuti dengan Rapat Internal Komite Audit dan Risiko Usaha dan peran Komite Audit dan Risiko Usaha dalam Rapat Internal Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. The review of the Company's performance results is followed up with an Internal Meeting of the Audit and Business Risk Committee, emphasizing the pivotal role of the Audit and Business Risk Committee in the Internal Board of Commissioners Meeting or Coordination Meeting of the Board of Commissioners and Directors.	Dilaksanakan Implemented	Dilaksanakan Implemented	100%
4	Kegiatan penelaahan atas Sistem Pengendalian Internal yang dilaksanakan oleh Perseroan melalui koordinasi dengan SPI. The review activity on the Internal Control System executed by the Company through coordination with SPI.	Dilaksanakan Implemented	Dilaksanakan Implemented	100%
5	Kegiatan penelaahan atas Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 dan kesesuaiannya dengan Rencana Jangka Panjang Perseroan 2025-2030. The review activity on the Draft of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the year 2025 and its alignment with the Company's Long-Term Plan for 2025-2030.	Dilaksanakan Implemented	Dilaksanakan Implemented	100%

Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko
Nomination, Remuneration and Risk Oversight Committee



*DWI GAWAN ISLANDHI H.B.

Ketua Merangkap Anggota
Chairman Acting Member

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia
Age

60 tahun per 31 Desember 2025
60 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan

Tenure

Periode ke-1 (2025–2030)
1st Period (2025–2030)

Dasar Hukum Penunjukan — Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.05/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025.
Letter of The Board of Commissioners Decree No. SK.05/DK-WB/VII/2025 dated July 17, 2025.

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi — Educational and/or Certification Background

Sarjana (S1) Arsitektur – Universitas Pancasila (1990).
Bachelor's Degree in Architecture from Pancasila University (1990).

Pengalaman Kerja — Work Experiences

- Arsitek dan Desainer Interior, Wiraswasta (2002–2025)
- Tenaga Ahli Arsitek, Museum Basoeki Abdullah, Jakarta (2018–2019)
- Tenaga Ahli Arsitek, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta (2015–2017)
- Architect and Interior Designer, Self-employed (2002–2025)
- Architectural Expert, Basoeki Abdullah Museum, Jakarta (2018–2019)
- Architectural Expert, Ministry of Public Works and Public Housing, Jakarta (2015–2017)

Rangkap Jabatan — Concurrent Position

- Ketua merangkap Anggota Komite Audit, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025–Sekarang)
- Komisaris Independen, PT Wijaya Karya Beton Tbk 2025–Sekarang)
- Chairman and Member of the Audit Committee, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025–Present)
- Independent Commissioner, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025–Present)

Hubungan Afiliasi — Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali langsung/tidak langsung.
Has no affiliation relationship with the Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, and direct/indirect controllers.

* Bapak Dwi Gawan Islandhi H.B. selaku Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko tidak lagi menjabat karena meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Perseroan melalui Surat Pengumuman No. SE.01.01/WB-0A.0167/2026 tanggal 18 Februari 2025.
* Mr. Dwi Gawan Islandhi H.B., in his capacity as Chairman of Nomination, Remuneration and Risk Oversight Committee of the Company has passed away, no longer serves in such position as announced by the Company through Announcement Letter No. SE.01.01/WB-0A.0167/2026 dated February 18, 2025



TJIA MARWAN

Anggota
Member

Kewarganegaraan
Citizenship
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia
Age
64 tahun per 31 Desember 2025
64 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan
Tenure
Periode ke-1 (2025–2030)
1st Period (2025–2030)

Dasar Hukum Penunjukan
Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.04/DK-WB/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025.
Letter of The Board of Commissioners Decree No. SK.04/DK-WB/VII/2025 dated July 8, 2025.

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi
Educational and/or Certification Background

Sarjana (S1) Ekonomi, Jurusan Manajemen – Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (1987).
Bachelor's Degree in Economics majoring in Management from Atma Jaya Catholic University of Indonesia (1987).

Pengalaman Kerja
Work Experiences

- Chief Marketing Office (Marketing Director), PT Dharmesta Swasti Mandiri (2023-2025)
- Direktur & Penasihat Eksekutif, PT Denso Sales Indonesia (2013 - 2022)
- Chief Marketing, PT Kayaba Indonesia (2008 - 2011)
- Deputy CEO, PT Astra Otopart Tbk (2004 - 2008)

- Chief Marketing Office (Marketing Director), PT Dharmesta Swasti Mandiri (2023-2025)
- Direktur & Penasihat Eksekutif, PT Denso Sales Indonesia (2013 - 2022)
- Chief Marketing, PT Kayaba Indonesia (2008 - 2011)
- Deputy CEO, PT Astra Otopart Tbk (2004 - 2008)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025 - Sekarang)
- Komisaris, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025 - Sekarang)

- Member of the Integrated Governance and Good Corporate Governance Committee, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025 - Present)
- Commissioner, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025 - Present)

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali langsung/tidak langsung.
Has no affiliation relationship with the Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, and direct/indirect controllers.



PRIATNA AGUS SETIAWAN

Anggota
Member

Kewarganegaraan
Citizenship
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia
Age
67 tahun per 31 Desember 2025
67 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan
Tenure
Periode ke-1 (2024–2029)
1st Period (2024–2029)

Dasar Hukum Penunjukan
Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.12/DK-WB/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
Letter of The Board of Commissioners Decree No. SK.12/DK-WB/X/2024 dated October 28, 2024.

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi
Educational and/or Certification Background

- Magister (S2) Manajemen – PPM Graduate School of Management (2005).
- Sarjana Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian – Institut Pertanian Bogor (1981).
- Master of Management from PPM Graduate School of Management (2005).
- Bachelor's Degree in Agriculture majoring in Agricultural Socioeconomics from Bogor Agricultural University (1981).

Pengalaman Kerja
Work Experiences

- Anggota Komite NR & GCG PT WIKA Beton Tbk, Jakarta (2023–2025)
- Anggota Komite GCG PT WIKA Beton Tbk, Jakarta (2018–2022)
- Senior Manager SDM PT Bintang Pelajar, Bogor (2014–2017)
- Manajer HR dan Community Development (Rent to Manage), Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme & Kamoro (LPMAK), Jakarta (2003–2008)
- General Manager HR & GA, PT Pusaka Marmer Indahjaya (1998–2000)
- Manajer Bagian HR, PT Dipasena Citra Darmaja (1996–1998)
- Member of NR & PR PT Committee of PT WIKA Beton Tbk, Jakarta (2023–2025)
- Member of GCG Committee of PT WIKA Beton Tbk, Jakarta (2018–2022)
- Senior Manager of Human Capital of PT Bintang Pelajar, Bogor (2014–2017)HR Manager and Community Development (Contract), Amungme & Kamoro Community Development Foundation (LPMAK), Jakarta (2003–2008)
- HR & GA General Manager, PT Pusaka Marmer Indahjaya (1998–2000)
- HR Section Manager, PT Dipasena Citra Darmaja (1996–1998)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

- Anggota Komite NR & PR PT WIKA Beton Tbk, Jakarta (2025–Sekarang)
- Senior Associate Consultant PT Synergy Partner Prima, Jakarta (2019–Sekarang)
- Senior Associate Consultant PPM Manajemen, Jakarta (2000–Sekarang)
- Member of NR & PR PT Committee of PT WIKA Beton Tbk, Jakarta (2025–Present)
- Senior Associate Consultant of PT Synergy Partner Prima, Jakarta (2019–Present)
- Senior Associate Consultant of PPM Manajemen, Jakarta (2000–Present)

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali langsung/tidak langsung.
Has no affiliation relationship with the Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, and direct/indirect controllers.



DEDI INDRA

Anggota
Member

Kewarganegaraan
Citizenship
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia
Age
46 tahun per 31 Desember 2025
46 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan
Tenure
Periode ke-1 (2024–2027)
1st Period (2024–2027)

Dasar Hukum Penunjukan
Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.12/DK-WB/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
Letter of The Board of Commissioners Decree No. SK.12/DK-WB/X/2024 dated October 28, 2024.

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi
Educational and/or Certification Background

Sarjana (S1) Teknik Informatika – Universitas Gunadarma (2003).
Bachelor's Degree in Informatics Engineering from Gunadarma University (2003).

Pengalaman Kerja
Work Experiences

- Sekretaris Perusahaan, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2022–2024)
- Manajer Biro Sistem Informasi, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017–2022)
- Corporate Secretary, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2022–2024)
- Manager of Information System Bureau, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017–2022)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

1. Manajer Divisi Human Capital PT Wijaya Karya Beton Tbk (2024-sekarang)
2. Pejabat Sementara Manajer Bidang Pengembangan Organisasi dan Budaya (2025-sekarang)

1. Human Capital Division Manager at PT Wijaya Karya Beton Tbk (2024–present)
2. Acting Manager of Organizational and Cultural Development (2025–present)

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali langsung/tidak langsung.
Has no affiliation relationship with the Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, and direct/indirect controllers.

Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk membentuk Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko (Komite NR & PR) sebagai organ pendukung Dewan Komisaris yang bersifat kolektif dan mandiri untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan (oversight) di bidang nominasi, remunerasi, tata kelola, dan pemantauan risiko Perseroan. Komite NR & PR berkedudukan langsung di bawah Dewan Komisaris, melaporkan secara langsung, dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

The Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Beton Tbk established the Nomination, Remuneration, and Risk Oversight Committee (NR & PR Committee) as a collective and independent supporting body of the Board of Commissioners to assist in the implementation of oversight functions in the areas of nomination, remuneration, governance, and risk monitoring of the Company. The NR & PR Committee is directly under the Board of Commissioners, reports directly to the Board of Commissioners, and is accountable to the Board of Commissioners in accordance with applicable regulations and the Company's Articles of Association.

Pembentukan Komite NR & PR berlandaskan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahannya yang terakhir dituangkan dalam akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12 Juni 2025.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik, serta pedoman tata kelola perusahaan terbuka.
3. Ketentuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengenai penerapan praktik Good Corporate Governance (GCG) dan organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
4. Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk:
    a. SK.05/DK-WB/VI/2024 tentang Pengangkatan Organisasi Nominasi, Remunerasi, dan Good Corporate Governance;
    b. SK.06/DK-WB/VI/2024 tentang Pengangkatan Organ Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi;
    c. SK.04/DK-WB/VII/2025 tentang Penyesuaian Nomenklatur serta Pengangkatan Organ Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko;
    d. SK.07/DK-WB/VII/2025 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko.

The establishment of the NR & PR Committee is based on the following provisions:

1. The Company's Articles of Association and all subsequent amendments are set forth in the deed of amendment to the Company's Articles of Association dated June 12, 2025.
2. Financial Services Authority regulations regarding the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies, as well as guidelines for open company governance.
3. Provisions of the Ministry of State-Owned Enterprises regarding the implementation of Good Corporate Governance (GCG) practices and supporting organs of the Board of Commissioners/Board of Supervisors of State-Owned Enterprises.
4. Decision of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Beton Tbk:
    a. SK.05/DK-WB/VI/2024 concerning the Appointment of the Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance Organization;
    b. SK.06/DK-WB/VI/2024 concerning the Appointment of the Risk Oversight and Integrated Governance Committee;
    c. SK.04/DK-WB/VII/2025 concerning the Adjustment of Nomenclature and the Appointment of the Nomination, Remuneration and Risk Oversight Committee;
    d. SK.07/DK-WB/VII/2025 concerning the Charter of the Nomination, Remuneration and Risk Oversight Committee.

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris menetapkan penyesuaian nomenklatur dan susunan organ komite-komite di bidang nominasi, remunerasi, tata kelola, dan pemantauan risiko melalui SK.04/DK-WB/VII/2025. Keputusan ini sekaligus menetapkan Komite NR & PR sebagai organ pendukung Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi, remunerasi, dan

In 2025, the Board of Commissioners established adjustments to the nomenclature and structure of committees in the areas of nomination, remuneration, governance, and risk monitoring through Decree SK.04/DK-WB/VII/2025. This decision also established the NR & PR Committee as a supporting body of the Board of Commissioners that carries out the functions

pemantauan risiko secara terintegrasi, dengan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Piagam Komite NR & PR (SK.07/DK-WB/VII/2025).

1. Perseroan menata komposisi Komite Nominasi agar seluruh anggota memenuhi kriteria independensi sesuai praktik terbaik. Perseroan menampilkan status independensi anggota komite secara eksplisit pada laman komite dan laporan tahunan.

2. Perseroan menyelaraskan proses nominasi Komisaris dengan peta strategi (strategic map) melalui kriteria kompetensi yang terukur. Perseroan mengungkapkan kriteria kompetensi dan ringkasan proses seleksi pada publikasi tata kelola.
3. Perseroan membuka opsi penggunaan professional search firm dalam proses penjaringan kandidat Komisaris untuk memperluas pool kandidat. Perseroan mengungkapkan kebijakan penggunaan search firm dan prinsip seleksi yang diterapkan.
4. Perseroan mengevaluasi komposisi Dewan Komisaris untuk memperkuat independensi dan efektivitas pengawasan sesuai praktik terbaik. Perseroan melaksanakan penyesuaian komposisi melalui mekanisme RUPS dan mengungkapkan hasilnya pada publikasi korporasi.

PERIODE JABATAN

Ketentuan masa jabatan Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko ("Komite NR & PR") mengacu pada Piagam Komite dan Keputusan Dewan Komisaris. Pada prinsipnya, masa jabatan anggota Komite ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris dan tidak boleh lebih lama daripada masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Bagi anggota Komite yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, masa jabatannya berakhir bersamaan dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan oleh RUPS.

Bagi anggota Komite yang bukan anggota Dewan Komisaris, masa jabatan ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

of nomination, remuneration, and risk monitoring in an integrated manner, with duties and authorities as stipulated in the NR & PR Committee Charter (SK.07/DK-WB/VII/2025).

1. The Company structures the composition of the Nomination Committee so that all members meet the independence criteria in accordance with best practice. The Company explicitly states the independence status of committee members on the committee's website and in its annual report
2. The Company aligns the Commissioners nomination process with the strategic map through measurable competency criteria. The Company disclose the competency criteria and summary of the selection process in its governance publications.
3. The Company is open to using professional search firms in the Commissioner candidate selection process to expand the candidate pool. The Company disclose its policy on the use of search firms and the selection principles applied.
4. The Company evaluates the composition of the Board of Commissioners to strengthen independence and oversight effectiveness in accordance with best practices. The Company implements adjustments to the composition through the GMS mechanism and disclose the results in corporate publications.

TERM OF OFFICE

General provisions on the term of office of the Nomination, Remuneration, and Risk Monitoring Committee ("NR & PR Committee") refer to the Committee Charter and the Board of Commissioners' Decree. In principle, the term of office of Committee members is determined by a Board of Commissioners' Decree and shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association.

For Committee members who concurrently serve as members of the Board of Commissioners, their Committee term ends concurrently with their term as Commissioners as determined by the GMS.

For Committee members who are not Commissioners, the term is determined in the Board of Commissioners' Decree and, upon expiry, they may be reappointed for only one subsequent term, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss them at any time.

SUSUNAN KOMITE NR & PR
COMPOSITION OF THE NR & PR COMMITTEE

Piagam Komite NR & PR mensyaratkan bahwa Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:

1. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota yang merupakan Komisaris Independen.
2. Anggota lainnya dapat berasal dari:
   a. anggota Dewan Komisaris;
   b. pihak independen dari luar Perseroan; dan/atau
   c. pejabat manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

The NR & PR Committee Charter stipulates that the Committee shall consist of at least 3 (three) members, with the following provisions:

1. 1 (one) Chairperson who is also a member and an Independent Commissioner.
2. Other members may come from:
   a. members of the Board of Commissioners;
   b. independent parties from outside the Company; and/or
   c. managerial officials under the Board of Directors who are in charge of human resources.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.04/DK-WB/VII/2025 tentang Penyesuaian Nomenklatur Serta Pengangkatan Organ Komite Nominasi Remunerasi dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk, maka komposisi Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Based on the Board of Commissioners' Decree Number SK.04/DK-WB/VII/2025 concerning Adjustments to Nomenclature and the Appointment of the Nomination, Remuneration, and Risk Monitoring Committee of PT Wijaya Karya Beton Tbk, the composition of the Nomination, Remuneration, and Risk Monitoring Committee as of December 31, 2025 is as follows:

Susunan Anggota Komite NR & PR
Composition Member of the NR & PR Committee

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	Periode & Masa Jabatan Tenure	Keahlian Expertise
Dwi Gawan Islandhi H.B.	Ketua merangkap Anggota Chairman concurrent as a Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.04/DK-WB/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025. Based on the Decree of the Board of Commissioners Number SK.04/DK-WB/VII/2025 dated July 8, 2025.	Periode ke-1 1st Period 2025–2030	Arsitektur dan Teknik Sipil Architecture and Civil Engineering
Tjia Marwan	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.04/DK-WB/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025. Based on the Decree of the Board of Commissioners Number SK.04/DK-WB/VII/2025 dated July 8, 2025	Periode ke-1 1st Period 2025–2030	Penjualan, Pemasaran, dan Bisnis sales, marketing, and business
Priatna Agus Setiawan	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.12/DK-WB/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024. Based on the Decree of the Board of Commissioners No. SK.12/DK-WB/X/2024 regarding the Changes in the Nomination, Remuneration, and GCG Committee on October 28th, 2024.	Periode ke-1 1st Period 2024–2029	Manajemen Tata Kelola, Strategi SDM, dan Pemantau Risiko Governance Management, Human Capital Strategy, and Risk Monitoring
Dedi Indra	Anggota merangkap Manajer Divisi Human Capital Member concurrent as Manager of Human Capital Division	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.12/DK-WB/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024. Based on the Decree of the Board of Commissioners Number: SK.12/DK-WB/X/2024 regarding the Changes in the Nomination, Remuneration, and GCG Committee on October 28th, 2024.	Periode ke-1 1st Period 2024–2027	Teknik Informatika Information Technology

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE NR & PR
STATEMENT OF INDEPENDENCE OF NR & PR COMMITTEE

Piagam Komite NR & PR mensyaratkan bahwa anggota Komite harus memenuhi kriteria umum dan khusus sebagai berikut:

The NR & PR Committee Charter requires that Committee members meet the following general and specific criteria:

1. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, dan pengalaman yang memadai untuk menjalankan tugas pengawasan di bidang nominasi, remunerasi, dan pemantauan risiko.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai:
   a. Anggaran Dasar Perseroan;
   b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan pasar modal; serta
   c. Prinsip-prinsip nominasi, remunerasi, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.
4. Mampu memahami kegiatan usaha Perseroan dan sektor industri tempat Perseroan beroperasi.
5. Mampu mengkomunikasikan hasil pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris secara lisan maupun tertulis.

1. Possess integrity, dedication, competence, education, independence, and sufficient experience to perform supervisory duties in the areas of nomination, remuneration, and risk monitoring.
2. Have sufficient knowledge of:
   a. The Company's Articles of Association;
   b. laws and regulations relating to the Company's business activities and the capital market; and
   c. the principles of nomination, remuneration, risk management, and corporate governance.
4. Being able to understand the Company's business activities and the industry sector in which the Company operates.
5. Being able to communicate the results of the implementation of tasks to the Board of Commissioners both verbally and in writing.

Seluruh anggota Komite NR & PR wajib menandatangani pernyataan independensi dan mematuhi Kode Etik Komite serta standar etika Perseroan. Untuk menjaga independensi, Piagam Komite NR & PR mengatur antara lain bahwa:

All members of the NR & PR Committee are required to sign a statement of independence and comply with the Committee's Code of Ethics and the Company's ethical standards. To maintain independence, the NR & PR Committee Charter stipulates, among other things, that:

Aspek Independensi Independent Aspect	**Dwi Gawan Islandhi H.B.(*)**	**Tjia Marwan**	**Priatna Agus Setiawan**	**Dedi Indra**
Anggota Komite NR & PR baik yang merupakan anggota Dewan Komisaris maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi; Members of the NR & PR Committee, whether members of the Board of Commissioners or not members of the Board of Commissioners, have no financial, management, share ownership and/or blood relations to the third degree, either in a straight line or sideways or in a relationship that arises due to marriage with another member of the Board of Commissioners or with a member of the Board of Directors;	✓	✓	✓	✓
Anggota Komite NR & PR baik yang merupakan anggota Dewan Komisaris maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; Members of the NR & PR Committee, whether members of the Board of Commissioners or not members of the Board of Commissioners, do not hold concurrent positions as administrators of political parties and/or candidates/members of the legislature and or candidates for regional/deputy regional heads, and other positions in accordance with the provisions regulations;	✓	✓	✓	✓

Aspek Independensi Independent Aspect	Dwi Gawan Islandhi H.B.(*)	Tjia Marwan	Priatna Agus Setiawan	Dedi Indra
Anggota Komite NR & PR yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap sebagai: 1. Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain; 2. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris pada Perusahaan lain; 3. Anggota Komite lain pada Perusahaan; 4. Anggota Komite di Perusahaan lain. Members of the NR & PR Committee who are not members of the Board of Commissioners, do not concurrently serve as: 1. Members of the Board of Commissioners at other companies; 2. Secretary/Staff of the Secretariat of the Board of Commissioners on other companies; 3. Other Committee Members in the Company; 4. Committee members in other companies.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; Does not have a business relationship, either directly or indirectly related to the business activities of PT Wijaya Karya Beton Tbk which may cause a conflict of interest;	✓	✓	✓	✓
Bukan merupakan pegawai kunci, yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan PT Wijaya Karya Beton Tbk dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris; Not a key employee, namely a person who has the authority and responsibility to plan, lead, or control the activities of PT Wijaya Karya Beton Tbk in the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners;	✓	✓	✓	-
Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material Perusahaan; Does not have a personal interest directly or indirectly with the Company's material information;	✓	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultansi lainnya kepada PT Wijaya Karya Beton Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris; Not a member of a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, or other party providing audit services, non-audit services and or other consulting services to PT Wijaya Karya Beton Tbk within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners;	✓	✓	✓	✓

(*) Bapak Dwi Gawan Islandhi H.B. selaku Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko tidak lagi menjabat karena meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Perseroan melalui Surat Pengumuman No. SE.01.01/WB-0A.0167/2026 tanggal 18 Februari 2025.
(*) Mr. Dwi Gawan Islandhi H.B., in his capacity as Chairman of Nomination, Remuneration and Risk Oversight Committee of the Company has passed away, no longer serves in such position as announced by the Company through Announcement Letter No. SE.01.01/WB-0A.0167/2026 dated February 18, 2025

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI YANG TELAH DIIKUTI DALAM TAHUN BUKU
TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT PARTICIPATED IN FISCAL YEAR 2025

Peningkatan kompetensi anggota Komite NR & PR dilaksanakan melalui program pelatihan, seminar, dan/atau workshop yang relevan dengan tugas Komite, antara lain di bidang:

1. tata kelola perusahaan dan GCG terintegrasi;
2. manajemen risiko dan kepatuhan;
3. remunerasi dan praktik kompensasi di industri sejenis;
4. isu-isu ESG, termasuk risiko dan peluang terkait perubahan iklim.

Pada tahun 2025, anggota Komite NR & PR mengikuti pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi seperti yang terperinci dalam tabel di bawah ini:

The competency of NR & PR Committee members is enhanced through training programs, seminars, and/or workshops relevant to the Committee's duties, including in the areas of:

1. corporate governance and integrated GCG;
2. risk management and compliance;
3. remuneration and compensation practices in similar industries;
4. ESG issues, including risks and opportunities related to climate change.

In 2025, members of the NR & PR Committee will participate in training and/or competency enhancement as detailed in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Dwi Gawan Islandhi H.B.	Ketua (merangkap Anggota) Chairman acting Member	Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV	Jakarta	27-28 Agustus 2025 August 27-28, 2025	PT RAP Academy
Tjia Marwan	Anggota Member	Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV	Jakarta	27-28 Agustus 2025 August 27-28, 2025	PT RAP Academy
Priatna Agus Setiawan	Anggota Member	Certified Risk Management Professional (CRMP)	Jakarta	08-11 Desember 2025 December 08-11, 2025	PT RAP Academy
Dedi Indra	Manajer Divisi Human Capital / Anggota Komite Manager of Human Capital Division / Committee Member Committee Member	Certified Risk Management Professional (CRMP)	Jakarta	08-11 Desember 2025 December 08-11, 2025	PT RAP Academy

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI, REMUNERASI & PEMANTAU RISIKO
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE MEMBERS OF THE NOMINATION, REMUNERATION & RISK MONITORING COMMITTEE

Komite Nominasi, Remunerasi & Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip terkait Nominasi, Remunerasi, dan Pemantauan Risiko. Agar Komite Nominasi Remunerasi & Pemantau Risiko dapat berperan efisien dan efektif, maka tugas, tanggung-jawab, dan kewenangannya diatur sebagai berikut:

1. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Nominasi
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      1). Komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
      2). Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
      3). Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

The Nomination, Remuneration & Risk Monitoring Committee has the duty and responsibility to assist the Board and Commissioners by providing professional and independent opinions to ensure the implementation of principles related to Nomination, Remuneration, and Risk Monitoring. The duties, responsibilities, and authorities of the Committee are structured to ensure that it performs its role efficiently and effectively, as set as bellow:

1. Duties and Responsibilities Nomination Function
   a. Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding:
      1). The Composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners
      2). Policies and criteria required in the nomination process; and
      3). Performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
   b. Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners based on established benchmarks as evaluation material;
   c. Provide recommendations regarding competency development programs for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;

d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

e. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

f. Melakukan review secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (Talent Management System) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya;

g. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (Talent Classification) yang dilakukan oleh Direksi;

h. Melakukan evaluasi atas usulan Key Performance Indicators Perseroan, Individu anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;

i. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

j. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perusahaan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Remunerasi

a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyusunan struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris mengenai:
   1). Struktur Remunerasi;
   2). Kebijakan atas Remunerasi; dan
   3). Besaran atas Remunerasi;

b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

c. Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

d. Propose qualified candidates for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the Board of Commissioners for submission to the General Meeting of Shareholders (GMS);

e. Propose qualified candidates for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of Subsidiaries to the Board of Commissioners for submission to the GMS;

f. Conduct periodic reviews of the Company's Talent Management System and monitor and evaluate its implementation;

g. Evaluate the Talent Classification system and procedures implemented by the Board of Directors;

h. Evaluate proposed Key Performance Indicators (KPIs) of the Company, individual members of the Board of Directors, and members of the Board of Commissioners;

i. Prepare proposals for individual performance evaluation systems for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;

j. Evaluate proposals from the Board of Directors regarding the Company's organizational structure.

2. Duties and Responsibilities Remuneration Function

a. To provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure of remuneration for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners, including:
   1). Remuneration structure;
   2). Remuneration policies; and
   3). Remuneration amounts.

b. To assist the Board of Commissioners in assessing performance in relation to the appropriateness of remuneration received by each member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;

c. To evaluate the structure, policies, and amounts of remuneration at least once a year.

d. Assist the Board of Commissioners in assessing performance in relation to the appropriateness of the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.

3. Tugas dan Tanggung Jawab terkait Fungsi Pemantau Risiko
   a. Mengevaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan Dewan Komisaris untuk mengawasi dan memastikan kecukupan kebijakan Manajemen Risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan Manajemen Risiko Perseroan;
   b. Menganalisis dan mengevaluasi laporan Manajemen Risiko, Laporan Profil Risiko Perseroan, maupun laporan lainnya terkait Manajemen Risiko setiap triwulan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan;
   c. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi Manajemen Risiko Perseroan setiap triwulan, serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan Manajemen Risiko Perusahaan;
   d. Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan fungsi kepatuhan (compliance) Perseroan dalam penerapan Manajemen Risiko setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan penerapan Manajemen Risiko Perseroan;
   e. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas unit kerja yang membidangi keuangan dan Manajemen Risiko beserta jajarannya serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas unit kerja yang membidangi Keuangan dan Manajemen Risiko beserta jajarannya yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
   f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
   g. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada ketua dan anggota komite terkait isu-isu ESG, termasuk pengelolaan risiko dan peluang terkait perubahan iklim.

3. Duties and Responsibilities Risk Monitoring Function
   a. To periodically evaluate, in accordance with applicable provisions and procedures within the Board of Commissioners, the adequacy of Risk Management policies and provide advice and/or recommendations for improvement and enhancement of the Company's Risk Management framework and policies;
   b. To analyze and evaluate Risk Management reports, the Company's Risk Profile reports, and other related reports on a quarterly basis and provide recommendations for necessary improvements;
   c. Monitor and evaluate, on a quarterly basis, the adequacy of the Company's risk management processes, including identification, measurement, monitoring, control, and information systems, and provide advice and/or recommendations to the Board of Commissioners to enhance the effectiveness and quality of the implementation of the Company's Risk Management;
   d. Evaluate and analyze, on a semi-annual basis, the implementation of the Company's compliance function in relation to Risk Management, and provide advice and/or recommendations to the Board of Commissioners to enhance the quality of the implementation of the Company's Risk Management compliance function;
   e. Supervise and evaluate the performance of work units responsible for finance and Risk Management, including their respective teams, and provide advice and/or recommendations to the Board of Commissioners to enhance the effectiveness of their functions, to be carried out at least once annually; and
   f. To perform other duties assigned by the Board of Commissioners from time to time;
   g. To supervise and provide direction to the Chair and members of the Committee regarding ESG-related matters, including management of risks and opportunities related to climate change.

4. Kewenangan dan Mekanisme Kerja
   a. Komite Nominasi Remunerasi & Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
   b. Komite Nominasi, Remunerasi & Pemantau Risiko mempunyai wewenang mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang pegawai, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
   c. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana diatur dalam butir a dan b di atas, Komite Nominasi, Remunerasi & Pemantau Risiko wajib bekerja sama dengan mitra kerja di antaranya: Organ Pendukung Dewan Komisaris, satuan kerja terkait di level manajemen antara lain: Unit Kerja Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan, dan Unit-Unit operasional Perusahaan terkait;
   d. Mekanisme kerja sebagaimana butir a, b, dan c di atas harus mengikuti prosedur kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
   e. Apabila dianggap perlu, Komite Nominasi, Remunerasi & Pemantau Risiko dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/ asesor/pihak independen di luar anggota Komite Nominasi Remunerasi & Pemantau Risiko yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas biaya Perusahaan;
   f. Apabila dianggap perlu, Komite Nominasi, Remunerasi & Pemantau Risiko dapat membentuk suatu tim yang bersifat ad-hoc, dengan kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya;
   g. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut Nominasi Remunerasi & Pemantau Risiko;
   h. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi terkait Nominasi, Remunerasi & Pemantau Risiko;
   i. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Komite Nominasi Remunerasi & Pemantau Risiko;

4. Authority and Working Mechanism
   a. The Nomination, Remuneration & Risk Monitoring Committee operates collectively and independently in performing its duties;
   b. The Nomination, Remuneration & Risk Monitoring Committee has the authority to access Company documents, data, and information relating to employees, funds, assets, and other resources necessary for the execution of its duties;
   c. In exercising such authority as referred to in points a and b, the Nomination, Remuneration & Risk Monitoring Committee shall coordinate with relevant parties, including supporting organs of the Board of Commissioners and management-level work units such as Internal Audit, Corporate Secretary, and operational units;
   d. The working mechanism as referred to in points a, b, and c above shall comply with work procedures in accordance with applicable laws and regulations;
   e. Where deemed necessary, the Nomination, Remuneration & Risk Monitoring Committee may engage experts and/or consultants/ assessors/independent parties outside the Nomination, Remuneration & Risk Monitoring Committee to assist in the performance of its duties, subject to prior written approval of the Board of Commissioners and at the Company's expense;
   f. Where deemed necessary, the Nomination, Remuneration & Risk Monitoring Committee may establish an ad hoc team, with the criteria and assignment period adjusted to the needs and nature of the work;
   g. Request explanations from the Board of Directors and/or other officers regarding all matters related to Nomination, Remuneration & Risk Monitoring;
   h. Be informed of all policies and actions that have been and will be implemented by the Board of Directors in relation to Nomination, Remuneration & Risk Monitoring;
   i. Request the Board of Directors and/or other officers under the Board of Directors, with the knowledge of the Board of Directors, to attend meetings of the Nomination, Remuneration & Risk Monitoring Committee;

j. Komite Nominasi Remunerasi & Pemantau Risiko mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan pegawai Perusahaan, termasuk Direksi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
k. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

5. Kode Etik Kerahasiaan
   a. Anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
   b. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan untuk keuntungan pribadi;
   c. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

6. Sistem Pelaporan Kegiatan
   a. Komite Nominasi, Remunerasi & Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
   b. Sistem Pelaporan Kegiatan Komite Nominasi Remunerasi & Pemantau Risiko disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
      1). Laporan hasil rapat (risalah rapat).
      2). Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulanan Komite.
      3). Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite.
      4). Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan, dan saran.

j. The Nomination, Remuneration & Risk Monitoring Committee has the authority to communicate directly with the Company's employees, including the Board of Directors and other relevant parties in relation to the performance of its duties;
k. Performing other supervisory authorities provided that such authorities do not conflict with applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS).

5. Confidentiality Code of Ethics
   a. Committee members, whether currently serving or no longer serving, shall maintain the confidentiality of Company documents, data, and information obtained during their tenure and use such information solely for the performance of their duties;
   b. Committee members are prohibited from misusing material information for personal gain;
   c. Committee members must comply with the Company's Code of Ethics and are prohibited from deriving personal benefit, directly or indirectly, from Company activities other than honorarium, facilities, and other allowances.

6. Activity Reporting System
   a. The Nomination, Remuneration & Risk Monitoring Committee is accountable to the Board of Commissioners.
   b. The reporting system of the Nomination, Remuneration & Risk Monitoring Committee is submitted to the Board of Commissioners in the form of the following reports:
      1). Minutes of meetings;
      2). Quarterly activity and performance reports;
      3). Annual activity and performance reports;
      4). Field visit reports containing findings, evaluations, analyses, conclusions, and recommendations.

PERNYATAAN BAHWA ANGGOTA KOMITE NR & PR TELAH MEMILIKI PEDOMAN ATAU PIAGAM (CHARTER)
STATEMENT OF HAVING NR & PR COMMITTEE GUIDELINES OR CHARTER

Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko telah memiliki Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan menjadi pedoman pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite NR & PR.

The Nomination, Remuneration, and Risk Monitoring Committee has a Nomination, Remuneration, and Risk Monitoring Committee Charter established by the Board of Commissioners, which serves as a guideline for the implementation of the duties, responsibilities, and authorities of the NR & PR Committee.

Komite NR & PR melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. SK.07/DK-WB/VII/2025.

The NR & PR Committee carries out its duties, responsibilities, and authorities based on the Charter of the Nomination, Remuneration, and Risk Monitoring Committee established through Board of Commissioners Decree No. SK.07/DK-WB/VII/2025.

Piagam Komite NR & PR antara lain memuat:
1. Kedudukan, tujuan, dan ruang lingkup tugas Komite NR & PR.
2. Struktur organisasi, keanggotaan, dan persyaratan anggota Komite.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite NR & PR dalam:
    a. fungsi nominasi,
    b. fungsi remunerasi, dan
    c. fungsi pemantau risiko.
4. Kewenangan dan mekanisme kerja Komite, termasuk hak mengakses dokumen, data, dan informasi yang relevan, serta kemungkinan melibatkan tenaga ahli atau konsultan independen dengan persetujuan Dewan Komisaris.
5. Ketentuan mengenai rapat dan pengambilan keputusan, dokumentasi risalah rapat, serta tata cara pelaporan kepada Dewan Komisaris.
6. Ketentuan peninjauan dan penyempurnaan Piagam Komite secara berkala sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan Perseroan.

The NR & PR Committee Charter includes:
1. The position, objectives, and scope of duties of the NR & PR Committee.
2. The organizational structure, membership, and requirements for Committee members.
3. The duties and responsibilities of the NR & PR Committee in:
    a. the nomination function,
    b. the remuneration function, and
    c. the risk monitoring function.
4. The authority and working mechanisms of the Committee, including the right to access relevant documents, data, and information, as well as the possibility of involving independent experts or consultants with the approval of the Board of Commissioners.
5. Provisions regarding meetings and decision-making, documentation of meeting minutes, and procedures for reporting to the Board of Commissioners.
6. Provisions for periodic review and refinement of the Committee Charter in accordance with regulatory developments and the Company's needs.

Piagam Komite NR & PR menjadi acuan resmi bagi Komite dan dilampirkan pada setiap SK pengangkatan organisasi Komite NR & PR.

The NR & PR Committee Charter serves as the official reference for the Committee and is attached to every decree of appointment of the NR & PR Committee organization.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE NR & PR

POLICY AND IMPLEMENTATION OF MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVELS OF THE NOMINATION, REMUNERATION, AND RISK MONITORING COMMITTEE MEMBERS

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE NR & PR

Piagam Komite NR & PR mengatur bahwa:

1. Rapat Komite NR & PR diselenggarakan sesuai kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rapat Komite NR & PR hanya dapat dilaksanakan apabila:
   a. dihadiri oleh mayoritas anggota Komite NR & PR; dan
   b. salah satu dari mayoritas anggota tersebut adalah Ketua Komite NR & PR.
3. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai, diambil berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip "1 (satu) orang 1 (satu) suara".
4. Perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan wajib dicatat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite NR & PR, dan bila Ketua berhalangan, dipimpin oleh anggota Komite yang ditunjuk/disepakati dalam rapat.
6. Seluruh rapat didokumentasikan dalam risalah rapat yang ditandatangani peserta rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Komite NR & PR diminta untuk mengadakan pertemuan setidaknya empat kali setahun. Keputusan yang sah diambil oleh konsensus atau, gagal itu, dengan suara mayoritas, dan semua pertemuan dicatat dalam risalah yang diajukan kepada Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN RAPAT KOMITE NR & PR

Pada tahun 2025, Komite NR & PR mengadakan pertemuan sebanyak 5 (lima) kali, seperti terperinci dalam tabel di bawah ini:

NR & PR COMMITTEE MEETING POLICY

The NR & PR Committee Charter stipulates that:

1. NR & PR Committee meetings shall be held as required by the Company, at least four (4) times a year.
2. NR & PR Committee meetings can only be held if:
   a. attended by a majority of NR & PR Committee members; and
   b. one of the majority members is the Chair of the NR & PR Committee.
3. Meeting decisions are made based on consensus, and if consensus cannot be reached, decisions are made based on a majority vote with the principle of "one person, one vote".
4. Differences of opinion in decision-making must be clearly recorded in the minutes of the meeting along with the reasons.
5. Meetings are chaired by the Chair of the NR & PR Committee, and if the Chair is unable to attend, they are chaired by a Committee member appointed/ agreed upon at the meeting.
6. All meetings are documented in the minutes of the meeting signed by the meeting participants and submitted to the Board of Commissioners.

The NR & PR Committee is required to hold meetings at least four times a year. Valid decisions are made by consensus or, failing that, by majority vote, and all meetings are recorded in minutes submitted to the Board of Commissioners.

IMPLEMENTATION OF NR & PR COMMITTEE MEETINGS

In 2025, the NR & PR Committee held 5 (five) meetings, as detailed in the table below:

In carrying out its duties and responsibilities, the NR &

Frekuensi Rapat Komite NR & PR dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite NR & PR
Meeting Frequency of the NR & PR Committee and Attendance of the Members

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Sebelum Perubahan Nomenklatur **Before the Nomenclature Change**				
Nita Prihutaminingrum*	Ketua NR & GCG (merangkap Anggota) Chairman acting Member	1	1	100%
Priatna Agus Setiawan	Anggota NR & GCG Member	1	1	100%
Dedi Indra	Manajer Divisi Human Capital/Anggota Komite NR & GCG Manager of Human Capital Division/Committee Member	1	1	100%
R. Permadi Mulajaya*	Ketua PR & TKT (merangkap Anggota) Chairman acting Member	1	1	100%
Miftachul Munir*	Anggota PR & TKT Member	1	1	100%
Denny Setiawan*	Anggota PR & TKT Member	1	1	100%
Setelah Perubahan Nomenklatur **After the Nomenclature Change**				
Dwi Gawan Islandhi H.B.	Ketua (merangkap Anggota) Chairman acting Member	3	3	100%
Tjia Marwan	Anggota Member	3	3	100%
Priatna Agus Setiawan	Anggota Member	3	3	100%
Dedi Indra	Manajer Divisi Human Capital/Anggota Komite Manager of Human Capital Division/Committee Member	3	3	100%

Catatan I Notes
* Menjabat hingga 8 Juli 2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.04/DK-WB/VII/2025.
* Appointed until July 8, 2025 based on the Board of Commissioners' Decree Number SK.04/DK-WB/VII/2025.

Mata Acara Rapat Komite NR & PR
Meeting Agenda of NR & PR Committee

No	Tanggal Date	Mata Acara Agenda
Sebelum Perubahan Nomenklatur **Before the Nomenclature Change**		
1	29 April 2025 April 29, 2025	Rapat Koordinasi Pemantauan Risiko TW I 2025 Risk Monitoring Coordination Meeting for the First Quarter of 2025
2	29 April 2025 April 29, 2025	Rapat Koordinasi Nominasi, Remunerasi dan Tata Kelola Perusahaan Nomination, Remuneration and Corporate Governance Coordination Meeting
Setelah Perubahan Nomenklatur **After the Nomenclature Change**		
1	5 Agustus 2025 August 5, 2025	Rakor Program Nominasi & Remunerasi Divisi Human Capital Human Capital Division Nomination & Remuneration Program Coordination Meeting
2	17 Oktober 2025 October 17, 2025	Rapat Koordinasi Program Nominasi Remunerasi dan Pemantau Risiko TW II 2025 Nomination Remuneration and Risk Monitoring Program Coordination Meeting for the Second Quarter of 2025
3	16 Desember 2025 December 16, 2025	Rapat Koordinasi Laporan Kinerja Program SDM TW III dan IV Tahun 2025 Human Capital Program Performance Report Coordination Meeting for the Third and Fourth Quarters of 2025

URAIAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE NR & PR PADA TAHUN BUKU SESUAI DENGAN YANG DICANTUMKAN DALAM PEDOMAN ATAU PIAGAM (CHARTER) KOMITE NR & PR

BRIEF DESCRIPTION OF THE IMPLEMENTATION OF NR & PR COMMITTEE ACTIVITIES IN THE FINANCIAL YEAR AS STATED IN THE NR & PR COMMITTEE GUIDELINES OR CHARTER

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite NR & PR telah melakukan kegiatan yang melibatkan penyelenggaraan proses nominasi, remunerasi, dan implementasi Pemantauan Risiko. Sepanjang tahun 2025, Komite NR & PR melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. **Tata kerja & pelaporan Komite**
   Komite menyelenggarakan rapat sesuai kebutuhan Perseroan (minimal 4 kali setahun), menyusun risalah rapat, serta menyampaikan laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan (triwulanan dan tahunan) kepada Dewan Komisaris.

2. **Fungsi Nominasi (komposisi, kebijakan, dan kandidat)**
   Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait komposisi Direksi/Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria nominasi, program pengembangan, serta usulan kandidat Direksi/ Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

3. **Fungsi Nominasi (kinerja, KPI, dan talenta)**
   Komite membantu proses penilaian kinerja Direksi/ Dewan Komisaris, mengevaluasi usulan KPI Perseroan dan KPI individu, menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu, serta melakukan review berkala atas sistem pengelolaan talenta (termasuk evaluasi talent classification) dan mengevaluasi usulan Direksi terkait struktur organisasi.

4. **Fungsi Remunerasi**
   Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Direksi/Dewan Komisaris, serta melakukan evaluasi kesesuaian remunerasi dengan kinerja dan melakukan evaluasi remunerasi minimal 1 kali dalam 1 tahun.

5. **Fungsi Pemantau Risiko (termasuk ESG/iklim)**
   Komite melakukan evaluasi dan pemantauan atas kecukupan kebijakan dan kerangka kerja Manajemen Risiko; menelaah laporan Manajemen Risiko/Profil Risiko secara triwulanan; mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan,

PR Committee has conducted activities involving the nomination process, remuneration, and implementation of Risk Monitoring. Throughout 2025, the NR & PR Committee carried out the following activities:

1. **Committee governance, meetings, and reporting**
   The Committee held meetings as required (at least four times a year), prepared meeting minutes, and submitted periodic performance and activity reports (quarterly and annual) to the Board of Commissioners.

2. **Nomination function (composition, policies, and candidates)**
   The Committee provided recommendations to the Board of Commissioners on the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners, nomination policies and criteria, capability development programs, and proposed candidates for Directors/Commissioners to be submitted to the GMS.

3. **Nomination function (performance, KPIs, and talent management)**
   The Committee supported the performance evaluation process for the Board of Directors and the Board of Commissioners, reviewed proposed Company and individual KPIs, proposed an individual performance evaluation framework, conducted periodic reviews of the talent management system (including talent classification), and assessed Management proposals on organizational structure.

4. **Remuneration function**
   The Committee provided recommendations to the Board of Commissioners on the remuneration structure, policies, and amounts for the Board of Directors and the Board of Commissioners, and evaluated the alignment of remuneration with performance, including at least one annual review of remuneration matters.

5. **Risk oversight function (including ESG and climate)**
   The Committee reviewed the adequacy of the Company's risk management policies and framework; examined quarterly risk management/risk profile reports; assessed the adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes and

pengendalian dan sistem informasi Manajemen Risiko; mengevaluasi aspek kepatuhan penerapan Manajemen Risiko secara semesteran; melakukan pengawasan atas unit kerja terkait keuangan dan Manajemen Risiko minimal 1 kali setahun; serta memberikan arahan atas isu ESG termasuk risiko dan peluang perubahan iklim.

related information systems; evaluated compliance aspects of risk management implementation on a semi-annual basis; oversaw relevant finance and risk management functions at least once a year; and provided direction on ESG matters, including climate-related risks and opportunities.

PENILAIAN KINERJA KOMITE NR & PR
ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE NR & PR COMMITTEE

Piagam Komite NR & PR mengatur bahwa Komite menyusun dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris, antara lain berupa:

1. Laporan kegiatan triwulanan Komite.
2. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite.
3. Laporan hasil kunjungan lapangan, jika ada, yang memuat temuan, evaluasi, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi.

The NR & PR Committee Charter stipulates that the Committee shall prepare and submit reports to the Board of Commissioners, including:

1. Quarterly activity reports of the Committee.
2. Reports on the performance and implementation of the Committee's annual activities.
3. Reports on the results of field visits, if any, containing findings, evaluations, analyses, conclusions, and recommendations.

Penilaian kinerja Komite NR & PR dilaksanakan dengan mekanisme self-assessment dan/atau evaluasi oleh Dewan Komisaris, berdasarkan indikator kinerja yang mencakup:

1. efektivitas pelaksanaan fungsi nominasi, remunerasi, dan pemantauan risiko;
2. kualitas rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris;
3. partisipasi dan kehadiran dalam rapat;
4. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Piagam Komite.

The performance assessment of the NR & PR Committee is carried out through a self-assessment mechanism and/or evaluation by the Board of Commissioners, based on performance indicators that include:

1. the effectiveness of the implementation of nomination, remuneration, and risk monitoring functions;
2. the quality of recommendations provided to the Board of Commissioners;
3. participation and attendance at meetings;
4. compliance with laws and regulations and the Committee Charter.

Komite NR & PR melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada KPI yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dewan Komisaris. Pada tahun 2025, pencapaian KPI Komite NR & PR adalah sebagai berikut:

The NR & PR Committee carried out its duties in accordance with the KPIs set out in the Board of Commissioners' Work Plan. In 2025, the NR & PR Committee's KPI achievements were as follows:

Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Komite NR & PR
Indicator Performance of Nomination, Remuneration and Risk Monitoring Evaluation

No	Indikator Indicator	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement (%)
1	Penyampaian rekomendasi nominasi kepada Dewan Komisaris (komposisi, KPI/evaluasi, kandidat) minimal 1 paket rekomendasi dalam 1 tahun. Submission of nomination recommendations to the Board of Commissioners (composition, KPIs/evaluation, candidates) at least 1 recommendation package per year.	Terlaksana Implemented	100
2	Evaluasi dan rekomendasi remunerasi Direksi & Dewan Komisaris minimal 1 kali dalam 1 tahun. Evaluation and recommendation of remuneration for the Board of Directors & Board of Commissioners at least once per year.	Terlaksana Implemented	100
3	Penelaahan Laporan Profil Risiko/Manajemen Risiko triwulanan (4 kali) dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut. Review of quarterly Risk Profile/Risk Management Reports (4 times) and submission of follow-up recommendations.	Terlaksana Implemented	100
	Pencapaian Rata-rata **Average Achievement**		100

Komite Tata Kelola Terintegrasi dan GCG
Integrated Governance and GCG Committee



WILAN OKTAVIAN

Ketua Merangkap Anggota
Chairman Acting Member

Kewarganegaraan
Citizenship
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia
Age
54 tahun per 31 Desember 2025
54 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan
Tenure
Periode ke-1 (2025–2030)
1st Period (2025–2030)

Dasar Hukum Penunjukan
Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.06/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025.
Letter of The Board of Commissioners Decree No. SK.06/DK-WB/VII/2025 dated July 17, 2025.

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi
Educational and/or Certification Background

- Magister (S2) Kebijakan Publik – University of Southern California (2000).
- Sarjana (S1) Teknik Sipil – Institut Teknologi Bandung (1995).
- Master of Public Policy from the University of Southern California (2000).
- Bachelor's Degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (1995).

Pengalaman Kerja
Work Experiences

- Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta (2023–2024)
- Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta–Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta (2021–2023)
- Kepala Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta (2020–2021)
- Director of Road and Bridge Operations Systems and Strategy, Directorate General of Highways, Ministry of Public Works and Public Housing, Jakarta (2023–2024)
- Head of the National Road Implementation Bureau for Jakarta–West Java, Directorate General of Highways, Ministry of Public Works and Public Housing, Jakarta (2021–2023)
- Head of the Sub-Directorate for Strategy, Programs, and Budget, Directorate of Road and Bridge Operations Systems and Strategy, Directorate General of Highways, Ministry of Public Works and Public Housing, Jakarta (2020–2021)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

1. Komisaris Utama, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025-sekarang)
2. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (2025-sekarang)
1. President Commissioner PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025–present)
2. Head of the Toll Road Regulatory Agency, Directorate General of Highways, Ministry of Public Works (2025–present)

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali langsung/tidak langsung.
Has no affiliation relationship with the Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, and direct/indirect controllers.



TJIA MARWAN

Anggota
Member

Kewarganegaraan
Citizenship
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia
Age
64 tahun per 31 Desember 2025
64 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan
Tenure
Periode ke-1 (2025–2030)
1st Period (2025–2030)

Dasar Hukum Penunjukan
Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.06/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025.
Letter of The Board of Commissioners Decree No. SK.06/DK-WB/VII/2025 dated July 17, 2025.

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi
Educational and/or Certification Background

Sarjana (S1) Ekonomi, Jurusan Manajemen – Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (1982).
Bachelor's Degree in Economics majoring in Management from Atma Jaya Catholic University of Indonesia (1982).

Pengalaman Kerja
Work Experiences

- Chief Marketing Office (Marketing Director), PT Dharmesta Swasti Mandiri (2023 - 2025)
- Direktur & Penasihat Eksekutif, PT Denso Sales Indonesia (2013 - 2022)
- Chief Marketing, PT Kayaba Indonesia (2008 - 2011)
- Deputy CEO, PT Astra Otopart Tbk (2004 - 2008)

- Chief Marketing Office (Marketing Director), PT Dharmesta Swasti Mandiri (2023 - 2025)
- Direktur & Penasihat Eksekutif, PT Denso Sales Indonesia (2013 - 2022)
- Chief Marketing, PT Kayaba Indonesia (2008 - 2011)
- Deputy CEO, PT Astra Otopart Tbk (2004 - 2008)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

- Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025 - Sekarang)
- Komisaris, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025 - Sekarang)

- Member of the Nomination, Remuneration, and Risk Oversight Committee, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025 - Present)
- Commissioner, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2025 - Present)

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali langsung/tidak langsung.
Has no affiliation relationship with the Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, and direct/indirect controllers.



AGUNG DAMIAR

Anggota
Member

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia
Age

59 tahun per 31 Desember 2025
59 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan
Tenure

Periode ke-1 (2025–2030)
1st Period (2025–2030)

Dasar Hukum Penunjukan
Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.06/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025.
Letter of The Board of Commissioners Decree No. SK.06/DK-WB/VII/2025 dated July 17, 2025.

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi
Educational and/or Certification Background

- Sertifikasi Kompetensi Manajer SDM – BNSP (2021).
- Corporate Finance Program – IPMI International Business School (2019).
- Certified Corporate Coach Program – Loop Institute of Coaching (2019).
- Enrich Leadership Program – Corporate Leadership Development Institute (2018).

- HR Manager Competency Certification – BNSP (2021).
- Corporate Finance Program – IPMI International Business School (2019).
- Certified Corporate Coach Program – Loop Institute of Coaching (2019).
- Enrich Leadership Program – Corporate Leadership Development Institute (2018).

Pengalaman Kerja
Work Experiences

- Presiden Direktur, PT Citra Lautan Teduh (2022–2025)
- Manajer Human Capital, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2018–2022)
- Manajer Pabrik, PPB Bogor, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2013–2017)
- Manajer Pabrik Majalengka, PT Wijaya Karya Tbk (2005-2013)

- President Director, PT Citra Lautan Teduh (2022–2025)
- Human Capital Manager, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2018–2022)
- Plant Manager, PPB Bogor, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2013–2017)
- Majalengka Plant Manager, PT Wijaya Karya Tbk (2005–2013)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan.
No concurrent positions.

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali langsung/tidak langsung.
Has no affiliation relationship with the Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, and direct/indirect controllers.

Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Perseroan") membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance (Komite TKT & GCG) sebagai perangkat Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif dan independen untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan (oversight) di bidang tata kelola terintegrasi dan penerapan praktik Good Corporate Governance (GCG) secara efektif di Perseroan dan entitas anak.

Komite TKT & GCG dibentuk berdasarkan dan berpedoman pada ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Menteri BUMN mengenai Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, serta penerapan GCG di BUMN.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola perusahaan terbuka.
5. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan terakhir yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
6. Keputusan Dewan Komisaris No. SK.06/DK-WB/VII/2025 tentang Pengangkatan Organ Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance PT Wijaya Karya Beton Tbk.
7. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance yang ditetapkan sebagai Lampiran Keputusan Dewan Komisaris No. SK.08/DK-WB/VII/2025.

Sebelum penyesuaian tahun 2025, fungsi pengawasan atas pemantauan risiko dan tata kelola terintegrasi dilaksanakan oleh Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi (Komite PR & TKT). Sejalan dengan penguatan struktur tata kelola, Dewan Komisaris melakukan penyesuaian nomenklatur dan komposisi menjadi Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance (Komite TKT & GCG) melalui SK.06/DK-WB/VII/2025.

Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance (Komite TKT & GCG) adalah organ pendukung kolektif dan independen dari Dewan Komisaris, yang didirikan untuk memperkuat pengawasan dalam tata kelola terintegrasi dan implementasi efektif GCG di seluruh Perusahaan dan anak perusahaannya.

The Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Beton Tbk ("the Company") established the Integrated Governance and Good Corporate Governance Committee (TKT & GCG Committee) as a supporting body of the Board of Commissioners that works collectively and independently to assist in carrying out oversight functions in the areas of integrated governance and the effective implementation of Good Corporate Governance (GCG) within the Company and its subsidiaries.

The TKT & GCG Committee is established based on and guided by the following provisions:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
3. Regulations of the Ministry of State-Owned Enterprises regarding SOE Organs and Human Resources, supporting organs of the Board of Commissioners/Board of Supervisors, and the implementation of GCG in SOEs.
4. Regulations of the Financial Services Authority regarding the implementation of governance in publicly listed companies.
5. The Company's Articles of Association, including the latest amendments approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
6. Board of Commissioners Decree No. SK.06/DK-WB/VII/2025 concerning the Appointment of the Integrated Governance and Good Corporate Governance Committee of PT Wijaya Karya Beton Tbk.
7. The Integrated Governance and Good Corporate Governance Committee Charter is stipulated as an attachment to the Board of Commissioners Decree No. SK.08/DK-WB/VII/2025.

Before the 2025 adjustment, the oversight function for risk monitoring and integrated governance was carried out by the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee (PR & TKT Committee). In line with the strengthening of the governance structure, the Board of Commissioners revised the nomenclature and composition to form the Integrated Governance and Good Corporate Governance Committee (TKT & GCG Committee) through Decree No. SK.06/DK-WB/VII/2025.

The Integrated Governance and Good Corporate Governance Committee (TKT & GCG Committee) is a collective and independent supporting organ of the Board of Commissioners, established to strengthen oversight of integrated governance and the effective implementation of GCG across the Company and its subsidiaries.

PERIODE DAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE

Ketentuan mengenai masa jabatan Komite TKT & GCG diatur dalam Piagam Komite dan SK.06/DK-WB/VII/2025 sebagai berikut:

1. Masa jabatan anggota Komite TKT & GCG tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
2. Masa jabatan anggota Komite yang merupakan Komisaris atau Komisaris Utama entitas anak Perseroan ditetapkan secara ex officio, berlandaskan jabatannya di entitas anak. Perubahan susunan Komisaris/Komisaris Utama entitas anak secara otomatis mengubah komposisi anggota Komite tanpa memerlukan SK Dewan Komisaris terpisah.
3. Anggota Komite yang bukan anggota Dewan Komisaris dan telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali maksimal untuk satu periode berikutnya, tanpa mengurangi kewenangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Piagam Komite menetapkan bahwa masa jabatan Ketua dan Anggota Komite TKT & GCG paling lama 5 (lima) tahun, tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE

Piagam Komite TKT & GCG mengatur persyaratan khusus dan umum keanggotaan, yang secara garis besar mencakup:

1. **Persyaratan khusus:**
   a. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, dan pengalaman yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan terkait Tata Kelola Terintegrasi dan GCG.
   b. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi, GCG, dan Etika Perusahaan.
   c. Memahami Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perseroan, peraturan pasar modal, serta ketentuan lain terkait TKT & GCG.
   d. Mampu mempelajari dan memahami kegiatan Perseroan serta sektor usaha yang relevan, dan mengkomunikasikan hasil pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris secara lisan maupun tertulis.

PERIOD AND TERM OF OFFICE OF THE COMMITTEE MEMBER

The provisions regarding the term of office of the TKT & GCG Committee are regulated in the Committee Charter and Decree No. SK.06/DK-WB/VII/2025 as follows:

1. The term of office of TKT & GCG Committee members must not exceed the term of office of the Company's Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association.
2. The term of office of Committee members who serve as Commissioners or President Commissioners of the Company's subsidiaries is determined on an ex officio basis, in line with their positions in the subsidiary. Any changes in the composition of Commissioners/President Commissioners of the subsidiary will automatically alter the composition of the Committee without requiring a separate Board of Commissioners Decree.
3. Committee members who are not members of the Board of Commissioners and whose term has ended may be reappointed for a maximum of one additional period, without limiting the authority of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

The Committee Charter stipulates that the term of office for the Chair and Members of the TKT & GCG Committee is a maximum of five (5) years, without limiting the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

REQUIREMENT OF COMMITTEE MEMBER

The TKT & GCG Committee Charter sets out both specific and general membership requirements, which broadly include:

1. **Specific requirements:**
   a. Possess integrity, dedication, competence, education, independence, and sufficient experience to carry out oversight functions related to Integrated Governance and GCG.
   b. Have adequate knowledge of Integrated Governance principles, GCG, and Corporate Ethics.
   c. Understand the Company's Articles of Association, laws and regulations related to the Company's operations, capital market regulations, and other provisions related to Integrated Governance and GCG.
   d. Be able to learn and understand the Company's activities and relevant business sectors, and communicate the results of their duties to the Board of Commissioners both verbally and in writing.

2. Persyaratan umum:

a. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik garis lurus maupun ke samping, atau hubungan karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

b. Tidak merangkap sebagai pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, maupun jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

c. Anggota Komite yang bukan anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai:

   i. anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain;
   ii. sekretaris/staf Sekretariat Dewan Komisaris di perusahaan lain;
   iii. anggota komite lain di Perseroan; atau
   iv. anggota komite di perusahaan lain.

d. Tidak memiliki hubungan usaha, langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

e. Bukan pegawai kunci atau pihak dari kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit maupun jasa non-audit kepada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat.

f. Bersedia menandatangani pernyataan tertulis mengenai independensi, mematuhi Kode Etik Komite, dan terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

2. General requirements:

a. Must not have any financial, managerial, or share ownership relationship, and/or a family relationship by blood up to the third degree, whether in a direct or collateral line, or a marital relationship with any member of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

b. Must not hold concurrent positions as a political party official, legislative candidate/member, or candidate for regional head/deputy regional head, nor any other position prohibited by applicable laws and regulations.

c. Committee members who are not members of the Board of Commissioners may not concurrently serve as:

   i. a member of the Board of Commissioners in another company;
   ii. a secretary or staff member of the Board of Commissioners Secretariat in another company;
   iii. a member of another committee within the Company; or
   iv. a member of a committee in another company.

d. Must not have any direct or indirect business relationship related to the Company's operations that could create a potential conflict of interest.

e. Must not be a key employee or affiliated party of a public accounting firm, law firm, or any other party providing audit or non-audit services to the Company within the past six (6) months before appointment.

f. Must be willing to sign a written statement of independence, comply with the Committee's Code of Ethics, and continuously enhance their competence through ongoing education and training.

SUSUNAN KOMITE TKT & GCG
COMPOSITION OF THE TKT & GCG COMMITTEE

Piagam Komite TKT & GCG mensyaratkan bahwa Komite paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan maksimal 2 (dua) orang anggota ahli dari luar Perseroan yang bukan pegawai kunci dalam 6 (enam) bulan terakhir. Ketua Komite merupakan Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris.

The TKT & GCG Committee Charter requires that the Committee consist of at least two (2) members of the Board of Commissioners and no more than two (2) expert members from outside the Company who have not been key employees within the past six (6) months. The Chairman of the Committee must be the President Commissioner or a member of the Board of Commissioners.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.06/DK-WB/VII/2025 tentang Pengangkatan Organ Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance PT Wijaya Karya Beton Tbk, maka komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Based on the Board of Commissioners Decree No. SK.06/DK-WB/VII/2025, the composition of the Integrated Governance and Good Corporate Governance Committee as of December 31, 2025, is as follows:

Susunan Anggota Komite TKT & GCG
Composition of the TKT & GCG Committee

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	Periode & Masa Jabatan Period & Term of Office	Keahlian Expertise
Wilan Oktavian	Ketua merangkap Anggota Chairman concurrent as a Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.06/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 Based on the Board of Commissioners Decree No. SK.06/DK-WB/VII/2025, dated July 17, 2025	Periode ke-1 1st Period 2025–2030	Teknik Sipil Civil Engineering
Tjia Marwan	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.06/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 Based on the Board of Commissioners Decree No. SK.06/DK-WB/VII/2025, dated July 17, 2025	Periode ke-1 1st Period 2025–2030	Penjualan, Pemasaran, dan Bisnis Sales, Marketing, and Business
Komisaris PT Citra Lautan Teduh	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.06/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 Board of Commissioners Decree Number SK.06/DK-WB/VII/2025 dated July 17, 2025	Periode ke-1 1st Period 2025–2030	
Komisaris Utama PT Wijaya Karya Krakatau Beton	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.06/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 Based on the Board of Commissioners Decree No. SK.06/DK-WB/VII/2025, dated July 17, 2025	Periode ke-1 1st Period 2025–2030	
Komisaris Utama PT Wijaya Karya Komponen Beton	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.06/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 Based on the Board of Commissioners Decree No. SK.06/DK-WB/VII/2025, dated July 17, 2025	Periode ke-1 1st Period 2025–2030	
Komisaris Utama PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.06/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 Based on the Board of Commissioners Decree No. SK.06/DK-WB/VII/2025, dated July 17, 2025	Periode ke-1 1st Period 2025–2030	
Agung Damiar	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.06/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 Based on the Board of Commissioners Decree No. SK.06/DK-WB/VII/2025, dated July 17, 2025	Periode ke-1 1st Period 2025–2030	Kepemimpinan Operasional & Transformasi Human Capital Kepemimpinan Operasional & Transformasi Sumber Daya Manusia

PERNYATAAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE TKT & GCG
STATEMENT OF INDEPENDENCE OF RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE MEMBERS

Aspek Independensi Independent Aspect	Wilan Oktavian	Tjia Marwan	Komisaris Entitas Anak	Agung Damiar
Anggota Komite TKT & GCG baik yang merupakan anggota Dewan Komisaris maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi. Members of the PR & TKT Committee, whether members of the Board of Commissioners or not members of the Board of Commissioners, have no financial, management, share ownership and/or blood relations to the third degree, either in a straight line or sideways or in a relationship that arises due to marriage with another member of the Board of Commissioners or with a member of the Board of Directors;	✓	✓	✓	✓
Anggota Komite TKT & GCG baik yang merupakan anggota Dewan Komisaris maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; Members of the PR & TKT Committee, whether members of the Board of Commissioners or not members of the Board of Commissioners, do not hold concurrent positions as administrators of political parties and/or candidates/members of the legislature and or candidates for regional/deputy regional heads, and other positions in accordance with the provisions regulations;	✓	✓	✓	✓
Anggota Komite TKT & GCG yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap sebagai: 1. Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain; 2. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris pada Perusahaan lain; 3. Anggota Komite lain pada Perusahaan; 4. Anggota Komite di Perusahaan lain. Members of the PR & TKT Committee who are not members of the Board of Commissioners, do not concurrently serve as: 1. Members of the Board of Commissioners at other companies; 2. Secretary/Staff of the Secretariat of the Board of Commissioners on other companies; 3. Other Committee Members in the Company; 4. Committee members in other companies.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; Does not have a business relationship, either directly or indirectly related to the business activities of PT Wijaya Karya Beton Tbk which may cause a conflict of interest;	✓	✓	✓	✓
Bukan merupakan pegawai kunci, yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan PT Wijaya Karya Beton Tbk dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris; Not a key employee, namely a person who has the authority and responsibility to plan, lead, or control the activities of PT Wijaya Karya Beton Tbk in the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners;	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material Perusahaan; Does not have a personal interest directly or indirectly with the Company's material information;	✓	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultansi lainnya kepada PT Wijaya Karya Beton Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris; Not a member of a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, or other party providing audit services, non-audit services and or other consulting services to PT Wijaya Karya Beton Tbk within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners;	✓	✓	✓	✓

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI YANG TELAH DIIKUTI ANGGOTA KOMITE TKT & GCG DALAM TAHUN BUKU
TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAMS ATTENDED BY TKT & GCG COMMITTEE MEMBERS DURING THE FISCAL YEAR

Sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan dan tata kelola, Perseroan memfasilitasi anggota Komite TKT & GCG untuk mengikuti program pelatihan, seminar, dan/atau workshop yang relevan dengan tugas Komite, antara lain di bidang: tata kelola terintegrasi, GCG, manajemen risiko, kepatuhan, dan perkembangan regulasi terbaru.

As part of strengthening its oversight and governance functions, the Company provides members of the TKT & GCG Committee with access to training programs, seminars, and/or workshops relevant to the Committee's duties, including in integrated governance, GCG, risk management, compliance, and recent regulatory developments.

Berikut adalah pelatihan yang diikuti oleh Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance sepanjang tahun 2025:

The following are the training programs attended by members of the Integrated Governance and Good Corporate Governance Committee throughout 2025:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Wilan Oktavian	Ketua merangkap Anggota Chairman concurrent as a Member	Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV	Jakarta	27-28 Agustus 2025 August 27-28, 2025	PT RAP Academy
Tjia Marwan	Anggota Member	Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV	Jakarta	27-28 Agustus 2025 August 27-28, 2025	PT RAP Academy
Agung Damiar	Anggota Member	Certified Risk Management Professional (CRMP)	Jakarta	8-11 Desember 2025 December 08-11, 2025	PT RAP Academy
Denny Setiawan(*)	Anggota Member	Certified Risk Management Profesional (CRMP)	Jakarta	04 Maret 2025 March 4, 2024	RAP Academy

Catatan I Notes
Komisaris Utama anak usaha dijabat oleh Direksi Perseroan, pelatihan Direksi Perseroan dapat dilihat pada halaman 167-168.
The President Commissioner of the subsidiary is positioned by a member of the Board of Directors of the Company, the details of the Board of Directors' training can be found on page 167-168.

(*) Menjabat hingga 17 Juli 2025 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. SK.06/DK-WB/VII/2025.
(*) Served until July 17, 2025, based on the Board of Commissioners Decree No. SK.06/DK-WB/VII/2025.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TKT & GCG
DESCRIPTION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF TKT & GCG COMMITTEE

Komite Tata Kelola Terintegrasi & GCG bertugas dan bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip terkait Tata Kelola Terintegrasi, GCG, dan Standar Etika Perusahaan. Agar Komite TKT & GCG dapat berperan efisien dan efektif, maka tugas, tanggungjawab, dan kewenangannya diatur sebagai berikut:

Integrated Governance & GCG Committee is tasked and responsible to assist the Board of Commissioners by providing professional and independent opinions to ensure the effective implementation related to Integrated Governance, Good Corporate Governance (GCG) principles, and the Company's Ethical Standards. To enable the Committee to perform efficiently and effectively, its duties, responsibilities, and authorities are defined as follows:

A. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Tata Kelola Terintegrasi

Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat terkait Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi sebagai berikut:

1. Mengevaluasi secara berkala dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi pada lingkup Perseroan;
2. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Grup Perseroan;
3. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui penilaian kecukupan pengendalian internal, manajemen risiko dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BUMN Induk untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris BUMN Induk dari waktu ke waktu sesuai wewenang, tugas dan fungsinya.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi GCG

Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat terkait Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi sebagai berikut:

1. Melakukan kajian, evaluasi, dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan GCG di PT WIjaya Karya Beton Tbk;
2. Melakukan kajian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan karakteristik bidang kegiatan Perusahaan, antara lain yang mengatur tentang badan hukum Perusahaan, badan hukum milik negara, pasar modal jasa konstruksi, perjanjian dan tata kelola Perusahaan;

A. Duties and Responsibilities of the Integrated Governance Function

The Committee is tasked and responsible to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory and advisory functions related to Integrated Governance to the Board of Directors, as follows:

1. Periodically evaluate and provide input to the Board of Commissioners for approval of the Integrated Governance policy within the Company;
2. Monitor and evaluate the compliance of the implementation of the Company Group's Integrated Governance policy;
3. Evaluate the implementation of Integrated Governance, including through assessments of the adequacy of internal controls, risk management, and the integrated performance of compliance functions;
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners of the Parent State-Owned Enterprise for the improvement of Integrated Governance policies;
5. Conducting monitoring and evaluation of the implementation of the Company's Integrated Governance functions in accordance with applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association;
6. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners of the Parent State-Owned Enterprise from time to time in accordance with its authority, duties, and functions.

B. Duties and Responsibilities of the GCG Committee

The Committee is tasked with and responsible for assisting the Board of Commissioners in carrying out oversight duties and providing advice regarding Integrated Corporate Governance to the Board of Directors as follows:

1. Conducting reviews, evaluations, and making recommendations to the Board of Commissioners regarding the implementation of GCG at PT Wijaya Karya Beton Tbk;
2. Conducting reviews of the Company's compliance with applicable laws and regulations relevant to the nature of the Company's business activities, including those governing the Company's legal entity, state-owned legal entities, the capital market, construction services, agreements, and corporate governance;

3. Memberikan pendapat dan/atau masukan yang obyektif, profesional dan independen atas hal-hal yang memerlukan perhatian, tindak lanjut, atau hal-hal lainnya yang dapat membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berkaitan dengan praktik GCG;
4. Melakukan kajian atas kesesuaian ketentuan-ketentuan dalam Standard Operasi Prosedur (SOP) dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku dan relevan;
5. Menyusun self-assessment tools dan melakukan self-assessment terhadap kinerja Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
6. Mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan tugas Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris secara periodik;
7. Melaksanakan tugas khusus dan tugas lainnya dari Dewan Komisaris yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, Peraturan Perusahaan, Code of Corporate Governance PT Wijaya Karya Beton Tbk, Kode Etik Perusahaan, Board Manual, serta ketentuan-ketentuan lain dalam piagam ini;
8. Mengevaluasi kebijakan tentang GCG dan Standar Etika serta tindak lanjut hasil assessment yang dilakukan oleh konsultan eksternal.

C. Kewenangan dan Mekanisme Kerja
1. Komite TKT & GCG bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
2. Komite TKT & GCG mempunyai wewenang mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang pegawai, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
3. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana diatur dalam butir 1, 2, dan 3 di atas, Komite TKT & GCG wajib bekerja sama dengan mitra kerja di antaranya: Organ Pendukung Dewan Komisaris, satuan kerja terkait di level manajemen antara lain: Unit Kerja Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan, dan Unit-Unit operasional Perusahaan terkait;
4. Mekanisme kerja sebagaimana butir 1, 2, dan 3 di atas harus mengikuti prosedur kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3. Provide objective, professional, and independent opinions and/or input on matters requiring attention, follow-up, or other matters that may assist the Board of Commissioners in performing its duties regarding GCG practices;
4. Conduct reviews on the alignment of provisions in Standard Operating Procedures (SOPs) with applicable and relevant laws, regulations, and codes of ethics;
5. Develop self-assessment tools, conduct self-assessments of the Committee's performance, and report the results to the Board of Commissioners;
6. Document the results of the Committee's activities and report them to the Board of Commissioners on a regular basis;
7. Carrying out special duties and other tasks assigned by the Board of Commissioners that do not conflict with applicable and relevant laws and regulations, the Company's Bylaws, the Code of Corporate Governance of PT Wijaya Karya Beton Tbk, the Company's Code of Ethics, the Board Manual, and other provisions in this charter;
8. Evaluating policies regarding Corporate Governance (CG) and Ethical Standards, as well as following up on the results of assessments conducted by external consultants.

C. Authority and Working Mechanisms
1. The TKT & GCG Committee operates collectively and independently in carrying out its duties;
2. The TKT & GCG Committee has the authority to access Company documents, data, and information regarding employees, funds, assets, and resources necessary for the performance of its duties;
3. In exercising the authority as stipulated in points 1, 2, and 3 above, the TKT & GCG Committee is required to cooperate with its partners, including: the Board of Commissioners' Support Body, relevant units at the management level, such as: the Company's Operational Units, the Internal Audit Unit, the Corporate Secretary, and relevant Company operational units;
4. The working mechanisms as per points 1, 2, and 3 above must follow procedures in accordance with applicable regulations;

5. Apabila dianggap perlu, Komite TKT & GCG dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/asesor/pihak independen di luar anggota Komite TKT & GCG yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas biaya Perusahaan;
6. Apabila dianggap perlu, Komite TKT & GCG dapat membentuk suatu tim yang bersifat ad-hoc, dengan kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya;
7. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut TKT dan GCG;
8. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi terkait TKT dan GCG;
9. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Komite TKT & GCG;
10. Komite TKT & GCG mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan pegawai Perusahaan, termasuk Direksi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
11. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

D. Kode Etik Kerahasiaan

1. Anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
2. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan untuk keuntungan pribadi;
3. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

5. If deemed necessary, the TKT & GCG Committee may engage experts and/or consultants/assessors/independent parties outside the TKT & GCG Committee who are required to assist in the performance of its duties, subject to the written approval of the Board of Commissioners and at the Company's expense;
6. If deemed necessary, the TKT & GCG Committee may form an ad-hoc team, with the criteria and duration of its assignment tailored to the needs and nature of the work;
7. Requesting explanations from the Board of Directors and/or other officers regarding any matters pertaining to TKT and GCG;
8. Being informed of all policies and actions that have been and will be implemented by the Board of Directors regarding TKT and GCG;
9. Requesting the Board of Directors and/or other officers under the Board of Directors, with the Board's knowledge, to attend meetings of the TKT & GCG Committee;
10. The TKT & GCG Committee has the authority to communicate directly with Company employees, including the Board of Directors and parties related to the performance of its duties;
11. Exercise other supervisory authorities as long as they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS resolutions.

D. Code of Ethics on Confidentiality

1. Committee members, whether currently serving or no longer serving as members of the Committee, are required to maintain the confidentiality of Company documents, data, and information obtained while serving as Committee members, whether from internal or external parties, and to use such information solely for the purpose of performing their duties;
2. Committee members are prohibited from misusing important information related to the Company for personal gain;
3. In carrying out their duties and responsibilities, Committee members must comply with the Company's Code of Ethics and are prohibited from deriving personal benefit, either directly or indirectly, from the Company's activities, other than honoraria, facilities, and other allowances.

E. Sistem Pelaporan Kegiatan
1. Komite TKT & GCG bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Sistem Pelaporan Kegiatan Komite TKT & GCG disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
   a. Laporan hasil rapat (risalah rapat).
   b. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulanan Komite.
   c. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite.
   d. Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan, dan saran.

E. Activity Reporting System
1. The TKT & GCG Committee is accountable to the Board of Commissioners.
2. The TKT & GCG Committee's Activity Reporting System is submitted to the Board of Commissioners in the form of the following reports:
   a. Meeting minutes.
   b. Quarterly reports on the Committee's performance and activities.
   c. Annual reports on the Committee's performance and activities.
   d. Reports on field visit results, which include, among other things, field findings or facts, evaluations, analyses, conclusions, and recommendations.

PERNYATAAN BAHWA TELAH MEMILIKI PEDOMAN ATAU PIAGAM (CHARTER) KOMITE TKT & GCG
STATEMENT OF HAVING TKT & GCG COMMITTEE GUIDELINES OR CHARTER

Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance telah memiliki Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan menjadi pedoman pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite TKT & GCG.

The Integrated Governance and Good Corporate Governance Committee has an official Committee Charter issued by the Board of Commissioners, which serves as a guideline for the duties, responsibilities, and authorities of the TKT & GCG Committee.

Piagam Komite TKT & GCG mengatur antara lain:

1. Kedudukan Komite TKT & GCG sebagai perangkat Dewan Komisaris yang bersifat profesional dan independen dalam membantu pelaksanaan dan penguatan fungsi pengawasan terkait tata kelola terintegrasi, penerapan GCG, dan standar etika perusahaan.
2. Struktur organisasi dan keanggotaan Komite, termasuk syarat-syarat keanggotaan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, serta evaluasi kinerja.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite dalam fungsi Tata Kelola Terintegrasi dan fungsi GCG.
4. Kewenangan dan mekanisme kerja, termasuk hak akses terhadap dokumen, data, dan informasi, kerja sama dengan unit kerja terkait, dan pelibatan tenaga ahli atau konsultan independen bila diperlukan.
5. Ketentuan rapat dan surat-menyurat, termasuk frekuensi rapat, tata cara pengambilan keputusan, dokumentasi risalah rapat, dan pelaporan kepada Dewan Komisaris.
6. Ketentuan mengenai masa jabatan dan penggantian anggota Komite.

The TKT & GCG Committee Charter regulates, among other things:

1. The position of the TKT & GCG Committee is a professional and independent supporting body of the Board of Commissioners, assisting in the implementation and strengthening of oversight functions related to integrated governance, GCG implementation, and corporate ethical standards.
2. The organizational structure and membership of the Committee, including membership requirements, procedures for appointment and dismissal, and performance evaluation.
3. The duties and responsibilities of the Committee in the areas of Integrated Governance and GCG.
4. The Committee's authority and working mechanism, including access to documents, data, and information; cooperation with relevant work units; and the engagement of experts or independent consultants when necessary.
5. Provisions on meetings and correspondence, including meeting frequency, decision-making procedures, documentation of meeting minutes, and reporting to the Board of Commissioners.
6. Provisions regarding the term of office and replacement of Committee members.

7. Ketentuan peninjauan dan penyempurnaan Piagam secara berkala sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan Perseroan.

Piagam Komite TKT & GCG berfungsi sebagai pedoman formal yang memastikan bahwa Komite melakukan tugasnya secara efisien, efektif, transparan, profesional, independen, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

7. Provisions for regular review and improvement of the Committee Charter in line with regulatory developments and the needs of the Company.

The TKT & GCG Committee Charter serves as a formal guideline that ensures the Committee performs its duties efficiently, effectively, transparently, professionally, independently, and in compliance with applicable laws and regulations.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT KOMITE TKT & GCG
POLICY AND IMPLEMENTATION OF THE MEETING FREQUENCY OF THE TKT & GCG COMMITTEE

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE TKT & GCG

Piagam Komite TKT & GCG mengatur hal-hal pokok berikut terkait rapat Komite:

1. Rapat Komite TKT & GCG diselenggarakan sesuai kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
2. Rapat sah apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Komite dan salah satunya adalah Ketua Komite.
3. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; apabila tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip "1 (satu) orang 1 (satu) suara".
4. Perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan wajib dicatat dalam risalah rapat beserta alasannya.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite; apabila Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Komite senior yang ditunjuk atau disepakati dalam rapat.
6. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani anggota Komite yang hadir, didokumentasikan dengan baik, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7. Tingkat kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.

PELAKSANAAN RAPAT KOMITE TKT & GCG

Komite TKT & GCG telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

TKT & GCG COMMITTEE MEETING POLICY

The TKT & GCG Committee Charter regulates the following key provisions regarding Committee meetings:

1. Committee meetings are held as needed by the Company, at least four (4) times a year.
2. A meeting is valid if attended by the majority of Committee members, including the Committee Chair.
3. Decisions are made based on deliberation and consensus; if consensus cannot be reached, decisions are taken by majority vote under the principle of "one person, one vote."
4. Any differing opinions during decision-making must be recorded in the meeting minutes along with the reasons.
5. Meetings are chaired by the Committee Chair; if the Chair is unable to attend, the meeting is led by the senior Committee member appointed or agreed upon during the meeting.
6. Meeting results must be documented in minutes, signed by all members present, properly archived, and submitted to the Board of Commissioners.
7. Committee members' attendance levels are reported in the Committee's quarterly and annual reports.

IMPLEMENTATION OF TKT & GCG COMMITTEE MEETINGS

The TKT & GCG Committee held 7 (seven) meetings in 2025, with the following details:

Frekuensi Rapat Komite TKT & GCG dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite TKT & GCG
Frequency of TKT & GCG Committee Meetings and Attendance of Committee Members

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Sebelum Perubahan Nomenklatur **Prior to the Organizational Nomenclature Change**				
Nita Prihutaminingrum (*)	Ketua NR & GCG (merangkap Anggota) Chairman NR & GCG (acting Member)	2	2	100%
Priatna Agus Setiawan(*)	Anggota NR & GCG Member NR & GCG	2	2	100%
Dedi Indra(*)	Anggota NR & GCG Member NR & GCG	2	2	100%
R. Permadi Mulajaya(*)	Ketua PR & TKT (merangkap Anggota) Chairman PR & KT (acting Member)	3	3	100%
Miftachul Munir(*)	Anggota PR & TKT Member PR & TKT	3	3	100%
Denny Setiawan(*)	Anggota PR & TKT Member PR & TKT	3	3	100%
Setelah Perubahan Nomenklatur **After the Organizational Nomenclature Change**				
Wilan Oktavian	Ketua merangkap Anggota Chairman concurrent as a Member	2	2	100%
Tjia Marwan	Anggota Member	2	2	100%
Komisaris PT Citra Lautan Teduh	Anggota Member	2	2	100%
Komisaris Utama PT Wijaya Karya Krakatau Beton	Anggota Member	2	2	100%
Komisaris Utama PT Wijaya Karya Komponen Beton	Anggota Member	2	2	100%
Komisaris Utama PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	Anggota Member	2	2	100%
Agung Damiar	Anggota Member	2	2	100%

Catatan I Notes
(*) Menjabat hingga 17 Juli 2025 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. SK.06/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025
(*) Served until Juli 17, 2025, based on the Board of Commissioners Decree No. SK.06/DK-WB/VII/2025 dated July 17, 2025.

Mata Acara Rapat Komite TKT & GCG
Agenda Items for TKT & GCG Committee Meetings

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
Sebelum Perubahan Nomenklatur **Prior to the Organizational Nomenclature Change**	
21 Januari 2025 January 21, 2025	Koordinasi Laporan Penerapan aspek TKT Triwulan IV 2024 Coordination for the Implementation Report of Integrated Governance Aspects – Fourth Quarter 2024
18 Februari 2025 February 18, 2025	Rapat Koordinasi Rencana dan Strategi GCG Tahun 2025 dan Realisasi Program GCG s.d bulan Februari 2025 Coordinating Meeting on the 2025 GCG Plan and Strategy and the Implementation of the GCG Program Through February 2025
18 Maret 2025 March 18, 2025	Koordinasi Laporan Penerapan Aspek TKT Triwulan I 2025 Coordination for the Implementation Report of Integrated Governance Aspects – First Quarter 2025
29 April 2025 April 29, 2025	Finalisasi Koordinasi Laporan Penerapan Aspek TKT Triwulan I 2025 Finalization of the Implementation Report Coordination for Integrated Governance Aspects – First Quarter 2025
29 April 2025 April 29, 2025	Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Tata Kelola Perusahaan Triwulan III 2025 Monitoring and Evaluation Meeting on the Implementation of Integrated Governance and Corporate Governance for the Third Quarter of 2025

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
Setelah Perubahan Nomenklatur **After the Organizational Nomenclature Change**	
08 Juli 2025 July 08, 2025	Koordinasi Laporan Penerapan Aspek TKT Triwulan II 2025 Coordination of the Report on the Implementation of Integrated Governance Aspects for the Second Quarter of 2025
05 November 2025 November 05, 2025	Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Tata Kelola Perusahaan Triwulan III 2025 Meeting on Monitoring and Evaluation of the Implementation of Integrated Governance and Corporate Governance for the Third Quarter of 2025

URAIAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE TKT & GCG PADA TAHUN BUKU SESUAI DENGAN YANG DICANTUMKAN DALAM PEDOMAN ATAU PIAGAM (CHARTER) KOMITE TKT & GCG

A BRIEF DESCRIPTION OF IMPLEMENTATION OF TKT & GCG COMMITTEE ACTIVITIES IN THE FINANCIAL YEAR AS OUTLINED IN THE AUDIT COMMITTEE'S TERMS OF REFERENCE

Dalam menjalankan tugasnya membantu Dewan Komisaris untuk memastikan terlaksananya prinsip Tata Kelola Terintegrasi, penerapan GCG, dan standar etika perusahaan secara efektif, Komite TKT & GCG melaksanakan kegiatan rutin sesuai Piagam sepanjang Tahun Buku.

Sepanjang tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. **Tata kerja rapat, dokumentasi, dan pelaporan**
   a. Menyelenggarakan rapat sesuai kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
   b. Menuangkan hasil rapat dalam risalah rapat yang ditandatangani dan didokumentasikan, serta disampaikan kepada Dewan Komisaris.
   c. Menyampaikan pelaporan periodik kepada Dewan Komisaris berupa risalah rapat, laporan triwulanan, laporan tahunan, dan (bila ada) laporan kunjungan lapangan.

2. **Fungsi Tata Kelola Terintegrasi**
   a. Melakukan evaluasi berkala dan memberi masukan atas kebijakan Tata Kelola Terintegrasi untuk persetujuan Dewan Komisaris.
   b. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi pada Grup Perseroan.
   c. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, termasuk melalui penilaian kecukupan pengendalian internal, manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan terintegrasi.
   d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi sesuai ketentuan peraturan dan Anggaran Dasar.

In carrying out its duties to assist the Board of Commissioners in ensuring the effective implementation of Integrated Governance principles, GCG, and corporate ethical standards, the TKT & GCG Committee carried out routine activities in accordance with the Charter throughout the Fiscal Year.

Throughout 2025, the Integrated Governance and Good Corporate Governance Committee carried out the following activities:

1. **Meeting procedures, documentation, and reporting**
   a. Holding meetings as required by the Company, at least 4 (four) times a year.
   b. Recording the results of meetings in minutes that are signed and documented, and submitted to the Board of Commissioners.
   c. Submitting periodic reports to the Board of Commissioners in the form of meeting minutes, quarterly reports, annual reports, and (if any) field visit reports.

2. **Integrated Governance Function**
   a. Conducting periodic evaluations and providing input on Integrated Governance policies for approval by the Board of Commissioners.
   b. Monitoring and evaluating the compliance of the implementation of Integrated Governance policies within the Company Group.
   c. Evaluate the implementation of Integrated Governance, including through assessments of the adequacy of internal controls, risk management, and integrated compliance functions.
   d. Monitor and evaluate the implementation of Integrated Governance functions in accordance with regulations and the Articles of Association.

3. **Fungsi Good Corporate Governance (GCG) dan etika**
   a. Melakukan kajian/evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan GCG.
   b. Menelaah kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan karakteristik kegiatan usaha.
   c. Menelaah kesesuaian ketentuan dalam SOP dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.
   d. Mengevaluasi kebijakan GCG dan Standar Etika serta tindak lanjut hasil assessment (termasuk oleh konsultan eksternal jika ada).

4. **Koordinasi, akses informasi, dan tindak lanjut**
   a. Berkoordinasi dengan organ pendukung Dewan Komisaris dan satuan kerja terkait (mis. SPI, Sekretaris Perusahaan, unit operasional) dalam pelaksanaan evaluasi/kajian.
   b. Meminta penjelasan dari Direksi/pejabat terkait dan mengakses dokumen/data yang diperlukan untuk mendukung fungsi pengawasan.
   c. Melakukan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris secara periodik.

3. **Functions of Good Corporate Governance (GCG) and ethics**
   a. Conducting studies/evaluations and providing recommendations to the Board of Commissioners on the implementation of GCG.
   b. Reviewing the Company's compliance with laws and regulations relevant to the characteristics of its business activities.
   c. Reviewing the compliance of provisions in SOPs with applicable laws and regulations and codes of ethics.
   d. Evaluating GCG policies and Ethical Standards as well as following up on assessment results (including by external consultants, if any).

4. **Coordination, access to information, and follow-up**
   a. Coordinating with supporting organs of the Board of Commissioners and related work units (e.g., SPI, Corporate Secretary, operational units) in conducting evaluations/studies.
   b. Requesting explanations from the Board of Directors/related officials and accessing documents/data necessary to support the supervisory function.
   c. Document the results of the implementation of tasks and submit them to the Board of Commissioners periodically.

Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Komite NR & PR
Indicator Performance of Nomination, Remuneration and Risk Monitoring Evaluation

No	Indikator Indicator	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement (%)
1	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi Provided recommendations to the Board of Commissioners regarding the implementation of Integrated Governance.	Terlaksana Implemented	100
2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Monitored and evaluated the implementation of Integrated Governance and Good Corporate Governance.	Terlaksana Implemented	100
3	Melakukan Review Pedoman dan Kebijakan GCG Perseroan Conducted a review of the Company's GCG guidelines and policies.	Terlaksana Implemented	100
	Pencapaian Rata-rata **Average Achievement**		100

Komite ESG
ESG Committee

Komite Environmental, Social and Governance dibentuk oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK.01.01/WB-0A.0075/2025 tentang Struktur Organisasi Komite Environmental, Social and Governance (ESG) PT Wijaya Karya Beton Tbk. Pembentukan Komite ESG bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan (environmental), sosial (social) dan tata kelola yang baik (governance) ke dalam strategi bisnis untuk menciptakan dampak positif jangka panjang bagi Perseroan dan pemangku kepentingan, serta memenuhi regulasi dan tuntutan pasar global.

The Environmental, Social, and Governance Committee was established by the Board of Directors pursuant to Board of Directors' Resolution No. SK.01.01/WB-0A.0075/2025 regarding the Organizational Structure of the Environmental, Social, and Governance (ESG) Committee of PT Wijaya Karya Beton Tbk. The establishment of the ESG Committee aims to integrate the principles of environmental sustainability, social responsibility, and good governance into the business strategy to create long-term positive impacts for the Company and its stakeholders, as well as to comply with regulations and meet the demands of the global market.

Struktur Organisasi Komite ESG

Untuk memastikan implementasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) berjalan secara terarah dan terintegrasi, Perseroan membentuk struktur organisasi Komite ESG sebagai bagian dari penguatan tata kelola keberlanjutan. Berikut adalah komposisi kepengurusan Komite ESG:

Organizational Structure of the ESG Committee

To ensure the implementation of environmental, social, and governance (ESG) aspects proceeds in a focused and integrated manner, the Company has established the organizational structure of the ESG Committee as part of strengthening sustainability governance. The following is the composition of the ESG Committee's leadership:



Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Komite ESG

Perseroan menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip korporasi yang melekat dalam seluruh kegiatan usaha. Dalam rangka memperkuat peran Komite ESG, Perseroan berkomitmen memberikan pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan kepada seluruh anggota komite. Komitmen Perseroan terhadap pemberian pelatihan meliputi penyediaan materi yang relevan dan terkini, Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan kemampuan anggota Komite ESG dalam merancang, memantau, dan mengevaluasi inisiatif keberlanjutan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar internasional. Struktur anggota Komite dijabat oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Manajer Divisi Perseroan, pelatihan tersebut dapat dilihat pada halaman 167-170

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Environmental, Social and Governance (ESG)

Dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai Komite Environmental, Social and Governance (ESG), setiap fungsi organ terdapat didalamnya wewenang dan tanggung jawab Komite Environmental, Social and Governance (ESG) sebagai berikut:

1. **Dewan Komisaris:**
   Melakukan pengawasan yang melekat, melalui Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko dan memberikan arahan kepada ketua dan anggota komite terkait isu-isu ESG, termasuk pengelolaan risiko dan peluang terkait perubahan iklim.

2. **Ketua Komite dan Anggota Komite:**
   Ketua dan Anggota Komite berwenang untuk memutuskan dan memberi arahan atas target, strategi, roadmap, kebijakan, inisiatif serta ukuran kinerja terkait penerapan aspek keberlanjutan termasuk isi perubahan iklim.

3. **Chief of Sustainability Officer:**
   - Mengembangkan strategi keberlanjutan serta isu perubahan iklim: merancang dan menerapkan strategi keberlanjutan jangka pendek, menengah dan panjang yang sejalan dengan tujuan bisnis secara keseluruhan.

Training and Competency Development for the ESG Committee

The Company regards sustainability as a core corporate principle embedded in all business activities. To strengthen the role of the ESG Committee, the Company is committed to providing systematic and ongoing training to all committee members. The Company's commitment to providing training includes the provision of relevant and up-to-date materials. This training aims to enhance the capacity, understanding, and capabilities of ESG Committee members in designing, monitoring, and evaluating sustainability initiatives, as well as ensuring compliance with regulations and international standards. The Committee's membership consists of members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Company's Division Managers; details of the training can be found on page 167-170.

Authority and Responsibilities of the Environmental, Social, and Governance (ESG) Committee

In carrying out its role and duties as the Environmental, Social, and Governance (ESG) Committee, each function of the body entails the following authority and responsibilities of the Environmental, Social, and Governance (ESG) Committee:

1. **Board of Commissioners:**
   To exercise inherent oversight, through the Nomination, Remuneration, and Risk Monitoring Committees, and to provide guidance to the committee chair and members regarding ESG issues, including the management of risks and opportunities related to climate change.
2. **Committee Chair and Members:**
   The Committee Chair and Members have the authority to decide on and provide guidance regarding targets, strategies, roadmaps, policies, initiatives, and performance metrics related to the implementation of sustainability aspects, including climate change.
3. **Chief Sustainability Officer:**
   Developing sustainability strategies and addressing climate change issues: designing and implementing short-, medium-, and long-term sustainability strategies aligned with overall business objectives.

- Membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, seperti investor, pelanggan, pemasok dan regulator.

Building and maintaining strong relationships with internal and external stakeholders, such as investors, customers, suppliers, and regulators.

4. Sekretaris Komite:

- Melaksanakan arahan Ketua dan Anggota Komite terkait pengelolaan aspek keberlanjutan dan melakukan tugas antara lain perencanaan, monitoring, evaluasi penerapan aspek keberlanjutan serta pelaporan internal/eksternal.
- Membantu komite dalam mengkaji kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait keberlanjutan yang berlaku.
- Memberikan laporan berkala kepada Ketua dan Anggota Komite mengenai kemajuan isu-isu terkait keberlanjutan.

4. Committee Secretary:

- Implement the directives of the Chair and Committee Members regarding the management of sustainability aspects and perform duties including planning, monitoring, and evaluating the implementation of sustainability aspects, as well as internal and external reporting.
- Assist the Committee in reviewing the Company's compliance with applicable laws and regulations related to sustainability.
- Provide periodic reports to the Chair and Committee Members regarding progress on sustainability-related issues.

5. Koordinator ESG

Mengkoordinasikan implementasi dan laporan inisiatif ESG untuk memastikan agar selaras dengan target keberlanjutan Perusahaan.

5. ESG Coordinator

Coordinate the implementation and reporting of ESG initiatives to ensure alignment with the Company's sustainability targets.

6. Implementer WIKA Beton dan Subsidiaries

- Melaksanakan program dan aktivitas ESG dalam aktivitas keseharian yang mengacu sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan.
- Melakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan secara berkala melalui penyediaan data dan pelaporan laporan ESG.

6. Implementer at WIKA Beton and Subsidiaries

- Carry out ESG programs and activities in daily operations in accordance with established standards and guidelines.
- Conduct regular monitoring, evaluation, and improvement through the provision of data and ESG reporting.

Pelaksanaan Rapat Komite ESG

Komite ESG secara berkala menyelenggarakan rapat sebagai bagian dari mekanisme tata kelola keberlanjutan yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan penyelarasan antar organ. Adapun implementasi rapat Komite ESG yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Conducting ESG Committee Meetings

The ESG Committee periodically holds meetings as part of the sustainability governance mechanism aimed at strengthening coordination, communication, and alignment among organizational units. The implementation of ESG Committee meetings held throughout 2025 is presented as follows:

Organ Komite ESG ESG Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Attendances	Keterangan Remarks
Dewan Komisaris Board of Commissioners	2	2	Hadir Present
Ketua Komite Committee Chairman	2	2	Hadir Present
Anggota Komite Committee Members	2	2	Hadir Present
Chief Sustainability Officer Chief Sustainability Officer	2	2	Hadir Present

Organ Komite ESG ESG Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Attendances	Keterangan Remarks
Sekretaris Komite Committee Secretary	2	2	Hadir Present
Koordinator ESG ESG Coordinator	2	2	Hadir Present
Implementer WIKA Beton Implementer of WIKA Beton	2	2	Hadir Present
Implementer Subsidiaries Implementer Subsidiaries	2	2	Hadir Present

Agenda Rapat Komite ESG
ESG Committee Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
21 Maret 2025 March 21, 2025	Pembahasan Pilar Keberlanjutan WIKA Beton Discussion of WIKA Beton's Sustainability Pillars
08 Desember 2025 December 08, 2025	Strategi Penguatan Implementasi ESG WIKA Beton 2026 Strategy for Strengthening ESG Implementation of WIKA Beton 2026

Uraian Pelaksanaan Kegiatan Komite ESG

Komite ESG melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari fungsi koordinasi, pengawasan, dan penguatan implementasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di lingkungan Perseroan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, proses operasional, serta pengambilan keputusan perusahaan. Dalam menjalankan perannya, Komite ESG berfokus pada pembahasan isu-isu material keberlanjutan, pemantauan pelaksanaan program, evaluasi capaian kinerja, serta identifikasi risiko dan peluang yang berkaitan dengan agenda ESG Perseroan.

Selain itu, Komite ESG juga berperan dalam mendorong sinergi antar fungsi kerja agar implementasi keberlanjutan dapat berjalan secara konsisten, terukur, dan selaras dengan arah strategis Perseroan. Berbagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun mencerminkan komitmen Perseroan dalam memperkuat tata kelola keberlanjutan, meningkatkan kesiapan organisasi terhadap perkembangan regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan, serta mendukung penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Adapun pelaksanaan kegiatan Komite ESG sepanjang tahun pelaporan disajikan sebagai berikut:

Description of the ESG Committee's Activities

The ESG Committee carries out various activities as part of its functions to coordinate, oversee, and strengthen the implementation of environmental, social, and governance (ESG) aspects within the Company. These activities are designed to support the integration of sustainability principles into the Company's business strategies, operational processes, and decision-making. In carrying out its role, the ESG Committee focuses on discussing material sustainability issues, monitoring program implementation, evaluating performance achievements, and identifying risks and opportunities related to the Company's ESG agenda.

Additionally, the ESG Committee plays a role in fostering synergy among functional units to ensure that sustainability implementation proceeds consistently, measurably, and in alignment with the Company's strategic direction. The various activities conducted throughout the year reflect the Company's commitment to strengthening sustainability governance, enhancing the organization's readiness for regulatory developments and stakeholder expectations, and supporting the creation of sustainable long-term value. The activities of the ESG Committee throughout the reporting year are presented as follows:

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary



YUSHADI

Pemegang Jabatan Sementara (Pjs) Sekretaris Perusahaan
Acting Corporate Secretary

Kewarganegaraan
Citizenship
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia
Age
54 tahun per 31 Desember 2025
54 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan
Tenure
Periode ke-1 (2024–Sekarang)
1st Period (2024–Present)

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Direksi Nomor SK.02.01/WB-0A.0275/2024 tanggal 28 Oktober 2024
Letter of The Board of Directors Decree No. SK.02.01/WB-0A.0275/2024 dated October 28th, 2024

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi
Educational and/or Certification Background

- Magister (S2) Manajemen – Universitas Gadjah Mada (2022) .
- Sarjana (S1) Hukum – Universitas Bung Karno (2010) .
- Sarjana (S1) Akuntansi – Universitas Indonesia (1999).
- Master in Management from Universitas Gadjah Mada (2022).
- Bachelor of Law from Universitas Bung Karno (2010).
- Bachelor's Degree in Accounting from Universitas Indonesia (1999).

Pengalaman Kerja
Work Experiences

Manajer Bidang Investor Relations dan Public Relations, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2014–2024)
Manager of Investor Relations and Public Relations Field, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2014–2024)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan.
No concurrent positions.

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali langsung/tidak langsung.
Has no affiliation relationship with the Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, and direct/indirect controllers.

Sebagai sebuah entitas anak perusahaan milik BUMN yang juga tercatat sebagai perusahaan terbuka, peran Sekretaris Perusahaan sangat penting bagi Perseroan. Sekretaris Perusahaan merupakan orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang berperan dalam menjalankan fungsi kesekretariatan perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah untuk fasilitasi komunikasi antara berbagai organ dalam Perseroan dan/atau dengan pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan citra perusahaan yang positif. Dalam konteks ini, Sekretaris Perusahaan juga berkontribusi pada penyusunan kebijakan, perencanaan, dan memastikan keefektifan serta transparansi komunikasi perusahaan. Selain itu, perannya juga mencakup manajemen hubungan kelembagaan, hubungan investor, dan pelaku pasar modal lainnya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika perusahaan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), serta nilai dan budaya perusahaan.

As a subsidiary owned by a State-Owned Enterprises and also listed as a public company, the role of the Corporate Secretary is of paramount importance to the Company. The Corporate Secretary is an individual or the person in charge of a functional unit responsible for executing the company's secretarial functions. The duties and responsibilities of the Corporate Secretary include facilitating communication among various organs within the Company and/or with stakeholders, as well as supporting the creation of a positive corporate image. In this context, the Corporate Secretary also contributes to policy formulation, planning, and ensures the effectiveness and transparency of corporate communication. Additionally, their role encompasses institutional relationship management, investor relations, and other capital market participants, considering corporate ethics, Good Corporate Governance (GCG) principles, as well as the company's values and culture.

Proses penunjukkan Sekretaris Perusahaan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 sehubungan dengan POJK No. 35/POJK.04/2014 mengenai Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Secara teknis, Sekretaris Perusahaan memiliki tanggung jawab langsung kepada Direksi dan dapat diangkat atau diberhentikan melalui Keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

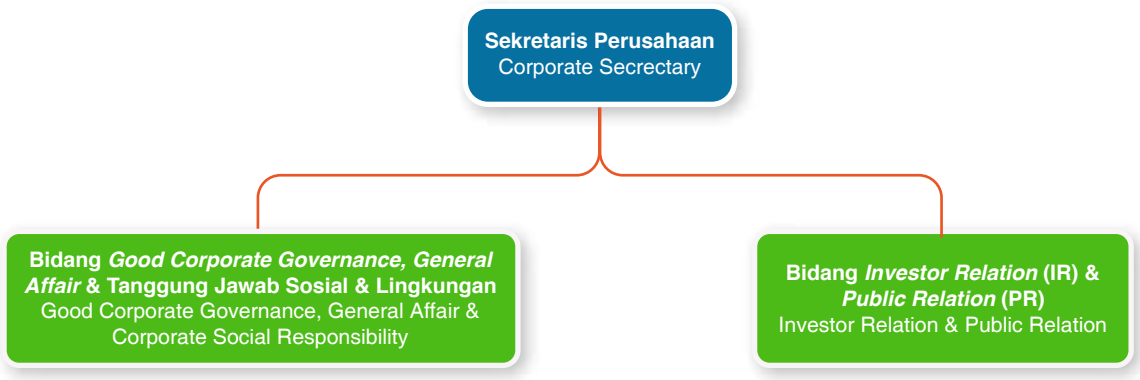
The appointment process of the Corporate Secretary follows the provisions outlined in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 in relation to POJK No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies. Technically, the Corporate Secretary has a direct responsibility to the Board of Directors and can be appointed or dismissed through a Board of Directors' Decision requiring the approval of the Board of Commissioners.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan Surat Keputusan Organisasi Perseroan Nomor SK.01.01/WB-0A.0010/2025 tentang Struktur Organisasi PT Wijaya Karya Beton Tbk pada tanggal 1 Juli 2025, struktur organisasi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE CORPORATE SECRETARY

In accordance with the Company's Organizational Decree No. SK.01.01/WB-0A.0010/2025 regarding the Organizational Structure of PT Wijaya Karya Beton Tbk dated 1 July 2025, the organizational structure of the Corporate Secretary is as follows:



Darmawan Wicaksono

Manajer Bidang *Good Corporate Governance, General Affair* & Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan
Manager of Good Corporate Governance, General Affairs & Social & Environmental Responsibility

Menjabat sejak 21 Juli 2025. Bergabung di WIKA Beton sejak 9 April 2003. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sebelas Maret dan pernah menjabat sebagai Manajer Biro Keuangan dan SDM Anak Perusahaan.

Has held this position since July 21, 2025. Joined WIKA Beton on April 9, 2003. Earned a Bachelor's degree in Economics from Sebelas Maret University and previously served as Manager of the Finance and Human Resources Department at a subsidiary.

Sarah Regina Sitompul

Manajer Bidang *Investor Relations & Public Relations*
Manager of Investor Relations & Public Relations

Menjabat sejak 28 Oktober 2024. Bergabung di WIKA Beton sejak 24 Juni 2013. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan pernah menjabat sebagai Koordinator Bidang Investor Relations & Public Relations WIKA Beton.

Has held this position since October 28, 2024. Joined WIKA Beton on June 24, 2013. Earned a Bachelor's degree in Economics from the University of Indonesia and previously served as Coordinator of Investor Relations & Public Relations at WIKA Beton.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan bertugas dan tanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
    a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
    b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
    c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
    d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CORPORATE SECRETARY

Pertaining to Financial Services Authority Regulation (POJK) No.35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, the duties and responsibilities of the Corporate Secretary include:

1. Following the development of the Capital Market, particularly the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector;
2. Providing input to the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies to comply with the provisions of the laws and regulations in the Capital Market sector;
3. Assisting the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of corporate governance, which includes:
    a. Information disclosure to the public, including the availability of information on the Issuer's or Public Company's Website;
    b. Timely submission of reports to the Financial Services Authority;
    c. Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders;
    d. Organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners; and

e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
d. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

e. Implementation of the company orientation program for the Board of Directors and/or Commissioners.
d. As a liaison between the Issuer or Public Company and the Issuer or Public Company shareholders, the Financial Services Authority, and other stakeholders.

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perseroan secara aktif mendukung pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan melalui partisipasi dalam berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap regulasi pasar modal, peran strategis Sekretaris Perusahaan, serta praktik komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan. Dengan mengikuti pelatihan secara berkelanjutan, Sekretaris Perusahaan diharapkan mampu menjalankan fungsi koordinatif, informatif, dan kepatuhan secara lebih optimal. Pada tahun 2025, Sekretaris Perusahaan mengikuti beberapa program pengembangan diantaranya adalah:

TRAINING AND COMPETENCY IMPROVEMENT OF CORPORATE SECRETARY

The Company is committed to continuously supporting the professional development of the Corporate Secretary through active participation in various training and capacity-building programs. These initiatives are designed to strengthen the Corporate Secretary's understanding of capital market regulations, enhance their strategic role within the organization, and improve stakeholder communication practices. Through ongoing development, the Corporate Secretary is expected to effectively fulfill coordination, disclosure, and compliance responsibilities. In 2025, the Corporate Secretary took part in several development programs, including:

Pelatihan/Seminar/Sertifikasi/Workshop Training/Seminar/Certification/Workshop	Tanggal Pelaksanaan Date of Training	Tempat Place
Pengukuran Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Measurement of The Implementation of Corporate Governance Based on ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)	24 Januari 2025 January 24, 2025	Jakarta
Masa Persiapan Purnabakti Retirement Preparation Period	2-4 Desember 2025 December 2-4, 2025	Jakarta

URAIAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang diaktualisasikan di sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BRIEF DESCRIPTION OF THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE CORPORATE SECRETARY

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary actualized throughout 2025 are as follows:

No	Kebijakan Policies	Program Kerja Work Program	Status Status
1	Pelaksanaan Aksi korporasi dan pasar modal dilakukan secara aman dan memberikan perlindungan hukum bagi Perseroan. The implementation of corporate and capital market actions is carried out safely and provides legal protection for the Company.	1. Terselenggaranya rapat sesuai calendar of event & dokumentasinya. 2. Terselenggaranya Pemberian Keputusan yang tepat atas kegiatan dan/atau Aksi Korporasi Perseroan yang membutuhkan persetujuan Direksi. 3. Pemenuhan dokumen dan legalitas untuk Aksi Korporasi tersedia tepat waktu dan sesuai kebutuhan. 4. Terselenggaranya kegiatan aksi korporasi yang aman. 5. Saran dan asistensi kontrak-kontrak atas pendanaan dari Lembaga perbankan maupun non perbankan. 6. Pemberian advis atas dasar hukum atas rencana dan pelaksanaan aksi korporasi dan pasar modal telah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kaidah hukum yang berlaku. 1. Organize and record meetings according to the calendar of events. 2. Provide proper decisions on the Company's Corporate Activities and/or Actions that require the Board of Directors' approval. 3. Compliance documents and legality for Corporate Actions are available on time and as needed. 4. Implement safe corporate action activities 5. Provide advice and assistance for the contracts of financing from banking and non-banking institutions 6. Provide advice on a legal basis for plans and implementation of corporate and capital market actions in accordance with the laws and regulations and applicable legal principles.	Terlaksana Implemented
2	Terlaksananya Tata Kelola yang berkelanjutan dan tercapainya skor GCG. Implementing sustainable governance and achieving a GCG score.	1. Pelaksanaan dan Penerapan GCG di Perseroan melalui assessment baik oleh pihak internal maupun eksternal. 2. Patuh dan comply terhadap ketentuan dan kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang berlaku. 1. Implement the Company's GCG Assessment by both internal and external parties. 2. Comply with the applicable provisions and policies of Corporate Governance.	Terlaksana Implemented
3	Hubungan Investor Investor Relations	1. Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024. 2. Melaksanakan pelaporan dan/atau keterbukaan informasi kepada regulator secara berkala, baik insidental, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. 3. Melaksanakan Analyst Meeting, Conference, Public Expose, Site Visit, dan One-on-One Meeting sebagai bentuk keterbukaan kepada analis, investor, dan calon investor baik dalam maupun luar negeri. 4. Mengikuti dan turut serta dalam melakukan publikasi dan sosialisasi oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 1. Convene the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Fiscal Year. 2. Report and/or disclose information to regulators on a regular basis, whether incidental, monthly, quarterly, semester or annually. 3. Convene Analyst Meetings, Conferences, Public Exposes, Site Visits, and One-on-One Meetings as a form of transparency to analysts, investors and potential investors both domestic and foreign. 4. Follow and participate in publications and socialization by the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority.	Terlaksana Implemented
4	Membina hubungan yang baik secara berkelanjutan dengan pemangku kepentingan. Fostering good relationships on an ongoing basis with stakeholders.	1. Mengikuti beberapa sosialisasi yang dilaksanakan secara daring oleh regulator. 2. Menjaga hubungan dengan jurnalis melalui press release, media gathering, dan interview session. 3. Melakukan upaya pemberian informasi terkini melalui pengelolaan dan pembaruan konten situs web Perseroan baik atas informasi yang disediakan secara berkala, serta merta, maupun setiap saat harus tersedia. 4. Melaksanakan komunikasi interaktif melalui publikasi media sosial. 1. Participate in several online socializations by the regulator. 2. Maintain relations with journalists through press releases, media gatherings, and interview sessions. 3. Strive to provide the latest information by managing and updating the Company's website content both for information provided regularly, immediately, and at any time it must be available. 4. Carry out interactive communication through social media publications.	Terlaksana Implemented
5	Peningkatan Service Excellence Enhancement of Service Excellence	Melakukan survei kepuasan terhadap kinerja Divisi Sekretariat Perusahaan dengan responden Pegawai di Kantor Pusat, dengan hasil nilai rata-rata 4,49 dari 5. Conduct a satisfaction survey on the Corporate Secretary Division's performance with Employee respondents at the Head Office, with an average score of 4.49 out of 5.	Terlaksana Implemented
6	Pengelolaan Arsip Perusahaan Company Records Management	Dokumen tersimpan di Gedung Arsip, rapi dan mudah dicari. 1. Melengkapi semua kebutuhan dan perlengkapan yang harus ada. 2. Mengendalikan urutan kerja pengarsipan dokumen. 3. Penggunaan teknologi dalam pengarsipan. Documents are stored in the Archive Building, neat and easy to find. 1. Complete all the required needs and equipment. 2. Control the work sequence of document archiving. 3. Utilize archiving technology.	Terlaksana Implemented

No	Kebijakan Policies	Program Kerja Work Program	Status Status
7	ESG Rating	1. Melakukan evaluasi atas kinerja ESG Perseroan 2. Mengkoordinasikan lintas sektoral untuk pembentukan tim baru yaitu Tim Transformasi 3. Melakukan koordinasi dengan Lembaga ESG Rating untuk penciptaan nilai ESG 1. Evaluating the Company's ESG performance. 2. Coordinating cross-sectoral efforts to form a new team, namely the Transformation Team. 3. Coordinating with ESG Rating Institutions to create ESG value.	Terlaksana Implemented
8	Implementasi Program TJSL	1. Menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan semua pemangku kepentingan Perseroan. 2. Membuat Road Map TJSL. 3. Melaksanakan kegiatan TJSL yang sudah direncanakan dalam Road Map 4. Evaluasi kegiatan dan dampak terhadap pemangku kepentingan 1. Organize Focus Group Discussions with all stakeholders of the Company. 2. Create a CSR Road Map. 3. Implement CSR activities as planned in the Road Map. 4. Evaluate activities and their impact on stakeholders.	Terlaksana Implemented

Catatan I Notes:
Perseroan menargetkan publikasi laporan keuangan tahunan audited paling lambat 60 hari setelah akhir tahun buku. Perseroan mengungkapkan realisasi ketepatan waktu publikasi sebagai bagian dari komitmen transparansi.
The Company targets the publication of audited annual financial statements no later than 60 days after the end of the financial year. The Company disclose the realization of timely publication as part of its commitment to transparency

Pertemuan Investor & Analis

Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan kegiatan pertemuan investor dan analis (investor & analyst meeting). Melalui kegiatan ini, Perseroan mensosialisasikan informasi terkini dan kredibel terkait kondisi Perseroan, memberikan edukasi, sekaligus memperbarui informasi mengenai kebijakan strategis Perseroan kepada investor maupun calon investor serta analis pasar modal.

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan melakukan 4 (empat) kali investor/analyst meeting dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Investor & Analyst Meeting

The Corporate Secretary organizes investor and analyst meetings. Through this activity, the Company disseminates the latest and credible information regarding the Company's condition, provides education, as well as updates information regarding the Company's strategic policies to investors and potential investors as well as capital market analysts.

Throughout 2025, the Corporate Secretary held 4 (four) investor/analyst meetings with the following summary:

Pertemuan Triwulan 2025 Quarters Meeting in 2025	Jumlah Pertemuan Total Meetings
Laporan Keuangan Triwulan 1 1st Quarter Financial Report	1
Laporan Keuangan Triwulan 2 2nd Quarter Financial Report	1
Laporan Keuangan Triwulan 3 3rd Quarter Financial Report	1
Laporan Keuangan Triwulan 4 4th Quarter Financial Report	1

Konferensi Pers Press Conference	Jumlah Pertemuan Total Meetings
Paparan Publik Public Expose	1

Satuan Pengawasan Intern
Internal Control



DENNY SETIAWAN ARIWIBOWO

Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia
Age

49 tahun per 31 Desember 2025
49 years old as of December 31st, 2025

Masa Jabatan

Tenure

Periode ke-1 (2025–Sekarang)
1st Period (2025–Present)

Dasar Hukum Penunjukan
Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Direksi Nomor SK.02.01/WB-0A.0324/2025 tanggal 18 Juli 2025
Letter of The Board of Directors Decree No. SK.02.01/WB-0A.0324/2025 dated July 18th, 2025

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi
Educational and/or Certification Background

Sarjana (S1) Teknik Sipil – Universitas Kristen Petra (2002).
Bachelor's Degree in Civil Engineering from Petra Christian University (2002).

Pengalaman Kerja
Work Experiences

- Manajer Divisi Pengendalian dan Manajemen Risiko, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2023–2025)
- Manajer Wilayah Penjualan di Wilayah Penjualan V, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2019-2023)
- Manajer Wilayah Penjualan di Wilayah Penjualan I, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017-2019)

- Division Manager of Control and Risk Management, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2023–2025)
- Sales Region Manager for Sales Region V, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2019-2023)
- Sales Region Manager for Sales Region I, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017-2019)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak ada
None

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali langsung/tidak langsung.
Has no affiliation relationship with the Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, and direct/indirect controllers.

Profil Kepala Pemeriksa SPI
Head Auditors' Profile

Triyono Wijanarko

Menjabat sejak 20 November 2022 dan mulai bergabung di WIKA Beton sejak 2 Januari 2012. Beliau memperoleh gelar S1 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI Jakarta pada Tahun 2009 dan telah menyelesaikan Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti pada tahun 2025. Pernah menjabat sebagai Ahli Madya I Keuangan Divisi Ready Mix dan Material.

Served since November 20, 2022 and joined WIKA Beton on January 2, 2012. He obtained a bachelor degree from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI University in 2009 and has completed the Professional Accounting Education Program (PPAk) at the Faculty of Economics and Business, Trisakti University in 2025. Has served as Finance Intermediate Expert I for Ready Mix and Material Division.

Halim

Menjabat sejak 20 Juli 2023 dan mulai bergabung di WIKA Beton sejak 23 Agustus 1995 Beliau memperoleh gelar D3 Teknik Mesin dari Universitas Sriwijaya pada Tahun 1995 dan pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Peralatan Mobile Concrete IKN.

Served since July 20, 2023 and joined WIKA Beton on August 23, 1995. He obtained a Diploma degree in Machine Engineering from Sriwijaya University in 1995 and has served as Head of Equipment Mobile Concrete IKN.

Rudy Zatmiko

Menjabat sejak 01 Oktober 2023 dan mulai bergabung di WIKA Beton sejak 21 Desember 1995. Beliau memperoleh gelar S2 Sumber Daya Manusia dari Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2011 dan pernah menjabat sebagai Manajer Bidang Pengendalian Produksi dan Manajemen Risiko.

Served since October 01, 2023 and joined WIKA Beton on December 21, 1995. He obtained a Master degree from Hasanuddin University in 2011 and has served as Production Control and Risk Management Manager.

Wide Febro Amor

Menjabat sejak 20 Juli 2025 dan mulai bergabung di WIKA Beton sejak 8 Maret 2010, Beliau memperoleh gelar S1 Manajemen Keuangan dari Universitas Andalas Padang pada Tahun 2007 dan pernah menjabat sebagai Manajer Bidang Akuntansi dan Pajak. Beliau memiliki sertifikasi Qualified Internal Auditor pada Desember 2024.

Served since July 20, 2025, and having joined WIKA Beton on March 8, 2010, he holds a Bachelor's degree in Financial Management from Andalas University, Padang, obtained in 2007. He previously served as Manager of Accounting and Tax, obtaining the Qualified Internal Auditor certification in December 2024.

Muhammad Iqbal

Menjabat sejak 20 Juli 2025 dan mulai bergabung di WIKA Beton sejak 4 Juni 2007, Beliau memperoleh gelar S1 Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia pada Tahun 2004 dan pernah menjabat sebagai Manajer Bidang Umum dan CSR serta Manajer Keuangan PT Citra Lautan Teduh.

Served since July 20, 2025, and having joined WIKA Beton on June 4, 2007, he holds a Bachelor's degree in Accounting Economics from the University of Indonesia, obtained in 2004. He previously served as Manager of General Affairs and CSR and Finance Manager at PT Citra Lautan Teduh.

DASAR PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN
LEGAL BASIS OF INTERNAL AUDIT UNIT ESTABLISHMENT

Sikap antisipatif sangat diperlukan dalam menjaga kepentingan Perseroan. Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan secara kontinu melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan implementasi tata kelola perusahaan. Perseroan mendorong keterlibatan seluruh elemen dalam proses dan pelaksanaannya, sehingga menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan aktivitas yang terkait dengan pengendalian internal Perseroan, Unit Satuan Pengawasan Intern (SPI) menjadi pelaksana utama. Pembentukan SPI memperhatikan dan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
3. Akta Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk;
4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Wijaya Karya Beton Tbk dengan Perhimpunan Pegawai PT Wijaya Karya Beton Tbk yang berlaku dan telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.4/HI.00.01/00.0000.250620013/P-1/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025;
5. Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor: SK.01.01/WB-0A.0010/2025 tanggal 01 Juli 2025 tentang Struktur Organisasi PT Wijaya Karya Beton Tbk;
6. Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor: SK.01.01/WB-0A.0084/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Pembentukan Satuan Pengawasan Intern;
7. Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor: SK.01.01/WB-0A.0085/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Susunan Organisasi Satuan Pengawasan Intern; dan
8. Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor: SK.01.01/WB-0A.336C/2018 tanggal 20 Juni 2018 tentang Penetapan Grade, Fixed Pay, Tunjangan Grade dan PHDP Pegawai.

Proactive attitude is crucial in safeguarding the Company's interests. To achieve this objective, the Company consistently evaluates and enhances the effectiveness of risk management, internal audit, and corporate governance implementation. The Company promotes the involvement of all elements in the process and execution, thereby fostering operational effectiveness and efficiency, financial reporting reliability, as well as compliance with applicable laws and regulations.

In executing activities related to the Company's internal audit, the Internal Audit Unit (SPI) serves as the primary executor. The establishment of Internal Audit Unit takes into consideration and adheres to:

1. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
2. Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter;
3. Articles of Association of PT Wijaya Karya Beton Tbk;
4. Collective Labor Agreement (CLA) between PT Wijaya Karya Beton Tbk and the Employees Association of PT Wijaya Karya Beton Tbk, which is valid and registered with the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia under the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. KEP.4/HI.00.01/00.0000.250620013/P-1/VII/2025 dated July 10, 2025;
5. Board of Directors Decree of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.0010/2025 dated July 1, 2025 on the Organizational Structure of PT Wijaya Karya Beton Tbk;
6. Board of Directors Decree of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.0084/2022 dated June 28, 2022 on the Establishment of the Internal Audit Unit;
7. Board of Directors Decree of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.0085/2022 dated June 28, 2022, on the Organizational Structure of the Internal Audit Unit; and
8. Board of Directors Decree of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.336C/2018 dated June 20, 2018 on the Determination of Employee Grades, Fixed Pay, Grade Allowances, and PHDP.

Dalam struktur organisasi Perseroan, SPI memiliki peran strategis dalam memberikan pendapat profesional, independen, dan objektif kepada Direktur Utama mengenai jalannya aktivitas dan kegiatan operasional Perseroan. Agar sistem pengendalian internal yang baik dapat terbentuk di lingkungan Perseroan, SPI selalu menerapkan prinsip-prinsip dan praktik terbaik GCG serta aspek manajemen risiko sebagai dasar model pemeriksaan yang dilakukan.

Within the Company's organizational structure, the Internal Audit serves a strategic role in providing professional, independent, and objective opinions to the President Director regarding the course of activities and operational undertakings of the Company. To ensure the establishment of a sound internal audit system, the Internal Audit consistently applies the principles and best practices of GCG, as well as risk management aspects, as the basis for the audit model.

Visi Vision

Menjadi mitra strategis yang profesional berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berbasis transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness dalam rangka mendukung kemajuan perusahaan.

To become a professional strategic partner based on the principles of good corporate governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, to support the Company's growth and development.

Misi Mission

1. Membantu perusahaan dalam memastikan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan secara berkelanjutan, melalui pelaksanaan dan evaluasi terhadap proses pengendalian kegiatan operasi, pengelolaan risiko dan tata kelola yang baik, melalui penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC).
2. Meningkatkan dan melindungi nilai perusahaan dengan menjalankan peran dan fungsi assurance dan consulting dengan memberikan rekomendasi yang independen, objektif, inovatif dan konstruktif serta memberikan nilai tambah dengan menggunakan teknologi informasi terkini.
3. Mengembangkan kompetensi auditor secara berkesinambungan.
4. Meningkatkan sinergi fungsi audit intern dan eksternal audit.
5. Mengelola aktivitas internal audit secara efektif dan efisien.

1. To assist the Company in ensuring the sustainable achievement of its objectives through the implementation and evaluation of operational control processes, risk management, and good governance, by applying Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) principles.
2. To enhance and protect the Company's value by performing assurance and consulting roles through the provision of independent, objective, innovative, and constructive recommendations, and by creating added value through the use of up-to-date information technology.
3. To continuously develop auditor competencies.
4. To strengthen synergy between the internal audit and external audit functions.
5. To manage internal audit activities effectively and efficiently.

KUALIFIKASI ATAU SERTIFIKASI SEBAGAI PROFESI AUDIT INTERNAL
QUALIFICATION OR CERTIFICATION AS A PROFESSIONAL INTERNAL AUDIT

Pentingnya audit internal dalam semua aspek bisnis dan operasional menyoroti peran kunci Satuan Pengawas Intern. Oleh karena itu, Perseroan memastikan bahwa setiap anggota SPI telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.

The significance of internal audit in all aspects of business and operations underscores the pivotal role of the Internal Audit Unit. Therefore, the Company ensures that each Internal Audit Unit member meets the established criteria and requirements.

Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk pelaksanaan audit internal menjadi tugas setiap individu di SPI, dan setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan.

Knowledge, skills, and competencies necessary for internal audit implementation are designated as the responsibility of every individual within the Internal Audit Unit. Each member is accountable for participating in ongoing professional training and development. A complete description of other skill requirements that all Internal Audit Unit members must possess has been regulated in the Internal Audit Charter.

Perseroan memastikan bahwa seluruh personil Satuan Pengawasan Intern memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan berbasis risiko. Piagam Pengawasan Internal memuat secara rinci persyaratan keahlian lain yang harus dimiliki oleh setiap anggota SPI.

The Company ensures that all personnel of the Internal Audit Unit have adequate competencies to perform risk-based audit functions. The Internal Audit Charter sets out in detail the additional expertise requirements that must be met by each member of the Internal Audit Unit.

Kualifikasi tersebut diperkuat melalui kepemilikan sertifikasi profesi seperti Qualified Internal Auditor (QIA), Certified Risk Management Professional (CRMP), Chartered Accountant (CA), serta sertifikasi audit internal lanjutan lainnya.

These qualifications are strengthened through the possession of professional certifications, such as Qualified Internal Auditor (QIA), Certified Risk Management Professional (CRMP), Chartered Accountant (CA), and other advanced internal audit certifications.

Sampai dengan 31 Desember 2025, sebanyak 7 (tujuh) personil SPI telah memiliki sertifikasi profesi yang relevan dengan aktivitas audit internal, antara lain:

As of December 31, 2025, a total of 7 (seven) Internal Audit Unit personnel held professional certifications relevant to internal audit activities, including:

Nama Name	Sertifikasi Certification
Denny Setiawan Ariwibowo	*Qualified Internal Auditor* *Certified Risk Management Professional*
Kukuh Bardianto*	*Qualified Internal Auditor*
Wide Febro Amor	*Qualified Internal Auditor*
Triyono	*Qualified Internal Auditor*
Muhammad Iqbal	*Chartered Accountant*
Ginanjar Satria Febriandito	*Qualified Internal Auditor*
Anggun Nuansa Dewi	*Qualified Internal Auditor Tingkat Lanjutan* *Qualified Internal Audit Certification Basic Level*
Wenny Indriyani	*Qualified Internal Auditor Tingkat Lanjutan* *Qualified Internal Audit Certification Basic Level* *Certified Risk Management Officer*

Catatan I Notes
* Menjabat hingga 21 Juli 2025 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.02.01/WB-0A.0324/2025 tanggal 18 Juli 2025.
*Served until July 21, 2025, in accordance with the Board of Directors' Decree No. SK.02.01/WB-0A.0324/2025 dated July 18, 2025.

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERN DALAM TAHUN BUKU
TRAINING AND COMPETENCY IMPROVEMENT OF INTERNAL CONTROL UNITS IN FISCAL YEAR

Sepanjang tahun 2025, Perseroan secara konsisten melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi Satuan Pengawasan Intern (SPI) guna memastikan efektivitas fungsi pengawasan dan pengendalian internal. Pelatihan tersebut mencakup aspek audit internal berbasis risiko, pemahaman atas peraturan terbaru, serta penguatan integritas dan etika profesional. Perseroan juga mendorong partisipasi SPI dalam sertifikasi profesional dan forum peningkatan kapasitas yang relevan di tingkat nasional. Upaya ini sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menjaga tata kelola yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika bisnis.

Throughout 2025, the Company consistently implemented training and competency development programs for the Internal Audit Unit (Satuan Pengawasan Intern/SPI) to ensure the effectiveness of internal control and oversight functions. The training covered areas such as risk-based internal auditing, updates on regulatory frameworks, and the reinforcement of professional integrity and ethics. The Company also encouraged SPI personnel to pursue professional certifications and participate in relevant capacity-building forums at the national level. These efforts reflect the Company's commitment to maintaining transparent, accountable, and adaptive corporate governance practices.

Nama Name	Pelatihan/Seminar/Sertifikasi/Workshop Training/Seminar/Certification/Workshop	Tanggal Pelaksanaan Date of Training	Tempat Place
Denny Setiawan Ariwibowo	Qualified Internal Auditor	Oktober 2025 October 2025	YPIA - JAKARTA
Kukuh Bardianto*	Qualified Internal Auditor	Mei 2023 May 2023	YPIA - JAKARTA

Catatan I Notes
* Menjabat hingga 21 Juli 2025 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.02.01/WB-0A.0324/2025 tanggal 18 Juli 2025.
*Served until July 21, 2025, in accordance with the Board of Directors' Decree No. SK.02.01/WB-0A.0324/2025 dated July 18, 2025.

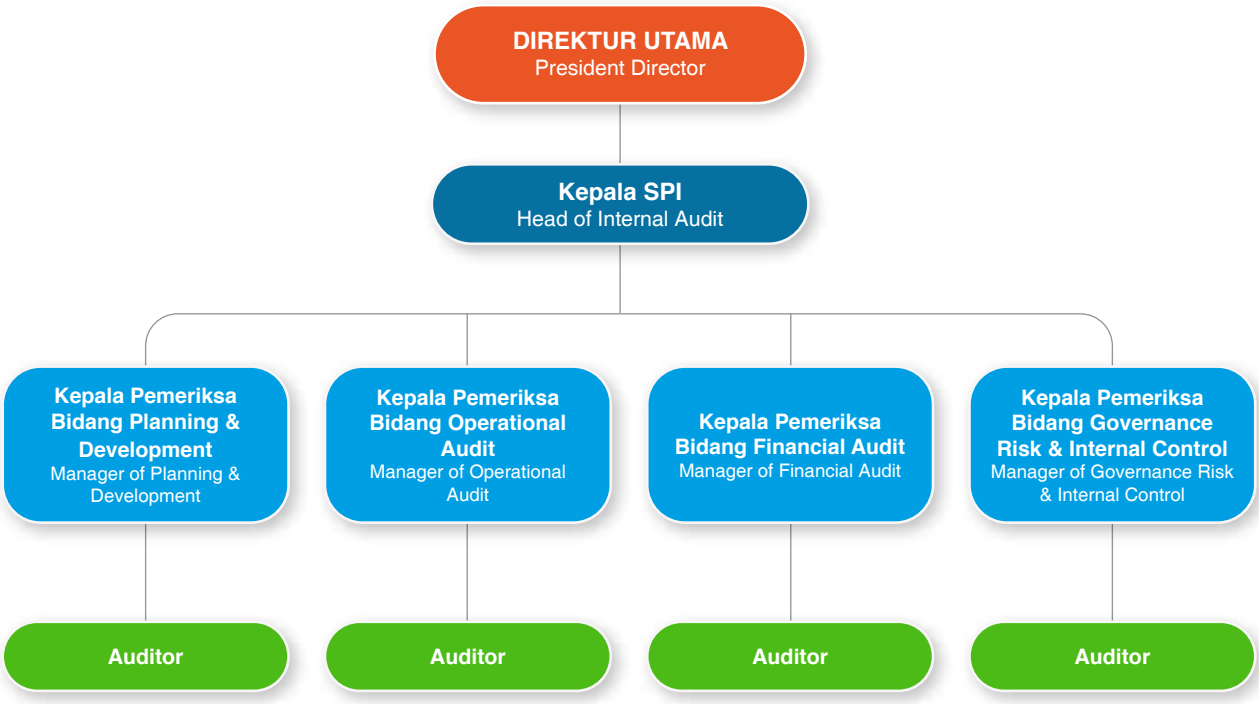
STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT STRUCTURE AND POSITION

Kepala SPI, yang memiliki posisi setara dengan Manajer Divisi, memimpin SPI dan langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Kepala Pemeriksa, yang merupakan jabatan struktural yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Direksi, bekerja sama dengan SPI dan langsung melapor kepada Kepala SPI. Pemeriksa, sebagai jabatan ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atau pejabat yang berwenang, memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas audit dan harus memberikan laporan kepada Kepala Pemeriksa yang juga menjabat sebagai Ketua Tim.

Berikut adalah gambaran struktur organisasi SPI Perseroan:

The Head of the Internal Audit holds a position equivalent to that of a Division Manager, leads the Internal Audit and reports directly to the President Director. The Head of the Internal Audit, a designated and terminated structural position by the Board of Directors, collaborates with the Internal Audit and reports directly to the Head of the Internal Audit Division. The Inspector, an expert position appointed and terminated by the Board of Directors or authorized personnel, bears responsibility for executing audit tasks and must submit reports to the Head of Internal Audit, who concurrently serves as the Team Leader.

The organizational structure of the Internal Audit is outlined below:



URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGAWASAN INTERN
INTERNAL AUDIT UNIT DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagaimana tertuang dalam Piagam Pengawasan Intern Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) berbasis risiko yang disetujui oleh Direktur Utama, termasuk perhitungan anggaran SPI yang berkaitan dengan sifat audit serta jumlah divisi dan unit kerja yang diprogramkan untuk diperiksa.
2. Melakukan pemeriksaan rutin sesuai dengan jadwal dalam PKPT serta menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas, minimal namun tidak terbatas dilakukan pada bidang Akuntansi, Keuangan, Operasional, Human Capital, Pemasaran, Teknik Mutu, Produktivitas, Teknologi Informasi, Sekretariat Perusahaan dan melakukan evaluasi atas sistem, prosedur, dan kebijakan operasi perusahaan yang dilakukan secara berkesinambungan. Menyiapkan dan mendokumentasikan Kertas Kerja Pemeriksaan.
4. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan SPI Berbasis Risiko WB-LIC-PS-03 dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit
5. Memantau dan menganalisa Tindak Lanjut dari LHP yang disampaikan kepada pimpinan tertinggi unit kerja sesuai dengan disposisi dari Direktur Utama, dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
6. Memantau tindak lanjut hasil audit dari auditor eksternal.
7. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan auditor SPI melalui pendidikan, pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Profesi seperti Qualified Internal Auditor (QIA), dan atau sertifikat keahlian lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan dan tanggung jawabnya sebagai pemeriksa.
8. Menyusun dan melakukan program jaminan mutu kegiatan audit internal sesuai dengan prosedur pengawasan internal berupa :
   - Melakukan supervisi rutin dalam penugasan pemeriksaan.
   - Melakukan penilaian mandiri kualitas internal audit minimum setahun sekali (peer review).
   - Melakukan asesmen eksternal minimum tiga tahun sekali oleh pihak independen.

The duties and responsibilities of the Internal Audit Unit (SPI), as set out in the Company's Internal Audit Charter, are as follows:

1. Prepare a risk-based Annual Audit Work Program (PKPT) approved by the President Director, including the calculation of the Internal Audit Unit (SPI) budget based on the nature of the audits and the number of divisions and work units to be audited.
2. Conduct routine audits in accordance with the schedule set out in the PKPT, and test and evaluate the implementation of internal controls and risk management systems in compliance with applicable regulations.
3. Perform audits and assessments of efficiency and effectiveness, including but not limited to the areas of Accounting, Finance, Operations, Human Capital, Marketing, Engineering and Quality, Productivity, Information Technology, and Corporate Secretariat, as well as conduct continuous evaluations of the Company's systems, procedures, and operational policies. Prepare and document audit working papers.
4. Prepare Audit Reports (Laporan Hasil Pemeriksaan/ LHP) in accordance with the Risk-Based Internal Audit Procedure WB-LIC-PS-03 and submit the reports to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
5. Monitor and analyze the follow-up actions on audit findings reported to the heads of work units in accordance with directives from the President Director, and report the follow-up monitoring results to the President Director and the Audit Committee.
6. Monitor follow-up actions on audit results from external auditors.
7. Enhance the competence and capability of Internal Audit (SPI) auditors through education, training, and professional certifications such as Qualified Internal Auditor (QIA) and other relevant certifications required to support their duties and responsibilities.
8. Prepare and implement an internal audit quality assurance program in accordance with internal control supervision procedures, including the following:
   - Conduct regular supervision of audit assignments.
   - Perform an internal audit quality self-assessment at least once a year (peer review).
   - Conduct an external assessment by an independent party at least once every three years.

9. Memberikan pendapat, masukan dan pertimbangan maupun jasa konsultasi yang obyektif kepada Manajemen dan unit kerja lainnya baik secara formal maupun informal berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan fungsi pengawasan.
10. Bekerja sama dan membina hubungan yang setara dengan Komite Audit.isi/unit kerja dengan Direksi untuk perbaikan sistem dan prosedur.
11. Melakukan Audit Khusus apabila diperlukan.
12. Dalam hal ditugaskan untuk bekerja sama dengan organ pendukung Dewan Komisaris selain Komite Audit akan ditetapkan dalam Surat Penugasan tersendiri.
13. Melakukan penyusunan dan pengkajian piagam audit intern secara periodik.
14. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas audit internal kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan atau putusan pengadilan.
15. Melakukan penyelenggaraan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
16. Dalam rangka pelaksanaan fungsi Internal Audit Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab SPI mengacu pada pedoman tata kelola terintegrasi.
    - Menentukan strategi pelaksanaan audit intern dengan entitas anak dan afiliasi merumuskan prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah pelaksanaan pengendalian mutu.
    - Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing entitas anak dan afiliasi dalam lingkup WIKA Beton group.
    - Dapat melaksanakan audit pada entitas anak dan atau afiliasi baik secara individual, audit bersama atau berdasarkan laporan dari internal audit entitas anak.
17. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
18. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas pengawasan intern yaitu terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota SPI. Penggunaan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SPI dan pihak eksternal mematuhi piagam audit intern perusahaan.

9. Provide objective opinions, input, considerations, and consulting services to Management and other work units, both formally and informally, in relation to audit activities and oversight functions.
10. Cooperate and maintain equal and constructive working relationships with the Audit Committee and relevant units, as well as with the Board of Directors, to improve systems and procedures.
11. Conduct special audits when required.
12. If assigned to work with supporting bodies of the Board of Commissioners other than the Audit Committee, such assignments shall be stipulated in a separate Letter of Assignment.
13. Prepare and periodically review the Internal Audit Charter.
14. Maintain the confidentiality of Company information and/or data related to the performance of internal audit duties, except as permitted by applicable laws and regulations and/or court decisions.
15. Conduct regular and ad hoc meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.
16. In carrying out the Integrated Internal Audit function, the duties and responsibilities of the Internal Audit Unit (SPI) refer to the integrated governance guidelines.
    - Determine the internal audit implementation strategy for subsidiaries and affiliated entities, and establish internal audit principles that cover audit methodologies and quality control procedures.
    - Monitor the implementation of internal audits in each subsidiary and affiliated entity within the WIKA Beton Group.
    - Conduct audits of subsidiaries and/or affiliated entities, either individually, jointly, or based on reports from the internal audit units of the subsidiaries.
17. Report significant findings to the President Director and the Board of Commissioners to ensure timely corrective actions.
18. Ensure that, when external parties are engaged for internal oversight activities, effective knowledge transfer takes place from the external parties to members of the Internal Audit Unit (SPI). The use of external services does not affect the independence and objectivity of the SPI, and external parties comply with the Company's Internal Audit Charter.

19. Memastikan pelaksanaan audit sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik audit intern.
20. SPI menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/ Komite Audit, yang memuat rangkuman hasil audit, pemantauan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal.
21. Melakukan penilaian Risk Maturity Index (RMI) bersama lini kedua.
22. Bertindak sebagai lini ketiga dalam implementasi Internal Control over Financial Report (ICoFR). Dalam menjalankan implementasi ICoFR, SPI berperan antara lain :
    - Memberikan masukan/konsultasi dalam penentuan ruang lingkup ICoFR kepada lini pertama dan lini kedua.
    - Melakukan evaluasi efektivitas implementasi pengendalian internal melalui Test Of Design (TOD) dan Test Of Operating Effectiveness (TOE).
    - Memberikan konsultasi yang independen dan obyektif terkait remediasi rancangan pengendalian kepada lini pertama dan lini kedua.
    - 5.22.4. Mengevaluasi kembali hasil remediasi melalui TOD & TOE.
    - Menyusun laporan hasil evaluasi efektivitas implementasi ICoFR termasuk penilaian Degree of Deficiency (DOD).
    - Berkoordinasi dengan lini pertama dan lini kedua dalam melakukan perhitungan Degree of Deficiency (DOD) atas pengendalian yang sampai akhir periode laporan keuangan tidak efektif.
    - Memberikan laporan hasil evaluasi efektivitas implementasi ICoFR kepada praktisi eksternal.
23. SPI menyusun dan menyampaikan laporan dengan pendistribusian sebagai berikut :
    - Laporan hasil audit atas unit kerja disampaikan kepada Direktur Utama, auditee, Dewan Komisaris/Komite Audit dan Internal Audit Induk Perusahaan.
    - Laporan hasil audit pada entitas anak dan atau afiliasi disampaikan kepada Direktur Utama Wika Beton dan Direktur Utama entitas anak/ afiliasi.

19. Ensure that audit activities are conducted in accordance with professional internal audit standards and the internal audit code of ethics.
20. The SPI submits quarterly activity reports to the President Director and the Board of Commissioners/ Audit Committee, containing a summary of audit results and monitoring of follow-up actions on internal and external audit findings.
21. Conduct the Risk Maturity Index (RMI) assessment jointly with the second line of defense.
22. Act as the third line of defense in the implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR). In carrying out the ICoFR implementation, the role of the SPI includes the following:
    - Provide input and consultation to the first and second lines of defense in determining the scope of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR).
    - Evaluate the effectiveness of internal control implementation through Tests of Design (TOD) and Tests of Operating Effectiveness (TOE).
    - Provide independent and objective consultation related to the remediation of control design to the first and second lines of defense.
    - Re-evaluate the results of remediation through TOD and TOE.
    - Prepare evaluation reports on the effectiveness of ICoFR implementation, including the assessment of the Degree of Deficiency (DOD).
    - Coordinate with the first and second lines of defense in calculating the Degree of Deficiency (DOD) for controls that remain ineffective at the end of the financial reporting period.
    - Submit evaluation reports on the effectiveness of ICoFR implementation to external practitioners.
23. The SPI prepares and submits reports with the following distribution:
    - Audit reports on work units are submitted to the President Director, the auditees, the Board of Commissioners/Audit Committee, and the Parent Company's Internal Audit Unit.
    - Audit reports on subsidiaries and/or affiliated entities are submitted to the President Director of WIKA Beton and the President Director of the respective subsidiary or affiliated entity.

- Laporan SPI antara lain : Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit SPI, Laporan Tindak Lanjut Audit SPI, BPK, BPKP dan auditor Independen, Laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SPI, Laporan Khusus mengenai temuan yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha, Laporan Hasil Kaji Ulang Pihak Eksternal yang independent (Quality Assurance Review).

- SPI reports include, but are not limited to: the SPI Audit Implementation and Key Audit Results Report; the SPI Audit Follow-Up Report; follow-up reports on audits conducted by the Supreme Audit Board (BPK), the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP), and independent auditors; reports on the appointment or dismissal of the Head of SPI; special reports on findings that may threaten business continuity; and reports on Independent External Quality Assurance Reviews.

KEWENANGAN UNIT AUDIT INTERNAL

SPI Perseroan juga memiliki sejumlah kewenangan, antara lain:

1. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.
2. Memasuki seluruh areal perusahaan dan meninjau tempat usaha, lingkungan kerja dan lokasi aset Perseroan.
3. Meminta keterangan dan penjelasan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan dalam rangka pemeriksaan.
4. Memiliki akses sepenuhnya atas semua dokumen, pencatatan, karyawan Perseroan dan fisik informasi atas Obyek Pemeriksaan, untuk mendapatkan data dan atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
5. Meminta bantuan tenaga pemeriksa dari dalam perusahaan dalam hal tidak tersedianya kompetensi Auditor SPI, dan dari luar perusahaan jika dipandang perlu dengan beban yang menjadi tanggung jawab perusahaan.
6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan atau Komite Audit.
7. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan atau Komite Audit.
8. Melakukan koordinasi kegiatan SPI dengan kegiatan Auditor Ekstern.
9. Dapat mengikuti rapat-rapat manajemen yang bersifat strategis.
10. Melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas SPI.
11. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi fraud dan pelanggaran kode etik/code of conduct.
12. Melakukan pengawasan pada Anak Perusahaan dalam lingkup PT Wijaya Karya Beton Tbk., dengan ketentuan sebagai berikut :

INTERNAL AUDIT UNIT AUTHORITY

The Company's SPI also has several authorities, including:

1. Prepare, revise, and implement internal audit policies, including determining audit procedures and the scope of audit activities.
2. Access all Company areas and review business locations, work environments, and asset sites.
3. Request information and explanations from all levels of management and employees for audit purposes.
4. Have full access to all Company documents, records, personnel, and physical information related to the audit object to obtain data and information required for audit activities.
5. Request assistance from internal personnel when the required SPI auditor competencies are not available, and from external parties when deemed necessary, with the related costs borne by the Company.
6. Communicate directly with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.
7. Hold regular and ad hoc meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.
8. Coordinate SPI activities with those of external auditors.
9. Attend strategic management meetings when required.
10. Select competent human resources as needed to carry out SPI duties.
11. Conduct investigative activities related to cases or issues in any aspect of operations that are suspected of fraud or violations of the code of ethics or code of conduct.
12. Conduct oversight of subsidiaries within PT Wijaya Karya Beton Tbk., in accordance with the following provisions:

- Dapat meminta rencana audit tahunan dan laporan audit entitas anak dan afiliasi serta dokumen lain yang dibutuhkan dalam hal yang berhubungan dengan internal audit.
- SPI PT Wijaya Karya Beton, Tbk dapat melakukan pemeriksaan ke Anak Perusahaan bilamana dipandang perlu dengan penugasan oleh Direktur Utama PT Wijaya Karya Beton, Tbk atau apabila diminta oleh Direktur Utama, Komisaris dan Pemegang Saham anak perusahaan.
- Atas hasil pemeriksaan SPI PT Wijaya Karya Beton Tbk dilaporkan secara langsung kepada Komisaris Utama Anak Perusahaan dengan ditembuskan Kepada Direktur Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk dan Direktur Utama Anak Perusahaan.

HUBUNGAN KERJA UNIT AUDIT INTERNAL

SPI menjalin hubungan kerja dengan organ Perseroan lainnya dalam melaporkan proses pelaporan kegiatan audit internal. Hal ini mencakup aktivitas hubungan kerja dengan manajemen, hubungan kerja dengan Komite Audit, dan hubungan kerja dengan Auditor Eksternal.

1. **Hubungan Kerja dengan Manajemen**
   SPI sebagai mitra bagi semua tingkatan manajemen dan sebagai "advisor" yang memberikan masukan yang konstruktif kepada Direksi, berwenang setiap saat melaksanakan fungsinya pada semua unit kerja dalam lingkup Perseroan guna memastikan bahwa kebijakan Direksi dan Sistem Pengendalian Intern dijalankan oleh semua lini dalam organisasi secara konsisten
2. **Hubungan Kerja dengan Komite Audit**
   Dalam pelaksanaan tugasnya, SPI dan Komite Audit (KA) merupakan mitra kerja, dimana Komite Audit melakukan penilaian atas aktivitas hasil audit yang dilakukan oleh SPI dan memberikan masukan yang konstruktif kepada SPI sebagai umpan balik atas pelaksanaan tugas yang dilakukan SPI yang diwujudkan dengan rapat koordinasi yang dilakukan secara berkala.
3. **Hubungan dengan Auditor Eksternal**
   Untuk mendukung audit yang dilakukan pihak eksternal, maka SPI mendukung sepenuhnya dengan memberikan informasi yang relevan berkaitan dengan tujuan audit eksternal yang dilakukan dan secara jabatan, SPI menjadi mitra kerja untuk mendukung proses audit berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.l

- Request annual audit plans, audit reports, and other relevant documents from subsidiaries and affiliated entities in matters related to internal audit.
- The Internal Audit Unit (SPI) of PT Wijaya Karya Beton Tbk may conduct audits of subsidiaries when deemed necessary, based on an assignment from the President Director of PT Wijaya Karya Beton Tbk or upon request from the President Director, Commissioners, or Shareholders of the subsidiary.
- The results of audits conducted by the SPI of PT Wijaya Karya Beton Tbk are reported directly to the President Commissioner of the subsidiary, with copies provided to the President Director of PT Wijaya Karya Beton Tbk and the President Director of the subsidiary.

INTERNAL AUDIT UNIT WORK RELATION

The Internal Audit Unit (SPI) establishes working relationships with other Company organs in reporting internal audit activities. This includes coordination with management, collaboration with the Audit Committee, and cooperation with external auditors.

1. **Working Relationship with Management**
   As a partner to all levels of management and as an advisor providing constructive input to the Board of Directors, the Internal Audit Unit (SPI) is authorized to perform its functions at any time across all work units within the Company to ensure that Board policies and the Internal Control System are implemented consistently throughout the organization.

2. **Working Relationship with the Audit Committee**
   In carrying out their duties, the Internal Audit Unit (SPI) and the Audit Committee act as working partners. The Audit Committee reviews the results of audits conducted by the SPI and provides constructive feedback to the SPI. This collaboration is carried out through regular coordination meetings.

3. **Working Relationship with External Auditors**
   To support audits conducted by external parties, the Internal Audit Unit (SPI) fully provides relevant information related to the objectives of external audits and, by function, acts as a working partner to ensure that the audit process is carried out in accordance with applicable regulations.

4. **Hubungan dengan Internal Audit Entitas Anak dan Afiliasi**
   Sehubungan dengan pelaksanaan Audit Internal Terintegrasi, SPI Wika Beton menentukan strategi pelaksanaan audit intern yang mencakup metodologi audit dan pengendalian mutu, serta memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing entitas anak dan afiliasi.

INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS UNIT AUDIT INTERNAL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pemeriksa Intern dalam konteks kebebasan bertindak (independensi) secara obyektif diaplikasikan sebagai berikut:

1. Tidak memihak kepada kepentingan para pihak dalam Perseroan seperti Manajemen dan Komisaris, baik langsung maupun tidak langsung.
2. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan kaidah dan prinsip audit internal yang diterima dan berlaku secara umum.
3. Dalam pelaksanaan tugas audit membebaskan diri dari segala kepentingan pribadi maupun unit kerja yang diperiksa, dengan tetap menjunjung teguh kode etik yang telah ditetapkan.
4. Tidak memiliki tanggung jawab atau wewenang operasional langsung atas setiap kegiatan yang diaudit. Auditor tidak melakukan pemeriksaan/menilai operasi spesifik yang menjadi tanggung jawabnya minimal dalam 6 bulan sebelumnya (cooling down period).
5. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala SPI dilarang untuk merangkap tugas dan jabatan sebagai pelaksana kegiatan operasional perusahaan, baik di Emiten atau Perusahaan Publik maupun anak perusahaannya.
6. Dalam pelaksanaan penugasan jika independensi atau objektivitas berpotensi tidak dapat dicapai, harus diungkapkan dan apabila dinilai mengganggu independensi dan objektivitas, hal tersebut akan diputuskan dan diatur lebih lanjut oleh Kepala SPI.

KODE ETIK SATUAN PENGAWASAN INTERN

Menjaga martabat dan kehormatan adalah kewajiban utama SPI dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, SPI harus selalu mematuhi etika bisnis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Working Relationship with Internal Audit Units of Subsidiaries and Affiliated Entities**
   In relation to the implementation of Integrated Internal Audits, the SPI of WIKA Beton determines the internal audit strategy, including audit methodology and quality control measures, and monitors the implementation of internal audits at each subsidiary and affiliated entity.

INTERNAL AUDIT UNIT INDEPENDENCY

In carrying out its duties and functions as an Internal Auditor, the principle of independence and objectivity is applied as follows:

1. Remain impartial and not favor the interests of any parties within the Company, including Management and the Board of Commissioners, either directly or indirectly.
2. Conduct audits in accordance with generally accepted internal audit standards and principles.
3. Perform audit duties free from personal interests or the interests of the audited unit, while upholding the established code of ethics.
4. Have no direct operational responsibility or authority over the activities being audited. Auditors do not audit or evaluate specific operations for which they were responsible within the previous six months (cooling-off period).
5. In performing their duties, the Head of the Internal Audit Unit (SPI) is prohibited from holding concurrent operational roles or positions within the Company, whether in the listed entity, public company, or its subsidiaries.
6. If, during an assignment, independence or objectivity is potentially compromised, such circumstances must be disclosed. Where independence or objectivity is deemed to be affected, the matter will be decided and further regulated by the Head of SPI.

INTERNAL AUDIT CODE OF ETHICS

Maintaining dignity and honor is the primary obligation of the Internal Audit in the execution of its duties and responsibilities. In this regard, the Internal Audit must consistently adhere to business ethics and prevailing

Oleh karena itu, anggota SPI diwajibkan tunduk pada kode etik dan prinsip dasar yang harus diikuti selama mereka melaksanakan tugas masing-masing, yaitu:

1. Pemeriksa internal wajib bersikap jujur, objektif, hati-hati, bijaksana, bertanggung jawab, berani, dan memiliki integritas yang tinggi serta harus mampu bertindak secara independen dalam menjalankan tugas maupun kewajibannya, dan harus mampu memelihara kepercayaan yang diberikan oleh Direktur Utama dan atau Kepala Satuan Pengawasan Intern;
2. Pemeriksa internal harus mampu memelihara dan menjaga kepercayaan yang diberikan dalam rangka tugas pemeriksaan;
3. Pemeriksa internal harus menggunakan semua kemampuannya untuk memperoleh bukti-bukti yang memadai guna mendukung pernyataannya;
4. Pemeriksa internal harus berusaha untuk meningkatkan keahlian dalam melakukan pekerjaannya dengan memelihara kompetensi jabatan, moralitas, dan menjunjung tinggi kehormatan jabatan;
5. Pemeriksa internal harus membangun komunikasi yang intens dengan sesama pemeriksa dan auditor eksternal, untuk kepentingan perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugas yang diembannya;
6. Dalam rangka menjalankan tugasnya, pemeriksa internal harus berpedoman kepada norma-norma pemeriksaan dan prosedur umum pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern;
7. Pemeriksa internal harus menghindarkan diri untuk mengambil bagian dalam aktivitas ilegal atau yang tidak sepantasnya dilakukan;
8. Pemeriksa internal berusaha untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan maupun prasangka yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertindak secara independen;
9. Dalam menerima penugasan di luar kegiatan pemeriksaan dan operasional perusahaan, diminta sebagai pemeriksa internal wajib menanggalkan identitas dan atributnya selaku pemeriksa internal;
10. Pemeriksa internal dilarang untuk merangkap tugas secara langsung dalam kegiatan operasional Perseroan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern

Direktur Utama memiliki wewenang untuk mengangkat atau memberhentikan Kepala SPI setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika Kepala SPI tidak

legal regulations. Therefore, Internal Audit members are required to comply with a code of ethics and fundamental principles to be followed during the course of their respective duties, namely:

1. Internal auditors are required to be honest, objective, careful, wise, responsible, courageous, and have high integrity and must be able to act independently in carrying out their duties and obligations, and must be able to maintain the trust given by the President Director and/or Head of Internal Audit;
2. Internal auditors must maintain and maintain the trust given to them in the context of their audit duties;
3. The internal auditor must use all his abilities to obtain sufficient evidence to support his statement;
4. Internal auditors must strive to improve their expertise in carrying out their work by maintaining position competence morality and upholding the honor of the position;
5. Internal auditors must establish intense communication with fellow auditors and external auditors for the company's benefit in the context of carrying out their duties;
6. To carry out their duties, internal auditors must adhere to audit norms and general procedures for audit by the Internal Audit;
7. Internal auditors must refrain from participating in illegal or inappropriate activities;
8. Internal auditors try not to involve themselves in activities that may create a conflict of interest or prejudice that may doubt their ability to act independently;
9. In accepting an assignment outside the company's audit and operational activities, he is asked as an internal auditor to be required to give up his identity and attributes as an internal auditor;
10. Internal auditors are prohibited from concurrently serving directly in the Company's operational activities.

The Party Appointing and Dismissing the Head of Internal Audit

The Head of the Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director after obtaining the Board of Commissioners' approval. The President Director may

memenuhi persyaratan sebagai auditor SPI, sesuai dengan ketentuan jabatan dan/atau tidak mampu menjalankan tugasnya, Direktur Utama berhak memberhentikannya dengan persetujuan Dewan Komisaris. Jika laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Direktur Utama memerlukan klarifikasi lebih lanjut, tanggapan atau disposisi tertulis diberikan oleh Direktur Utama untuk segera ditindaklanjuti oleh SPI. Pengumuman setiap pengangkatan, pergantian, atau pemberhentian Kepala SPI dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

dismiss the Head of SPI, after obtaining the Board of Commissioners' approval if the Head of Internal Audit does not meet the requirements as an auditor and or fails or is incompetent in carrying out his duties. If the accountability submitted to the President Director requires further explanation, then the President Director provides a response or written disposition, to be immediately followed up by the Internal Audit. Every appointment, replacement and dismissal of the Head of Internal Audit is notified to the Financial Services Authority.



Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Sistem pengendalian internal, bagi Perseroan, diartikan sebagai rangkaian kebijakan dan prosedur yang bertujuan melindungi entitas dari potensi penyimpangan dan kecurangan (*fraud*), menjamin akurasi informasi, dan memastikan ketaatan terhadap hukum serta peraturan. Oleh karena itu, peran sistem pengendalian internal memiliki dampak yang signifikan dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh Pemangku Kepentingan.

The internal audit system, as interpreted by the Company, is defined as a set of policies and procedures aimed at safeguarding the entity from potential deviations and fraud, ensuring the accuracy of information, and ensuring compliance with laws and regulations. Therefore, the role of the internal audit system has a significant impact on achieving the desired goals of stakeholders.

Dalam pelaksanaannya, sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Perseroan merupakan suatu proses penggabungan tindakan dan kegiatan secara berkesinambungan. Tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh pimpinan Perseroan, melainkan juga oleh karyawan sebagai upaya untuk meyakinkan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai melalui kinerja yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, perlindungan aset, dan ketaatan terhadap regulasi. Dengan demikian, Perseroan tidak hanya memiliki struktur organisasi yang memadai, tetapi juga kebijakan dan infrastruktur yang sistematis dan komprehensif.

In its implementation, the internal audit system applied by the Company is a process of integrating actions and activities in a continuous manner. These actions are not only carried out by the Company's leadership but also by employees as an effort to ensure that the company's objectives are achieved through efficient and effective performance, reliable financial reporting, asset protection, and compliance with regulations. Thus, the Company not only possesses an adequate organizational structure but also systematic and comprehensive policies and infrastructure.

TUJUAN PENGENDALIAN INTERNAL

Perseroan menjalankan sistem pengendalian internal dengan melibatkan beberapa elemen kunci, seperti Lingkungan Pengendalian Internal, pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), Aktivitas Pengendalian, Sistem Informasi dan Komunikasi, serta Monitoring efektivitas sistem pengendalian internal. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi investasi dan aset Perseroan, sambil tetap memastikan kualitas sistem pengendalian internal yang ketat dan efisien.

INTERNAL AUDIT OBJECTIVES

The Company implements an internal audit system involving several key elements, such as the Internal Audit Environment, enterprise risk management (risk assessment), Control Activities, Information and Communication Systems, and the Monitoring of the effectiveness of the internal audit system. The primary objective is to safeguard the company's investments and assets, while ensuring the quality of a rigorous and efficient internal audit system.

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Secara lebih spesifik, sistem pengendalian internal yang diterapkan di Perseroan dapat dijelaskan pada poin-poin berikut:

A. Pengendalian Keuangan
   Sistem pengendalian internal dalam hal keuangan dilakukan guna memberikan jaminan kebenaran informasi keuangan, efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan Perseroan serta aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.

FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROL

Specifically, the internal audit system implemented in the Company can be explained in the following points:

Financial Control

A. The internal audit system in financial matters is implemented to provide assurance of the correctness of financial information, the effectiveness and efficiency of the Company's management process as well as aspects of compliance with related laws and regulations. The Board of Directors must establish an effective internal audit system to safeguard the Company's investments and assets.

B. Pengendalian Operasional
Pengendalian dalam kegiatan operasional yang meliputi kegiatan produksi, penjualan, operasi maupun investasi dilakukan agar tercapainya target Perseroan melalui standar dan sistem manajemen yang berlaku secara nasional maupun internasional oleh bidang sistem manajemen perusahaan.

B. Operational Control
Control in operational activities which includes production, sales, operations and investment activities is carried out in order to achieve the Company's target that is free from fraud and in accordance with the Company's regulations.

KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

Sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), WIKA Beton senantiasa menjalankan operasional bisnisnya dengan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia.

Kami memastikan bahwa setiap kegiatan usaha perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur bidang industri beton pracetak, termasuk namun tidak terbatas pada aspek ketenagakerjaan, lingkungan hidup, perpajakan, persaingan usaha, serta aturan yang diterapkan oleh regulator terkait.

Hingga saat ini, WIKA Beton dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh perusahaan. Setiap potensi risiko hukum diidentifikasi dan ditangani secara proaktif untuk menjaga kepatuhan serta memastikan keberlanjutan operasional yang sehat dan berintegritas.

Sebagai wujud tanggung jawab perusahaan, WIKA Beton juga terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh karyawan terhadap pentingnya patuh pada peraturan yang berlaku melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi.

Dengan demikian, WIKA Beton berkomitmen untuk terus mempertahankan reputasi perusahaan sebagai entitas bisnis yang terpercaya, patuh hukum, dan berkontribusi positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN COSO INTERNAL CONTROL *FRAMEWORK*

Penerapan sistem pengendalian internal di Perseroan mengacu pada metode kerangka pengendalian internal *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Metode ini mencakup lima komponen yang saling terhubung, sebagai berikut:

COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS

As a company committed to upholding the principles of Good Corporate Governance (GCG), WIKA Beton consistently conducts its business operations in full compliance with the laws and regulations applicable within the jurisdiction of the Republic of Indonesia.

We ensure that all business activities are carried out in accordance with the legal provisions governing the precast concrete industry, including but not limited to labor regulations, environmental standards, taxation, fair competition, and requirements set by relevant regulatory bodies.

To date, WIKA Beton affirms that there have been no violations of any applicable laws or regulations by the Company. Potential legal risks are proactively identified and managed to maintain compliance and ensure sustainable operations with integrity.

As part of our corporate responsibility, WIKA Beton continues to enhance the awareness and understanding of all employees regarding the importance of regulatory compliance through various training programs and socialization initiatives.

Thus, WIKA Beton remains steadfast in its commitment to maintaining its reputation as a trusted, law-abiding business entity that contributes positively to all stakeholders.

COMPATIBILITY OF THE INTERNAL AUDIT SYSTEM WITH THE COSO INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

The implementation of the internal audit system at the Company adheres to the methodology of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) internal control framework. This methodology encompasses five interconnected components, as follows:

A. Lingkungan Pengendalian Internal

Manajemen telah menetapkan standar, proses, dan struktur sebagai dasar terlaksananya pengendalian internal secara menyeluruh yang dilaksanakan secara disiplin dan terstruktur. Lingkup pengendalian internal mencakup:

1. Integritas, kompetensi karyawan dan nilai etika yang dianut Perseroan;
2. Filosofi dan gaya manajemen;
3. Parameter-parameter manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
4. Pembagian wewenang dan pengembangan sumber daya manusia, serta arahan yang dilakukan Direksi;
5. Proses untuk menarik, mengembangkan; dan mempertahankan individu yang kompeten serta kejelasan ukuran kinerja;
6. Insentif dan imbalan untuk mendorong akuntabilitas kinerja.

B. Penilaian Risiko

Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha merupakan proses identifikasi, analisis, dan penilaian mengenai pengelolaan risiko yang relevan. Hal ini dilakukan Perseroan antara lain:

1. Menetapkan tujuan yang jelas dalam kategori operasi, pelaporan dan kepatuhan sehingga dapat dilakukan perbandingan antara pelaksanaan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan risiko dapat secepatnya teridentifikasi;
2. Menetapkan lingkup konteks penerapan, identifikasi, analisa, evaluasi, penanganan, pemantauan, dan review serta komunikasi dan konsultasi mengenai kemungkinan risiko;
3. Membuat skala prioritas dalam penanganan risiko-risiko yang strategis, risiko fisik, risiko terhadap kepatuhan hukum, dan lainnya.

C. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian dilaksanakan di seluruh tingkatan dan fungsi Perseroan. Kegiatan pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan. Kegiatan pengendalian dilaksanakan pada semua tingkat organisasi pada berbagai tahap proses bisnis. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya hal-hal berikut:

A. Control Environment

The management has established standards, processes and structures as the basis for the implementation of overall internal audit which is carried out in a disciplined and structured manner. The scope of internal audit includes:

1. Integrity, employee competency and ethical values adopted by the Company;
2. Management philosophy and style;
3. Management parameters in carrying out their authority and responsibility;
4. Distribution of authority and development of human resources, as well as directions made by the Board of Directors;
5. Processes for attracting, developing and retaining competent individuals and clarity of performance measures;
6. Incentives and rewards to drive performance accountability.

B. Risk Assessment

Assessment of business risk management is a process of identifying, analyzing and assessing relevant risk management. This is done by the Company, among others:

1. Setting clear objectives in the categories of operations, reporting and compliance so that comparisons can be made between implementation and established criteria and risks can be identified as soon as possible;
2. Determine the scope of implementation context, identification, analysis, evaluation, handling, monitoring, and review as well as communication and consultation regarding possible risks;
3. Make a priority scale in handling strategic risks, physical risks, risks to legal compliance, and others.

C. Control Activities

Control activities are carried out at all levels and functions of the Company. Control activities include actions determined through policies and procedures to help ensure the implementation of management directives in order to minimize risks in achieving objectives. Control activities are implemented at all organization levels at various stages of the business process. The Board of Directors is responsible for ensuring the implementation of:

1. Proses tinjauan berkala dan pencapaian sasaran kinerja Perseroan;
2. Kepatuhan terhadap perundang-undangan untuk setiap tindakan dan proses yang dilakukan oleh Perseroan;
3. Kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan internal, terutama dalam proses otorisasi, verifikasi dan penanganan hal-hal yang berkaitan dengan aset dan investasi Perseroan.

D. Informasi dan Komunikasi

Perseroan memerlukan informasi demi terselenggaranya fungsi pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan Perseroan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Perseroan harus menyajikan laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan agar dapat mendukung proses pengendalian internal berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

E. Kegiatan Pemantauan

Kegiatan pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat menyajikan informasi tepat waktu.

1. Segala bentuk penyimpangan yang terjadi atas pelaksanaan monitoring dilaporkan kepada Direktur Utama;
2. Monitoring merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menilai kinerja (mutu), Sistem Pengendalian Internal sepanjang waktu dalam bentuk *ongoing monitoring*, evaluasi secara terpisah, atau kombinasi dari kedua bentuk tersebut;
3. *Ongoing monitoring* dilakukan bersamaan dengan proses operasional Perseroan;
4. Monitoring ini mencakup aktivitas pengelolaan dan supervisi reguler dan berbagai hal lain yang dilakukan dalam bentuk aktivitas masing-masing.

1. Periodic review process and achievement of the Company's performance targets;
2. Compliance with laws and regulations for every action and process carried out by the Company;
3. Compliance with the implementation of internal regulations, especially in the process of authorization, verification and handling of matters related to the Company's assets and investments.

D. Information and Communication

The Company requires information for the implementation of internal control functions that support the achievement of the Company's targets. Management must obtain, produce and use relevant and quality information from both internal and external sources. Therefore, the Company must present reports on operational and financial activities, as well as compliance and compliance with statutory provisions in order to support the internal control process to function as expected.

E. Monitoring Activities

Monitoring activities include ongoing evaluation on internal audit system quality, including the internal audit function at each level and unit in the Company's organizational structure so that it can function properly and provide timely information.

1. All forms of irregularities that occur in the implementation of monitoring are reported to the President Director;
2. Monitoring is a process to assess performance (quality), the existing Internal Audit System in the form of on-going monitoring, separate evaluation, or its combinations;
3. On-going monitoring is carried out simultaneously with the Company's operational processes;
4. This monitoring includes regular management and supervision activities as well as other activities carried out in the form of each activity.

PENINGKATAN KAPASITAS PENGENDALIAN INTERNAL

Perseroan secara proaktif mengikuti setiap perubahan atau update terkait pengendalian internal, khususnya yang relevan dengan bidang usaha Perseroan. Pada tahun 2025, Perseroan telah mengikuti berbagai seminar dan sosialisasi yang berkaitan dengan pengendalian internal, antara lain:

1. *Certified Internal Auditor - Professional Recognition Program*
2. *Certified Risk Management Professional (CRMP)*
3. Seminar *A Balance Between Power, Purpose, and Principles*
4. Seminar Pengelolaan Aset BUMN Pasca Pemberlakuan UU BUMN Baru
5. *Awareness ISO 27001*
6. *Emerging Cybersecurity Risk : Trend and Challenges for Internal Audit*
7. Seminar Nasional Internal Audit - *What's Driving Change to Stay Ahead of The Curve for Internal Auditors In The Coming Years?*
8. Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor dan STabilitas Sektor Keuangan
9. *Workshop Manajemen Risiko*
10. *Workshop ITGC*
11. *Workshop Risk Maturity Index*
12. *Workshop Corporate Finance*
13. *Certified Risk Management Officer (CRMO)*
14. *CTO Talk 2025*
15. Penerapan *Engineering, Quality, & HSE Excellence Proyek MRT Jakarta CP 205 Fase 2A*

ENHANCEMENT OF INTERNAL AUDIT CAPACITY

The Company proactively monitors every change or update related to internal control, particularly those pertinent to the Company's business sector. Throughout 2025, the Company has actively participated in various seminars and awareness programs related to internal control, including:

1. Certified Internal Auditor – Professional Recognition Program
2. Certified Risk Management Professional (CRMP)
3. Seminar on Balancing Power, Purpose, and Principles
4. Seminar on the Management of State-Owned Enterprise Assets Following the Implementation of the New SOE Law
5. ISO 27001 Awareness
6. Emerging Cybersecurity Risks: Trends and Challenges for Internal Audit
7. National Internal Audit Seminar: What's Driving Change to Stay Ahead of the Curve for Internal Auditors in the Coming Years?
8. The Role of GRC in Enhancing Investor Confidence and Financial Sector Stability
9. Risk Management Workshop
10. IT General Controls (ITGC) Workshop
11. Risk Maturity Index Workshop
12. Corporate Finance Workshop
13. Certified Risk Management Officer (CRMO)
14. CTO Talk 2025
15. Implementation of Engineering, Quality, and HSE Excellence for the MRT Jakarta Project CP 205 Phase 2A

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA TAHUN BUKU

Secara berkala, SPI mengevaluasi implementasi sistem pengendalian internal secara menyeluruh untuk memastikan kecukupan dan efektivitasnya. Langkah ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada keputusan dan kebijakan Direksi terkait efektivitas sistem yang telah diterapkan. Hasil evaluasi kemudian disampaikan kepada manajemen guna ditindaklanjuti, sambil dipantau pelaksanaannya agar memastikan sistem beroperasi dengan efektif.

SPI bersama dengan Komite Audit, Bidang Manajemen Risiko, dan Bidang Sistem Manajemen bekerja sama untuk, memastikan bahwa penerapan pengendalian internal di Perseroan telah memadai. Audit dilakukan pada

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Periodically, the Internal Audit (SPI) evaluates the comprehensive implementation of the internal audit system to ensure its adequacy and effectiveness. This step aims to provide support for the Board's decisions and policies related to the effectiveness of the implemented system. The evaluation results are then communicated to the management for further action, while monitoring its implementation to ensure the system operates effectively.

SPI, in collaboration with the Audit Committee and the Risk Management & QSHE Department, works together to ensure that the implementation of internal audit in the Company is sufficient. Audits are conducted at various

berbagai tingkatan, termasuk Unit Wilayah Penjualan, Pabrik Produk Beton (PPB), Unit Operasi, Proyek, dan Divisi Kantor Pusat. Evaluasi kualitas dan kecukupan pengendalian internal selalu memperhitungkan prinsip berbasis risiko, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan membentuk budaya sadar risiko dalam setiap aktivitas Perseroan.

levels, including Sales Area Unit, Concrete Product Plant (PPB), Operation Unit, Project, and Head Office Division. The evaluation of the quality and adequacy of internal audit always takes into account risk-based principles, with the goal of enhancing awareness and fostering a risk-conscious culture in every Company activity.

Direksi telah menerima hasil evaluasi atas pengendalian internal tahun 2025 dari SPI. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, beberapa rekomendasi perbaikan ke depan telah diidentifikasi, antara lain:

1. Pengendalian Internal
   Perseroan diharapkan agar lebih meningkatkan pengendalian internal di tingkat unit kerja dengan pengendalian di lini kedua sebagai penanggung jawab (Divisi).
2. Sistem Akuntansi
   Meningkatkan kontrol di bidang akuntansi dengan penerapan sistem akuntansi SAP (*System Application and Product*).

The Board of Directors has received the evaluation results for the internal controls in 2025 from SPI. Based on these evaluation results, several recommendations for future improvements have been identified, including:

1. Internal Control:
   The Company is expected to enhance internal control at the operational unit level, with secondary line controls assigned to divisions for accountability.

2. Accounting System:
   Enhancing accounting oversight through the implementation of the SAP (System Application and Product) accounting system.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi dan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk menyatakan bahwa Perseroan telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPI yang diterapkan mencakup pengendalian keuangan dan operasional, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tinjauan berkala atas efektivitas sistem.

Direksi dan Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Sistem pengendalian internal Perseroan dilaksanakan selaras dengan Piagam Pengawasan Intern, Kebijakan Sistem Pengendalian Internal, Kebijakan Sistem Manajemen Risiko, serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan (CoCG).

Selain itu, Perseroan juga menegaskan komitmennya terhadap penerapan governansi korporat yang baik. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa SPI di PT Wijaya Karya Beton Tbk sudah memadai dan efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional yang mungkin timbul, serta mendukung implementasi governansi korporat yang kuat.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL AUDIT SYSTEM

The Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Beton Tbk confirm that the Company has implemented an Internal Control System (ICS) following applicable regulations. The ICS includes financial and operational controls, compliance with laws and regulations, and regular reviews of the system's effectiveness.

The Board of Directors and the Board of Commissioners also ensure that the Company's internal control system is implemented in accordance with the Internal Audit Charter, the Internal Control System Policy, the Risk Management System Policy, and the Corporate Governance Code (CoCG).

Additionally, the Company reaffirms its commitment to implementing good corporate governance. The Board of Directors and the Board of Commissioners state that the ICS at PT Wijaya Karya Beton Tbk is adequate and effective to identify, assess, monitor, and control potential operational risks, and to support the implementation of strong corporate governance.

Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

Perseroan telah merancang dan menerapkan Sistem Manajemen Risiko yang terintegrasi, memadai, andal, serta terukur pada tingkat korporasi dengan melibatkan seluruh satuan kerja sebagai bagian dari ekosistem pengendalian risiko. Sistem ini dikembangkan sebagai komponen strategis jangka panjang untuk memastikan setiap risiko yang bersifat material dapat diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan dikelola secara konsisten sesuai dengan kebijakan, tata kelola, dan kerangka manajemen risiko Perseroan.

Dalam implementasinya, Perseroan memastikan bahwa prinsip-prinsip manajemen risiko tertanam secara menyeluruh ke dalam proses bisnis, operasional, dan pengambilan keputusan. Integrasi ini memungkinkan sistem berfungsi sebagai early warning system yang efektif, memberikan deteksi dini terhadap potensi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas operasional, kinerja keuangan, maupun keberlanjutan bisnis.

Selain penguatan sistem, Perseroan juga berfokus pada pembangunan budaya sadar risiko di seluruh tingkatan organisasi melalui edukasi, komunikasi, dan pengawasan berkelanjutan. Evaluasi atas efektivitas sistem dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa mekanisme pengendalian, model penilaian risiko, serta kebijakan yang digunakan tetap relevan dengan dinamika bisnis, perkembangan teknologi, dan perubahan regulasi. Dengan pendekatan yang adaptif dan berorientasi ke depan, implementasi manajemen risiko Perseroan mampu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat, responsif, dan berkelanjutan, serta memperkuat resiliensi korporasi dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa mendatang.

Prinsip Manajemen Risiko WIKA Beton

Perseroan mengadopsi delapan prinsip utama Manajemen Risiko untuk memastikan proses penciptaan dan perlindungan nilai berjalan secara efektif, terukur, dan selaras dengan praktik tata kelola yang baik. Kerangka ini menjadi landasan bagi penerapan manajemen risiko yang adaptif dan andal di seluruh jenjang organisasi.

The Company has designed and implemented an integrated, adequate, reliable, and measurable Risk Management System at the corporate level, involving all business units as part of the overall risk control framework. This system has been developed as a long-term strategic component to ensure that all material risks are consistently identified, analyzed, evaluated, and managed in accordance with the Company's risk management policies, governance structure, and framework.

In its implementation, the Company ensures that risk management principles are fully integrated into its business processes, operations, and decision-making activities. This integration enables the system to function as an effective early warning mechanism, providing timely identification of potential risks that may affect operational stability, financial performance, and business sustainability.

In addition to strengthening the system, the Company focuses on building a strong risk awareness culture across all levels of the organization through continuous education, communication, and supervision. The effectiveness of the system is reviewed periodically to ensure that control mechanisms, risk assessment models, and related policies remain relevant to business developments, technological advancements, and regulatory changes. Through an adaptive and forward-looking approach, the Company's risk management implementation supports a healthier, more responsive, and sustainable business environment, while enhancing corporate resilience in addressing future challenges and opportunities.

WIKA Beton Risk Management Principles

The Company adopts eight key Risk Management principles to ensure that value creation and value protection processes are carried out effectively, in a measurable manner, and in line with good corporate governance practices. This framework serves as the foundation for implementing adaptive and reliable risk management across all levels of the organization.

1. **Informasi Terbaik yang Tersedia**
   Pengelolaan risiko didasarkan pada data dan informasi paling relevan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keputusan mitigasi dan respons risiko memiliki akurasi yang tinggi.

2. **Faktor Manusia dan Budaya**
   Perseroan membangun budaya sadar risiko melalui penguatan kompetensi, komunikasi berkelanjutan, dan peran aktif pimpinan sehingga seluruh insan Perseroan memahami perannya dalam mengelola risiko.

3. **Perbaikan Berkesinambungan**
   Kerangka risiko dievaluasi secara periodik untuk memastikan kesesuaian dengan dinamika bisnis, ketentuan regulator, dan efektivitas kontrol internal, serta mendorong peningkatan berkelanjutan.

4. **Terintegrasi**
   Manajemen risiko menjadi bagian dari seluruh proses bisnis, perencanaan strategis, dan pengambilan keputusan, sehingga risiko dapat diidentifikasi dan dikelola secara menyeluruh.

5. **Terstruktur dan Komprehensif**
   Proses pengelolaan risiko disusun secara sistematis, terdokumentasi, dan mencakup seluruh kategori risiko material untuk memastikan pengendalian risiko berjalan konsisten.

6. **Disesuaikan**
   Pendekatan risiko diselaraskan dengan karakteristik usaha, model bisnis, kapasitas modal, dan tingkat kompleksitas Perseroan, sehingga tetap relevan dan proporsional.

7. **Inklusif**
   Perseroan melibatkan berbagai fungsi dan pemangku kepentingan dalam proses identifikasi dan penilaian risiko, guna memperoleh perspektif yang lebih luas dan rekomendasi mitigasi yang akurat.

8. **Dinamis**
   Perseroan secara aktif memantau perubahan lingkungan internal dan eksternal, termasuk perkembangan pasar dan regulasi, sehingga mampu merespons risiko baru secara cepat dan tepat.

1. **Best Available Information**
   The Company builds a risk-aware culture by strengthening competencies, maintaining continuous communication, and ensuring the active involvement of leadership, so that all employees understand their roles and responsibilities in managing risks.

2. **Human and Cultural Factors**
   Risk management is based on the most relevant, up-to-date, and reliable data and information, so that risk mitigation and response decisions are highly accurate.

3. **Continuous Improvement**
   The risk framework is reviewed periodically to ensure its alignment with business dynamics, regulatory requirements, and the effectiveness of internal controls, while supporting continuous improvement.

4. **Integrated**
   Risk management is embedded in all business processes, strategic planning, and decision-making, enabling risks to be identified and managed comprehensively.

5. **Structured and Comprehensive**
   The risk management process is designed in a systematic and well-documented manner and covers all material risk categories to ensure consistent risk control.

6. **Customized**
   The risk approach is aligned with the Company's business characteristics, business model, capital capacity, and level of complexity, so that it remains relevant and proportional.

7. **Inclusive**
   The Company involves various functions and stakeholders in the risk identification and assessment process to obtain broader perspectives and accurate risk mitigation recommendations.

8. **Dynamic**
   The Company actively monitors changes in the internal and external environment, including market developments and regulatory changes, to respond to emerging risks in a timely and appropriate manner.



Dasar Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko

Merujuk pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara yang berkonsep ERM dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Perusahaan Induk.

Dalam upaya mengimplementasikan praktik terbaik tentang Enterprise Risk Management (ERM), Perseroan melaksanakan pengembangan Manajemen Risiko dengan mengadopsi standar nasional SNI 8615:2018 (ADOPSI ISO 31000:2018) (landasan) lain, yaitu diantaranya:

A. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
B. Kebijakan Strategis Perusahaan yang mengatur agar saat menjalankan setiap aktivitas bisnis dan operasionalnya, Perseroan senantiasa menerapkan manajemen risiko guna mencari dan meminimalkan risiko yang berdampak negatif;

Policy Basis and Guidelines for Risk Management Implementation

This policy refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/03/2023 on Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, which adopts the ERM concept, with PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as the Parent Company.

To implement best practices in Enterprise Risk Management (ERM), the Company develops its Risk Management framework by adopting the national standard SNI 8615:2018 (Adoption of ISO 31000:2018) as the main foundation, among others, including:

A. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
B. The Company's Strategic Policy, which requires the Company to consistently apply risk management in all business and operational activities to identify and minimize risks that may have a negative impact;

C. Kebijakan Sistem Manajemen Risiko yang mengatur agar Direksi dan seluruh unit kerja Perseroan dan entitas anak PT Wijaya Karya Beton Tbk wajib menerapkan Manajemen Risiko (Enterprise Risk Management) serta senantiasa melakukan peningkatan budaya sadar risiko secara berkesinambungan berlandaskan Risk Based Thinking (RBT).

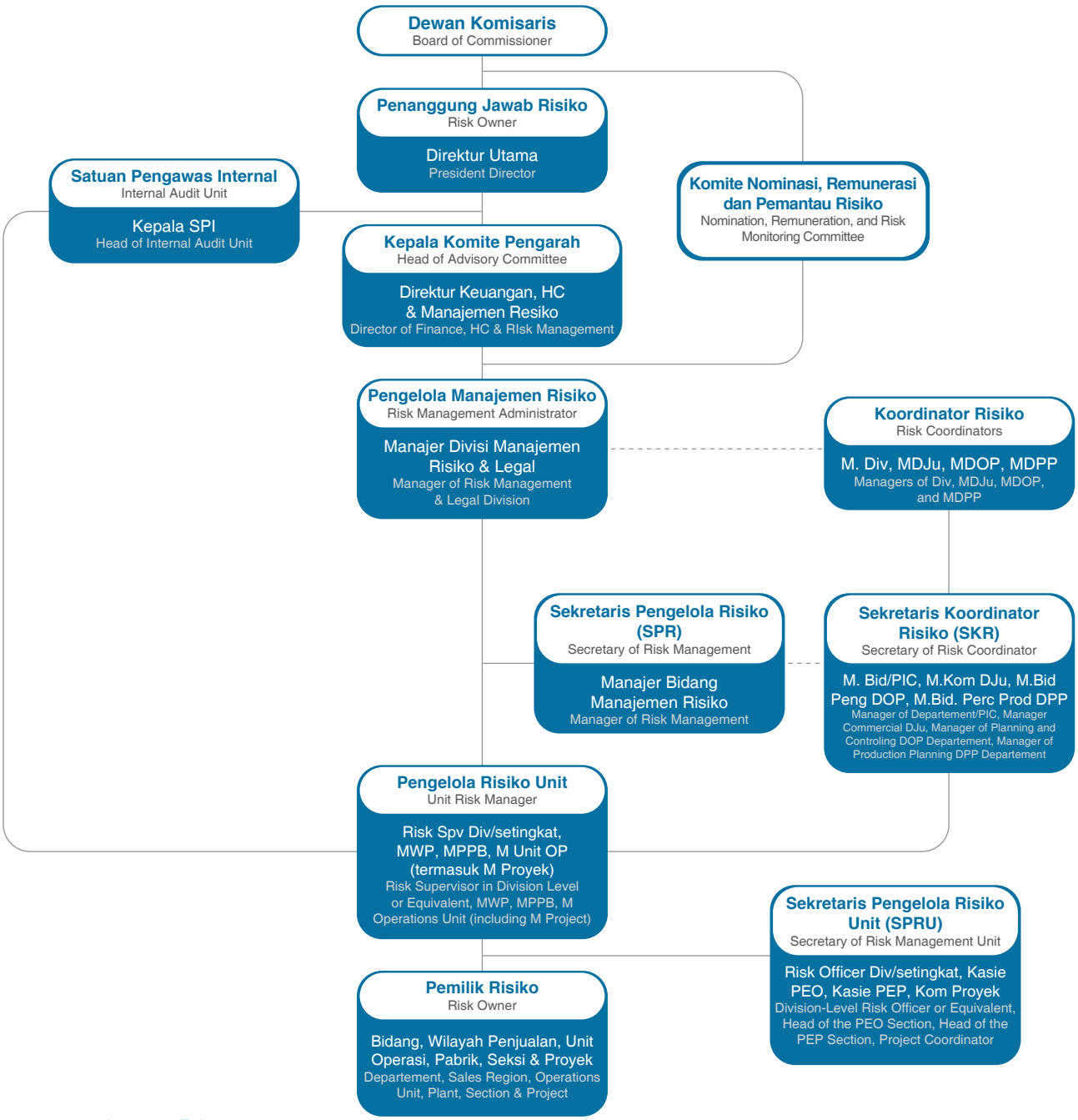
C. The Risk Management System Policy requires the Board of Directors, all work units of the Company, and the subsidiaries of PT Wijaya Karya Beton Tbk to implement Enterprise Risk Management and continuously strengthen a risk-aware culture based on Risk-Based Thinking (RBT).

Struktur Organisasi dan Peran Pengawasan Risiko

Pada tahun 2025, nomenklatur organisasi pengelola manajemen risiko mengacu kepada Pedoman Operasi Perusahaan nomor WB-LDS-PO-01 Revisi 14 tanggal 6 Oktober 2025. Berdasarkan nomenklatur ini, susunan organisasi pengelola manajemen risiko di Perseroan adalah sebagai berikut:

Organizational Structure and Risk Oversight Roles

In 2025, the nomenclature of the risk management organization refers to Decree Company Operating Guidelines No. WB-LDS-PO-01, Revision 14, dated October 6, 2025. Based on this nomenclature, the organizational structure for risk management within the Company is as follows:



Fungsi dan Peran Organ Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi
Functions and Roles of Integrated Risk Management Governance

Organ Tata Kelola Manajemen Risiko Governance Organ of Risk Management	Fungsi Function
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Dewan Komisaris adalah pemegang mandat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengawasi pengurusan perusahaan oleh Direksi, termasuk di dalamnya memastikan bahwa penerapan manajemen risiko berjalan secara efektif dan efisien The Board of Commissioners is mandated by the General Meeting of Shareholders (GMS) to supervise the management of the company by the Board of Directors, including ensuring that risk management is implemented effectively and efficiently.
Penanggung Jawab Risiko Risk Person in Charge	Menetapkan arah dan kebijakan risiko, memastikan implementasinya berjalan efektif dan patuh, menyediakan sumber daya yang memadai, melakukan evaluasi berkala, serta melaporkan profil risiko perusahaan kepada para pemangku kepentingan sesuai ketentuan. Set the direction and risk policies, ensures their effective and compliant implementation, provides adequate resources, conducts periodic evaluations, and reports the company's risk profile to stakeholders in accordance with regulations.
Satuan Pengawas Internal Internal Audit Unit	Berfungsi memberikan assurance independen atas efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal perusahaan, serta bertindak sebagai Lini Ketiga dalam kerangka Three Lines Model. Provides independent assurance on the effectiveness of the company's governance, risk management, and internal controls, and acts as the Third Line in the Three Lines Model framework
Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi Risk Monitoring & Integrated Governance Committee	Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan efektivitas manajemen risiko serta tata kelola terintegrasi di tingkat perusahaan. Assists the Board of Commissioners in overseeing the policies, implementation, and effectiveness of risk management and integrated governance at the corporate level.
Kepala Komite Pengarah Head of the Steering Committee	Berperan memimpin dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan strategis manajemen risiko di tingkat korporat, memastikan sinergi antar fungsi, serta menjembatani arahan Direksi dengan implementasi teknis di organisasi. Leads and directs the implementation of strategic risk management policies at the corporate level, ensures synergy between functions, and bridges the gap between the Board of Directors' directives and technical implementation within the organization.
Pengelola Manajemen Risiko Risk Management Officer	Mengelola dan memfasilitasi pelaksanaan proses manajemen risiko di masing-masing unit kerja, termasuk identifikasi, analisis, evaluasi, pemantauan risiko, serta memastikan pengendalian risiko dilaksanakan sesuai kebijakan perusahaan.Selain itu, berfungsi sebagai penanggunjawab pengembangan, pemeliharaan dan evaluasi sistem manajemen risiko. Manages and facilitates the implementation of risk management processes in each work unit, including identification, analysis, evaluation, risk monitoring, and ensuring that risk control is carried out in accordance with company policy. In addition, serves as the person in charge of developing, maintaining, and evaluating the risk management system.
Sekretaris Pengelola Risiko Secretary of Risk Management	Memberikan dukungan administratif, dokumentasi, pengelolaan data risiko perusahaan, serta penyusunan laporan manajemen risiko sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Providing administrative support, documentation, corporate risk data management, and preparation of risk management reports as a basis for management decision-making.
Koordinator Risiko Risk Coordinator	Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian risiko seluruh divisi Kantor Pusat, Wilayah Penjualan, Pabrik Produk Beton (PPB) dan Unit Operasi. Coordinating the implementation of risk control across all divisions of the Head Office, Sales Regions, Concrete Products Factory (PPB), and Operating Units.
Sekretaris Koordinator Risiko Secretary of the Risk Coordinator	menjalankan fungsi administrasi, pendokumentasian, penyusunan laporan manajemen risiko, serta berperan sebagai fasilitator dan katalisator penerapan sistem manajemen risiko terintegrasi oleh para pemilik risiko. Performing administrative functions, documentation, preparation of risk management reports, and acting as a facilitator and catalyst for the implementation of an integrated risk management system by risk owners
Pengelola Risiko Unit Unit Risk Officer	Mengelola pelaksanaan manajemen risiko masing masing divisi kantor pusat, unit kerja wilayah penjualan unit kerja pabrik produk beton dan unit operasi. Managing the implementation of risk management in each division of the head office, sales region work units, concrete product factory work units, and operating units.
Sekretaris Pengelola Risiko Unit Secretary of the Unit Risk Management Officer	Menjalankan kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengadministrasian dan pendokumentasian pengelola risiko di masing masing unit kerja, Exercising the authority and responsibility to administer and document risk management in each work unit.
Pemilik Risiko Risk Owner	Pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas risiko yang melekat pada proses bisnisnya, termasuk menetapkan konteks risiko, memastikan perlakuan risiko yang efektif dan efisien serta terintegrasi dalam proses bisnis, serta melakukan pemantauan dan pelaporan perubahan profil risiko secara berkala. The party that has the authority and responsibility for the risks inherent in its business processes, including determining the risk context, ensuring effective and efficient risk treatment that is integrated into business processes, and monitoring and reporting changes in the risk profile on a regular basis.

Pelatihan, Seminar dan Sertifikasi Personil Manajemen Risiko

Sosialisasi dan sharing knowledge sangat diperlukan untuk meningkatkan awareness dan menumbuhkan budaya sadar risiko. Oleh karena itu, Perseroan terus memperkuat peranan SDM dalam penerapan sistem manajemen risiko melalui upaya fasilitasi pengembangan kompetensi di bidang manajemen risiko melalui pelatihan internal, seminar, ataupun diskusi internal secara berkala.

Salah satu upaya konkret yang ditempuh Perseroan adalah melalui sosialisasi prosedur dan melakukan sosialisasi setiap unit mengenai prosedur risiko WB-ERM-PS-01 Prosedur Sistem Manajemen Risiko dan WB-LDS-PO-02 Pedoman Sistem Manajemen Risiko.

Training, Seminar and Certification of Risk Management Personnel

Socialization and knowledge sharing are essential to increase awareness and foster a risk-aware culture. Therefore, the Company continues to strengthen the role of human capital in implementing the risk management system by facilitating competency development in risk management through internal training, seminars, and regular internal discussions.

One concrete initiative undertaken by the Company is the socialization of risk management procedures across all units, including the WB-ERM-PS-01 Risk Management System Procedure and the WB-LDS-PO-02 Risk Management System Guidelines.

Nama Name	Jenis Sosialisai, Pendidikan dan Pelatihan Types of Socialization, Education, and Training	Tanggal Pelaksanaan Date
Sosialisasi Budaya Sadar Risiko Risk Awareness Culture Campaigns	Sosialisasi Socialization	13 Juni 2025 June 13, 2025
Sosialisasi Manajemen Risiko Anak Perusahaan Risk Management Campaigns for Subsidiaries	Sosialisasi Socialization	25 Juni 2025 July 25, 2025
Workshop Kertas Kerja Pelaporan Manajemen Risiko Risk Management Reporting Workshop	Workshop Workshop	12 Agustus 2025 August 12, 2025

Metodologi Penilaian Risiko dan Proses Identifikasi Risiko Secara Proaktif dan Berkelanjutan

Perseroan menerapkan Proses Manajemen Risiko secara terstruktur dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan dapat diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan ditangani secara efektif. Kerangka proses ini mengacu pada praktik terbaik internasional dan terintegrasi dalam seluruh aktivitas bisnis.

1. **Lingkup, Konten, dan Kriteria (Scope, Context, Criteria)**
   Tahap awal proses manajemen risiko dimulai dengan penetapan lingkup, konteks, dan kriteria. Perseroan mendefinisikan ruang lingkup risiko, memahami konteks internal dan eksternal, serta menetapkan parameter dan toleransi risiko (risk appetite & risk tolerance). Penetapan ini menjadi dasar konsistensi dalam penilaian dan pengambilan keputusan risiko pada seluruh unit kerja.

Risk Assessment Methodology and Proactive, Continuous Risk Identification Process

The Company implements a structured and continuous Risk Management Process to ensure that risks which may affect the achievement of corporate objectives are identified, analyzed, evaluated, and managed effectively. This process framework refers to international best practices and is integrated into all business activities.

1. **Scope, Context, and Criteria**

   The risk management process begins with the determination of scope, context, and criteria. The Company defines the risk scope, understands the internal and external context, and establishes risk parameters as well as risk appetite and risk tolerance. This determination serves as the basis for consistent risk assessment and decision-making across all work units.

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Penilaian risiko mencakup tiga tahapan utama yang saling terintegrasi:

- Identifikasi Risiko (Risk Identification):
  Perseroan mengidentifikasi seluruh potensi risiko yang dapat muncul dari proses bisnis, aktivitas operasional, perubahan regulasi, kondisi pasar, teknologi, maupun faktor eksternal lainnya.
- Analisis Risiko (Risk Analysis):
  Setiap risiko dianalisis untuk memahami penyebab, dampak, tingkat kemungkinan, serta konsekuensi terhadap operasional dan kinerja perusahaan. Metode analisis dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif sesuai karakteristik risiko.
- Evaluasi Risiko (Risk Evaluation):
  Berdasarkan hasil analisis, risiko dievaluasi terhadap kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan tingkat prioritas dan kebutuhan tindak lanjut. Risiko kemudian dikategorikan untuk memudahkan penentuan strategi mitigasi.

3. Perlakuan Risiko (Risk Treatment)

Pada tahap ini, Perseroan merumuskan dan menetapkan strategi penanganan risiko yang meliputi penghindaran, pengurangan, pemindahan, atau penerimaan risiko. Implementasi tindakan mitigasi dilakukan oleh pemilik risiko (risk owner) dengan koordinasi fungsi manajemen risiko untuk memastikan efektivitas pengendalian.

4. Pemantauan dan Tinjauan (Monitoring & Review)

Proses pemantauan dilakukan secara rutin untuk menilai efektivitas kontrol risiko, perkembangan profil risiko, serta potensi munculnya risiko baru. Perseroan melakukan tinjauan berkala atas efektivitas mitigasi dan menyesuaikan strategi penanganan risiko sesuai dinamika internal dan eksternal.

5. Komunikasi dan Konsultasi (Communication & Consultation)

Komunikasi risiko dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Proses konsultasi membantu memastikan bahwa pemahaman risiko konsisten, tindakan mitigasi tepat sasaran, serta keputusan manajemen didukung informasi yang memadai.

2. Risk Assessment

Risk assessment consists of three main and integrated stages:

- Risk Identification
  The Company identifies all potential risks arising from business processes, operational activities, regulatory changes, market conditions, technology, and other external factors.
- Risk Analysis
  Each risk is analyzed to understand its causes, impacts, likelihood, and consequences for the Company's operations and performance. The analysis may be qualitative or quantitative, depending on the nature of the risk.
- Risk Evaluation
  Based on the analysis results, risks are evaluated against established criteria to determine their priority level and the need for follow-up actions. Risks are then categorized to support the selection of appropriate mitigation strategies.

3. Risk Treatment

At this stage, the Company formulates and determines risk treatment strategies, including risk avoidance, risk reduction, risk transfer, or risk acceptance. Mitigation actions are implemented by the risk owners in coordination with the risk management function to ensure effective controls.

4. Monitoring and Review

Monitoring is conducted regularly to assess the effectiveness of risk controls, changes in the risk profile, and the potential emergence of new risks. The Company performs periodic reviews of mitigation effectiveness and adjusts risk treatment strategies in line with internal and external developments.

5. Communication and Consultation

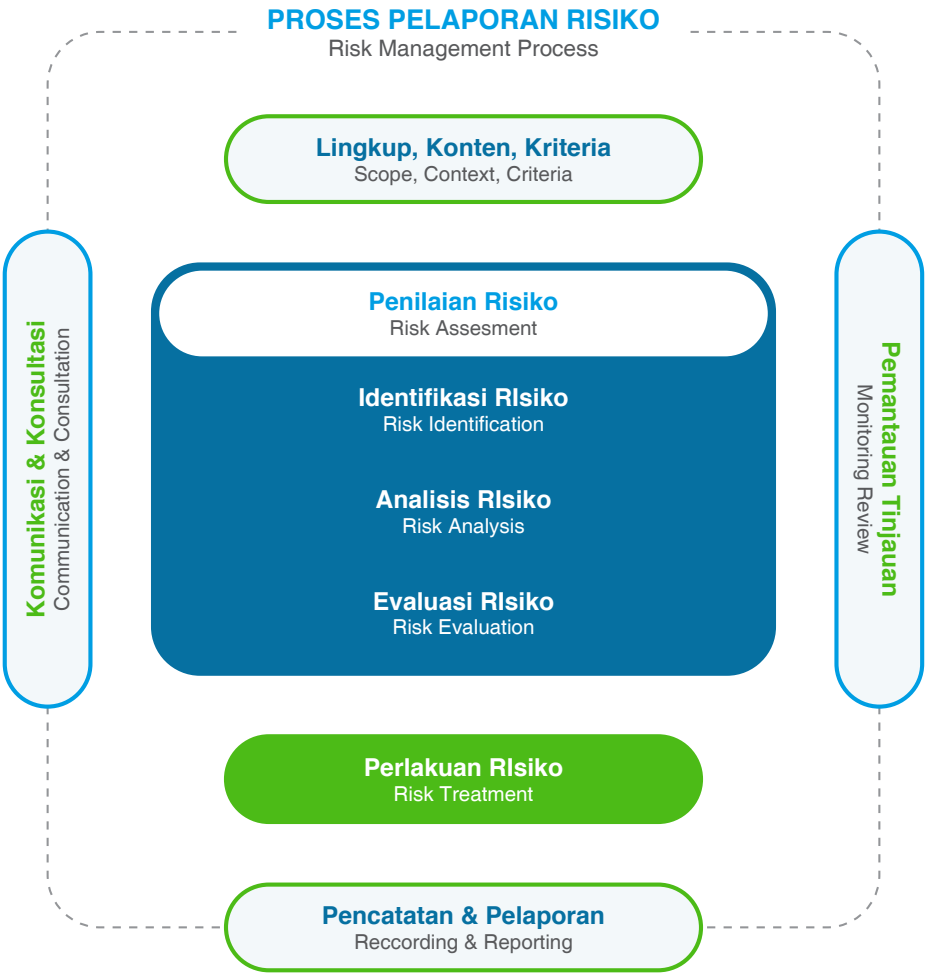
Risk communication is carried out openly and continuously by involving all internal and external stakeholders. The consultation process helps ensure a consistent understanding of risks, appropriate mitigation actions, and management decisions supported by adequate information.

6. **Pencatatan dan Pelaporan (Recording & Reporting)**
Seluruh proses manajemen risiko dicatat secara sistematis untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Pelaporan risiko dilakukan secara berkala kepada manajemen dan Dewan Komisaris, termasuk status mitigasi, indikator risiko utama (KRI), serta perkembangan profil risiko. Dokumentasi ini juga menjadi dasar evaluasi berkelanjutan atas efektivitas kerangka manajemen risiko.

6. **Recording and Reporting**
All risk management processes are recorded systematically to ensure accountability and transparency. Risk reporting is conducted regularly to Management and the Board of Commissioners, including mitigation status, Key Risk Indicators (KRIs), and developments in the risk profile. This documentation also serves as the basis for continuous evaluation of the effectiveness of the risk management framework.

Dengan menerapkan proses manajemen risiko yang menyeluruh tersebut, Perseroan memastikan bahwa risiko dapat dikelola secara proaktif, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

By implementing this comprehensive risk management process, the Company ensures that risks can be managed proactively, measurably, and in line with strategic objectives and good corporate governance principles.



Kesesuaian Proses Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000

Dalam menjalankan manajemen risiko, Perseroan mengikuti standar internasional ISO 31000:2018. Standar ini menjadi acuan utama dalam menerapkan proses manajemen risiko secara menyeluruh. Fokusnya

Compliance with ISO 31000-Based Risk Management Processes

In the execution of risk management, the Company adheres to the international standard ISO 31000:2018. This standard serves as the primary reference for implementing comprehensive risk management

adalah pada pengidentifikasian potensi kejadian yang dapat berdampak pada entitas, pengembangan serta peningkatan kerangka sistem pengelolaan risiko, dan struktur pengendalian internal yang terintegrasi dan menyeluruh. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi dini mengenai potensi risiko yang dapat mempengaruhi hasil perusahaan.

Selain itu, juga dilakukan penyusunan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi yang memadai dan dapat diukur. Bagan berikut memperlihatkan secara rinci proses manajemen risiko di Kantor Pusat dan unit kerja/anak perusahaan.

processes. The focus is on identifying potential events that could impact the entity, developing and enhancing the framework for risk management systems, and establishing an integrated and comprehensive internal control structure. The main objective is to provide early information about potential risks that may affect the company's outcomes.

Furthermore, the Company undertakes the formulation of adequate and measurable steps for anticipation and mitigation. The following diagram provides a detailed overview of the risk management process at the Head Office and the operational units/subsidiaries.

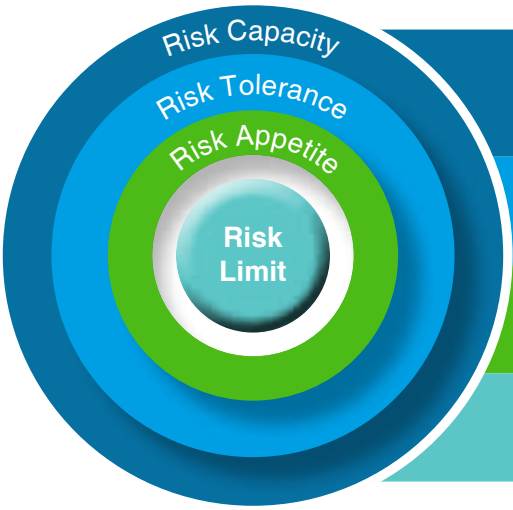
Identifikasi Risiko Risk Identification	**Pengukuran Risiko** Risk Measurement	**Analisis dan Evaluasi** Analysis and Evaluation	**Penyusunan Strategi** Strategy Preparation	**Pengendalian Risiko** Risk Control	**Komunikasi dan Konsultasi** Communication and Consultation
Mendeteksi risiko sedini mungkin pada setiap aktivitas yang berhubungan dengan bidang usaha Detecting risks as early as possible in every activity related to the line of business	Pengukuran tingkat risiko dengan memperhitungkan dampak dan peluang terjadinya risiko Measuring the level of risk by taking into account the impact and opportunity of risk	Analisis dan evaluasi sumber risiko untuk memetakan dan mengendalikan risiko yang signifikan Analysis and evaluation of risk sources to map and control significant risks	Menyusun rencana strategi pengendalian risiko yang mempunyai prioritas tinggi Developing a risk control strategy plan that has high priority	Melakukan kegiatan strategi pengendalian risiko yang membahayakan kelangsungan Perseroan Carrying out strategic risk control activities that endanger the sustainability of the Company	Melakukan komunikasi, konsultasi, review dan pemantauan risiko secara terus menerus Conducting continuous communication, consultation, review, and risk monitoring

Pengelolaan Risiko dan Risk Appetite WIKA Beton

Melalui penerapan kerangka manajemen risiko yang terstruktur, terintegrasi, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, WIKA Beton secara berkesinambungan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas risiko strategis, operasional, keuangan, serta kepatuhan yang berpotensi mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan usaha Perseroan. Penetapan risk appetite dan risk tolerance digunakan sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan bisnis guna memastikan bahwa eksposur risiko yang dihadapi berada dalam batas yang dapat diterima serta sejalan dengan strategi perusahaan dan kapasitas permodalan Perseroan. Sejalan dengan hal tersebut, Tim Manajemen Risiko telah menetapkan kriteria risiko untuk tahun 2025 dan mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi risiko secara sistematis guna menurunkan tingkat kemungkinan dan dampak risiko terhadap Perseroan. Berikut disajikan kriteria risiko dan pelaksanaan mitigasi risiko pada tahun 2025.

Risk Management and Risk Appetite of WIKA Beton

Through the implementation of a structured, integrated risk management framework that is in line with applicable laws and regulations, WIKA Beton continuously identifies, measures, monitors, and controls strategic, operational, financial, and compliance risks that could potentially affect the Company's performance and business continuity. The determination of risk appetite and risk tolerance is used as the main reference in business decision-making to ensure that the risk exposure faced is within acceptable limits and in line with the Company's strategy and business objectives. The determination of risk appetite and risk tolerance is used as the main reference in business decision-making to ensure that the risk exposure faced is within acceptable limits and in line with the company's strategy and capital capacity. In line with this, the Risk Management Team has established risk criteria for 2025 and implemented systematic risk mitigation measures to reduce the level of risk probability and impact on the Company. The following presents the risk criteria and risk mitigation implementation in 2025.



Maksimum nilai Risiko yang dapat ditanggung perusahaan berdasarkan modal, net working capital, likuiditas, total kemampuan pendanaan perusahaan, atau nilai batasan lainnya.

Rp841.480.000.000 (100% dari Net Working Capital)

Nilai batasan Risiko yang bersedia diambil yang dapat ditoleransi dari nilai Selera Risiko. Nilai ini lebih besar dari nilai Selera Risiko.

Rp168.296.000.000 (20% dari Net Working Capital)

Nilai batasan keseluruhan risiko yang bersedia diambil untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Rp84.148.000.000 (10% dari Net Working Capital)

Nilai batasan risiko yang akan didistribusikan dan menjadi acuan bagi unit pemilik risiko.

Rp. 20.201.000.000 (2,4% dari Net Working Capital)

Peristiwa Risiko Risk Events	**Penyebab** Causes	**Dampak Risiko** Risk Impact
Realisasi biaya melebihi RAB Actual costs exceeded the budget estimate	1. Kenaikan harga material melebihi RAB 2. Produktivitas PPB dan Unit Operasi rendah 3. Biaya Tidak Langsung dan Biaya Usaha meningkat 1. Material price increases exceeding the budget 2. Low PPB and Operating Unit productivity 3. Increased indirect and operating costs	Realisasi laba usaha dibawah rencana Business profit realization below plan
Ketidaksiapan lahan proyek Project site unpreparedness Stock bahan baku terbatas/ kesulitan dalam pembelian bahan baku Limited raw material stock / difficulties in purchasing raw materials	1. Site proyek yang belum siap atau keterlambatan kontraktor dalam pekerjaan di proyek. 2. Kesulitan/keterbatasan cash flow 1. Project sites that are not ready or delays by contractors in project work. 2. Difficulties/limitations in cash flow	Munculnya biaya tambahan di luar RAB The emergence of additional costs outside the budget plan
Keterlambatan pencairan termin Delays in disbursement	Penyeliaan dan mitigasi terkait klausul pembayaran dalam kontrak kurang komprehensif Supervision and mitigation related to payment clauses in contracts are not comprehensive enough.	Pembiayaan operasional melalui fasilitas perbankan meningkat (Beban Bunga) Operating financing through banking facilities increased (Interest Expense)
Potensi akan terjadinya perubahan dinamika pasar Potential for changes in market dynamics	1. Perubahan kebijakan dan regulasi pemerintahan baru terkait dengan focus penggunaan porsi APBN 2. Porsi APBN untuk Pembangunan Infrastruktur berkurang 3. Fokus pembangunan Ke arah pendidikan. 1. Changes in policy and regulation by the new administration related to the focus of state budget allocation 2. State budget allocation for infrastructure development has decreased 3. Focus of development has shifted towards education.	Laba tidak tercapai Profit targets not achieved
Peningkatan emisi karbon dan pencemaran lingkungan/GRK yang diakibatkan dari aktivitas operasional Increased carbon emissions and environmental pollution/ GHG resulting from operational activities	1. Regulasi dan kesadaran aspek pengelolaan lingkungan semakin tinggi 2. Lokasi operasional produksi berdekatan dengan lingkungan warga 1. Regulations and awareness of environmental management aspects are increasing 2. Production operations are located close to residential areas	1. Ketidaksesuaian laporan ESG dan reputasi Perusahaan menurun 2. Kerugian Financial 1. Inconsistencies in ESG reporting and declining corporate reputation 2. Financial losses

Rencana Mitigasi Risiko Tahun 2025

Dari penetapan kriteria risiko diatas, Tim Manajemen Risiko Perseroan mendapatkan Risiko inheren dan risiko residual yang merupakan komponen utama dalam

2025 Risk Mitigation Plan

From the determination of the above risk criteria, the Company's Risk Management Team obtained inherent risks and residual risks, which are the main components

kerangka manajemen risiko Perseroan yang digunakan untuk memberikan gambaran tingkat eksposur risiko sebelum dan setelah penerapan pengendalian serta mitigasi risiko. Berikut adalah rencana mitigasi serta target rencana level risiko residual:

in the Company's risk management framework used to provide an overview of the level of risk exposure before and after the implementation of risk control and mitigation. The following are the mitigation plans and target residual risk levels

Peristiwa Risiko Risk Event	**Level Risiko Inheren** Inherent Risk Level	**Rencana Perlakuan Risiko** Risk Treatment Plan	**Rencana Level Risiko Risidual** Residual Risk Level Plan
Realisasi biaya melebihi RAB Actual costs exceeded the budget estimate	High - 24	1. Selektif Proyek dan Pelanggan dengan mempertimbangkan: likuiditas, kemampulabaan dan metode pembayaran. 2. Melakukan mitigasi risiko atas potensi adanya penurunan kualitas produk bersinergi dengan D.QHET, DPP, DJU, DOP dan Unit. 3. Mengoptimalkan pabrik, Batching & Mobile Plant 4. Melakukan review berkala biaya langsung dan BTL PPU sesuai target RKAP. 1. Selective Projects and Customers by considering: liquidity, profitability, and payment methods. 2. Mitigate risks related to potential product quality decline in synergy with D.QHET, DPP, DJU, DOP, and the Unit. 3. Optimize the factory, Batching & Mobile Plant. 4. Conduct periodic reviews of direct costs and BTL PPU in accordance with RKAP targets.	High - 23
Ketidaksiapan lahan proyek Project site unpreparedness Stock bahan baku terbatas/kesulitan dalam pembelian bahan baku Limited raw material stock / difficulties in purchasing raw materials	High - 24	1. Memprioritaskan produksi terhadap perolehan yang likuiditasnya lancar. 2. Monitoring dan kontrol kinerja penjualan secara lebih komprehensif terutama untuk proyek yang berisiko tinggi dan backbone. 3. Menambah klausul term of payment pada kontrak dengan pengakuan progres produksi. 1. Prioritize production over liquid assets. 2. Monitor and control sales performance more comprehensively, especially for high-risk and backbone projects. 3. Add a term of payment clause to contracts with recognition of production progress.	High - 23
Keterlambatan pencairan termin Delays in disbursement	Moderate - 14	1. Mendorong dan menargetkan perolehan kontrak yang memiliki cara pembayaran yang baik. 2. Melakukan pencairan termin korporat dan unit kerja sesuai target RKAP. 1. Encourage and target contracts with favorable payment terms. 2. Disburse corporate and work unit funds in accordance with the RKAP (Work Plan and Budget) targets.	Low to Moderate - 8
Potensi akan terjadinya perubahan dinamika pasar Potential for changes in market dynamics	Moderate - 14	1. Mempertajam sasaran proyek dengan pendanaan swasta dan Capex BUMN 2. Sinergi dengan WIKA Group (captive market) khusus proyek strategis nasional 3. Menargetkan pelanggan potensial untuk meningkatkan perolehan omzet kontrak 4. Pricing Policy dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan ketersediaan kapasitas produksi 5. Mendekatkan plant ke site project berdasarkan feasibility study yang tepat untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 1. Sharpen project targets with private funding and state-owned enterprise capital expenditure 2. Synergy with WIKA Group (captive market) specifically for national strategic projects 3. Target potential customers to increase contract revenue 4. Pricing policy that considers market conditions and production capacity availability 5. Move plants closer to project sites based on appropriate feasibility studies to achieve better results.	Low to Moderate - 9
Peningkatan emisi Increased emissions	Moderate - 13	1. Menggunakan material yang ramah lingkungan dan rendah emisi 2. Mengembangkan sarana dan proses produksi dengan sistem yang ramah lingkungan 3. Melaksanakan program environment untuk mendukung program ESG. 1. Using environmentally friendly and low-emission materials 2. Developing production facilities and processes with environmentally friendly systems 3. Implementing environmental programs to support ESG programs.	Moderate - 8



Realisasi Mitigasi Risiko Tahun 2025

Perseroan telah mengimplementasikan langkah mitigasi risiko sepanjang tahun 2025 sesuai dengan hasil identifikasi dan rencana mitigasi yang dilakukan. Berikut adalah implementasi mitigasi risiko di tahun 2025:

Realization of Risk Mitigation in 2025

The Company has implemented risk mitigation measures throughout 2025 in accordance with the results of the identification and mitigation plans carried out. The following are the risk mitigation implementations in 2025:

Peristiwa Risiko Risk Event	Realisasi Level Risiko Risidual Realization of Residual Risk Level	Realisasi Perlakuan Risiko Realization of Risk Treatment
Realisasi biaya melebihi RAB Actual costs exceeded the budget estimate	High - 24	1. Sudah dilakukan penyeliaan RKP proyek pada saat tender, perolehan dan pelaksanaan 2. Sudah dilakukan review atas BTL dan BIUS menyesuaikan dengan target RKAP 3. Penerapan *Locking Budget* pada struktur biaya usaha dan BTL Unit 15% 4. Sudah dilakukan *review* kinerja atas kebijakan pemerintah dalam struktur anggaran infrastruktur tahun 2025 melalui penyusunan program *stress test* laba Perusahaan terhadap RKAP 2025 5. Saat ini sedang dilakukan kajian terkait rencana pengabungan Pabrik Produk Beton Lampung dengan Pabrik Produk Beton Lampung Selatan 6. Sudah dilakukan evaluasi terkait keberlangsungan operasional WIKA Pracetak Gedung 7. Sudah diterapkan pola operasi minimalis pada pabrik yang produktivitasnya dibawah 50% (Sumatera Utara, Lampung-Lampung Selatan, Sulawesi Selatan) 1. Project RKP supervision has been carried out during the tender, procurement, and implementation phases. 2. A review of BTL and BIUS has been carried out in accordance with RKAP targets. 3. Locking Budget has been applied to the business cost structure and BTL Unit 15%. 4. A performance review of government policy in the 2025 infrastructure budget structure has been carried out through the preparation of a stress test program for the Company's profits against the 2025 RKAP. 5. A study is currently being conducted regarding the planned merger of the Lampung Concrete Products Factory with the South Lampung Concrete Products Factory. 6. An evaluation has been conducted regarding the operational sustainability of WIKA Pracetak Gedung. 7. A minimalist operating pattern has been implemented at factories with productivity below 50% (North Sumatra, Lampung-South Lampung, South Sulawesi).
Ketidaksiapan lahan proyek Project site unpreparedness Stock bahan baku terbatas / kesulitan dalam pembelian bahan baku Limited raw material stock / difficulties in purchasing raw materials	High - 24	1. Sudah dilakukan selektif produksi menyesuaikan dengan *progress* termin dari pelanggan 2. Sudah dilakukan *review* pada proyek *backbone* / berisiko tinggi pada rakor POTOB 3. Pada beberapa kontrak, sudah ditambahkan klausul *term of payment* dengan pengakuan progress produksi 4. Sudah dilakukan *review* kinerja atas kebijakan pemerintah dalam struktur anggaran infrastruktur tahun 2025 melalui penyusunan program *stress test omzet* penjualan terhadap RKAP 2025 5. Sudah dilakukan optimalisasi penjualan atas kontrak yang sudah *on hand* baik kontrak lama maupun kontrak baru 1. Selective production has been carried out in accordance with the customer's progress schedule 2. A review has been conducted on backbone/high-risk projects at the POTOB coordination meeting 3. In several contracts, a term of payment clause has been added with recognition of production progress. 4. A performance review has been conducted on government policy in the 2025 infrastructure budget structure through the preparation of a sales revenue stress test program against the 2025 RKAP. 5. Sales optimization has been carried out on existing contracts, both old and new.
Keterlambatan pencairan termin Delays in disbursement	Moderate - 13	1. Sudah dilakukan reviu atau rakor keuangan pada *profit centre* secara rutin setiap bulan 2. Penetrasi dan strategi yang tepat untuk percepatan pencairan termin kepada Pelanggan 3. Seleksi *project* dengan likuiditas yang baik 1. Financial reviews or coordination meetings have been conducted regularly every month at the profit center. 2. Appropriate penetration and strategies to accelerate installment payments to customers. 3. Selection of projects with good liquidity.

Peristiwa Risiko Risk Event	Realisasi Level Risiko Risidual Realization of Residual Risk Level	Realisasi Perlakuan Risiko Realization of Risk Treatment
Potensi akan terjadinya perubahan dinamika pasar Potential for changes in market dynamics	Low - 4	1. Sudah dilakukan rakor untuk penyeliaan dan mempertajam sasaran proyek dengan pendanaan swasta / asing melalui agenda Sales Engineer Forum pada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli --> Realisasi Omzet Kontrak Baru sd Juli 2025 Rp.2.330 M dari target RKAP sd Juli 2025 Rp.2.847 M dan sudah sesuai dengan Kebijakan Operasi 2025. 2. Sinergi dengan WIKA Group (captive market) khusus proyek strategis nasional --> Realisasi Omzet Kontrak Baru WIKA (Stand Alone) sd Juli 2025 Rp. 123,00 M 3. Target proyek backbone yang sudah didapat sampai dengan Juli 2025 antara lain : • PT Indah Kiat Pulp & Paper Jembatan akses utama IKK (PI,BR,PT) Rp.158,50 M • PT Hutama Karya Infrastruktur - Toll Betung Jambi Seksi 2B (RD) Rp. 80.96 M • PT Duta Graha Karya - Toll Kataraja tahap 2 (PI&BR) Rp.138 M 4. Kajian / feasibility study yang tepat untuk memperoleh komposisi harga yang baik dilakukan oleh unit operasi dengan konsep mobile plant 5. Sudah dilakukan Pricing Policy dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan persaingan yang terjadi saat ini di wilayah DKI Jabar, Jateng dan Jatim 6. Melakukan renegosiasi pada vendor dan mitra kerja untuk mendapatkan harga yang optimal sehingga meningkatkan kebersaingan harga jual produk WIKA Beton 1. A coordination meeting has been held to supervise and refine project targets with private/foreign funding through the Sales Engineer Forum agenda in January, February, March, April, May, June, and July. --> Realization of New Contract Turnover until July 2025 is Rp2,330 million from the RKAP target until July 2025 of Rp2,847 million and is in accordance with the 2025 Operating Policy. 2. Synergy with WIKA Group (captive market) specifically for national strategic projects --> Realization of WIKA's New Contract Turnover (Stand Alone) until July 2025 is Rp123.00 million 3. The backbone project targets that have been obtained until July 2025 include: • PT Indah Kiat Pulp & Paper Main access bridge IKK (PI, BR, PT) Rp158.50 million • PT Hutama Karya Infrastruktur - Betung Jambi Toll Road Section 2B (RD) Rp80.96 million • PT Duta Graha Karya - Kataraja Toll Road phase 2 (PI & BR) Rp138 million 4. Appropriate studies/feasibility studies to obtain a good price composition are carried out by the operating unit using the mobile plant concept. 5. A pricing policy has been implemented, taking into account current market conditions and competition in the DKI Jakarta, Central Java, and East Java regions. 6. Renegotiations are being conducted with vendors and partners to obtain optimal prices, thereby increasing the competitiveness of WIKA Beton's product prices.
Peningkatan emisi karbon dan pencemaran lingkungan / GRK yang diakibatkan dari aktivitas operasional Increased carbon emissions and environmental pollution/ GHG caused by operational activities	Low - 1	1. Sudah dilakukan pemakaian semen ramah lingkungan (semen PCC) 2. Sudah terpasang PLTS di PPB Bogor dan PPB Majalengka substitusi sumber listrik PLN 3. Score ESG Rating S&P Global WIKA Beton 2024 adalah 46 4. Dilakukan pengukuran nilai emisi kendaraan operasional dan alat berat secara terjadwal 1. Environmentally friendly cement has been used (PCC cement) 2. Solar power plants have been installed at the Bogor and Majalengka PPBs to substitute PLN electricity sources 3. S&P Global WIKA Beton's 2024 ESG Rating score is 46 4. Scheduled measurements of emissions from operational vehicles and heavy equipment are carried out

Integrasi Manajemen Risiko dalam Perencanaan Bisnis dan Pengambilan Keputusan

Perseroan memandang integrasi manajemen risiko sebagai elemen fundamental dalam memastikan kesinambungan usaha, kualitas operasional, serta pencapaian kinerja yang berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko terintegrasi dilakukan secara sistematis sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta mengacu pada kerangka Enterprise Risk Management (ERM) yang berlaku.

Perseroan mengimplementasikan manajemen risiko berdasarkan kebijakan korporasi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan ini memastikan bahwa seluruh proses perencanaan bisnis, penyusunan strategi, dan pengambilan keputusan berjalan sejalan

Integration of Risk Management into Business Planning and Decision-Making

The Company considers the integration of risk management as a fundamental element in ensuring business sustainability, operational quality, and the achievement of sustainable performance. Integrated risk management is implemented systematically in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG) and the applicable Enterprise Risk Management (ERM) framework.

The Company implements risk management based on corporate policies approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors. These policies ensure that all business planning, strategy

dengan risk appetite dan risk tolerance yang telah ditetapkan. Mekanisme ini juga selaras dengan praktik terbaik industri serta mengacu pada ketentuan regulator, termasuk perkembangan standar pelaporan keberlanjutan dan pengelolaan risiko operasional.

1. **Integrasi dalam perencanaan bisnis**
   Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta rencana strategis jangka menengah-panjang, Perseroan melakukan proses penilaian risiko terhadap seluruh asumsi bisnis kunci, antara lain:
   - Ketersediaan dan fluktuasi harga bahan baku utama seperti semen, agregat, dan aditif beton.
   - Kapasitas produksi, keandalan mesin, serta kebutuhan pemeliharaan atau investasi peralatan.
   - Kondisi rantai pasok termasuk risiko keterlambatan pengiriman, ketergantungan pemasok kritikal, dan dinamika pasar konstruksi.
   - Profil risiko proyek konstruksi seperti potensi keterlambatan, perubahan desain, kondisi geoteknik, dan risiko keselamatan kerja.

   Temuan dan analisis risiko tersebut digunakan sebagai dasar dalam penetapan target kinerja, prioritas investasi, strategi efisiensi, serta pengembangan skenario kontinjensi. Integrasi ini memastikan bahwa rencana bisnis Perseroan memiliki tingkat kesiapan yang memadai terhadap dinamika internal maupun eksternal.

2. **Integrasi dalam Decision Making**
   Perseroan menerapkan pendekatan risk-based decision making, di mana setiap keputusan strategis dan operasional dilakukan melalui evaluasi risiko yang objektif dan terdokumentasi. Mekanisme ini mencakup:
   - Kajian risiko terhadap proyek baru, investasi fasilitas produksi, ekspansi pasar, dan penawaran tender.
   - Penilaian kelayakan proyek berbasis risiko yang mencakup aspek teknis, finansial, operasional, kepatuhan, serta keselamatan dan lingkungan.
   - Penggunaan indikator risiko utama (Key Risk Indicators/KRI) sebagai sistem peringatan dini untuk memastikan pengendalian risiko proyek, produksi, dan kualitas layanan.

formulation, and decision-making processes are aligned with the established risk appetite and risk tolerance. This approach is also consistent with industry best practices and complies with regulatory requirements, including developments in sustainability reporting standards and operational risk management.

1. **Integration into Business Planning**
   In preparing the Company Work Plan and Budget (RKAP) as well as medium- and long-term strategic plans, the Company conducts risk assessments on all key business assumptions, including the following:
   - Availability and price volatility of key raw materials such as cement, aggregates, and concrete additives.
   - Production capacity, machine reliability, and requirements for equipment maintenance or investment.
   - Supply chain conditions, including the risk of delivery delays, dependence on critical suppliers, and developments in the construction market.
   - Construction project risk profiles, including potential delays, design changes, geotechnical conditions, and occupational safety risks.

   The results and analysis of these risks are used as the basis for setting performance targets, investment priorities, efficiency strategies, and the development of contingency scenarios. This integration ensures that the Company's business plans are adequately prepared to address both internal and external dynamics.

2. **Integration into Decision-Making**
   The Company applies a risk-based decision-making approach, in which all strategic and operational decisions are made through objective and well-documented risk evaluations. This mechanism includes the following:
   - Risk assessments for new projects, production facility investments, market expansion, and tender proposals.
   - Risk-based project feasibility assessments covering technical, financial, operational, compliance, as well as health, safety, and environmental aspects.
   - Use of Key Risk Indicators (KRIs) as an early warning system to ensure effective risk control over projects, production, and service quality.

Seluruh keputusan strategis tunduk pada penilaian apakah risiko yang melekat berada dalam batas risk appetite yang dapat diterima Perseroan. Dalam kondisi tertentu, mitigasi tambahan seperti diversifikasi pemasok, peningkatan kapasitas pengendalian mutu, penyesuaian jadwal proyek, atau penggunaan proteksi asuransi diterapkan sebelum keputusan disahkan.

All strategic decisions are assessed to ensure that the inherent risks remain within the Company's acceptable risk appetite. In certain cases, additional mitigation measures, such as supplier diversification, enhanced quality control capacity, project schedule adjustments, or the use of insurance coverage, are implemented before decisions are approved.

Evaluasi dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Melalui penilaian berkala, Perseroan mewujudkan komitmennya terhadap implementasi manajemen risiko yang efisien dan efektif. Penilaiannya melibatkan tiga mekanisme, yaitu:

1. **Audit oleh SPI**
   Audit berbasis risiko yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) menjadi mekanisme berkala yang diterapkan dalam mengukur tingkat risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnis Perseroan. Penetapan objek audit dan fokus audit diprioritaskan mulai dari risiko yang paling besar hingga risiko yang paling kecil. Berdasarkan audit tersebut, hasil evaluasi akan disampaikan kepada Direksi bersamaan dengan aktivitas Perseroan yang berpengaruh signifikan pada Perseroan untuk kemudian ditetapkan langkah antisipasi dan mitigasinya.

2. **Audit Internal (AI)**
   Audit internal dilaksanakan setiap semester di seluruh Unit Kerja tidak terkecuali Direksi, yang dilakukan oleh Tim Internal perusahaan yang telah dibekali pengetahuan untuk melakukan tugasnya. Audit Internal meliputi audit atas pelaksanaan Manajemen ISO, Manajemen Peralatan, SMK3 dan Manajemen Risiko. Selanjutnya, temuan Audit Internal harus diperbaiki oleh Unit Kerja terkait yang tertuang dalam Rencana Tindakan Preventif (RTP) yang juga dimonitor secara berkala pelaksanaannya. Hasil audit juga dilaporkan ke Direksi termasuk evaluasi performa masing-masing Unit Kerja.

3. **Assessment Risk Maturity oleh Konsultan Independen Perseroan**
   Dalam memfokuskan pengukuran risiko secara lebih akuntabel dan independen, Perseroan menunjuk Konsultan Manajemen Risiko independen secara

Evaluation and Effectiveness of the Risk Management System

Through periodic assessments, the Company demonstrates its commitment to implementing an efficient and effective risk management system. The evaluation is carried out through three mechanisms, as follows:

1. **Audit by SPI**
   Risk-based audits conducted by the Internal Audit Unit serve as a periodic mechanism to measure the level of risk faced in the Company's business activities. Audit objects and audit focus are prioritized from the highest to the lowest risk. Based on the audit results, evaluation findings are reported to the Board of Directors together with significant activities that may affect the Company, so that appropriate anticipatory and mitigation measures can be determined.

2. **Internal Audit**
   Internal audits are conducted every semester across all work units, including the Board of Directors, and are carried out by an internal team equipped with the necessary knowledge and competencies. The internal audits cover the implementation of ISO Management Systems, Equipment Management, OHSE), and Risk Management. Any internal audit findings must be addressed by the relevant work units through a Preventive Action Plan (RTP), the implementation of which is monitored regularly. Audit results are also reported to the Board of Directors, including an evaluation of the performance of each work unit.

3. **Assessment Risk Maturity by Independent Consultant**
   To ensure more accountable and independent risk measurement, the Company periodically appoints

berkala untuk melakukan pengukuran tingkat pencapaian pelaksanaan serta memberikan rekomendasi perbaikan manajemen risiko. Objek assessment adalah organ Perseroan yang dimulai dari Direksi sampai dengan tingkat manajemen di lapangan. Pemetaan hasil audit kemudian akan menjadi perbandingan atas pencapaian praktik manajemen risiko pada periode sebelumnya serta menghasilkan sejumlah rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan untuk tahap berikutnya.

Pada tahun 2025, Perseroan meninjau efektivitas manajemen risiko dengan melakukan internal assessment WIKA Group. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kematangan penerapan manajemen risiko (risk maturity) dalam Perseroan. Skor hasil penilaian pada angka 2.21 menunjukkan bahwa tingkat kematangan manajemen risiko Perseroan dianggap memadai, yang berarti Perseroan dapat menghindari dampak eksposur risiko yang telah diidentifikasi.

Kepatuhan Perseroan Terhadap Regulasi

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan kepatuhan secara menyeluruh sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan memastikan bahwa seluruh kebijakan, prosedur, proses operasional, dan pengambilan keputusan telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar regulator sektoral, serta praktik terbaik industri.

Selama tahun pelaporan, Perseroan tidak hanya memastikan pemenuhan terhadap regulasi inti yang mengatur kegiatan usaha, tetapi juga terhadap ketentuan pendukung lainnya yang meliputi standar pelaporan, ketenagakerjaan, lingkungan, perpajakan, perlindungan konsumen, keamanan informasi, serta aspek keberlanjutan/ESG sesuai ketentuan OJK dan standar internasional. Seluruh temuan audit kepatuhan dipantau secara berkala, dan tindakan korektif maupun preventif dilaksanakan untuk menjaga tingkat kepatuhan.

Inovasi dan Peningkatan Berkelanjutan dalam Praktik Manajemen Risiko

Perseroan secara konsisten mendorong inovasi dan peningkatan berkelanjutan dalam praktik manajemen risiko sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan

an independent Risk Management Consultant to assess the level of implementation and provide recommendations for improving risk management practices. The assessment covers the Company's governance bodies, ranging from the Board of Directors to operational management at the field level. The mapping of assessment results is then used to compare the achievement of risk management practices with previous periods and to generate recommendations for improvement and enhancement in subsequent stages.

In 2025, the Company reviewed the effectiveness of its risk management by conducting an internal assessment within the WIKA Group. The purpose of this assessment was to evaluate the level of risk management maturity within the Company. The assessment score of 2,21 indicates that the Company's risk management maturity is considered adequate, meaning that the Company can avoid the impacts of the identified risk exposures.

Company Compliance with Regulations

The Company is committed to comprehensive compliance as an integral part of good corporate governance. In conducting its business activities, the Company ensures that all policies, procedures, operational processes, and decision-making are aligned with applicable laws and regulations, sectoral regulatory standards, and industry best practices.

During the reporting year, the Company ensured compliance not only with core regulations governing its business activities, but also with supporting requirements, including reporting standards, labor regulations, environmental regulations, taxation, consumer protection, information security, and sustainability/ESG aspects in accordance with OJK regulations and international standards. All compliance audit findings are monitored regularly, and corrective and preventive actions are implemented to maintain a high level of compliance.

Innovation and Continuous Improvement in Risk Management Practices

The Company consistently promotes innovation and continuous improvement in its risk management

operasional dan menjaga kualitas eksekusi proyek. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha, Perseroan mengembangkan pendekatan pengelolaan risiko yang lebih proaktif melalui penerapan IT sistem Real-Time Monitoring pada proyek-proyek yang sedang berjalan. Sistem ini memungkinkan Perseroan untuk melakukan pengawasan secara lebih terintegrasi, akurat, dan responsif terhadap berbagai indikator kinerja proyek, sehingga potensi deviasi dapat teridentifikasi lebih dini sebelum berkembang menjadi risiko yang lebih material.

Penerapan sistem tersebut juga didukung dengan fitur early warning alert yang memberikan notifikasi secara otomatis apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam aspek anggaran, spesifikasi produk, maupun progres pelaksanaan proyek. Dengan demikian, manajemen dapat segera melakukan evaluasi dan tindak lanjut korektif secara tepat waktu guna menjaga disiplin biaya, kepatuhan terhadap standar mutu, serta pencapaian target operasional. Inisiatif ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk terus memperkuat kapabilitas manajemen risiko melalui pemanfaatan teknologi dan data, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola proyek yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi atas Efektivitas Manajemen Risiko WIKA Beton

Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk menyatakan bahwa Sistem Manajemen Risiko Perseroan telah diterapkan secara memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan mencakup identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian dan mitigasi risiko, serta pemantauan dan evaluasi.

Selain itu, sistem ini juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang relevan. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Sistem Manajemen Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk sudah memadai untuk mendukung pengelolaan risiko yang efektif, melindungi aset Perseroan dan memastikan kelangsungan usaha dalam lingkungan yang dinamis.

practices as part of its efforts to strengthen operational resilience and maintain the quality of project execution. In line with the increasing complexity of its business activities, the Company has developed a more proactive risk management approach through the implementation of a real-time monitoring IT system across ongoing projects. This system enables the Company to conduct more integrated, accurate, and responsive oversight of various project performance indicators, allowing potential deviations to be identified at an early stage before they develop into more material risks.

The implementation of this system is further supported by an early warning alert feature that provides automatic notifications in the event of any indications of discrepancies in budget, product specifications, or project progress. This allows management to promptly carry out evaluations and take timely corrective actions to ensure cost discipline, compliance with quality standards, and the achievement of operational targets. This initiative reflects the Company's commitment to continuously strengthening its risk management capabilities through the utilization of technology and data, while also supporting the establishment of more effective, accountable, and value-driven project governance.

Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Effectiveness of WIKA Beton's Risk Management

The Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee of PT Wijaya Karya Beton Tbk state that the Company's Risk Management System has been implemented adequately in accordance with applicable regulations. The Risk Management System covers risk identification, risk measurement, risk control and mitigation, as well as risk monitoring and evaluation.

In addition, the system ensures compliance with relevant regulations. The Board of Directors and the Board of Commissioners confirm that the Risk Management System of PT Wijaya Karya Beton Tbk is adequate to support effective risk management, protect the Company's assets, and ensure business continuity in a dynamic environment.

Perkara Hukum Yang Berdampak Material
Legal Cases With Material Impact

Pada tahun 2025, Perseroan tidak menghadapi perkara hukum apapun, baik yang memiliki dampak material maupun melibatkan Perseroan.

In 2025, the Company was not subject to legal cases that have a material impact or involve the Company.

Perkara hukum yang Dihadapi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Selama Tahun Buku

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat kasus hukum apapun, baik yang bersifat perdata maupun pidana, yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau memiliki dampak material bagi Perseroan.

Legal Cases Faced by Members of the Board of Commissioners and Board of Directors in Fiscal Year

Throughout 2025, all members of the Board of Commissioners and Board of Directors were not involved in any legal cases, both civil and criminal, which have a material impact on the Company.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat Entitas Anak Perseroan yang terlibat dalam kasus hukum apapun, baik yang bersifat perdata maupun pidana, yang memiliki dampak material baik bagi entitas anak maupun bagi Perseroan.

LEGAL CASES FACED BY THE COMPANY'S SUBSIDIARIES

Throughout 2025, there were no Subsidiaries involved in any legal cases, both civil or criminal, which have a material impact on both the subsidiaries and the Company.

Informasi Tentang Sanksi Administratif
Information About Administrative Sanctions

Sepanjang tahun 2025, tidak ada sanksi administrasi yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas lainnya kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris, ataupun Direksi.

During the year of 2025, no administrative sanctions have been imposed by the Financial Services Authority (OJK) or any other regulatory authorities on the Company, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors.

Hal ini mencerminkan komitmen kami untuk menjalankan kegiatan usaha dengan penuh integritas serta kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

This reflects our commitment to conducting business operations with integrity and full compliance with applicable laws and regulations.

PT Wijaya Karya Beton Tbk terus memastikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) diterapkan secara konsisten di setiap tingkatan organisasi.

PT Wijaya Karya Beton Tbk continues to ensure that Good Corporate Governance is consistently implemented at all levels of the organization.

Kode Etik Dan Budaya Perseroan
Code Of Conduct And Corporate Culture

Sejalan dengan perkembangan regulasi dan ekspektasi Pemangku Kepentingan, Perseroan secara berkala memperbaharui Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct). Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan terakhir diperbarui melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK.01.01WB-0A.0037/2024 tanggal 6 September 2024, dengan merujuk pada Anggaran Dasar, budaya Perseroan, nilai-nilai Good Corporate Governance serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk membangun hubungan yang efektif, bernilai tambah, dan saling pengertian antara Perseroan dan Pemangku Kepentingan, sekaligus menjaga kepatuhan dan reputasi Perseroan.

In line with regulatory developments and stakeholder expectations, the Company regularly updates its Code of Ethics and Conduct. The most recent update was approved through the Joint Resolution of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. SK.01.01WB-0A.0037/2024 dated September 6, 2024, with reference to the Articles of Association, the Company's culture, Good Corporate Governance principles, and applicable laws and regulations. This update reflects the Company's commitment to building effective, value-adding, and mutually respectful relationships with stakeholders, while maintaining compliance and safeguarding the Company's reputation.

Kode Etik dan Budaya Perseroan ini menjadi rujukan perilaku bagi seluruh Insan WIKA Beton dalam menjalankan aktivitas usaha dan berinteraksi dengan Pemangku Kepentingan. Nilai-nilai perusahaan yang diinternalisasikan melalui Kode Etik diintegrasikan ke dalam proses bisnis, sistem manajemen, serta program pengembangan SDM, sehingga budaya Perseroan tidak hanya menjadi slogan, tetapi tercermin dalam keputusan dan tindakan sehari-hari.

The Company's Code of Conduct and Culture serves as a behavioral guideline for all WIKA Beton employees in conducting business activities and interacting with stakeholders. The corporate values embedded in the Code of Ethics are integrated into business processes, management systems, and human capital development programs, ensuring that the Company's culture is not merely a slogan but is reflected in daily decisions and actions.

POKOK-POKOK KODE ETIK
CODE OF CONDUCT PRINCIPLES

Pedoman dan Etika Perilaku (*Code of Conduct*) Perseroan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Etika Bisnis Perseroan merupakan penjelasan tentang bagaimana Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika, dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perseroan dengan kepentingan stakeholders sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perseroan. Etika Bisnis Perseroan mengatur tentang:
   a. Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan;
   b. Pemberian dan penerimaan hadiah/gratifikasi, suap dan lainnya;
   c. Kepedulian terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH);
   d. Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hak Asasi Manusia;

The Company's Code of Conduct is divided into (3) three sections, namely:

1. Business Ethics of the Company explains how the Company, as a business entity, behaves and acts to balance the interests of the Company with those of stakeholders in accordance with the principles of GCG and healthy corporate values while maintaining the Company's profitability. Business Ethics of the Company governs:
   a. Compliance with legal regulations;
   b. Giving and receiving gifts/gratuities, bribery, and others;
   c. Concern for Occupational Health and Safety and Environmental Health (K3LH);
   d. Respect, Recognition, and Enforcement of Human Rights;

e. Pemberian kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mendapatkan penugasan, promosi dan pemberhentian kerja;
   a. Etika terkait stakeholders;
   b. Standar etika jajaran manajemen dan pegawai;
   c. Integritas laporan keuangan.

2. Etika Perilaku Insan Perseroan, adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh setiap Pimpinan dan Pegawai dalam melaksanakan tugasnya termasuk etika hubungan antar Pegawai dan Perseroan. Etika Perilaku Insan Perseroan mengatur tentang:
   a. Komitmen Insan Perseroan;
   b. Manajemen Risiko;
   c. Menjaga nama baik Perseroan;
   d. Keterbukaan informasi;
   e. Menjaga hubungan baik antar insan Perseroan;
   f. Melindungi informasi rahasia Perusahaan (*Intangible Asset*);
   g. Pengelolaan data Perusahaan dan penyusunan laporan;
   h. Menjaga dan menggunakan Aset Perusahaan;
   i. Menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup;
   j. Pelarangan insider trading;
   k. Memberi dan/atau menerima Hadiah, Jamuan, Hiburan, dan Donasi;
   l. Benturan kepentingan;
   m. Pengelolaan anak perusahaan; dan
   n. Aktivitas Politik.

3. Penegakan dan Pelaporan, meliputi mekanisme pelaporan dan pelanggaran sanksi, mengatur tentang:
   a. Pelaporan Pelanggaran;
   b. Sosialisasi dan Internalisasi;
   c. Konsultasi dan Pelaporan Masalah;
   d. ekanisme Pelaporan Pelanggaran;
   e. Sanksi atas Pelanggaran.

e. Equal opportunities for employees in assignments, promotions, and terminations;
   a. Ethics related to stakeholders;
   b. Ethical standards for management and employees;
   c. Integrity of financial reports.

2. Human Behavior Ethics of the Company is the value system or norms embraced by every Leader and Employee in performing their duties, including ethics in interpersonal relationships between Employees and the Company. Human Behavior Ethics of the Company regulates:
   a. Commitment of the Company's personnel;
   b. Risk Management;
   c. Maintaining the Company's reputation;
   d. Information transparency;
   e. Maintaining good relationships among the Company's people;
   f. Protection of Company confidential information (Intangible Asset);
   g. Company data management and report preparation;
   h. Maintenance and use of Company Assets;
   i. Ensuring Occupational Health and Safety and Environmental Health;
   j. Prohibition of insider trading;
   k. Giving and/or receiving gifts, banquets, entertainment, and donations;
   l. Conflict of interest;
   m. Management of subsidiaries; and
   n. Political activities.

3. Enforcement and Reporting include reporting mechanisms and violation sanctions, governing:
   a. Reporting Violations;
   b. Socialization and Internalization;
   c. Consultation and Reporting of Issues;
   d. Violation Reporting Mechanisms;
   e. Sanctions for Violations.

BENTUK SOSIALISASI KODE ETIK DAN UPAYA PENEGAKANNYA
FORMS OF CODE OF CONDUCT SOCIALIZATION AND ENFORCEMENT EFFORTS

Perseroan secara rutin menyosialisasikan Kode Etik kepada seluruh pihak yang berkepentingan di berbagai tingkatan organisasi untuk memastikan pemahaman yang tepat dan seragam. Tanggung jawab mensosialisasikan standar etika Perseroan kepada seluruh karyawan berada di tangan manajemen Perseroan.

Regularly, the Company disseminates the Code of Conduct to all stakeholders at every level to ensure accurate, fair, and proper understanding. The responsibility for socializing the Company's ethical standards to all employees rests with the Company's management.

Berbagai acara digelar untuk menyosialisasikan dan menekankan penerapan kode etik kepada karyawan di berbagai level manajemen. Sebagai contoh, dalam situasi di mana terjadi perubahan terkait Peraturan Perusahaan di bidang kepegawaian, Tim Manajemen akan mengadakan sosialisasi di seluruh unit kerja untuk memastikan tersampaikannya perubahan tersebut oleh semua karyawan.

Various events are organized to socialize and emphasize the implementation of the ethical code to employees at various management levels. For instance, in situations involving changes in Company Regulations related to employment, the Management Team conducts socialization across all units to ensure that all employees are informed of these changes.

Pada tahun 2025, Perseroan menyelenggarakan sosialisasi Kode Etik kepada Pegawai pada tanggal 17 Desember 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui media Zoom meeting dan melalui media lainnya seperti website Perseroan atau platform lainnya.

In 2025, the Company conducted the socialization of the Code of Conduct to employees on December 17, 2025, online through a Zoom meeting platform and other platforms such as Company's website or other platforms.

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Sanksi akan diberikan kepada setiap individu Perseroan yang terbukti melanggar *Code of Conduct*, sesuai dengan kebijakan dan peraturan hukum yang berlaku. Sanksi yang berlaku saat ini mencakup:

1. Sanksi bagi karyawan yang melanggar Kode Etik diputuskan oleh Atasan Langsung atau Direksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya setelah mendapat laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan;
2. Direksi memberi arahan atas tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan masing-masing;
3. Sanksi bagi Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Dewan Komisaris;
4. Sanksi bagi Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham;
5. Apabila mitra kerja atau stakeholders Perseroan didapati melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang tertuang di dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana, Perseroan dapat meneruskannya kepada pihak berwajib.

CODE OF CONDUCT VIOLATIONS SANCTIONS

Sanctions will be imposed on any Company individual proven to violate the Code of Conduct, in accordance with applicable policies and legal regulations. Current sanctions include:

1. Sanctions for employees violating the Code of Conduct are determined by the Direct Supervisor or the Board of Directors, depending on the severity of the violation, following a report on the misconduct by the concerned employee;
2. The Board of Directors provides guidance on corrective actions, disciplinary sanctions, and/or other measures, as well as preventive actions to be implemented by the Direct Supervisors within their respective environments;
3. Sanctions for the Board of Directors found in violation are decided by the Board of Commissioners;
4. Sanctions for the Board of Commissioners found in violation are decided by the Shareholders;
5. If business partners or Company stakeholders are found to be in violation, sanctions will be applied as stipulated in the contract terms. In case of criminal activities, the Company may refer the matter to the relevant authorities.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK TAHUN 2025

Pada tahun 2025, tidak terjadi pelanggaran Kode Etik di lingkungan Perseroan. Dengan demikian, pada tahun buku 2025 tidak terdapat sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang perlu dijatuhkan Perseroan.

NUMBER OF CODE VIOLATIONS IN FISCAL YEAR

In 2025, there were no violations of the Company's Code of Ethics. Accordingly, no sanctions related to Code of Conduct violations were imposed during the 2025 fiscal year.

PERNYATAAN BAHWA KODE ETIK BERLAKU BAGI ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN KARYAWAN PERUSAHAAN

STATEMENT OF APPLICABILITY: THE CODE OF CONDUCT APPLIES TO ALL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND ALL EMPLOYEES OF THE COMPANY

Seluruh insan WIKA Beton, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Organ Penunjang, dan semua pekerja di berbagai tingkatan seperti kantor pusat, unit kerja, anak perusahaan, dan afiliasi lain yang berada di bawah kendali Perseroan, diharuskan untuk mematuhi Kode Etik dan Budaya Perseroan.

Peneguhan bahwa Kode Etik Perseroan berlaku untuk seluruh hierarki organisasi telah diungkapkan melalui tanda tangan setiap karyawan pada Lembar Pernyataan Kepatuhan Standar Etika Perseroan dan Kode Tata Kelola Perusahaan setiap awal tahun sebagai bentuk komitmen terhadap implementasi Kode Etik dan Budaya Perseroan serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

All WIKA Beton personnel, including the Board of Commissioners, the Board of Directors, Supporting Organs, and all employees at various levels covering the head office, work units, subsidiaries, and other affiliates under the Company's control, are required to comply with the Company's Code of Conduct and Culture.

The affirmation that the Company's Code of Ethics applies to all levels of the organization is formalized through the signing of the Statement of Compliance with the Company's Ethical Standards and Corporate Governance Code by each employee at the beginning of every year, as a commitment to implementing the Company's Code of Conduct and Culture as well as the Corporate Governance Guidelines.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen (MSOP/ESOP)

Employee and/or Management Stock Option Plan (MSOP/ESOP)

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (Employee Stock Ownership Program/ESOP maupun Management Stock Ownership Program/MSOP). Dengan demikian, tidak terdapat saham Perseroan yang dialokasikan secara khusus kepada karyawan atau manajemen melalui skema kepemilikan saham selama tahun pelaporan. Meskipun demikian, Perseroan tetap berkomitmen untuk menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia dan sistem remunerasi yang kompetitif guna mendukung kinerja, retensi talenta, dan penciptaan nilai jangka panjang bagi Perseroan.

As of 31 December 2025, the Company did not have an Employee Stock Ownership Program (ESOP) and/or Management Stock Ownership Program (MSOP) in place. Accordingly, there were no Company shares specifically allocated to employees or management under any share ownership scheme during the reporting year. Nevertheless, the Company remains committed to implementing human capital management policies and a competitive remuneration system to support performance, talent retention, and the creation of long-term value for the Company.

Kebijakan Pengungkapan Informasi Mengenai Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Disclosure Policy of Information On Share Ownership of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus memberikan laporan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai kepemilikan saham dan/atau kepemilikan saham anggota keluarganya di Perseroan dan Perusahaan lain, beserta segala perubahannya.

Pertaining to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association, each member of the Board of Commissioners and Board of Directors must report to the Corporate Secretary regarding their and/or family's share ownership in the Company and other Companies including any change thereto.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar Perseroan, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib melaporkan kepemilikan sahamnya, termasuk kepemilikan saham anggota keluarganya di Perseroan maupun di perusahaan lain, kepada Sekretaris Perusahaan, beserta segala perubahannya.

Following the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association, every member of the Board of Commissioners and Board of Directors is required to report their share ownership, including the share ownership of their family members, both in the Company and in other companies, to the Corporate Secretary, along with any changes.

Lebih lanjut, merujuk pada SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus dilaporkan paling lambat tiga (3) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka. Pelaksanaan kebijakan pengungkapan informasi tersebut memastikan transparansi dan kemudahan akses bagi pemangku kepentingan.

Furthermore, referring to SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021, share ownership by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners must be reported no later than three (3) business days after the acquisition or any change in ownership of shares in the Public Company. The implementation of this disclosure policy ensures transparency and ease of access for stakeholders.

Perseroan mengungkapkan aktivitas transaksi saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku berjalan. Dalam hal tidak terdapat transaksi, Perseroan menyatakan ketiadaan transaksi tersebut secara eksplisit pada Laporan Tahunan dan/atau laman Hubungan Investor.

The Company discloses share transaction activities by the Board of Directors and Board of Commissioners during the current fiscal year. In the absence of transactions, the Company explicitly states this absence in the Annual Report and/or Investor Relations page.

Informasi lengkap tentang rincian kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2025 disajikan pada bab 5 (lima) halaman XXX bagian Transparansi Direksi dan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Detailed information on the share ownership of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as of December 31, 2025, is presented in Chapter 5, page XXX, under the section on Board of Directors and Board of Commissioners Transparency in this Annual Report.

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

Dengan tekad yang kuat untuk menjunjung tinggi integritas, Perseroan berupaya mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan (fraud) melalui optimalisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/ WBS) sebagai bagian dari Fraud Control System (FCS), yang sejalan dengan Code of Conduct, Code of Corporate Governance, Board Manual, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

With a strong commitment to upholding integrity, the Company strives to prevent violations and fraudulent activities through the optimization of the Whistleblowing System (WBS) as part of the Fraud Control System (FCS), in alignment with the Code of Conduct, Code of Corporate Governance, Board Manual, and applicable laws and regulations.

WBS menjadi sarana deteksi dini (early warning system) sekaligus wadah bagi insan Perseroan dan pihak berkepentingan untuk menyampaikan laporan secara aman, rahasia, dan bertanggung jawab, guna mendorong budaya speak up, mencegah penyimpangan, serta menjaga agar permasalahan dapat ditangani secara internal sebelum berdampak pada reputasi Perseroan.

The WBS serves as both an early detection mechanism and a secure platform for the Company's employees and stakeholders to submit reports in a safe, confidential, and accountable manner. It is designed to foster a speak-up culture, prevent misconduct, and ensure that issues can be addressed internally before they have an adverse impact on the Company's reputation.

Setiap laporan yang diterima akan dikelola oleh Tim Kepatuhan GCG melalui proses penerimaan, penelaahan awal, dan verifikasi, serta ditindaklanjuti khususnya untuk laporan terkait pelanggaran kode etik. Sementara itu, apabila laporan termasuk dalam kategori pelanggaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), maka proses verifikasi dan tindak lanjut dilakukan oleh Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP). Seluruh proses tersebut mencakup penilaian kategori pelanggaran, identitas terlapor, serta kelengkapan informasi dan bukti yang menjadi dasar dalam penetapan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

All reports received are managed by the GCG Compliance Team through a structured process comprising intake, preliminary review, and verification, followed by appropriate follow-up actions, particularly for reports related to violations of the code of ethics. Meanwhile, reports categorized under the Anti-Bribery Management System (SMAP) are subject to verification and follow-up by the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) Team. These processes include the assessment of the type of violation, identification of the reported party, as well as the completeness of information and supporting evidence, which serve as the basis for determining the appropriate course of action in accordance with the Company's prevailing policies and procedures.

TUJUAN IMPLEMENTASI *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Mendorong implementasi yang optimal dapat dicapai dengan menetapkan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, Perseroan menetapkan tujuan implementasi WBS sebagai berikut:

1. Mendorong setiap insan WIKA Beton dan pihak berkepentingan untuk menyampaikan kepada pihak internal perusahaan yang berwenang tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan;
2. Meminimalkan terjadinya risiko yang merugikan perusahaan melalui deteksi dini;
3. Menciptakan sistem dan iklim yang kondusif untuk pelaporan terhadap hal-hal yang merugikan perusahaan;

OBJECTIVES OF WHISTLEBLOWING SYSTEM IMPLEMENTATION

Optimal implementation is achieved by setting clear objectives. Therefore, the Company establishes the following goals for WBS implementation:

1. Encourage all WIKA Beton employees and stakeholders to report any violations and/or irregularities to the authorized internal parties within the Company;
2. Minimize company risks through early detection;
3. Create a conducive system and climate for reporting activities detrimental to the company;

4. Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran;
5. Membangun kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor;
6. Meningkatkan reputasi perusahaan.

PRINSIP-PRINSIP UMUM

Dalam menerapkan kebijakan WBS di lingkungan Perseroan, insan Perseroan wajib mematuhi prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

1. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh insan Perseroan, yaitu Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, Pihak Independen, Pihak Ketiga dan shareholders lainnya.

   Setiap laporan yang masuk akan diterima, ditelaah, dan ditindaklanjuti oleh Tim Kepatuhan GCG atau Tim FKAP sesuai dengan kategori pelanggarannya. Dalam hal dugaan pelanggaran dilakukan oleh:

   a. Direksi, Tim Kepatuhan GCG atau Tim FKAP melaporkan kepada Dewan Komisaris.

   b. Dewan Komisaris, Tim Kepatuhan GCG atau Tim FKAP melaporkan kepada Direksi yang selanjutnya laporan diteruskan ke Pemegang Saham Mayoritas dalam hal ini kepada Tim Kepatuhan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

   Selanjutnya, setiap laporan akan melalui proses verifikasi atas bukti dan kronologi kejadian, yang dilanjutkan dengan investigasi awal oleh Tim Kepatuhan GCG atau Tim FKAP. Apabila dugaan pelanggaran tidak terbukti, maka laporan dinyatakan selesai. Namun, apabila terdapat indikasi pelanggaran, proses dilanjutkan dengan investigasi lanjutan yang melibatkan Tim Pencari Fakta. Hasil investigasi beserta rekomendasi tindak lanjut kemudian disampaikan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

2. Prinsip dasar dari kebijakan ini adalah:
   a. Segala informasi yang disampaikan bersifat rahasia;
   b. Setiap pelapor harus mendapat perlindungan;
   c. Setiap informasi yang dilaporkan harus dilakukan proses *due diligence* dan investigasi lebih lanjut.

4. Facilitate effective management handling of reported violations;
5. Develop policies and infrastructure to protect whistleblowers;
6. Enhance the company's reputation.

GENERAL PRINCIPLES

In applying the WBS policy, Company individuals must adhere to the following general principles:

1. This policy applies to all members of the Company, including employees, the Board of Directors, the Board of Commissioners, independent parties, third parties, and other shareholders.

   All reports received will be accepted, reviewed, and followed up by the GCG Compliance Team or the FKAP Team in accordance with the category of the violation. In the event that the alleged violation involves:
   a. The Board of Directors, the GCG Compliance Team or the FKAP Team shall report to the Board of Commissioners.
   b. The Board of Commissioners, the GCG Compliance Team or the FKAP Team shall report to the Board of Directors, which will subsequently escalate the report to the Majority Shareholder, in this case the Compliance Team of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

   Subsequently, each report undergoes a verification process covering supporting evidence and the chronology of events, followed by a preliminary investigation conducted by the GCG Compliance Team or the FKAP Team. If the alleged violation is not substantiated, the report is deemed closed. However, if there are indications of a violation, the process proceeds to a further investigation involving the Fact-Finding Team. The results of the investigation, along with recommendations for follow-up actions, are then submitted to the Board of Directors in accordance with the Company's prevailing policies and procedures.

2. The basic principles of this policy are:
   a. All information disclosed is confidential;
   b. Every whistleblower must receive protection;
   c. Reported information undergoes due diligence and further investigation.

3. Setiap pelapor harus bertanggung jawab dan memiliki itikad baik dalam melaporkan pelanggaran atau potensi pelanggaran yang akan atau telah merugikan Perseroan;

3. Every whistleblower is responsible and acts in good faith when reporting violations or potential harm to the Company;

4. Dengan adanya kebijakan *Whistleblowing System*, diharapkan tidak ada seorang pekerja atau manajemen perusahaan maupun pihak ketiga lainnya yang dapat menggunakan jabatan mereka untuk mencegah seseorang untuk membuat laporan.

4. With the Whistleblowing System policy in place, it is expected that no employee, company management, or third party can use their position to prevent someone from making a report.

CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING REPORT SUBMISSION

Perseroan telah mengembangkan mekanisme Whistleblowing System (WBS) dengan memiliki beberapa media pengaduan sebagai berikut:

1. Surat elektronik (e-mail) ke alamat wbs@wika-beton.co.id;
2. Aplikasi internal WORKIN' yang dapat diakses oleh seluruh Insan WIKA Beton;
3. Menu WBS pada website Perseroan https://www.wika-beton.co.id/ yang dapat diakses oleh masyarakat umum; dan
4. Surat tertulis yang dikirimkan ke Kantor Pusat Perseroan dan ditujukan kepada Tim Kepatuhan GCG.

The Company has established a Whistleblowing System (WBS) supported by several reporting channels, as follows:

1. Electronic mail (email) sent to wbs@wika-beton.co.id;
2. The internal WORKIN' application, accessible to all WIKA Beton employees;
3. The WBS menu on the Company's website, which is accessible to the public; and
4. Written reports sent to the Company's Head Office and addressed to the GCG Compliance Team

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR
PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

Salah satu aspek utama yang senantiasa ditekankan adalah keamanan informasi bagi para pelapor. Perseroan memberikan jaminan perlindungan kepada setiap pelapor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan hukum dan praktik terbaik yang umum berlaku dalam pelaksanaan WBS. Perlindungan yang diberikan oleh Perseroan kepada pelapor melibatkan beberapa hal, diantaranya:

1. Perseroan berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada setiap pelapor dengan menjamin aspek keamanan dan kenyamanan yang diperlukan.
2. Perseroan memberikan perlindungan kepada setiap keluarga pelapor dari aksi atau tindakan balasan oleh pihak yang dilaporkan atau pihak yang memiliki kepentingan.
3. Jenis perlindungan yang diberikan Perseroan baik kepada pelapor maupun keluarga pelapor adalah berupa perlindungan hukum terhadap tekanan atau serangan fisik.

One of the key aspects that is consistently emphasized is the security of information for whistleblowers. The Company guarantees protection to each whistleblower by the provisions outlined in the applicable laws and best practices commonly followed in the implementation of the WBS. The protection provided by the Company to whistleblowers includes several key measures, such as:

1. The Company is committed to protecting every whistleblower by ensuring security and comfort.
2. The Company guarantees protection to the whistleblower's family from any retaliatory actions or actions by the reported party or any interested parties.
3. The type of protection provided by the Company to both the whistleblower and their family includes legal protection against physical pressure or attacks.

4. Tim Kepatuhan GCG dan Tim FKAP (Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan) akan diberikan perlindungan yang sama dengan Pelapor, Perlindungan terhadap pembalasan, tekanan, ancaman baik secara fisik, psikis, administratif maupun tuntutan hukum.
5. Setiap identitas pelapor dan bahan laporan harus dirahasiakan dan diberikan perlindungan kerahasiaan sesuai dengan mekanisme perlindungan kerahasiaan dan akan diberikan sanksi bagi yang membocorkan identitas pelapor dan bahan laporan.

4. The GCG Compliance Team and the FKAP Team (Anti-Bribery Compliance Function) are afforded the same level of protection as whistleblowers, including protection against retaliation, pressure, and threats whether physical, psychological, administrative, or legal in nature.
5. The identity of each whistleblower and all reported information shall be kept strictly confidential and protected in accordance with the established confidentiality protection mechanisms. Any party found to have disclosed the identity of the whistleblower or the reported information will be subject to sanctions.

PENANGANAN PENGADUAN
COMPLAINT HANDLING

Prosedur penanganan pengaduan terhadap laporan pelanggaran yang diterima melalui WBS akan mencakup tahap investigasi, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Semua laporan pelanggaran yang diterima akan melalui proses investigasi oleh Tim Kepatuhan GCG dan Tim FKAP dalam menangani WBS. Investigasi ini melibatkan pencarian fakta dan bukti yang valid guna mendukung proses penanganan laporan selanjutnya.
2. Dalam melakukan proses investigasi, Perseroan menitikberatkan pada aspek independensi Tim Kepatuhan GCG , Tim FKAP, dan Tim Pencari Fakta guna menjamin objektivitas, kewajaran, dan keadilan dalam menilai hasil temuan.
3. Pihak terlapor diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dan bukti-bukti serta menyampaikan pembelaan atas kasus yang terjadi.
4. Hasil penilaian dan investigasi akan disampaikan kepada Direksi, untuk selanjutnya diproses lebih lanjut yaitu penetapan sanksi apabila kasus tersebut dinyatakan benar dengan menimbang bukti-bukti yang ada.

The procedure for handling reported violations received through WBS includes an investigation phase, with the following mechanisms:

1. All reported violations received through the WBS will undergo an investigation process conducted by the GCG Compliance Team and FKAP Team. This investigation involves the collection of facts and valid evidence to support the subsequent handling and resolution of the reports.
2. In conducting the investigation process, the Company places strong emphasis on the independence of the GCG Compliance Team, the FKAP Team, and the Fact-Finding Team to ensure objectivity, fairness, and impartiality in assessing the findings.
3. The reported party is given the opportunity to provide explanations, evidence, and a defense against the case.
4. The results of the assessment and investigation are presented to the Board of Directors for further processing, which may involve imposing sanctions if the case is deemed substantiated based on the available evidence

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN
RESPONSIBLE PARTIES FOR COMPLAINT MANAGEMENT

Kewenangan pengelolaan dan tindak lanjut atas seluruh laporan pelanggaran yang diterima melalui WBS berada di bawah koordinasi Sekretaris Perusahaan c.q. bidang GCG, General Affair , dan TJSL yang menjalankan fungsi Tim Kepatuhan GCG atau Tim FKAP sebagaimana diatur dalam Prosedur Tata Kelola Perusahaan.

The authority to manage and follow up on all violation reports received through the Whistleblowing System is under the coordination of the Corporate Secretary, c.q. the GCG, General Affairs, and TJSL functions, which carries out the functions of the GCG Compliance Team or the FKAP Team in accordance with the WBS Charter and Corporate Governance Procedure owned by the Company.

Lebih rinci, pihak-pihak yang Perseroan tunjuk untuk mengelola pengaduan yang diterima melalui WBS mencakup:

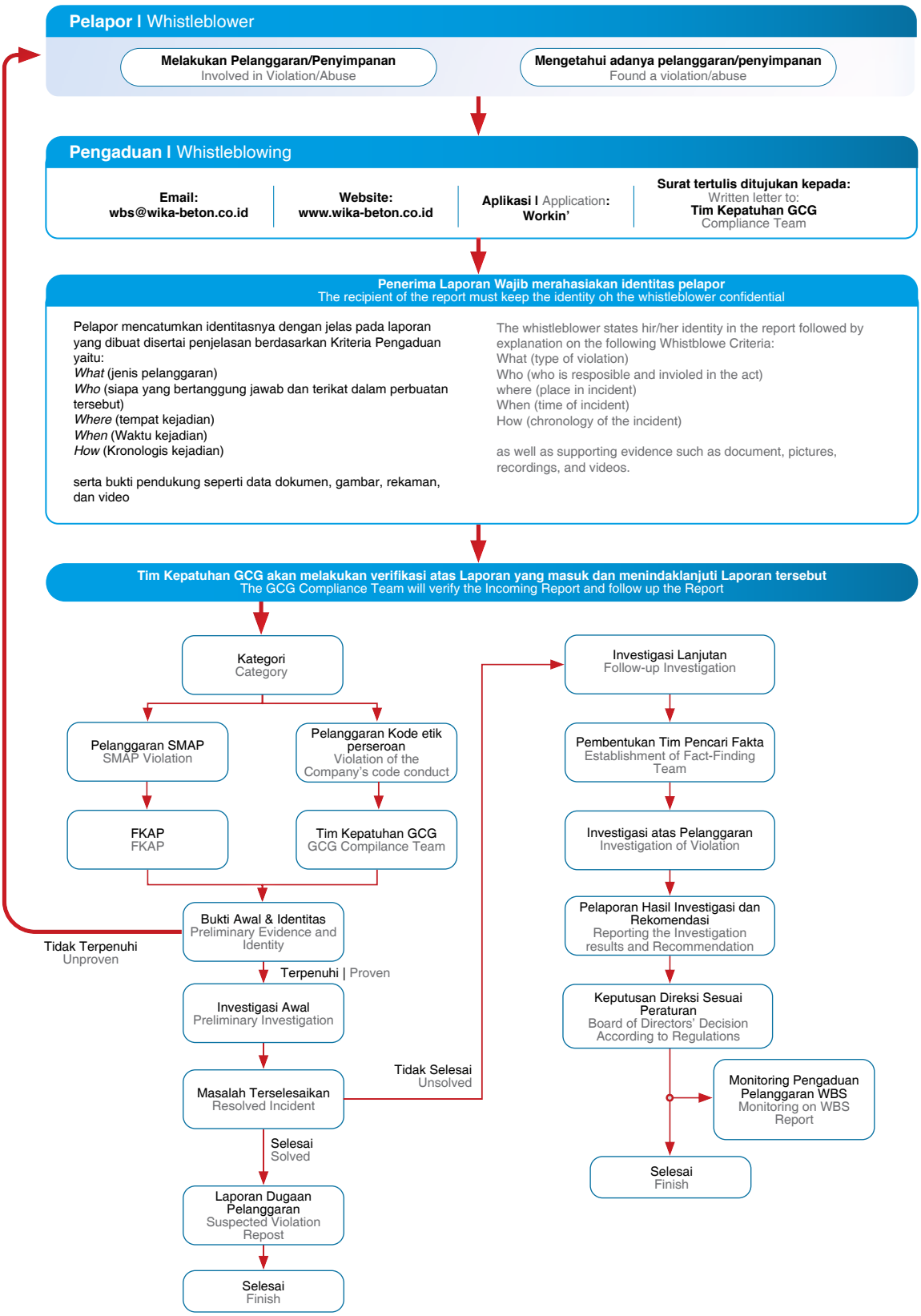
1. Tim Kepatuhan GCG atau Tim FKAP
   Merupakan tim yang dibentuk oleh Perseroan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan Kode Etik dan Penyuapan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam rangka menjaga independensi dan profesionalisme, maka seluruh identitas anggota Tim Kepatuhan GCG atau Tim FKAP dirahasiakan, dan setiap anggotanya diberikan perlindungan terhadap aksi pembalasan, tekanan, ancaman fisik dan/atau psikologis, administrasi, maupun penuntutan hukum.
2. Tim Pencari Fakta
   Merupakan tim yang dibentuk dan direkomendasikan oleh Tim Kepatuhan GCG atau Tim FKAP dan berfungsi untuk menindaklanjuti, mencari dan menyelidiki indikasi penyelewengan terhadap pelaksanaan kepatuhan Kode Etik dan/atau Penyuapan. Keberadaan Tim Pencari Fakta bersifat *Ad Hoc*. Dalam hal hasil review Tim Pencari Fakta kasus dapat dilimpahkan atau dilanjutkan ke Majelis Kehormatan Pegawai.
3. Majelis Kehormatan Pegawai
   Majelis Kehormatan Pegawai terdiri dari pejabat Perseroan yang diberi kewenangan untuk melakukan tindak lanjut hasil investigasi Tim Pencari Fakta terhadap pegawai yang dilaporkan/diduga melanggar kode etik atau melakukan penyuapan, serta menyediakan mekanisme remediasi yang efektif dan merekomendasikan sanksi.

Secara umum, berikut adalah alur sistem pelaporan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pelapor dalam menyampaikan laporan terkait indikasi pelanggaran yang terjadi di Perusahaan:

More specifically, the parties appointed by the Company to manage reports received through the WBS include:

1. GCG Compliance Team or FKAP Team
   This team, established by the Company, is responsible for receiving and following up on reports of violations and/or deviations from the Code of Ethics and Bribery. It directly reports to the CEO. To maintain independence and professionalism, the identities of all GCG Compliance Team or FKAP Team members are kept confidential, and they are protected against retaliation, pressure, physical and/or psychological threats, administrative actions, or legal prosecution.
2. Fact-Finding Team
   This team is established and recommended by the GCG Compliance Team or the FKAP Team and is tasked with following up, identifying, and investigating indications of violations of the Code of Ethics and/or bribery. The Fact-Finding Team is established on an Ad Hoc basis. If the results of the Fact-Finding Team's review indicate that the case can be escalated or referred to the Employee Honor Council.
3. Employee Honor Council
   The Employee Honor Council consists of Company officials who are authorized to follow up on the investigation results of the Fact-Finding Team concerning employees reported or suspected of violating the code of ethics or engaging in bribery, as well as to provide effective remediation mechanisms and recommend appropriate sanctions.

In general, the following is the flow of the violation reporting system that can be carried out by the reporter in submitting reports related to indications of violations in the Company:


Pelapor I Whistleblower
Melakukan Pelanggaran/Penyimpanan
Involved in Violation/Abuse
Mengetahui adanya pelanggaran/penyimpanan
Found a violation/abuse
Pengaduan I Whistleblowing
Email:
wbs@wika-beton.co.id
Website:
www.wika-beton.co.id
Aplikasi I Application:
Workin'
Surat tertulis ditujukan kepada:
Written letter to:
Tim Kepatuhan GCG
Compliance Team
Penerima Laporan Wajib merahasiakan identitas pelapor
The recipient of the report must keep the identity oh the whistleblower confidential
Pelapor mencatumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat disertai penjelasan berdasarkan Kriteria Pengaduan yaitu:
What (jenis pelanggaran)
Who (siapa yang bertanggung jawab dan terikat dalam perbuatan tersebut)
Where (tempat kejadian)
When (Waktu kejadian)
How (Kronologis kejadian)
serta bukti pendukung seperti data dokumen, gambar, rekaman, dan video
The whistleblower states hir/her identity in the report followed by explanation on the following Whistblowe Criteria:
What (type of violation)
Who (who is resposible and invioled in the act)
where (place in incident)
When (time of incident)
How (chronology of the incident)
as well as supporting evidence such as document, pictures, recordings, and videos.
Tim Kepatuhan GCG akan melakukan verifikasi atas Laporan yang masuk dan menindaklanjuti Laporan tersebut
The GCG Compliance Team will verify the Incoming Report and follow up the Report
Kategori
Category
Pelanggaran SMAP
SMAP Violation
Pelanggaran Kode etik perseroan
Violation of the Company's code conduct
FKAP
FKAP
Tim Kepatuhan GCG
GCG Compilance Team
Bukti Awal & Identitas
Preliminary Evidence and Identity
Tidak Terpenuhi
Unproven
Terpenuhi | Proven
Investigasi Awal
Preliminary Investigation
Masalah Terselesaikan
Resolved Incident
Tidak Selesai
Unsolved
Selesai
Solved
Laporan Dugaan Pelanggaran
Suspected Violation Repost
Selesai
Finish
Investigasi Lanjutan
Follow-up Investigation
Pembentukan Tim Pencari Fakta
Establishment of Fact-Finding Team
Investigasi atas Pelanggaran
Investigation of Violation
Pelaporan Hasil Investigasi dan Rekomendasi
Reporting the Investigation results and Recommendation
Keputusan Direksi Sesuai Peraturan
Board of Directors' Decision According to Regulations
Monitoring Pengaduan Pelanggaran WBS
Monitoring on WBS Report
Selesai
Finish

SOSIALISASI WBS

Setiap tahun, Perseroan secara berkala menyelenggarakan sesi sosialisasi mengenai WBS kepada seluruh insan WIKA Beton, dengan tujuan memastikan bahwa seluruh elemen Perseroan memahami kebijakan, prosedur, dan mekanisme terkait WBS. Dalam pelaksanaannya, Perseroan memaksimalkan penggunaan berbagai saluran komunikasi internal dan menggunakan pertemuan manajemen serta karyawan sebagai platform utama untuk kegiatan sosialisasi tersebut. Pada tahun 2025, kegiatan sosialisasi WBS Perseroan kepada Internal Perusahaan diselenggarakan pada tanggal 6 dan 11 Agustus 2025 secara online melalui media zoom meeting serta pada tanggal 17 Desember 2025 melalui kegiatan sosialisasi kode etik dan training transisi ISO 37001:2025 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yang didalamnya mencakup sosialisasi mekanisme pengaduan WBS. Selain itu untuk, memperkuat integritas Perseroan juga melakukan sosialisasi kepada Mitra Kerja pada tanggal 13 Agustus 2025.

WIKA Beton juga mengintensifkan sosialisasi melalui komunikasi multi-kanal melalui situs resmi, aplikasi workin' WIKA Beton, surat edaran, pemasangan banner di area kantor, grup komunikasi internal, artikel majalah kantor dan tayangan pada digital signage lobby WIKA Beton.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Setiap Insan WIKA Beton yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Direksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya setelah mendapat laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.
2. Direksi memberikan arahan atas tindakan pembinaan, sanksi disiplin, dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan masing-masing.
3. Sanksi bagi Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Dewan Komisaris.
4. Sanksi bagi Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.

WBS Socialization

Each year, the Company regularly conducts Whistleblowing System (WBS) socialization sessions for all WIKA Beton employees, with the aim of ensuring that all elements of the Company understand the policies, procedures, and mechanisms related to the WBS. In its implementation, the Company maximizes the use of various internal communication channels and utilizes management and employee meetings as the primary platforms for these socialization activities. In 2025, the Company's WBS socialization for internal stakeholders was conducted on August 6 and 11, 2025, through online sessions via Zoom meetings, and on December 17, 2025, as part of the Code of Conduct socialization and ISO 37001:2025 transition training on the Anti-Bribery Management System, which also included the dissemination of the WBS reporting mechanism. In addition, to further strengthen integrity, the Company also conducted socialization activities for business partners on August 13, 2025.

WIKA Beton also intensified its socialization efforts through multi-channel communication, including its official website, the Workin' WIKA Beton application, circular letters, the installation of banners in office areas, internal communication groups, articles in the Company's internal magazine, and displays on digital signage in the WIKA Beton lobby.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS

Any WIKA Beton personnel proven to have committed violations will be subject to sanctions in accordance with the Company's policies and applicable laws and regulations, as follows:

1. Sanctions for employees who commit violations are determined by the Board of Directors based on the severity of the violation, following the receipt of reports regarding the misconduct concerned.
2. The Board of Directors provides direction on coaching measures, disciplinary sanctions, and/or other necessary actions, as well as preventive measures to be implemented by the respective direct supervisors within their respective units.
3. Sanctions for members of the Board of Directors who commit violations are determined by the Board of Commissioners.
4. Sanctions for members of the Board of Commissioners who commit violations are determined by the Shareholders.

5. Apabila Mitra Kerja atau Pemangku Kepentingan yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

5. In the event that Business Partners or other Stakeholders commit violations, sanctions will be imposed in accordance with the provisions stipulated in the relevant contracts. Where such violations constitute criminal offenses, the matter may be referred to the competent authorities.

HASIL DARI PENANGANAN PENGADUAN
COMPLAINT HANDLING OUTCOMES

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan menerima 4 (empat) laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan melalui WBS. Seluruh laporan tersebut telah diverifikasi oleh Tim Kepatuhan GCG dan Tim FKAP serta ditindaklanjuti melalui proses investigasi sesuai prosedur yang berlaku.

As of December 31, 2025, the Company received 4 (four) reports of alleged violations submitted through the WBS. All reports were verified by the GCG Compliance Team and the FKAP Team and were followed up through an investigation process in accordance with applicable procedures.

Berdasarkan hasil investigasi, tidak ditemukan pelanggaran yang terbukti dan/atau tidak diperlukan tindak lanjut berupa investigasi lanjutan, sehingga seluruh laporan dinyatakan selesai dan ditutup tanpa rekomendasi sanksi.

Based on the investigation results, no violations were proven, and no further investigation was required. Accordingly, all reports were declared resolved and closed without any recommendation for sanctions.

EVALUASI EFEKTIVITAS DAN PENINGKATAN WBS

Secara berkelanjutan, Perseroan terus melakukan evaluasi efektivitas dan penyempurnaan WBS untuk meningkatkan responsivitas dan akurasi fungsi, sekaligus mengurangi potensi risiko reputasi. Pembaruan Pedoman WBS disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, diikuti dengan pelaksanaan tindak lanjut terhadap saran dan rekomendasi yang diterima. Sosialisasi mengenai WBS juga dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya ini.

EVALUATION OF WBS EFFECTIVENESS AND IMPROVEMENT

Continuously, the Company evaluates the effectiveness and enhances the WBS for improved responsiveness and accuracy of functions while reducing potential reputation risks. Updates to the WBS Guidelines are tailored to the Company's needs, followed by the implementation of follow-up actions based on received suggestions and recommendations. Regular socialization of WBS is also conducted as part of these efforts.

Kebijakan Anti Korupsi, Anti Gratifikasi dan Donasi
Anti-Corruption, Anti-Gratification and Donation Policy

Kebijakan Etika Berusaha, Anti Korupsi, dan Donasi serta Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Perseroan menjadi landasan bagi seluruh insan WIKA Beton dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kebijakan ini menetapkan sikap tegas Perseroan terhadap setiap bentuk perilaku yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, termasuk tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

The Company's Business Ethics, Anti-Corruption and Donation Policy, as well as the Anti-Bribery Management System Policy, serve as the foundation for all WIKA Beton personnel in carrying out their duties and responsibilities. These policies reflect the Company's firm stance against any form of conduct that may give rise to conflicts of interest, including acts of Corruption, Collusion, and Nepotism.

Sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola Anti Korupsi, Perseroan membangun dan mengoperasikan Whistleblowing System (WBS) sebagai sarana pelaporan, pencegahan, dan pengungkapan pelanggaran atau penipuan di lingkungan Perseroan. WBS ini diawasi secara berkelanjutan dan disosialisasikan kepada seluruh Insan WIKA Beton serta pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

As part of the implementation of Anti-Corruption Governance, the Company has been established. It operates a Whistleblowing System (WBS) as a reporting mechanism for the prevention, detection, and disclosure of violations or fraud within the Company. The WBS is continuously monitored and has been communicated to all WIKA Beton employees as well as parties related to the Company's business activities.

Untuk mengendalikan risiko korupsi, penyuapan, dan gratifikasi, Perseroan menerapkan serangkaian kebijakan dan program yang terintegrasi, antara lain Kebijakan Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan SNI ISO 37001:2016, Kebijakan Seleksi dan Peningkatan Kemampuan Pemasok/ Vendor, Kebijakan Whistleblowing System, Pedoman Etika dan Perilaku, Pedoman Benturan Kepentingan, serta Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS). Seluruh kebijakan dan pedoman ini menjadi rujukan utama bagi Insan WIKA Beton dalam mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti praktik korupsi, suap, kickback, fraud, dan gratifikasi di lingkungan Perseroan.

To manage the risks of corruption, bribery, and gratification, the Company implements a series of integrated policies and programs, including the Business Ethics, Anti-Corruption and Donation Policy, Gratification Control Policy, Anti-Bribery Management System (ABMS) Policy based on SNI ISO 37001:2016, Supplier/Vendor Selection and Capability Development Policy, Whistleblowing System Policy, Code of Ethics and Conduct, Conflict of Interest Guidelines, as well as the Whistleblowing System (WBS). These policies and guidelines serve as the primary reference for WIKA Beton personnel in preventing, detecting, and addressing practices such as corruption, bribery, kickbacks, fraud, and gratification within the Company's operations.

PROGRAM DAN PROSEDUR YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI PRAKTIK KORUPSI, BALAS JASA (KICKBACKS), FRAUD, SUAP DAN/ATAU GRATIFIKASI
PROGRAMS AND PROCEDURES TO ADDRESS CORRUPTION, KICKBACKS, FRAUD, BRIBERY, AND/OR GRATIFICATION

Untuk mewujudkan komitmen ini, Perseroan mengimplementasikan kebijakan dan mekanisme anti korupsi serta anti gratifikasi dan donasi. Dalam kebijakan ini, gratifikasi diartikan sebagai setiap pemberian dalam arti luas kepada Insan WIKA Beton, baik berupa uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, maupun fasilitas lainnya, yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan dan dapat menimbulkan benturan kepentingan.

To fulfill this commitment, the Company has implemented anti-corruption, anti-gratuity, and donation policies and mechanisms. Under these policies, a gratuity is defined as any form of benefit given to WIKA Beton employees, including but not limited to money, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, travel tickets, accommodation facilities, leisure trips, free medical services, or other benefits related to an employee's position or duties that may give rise to a conflict of interest.

Perseroan menetapkan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk penggunaan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang terkait dengan wewenang atau jabatan karyawan.

Program dan prosedur yang dimaksud antara lain diimplementasikan melalui pengaturan terhadap area-area berisiko sebagai berikut:

1. **Program Pengaturan Keterlibatan Politik**
   a. Tidak ada dana atau aset Perusahaan yang boleh digunakan untuk kontribusi partai politik atau calon partai politik. Larangan ini meliputi tidak hanya secara kontribusi langsung tetapi juga bantuan tidak langsung atau dukungan melalui pemberian barang-barang atau jasa atau perlengkapan untuk tujuan penggalangan dana politik atau tujuan kampanye lainnya. Penerapan larangan hanya untuk penggunaan dana atau aset Perusahaan untuk tujuan politik dan tidak diartikan untuk mengecilkan pegawai dari kontribusi pribadi kepada calon atau partai politik yang dipilih;
   b. Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan pegawai mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur keterlibatan Perusahaan dan pegawai dalam urusan politik. Mereka tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik;
   c. Perusahaan melarang seseorang melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

2. **Program Pengaturan Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Donasi, dan Sponsorship**
   a. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat negara atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
   b. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perseroan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
   c. Setiap donasi dan/atau sponsorship hanya dapat diberikan untuk tujuan sosial yang sah, dilakukan secara transparan, serta tidak digunakan sebagai sarana penyuapan atau untuk mempengaruhi keputusan bisnis.

The Company has established rules that apply both domestically and internationally, including rules governing the use of electronic or non-electronic means in connection with employees' authority or positions.

The programs and procedures are implemented, among others, through the regulation of the following risk-prone areas:

1. **Program for Regulation of Political Involvement**
   a. No Company funds or assets may be used for political party contributions or political candidate support. This prohibition covers not only direct contributions but also indirect assistance or support through the provision of goods, services, or equipment for political fundraising or other campaign purposes. The prohibition applies solely to the use of Company funds or assets for political purposes and is not intended to discourage employees from personal contributions to selected political candidates or parties;
   b. The Board of Commissioners, Board of Directors, management, and employees comply with all applicable laws governing the Company's involvement in political affairs. They are not allowed to hold positions in political parties;
   c. The Company prohibits coercion that limits an individual's right to express their political aspirations.

2. **Program for the Regulation of the Giving and Receiving of Gifts, Donations, and Sponsorships**
   a. Members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Company employees are prohibited from offering or providing, directly or indirectly, anything to government officials or individuals representing business partners that could influence decision-making;
   b. Members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Company employees are prohibited from receiving anything for personal gain, directly or indirectly, from business partners that could influence decision-making.
   c. Each donation and / or sponsorship may only be provided for legitimate social purposes, conducted transparently, and shall not be used as a means of bribery or to influence business decisions.

d. Perseroan melarang pemberian donasi dan/atau sponsorship kepada partai politik atau kegiatan politik dalam bentuk apa pun.
e. Perseroan memproses setiap pengajuan donasi dan/atau sponsorship melalui mekanisme persetujuan dan pencatatan resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan (Compliance Program)

a. Organ Perseroan dan pegawai Perseroan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan Perseroan;
b. Perseroan senantiasa melakukan pencatatan atas harta, utang, dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

4. Pelaporan atas Pelanggaran dan Perlindungan Bagi Pelapor (WBS)

a. Direksi berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis dan Panduan Perilaku Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, diproses secara wajar dan tepat waktu berdasarkan kebijakan *Whistleblowing System* Perseroan;
b. Perseroan harus menyusun peraturan yang menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis, Panduan Perilaku Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

5. Pengelolaan Benturan Kepentingan

a. Benturan Kepentingan didefinisikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan Organ Utama Perseroan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi) memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan, sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perusahaan secara objektif;
b. Benturan kepentingan ini dapat terjadi karena Organ Perseroan melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan baik oleh Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Pedoman Perilaku Perseroan;
c. Benturan kepentingan ini dapat melibatkan jajaran Perseroan dan Anak Perusahaan;

d. The Company prohibits any donations and / or sponsorships to political parties or political activities in any form.
e. The Company processes every donation and / or sponsorship proposal through official approval and recording mechanisms in accordance with the prevailing regulations.

3. Compliance with Regulations

a. Company organs and employees must comply with statutory regulations and Company regulations;
b. The Company consistently records assets, liabilities, and equity accurately in accordance with generally accepted accounting principles.

4. Reporting Violations and Protection for Reporters

a. The Board of Directors is responsible for receiving and ensuring that complaints about violations of business ethics and the Company's Code of Conduct and legal regulations are processed appropriately and promptly based on the Company's Whistleblowing System policy;

b. The Company must establish rules ensuring protection for individuals reporting violations of business ethics, the Company's Code of Conduct, and legal regulations.

5. Conflict of Interest Management

a. A Conflict of Interest is defined as a condition that allows the Company's Principal Organs (Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors) to exploit their position and authority within the Company for personal, familial, or group interests, potentially affecting the objective implementation of Company-assigned tasks;

b. This conflict can arise from actions by Company organs that violate the Company's Articles of Association, applicable laws, or the Company's Code of Conduct;

c. This conflict may involve both the Company and its subsidiaries;

d. Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan peran/ fungsi Organ Utama Perseroan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi), maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   1). Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan yang bersangkutan, selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditentukan oleh RUPS.
   2). Dilarang memangku jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
   3). Tidak berwenang mewakili Perseroan apabila mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
   4). Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dalam pembuatan suatu keputusan, maka yang bersangkutan harus mundur dari proses pengambilan keputusan tersebut.
   5). Larangan hubungan keluarga sebagaimana tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perseroan lainnya.

d. To maintain independence in fulfilling the roles/ functions of the Company's Principal Organs (Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors), the following must be observed:
   1). Prohibition of transactions with conflicts of interest and personal gain from Company activities, except for salaries and facilities as determined by the GMS.
   2). Prohibition of holding other positions that may cause conflicts of interest.
   3). Lack of authority to represent the Company if there is a conflict of interest.
   4). In case of a conflict of interest involving the Board of Directors and Board of Commissioners in making a decision, the concerned party must withdraw from the decision-making process.
   5). The prohibition of family relationships as mentioned above is further regulated in the Company's Articles of Association and other applicable Company regulations.

Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang mengacu pada SNI ISO 37001:2016 sebagai kerangka kerja utama dalam mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti setiap bentuk penyuapan. Melalui SMAP, Perseroan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap penyuapan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, Insan WIKA Beton, maupun pihak eksternal.

The Company has implemented an Anti-Bribery Management System in accordance with SNI ISO 37001:2016 as the main framework for preventing, detecting, and addressing all forms of bribery. Through the ABMS, the Company applies a zero-tolerance policy toward bribery involving the Board of Directors, the Board of Commissioners, WIKA Beton employees, or external parties.

Perseroan juga menghimbau seluruh Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan untuk tidak memberikan gratifikasi dan/atau suap kepada Insan WIKA Beton, baik dalam bentuk uang, barang, bingkisan/parcel, fasilitas, maupun bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan atau tugas dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan atau melanggar peraturan perundang-undangan, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, SMAP, dan Standar Etika Perseroan.

The Company also urges all Business Partners and Stakeholders not to offer any gratuities and/or bribes to WIKA Beton employees, whether in the form of money, goods, gifts or parcels, facilities, or other benefits related to positions or duties that may create conflicts of interest or violate applicable laws and regulations, the Gratuity Control Policy, the ABMS, and the Company's Code of Conduct.

INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya, Perseroan menetapkan larangan terhadap keterlibatan insan Perseroan dalam aktivitas politik. Upaya ini dimaksudkan untuk memastikan independensi dan integritas tetap terjaga. Selain itu, Perseroan

DISCLOSURE ON THE FUND DISTRIBUTION FOR POLITICAL ACTIVITIES

In fulfilling its responsibilities and authorities, WIKA Beton establishes prohibitions on the involvement of Company personnel in political activities. This initiative is aimed at ensuring the preservation of independence and integrity. Furthermore, the Company imposes restrictions on the

mengeluarkan larangan terhadap penggunaan dana dan/atau asetnya untuk mendukung aktivitas politik dalam segala bentuk yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dan mengganggu integritas Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan-aturan ini telah diatur dalam dokumen-dokumen seperti *Code of Conduct*, *Code of Corporate Governance*, dan Kebijakan Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi.

use of its funds and/or assets to support political activities in any form that may pose a potential conflict of interest and disrupt the Company's integrity, in accordance with prevailing regulations. These rules are delineated in documents such as the Code of Conduct, Code of Corporate Governance, and Business Ethics, Anti-Corruption and Donation Policy.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI KORUPSI KEPADA KARYAWAN PERUSAHAAN
ANTI-CORRUPTION TRAINING AND AWARENESS FOR EMPLOYEES

Pada tahun 2025, Perseroan melaksanakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi anti korupsi dan anti gratifikasi kepada pegawai yaitu Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dilaksanakan secara daring melalui media zoom meeting pada tanggal 6 dan 11 Agustus 2025, serta pada tanggal 17 Desember 2025 melalui kegiatan sosialisasi kode etik dan training transisi ISO 37001:2025 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

In 2025, the Company conducted anti-corruption and anti-gratification training and socialization programs for employees, including the dissemination of the Anti-Bribery Management System, which was held virtually via Zoom meetings on August 6 and 11, 2025, as well as on December 17, 2025 through a Code of Conduct socialization session and ISO 37001:2025 transition training on the Anti-Bribery Management System.

Selain itu, untuk memperkuat integritas Perseroan juga melakukan sosialisasi kepada Mitra Kerja pada tanggal 13 Agustus 2025.

In addition, to further strengthen the Company's integrity, similar socialization activities were also conducted for business partners on August 13, 2025.

LAPORAN KORUPSI DAN GRATIFIKASI PADA TAHUN BUKU
CORRUPTION AND GRATIFICATION REPORT IN FISCAL YEAR

Mengacu pada Laporan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025, tidak terdapat laporan gratifikasi yang terbukti sebagai pelanggaran maupun indikasi terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Perseroan.

Based on the 2025 Gratification Control Report, there were no reports of gratuities that were proven to constitute violations or indications of corruption within the Company.

Namun, selama tahun pelaporan, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran suap yang telah diverifikasi oleh Tim FKAP. Hasil investigasi menyimpulkan bahwa laporan dimaksud tidak terbukti sebagai pelanggaran, sehingga tidak diperlukan tindak lanjut berupa investigasi lanjutan.

However, during the reporting year, there was one (1) report of an alleged bribery violation that was verified by the FKAP Team. The investigation concluded that the allegation was not proven, and therefore, no further investigation or follow-up action was required.

KEPATUHAN TERHADAP LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
COMPLIANCE WITH THE STATE ORGANIZER WEALTH REPORT (LHKPN)

Perseroan mewajibkan seluruh Insan WIKA Beton sampai dengan 1 (satu) level di bawah Direksi yang termasuk kategori Penyelenggara Negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setiap tahun sesuai ketentuan KPK.

The Company requires all WIKA Beton employees classified as State Officials, up to one (1) level below the Board of Directors, to submit an Annual State Officials' Asset Declaration (LHKPN) in accordance with the regulations of the KPK.

Perseroan menerapkan mekanisme pemantauan dan pemberian teguran/sanksi bagi pihak yang tidak patuh. Pada tahun 2025, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN Perseroan mencapai 100%.

The Company has implemented a monitoring mechanism and imposes warnings or sanctions on non-compliant parties. In 2025, the Company achieved a 100% compliance rate for LHKPN reporting.

Kebijakan *Insider Trading*
Insider Trading Policy

Insider trading adalah perdagangan saham Perusahaan atau surat berharga lainnya (misalnya obligasi atau opsi saham) yang dilakukan oleh pihak yang memiliki akses atas informasi material dan belum tersedia untuk publik mengenai Perusahaan, dan menggunakan informasi tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi. Praktik ini merupakan pelanggaran peraturan Pasar Modal dan dilarang di berbagai yurisdiksi.

Insider trading is the trading of the Company's shares or other securities (such as bonds or stock options) by individuals who have access to material information about the Company that is not yet available to the public, and who use that information for personal gain. This practice violates Capital Market regulations and is prohibited in many jurisdictions.

Perusahaan melarang keras seluruh Insan WIKA Beton (Dewan Komisaris, Direksi, organ pendukung, dan pegawai) yang mempunyai dan/atau memiliki akses informasi orang dalam dan/atau informasi yang bersifat material untuk menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan dan/atau menggunakan informasi, antara lain:

1. Memberikan, mengungkapkan, atau menggunakan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan investor untuk membeli, menjual, atau menahan saham Perusahaan.
2. Memberikan informasi kepada orang-orang yang memiliki hubungan istimewa untuk melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa dengan Perusahaan.

The Company strictly prohibits all WIKA Beton personnel (the Board of Commissioners, the Board of Directors, supporting organs, and employees) who possess and/or have access to inside information and/or material information from misusing their position and duties to disclose and/or use such information, including:

1. Providing, disclosing, or using information that may influence an investor's decision to buy, sell, or hold the Company's shares.
2. Providing information to individuals with special relationships to facilitate trading transactions of goods and/or services with the Company.

Informasi rahasia dan/atau informasi material Perusahaan hanya dapat disampaikan kepada pihak lain sesuai dengan Kebijakan Kepemilikan dan Kerahasiaan Informasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Setiap Insan WIKA Beton yang terbukti melanggar Kebijakan Insider Trading ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan internal Perusahaan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Confidential and/or material information of the Company may only be disclosed to other parties in accordance with the Information Ownership and Confidentiality Policy and the applicable Capital Market regulations. Any WIKA Beton personnel found to have violated this Insider Trading Policy will be subject to sanctions in line with the Company's internal rules and/or applicable laws.

JUMLAH PELANGGARAN INSIDER TRADING PADA TAHUN BUKU

Hingga 31 Desember 2025, Perusahaan tidak mengidentifikasi adanya kasus maupun dugaan pelanggaran terkait insider trading yang melibatkan anggota Dewan Komisaris, Direksi, organ pendukung, maupun pegawai Perusahaan.

NUMBER OF INSIDER TRADING VIOLATIONS IN FISCAL YEAR

As of December 31, 2025, the Company had not identified any cases or suspected violations related to insider trading involving members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, supporting organs, or employees.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services Policy

Dalam upaya mencapai visi "Menjadi Perusahaan Terkemuka di Bidang *Engineering, Production, Installation* (EPI) Industri Beton di Asia Tenggara," Perseroan berkomitmen untuk bekerja secara profesional guna menghasilkan produk beton berkualitas tinggi dan terjamin mutunya. Demi memastikan hal tersebut, Perseroan senantiasa mengimplementasikan standar etika dalam pelaksanaan setiap kegiatan usaha, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam standar mutu ISO, SMK3L, sistem manajemen peralatan, dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

In pursuit of the vision "To be the foremost precast concrete company in Engineering, Production, Installation (EPI) in Southeast Asia." WIKA Beton is committed to working professionally to produce high quality and guaranteed concrete products. To ensure this, the Company consistently implements ethical standards in every business activity, in accordance with the provisions set by ISO quality standards, Occupational Health and Safety, Envinronment Management System (SMK3L), equipment management systems, and the principles of Good Corporate Governance (GCG).

PRINSIP DAN KEBIJAKAN

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), Perusahaan menjamin pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang efisien dan transparan guna menghindari kemungkinan adanya konflik kepentingan.

Perusahaan juga mengintegrasikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001:2016 ke dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa, sehingga setiap tahapan pengadaan mendukung budaya zero tolerance terhadap penyuapan dan praktik tidak etis lainnya.

Kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan ini merujuk pada ketentuan:

1. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. UU No.19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara;
3. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.21/ POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; dan
7. Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
8. PERPRES No.46 tahun 2025 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

PRINCIPLES AND POLICIES

By adhering to the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Company ensures the efficient and transparent procurement process to avoid potential conflicts of interest.

The Company also integrates the implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) based on SNI ISO 37001:2016 into the procurement process for goods and/or services, so that each stage of procurement supports a culture of zero tolerance for bribery and other unethical practices.

The policies guiding this procurement align with the provisions of:

1. Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market,
2. No. 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises,
3. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies,
4. Presidential Regulation No. 70 of 2012, the second revision of Presidential Regulation No. 16 of 2018 on Government Procurement of Goods and Services.
5. Financial Services Authority Regulation (OJK) No.21/ POJK.04/2015 concerning the Implementation of Corporate Governance Guidelines for
6. Public Company and OJK Circular Letter No.32/ SEOJK.04/2015
7. concerning the Corporate Governance Guidelines for Public Company.
8. Presidential Regulation No. 46 of 2025 on Government Procurement of Goods and Services;

9. PP No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
10. Permen BUMN No.PER-2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN;
11. Peraturan KPK RI No.2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
12. Peraturan OJK No.21/PJOK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

PRINSIP-PRINSIP UTAMA

Prinsip-prinsip utama yang wajib dipahami dan dipatuhi saat proses pengadaan barang dan/atau jasa Perseroan berlangsung, antara lain:

1. Semua kegiatan pengadaan dilakukan hanya untuk kepentingan PT Wijaya Karya Beton Tbk (Perseroan). Semua kegiatan pengadaan harus dilaksanakan secara masuk akal, dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan menerapkan pengelolaan biaya dengan prinsip kewajaran;
2. Pelaksanaan pengadaan wajib menghindarkan diri dari fraud dan benturan kepentingan dengan bertindak dan bekerja sesuai kode etik, peraturan, prosedur, dan dalam kontrol yang memadai;
3. Unit yang berwenang melakukan pengadaan adalah unit-unit di dalam Perseroan yang diberikan wewenang melakukan pengadaan barang/jasa sesuai kategori yang diatur dalam Kebijakan Biaya Perseroan.

ETIKA UNIT PENGADAAN

Standar etika yang harus dipatuhi oleh seluruh unit pengadaan dalam berkomunikasi dengan rekan bisnis dan vendor Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pengadaan yaitu:

1. Melaksanakan dan memegang teguh kejujuran;
2. Mematuhi semua ketentuan eksternal/ perundang-undangan yang disyaratkan dan seluruh ketentuan internal Perseroan;
3. Setiap pengadaan yang dilakukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan biaya Perseroan;
4. Proses pengadaan barang/ jasa harus berdasarkan pada persaingan yang sehat yang memperhatikan tingkat kemampuan yang setara dan kredibilitas dari setiap vendor;

9. Government Regulation No. 50 of 2012 on the Occupational Safety and Health Management System;
10. Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2 of 2023 on the Implementation of Procurement of Goods and Services by State-Owned Enterprises;
11. Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia Regulation No. 2 of 2019 concerning Reporting of Gratuities;
12. Financial Services Authority Regulation No. 21/ PJOK.03/2014 concerning Minimum Capital Requirements for Sharia Commercial Banks.

KEY PRINCIPLES

Key principles that must be understood and adhered to during the Company's procurement process include:

1. All procurement activities are conducted solely for the benefit of PT Wijaya Karya Beton Tbk (the Company). Procurement activities must be rational, accountable, and cost-effective under fair principles;
2. Procurement must avoid fraud and conflicts of interest by acting and working in accordance with the code of ethics, regulations, procedures, and under adequate control.
3. Authorized units conducting procurement are those within the Company granted the authority to procure goods/services according to categories specified in the Company's Cost Policy.

PROCUREMENT UNIT ETHICS

Ethical standards that must be adhered to by all procurement units when communicating with business partners and the Company's vendors, directly or indirectly, for procurement activities include:

1. Upholding honesty and integrity;
2. Compliance with all external regulations and internal Company policies;
3. Every procurement is an integral part of the Company's cost policy;
4. Procurement processes must be based on fair competition, considering equivalent capabilities and credibility of each vendor;

5. Semua vendor harus diperlakukan sama dalam hal kesempatan, informasi, perhitungan atas pengambilan keputusan dalam proses seleksi vendor sebagai entitas eksternal yang terikat secara profesional;
6. Tidak mengambil kesempatan untuk memanfaatkan kesalahan vendor. Dengan maksud, pada saat ada kesalahan yang dapat dijelaskan dan diterima oleh Perseroan, maka Perseroan wajib memberikan kesempatan untuk re-negosiasi selama masih bisa diterima oleh Perseroan;
7. Setiap kegiatan pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
8. Perlindungan terhadap kerahasiaan informasi vendor yang diberikan kepada Perseroan dan sebaliknya;
9. Tidak menyediakan informasi yang dapat memberikan keuntungan kepada salah satu vendor saja;
10. Dalam keadaan apapun, tidak menerima hadiah, barang, komisi berupa uang tunai atau sejenisnya (cek, voucher), souvenir, cinderamata, makanan, di lingkungan kantor maupun rumah;
11. Tidak melakukan kegiatan pinjam/meminjamkan uang kepada vendor.

5. Equal treatment of all vendors in terms of opportunities, information, and decision-making in the vendor selection process;
6. Avoiding taking advantage of vendor errors; providing opportunities for renegotiation if errors are explainable and acceptable to the Company;
7. All procurement activities must be conducted openly and accountably;
8. Protecting the confidentiality of vendor information provided to the Company and vice versa;
9. Not providing information that gives an advantage to a specific vendor;
10. Under no circumstances accepting gifts, money, commissions, or similar benefits (checks, vouchers, souvenirs, etc.) in the office or at home.
11. Refraining from engaging in lending/borrowing activities with vendors.

HUBUNGAN DENGAN MITRA PERUSAHAAN

Hubungan dengan calon mitra dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memilih Mitra Perusahaan yang memiliki kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil;
2. Senantiasa melakukan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku;
3. Memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kontrak;
4. Mitra usaha wajib mematuhi semua ketentuan internal yang berlaku di Perseroan;
5. Memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap seluruh Mitra kerja dalam pengadaan barang dan jasa di perusahaan sebagaimana diatur dalam kebijakan Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Proses pengadaan barang dan jasa harus menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
7. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;

RELATIONS WITH BUSINESS PARTNERS

Professional, equitable, and mutually beneficial relationships with potential partners are conducted while adhering to the following principles:

1. Selecting business partners with credible and accountable credentials, free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN), prioritizing caution, selectivity, competitiveness, and fairness;
2. Maintaining a working relationship in accordance with ethical and legal values;
3. Fulfilling the rights and obligations of each party as stipulated in the contract;
4. Business partners must comply with all internal regulations applicable to the Company;
5. Providing equal treatment and opportunities to all working partners in the procurement of goods and services in the Company, as per Company policies and applicable laws;
6. The procurement process for goods and services must implement an Anti-Bribery Management System and be free from corruption, collusion, and nepotism (KKN).
7. Avoiding direct or indirect influence leading to unhealthy competition, a decline in the quality of procurement processes, and outcomes;

8. Mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan;
9. Melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan Pemasok yang memenuhi kualitas persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
10. Menjalin komunikasi yang baik dengan Pemasok termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan yang dilaksanakan secara tuntas, konsisten dan efektif;
11. Melakukan Evaluasi Pengukuran Kepuasan Pemasok/Mitra Kerja dengan mengirimkan kuesioner ke Pemasok/Mitra Kerja yang dilakukan secara tahunan.

8. Preventing conflicts of interest among parties involved directly or indirectly in the procurement process;
9. Conducting procurement processes transparently, competitively, and fairly to obtain suppliers meeting the quality requirements of the work and accountable prices;
10. Maintaining good communication with suppliers, including addressing complaints and objections in a thorough, consistent, and effective manner;
11. Conducting an annual Supplier/Working Partner Satisfaction Measurement Evaluation through the distribution of questionnaires to suppliers/working partners.

PROSES PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa, Perseroan menitikberatkan pada prinsip keadilan dan kejujuran. Seluruh pihak yang berminat dan memenuhi persyaratan, terutama dalam hal kemampuan dan kinerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, berhak mengikuti proses pengadaan Perseroan melalui persaingan yang sehat.

Segala ketentuan dan informasi terkait pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk persyaratan teknis dan administratif pengadaan, prosedur evaluasi, hasil evaluasi, serta penentuan penyedia barang dan/atau jasa, bersifat terbuka bagi semua peserta penyedia barang dan/atau jasa, serta masyarakat umum yang tertarik. Calon penyedia barang dan/atau jasa dapat mendaftar sebagai vendor terlebih dahulu melalui tautan: https://eproc.wika-beton.co.id untuk mengikuti seluruh proses pengadaan barang dan/atau jasa.

Pengembangan dan pemutakhiran sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) dilakukan secara berkala untuk memastikan penerapan prinsip keterbukaan, efisiensi biaya, kompetitif, dan fairness sesuai Pedoman Tata Kelola Perusahaan (CoCG) Perusahaan.

PROCESS OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

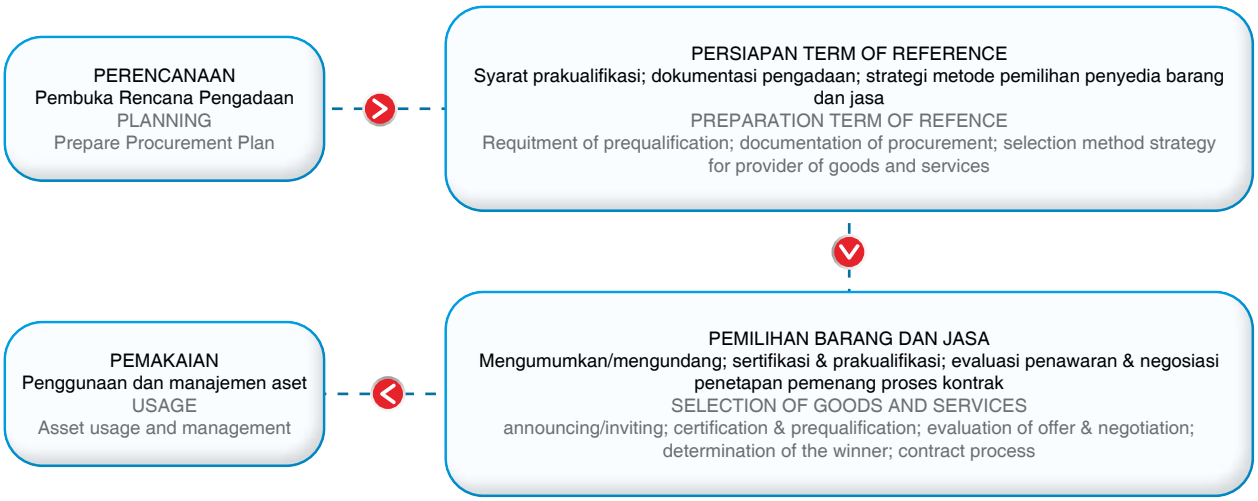
In executing the procurement of goods and/or services, WIKA Beton emphasizes principles of fairness and honesty. All interested parties meeting the requirements, especially in terms of capabilities and performance aligned with the necessary competencies, have the right to participate in the Company's procurement process through healthy competition.

All provisions and information related to the procurement of goods and/or services, including technical and administrative requirements, evaluation procedures, evaluation results, as well as the selection of goods and/or services providers, are open to all participants in the procurement of goods and/or services, as well as the general public interested. Prospective providers of goods and/or services may register as vendors in advance through the following link: https://eproc.wika-beton.co.id to participate in the entire procurement process of goods and/or services.

The development and updating of the electronic procurement system (e-procurement) is carried out periodically to ensure the implementation of the principles of transparency, cost efficiency, competitiveness, and fairness in accordance with the Company's Corporate Governance Guidelines (CoCG).

Rincian tahapan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa di WIKA Beton tergambar dalam bagan berikut:

The details of the stages in the procurement process of goods and/or services at WIKA Beton are illustrated in the following diagram:



PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMASOK

Kebijakan peningkatan kemampuan pemasok/vendor disusun demi memastikan bahwa rantai pasokan (supply chain) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok dalam memasok/memenuhi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Perusahaan akan mempengaruhi kualitas output Perusahaan. Untuk itu, dengan dilakukannya seleksi, maka diharapkan pemasok yang mendaftarkan dirinya untuk bersaing semakin meningkatkan kemampuan dan daya tawarnya.

Demi tercapainya suatu hubungan kemitraan yang baik dengan para pemasok, Perusahaan senantiasa memenuhi hak-hak pemasok sesuai dengan yang disepakati bersama dalam perjanjian. Pedoman hubungan antara Perusahaan dan para pemasok juga diatur secara khusus melalui Code of Corporate Governance dan kebijakan internal Perusahaan.

ENHANCEMENT OF SUPPLIER CAPABILITY

The policy of enhancing supplier/vendor capabilities is formulated to ensure the efficient and effective operation of the supply chain. The ability of suppliers to deliver goods and/ or services required by the Company will impact the quality of the Company's output. Therefore, through rigorous selection processes, it is anticipated that suppliers registering themselves to compete will increasingly enhance their capabilities and competitiveness.

In pursuit of fostering strong partnership relations with suppliers, the Company consistently upholds the rights of suppliers as agreed upon in contractual agreements. Guidelines governing the relationship between the Company and its suppliers are also specifically regulated through the Code of Corporate Governance and internal Company policies.

Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur
Policy On Fulfillment of Creditor Rights

Sebagai tindakan nyata dalam melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance, Perusahaan secara konsisten memprioritaskan kepentingan pihak-pihak yang turut serta dalam meningkatkan kemampuan modal kerja dan sebagai sumber pendanaan untuk investasi jangka menengah dan panjang (kreditur).

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kepercayaan terus diberikan kepada Perusahaan, sehingga prospek pertumbuhan jangka panjang dapat terus terjaga. Kebijakan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan (CoCG) dan Pedoman Etika dan Perilaku (CoC) Perusahaan terkait hubungan dengan kreditur, khususnya mengenai pemenuhan hak-hak kreditur dan kewajiban Perusahaan.

Guna mewujudkan komitmen tersebut, Perusahaan telah mengeluarkan kebijakan terkait pemenuhan hak-hak kreditur. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak-hak kreditur dan mempertahankan tingkat kepercayaan yang telah diberikan oleh kreditur kepada Perusahaan. Secara umum, prinsip-prinsip yang diakui dalam kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur yang diterapkan oleh Perusahaan mencakup:

1. Perusahaan mempertimbangkan dan mengukur kemampuan secara internal untuk memenuhi hak-hak kreditur sebelum melakukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini dilakukan untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan;
2. Perusahaan melakukan pemilihan kreditur berdasarkan aspek kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Perusahaan menerima pinjaman yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (fairness);
4. Perusahaan senantiasa memastikan bahwa pembayaran hutang pokok, bunga dan pokok pinjaman dilakukan tepat waktu;
5. Perusahaan memastikan penyampaian informasi laporan keuangan kepada kreditur dilakukan secara tepat waktu, transparan, akurat, dan dapat dipercaya;
6. Perusahaan menjaga rasio keuangan sesuai dengan rasio yang disepakati dengan kreditur;
7. Perusahaan menggunakan Pinjaman sesuai dengan tujuan penggunaan pinjaman yang diperjanjikan;

As a tangible step in implementing the principles of Good Corporate Governance, the Company consistently prioritizes the interests of stakeholders involved in enhancing working capital capabilities and serving as a source of funding for medium to long-term investments (creditors). This is done with the aim of maintaining trust in the Company, ensuring the sustained prospect of long-term growth.

This is done with the aim of maintaining trust in the Company, so that long-term growth prospects can be maintained. This policy is a further elaboration of the Company's Corporate Governance Guidelines (CoCG) and Code of Conduct (CoC) regarding relationships with creditors, particularly with regard to the fulfillment of creditors' rights and the Company's obligations.

To realize this commitment, the Company has issued a policy regarding the fulfillment of creditor rights. This policy is designed to ensure the fulfillment of creditor rights and maintain the level of trust extended to the Company by creditors. In general, the principles recognized in the policy on fulfillment of creditor rights applied by the Company include:

1. The Company considers and assesses its internal capacity to fulfill creditor rights before borrowing from creditors, ensuring the rights are upheld and maintaining creditors' trust;
2. The Company selects creditors based on accountable credibility factors;
3. The Company accepts loans bound by valid agreements with clauses prioritizing fairness;
4. The Company consistently ensures timely payment of principal, interest, and loan amounts;
5. The Company ensures transparent, accurate, and timely financial report delivery to creditors;
6. The Company maintains financial ratios as agreed upon with creditors;
7. The Company uses loans according to the agreed upon purpose;

8. Perusahaan memastikan bahwa seluruh persyaratan dalam perjanjian dengan pihak kreditur terpenuhi;
9. Perusahaan memberikan informasi secara transparan, akurat, terbuka dan tepat waktu tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur;
10. Perusahaan menyampaikan salinan akta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan kepada kreditur;
11. Perusahaan memberitahukan kepada kreditur pembagian dividen kepada Pemegang Saham Perusahaan;
12. Perusahaan menginformasikan kepada kreditur apabila terjadi perubahan susunan pengurus dan/atau Pemegang Saham Perusahaan.

8. The Company ensures all terms in agreements with creditors are met;
9. The Company provides transparent, accurate, open, and timely information about fund usage to enhance creditor trust;
10. The Company delivers copies of amendments to the Company's Articles of Association to creditors;
11. The Company informs creditors of dividend distributions to Company Shareholders;
12. The Company notifies creditors of changes in the management and/or Shareholders of the Company.

Dalam menjalin hubungan dengan Kreditur, insan WIKA Beton diwajibkan untuk:

1. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada kreditur sehubungan dengan kerja sama yang terjadi dengan menjunjung tinggi transparansi dan kejelasan serta tidak mengandung hal-hal yang multitafsir, dengan tetap memperhatikan dan menjaga informasi-informasi yang bersifat confidential atau rahasia yang dimiliki Perusahaan;
2. Bekerja sama dengan para kreditur yang sudah dipilih atas dasar pertimbangan kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan dan pengembangan bisnis;
3. Melakukan analisa risiko dan manfaat sebelum melakukan ikatan perjanjian kerja sama;
4. Menjaga dan mengutamakan kepentingan Perusahaan;
5. Berkomitmen untuk memenuhi hak-hak para kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain kreditur sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati antara Perusahaan dan Kreditur serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

In establishing relationships with creditors, Company personnel are obligated to:

1. Provide complete and accurate information to creditors regarding ongoing collaborations, upholding transparency and clarity while respecting confidential or proprietary information held by the Company;
2. Collaborate with selected creditors based on considerations of accountable credibility and bona fide judgment for the interests and business development;
3. Conduct risk and benefit analysis before entering into collaboration agreements;
4. Safeguard and prioritize the interests of the Company;
5. Commit to fulfilling the rights of creditors as agreed upon, including interest payments, principal settlements, and other creditor rights as per the agreed-upon terms between the Company and creditors, and relevant legal regulations.

Dalam konteks kebijakan mengenai pelarangan pemberian pinjaman kepada Dewan Komisaris dan Direksi atau pernyataan bahwa pemberian pinjaman dilakukan dalam kondisi wajar dan sesuai dengan bunga yang berlaku di pasar (arm's length).

In the context of policies regarding the prohibition of lending to the Board of Commissioners and Directors or statements that lending is carried out under reasonable conditions and in accordance with prevailing market interest rates (arm's length).

Perseroan menetapkan kebijakan mengenai pinjaman kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan pendekatan pelarangan atau pengaturan ketat. Perseroan memastikan setiap ketentuan pengecualian, apabila ada, tetap memenuhi prinsip kewajaran (arm's length) dan tingkat bunga pasar serta diungkapkan secara jelas pada kanal GCG Perseroan.

The company establishes a policy regarding loans to members of the Board of Directors and Board of Commissioners with a prohibition or strict regulation approach. The company ensures that any exceptions, if any, still comply with the arm's length principle and market interest rates and are clearly disclosed on the company's GCG channel.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
Anti Bribery Management System (SMAP)



Sebagai Perusahaan yang berkomitmen terhadap integritas dan transparansi, PT WIKA Beton Tbk memahami pentingnya penerapan kebijakan yang tegas dalam mencegah praktik penyuapan dan korupsi di seluruh kegiatan operasional perusahaan.

Dalam upaya mendukung lingkungan bisnis yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, kami mengadopsi dan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai dengan standar internasional ISO 37001:2016.

Penerapan SMAP di lingkungan Perusahaan terintegrasi dengan Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Kebijakan Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, Kebijakan Whistleblowing System, Kebijakan Seleksi dan Peningkatan Kemampuan Pemasok/ Vendor, Pedoman Etika dan Perilaku, Pedoman Benturan Kepentingan, serta sistem pelaporan pelanggaran (WBS) sehingga pengendalian anti penyuapan berjalan secara menyeluruh.

Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan, baik di internal maupun dalam hubungan dengan mitra kerja, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya, bebas dari praktik penyuapan.

As a company committed to integrity and transparency, PT WIKA Beton Tbk recognizes the importance of implementing firm policies to prevent bribery and corruption across all operational activities.

As part of our efforts to promote a clean, healthy, and sustainable business environment, we have adopted and implemented the Anti-Bribery Management System (SMAP) in accordance with the international standard ISO 37001:2016.

The implementation of the Anti-Bribery Management System (ABMS) within the Company is integrated with the Anti-Bribery Management System Policy, Business Ethics, Anti-Corruption and Donation Policy, Gratification Control Policy, Whistleblowing System Policy, Supplier/Vendor Selection and Capability Development Policy, Code of Ethics and Conduct, Conflict of Interest Guidelines, as well as the Whistleblowing System (WBS), thereby ensuring that anti-bribery controls are implemented in a comprehensive and integrated manner.

This system is designed to ensure that all company activities, both internal and in interactions with business partners, customers, and other stakeholders, uphold a zero-tolerance approach to bribery.

Melalui penerapan SMAP, WIKA Beton menegaskan komitmennya untuk menjalankan bisnis usaha di atas nilai integritas, berpedoman pada kode etik dan menerapkan Prinsip 5 No(s) yaitu:

1. *No Bribery* (Tidak boleh ada suap-menyuap, sogok, dan pemerasan).
2. *No Kickback* (Tidak boleh ada komisi, uang terima kasih, dan uang bagi-bagi).
3. *No Gift* (Tidak boleh ada hadiah yang tidak wajar).
4. *No Luxurious Hospitality* (Tidak boleh ada jamuan-jamuan yang berlebihan).
5. *No Conflict of Interest* (Tidak boleh ada kepentingan pribadi).

Kebijakan Anti Penyuapan dilaksanakan dengan tujuan:

1. Membantu Perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
2. Sebagai jaminan pada Pemangku Kepentingan bahwa Perusahaan telah melaksanakan praktik kontrol anti suap yang diakui secara internasional dan nasional.
3. Mencegah terjadinya penyuapan.
4. Mendeteksi terjadinya penyuapan.
5. Bukti bahwa Perusahaan telah menanggapi/merespon terjadinya penyuapan.

Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Insan WIKA Beton berkewajiban menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini secara konsisten dalam setiap kegiatan operasional, pengambilan keputusan, dan interaksi dengan pemangku kepentingan.

Kami percaya bahwa penerapan SMAP tidak hanya menjaga reputasi Perusahaan tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang beretika dan profesional.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, serta tindak lanjut atas dugaan pelanggaran kebijakan anti penyuapan dikoordinasikan oleh Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan.

Perseroan mendorong seluruh Insan WIKA Beton, mitra, dan pemangku kepentingan senantiasa menolak segala bentuk penyuapan, gratifikasi yang tidak wajar, dan praktik tidak etis lainnya dalam setiap aktivitas bisnis, demi tercapainya bisnis yang berintegritas dan berkelanjutan.

By this implementation of SMAP, WIKA Beton reaffirms its commitment to conducting business with integrity, guided by a code of ethics and adhering to the 5 No(s) Principles, are:

1. No Bribery (There can be no bribery, kickbacks, and extortions).
2. No Kickback (There can be no commissions, gratuities, and free money).
3. No Gift (There can be no unreasonable gifts).
4. No Luxurious Hospitality (There can be no excessive hospitality).
5. No Conflict of Interest (There can be no conflict of interest).

The Anti Bribery Policy is implemented with the following aims:

1. To help the Company in implementing the Anti Bribery Management System.
2. As an insurance for Stakeholder that the Company has implemented the internationally and nationally recognized anti bribery control practices.
3. To prevent bribery.
4. To detect bribery.
5. To prove that the Company has handled/responded to bribery.

The Board of Commissioners, the Board of Directors, and all WIKA Beton personnel are required to consistently apply this Anti-Bribery Management System in all operational activities, decision-making processes, and interactions with stakeholders.

We firmly believe that the implementation of SMAP not only preserves the Company's reputation but also plays a crucial role in cultivating an ethical and professional work environment.

The monitoring, evaluation, and follow-up of suspected violations of the anti-bribery policy are coordinated by the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) in accordance with the Company's internal regulations.

The Company encourages all WIKA Beton personnel, partners, and stakeholders to consistently reject all forms of bribery, improper gratification, and other unethical practices in every business activity, in order to achieve an ethical and sustainable business.

Penerapan Atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Implementation Of Corporate Governance Guidelines

WIKA Beton berkomitmen untuk melaksanakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015. Komitmen ini diwujudkan melalui implementasi lima aspek utama GCG: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

Selama tahun 2025, Perseroan secara bertahap telah menyelaraskan struktur, sistem, dan kebijakan internal untuk memastikan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan dijalankan secara profesional, berbasis prinsip kehati-hatian, dan selaras dengan kepentingan pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya.

Perseroan juga menjalankan asesmen GCG dengan lembaga independen berdasarkan parameter ACGS atas penerapan GCG dan memperkuat pengungkapan informasi melalui pelaporan rutin yang terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan, keberlanjutan, serta manajemen risiko.

Selain itu, dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan meningkatkan kredibilitas tata kelola, WIKA Beton telah memulai proses penyesuaian terhadap standar internasional melalui adopsi prinsip-prinsip IFRS *Sustainability Disclosure* (IFRS S1 & S2). Persiapan ini mencakup integrasi aspek ESG ke dalam strategi bisnis, pengelolaan risiko jangka panjang, serta pengembangan sistem informasi pelaporan yang lebih andal.

Untuk meningkatkan tata kelola perusahaan agar semakin baik, PT Wijaya Karya Beton Tbk telah menerapkan 8 prinsip pengelolaan perusahaan sesuai Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, pengungkapan informasi disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

WIKA Beton is committed to applying corporate governance principles following the regulations of the Financial Services Authority, specifically as outlined in OJK Regulation Number 21/POJK.04/2015 and OJK Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015. This commitment is demonstrated through implementing the five key aspects of Good Corporate Governance (GCG): transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness and equality.

Throughout 2025, the Company has gradually aligned its structure, systems, and internal policies to ensure that all decision-making processes are conducted professionally, based on prudence, and in line with the interests of shareholders and other stakeholders.

The Company also conducts a GCG assessment conducted by an independent institution based on ACGS parameters of its corporate governance practices and strengthens its information disclosure through regular reporting integrated with the financial reporting system, sustainability efforts, and risk management.

Furthermore, to meet the principles of transparency and enhance governance credibility, WIKA Beton has begun aligning with international standards by adopting the IFRS Sustainability Disclosure principles (IFRS S1 & S2). This preparation includes integrating ESG aspects into the business strategy, long-term risk management, and developing a more reliable reporting information system.

To further enhance corporate governance, PT Wijaya Karya Beton Tbk has implemented eight corporate governance principles in accordance with the Guidelines for Public Company Governance. The related disclosures are presented in the following table:

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi Implementation	Status
Prinsip 1 **Principle 1**			
Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Improving the Value of the General Meeting of Shareholders (GMS) Implementation:	1. Cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. The methods or technical procedures for vote collection (voting), both open and closed, prioritize independence and the interests of shareholders.	PT Wijaya Karya Beton Tbk telah memiliki prosedur teknis pengumpulan suara yang terdapat dalam tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham. PT Wijaya Karya Beton Tbk has established technical procedures for vote collection as outlined in the General Meeting of Shareholders' rules.	Terpenuhi Comply
	2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir dalam RUPS tahunan. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners attend the annual GMS.	Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris hadir dalam RUPS. All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners attend the GMS.	Terpenuhi Comply
	3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web paling sedikit 1 tahun. A summary of the GMS minutes is available on the website for at least one year.	Risalah Keputusan RUPS telah tersedia di Web Perseroan dan dapat diakses pada https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html. The Minutes of the GMS are available on the Company's website and can be accessed at https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html.	Terpenuhi Comply
Prinsip 2 **Principle 2**			
Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor. Improving the Quality of Communication Between the Public Company and Shareholders or Investor.	1. Memiliki kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor. The Company has a communication policy for shareholders or investors.	PT Wijaya Karya Beton Tbk memiliki kebijakan komunikasi kepada investor melalui https://investor.wika-beton.co.id/shareholders.html PT Wijaya Karya Beton Tbk has an investor communication policy through https://investor.wika-beton.co.id/shareholders.html	Terpenuhi Comply
	2. Mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dalam situs web. The communication policy is disclosed on the Company's website.	Situs website PT Wijaya Karya Beton Tbk memuat informasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham dalam rangka menjalin komunikasi yang baik. The website of PT Wijaya Karya Beton Tbk contains information aimed at enhancing shareholder participation and fostering good communication.	Terpenuhi Comply
Prinsip 3 **Principle 3**			
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners.	1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan. The number of members of the Board of Commissioners is determined based on the company's condition.	Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Penunjukan dan pengangkatan tersebut mempertimbangkan kondisi Perseroan dan disesuaikan dengan Pemenuhan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. The appointment and designation of the Board of Commissioners are governed by the Board of Commissioners and Directors' Work Guidelines. These appointments are made considering the Company's conditions and in compliance with the requirements of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.	Terpenuhi Comply
	2. Penentuan Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keragaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition of the Board of Commissioners takes into account the diversity of skills, knowledge, and experience required.	Berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, Dewan Komisaris telah dipilih dengan memperhatikan keragaman keahlian, pengetahuan, pengalaman serta kondisi, dan kompleksitas bisnis PT Wijaya Karya Beton Tbk. Following the Shareholders' policy, the Board of Commissioners has been selected considering the diversity of skills, knowledge, experience, as well as the Company's conditions and business complexity.	Terpenuhi Comply

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi Implementation	Status
Prinsip 4 **Principle 4**			
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Improving the Quality of the Board of Commissioners' Duties and Responsibilities.	1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate its performance.	PT Wijaya Karya Beton Tbk memiliki kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris yang menjadi pedoman untuk menilai kinerja perusahaan. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dapat dilihat dalam laporan tahunan ini. PT Wijaya Karya Beton Tbk has a performance evaluation policy for the Board of Commissioners, which serves as a guideline for assessing the company's performance. The Board's performance evaluation can be found in this annual report.	Terpenuhi Comply
	2. Kebijakan penilaian sendiri diungkapkan dalam Laporan Tahunan. This self-assessment policy is disclosed in the Annual Report.	Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kebijakan *self assessment* atas kinerja pada tahun buku dan telah diungkapkan pada Laporan Tahunan ini. The Board of Commissioners and the Board of Directors have a self-assessment policy for their performance during the fiscal year, which has been disclosed in this Annual Report.	Terpenuhi Comply
	3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan pengunduran diri apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a resignation policy in case of involvement in financial crimes.	Kode Etik Perseroan telah mengatur tentang etika dalam menjalankan bisnis Perseroan termasuk jika terlibat dalam kejahatan keuangan. Kode Etik Perseroan dapat diakses pada https://www.wika-beton.co.id/pedoman-tata-kelola-perusahaan/#flipbook-pedoman-etika-dan-perilaku-code-of-conduct-2/1/ The Company's Code of Ethics outlines the standards of conduct for doing business, including involvement in financial crimes. The Code of Ethics can be accessed at https://www.wika-beton.co.id/pedoman-tata-kelola-perusahaan/#flipbook-pedoman-etika-dan-perilaku-code-of-conduct-2/1/.	Terpenuhi Comply
	4. Dewan Komisaris atau KNR menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the NRC (Nomination and Remuneration Committee) develops a succession policy for the nomination process of Board of Directors members.	Dewan Komisaris dan Komite Nominasi Remunerasi & GCG mengevaluasi kebijakan suksesi atas nominasi anggota Direksi sebagaimana tugas dan tanggung jawab dalam Board Manual Komite Nominasi Remunerasi dan GCG. The Board of Commissioners and the Nomination, Remuneration & GCG Committee evaluate the succession policy for nominating members of the Board of Directors, as outlined in the Board Manual of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee.	Terpenuhi Comply
Prinsip 5 **Principle 5**			
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.	1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. The number of members of the Board of Directors is determined based on the company's condition and the effectiveness of decision-making.	Penentuan jumlah Direksi Perusahaan mengacu pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dimana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, paling kurang terdiri dari 2 orang anggota Direksi, yang 1 di antaranya diangkat menjadi Direktur Utama. The number of Directors is following applicable regulations. According to Article 2, Paragraphs (1) and (2) of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Board must consist of at least two members, one of whom is appointed as the President Director.	Terpenuhi Comply
	2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keragaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition of the Board of Directors considers the diversity of skills, knowledge, and experience required.	Dalam prosesnya, Perseroan memperhatikan keberagaman dan keahlian termasuk gender. Perseroan senantiasa memberikan kesempatan kerja kapada siapapun selama keahlian dan latarbelakang mereka memenuhi kriteria yang ditentukan. In the process, the Company takes diversity and expertise, including gender, into account. The Company consistently provides equal employment opportunities to anyone as long as their skills and background meet the specified criteria.	Terpenuhi Comply
	3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors responsible for accounting or finance have expertise and/or knowledge in the field of accounting.	Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dalam Perusahaan adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang akuntansi dan keuangan sebagaimana dapat dilihat dalam riwayat jabatan dan pendidikan Direksi pada bagian Profil Direksi. The Director responsible for accounting or finance at the company is the Finance and Risk Management Director, who possesses adequate knowledge and experience in accounting and finance, as detailed in the Director's profile section.	Terpenuhi Comply

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi Implementation	Status
Prinsip 6 **Principle 6**			
Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Improving the Execution of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.	1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to evaluate its performance.	Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian Sendiri yang tercantum dalam bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. The Board of Directors has a Self-Assessment Policy, which is included in the section on the Performance Evaluation of the Board of Commissioners and the Board of Directors.	Terpenuhi Comply
	2. Kebijakan penilaian sendiri diungkapkan dalam Laporan Tahunan. This self-assessment policy is disclosed in the Annual Report.	Hasil Penilaian Sendiri Direksi diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan dalam bagian Tata Kelola Perusahaan. The results of the Board of Directors' self-assessment are disclosed in the Company's Annual Report, under the Corporate Governance section.	Terpenuhi Comply
	3. Direksi mempunyai kebijakan pengunduran diri apabila terlibat kejahatan keuangan. The Board of Directors has a resignation policy in case of involvement in financial crimes.	Kode Etik Perseroan telah mengatur tentang etika dalam menjalankan bisnis Perseroan termasuk jika terlibat dalam kejahatan keuangan. Kode Etik Perseroan dapat diakses pada https://www.wika-beton.co.id/pedoman-tata-kelola-perusahaan/#flipbook-pedoman-etika-dan-perilaku-code-of-conduct-2/1/ The Company's Code of Ethics outlines the standards of conduct for doing business, including involvement in financial crimes. The Code of Ethics can be accessed at https://www.wika-beton.co.id/pedoman-tata-kelola-perusahaan/#flipbook-pedoman-etika-dan-perilaku-code-of-conduct-2/1/.	Terpenuhi Comply
Prinsip 7 **Principle 7**			
Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan Melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Enhancing Corporate Governance Through Stakeholder	1. Memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. A policy to prevent insider trading.	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait Insider Trading yang dapat diakses pada https://www.wika-beton.co.id/wp-content/uploads/2024/07/gcg_KEBIJAKAN-INSIDER-TRADING-FINAL-2024.pdf The Company has established an Insider Trading Policy, which can be accessed at https://www.wika-beton.co.id/wp-content/uploads/2024/07/gcg_KEBIJAKAN-INSIDER-TRADING-FINAL-2024.pdf.	*Comply*
	2. Memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud. Anti-corruption and anti-fraud policies.	Dalam rangka implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), PT Wijaya Karya Beton Tbk memiliki beberapa kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*, melalui Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*), monitoring atas Laporan harta kekayaan pejabat Negara (LHKPN), program Pengendalian Gratifikasi, Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 serta sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). As part of its commitment to Good Corporate Governance (GCG), the Company enforces its anti-corruption and anti-fraud measures through the Corporate Code of Conduct, monitoring of State Official Asset Declarations (LHKPN), a Gratification Control Program, the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, and a Whistleblowing System.	Terpenuhi Comply
	3. Memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok dan vendor. A policy for the selection and capacity building of suppliers and vendors;	WIKA Beton telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang proses seleksi vendor dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa, kebutuhan tersebut dapat diakses pada https://www.wika-beton.co.id/wp-content/uploads/2024/07/gcg_KEBIJAKAN-SELEKSI-PEMASOK_VENDOR-2024-FINAL.pdf. WIKA Beton has a policy that governs the vendor selection process for meeting the needs of goods and services. This policy can be accessed at https://www.wika-beton.co.id/wp-content/uploads/2024/07/gcg_KEBIJAKAN-SELEKSI-PEMASOK_VENDOR-2024-FINAL.pdf.	Terpenuhi Comply
	4. Memiliki kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur. A policy to uphold the rights of creditors;	Pemenuhan hak-hak kreditur telah diatur melalui kebijakan dan dapat diakses pada https://www.wika-beton.co.id/wp-content/uploads/2024/06/gcg_KEBIJAKAN-PEMENUHAN-HAK-HAK-KREDITUR-FINAL-2024.pdf The fulfillment of creditors' rights is governed by a policy, which can be accessed at https://www.wika-beton.co.id/wp-content/uploads/2024/06/gcg_KEBIJAKAN-PEMENUHAN-HAK-HAK-KREDITUR-FINAL-2024.pdf.	Terpenuhi Comply

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi Implementation	Status
	5. Memiliki kebijakan sistem whistleblowing. A whistleblowing policy;	Perseroan telah memiliki mekanisme penyampaian pengaduan pelanggaran yang terjadi di seluruh unit WIKA Beton. Kebijakan penyampaian pelaporan pelanggaran tersebut telah diungkapkan pada Laporan Tahunan ini. The Company has established a mechanism for reporting violations that occur across all units of WIKA Beton. The policy for reporting violations has been disclosed in this Annual Report.	Terpenuhi Comply
	6. Memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang Direksi dan karyawan. A policy on long-term incentive programs for Directors and employees.	WIKA Beton telah memiliki kebijakan terkait pemberian insentif bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini. WIKA Beton has a policy regarding the provision of incentives for the Board of Commissioners and the Board of Directors, which has been disclosed in this Annual Report.	Terpenuhi Comply
Prinsip 8 **Principle 8**			
Meningkatkan Keterbukaan Informasi. Enhancing Information Disclosure	1. Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. The Company utilizes information technology more broadly beyond the official wtebsite as a means to support greater transparency and disclosure.	Dalam implementasinya Perseroan menggunakan *channel* media lainnya dalam melakukan keterbukaan informasi melalui: Ig. : wikabeton Youtube : PTWIKABeton LinkedIn : PT Wijaya Karya Beton Tbk In its implementation, the Company utilizes other media channels to ensure information transparency through: Instagram: wikabeton YouTube: PTWIKABeton LinkedIn: PT Wijaya Karya Beton Tbk	Terpenuhi Comply
	2. Laporan tahunan perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan, paling sedikit 5% selain Pemegang Saham Utama dan Pengendali. The annual report of the Public Company discloses the ultimate beneficial owners holding at least 5% of the Company's shares, excluding the Main and Controlling Shareholders.	Perseroan telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir di Bab 3 pada Laporan Tahunan ini. The Company has disclosed the ultimate beneficial owners in Chapter 3 of this Annual Report.	Terpenuhi Comply

Referensi PUGKI 2021
2021 PUGKI Reference

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris **Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioner**			
1.1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi **Roles and Responsibilities of the Board of Director**			
1.1.1. Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out its leadership role and seeks to achieve the following governance outcomes:	√		
a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; to be competitive and focused on longterm performance;	√		
b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; to be ethical and responsible in conducting business;	√		
c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta to have positive contributions to the community and the environment; as well as	√		
d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (corporate resilience) to be able to survive and grow (corporate resilience)	√		
1.1.2. Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporate mission, vision, goals, objectives, strategies, as well as annual and mid-term plans are consistent with long-term goals, by effectively utilizing innovation and technology.	√		
1.1.3. Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporation implements an appropriate and effective risk management and internal control system that is aligned with the corporate vision, mission, goals, objectives and strategies, as well as complying with applicable laws and regulations and standards.	√		
1.1.4. Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures that the integrity of the corporate accounting and financial reporting system and the timely and accurate disclosure of all material information about the corporation	√		
1.1.5. Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared properly.	√		

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
1.1.6. Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors builds a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with corporate business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, as well as supports corporate goals and strategies.	√		
1.1.7. Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations conducting business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting tools, allowing the Sharia Supervisory Board to carry out its role effectively.		√	Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sehingga Perseroan tidak membutuhkan perangkat pendukung termasuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi implementasi prinsip usaha syariah. The Company does not conduct its business activities based on Sharia principles; therefore, it does not require supporting structures, including a Sharia Supervisory Board, to oversee the implementation of Sharia business practices.
1.1.8. Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors' Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among others, the delegation of roles for the Directors individually, which can be regulated in the Board of Directors' Charter or by a decision letter of the Board of Directors.	√		
1.1.9. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in a financial crime and are proven to have made a mistake.	√		
1.2. Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya **Performance Assessment – Board of Directors and its Members**			
1.2.1. Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation in an objective and independent manner to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual Director.	√		
1.2.2. Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with due observance of the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining performance assessment criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	√		

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
1.3. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris **Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners**			
1.3.1. Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the corporate mission, vision and strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advice, and approves longterm business and financial plans and the company's short-term financial plans. The Board of Commissioners provides advice and monitors the Board of Directors on the management of its implementation. The Board of Directors and Board of Commissioners are involved in decisions that are very important for the corporation, as regulated in the articles of association of the company.	√		
1.3.2. Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan The types of decisions that require the approval of the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.	√		
1.3.3. Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur non diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. Taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and to be resolved by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the above, the Board of Commissioners takes into account the diversity, non-discriminatory elements, as well as provides equal opportunities regardless of ethnicity, religion, race, class and gender. The Board of Commissioners ensures a formal and transparent selection and nomination process for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.	√		
1.3.4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or Committees conducting the nomination function formulate a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors. Every year, the Board of Commissioners reviews the report on the implementation of the development and succession plans submitted by the President Director.	√		

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
1.3.5. Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners a). submit to the GMS, which may be preceded by recommendation from Committees conducting the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, in line with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporation and shareholders; b). periodically reviewing the remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners.	√		
1.3.6. Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners oversees the effectiveness of corporate governance policies and the implementation, as well as proposing changes if necessary.	√		
1.3.7. Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs the company to implement the appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with the corporate goals, objectives and strategies as well as complying with laws and regulations, codes of conduct, and applicable standards.	√		
1.3.8. Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and directs the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions	√		
1.3.9. Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews, and approves the annual report and sustainability report of the company, and ensures their integrity, as well as oversees the company's disclosure and communication process.	√		
1.3.10. Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	√		
1.3.11. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	√		

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
1.3.12. Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are highly expected to be able to contribute to honest, objective, active, and constructive discussions at meetings of the Board of Commissioners	√		
1.3.13. Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner acts as the coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner promotes a culture of transparency and constructive dialogue that allows a variety of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. In addition, there should also be opportunities for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	√		
1.4. Pembentukan Komite **Establishment of Committees**			
1.4.1. Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporation has committees under the Board of Commissioners, consisting of at least: the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Management Monitoring Committee.	√		
1.4.2. Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and the majority of other committees established by the Board of Commissioners are independent parties, and all members of the committee are competent, committed, and have sufficient authority to perform their roles in an effective and independent manner	√		
1.4.3. Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure the monitoring on the implementation of duties of the Audit Committee is carried out in an objective and independent manner, the President Commissioner is not allowed to be the chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances, which must be explained in the annual report.	√		

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
1.5. Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya **Performance Assessment – Board of Commissioners and its Member**			
1.5.1. Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual Commissioner.	√		
1.6. Benturan Kepentingan **Conflicts of Interest**			
1.6.1. Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors with concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chairman of the committee carrying out the nomination function, prior to accepting a new appointment as Director or Commissioner of a public company, other Director positions or other positions with a significant time commitment.	√		
1.6.2. Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest for management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners with conflicts of interest do not participate in monitoring and making decisions on potential conflicts of interest involving the Commissioners or affiliates of the Commissioners concerned.	√		
1.7. Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris **Competency Improvement of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners**			
1.7.1. Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, characteristics and operations of the corporation, relevant laws and regulations and other applicable standards and obligations. The Board of Directors through the corporate secretary supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing the required skills and knowledge to carry out their roles on the Board.	√		

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
2. Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris **Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners**			
2.1. Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris **Composition of the Board of Directors and Board of Commissioner**			
2.1.1. Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining prospective candidates for Directors, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee can use independent sources to determine qualified candidates.	√		
2.1.2. Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the required knowledge, abilities, and expertise to properly meet the role of the Board of Directors and takes into account the fulfillment of the diversity of the Board of Directors.	√		
2.1.3. Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The corporate policy regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report	√		
2.1.4. Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent in order to produce the desired Board composition. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.	√		
2.1.5. Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee that performs the nomination function establishes nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' expertise matrix, which has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate profile meets the established requirements in the expertise matrix and nomination criteria.	√		

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
2.1.6. Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee that performs the nomination function establishes nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' expertise matrix, which has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate profile meets the established requirements in the expertise matrix and nomination criteria.	√		
2.1.7. Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota -anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan jender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background, and gender needed to properly fulfill the role of the Board of Commissioners.	√		
2.1.8. Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles with potentials for conflicts of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with a limited term of office and there is disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence from a corporate perspective.	√		
2.1.9. Tanggung jawab dan peran Komite Nominasi dan Remunerasi termasuk namun tidak terbatas pada: The responsibilities and roles of the Nomination and Remuneration Committee include, but are not limited to, the following:			
a. Menyusun pedoman untuk memastikan bahwa semua komisaris mengalokasikan waktu yang cukup kepada korporasi agar dapat menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Pedoman tersebut mencakup diantaranya: Develop guidelines to ensure that all commissioners allocate sufficient time to the corporation to effectively fulfill their responsibilities. These guidelines include, but are not limited to, the following:			

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference		Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
		Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
i.	Dalam penunjukan komisaris utama, Komite Nominasi dan Remunerasi menyiapkan uraian spesifikasi pekerjaan, termasuk persyaratan komitmen waktu yang juga mempertimbangkan kebutuhan komitmen waktu pada saat krisis. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada dewan komisaris sebelum penunjukan dan diungkapkan dalam laporan tahunan. Perubahan komitmen harus segera dilaporkan kepada dewan komisaris dan dampaknya dijelaskan dalam laporan tahunan berikutnya. In the appointment of the President Commissioner, the Nomination and Remuneration Committee prepares a detailed job specification, including time commitment requirements that also take into account the demands during times of crisis. Any significant external commitments must be disclosed to the Board of Commissioners before appointment and must also be disclosed in the annual report. Any changes to such commitments must be promptly reported to the Board of Commissioners and explained in the following annual report.	√		
ii.	Dalam penunjukan anggota komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan syarat dan ketentuan penunjukan anggota komisaris. Syarat dan ketentuan ini tersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Komitmen waktu yang diharapkan dicantumkan dalam Surat penunjukan anggota komisaris dan anggota komisaris harus memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi komitmen waktu yang diharapkan. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada dewan komisaris sebelum penunjukan, beserta indikasi komitmen waktu yang diperlukan dan dewan komisaris harus diberitahu jika terdapat perubahan atas komitmen tersebut. In appointing members of the Board of Commissioners, the Nomination and Remuneration Committee sets the terms and conditions of appointment. These terms and conditions must be made available for review. The expected time commitment must be specified in the appointment letter for each member, and members must ensure they have sufficient time to meet the expected commitments. Any significant external obligations must be disclosed to the Board of Commissioners before appointment, along with an indication of the time commitment required, and any changes to these commitments must be promptly reported to the Board.	√		

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference		Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
		Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
b.	Secara proaktif memimpin dan bertanggungjawab atas pengembangan, implementasi, dan reviu berkelanjutan atas perencanaan suksesi direksi dan dewan komisaris. Proactively lead and take responsibility for the development, implementation, and ongoing review of succession planning for the Board of Directors and the Board of Commissioners.		√	Dalam implementasinya, pelaksanaan suksesi Direksi dilaksanakan oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance. Namun, perencanaan suksesi Dewan Komisaris dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku induk Perseroan. In practice, the succession process for the Directors is carried out by the Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance Committee. However, the succession planning for the Board of Commissioners is conducted by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as the Company's parent entity.
c.	Secara proaktif memimpin dan bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan reviu berkelanjutan atas perencanaan suksesi direksi dan dewan komisaris. Proactively lead and take responsibility for the development, implementation, and ongoing review of succession planning for the Board of Directors and the Board of Commissioners.	√		
d.	"Menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite. Uphold the principle of independence in handling conflicts of interest (and potential conflicts of interest) among committee members in carrying out the Committee's duties."		√	Sampai dengan tahun 2025, Perseroan belum menunjuk atau bekerja sama dengan pihak ke-3 atau konsultan indpenden nominasi. Proses nominasi Direksi Perseroan dilakukan oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance dan untuk Dewan Komisaris kewanangannya di berikan kepada induk Perseroan yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. As of 2025, the Company has not appointed or collaborated with any third party or independent nomination consultant. The nomination process for the Company's Directors is conducted by the Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance Committee, while the authority for nominating members of the Board of Commissioners is assigned to the Company's parent entity, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
2.2. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris **Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners**			
2.2.1. Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The Board of Directors' remuneration must be proposed, through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be resolved by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by taking into account the role of each member of the Board of Directors and the economic situation as well as corporate performance	√		
2.2.2. Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of longterm goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by taking into account the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation as well as corporate performance. In addition, consideration should also be given to his/her position as President Commissioner and chairman as well as membership in committees.	√		
2.2.3. Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that the remuneration package is determined based on the achievements, qualifications, and competencies of the Directors and Commissioners by taking into account the performance of corporate operations, individual performance, and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for establishing remuneration policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	√		

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
3. Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris **Work Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners**			
3.1. Sifat Hubungan Kerja **Nature of Work Relationship**			
3.1.1. Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners and between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to ensure that confidential information does not leak.	√		
3.1.2. Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors cooperates with the Board of Commissioners in formulating the corporate missions, visions and strategies, and regularly discusses the implementation.	√		
3.1.3. Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has a crucial role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	√		
3.2. Akses informasi Dewan Komisaris **Access to Information for the Board of Commissioners**			
3.2.1. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant, and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains sufficient information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay, and comprehensively on all matters relevant to the corporation. The Board of Commissioners may at any time request additional information to the Board of Directors.	√		
3.2. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi **Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners on Impacts of the Structure**			

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
3.3.1. Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of the ownership structure on the corporation. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the shareholding structure and relationships between corporate shareholders, which may have an impact on corporate management and operations.	√		
4. Perilaku Etis dan bertanggung jawab **Etchical and Responsible Conduct**			
4.1. Pedoman Etika dan Perilaku **Code of Conduct**			
4.1.1. Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: This statement is set forth in the Code of Conduct and Business Ethics, which must clearly state the corporate expectation that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners and employees will:			
a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; Act in the best interests of the corporation;	√		
b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; Act honestly and with a high standard of integrity;	√		
c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. Be independent and act based on complete information, in good faith, with due diligence and prudence;	√		
d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; Comply with laws and regulations that apply to the corporation and its operations;	√		
e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; Avoiding actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate ethics guidelines;	√		
f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; Not involved or participating in any activities that will create a conflict of interest with the best interests of the corporation or which will have a negative impact on the reputation of the corporation;	√		
g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. Do not take advantage of property or information owned by the corporation, ownership of other assets or its customers for personal gain or which causes harm to the corporation and its customers	√		

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. Does not take advantage of the position or opportunities generated by the position for personal gain	√		
i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. Avoiding the act of asking for or receiving from third parties payments, gratuities, or other benefits for themselves or for other people that will lead to conflicts of interest/provide benefits to third parties by violating the laws and regulations;	√		
j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. Respect differences of opinion and the rights of each member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees;	√		
k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. Ensuring full, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications;	√		
4.1.2. Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan (anti fraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors establishes policies and practices on anti-money laundering and financing of terrorism, anti-bribery, anticorruption, anti-fraud, political involvement with reference to the national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other related standards.	√		
4.2. Nilai – nilai dan Budaya Organisasi **Corporate Values and Culture**			
4.2.1. Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai nilai korporasi The corporation articulates, fosters, and discloses corporate culture and value	√		
4.3. Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya **Enforcement and Communication of the Code of Ethics, Values, and Culture**			
4.3.1. Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The corporate code of conduct and code of ethics are communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees, integrated into corporate strategy and operations, including risk management system and remuneration structure, as well as being enforced.	√		

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
5. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan **Risk Management, Internal Control, and Compliance**			
5.1. Pengendalian Internal dan Kepatuhan **Internal Control and Compliance**			
5.1.1. Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors periodically reviews the accuracy of designs and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control, and corporate compliance and reports the implementation and results of the review to shareholders through the annual report of the Corporation.	√		
5.2. Manajemen Risiko **Risk Management**			
5.2.1. Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk is a unity, disclosed in a transparent manner, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as in discussions at the meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.	√		
5.2.2. Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Oversight Committee assists the implementation of the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused, and independent mechanism for oversight of corporate risk management	√		
5.3. Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan **Integration of Governance, Risk Management, and Compliance**			
5.3.1. Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors establishes an integrated governance, risk management and compliance (GRC) system, by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its objectives.	√		
5.3.2. Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the division in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause a conflict of interest.	√		

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
5.4. Audit Internal **Internal Audit**			
5.4.1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners through the Audit Committee oversees and ensures that the internal audit function assists the corporation in achieving its goals through an objective and disciplined approach in order to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.	√		
6. Pengungkapan dan Transparansi **Disclosure and Transparency**			
6.1. Kebijakan Pengungkapan **Policy and Disclosure**			
6.1.1. Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure the disclosure of material information and safeguard sensitive information as well as corporate secrets.	√		
6.1.2. Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' right to obtain regularly and timely relevant material information regarding the corporation must be me.	√		
6.2. Laporan Keuangan dan Keberlanjutan **Financial and Sustainability Reports**			
6.2.1. Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial reports that are not materially audited or reviewed by external auditors are accurate, complete, and provide investors with the right information to make the right investment decisions	√		
6.2.2. Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of audits on financial report carried out by external auditors. This activity includes recommending the appointment, reappointment and, if necessary, the termination and remuneration of the external auditor.	√		
6.2.3. Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. The sustainability report shall be prepared and disclosed accurately and in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	√		

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
6.2.4. Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The corporation issues an integrated annual report that places historical performance into context and describes the risks, opportunities, and prospects of the corporation in the future, which will subsequently assist shareholders and stakeholders to understand the strategic goals of the corporation and its progress in creating sustainable valu.	√		
6.3. Diseminasi Informasi **Dissemination of Information**			
6.3.1. Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Channels for the dissemination of information should provide users with equitable, timely, and relatively inexpensive access to relevant information.	√		
6.3.2. Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The corporation ensures that an annual statement on the implementation of the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance, including an explanation on the implementation of each Recommendation and Guideline is available on the website for a minimum period of five years	√		
6.3.3. Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus di diungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations listed on the capital market in jurisdictions other than the jurisdiction of origin, applicable laws and regulations on corporate governance must be clearly disclosed. In the case of cross listing, the criteria and procedures for cross listing, criteria and procedures for recognizing the listing requirements for the primary listing must be transparent and documented	√		

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
7. Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham **Protection of the Rights of Shareholders**			
7.1. Hak Pemegang Saham **Rights of Shareholders**			
7.1.1. Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor The corporation has a communication policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.		√	Perseroan belum memiliki kebijakan terkait komunikasi dengan pemegang saham dan investor. Namun, Perseroan telah memfasilitasi keterlibatan komunikasi dengan pemegang saham dan investor selain melalui penyelenggaraan RUPST, dimana Perseroan memberikan beberapa fasilitas media agar pemegang saham dan investor dapat memperbaharui informasi mereka terkait Perseroan. Hal ini telah diungkapkan pada Laporan Tahunan 2025. The Company has not yet established a formal policy regarding communication with shareholders and investors. However, the Company has facilitated engagement with shareholders and investors beyond the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) by providing various media channels through which they can access updated information about the Company. This has been disclosed in the 2025 Annual Report.
7.1.2. Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. Corporations that are parent entities ensure that their corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which their investment is significant.	√		Perseroan mengimplementasikan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang ditetapkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku entitas induk, Perseroan dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik turut diimplementasikan secara konsisten oleh anak perusahaannya. Pendekatan ini mendukung terciptanya sinergi tata kelola yang selaras dan berkesinambungan di seluruh lini usaha. The Company implements the Integrated Governance Policy established by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as the parent entity. This ensures that the principles of good corporate governance are consistently applied across its subsidiaries. This approach supports the creation of aligned and sustainable governance synergy throughout all business lines.

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
7.2. Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham **Fair Treatment of Shareholders**			
7.2.1. Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b).pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. Corporations have rules and procedures that ensure a). all shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally, b). disclosure of said rules and procedures, as well as disclosure of capital structure and arrangements that allow certain shareholders to gain influence or control that is disproportionate to their share ownership.			
a. Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, All shareholders holding the same series within a class of shares must be treated equally,	√		
b. Pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memeroleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. The corporation must disclose the rules and procedures governing this principle, as well as disclose the capital structure and any arrangements that allow certain shareholders to exercise influence or control disproportionate to their share ownership.	√		

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
7.2.2. Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The corporation has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and carried out in such a way as to ensure that conflicts of interest are properly managed, and protect the interests of the corporation and shareholders.	√		Perseroan tidak memiliki prosedur dan aturan khusus yang mengatur mengenai transaksi pihak berelasi. Namun dalam penerapannya, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta telah mengungkapkan sifat dan hubungan dari transaksi berelasi telah diungkapkan pada Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan serta keterbukaan Informasi yang mengacu kepada POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. The Company does not have specific internal procedures and rules governing related party transactions. However, in practice, as a publicly listed company, it refers to the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions. The Company has disclosed the nature and relationships of related party transactions in its Financial Statements, Annual Report, and Information Disclosure, following Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies.

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
7.2.3. Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. The corporation has and discloses policies to prevent insider trading. The corporation has clear rules regarding any trading in the corporation's shares by directors, commissioners, and insiders to ensure that no one may directly or indirectly benefit from information that is not/has not yet been made available to the market.	√		
7.3. Rapat Umum Pemegang Saham **General Meeting of Shareholders**			
7.3.1. Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi The corporation implement the notice for GMS with the agenda and materials for the GMS as completely and as early as possible (no later than 28 days prior to the GMS) to provide sufficient time and material for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are disclosed through electronic means, such as through the corporate website.	√		
7.3.2. Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporation has established and disclosed rules and procedures that facilitate shareholders to participate and vote effectively at the GMS.	√		
7.3.3. Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Shareholders participate effectively to determine the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	√		
7.3.4. Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporation ensures the transparency and accountability of the external auditor at the GMS.	√		
7.3.5. Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. Submission of voting results and a complete summary of the minutes of the GMS will be announced to the public on the following working day.	√		

Referensi PUGKI 2021 2021 PUGKI Reference	Rekomendasi Terlaksana Implemented Recommendation		Penjelasan Explanation
	Terpenuhi Comply	Menjelaskan Explain	
8. Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham **Appreciation for Stakeholders**			
8.1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*stakeholder engagement*) **Stakeholders Engagement**			
8.1.1. Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The corporation through the Corporate Secretary carries out regular, transparent, and effective communication with key stakeholders as well as involves them to understand their hopes and complaints as well as the impact of the corporation on them.	√		
8.2. Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis **Integration of Sustainability in Business Models**			
8.2.1. Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners together with the Board of Directors are responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including in terms of establishing corporate sustainability strategies, priorities and targets. The Board of Directors and Board of Commissioners incorporate sustainability considerations when carrying out their roles, including by developing and implementing corporate strategies, business plans, main action plans, and risk management.	√		
8.3. Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis **Protection for Stakeholders**			
8.3.1. Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the application of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporation and ensures that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with the rights of stakeholders		√	
8.3.2. Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritizes sustainability		√	

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
A	**Rights and Equitable Treatment of Shareholder** **Hak Pemegang Saham**	
A.1	Basic Shareholders Rights. Hak Dasar Pemegang Saham.	
A.1.1	Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and(ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? In case the company has offered Scrip dividend, did the company paid the dividend within 60 days? Apakah perusahaan membayar dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; artinya, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) diumumkan untuk dividen interim dan (ii) disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum untuk dividen final? Jika perusahaan telah menawarkan dividen Scrip, apakah perusahaan membayar dividen dalam waktu 60 hari?	1. Annual Report 2025 (Pages 311-315) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 311-315) 2. Annual Report 2025 (Page 27) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 27) 3. Summary of minutes of AGMS Ringkasan Risalah RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026
A.2	Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder meetings. Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta mendapatkan informasi terkait aturan-aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang berlaku di RUPS.	
A.2.1	Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/commissioners? Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan dengan mata acara, untuk menyetujui remunerasi (biaya, tunjangan, manfaat dalam bentuk natura dan imbalan lainnya) atau kenaikan remunerasi untuk Direktur/Komisaris non-eksekutif?	1. Annual Report 2025 (Page 357): Laporan Tahunan 2025 (Halaman 357) 2. Annual Report 2025 (Page 348): Laporan Tahunan 2025 (Halaman 348) 3. AGMS Rules of Procedure: Tata Tertib Pelaksanaan RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026 4. Summary of minutes of AGMS Ringkasan Risalah RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026
A.2.2	Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/commissioners? Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham non-pengendali untuk mencalonkan kandidat anggota Direksi/Komisaris?	1. Annual Report 2025 (Page 347-348): Laporan Tahunan 2025 (Halaman 347-348) 2. Announcement of the 2025 AGMS Pengumuman RUPST 2025 https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026
A.2.3	Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually? Apakah perusahaan memperbolehkan pemegang saham untuk memilih Direktur/Komisaris secara individual?	1. AGMS Rules of Procedure Tata Tertib Pelaksanaan RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026 2. Minutes of AGMS Risalah RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026
A.2.4	Does the company disclose the voting procedures used before the start of meeting? Apakah perusahaan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum rapat dimulai?	AGMS Rules of Procedure Tata Tertib Pelaksanaan RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026
A.2.5	Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded? Apakah risalah Rapat Umum Tahunan terakhir mencatat bahwa para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta mencatat pertanyaan yang diajukan pemegang saham dan jawaban yang diberikan?	1. AGMS Rules of Procedure Tata Tertib Pelaksanaan RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026 2. Minutes of AGMS Risalah RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
A.2.6	Does the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM? Apakah perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk setuju, tidak setuju, dan abstain suara untuk seluruh keputusan/setiap mata acara RUPS terakhir?	1. Annual Report 2025 (Pages 354 - 359): Laporan Tahunan 2025 (Halaman 354-359) 2. Minutes of AGMS: Risalah RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026 3. Announcement of 2024 AGMS Results: Pengumuman Hasil RUPST 2024 https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026
A.2.7	Does the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM? Apakah perusahaan mengungkapkan daftar anggota dewan yang menghadiri RUPS terakhir?	Annual Report 2025 (Page 353): Laporan Tahunan 2025 (Halaman 353) Announcement of 2024 AGMS Results: Pengumuman Hasil RUPST 2024 https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026 Minutes of AGMS: Risalah RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026
A.2.8	Does the company disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attended the most recent AGM? Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan Direktur Utama (jika bukan anggota direksi dan Dewan Komisaris) menghadiri RUPS terakhir?	Annual Report 2025 (Pages 354 - 359): Laporan Tahunan 2025 (Halaman 354-359) Minutes of AGMS: Risalah RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026 Announcement of 2024 AGMS Results: Pengumuman Hasil RUPST 2024 https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026
A.2.9	Does the company allow voting in absentia? Apakah perusahaan mengizinkan pemungutan suara in absentia?	AGMS Rules of Procedure Tata Tertib Pelaksanaan RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026
A.2.10	Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM? Apakah pemungutan suara di perusahaan dilakukan melalui jajak pendapat (dan bukan dengan mengacungkan tangan) untuk semua keputusan pada RUPS terakhir?	Minutes of AGMS Risalah RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026 AGMS Rules of Procedure Tata Tertib Pelaksanaan RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026
A.2.11	Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM? Apakah perusahaan mengungkapkan penugasan pihak independen (pemeriksa) untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara pada RUPS?	Annual Report 2025 (Page 365) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 365)
A.2.12	Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM/EGM for all resolutions? Apakah perusahaan mengumumkan hasil pemungutan suara untuk setiap keputusan yang diambil di RUPS/RUPSLB terakhir pada hari kerja berikutnya?	Yes, on the Investor Relations Menu Website page, GMS Submenu, all AGMS Minutes information can be accessed publicly on the next working day Ya, di halaman menu Hubungan Investor pada situs web, submenu RUPST, semua informasi Risalah RUPST dapat diakses oleh publik pada hari kerja berikutnya https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026
A.2.13	Does the company provide at least 21 days notice for all AGMs and EGMs? Apakah perusahaan memberikan panggilan setidaknya 21 hari untuk semua RUPS dan RUPSLB?	Yes, attached to the Investor Relations Menu Website page, GMS Submenu (AGMS Invitation and AGMS Announcement) Ya, terdapat di halaman situs web menu Hubungan Investor, submenu RUPST (Undangan RUPST dan Pengumuman RUPST) AGMS Invitation Undangan RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026 AGMS Announcement Pengumuman RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
A.2.14	Does the company provide the rationale and explanation for each agenda item which require shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement? Apakah perusahaan memberikan alasan dan penjelasan untuk setiap mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pemberitahuan RUPS/surat edaran dan/atau pernyataan yang menyertainya?	Annual Report 2025 (Pages 354 - 359): Laporan Tahunan 2025 (Halaman 354-359) Articles of Association Anggaran Dasar https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/ AGMS Presentation Materials: Materi Presentasi RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026 AGMS Rules of Procedure Tata Tertib Pelaksanaan RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026
A.2.15	Does the company give the opportunity for shareholders to place item/s on the agenda of general meetings and/or to request for general meetings subject to a certain percentage? Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memasukkan mata acara rapat umum dan/atau untuk meminta diadakannya rapat umum dengan persentase tertentu?	Articles of Association Anggaran Dasar https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/ AGMS Presentation Materials Materi Presentasi RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026 Minutes of AGMS Risalah RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026
A.3	Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and transparent manner. Berfungsinya pasar dalam mengendalikan perusahaan secara efisien dan transparan.	
A.3.1	In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers requiring shareholders' approval, does the board of directors/commissioners of the company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price? Dalam hal merger, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang membutuhkan hak persetujuan pemegang saham, apakah Direksi/Komisaris Perseroan menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran harga transaksi?	Annual Report 2025 (Page 129-130) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 129-130)
A.4	The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated. Pelaksanaan Hak Kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham Termasuk Institusi Investor wajib terfasilitasi.	
A.4.1	Does the company disclose its practices to encourage shareholders to engage with the company beyond general meetings? Apakah perusahaan mengungkapkan praktik yang dilakukan untuk mendorong pemegang saham agar terlibat dengan perusahaan di luar rapat umum?	Annual Report 2025 (Page 526 Point 3-4) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 526 Poin 3-4) Annual Report 2025 (Page 527) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 527)
A.5	Shares and Voting Rights. Saham dan Hak Suara.	
A.5.1	Where the company has more than one class of shares, does the company publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website/reports/the stock exchange/the regulator's website)? Jika perusahaan memiliki lebih dari satu kelas saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak suara yang melekat pada setiap kelas saham (misalnya melalui situs web perusahaan/laporan/bursa efek/situs web regulator)?	N/A. WIKA Beton does not have more than one share class. WIKA Beton only has one share class, namely common stock. This statement is supported by and can be seen in: WIKA Beton tidak memiliki lebih dari satu kelas saham. WIKA Beton hanya memiliki satu kelas saham, yaitu saham biasa. Pernyataan ini didukung oleh dan dapat dilihat dalam: Articles of Association Anggaran Dasar https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/
A.6	Notice of AGM. Pemanggilan RUPS.	

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
A.6.1	Does each of the resolutions tabled at the most recent annual general meeting deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution? Apakah setiap keputusan yang diambil pada rapat umum tahunan terbaru hanya berurusan dengan satu item, yaitu, tidak ada bundling beberapa item ke dalam resolusi yang sama?	Each resolution at the WIKA Beton Annual General Meeting of Shareholders addresses only one issue, which is outlined in: Setiap keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan WIKA Beton hanya membahas satu hal, yang dijabarkan dalam: Minutes of AGMS Risalah RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026 Announcement of AGMS Results Pengumuman Hasil RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026
A.6.2	Are the company's notice of the most recent AGM/ circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version? Apakah panggilan tentang RUPS/surat edaran terbaru sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan versi bahasa lokal?	Invitation to AGMS Undangan RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026
A.6.3	Does the notice of AGM/circulars have the following details:Are the profiles of directors/ commissioners (at least age, academic qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/re-election included? Apakah pemanggilan RUPS/surat edaran memiliki rincian sebagai berikut:Apakah terdapat profil Direksi/Komisaris (setidaknya usia, kualifikasi akademik, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman, dan jabatan direktur di emiten lain) yang dipilih/dipilih kembali?	Annual Report 2025 (Pages 132 - 142) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 132-142) Profile of a Candidate for Company Management CV Calon Pengurus Perusahaan https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026
A.6.4	Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified? Apakah auditor yang diangkat/diangkat kembali teridentifikasi secara jelas?	Annual Report 2025 (Pages 356) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 356) Annual Report 2025 (Page 129) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 129) AGMS Announcement Pengumuman RUPST https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html/year/2026
A.6.5	Were the proxy documents made easily available? Apakah dokumen proksi tersedia dengan mudah?	Proxy documents are available on the WIKA Beton Website at Dokumen-dokumen proxy tersedia di situs web WIKA Beton di https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html the eASY.KSEI system at Sistem eASY.KSEI di https://akses.ksei.co.id/
A.7	Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited. Terdapat larangan insider trading dan tindakan menguntungkan diri sendiri.	
A.7.1	Are the directors/commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days? Apakah Direksi/Komisaris perusahaan diwajibkan melaporkan transaksinya atas saham perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja?	Annual Report 2025 (Page 466-467) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 466-467)
A.8	Related Party Transactions by Directors and Key Executives Transaksi dengan Pihak Berelasi oleh Direksi dan Eksekutif	
A.8.1	Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/commissioners to review material RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders? Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan komite yang terdiri dari Direktur/Komisaris independen untuk meninjau RPT material untuk menentukan apakah hal tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham?	Annual Report 2025 (Pages 317-320) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 317-320

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
A.8.2	Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted? Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi mata acara rapat di mana mereka memiliki kepentingan?	Conflict of Interest Guidelines: Pedoman Benturan Kepentingan: https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/ Annual Report 2025 (Page 337) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 337) Independency Principle in Corporate Governance Prinsip Kemandirian dalam Tata Kelola Perusahaan Annual Report 2025 (Pages 317-320) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 317-320)
A.8.3	Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates? Apakah perusahaan memiliki kebijakan mengenai pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris, baik terkait tidak diperbolehkannya praktik ini atau untuk memastikan bahwa hal tersebut dilakukan secara wajar dan dengan harga pasar?	Annual Report 2025 (Page 463-464) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 463-464) Annual Report 2025 (Pages 317-320) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 317-320)
A.9	Protecting minority shareholders from abusive actions. Melindungi hak pemegang saham minoritas dari tindakan sewenang-wenang.	
A.9.1	Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length? Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi pihak berelasi (RPT) dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi tersebut adil dan dilakukan secara wajar (at arm's length)?	Annual Report 2025 (Pages 317-320) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 317-320) Financial Report Laporan Keuangan https://investor.wika-beton.co.id/financials.html
A.9.2	In case of related party transactions requiring shareholders' approval, is the decision made by disinterested shareholders? Dalam hal transaksi dengan pihak terkait yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak berkepentingan?	Articles of Association Anggaran Dasar https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/
B	Sustainability and Resilience Keberlanjutan dan Ketahanan	
B.1	Sustainability-related disclosure should be consistent, comparable and reliable, and include retrospective and forward-lookingmaterial information that a reasonable investor would consider important in making an investment or voting decision. Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, serta mencakup informasi material yang bersifat retrospektif dan berwawasan ke depan yang akan dianggap penting oleh investor yang wajar dalam membuat keputusan investasi atau pemungutan suara.	
B.1.1	Material Sustainability-related information should be specified.Does the company identify/report ESG topics that are material to the organization's strategy? Informasi keberlanjutan yang material harus ditetapkan secara jelas.Apakahperusahaan mengidentifikasi/melaporkan topik-topik ESG yang material bagi strategi organisasi?	Sustainability Report 2025 (Pages 44 -52) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 44-52)
B.1.2	Does the company identify climate change as an issue? Apakah perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai suatu permasalahan?	Sustainability Report 2025 page 46 Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 46)
B.1.3	Does the company adopt an internationally recognized reporting framework or standard for sustainability (i.e. GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)? Apakah perusahaanmengadopsi kerangka pelaporan yang diakui secara internasional atau standar keberlanjutan yang diakui secara internasional (yaitu GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)?	Sustainability Report 2025 (Page 41) Sustainability Report 2025 (Pages 172 - 200) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 41) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 172-200)

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
B.1.4	If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should provide that reliable metrics are regularly disclosed in an easily accessible form.Does the company disclose quantitativesustainability target? Jika sebuah perusahaan secara terbuka menetapkan tujuan atautarget terkait keberlanjutan, kerangka kerja pengungkapan harus menetapkan bahwa metrik yang andal diungkapkan secara teratur dalam bentuk yang mudah diakses.Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif?	Sustainability Report 2025 (Pages 12-13) Sustainability Report 2025 (Pages 24-30) Sustainability Report 2025 (Pages 47-49) Sustainability Report 2025 (Pages 50-52) Sustainability Report 2025 (Page 166) Sustainability Report 2025 (Page 168) Sustainability Report 2025 (Pages 193-196) Sustainability Report 2025 (Page 203) Sustainability Report 2025 (Page 246) Sustainability Report 2025 (Page 255) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 12-13) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 24-30) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 47-49) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 50-52) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 166) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 168) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 193-196) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 203) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 246) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 255)
B.1.5	Does the company disclose sustainability-related performance progress in relation to its previously set targets? Apakah perusahaan mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan di Kaitannya dengan target yang ditetapkan sebelumnya?	Sustainability Report 2025 page 13 Sustainability Report 2025 pages 24-30 Sustainability Report 2025 pages 47-49 Sustainability Report 2025 pages 157-158 Sustainability Report 2025 page 166 Sustainability Report 2025 pages 173-177 Sustainability Report 2025 pages 193-196 Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 13) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 24-30) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 47-49) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 157-158) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 166) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 173-177) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 193-196)
B.1.6	Does the company confirm that its Sustainability Report / Reporting is reviewed and /or approved by the Board or Board Committee? Apakah perusahaan mengkonfirmasi bahwa Laporan/ Pelaporan Keberlanjutannya ditinjau dan/atau disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Dewan?	Sustainability Report 2025 page 15 Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 15)
B.2	Corporategovernance frameworks should allow for dialogue between a company, its shareholdersand stakeholders to exchange views on sustainability matters. Kerangkatata kelola perusahaan harus memungkinkanterjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai masalah keberlanjutan.	
B.2.1	Does the company engage internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company? Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang masalah keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan?	Sustainability Report 2025 page 43 Sustainability Report 2025 page 56 Sustainability Report 2025 page 310 Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 43) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 56) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 310)
B.2.2	Does the company engage external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company? Apakah perusahaan melibatkan pemangkukepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang masalah keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan?	Sustainability Report 2025 pages 54-58 Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 54-58)

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
B.3	The corporate governance framework should ensure that boards adequately consider material sustainability risks and opportunities when fulfilling their key functions in reviewing, monitoring and guiding governancepractices, disclosure, strategy, risk management and internal control systems, including with respect to climate-related physical and transition risks. Kerangkatatakelola perusahaan harus memastikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan risikodanpeluang keberlanjutan yang material secara memadai saat menjalankan fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau, dan membimbing praktiktatakelola,pengungkapan,strategi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi terkait perubahan iklim.	
B.3.1	Direksi dan Dewan Komisaris harus menilai apakah struktur modal perusahaan sesuaidengan tujuan strategis danselera risiko yang terkait untukmemastikanketahananperusahaan terhadap berbagaiskenario. Does the company disclose thatthe board reviews on an annualbasisthatthecompany'scapital and debt structure iscompatible with its strategicgoals and its associated riskappetite?Boards should assess whether the company's capital structure is compatible with its strategicgoals and its associated riskappetite to ensure it is resilientto different scenarios. Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa setiap tahun Direksi dan Dewan Komisaris meninjau kompatibilitas struktur modaldan utang perusahaan dengantujuan strategis dan selerarisiko yang terkait?	Annual Report 2025 (Pages 288 - 289) Sustainability Report 2025 pages 131-132 Laporan Tahunan 2025 (Halaman 288-289) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 131-132)
B.4	The corporate governance framework should recognise the rights of stakeholders established by law or through mutual agreements and encourage active cooperation between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises. Kerangkatata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undangataumelalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama aktif antara korporasi dan pemangku kepentingandalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja,dan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial.	
B.4.1	Does the company disclose a policy and practices that address:The existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare? Apakahperusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas:Keberadaan dan ruang lingkup upaya perusahaan untuk menanganikesejahteraan pelanggan?	Sustainability Report 2025 page 54 Code Of Conduct https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/ Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 54) Kode Etik
B.4.2	Supplier/contractorselection procedures? Prosedurpemilihan pemasok/kontraktor?	Sustainability Report 2025 pages 79-83 Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 79-83)
B.4.3	The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development? Upaya perusahaan untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dengan promosi pembangunan berkelanjutan?	Sustainability Report 2024 (Page 83) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 83)
B.4.4	The company's efforts to interact with the communities in which they operate? Upaya perusahaan untuk berinteraksidengan masyarakat sekitar area operasional?	Sustainability Report 2024 Pages 57 Sustainability Report 2025 pages 276-285 Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 57) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 276-285)
B.4.5	The company's anti-corruption programmes and procedures? Programdanprosedur antikorupsi perusahaan?	Annual Report 2025 (Pages 580-585) Sustainability Report 2024 (Pages 140-146) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 580-585) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 140-146)

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
B.4.6	Howcreditors'rightsare safeguarded? Bagaimana hak-hak kreditor dilindungi?	Creditor's Rights Policy https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/ Annual Report 2025 (Pages 591-592) Hak-Hak Kreditur Laporan Tahunan 2025 (Halaman 591-592)
B.4.7	Does the company have a separate report/section that discusses its efforts on environment/economy and social issues? Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang membahas upayanya pada lingkungan/ ekonomidan masalah sosial?	Sustainability Report 2025. https://www.wika-beton.co.id/laporan-keberlanjutan/ Laporan Keberlanjutan 2025: https://www.wika-beton.co.id/laporan-keberlanjutan/
B.5	Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights. Jika kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan harus diberikan kesempatanuntuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.	
B.5.1	Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights? Apakahperusahaan memberikan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh para pemangkukepentingan (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) yang dapat digunakan untuk menyuarakan keprihatinan dan/ atau keluhan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka?	WIKA Beton's website: https://esg.wika-beton.co.id/social#:~:text=Stakeholder%20Engagement%20Programs Investor Relations Contact: https://investor.wika-beton.co.id/ir_contact.html Annual Report 2025 (Pages 84-85) Annual Report 2025 (Page 834) Sustainability Report 2025 (Page 59) Website WIKA Beton: https://esg.wika-beton.co.id/social#:~:text=Stakeholder%20Engagement%20Programs Kontak Relasi Investor: https://investor.wika-beton.co.id/ir_contact.html Laporan Tahunan 2025 (Halaman 84-85) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 834) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 59)
B.6	Mechanisms for employee participation should be permitted to develop. Mekanisme untuk partisipasi pegawai harus diizinkan untuk berkembang.	Sustainability Report 2025 (Pages 150- 151) Sustainability Report 2025 (Pages 265- 266) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 150-151) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 265-266)
B.6.1	Does the company explicitly disclose the policies and practices on health, safety and welfare for its employees? Apakah perusahaan secara eksplisitmengungkapkan kebijakan dan praktik tentang kesehatan, keselamatan dan kesejahteraanbagi pegawainya?	Sustainability Report 2025 (Pages 150- 151) Sustainability Report 2025 (Pages 265- 266) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 150-151) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 265-266)
B.6.2	Does the company explicitly disclose the policies and practices on training and development programmes for its employees? Apakah perusahaan secara eksplisitmengungkapkan kebijakan dan praktik tentang pelatihan dan program pelatihan dan pengembangan untuk pegawainya?	Annual Report 2025 (Pages 184-187): Sustainability Report 2025 (Pages 242-247): Laporan Tahunan 2025 (Halaman 184-187) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 242-247)
B.6.3	Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures? Apakah perusahaan memiliki kebijakan penghargaan/ kompensasi yang memperhitungkankinerja perusahaan di luar ukuran keuangan jangka pendek?	Sustainability Report 2025(Pages 233- 235) Annual Report 2025 (Pages 188- 189) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 233-235) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 188-189)

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
B.7	Stakeholdersincluding individual employee and their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this. Para pemangku kepentingan termasuk pegawai individu dan badanperwakilanmereka, harus dapat dengan bebas mengomunikasikan kekhawatiran mereka mengenai praktik ilegal atau tidak etis kepada direksidandewan komisaris, di mana hak-hak mereka tidak boleh dirugikan karena melakukan hal ini.	
B.7.1	Does the company have a whistle blowing policy which includes procedures for complaints by employees and other stakeholders concerning alleged illegal and unethical behaviour and provide contact details via the company's website or annual report. Apakah perusahaan memiliki kebijakan whistle-blowing yang mencakup prosedur pengaduan pegawai dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan perilaku ilegal dan tidak etis dan memberikan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau laporan tahunan.	Whistleblowing System Policy: https://www.wika-beton.co.id/kebijakan-tata-kelola-perusahaan/ Sustainability Report 2025 (Page 145-146): Annual Report 2025 (Pages 572-579): Kebijakan Pelaporan Pelanggaran Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 145-146) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 572-579)
B.7.2	Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals alleged illegal/ unethical behaviour from retaliation? Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi pegawai/orang yang mengungkapkandugaan perilaku ilegal/tidak etis dari tindakan pembalasan?	Business Ethics, Anti-Corruption, and Donation Policy: https://www.wika-beton.co.id/kebijakan-tata-kelola-perusahaan Annual Report 2025 (Page 580-584) Sustainability Report 2025 (Page 145-146): Etika Bisnis, Anti Korupsi, dan Kebijakan Donasi Laporan Tahunan 2025 (Halaman 580-584) Laporan Keberlanjutan 2025 (Halaman 145-146)
C	Disclosure and Transparency Pengungkapan dan Transparansi	
C.1	Transparent Ownership Structure. Transparansi Struktur Kepemilikan.	
C.1.1	Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more? Apakah informasi kepemilikan saham memperlihatkan identitas beneficial owner, memiliki 5% atau lebih saham?	Laporan Tahunan 2025 (Halaman 150 - 156) Annual Report 2025 (Pages 150-156):
C.1.2	Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders? Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham baik yang langsung dan tidak langsung (jika ada) oleh pemegang saham utama dan/atau substansial?	Laporan Tahunan 2025 (Halaman 150-151) Annual Report 2025 (Pages 150-151): Website Company Menu, Structure Submenu (Company Shareholder Structure): Website Menu Perusahaan, SubMenu Struktur (Struktur Pemegang Saham Perusahaan): https://www.wika-beton.co.id/struktur-pemegang-saham-perusahaan/
C.1.3	Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)? Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham para direksi/komisaris baik langsung dan tidak langsung?	Laporan Tahunan 2025 (Halaman 151) Annual Report 2025 (Page 151)
C.1.4	Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management? Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung oleh manajemen senior?	Laporan Tahunan 2025 (Halaman 149) Annual Report 2025 (Page 149)
C.1.5	Does the company disclose details of the parent/holding company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/ (SPVs)? Apakah perusahaan mengungkapkan rincian perusahaan induk/ holding, anak perusahaan, entitas asosiasi, perusahaan patungan, dan entitas/perusahaan bertujuan khusus (SPE)/(SPV)?	Website Company Menu, Structure Submenu (Corporate Group Structure): Website Menu Perusahaan, SubMenu Struktur (Struktur Grup Perusahaan): https://www.wika-beton.co.id/struktur-grup-perusahaan/ Annual Report 2025 (Pages 154-156): Laporan Tahunan (Halaman 154-156)

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
C.2	Quality of Annual Report. Kualitas Laporan Tahunan.	
C.2.1	Does the company's annual report disclose the following items:Corporate Objectives Apakah laporan tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:Tujuan Perusahaan	Annual Report 2025 (Pages 94-98) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 94-95)
C.2.2	Financial Performance indicators Indikator Kinerja Keuangan	Annual Report 2025 (Pages 20-21): Laporan Tahunan 2025 (Halaman 20-21)
C.2.3	Non-Financial Performance indicators Indikator Kinerja Non-Keuangan	Annual Report 2025 (Pages 22-28): Laporan Tahunan 2025 (Halaman 22-28)
C.2.4	Dividend Policy Kebijakan Dividen	Annual Report 2025 (Page 61) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 61) Annual Report 2025 (Page 308) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 308)
C.2.5	Biographical details (at least age, academic qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of all directors/commissioners Detail biografi (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman yang relevan, dan jabatan direktur di emiten lainnya) dari seluruh direktur/komisaris	Annual Report 2025 (Pages 132-138): Laporan Tahunan 2025 (Halaman 132-138)
C.2.6	Corporate Governance Confirmation StatementDoes the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non-compliance, identify and explain reasons for each such issue? Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola PerusahaanApakah Laporan Tahunan berisi pernyataan yang menegaskan kepatuhan penuh perusahaan terhadap kode etik tata kelola perusahaan, dan jika terjadi ketidakpatuhan apakah terdapat identifikasi dan penjelasan atas permasalahan tersebut?	Annual Report 2025 (Pages 567-569) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 567-569)
C.3	Remuneration of Members of the Board and Key Executives. Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Kunci.	
C.3.1	Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners? Apakah ada pengungkapan struktur biaya untuk non-eksekutif Direksi/Komisaris?	Annual Report 2025 (Pages 456 - 459): Laporan Tahunan 2025 (Halaman 456 - 459)
C.3.2	Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] details of remuneration of each non-executive director/ commissioner? Apakah perusahaan mengungkapkan secara terbuka [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang dipublikasikan] rincian remunerasi masing-masing direktur/komisaris non-eksekutif?	Annual Report 2025 (Pages 516-520): Laporan Tahunan 2025 (Halaman 516 - 520)
C.3.3	Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e. the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO? Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, manfaat dalam bentuk barang dan tunjangan lainnya) (yaitu penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang dan ukuran kinerja) untuk Direktur/Komisaris dan Direktur Utama?	Annual Report 2025 (Page 456) Laporan Tahunan (Halaman 456) Annual Report 2025 (Page 460) Laporan Tahunan (Halaman 460)
C.3.4	Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] the details of remuneration of each of the executive directors and CEO [if he/she is not a member of the Board]? Apakah perusahaan mengungkapkan kepada publik [yaitu laporan tahunan atau lainnya yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing Direktur/Komisaris dan Presiden Direktur yang bersangkutan?	Annual Report 2025 (Pages 458-460): Laporan Tahunan 2025 (Halaman 458-460)

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
C.4	Disclosure of Related Party Transactions (RPTs). Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Berelasi (RPT).	
C.4.1	Does the company disclose its policy covering the review and approval of material RPTs? Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan yang mencakup peninjauan dan persetujuan atas transaksi dengan pihak berelasi yang material?	Articles of Ascociation https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/ Annual Report 2025 (Pages 319-320): Laporan Tahunan 2025 (Halaman 319-320)
C.4.2	Does the company disclose the name, relationship, nature and value for each material RPTs? Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan, sifat, dan nilai untuk setiap transaksi dengan pihak berelasi yang material?	Annual Report 2025 (Pages 317-318): Laporan Tahunan 2025 (Halaman 317-318):
C.5	Directors and commissioners dealings in shares of the company. Transaksi Saham oleh Direktur dan Komisaris Perusahaan.	
C.5.1	Does the company disclose trading in the company's shares by insiders? Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam?	Annual Report 2025 (Page 466-467): Laporan Tahunan 2025 (Halaman 466-467) Annual Report 2025 (Page 598): Insider Trading Policy: https://www.wika-beton.co.id/kebijakan-tata-kelola-perusahaan/
C.6	External Auditor and Auditor Report. Auditor Eksternal dan Laporan Auditor.	
C.6.1	Where the same audit firm is engaged for both audit and non-audit services.Are the audit and non-audit fees disclosed? Di mana perusahaan audit yang sama dilibatkan untuk layanan audit dan non-audit.Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan?	Annual Report 2025 (Pages 129-130): Laporan Tahunan 2025 (Halaman 129-130)
C.6.2	Does the non-audit fee exceed the audit fees? Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit?	Annual Report 2025 (Pages 129-130): Laporan Tahunan 2025 (Halaman 129-130)
C.7	Medium of Communications. Media Komunikasi.	
C.7.1	Does the company use the following modes of communication? Quarterly Reporting Apakah perusahaan menggunakan mode komunikasi berikut?Laporan per Kuartal	Wika Beton's Website - Financial Report Website Wika Beton - Laporan Keuangan https://investor.wika-beton.co.id/financials.html
C.7.2	Company Website Situs Web Perusahaan	Wika Beton's Website Website Wika Beton https://www.wika-beton.co.id/
C.7.3	Analyst's briefing Pengarahan analis	Website Investor Relations Menu, Other Information SubMenu (Company Presentation) Website Menu Hubungan Investor, SubMenu Informasi Lainnya (Presentasi Perusahaan) https://investor.wika-beton.co.id/slides.html
C.7.4	Media briefings/press conferences Media briefing/konferensi pers	Website Media Menu Press Release Submenu https://www.wika-beton.co.id/siaran-pers/
C.8	Timely filing/release of annual/financial reports. Penyampaian/penerbitan laporan tahunan/keuangan tepat waktu.	
C.8.1	Are the audited annual financial report / statement released within 120 days from the financial year end? Apakah laporan/pernyataan keuangan yang telah diaudit diterbitkan dalam waktu 120 hari setelah tahun buku berakhir?	Directors Statement Letter Relating to the Responsibility on the Consolidated Financial Statements For the Year Ended December 31, 2024 that published on March 20, 2025 (less than 120 days from the financial year end) Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 yang diterbitkan pada 26 Maret 2026 (kurang dari 120 hari setelah tahun buku berakhir) Annual Report 2025 pages 694-695 Laporan Tahunan 2025 halaman 694 - 695 Website Investor Relation Menu, Other Information SubMenu (IDXNet & SPEOJK Reports, March 26, 2025) Website Menu Hubungan Investor, Sub Menu Informasi lainnya (Laporan IDXNet & SPEOJK, 26 Maret 2025) https://investor.wika-beton.co.id/financials.html

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
C.8.2	Is the annual report released within 120 days from the financial year end? Apakah laporan tahunan diterbitkan dalam 120 hari setelah tahun buku berakhir?	Website Investor Relation Menu, Other Information SubMenu (IDXNet & SPEOJK Reports) Website Menu Hubungan Investor, Sub Menu Informasi lainnya (Laporan IDXNet & SPEOJK) https://investor.wika-beton.co.id/newsroom.html
C.8.3	Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company? Apakah keabsahan dan kewajaran presentasi laporan keuangan tahunan telah diafirmasi oleh direksi/komisaris dan/atau pejabat perusahaan terkait?	Director's Statement Letter Relating to the Responsibility on the Consolidated Financial Statements For The Year Ended December 31, 2025. Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 Annual Report 2025 pages 694-695 Laporan Tahunan 2025 halaman 694 - 695
C.9	Company Website. Situs Web Perusahaan.	
C.9.1	Does the company have a website disclosing up-to-date information on the following:Financial statements/reports (latest quarterly) Apakah perusahaan memiliki website yang mengungkapkan informasi terkini sebagai berikut:Laporan keuangan (per kuartal terakhir)	Website Investor Relations Menu, Financial Reports SubMenu https://investor.wika-beton.co.id/financials.html Website Investor Relations Menu, Other Information SubMenu (Company Presentation) https://investor.wika-beton.co.id/slides.html
C.9.2	Materials provided in briefings to analysts and media Menyediakan materi dalam briefing bagi analis dan media	Website Investor Relations Menu, Annual Report SubMenu https://investor.wika-beton.co.id/annual_report.html Website Menu Hubungan Investor, SubMenu Informasi Lainnya (Presentasi Perusahaan) https://investor.wika-beton.co.id/slides.html
C.9.3	Downloadable Annual Report Laporan tahunan yang dapat diunduh	Website Investor Relations Menu, Annual Report SubMenu https://investor.wika-beton.co.id/annual_report.html Website Menu Hubungan Investor, SubMenu Laporan Tahunan https://investor.wika-beton.co.id/annual_report.html
C.9.4	Notice of AGM and/or EGM Panggilan RUPS dan/atau RUPSLB	Website Investor Relations Menu, General Meeting of Shareholders SubMenu (Summons for GMS) https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.htm Website Menu Hubungan Investor, SubMenu Rapat Umum Pemegang Saham, (Panggilan RUPS) https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.htm
C.9.5	Minutes of AGM and/or EGM Risalah RUPS dan/atau RUPSLB	Minutes of AGMS https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.htm Risalah RUPS https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.htm
C.9.6	Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association) Konstitusi dasar perusahaan (Anggaran Rumah Tangga Perusahaan, Memorandum dan Anggaran Dasar	Company's Articles of Association https://www.wika-beton.co.id/pedoman-tata-kelola-perusahaan/ Anggaran Dasar Perusahaan https://www.wika-beton.co.id/pedoman-tata-kelola-perusahaan/
C.10	Investor Relations. Hubungan Investor.	
C.10.1	Does the company disclose the contact details (e.g. telephone, fax, and email) of the officer / office responsible for investor relations? Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, fax, dan email) dari petugas/unit yang bertanggung jawab untuk hubungan investor?	Website Investor Relations Menu, Help Center SubMenu (IR Contact) https://investor.wika-beton.co.id/ir_contact.html Website Menu Hubungan Investor, SubMenu Pusat Bantuan (Kontak IR) https://investor.wika-beton.co.id/ir_contact.html
D	Responsibilities of the Board Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi	
D.1	Board Duties and Responsibilities. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi/Dewan Komisaris.	

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
D.1.1	Clearly defined board responsibilities and corporate governance policy.Does the company disclose its corporate governance policy/ board charter? Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Kebijakan Corporate Governance dinyatakan secara jelas.Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola/ piagam Dewan Komisaris dan Direksi secara jelas?	Annual Report 2025 (Page 395) Annual Report 2025 (Page 427) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 395) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 427)
D.1.2	Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners' approval disclosed? Apakah jenis-jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/Direksi diungkapkan?	Board Manual The Authority Limits https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/ Pedoman Kerja Batasan Tanggung Jawab
D.1.3	Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated? Apakah peran dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris/Direksi dinyatakan secara jelas?	Annual Report 2025 (Pages 378 - 394) Annual Report 2025 (Pages 411 - 426) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 378 - 394) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 411 - 426)
D.1.4	Corporate Vision/Mission.Does the company have an updated vision and mission statement? Visi dan misi Perusahaan.Apakah perusahaan memiliki pernyataan visi dan misi yang terbaru?	Website Company Menu, Vision & Mission https://www.wika-beton.co.id/visi-misi/ Annual Report (Pages 94-95) Menu Web Perseroan, Visi & Misi Laporan Tahunan (Halaman 94 - 95)
D.1.5	Does the board of directors play a leading role in the process of developing and reviewing the company's strategy at least annually? Apakah direksi memegang peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setidaknya setiap tahun?	Annual Report 2025 (Page 59) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 59)
D.1.6	Does the board of directors have a process to review, monitor and oversee the implementation of the corporate strategy? Apakah direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi penerapan strategi perusahaan?	Annual Report 2025 (Page 59-60) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 59 - 60)
D.2	Board Structure. Struktur Dewan Komisaris dan Direksi.	
D.2.1	Code of Ethics or Conduct.Are the details of the code of ethics or conduct disclosed? Kode Etik/Perilaku.Apakah rincian kode etik diungkapkan?	Code of Conduct: https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/ Annual Report 2025 (Pages 567-570) Code of Conduct and Corporate Culture: Kode Etik Laporan Tahunan 2025 (Halaman 567 - 570) Kode Etik dan Budaya Perseroan
D.2.2	Are all directors/commissioners, senior management and employees required to comply with code/s? Apakah semua Dewan Komisaris/Direksi, manajemen senior dan karyawan diharuskan untuk mematuhi kode etik?	Annual Report 2025 (Page 570): Code of Conduct https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/ Laporan Tahunan 2025 (Halaman 570) Kode Etik
D.2.3	Does the company have a process to implement and monitor compliance with the code/s of ethics or conduct? Apakah perusahaan memiliki proses menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik?	Annual Report 2025 (Pages 567-570) Code of Conduct https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/ Laporan Tahunan 2025 (Halaman 567 - 570) Kode Etik

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
D.2.4	Board Structure & Composition.Do independent directors/commissioners make up at least 50% of the board of directors/commissioners? Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris.Apakah direktur/komisaris independen sekurangnya berjumlah 50% dari jumlah Direksi/Dewan Komisaris?	Annual Report 2025 (Pages 410- 411) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 410 - 411)
D.2.5	Does the company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years*) each for its independent directors/ commissioners?*) The five years term must be required by legislation which pre- existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011. Apakah perusahaan memiliki batas masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 kali masa jabatan masing-masing lima tahun*) untuk direktur/ komisaris independen?*) Masa jabatan lima tahun dipersyaratkan oleh undang-undang yang berlaku sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011.	Board Manual https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/ Annual Report 2025 (Pages 436) Pedoman Kerja Laporan Tahunan 2025 (Halaman 436)
D.2.6	Has the company set a limit of five board seats that an individualindependent/non-executive director/ commissioner may hold simultaneously? Apakah perusahaan telah menetapkan batas lima posisi dewan yang dapat dipegang oleh seorang Direktur/Komisaris Independen/Non-Eksekutif secara bersamaan?	Board Manual https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/ Pedoman Kerja
D.2.7	Does the company have any executive directors who serve on more than two boards of listed companies outside of the group? Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat di lebih dari dua dewan perusahaan yang terdaftar di luar grup?	No. Annual Report 2025 (Pages 134-138) Annual Report 2025 (Pages 140-142) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 134 - 138) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 140 - 142)
D.2.8	Nomination Committee (NC).Does the company have a Nominating Committee? Komite Nominasi.Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi?	Annual Report 2025 (Pages 482-500) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 482-500)
D.2.9	Is the Nominating Committee comprised of a majority of independent directors/commissioners? Apakah Komite Nominasi terdiri dari mayoritas direktur/ komisaris independen?	Annual Report 2025 (Pages 488) Annual Report 2025 (Pages 142) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 488) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 142)
D.2.10	Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner? ApakahketuaKomiteNominasiseorang direktur/ komisaris independen?	Annual Report 2025 (Pages 488) Annual Report 2025 (Pages 142) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 488) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 142)
D.2.11	Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Nominating Committee? Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/ struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi?	Annual Report 2025 (Page 496) Nomination and Remuneration Committee and Good Corporate and Governance (GCG) Charter https://www.wika-beton.co.id/komite-nominasi-remunerasi-pemantau-risiko/ Laporan Tahunan 2025 (Halaman 496) Komite Nominasi dan Remunerasi dan Piagam Tata Kelola Perusahaan
D.2.12	Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year? Apakah kehadiran Komite Nominasi dalam rapat diungkapkan dan jika ya, apakah Komite Nominasi bertemu setidaknya dua kali dalam setahun?	Annual Report 2025 (Page 498) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 498)
D.2.13	RemunerationCommittee(RC)/Compensation Committee.Does the company have a Remuneration Committee? Komite Remunerasi/Komite Kompensasi.Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi?	Annual Report 2025 (Pages 482-500) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 482-500)

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
D.2.14	Is the Remuneration Committee comprised entirely of non- executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners? Apakah Komite Remunerasi terdiri dari sepenuhnya direktur/komisaris independen?	Annual Report 2025 (Pages 488) Annual Report 2025 (Pages 142) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 488) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 142)
D.2.15	Is the chairman of the Remuneration Committee an independent director/commissioner? ApakahketuaKomiteRemunerasimerupakan direktur/komisaris independen?	Annual Report 2025 (Pages 488) Annual Report 2025 (Pages 142) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 488) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 142)
D.2.16	Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Remuneration Committee? Apakahperusahaanmengungkapkankerangka acuan/ struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi?	Annual Report 2025 (Page 496) Nomination and Remuneration Committee and Good Corporate and Governance (GCG) Charter https://www.wika-beton.co.id/komite-nominasi-remunerasi-pemantau-risiko Laporan Tahunan 2025 (Halaman 496) Komite Nominasi dan Remunerasi dan Piagam Tata Kelola Perusahaan
D.2.17	Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed and, if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year? Apakah kehadiran Komite Remunerasi dalam rapat diungkapkan dan, jika ya, apakah Komite Remunerasi bertemu setidaknya dua kali dalam setahun?	Annual Report 2025 (Page 498) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 498)
D.2.18	Audit Committee (AC).Does the company have an Audit Committee? Komite Audit.Apakah perusahaan memiliki Komite Audit?	Annual Report 2025 (Pages 468-481) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 468-481)
D.2.19	Is the Audit Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	Annual Report 2025 (473) Annual Report 2025 (Page 142)
	Apakah Komite Audit terdiri sepenuhnya dari direktur/ komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/ komisaris independen?	Laporan Tahunan 2025 (Halaman 473) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 142)
D.2.20	Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?	Annual Report 2025 (pages 473) Annual Report 2025 (Page 142)
	Apakah ketua Komite Audit adalah direktur/komisaris independen?	Laporan Tahunan 2025 (Halaman 473) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 142)
D.2.21	Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Audit Committee?	Annual Report 2025 (Page 478-479) Audit Committee Charter https://www.wika-beton.co.id/komite-audit/
	Apakahperusahaanmengungkapkankerangka acuan/ struktur tata kelola/piagam Komite Audit?	Laporan Tahunan 2025 (Halaman 478-479) Piagam Komite Audit
D.2.22	Does at least one of the independent directors/ commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	Annual Report 2025 (Pages 473) Annual Report 2025 (Pages 142)
	Apakah setidaknya salah satu direktur/komisaris independen komite memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)?	Laporan Tahunan 2025 (Halaman 473) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 142)
D.2.23	Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed and, if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	Annual Report 2025 (Page 480)

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
	Apakah kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit bertemu setidaknya empat kali selama setahun?	Laporan Tahunan 2025 (Halaman 480)
D.2.24	Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	Annual Report 2025 (Pages 476-478) Audit Committee Charter https://www.wika-beton.co.id/komite-audit/
	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk rekomendasi penunjukan, dan pemberhentian auditor eksternal?	Laporan Tahunan 2025 (Halaman 476-478) Piagam Komite Audit
D.3	Board Processes. Proses Dewan.	
D.3.1	Board Meetings and Attendance.Are the board of directors meeting scheduled before the start of financial year?	Articles of Association https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/ Annual Report 2025 (Pages 396-397):
	Rapat Dewan Komisaris dan Direksiserta Tingkat Kehadiran.Apakah rapat direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun keuangan?	Anggaran Dasar Laporan Tahunan 2025 (Halaman 396 - 397)
D.3.2	Does the board of directors/commissioners meet at least six times during the year?	Annual Report 2025 The Board of Directors Meeting Agenda (Pages 397-398) The Board of Commissioners Meeting Agenda (Pages 429-430) Meeting Agenda of the Board of Directors with the Board of Commissioners (Pages 400-401)
	Apakah dewan direksi/komisaris mengadakan rapat setidaknya enam kali dalam setahun?	Laporan Tahunan 2025 Agenda Rapat Direksi (Halaman 397-398) Agenda Rapat Dewan Komisaris (Halaman 429-430) Agenda Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris (Halaman 400-401)
D.3.3	Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	Annual Report 2025 The Board of Directors Meeting Agenda (Pages 397-398) The Board of Commissioners Meeting Agenda (Pages 429-430) Meeting Agenda of the Board of Directors with the Board of Commissioners (Pages 400-401)
	Apakah masing-masing direktur/komisaris menghadiri paling sedikit 75% dari seluruh rapat dewan yang diadakan selama tahun tersebut?	Laporan Tahunan 2025 Agenda Rapat Direksi (Halaman 397-398) Agenda Rapat Dewan Komisaris (Halaman 429-430) Agenda Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris (Halaman 400-401)
D.3.4	Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?	Articles of Association https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/ 2. Annual Report 2025 (Pages 396) 3. Board manual https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/
	Apakah perusahaan mensyaratkan kuorum minimal 2/3 untuk keputusan Direksi/Dewan Komisaris?	Anggaran Dasar Laporan Tahunan 2025 (Halaman 396) Pedoman Kerja
D.3.5	Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any executives present?	Annual Report 2025 (Pages 397-401)
	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif perusahaan mengadakan pertemuan secara terpisah setidaknya sekali dalam setahun tanpa kehadiran eksekutif?	Laporan Tahunan 2025 (Halaman 397-401)
D.3.6	Access to Information.Are board papers for board of directors/commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	Articles of Association https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
	Akses Informasi.Apakah kertas dewan untuk rapat direksi/komisaris diberikan kepada direksi dan dewan komisaris setidaknya lima hari kerja sebelum rapat direksi dan dewan komisaris?	Anggaran Dasar https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/
D.3.7	Does the company secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	Annual Report 2025 (page 524-525) Duties and Responsibilities of Corporate Secretary
	Apakah sekretaris perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung direksi dan dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya?	Laporan Tahunan 2025 (Halaman 524-525) Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perseroan
D.3.8	Is the company secretary trained in legal, accountancy or company secretarial practices and has kept abreast on relevant developments?	Annual Report 2025 (Pages 522): Corporate Secretary Profile: https://www.wika-beton.co.id/struktur-manajemen-perusahaan/
	Apakah sekretaris perusahaan terlatih dalam bidang hukum, akuntansi atau praktik kesekretariatan perusahaan dan selalu mengikuti perkembangan yang relevan?	Laporan Tahunan 2025 (Halaman 522) Profil Sekretaris Perseroan https://www.wika-beton.co.id/struktur-manajemen-perusahaan/
D.3.9	Board Appointment and Re-Election.Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/ commissioners?	Board Manual https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/ Annual Report 2025 pages 452-455
	Pengangkatan dan Pemilihan Kembali Dewan.Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam pemilihan direksi/komisaris baru?	Pedoman Kerja https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/ Laporan Tahunan 2025 (Halaman 452-455)
D.3.10	Did the company describe the process followed in appointing new directors/commissioners?	Annual Report 2025 (Page 452-455) Board Manual https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan
	Apakah perusahaan menjelaskan proses pengangkatan direktur/komisaris baru?	Laporan Tahunan 2025 (Halaman 452-455) Pedoman Kerja https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/
D.3.11	Are all directors/commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5 years*) each?*) The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	Annual Report 2025 (Page 377-378) Annual Report 2025 (Page 410) Board Manual https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/
	Apakah semua direktur/komisaris dapat dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan yang terdaftar di negara yang undang-undangnya menetapkan masa jabatan 5 tahun?*) Masa jabatan lima tahun dipersyaratkan oleh undang-undang yang telah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011	Laporan Tahunan 2025 (Halaman 377-378) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 410) Pedoman Kerja https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/
D.3.12	Remuneration Matters.Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?	Annual Report 2025 (Page 357)
	Pentingnya Remunerasi.Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior?	Laporan Tahunan 2025 (Halaman 357)
D.3.13	Does the company have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with long-term interests of the company, such as claw back provision and deferred bonuses?	Annual Report 2025 (Pages 455-460)

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
	Apakah perusahaan memiliki standar terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti pencadangan kembali dan bonus yang ditangguhkan?	Laporan Tahunan 2025 (Halaman 455-460)
D.3.14	Internal Audit.Does the company have a separate internal audit function?	Annual Report 2025 (Pages 528-541) Website GCG Menu, Internal Audit Unit SubMenu https://www.wika-beton.co.id/en/sistem-pengawasan-intern/ Internal Audit Charter https://www.wika-beton.co.id/sistem-pengawasan-intern/
	Audit Internal.Apakah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang terpisah?	Laporan Tahunan 2025 (Halaman 528-541) Menu Web GCG, SubMenu Unit Audit Internal Piagam Audit Internal
D.3.15	Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed? Apakah kepala audit internal diidentifikasi atau, jika dialihdayakan, apakah nama kantor eksternal diungkapkan?	Annual Report 2025 (Page 528) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 528)
D.3.16	Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee? Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit?	Internal Audit Charter https://www.wika-beton.co.id/sistem-pengawasan-intern/ Annual Report 2025 (Page 540-541) Piagam Audit Internal Laporan Tahunan 2025 (Halaman 540-541)
D.3.17	Risk Oversight.Does the company establish a sound internal control procedures/risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework? Pengawasan Risiko.Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal/kerangka manajemen risiko yang baik dan secara berkala meninjau efektivitas kerangka tersebut?	Annual Report 2025 (Pages 548-565) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 548-565)
D.3.18	Does the Annual Report/Annual CG Report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems? Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan mengungkapkan bahwa direksi/komisaris telah melakukan peninjauan terhadap pengendalian material perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko?	Annual Report 2025 (Page 565) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 565)
D.3.19	Does the company disclose the key risks to which the company is materially exposed to (i.e. financial, operational including IT, environmental, social, economic)? Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang dihadapi perusahaan secara material (yaitu keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, ekonomi)?	Annual Report 2025 (Pages 556-561) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 556-561)
D.3.20	Does the Annual Report/Annual CG Report contain a statement from the board of directors/commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/risk management systems? Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan memuat pernyataan direksi/komisaris atau Komite Audit tentang kecukupan sistem pengendalian internal/ manajemen risiko perusahaan?	Annual Report 2025 (Page 565) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 565)
D.4	People on the Board Anggota Dewan Komisaris	

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
D.4.1	Board Chairman.Do different persons assume the roles of chairman and CEO? Ketua Dewan Komisaris.Apakah individu yang berbeda menjabat sebagai Komisaris Utama dan Direktur utama?	Annual Report 2025 (Pages 120- 121) Annual Report 2025 (pages 132-133) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 120-121) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 132-133)
D.4.2	Is the chairman an independent director/commissioner? ApakahpimpinanDewanKomisarismerupakan Komisaris Independen?	Annual Report 2025 (Pages 140-142) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 140-142)
D.4.3	Is any of the directors a former CEO of the company in the past 2 years? Apakah ada komisaris yang merupakan mantan Direktur Utama perusahaan dalam 2 tahun terakhir?	No Annual Report (pages 140-142) Tidak Laporan Tahunan 2025 (Halaman 140-142)
D.4.4	Are the roles and responsibilities of the chairman disclosed? Apakah peran dan tanggung jawab Komisaris Utama diungkapkan?	Annual Report 2025 (pages 411-426) Board Manual https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/ Laporan Tahunan 2025 (Halaman 411-426) Pedoman Kerja
D.4.5	Lead Independent Director.If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined? Komisaris Independen Senior.Jika Komisaris Utama tidak independen, apakah Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Independen Senior dan apakah perannya telah ditentukan?	Annual Report 2025 (Pages 140-142) Annual Report 2025 (pages 435-437) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 140-142) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 435 - 437)
D.4.6	Skill and Competencies.Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector that the company is operating in? Keahlian dan Kompetensi.Apakah setidaknya satu direktur/komisaris non-eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama tempat perusahaan beroperasi?	Annual Report 2025 (Page 140-142) Annual Report 2025 (Page 465) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 140-142) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 465)
D.5	Board Performance. Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.	
D.5.1	Directors Development.Does the company have orientation programmes for new directors/ commissioners? Pengembangan Direksi dan Dewan Komisaris.Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk direksi/ komisaris baru?	Annual Report 2025 (Page 403-404) Annual Report 2025 (page 434-435) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 403-404) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 434-435)
D.5.2	Does the company have a policy that encourages directors/commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes? Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan praktik serta program aktual yang mendorong direksi/komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional yang berkelanjutan?	Annual Report 2025 (Page 403) Annual Report 2025 (Page 434) Board Manual https://www.wika-beton.co.id/en/pedoman-tata-kelola-perusahaan/ Laporan Tahunan 2025 (Halaman 403) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 434) Pedoman Kerja
D.5.3	CEO/Executive Management Appointments and Performance.Does the company disclose the process on how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?	Annual Report 2025 (Pages 452-455)

No.	Principles and Recommendation Prinsip dan Rekomendasi	
	Pengangkatan dan Kinerja Direktur Utama/Manajemen Eksekutif.Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana Direksi/Dewan Komisaris merencanakan untuk suksesi Direktur Utama/Direktur Pelaksana/ Presiden Direktur dan manajemen kunci?	Laporan Tahunan 2025 (Halaman 452-455)
D.5.4	Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President? Apakah dewan direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direktur Utama/Direktur Pelaksana/Presiden Direktur?	Annual Report 2025 (Pages 438- 445) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 438-445)
D.5.5	Board Appraisal.Did the company conduct an annual performance assessment of the board of directors/ commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment? Penilaian Dewan.Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan Direksi/Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian tersebut?	Annual Report 2025 (Pages 438- 441) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 438-441)
D.5.6	Director Appraisal.Did the company conduct an annual performance assessment of the individual directors/ commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment? Penilaian Direktur.Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan masing-masing direktur/ komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian tersebut?	Annual Report 2025 (Pages 441- 445) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 441-445)
D.5.7	Committee Appraisal.Did the company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment? Penilaian Komite.Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan Komite Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian tersebut?	Annual Report 2025 (Pages 481) Annual Report 2025 (Pages 500) Annual Report 2025 (Pages 517) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 481) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 500) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 517)
ITEM BONUS		
(B)A	Rights of Shareholders Hak-Hak Pemegang Saham	
(B)A.1	Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures that govern general shareholders meetings. Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan mendapatkan informasi mengenai aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.	
(B)A.1.1	Does the company practice real time secure electronic voting in absentia at the general meetings of shareholders? Apakah perusahaan mempraktekkan pemungutan suara elektronik yang aman dan real-time secara in absentia pada rapat umum pemegang saham?	1. Website Investor Relations Menu, GMS SubMenu 1. Website Menu Hubungan Investor, SubMenu RUPS https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html 2. Website Investor Relations Menu, GMS SubMenu 2. Website Menu Hubungan Investor, SubMenu RUPS https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html
(B)A.2	Equitable Treatment of Shareholders. Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham.	

(B)A.2.1	Notice of AGM. Does the company release its notice of AGM (with detailed agendas and explanatory circulars), as announced to the Exchange, at least 28 days before the date of the meeting? Pemanggilan RUPST. Apakah perusahaan mengeluarkan panggilan tentang RUPS (dengan agenda rinci dan edaran penjelasan), sebagaimana diumumkan kepada Bursa Efek, setidaknya 28 hari sebelum tanggal rapat?	Website Investor Relations Menu, GMS SubMenu Website Menu Hubungan Investor, SubMenu RUPS 1. GMS Invitation Panggilan RUPS https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html 2. GMS Announcement Pengumuman RUPS https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html
(B)B	Sustainability and Resilience. Keberlanjutan dan Ketahanan.	
(B)B.1	Sustainability-related disclosure should be consistent, comparable and reliable, and include retrospective and forward-looking material information that a reasonable investor would consider important in making an investment or voting decision. Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, serta mencakup informasi material yang bersifat retrospektif dan berwawasan ke depan yang akan dianggap penting oleh investor yang wajar dalam membuat keputusan investasi atau pemungutan suara.	
(B)B.1.1	Does the company disclose how it manages climate-related risks and opportunities? Apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana mengelola risiko dan peluang terkait iklim?	Sustainability Report 2025 pages 181-191
(B)B.1.2	Does the company disclose that its Sustainability Report / Sustainability Reporting is externally assured? Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporan Keberlanjutannya dilakukan assurance secara eksternal?	Sustainability Report 2025 page 43 Sustainability Report 2025 pages 286-291
(B)B.1.3	Does the company disclose the engagement channel with stakeholder groups and how the company responds to stakeholders' ESG concerns? Apakah perusahaan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana perusahaan menanggapi kekhawatiran ESG pemangku kepentingan?	Sustainability Report 2025 pages 54-58 Sustainability Report 2025 page 59 Sustainability Report 2025 pages 145-146 Sustainability Report 2025 pages 277-278 Sustainability Report 2025 page 310
(B)B.1.4	Does the company have a unit / division / committee who is specifically responsible to manage the sustainability matters? Apakah perusahaan memiliki unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola masalah keberlanjutan?	Sustainability Report 2025 pages 120-124
(B)B.1.5	Does the company disclose board of directors/commissioners' oversight of sustainability-related risks and opportunities? Apakah perusahaan mengungkapkan pengawasan direksi/komisaris terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan?	Sustainability Report 2025 pages 122-123
(B)B.1.6	Does the company disclose the linkage between executive directors and senior management remuneration and sustainability performance for the previous year? Apakah perusahaan mengungkapkan hubungan remunerasi antara Direktur Eksekutif dan Manajemen Senior dan kinerja keberlanjutan untuk tahun sebelumnya?	Sustainability Report 2025 page 192
(B)B.1.7	Is the company's Whistle Blowing System managed by independent parties/institutions? Apakah Whistle Blowing System perusahaan dikelola oleh pihak/lembaga independen?	No
(B)C	Disclosure and Transparency Pengungkapan dan Transparansi	

(B)C.1	Quality of Annual Report. Kualitas Laporan Tahunan	
(B)C.1.1	Are the audited annual financial report /statement released within 60 days from the financial year end? Apakah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dirilis dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun buku?	No.
(B)D	Responsibilities of the Board Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
(B)D.1	Board Competencies and Diversity. Kompetensi dan Keragaman Dewan Komisaris.	
(B).D.1.1	Does the company have at least one female independent director/commissioner? Apakah perusahaan memiliki setidaknya satu komisaris/komisaris independen perempuan?	No.
(B).D.1.2	Does the company have a policy and disclose measurable objectives for implementing its board diversity and report on progress in achieving its objectives? Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan yang dapat diukur untuk mengimplementasikan keragaman Dewan Komisaris dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya?	1. Board Diversity Policy 1. Kebijakan Kesetaraan dan Inklusi Dewan Komisaris dan Direksi https://esg.wika-beton.co.id/pdf/KEBIJAKAN_BOARD_DIVERSITY_WTON 2. Annual Report 2025 (Pages 464-465) 2. Laporan Tahunan 2025 (Halaman 464-465)
(B)D.2	Board Structure. Struktur Dewan Komisaris.	
(B)D.2.1	Is the Nominating Committee comprise entirely of independent directors/commissioners? Apakah Komite Nominasi terdiri dari komisaris/komisaris independen?	1. Annual Report 2025 (Page 482-490) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 488) 2. Annual Report 2025 (Pages 142) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 142)
(B)D.2.2	Does the Nominating Committee undertake the process of identifying the quality of directors aligned with the company's strategic directions? Apakah Komite Nominasi melakukan proses identifikasi kualitas direksi yang selaras dengan arah strategis perusahaan?	Annual Report 2025 (Page 491-492) Duties and Responsibilities related to the Nomination Function Laporan Tahunan 2025 (Halaman 491-492) Tugas dan Tanggung Jawab terkait Fungsi Nominasi
(B)D.3	Board Appointments and Re-Election Penunjukan dan Pengangkatan Kembali Direksi/Dewan Komisaris	
(B)D.3.1	Does the company use professional search firms or other external sources of candidates (such as director databases set up by director or shareholder bodies) when searching for candidates to the board of directors/commissioners? Apakah perusahaan menggunakan firma rekrutmen profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti basis data Direktur yang dibuat oleh badan direktur atau pemegang saham) ketika mencari kandidat untuk Direksi/Dewan Komisaris?	The Company does not engage professional recruitment firms or other external institutions in the process of appointing members of the Board of Directors. Tidak. Perseroan tidak menggunakan firma rekrutmen profesional atau lembaga eksternal lainnya dalam proses penunjukan Direksi. The appointment of the Board of Directors is carried out through the General Meeting of Shareholders (GMS), in accordance with the prevailing laws and regulations, including Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014. Penunjukan Direksi dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014.

		The nomination and appointment process for members of the Board of Directors is conducted in a transparent and objective manner, taking into account the candidates' competence, integrity, and track record, as well as the Company's strategic needs. Proses pencalonan dan pengangkatan Direksi dilaksanakan secara transparan dan objektif, dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak calon, serta kebutuhan strategis Perseroan. https://www.wika-beton.co.id/pedoman-tata-kelola-perusahaan/
(B)D.4	Board Structure & Composition Struktur dan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris	
(B)D.4.1	Do independent non-executive directors/commissioners make up more than 50% of the board of directors/commissioners for a company with independent chairman? Apakah lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, pada perusahaan yang Komisaris Utamanya juga merupakan Komisaris Independen?	Annual Report 2025 (Page 410-411)
(B)D.5	Risk Oversight Pengawasan Risiko	
(B)D.5.1	Does the company disclose that its Board identified key risk in relation to information technology including disruption, cyber security, and disaster recovery, to ensure that such risks are managed and integrated into the overall risk management framework? Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Dewan Komisaris mengidentifikasi risiko utama terkait masalah TI seperti gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa semua risiko utama dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan?	1. IT and Service Management Policy https://www.wika-beton.co.id/kebijakan-tata-kelola-perusahaan/ 2. Annual Report 2025 (Pages 72-73) 2. Laporan Tahunan 2025 (Halaman 72-73) 3. Emerging Risk 2025 Emerging Risk 2025 https://esg.wika-beton.co.id/pdf/Emerging_Risk_2025_WIKA_Beton
(B)D.6	Board Performance Kinerja Direksi/Dewan Komisaris	
(B)D.6.1	Does the company have a separate board level Risk Committee? Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko yang terpisah pada tingkat Dewan Komisaris?	1. Annual Report 2025 (Page 551) 1. Laporan Tahunan 2025 (Halaman 551) 2. Annual Report 2025 (Pages 482-500) Laporan Tahunan 2025 (Halaman 482-500)

7



2025 Laporan Tahunan
Annual Report



Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan

Social & Environment Responsibility

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
Corporate Social and Environmental Responsibility

WIKA Beton berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek *Environmental, Social and Governance* (ESG) dalam setiap proses bisnisnya. Sebagai bagian dari entitas publik dan anak usaha BUMN, Perseroan tidak hanya bertanggung jawab menciptakan nilai finansial, tetapi juga memberikan dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan. Prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi dasar dalam merumuskan strategi keberlanjutan yang terintegrasi dengan arah pertumbuhan jangka panjang Perseroan.

WIKA Beton is committed to conducting its business sustainably by incorporating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into every aspect of its operations. As a publicly listed company and a subsidiary of a state-owned enterprise, the Company is responsible for creating financial value and generating positive impacts on society and the environment. The principles of integrity, transparency, and accountability form the foundation for developing a sustainability strategy that aligns with the Company's long-term growth objectives.

Untuk memperkuat transparansi pelaporan dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, Perseroan menyampaikan informasi kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara lengkap dalam Laporan Keberlanjutan 2024, yang diterbitkan secara terpisah namun bersamaan waktunya dengan Laporan Tahunan. Penyusunan laporan ini mengacu pada ketentuan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan serta pedoman teknis SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 mengenai bentuk dan isi laporan keberlanjutan.

To strengthen transparency in reporting and accountability to stakeholders, the Company provides comprehensive information on Social and Environmental Responsibility (TJSL) activities in the 2024 Sustainability Report. This report is published separately but concurrently with the Annual Report. Its preparation follows the provisions of POJK No. 51/POJK.03/2017 on sustainable finance, as well as the technical guidelines outlined in SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 regarding the format and content of sustainability reports.

Laporan Keberlanjutan Perseroan mencakup informasi mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia, ketenagakerjaan, praktik usaha yang wajar, pengelolaan lingkungan hidup, layanan pelanggan, serta pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Laporan ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi resmi Perseroan dalam mengungkapkan kinerja ESG kepada seluruh pemangku kepentingan secara transparan dan kredibel.

The Company's Sustainability Report includes information on the respect for human rights, labor practices, fair business practices, environmental management, customer service, and community engagement and empowerment. This report also is the Company's official communication tool to transparently and credibly disclose its ESG performance to all stakeholders.

Sebagai bagian dari kesiapan menuju harmonisasi standar global, Perseroan telah memulai proses penyesuaian terhadap standar internasional IFRS S1 dan IFRS S2. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan struktur tata kelola, pengelolaan risiko berbasis ESG, serta pengembangan sistem informasi pelaporan yang mendukung transparansi. Perseroan juga mengintegrasikan topik-topik keberlanjutan dalam perumusan strategi, termasuk pengungkapan atas empat pilar utama IFRS: *Governance, Strategy, Risk Management dan Metrics & Targets.*

As part of its readiness for global standard harmonization, the Company has begun the process of aligning with the international IFRS S1 and IFRS S2 standards. This initiative is reflected in strengthening governance structures, implementing ESG-based risk management, and developing reporting information systems that support transparency. The Company has also integrated sustainability topics into its strategy formulation, including disclosures on the four main pillars of IFRS: Governance, Strategy, Risk Management, and Metrics & Targets.

Integrasi keberlanjutan ke dalam strategi bisnis dan manajemen risiko dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap dinamika lingkungan bisnis, perubahan iklim, serta tekanan regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan. Perseroan memastikan operasional tetap resilien, bertanggung jawab dan relevan secara jangka panjang.

Informasi lebih lengkap mengenai implementasi program TJSL WIKA Beton 2024 dapat diakses dalam Laporan Keberlanjutan melalui situs web resmi Perseroan di:

https://www.wika-beton.co.id/laporan-keberlanjutan/

The integration of sustainability into business strategy and risk management is carried out to anticipate business environment dynamics, climate change, and the pressures of regulations and stakeholder expectations. The Company ensures that its operations remain resilient, responsible, and relevant in the long term.

More detailed information on the implementation of WIKA Beton's 2024 CSR programs can be accessed in the Sustainability Report on the Company's official website at:

https://www.wika-beton.co.id/laporan-keberlanjutan/



Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun 2025

Statement of the Board of Commissioners and Board of Directors Regarding Responsibility for the 2025 Annual Report of PT Wijaya Karya Beton Tbk

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun 2025

Statement Letter from the Board of Commissioners for the Responsibility of the 2025 Annual Report of PT Wijaya Karya Beton Tbk

Kami, anggota Dewan Komisaris Perseroan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned members of the Board of Commissioners of the Company stated that all information in 2025 Annual Report of PT Wijaya Karya Beton Tbk has been informed completely and therefore declare we are fully responsible for the information set forth.

Jakarta, 10 April 2026
Jakarta, April 10, 2026

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Wilan Oktavian
Komisaris Utama
President Commissioner

Tjia Marwan
Komisaris
Commissioner

Bapak Dwi Gawan Islandhi H.B. selaku Komisaris Independen Perseroan tidak lagi menjabat karena meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Perseroan melalui Surat Pengumuman No. SE.01.01/WB-0A.0167/2026 tanggal 18 Februari 2026.
Mr. Dwi Gawan Islandhi H.B., in his capacity as Independent Commissioner of the Company has passed away, no longer serves in such position as announced by the Company through Announcement Letter No. SE.01.01/WB-0A.0167/2026 dated February 18, 2026.

Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun 2025

Statement Letter from the Board of Directors for the Responsibility of the 2025 Annual Report of PT Wijaya Karya Beton Tbk

Kami, anggota Direksi Perseroan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned members of the Board of Directors of the Company stated that all information in 2025 Annual Report of PT Wijaya Karya Beton Tbk has been informed completely and therefore declare we are fully responsible for the information set forth.

Jakarta, 10 April 2026
Jakarta, April 10, 2026

Direksi
Board of Directors



Kuntjara
Direktur Utama
President Director



Syailendra Ogan
Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Human Capital and Risk Management



Verly Widiantoro
Direktur Teknik dan Produksi
Director of Engineering and Production



Agus Pramono
Direktur Operasi dan *Supply Chain Management*
Director of Operation and Supply Chain Management



Rija Judaswara
Direktur Pemasaran dan Pengembangan
Director of Marketing and Development

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021:
Bentuk dan Isi Laporan Tahunan
Emiten atau Perseroan Publik

SEOJK Reference Number 16/SEOJK.04/2021:
Form and Content of the Annual Report of Issuers or
Public Companies

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021:
Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perseroan Publik
SEOJK Reference Number 16/SEOJK.04/2021:
Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan	Halaman Page	Description
I. Ketentuan Umum		I. General Disclosure
1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:		1. In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau Perseroan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau Perseroan publik.	√	a. Annual Report is a report on the accountability of the Board of Directors and the Board of Commissioners in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) financial year to the General Meeting of Shareholders based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation regarding the Annual Report of Issuers or Public Companies.
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.	√	b. Issuers are parties who make public offerings.
c. Perseroan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	√	c. Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp. 3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority.
d. Perseroan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perseroan Publik.	√	d. Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Public Company.
e. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perseroan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.	√	e. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.
f. Direksi:		f. Board of Directors
1) Bagi Emiten atau Perseroan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik; dan	√	1) For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and
2) Bagi Emiten atau Perseroan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai badan hukum tersebut.	√	2) For an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company is an organ that runs the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.
g. Dewan Komisaris:		g. Board of Commissioners
1) Bagi Emiten atau Perseroan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik; dan	√	1) For an Issuer or Public Company in the form of a limited liability company is the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; and
2) Bagi Emiten atau Perseroan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai badan hukum tersebut	√	2) For an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company is the organ that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.
h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:		h. General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:

Keterangan	Halaman Page	Description
1) Bagi Emiten atau Perseroan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka; dan	√	1) For an Issuer or Public Company in the form of a limited liability company is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and
2) Bagi Emiten atau Perseroan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.	√	2) For an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company is an organ that has authority that could not be given to an organ that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the laws and/or articles of association governing the legal entity.
2. Laporan Tahunan Emiten atau Perseroan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perseroan Publik.	√	2. The Annual Report of a listed company is one of the most important sources as the base for investors or shareholders in making an investment decision, and is a means of monitoring an issuer or public company.
3. Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perseroan Publik.	√	3. Along with the development of the Capital Market and the growing needs of investors or shareholders regarding information disclosure, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to improve the quality of information disclosure through an annual report.
4. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.	√	4. Annual Report should be prepared in an orderly manner and should be informative to provide conveniences for the investors or shareholders in getting the information they need.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perseroan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.	√	5. This Circular Letter of the Financial Service Agency serves guidelines for Issuers or Public Companies that should be applied in preparing their Annual Report.
II. Bentuk Laporan Tahunan		II. Format of Annual Report
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	√	1. Annual Report should be presented in the printed format and in electronic document copy.
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	√	2. The printed version of the Annual Report should be printed on light-colored paper of fine quality, in A4 size, bound and can be reproduced in good quality.
3. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.	√	3. Annual Report may present the information in form of images, charts, tables, and diagrams are presented by mentioning the title and/or clear description, that is easy to read and be understood;
4. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam portable document format (PDF).	√	4. The Annual Report presented in electronic document format is the Annual Report converted into portable document format.
III. Isi Laporan Tahunan		III. Format of Annual Report
1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat:	√	1. Annual Report should contain at least the following information:
a. Ikhtisar data keuangan penting;	16-23	a. Summary of key financial information;
b. Informasi saham (jika ada);	24-28	b. Stock information (if any);
c. Laporan Direksi;	51-68	c. The Board of Directors report;
d. Laporan Dewan Komisaris;	70-81	d. The Board of Commissioners report;
e. Profil Emiten atau Perseroan Publik;	83-205	e. Profile of Issuer or Public Company;
f. Analisis dan pembahasan manajemen;	207-326	f. Management Discussion and Analysis
g. Tata kelola Emiten atau Perseroan Publik;	329-639	g. Corporate governance applied by the Issuer or Public Company;
h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perseroan Publik;	641-643	h. Corporate social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;
i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	691-826	i. Audited annual report; and
j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	645-647	j. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the Annual Report;

Keterangan	Halaman Page	Description
2. Uraian Isi Laporan Tahunan		2. Description of Content of Annual Report
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perseroan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	16-23	a. Summary of Key Financial Information Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since the commencement of business if the Issuers or the Public Company commencing the business less than 3 (three) years, at least contain:
1) Pendapatan/penjualan;	16	1) Income/sales;
2) Laba bruto;	16	2) Gross profit;
3) Laba (rugi);	16	3) Profit (loss);
4) Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	16	4) Total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest;
5) Total laba (rugi) komprehensif;	16	5) Total comprehensive profit (loss);
6) Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	16	6) Total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest;
7) Laba (rugi) per saham;	16	7) Earning (loss) per share;
8) Jumlah aset;	17	8) Total assets;
9) Jumlah liabilitas;	17	9) Total liabilities;
10) Jumlah ekuitas;	17	10) Total equities;
11) Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	19	11) Profit (loss) to total assets ratio;
12) Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	19	12) Profit (loss) to equities ratio;
13) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan;	19	13) Profit (loss) to income ratio;
14) Rasio lancar;	18	14) Current ratio;
15) Rasio liabilitas terhadap ekuitas;	19	15) Liabilities to equities ratio;
16) Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	19	16) Liabilities to total assets ratio; and
17) Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perseroan Publik dan jenis industrinya;	18-19	17) Other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;
b. Informasi saham Informasi saham bagi Perseroan Terbuka paling sedikit memuat:	24-28	b. Stock Information Stock Information for Public Company at least contains:
1) Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	24	1) Shares issued for each three-month period in the last 2 (two) fiscal years (if any), at least covering:
a) Jumlah saham yang beredar;	24	a) Number of outstanding shares;
b) Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	24	b) Market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on
c) Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	24	c) Highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on; and
d) Volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	24	d) Share volume at the Stock Exchange where the shares listed on;
Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek;		Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed in the Stock Exchange;
2) Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	27	2) In the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on:
a) Tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	27	a. Date of corporate action;

Keterangan	Halaman Page	Description
b) Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham;	27	b. Stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares;
c) Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi;	27	c. Number of outstanding shares prior to and after corporate action;
d) Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan	27	d. Number of conversion shares proceed (if any); and
e) Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	27	e. Share price prior to and after corporate action;
3) Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan	28	3) In the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the year under review, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and
4) Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut.	28	4) In the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/or delisting;
c. Laporan Direksi Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	52	c. The Board of Directors Report The Board of Directors Report should at least contain the following items:
1) Kinerja Emiten atau Perseroan Publik, paling sedikit memuat:		1) The performance of the Issuer or Public Company, at least covering:
a) Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perseroan Publik;	56	a) Strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;
b) Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perseroan Publik;	59	b) The Board of Directors roles in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;
c) Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perseroan Publik;	59	c) The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer or Public Company strategy;
d) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perseroan Publik; dan	60	d) Comparison between achievement of results and targets; or Public Company; and
e) Kendala yang dihadapi Emiten atau Perseroan Publik;	61	e) Challenges faced by the Issuer or Public Company;
2) Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perseroan Publik; dan	63	2) Description on business prospects; or Public Company; and
3) Penerapan tata kelola Emiten atau Perseroan Publik.	64	3) Implementation of good corporate governance by Issuer or Public Company;
d. Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	70	d. The Board of Commissioners Report The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:
1) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perseroan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perseroan Publik yang dilakukan oleh Direksi;	71	1) Assessment of the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of the strategy of the Issuer or Public Company carried out by the Board of Directors;
2) Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perseroan Publik yang disusun oleh Direksi; dan	74	2) View on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors; and
3) Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perseroan Publik.	74	3) View on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public Company;

Keterangan	Halaman Page	Description
e. Profil Emiten atau Perseroan Publik Profil Emiten atau Perseroan Publik paling sedikit memuat informasi:	83-205	e. Profile of the Issuer or Public Company Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:
1) Nama Emiten atau Perseroan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	84; 89	1) Name of Issuer or Public Company, including change of name, the reason for the change, and the effective date of the change of name during the year under review;
2) Akses terhadap Emiten atau Perseroan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perseroan Publik, meliputi:	118	2) Access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where the public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include:
a) Alamat;	118	a) Address;
b) Nomor telepon;	118	b) Telephone number;
c) Alamat surat elektronik; dan	118	c) E-mail address; and
d) Alamat Situs Web;	118	d) Website address;
3) Riwayat singkat Emiten atau Perseroan Publik;	86-89	3) Brief history of the Issuer or Public Company;
4) Visi dan misi Emiten atau Perseroan Publik serta budaya Perseroan (corporate culture) atau nilai-nilai Perseroan;	94-100	4) Vision and mission of the Issuer or Public Company as well as corporate culture or values;
5) Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	101-113	5) Line of business according to the latest Articles of Association, and types of products and/or services produced;
6) Wilayah operasional Emiten atau Perseroan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional Perseroan.	114-119	6) The operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or district for implementing operational activities or the range of the company's operational activities.
7) Struktur organisasi Emiten atau Perseroan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan;	120-121	7) Structure of organization of the Issuer or Public Company in chart form, at least 1 (one) level below the Board of Directors, with the names and titles;
8) Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan;	122	8) A list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;
9) Profil Direksi, paling sedikit memuat:	132-139	9) The Board of Directors profiles include:
a) Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	√	a) Name and short description of duties and functions;
b) Foto terbaru;	√	b) Latest photograph;
c) Usia;	√	c) Age;
d) Kewarganegaraan;	√	d) Citizenship;
e) Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	√	e) Education;
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	f) History position, covering information on:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perseroan Publik yang bersangkutan;	√	(1) Legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company;
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perseroan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	√	(2) Concurrent position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perseroan Publik;	√	(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;

Keterangan	Halaman Page	Description
g) Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perseroan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan	√	g) Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and major or controlling shareholders, either directly or indirectly, to individual owners, including the names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and
h) Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	139	h) Changes in the composition of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;
10) Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	140-145	10) The Board of Commissioners profiles, at least include:
a) Nama dan jabatan;	√	a) Name;
b) Foto terbaru;	√	b) Latest photograph;
c) Usia;	√	c) Age;
d) Kewarganegaraan;	√	d) Citizenship;
e) Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	√	e) Education;
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	f) History position, covering information on:
(1) Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris;	√	(1) Legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners
(2) Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perseroan Publik yang bersangkutan;	√	(2) Legal bases for the first appointment as member of the Board of Commissioners who also Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;
(3) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perseroan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	√	(3) Concurrent position, as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee, and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and
(4) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perseroan Publik;	√	(4) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g) Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perseroan Publik mengungkapkan hal tersebut;	√	g) Disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and major or controlling shareholders, either directly or indirectly, to individual owners, including the names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and
h) Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan	143	h) Statement of independence of Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods; and
i) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	144	i) Changes in the composition of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;

Keterangan	Halaman Page	Description
11) Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	139; 145	11) In the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report;
12) Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	123-128	12) Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the financial year; Disclosure of information can be presented in table form.
13) Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	150-156	13) Names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:
a) Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perseroan Publik;	150	a) Shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company;
b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perseroan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	151	b) Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who own shares in Issuers or Public Companies. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and
c) Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perseroan Publik; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.	150	c) Groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuers or Public Company;
14) Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perseroan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perseroan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	152	14) The percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.
15) Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	152	15) Number of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on:
a) Kepemilikan institusi lokal;	152	a) Ownership of local institutions;
b) Kepemilikan institusi asing;	152	b) Ownership of foreign institutions;
c) Kepemilikan individu lokal; dan	152	c) Ownership of local individual; and
d) Kepemilikan individu asing;	152	d) Ownership of foreign individual;
16) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perseroan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	154-156	16) Information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram;
17) Nama entitas anak, Perseroan asosiasi, Perseroan ventura bersama dimana Emiten atau Perseroan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, Perseroan asosiasi, Perseroan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	157-161	17) Name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the Issuers of Public Company (if any); For subsidiaries, include the addresses of the said subsidiaries;

Keterangan	Halaman Page	Description
18) Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perseroan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	162-164	18) Chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed;
19) Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	164	19) Chronology of securities listing in addition to the said security in point 18), which at least should contain the name of the Securities, year of issuance, date of maturity, bid price, and rating of the securities (if any);
20) Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:	129-130	20) Information on public accounting services (AP) and public accounting firms (KAP) and their networks/associations/allies includes:
a) Nama dan alamat;	129	a) Name and address
b) Periode penugasan;	129	b) Assignment period
c) Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	129	c) Information on audit and/or non-audit services provided;
d) Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	129	d) Audit and/or non-audit fee for each assignment given during the financial year; and
e) Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/ asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	129	e) In the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and Disclosure of information on AP and KAP services and their networks/ associations/allies can be presented in table form.
21) Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	130-131	21) Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	207-326	f. Management Discussion and Analysis Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:
1) Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perseroan Publik, paling sedikit mengenai:	222-239	1) Operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including:
a) Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	223; 225; 226; 227; 230; 231; 235	a) Production, which includes process, capacity and its development;
b) Pendapatan/penjualan; dan	228; 231; 236; 238	b) Income/sales; and
c) Profitabilitas;	228; 232; 236	c) Profitability;
2) Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	240-273	2) Comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:
a) Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	241-250	a) Current assets, non-current assets, and total assets;
b) Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	251-257	b) Short term liabilities, long term liabilities, total liabilities;
c) Ekuitas;	257-258	c) Equities;
d) Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	259-271	d) Sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and

Keterangan	Halaman Page	Description
e) Arus kas;	271-273	e) Cash flows;
3) Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	281-283; 286-287	3) The capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;
4) Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perseroan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	284-285	4) Accounts receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios;
5) Struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	288-290	5) Capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy;
6) Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	291	6) Discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least:
a) Tujuan dari ikatan tersebut;	291	a) The purpose of such ties;
b) Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	291	b) Source of funds expected to fulfill the said ties;
c) Mata uang yang menjadi denominasi; dan	291	c) Currency of denomination; and
d) Langkah yang direncanakan Emiten atau Perseroan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	291	d) Steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks;
7) Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	292-293	7) Discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include:
a) Jenis investasi barang modal;	293	a) Type of investment of capital goods;
b) Tujuan investasi barang modal; dan	292	b) Objective of the investment of capital goods; and
c) Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	292	c) Value of the investment of capital goods;
8) Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	293	8) Material Information and facts that occurring after thedate of the accountant's report (if any);
9) Prospek usaha dari Emiten atau Perseroan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	297-299	9) Information on the prospects of the Issuer or the Company in connection with industry,economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;
10) Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	300-304	10) Comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning:
a) Pendapatan/penjualan;	301	a) Income/sales;
b) Laba (rugi);	301	b) Profit (loss);
c) Struktur modal (capital structure); atau	300	c) Capital structure; or
d) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perseroan Publik;	300-304	d) Others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
11) Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perseroan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	305-308	11) Target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning:
a) Pendapatan/penjualan;	307	a) Income/sales;
b) Laba (rugi);	307	b) Profit (loss);
c) Struktur modal (capital structure); atau	306	c) Capital structure; or
d) Kebijakan dividen; atau	308	d) Dividend policy; or
e) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perseroan Publik;	306-308	e) Others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
12) Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perseroan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	309-310	12) Marketing aspects of the company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share;
13) Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:	311-315	13) Description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least:
a) Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih;	311-312	a) Dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;

Keterangan	Halaman Page	Description
b) Tanggal pembayaran dividen kas dan/ atau tanggal distribusi dividen non kas;	313	b) The date of the payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend;
c) Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	313	c) Amount of cash per share (cash and/or non cash); and
d) Jumlah dividen per tahun yang dibayar; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perseroan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	313	d) The amount of dividends paid per year; Disclosure of information can be presented in table form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.
14) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	315	14) Use of proceeds from Public Offerings, under the condition of:
a) Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	315	a) During the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and
b) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	315	b) In the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then Issuer should explain the said changes;
15) Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/ modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat:	316-320	15) Material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, along others include:
a) Tanggal, nilai, dan objek transaksi;	316-317	a) Transaction date, value, and object;
b) Nama pihak yang melakukan transaksi;	318	b) Name of transacting parties;
c) Sifat hubungan Afiliasi (jika ada);	318	c) Nature of affiliate relationship (if any);
d) Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	319	d) Description of the fairness of the transaction;
e) Pemenuhan ketentuan terkait; dan	320	e) Compliance with related rules and regulations; and
f) Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perseroan Publik juga mengungkapkan informasi:	319	f) In the event that there is an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:
(1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arm's length principle); dan	319	(1) A statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has conducted through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is in line with generally accepted business practices, among others, by complying with the arm's length principle; and
(2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arm's length principle);	320	(2) The Board of Commissioners and the audit committee roles in carrying out adequate procedures to ensure that affiliate transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the arm's length principle;

Keterangan	Halaman Page	Description
g) Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	319	g) For affiliate transactions or material transactions which are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliate transactions or material transactions are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously; In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.
h) Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	320	h) For disclosure of affiliate transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliate transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;
i) Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	317	i) in the event that there is no affiliate transaction and/or conflict of interest transaction, then this matter shall be disclosed;
16) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perseroan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	321-325	16) Changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any); and
17) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	326	17) Changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any).
g. Tata Kelola Emiten atau Perseroan Publik Tata kelola Emiten atau Perseroan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	330	g. Corporate Governance of the Issuer or Public Company Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:
1) RUPS, paling sedikit memuat:	347	1) GMS, at least contains:
a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:		a) Information on the resolution from the AGM of the previous 1 (one) year, covering:
(1) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan	374	(1) Resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year before the financial year are realized in the financial year; and
(2) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;	375	(2) Resolutions of the GMS for the financial year and 1 (one) year prior to the financial year that have not been realized and the reasons for not realizing them;
b) Dalam hal Emiten atau Perseroan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	375	b) In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;
2) Direksi, paling sedikit memuat:	377	2) The Board of Directors, covering:
a) Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	390	a) Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in table.
b) Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;	395	b. A statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;

Keterangan	Halaman Page	Description
c) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	396	c) Policies and frequency of Board of Directors meetings, joint meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS; Information on the attendance of members of the Board of Directors at the meeting of the Board of Directors, joint meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in table.
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	402	d) Training and/or competency of members of the Board of Directors:
(1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan	403	(1) Policies related to training and/or the competence improvement of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and
(2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	403	(2) Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any);
e) Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	405	e) The Board of Directors' assessment of the committees' performance that support the implementation of the Board of Directors' duties for the financial year shall at least contain:
(1) Prosedur penilaian kinerja; dan	405	(1) Performance appraisal procedures; and
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	405	(2) The criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and
f) Dalam hal Emiten atau Perseroan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	N/A	f) In the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, then this shall be disclosed.
3) Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	409	3) The Board of Commissioners, at least contains:
a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	411	a) Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
b) Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;	427	b) Statement that the Board of Commissioner has already have the board manual or charter;
c) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	427	c) Policies and the frequency of the Board of Commissioners meetings, joint meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting including attendance at the GMS; Information on the attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in table.
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.		Information on the attendance rate of members of the Board of Commissioners in Board of Commissioners meetings, Board of Commissioners meetings with the Board of Directors, or GMS can be presented in table form.
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	433	d) Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:

Keterangan	Halaman Page	Description
(1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan	434	(1) Policies on training and/or the competency improvement of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and
(2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	434	(2) Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the financial year (if any);
e) Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	438	e) Performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least contain:
(1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	438	(1) Procedure for the implementation of performance assessment;
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	439	(2) The criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and
(3) Pihak yang melakukan penilaian; dan	439	3. Assessor; and
f) Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	445	f) The Board of Commissioners' assessment of the Committees' performance that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the financial year includes:
(1) Prosedur penilaian kinerja; dan	445	(1) Performance appraisal procedures; and
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	446	(2) The criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings;
4) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	452	4) The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:
a) Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan	452	a) Nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
b) Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	454	b) Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, including:
(1) Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	454	(1) The procedure for determining the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
(2) Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan	457	(2) The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and
(3) Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	460	(3) The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in table.
5) Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perseroan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	451	5) Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that conduct business based on sharia law, as stipulated in the articles of association, at least containing:
a) Nama;	451	a. Name;

Keterangan	Halaman Page	Description
b) Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah;	451	b) Legal basis of appointment of Sharia Supervisory Board;
c) Periode penugasan dewan pengawas syariah;	451	c) Term of office of Sharia Supervisory Board;
d) Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan	451	d) Duty and responsibility of Sharia Supervisory Board and;
e) Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perseroan Publik;	451	e) Frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance of Sharia Principles of the Issuer or Public Company in the Capital Market;
6) Komite Audit, mencakup antara lain:	468	6) Audit Committee, among others covering:
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	468–470	a) Name and position in the committee;
b) Usia;	468–470	b) Age;
c) Kewarganegaraan;	468–470	c) Citizenship;
d) Riwayat pendidikan;	468–470	d) Education background;
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	468–470	e) History of position; including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	468–470	(1) Legal basis for the appointment as member of the committee;
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	468–470	(2) Concurrent position, as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of the committee, and other position (if any); and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perseroan Publik;	468–470	(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f) Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	468–470	f) Period and terms of office of the member of Audit Committee;
g) Pernyataan independensi Komite Audit;	473	g) Statement of independence of the Audit Committee;
h) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	474	h) Training and competency development participated in during the book year (if any);
i) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan	479	i) Policies and implementation of the frequency of meeting of the Audit Committee and attendance of member of Audit Committee; and
j) Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit;	480	j) The activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter;
7) Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perseroan Publik, paling sedikit memuat:	482	7) Committee or remuneration and nomination functions of Issuer or Public Company at least contains;
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	482–485	a) Name and position in the committee;
b) Usia;	482–485	b) Age;
c) Kewarganegaraan;	482–485	c) Citizenship;
d) Riwayat pendidikan;	482–485	d) Education background;
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	482–485	e) History of position; including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	482–485	(1) Legal basis for the appointment as member of the committee;
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	482–485	(2) Concurrent position, as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of the committee, and other position (if any); and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perseroan Publik;	482–485	(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;

Keterangan	Halaman Page	Description
f) Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	482–485	f) Period and terms of office of the member of Audit Committee;
g) Pernyataan independensi komite;	488	g) Independence statement of Audit Committee;
h) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	490	h) Training and/or competency development participated in during the book year (if any);
i) Uraian tugas dan tanggung jawab;	491	i) Description of Duties and Responsibilities;
j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter);	496	j) A statement that already has charter or guidelines;
k) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut;	497	k) Policies and frequency of meeting and attendence level at the meeting;
l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	499	l) Description of duties implementation during the book year; and
m) Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perseroan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	N/A	m) In the event that nomination and remuneration committee is not formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:
(1) Alasan tidak dibentuknya komite; dan	N/A	(1) The reason why does not form the committee; and
(2) Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	N/A	(2) The party who carries out the nomination and remuneration function;
8) Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perseroan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	501	8) Other committees owned by the Issuer or Public Company in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least contains;
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	501–503	a) Name and position in the committee;
b) Usia;	501–503	b) Age;
c) Kewarganegaraan;	501–503	c) Citizenship;
d) Riwayat pendidikan;	501–503	d) Education background;
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	501–503	e) History of position; including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	501–503	(1) Legal basis of appointment as member of Committee;
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	501–503	(2) Concurrent position, as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of the committee, and other position (if any); and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perseroan Publik;	501–503	(3) Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;
f) Periode dan masa jabatan anggota komite;	501–503	f) Periode and tenure of Committee member;
g) Pernyataan independensi komite;	508	g) Statement of independence of Committee;
h) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	509	h) Training and/or Competency Development participated in during the book year (if any); and
i) Uraian tugas dan tanggung jawab;	509	i) Description of Duties and Responsibilities;
j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	513	j) Statement that already have work guideline and board charter;
k) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan	514	k) Policies and frequency of meetings, and attendance level at the meetings; and
l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	516	l) Description of Duties Implementation during the book year;
9) Sekretaris Perseroan, paling sedikit memuat:	522	9) Corporate Secretary, including:
a) Nama;	522	a) Name;

Keterangan	Halaman Page	Description
b) Domisili;	522	b) Domicile;
c) Riwayat jabatan, meliputi:	522	c) History of position, including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris Perseroan; dan	522	(1) Legal basis for the appointment as Corporate Secretary; and
(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perseroan Publik;	522	(2) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
d) Riwayat pendidikan;	522	d) Education background;
e) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan	525	e) Training and competency development participated in during the book year; and
f) Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris Perseroan pada tahun buku;	525	f) Brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the year under review;
10) Satuan Pengawasan Intern, paling sedikit memuat:	528	10) Internal Audit, among others including:
a) Nama kepala Satuan Pengawasan Intern;	528	a) Name of Head of Internal Audit;
b) Riwayat jabatan, meliputi:	528	b) History of position, including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai kepala Satuan Pengawasan Intern; dan	528	(1) Legal basis for the appointment as Head of Internal Audit; and
(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perseroan Publik;	528	(2) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
c) Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	531	c) Qualification or certification as internal auditor (if any);
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku;	532	d) Traning and/or Competency Development participated in during the book year;
e) Struktur dan kedudukan Satuan Pengawasan Intern;	533	e) Structure and position of Internal Audit;
f) Uraian tugas dan tanggung jawab;	534	f) Description of duties and responsibilities;
g) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Satuan Pengawasan Intern; dan	530	g) a statement that the Internal Audit has already had Internal Audit charter; and
h) Uraian singkat pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit;	534	h) Brief description of the duties implementation of the Internal Audit in the financial year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;
11) Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perseroan Publik, paling sedikit mengenai:	542	11) Description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering:
a) Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan	542	a) Financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules; and
b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan	546	b) Review on the effectiveness of internal control systems; and
c) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	547	c) Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;
12) Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perseroan Publik, paling sedikit mengenai:	548	12) Risk management system implemented by the company, at least includes:
a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perseroan Publik;	549	a) General description about the company's risk management system the Issuer or Public Company;
b) Jenis risiko dan cara pengelolaannya;	555	b) Types of risk and the management;
c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perseroan Publik; dan	563	c) Review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company; and

Keterangan	Halaman Page	Description
d) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	565	d) Statement of the Board of Directors and/ or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;
13) Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perseroan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat:	566	13) Legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:
a) Pokok perkara/gugatan;	566	a) Substance of the case/claim;
b) Status penyelesaian perkara/gugatan; dan	566	b) Status of settlement of case/claim; and
c) Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perseroan Publik;	566	c) Potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company;
14) Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perseroan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	566	14) Information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any);
15) Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perseroan Publik meliputi:	567	15) Information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes:
a) Pokok-pokok kode etik;	567	a) Key points of the code of conduct;
b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	568	b) Socialization of the code of conduct and enforcement; and
c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perseroan Publik;	570	c) Statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issuer of Public Company;
16) Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perseroan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	570	16) A brief description of the policy for providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (ESOP) and/or program employee stock ownership (ESOP); In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (ESOP) and/or employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:
a) Jumlah saham dan/atau opsi;	570	a) Number of share and/or option;
b) Jangka waktu pelaksanaan;	570	b) Period;
c) Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	570	c) The requirement for eligible employee and/ or management; and
d) Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	570	d) exercised price;
17) Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	571	17) Description of employee or management stock ownership program of the Issuer or Public Company, among others contains:
a) Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan Terbuka; dan	571	a) Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and
b) Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	571	b) Implementation of that policy;
18) Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perseroan Publik, paling sedikit memuat:	572	18) A description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company, among others include:
a) Cara penyampaian laporan pelanggaran;	574	a) Mechanism for violation reporting;
b) Perlindungan bagi pelapor;	574	b) Protection for the whistleblower;

Keterangan	Halaman Page	Description
c) Penanganan pengaduan;	575	c) Handling of violation reports;
d) Pihak yang mengelola pengaduan; dan	575	d) Unit responsible for handling of violation report; and
e) Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:	579	e) Results from violation report handling, at least includes:
(1) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	579	(1) Number of complaints received and processed during the fiscal year; and
(2) Tindak lanjut pengaduan;	579	(2) Follow up of complaints;
Dalam hal Emiten atau Perseroan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	N/A	In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, it is disclosed regarding this matter
19) Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perseroan Publik, paling sedikit memuat:	580	19) A description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least contains;
a) Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perseroan Publik; dan	580	a) Programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in Issuers or Public Companies; and
b) Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perseroan Publik; Dalam hal Emiten atau Perseroan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.	584	b) Anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies; In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.
20) Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perseroan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perseroan Publik, meliputi:	595	20) Implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Companies for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including:
a) Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	595	a) Statement regarding the recommendation that has been implemented; and/or
b) Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	595	b) Description of recommendation that has not been implemented, along with the reason and alternatives of implementation (if any);
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		Disclosure of information can be presented in table.
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perseroan Publik	641	h. Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company
1) Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perseroan Publik, paling sedikit memuat:	642	1) Information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, containing at least :
a) Penjelasan strategi keberlanjutan;	642	a) Sustainability strategy explanation;
b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);	642	b) Sustainability aspects overview (economic, social and environmental);
c) Profil singkat Emiten atau Perseroan Publik;	642	c) Brief Profile of Issuers or Public Company;
d) Penjelasan Direksi;	642	d) The Board of Directors explanation;
e) Tata kelola keberlanjutan;	642	e) Sustainability Governance;
f) Kinerja keberlanjutan;	642	f) Sustainability performance;
g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;	642	g) Written verification from an Independent Party (if any);
h) Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan	642	h) Feedback sheet for stakeholders (if any);
i) Tanggapan Emiten atau Perseroan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	642	i) The Issuer or Public Company response to the previous year's report feedback;

Keterangan	Halaman Page	Description
2) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perseroan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	642	2) The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Attachment II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;
3) Informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat:	642	3) Information on the Sustainability Report in number 1) shall be;
a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau	642	a) Is disclosed in other relevant sections outside of the social and environmental responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or
b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perseroan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perseroan Publik;	642	b) Referring to other sections outside the social and environmental responsibility section while still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as profile of Issuer or Public Company;
4) Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan;	642	4) The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;
5) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	642	5) In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the said Sustainability Report must:
a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan	642	a) Contains all the information as referred to in number 1); and
b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perseroan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	642	b) Compiled according to the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;
6) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan	642	6) In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that information regarding social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and
7) Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	642	7) Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the submission of the Annual Report.

Keterangan	Halaman Page	Description
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perseroan efek dalam hal Emiten merupakan Perseroan efek.	689	i. Audited Financial Statements The annual financial statements contained in the Annual Report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	645	j. Statement Letter of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding Responsibility for the Annual Report Statement letters from members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding responsibilities for the Annual Report are prepared in accordance with the format of Statement Letters from Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report as contained in Appendix I which is an integral part of this Circular Letter of the Financial Services Authority.

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

Kriteria
Annual Report Award

Annual Report Award Criteria

Kriteria Annual Report Award
Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
1. Uraian Isi Laporan Tahunan		**1. Annual Report Content**
1. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit	691-826	1. Annual Audited Financial Statements
2. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan	645-647	2. Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners on Responsibility for the Annual Report
2. Ikhtisar data keuangan penting		**2. Summary of Key Financial Data**
Informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun	16-23	Comparative Financial Information for the Past Three Fiscal Years or Since Commencement of Business Activities (if less than Three Years)
Informasi memuat antara lain:		Information contains the following:
1. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset	19	1. Profit (Loss) to Total Assets Ratio
2. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas	19	2. Profit (Loss) to Equity Ratio
3. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan	19	3. Profit (Loss) to Revenue/Sales Ratio
4. Rasio lancar	18	4. Current Ratio
5. Rasio liabilitas terhadap ekuitas	19	5. Debt to Equity Ratio
6. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	19	6. Debt to Total Assets Ratio
7. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Perusahaan dan jenis industrinya	18-19	7. Other Relevant Financial Information and Ratios Pertinent to the Company and Its Industry
3. Informasi Saham (Jika Ada)	24-28	**3. Share Information (If Applicable)**
1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir	24	1. Shares Issued for Each Quarter Presented in Comparative Form Over the Last Two Fiscal Years
1. Jumlah saham yang beredar	24	1. Number of Outstanding Shares
2. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat sahamdicatatkan	24	2. Market Capitalization Based on Stock Exchange Price
3. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan	24	3. Highest, Lowest, and Closing Share Prices Based on Stock Exchange Price
4. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan	24	4. Trading Volume on the Stock Exchange Where the Shares Are Listed
2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal	27	2. In the Event of Corporate Actions Affecting Shares (e.g., Stock Splits, Reverse Stock Splits, Stock Dividends, Bonus Shares, Changes in Nominal Value, Issuance of Convertible Securities, Capital Increases or Reductions)
1. tanggal pelaksanaan aksi korporasi	27	1. Date of Corporate Action Execution
2. rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham	27	2. Ratio of Stock Splits, Reverse Stock Splits, Stock Dividends, Bonus Shares, Issuance of Convertible Securities, and Changes in Nominal Value
3. jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi	27	3. Number of Outstanding Shares Before and After Corporate Actions
4. jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada)	27	4. Number of Convertible Securities Executed (if any)

Keterangan	Halaman Page	Description
3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/ atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut	28	3. In the Event of Suspension and/or Delisting of Shares During the Fiscal Year, the Reasons Must Be Disclosed
4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/ atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut	28	4. If Suspension and/or Delisting Continues Until the End of the Reporting Period, Actions Taken to Resolve Such Matters Must Be Disclosed
4. Laporan Direksi	52	**4. Report of the Board of Directors**
1. Kinerja Perusahaan		1. Board of Commissioners' Report
1. strategi dan kebijakan strategis Perusahaan	56	1. Corporate Strategies and Strategic Policies
2. peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan	59	2. Role of the Board of Directors in Formulating Corporate Strategies and Strategic Policies
3. proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi	59	3. Process Undertaken by the Board of Directors to Ensure Implementation of Strategies
4. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Perusahaan	60	4. Comparison Between Achieved and Targeted Results
5. kendala yang dihadapi	61	5. Challenges Encountered
2. Gambaran tentang prospek usaha Perusahaan	63	2. Description of the Company's Business Prospects
3. Penerapan governansi Perusahaan	64	3. Implementation of Corporate Governance
5. Laporan Dewan Komisaris	70	**5. Report of the Board of Commissioners**
1. Penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan Perusahaan, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Perusahaan	71	1. Assessment of the Board of Directors' Performance Including Supervision of the Formulation and Implementation of Corporate Strategies
2. Pandangan atas prospek usaha Perusahaan yg disusun oleh Direksi	74	2. Views on the Company's Business Prospects Prepared by the Board of Directors
3. Pandangan atas penerapan governansi Perusahaan	74	3. Views on the Implementation of Corporate Governance
6. Profil Perusahaan	83-205	**6. Company Profile**
1. Akses terhadap Perusahaan termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Perusahaan	118	1. Access to the Company Including Branch Offices or Representative Offices Providing Public Access to Company Information
1. alamat	118	1. Address
2. nomor telepon	118	2. Telephone Number
3. alamat surat elektronik	118	3. Email Address
4. alamat situs web	118	4. Website Address
2. Riwayat singkat Perusahaan	86-89	2. Brief History of the Company
3. Visi dan misi Perusahaan serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan;	94-100	3. Vision and Mission Statements and Corporate Culture or Company Values
4. Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan	101-113	4. Business Activities According to the Latest Articles of Association, Activities Carried Out During the Fiscal Year, and Types of Goods and/or Services Produced
5. Wilayah operasional Perusahaan; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan	114-119	5. Operational Areas of the Company; Scope or Areas of Operational Activities
6. Struktur organisasi Perusahaan dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan	120-121	6. Organizational Structure Diagram, at Least up to One Level Below the Board of Directors Including Committees under the Board of Directors and Board of Commissioners (if any), with Names and Positions

Keterangan	Halaman Page	Description
7. Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan	122	7. List of Membership in National and International Industry Associations Related to Sustainable Finance
8. Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel		8. Number of Employees by Gender, Position, Age, Education Level, and Employment Status (Permanent/Contract) During the Fiscal Year (May be Presented in Table Form)
9. Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/ asosiasi/aliansinya meliputi:	129-130	9. Information on the Use of Public Accountant (PA) and Public Accounting Firm (PAF) Services and Their Networks/Associations/Alliances, Including:
1. Nama dan alamat	129	1. Name and Address
2. Periode penugasan	129	2. Period of Engagement
3. informasi jasa audit yang diberikan;	129	3. Information on Audit Services Provided
4. biaya jasa (fee) audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	129	4. Audit Fee for Each Assignment During the Fiscal Year
5. informasi jasa non audit yang diberikan;	129	5. Information on Non-Audit Services Provided
6. biaya jasa (fee) non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	129	6. Non-Audit Fee for Each Assignment During the Fiscal Year
7. Catatan: dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut (atas poin A.1.6.9.e & f)	129	7. Note: If the PA and PAF along with their Networks/Associations/Alliances Do Not Provide Non-Audit Services, Such Information Must Be Disclosed
10. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP	130-131	10. Name and Address of Other Capital Market Supporting Institutions and/or Professions Besides PA and PAF
7. Profil Direksi	132-139	**7. Company Profile**
1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab	√	1. Name and position following duties and responsibilities;
2. Usia	√	2. Age;
3. Kewarganegaraan	√	3. Nationality;
4. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi	√	4. Educational background and/or certifications;
5. Riwayat jabatan, meliputi informasi	√	5. Career history, including:
1. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Perusahaan yang bersangkutan	√	1. Legal basis for appointment as a member of the Board of Directors in the Company;
2. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Perusahaan.	√	2. Concurrent positions held, whether as a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, committee member, or any other position within or outside the Company.
3. Catatan: Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.7.5.b)	√	3. (Note: If a Director does not hold any concurrent position, this must also be disclosed.)
4. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan	√	4. Work experience along with the period of service, both within and outside the Company;
6. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi.	√	6. Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controlling parties, either directly or indirectly, including disclosure of the names of affiliated parties.
Catatan: Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Perusahaan mengungkapkan hal tersebut (atas poin A.1.7.6)	√	Note: In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation relationship, the Company shall disclose this (as per point A.1.7.6).
7. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya.	139	7. Changes in the composition of the Board of Directors members and the reasons for the changes.

Keterangan	Halaman Page	Description
"Catatan: (atas poin A.1.7.7) 1. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut 2. Dalam hal perubahan komposisi anggota Direksi terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi yang terakhir dan sebelumnya;"	139	"Note: (as per point A.1.7.7) 1. If there is no change in the composition of the Board of Directors, this should be disclosed. 2. If changes in the composition of the Board of Directors occur after the end of the fiscal year until the deadline for submitting the Annual Report, the composition listed in the Annual Report should include both the current and previous members of the Board of Directors."
8. Profil Dewan Komisaris	140-145	**8. Company Profile**
1. Nama dan jabatan	√	1. Name and position;
2. Usia	√	2. Age;
3. Kewarganegaraan	√	3. Nationality;
4. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi	√	4. Educational background and/or certifications;
5. Riwayat jabatan, meliputi informasi	√	5. Career history, including:
1. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris	√	1. Legal basis for appointment as a member of the Board of Commissioners;
2. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Perusahaan yang bersangkutan	√	2. Legal basis for the initial appointment as an Independent Commissioner within the Company;
3. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Perusahaan.	√	3. Concurrent positions held, whether as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors, committee member, or any other position within or outside the Company.
Catatan: Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.8.5.c)	√	(Note: If a member of the Board of Commissioners does not hold any concurrent position, this must be disclosed.)
4. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan	√	4. Work experience, including the period of service, both within and outside the Company;
6. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi;	√	6. Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controlling parties, either directly or indirectly, including disclosure of the names of affiliated parties.
Catatan: Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Perusahaan mengungkapkan hal tersebut (atas poin A.1.8.6)	√	(Note: If a member of the Board of Commissioners has no affiliation, this must be disclosed.)
7. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode	143	7. Statement of independence for Independent Commissioners who have served more than two terms;
8. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya.	144	8. Changes in the composition of the Board of Commissioners and the reasons for such changes.
Catatan: (atas poin A.1.8.8) 1. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut 2. Dalam hal perubahan komposisi anggota Direksi terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	147	(Note: as per point A. 1.8.8) 1. If there are no changes in the composition of the Board of Commissioners, this must be disclosed; 2. If changes in the Board of Commissioners occur after the end of the financial year but before the submission of the Annual Report, the Annual Report must include both the latest and the previous composition of the Board.)
9. Informasi pemegang saham		**9. Shareholder Information**
1. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	150-156	1. The names of shareholders and their ownership percentages at the beginning and end of the financial year, which include:
1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan	150	1. Shareholders holding 5% (five percent) or more of the Company's shares;
2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan.	151	2. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who own shares in the Company.

Keterangan	Halaman Page	Description
Catatan: Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/ atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.9.1.b)		(Note: If none of the Directors and/or Commissioners own shares, this must be disclosed.)
3. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik	150	3. Public shareholder groups, meaning groups of shareholders each holding less than 5% (five percent) of the Company's or Public Company's shares.
2. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Perusahaan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	152	2. The percentage of indirect ownership of the Company's shares by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders listed on the shareholder register for indirect ownership by Directors and Commissioners.
Catatan: Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/ atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Perusahaan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.9.2)	152	Note: If none of the Directors and/or Commissioners have indirect ownership of the Company's shares, this must be disclosed. (as per point A. 1.9.2)
3. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan, berdasarkan klasifikasi	152	3. The number of shareholders and percentage of ownership, classified as follows:
1. kepemilikan institusi lokal	152	1. Local institutional ownership;
2. kepemilikan institusi asing	152	2. Foreign institutional ownership;
3. kepemilikan individu lokal	152	2. Local individual ownership;
4. kepemilikan individu asing	152	2. Foreign individual ownership.
4. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	154-156	4. Information on the Company's principal and controlling shareholders, whether directly or indirectly, is presented in the form of a diagram or chart showing ownership structure down to the ultimate individual owners.
5. Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Perusahaan memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut	157-161	5. Names of subsidiaries, associates, and joint venture entities where the Company has joint control (if any), along with details such as ownership percentage, line of business, total assets, operational status, and for subsidiaries, the address of the entity.
6. Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada)	162-164	6. A chronology of share listings, including the number of shares, nominal value, and offering prices from the initial listing to the end of the financial year, and the name of the stock exchange where the Company's shares are listed. This also includes any stock splits, reverse stock splits, stock dividends, bonus shares, changes in nominal value, and the execution of convertible securities, capital increases, and reductions (if any).
7. Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud sebelumnya, yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/ imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada)	164	7. Information on the listing of other securities, besides the aforementioned shares, that have not matured during the financial year, which must at least include the name of the security, year of issuance, interest rate/yield, maturity date, offering value, and credit rating (if any).
10. Analisa dan Pembahasan Manajemen	207-326	**10. Management Discussion and Analysis**
1. Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai Kegiatan Usaha Perusahaan, meliputi	222-239	1. Review of Operations by Business Segment, Including:
1. Produksi, yg meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya	223; 225; 226; 227; 230; 231; 235	1. Production (Processes, Capacity, and Developments)
2. Pendapatan/penjualan	228; 231; 236; 238	2. Revenue/Sales
3. Profitabilitas	228; 232; 236	3. Profitability
2. Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut,	240-273	2. Comprehensive Financial Performance Including Comparison Over the Last Two Fiscal Years, Explanations for Changes and Their Impacts:
1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset	241-250	1. Current Assets, Non-Current Assets, and Total Assets

Keterangan	Halaman Page	Description
2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas	251-257	2. Short-Term Liabilities, Long-Term Liabilities, and Total Liabilities
3. Ekuitas	257-258	3. Equity
4. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi), komprehensif; dan	259-271	4. Revenue/Sales, Expenses, Profit (Loss), Other Comprehensive Income, and Total Comprehensive Profit (Loss)
5. Arus kas	271-273	4. Cash Flows
3. Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan	281-283; 286-287	3. Debt Payment Capability by Presenting Relevant Ratios
4. Tingkat kolektibilitas piutang perusahaan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan	284-285	4. Receivables Collectibility Level by Presenting Relevant Ratios
5. Struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud	288-290	5. Capital Structure and Capital Structure Management Policies Including Basis for Policy Determination
6. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan	291	6. Discussion on Material Commitments for Capital Goods Investment Including:
1. Tujuan dari ikatan tersebut	291	1. Objectives of Such Commitments
2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut	291	2. Expected Funding Sources
3. Mata uang yang menjadi denominasi	291	3. Currency Denomination
4. Langkah yang direncanakan Perubahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait	291	4. Planned Measures to Mitigate Currency Risks
7. Bahasan mengenai investasi barang modal yang yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir:	292-293	7. Discussion on Realized Capital Goods Investment During the Fiscal Year Including:
1. Jenis investasi barang modal	293	1. Types of Capital Goods Invested
2. Tujuan investasi barang modal	292	2. Objectives of Capital Goods Investment
3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan	292	3. Value of Capital Goods Investment
8. Prospek usaha dari Perusahaan dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya	297-299	8. Business Prospects of the Company Considering Industry Conditions, General Economy, and International Markets with Supporting Quantitative Data from Credible Sources
9. Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi)	300-304	9. Comparison of Initial Targets/Projections with Realization:
1. Pendapatan/penjualan	301	1. Revenue/Sales
2. Laba (rugi)	301	2. Profit (Loss)
3. Struktur modal (capital structure)	300	3. Capital Structure
4. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Perusahaan	300-304	4. Other Important Matters to the Company
10. Target/proyeksi yang ingin dicapai Perusahaan untuk 1 (satu) tahun mendatang,	305-308	10. Targets/Projections for the Next Fiscal Year Including:
1. Pendapatan/penjualan	307	1. Revenue/Sales
2. Laba (rugi)	307	2. Profit (Loss)
3. Struktur modal (capital structure)	306	3. Capital Structure
4. Kebijakan dividen	308	4. Dividend Policy
5. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Perusahaan	306-308	5. Other Important Matters to the Company
11. Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Perusahaan, paling sedikit mengenai Strategi pemasaran dan Pangsa pasar	309-310	11. Marketing Aspects of the Company's Goods and/or Services Including:
12. Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir	311-315	12. Dividend Information Over the Last Two Fiscal Years

Keterangan	Halaman Page	Description
1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih;	311-312	1. The following information is disclosed regarding the Company's dividends over the past two financial years:
2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	313	2. The payment date of cash dividends and/or the distribution date of non-cash dividends;
3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	313	3. The amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and
4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar;	313	4. The total dividends paid per year.
Catatan: Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	311–313	Note: If the Issuer or Public Company has not distributed dividends in the last two financial years, this must also be disclosed.
13. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan	315	13. Realization of Use of Proceeds from Public Offerings, Including:
1. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku	315	1. If during the fiscal year, the Issuer is required to submit a report on the realization of fund usage, the cumulative realization of the use of proceeds from the public offering must be disclosed up to the end of the fiscal year.
2. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut	315	2. If there are any changes in the use of proceeds as stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of public offering proceeds, the Issuer must explain such changes.
14. Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku	316-320	14. Material information (if any) related to activities such as investment, expansion, divestment, merger or consolidation, acquisition, debt or capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions during the fiscal year.
1. Tanggal, nilai, dan objek transaksi	316-317	1. Transaction Date, Value, and Object
2. Nama pihak yang melakukan transaksi;	318	2. Name of Transaction Counterparty
3. Sifat hubungan afiliasi (jika ada);	318	3. Nature of Affiliated Relationship (If Any)
4. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	319	4. Explanation on Fairness of Transaction
5. Pemenuhan ketentuan terkait; dan	320	5. Compliance with Related Regulations
6. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Perusahaan juga mengungkapkan informasi:	319	6. In the event of affiliated relationships, in addition to disclosing the information as stated in points a) to e), the Company shall also disclose the following:
7. Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle);	319	7. A statement from the Board of Directors confirming that the affiliated transactions have followed adequate procedures to ensure they were conducted by generally accepted business practices, including adherence to the arm's-length principle;
8. Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle);	320	8. The role of the Board of Commissioners and the audit committee is to ensure that such affiliated transactions are carried out with proper procedures and by the arm's-length principle;
9. usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan;	319	9. If the affiliated or material transaction is part of regular business activities intended to generate operating revenue and is carried out routinely, repeatedly, and/or continuously, a clarification must be added to confirm that such transaction is part of the Company's regular business operations;

Keterangan	Halaman Page	Description
10. Catatan: Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut (atas point A.1.10.14.g)	319	10. Note: If the affiliated or material transaction has been disclosed in the annual financial statements, the relevant reference to that disclosure must be provided; (as point A.1.10.14.g)
11. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/ atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi tersebut	320	11. For disclosure of affiliated and/or conflict of interest transactions resulting from those already approved by independent shareholders, the Company must include the date of the General Meeting of Shareholders (GMS) that approved the transaction;
12. Catatan: dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (atas point A.1.10.14.i)	317	12. Note: If no affiliated and/or conflict of interest transactions occurred, this must also be stated; (as per point A. 1.10.14.i)
15. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	321-325	15. Changes in Laws and Regulations with Significant Impact on the Company and Their Effects on the Financial Statements (If Any)
VI. Good Corporate Governance	330	**VI. Good Corporate Governance**
1. Pengungkapan terkait RUPS:	347	1. Disclosure Related to the General Meeting of Shareholders (GMS):
a. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku		a. Information on GMS Resolutions During the Fiscal Year and the Prior Year
b. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku	374	b. Realization of GMS Resolutions During the Fiscal Year
c. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan	375	c. Unrealized GMS Resolutions and Reasons for Non-Realization
d. Dalam hal Perusahaan menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	375	d. If an Independent Party Was Appointed to Count Votes at the GMS, Disclosure of Such Appointment
2. Pengungkapan terkait Direksi	377	2. Disclosure Related to the Board of Directors:
1. Tugas dan tanggung jawab masing masing anggota Direksi;	390	1. Duties and Responsibilities of Each Director
2. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi	395	2. Statement Confirming the Existence of a Board Charter
3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran direksi dalam rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan dalam RUPS (dapat disajikan dalam bentuk tabel).	396	3. The Company has a policy regarding the frequency of Board of Directors meetings and joint meetings with the Board of Commissioners. This includes the attendance of Board members at these meetings, and their presence at the General Meeting of Shareholders (GMS). Information on the attendance of Directors at Board meetings, joint meetings with the Board of Commissioners, and the GMS may be presented in a table format.
4. Kebijakan terkait frekuensi rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris		4. Policies related to the frequency of Board of Directors meetings and joint Board of Directors meetings with the Board of Commissioners
5. Frekuensi pelaksanaan rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris	397	5. Frequency of implementation of Board of Directors meetings and joint Board of Directors meetings with the Board of Commissioners
6. Informasi tingkat kehadiran direksi dalam rapat direksi, rapat direksi dekom, RUPS	398	6. Information on the level of attendance of directors in board of directors meetings, joint meeting with board of commissioners, GMS
7. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi	402	7. Training and/or increasing the competence of members of the Board of Directors

Keterangan	Halaman Page	Description
8. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada);	403	8. Training and/or competency development attended by members of the Board of Directors during the financial year (if any)
9. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada)	403	9. Training and/or competency development attended by members of the Board of Directors during the financial year (if any)
10. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku	405	10. The Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties in the financial year
11. Prosedur penilaian kinerja	405	11. Performance appraisal procedures
12. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat	405	12. The criteria used include performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings.
13. Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.2.e1 & e2)	N/A	13. Note: In the event that the Company does not have a committee that supports the implementation of the Board of Directors' duties, this must be disclosed (in points A.1.11.2.e1 & e2).
3. Pengungkapan terkait Dewan Komisaris	409	3. Disclosure Related to the Board of Commissioners:
1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	411	1. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners
2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris	427	2. Statement Confirming the Existence of a Board of Commissioners Charter
3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS;	427	3. Policies and Implementation of Meeting Frequency and Attendance of the Board of Commissioners' Meetings and Joint Meetings with the Board of Directors, Including GMS Attendance
4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris	433	4. Training and/or competency improvement for members of the Board of Commissioners
5. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat	434	5. Policy on training and/or competency improvement for members of the Board of Commissioners, including orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners
6. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada)	434	6. Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the financial year (if any)
7. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	438	7. Performance assessment of the Board of Directors and the Board of Commissioners and each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners
8. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	438	8. Procedures for conducting performance assessment;
9. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	439	9. Criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and
4. Pengungkapan terkait Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	452	4. Disclosure of the Nomination and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners
1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;	452	1. Nomination Procedures: A brief explanation of the policies and process for nominating members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	454	2. Remuneration Procedures and Implementation of the Board of Directors and the Board of Commissioners, including:
3. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	454	3. The procedures for determining the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
4. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/ bonus dan lainnya; dan	457	1. The remuneration structure, includes salary, allowances, bonuses, and other benefits.
2. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	460	2. The amount of remuneration received by each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Keterangan	Halaman Page	Description
5. Pengungkapan terkait Dewan pengawas syariah, bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar	451	4. Disclosure Regarding the Sharia Supervisory Board for companies operating based on Sharia principles as stated in their Articles of Association
1. nama	451	1. Name;
2. dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah	451	2. Legal basis for the appointment of the Sharia Supervisory Board;
3. periode penugasan dewan pengawas syariah	451	3. Term of assignment of the Sharia Supervisory Board;
4. Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah;	451	4. Duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board;
5. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Perusahaan.	451	5. Frequency and method of providing advice, guidance, and supervision regarding the Company's compliance with Sharia principles in the capital market.
6. Pengungkapan terkait Komite audit	468	6. Disclosure Related to Audit Committee, Including:
1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite	468–470	1. Name and Position
2. Usia	468–470	2. Age
3. Kewarganegaraan	468–470	3. Nationality
4. Riwayat pendidikan	468–470	4. Educational Background
5. Riwayat jabatan	468–470	5. Work History
6. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite	468–470	6. Legal Basis for Appointment
7. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada);	468–470	7. Concurrent positions held, whether as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors, committee member, or other roles (if any);
8. Catatan: Dalam tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.6.e2)	468–470	8. Note: If no concurrent positions are held, this must also be disclosed (based on point A.1.11.6.e2).
9. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan;	468–470	9. Work experience along with the periods of service, both within and outside the Company;
10. Periode dan masa jabatan anggota komite audit	468–470	10. Period and term of office of the audit committee members;
11. Pernyataan independensi komite audit	473	11. Statement of independence of the audit committee;
12. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada)	474	12. Training and/or competency development attended during the financial year (if any);
13. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut;	479	13. Policy and implementation regarding the frequency of audit committee meetings and attendance rates of audit committee members at such meetings;
14. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku	480	14. Activities carried out by the audit committee during the financial year.
7. Pengungkapan terkait Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan.	482	7. Disclosures regarding the Company's nomination and remuneration committee or function.
1. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite	482–485	1. name and position in the committee membership
2. usia	482–485	2. age
3. kewarganegaraan	482–485	3. nationality
4. riwayat pendidikan	482–485	4. educational background
5. riwayat jabatan	482–485	5. job history
6. dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite	482–485	6. legal basis of appointment as a committee member

Keterangan	Halaman Page	Description
7. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada);	482–485	7. Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee and other positions (if any);
8. Catatan: Dalam tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (A.1.11.7a.e2)	482–485	8. Note: In the absence of dual positions, this is disclosed; (A.1.11.7a.e2)
9. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan	482–485	9. Work experience and time period both inside and outside the Company
10. periode dan masa jabatan anggota komite audit	482–485	10. period and term of office of audit committee members
11. Pernyataan independensi komite;	488	11. Committee independence statement;
12. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada)	490	12. training and/or competency improvement that has been undertaken in the financial year (if any)
13. uraian tugas dan tanggung jawab	491	13. job description and responsibilities
14. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter)	496	14. statement that has guidelines or a charter
15. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut;	497	15. Policy and implementation of meeting frequency and level of member attendance at these meetings;
16. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku;	499	16. A brief description of the implementation of activities in the financial year;
17. Catatan: Dalam hal tidak dibentuk komite:	N/A	17. Note: In case a committee is not formed:
18. Alasan tidak dibentuknya komite	N/A	18. Reasons for not forming a committee
19. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi	N/A	19. Parties carrying out nomination and remuneration functions
7. Pengungkapan terkait Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan.	501	7. Disclosures regarding the Company's nomination and remuneration committee or function.
1. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite	482	1. name and position in the committee membership
2. usia	482–485	2. age
3. kewarganegaraan	482–485	3. nationality
4. riwayat pendidikan	482–485	4. educational background
5. riwayat jabatan	482–485	5. job history
6. dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite	482–485	6. legal basis of appointment as a committee member
7. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada);	482–485	7. Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee and other positions (if any);
8. Catatan: Dalam tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.7b.e2);	482–485	8. Note: In the absence of dual positions, this is disclosed; (A.1.11.7a.e2)
9. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan	482–485	9. Work experience and time period both inside and outside the Company
10. periode dan masa jabatan anggota komite audit	482–485	10. period and term of office of audit committee members
11. Pernyataan independensi komite;	488	11. Committee independence statement;
12. "pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada)"	490	12. training and/or competency improvement that has been undertaken in the financial year (if any)
13. uraian tugas dan tanggung jawab	491	13. job description and responsibilities
14. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter)	496	14. statement that has guidelines or a charter
15. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut;	497	15. Policy and implementation of meeting frequency and level of member attendance at these meetings;

Keterangan	Halaman Page	Description
16. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku;	499	16. A brief description of the implementation of activities in the financial year;
17. Catatan: Dalam hal tidak dibentuk komite:	N/A	17. Note: In case a committee is not formed:
18. Alasan tidak dibentuknya komite	N/A	18. Reasons for not forming a committee
19. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi	N/A	19. Parties carrying out nomination and remuneration functions
8. Pengungkapan terkait Komite Manajemen Risiko	501	8. Disclosure Related to the Risk Management Committee, Including:
1. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite	501–503	1. Name and Position in the Committee
2. usia	501–503	2. Age
3. kewarganegaraan	501–503	3. Nationality
4. riwayat pendidikan	501–503	4. Educational Background
5. riwayat jabatan	501–503	5. Work History
6. dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite	501–503	6. Legal Basis for Appointment
7. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada);	501–503	7. Concurrent positions held, including as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors, committee member, or other positions (if any);
8. Catatan: Dalam tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.8a.e2);	501–503	8. Note: If no concurrent positions are held, this must be disclosed (based on point A.1.11.8a. e2).
9. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan	501–503	9. Work experience and periods of service both within and outside the Company;
10. periode dan masa jabatan anggota komite manajemen risiko	501–503	10. Period and term of office of the risk management committee members;
11. Pernyataan independensi komite;	508	11. Statement of independence of the committee members;
12. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada)	509	12. Training and/or competency development attended during the financial year (if any);
13. uraian tugas dan tanggung jawab	509	13. Description of the duties and responsibilities;
14. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter)	513	14. Statement confirming the existence of a guideline or charter;
15. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut;	514	15. Policy and implementation regarding the frequency of meetings and attendance rates of committee members;
16. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku;	516	16. Summary of activities carried out during the financial year;
8. Pengungkapan terkait Komite lain yang dimiliki Perusahaan dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugasDewan Komisaris:	518	8. Disclosure Related to Other Committees Supporting the Board of Directors or the Board of Commissioners (If Any), Including:
1. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite	518	1. Name and Position in the Committee
2. usia	518	2. Age
3. kewarganegaraan	518	3. Nationality
4. riwayat pendidikan	518	4. Educational Background
5. riwayat jabatan	518	5. Work History
6. dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite	518	6. Legal Basis for Appointment

Keterangan	Halaman Page	Description
7. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada);	518	7. Concurrent positions held, including as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors, committee member, or other roles (if any);
8. Catatan: Dalam tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	518	8. Note: If there are no concurrent positions, this must be disclosed.
9. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan	518	9. Work experience and duration of service, both within and outside the Company;
10. periode dan masa jabatan anggota komite lain	518	10. Period and term of office of the members of the other committees;
11. Pernyataan independensi komite;	518	11. Statement of the committee's independence;
12. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada)	519	12. Training and/or professional development attended by committee members during the financial year (if any);
13. uraian tugas dan tanggung jawab	519	13. Description of the committee's duties and responsibilities;
14. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter)	518	14. Statement confirming the existence of a guideline or charter;
15. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut;	520	15. Policy and implementation of meeting frequency, and the attendance rate of members at those meetings;
16. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku;	521	16. Summary of the committee's activities during the financial year.
9. Pengungkapan terkait Sekretaris perusahaan	522	9. Disclosure Related to Corporate Secretary, Including:
1. Nama	522	1. Name
2. Domisili	522	2. Domicile
3. Riwayat jabatan	522	3. Work History
4. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan	522	4. Legal Basis for Appointment
5. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan	522	5. Work Experience Inside and Outside the Company
6. Riwayat pendidikan	522	6. Educational Background
7. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku	525	7. Training and/or Competency Development Attended During the Fiscal Year
8. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;	525	8. Summary of the Corporate Secretary's Activities During the Fiscal Year
10. Pengungkapan terkait Unit audit internal, paling sedikit memuat	528	10. Disclosure Related to Internal Audit Unit, Including:
a. Nama kepala unit audit internal	528	a. Name of the Head of Internal Audit Unit
b. Riwayat jabatan	528	b. Work History
b1. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal	528	b1. Legal Basis for Appointment
b2. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan	528	b3. Work Experience Inside and Outside the Company
d. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal	531	c. Qualifications or Certifications in Internal Auditing
d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku	532	d. Training and/or Competency Development Attended During the Fiscal Year
e. Struktur dan kedudukan unit audit internal;	533	e. Structure and Position of Internal Audit Unit
f. Uraian tugas dan tanggung jawab;	534	f. Description of Duties and Responsibilities
g. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal	530	g. Statement Confirming the Existence of an Internal Audit Charter

Keterangan	Halaman Page	Description
11. Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Perusahaan	542	11. Description of the Internal Control System Implemented by the Company:
a. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;	542	a. Financial and operational controls, as well as compliance with applicable laws and regulations;
b. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal	546	b. A review of the effectiveness of the internal control system;
c. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	547	c. A statement from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners regarding the adequacy of the internal control system.
12. Uraian mengenai Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan	548	12. Description of the Risk Management System Implemented by the Company:
a. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Perusahaan;	549	a. A general overview of the Company's risk management system;
b. Jenis risiko dan cara pengelolaannya;	555	b. The types of risks faced and how they are managed;
c. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Perusahaan	563	c. A review of the effectiveness of the Company's risk management system;
d. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	565	d. A statement from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the Audit Committee regarding the adequacy of the risk management system;
13. Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku	566	13. Information on any administrative sanctions or penalties imposed on the Company, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors by the Financial Services Authority (OJK) or other authorities during the financial year.
14. Informasi mengenai kode etik Perusahaan	567	14. Public Accountant
a. Pokok-pokok kode etik	567	a. Key principles of the Code of Conducts;
b. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	568	b. Methods of disseminating and enforcing the Code of Conducts;
c. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan	570	c. A statement that the Code of Conducts applies to members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees of the Company;
15. Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Perusahaan (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP)		15. A brief description of any policies related to long-term performance-based compensation for management and/or employees, if applicable, such as a Management Stock Ownership Program (MSOP) and/or an Employee Stock Ownership Program (ESOP).
16. Dalam hal terdapat pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: (atas point A.1.11.16)	570	16. If compensation is provided through a Management Stock Ownership Program (MSOP) and/or an Employee Stock Ownership Program (ESOP), the disclosed information must include at a minimum:
a. jumlah saham dan/atau opsi	570	a. The number of shares and/or options granted;
b. jangka waktu pelaksanaan	570	b. The exercise period;
c. persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak	570	c. The eligibility criteria for employees and/or management; and
d. harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan	570	d. The exercise price or the method for determining the exercise price.
17. Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai	571	17. A brief description of the Company's policy on the disclosure of information regarding
a. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka;	571	a. Share ownership by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, no later than three (3) working days after the acquisition or any change in ownership of shares in the Public Company;
b. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud	571	b. Implementation of the said policy.

Keterangan	Halaman Page	Description
18. Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Perusahaan:	572	18. Description of the Company's Whistleblowing System:
a. Cara penyampaian laporan pelanggaran;	574	a. Procedures for submitting reports of violations;
b. Perlindungan bagi pelapor;	574	b. Protection measures for whistleblowers;
c. Penanganan pengaduan;	575	c. Procedures for handling complaints;
d. Pihak yang mengelola pengaduan;	575	d. Parties responsible for managing complaints;
e. Hasil dari penanganan pengaduan:	579	e. Outcomes of complaint handling, including:
e1. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku	579	e1. Number of complaints received and processed during the financial year;
e2. Tindak lanjut pengaduan;	579	e2. Follow-up actions taken.
Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. (atas point A.1.11.18)	N/A	Note: If the Company does not have a whistleblowing system, this must be disclosed accordingly (referring to point A.1.11.18).
19. Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Perusahaan	580	19. Description of corporate social responsibility related to employment, health and work safety, including information about
a. Program dan prosedur yang dilakukan	580	a. Programs and procedures implemented
b. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Perusahaan;	584	b. Anti-corruption training or awareness programs conducted for Company employees
Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud (atas point A.1.11.19)	N/A	Note: If the Company does not have an anti-corruption policy, an explanation must be provided regarding the absence of such a policy (referring to point A.1.11.19).
20a. Penerapan atas pedoman governansi Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	595	20a. The implementation of governance guidelines for Public Companies or Issuers that issue equity securities, including:
a. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan	595	a. Statement regarding the recommendations that have been implemented;
b. Bukti/penjelasan yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan rekomendasi tersebut	595	b. Evidence or explanation demonstrating that the company has implemented the recommendation.
c. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif	596	c. Explanation for Recommendations Not Yet Implemented, Including Reasons and Alternatives
20b. Pengungkapan terkait penerapan atas pedoman governansi Perusahaan dengan pendekatan "comply or explain " atau "apply or explain ", meliputi:	600	20b. Disclosure regarding the implementation of the Company's governance guidelines using a "comply or explain" or "apply or explain" approach, including:
a. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	600	a. Statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or
b. Bukti/penjelasan yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan rekomendasi tersebut	600	b. Evidence or explanation demonstrating that the company has implemented the recommendation.
c. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif	600	c. Explanation for Recommendations Not Yet Implemented, Including Reasons and Alternatives

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

Lampiran Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk dan Entitas Anak Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2024

Consolidated Financial Statements of
PT Wijaya Karya Beton Tbk
and Its Subsidiary for The Year Ended
December 31, 2024

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

AKHLAK

WIKA BETON

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

DESEMBER 2025



2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024, DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2025 AND 2024 AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES

Consolidated Financial Statements
For The Years Ended
December 31, 2025 and 2024

Daftar Isi

Halaman/
Pages

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan Konsolidasian **Untuk Tahun-tahun yang Berakhir** **Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**		***Consolidated Financial Statements*** ***For The Years Ended*** ***December 31, 2025 and 2024***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
Tamansari Hive Office Lt. 3-5
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta 13340
t. (021) 819 2802
sekper@wika-beton.co.id
www.wika-beton.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
DIRECTOR'S STATEMENT LETTER

TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. DAN ENTITAS ANAK
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. AND SUBSIDIARIES

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
FOR YEARS ENDED DECEMBER 31, 2025

NO: MJ.02.02/WB-0A.0002/2026

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : *We Are Undersigned:*

Nama	:	Kuntjara	:	*Name*
Alamat Kantor	:	Tamansari Hive Office Lt.3-5 Jl. D.I Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur – 13340	:	*Office Address*
Alamat Domisili sesuai Kartu Identitas	:	Jl. Alternatif Cibubur, Harjamukti - Cimanggis, Depok, Jawa Barat 16454	:	*Domicile as stated in ID card*
Nomor Telepon	:	021-80679200	:	*Phone number*
Jabatan	:	Direktur Utama/ *President Director*	:	*Position*
Nama	:	Syailendra Ogan	:	*Name*
Alamat Kantor	:	Tamansari Hive Office Lt.3-5 Jl. D.I Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur – 13340	:	*Office Address*
Alamat Domisili	:	Bukit Cimanggu Villa S.1/22 RT.001/RW.014 Cibadak, Tanah Sareal, Bogor	:	*Domicile Address*
Nomor Telepon	:	021-80679200	:	*Phone number*
Jabatan	:	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko/ *Director of Finance, Human Capital, & Risk Management*	:	*Position*

Menyatakan bahwa : *Declared that :*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak;

   We are the responsible for the preparation and presentation of the company and its subsidiaries' Consolidated Financial Statement;

2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia;

   The company and its subsidiaries' Consolidated Financial Statement have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;

3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar.

   a. All information contained in the company and its subsidiaries' Consolidated Financial Statement are complete and correct;

   b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material

   b. The company and its subsidiaries' Consolidated Financial Statement do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts;

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
Tamansari Hive Office Lt. 3-5
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta 13340
(021) 819 2802
sekper@wika-beton.co.id
www.wika-beton.co.id

4	Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan Entitas Anak	4	*We are responsible for the company and its subsidiaries' internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 26 Maret 2026/ *March 26, 2026*

Direktur Utama / *President Director*	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko/ *Director of Finance, Human Capital, and Risk Management*
Kuntjara	Syailendra Ogan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : 00295/2.1030/AU.1/04/1680-5/1/III/2026

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Opini
Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian nya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion
We have audited the consolidated financial statements of PT Wijaya Karya Beton Tbk and its subsidiaries ("Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2025 and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2025, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IAPI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with Code of Ethics for Public Accountants established by IAPI, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licensed KAP No. 07.1030.1.203
Registered in the Financial Services Authority (OJK)

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Estimasi penurunan nilai piutang usaha

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup mencatat piutang usaha sebesar Rp776.662 juta, dimana jumlah tersebut mencakup 12,25% dari total aset Grup. Grup juga mencatat cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan tersebut sebesar Rp126.404 juta pada tanggal 31 Desember 2025.

Perhitungan yang dilakukan manajemen atas estimasi penurunan nilai piutang usaha melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan. Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan. Grup melakukan peninjauan atas estimasi penurunan nilai aset keuangan berdasarkan estimasi probabilitas gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang perhitungannya mencakup data historis, asumsi dan ekspektasi dari kondisi masa depan. Perubahan probilitas gagal bayar dapat berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Pengungkapan Grup mengenai piutang usaha dijelaskan dalam Catatan 2.h, 3, dan 5.a atas laporan keuangan konsolidasian.

Kami melakukan prosedur audit atas hal ini termasuk:

- Memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Grup yang relevan sehubungan dengan estimasi penurunan nilai atas aset keuangan.
- mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan dalam model kerugian penurunan nilai dan memeriksa keakuratan matematis dari perhitungan tersebut.
- mengevaluasi kewajaran dan asumsi utama (yaitu definisi gagal bayar, pengelompokan pelanggan, karakteristik risiko kredit, dan informasi masa depan) yang digunakan manajemen untuk mengestimasi cadangan kerugian penurunan nilai.
- mengembangkan perkiraan atau rentang poin auditor untuk mengevaluasi estimasi manajemen dan pengungkapan terkait ketidakpastian estimasi mungkin merupakan pendekatan yang tepat.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most material in our audit of the consolidated financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Estimation on impairment losses of trade receivables

On December 31, 2025, the Group recorded trade receivables of Rp776,662 million, which represents 12.25% of the Group's total assets. The Group also recorded provision for impairment losses reserves of the financial asset of Rp126,404 million as of December 31, 2025.

The calculation that management performs on the reserves of impairment losses of financial assets involves significant estimates and judgment. The Group applies a simplified method to measure expected credit losses on such financial assets. The Group conducts a review of the estimated impairment losses of financial assets based on the estimated probability of default over a certain period of time, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions. Changes in estimated probability of default may have a material impact on the Group's consolidated financial statements.

The Group's disclosures on trade receivables are set out in Notes 2.h, 3, and 5.a to the consolidated financial statements.

We performed audit procedures over this matter including:

- *Understand and evaluate the design and implementation of the Group's relevant internal controls in respect of the allowance for expected credit losses of such financial asset.*
- *evaluated accuracy and completeness of data used in the expected credit loss model and checked mathematical accuracy of the calculation.*
- *evaluated the reasonableness of key assumptions (i.e. definition of default, grouping of various customer segments, credit risk characteristics, and forward looking information) used by management to estimate the allowance for expected credit losses.*
- *developing an auditor's point estimate or range to evaluate management's point estimate and related disclosures about estimation uncertainty may be an appropriate approach.*

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The Annual Report is expected to be available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements, or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations or Standards on Auditing established by IAPI.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, tetapi bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian , baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

  Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

  Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

  Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait

  Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or

dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would

dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Maxson Hakim Wijaya

Maxson Hakim Wijaya
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1680/
Public Accountant License Number: AP.1680

Jakarta, 26 Maret 2026/*March 26, 2026*

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025 Rp	2024 Rp	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan Setara Kas	4	411.725.808.388	597.554.294.190	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha - Bersih				*Trade Receivables - Net*
Pihak Berelasi	5.a	425.352.962.906	417.835.737.496	*Related Parties*
Pihak Ketiga	5.a	351.309.358.462	500.849.180.985	*Third Parties*
Piutang Retensi - Bersih				*Retention Receivable - Net*
Pihak Berelasi	5.b	3.757.922.744	14.699.045.648	*Related Parties*
Pihak Ketiga	5.b	24.807.001.432	30.567.710.851	*Third Parties*
Piutang yang Belum Ditagih - Bersih				*Accrued Income - Net*
Pihak Berelasi	6	419.793.379.813	660.681.241.810	*Related Parties*
Pihak Ketiga	6	157.825.508.271	262.675.004.831	*Third Parties*
Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Bersih				*Gross Amount Due From Customer - Net*
Pihak Berelasi	7	11.367.704.864	21.535.434.206	*Related Parties*
Pihak Ketiga	7	60.479.775.811	17.198.145.361	*Third Parties*
Piutang Lain-Lain	8	12.456.098.469	13.099.021.155	*Other Receivables*
Pajak Dibayar di Muka	21.a	196.169.821.689	246.483.341.708	*Prepaid Taxes*
Persediaan	9	683.833.385.144	725.336.071.642	*Inventories*
Uang Muka	10	25.460.052.529	10.823.732.049	*Advances*
Biaya Dibayar di Muka	11	156.249.305.324	215.582.634.844	*Prepaid Expenses*
Proyek Dalam Pelaksanaan	12	227.274.448.498	194.890.454.265	*Project On Progress*
Jumlah Aset Lancar		**3.167.862.534.344**	**3.929.811.051.041**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON - CURRENT ASSETS***
Aset Pajak Tangguhan	21.c	--	2.801.824.451	*Deferred Tax Assets*
Investasi Ventura Bersama	13.a	10.574.644.322	1.951.505.613	*Investments in Joint Ventures*
Properti Investasi	14	194.141.176.000	191.558.156.000	*Investment Properties*
Aset Hak Guna - Bersih	15	--	7.475.961.959	*Right-of-Use Assets - Net*
Aset Tetap - Bersih	16	2.889.090.766.414	3.007.715.519.262	*Fixed Assets - Net*
Investasi Jangka Panjang Lainnya	17.a	6.143.595.743	2.500.000.000	*Other Long Term Investment*
Aset Tidak Lancar Lainnya	17.b	22.655.700.000	50.874.310.552	*Other Non- Current Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**3.122.605.882.479**	**3.264.877.277.837**	***Total Non - Current Assets***
JUMLAH ASET		**6.290.468.416.823**	**7.194.688.328.878**	***TOTAL ASSETS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

	Catatan/ *Notes*	2025 Rp	2024 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman Jangka Pendek	18	10,017,009,920	--	*Short-Term Loan*
Utang Usaha				*Trade Payables*
Pihak Berelasi	20	307,154,770,074	423,068,116,663	*Related Parties*
Pihak Ketiga	20	1,118,216,714,327	1,550,944,033,360	*Third Parties*
Utang Pajak	21.b	63,124,009,899	65,090,279,861	*Taxes Payable*
Uang Muka Dari Pelanggan	22	209,682,105,534	214,279,786,510	*Advances From Customers*
Pendapatan Diterima di Muka	23	61,828,720,803	158,597,893,991	*Unearned Revenues*
Beban Akrual	24	587,332,996,246	582,020,283,767	*Accrued Expenses*
Utang Lain-lain	25	3,339,365,897	1,440,687,071	*Other Payables*
Bagian Jangka Pendek dari Liabilitas Jangka Panjang:				*Current Portion of Long-term Liabilities:*
Pinjaman Bank	27	68,351,000,000	40,000,000,000	*Bank Loan*
Liabilitas Sewa	19	--	6,566,084,523	*Lease Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**2,429,046,692,700**	**3,042,007,165,746**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas Jangka Panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek				*Long-term Liabilities, Net of current portion*
Pinjaman Bank	27	134,320,000,000	426,254,000,000	*Bank Loan*
Liabilitas Sewa	19	--	--	*Lease Liabilities*
Liabilitas Pajak Tangguhan	21.c	216,400,632	--	*Deferred Tax Liabilities*
Liabilitas Imbalan Kerja	26	32,693,493,986	31,494,767,049	*Employee Benefit Liabilities*
Utang Ventura Bersama	13.b	8,179,598,218	8,166,650,681	*Joint Venture Payables*
Jumlah Utang Jangka Panjang		**175,409,492,836**	**465,915,417,730**	***Total Non-current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**2,604,456,185,536**	**3,507,922,583,476**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				***EQUITY ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY***
Modal Saham				*Capital Share*
Modal Dasar 26.680.000.000 saham, modal ditempatkan dan disetor 8.715.466.600 saham. Nilai nominal Rp100 per saham.	29	871,546,660,000	871,546,660,000	*Authorized Capital 26,680,000,000 share, Issued and paid up 8,715,466,600 shares. par value of Rp100 per share.*
Tambahan Modal Disetor	30	987,413,288,862	987,413,288,862	*Additional Paid-in Capital*
Saldo Laba				*Retained Earnings*
Ditentukan Penggunaannya	31	372,988,876,808	372,988,876,808	*Appropriated*
Belum Ditentukan Penggunaannya	31	1,395,812,501,272	1,360,648,370,807	*Unappropriated*
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		**3,627,761,326,942**	**3,592,597,196,477**	***Equity Attributable to Owners of the Parent Entity***
Kepentingan Nonpengendali	28	58,250,904,345	94,168,548,925	*Non-Controlling Interest*
JUMLAH EKUITAS		**3,686,012,231,287**	**3,686,765,745,402**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**6,290,468,416,823**	**7,194,688,328,878**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025 Rp	2024 Rp	
PENDAPATAN USAHA	33	3,585,862,255,135	4,896,024,340,364	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	34	(3,328,961,319,202)	(4,522,338,149,234)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO		**256,900,935,933**	**373,686,191,130**	***GROSS PROFIT***
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Beban Umum dan Administrasi	35	(146,382,671,607)	(154,381,461,891)	*General and Administrative Expenses*
Beban Pengembangan Bisnis	35	(3,429,560,512)	(4,699,503,872)	*Business Development Expenses*
Beban Pemasaran	35	(737,623,102)	(1,195,954,013)	*Marketing Expenses*
Jumlah Beban Usaha		**(150,549,855,221)**	**(160,276,919,776)**	***Total Operating Expenses***
LABA USAHA		**106,351,080,712**	**213,409,271,354**	***OPERATING INCOME***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				***OTHER INCOME (EXPENSES)***
Pemulihan (Beban Cadangan) atas Penurunan Nilai Instrumen Keuangan		10,752,689,467	(2,156,088,598)	*Recovery (Allowance Expense) on Impairment of Financial Instruments*
Pendapatan Bunga		5,020,818,562	4,673,099,763	*Interest Income*
Laba atas Penjualan Aset Tetap	16	1,001,939,067	1,477,702,528	*Gain on Sale of Fixed Assets*
Bagian atas Laba (Rugi) Pada Ventura Bersama	13	8,890,691,172	(1,426,313,204)	*Share in Profit (Loss) from Joint Ventures*
Laba Selisih Kurs		821,278,396	507,976,630	*Gain on Foreign Exchange*
Beban Pajak Final		(21,044,081,002)	(28,787,727,135)	*Final Tax Expenses*
Beban Bunga		(19,701,240,597)	(36,783,990,555)	*Interest Expenses*
Beban Lain- Lain Bersih		(72,232,319,192)	(63,433,249,398)	*Others Expenses- Net*
Jumlah Beban Lain-Lain		**(86,490,224,127)**	**(125,928,589,969)**	***Total Other Expenses***
LABA SEBELUM PAJAK		**19,860,856,585**	**87,480,681,385**	***PROFIT BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	21.d	(15,738,465,457)	(23,281,176,384)	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**4,122,391,128**	**64,199,505,001**	***NET INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang Tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi:				***Items that will not be Reclassified Subsequently to Profit or Loss:***
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti		2,148,556,454	4,305,103,776	*Remesurement on Defined Benefit Liabilities*
Pajak Penghasilan Terkait		(472,343,358)	(944,524,217)	*Related Tax*
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak		**1,676,213,096**	**3,360,579,559**	***Total Other Comprehensive Income For the Year Net of Tax***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**5,798,604,224**	**67,560,084,560**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik Entitas Induk		40,019,501,701	65,004,281,962	*Owners of The Parent Entity*
Kepentingan Nonpengendali		(35,897,110,573)	(804,776,961)	*Non-Controlling Interest*
JUMLAH		**4,122,391,128**	**64,199,505,001**	***TOTAL***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik Entitas Induk		41,700,730,415	68,361,028,426	*Owners of The Parent Entity*
Kepentingan Nonpengendali		(35,902,126,191)	(800,943,866)	*Non-Controlling Interest*
JUMLAH		**5,798,604,224**	**67,560,084,560**	***TOTAL***
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	32	**4.59**	**7.46**	***BASIC EARNING PER SHARE***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN ***CONSOLIDATE***
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

		Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ *Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*					
				Saldo Laba/ *Retained Earnings*			
	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor/ *Issued and Paid up Capital* Rp	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid in Capital* Rp	Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated* Rp	Belum Ditentukan Penggunaannya*)/ *Unappropriated*)* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	Kepentingan Non Pengendali/ *Non Controlling Interest* Rp
Saldo tanggal 1 Januari 2024		**871,546,660,000**	**987,413,288,862**	**372,988,876,808**	**1,299,172,585,996**	**3,531,121,411,666**	**94,988,574,**
Dividen Tunai	31	--	--	--	(6,885,243,615)	(6,885,243,615)	(19,082,0
Laba Bersih Tahun Berjalan	31	--	--	--	65,004,281,962	65,004,281,962	(804,776,9
Penghasilan Komprehensif Lain	28	--	--	--	3,356,746,464	3,356,746,464	3,833,
Saldo tanggal 31 Desember 2024		**871,546,660,000**	**987,413,288,862**	**372,988,876,808**	**1,360,648,370,807**	**3,592,597,196,477**	**94,168,548,**
Dividen Tunai	31	--	--	--	(6,536,599,950)	(6,536,599,950)	(15,518,3
Laba Bersih Tahun Berjalan	31	--	--	--	40,019,501,701	40,019,501,701	(35,897,110,5
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain	28	--	--	--	1,681,228,714	1,681,228,714	(5,015,6
Saldo tanggal 31 Desember 2025		**871,546,660,000**	**987,413,288,862**	**372,988,876,808**	**1,395,812,501,272**	**3,627,761,326,942**	**58,250,904,**

* Termasuk Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENTS OF CASH FLOW
For The Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025 Rp	2024 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Kas dari Pelanggan		4,176,031,094,918	5,487,871,637,025	*Cash Received from Customers*
Pembayaran Kas Kepada Pemasok		(3,784,911,348,869)	(4,924,129,767,446)	*Cash Payment to Suppliers*
Pembayaran Kepada Direksi dan Karyawan		(266,269,050,658)	(272,393,592,460)	*Payment for Director and Employees*
Pembayaran Pajak Penghasilan Final dan Non Final		(7,144,363,367)	(33,412,620,531)	*Payment of Final and Non Final Taxes*
Penerimaan Bunga		5,739,454,033	4,083,410,457	*Interest Received*
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**123,445,786,057**	**262,019,067,045**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian Aset Tetap	16	(14,353,142,894)	(108,837,545,187)	*Acquisition of Fixed Assets*
Penjualan Aset Tetap	16	1,194,371,873	1,529,825,000	*Disposal of Fixed Assets*
Penerimaan dari Investasi pada Ventura Bersama	13.a	280,500,000	--	*Proceed from Investment in Joint Venture*
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		**(12,878,271,021)**	**(107,307,720,187)**	***Net Cash Used in Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek Pihak Ketiga	18	30,065,689,600	--	*Proceed from Short Term Bank Loans- Third Parties*
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek Pihak Ketiga	18	(20,048,679,680)	--	*Payment of Short Term Bank Loans- Third Parties*
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek Pihak Berelasi	18	--	19,584,978,813	*Proceed from Short Term Bank Loans- Related Parties*
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek Pihak Berelasi	18	--	(120,772,452,683)	*Payment of Short Term Bank Loans- Related Parties*
Pembayaran Pinjaman pada Pihak Berelasi		(7,321,686)	--	*Payment to Related Parties*
Pembayaran Bunga		(29,959,404,280)	(38,428,810,777)	*Interest Paid*
Pembayaran Liabilitas Sewa	19	(7,132,444,849)	(9,613,010,992)	*Payment of Lease Liabilities*
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Panjang	27	--	320,000,000,000	*Proceed From Long Term Bank Loans*
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Panjang	27	(263,583,000,000)	(128,746,000,000)	*Payment of Long Term Bank Loans*
Pembayaran Dividen Kepada Pemegang Saham		(6,536,599,950)	(6,885,243,615)	*Dividend Payment to Shareholders*
Pembayaran Dividen Kepada Kepentingan Nonpengendali		(15,518,389)	(19,082,064)	*Dividend Payment to Non Controlling Interest*
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		**(297,217,279,234)**	**35,120,378,681**	***Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**(186,649,764,198)**	**189,831,725,540**	***NET INCREASE (DECREASE) OF CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Dampak Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun		**821,278,396**	**507,976,630**	***Effect of Foreign Exchange on Cash and Cash Equivalent at end of the Year***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		**597,554,294,190**	**407,214,592,020**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	4	**411,725,808,388**	**597,554,294,190**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***

Transaksi non kas dan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan disajikan di Catatan 43 dan 44.

Non cash transactions and reconciliation of liabilities arising from financing activities are presented in Notes 43 and 44.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

1. Umum

1.a. Pendirian Perusahaan

PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Perusahaan"), didirikan di Jakarta dengan Akta Perusahaan Terbatas PT Wijaya Karya Beton No. 44 tanggal 11 Maret 1997, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., selaku pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan memulai kegiatan operasionalnya sejak tanggal 11 Maret 1997.

Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-12776.HT.01.01.TH.97 tanggal 9 Desember 1997 dan telah didaftarkan dalam daftar Perusahaan sesuai Undang- Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 2096/BH.09.03/I/98 tanggal 13 Januari 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 29 Mei 1998 Tambahan No. 2832.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta No. 5 tanggal 2 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0043541.AH.01.02 tanggal 4 Juli 2025.

Pada tanggal 26 Maret 2014, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan surat No. S-174 /D.04/ 2014 untuk melakukan penawaran umum saham perdana sejumlah 2.045.466.600 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 setiap lembar saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp590 setiap saham. Termasuk didalamnya jumlah saham umum perdana kepada masyarakat adalah saham yang telah dialokasikan sehubungan dengan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA") sejumlah 61.364.000 saham baik berupa Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti Pegawai yang sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No.SK.01.01/WB-0A.019/2014 tanggal 11 Februari 2014.

1. General

1.a. The Company Establishment

PT Wijaya Karya Beton Tbk ("the Company"), was established in Jakarta with the Deed of a Limited Liability Company PT Wijaya Karya Beton No. 44 dated March 11, 1997, made in the presence of Achmad Bajumi, S.H., as successor of Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta the Company's started operational activities at March 11, 1997.

The deed has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with its decision No.C2-12776.HT. 01.01. TH. 97 dated December 9, 1997 and have been registered in the list of companies according to Act No. 3 of 1982 about a mandatory list of companies in the Company Registration Office of south Jakarta No.2096/BH. 09.03/I/98 dated January 13, 1998 and published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 43 dated May 29, 1998 Supplement No. 2832.

The Articles of Association have been amended several times and were last amended by Deed No. 5 dated July 2, 2025 made in presence of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in South Jakarta and received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesian No. AHU-0043541.AH.01.02 dated July 4, 2025.

On March 26, 2014, the Company obtained an effective statement of the Board of Commissioner of the Financial Services Authority ("OJK") in their letter No. S-174 / D.04 / 2014 for an initial public offering of 2,045,466,600 ordinary shares with a par value of Rp100 per share offered to the public at the offering price of Rp590 per share. Including the number of initial public stock to the public is that the stock has been allocated in connection with the Employee Stock Allocation Program (Employee Stock Allocation or "ESA") number of 61,364,000 shares in the form of stocks and shares Ration Definitely Award Employees in accordance with the Decree of the Directors No. SK.01.01/WB-0A.019/2014 dated February 11, 2014.

1.b. Kegiatan Usaha Perusahaan

Sesuai Akta No. 5 tanggal 2 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU.0043541.AH.01.02 Tahun 2025 tanggal 4 Juli 2025, maka maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Berusaha dalam bidang perdagangan dan industri beton, jasa konstruksi dan bidang usaha lain yang terkait.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
   a. Melakukan Perencanaan, Produksi, Penjualan, Pemasangan dan Pelaksanaan Konstruksi produk-produk beton, antara lain:
      1) Industri Barang dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi
      2) Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang
      3) Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung
      4) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan
      5) Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang tahan api
   b. Melakukan usaha Jasa Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi dalam bidang usaha Sipil, Elektrikal dan *Post-tensioning*.
   c. Perencanaan, Produksi dan Penjualan produk/ komponen bahan bangunan.
   d. Melakukan usaha impor dan ekspor yang terkait dengan usaha tersebut pada huruf a, b dan c di atas.

3. Selain kegiatan usaha utama tersebut, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:
   a. Pekerjaan pelaksanaan konstruksi:
      1) Sipil (seluruh sektor pembangunan)
         a) Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran, dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase

1.b. The Company's Activities

In accordance with the Deed No. 5 dated July 2, 2025 made in presence of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in South Jakarta and received approval from the Indonesian Minister of Law and Human Rights No. AHU.0043541.AH.01.02 dated July 4, 2025, the Company's aims and objectives and business activities are as follows:

1. Perform business in concrete industry, construction services, and other related sector.
2. To achieve the goals and purposes above, the Company can carry out business activities as follows along its:
   a. Planning, Production, Sales, Installation and Execution of concrete products construction, such as:
      1) Lime and Cement Products for Construction Purposes Industry
      2) Foundation and Pile Installation
      3) Offshore and Floating Structure Industry
      4) Various Building Materials Trading
      5) Industry of Fire-resistant Brick, Mortar, Cement, etc
   b. Performing business of Construction Planning, Execution and Supervision Services in Civil, Electrical, and Post-tensioning.
   c. Planning, Production and Sale of products/ components of building material.
   d. Conducting import and export related to the businesses referred to letters a, b and c above.

3. In addition to the aforesaid main business, the Company can carry out supporting business activities in order to optimize the utilization of available resources to:
   a. Construction work:
      1) Civil (entire development sector)
         a) Construction of Drinking Water, Wastewater, and Drainage Processing, Distribution, and Reservoir Structure

b) Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
c) Pemasangan Bangunan Prafabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi dan Limbah
d) Konstruksi Jaringan Irigasi
e) Konstruksi Terowongan
f) Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang
g) Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel
h) Pemasangan Bangunan Prafabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jalan Rel
i) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
j) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan
k) Pengerukan
l) Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang
m) Penyiapan Lahan
n) Konstruksi Jalan Raya
o) Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
p) Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut dan Rambu Sungai
q) Pemasangan Perancah
r) Pemasangan Bangunan Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya
s) Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya
t) Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya
u) Konstruksi Khusus Lainnya
v) Konstruksi Bangunan Sipil lainnya

2) Pekerjaan Gedung (seluruh sektor pembangunan)
a) Konstruksi Gedung Perkantoran
b) Konstruksi Gedung Penginapan
c) Konstruksi Gedung Industri
d) Konstruksi Gedung Tempat Tinggal
e) Konstruksi Gedung Kesehatan

b) Construction of Water Resource Infrastructure
c) Installation of Pre-fabricated Structure for Irrigation Channel, Communication Network, and Waste Disposal Network Construction
d) Construction of Irrigation Network
e) Tunnel Construction
f) Bridge and Overpass Construction
g) Railway and Rail Bridge Construction
h) Installation of Prefabricated Structure for Road and Railway Construction
i) Non-fishery Harbor Structure Construction
j) Harbor Structure Construction
k) Dredging
l) Airplane Runway Construction
m) Land Preparation
n) Highway Construction
o) Train Telecommunication and Signal Construction
p) Sea Navigation and River Sign Telecommunication Aid Construction
q) Scaffolding Installation
r) Installation of Prefabricated Structure for Other Civil Constructions
s) Construction of Other Electrical and Telecommunication Network
t) Construction of Other Electrical and Telecommunication Network
u) Other Distinctive Construction
v) Other Civil Structure Construction

2) Building Work (entire development sector)
a) Office Building Construction
b) Lodging Building Construction
c) Industrial Building Construction
d) Residential Building Construction
e) Health Services Building Construction

f) Konstruksi Gedung Pendidikan
g) Konstruksi Gedung Perbelanjaan
h) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
i) Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah
j) Konstruksi Gedung Lainnya
k) Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung
l) Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya

3) Pekerjaan Mekanikal Elektrikal termasuk jaringannya
a) Konstruksi Bangunan Elektrikal
b) Instalasi Listrik
c) Instalasi Telekomunikasi
d) Instalasi Mekanikal
e) Instalasi Navigasi Laut dan Sungai
f) Instalasi Navigasi Udara
g) Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
h) Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya
i) Instalasi Saluran Air (*Plambing*)
j) Instalasi Pemanas dan Geotermal
k) Instalasi Minyak dan Gas
l) Instalasi Konstruksi Lainnya

4) Pelaksanaan Pekerjaan EPI *(Engineering, Production, and Installation*), Jasa Perencanaan, *Feasibility Study*, Perancangan (*Design*), *Quantity Surveying*, *Project Management Services, Construction Management Services*, Pengawasan, dan Pekerjaan Rancang Bangun (*Design and Build*), yang antara lain:
a) Aktivitas Kantor Pusat;
b) Aktivitas Arsitektur;
c) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis;
d) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi;
e) Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa;

f) Educational Building Construction
g) Commercial Building Construction
h) Entertainment and Sports Building Construction
i) Groundwater Well Construction
j) Other Building Construction
k) Installation of Prefabricated Structure for Building
l) Completion of Other Building Construction

3) Works of Electrical Mechanics including its network
a) Construction of Electrical Structure
b) Electrical Installation
c) Telecommunication Installation
d) Mechanics Installation
e) Sea and River Navigation Installation
f) Air Navigation Installation
g) Train Telecommunication and Signal Installation
h) Highway Signs Installation
i) Waterways (Plumbing) Installation
j) Heater and Geothermal Installation
k) Oil and Gas Installation
l) Installation of Other Construction

4) Execution of EPI (Engineering, Production, and Installation) Operation, Planning Service, Feasibility Study, Design, Quantity Surveying, Project Management Services, Construction Management Services, Supervision, and Design and Build Services, such as:
a) Headquarters Activity;
b) Architecture Activity;
c) Engineering and Technical Consulting Activity;
d) Installation Technique Inspection Service;
e) Engineering Technology Research and Development;

f) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya;
g) Penelitian Pasar;
h) Aktivitas Perancangan Khusus;
i) Jasa Pengujian Laboratorium;
j) Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa; dan
k) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya.

b. Melakukan Usaha Jasa Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi dalam bidang usaha:
   1) Aktivitas Arsitektur;
   2) Instalasi Konstruksi Lainnya;
c. Melakukan Usaha Penyewaan dan Penyediaan Jasa dalam Bidang Peralatan Konstruksi, seperti:
   1) Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator
   2) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil
   3) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya
d. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak.
e. Industri Mortar atau Beton Siap Pakai.
f. Melakukan perencanaan, penggalian, penambangan, produksi, penjualan dan perdagangan produk sumber material alam/ *Quarry*:
   1) Penggalian Pasir
   2) Penggalian Kerikil (sirtu)
   3) Penggalian Tanah dan Tanah Liat
   4) Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya
   5) Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan
   6) Penggalian Kuarsa/ Pasir Kuarsa
   7) Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi
   8) Industri Barang dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan dan Bahan Bangunan

f) Science and Other Engineering Technology Research and Development;
g) Market Research;
h) Distinctive Design Activity;
i) Laboratory Testing Service;
j) Technology and Engineering Research and Development; and
k) Other Professional, Scientific, and Technical Activity.

b. Perform Construction Planning, Execution, and Supervision in the following business fields:
   1) Architecture Activity;
   2) Other Construction Installation;
c. Perform Rental and Service business in Construction Equipments sector, such as:
   1) Construction Equipments including Operator Rental
   2) Leasing Activity and Business Lease Without Option Right for Civil Engineering and Construction Equipments and Machineries
   3) Leasing Activity and Business Lease Without Option Right for Other Equipments, Machineries, and Tangible Goods
d. Wholesale Trade on the basis of Fees or Contracts.
e. Mortar and Ready mix Concrete Industry.
f. Execution of planning, drilling, mining, producting, and selling of natural resources products / Quarry:
   1) Sand Mining
   2) Gravel Mining
   3) Soil and Clay Mining
   4) Other Rock, Sand, and Clay Mining
   5) Ornamental dan Material Stone Mining
   6) Quartz/ Quartz Sand Mining
   7) Mining, Digging, and Construction Machine Industry
   8) Rock-Based Household and Building Material Products Industry

g. Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya.
h. Melakukan Perencanaan, Pengelolaan, Penjualan, Pembelian, Sewa Menyewa dan Perdagangan Bidang Usaha Kepelabuhan Dan Dermaga (*Jetty*), Seperti:
   1) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
   2) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau
   3) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan
i. Melakukan Perencanaan, Pengelolaan, Penjualan, Pembelian, Sewa- Menyewa dan Perdagangan Jasa Ekspedisi/ Usaha Angkutan Darat dan Laut, seperti:
   1) Jasa Pengurusan Transportasi
   2) Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api (EMKA) dan Ekspedisi Angkutan Darat (EAD)
   3) Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)
   4) Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)
   5) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum
   6) Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus
   7) Angkutan Laut Dalam Negeri Liner untuk Barang
   8) Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper untuk Barang
   9) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus
   10) Angkutan Laut Luar Negeri Liner untuk Barang
   11) Angkutan Laut Luar Negeri Tramper untuk Barang
   12) Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus
   13) Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan atau Hewan
   14) Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus
   15) Angkutan Penyeberangan Umum Antar provinsi untuk Barang
   16) Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Provinsi untuk Barang
   17) Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang termasuk Penyeberangan Antar Negara

g. Management and Disposal Of Hazardous Waste.
h. Perform Planning, Management, Sale, Purchase, Lease and Trade In Port And Dock (Jetty) Business, Such As:
   1) Sea Port Service Activity
   2) River and Lake Port Service Activity
   3) Ferriage Port Service Activity
i. Perform planning, management, sale, purchase, lease and trade in land and sea expedition/ transportation services.
   1) Transportation Management Service
   2) Train Cargo Expedition (EMKA) and Land Transportation Expedition (EAD) Activity
   3) Ship Cargo Expedition (EMKL) Activity
   4) Airplane Cargo Expedition (EMPU) Activity
   5) Motorized Transport for General Goods
   6) Motorized Transport for Uncommon Goods
   7) Domestic Linear Sea Transport for Goods
   8) Domestic Tramper Sea Transport for Goods
   9) Domestic Sea Transport for Uncommon Goods
   10) Overseas Linear Sea Transport for Goods
   11) Overseas Tramper Sea Transport for Goods
   12) Overseas Sea Transport for Uncommon Goods
   13) Lake and River Transport for General Goods and Animals
   14) Lake and River Transport for Uncommon Goods
   15) General Provincial Ferriage Transport for Goods
   16) Provincial Pioneer Ferriage Transport for Goods
   17) Other Ferriage for Goods, including Intercountry Ferriage

j. Melakukan Usaha Industri Dan Perdagangan Peralatan Produksi Beton, seperti:
   1) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya
   2) Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya
   3) Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya
   4) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan perlengkapan Lainnya
k. Industri Semen
l. Melakukan Usaha Industri Dan Perdagangan Besi dan Baja:
   1) Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron and Steel Making*)
   2) Industri Penggilingan Baja (*Steel Rolling*)
   3) Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan
   4) Industri Konstruksi dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya
   5) Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk
   6) Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi
   7) Industri Pengecoran Besi dan Baja
   8) Industri Paku, Mur dan Baut
   9) Industri Pembuatan Profil
   10) Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam
   11) Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
m. Melakukan Usaha Industri Dan Perdagangan Bahan Bangunan:
   1) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu
   2) Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
   3) Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
   4) Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu
   5) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan

j. Perform business and commerce in Concrete Manufacturing Equipments Industry, such as:
   1) Commerce of Industrial and Office Machineries, its Spare Parts and Supplies
   2) Commerce of Sea Transportation Equipments, its Spare Parts and Supplies
   3) Commerce of Land Transportation Equipments (excluding cars, motorcycles, among others), its Spare Parts and Supplies
   4) Commerce of Machineries, Equipments, and other Devices
k. Cement Industry
l. Perform business and commerce in iron and steel industry:
   1) Iron and Steel Making Industry
   2) Steel Rolling Industry
   3) Pre-installed Steel for Building and Heavy Construction Industry
   4) Pre-installed Metal for Other Construction Industry
   5) Steel Forging, Pressing, Molding, and Forming Industry;
   6) Iron and steel pipe and pipe-joint Industry
   7) Iron and Steel Casting Industry
   8) Nail, Screw, and Bolt Industry
   9) Profile Manufacture Industry
   10) Commerce of Metal and Metal Ore
   11) Commerce of Metal for Construction Material
m. Performing business and commerce in in Building Material Industry:
   1) Commerce of Cement, Lime, Sand, and Rock
   2) Commerce of Other Construction Materials
   3) Retail Trade of Metal for Construction Material
   4) Retail Trade of Cement, Lime, Sand, and Rock
   5) Retail Trade of Various Building Material

6) Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya

n. Melakukan usaha reparasi, pabrikasi, instalasi/ pemasangan mesin dan peralatan konstruksi, seperti:
   1) Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya
   2) Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus
   3) Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri

o. Melakukan Usaha Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di Bidang Sarana dan Prasarana Dasar (Infrastruktur) termasuk:
   1) Aktivitas Jalan Tol
   2) Aktivitas Perusahaan Holding
   3) Trust, Pembiayaan dan Entitas Keuangan Sejenis
   4) Aktivitas Manajemen Dana
   5) *Real Estat*e yang Dimiliki Sendiri atau Disewa

p. Melakukan Usaha Identifikasi, Perencanaan, Survei, dan Investigasi Seperti Pemetaan Udara, dan Penginderaan Jauh untuk Mendukung Pekerjaan *Structural Health Monitoring System* (SHMS), Seperti:
   1) Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara
   2) Konstruksi Sentral Telekomunikasi

q. Melakukan Usaha Instalasi Listrik, Meliputi :
   1) Kegiatan Usaha Pembangunan
   2) Pemasangan dan Pemeliharaan
   3) Jaringan Transmisi dan Distribusi
   4) Sistem Kelistrikan di Berbagai Infrastruktur Jalan, Kereta Api, dan Lapangan Udara

4. Menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat-ayat di muka dan setiap kegiatan yang berhubungan baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan, dengan mengindahkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

6) Retail Trade of Other Construction Material

n. Performing business in Construction Equipments and Machineries repair, fabrication, and installation, such as:
   1) Fabricated Metal Products Reparation
   2) Equipments for Specific Purpose Reparation
   3) Industrial Equipments and Machineries Installation

o. Performing Investment and/or Managerial business in basic infrastructure sector, such as:
   1) Toll Road Activity
   2) Holding Company Activity
   3) Trust, Financing, and Other Similar Financial Entity
   4) Fund Management Activity
   5) Real Estate Ownership or Leasing

p. Performing business of identification, planning, survey, and investigation, such as air mapping, and remote sensing to support Structural Health Monitoring System (SHMS), such as:
   1) Construction of Air Navigation Telecommunication
   2) Construction of Central Telecommunication

q. Cundocting Electrical Installation Business includes :
   1) Business Activities of Building
   2) Installing and Maintaining Electrical Installations for Power Plants
   3) Transmission and distribution networks
   4) Electrical System in Various Road, Railway and Airport Infrastructure

4. Carry out every action that conform with aforementioned purposes and objectives, whether independently or with cooperation of other parties, under any methods that are allowed by law and regulations.

Perusahaan merupakan entitas anak dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan kepemilikan 60%. Sejak tahun 1997 Perusahaan telah menjalankan operasinya dengan dibagi atas beberapa kantor Wilayah Penjualan (WP), di mana tiap Wilayah Penjualan didukung dengan rata - rata satu Pabrik Produk Beton (PPB) dan *Quarry*, berikut ini merupakan lokasi kantor dan pabrik:

The Company is a subsidiary of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk with ownership of 60%. The Company has been running its business nationwide since 1997, supported by several marketing offices which divided by areas of sales (WP), where each sales area are supported by Concrete Products Factory (PPB) and Quarry, the following is the location of head office, marketing offices, and factories:

Kantor Pusat	Tamansari Hive Office Lt. 3-5, Jl D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur 13340	***Head Office***
Kantor Wilayah Penjualan		***Regional Sales Office***
Wilayah Penjualan I	Jl. Gunung Krakatau No. 15, Medan 20239	*Sales Region I*
Wilayah Penjualan II	Jl. Bambang Utoyo Rama Kasih Raya No. 957 Palembang	*Sales Region II*
Wilayah Penjualan III	Jl. Let. Jend MT Haryono Kav 12, Jakarta Timur	*Sales Region III*
Wilayah Penjualan IV	Ruko BSB Blok A, Balikpapan 74110	*Sales Region VII*
Wilayah Penjualan V	Gedung Taman Sari Papilio It 5, Jl Ahmad Yani 176-178 Surabaya 60235	*Sales Region V*
Wilayah Penjualan VI	Jl. Kima Raya II Kav. S/4-5-6, Kawasan Industri Makassar	*Sales Region VI*
Divisi Operasi		***Operations Division***
Unit Operasi I	Jl. Let. Jend MT Haryono Kav 12, Jakarta Timur	*Operations Unit I*
Unit Operasi II	Jl. Surya Madya III Kav. 134 Kawasan Industri Surya Cipta, Karawang Timur	*Operations Unit II*
Unit Operasi III	Perumahan Taman Pinang Indah Blok D6 No. 3, Desa Banjarbendo Kec. Sidoarjo, Sidoarjo 61225	*Operations Unit III*
Unit Operasi III - CP Bogor	Jl. Raya Parung Panjang, Mekarjaya, Cigudeg, Bogor	*Operations Unit III - Bogor CP*
Unit Operasi IV	Grand City Ruko Palladium Blok H26 Jl. Sinar Mas Land Boulevard Kec. Balikpapan Utara Balikpapan 76114	*Operations Unit IV*
Unit Operasi IV - CP Palu	Jl. Trans Palu - Donggala KM 23 Desa Lolidondo Kec. Banawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah	*Operations Unit IV - Palu CP*
Pabrik Produk Beton		***Concrete Products Factory***
Sumatera Utara	Jl. Binjai Km. 15,5 No. 1, Deli Serdang Sumatera Utara	*North Sumatera*
Lampung	Jl. Raya Kota Bumi Km. 34,5 Tegineneng, Lampung	*Lampung*
Lampung - *Plant* Lampung Selatan	Jl. Wijaya Karya Beton Desa Sumur Ketapang Lampung Selatan 35596	*Lampung - Plant South Lampung*
Lampung - CP Lampung Selatan	Jl. Wijaya Karya Beton, Desa Sumur Ketapang, Lampung Selatan 35596	*Lampung - CP South Lampung*
Bogor	Jl. Raya Narogong Km. 26 Cileungsi, Bogor 16820	*Bogor*
Majalengka	Jl. Raya Brujul Kulon, Jatiwangi, Majalengka 45454	*Majalengka*
Boyolali	Jl. Raya Boyolali - Solo Km. 4,5 Mojosongo, Boyolali	*Boyolali*
Pasuruan	Jl. Raya Kejapanan No. 323 Gempol, Pasuruan 67155	*Pasuruan*
Sulawesi Selatan	Jl. Kima Raya II Kav. S/4-5-6 Kawasan Industri Makassar, Makassar 90241	*South Sulawesi*
Subang	Jl. Raya Pabuaran - Cipeundeuy KM.3.5 Kp. Sukamukti, Subang 41272	*Subang*
Subang - *Plant* Karawang	Jl. Surya Madya III Kav. 134 Kawasan Industri Surya Cipta, Karawang Timur	*Subang - Plant Karawang*

1.c. Entitas Anak / *Subsidiaries*

PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKA KOBE)
WIKA KOBE didirikan sebagai bentuk kerja sama antara Perusahaan dengan PS Construction Co. Ltd., dimana Perusahaan memiliki penyertaan saham sebesar 51%.

WIKA KOBE didirikan di Jakarta dengan Akta Notaris No. 18 tanggal 10 Mei 2012, dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris, di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-25815.AH.01.01 tanggal 14 Mei 2012.

Akta tersebut mengalami perubahan terakhir dalam Akta No. 6 tanggal 7 Oktober 2024, dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., M.Kn. Notaris yang berkedudukan di Jakarta mengenai perubahan kepemilikan saham, sebagaimana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.09-0260537 Tahun 2024 pada tanggal 8 Oktober 2024.

PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKA KOBE)
WIKA KOBE was established as a form of cooperation between the Company and PS Construction Co. Ltd., where the Company hold 51% ownership share participation.

WIKA KOBE, was founded at Jakarta based on Notarial Deed No. 18 dated May 10, 2012, made in presence of Karin Christiana Basoeki, S.H., Notary in Jakarta. The Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-25815.AH.01.01 dated May 14, 2012.

The deed was last amended by Notarial Deed No. 6 dated October 7, 2024, drawn up before Tjhong Sendrawan, S.H., M.Kn. A Notary domiciled in Jakarta regarding changes in share ownership, as has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0260537 of 2024 dated October 8, 2024.

WIKA KOBE berdomisili di Karawang, Jawa Barat dan bergerak dalam bidang industri beton pracetak, perdagangan, dan kegiatan usaha lain yang terkait.

WIKA KOBE is domiciled in Karawang, West Java, and engaged in precast concrete industry, trade and other related business activity.

Berdasarkan Anggaran Dasar WIKA KOBE, struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

According to WIKA KOBE's Article of Association, the capital and shareholder's structure is as follows:

Pemegang Saham/ *Shareholders*	Nilai Nominal/ *Par Value*		
	Saham/ *Shares*	Rupiah Penuh/ *Full in Rupiah*	%
Modal Dasar/ *Authorized Capital*	374,000	374,000,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Paid in Capital*			
PT Wijaya Karya Beton Tbk	47,685	47,685,000,000	51
PS Construction Co. Ltd.	45,815	45,815,000,000	49
Jumlah/ *Total*	**93,500**	**93,500,000,000**	**100**
Saham dalam Portepel/ *Portfolio Stock*	280,500	280,500,000,000	

Ikhtisar Data Keuangan / ***Financial Data Summary***

	2025 Rp	2024 Rp	
Jumlah Aset	174,817,090,293	211,084,624,695	*Total Assets*
Jumlah Liabilitas	61,937,825,580	101,966,254,102	*Total Liabilities*
Jumlah Ekuitas	112,879,264,713	109,118,370,593	*Total Equity*
Jumlah Laba Komprehensif	3,760,894,120	6,600,451,621	*Total Comprehensive Income*

PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKA KRATON)

WIKA KRATON didirikan pada tanggal 16 Desember 2013 sesuai dengan Akta Notaris Indrajati Tandjung, S.H., No. 16 di Cilegon dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-02372.AH.01.01 tanggal 17 Januari 2014. WIKA KRATON memulai kegiatan operasionalnya sejak tahun 2013.

PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKA KRATON)

WIKA KRATON was established on December 16, 2013 in accordance with Notarial Deed No. 16 by Indrajati Tandjung, S.H., in Cilegon and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-02372.AH.01.01 dated January 17, 2014. WIKA KRATON have been operated since 2013.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dimuat dalam akta No. 13 tanggal 5 Juni 2025, dibuat di hadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Cilegon, dan telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09.0296256 tanggal 11 Juni 2025 tentang perubahan Direksi dan Komisaris Perusahaan.

The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest amendment is contained in deed No. 13 dated June 5, 2025, made before Miki Tanumiharja, S.H., Notary in Cilegon, and has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.09.0296256 dated June 11, 2025 concerning changes in the Company's Board of Directors and Commissioners.

WIKA KRATON berdomisili di Cilegon, Banten dan bergerak dalam bidang industri beton pracetak, perdagangan, dan kegiatan usaha lain yang terkait.

WIKA KRATON is domiciled in Cilegon, Banten, and engaged in precast concrete, trade and industry.

Susunan pemegang saham WIKA KRATON adalah sebagai berikut:

The WIKA KRATON's capital structure and shareholder is as follows:

Pemegang Saham/ *Shareholders*	Nilai Nominal/ *Par Value*		
	Saham/ *Shares*	Rupiah Penuh/ *Full in Rupiah*	%
Modal Dasar/ *Authorized Capital*	175,000	175,000,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Paid in Capital*			
PT Wijaya Karya Beton Tbk	32,400	32,400,000,000	60
PT Krakatau Wajatama	16,200	16,200,000,000	30
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	5,400	5,400,000,000	10
Jumlah/ *Total*	**54,000**	**54,000,000,000**	**100**
Saham dalam Portepel/ *Portfolio Stock*	121,000	121,000,000,000	

Ikhtisar Data Keuangan / ***Financial Data Summary***

	2025 Rp	2024 Rp	
Jumlah Aset	127,083,454,892	145,061,146,578	*Total Assets*
Jumlah Liabilitas	88,083,153,436	94,129,262,802	*Total Liabilities*
Jumlah Ekuitas	39,000,301,456	50,931,883,776	*Total Equity*
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	(11,931,582,320)	1,681,053,104	*Total Comprehensive Income (Loss)*

PT Citra Lautan Teduh (CLT)

Pada tanggal 12 September 2014, Perusahaan mengakuisisi 90% saham CLT yang berdomisili di Batu Besar, Batam. Kemudian, pada tanggal 5 Desember 2014, Perusahaan menambah akuisisi atas CLT menjadi 99.5 % saham. CLT memulai kegiatan operasionalnya sejak tahun 1992.

PT Citra Lautan Teduh (CLT)

On September 12, 2014, the Company acquired 90% of CLT share, where domiciled in Batu Besar, Batam. Then on December 5, 2014, the Company enlarge its acquisition of CLT to 99,5% share. CLT have been operated since 1992.

Anggaran Dasar telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir yaitu mengenai perubahan Kegiatan Usaha Perusahaan pada Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 54 Tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Miki Tanumiharja, S.H., notaris di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0077592.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 26 Oktober 2022.

The Articles of Association have been amended several times, the latest regarding the changes of Company's Business Activities in the Deed of Amendment of Articles of Association No. 54 dated October 25, 2022 made in presence of Miki Tanumiharja, S.H., Notary in South Jakarta. The amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with his Decree No. AHU-0077592.AH.01.02 Year 2022 dated October 26, 2022.

CLT berdomisili di Batu Besar, Batam dan bergerak dibidang perdagangan dan industri beton, jasa konstruksi dan bidang usaha terkait.

CLT is domiciled in Batu Besar, Batam, and engaged in the concrete trade and industry, construction and related business.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham CLT adalah sebagai berikut:

The CLT's capital structure and shareholder is as follows:

Pemegang Saham/ *Shareholders*	Nilai Nominal/ *Par Value*		
	Saham/ *Shares*	Rupiah Penuh/ *Full in Rupiah*	%
Modal Dasar/ *Authorized Capital*	3,738,692,000	373,869,200,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Paid in Capital*			
PT Wijaya Karya Beton Tbk	929,999,635	92,999,963,500	99.5
Kopkar Beton Makmur Wijaya	4,673,365	467,336,500	0.5
Jumlah/ *Total*	**934,673,000**	**93,467,300,000**	**100**
Saham dalam Portepel/ *Portfolio Stock*	2,804,019,000	280,401,900,000	

Ikhtisar Data Keuangan / ***Financial Data Summary***

	2025 Rp	2024 Rp	
Jumlah Aset	445,567,052,060	465,649,930,108	*Total Assets*
Jumlah Liabilitas	62,415,530,623	91,726,430,192	*Total Liabilities*
Jumlah Ekuitas	383,151,521,437	373,923,499,916	*Total Equity*
Jumlah Laba Komprehensif	12,331,699,358	15,371,421,661	*Total Comprehensive Income*

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG)

WPG didirikan di Jakarta dengan akta Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Pracetak Gedung berdasarkan Akta Notaris No. 142 Tanggal 23 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-0001918.AH.0101 tanggal 17 Januari 2017.

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG)

WPG was established in Jakarta with the deed of Limited Liability Company WPG based on Notarial Deed No. 142 Dated December 23, 2016 made before Sri Ismiyati, S.H., Notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0001918.AH.0101 dated 17 January 2017.

Perubahan Anggaran Dasar WPG terakhir dimuat dalam akta No. 5 yang dibuat dihadapan Notaris Fatma, SH., MKn., MH, tanggal 26 Juni 2023 dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.09-0137519 Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi WPG.

The latest amendment in the articles of Associaton of WPG is covered in Deed No. 5 made before Notary Fatma, SH., MKn., MH, dated June 26, 2023 and has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. AHU-AH.01.09-0137519 Year 2023 dated July 10, 2023 concerning changes to the composition of the WPG's Board of Commissioners and Directors.

WPG berdomisili di Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bergerak dibidang perindustrian, perdagangan, dan jasa.

WPG is domiciled in South Jakarta, Jakarta Capital Special Region and engaged in industry, trading, and services.

Berdasarkan, Akta Perjanjian Jual Beli No. 13 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat No. 12 keduanya tanggal 25 Juli 2022 dan dibuat di hadapan Notaris Fatma SH., MKn., Perusahaan membeli 10.000.000 lembar saham WPG senilai Rp2.700.000.000 dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, pihak berelasi. Oleh karena itu terdapat peningkatan persentase kepemilikan Perusahaan di WPG dari 49% menjadi 51% dan berubah dari entitas asosiasi menjadi entitas anak. Transaksi ini diakui sebagai kombinasi bisnis entitas sepengendali. WPG memulai kegiatan operasionalnya sejak tahun 2017.

Based on, Deed of Sale and Purchase Agreement No. 13 and the Deed of Shareholders' Decision Decree outside Meeting No. 12, both dated July 25, 2022 and were made in presence of the Notary Fatma SH., MKn., the Company bought 10,000,000 shares of WPG amounting to Rp2,700,000,000 from PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, related party. Therefore, the percentage of the Company's ownership in WPG has increased from 49% into 51% and changed from an associate into a subsidiary. This transaction is recognized as a business combination of entities under common control. WPG started its operational activities since 2017.

Akta tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.09-0036894 tanggal 26 Juli 2022.

The amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-AH.01.09-0036894 dated July 26, 2022.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham WPG adalah sebagai berikut:

The WPG's capital structure and shareholder is as follows:

Pemegang Saham/ *Shareholders*	Nilai Nominal/ *Par Value*		
	Saham/ *Shares*	Rupiah Penuh/ *Full in Rupiah*	%
Modal Dasar/ *Authorized Capital*	2,000,000,000	200,000,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Paid in Capital*			
PT Wijaya Karya Beton Tbk	255,000,000	25,500,000,000	51
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	245,000,000	24,500,000,000	49
Jumlah/ *Total*	**500,000,000**	**50,000,000,000**	**100**
Saham dalam Portepel/ *Portfolio Stock*	1,500,000,000	150,000,000,000	

Ikhtisar Data Keuangan / ***Financial Data Summary***

	2025 Rp	2024 Rp	
Jumlah Aset	248,196,356,397	339,984,258,803	*Total Assets*
Jumlah Liabilitas	278,382,730,630	302,754,327,164	*Total Liabilities*
Jumlah Ekuitas	(30,186,374,233)	37,229,931,639	*Total Equity*
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	(67,416,305,875)	(9,764,170,428)	*Total Comprehensive Income(Losses)*

1.d. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan / *Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees*

Dewan Komisaris dan Direksi / ***Board of Commissioners dan Director***

Sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris No. 25 tanggal 12 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.09-0299236 tanggal 17 Juni 2025.

As stated in the Notarial Deed No. 25 dated June 12, 2025 made in presence of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0299236 dated June 17, 2025.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners and Director as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Dewan Komisaris / ***Board of Commissioner***

	2025	2024	
Komisaris Utama	Wilan Oktavian	Eko Sujianto	*President Commissioner*
Komisaris	Tjia Marwan	R. Permadi Mulajaya	*Commissioner*
Komisaris	--	Miftachul Munir	*Commissioner*
Komisaris Independen	Dwi Gawan Islandhi H. B.	Nita Prihutaminingrum	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	--	Iswandi Imran	*Independent Commissioner*

Direksi / ***Directors***

	2025	2024	
Direktur Utama	Kuntjara	Kuntjara	*President Director*
Direktur Pemasaran dan Pengembangan	Rija Judaswara	Rija Judaswara	*Director of Marketing and Development*
Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko	Syailendra Ogan	Syailendra Ogan	*Director of Finance, Human Capital and Risk Management*
Direktur Operasi dan *Supply Chain Management*	Agus Pramono	Agus Pramono	*Director of Operations and Supply Chain Management*
Direktur Teknik dan Produksi	Verly Widiantoro	Verly Widiantoro	*Director of Engineering and Production*

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.05/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 pengangkatan Komite Audit dan Risiko Usaha, susunan Komite Audit per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Audit Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. SK.05/DK-WB/VII/2025 dated July 17, 2025 the Audit Committee and Business Risk, the composition of the Audit Committee as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Ketua	Dwi Gawan Islandhi H. B.	Iswandi Imran	*Chairman*
Anggota	Ashuri	Nita Prihutaminingrum	*Member*
Anggota	Gunarto	Gunarto	*Member*

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. SK.02.01/WB-0A.0275/2024 tanggal 28 Oktober 2024, Sekretaris Perusahaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Yushadi.

Corporate Secretary

Based on the decree of the Board of Directors No. SK.02.01/WB-0A.0275/2024 dated October 28, 2024, the Corporate Secretary as of December 31, 2025 and 2024 is Yushadi.

Personil manajemen kunci meliputi Dewan Komisaris, Direksi Perusahaan, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Perusahaan dan Manajer Divisi.

Key management personnel are the Company's Boards of Commisioners, Directors, Head of Internal Audit, Corporate Secretary and Division Manager.

Jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners and Directors Remuneration for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Dewan Komisaris

Board of Commissioner

	2025 Rp	2024 Rp	
Imbalan Jangka Pendek	3,670,034,250	4,287,591,000	*Short-Term Benefit*
Imbalan Pascakerja	1,343,655,000	1,180,237,500	*Post-employment Benefit*
Jumlah	**5,013,689,250**	**5,467,828,500**	***Total***

Direksi

Directors

	2025 Rp	2024 Rp	
Imbalan Jangka Pendek	9,686,458,334	9,193,400,000	*Short-Term Benefit*
Imbalan Pascakerja	1,775,400,000	2,461,350,000	*Post-employment Benefit*
Jumlah	**11,461,858,334**	**11,654,750,000**	***Total***

Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebanyak 910 dan 1.066 orang (tidak diaudit).

Number of employees as of December 31, 2025 and 2024 are 910 and 1,066 person respectively (unaudited).

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

2.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik, sepanjang tidak bertentangan dengan PSAK dan ISAK.

2.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dan arus kas diklasifikasikan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2. Material Accounting Policies Information

2.a. Compliance Statements

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Services Authority/ Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No.VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the Issuer or public company, to the extent it does not in conflict with PSAK and ISAK

2.b. Basis Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the return given in exchange for assets.

consolidated cash flows are prepared based on direct method by classifying cash flow from operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah (Rp) which is the functional currency of the Company. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah amendemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, yaitu:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran;
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK 109: Instrumen Keuangan;
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 216: Aset Tetap;
- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 232: Instrumen Keuangan: Penyajian;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;
- PSAK 238: Aset Takberwujud; dan
- PSAK 240: Properti Investasi.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak (selanjutnya disebut "Grup") tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are amendments and adjustments of financial accounting standards (SAK) which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, are as follows:

- *PSAK 117: Insurance Contract;*
- *Amendments PSAK 221: Foreign Exchange Rate regarding Lack of Exchangeability;*
- *Amendments PSAK 117: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 Comparative Information.*

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:

- *PSAK 117: Insurance Contract;*
- *PSAK 105: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;*
- *PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures;*
- *PSAK 109: Financial Instruments;*
- *PSAK 115: Income from Contracts with Customers;*
- *PSAK 201: Presentation of Financial Statements;*
- *PSAK 207: Statement of Cash Flows;*
- *PSAK 216: Fixed Assets;*
- *PSAK 219: Employee Benefits;*
- *PSAK 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;*
- *PSAK 232: Financial Instruments: Presentation;*
- *PSAK 236: Impairment of Assets;*
- *PSAK 237: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets;*
- *PSAK 238: Intangible Assets; and*
- *PSAK 240: Investment Property.*

The implementation of these standards did not result in a substantial change in the Company and subsidiaries (hereinafter collectively referred to as "the Group") accounting policies and had no material impact on the financial statements of the current year or previous year.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Grup menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di *investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk:

a) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain;
b) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain;
c) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
d) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilikan dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan

2.d. The Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Group reassesses whether there is a control an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control as listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including:

a) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders;
b) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties;
c) rights arising from other contractual arrangements; and
d) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the

penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti mengendalikan entitas anak.

date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the noncontrolling interest. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the noncontrolling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

When necessary, adjustment are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra kelompok usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

All intra group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the group are eliminated in full on consolidation.

Perubahan kepemilikan Perusahaan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Perusahaan atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Perusahaan dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Changes in the Company's ownership interest in existing subsidiaries that do not result in the Company losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Company's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian, maka Perusahaan:

If the Company loses control, the Company:

a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill)* dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali);

a) Derecognized the asset (including goodwills) and liabilities of the subsidiaries at their carrying amount at the date when the contract is lost;
b) Derecognized the carrying amount of any none controlling interest in the for more subsidiaries at the date when the control is lost (including any component of other comprehensive income atributable to none controlling interest);

c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

c) Recognized fair value of the payment received, if any, from the transaction, event or circumstances that result in the lost of control;
d) Recognized any investment retained in the formal subsidiaries at fair value at the date when the control is lost;
e) Reclasifies to profit and loss, or transfer directly to retained earning if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiaries;
f) Recognized any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

2.e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan individu masing-masing entitas dalam Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Grup disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap individu entitas Grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir tahun pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non moneter diukur dalam biaya historis yang tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada tahun saat terjadinya.

2.e. Transactions and Balances in Foreign Currency

The individual financial statements of each Group's entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the Group are presented in Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Company and the presentation currency for the consolidated financial statements.

In preparing the financial statements of each individual Group entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting year, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange rate differences on monetary items are recognized in profit or loss in the years in which they arise.

Kurs yang digunakan Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

The rates used are the Bank of Indonesia middle rates on December 31, 2025 and 2024 as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
USD	16,782	16,162	*USD*
Euro	19,753	16,851	*Euro*
SGD	13,069	11,919	*SGD*
PHP	285	279	*PHP*

2.f. Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya);
   b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

2.f. Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the reporting entity:

1. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
   a. Has control or joint control over the reporting entity;
   b. Has a significant influence upon the reporting entity; or
   c. Is a member of key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
2. An entity is related to reporting entity if any of the following conditions applies:
   a. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each the parent, subsidiary, and fellow subsidiaries are related to the others);
   b. One entity is an associations or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
   c. Both entities are joint ventures of the same third party;
   d. One entity is a joint venture of the third entity and other entity is an associate of the third entity;
   e. The entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the provider itself, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;

f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka 1;
g. Orang yang diidentifikasi dalam angka 1.a memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
h. Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in 1;

g. A person identified in 1.a has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or
h. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Government-related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE'e Ministry as a shareholder's representative.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes.

2.g. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

2.g. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement and are not issued as collateral and are not restricted in use.

2.h. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada

2.h. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilites at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus

nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

or minus with the transaction costs that are directly attributtable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Subsequent Measurement of Financial Assets

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The Group financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

(1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan

(2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

(i) Financial Assets Measured at Amortized Costs

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:

(1) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and

(2) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Pendapatan keuangan dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual Ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

(ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

(1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
(2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

(ii) Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

(1) The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets; and
(2) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

(iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

(iii) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs FVTOCI. Hence, these are measured at FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

(a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.

(b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.

(c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
   (i) Jumlah penyisihan kerugian; dan
   (ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 115.

(d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortized cost, except for:

(a) Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.

(b) Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.

(c) Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:
   (i) The amount of the loss allowance; and
   (ii) the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 115.

(d) Contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which PSAK 103 applies. Such contingent consideration shall

pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

(a) Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkosistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau
(b) Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan. Aset keuangan yang berupa investasi pada instrumen ekuitas tidak dilakukan penurunan nilai.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.

The Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

(a) It eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or

(b) A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Group's key management personnel.

Impairment of Financial Assets

The Group recognize expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI, lease receivables, contract assets or loan commitments and financial guarantee contracts. Financial asset in form of investment in equity instrument is not impaired.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12 months expected credit loss is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Tahun maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
ii. Nilai waktu uang; dan
iii. Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat *"investment grade"* berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum year considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;

ii. Time value of money; and
iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfill its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama tahun yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant year.

The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak

Derecognition of Financial Assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Group recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Group retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the retain an option to repurchase part of a transferred

untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

asset), the Group allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Derecognition of Financial Liabilities

The Group derecognizes financial liabilities, if and only if the Group obligations are discharged, canceled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the considerations paid and payable is recognized in profit or loss.

Reklasifikasi

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar asset keuangan diakui dalam laba

Reclassification

The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from

rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar asset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost. This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, asset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

When the Group reclassifies its financial asset out of FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability
A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair Value Measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:
(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:
(i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);
(ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);
(iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

2.i. Tagihan Bruto Kepada Pemberi kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan dan belum ditagihkan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

2.i. Gross Amount Due from Customers

Gross amount due from customers represents receivable originated from construction contract in progress and not yet billed. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

2.j. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi sampai menjadi produk jadi.

Persediaan bahan baku, suku cadang, BBM dan pelumas diakui berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan (menggunakan metode rata-rata tertimbang) dan nilai realisasi bersih, sedangkan untuk persediaan barang jadi dinilai berdasarkan harga perolehan dikarenakan semua persediaan barang jadi merupakan barang pesanan *(job ordered)*.

Grup mengakui kerugian penurunan nilai ketika nilai ketika realisasi bersih lebih rendah dari pada biaya perolehan dengan membentuk penyisihan penurunan nilai persediaan dengan menggunakan karakteristik identifikasi spesifik.

Manajemen menetapkan untuk persediaan yang bukan merupakan kategori kelompok bahan baku dan persediaan yang telah kadaluarsa yang sebelumnya tercatat dalam persediaan bahan baku, dikoreksi dan dibebankan sebagai biaya.

2.j. Inventory

Inventories are assets in the form of materials or equipment to be used in the production process to a finished product.

Inventories of raw materials, spare parts, fuel and lubricants are recognized at the lower of cost (using the weighted average method) and net realizable value, while for finished goods inventory valued at cost because all the inventory of finished goods are goods orders (job ordered).

The Group recognizes the impairment loss when the value when the net realization is lower than the cost by forming an impairment allowance for inventory value using specific identification characteristics.

Management set for the inventory that is not a category of raw materials and supplies that have expired and previously listed in the inventory of raw materials, are corrected and accounted for as expenses.

2.k. Uang Muka Diterima

Uang muka diterima merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sesuai dengan kontrak yang akan dikompensasikan secara proporsional dengan tagihan.

2.k. Advances Received

Advances received is an advance received from customer in accordance with the contract will be proportionally compensated to the bill.

2.l. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, pada saat manfaat diterima.

Biaya dibayar di muka terdiri dari biaya usaha, biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya sewa akan dibebankan secara proporsional dengan pendapatan yang diakui pada setiap periode, sedangkan biaya

2.l. Prepaid Expense

Prepaid expenses are costs that have been paid but have not yet recognized as expense, it will be recognized as expense in the coming period, when the benefit is received.

Prepaid expenses, which consist of operating expenses, production costs, distribution costs, and rental fees, will be charged in proportion to revenue recognized in each period, while the prepaid rent are amortized

dibayar di muka atas sewa diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

over the useful life of each expense with a straight-line method.

2.m. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Pengaturan Bersama

Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan aset atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* akan mengurangi nilai tercatat investasi.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

a. Jika investasi menjadi entitas anak, Grup mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 103 dan PSAK 110.

b. Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.

c. Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan atas dua atau lebih pihak yang memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

2.m. Investments in Associates and Joint Arrangement

Associates

Associates are entities in which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but has no control or jointly control over those policies (significant influence).

Investment in associates is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost and the carrying amount is added or subtracted by the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee will reduce the carrying amount of the investment.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

a. If the investment becomes a subsidiary, the Group account for its investment in accordance with PSAK 103 and PSAK 110.

b. If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measures the retained interest at fair value.

c. When the Group discontinue the use of the equity method, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

The Group classifies joint arrangement as a joint venture whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

Ventura bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

A joint venturer recognise its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

2.n. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan bukan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrasi atau dijual dalam kegiatan bisnis normal.

2.n. Investment Properties

Investment properties are properties (land or building or part of a building or both) held to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

After initial recognition, the Group choose to use fair value model and measure all of its investment property at fair value. A gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

The fair value of investment property is based on a valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

a. Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang akan digunakan sendiri;

The Group shall transfer a property, to, or from investment property when, and only when, there the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of the change in use, include:

a. Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;

b. Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
c. Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi; dan
d. Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Aset dalam konstruksi yang memenuhi definisi sebagai properti investasi diklasifikasikan sebagai properti investasi dan diukur sebesar harga perolehan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

b. Commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment property to inventories;
c. End of owner-occupation for a transfer from owner occupied property to investment property; and
d. Inception of operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment property.

Construction in progress which meets the definition of investment properties are classified as investment properties and measured at its cost.

Investment properties are derecognized when either they have been disposed of or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from its diposal. Any gains or losses on the retirement or disposal of investment properties are recognized in profit or loss in the period of those retirement or disposal.

2.o. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan dipindahkan ke aset tetap pada saat selesai dan siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

2.o. Fixed Asset

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

Construction in progress stated at cost and removed into fixed asset at the time of the completion and ready to be used.

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Aset tetap secara keseluruhan disusutkan berdasarkan metode garis lurus sesuai umur ekonomis masing-masing aset berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset.

Fixed assets are depreciated based on the overall straight-line method according to the economic life of each asset based on the estimated useful lives of assets.

Berdasarkan hasil kajian teknis pencatatan perhitungan umur ekonomis aset tetap khususnya beberapa peralatan produksi mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, sesuai Surat Keputusan Direksi No.SK.01.03/WB-0A.0001/2023 tanggal 25 September 2023 adalah sebagai berikut:

Based on the results of technical studies recording the calculation of the age of the assets, particularly some of the production equipment was changed from the previous year, according the Decree of the Directors No.SK.01.03/WB-0A.0001/2023 dated September 25, 2023 are as follows:

	Masa Manfaat / *Useful Life*		
	Sebelum Perubahan/ *Before the Change*	**Setelah Perubahan/ *After the Change***	
Bangunan	10 - 30 Tahun/ *Years*	20 - 50 Tahun/ *Years*	*Buildings*
Prasarana	10- 20 Tahun/ *Years*	10 - 40 Tahun/ *Years*	*Infrastructures*
Perlengkapan Kantor	4 Tahun/ *Years*	4 Tahun/ *Years*	*Office Equipment*
Kendaraan	8 Tahun/ *Years*	10 Tahun/ *Years*	*Vehicles*
Cetakan	7 - 20 Tahun/ *Years*	7 - 20 Tahun/ *Years*	*Mold*
Peralatan	7 - 20 Tahun/ *Years*	7 - 25 Tahun/ *Years*	*Plant Equipment*

Aset tetap yang masa penyusutannya telah berakhir dinilai sebesar Rp1.000 (seribu rupiah). Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pemugaran dan peningkatan daya guna dalam jumlah besar dan menambah umur ekonomis atau kapasitas dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang berlaku. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasinya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap dibukukan dalam laba rugi tahun yang bersangkutan.

Fixed asset depreciation period has ended is valued at Rp1,000 (one thousand rupiahs). The cost of maintenance and repairs are charged to income as incurred. Restoration and improvement of efficiency in large numbers and add the economic life or capacity are capitalized and depreciated in accordance with the applicable depreciation rates. Fixed assets that are no longer used are removed from the following fixed asset accumulation. Gains or losses from sale of fixed assets recorded in the profit or loss for the year.

Grup senantiasa melakukan peninjauan kembali atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

The Group continually reassesed the estimated useful life, depreciation method and residual value at the end of each reporting period.

Tambang

Tambang disajikan sebesar harga perolehan, disusutkan dengan menggunakan unit produksi dimulai dari awal operasi komersial, penyusutan tersebut dihitung berdasarkan estimasi cadangan. Perubahan dalam estimasi cadangan dilakukan secara prospektif dimulai sejak periode terjadinya perubahan.

Mining

Mining are stated at cost less, the value of mining properties is depreciated using the unit of production method from the date of the commencement of commercial operation. The depreciation is calculated based on estimated mineable reserves. change in estimated reserves are accounted for on a prospective basis, from the beginning of the period in which the change occurs.

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grup diakumulasikan secara terpisah untuk setiap *area of interest* pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan

Development expenditure incurred by or on behalf of the Group is accumulated separately for each area of interest in which economically recoverable resources have been identified. Such expenditure comprises costs directly attributable to the construction

secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah yang dicatat sebagai aset tetap.

Ketika keputusan pengembangan telah diambil, jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* tertentu dipindahkan sebagai "tambang dalam pengembangan" pada akun aset tetap dan digabung dengan pengeluaran biaya pengembangan selanjutnya.

"Tambang dalam Pembangunan" direklasifikasi ke "Aset Tetap Tambang" pada akun Aset Tetap pada akhir tahap *commissioning*, ketika tambang tersebut mampu beroperasi sesuai dengan maksud manajemen.

"Tambang dalam pembangunan" tidak disusutkan sampai direklasifikasi menjadi "Aset Tetap Tambang".

Ketika timbul biaya pengembangan lebih lanjut atas properti pertambangan setelah dimulainya produksi, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai bagian dari "Aset Tetap Tambang" apabila terdapat kemungkinan besar tambahan manfaat ekonomis masa depan sehubungan dengan biaya tersebut akan mengalir ke Perusahaan. Apabila tidak, biaya tersebut dibebankan sebagai biaya produksi.

"Aset Tetap Tambang" (termasuk biaya eksplorasi, evaluasi dan pengembangan, serta pembayaran untuk memperoleh hak penambangan dan sewa) diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan terduga, dengan perhitungan terpisah yang dibuat untuk setiap *area of interest*.

"Aset tetap Tambang dalam Pembangunan" dan "Aset Tetap Tambang" diuji penurunan nilainya.

of a mine and the related infrastructure and excludes physical assets and land rights, which are recorded as property, plant and equipment.

Once a development decision has been taken, the carrying amount of the exploration and evaluation assets in respect of the area of interest is transferred to "mines under development" within Fixed Assets and aggregated with the subsequent development expenditure.

"Construction in Progress of Mine" are reclassified as "Fixed Asset of Mine" within mining properties at the end of the commissioning phase, when the mine is capable of operating in the manner intended by management.

No depreciation is recognised for "Construction in Progress of Mine" until they are reclassified as "Fixed Asset of Mine"

When further development expenditure is incurred on a mining property after the commencement of production, the expenditure is carried forward as part of "Fixed Asset of Mine" when it is probable that additional future economic benefits associated with the expenditure will flow to the company. Otherwise, such expenditure is classified as a cost of production.

"Fixed Asset of Mine" (including reclassified exploration, evaluation and development expenditure and payments made to acquire mineral rights and leases) are amortised using the units-of-production method on the basis of proved and probable reserves, with separate calculations being made for each area of interest.

"Construction in Progress of Mine" and "Fixed Asset of Mine" are tested for impairment.

2.p. Sewa

Pada tanggal insepsi kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

2.p. Lease

At inception of a contract, the Company shall assess whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if he contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu, Perusahaan menilai apakah selama periode penggunaan, Perusahaan memiliki dua hal berikut:

a. Hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
b. Hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, yaitu hanya jika:
   (i) Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan; atau
   (ii) keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
   - Perusahaan memiliki hak mengoperasikan aset (atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan) selama periode penggunaan, tanpa pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut; atau
   - Perusahaan mendesain aset (atau aspek tertentu dari aset) dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time, the Company shall assess whether, throughout the period of use, the Company has both of the following:

a. The right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified asset; and
b. The right to direct the use of the identified asset, only if either:
   (i) The Company has the right to direct how and for what purpose the asset is used throughout the period of use; or
   (ii) the relevant decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined and
   - *The Company has the right to operate the asset (or to direct others to operate the asset in a manner that it determines) throughout the period of use, without the supplier having the right to change those operating instructions; or*
   - *The Company designed the asset (or specific aspects of the asset) in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used throughout the period of use.*

Perusahaan sebagai *Lessee*
Perusahaan menerapkan satu pendekatan pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Perusahaan mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang merupakan hak untuk menggunakan aset pendasar.

The Company as Lessee
The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company recognizes lease liabilities to make lease payments and right of use assets representing the the right to use the underlying assets.

Perusahaan mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung yang timbul di awal, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-

The Company recognizes right use of assets at the commencement date of the lease (i.e., the date underlying assets is available for use). Right of use assets are measure at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right of use assets includes the amount of lease liabilities recognized, intitial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right of use assets

guna disusutkan dengan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara sewa dan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewa beralih ke Perusahaan pada akhir masa sewa atau biaya perolehan mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset.

Pada tanggal dimulainya sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dibawah jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang cukup pasti akan dilaksanakan oleh Perusahaan, dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan Perusahaan melaksanakan opsi untuk menghentikan sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban (kecuali terjadi untuk menghasilkan persediaan) pada periode dimana peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk merefleksikan penambahan bunga dan mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran masa depan akibat perubahan indeks atau kurs yang digunakan untuk pembayaran sewa) atau perubahan penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak guna telah berkurang menjadi nol.

are depreciated on a straght-line basis over the shorter period of the lease term and the estimated useful lives of the assets.

If ownership of the leased assets transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects to exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets.

At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in-substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expexted to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Company exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses (unless they are incurred to produce inventories) in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, The Company uses its incremental borrowing rate at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa bangunan (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli). Hal ini juga berlaku untuk pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa bangunan yang dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases of buildings and infrastructures (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-values assets recognition exemption to leases of buildings and infrastructures that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- Pengakuan awal *goodwill*; atau
- Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang:
  i. bukan kombinasi bisnis;
  ii. pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak); dan
  iii. pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan:

- Mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- Menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal efektif modifikasi;
- Menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perusahaan mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- Membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

The Company accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- *The initial recognition of goodwill; or*
- *The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is:*
  i. not a business combination;
  ii. at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss); and
  iii. at the time of the transaction, does not give rise to equal taxable and deductible temporary differences.

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Company:

- *Remeasure and allocate the consideration in the modified contract;*
- *Determine the lease term of the modified lease;*
- *Remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of use assets. The revised discount rate is determined as The Company's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *Decrease the carrying amount of the right of- use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Company recognize in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *Make a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

Perusahaan sebagai *Lessor*
Perusahaan mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari asset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa operasi. Sewa kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

The Company as Lessor
The Company presents assets subject to operating leases in the statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as the lease income. Contingent rents, if any, are recognized as income in the period incurred. Lease income from operating leases is recognized as revenue on a straight-line basis over the lease term.

2.q. Imbalan Kerja
Imbalan Kerja Jangka Pendek
Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pasca kerja
Grup memberikan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Cipta Kerja No. 11/2020 untuk perhitungan 31 Desember 2025 dan 2024.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari

2.q. Employee Benefits
Short-Term Employee Benefits
Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during the period, at the undiscounted amount of Short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment Benefit
The Group also provides post-employment benefits as required under Omnibus Law No. 11/2020 for the calculation of December 31, 2025 and 2024.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interest on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial

keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan mengikutsertakan karyawannya dalam program pensiun iuran pasti dengan iuran perusahaan sebesar 12.5% dari penghasilan dasar pensiun per bulan. Program ini mulai efektif sejak tahun 2007.

Pesangon
Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:
(a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
(b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 237 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya
Perusahaan juga memberikan program imbalan kerja jangka panjang lainnya kepada karyawannya berupa cuti besar dan penghargaan atas lamanya pengabdian disebut "Satya Karya".

Imbalan jangka panjang lain diukur dengan menggunakan metode yang sama dengan imbalan pascakerja, kecuali untuk pengukuran kembali liabilitas diakui dalam laba rugi.

2.r. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Perusahaan mengakui pendapatan sesuai dengan PSAK 115, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", dengan melakukan analisis transaksi melalui metode lima langkah pengakuan pendapatan sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
   - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
   - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan.

gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Company includes its employees on a funded defined contribution pension program with employer contribution 12.5% of monthly pensionable salary. This program is effective from the year 2007 onwards.

Termination Benefits
The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:
(a) When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and
(b) When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 237 and involves payment of termination benefits.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

Other Long-Term Employee Benefits
Company also provides other long-term employee benefit in form of long service leave and long service award called "Satya Karya".

Other long-term employee benefits measured using the same method as post-employment benefits, except for the remeasurement of the liability recognized in profit or loss.

2.r. Revenue and Expense Recognition
The Company recognizes revenues in accordance with PSAK 115, "Revenue from Contracts with Customers", by performing transaction analysis through the five steps of income recognition model as follows:

1. Identify contracts with customers with certain criteria as follows:

   - *The contract has been agreed by the parties involved in the contract*
   - *The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred*

- Kontrak memiliki substansi komersial

2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:
- Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi dari sepanjang waktu:
- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- Pelaksanaan Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Pelaksanaan Grup tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk pelaksanaan yang diselesaikan hingga saat ini.

- *The contract has commercial substance*
2. *Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).*

A performance obligation may be satisfied at the following:
- *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.*

A performance obligation is satisfied at a point in time unless it meets one of the following criteria, in which case it is satisfied over time:
- *The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Group's performance as the Group performs;*
- *The Group's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; and*
- *The Group's performance does not create an asset with an alternative use to the Group and the Group has an enforceable right to payment for performance completed to date.*

Pendapatan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sepanjang waktu yang dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan yang diakui setara dengan estimasi terbaru dari total nilai kontrak dikalikan dengan tingkat penyelesaian sebenarnya yang ditentukan dengan mengacu pada keadaan fisik kemajuan pekerjaan.

Revenues related to construction contracts are contracts are recognized over time which accounted for using the percentage of completion method, the revenue recognised equals the latest estimate of the total value of the contract multiplied by the actual completion rate determined by reference to the physical state of progress of the works.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Contract revenue comprises the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that it will result in revenue and can be realiably measured.

Jika adanya kemungkinan bahwa kontrak akan menghasilkan kerugian pada saat penyelesaian kontrak, penyisihan atas kerugian yang diperkirakan hingga penyelesaian kontrak diakui sebagai penyisihan kini pada laporan keuangan konsolidasian. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

If it is regarded as probable that a contract will generate a loss on completion, a provision for expected losses to completion is recognised as a current provision in the consolidated financial statements. The loss is provided for in full as soon as it is can be reliably measured, irrespective of the completion rate.

Biaya kontrak yang tidak mungkin dipulihkan diakui segera sebagai beban tahun berjalan pada laba rugi.

Contract costs that are not probable of being recovered are recognised as current year expenses in profit or loss

Beban langsung dan beban tidak langsung proyek yang dapat dialokasikan ke suatu proyek tertentu, diakui sebagai beban pada proyek yang bersangkutan, sedangkan beban yang tidak dapat didistribusikan atau tidak dapat dialokasikan ke aktivitas proyek menjadi beban non proyek (beban usaha).

Direct and indirect costs of projects which can be allocated to a particular project, are recognised as an expense on the related projects, while the expenses that cannot be distributed or cannot be allocated to the project activities are recognised as non-project expenses (operating expenses).

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan. Pendapatan jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat dari jasa tersebut.

Revenue from the sale of goods is recognised when the control of goods has been transferred to the customer. Revenue from the rendering of services is recognised when the customer has received and consumed benefit from the services.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual), kecuali merupakan aset yang terkait dengan aktivitas kontrak masa depan.

Expenses are recognised as incurred (accrual basis), unless they create an asset related to future contract activity.

2.s. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang

2.s. Borrowing Cost

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time

membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

2.t. Pajak Penghasilan dan Pajak Final

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

2.t. Income Tax dan Final Tax

Tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax which calculated in determining profit or loss in the period. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Benefits related to tax losses that can be withdrawn to recover current tax of prior periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

a) Pengakuan awal *goodwill*; atau
b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis, pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak) dan
c) Pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

a) The initial recognition of goodwill; or
b) The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination, at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss) and
c) At the time of the transaction, does not give rise to equal taxable and deductible temporary differences.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit

pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang:

a) Bukan kombinasi bisnis;
b) Pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak); dan

c) Pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:
a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
    i. Entitas kena pajak yang sama; atau
    ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan

will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction:

a) Is not a business combination
b) At the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss) and

c) If the transaction does not result in a temporary difference, both the taxable and temporary difference can be deducted in the same amount.

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the entity expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

a) The Group has rights that can be enforced by law to set off current tax assets against current tax liabilities; and

b) The deferred tax assets and deferred tax liabilities related to income taxes levied by the same taxation authority on:

    i. The same taxable entity; or
    ii. Different taxable entities which intend to recover current tax assets

aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

and liabilities with a net basis, or realize the asset and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of the assets or deferred tax liabilities are expected to be completed or restored.

Pajak Kini

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Current Tax

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Current tax expense is computed using the tax rates in effect at the financial reporting date, and determined based on the estimated taxable income for the current year. Management periodically evaluates positions reported in Annual Tax Returns (SPT) with respect to situations where applicable tax regulations require interpretation. If necessary, management determines provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini disajikan jika, dan hanya jika, Perusahaan:

- Memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk menghapus dalam jumlah yang diakui; dan
- Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

The offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the entity:

- *Has legally enforceable right to set-off the recognized amounts; and*
- *Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui

Deferred Tax

Deferred tax is measured using the liability method over the time difference at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable

untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi aset apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

temporary differences with some exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses when it is probable that the amount of future taxable profit will be adequate to compensate for temporary differences and tax losses.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of the reporting period, and reduces the carrying amount if it is probable that taxable profit is no longer available in an amount sufficient to compensate for part or all of the deferred tax assets. Deferred tax assets that have not been recognized are revalued at the end of each reporting period and recognized to the extent that it is probable that future taxable income will allow deferred tax assets to be recovered.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Deferred tax assets and liabilities are calculated based on the rates that will be charged in the period when the asset is realized or the liability is settled, based on the tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of the financial reporting period. The tax effects relating to provision for and / or recovery of all temporary differences during the year, including the effect of changes in tax rates, are credited or charged in current operations, for transactions that have previously been charged or credited directly to equity.

Saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan, jika dan hanya jika:

The offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

a. Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan a. saling hapus asset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan

a. The Company has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and

b. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
   i. Entitas kena pajak yang sama; atau
   ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan asset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap tahun masa

b. The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:

   i. The same taxable entity; or
   ii. Different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future year in which significant amounts of deferred

depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Pajak Final
Beban pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui selama periode/ tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada penghitungan laba atau rugi tahun berjalan, diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak. Jika penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final, perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Final Tax
Final income tax expense is recognized proportionately with the accounting income recognized during the period/ year. The difference between the final income tax paid and the final tax expense in the profit or loss for the period is recognized as prepaid tax or tax payable. If the income is already subject to final income tax, the differences between the carrying value of existing assets and liabilities and their tax basses are not recognized as deferred tax assets or liabilities.

Berdasarkan PP No 34 Tahun 2016 memuat aturan perpajakan sebesar 2,5% berlaku untuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Based on PP No 34 of 2016 concerning tax rule of 2.5% applies to for the transfer of rights over land and/or buildings in addition to the transfer of rights over land and/or buildings in the form of Regular Houses or Regular Flats by a Taxpayer whose main business is transferring rights over land and/or buildings.

Berdasarkan PMK No. 34 Tahun 2017 tentang memuat aturan perpajakan sebesar 0,25% berlaku untuk penjualan bahan bakar minyak kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina.

Based on PMK No 34 of 2017 concerning tax rule of 0.25% applies to the sale of fuel oil at public refueling stations that sell fuel oil purchased from Pertamina or Pertamina's subsidiaries.

Berdasarkan PP No. 34 Tahun 2017 memuat aturan perpajakan sebesar 10% berlaku untuk penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan baik sebagian maupun seluruh bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan.

Based on PP No 34 of 2017 concerning tax rule of 10% applies to income from rental of land and/or buildings, both part and all of the buildings received or acquired by individuals or entities.

Pajak penghasilan final disajikan diluar beban pajak penghasilan pada laba rugi.

Final income tax is presented outside income tax expense in profit or loss.

2.u. Laba Per Saham
Laba per saham dasar masing-masing dihitung dengan membagi laba atau rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

2.u. Earnings Per Share
Basic earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to the owners of the parent entity by the weighted average of outstanding shares during the year.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba atau rugi yang diatribusikan

Diluted earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to the

kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Tidak ada indikasi kejadian pada Perusahaan yang dapat menimbulkan efek dilusi saham.

owners of the company by the weighted average number of ordinary shares that has been adjusted with potential effects of all dilutive ordinary shares.

There is no indication that any events in the Company can affect to the dilution of shares.

2.v. Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direviu oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi segmen geografis disusun untuk menunjukkan aset dan hasil usaha setiap Grup wilayah geografis.

2.v. Operating Segment

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
c) for which discrete financial information is available.

Geographical Segment information is prepared to show the assets and results of operations of each geographical Group.

2.w. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

2.w. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

2.x. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkani atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Apabila penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat asset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

2.x. Impairment of Nonfinancial Assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of nonfinancial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

3. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 2, Direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Penting dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi
Di bawah ini adalah pertimbangan penting, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Kepentingan dalam pengaturan bersama
Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai operasi bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Grup mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama, apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah

3. Sources of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgments

In the application of the Group accounting policies, which are described in Note 2, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies
Below are the critical judgments, apart from those involving estimations, that the directors have made in the process of applying the Group accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Interests in joint arrangements
Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the financial, operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle*

- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  a. Bentuk legal dari kendaraan terpisah;
  b. Persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
  c. Fakta dan kondisi lainnya, jika relevan.

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut merupakan sebuah ventura bersama.

Sumber Ketidakpastian Estimasi
Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Persentase Penyelesaian
Pengakuan pendapatan dan beban pokok penjualan Grup mengakui pendapatan dan beban pokok penjualan dari proyek yang masih dalam progress pembangunan berdasarkan metode persentase penyelesaian. Tahap penyelesaian diukur berdasarkan kebijakan akuntansi, asumsi yang penting diperlukan adalah dalam menentukan tahap penyelesaian (persentase penyelesaian) dan jumlah estimasi pendapatan dan jumlah biaya pembangunan. Dalam membuat asumsi, Grup mengevaluasinya berdasarkan pengalaman di waktu yang lampau dan bantuan dari spesialis.

- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:*
  a. The legal form of the separate vehicle;
  b. The terms of the contractual arrangement; and
  c. Other relevant facts and circumstances.

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the consolidated financial statements.

The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures. These structures and terms of the contractual arrangement indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangement. The Group also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and concluded that the arrangements are joint ventures.

Sources of Estimation Uncertainty
The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Percentage of Completion
The Group recognise revenues and cost of revenues from the construction and project in development stage based on percentage of completion method. Stage of completion is measured based on the accounting policies, important assumption is required in determining the stage completion (percentage of completion) and the amount of estimated income and total development cost. In making assumptions, the Group evaluates them based on past experience and with the assistance of specialist.

Rugi Penurunan Nilai pada Aset Keuangan yang diukur pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi

Grup menilai penurunan nilai pada aset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh aset keuangan. Nilai tercatat aset keuangan telah diungkapkan dalam Catatan 5, 6, dan 7.

Impairment Loss on Financial Asset measured at Amortized Cost

The Group assess their financial assets measured at amortized cost for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions. The Group applies simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all financial assets. The carrying amount of financial assets are disclosed in Notes 5, 6, and 7.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The useful life of each item of the Group's property, plant and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

A change in the estimated useful life of any item of fixed assets would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying amounts of these assets.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 16.

The carrying amounts of fixed assets are disclosed in Note 16.

Imbalan Pascakerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi

Post-employment Benefits

The determination of post-employment benefits liabilities is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual

aktual yang berbeda dari asumsi Grup akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya yang diakui di laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Grup. Nilai tercatat liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 26.

results that differ from the Group's assumptions generally affect the recognized expense in profit or loss and other comprehensive income and recorded obligation in future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's post-employment benefit obligations. The carrying amounts of post-employment benefits liabilities are disclosed in Note 26.

Nilai Wajar Properti Investasi dan Aset Tetap Tanah

Dalam proses penilaian, manajemen dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Perusahaan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model nilai wajar. Nilai tercatat properti investasi dan aset tetap tanah disajikan di Catatan 14 dan 16.

Fair Value of Investment Property and Land Fixed Assets

Management, with the assistance of independent public valuer, determines the data inputs and assumption, assesses valuation method and hold discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the assets lass. While it is believed that the Company's data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or significant changes in assumptions may materially affect the value of assets that use fair value model. The carrying amount of investment properties and land are disclosed in Notes 14 and 16.

Menentukan Perkiraan Cadangan Mineral

Sumber mineral adalah suatu konsentrasi atau keberadaan mineral di dalam atau di atas kerak bumi yang memiliki nilai ekonomi, dalam bentuk dan kuantitas yang memiliki prospek ekonomis yang layak untuk ditambang. Lokasi, kuantitas, kualitas, karakteristik geologi dan keberlanjutan dari sumber mineral itu dapat diketahui, diperkirakan atau ditafsirkan melalui bukti geologi dan sains yang spesifik. Sumber daya mineral digolongkan berdasarkan urutan tingkat kepercayaan geologisnya menjadi tiga kategori: "tereka" *(inferred),* "terindikasi" *(indicated)* dan "terukur" *(measured).*

Determining Mineral Reserve Estimates

Mineral resources refers to a concentration or occurrence of mineral of intrinsic economic interest in or on the earth's crust in such form and quantity that there are reasonable prospects for eventual economic extraction. The location, quantity, grade, geological characteristics and continuity of a mineral resource are known, estimated or interpreted from specific geological evidence and science. Mineral resources are subdivided, in order of increasing its geological confidence, into "inferred", "indicated" and "measured" categories.

Istilah cadangan mineral didefinisikan sebagai bagian dari sumber daya mineral yang measured dan indicated, yang secara ekonomi dapat ditambang. Cadangan mineral dibagi berdasarkan tingkatan keyakinannya "cadangan terestimasi" dan "cadangan terbukti".

Mineral reserve is the economically mineable part of a measured and indicated mineral resource. Mineral reserves are subdivided in order of its increasing confidence into "probable mineral reserves" and "proven mineral reserves".

Jumlah cadangan mineral digunakan sebagai basis perhitungan: penyusutan, amortisasi dan penurunan nilai, perhitungan rasio pengupasan tanah selama masa penambangan dan prakiraan saat pembayaran untuk penutupan tambang serta prakiraan biaya restorasi dan pembersihan.

Mineral reserves are used in the calculation of depreciation, amortization and impairment charges, the assessment of life of mine stripping ratios and for forecasting the timing of the payment of close-down and restoration costs and clean up costs.

Dalam menentukan umur tambang untuk tujuan akuntansi, sumber daya mineral hanya akan diperhitungkan apabila terdapat tingkat keyakinan yang tinggi akan diperoleh hasil tambang yang ekonomis.

In assessing the life of a mine for accounting purposes, mineral resources are only taken into account where there is a high degree of confidence of economic extraction.

Terdapat berbagai ketidakpastian inheren dalam pengestimasian cadangan dan penentuan asumsi yang digunakan pada saat estimasi dilakukan, yang dapat berubah secara signifikan ketika tersedia informasi yang baru. Perubahan perkiraan harga komoditas, nilai tukar uang, biaya produksi atau tingkat pemulihan dapat mengubah status keekonomian dari cadangan yang, pada akhirnya, dapat mengakibatkan perubahan terhadap perkiraan cadangan.

There are numerous uncertainties inherent in estimating reserves and assumptions that are valid at the time of estimation but may change significantly when new information becomes available. Changes in the forecast prices of commodities, exchange rates, production costs or recovery rates may change the economic status of reserves and may, ultimately, result in changes to reserve estimates.

4. Kas dan Setara Kas / *4. Cash and Cash Equivalents*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2025 Rp	2024 Rp
Kas / *Cash on Hand*	239,925,800	342,547,717
Bank/ *Cash in Banks*	92,115,882,588	216,581,746,473
Deposito / *Time Deposit*	319,370,000,000	380,630,000,000
Jumlah / *Total*	**411,725,808,388**	**597,554,294,190**

Rincian saldo bank dan deposito kepada pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Detail of bank balances and time deposits to related parties and third parties are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Bank		
Pihak Berelasi / *Related Parties*		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	61,253,760,401	180,180,498,058
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14,211,279,038	22,239,840,184
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4,420,866,410	726,822,263
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1,915,229,541	874,708,713
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	179,072,058	24,014,954
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	22,190,804	179,251,038
USD		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4,060,583,293	2,702,483,738
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	843,171,145	812,015,568
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	364,008,628	236,876,090
SGD		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	123,274,514	113,861,355
Subjumlah/ *Subtotal*	**87,393,435,832**	**208,090,371,961**

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Ketiga / *Third Parties*		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	903,654,692	1,685,551,884
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	647,632,603	1,871,131,513
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	540,710,340	323,900,945
PT Bank Mega Tbk	160,093,885	160,363,401
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	51,468,592	51,433,441
PT Bank CIMB Niaga Tbk	24,619,054	947,604,482
PT Bank Permata Tbk- Unit Usaha Syariah	19,314,913	19,663,839
PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	10,060,399	10,240,399
PT Bank DKI	5,535,307	41,970,744
PT Bank Artha Graha International Tbk	1,965,000	2,875,000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	972,373	346,187
PT Bank Bukopin Tbk	--	132,183,089
PHP		
Asia United Bank	2,188,510,661	3,124,104,960
Union Bank of the Philippines	43,904,391	--
USD		
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	124,004,547	120,004,628
Subjumlah/ *Subtotal*	**4,722,446,756**	**8,491,374,512**
Jumlah/ *Total*	**92,115,882,588**	**216,581,746,473**
Deposito / *Time Deposit*		
Rupiah		
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	185,370,000,000	55,630,000,000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	111,000,000,000	205,000,000,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12,000,000,000	115,000,000,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11,000,000,000	5,000,000,000
Jumlah/ *Total*	**319,370,000,000**	**380,630,000,000**

Penempatan deposito berupa Deposito berjangka sampai dengan 3 bulan dan *Deposito on Call* (DOC) 5 - 18 hari dengan tingkat bunga 2,00% - 4,50% dan 2,00% - 4,75%, masing-masing tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Placement of time deposits i.e. time Deposits up to 3 months and Deposit On Call (DOC) of 5 - 18 days, with an interest rate 2.00% - 4.50% and 2.00% - 4.75% as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

5. Piutang Usaha dan Retensi-Bersih / *5. Trade and Retention Receivables-Net*

5.a Piutang Usaha - Bersih / *5.a Trade Receivables - Net*

Semua piutang usaha Grup dalam mata uang rupiah.

All of the Group's trade receivables are denominated in rupiah.

Rincian piutang usaha kepada pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Details of trade receivables to related parties and third parties are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	207,480,336,071	141,221,314,994
KSO China Road & Bridge Corporation - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	26,476,837,021	14,447,322,914
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	23,733,669,370	24,515,956,984
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	22,940,285,362	8,494,781,887
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	18,945,765,061	6,542,336,022
PT Hutama Karya Infrastruktur	18,251,905,750	27,771,216,161
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	14,213,763,438	18,382,449,951
PT Waskita Beton Precast Tbk	3,432,723,846	30,874,529,162

	2025 Rp	2024 Rp
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Waskita Karya (Persero) Tbk - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	2,928,347,200	10,787,998,891
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Karya Marga Konstruksi - PT Hutama Karya Infrastruktur	1,572,054,000	11,087,031,592
High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC) - Team WIKA	313,125,688	13,634,672,384
PT Hutama Karya (Persero)	--	17,572,811,972
Others (each below Rp10 Billion)	93,844,518,441	132,748,158,930
Jumlah/ *Total*	**434,133,331,248**	**458,080,581,844**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	**(8,780,368,342)**	**(40,244,844,348)**
Bersih/ *Net*	**425,352,962,906**	**417,835,737,496**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Truba Jaya Engineering	29,734,120,104	29,734,120,104
PT Girder Indonesia	27,169,563,958	11,417,796,952
PT Jaya Bersama Alexindo	25,484,674,200	--
KSO PT Adhi Karya (Persero) Tbk - PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Marga Konstruksi Nusantara	23,229,219,350	52,691,852,350
KSO PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Guntur Satria Perkasa	17,932,629,610	27,193,927,823
KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk - PT Waskita Karya (Persero) Tbk - PT Modern Wijaya Tehnical	16,531,091,549	1,606,144,050
KSO PT Hutama Karya Infrastruktur - PT Acset Indonusa Tbk. - PT Nindya Karya	15,737,670,000	16,942,422,500
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	10,204,689,478	29,517,034,762
PT Hastari Jaya Sentosa	10,181,580,300	2,637,750,285
PT Dian Previta	9,357,301,133	14,256,055,209
KSO PT Hutama Karya (Persero) - PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk - PT Yasa Patria Perkasa	3,970,247,400	22,137,573,280
PT Mitra Murni Perkasa	2,645,715,675	12,058,656,572
PT Basuki Rahmanta Putra	1,446,841,440	14,145,547,336
PT Rekagunatek Persada	--	20,575,167,734
PT Jakarta Propertindo	--	14,546,452,186
PT Karya Logistik Nusantara	--	12,703,966,608
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 Miliar)/ *Others (each below Rp10 Billion)*	275,307,789,922	315,481,051,470
Jumlah/*Total*	**468,933,134,119**	**597,645,519,221**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	**(117,623,775,657)**	**(96,796,338,236)**
Bersih/*Net*	**351,309,358,462**	**500,849,180,985**
Jumlah/ *Total*	**776,662,321,368**	**918,684,918,481**

Rincian analisis umur piutang usaha dihitung sejak tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Aging analysis of trade receivables are calculated from the due date are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Belum Jatuh Tempo	298,604,667,176	264,315,085,176	*Not yet due*
> 0 - 3 bulan	205,114,903,313	341,174,138,767	*> 0 up to 3 months*
> 3 - 6 bulan	74,710,073,916	57,029,214,232	*> 3 up to 6 months*
> 6 - 9 bulan	58,440,994,014	102,396,485,908	*> 6 up to 9 months*
> 9 - 12 bulan	40,763,572,493	59,328,953,571	*> 9 up to 12 months*
> 12 - 15 bulan	17,442,136,549	22,878,783,415	*> 12 up to 15 months*
> 15 - 18 bulan	10,994,524,783	8,251,048,652	*> 15 up to 18 months*
> 18 - 21 bulan	11,054,781,972	11,506,753,931	*> 18 up to 21 months*
> 21 - 24 bulan	30,024,107,329	17,892,615,606	*> 21 up to 24 months*
> 24 - 27 bulan	4,632,684,329	6,141,482,249	*> 24 up to 27 months*
> 27 - 30 bulan	4,075,673,225	3,799,960,572	*> 27 up to 30 months*
> 30 - 33 bulan	6,519,773,320	6,527,349,561	*> 30 up to 33 months*
> 33 - 36 bulan	14,678,042,690	15,763,003,981	*> 33 up to 36 months*
Diatas 36 bulan	126,010,530,258	138,721,225,444	*More than 36 months*
Jumlah	**903,066,465,367**	**1,055,726,101,065**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(126,404,143,999)	(137,041,182,584)	*Allowance for Impairment losses*
Neto	**776,662,321,368**	**918,684,918,481**	***Net***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

The movement in allowance for impairment losses of receivables are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo Awal	137,041,182,584	125,996,464,341	*Beginning Balance*
Penambahan Penyisihan	38,662,117,431	69,419,136,950	*Additional of Impairment*
Pemulihan Penyisihan	(49,299,156,016)	(58,374,418,707)	*Impairment Recovery*
Saldo Akhir	**126,404,143,999**	**137,041,182,584**	***Ending Balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

The management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible trade receivables.

Piutang digunakan sebagai jaminan utama atas fasilitas kredit modal kerja *revolving* dan fasilitas *Non-Cash Loan* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 18 dan 27).

Receivables used as the primary collateral for working capital revolving credit facility and Non-Cash Loan facilities at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Notes 18 and 27).

5.b Piutang Retensi - Bersih / *5.b Retention Receivables - Net*

Rincian piutang retensi kepada pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Details of retention receivables to related parties and third parties are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Rekayasa Industri	2.004.913.231	2.004.913.231
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	612.837.838	3.562.207.207
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	--	5.787.979.398
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 Miliar)/ *Others (each below Rp2 Billion)*	1.718.184.318	3.818.428.881
Jumlah/ *Total*	**4.335.935.387**	**15.173.528.717**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	**(578.012.643)**	**(474.483.069)**
Bersih/ *Net*	**3.757.922.744**	**14.699.045.648**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	6.432.536.363	9.995.009.516
PT Fajar Putra Dinasti	4.448.361.716	--
PT Sinar Perdana Kurnia Alam	3.989.197.202	3.989.197.202
JV Shimizu - PT Adhi Karya (Persero) Tbk	3.568.312.310	5.829.683.451
PT Indovisi Sukses Mandiri	470.000.000	2.668.485.980
PT Marianna Resort International	--	4.415.378.946
PT Kota Podomoro Tenjo Sejahtera	--	2.284.586.057
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 Miliar)/ *Others (each below Rp2 Billion)*	7.754.067.122	4.441.253.515
Jumlah/*Total*	**26.662.474.713**	**33.623.594.667**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	**(1.855.473.281)**	**(3.055.883.816)**
Bersih/ *Net*	**24.807.001.432**	**30.567.710.851**
Jumlah/ *Total*	**28.564.924.176**	**45.266.756.499**

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi adalah sebagai berikut:

The movement in allowance for impairment losses of retention receivables are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo Awal	3,530,366,885	2,418,417,754	*Beginning Balance*
Penambahan Penyisihan (Pemulihan) Tahun Berjalan	(1,096,880,961)	1,111,949,131	*Additional Impairment (Recovery) in Current Year*
Saldo Akhir	**2,433,485,924**	**3,530,366,885**	***Ending Balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang retensi.

The management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible retention receivables.

6. Piutang Belum Ditagih - Bersih / *6. Accrued Income - Net*

Merupakan pendapatan yang sudah dicatat atas penyerahan barang ke pelanggan namun masih dalam proses penagihan.

Represent revenue which has been recorded for the delivery of goods to the customers, but still in the billing process.

Rincian piutang yang belum ditagih per pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of accrued income per customers are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	188,120,636,623	122,940,871,233
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	138,410,683,080	327,600,258,560
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	21,811,527,312	21,194,798,800
KSO Kumagai Gumi Co. Ltd - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	20,582,925,000	9,010,865,000
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Karya Marga Konstruksi - PT Hutama Karya Infrastruktur	7,943,835,160	18,640,025,500
PT Hutama Karya Infrastruktur	4,577,962,231	19,951,169,531
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk	4,118,549,000	14,740,529,000
KSO China Road & Bridge Corporation - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	852,946,410	25,185,693,275
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 Miliar)/ *Others (each below Rp10 Billion)*	37,704,797,426	104,149,377,563
Subjumlah/ *Subtotal*	**424,123,862,242**	**663,413,588,462**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	**(4,330,482,429)**	**(2,732,346,652)**
Bersih/ Net	**419,793,379,813**	**660,681,241,810**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk - PT Waskita Karya (Persero) Tbk- PT Modern Wijaya Tehnical	48,952,050,516	50,352,373,000
PT Sumber Urip Sejati	10,807,473,250	--
PT Basuki Rahmanta Putra	2,835,600,000	10,344,672,000
PT Bangun Kosambi Sukses	2,825,738,496	11,828,115,352
KSO PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Guntur Satria Perkasa	6,104,344	48,989,952,000
JV Shimizu - PT Adhi Karya (Persero) Tbk	--	25,124,162,433
PT Jaya Bersama Alexindo	--	20,507,087,000
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	--	18,082,878,041
JO Shimizu - Total JKT11 Data Center Main Works	--	11,484,339,914
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 Miliar)/ *Others (each below Rp10 Billion)*	93,696,666,065	68,252,676,514
Subjumlah/ *Subtotal*	**159,123,632,671**	**264,966,256,254**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	**(1,298,124,400)**	**(2,291,251,423)**
Bersih/ *Net*	**157,825,508,271**	**262,675,004,831**
Jumlah/ *Total*	**577,618,888,084**	**923,356,246,641**

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai pendapatan akan diterima adalah sebagai berikut:

The movement in allowance for impairment losses of accrued income are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo Awal	5,023,598,075	14,403,901,055	*Beginning Balance*
Penambahan Penyisihan (Pemulihan) Tahun Berjalan	605,008,754	(9,380,302,980)	*Additional Impairment (Recovery) in Current Year*
Saldo Akhir	**5,628,606,829**	**5,023,598,075**	***Ending Balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang yang belum ditagih.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible accrued income.

7. Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Bersih / *7. Gross Amount Due From Customers - Net*

Rincian tagihan bruto pemberi kerja per pelanggan adalah sebagai berikut:

Gross amount due from customers per customer are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Hutama Karya Infrastruktur	4,105,110,065	--
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2,330,000,000	--
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	2,262,831,800	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,021,886,668	4,928,222,408
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	838,477,251	4,071,172,973
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	--	7,088,324,552
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	--	3,463,727,250
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	--	1,803,999,696
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 Miliar)/ *Others (each below Rp2 Billion)*	911,147,747	179,987,327
Subjumlah/ *Subtotal*	**11,469,453,531**	**21,535,434,206**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	(101,748,667)	--
Bersih/ *Net*	**11,367,704,864**	**21,535,434,206**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	19,965,729,272	1,166,941,540
PT Fajar Putra Dinasti	16,682,590,487	--
PT Astakona Megahtama	8,906,839,930	--
Larsen & Toubro Ltd.	5,523,029,375	--
PT Jakarta Propertindo	4,585,076,863	--
PT Mega Andalan Sukses	2,257,987,272	5,689,672,551
PT Mandiri Bangun Makmur	1,085,032,636	7,381,175,074
PT Marianna Resort International	--	2,679,727,231
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 Miliar)/ *Others (each below Rp2 Billion)*	2,452,835,688	985,502,019
Subjumlah/ *Subtotal*	**61,459,121,523**	**17,903,018,415**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	(979,345,712)	(704,873,054)
Bersih/ *Net*	**60,479,775,811**	**17,198,145,361**
Total/ *Total*	**71,847,480,675**	**38,733,579,567**

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto adalah sebagai berikut:

The movement in allowance for impairment losses of gross amount due from customer are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo Awal	704,873,054	1,325,148,942	*Beginning Balance*
Penambahan Penyisihan (Pemulihan) Tahun Berjalan	376,221,325	(620,275,888)	*Additional Impairment (Recovery) in Current Year*
Saldo Akhir	**1,081,094,379**	**704,873,054**	***Ending Balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang yang belum ditagih.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible accrued income.

8. Piutang Lain-Lain / *8. Other Receivables*

Rincian piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

Details of other receivables is as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Mandiri Inhealth Indemnity	2,170,375,235	2,170,375,235
Koperasi Karyawan Wijaya Karya	1,899,206,869	2,041,081,310
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	1,137,162,775	--
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	1,058,803,437	1,018,855,211
KSO PT WIKA Pracetak Gedung - PT Hakaaston	--	2,675,988,270
KSO PT WIKA Pracetak Gedung - PT Bringin Karya Sejahtera	--	1,787,661,040
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 Miliar)/ *Others (each below Rp1 Billion)*	2,904,095,802	2,289,158,557
Sub jumlah/ *Sub total*	**9,169,644,118**	**11,983,119,623**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1,033,805,069	1,033,805,069
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 Miliar)/ *Others (each below Rp1 Billion)*	2,252,649,282	82,096,463
Sub jumlah/ *Sub total*	**3,286,454,351**	**1,115,901,532**
Jumlah/ *Total*	**12,456,098,469**	**13,099,021,155**

Manajemen tidak melakukan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang karena manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

Management does not provide any allowance for impairment loss since the management believes that all such receivables are collectible.

9. Persediaan / *9. Inventories*

Akun ini dapat dirinci sebagai berikut :

This account can be specified as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Barang Jadi di Gudang	476,200,747,849	447,088,839,913	*Finished Goods in Warehouse*
Bahan Baku	130,576,038,891	186,468,512,409	*Raw Materials*
Barang Jadi dalam Pengiriman	48,194,231,329	56,363,724,623	*Finished Goods in Transit*
Suku Cadang dan Perlengkapan	25,472,416,293	32,049,208,949	*Spare Parts and Supplies*
Bahan Bakar dan Pelumas	3,389,950,782	3,365,785,748	*Supplies of Fuel Oil and Lubricant*
Jumlah	**683,833,385,144**	**725,336,071,642**	***Total***

Persediaan barang jadi di gudang merupakan persediaan barang jadi yang belum terkirim ke pelanggan, masih tersimpan di pabrik, dengan rincian sebagai berikut:

Finished goods inventory in warehouse are finished goods inventory that has not been sent to the customer, is stored in the factory, with the following details:

	2025 Rp	2024 Rp	
Produk Putar	272,335,887,964	224,833,451,761	*Spun Concrete*
Produk Non Putar	155,137,250,741	171,985,235,141	*Precast Concrete*
Produk *Quarry*	48,727,609,144	50,270,153,011	*Quarry Product*
Jumlah	**476,200,747,849**	**447,088,839,913**	***Total***

Persediaan bahan baku merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi barang jadi. Persediaan bahan baku dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan baku utama dan bahan baku penunjang.

Raw material are materials that are used to produce finished goods. Raw material are divided into two types, primary raw materials and secondary raw material.

Masing-masing bahan baku terdapat rincian sebagai berikut:

The detail of each item as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Bahan Baku Utama	86,499,395,940	161,148,238,819	*Primary Raw Materials*
Bahan Baku Penunjang	44,076,642,951	25,320,273,590	*Secondary Raw Materials*
Jumlah	**130,576,038,891**	**186,468,512,409**	***Total***

Persediaan barang jadi dalam pengiriman merupakan persediaan barang jadi yang sudah terkirim ke pelanggan atau sudah di lokasi proyek dan dalam proses Berita Acara Serah Terima, dengan rincian sebagai berikut:

Finished goods inventory in transit are the inventory of finished goods that have been sent to the customer or already at the project site and in the Minutes of Handover Certificate, with the following details:

	2025 Rp	2024 Rp	
Produk Putar	27,300,870,938	42,667,674,057	*Spun Concrete*
Produk Non Putar	20,893,360,391	13,696,050,566	*Precast Concrete*
Jumlah	**48,194,231,329**	**56,363,724,623**	***Total***

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban masing – masing sebesar Rp2.106.096.300.142 dan Rp2.957.335.284.984 pada tahun 2025 dan 2024.

The cost of inventories recognized as an expense was Rp2,106,096,300,142 and Rp2,957,335,284,984 for 2025 and 2024.

Perusahaan tidak mengasuransikan dan tidak melakukan penyisihan penurunan nilai atas persediaan karena berdasarkan sifat produk yang tidak mudah rusak dan tidak mudah hilang sehingga Perusahaan tidak akan menanggung biaya atas kerusakan, kehilangan dan penurunan nilai.

The Company did not insure and did not provide allowance for impairment on inventories based on the nature of the product that is not easily damaged and lost the Company believes it will not bear the cost of any damage, loss and impairment.

Persediaan produk jadi digunakan sebagai agunan atas fasilitas kredit modal kerja *revolving* dan fasilitas *non cash loan* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 18 dan 27).

The inventory of finished products are pledge as collaterals on the working capital revolving credit facilities and non cash loan facilities at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Notes 18 and 27).

10. Uang Muka / *10. Advances*

Rincian uang muka adalah sebagai berikut:

Detail of advances are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Subkontraktor	23,336,676,712	8,043,862,720	*Advance to Subcontractors*
Pemasok	990,610,374	1,899,139,322	*Advance to Suppliers*
Persekot pekerjaan	1,132,765,443	880,730,007	*Advance for work*
Jumlah	**25,460,052,529**	**10,823,732,049**	***Total***

Uang muka merupakan uang muka yang diberikan kepada pemasok dan subkontraktor sehubungan dengan pengadaan bahan baku, pelaksanaan pekerjaan distribusi dan pemasangan produk.

Advances represents payment to the suppliers and subcontractors in connection with procurement of raw materials, distribution and installation project work operation.

11. Biaya Dibayar di Muka / *11. Prepaid Expenses*

Biaya dibayar di muka terutama biaya yang telah dikeluarkan namun masih ditangguhkan dan akan diakui sebagai beban atau harga pokok pada saat pengakuan pendapatan atau Berita Acara Serah Terima (BAST) telah ditandatangani.

Prepaid expenses are mainly expenses that have been incurred but still deferred and will be recognized as an expense or cost of goods sold when revenue is recognized or Handover (BAST) has been signed.

Rincian biaya dibayar di muka adalah sebagai berikut:

Details of prepaid expenses are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Biaya Produksi	112,889,629,812	107,026,216,927	*Production Cost*
Biaya Pelaksanaan Proyek	40,452,722,954	103,127,420,351	*Project Implementation Cost*
Sewa Dibayar di Muka	2,906,952,558	5,428,997,566	*Prepaid Rent*
Jumlah	**156,249,305,324**	**215,582,634,844**	***Total***

Biaya pelaksanaan proyek dibayar di muka merupakan biaya atas distribusi, perawatan dan pemasangan produk beton yang ditangguhkan sehubungan dengan perbedaan waktu antara pengakuan penjualan dan saat terjadinya pengiriman produk, dengan rincian sebagai berikut:

Prepaid project implementation costs is the cost for the concrete products distribution, maintenance and installation which were deferred due to time difference between the sales recognition and the time of delivery of the product, the details are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Subkontraktor	13,058,810,544	38,074,080,363	*Subcontractors*
Material	14,731,523,310	35,020,710,816	*Materials*
Fasilitas Distribusi	11,999,428,309	29,037,269,872	*Distribution Facilities*
Upah Buruh	662,960,791	995,359,300	*Labour's Wage*
Jumlah	**40,452,722,954**	**103,127,420,351**	***Total***

12. Proyek Dalam Pelaksanaan / *12. Project On Progress*

Proyek dalam pelaksanaan merupakan biaya yang terjadi atas pekerjaan proyek yang sampai dengan tanggal pelaporan progres pekerjaannya belum diserahterimakan atau belum disepakati oleh para pihak sesuai dengan ketentuan kontrak.

Projects on progress represent the costs incurred in relation to project works for which, as of the reporting date, the work progress has not yet been handed over or formally agreed upon by the respective parties in accordance with the contractual terms.

Rincian proyek dalam pelaksanaan sebagai berikut:

Detail of projects on progress are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Hutama Karya Infrastruktur	11,529,578,763	--
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	8,953,360,459	6,798,088,732
JV STA Clara International Corporation – PT Wijaya Karya Beton Tbk	5,793,877,935	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5,247,830,174	--
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	4,378,172,921	--
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3,922,519,000	59,209,737
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,684,791,963	--
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	--	--
Sub jumlah/ *Sub total*	**43,510,131,215**	**6,857,298,469**

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Marianna Resort International	85,958,664,677	82,772,141,665
PT Indovisi Sukses Mandiri	53,138,853,245	57,414,678,154
KSO PT Waskita Karya (Persero) Tbk – PT Nindya Karya – PT Len Railway Systems	24,777,025,866	--
PT Kota Podomoro Tenjo Sejahtera	22,407,393,498	22,407,393,498
PT Pandega Citraniaga	21,780,102,543	21,780,102,543
Sojitz Corporation	9,799,275,363	--
PT Fajar Putera Dinasti	7,427,343,040	--
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	6,337,460,070	--
PT Astakona Megahtama	2,696,255,561	--
Lain-Lain (masing-masing di Bawah Rp2 Miliar)/ *Others (each below Rp2 Billion)*	2,085,548,522	3,658,839,936
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	**(52,643,605,102)**	**--**
Sub jumlah/ *Sub total*	**183,764,317,283**	**188,033,155,796**
Jumlah/ *Total*	**227,274,448,498**	**194,890,454,265**

Rincian umur proyek dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

The aging of project on progress is as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
1-3 Bulan/*Months*	35,225,106,874	6,798,088,732
3-6 Bulan/*Months*	40,349,584,667	3,718,049,673
> 12 Bulan/*Months*	204,343,362,059	184,374,315,860
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	(52,643,605,102)	--
Sub jumlah/ *Sub total*	**227,274,448,498**	**194,890,454,265**

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai proyek dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on project on progress are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Saldo Awal/*Beginning Balance*	--	--
Penambahan/*Additional*	52,643,605,102	--
Saldo Akhir/ *Ending Balance*	**52,643,605,102**	**--**

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas proyek dalam pelaksanaan cukup untuk menutup kemungkinan kerugian di masa depan dari tidak tertagihnya pekerjaan dalam proses.

The Management of the Group believes that the allowance for impairment losses on project on progress is sufficient to cover possible losses on uncollectible of working in progress in the future.

13. Ventura Bersama / *13. Joint Venture*

13.a Investasi Ventura Bersama / *13.a Investment in Joint Venture*

Rincian saldo investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

Details of investment in joint ventures are as follows:

Nama Perusahaan/ *Company Name*	Proyek/ *Project*	Tempat Kedudukan/ *Domicile*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Jumlah tercatat/ *Carrying amount*	
				2025 Rp	2024 Rp
KSO Wijaya Karya Beton - Emrail	Jakarta Light Rapid Transit koridor 1 Kelapa Gading - Velodrome	Jakarta	50%	1,593,175,246	1,598,654,016
KSO Wijaya Karya Beton - WIKA (Persero)	Pekerjaan Penanganan Longsor pada Jalan Tol Cisumdawu KM 177/Bojongtotor dan KM 178/Mulyasari	Jakarta	25%	8,904,679,488	--
KSO Wijaya Karya Beton - Murni	Proyek Pembangunan Hunian tetap Paska Bencana Sulawesi Tengah	Makassar	51%	9,178,724	286,878,042
KSO Wijaya Karya Beton - Kidoh	Pekerjaan Jasa Pemasangan Pipa RCPP Diameter 1800 Mm Sistem Jacking MTBM Trase Sentra Timur Paket Rancang Bangun Spam Regional Jatiluhur 1	Jakarta	51%	67,610,864	65,973,555
Jumlah/ *Total*				**10,574,644,322**	**1,951,505,613**

Mutasi investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

Changes in investments in joint ventures are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Nilai Tercatat Awal Tahun	1,951,505,613	3,482,754,466	*Carrying Amount at Beginning of the Year*
Mutasi Investasi - Bersih	(280,500,000)	(106,356,143)	*Investment Movements - net*
Bagian Bersih Laba (Rugi) Investasi pada Ventura Bersama	8,903,638,709	(1,424,892,710)	*Share in Profit (Loss) from Joint Ventures*
Nilai Tercatat Akhir Tahun	**10,574,644,322**	**1,951,505,613**	***Carrying Amount at Ending of the Year***

KSO Wijaya Karya Beton – Emrail

Berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Operasi No. 3 tanggal 3 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Nenden Dewi Anggraeni, S.H., M.Kn., bahwa partisipasi atas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam KSO adalah Perusahaan dan Emrail Sdn. Bhd., masing-masing sebesar 50% dan 50%.

KSO Wijaya Karya Beton – Emrail

Based on Deed of Joint Operation Agreement No. 3 dated 3 February 2017, executed before Notary Nenden Dewi Anggraeni, S.H., M.Kn., that the participation of the rights and obligations of each party in the JV, the Company and Emrail Sdn. Bhd., amounting to 50% and 50%, respectively.

KSO Wijaya Karya Beton – Murni

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi No. PS.03.09/WB-D1.0012/2022 bahwa partisipasi atas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam KSO adalah Perusahaan dan PT Murni Konstruksi Indonesia masing-masing sebesar 51% dan 49%.

KSO Wijaya Karya Beton – Murni

Based on Joint Venture Agreement No. PS.03.09/WB-D1.0012/2022 that the participation of the rights and obligations of each party in the KSO, the Company and PT Murni Konstruksi Indonesia, amounting to 51% and 49%, respectively.

Berdasarkan persetujuan Tahun 2025 No. 001/WB-MKI.KSO/BERITA ACARA-DM/2025 bahwa KSO PT Wijaya Karya Beton Tbk – Murni mendistribusikan keuntungan kepada Perusahaan sebesar Rp280.500.000

Based on approval Year 2025 No. 001/WB-MKI.KSO/BERITA ACARA-DM/2025 that KSO PT Wijaya Karya Beton Tbk – Murni distributed profits to the Company amounting to Rp280,500,000

KSO Wijaya Karya Beton – Kidoh
Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi No. PS.03.09/WB-D1.0010/2022 bahwa partisipasi atas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam KSO adalah Perusahaan dan Kidoh Construction Co. Ltd., masing-masing sebesar 51% dan 49%.

KSO Wijaya Karya Beton – Kidoh
Based on Joint Venture Agreement No. PS.03.09/WB-D1.0010/2022 that the participation of the rights and obligations of each party in the JV, the Company and Kidoh Construction Co., Ltd., amounting to 51% and 49%, respectively.

KSO Wijaya Karya Beton – WIKA
Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi No. PS.01.03/B- WIKA - WITON KSO. BTT2.001.VIII/2025 bahwa partisipasi atas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam KSO adalah Perusahaan dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., masing-masing sebesar 25% dan 75%.

***KSO Wijaya Karya Beton* – WIKA**
Based on Joint Venture Agreement No. PS.01.03/B- WIKA- WITON KSO. BTT2.001.VIII/2025 that the participation of the rights and obligations of each party in the JV, the Company and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., amounting to 25% and 75%, respectively.

Ringkasan informasi keuangan dari ventura bersama Perusahaan ditetapkan di bawah ini:

Summary of financial information of joint venture is as follows:

	KSO Wijaya Karya Beton - Emrail		
	2025 Rp	2024 Rp	
Aset Lancar	3,721,308,950	3,730,104,323	*Current Assets*
Liabilitas Jangka Pendek	534,958,458	550,216,667	*Current Liabilities*
Laba (Rugi) Komprehensif di Tahun Berjalan	(10,957,539)	5,927,409	*Comprehensive Income (Losses) for the Year*

	KSO Wijaya Karya Beton - Murni		
	2025 Rp	2024 Rp	
Aset Lancar	1,930,446,478	2,821,565,247	*Current Assets*
Liabilitas Jangka Pendek	1,912,449,014	2,259,109,282	*Current Liabilities*
Laba (Rugi) Komprehensif di Tahun Berjalan	5,491,534	(2,800,077,334)	*Comprehensive Income (Losses) for the Year*

	KSO Wijaya Karya Beton - Kidoh		
	2025 Rp	2024 Rp	
Aset Lancar	2.098.026.027	19.322.012.523	*Current Assets*
Liabilitas Lancar	1.965.455.706	19.192.602.611	*Current Liabilities*
Laba Komprehensif di Tahun Berjalan	3.210.409	4.114.530	*Comprehensive Income for the Year*

	KSO Wijaya Karya Beton - WIKA		
	2025 Rp	2024 Rp	
Aset Lancar	152,564,608,794	--	*Current Assets*
Liabilitas Jangka Pendek	103,444,443,392	--	*Current Liabilities*
Laba Komprehensif di Tahun Berjalan	35,618,717,950	--	*Comprehensive Income for the Year*

13.b Utang Ventura Bersama / *13.b Joint Venture Payable*

Rincian saldo utang kepada ventura bersama adalah sebagai berikut:

Details of joint venture payables is as follows:

Nama Perusahaan/ *Company Name*	Proyek/ *Project*	Tempat Kedudukan/ *Domicile*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Jumlah tercatat/ *Carrying amount*	
				2025 Rp	2024 Rp
Wijaya Karya Beton - PT Pandji Pratama Indonesia	Pembangunan Pengaman Pantai Jakarta Tahap 3 Paket 2	Jakarta	60%	8,164,356,146	8,166,650,681
KSO Wijaya Karya Beton - STA. Clara	Proyek Metro Manilla Subway Project CP-102	Filipina	40%	15,242,072	--
Jumlah/*Total*				**8,179,598,218**	**8,166,650,681**

Mutasi utang kepada ventura bersama adalah sebagai berikut:

Changes in debt in joint ventures are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Nilai Tercatat Awal Tahun	(8,166,650,681)	(8,168,071,175)	*Carrying Amount at Beginning of the Year*
Bagian Laba (Rugi) Investasi pada Ventura Bersama	(12,947,537)	1,420,494	*Share in Profit (Loss) from Joint Ventures*
Nilai Tercatat Akhir Tahun	**(8,179,598,218)**	**(8,166,650,681)**	***Carrying Amount at Ending of the Year***

KSO Wijaya Karya Beton – PPI
Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi No. 03/WIKA BETON-PPI.KSO/V/2019 bahwa partisipasi atas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam KSO adalah Perusahaan dan PT Pandji Pratama Indonesia, masing-masing sebesar 60% dan 40%.

***KSO Wijaya Karya Beton* – PPI**
Based on Joint Venture Agreement No. 03/WIKA BETON-PPI.KSO/V/2019 that the participation of the rights and obligations of each party in the JV, the Company and PT Pandji Pratama Indonesia, amounting to 60% and 40%, respectively.

KSO Wijaya Karya Beton – STA Clara
Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 6 Maret 2024, bahwa partisipasi atas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam KSO adalah Perusahaan dan STA Clara International Corp., masing-masing sebesar 40% dan 60%.

***KSO Wijaya Karya Beton* – STA Clara**
Based on the Joint Operation Agreement dated 6 March 2024, that the participation of the rights and obligations of each party in the JV, the Company and STA Clara International Corp., amounting to 40% and 60%, respectively.

Ringkasan informasi keuangan dari ventura bersama Perusahaan ditetapkan di bawah ini:

Summary of financial information the joint venture is as follows:

	KSO Wijaya Karya Beton - PPI		
	2025 Rp	2024 Rp	
Aset Lancar	1,023,598,263	1,005,849,743	*Current Assets*
Liabilitas Jangka Pendek	15,380,858,508	15,371,763,992	*Current Liabilities*
Laba Komprehensif di Tahun Berjalan	3,824,225	2,367,490	*Comprehensive Income for the Year*

	KSO Wijaya Karya Beton - STA Clara		
	2025 Rp	2024 Rp	
Aset Lancar	30,075,811,046	--	*Current Assets*
Liabilitas Jangka Pendek	31,553,571,067	--	*Current Liabilities*
Rugi Komprehensif di Tahun Berjalan	(38,105,180)	--	*Comprehensive Losses for the Year*

Perjanjian penting atas investasi ventura bersama diungkapkan pada Catatan 36.

Significant agreement related to joint venture is disclosed on Note 36.

14. Properti Investasi / *14. Investment Properties*

Properti investasi merupakan investasi Perusahaan yang berupa tanah dan bangunan yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga jual dan hasil sewa. Metode pengukuran setelah pengakuan awal menggunakan pendekatan nilai wajar.

Investment properties represents the Company's land and buildings that are intended to gain any profit from incremental of market value and rent revenue. Method of measurement after initial recognition is using the fair value approach.

Mutasi properti investasi adalah sebagai berikut:

The movements of the investment properties are as follows:

	2025					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	*Penambahan/ Addition* Rp	Pengurangan/ *Deduction* Rp	Kenaikan (Penurunan) Nilai Wajar/ *Increase (Decrease) in Fair Value* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Nilai Wajar						***At Fair Value***
Tanah	93,594,676,000	--	--	758,424,000	94,353,100,000	*Land*
Bangunan dan Prasarana	97,963,480,000	--	--	1,824,596,000	99,788,076,000	*Building and Infrastructure*
Total	**191,558,156,000**	**--**	**--**	**2,583,020,000**	**194,141,176,000**	***Total***

	2024					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	*Penambahan/ Addition* Rp	Pengurangan/ *Deduction* Rp	Kenaikan (Penurunan) Nilai Wajar/ *Increase (Decrease) in Fair Value* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Nilai Wajar						***At Fair Value***
Tanah	93,807,576,000	--	--	(212,900,000)	93,594,676,000	*Land*
Bangunan dan Prasarana	95,155,200,000	2,583,380,000	--	224,900,000	97,963,480,000	*Building and Infrastructure*
Total	**188,962,776,000**	**2,583,380,000**	**--**	**12,000,000**	**191,558,156,000**	***Total***

Penambahan properti investasi di tahun 2024 sebesar Rp2.583.380.000 merupakan hasil konversi atas sebagian piutang usaha WPG kepada PT Samudra Bangun Raya dengan ruko yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat.

The addition of investment properties in 2024 amounting to Rp2,583,380,000 is the result of the conversion of part of WPG's trade receivables to PT Samudra Bangun Raya.

Berikut adalah nama Penilai, dan tanggal laporan penilaian atas perhitungan nilai wajar beberapa properti investasi pada 31 Desember 2025:

The following are the name of the Valuer, and the dates of the appraisal report on calculation of the fair value of some investment properties as of December 31, 2025:

Nama Penilai/ *Name of Valuer*	Partner/ *Partner/*	Tanggal Penilaian/ *Valuation date*	Objek/ *Object*
Perusahaan/ *The Company*			
Toto Suharto dan Rekan	Hery Wahyudianto, S.T., MAPPI (Cert.)	1 Sep 2025/ *Sep 1, 2025*	Unit Ruko di Bogor/ *Shop House Unit in Bogor*
Toto Suharto dan Rekan	Hery Wahyudianto, S.T., MAPPI (Cert.)	1 Sep 2025/ *Sep 1, 2025*	Tanah Bangunan Kantor/ *Office Building Land*
Toto Suharto dan Rekan	Hery Wahyudianto, S.T., MAPPI (Cert.)	1 Sep 2025/ *Sep 1, 2025*	Tanah Bangunan Rumah Tinggal/ *Residential Building Land*
Toto Suharto dan Rekan	Hery Wahyudianto, S.T., MAPPI (Cert.)	1 Sep 2025/ *Sep 1, 2025*	Unit Kantor Tamansari Hive Office/ *Tamansari Hive Office Unit*
Toto Suharto dan Rekan	Hery Wahyudianto, S.T., MAPPI (Cert.)	1 Sep 2025/ *Sep 1, 2025*	Unit Apartemen The Wave/ *The Wave Apartment Unit*
Toto Suharto dan Rekan	Hery Wahyudianto, S.T., MAPPI (Cert.)	1 Sep 2025/ *Sep 1, 2025*	Tanah Kosong Tegal/ *Vacant Land in Tegal*
Toto Suharto dan Rekan	Hery Wahyudianto, S.T., MAPPI (Cert.)	1 Sep 2025/ *Sep 1, 2025*	Tanah Kosong di Semarang/ *Vacant Land in Semarang*
Toto Suharto dan Rekan	Hery Wahyudianto, S.T., MAPPI (Cert.)	1 Sep 2025/ *Sep 1, 2025*	Kawasan Perumahan/ *Residential Area*
Entitas Anak/ *Subsidiaries*			
Toto Suharto dan Rekan	Hery Wahyudianto, S.T., MAPPI (Cert.)	1 Sep 2025/ *Sep 1, 2025*	Unit Ruko Pasar Bogor/ *Shop Pasar Bogor Unit*
Toto Suharto dan Rekan	Hery Wahyudianto, S.T., MAPPI (Cert.)	1 Sep 2025/ *Sep 1, 2025*	Tanah Kavling di Cilegon/ *Land Plot in Cilegon*

Pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan nilai wajar properti adalah pendekatan pendapatan, pendekatan pasar dan pendekatan biaya. Grup menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode arus kas terdiskonto yang telah didukung oleh bukti pasar.

Approaches that can be used in determining the fair value of property are the income approach, market approach and the cost approach. The Group uses the income approach with the discounted cash flow method which has been supported by market evidence.

Hierarki nilai wajar untuk properti investasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 menggunakan hierarki nilai wajar Tingkat 2.

Fair value measurement of investment properties as at December 31, 2025 and 2024 were using fair value hierarchy Level 2.

Pendapatan sewa dan beban pokok pendapatan dari properti investasi pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rental income and cost of revenues from investment property at December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Pendapatan Sewa	535,375,627	2,334,027,302	*Rental Income*
Beban Pokok Pendapatan	53,537,563	233,402,730	*Cost of Revenues*

15. Aset Hak Guna – Bersih / *15. Right-of-Use Assets - Net*

Rincian aset hak-guna adalah sebagai berikut:

Details of right of use assets are as follows:

	2025					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Saldo Akhir/ *Ending balance* Rp	
Aset Hak Guna						***Right-of-Use-Assets***
Peralatan	--	--	--	--	--	*Plant Equipment*
Bangunan	41,061,106,218	--	(41,061,106,218)	--	--	*Building*
Jumlah	**41,061,106,218**	**--**	**(41,061,106,218)**	**--**	**--**	***Total***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Peralatan	--	--	--	--	--	*Plant Equipment*
Bangunan	33,585,144,259	7,475,961,959	(41,061,106,218)	--	--	*Building*
Jumlah	**33,585,144,259**	**7,475,961,959**	**(41,061,106,218)**	**--**	**--**	***Total***
Nilai Tercatat	**7,475,961,959**				**--**	***Carrying Value***

	2024					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Saldo Akhir/ *Ending balance* Rp	
Aset Hak Guna						***Right-of-Use-Assets***
Peralatan	--	--	--	--	--	*Plant Equipment*
Bangunan	33,532,255,146	7,528,851,072	--	--	41,061,106,218	*Building*
Jumlah	**33,532,255,146**	**7,528,851,072**	**--**	**--**	**41,061,106,218**	***Total***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Peralatan	--	--	--	--	--	*Plant Equipment*
Bangunan	26,155,317,499	7,429,826,760	--	--	33,585,144,259	*Building*
Jumlah	**26,155,317,499**	**7,429,826,760**	**--**	**--**	**33,585,144,259**	***Total***
Nilai Tercatat	**7,376,937,647**				**7,475,961,959**	***Carrying Value***

Aset hak guna bangunan merupakan hak guna atas ruang kantor yang berada di WIKA Tower 1 di Jakarta.

Right-of-use assets building represents right-of-use of office space located at WIKA Tower 1 in Jakarta.

Beban penyusutan dialokasikan ke beban pokok pendapatan dan beban administrasi dan umum dengan rincian sebagai berikut:

Depreciation expenses allocated to cost of revenues and general and administrative expenses, with the details are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Beban Pokok Pendapatan	--	--	*Cost of Revenues*
Beban Usaha	7,475,961,959	7,429,826,760	*Operating Expenses*
Jumlah	**7,475,961,959**	**7,429,826,760**	***Total***

Perjanjian sewa atas ruang kantor di WIKA Tower 1 Jakarta berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tidak diperpanjang, sehingga Perusahaan tidak lagi menggunakan aset hak guna terkait sejak tanggal tersebut.

The lease agreements for office spaces at WIKA Tower 1 in Jakarta expired on December 31, 2025 and were not renewed thereafter.

16. Aset Tetap / *16. Fixed Asset*

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: / *Details of fixed assets is as follows:*

	2025					
	Saldo Awal/ *Beginning balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Saldo Akhir/ *Ending balance* Rp	
Harga Perolehan						***Acquisition Cost***
Kepemilikan Langsung						***Direct Ownership***
Tanah	1,620,007,720,233	--	--	--	1,620,007,720,233	*Land*
Tambang	60,329,605,327	--	--	--	60,329,605,327	*Mining*
Prasarana	471,044,615,347	3,052,760,650	--	--	474,097,375,997	*Infrastructures*
Bangunan	312,932,479,559	--	--	--	312,932,479,559	*Buildings*
Perlengkapan Kantor	47,450,466,317	4,476,844,608	--	--	51,927,310,925	*Office Equipment*
Peralatan	1,873,484,477,833	383,981,034	(58,979,253,527)	483,777,523	1,815,372,982,863	*Plant Equipment*
Cetakan	772,020,439,890	418,412,065	(94,741,536)	--	772,344,110,419	*Mold*
Jumlah	**5,157,269,804,506**	**8,331,998,357**	**(59,073,995,063)**	**483,777,523**	**5,107,011,585,323**	***Total***
Aset Tetap Dalam Pembangunan						***Construction in Progress***
Tanah	47,460,000	225,000,000	--	--	272,460,000	*Land*
Perlengkapan Kantor	--	3,764,394,537	--	--	3,764,394,537	*Office Equipment*
Peralatan	483,777,523	78,000,000	--	(483,777,523)	78,000,000	*Plant Equipment*
Cetakan	--	1,953,750,000	--	--	1,953,750,000	*Mold*
Jumlah	**531,237,523**	**6,021,144,537**	**--**	**(483,777,523)**	**6,068,604,537**	***Total***
Akumulasi Deplesi						***Accumulated Depletion***
Tambang	**11,777,499,691**	**--**	**--**	**--**	**11,777,499,691**	*Mine*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Prasarana	286,368,857,246	16,357,122,304	--	--	302,725,979,550	*Infrastructures*
Bangunan	117,570,954,045	5,739,573,841	--	--	123,310,527,886	*Buildings*
Perlengkapan Kantor	22,934,443,153	8,704,541,843	--	--	31,638,984,996	*Office Equipment*
Peralatan	1,326,924,149,704	68,501,052,729	(58,786,845,721)	--	1,336,638,356,712	*Plant Equipment*
Cetakan	384,509,618,928	33,483,172,219	(94,716,536)	--	417,898,074,611	*Mold*
Jumlah	**2,138,308,023,076**	**132,785,462,936**	**(58,881,562,257)**	**--**	**2,212,211,923,755**	***Total***
Nilai Tercatat	**3,007,715,519,262**				**2,889,090,766,414**	***Carrying Value***

	2024					
	Saldo Awal/ *Beginning balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Saldo Akhir/ *Ending balance* Rp	
Harga Perolehan						***Acquisition Cost***
Kepemilikan Langsung						***Direct Ownership***
Tanah	1,620,007,720,233	--	--	--	1,620,007,720,233	*Land*
Tambang	60,329,605,327	--	--	--	60,329,605,327	*Mining*
Prasarana	467,147,438,372	3,985,587,586	--	(88,410,611)	471,044,615,347	*Infrastructures*
Bangunan	312,061,357,525	841,065,090	(58,353,667)	88,410,611	312,932,479,559	*Buildings*
Perlengkapan Kantor	40,724,378,438	7,729,428,789	(1,003,340,910)	--	47,450,466,317	*Office Equipment*
Peralatan	1,850,357,874,670	28,545,830,333	(13,854,471,743)	8,435,244,573	1,873,484,477,833	*Plant Equipment*
Cetakan	671,173,157,456	102,407,337,326	(1,560,054,892)	--	772,020,439,890	*Mold*
Jumlah	**5,021,801,532,021**	**143,509,249,124**	**(16,476,221,212)**	**8,435,244,573**	**5,157,269,804,506**	***Total***
Aset Tetap Dalam Pembangunan						***Construction in Progress***
Tanah	--	47,460,000	--	--	47,460,000	*Land*
Tambang	6,050,805,996	--	(6,050,805,996)	--	--	*Mine*
Peralatan	8,435,244,573	483,777,523	--	(8,435,244,573)	483,777,523	*Plant Equipment*
Jumlah	**14,486,050,569**	**531,237,523**	**(6,050,805,996)**	**(8,435,244,573)**	**531,237,523**	***Total***
Akumulasi Deplesi						***Accumulated Depletion***
Tambang	**11,777,499,691**	**--**	**--**	**--**	**11,777,499,691**	*Mine*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Prasarana	269,267,596,130	17,189,670,816	--	(88,409,700)	286,368,857,246	*Infrastructures*
Bangunan	111,869,820,245	5,671,076,767	(58,352,667)	88,409,700	117,570,954,045	*Buildings*
Perlengkapan Kantor	16,346,260,939	7,591,326,348	(1,003,144,134)	--	22,934,443,153	*Office Equipment*
Peralatan	1,266,685,019,555	72,805,472,669	(12,566,342,520)	--	1,326,924,149,704	*Plant Equipment*
Cetakan	356,876,080,296	29,193,481,524	(1,559,942,892)	--	384,509,618,928	*Mold*
Jumlah	**2,021,044,777,165**	**132,451,028,124**	**(15,187,782,213)**	**--**	**2,138,308,023,076**	***Total***
Nilai Tercatat	**3,003,465,305,734**				**3,007,715,519,262**	***Carrying Value***

Beban penyusutan dan deplesi dialokasikan ke beban pokok pendapatan dan beban administrasi dan umum dengan rincian sebagai berikut:

Depreciation and depletion expenses allocated to cost of revenues and general and administrative expenses, with the details are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 34)	113,934,904,884	116,242,856,167	*Cost of Revenues (Note 34)*
Beban Usaha (Catatan 35)	18,850,558,052	16,208,171,957	*Operating Expenses (Note 35)*
Jumlah	**132,785,462,936**	**132,451,028,124**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp674.203.221.663 dan Rp620.775.334.447.

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has fixed assets with acquisition cost that have been fully depreciated and still in use amounted to Rp674.203.221.663 and Rp620,775,334,447, respectively.

Perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan atas nilai tercatat aset tetap tersebut.

The Company believe that there has been no impairment in the carrying amount of fixed assets.

Perhitungan keuntungan penjualan aset tetap berupa peralatan dan alat cetakan dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

The calculation of gain on sale of fixed assets in the form of equipment and molds in the income statement are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Harga Jual	1,194,371,873	1,529,825,000	*Selling Price*
Nilai Buku	192,432,806	52,122,472	*Book Value*
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	**1,001,939,067**	**1,477,702,528**	***Gain on Sale of Sale of Fixed Assets***

Perusahaan memiliki aset tambang galian C seluas 1.213.000 m² untuk batu split yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Lampung Selatan. Pemenuhan perijinan untuk masing-masing aset tambang antara lain:

a. Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat tanggal 22 September 2023 No. 81202112716430036 tentang Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 43.34 (empat puluh tiga koma tiga puluh empat) Hektar dengan komoditas batu hias dan batu bangunan.
b. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah No. 540/700/IUP-OP/DPMPTSP/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 20 (dua puluh) Hektar dengan komoditas batu andesit.

The Company has a mining asset types Pit C with area 1,213,000 sqm of split stone which are located in District Bogor, District Donggala and District South Lampung. Fulfillment of licensing for each of these assets include:

a. Decree of the Head of DPMPTSP West Java Province dated September 22, 2023 No. 81202112716430036 concerning Approval of the Granting of a Mining Business Permit (WIUP) area of 43.34 (forty-three point thirty-four) Hectares with decorative stone and building stone commodities.
b. Decree of the Head of the Central Sulawesi Province One Stop Investment and Integrated Services No. 540/700/IUP-OP/DPMPTSP/2018 dated December 31, 2018 concerning Approval of the Granting of Mining Business Permits (WIUP) covering an area of 20 (twenty) Hectares with stone commodities andesite.

c. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung No. 540/2347/KEP/V.16/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 60 (enam puluh) Hektar dengan komoditas batu andesit.

c. Decree of the Head of the Lampung Province One Stop Investment and Integrated Services Service No. 540/2347/KEP/V.16/2019 dated February 28, 2019 concerning Approval of the Granting of a Mining Business Permit (WIUP) area of 60 (sixty) Hectares with stone commodities andesite.

Aset dalam pembangunan tanah, tambang, bangunan, prasarana, dan peralatan merupakan aset atas pembangunan pabrik baru, penambangan batu, perluasan pabrik *existing* maupun penambahan prasarana dan peralatan.

Construction in progress of mine, buildings, infrastructure, and equipment are assets for the construction of new factories, stone mining, expansion of existing factories, and also an increase in infrastructure and plant equipment.

Pada 31 Desember 2025, tingkat penyelesaian aset tetap dalam pembangunan Perusahaan, khususnya perlengkapan kantor telah mencapai 70%, peralatan dan cetakan telah mencapai 90% dan diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Manajemen menyatakan tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset tetap dalam pembangunan tersebut.

As of 31 December 2025, the Company's construction in progress, particularly office equipment has reached 70%, equipment and molds has reached 90% completion and is expected to be completed within 12 (twelve) months from the reporting date. Management represents that there are no circumstances that may materially affect the completion of such construction in progress.

Aset tetap yang dijadikan jaminan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank) (Catatan 18) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 27, 40, dan 41) adalah sebagai berikut:

Fixed assets used as collateral to Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank) (Notes 18) and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Notes 27, 40, and 41) are as follows:

Jaminan/ ***Collateral***	**Aset Jaminan/** ***Collateral Asset's***	**Lokasi Aset/** ***Asset's Location***
Pabrik Produksi Beton KIW Bogor/ *Concrete Production Plant KIW Bogor*	Tanah dan bangunan serta sarana pelengkap di atasnya/ *Land and buildings and supporting facilities thereon*	Bogor, Jawa Barat/ *Bogor, West Java*
Pabrik Produksi Beton Makassar/ *Concrete Production Plant - Makassar*	Tanah dan bangunan serta sarana pelengkap di atasnya/ *Land and buildings and supporting facilities thereon*	Makassar, Sulawesi Selatan/ *Makassar, South Sulawesi*
Pabrik Produksi Beton Lampung Selatan/ *Concrete Production Plant - South Lampung*	Tanah dan bangunan serta sarana pelengkap di atasnya/ *Land and buildings and supporting facilities thereon*	Lampung Selatan/ *South Lampung*
Pabrik Produksi Beton Pasuruan I/ *Concrete Production Plant - Pasuruan I*	Tanah dan bangunan serta sarana pelengkap di atasnya/ *Land and buildings and supporting facilities thereon*	Pasuruan, Jawa Timur/ *Pasuruan, East Java*
Pabrik Produksi Beton Pasuruan II/ *Concrete Production Plant - Pasuruan II*	Tanah dan bangunan serta sarana pelengkap di atasnya/ *Land and buildings and supporting facilities thereon*	Pasuruan, Jawa Timur/ *Pasuruan, East Java*
Pabrik Produksi Beton KIMA Makassar/ *Concrete Production Plant KIMA Makassar*	Tanah dan bangunan serta sarana pelengkap di atasnya/ *Land and buildings and supporting facilities thereon*	Makassar, Sulawesi Selatan/ *Makassar, South Sulawesi*
Tanah di Batu Besar Batam/ *Land in Batu Besar Batam*	Tanah/ *Land*	Batam, Kepulauan Riau/ *Batam, Riau Islands*

Aset tetap Perusahaan kecuali tanah telah diasuransikan dengan polis Standar Kebakaran Indonesia pada 31 Desember 2025 dan 2024 dengan nilai pertanggungan asuransi sebesar Rp894.705.436.054 dan Rp906.202.011.976.

The fixed asset of the Company, excepts land, are covered by Indonesian Fire Standard Policy on December 31, 2025 and 2024 with insurance coverage amounting to Rp894,705,436,054 and Rp906,202,011,976, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Management believes that insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

17. Aset Tidak Lancar / *17. Other Non- Current Assets*

17.a Investasi Jangka Panjang Lainnya / *17.a Other Long Term Investment*

Investasi jangka panjang lainnya sebagai berikut:

Other long-term investments are as follows:

	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*		Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	
	2025	2024	2025	2024
	%	%	Rp	Rp
PT Wege Solusi Proklamasi	10.00%	10.00%	2,500,000,000	2,500,000,000
PT Waskita Beton Precast Tbk	0.95%	0.00%	3,643,595,743	--
PT Istaka Karya (Persero)*	3.28%	3.28%	--	--
Jumlah / *Total*			**6,143,595,743**	**2,500,000,000**

*Saham Seri C/ *C Series Share*

PT Istaka Karya (Persero)

Berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 23/ PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.jo pada Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 2013, dan telah mendapat persetujuan Debitur dan Kreditur. Saldo utang kreditur konkuren di konversi menjadi *equity* (penyertaan saham sementara).

Saham yang dikeluarkan untuk konversi utang adalah saham tanpa hak suara dan untuk ditarik kembali pada saat posisi saldo akumulasi Laba Perusahaan Positif atau diproyeksikan pada tahun ke-8. Selama utang menjadi *equity* dan saldo akumulasi laba masih negatif tidak ada pembagian dividen. Saham ditarik kembali sekaligus tahun ke-9 menjadi utang senilai saldo utang saat konversi. Pembayaran utang dilakukan secara bertahap sampai dengan maksimal 5 tahun.

Berdasarkan Akta No. 6 Tanggal 25 Januari 2019 tentang Penegasan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Istaka Karya (Persero) yang dibuat di hadapan di hadapan Siti Listiani, S.H., MKn. Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0187081 tanggal 4 April 2019. Saham Seri C adalah saham konversi utang PT Istaka Karya (Persero) kepada kreditur konkuren merupakan saham yang bersifat sementara, dapat ditarik kembali, tanpa hak suara dalam RUPS, dan tidak berhak atas dividen.

PT Istaka Karya (Persero)

Based on the Ratification of Settlement Decision (Homologation) No. 23/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST in conjunction with the Commercial Court at the Central Jakarta District Court dated January 22, 2013, and having obtained approval from both the Debtor and Creditors, the outstanding balance of concurrent creditors' debt has been converted into equity (temporary shareholding).

The shares issued for debt conversion are non-voting shares and are intended to be repurchased once the Company's retained earnings balance becomes positive or is projected to do so in the eighth year. As long as the debt remains converted into equity and the retained earnings balance remains negative, no dividends shall be distributed. The shares will be repurchased in the ninth year and reclassified as debt at the same value as the debt at the time of conversion. The repayment of this debt will be carried out in stages over a maximum period of five years.

Based on Deed No. 6 dated January 25, 2019, regarding the Affirmation of the Decision of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Istaka Karya (Persero), executed before Siti Listiani, S.H., MKn., Notary in South Jakarta, and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-AH.01.03-0187081 dated April 4, 2019, Series C shares represent the debt-to-equity conversion shares of PT Istaka Karya (Persero) to concurrent creditors. These shares are temporary in nature, subject to redemption, do not carry voting rights in the General Meeting of Shareholders, and are not entitled to dividends.

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penegasan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Istaka Karya (Persero) yang dibuat di hadapan Notaris Sita Listiani, S.H., MKn. di Jakarta menyatakan bahwa sebagai tindak lanjut adanya konversi utang PT Istaka Karya (Persero) kepada kreditur menjadi saham senilai Rp21.419.000.000.

Based on Deed No. 3 dated October 3, 2019, regarding the Affirmation of the Decision of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Istaka Karya (Persero), executed before Notary Sita Listiani, S.H., MKn., in Jakarta, it was stated that, as a follow-up to the debt-to-equity conversion of PT Istaka Karya (Persero) to creditors, shares amounting to Rp21,419,000,000 were issued.

Investasi Perusahaan pada PT Istaka Karya (Persero) dinyatakan berdasarkan nilai wajarnya. Terakhir dilakukan penilaian berdasarkan laporan penilai independen Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputri, Dewi Apriyanti dan Rekan tertanggal 10 Februari 2022.

The Company's investment in PT Istaka Karya (Persero) is based on its fair value. The most recent valuation was conducted based on the report from the independent appraiser, Nirboyo Adiputri, Dewi Apriyanti, and Partners Public Appraisal Services Office, dated February 10, 2022.

Pengukuran nilai wajar untuk saham seri C PT Istaka Karya (Persero) menggunakan metode pendekatan pendapatan serta dikelompokan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The fair value measurement of Series C shares of PT Istaka Karya (Persero) was conducted using the income approach method and classified as financial assets measured at fair value through profit or loss.

PT Wege Solusi Proklamasi
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (Entitas Anak) melakukan investasi pada PT Wege Solusi Proklamasi untuk selanjutnya disebut dengan WSP yang didirikan di Jakarta dengan Akta No. 85 tanggal 28 Mei 2019 ("Akta No. 85"), dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Investasi PT Wijaya Karya Pracetak Gedung sebesar Rp2.500.000.000.

PT Wege Solusi Proklamasi
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (Subsidiary Company) invested in PT Wege Solusi Proklamasi hereinafter referred to as WSP which was established in Jakarta with Deed No. 85 dated 28 May 2019 ("Deed No. 85"), drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. The investment of PT Wijaya Karya Pracetak Gedung is Rp2,500,000,000.

PT Waskita Beton Precast Tbk
Berdasarkan Putusan Berita Acara Kesepakatan (Perjanjian Homologasi) No. SE.02.01/WB-035/2025 pada tanggal 25 Juni 2025. Saldo utang kreditur konkuren dikonversi menjadi aset tidak lancar (investasi jangka panjang lainya) sebesar Rp7.920.860.309. Perusahaan telah melakukan evaluasi kembali nilai wajarnya Pada 31 Desember 2025 berdasarkan informasi yang didapat dari pasar saham menjadi Rp3.643.595.743.

PT Waskita Beton Precast
PT Waskita Beton Precast Tbk Based on the decision of the Minutes of Agreements (Homologation Agreement) No. SE.02.01/WB-035/2025 on June 25, 2025. The outstanding balance of concurrent creditors was converted into non-current assets (other long-term investments) amounting to Rp7,920,860,309. The Company re-evaluated its fair value as of December 31, 2025, based on information obtained from the stock market, resulting in a value of Rp3,643,595,743.

17.b Aset Tidak Lancar Lainnya
Aset tidak lancar lainnya pada tahun 2025 merupakan dana yang dibatasi penggunaannya pada rekening deposito terkait dengan fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp22.655.700.000 (Catatan 27).

17.b Other Non - Current Assets
Other non-current assets in 2025 represent restricted funds in deposit accounts related to the credit facility obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp22,655,700,000 (Note 27).

Aset tidak lancar lainnya pada tahun 2024 merupakan dana yang dibatasi penggunaannya pada rekening giro terkait dengan pinjaman atas Fasilitas Pembiayaan Investasi iB dari PT Bank CIMB Niaga Tbk serta dana yang dibatasi penggunaannya pada rekening deposito terkait dengan fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp50.874.310.552 (Catatan 27).

Other non-current assets in 2024 represent restricted funds in current accounts related to the iB Investment Financing Facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk and restricted funds in deposit accounts related to the credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp50,874,310,552 (Note 27).

18. Pinjaman Jangka Pendek / *18. Short-Term Loan*

Rincian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

Details of the credit facility are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Entitas Anak/ *Subsidiary*		
PT Citra Lautan Teduh		
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	10,017,009,920	--
Subjumlah/ *Subtotal*	**10,017,009,920**	**--**
Jumlah/ *Total*	**10,017,009,920**	**--**

Entitas Anak

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank Indonesia)

Pada tanggal 20 Juni 2025, PT Citra Lautan Teduh (CLT) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) mengadakan Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor ("KMKE") dengan nilai plafon pembiayaan sebesar Rp60.000.000.000 dan Fasilitas Penjaminan dengan nilai maksimal pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000. Jangka waktu fasilitas KMKE adalah 12 bulan sejak tanggal perjanjian dan dikenakan bunga *JIBOR 3 Months* (3M) + 1,78% *per annum*. Fasilitas pinjaman KMKE ini digunakan untuk percepatan pembayaran piutang usaha debitur kepada pemberi kerja untuk proyek luar negeri yang berorientasi ekspor dan/ atau penunjangan ekspor.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang, persediaan, tanah dan bangunan (Catatan 5, 9, dan 16).

CLT diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

a. *Current Ratio* minimal sebesar 100%;
b. *Debt to Equity Ratio* maksimal 300%; dan
c. *Debt Service Coverage Ratio* minimal

Subsidiary

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank)

On June 20, 2025, PT Citra Lautan Teduh (CLT) and Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) entered into a Working Capital Export Credit Facility Agreement ("KMKE") with a financing limit (plafond) of Rp60,000,000,000 and a Guarantee Facility with a maximum financing limit of Rp10,000,000,000. The term of the KMKE facility is 12 months from the agreement date and it bears interest at JIBOR 3 Months (3M) + 1.78% per annum. This KMKE loan facility is used to accelerate the payment of the Debtor's trade receivables from the employer for overseas projects with an export orientation and/or to support export activities.

The loan is pledged by receivebles, inventories, land and building (Notes 5, 9 and 16).

CLT is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

a. Current Ratio minimum of 100%;
b. Debt to Equity Ratio maximum of 300%; and
c. Debt Service Coverage Ratio minimum

100%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, CLT telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank).

Pencairan pinjaman baru di tahun berjalan sebesar Rp30.065.689.600. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp20.048.679.680, sehingga saldo pada 31 Desember 2025 adalah Rp10.017.009.920.

of 100%.

As of December 31, 2025, CLT has complied all the terms and conditions required by Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank).

Total drawdown of loans in current year amounted to Rp30,065,689,600. Payment of the loan in the current year amounted to sebesar Rp20,048,679,680, thus the balance as December 31, 2025 is Rp10.017.009.920.

19. Liabilitas Sewa / *19. Lease Liabilities*

Jadwal pembayaran sewa minimum berdasarkan perjanjian sewa Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The future minimum lease payments required under the company's outstanding lease agreements as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Kurang dari 1 tahun	--	7,761,851,873	*Less Than 1 year*
Antara 1-3 tahun	--	--	*Between 1 - 3 years*
Jumlah	**--**	**7,761,851,873**	***Total***
Dikurangi bagian bunga	--	(1,195,767,350)	*Less amount applicable to interest*
Nilai kini Pembayaran sewa minimum	**--**	**6,566,084,523**	***Present value of minimum lease payment***
Dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun	--	(6,566,084,523)	*Less current maturities*
Bagian Jangka Panjang	**--**	**--**	***Long- term maturities***

Berikut ini ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa:

The following summarizes the component of changes in the liabilities arising from leases:

	2025	2024	
Saldo Awal	**6,566,084,523**	**7,911,096,170**	***Beginning Balance***
Arus Kas	(7,132,444,849)	(9,613,010,992)	*Cash Flow*
Perubahan Nonkas			*Non-Cash Changes*
Penambahan Liabilitas Sewa	--	7,528,851,072	*Additions of Lease Liabilities*
Penambahan Bunga	566,360,326	739,148,273	*Additions of Interest*
Saldo Akhir	**--**	**6,566,084,523**	***Ending Balance***

20. Utang Usaha / *20. Trade Payables*

Rincian utang usaha berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

Details of account payables by type are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Utang Pemasok	967,322,481,448	1,310,550,977,360	*Supplier Payables*
Utang Subkontraktor	317,746,690,963	370,151,175,466	*Subcontractors Payables*
Utang Investasi	1,064,309,300	37,300,728,103	*Investment Payables*
Utang Usaha			*Supply Chain*
Supply Chain Financing	139,238,002,690	256,009,269,094	*Financing Payable*
Total	**1,425,371,484,401**	**1,974,012,150,023**	**Total**

Utang subkontraktor merupakan utang kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang di subkontraktorkan, seperti pekerjaan *stressing*, pemasangan, biaya angkut, penurunan *beam*, biaya pematokan dan lain-lain.

Subcontractor payables represent payable third party for work at subcontractor, such as stressing, installation, freight costs, reduction in beam, and peg the cost of others.

Utang pemasok merupakan utang atas pembelian bahan baku untuk pelaksanaan pekerjaan/proyek, seperti pembelian semen, pasir, besi, plat sambung dan lain-lain.

Supplier payables represent payable on the purchase of raw materials for the execution of the work / project, such as the purchase of cement, sand, iron, connecting plate etc.

Utang investasi digunakan untuk pembelian aset tetap.

Investment payables are used to purchase of fixed assets.

Utang usaha *Supply Chain Financing* merupakan utang atas fasilitas *Non Cash Loan* Perusahaan kepada bank mitra (Catatan 40 dan 41).

Supply Chain Financing Payables represent payable on the Company's Non Cash Loan facility to partner banks (Notes 40 and 41).

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang asing:

Details of account payables based on foreign currency:

	2025 Rp	2024 Rp	
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Rupiah	307,154,770,074	423,068,116,663	*Rupiah*
Subjumlah	**307,154,770,074**	**423,068,116,663**	***Subtotal***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Rupiah	1,118,216,714,327	1,550,944,033,360	*Rupiah*
Subjumlah	**1,118,216,714,327**	**1,550,944,033,360**	***Subtotal***
Jumlah	**1,425,371,484,401**	**1,974,012,150,023**	***Total***

Rincian umur utang usaha dihitung sejak tanggal faktur diterima adalah sebagai berikut:

The aging accounts payable is calculated from the date of invoice have been received are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Belum Jatuh Tempo	253,244,051,666	447,684,107,179	*Current Due*
Lewat Jatuh Tempo :			*Overdue :*
> 1 - 60 hari	348,733,237,375	602,218,121,418	*> 1 - 60 days*
> 61 - 150 hari	280,112,304,452	426,544,118,680	*> 61 - 150 days*
> 151 - 360 hari	266,019,881,972	359,084,088,524	*> 151 - 360 days*
> Lebih dari 360 hari	277,262,008,936	138,481,714,222	*> Over 360 days*
Jumlah	**1,425,371,484,401**	**1,974,012,150,023**	***Total***

Rincian utang usaha kepada pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Details of account payables to related and third parties are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Pihak Berelasi	307,154,770,074	423,068,116,663	*Related Parties*
Pihak Ketiga	1,118,216,714,327	1,550,944,033,360	*Third Parties*
Jumlah	**1,425,371,484,401**	**1,974,012,150,023**	***Total***

Rincian utang usaha berdasarkan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Details of trade payables based on related parties are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
Utang Pemasok/ *Supplier Payable*		
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	73,081,210,364	79,437,043,055
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	20,202,046,854	18,000,000,000
PT Krakatau Baja Konstruksi	14,861,749,077	18,543,231,310
Koperasi Karyawan WIKA Beton Pasuruan	11,876,442,291	8,448,318,994
Lain-Lain (masing-masing di bawah Rp10 Miliar)/ *Others (each below Rp10 Billion)*	27,507,434,467	19,794,806,535
Subjumlah/ *Subtotal*	**147,528,883,053**	**144,223,399,894**
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
Utang Subkontraktor/ *Subcontractors Payable*		
PT Pindad (Persero)	13,404,162,819	9,037,502,561
Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp 5 Miliar)/ *Others (Each below Rp5 Billion)*	6,983,721,512	13,797,945,114
Subjumlah/ *Subtotal*	**20,387,884,331**	**22,835,447,675**
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
Utang Usaha - *Supply Chain Financing* (Catatan 40 dan 41)/ *Supply Chain Financing Payables (Notes 40 and 41)*		
Perusahaan/ *The Company*	139,238,002,690	197,788,221,254
Entitas Anak/ *Subsidiaries*	--	58,221,047,840
Subjumlah/ *Subtotal*	**139,238,002,690**	**256,009,269,094**
Jumlah/ *Total*	**307,154,770,074**	**423,068,116,663**

Rincian utang usaha berdasarkan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

The details of trade payables based on third parties are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Utang Pemasok/ *Supplier Payable*		
PT Intiroda Makmur	57,870,348,950	101,949,282,405
PT Indocement Tunggal Prakarsa	54,863,540,839	53,382,462,580
PT Sumber Urip Sejati	52,765,765,229	67,275,364,167
PT Sumiden Serasi Wire Products	49,150,197,400	104,124,737,260
PT Intisumber Bajasakti	47,856,519,683	57,055,469,261
PT Kingdom Indah	31,861,708,700	94,890,888,399
PT Berkat Jaya Kontruksi	28,284,341,330	7,204,863,875
PT Sinar Indah Perkasa	16,237,364,220	17,146,956,280
PT Jui Shin Indonesia	13,312,856,450	12,919,823,050
PT Multi Guna Rejeki	13,001,484,300	6,075,000,000
CV Delta Mas	12,021,774,996	1,034,658,567
CV Ciwaringin	11,650,748,364	16,228,743,190
PT Besar Perkasa Sakti	11,350,887,360	12,608,704,512
PT Kabatama Raya	11,073,542,750	18,790,095,050
CV Bohlindo Teknik	10,554,195,186	23,495,959,226
PT Sinar IndahJaya Kencana	10,123,151,497	10,930,194,380
PT Multi Max Indonesia	10,061,625,000	11,875,225,000
CV Berkat Cahaya Agung	7,019,876,165	12,097,847,512
PT Dragon Trade Indonesia	4,149,249,300	15,353,956,648
Lain-Lain (masing-masing di bawah Rp10 Miliar)/ *Others (each below Rp10 Billion)*	366,584,420,676	521,887,346,104
Subjumlah/ *Subtotal*	**819,793,598,395**	**1,166,327,577,466**

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Utang Subkontraktor/ *Subcontractors Payable*		
PT Sinar Bahari Mas	34,005,866,332	25,091,040,927
PT Redja Abadi Persada	26,200,872,793	27,893,746,105
CV Rifqa Mandiri	24,228,424,265	30,775,658,598
PT Luthfi Arya Tehnik	14,526,475,919	10,444,529,439
PT Putra Delta Abadi	10,552,628,963	17,288,318,289
CV Biru Langit Prakoso	9,253,665,140	10,849,619,670
PT Sumber Laut Transport	6,517,934,819	5,013,727,354
PT Sino Persada Indonesia	5,711,979,774	5,283,676,491
PT Sima Trans Indonesia	5,378,958,218	16,448,091,350
PT Belawan Indah	5,298,429,678	3,347,491,435
PT Inti Persada Mandiri	5,236,036,544	2,678,363,072
CV Budi Jaya	5,181,913,883	13,627,069,128
PT Agung Glory Cargo Utama	5,178,252,153	4,877,937,991
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 Miliar)/ *Others (each below Rp5 Billion)*	140,087,368,151	173,696,457,942
Subjumlah/ *Subtotal*	**297,358,806,632**	**347,315,727,791**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Utang Investasi/ *Investment Payable*		
CV Delta Mas	973,750,000	8,034,850,417
Vossloh Fastening System GmbH	--	11,939,270,840
CV Lancar Jaya	--	6,303,219,203
PT Tatchi Engineering Indonesia	--	1,366,751,357
PT Soltius Indonesia	--	609,307,160
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500 Juta)/ *Others (each below Rp500 Million)*	90,559,300	9,047,329,126
Subjumlah/ *Subtotal*	**1,064,309,300**	**37,300,728,103**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Utang Usaha - *Supply Chain Financing* (Catatan 40 dan 41)/ *Account Payable - Supply Chain Financing (Notes 40 and 41)*		
Perusahaan/ *The Company*	--	--
Entitas Anak/ *Subsidiaries*	--	--
Jumlah/ *Total*	**1,118,216,714,327**	**1,550,944,033,360**

21. Perpajakan / *21. Taxation*

a. Pajak Dibayar di Muka / *a. Prepaid Taxes*

	2025 Rp	2024 Rp	
Perusahaan			***The Company***
PPh Pasal 4(2)	3,956,728,021	3,693,347,804	*Income Tax Article 4(2)*
Pajak Pertambahan Nilai	144,447,201,120	183,975,557,872	*Value Added Tax*
Subjumlah	**148,403,929,141**	**187,668,905,676**	***Subtotal***
Entitas Anak			***Subsidiaries***
PPh Pasal 28a			*Income Tax Article 28a*
Tahun 2025	1,902,284,007	--	*Year 2025*
Tahun 2024	2,723,970,702	2,982,114,350	*Year 2024*
Tahun 2023	--	1,741,879,763	*Year 2023*
Tahun 2022	--	1,133,417,634	*Year 2022*
Tahun 2020	3,148,838,794	3,244,629,463	*Year 2020*
PPh Pasal 22	3,026,761,434	2,578,573,920	*Income Tax Article 22*
PPh Pasal 23	36,621,146	32,208,956	*Income Tax Article 23*
PPh Pasal 4(2)	1,915,010,715	1,611,356,718	*Income Tax Article 4(2)*
Pajak Pertambahan Nilai	35,012,405,750	45,490,255,228	*Value Added Tax*
Subjumlah	**47,765,892,548**	**58,814,436,032**	***Subtotal***
Jumlah	**196,169,821,689**	**246,483,341,708**	***Total***

b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

	2025 Rp	2024 Rp	
Perusahaan			***The Company***
PPh Pasal 4(2)	10,373,320,940	10,042,077,184	*Income Tax Article 4(2)*
PPh Pasal 21	336,764,714	773,393,267	*Income Tax Article 21*
PPh Pasal 22	1,513,154,819	1,504,117,756	*Income Tax Article 22*
PPh Pasal 23	2,054,439,653	3,094,567,900	*Income Tax Article 23*
PPh Pasal 25	--	296,069,825	*Income Tax Article 25*
PPh Pasal 26	195,107,608	110,192,608	*IncomeTax Article 26*
PPh Pasal 29	2,170,099,056	1,553,493,985	*Income Tax Article 29*
Pajak Pertambahan Nilai Wapu	34,536,085,088	38,265,518,071	*Wapu Value Added Tax*
Subjumlah	**51,178,971,878**	**55,639,430,596**	***Subtotal***
Entitas Anak			***Subsidiaries***
PPh Pasal 4(2)	2,069,013,796	1,070,909,130	*Income Tax Article 4(2)*
PPh Pasal 21	913,269,839	295,602,016	*Income Tax Article 21*
PPh Pasal 22	22,703,376	22,703,376	*Income Tax Article 22*
PPh Pasal 23	627,901,425	710,868,728	*Income Tax Article 23*
PPh Pasal 25	235,635,502	461,052,766	*Income Tax Article 25*
PPh Pasal 29	--	55,283,459	*Income Tax Article 29*
Pajak Pertambahan Nilai	8,076,514,083	6,834,429,790	*Value Added Tax*
Subjumlah	**11,945,038,021**	**9,450,849,265**	***Subtotal***
Jumlah	**63,124,009,899**	**65,090,279,861**	***Total***

c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan / *c. Deferred Tax Asset (Liabilities)*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024* Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba (Rugi)/ *Credited (Expenses) to Profit or Loss* Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ *Credited to Other Comprehensive Income* Rp	31 Desember 2025/ *December 31, 2025* Rp	
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan					***Deferred Tax Asset (Liabilities)***
Perusahaan					***The Company***
Penyisihan Piutang	31,391,466,561	(2,589,106,135)	--	28,802,360,426	*Allowance for Receivables*
Imbalan Pascakerja	6,060,546,365	755,540,427	(424,648,387)	6,391,438,404	*Post-employment Benefit*
Penyusutan Aset Tetap	(40,469,321,896)	(1,114,065,768)	--	(41,583,387,664)	*Depreciation of Fixed Assets*
Aset Hak Guna-Bersih	(1,644,711,631)	1,644,711,631	--	--	*Right-of-Use Assets-Net*
Liabilitas Sewa	1,444,538,595	(1,444,538,595)	--	--	*Lease Liabilities*
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Perusahaan	**(3,217,482,006)**	**(2,747,458,439)**	**(424,648,387)**	**(6,389,588,833)**	***Deferred Tax Assets (Liabilities) of The Company***
Aset Pajak Tangguhan Entitas Anak	**6,019,306,457**	**201,576,715**	**(47,694,971)**	**6,173,188,201**	***Deferred Tax Asset of Subsidiaries***
Jumlah Pajak Tangguhan	**2,801,824,451**	**(2,545,881,725)**	**(472,343,358)**	**(216,400,632)**	***Total Deferred Tax***

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023* Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba (Rugi)/ *Credited (Expenses) to Profit or Loss* Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ *Credited to Other Comprehensive Income* Rp	31 Desember 2024/ *December 31, 2024* Rp	
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan					***Deferred Tax Asset (Liabilities)***
Perusahaan					***The Company***
Penyisihan Piutang	31,038,180,388	353,286,173	--	31,391,466,561	*Allowance for Receivables*
Imbalan Pascakerja	6,949,391,994	98,016,530	(986,862,159)	6,060,546,365	*Post-employment Benefit*
Penyusutan Aset Tetap	(36,635,547,299)	(3,833,774,597)	--	(40,469,321,896)	*Depreciation of Fixed Assets*
Aset Hak Guna-Bersih	(1,622,926,282)	(21,785,349)	--	(1,644,711,631)	*Right-of-Use Assets-Net*
Liabilitas Sewa	1,740,441,157	(295,902,562)	--	1,444,538,595	*Lease Liabilities*
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Perusahaan	**1,469,539,958**	**(3,700,159,805)**	**(986,862,159)**	**(3,217,482,006)**	***Deferred Tax Assets (Liabilities) of The Company***
Aset Pajak Tangguhan Entitas Anak	**7,653,311,241**	**(1,676,342,726)**	**42,337,942**	**6,019,306,457**	***Deferred Tax Asset of Subsidiaries***
Jumlah Pajak Tangguhan	**9,122,851,199**	**(5,376,502,531)**	**(944,524,217)**	**2,801,824,451**	***Total Deferred Tax***

Manajemen berkeyakinan bahwa aset (liabilitas) pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan waktu dapat direalisasikan pada tahun-tahun mendatang.

The Management believes that the deferred tax assets (liabilities) that resulted from the temporary differences are realizable in future years.

d. Beban Pajak Penghasilan / *d. Tax Benefit Expense*

	2025 Rp	2025 Rp	
Perusahaan			***The Company***
Pajak Kini	6,902,898,740	10,135,240,870	*Current Tax*
Penyesuaian Pajak Kini atas Periode Lalu	--	2,919,797,203	*Adjustment Current Tax on Prior Period*
Pajak Tangguhan	2,747,458,439	3,700,159,805	*Deferred Tax*
Entitas Anak			***Subsidiaries***
Pajak Kini	2,765,091,560	4,849,635,780	*Current Tax*
Penyesuaian Pajak Kini atas Periode Lalu	3,524,593,432	--	*Adjustment Current Tax on Prior Period*
Pajak Tangguhan	(201,576,715)	1,676,342,726	*Deferred Tax*
Jumlah	**15,738,465,457**	**23,281,176,384**	***Total***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi Perusahaan dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before tax according to the Company's of profit or loss statement with taxable income as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Laba Konsolidasian Sebelum Pajak Penghasilan	19,860,856,585	87,480,681,385	***Consolidated Income Before Income Tax***
Dikurangi: Rugi (Laba) Sebelum Pajak Penghasilan Entitas Anak	78,568,972,986	(20,041,257,660)	***Less: Loss (Profit) Before Income Tax Subsidiaries***
Laba sebelum Pajak Penghasilan Perusahaan	98,429,829,571	67,439,423,725	***Income Before Income Tax Company***
Beda Tetap			***Permanent Differences***
Biaya Representasi, Kesejahteraan, Sumbangan dan Lainnya	(5,187,756,361)	15,631,275,926	*Representation Fee, Wealthfare, Donation and Other*
Pendapatan Bunga	(3,565,925,281)	(3,892,349,249)	*Interest Income*
Penghasilan dan Beban yang Kena Pajak Final	(38,926,434,454)	(8,490,275,961)	*Final Taxable Income and Expenses*
Denda Pajak	--	3,959,944,256	*Tax Penalties*
Jumlah	**(47,680,116,096)**	**7,208,594,972**	***Total***
Beda Waktu			***Timing Differences***
Penyusutan	(5,063,935,307)	(17,426,248,167)	*Depreciation*
Beban (Pemulihan) Pencadangan *Impairment*	(11,768,664,248)	1,605,846,241	*Allowance (Recovery) for Doubtfull Impairment*
Imbalan Pascakerja	1,504,054,725	(4,040,207,405)	*Post-employement Benefits*
Beban Angsuran *Leasing*	909,877,435	(1,444,035,960)	*Leasing Installment Expense*
Jumlah	**(14,418,667,395)**	**(21,304,645,291)**	***Total***
Laba Kena Pajak Perusahaan	**36,331,046,079**	**53,343,373,406**	***Taxable Income Current Tax Expenses***
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (Dibulatkan)	**36,331,046,000**	**53,343,373,000**	*Estimated Taxable Income (Rounded)*
Jumlah Beban Pajak Kini	**6,902,898,740**	**10,135,240,870**	***Total Current Tax Expenses***
Pembayaran Pajak di Muka Perusahaan :			***Payment of Prepaid Taxes of The Company:***
PPh Pasal 22	(3,862,318,826)	(6,860,167,539)	*Income Tax Article 22*
PPh Pasal 23	(870,480,858)	(833,369,871)	*Income Tax Article 23*
PPh Pasal 25	--	(888,209,475)	*Income Tax Article 25*
Sub Jumlah	**(4,732,799,684)**	**(8,581,746,885)**	***Sub Total***
Kurang Bayar Pajak Penghasilan	**2,170,099,056**	**1,553,493,985**	***Income Tax Under Payment***

e. Pemeriksaan Pajak / *e. Tax Audits*

Perusahaan

Selama tahun berjalan, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Tahun 2021

Pada September 2024, Perusahaan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN untuk tahun pajak 2019 sebesar Rp820.026.505. Atas keputusan lebih bayar tersebut, Perusahaan melakukan saling hapus dengan kurang bayar.

The Company

For the year ended, the Company received the Tax Assessment Letter, the detail as of follows:

Tax Overpayment Assessment Letter Year 2021

In September 2024, the Company has received Tax Overpayment Assessment Letter of VAT for fiscal years 2019 amounted to Rp820,026,505. The Company has been received the tax refund.

No./ *No.*	Jenis Surat/ *Tax Letter*	Nomor Surat Ketetapan Pajak/ *Tax Assessment Letter No.*	Tanggal Surat/ *Date Issued*	Period/ *Period*	Jumlah/ *Total* Rp
1	Lebih Bayar PPN/ *Overpayment Tax Return VAT*	00006/407/19/093/24	23 September 2024/ September *23 2024*	September 2019/ Septem*ber 2019*	(119,781,702)
2	Lebih Bayar PPN/ *Overpayment Tax Return VAT*	00007/407/19/093/24	23 September 2024/ September 23 2024	Oktober 2019/ Octo*ber 2019*	(155,932,364)
3	Lebih Bayar PPN/ *Overpayment Tax Return VAT*	00008/407/19/093/24	23 September 2024/ September 23 2024	November 2019/ Novem*ber 2019*	(152,800,478)
4	Lebih Bayar PPN/ *Overpayment Tax Return VAT*	00009/407/18/093/21	23 September 2024/ September 23 2024	Desember 2019/ Decem*ber 2019*	(391,511,961)
				Total	**(820,026,505)**

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tahun 2021

Pada September 2024, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun pajak 2019 sebesar Rp6.771.287.183. Perusahaan telah membayar atas kurang bayar tersebut.

Tax Underpayment Assesment Letter Year 2021

In September 2024, the Company received Tax Underpayment Assesment Letter for fiscal year 2019 amounted to Rp6,771,287,183. The Company has paid the underpayment.

No./ *No.*	Jenis Surat / *Tax Letter*	Nomor Surat Ketetapan Pajak / *Tax Assessment Letter No.*	Tanggal Surat / *Date Issued*	Period / *Period*	Jumlah / *Total* Rp
1	Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan/ *Underpayment Corporate Income Tax*	00006/206/19/093/24	23 September 2024/ *September 23, 2024*	December 2019/ *December 2019*	2,919,797,203
2	Kurang Bayar PPh 21/ *Underpayment Income Tax Art. 21*	00008/201/19/093/24	23 September 2024/ *September 23, 2024*	December 2019/ *December 2019*	236,616,492
3	Kurang Bayar PPh 21 Final/ *Underpayment Income Tax Art Final 21*	00002/243/19/093/24	23 September 2024/ *September 23, 2024*	December 2019/ *December 2019*	4,500,331
4	Kurang Bayar PPh 22/ *Underpayment Income Tax Art. 22*	00004/202/19/093/24	23 September 2024/ *September 23, 2024*	December 2019/ *December 2019*	726,797,479
5	Kurang Bayar PPh 23/ *Underpayment Income Tax Art. 23*	00008/203/19/093/24	23 September 2024/ *September 23, 2024*	December 2019/ *December 2019*	856,141,749
6	Kurang Bayar PPh 26/ *Underpayment Income Tax Art. 26*	00001/204/19/093/24	23 September 2024/ *September 23, 2024*	December 2019/ *December 2019*	119,900,788
7	Kurang Bayar PPh 4 (2)/ *Underpayment Income Tax Art. 4 (2)*	00007/240/19/093/24	23 September 2024/ *September 23, 2024*	December 2019/ *December 2019*	624,865,139
8	Kurang Bayar PPN/ *Underpayment Tax Return VAT*	00012/287/19/093/24	23 September 2024/ *September 23, 2024*	September 2019/ *September 2019*	177,276,919
9	Kurang Bayar PPN/ *Underpayment Tax Return VAT*	000123/287/19/093/24	23 September 2024/ *September 23, 2024*	Oktober 2019/ *October 2019*	266,768,930
10	Kurang Bayar PPN/ *Underpayment Tax Return VAT*	00014/287/19/093/24	23 September 2024/ *September 23, 2024*	November 2019/ *November 2019*	229,784,028
11	Kurang Bayar PPN/ *Underpayment Tax Return VAT*	00015/287/19/093/24	23 September 2024/ *September 23, 2024*	Oktober 2019/ *October 2019*	608,838,125
				Total	**6,771,287,183**

Entitas Anak

Surat Ketetapan Pajak Kurang (Lebih) Bayar WIKA KRATON

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00010/206/22/456/24 atas pemeriksaan pajak tahun buku 2022, jumlah pokok pajak yang harus dibayar sebesar Rp249.801.114 dan sanksi administratif berupa bunga sesuai Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp86.855.847. Seluruh kewajiban pajak tersebut telah diselesaikan.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No. 000131/406/23/456/25 atas pemeriksaan pajak tahun buku 2023, terdapat lebih bayar pajak sebesar Rp73.375.381.

Subsidiaries

Tax Under (Over) payment Assessment Letter WIKA KRATON

Based on the Tax Underpayment Assessment Letter No. 00010/206/22/456/24 related to the tax audit for the 2022 fiscal year, the principal tax payable amounted to Rp249,801,114 and the administrative sanction in the form of interest under Article 13(2) of the KUP Law amounted to Rp86,855,847. The tax liability was fully settled.

Based on the Tax Overpayment Assessment Letter No. 000131/406/23/456/25 related to the tax audit for the 2023 fiscal year, there was a tax overpayment amounting to Rp73,375,381.

No./ *No.*	Jenis Surat/ *Tax Letter*	Nomor Surat Ketetapan Pajak/ *Tax Assessment Letter No.*	Tanggal Surat/ *Date Issued*	Period/ *Period*	Jumlah/ *Total* Rp
1	Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan/ Under*payment Corporate Income Tax*	00010/206/22/456/24	16 Juli 2024/ *July 16, 2024*	Desember 2022/ *December 2022*	336,656,961
2	Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan/ Over*payment Corporate Income Tax*	00131/40623/456/25	22 Juli 2025/ *July 22, 2025*	Desember 2023/ *December 2023*	(73,375,381)
				Total	**263,281,580**

Surat Ketetapan PPN Lebih Bayar WIKA WIKA KRATON

WIKA KRATON menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun pajak 2023 dan 2024 dengan jumlah sebesar Rp5.296.008.734. Atas lebih bayar pajak tersebut, KRATON telah menerima pembayaran restitusi dari otoritas pajak.

VAT Overpayment Assessment Letter WIKA KRATON

WIKA KRATON received Value Added Tax (VAT) Overpayment Assessment Letters (SKPLB) for the 2023 and 2024 fiscal years amounting to Rp5,296,008,734. The Company has received the refund for the tax overpayment from the tax authority.

No./ *No.*	Jenis Surat/ *Tax Letter*	Nomor Surat Ketetapan Pajak/ *Tax Assessment Letter No.*	Tanggal Surat/ *Date Issued*	Period/ *Period*	Jumlah/ *Total* Rp
1	Lebih Bayar PPN/ *Overpayment Tax Returns VAT*	00050/407/23/456/25	22 Juli 2025/ *July 22, 2025*	Februari 2023/ *February 2023*	(227,073,960)
2	Lebih Bayar PPN/ *Overpayment Tax Returns VAT*	00051/407/23/456/25	22 Juli 2025/ *July 22, 2025*	Maret 2023/ *March 2023*	(666,020,712)
3	Lebih Bayar PPN/ *Overpayment Tax Returns VAT*	00054/407/23/456/25	22 Juli 2025/ *July 22, 2025*	Oktober 2023/ *October 2023*	(2,035,962)
4	Lebih Bayar PPN/ *Overpayment Tax Returns VAT*	00023/407/23/456/25	30 Januari 2025/ *January 30, 2025*	Desember 2023/ *December 2023*	(3,151,391,389)
5	Lebih Bayar PPN/ *Overpayment Tax Returns VAT*	00082/SKPPKP/KPP.0813/2025	22 Mei 2025/ *May 22, 2025*	April 2024/ *April 2024*	(10,458,272)
6	Lebih Bayar PPN/ *Overpayment Tax Returns VAT*	00081/SKPPKP/KPP.0813/2025	22 Mei 2025/ *May 22, 2025*	Juni 2024/ *June 2024*	(22,605,000)
7	Lebih Bayar PPN/ *Overpayment Tax Returns VAT*	00080/SKPPKP/KPP.0813/2025	22 Mei 2025/ *May 22, 2025*	Juli 2024/ *July 2024*	(8,800,000)
8	Lebih Bayar PPN/ *Overpayment Tax Returns VAT*	00079/SKPPKP/KPP.0813/2025	22 Mei 2025/ *May 22, 2025*	Agustus 2024/ *August 2024*	(8,800,000)
9	Lebih Bayar PPN/ *Overpayment Tax Returns VAT*	00078/SKPPKP/KPP.0813/2025	22 Mei 2025/ *May 22, 2025*	September 2024/ *September 2024*	(122,295,478)
10	Lebih Bayar PPN/ *Overpayment Tax Returns VAT*	00266/SKPPKP/KPP.0813/2024	27 Desember 2024/ *December 27, 2024*	September 2024/ *September 2024*	(420,249,553)
11	Lebih Bayar PPN/ *Overpayment Tax Returns VAT*	00021/SKPPKP/KPP.0813/2025	30 Januari 2025/ *January 30, 2025*	November 2024/ *November 2024*	(656,278,408)
				Total	**(5,296,008,734)**

f. Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan, antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari semula 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Berdasarkan PMK Nomor 123/PMK.03/2020 sebagaimana telah diganti dengan PMK Nomor 40 Tahun 2023 Tertanggal 11 April 2023 Tentang Bentuk dan Tatacara Penyampaian Laporan Serta Daftar Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka, Perusahaan Terbuka dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah.

f. Changes in Tax Rate

On October 29, 2021, the Government approved the Bill on the Harmonization of Tax Regulations (RUU HPP) into Law Number 7 Year 2021 which stipulates, among others, the increase of Value Added Tax (VAT) from previously 10% to become 11% effective on April 1, 2022 and 12% effective on January 1, 2025. In addition, the bill revokes the reduction of the tax rates forentitled corporate income taxpayers and permanent establishments from previously decrease to 20% to remain at 22% for fiscal year 2022 onwards.

Based PMK – 123/PMK.03/2020, as replaced by PMK – 40 of 2023 dated April 11, 2023, concerning Forms and Procedures for Submitting Reports and List of Taxpayers in Order to Fulfill the Reduced Income Tax Rates for Domestic CorporateTaxpayers Who Formed as a Public Company, Resident publicly-listed companies in Indonesia whose at least 40% or more of the total paid-up shares or other equity instruments are listed for trading in the Indonesia stock exchanges and meet certain requirements in accordance with the government regulations, can apply rate of 3% lower.

22. Uang Muka dari Pelanggan / *22. Advances From Customers*

Rincian uang muka pelanggan adalah sebagai berikut:

Detail of advance received from customers are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
JV Kumagai Gumi Co Ltd - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	28.361.092.661	--
PT Hutama Karya Infrastruktur (Persero)	7.362.431.450	4.267.136.290
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	6.124.490.147	2.325.413.532
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.540.873.929	--
KSO PT Wijaya Karya Beton Tbk - Kidoh Construction Co Ltd	3.006.154.100	--
KSO China Road & Bridge Corporation - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	2.844.881.647	3.763.108.890
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi Tbk	2.809.437.404	--
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1.706.373.743	5.425.770.400
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Karya Marga Konstruksi - PT Hutama Karya Infrastruktur	713.908.804	9.524.438.483
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 Miliar)/ *Others (each below Rp2 Billion)*	4.053.442.243	3.499.990.876
Subjumlah/ *Subtotal*	**61.523.086.128**	**28.805.858.471**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Larsen & Toubro Limited	47,627,102,476	--
PT Jakarta Propertindo	22,747,629,480	31,414,243,610
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	15,233,203,362	--
JV Shimizu - PT Adhi Karya (Persero) Tbk	6,248,574,840	25,913,120,640
KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk - PT Waskita Karya (Persero) Tbk - PT Modern Wijaya Tehnical	5,875,339,895	4,108,436,670
KSO PT Waskita Karya (Persero) Tbk - PT Rinenggo - PT Antaraksa	5,547,853,864	--
PT China Harbour Indonesia	3,268,641,328	4,583,481,328
PT Astakona Megahtama	2,805,474,697	--
KSO PT Hutama Karya (Persero) - PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk - PT Yasa Patria Perkasa	2,692,875,000	--
PT Ciputra Anugerah Anarawata	2,301,205,500	--
PT Dizamatra Powerindo	2,159,845,000	--
KSO PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Guntur Satria Perkasa	--	13,967,775,037
PT Lancang Kuning Sukses	--	10,186,390,800
PT Jaya Bersama Alexindo	--	5,003,200,600
KSO TOA Corporation - PT Waskita Karya (Persero) Tbk - PT Wakachiku PT Hutama Karya (Persero) - PT Brantas Abipraya (Persero)	--	4,442,762,120
PT Mitra Murni Perkasa	--	3,816,095,304
BUT Wuhuan Engineering	--	3,653,991,060
PT Mulia Boga Raya Tbk	--	3,600,000,000
PT Sinar Jaya Inti Mulya	--	3,126,040,419
PT Bank Negara indonesia (Persero) Tbk	--	2,983,783,785
KSO SMCC - PT Hutama Karya (Persero) Tbk	--	2,802,518,492
PT Mega Andalan Sukses	--	2,507,525,286
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	--	2,281,636,350
KSO PT Hutama Karya (Persero) - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	--	2,140,836,864
PT Basic International Sumatera	--	2,009,492,280
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 Miliar)/ *Others (each below Rp2 Billion)*	31,651,273,964	56,932,597,394
Subjumlah/ *Subtotal*	**148,159,019,406**	**185,473,928,039**
Jumlah/ *Total*	**209,682,105,534**	**214,279,786,510**

Jumlah tersebut merupakan uang muka dari pelanggan yang diterima berdasarkan kontrak dan akan diperhitungkan secara periodik (proporsional) dengan tagihan progres.

The amounts represents advance received from the customers based on the contract and will be calculated on a periodic basis (proportionally) to the terms of its progress.

23. Pendapatan Diterima di Muka / *23. Unearned Revenues*

Rincian pendapatan diterima di muka per pelanggan adalah sebagai berikut:

Detail of unearned revenues per customers are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
JO China Road and Bridge Corporation - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	21,514,536,662	--
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	5,957,541,035	5,404,604,000
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3,522,720,278	2,736,081,721
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1,615,347,631	6,733,289,662
KSO Obayashi - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk - PT JFE Engineering Indonesia	472,207,629	2,424,688,703
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	156,160,000	7,034,480,200
JO Kumagai Gumi Co.Ltd - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	--	28,822,829,400
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk	--	6,676,095,000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	--	2,863,157,500
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 Miliar)/ *Others (each below Rp2 Billion)*	758,517,978	7,447,592,049
Subjumlah/ *Subtotal*	**33,997,031,213**	**70,142,818,235**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Ricky Kencana Sukses Mandiri	2,760,000,000	--
PT Basuki Rahmanta Putra	216,999,000	3,605,472,000
PT Girder Indonesia	--	32,864,351,620
PT Freeport Indonesia	--	6,578,108,160
PT Lancang Kuning Sukses	--	2,083,788,000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 Miliar)/ *Others (each below Rp2 Billion)*	24,854,690,590	43,323,355,976
Subjumlah/*Subtotal*	**27,831,689,590**	**88,455,075,756**
Jumlah/ *Total*	**61,828,720,803**	**158,597,893,991**

Jumlah tersebut merupakan kewajiban pengiriman pesanan yang harus dipenuhi sehubungan dengan tagihan kepada pelanggan telah dilaksanakan dan belum memenuhi kriteria pengakuan penjualan.

The amount represents the delivery order performance obligations in connection with bills to customers that has been implemented and has not yet met the criteria for recognition of sales.

24. Beban Akrual / *24. Accrued Expenses*

Rincian beban akrual adalah sebagai berikut:

Detail of accrued expenses are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Beban Pelaksanaan Proyek	293,346,835,764	400,371,124,960	*Project Implementation Expenses*
Utang dalam Proses	225,651,728,554	74,115,798,666	*Debt in Process*
Beban Proyek	16,553,404,094	14,175,263,144	*Project Expenses*
Beban Usaha	34,656,108,934	66,012,570,514	*Operating Expenses*
Beban Produksi	17,124,918,900	27,345,526,483	*Production Expenses*
Jumlah	**587,332,996,246**	**582,020,283,767**	***Total***

Beban Pelaksanaan Proyek / *Project Implementation Expenses*

	2025 Rp	2024 Rp	
Material	176,719,719,311	239,196,224,998	*Materials*
Subkontraktor	84,436,403,689	115,829,531,328	*Subcontractors*
Fasilitas Distribusi	30,136,870,295	42,397,756,063	*Distribution Facilities*
Upah	2,053,842,469	2,947,612,571	*Labour*
Jumlah	**293,346,835,764**	**400,371,124,960**	***Total***

Utang dalam Proses
Utang usaha dalam proses merupakan utang atas pesanan barang yang sudah diterima oleh Perusahaan berupa berita acara penerimaan barang, namun tagihannya belum diterima.

Payables in Process
Payables in the process represents payables for orders for goods that have been accepted by the Company of the minutes of receipt of goods, but the bill has not been received.

Beban Proyek
Beban proyek yang masih harus dibayar merupakan biaya yang harus diperhitungkan atas progres fisik proyek konstruksi.

Project Expenses
Accrued expenses of project are costs that must be accounted for the physical progress of construction projects.

Beban Usaha
Beban usaha yang masih harus dibayar merupakan biaya yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga sehubungan dengan aktivitas umum dan administrasi Perusahaan.

Operating Expenses
Accrued expenses of operating represent obligation which not yet been billed from third parties referring to company public activity and administration.

Beban Produksi
Beban produksi yang masih harus dibayar merupakan biaya yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga maupun tenaga kerja sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Production Expenses
Accrued expenses of production represent outstanding from expenditures that should be paid to third parties or project temporary labor.

25. Utang Lain-Lain / *25. Other Payables*

Rincian liabilitas lain-lain adalah sebagai berikut:

Details of other liabilities are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
BPJS Ketenagakerjaan	1,311,073,106	215,332,554	*BPJS Ketenagakerjaan*
Dana Pensiun Wijaya Karya	1,032,161,721	275,711,949	*Dana Pensiun Wijaya Karya*
Indonesia Financial Group	869,481,606	--	*Indonesia Financial Group*
PT Pacific Multindo Permai	--	261,900,100	*PT Pacific Multindo Permai*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	--	178,527,143	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 Juta)	126,649,464	509,215,325	*Others (each below Rp100 Million)*
Jumlah	**3,339,365,897**	**1,440,687,071**	***Total***

Utang pensiun hari tua merupakan utang kepada Dana Pensiun Wijaya Karya, sesuai dengan SK No.01.01/A.DIR.0053/98 tanggal 10 Juni 1998, iuran tersebut dibebankan sebesar 5% dari gaji pokok dan tunjangan tetap, sedangkan sebesar 10% dari gaji pokok dan tunjangan tetap ditanggung oleh Perusahaan.

Retirement payable is payable to the Pension Fund Wijaya Karya, in accordance with Decree SK No.01.01/A.DIR.0053/98 dated June 10, 1998, the contribution will be charged at 5% of basic salary and fixed allowances, while 10% of basic salary and fixed allowances paid by the Company.

26. Liabilitas Imbalan Kerja / *26. Employee Benefits Liabilities*

Program Pensiun Iuran Pasti
Grup menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetap.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Wijaya Karya yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusannya No. KEP-146/D.05/2014 tanggal 8 Desember 2014. Pendiri Dana Pensiun Wijaya Karya adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Defined Contribution Pension Plan
The Group established defined contribution pension plan covering all the permanent employees.

The pension plan is managed by Dana Pensiun Wijaya Karya, which the deed of establishment of was approved by the Ototritas Jasa Keuangan in his Decision Letter No. KEP-146/D.05/2014 dated December 8, 2014. Dana Pensiun Wijaya Karya was established by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Program Pensiun Imbalan Pasti
Grup menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan. Program ini memberikan imbalan pensiun berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Wijaya Karya.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Defined Benefit Pension Plan
The Group established defined benefit pension plan covering all the permanent employees. This plan provides pension benefits based on years of service and salaries of the employees.

The pension plan is managed by Dana Pensiun Wijaya Karya.

The defined benefit pension plan typically exposed the Group to actuarial risks such as investment risk, interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Risiko Investasi
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi pemerintah berkualitas tinggi; jika pengembalian asset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek ekuitas, deposito dan emas.

Investment Risk
The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality government bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently the plan has a relatively balanced investment in equity securities, time deposit and gold.

Risiko Harapan Hidup
Nilai kini imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Longevity Risk
The present value of the defined benefit plan is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants during their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Risiko Gaji
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary Risk
The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Risiko Tingkat Bunga
Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di *offset* oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Interest Risk
A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya
Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa tunjangan cuti besar dan satya karya.

Other Long-term Employee Benefit Program
The Group provides other long-term employee benefit in form of long service leave and long service award.

Grup memberikan ekstra hari cuti dan ekstra uang cuti untuk karyawan aktif setiap kelipatan 5 tahun masa kerja. Grup memberikan penghargaan satya karya kepada karyawan yang telah mencapai masa kerja tertentu.

The Group provides extra leave and extra leave allowance for active employee every 5 years of service. The Group provides long leave award to employee that reached certain year of service.

Perhitungan atas imbalan kerja tanggal 30 Januari 2026 dihitung oleh konsultan KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit.*

Calculation of employee benefit as of January 30, 2026 by KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan using the Projected Unit Credit method.

Asumsi dan metode aktuarial yang digunakan dalam perhitungan adalah sebagai berikut:

Assumtion and method of the actuarial calculation:

	2025	2024	
Umur Pensiun	55 tahun/ *years*	55 tahun/ years	*Pension age*
Mortalita	TMI IV/ 2019	TMI IV/ 2019	*Mortality*
Tingkat Sakit	5.00%	5.00%	*Illness rate*
Tingkat Pengunduran Diri	1.00%	1.00%	*Resignation rate*
Tingkat Diskonto	4.58% - 7.06% p.a	6.69% - 7.13% p.a	*Discount Rate*
Tingkat Kenaikan Gaji	6.00%	6.00%	*Salary Increase Rate*
Tingkat Pengembalian Investasi	7.07%	6.12%	*Return of Investement in Pension Fund*

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Details of employee benefit liabilities recognized in the consolidated statement of financial positions are as follow:

	2025 Rp	2024 Rp	
Program Pensiun Imbalan Pasti	19,554,231,002	18,705,677,651	*Defined Benefit Pension Plan*
Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	13,139,262,984	12,789,089,398	*Other Long-term Employee Benefit Program*
Jumlah	**32,693,493,986**	**31,494,767,049**	***Total***

a. Program Pensiun Imbalan Pasti
Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

a. Defined Benefit Pension Plan
The liabilities recognized in the consolidated statements of financial position is determined as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Nilai Kini Kewajiban	48,894,599,357	60,191,871,373	*Present Value of Obligations*
Nilai Wajar dari Aset Program	(29,340,368,355)	(41,486,193,722)	*Fair Value of Plan Assets*
Jumlah	**19,554,231,002**	**18,705,677,651**	***Total***

Biaya imbalan yang diakui dalam laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

Expenses recognized in the consolidation profit or loss is as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Biaya Jasa Kini	2,079,971,466	2,726,217,497	*Current Service Cost*
Biaya Bunga	4,251,560,435	4,091,618,991	*Interest Cost*
Biaya Jasa Lalu	--	(20,251,337)	*Past Service cost*
Jumlah	**6,331,531,901**	**6,797,585,151**	***Total***

Biaya imbalan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Expenses recognized in the consolidation other comprehensive income is as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Imbal Hasil atas Aset Program	(4,294,404,936)	(1,685,463,826)	*Return on Plan Asset*
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Bersih	6,442,961,390	5,990,567,602	*Net Actuarial Gain (Losses)*
Jumlah	**2,148,556,454**	**4,305,103,776**	***Total***

Mutasi nilai kini kewajiban adalah sebagai berikut:

The movement in the present value of obligations are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo Awal	60,191,871,373	60,512,175,985	*Beginning Balance*
Biaya Jasa Lalu	--	(20,251,337)	*Past Service cost*
Biaya Jasa Kini	2,079,971,466	2,726,217,497	*Current Service Cost*
Biaya Bunga	4,251,560,435	4,091,618,991	*Interest Cost*
Imbalan yang Dibayarkan	(11,185,842,527)	(1,127,322,161)	*Benefits Paid*
(Keuntungan) Kerugian Aktuarial Bersih	(6,442,961,390)	(5,990,567,602)	*Net Actuarial (Gain) Losses*
Saldo Akhir	**48,894,599,357**	**60,191,871,373**	***Ending Balance***

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The movement fair value of asset program are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo Awal Tahun	41,486,193,722	40,438,045,661	*Balance At Beginning of the Year*
Pendapatan bunga	2,564,858,438	2,733,611,887	*Interest income*
Hasil Aset Program yang Diharapkan	(4,294,404,936)	(1,685,463,826)	*Expected Return on Plan Assets*
Imbalan yang Dibayarkan	(10,416,278,869)	--	*Benefits Payment*
Saldo Pada Akhir Tahun	**29,340,368,355**	**41,486,193,722**	***Balance at End of The Year***

Analisa sensitivitas perubahan asumsi terhadap nilai kini kewajiban adalah sebagai berikut:

Sensitivity analysis of changes in assumption to the present value of obligation is as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Asumsi Tingkat Diskonto			*Discount Rate Assumption*
-1,00%	49,139,962,391	59,624,959,389	*-1.00%*
+1,00%	48,674,789,639	59,178,241,851	*+1.00%*
Asumsi Kenaikan Gaji			*Salary Increase Assumption*
-1,00%	48,669,011,812	59,064,337,762	*-1.00%*
+1,00%	49,142,055,484	59,748,031,524	*+1.00%*

b. Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya
Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

b. Other Long-term Employee Benefit Program
Liability recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Nilai Kini Kewajiban	13,139,262,984	12,789,089,398	*Present Value of Obligation*
Jumlah	**13,139,262,984**	**12,789,089,398**	***Total***

Biaya yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

Expenses recognized in the profit or loss is as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Biaya Jasa Kini	833,895,288	842,931,387	*Current Service Cost*
Biaya Bunga	869,658,079	989,244,033	*Interest Cost*
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Bersih	883,453,326	(83,128,406)	*Net Actuarial Gain (Losses)*
Jumlah	**2,587,006,693**	**1,749,047,014**	***Total***

Mutasi nilai kini kewajiban adalah sebagai berikut:

The movement in the present value of obligations are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Pada Awal Tahun	12,789,089,398	14,633,787,467	*At Beginning of the Year*
Biaya Jasa Kini	833,895,288	842,931,387	*Current Service Cost*
Biaya Bunga	869,658,079	989,244,033	*Interest Cost*
Imbalan yang Dibayarkan	(2,236,833,107)	(3,593,745,083)	*Benefits Paid*
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Bersih	883,453,326	(83,128,406)	*Net Actuarial Gain (Losses)*
Pada Akhir Tahun	**13,139,262,984**	**12,789,089,398**	***At End of The Year***

Analisa sensitivitas perubahan asumsi terhadap nilai kini kewajiban adalah sebagai berikut:

Sensitivity analysis of changes in assumption to the present value of obligation is as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Asumsi Tingkat Diskonto			*Discount Rate Assumption*
-1,00%	12,942,314,301	13,097,317,187	*-1,00%*
+1,00%	13,547,721,010	12,493,287,140	*+1,00%*
Asumsi Kenaikan Emas			*Gold Increase Assumption*
-1,00%	13,012,741,669	12,530,146,210	*-1,00%*
+1,00%	13,470,117,129	13,054,008,407	*+1,00%*

27. Pinjaman Jangka Panjang / *27. Long-Term Loan*

Pinjaman jangka panjang adalah sebagai berikut:

Long-Term Loan are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Party*		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	202,671,000,000	291,254,000,000
Pihak Ketiga/ *Third Party*		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	175,000,000,000
Total/ *Total*	**202,671,000,000**	**466,254,000,000**

	2025 Rp	2024 Rp
Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Jangka Panjang/		
Current Portion of Long Term Loan		
Pihak Berelasi/ ***Related Parties***		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	68,351,000,000	--
Pihak Ketiga/ ***Third Party***		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	40,000,000,000
Total Bagian Jangka Pendek / ***Short Term Portion***	**68,351,000,000**	**40,000,000,000**
Pinjaman Jangka Panjang setelah Dikurangi		
Bagian Jangka Pendek/ ***Long Term Loan, Net Current Portion***		
Pihak Berelasi/ ***Related Party***		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	134,320,000,000	291,254,000,000
Pihak Ketiga/ ***Third Party***		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	135,000,000,000
Total Bagian Jangka Panjang/ ***Long Term Portion***	**134,320,000,000**	**426,254,000,000**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 28 Mei 2025, Perusahaan telah melakukan persetujuan perpanjangan dan tambahan limit fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan surat penawaran pemberian kredit No. CBG.CB5/SIC2.SPPK.231/2025 atas pemberian fasilitas kredit terdiri dari Fasilitas KMK Transaksional sebesar Rp700.000.000.000, Fasilitas *Non-Cash Loan* sebesar Rp1.400.000.000.000, *Global Line* (LC/SKBN) sebesar Rp500.000.000.000, Fasilitas Kredit Investasi (*Refinancing*) I sebesar Rp500,000,000,000, dan Fasilitas Kredit Investasi (*Refinancing*) II sebesar Rp800,000,000,000 dengan tingkat bunga sebesar 8,00% - 8,65% per tahun.

Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas sejak 11 Juni 2025 sampai dengan 10 Juni 2026.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang, persediaan, tanah dan bangunan (Catatan 5, 9, dan 16).

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

a. *Current Ratio* minimal sebesar 100%;
b. *Debt to Equity Ratio* maksimal 300%; dan
c. *Debt Service Coverage Ratio* minimal 110%.

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On May 28, 2025, the Company has approved the extension and increase of the credit facility limit with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with the offer credit letter No. CBG.CB5/SIC2.SPPK.231/2025 for the provision of credit facilities consisting of Transactional Working Capital Facility amounting to Rp700,000,000,000, a Non-Cash Loan Facility amounted to Rp1,400,000,000,000, Global Line (LC/SKBN) Facility amounted to Rp500,000,000,000, Investment Credit Facility (Refinancing) I amounted to Rp500,000,000,000, and Investment Credit Facility (Refinancing) II amounted to Rp800,000,000,000, with an interest rate ranging from 8.00% - 8.65% per annum.

The validity of the agreement according to the extension of facilities is from June 11, 2025 until June 10, 2026.

The loan is pledged by receivebles, inventories, land and building (Notes 5, 9 and 16).

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

a. Current Ratio minimum of 100%;
b. Debt to Equity Ratio maximum of 300%; and
c. Debt Service Coverage Ratio minimum of 110%.

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has complied all the terms and conditions required by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Saldo pada awal tahun 2025 sebesar Rp291.254.000.000. Tidak terdapat pencairan pinjaman baru pada tahun berjalan. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp88.583.000.000. Saldo pada 31 Desember 2025 sebesar Rp202.671.000.000.

The outstanding balance as of the beginning of 2025 amounted to Rp291,254,000,000. There were no new loan disbursements during the year. Loan repayments during the year amounted to Rp88,583,000,000. Accordingly, the outstanding balance as of December 31, 2025 amounted to Rp202,671,000,000.

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Pada tanggal 20 Maret 2024, Perusahaan telah menandatangani perpanjangan perjanjian pembiayaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan perjanjian No. 042/BN/CBT-VII/III/2024.

PT Bank CIMB Niaga Tbk
On March 20, 2024, the Company signed an extension of the financing agreement with PT Bank CIMB Niaga Tbk under agreement No. 042/BN/CBT-VII/III/2024.

Fasilitas jangka panjang yang diberikan berupa Fasilitas Pembiayaan Investasi iB, *Musyarakah Mutanaqisah*, Fasilitas Pembiayaan Langsung, *On Liquidation Basis*, dan *Committed* (Fasilitas PI MMQ) sebesar Rp400.000.000.000. Jangka waktu perjanjian selama 5 tahun sejak 30 Oktober 2021 sampai dengan 30 Juli 2026. Skema ujrah bagi hasil bersifat *floating* setiap bulan, sesuai Nota Komitmen Proyeksi Pendapatan/Laba yang dibuat oleh Bank CIMB Niaga dan disetujui oleh Perusahaan. Tingkat ujrah bagi hasil pada tahun 2022 dimulai dari 53,15% untuk Perusahaan dan 46,85% untuk Bank hingga 66,53% untuk Perusahaan dan 33,47% untuk Bank.

Long-term facilities provided are in the form of iB Investment Financing Facility, Musyarakah Mutanaqisah, Direct Financing Facility, On Liquidation Basis, and Committed (PI MMQ Facility) amounting to Rp400,000,000,000. The term of the agreement is 5 years from October 30, 2021 until July 30, 2026. The profit sharing ujrah scheme is floating every month, according to the Income/Profit Projection Commitment Note made by Bank CIMB Niaga and approved by the Company. The ujrah profit sharing rate in 2022 starts from 53.15% for Companies and 46.85% for Banks up to 66.53% for Companies and 33.47% for Bank.

Agunan atas perjanjian tersebut berupa piutang, aset tetap (tanah, bangunan, dan mesin), dan rekening pembayaran utang (Catatan 5 dan 16).

Collaterals for the agreement are in the form of receivables, property, plant and equipment (land, buildings, and machinery), and Debt Service Reserve Account (Notes 5 and 16).

Rasio keuangan yang harus diperhatikan adalah:
- *Current Ratio* minimal 100%;
- *Debt to Equity Ratio* maksimal 400%; dan
- *Debt Security Cover Ratio* minimal 100%.

Financial ratios that must be considered are:
- *Current Ratio minimum of 100%;*
- *Debt to Equity Ratio at maximum 300%; and*
- *Debt Security Cover Ratio minimum of 100%.*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has complied all the terms and conditions required by the PT Bank CIMB Niaga.

Pada Maret 2025, Perusahaan mengambil dan menerima seluruh dokumen agunan di PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan fasilitas Kredit/Pembiayaan Kepemilikan Rumah/Kredit/Pembiayaan Kepemilikan Mobil/dan lain-lain yang telah lunas.

On March 2025, the Company took and received all collateral documents from PT Bank CIMB Niaga Tbk for the Mortgage/Financing Facility for Home Ownership/Car Ownership Loan/Financing and others that have been fully settled.

Saldo pada awal tahun 2025 sebesar Rp175.000.000.000. Tidak terdapat pencairan pinjaman baru pada tahun berjalan. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp175.000.000.000. Saldo pada 31 Desember 2025 sebesar Nihil.

The outstanding balance as of the beginning of 2025 amounted to Rp175,000,000,000. There were no new loan disbursements during the year. Loan repayments during the year amounted to Rp175,000,000,000. Accordingly, the outstanding balance as of December 31, 2025 was nil.

28. Kepentingan Nonpengendali / *28. Non-Controlling Interest*

Mutasi saldo kepentingan non pengendali untuk tahun-tahun yang berakhir pada 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Movement on non controlling interest for the years ended 2025 and 2024 are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo Awal Tahun	94,168,548,925	94,988,574,854	*Balance at Beginning of Year*
Rugi Bersih Tahun Berjalan	(35,897,110,572)	(804,776,961)	*Loss For the Year*
Pembayaran Dividen ke Entitas Non Pengendali	(15,518,389)	(19,082,064)	*Dividen Payment to Non-Controlling Interest*
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(5,015,618)	3,833,096	*Other Comprehensif Income (Losses) of the Current Year*
Saldo Akhir Tahun	**58,250,904,345**	**94,168,548,925**	***Balance at End of the Year***

Saldo kepentingan non pengendali berdasarkan entitas anak per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Non controlling interest balance based on subsidiaries as of December 31, 2025, and 2024 are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
PT Wijaya Karya Komponen Beton	55,042,768,587	53,199,930,468
PT Citra Lautan Teduh	1,914,743,213	1,868,603,106
PT Wijaya Karya Krakatau Beton	15,610,605,381	20,383,238,309
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	(14,317,212,836)	18,716,777,042
Jumlah/ *Total*	**58,250,904,345**	**94,168,548,925**

29. Modal Saham / *29. Share Capital*

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2025 is as follows:

2025			
Pemegang Saham/ *Shareholders*	**Jumlah Saham (Lembar)/ *Number of Shares (Share)***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Jumlah/ *Total* Rp**
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	5,229,279,960	60.00%	522,927,996,000
Koperasi Karya Mitra Satya	368,474,349	4.23%	36,847,434,900
Yayasan Wijaya Karya	86,043,040	0.99%	8,604,304,000
Kuntjara *)	9,577,300	0.11%	957,730,000
Rija Judaswara *)	2,339,700	0.03%	233,970,000
Verly Widianto *)	2,000,000	0.02%	200,000,000
Syailendra Ogan *)	109,000	0.00%	10,900,000
Agus Pramono *)	3,529,500	0.04%	352,950,000
Masyarakat/ *Public*	3,014,113,751	34.58%	301,411,375,100
Jumlah/ *Total*	**8,715,466,600**	**100.00%**	**871,546,660,000**

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2024 is as follows:

Pemegang Saham/ *Shareholders*	2024 Jumlah Saham (Lembar)/ *Number of Shares (Share)*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Jumlah/ *Total* Rp
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	5,229,280,000	60.00%	522,928,000,000
Koperasi Karya Mitra Satya	400,282,249	4.59%	40,028,224,900
Yayasan Wijaya Karya	86,043,000	0.99%	8,604,300,000
Kuntjara *)	9,577,300	0.11%	957,730,000
Rija Judaswara *)	2,339,700	0.03%	233,970,000
Verly Widianto *)	2,000,000	0.02%	200,000,000
Syailendra Ogan *)	109,000	0.00%	10,900,000
Agus Pramono *)	3,529,500	0.04%	352,950,000
Masyarakat/ *Public*	2,982,305,851	34.22%	298,230,585,100
Jumlah/ *Total*	**8,715,466,600**	**100.00%**	**871,546,660,000**

*) Manajemen Kunci/ *Key Management*

30. Tambahan Modal Disetor / *30. Additional Paid-In Capital*

	2025 Rp	2024 Rp	
Agio Saham	1,002,278,634,000	1,002,278,634,000	*Stock Agio*
Selisih Nilai Perolehan dengan Hasil Penjualan Saham yang Diperoleh Kembali	15,439,712,959	15,439,712,959	*Difference Between The Cost and The Proceeds from The Sale of Treasury Stock*
Selisih Nilai Transaksi dengan Entitas Sepengendali	(1,220,130,700)	(1,220,130,700)	*Difference transactions between Entities Under Common Control*
Biaya Emisi Saham	(29,084,927,397)	(29,084,927,397)	*Stock Issuance Costs*
Jumlah	**987,413,288,862**	**987,413,288,862**	***Total***

Biaya emisi efek ekuitas merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan efek ekuitas Emiten atau Perusahaan Publik. Biaya ini mencakup *fee* dan komisi yang dibayarkan kepada penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, dan biaya pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran, biaya pencatatan efek ekuitas dibursa efek, serta biaya promosi sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pasar Modal No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012, peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Bab Ekuitas pasal Tambahan Modal Disetor. Biaya Emisi Efek Ekuitas berasal dari penawaran perdana tahun 2014 sebesar Rp29.084.927.397.

Share Issuance Costs are cost related to the issuance of equity securities. These costs include fees and commissions paid to the underwriter, supporting institutions and professionals in capital markets, and the registration document printing costs, cost of equity securities listing on the stock exchange, as well as promotional cost in accordance with the Decision of the Chairman of the Capital Market Board No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012, regulation No. VII.G.7 of Guidelines for the Preparation of Financial Statements Chapter Equity article Additional Paid-in Capital. Share Issuance Costs derived from the initial public offering in 2014 amounted to Rp29,084,927,397.

31. Saldo Laba / *31. Retained Earnings*

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2025 Rp	2024 Rp	
Ditentukan Penggunaannya			***Appropriated Use***
Saldo Awal Tahun	372,988,876,808	372,988,876,808	*Beginning Balance of the Year*
Saldo Akhir Tahun	**372,988,876,808**	**372,988,876,808**	***Ending Balance of the Year***

	2025 Rp	2024 Rp	
Belum Ditentukan Penggunaannya			***Unappropriated Use***
Saldo Awal Tahun	1,360,648,370,807	1,299,172,585,996	*Beginning Balance of the Year*
Laba Tahun Berjalan	40,019,501,701	65,004,281,962	*Profit for the Year*
Penghasilan Komprehensif Lain	1,681,228,714	3,356,746,464	*Other Comprehensive Income*
Dividen	(6,536,599,950)	(6,885,243,615)	*Dividend*
Saldo Akhir Tahun	**1,395,812,501,272**	**1,360,648,370,807**	***Ending Balance of the Year***

Dalam rangka memenuhi undang - undang Perusahaan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007, yang mengharuskan Perusahaan secara bertahap mencadangkan sekurang-kurangnya 20% dari modal yang ditempatkan sebagai cadangan dana umum. Total saldo yang telah dicadangkan sebagai cadangan dana umum, setelah kapitalisasi dividen saham sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp372.988.876.808.

In compliance with Corporation Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007, which requires the Company to set aside, on a gradual basis, an amount equivalent to at least 20% of their subscribed capital as general reserve. Total appropriation of the Company's retained earnings as general reserve, after dividend capitalization as of December 31, 2025 and 2024 amounted Rp372,988,876,808.

Salinan Berita Acara Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham No. 3 tanggal 2 Juni 2025 dan No. 43 tanggal 17 Mei 2024 telah menetapkan pembagian dividen Perusahaan untuk tahun buku 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of shareholders No. 3 dated June 2, 2025 and No. 43 dated May 17, 2024 has declared the dividend distribution for the fiscal year 2024 and 2023 were as follows:

	Tanggal Dideklarasikan/ *Date Declared*	Tanggal Pembayaran/ *Date Paid*	Dividen Per Lembar Saham (Nilai Penuh)/ *Dividend Per Share (Full Amount)*	Jumlah/ *Total* Rp	
Perusahaan					***The Company***
Dividen tahun 2024	2 Juni/ *June 2025*	4 Juli/ *July 2025*	0.75	6,536,599,950	*Dividend for year 2024*
Dividen tahun 2023	17 Mei/ *May 2024*	20 Juni/ *June 2024*	0.79	6,885,243,615	*Dividend for year 2023*

32. Laba Per Saham Dasar / *32. Basic Earnings Per Share*

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Basic earnings per share calculated by dividing net profit by the average weighted general share amount circulated in the relevant year.

	2025	2024	
Laba Usaha Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Rp)	40,019,501,701	65,004,281,962	*Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity (Rp)*
Rata-rata Tertimbang Saham untuk Perhitungan Laba per Saham Dasar (lembar)	8,715,466,600	8,715,466,600	*Weighted Average Number Shares for the Computation of Basic Profit Per Share (share)*
Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	**4.59**	**7.46**	***Basic Earnings per Share (in full amount of Rupiah)***

33. Pendapatan Usaha / *33. Revenues*

Rincian pendapatan berdasarkan Satuan Bisnis Unit (SBU) untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Details of revenues per Strategic Business Units (SBU) for the year progress are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Produk Putar	1,945,920,056,111	2,540,509,075,666	*Spun Concrete*
Produk Non putar	1,156,450,015,279	1,801,038,353,710	*Precast Concrete*
Sub Jumlah	**3,102,370,071,390**	**4,341,547,429,376**	***Sub Total***
Jasa	174,476,638,753	193,490,040,013	*Service*
Konstruksi	309,015,544,992	360,986,870,975	*Construction*
Jumlah/ *Total*	**3,585,862,255,135**	**4,896,024,340,364**	***Total***

Rincian penjualan produk beton berdasarkan wilayah operasi untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Details of precast product sales by region for the current year operations are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Perusahaan			***The Company***
Wilayah Penjualan I			*Sales Region I*
Sumatera Utara	211,222,968,670	379,377,886,659	*North Sumatra*
Wilayah Penjualan II			*Sales Region II*
Sumatera Selatan	275,118,333,571	375,620,289,482	*South Sumatra*
Wilayah Penjualan III			*Sales Region III*
DKI Jakarta	767,743,310,774	1,281,626,267,451	*DKI Jakarta*
Wilayah Penjualan IV			*Sales Region IV*
Kalimantan	239,030,514,330	375,607,077,888	*Kalimantan*
Wilayah Penjualan V			*Sales Region V*
Jawa Timur	451,154,376,260	554,019,986,881	*East Java*
Wilayah Penjualan VI			*Sales Region VI*
Sulawesi Selatan	244,732,843,749	218,003,919,595	*South Sulawesi*
Divisi Operasi	535,633,987,768	652,697,218,191	*Operations Division*
Jumlah Penjualan Perusahaan	**2,724,636,335,122**	**3,836,952,646,147**	***Total Sales of the Company***
Entitas Anak			***Subsidiaries***
Kepulauan Riau -			*Riau Island -*
PT Citra Lautan Teduh	270,546,380,576	244,723,220,046	*PT Citra Lautan Teduh*
Jawa Barat -			*West Java -*
PT Wijaya Karya Komponen Beton	72,106,183,318	83,127,562,994	*PT Wijaya Karya Komponen Beton*
Banten -			*Banten -*
PT Wijaya Karya Krakatau Beton	25,558,455,850	126,627,995,889	*PT Wijaya Karya Krakatau Beton*
Jakarta -			*Jakarta -*
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	9,522,716,524	50,116,004,300	*PT Wijaya Karya Pracetak Gedung*
Jumlah Penjualan Entitas Anak	**377,733,736,268**	**504,594,783,229**	***Total Sales of Subsidiaries***
Jumlah	**3,102,370,071,390**	**4,341,547,429,376**	***Total***

Rincian penjualan produk beton berdasarkan pelanggan untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Details of precast product sales per customers for current year as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	378,905,435,940	279,832,361,686
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	80,263,035,916	25,064,246,704
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	75,474,052,811	88,764,180,287
PT Hutama Karya Infrastruktur	68,193,443,500	84,377,656,000
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	64,578,696,980	89,500,766,161
KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Waskita Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	63,158,420,103	24,636,146,297
JV Kumagai Gumi Co. Ltd - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	44,741,630,000	9,010,865,000
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk	43,233,492,000	23,493,888,000
KSO PT Jaya Obayashi - PT Wijaya karya (Persero) Tbk - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama - JFE Engineering Corp	29,560,920,884	35,120,135,080

	2025 Rp	2024 Rp
JO China Road & Bridge Corporation - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	27,661,198,430	32,690,691,996
JO PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Nindya Karya - PT Adhi Karya (Persero) Tbk	26,429,621,000	--
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Waskita Karya (Persero) Tbk - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	25,045,576,100	97,697,464,620
JO Sino Road And Bridge Group Co. Ltd - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk	11,065,310,250	62,940,772,374
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	8,703,046,420	44,286,353,056
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	3,392,955,500	30,498,590,500
PT Brantas Abipraya (Persero)	3,289,653,000	36,522,370,125
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	1,713,541,000	47,329,072,100
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	792,470,000	28,508,815,500
PT Hutama Karya (Persero)	940,000,000	33,412,328,600
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Minarta Dutahutama - PT Karta Utama	48,590,000	59,135,300,000
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Hutama Karya (Persero) - PT Brantas Abipraya (Persero)	--	174,589,266,147
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Karya Marga Konstruksi - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	--	144,944,937,520
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	--	37,136,192,700
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp25 Miliar)/ *Others (each below Rp25 Billion)*	196,567,738,791	226,831,600,940
Subjumlah/ *Subtotal*	**1,153,758,828,625**	**1,716,324,001,392**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk - PT Waskita Karya (Persero) Tbk - PT Modern Wijaya Tehnical	118,326,346,505	62,177,048,500
PT Jaya Bersama Alexindo	85,672,174,500	20,507,087,000
PT Mitra Murni Perkasa	79,455,105,416	199,180,194,918
PT Girder Indonesia	71,028,449,090	17,236,880,490
JV Shimizu - PT Adhi Karya (Persero) Tbk	48,676,883,200	--
PT Total Bangun Persada	42,214,880,500	332,262,000
PT Xinyi Solar Indonesia	36,108,641,500	14,285,774,500
PT Bangun Cipta Karya	35,447,654,550	--
PT Lancang Kuning Sukses	35,106,894,000	436,905,000
KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk	31,883,868,580	--
PT Bagus Karya	30,778,116,000	--
PT Ciputra Nusa Raya	28,551,717,200	--
KSO Beijing Urban Construction Group Co Ltd - PT Hutama Karya (Persero) Tbk	27,087,492,375	--
PT Basic International Sumatera	25,312,985,400	34,290,774,600
KSO PT Hutama Karya Infrastruktur - PT Acset Indonusa Tbk - PT Nindya Karya	21,337,650,000	32,685,292,500
KSO PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Guntur Satria Perkasa	20,919,999,598	103,299,329,396
KSO PT Hutama Karya (Persero) - PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk - PT Yasa Patria Perkasa	14,442,412,490	88,077,546,900
PT Bangun Kosambi Sukses	13,781,286,000	28,751,134,000
PT Indonesia Pondasi Raya Tbk	13,483,683,000	6,574,940,000
PT Nusacipta Indonesia	7,549,483,900	53,947,817,500
KSO PT Adhi Karya (Persero) Tbk - PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Marga Konstruksi Nusantara	6,909,045,050	71,321,742,450
PT Jaya Obayashi	6,277,284,000	50,602,824,000
PT Paramita Multi Sarana	5,363,910,400	80,535,229,480
PT Acset Indonusa Tbk	5,234,295,000	8,654,909,000
PT Basuki Rahmanta Putra	4,304,260,200	44,731,685,000
PT Rekagunatek Persada	2,834,153,175	42,962,903,625
KSO PT Hutama Karya (Persero) - PT Modern Surya Jaya - PT Bina Cipta Kontraktor	887,175,000	36,728,825,000
JO Shimizu - Total JKT11 Data Center Main Works	79,292,000	31,763,349,200
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	--	138,295,506,520
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	--	45,453,344,198
PT Pilar Teguh Utama	--	30,634,200,000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp25 Miliar)/ *Others (each below Rp25 Billion)*	1,129,556,104,136	1,381,755,922,207
Subjumlah/ *Subtotal*	**1,948,611,242,765**	**2,625,223,427,984**
Jumlah / *Total*	**3,102,370,071,390**	**4,341,547,429,376**

Rincian pendapatan jasa berdasarkan wilayah operasi untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Details of service revenues by region for the current year are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Perusahaan			***The Company***
Wilayah Penjualan I			*Sales Region I*
Sumatera Utara	14,885,362,415	74,877,207,243	*North Sumatra*
Wilayah Penjualan II			*Sales Region II*
Sumatera Selatan	22,232,762,579	4,960,581,440	*South Sumatra*
Wilayah Penjualan III			*Sales Region III*
DKI Jakarta	69,786,653,560	4,128,188,658	*DKI Jakarta*
Wilayah Penjualan V			*Sales Region V*
Jawa Timur	--	16,349,937,520	*East Java*
Wilayah Penjualan VI			*Sales Region VI*
Sulawesi Selatan	13,270,264,320	65,484,000	*South Sulawesi*

	2025 Rp	2024 Rp	
Wilayah Penjualan Cabang Filipina			*Sales Region Philippines Branch*
DKI Jakarta	4,368,891,667	--	*DKI Jakarta*
Divisi Operasi	40,198,631,304	75,871,223,920	*Operations Division*
Jumlah Penjualan Perusahaan	**164,742,565,845**	**176,252,622,781**	***Total Sales of the Company***
Entitas Anak			***Subsidiaries***
Kepulauan Riau -			*Riau Island -*
PT Citra Lautan Teduh	1,454,955,860	6,349,797,500	*PT Citra Lautan Teduh*
Jawa Barat -			*West Java -*
PT Wijaya Karya Komponen Beton	8,279,117,048	10,887,619,732	*PT Wijaya Karya Komponen Beton*
Jumlah Penjualan Entitas Anak	**9,734,072,908**	**17,237,417,232**	***Total Sales Subsidiaries***
Jumlah	**174,476,638,753**	**193,490,040,013**	***Total***

Rincian pendapatan jasa berdasarkan pelanggan untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Details of service revenues per customers for the current year as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Hutama Karya Infrastruktur	77,652,741,420	30,725,953,631
PT Freeport Indonesia	13,156,216,320	--
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3,431,700,000	7,345,931,020
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	261,205,000	10,620,000,000
PT Jasa Marga (Persero)	--	12,002,241,600
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama	--	9,812,619,991
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 Miliar)/ *Others (each below Rp 5 Billion)*	17,895,118,177	15,850,837,572
Subjumlah/ *Subtotal*	**112,396,980,917**	**86,357,583,814**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Girder Indonesia	19,611,304,000	--
PT Fajar Putra Dinasti	8,352,085,226	--
PT Karya Logistik Nusantara	5,245,215,000	21,972,226,400
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	--	15,026,094,000
KSO PT Hutama Karya (Persero) - PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia - PT Perkasa Abdi Bhuana	--	15,224,000,000
KSO PT Pembangunan Perumahan Presisi - PT Duta Pratama Indah	--	13,854,433,480
PT Wan Artha Nata Indonesia	--	10,887,619,732
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 Miliar)/ *Others (each below Rp 5 Billion)*	28,871,053,610	30,168,082,587
Subjumlah/ *Subtotal*	**62,079,657,836**	**107,132,456,199**
Jumlah/ *Total*	**174,476,638,753**	**193,490,040,013**

Rincian pendapatan konstruksi berdasarkan wilayah operasi untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Details of construction revenues by region for the current year are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Perusahaan			***The Company***
Wilayah Penjualan III			*Sales Region III*
DKI Jakarta	58,828,854,491	50,758,201,211	*DKI Jakarta*
Signalling Jalur Ganda Kereta Api	--	15,802,835,421	*Signalling Jalur Ganda Kereta Api*
Divisi Operasi	194,420,317,827	64,974,841,161	*Operations Division*
Jumlah Penjualan Perusahaan	**253,249,172,318**	**131,535,877,793**	***Total Sales of the Company***
Entitas Anak			***Subsidiaries***
Jakarta -			*Jakarta -*
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	54,881,009,668	191,918,177,590	*PT Wijaya Karya Pracetak Gedung*
Jawa Barat -			*West Java -*
PT Wijaya Karya Komponen Beton	885,363,006	37,532,815,592	*PT Wijaya Karya Komponen Beton*
Jumlah Penjualan Entitas Anak	**55,766,372,674**	**229,450,993,182**	***Total Sales Subsidiaries***
Jumlah	**309,015,544,992**	**360,986,870,975**	***Total***

Rincian pendapatan konstruksi berdasarkan pelanggan untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Details of construction revenue per customers for the current year as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	17,031,524,324	19,517,362,162
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16,299,745,340	43,609,708,894
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	14,828,648,400	15,850,064,421
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	14,686,378,600	1,184,175,000
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	988,950,978	83,536,580,504
PT Hutama Karya (Persero)	360,604,400	22,903,004,300
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	--	27,213,000,000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 Miliar)/ *Others (each below Rp5 Billion)*	7,530,996,105	11,582,684,499
Subjumlah/ *Subtotal*	**71,726,848,147**	**225,396,579,780**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Fajar Putra Dinasti	74,707,028,179	--
PT Jakarta Propertindo	40,457,339,129	40,376,571,812
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	27,985,224,831	30,209,790,103
PT Astakona Megahtama	19,236,177,917	1,129,720,129
Larsen & Toubro Ltd.	18,371,515,362	--
PT Mulia Boga Raya Tbk	18,796,982,747	--
KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Nindya Karya	13,695,637,655	--
PT Barry Callebaut Indonesia	11,407,465,533	--
PT Mega Andalan Sukses	10,758,490,721	--
PT Wan Artha Nata	885,363,006	36,415,468,993
PT Sinar Perdana Kurnia Alam	--	14,477,379,736
PT Mandiri Bangun Makmur	--	10,829,080,551
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 Miliar)/ *Others (each below Rp5 Billion)*	987,471,766	2,152,279,871
Subjumlah/ *Subtotal*	**237,288,696,846**	**135,590,291,195**
Jumlah/ *Total*	**309,015,544,992**	**360,986,870,975**

34. Beban Pokok Pendapatan / *Cost of Revenues*

Rincian harga pokok pendapatan untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Details of cost of goods sold for the current year are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Persediaan Barang Jadi Awal	503,452,564,536	680,771,402,267	*Beginning Balance of Finished*
Produksi Barang Jadi	2,127,038,714,784	2,780,016,447,253	*Finished Good Production*
Persediaan Barang Jadi Akhir	(524,394,979,178)	(503,452,564,536)	*Ending Balance of Finished Good*
Subjumlah	**2,106,096,300,142**	**2,957,335,284,984**	***Subtotal***
Biaya Langsung Produksi			***Direct Cost of Production***
Biaya Pelaksanaan Proyek	576,145,142,159	840,136,484,102	*Project Implementation Cost*
Biaya Material	77,926,936,635	100,361,701,647	*Materials Cost*
Biaya Operasional Proyek	48,848,941,568	71,096,491,360	*Operational Project Cost*
Biaya Upah Tenaga Kerja	4,232,136,694	2,839,088,277	*Labour Cost*
Subjumlah	**707,153,157,056**	**1,014,433,765,386**	***Subtotal***
Biaya Tidak Langsung Produksi			***Indirect Cost of Production***
Biaya Penyusutan	113,934,904,884	116,242,856,167	*Depreciation Expense*
Biaya Administrasi dan Umum	95,137,600,764	79,805,562,192	*Administrative and General Expense*
Biaya Penelitian dan Pengembangan	13,140,038,779	15,952,933,688	*Research and Development Expense*
Biaya Pemasaran dan Penjualan	599,607,244	634,423,270	*Marketing and Sales Expense*
Subjumlah	**222,812,151,671**	**212,635,775,317**	***Subtotal***
Jumlah	**3,036,061,608,869**	**4,184,404,825,687**	***Total***
Jasa Konstruksi			***Construction***
Biaya Material	129,197,704,724	167,043,675,529	*Materials Cost*
Subkontraktor	90,753,023,305	90,036,120,779	*Subcontractor*
Biaya Upah	30,816,515,336	24,011,096,147	*Labour Cost*
Biaya Tidak Langsung	30,231,277,070	14,950,527,764	*Overhead Cost*
Biaya Peralatan	11,901,189,898	41,891,903,328	*Equipment Cost*
Subjumlah	**292,899,710,333**	**337,933,323,547**	***Subtotal***
Jumlah	**3,328,961,319,202**	**4,522,338,149,234**	***Total***

Beban pelaksanaan proyek merupakan realisasi biaya distribusi, perawatan dan pemasangan produk di lapangan.

Project implementation cost is the realization of the cost of distribution, maintenance, and installation of the product on the field.

Beban upah merupakan realisasi biaya yang dikeluarkan untuk para pekerja langsung berkaitan dengan pelaksanaan proyek, baik upah harian, mingguan maupun upah borong.

Labour cost is the realization of the costs incurred for the workers directly related to the project process, both the daily wages, weekly wages and the entire stock.

Biaya material merupakan biaya - biaya yang timbul atas pekerjaan instalasi (penyerahan terpasang) dan pengadaan material yang pemanfaatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan tiap proyek.

Material cost are costs incurred on the installation work (submission is attached) and the procurement of material utilization is only to meet the needs of each project.

35. Beban Usaha / *35. Operating Expenses*

Rincian beban usaha untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Details of operating expenses for the current year are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Beban Umum dan Administrasi	146,382,671,607	154,381,461,891	*General and Administrative Expenses*
Beban Pengembangan Usaha	3,429,560,512	4,699,503,872	*Business Development Expenses*
Beban Pemasaran	737,623,102	1,195,954,013	*Marketing Expenses*
Jumlah	**150,549,855,221**	**160,276,919,776**	***Total***

Rincian beban administrasi dan umum untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Details of general and administrative expenses for the current year are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Beban Umum dan Administrasi Terdiri dari:			***General and Administrative Expenses Consist of:***
Beban Personalia	110,245,895,939	117,477,187,256	*Personnel Expenses*
Beban Informasi dan Teknologi	11,208,663,200	15,012,643,419	*Information and Technology Expenses*
Beban Penyusutan	18,850,558,052	16,208,171,957	*Depreciation Expense*
Beban Fasilitas Kantor	3,805,475,708	3,612,362,537	*Office Facilities Expenses*
Beban Keuangan	2,272,078,708	2,071,096,722	*Financial Charges*
Jumlah	**146,382,671,607**	**154,381,461,891**	***Total***

36. Perjanjian Ventura Bersama / *36. Joint Venture Agreements*

Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak sebagaimana tersebut pada masing-masing perjanjian, berupa penyerahan dana kepada Pengelola sesuai kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja sama menurut porsi yang ditetapkan. Pengelola proyek dibentuk dengan anggota yang berasal dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerja sama.

The Company entered into agreements with other parties, as specified in each agreement in the form of providing funds to Management in charge of the project based on the obligations set forth in the cooperative agreement according to the specified portion agreed percentage. Management in charge of the project was formed made up of the members each party to the cooperative agreement.

Pengelola proyek yang berasal dari Pemberi Kerja (*Owner*) dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan tersebut termasuk laporan

Management of the Project, who were coming from the Employer (Owner) takes full responsibility of the project activities, including preparing financial statements for

pertanggungjawaban keuangan dan proyek kepada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerja sama.

each part to the cooperative agreement.

Perjanjian ventura bersama antara lain, sebagai berikut:

The joint venture agreements are as follows:

No	Nama Proyek/ *Name of Project*	Porsi Bagi Hasil/ *Portion of share (%)*	Status/ *Status*
1	Jakarta Light Rapid Transit koridor 1 Kelapa Gading - Velodrome KSO PT Wijaya Karya Beton Tbk - Emrail Sdn Bhd	50% - 50%	Berjalan / *in Progress*
2	Pembangunan Pengaman Pantai Jakarta Tahap 3 Paket 2 KSO PT Wijaya Karya Beton Tbk - PT Pandji Pratama Indonesia	60% - 40%	Berjalan / *in Progress*
3	Pekerjaan Penanganan Longsor pada Jalan Tol Cisumdawu KM 177/Bojongtotor dan KM 178/Mulyasari KSO PT Wijaya Karya Beton Tbk - Wijaya Karya (Persero) Tbk	25% - 75%	Berjalan / *in Progress*
4	Proyek Pembangunan Hunian Tetap Paska Bencana Sulawesi Tengah KSO PT Wijaya Karya Beton Tbk - Murni Konstruksi	51% - 49%	Berjalan / *in Progress*
5	Proyek Paket Rancang Bangun SPAM Regional Jatiluhur 1 KSO PT Wijaya Karya Beton Tbk - Kidoh Construction Co	51% - 49%	Berjalan / *in Progress*
6	Proyek Metro Manilla Subway Project CP-102 KSO PT Wijaya Karya Beton Tbk - STA Clara International Corp	40% - 60%	Berjalan / *in Progress*

37. Ikhtisar Saldo dan Transaksi Dengan Pihak Berelasi

37. Summary of Related Parties Transactions and Balance

Sifat berelasi yang terjadi pada Grup adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh menteri negara BUMN merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan induk. Oleh karena itu secara tidak langsung Perusahaan memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.

2. Grup memiliki dana dan memiliki pinjaman dana pada bank-bank pemerintah atau bank-bank yang dimiliki oleh BUMN dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana berlaku pada pihak ketiga.
3. Grup mengadakan perjanjian dalam rangka usaha Perusahaan dengan BUMN-BUMN lain maupun anak perusahan.

The nature of related parties of the Group are as follows:

1. *The Government of the Republic of Indonesia which was represented by Minister of State-Owned Enterprise is the majority shareholder of the parent company. Therefore the Company has indirect affiliation with other stated owned companies through the inclusion of government capital of the Republic of Indonesia.*
2. *The Group has funds and loans in Government's Banks or State-Owned Banks with normal requirements and interest rate as applicable at any third party.*

3. *The Group enteres into agreements in relation to the Company’s opertations with other State-Owned Enterpise and subsidiaries*.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Details of the nature and type of material transactions with related parties are as follows:

Pihak Berelasi / *Related Parties*	Sifat Hubungan / *Nature of Relationship*	Jenis Transaksi / *Nature of Transaction*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penempatan Rekening, Pinjaman, dan Deposito/ *Placement of Accounts, Loans, dan Deposits*
PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penempatan Rekening dan Deposito/ *Placement of Accounts dan Deposits*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penempatan Rekening dan Deposito/ *Placement of Accounts dan Deposits*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penempatan Rekening dan Deposito/ *Placement of Accounts dan Deposits*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penempatan Rekening/ *Placement of Accounts*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penempatan Rekening dan Pinjaman/ *Placement of Accounts and Loans*

Pihak Berelasi / *Related Parties*	**Sifat Hubungan /** *Nature of Relationship*	**Jenis Transaksi /** *Nature of Transaction*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pemegang saham/ *Shareholders*	Pendapatan Usaha, Proyek Dalam Pelaksanaan, Piutang, Pendapatan yang Ditangguhkan, dan Utang Lain-lain/ *Revenue, Projects in Progress, Receivables, Deferred Revenues, and Other Payables*
PT Wijaya Karya Komponen Beton	Kepemilikan saham/ *Share ownership*	Penjualan Produk Beton/ *Concrete Product Sales*
PT Wijaya Karya Krakatau Beton	Kepemilikan saham/ *Share ownership*	Penjualan Produk Beton/ *Concrete Product Sales*
PT Citra Lautan Teduh	Kepemilikan saham/ *Share ownership*	Penjualan Produk Beton/ *Concrete Product Sales*
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	Kepemilikan saham/ *Share ownership*	Penjualan Produk Beton/ *Concrete Product Sales*
KSO WIKA Beton - PT Wijaya Karya Kratau Beton	Ventura Bersama/ *Joint Ventures*	Investasi Ventura Bersama/ *Joint Venture Investment*
KSO WIKA Beton - Emrail Sdn Bhd	Ventura Bersama/ *Joint Ventures*	Investasi Ventura Bersama/ *Joint Venture Investment*
KSO WIKA Beton - PT Murni Konstruksi Indonesia	Ventura Bersama/ *Joint Ventures*	Investasi Ventura Bersama/ *Joint Venture Investment*
KSO WIKA Beton - Kidoh Construction Co Ltd	Ventura Bersama/ *Joint Ventures*	Investasi Ventura Bersama/ *Joint Venture Investment*
KSO WIKA Beton - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Ventura Bersama/ *Joint Ventures*	Investasi Ventura Bersama/ *Joint Venture Investment*
KSO WIKA Beton - PT Pandji Pratama Indonesia	Ventura Bersama/ *Joint Ventures*	Investasi Ventura Bersama/ *Joint Venture Investment*
KSO WIKA Beton - STA Clara International Corp	Ventura Bersama/ *Joint Ventures*	Proyek Dalam Pelaksanaan dan Investasi Ventura Bersama/ *Project in Progress and Joint Venture Investment*
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Entitas Sepengendali/ *Entity Under Common Control*	Piutang, Proyek Dalam Pelaksanaan, Utang Usaha, dan Penjualan Produk Beton dan Jasa Konstruksi/ *Receivables, Project in Progress, Account Payables, and Concrete Products and Construction Services Sales*
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	Entitas Sepengendali/ *Entity Under Common Control*	Piutang, Proyek Dalam Pelaksanaan, Pendapatan yang Ditangguhkan, dan Penjualan Produk Beton dan Jasa Konstruksi/ *Receivables, Project in Progress, Deferred Revenues, and Concrete Products and Construction Services Sales*
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	Entitas Sepengendali/ *Entity Under Common Control*	Piutang Lain-Lain/ *Other Receivables*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Piutang, Pendapatan yang Ditangguhkan, dan Penjualan Produk Beton dan Jasa Konstruksi/ *Receivables, Deferred Revenues, and Concrete Products and Construction Services Sales*
PT Waskita Beton Precast Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Piutang dan Investasi Jangka Panjang/ *Receivables and Long-term Investment*
PT Wege Solusi Proklamasi	Pengendalian Tidak Langsung Pemegang Saham/ *Indirect Control Shareholder*	Investasi Jangka Panjang/ *Long-term Investment*
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Piutang, Pendapatan yang Ditangguhkan, dan Penjualan Produk Beton/ *Receivables, Deferred Revenues, and Concrete Products Sales*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Piutang, Pendapatan yang Ditangguhkan, dan Penjualan Produk Beton/ *Receivables, Deferred Revenues, and Concrete Products Sales*
PT Brantas Abipraya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Piutang dan Penjualan Produk Beton/ *Receivables and Concrete Product Sales*
PT Hutama Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Piutang dan Penjualan Produk Beton dan Jasa Konstruksi/ *Receivables and Concrete Products and Construction Services Sales*
PT Hutama Karya Infrastruktur	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Piutang, Proyek Dalam Pelaksanaan, Pendapatan yang Ditangguhkan, dan Penjualan Produk Beton dan Jasa Konstruksi/ *Receivables, Project in Progress, Deferred Revenues, and Concrete Products and Construction Services Sales*
Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penjualan Produk Beton/ *Concrete Product Sales*
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penjualan produk Beton/ Penjualan Produk Beton/
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penjualan Produk Beton/ *Concrete Product Sales*
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - MCM	Pengendalian Tidak Langsung Pemegang Saham/ *Indirect Control Shareholder*	Penjualan Produk Beton/ *Concrete Product Sales*
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - Ragam	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ *Limited Control Share Holder*	Penjualan Produk Beton/ *Concrete Product Sales*
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - Lestari	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ *Limited Control Share Holder*	Penjualan Produk Beton/ *Concrete Product Sales*
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - Bahagia Bangun Nusa	Pengendalian Tidak Langsung Pemegang Saham/ *Indirect Control Shareholder*	Penjualan Produk Beton/ *Concrete Product Sales*
KSO PT Wijaya Karya Gedung - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ *Limited Control Share Holder*	Penjualan Produk Beton/ *Concrete Product Sales*
PT Rekayasa Industri	Pengendalian Terbatas Pemerintah Pusat/ *Limited Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penjualan Produk Beton/ *Concrete Product Sales*
High Speed Railway Contractor Consorsium (HSRCC)	Entitas Sepengendali/ *Entity Under Common Control*	Penjualan Produk Beton/ *Concrete Product Sales*
PT Barata Indonesia (Persero)	Pengendalian Terbatas Pemerintah Pusat/ *Limited Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penjualan Produk Beton/ *Concrete Product Sales*
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Aneka Dharma Persada	Pengendalian Terbatas Pemerintah Pusat/ *Limited Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penjualan produk Beton/ *Concrete Product Sales*
PT BGR Logistik Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Subkontraktor/ *Subcontractor*

Pihak Berelasi / *Related Parties*	Sifat Hubungan / *Nature of Relationship*	Jenis Transaksi / *Nature of Transaction*
PT Pindad (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Subkontraktor/ *Subcontractor*
PT Semen Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Pemasok Material/ *Material Suplier*
PT Semen Indonesia Beton	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ *Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Pemasok Material/ *Material Suplier*
PT Semen Padang	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ *Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Pemasok Material/ *Material Suplier*
PT BNI Life Insurance	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ *Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Piutang Lain-Lain/ *Other Receivables*
PT Mandiri Inhealth Indemnity	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ *Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Piutang Lain-Lain/ *Other Receivables*

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Details of balances and transactions balances with parties are related as follows:

	2025 Rp	2025 %	2024 Rp	2024 %	
Aset					***Assets***
Kas dan Setara Kas	406.763.435.832	98,79	588.720.371.961	98,52	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha- Bersih	425.352.962.906	54,77	417.835.737.496	45,48	*Trade Receivables-Net*
Piutang Retensi- Bersih	3.757.922.744	13,16	14.699.045.648	32,47	*Retention Receivables-Net*
Piutang Lain-lain	9.169.644.118	73,62	11.983.119.623	91,48	*Other Receivable*
Piutang yang Belum Ditagih - Bersih	419.793.379.813	72,68	660.681.241.810	71,55	*Accrued Income - Net*
Tagihan Bruto - Bersih	11.367.704.864	15,82	21.535.434.206	55,60	*Gross Amount Due From Customer - Net*
Proyek Dalam Pelaksanaan	43.510.131.215	19,14	6.857.298.469	3,52	*Project on Progress*
Liabilitas					***Liabilities***
Utang Pemasok	147.528.883.053	15,25	107.680.168.584	8,22	*Supplier Payable*
Utang Subkontraktor	20.387.884.331	6,42	22.835.447.675	6,17	*Subcontractor Payable*
Supply Chain Finance	122.901.498.310	88,27	197.788.221.254	77,26	*Supply Chain Finance*
Utang Bank Jangka Panjang	202.671.000.000	100,00	291.254.000.000	62,47	*Long-term Bank Loans*
Uang Muka dari Pelanggan	61.523.086.128	29,34	28.805.858.471	13,44	*Advances from customer*
Pendapatan Diterima di Muka	33.997.031.213	54,99	70.142.818.235	44,23	*Unearned Revenue*
Utang Lain-lain	2.180.554.712	65,30	393.859.697	27,34	*Other Payables*
Pendapatan					***Revenue***
Pendapatan Usaha	1.337.882.657.689	37,31	1.891.674.752.898	38,64	*Revenue*

38. Aset dan Liabilitas Dalam Mata Uang Asing

38. Assets and Liabilities Denominated in Foreign Currencies

Informasi aset dan liabilitas dalam mata uang asing Grup adalah sebagai berikut:

Information on the Group's assets and liabilities in foreign currency are as follows:

	2025						
	USD	Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent Rupiah*	PHP	Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent Rupiah*	SGD	Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent Rupiah*	
Aset							***Assets***
Kas dan Setara Kas	321,283	5,391,767,613	7,674,273	2,188,510,661	9,433	123,274,514	*Cash and Cash Equivalent*
Valuta Asing Bersih	**321,283**	**5,391,767,613**	**7,674,273**	**2,188,510,661**	**9,433**	**123,274,514**	***Net Foreign Exchange***

	2024						
	USD	Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent Rupiah*	PHP	Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent Rupiah*	SGD	Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent Rupiah*	
Aset							***Assets***
Kas dan Setara Kas	239,536	3,871,380,024	11,180,678	3,124,104,960	9,553	113,861,355	*Cash and Cash Equivalent*
Valuta Asing Bersih	**239,536**	**3,871,380,024**	**11,180,678**	**3,124,104,960**	**9,553**	**113,861,355**	***Net Foreign Exchange***

39. Informasi Segmen

39. Segmental Information

Informasi segmen operasi Grup terdiri dari tiga jenis dengan rincian sebagai berikut:

1. Segmen operasi beton merupakan pendapatan atas penjualan produk beton putar dan non putar.
2. Segmen operasi *quarry* merupakan pendapatan beton non putar berupa *ready mix*.

The Group operational segment information is as follows:

1. *The concrete operating represents generates revenue from the sale of spun and precast concrete products*
2. *The mining operation segment represents precast concrete revenue in the form of ready mix.*

3. Segmen operasi jasa merupakan pendapatan atas jasa konstruksi dan jasa atas pemasangan beton

3. The service operating segment represents revenue from construction services and concrete installation services

	2025					
	Beton/ *Concrete* Rp	***Quarry* / *Quarry*** Rp	**Jasa/ *Service*** Rp	**Kantor Pusat/ *Head office*** Rp	**Jumlah/ *Total*** Rp	
Penjualan Bersih	3,100,577,140,262	1,792,931,128	483,492,183,745	--	3,585,862,255,135	*Net Sales*
Beban Pokok Penjualan	(2,878,443,351,346)	(1,664,480,660)	(448,853,487,196)	--	(3,328,961,319,202)	*Cost Of Revenues*
Hasil Segmen	222,133,788,917	128,450,468	34,638,696,549	--	256,900,935,933	*Segment Result*
Beban Usaha	(130,175,507,690)	(75,274,928)	(20,299,072,604)	--	(150,549,855,221)	*Operating Expenses*
Pendapatan bunga	4,341,336,658	2,510,409	676,971,495	--	5,020,818,562	*Interest Income*
Beban bunga	(17,035,014,700)	(9,850,620)	(2,656,375,276)	--	(19,701,240,597)	*Interest Expenses*
Penghasilan (beban) lain - lain bersih	(62,091,573,789)	(35,904,901)	(9,682,323,402)	--	(71,809,802,092)	*Other Income (Expenses)*
Laba Sebelum Pajak	17,173,029,395	9,930,428	2,677,896,762	--	19,860,856,585	*Profit Before Tax*
Beban Pajak	(13,608,533,387)	(7,869,233)	(2,122,062,838)	--	(15,738,465,457)	*Tax Expenses*
Laba Bersih Tahun Berjalan	**3,564,496,008**	**2,061,196**	**555,833,924**	**--**	**4,122,391,128**	***Net Income for the year***
Informasi lainnya						*Other information*
Aset Segmen	3,572,617,317,299	779,033,040,088	338,084,606,461	1,600,733,452,975	6,290,468,416,823	*Segment assets*
Liabilitas Segmen	335,312,738,800	228,801,775,998	73,921,835,864	1,966,419,834,874	2,604,456,185,536	*Segment liabilities*
Perolehan Aset Tetap	5,076,189,185	680,910,459	459,650,734	2,115,247,978	8,331,998,357	*Capital expenditures*
Penyusutan Aset Tetap	74,263,500,974	17,552,860,492	7,313,482,852	33,655,618,618	132,785,462,936	*Depreciation*

	2024					
	Beton/ *Concrete* Rp	***Quarry* / *Quarry*** Rp	**Jasa/ *Service*** Rp	**Kantor Pusat/ *Head office*** Rp	**Jumlah/ *Total*** Rp	
Penjualan Bersih	4,249,965,208,277	1,855,578,811	644,203,553,276	--	4,896,024,340,364	*Net Sales*
Beban Pokok Penjualan	(3,928,222,138,592)	(1,709,730,941)	(592,406,279,701)	--	(4,522,338,149,234)	*Cost Of Revenues*
Hasil Segmen	321,743,069,685	145,847,870	51,797,273,575	--	373,686,191,130	*Segment Result*
Beban Usaha	(138,872,011,928)	(61,598,463)	(21,343,309,385)	--	(160,276,919,776)	*Operating Expenses*
Pendapatan bunga	4,277,687,573	1,137,906	394,274,284	--	4,673,099,763	*Interest Income*
Beban bunga	(31,959,672,011)	(13,883,293)	(4,810,435,251)	--	(36,783,990,555)	*Interest Expenses*
Penghasilan (beban) lain - lain bersih	(80,696,504,576)	(37,759,818)	(13,083,434,783)	--	(93,817,699,177)	*Other Income (Expenses)*
Laba Sebelum Pajak	74,492,568,743	33,744,202	12,954,368,440	--	87,480,681,385	*Profit Before Tax*
Beban Pajak	(20,209,088,591)	(8,823,497)	(3,063,264,295)		(23,281,176,384)	*Tax Expenses*
Laba Bersih Tahun Berjalan	**54,283,480,152**	**24,920,704**	**9,891,104,145**	**--**	**64,199,505,001**	***Net Income for the year***
Informasi lainnya						*Other information*
Aset Segmen	4,086,161,222,521	891,014,714,634	386,682,391,692	1,830,830,000,031	7,194,688,328,878	*Segment assets*
Liabilitas Segmen	451,630,223,421	308,171,403,159	99,564,768,599	2,648,556,188,297	3,507,922,583,476	*Segment liabilities*
Perolehan Aset Tetap	87,431,618,094	11,727,912,628	7,916,964,087	36,432,754,315	143,509,249,124	*Capital expenditures*
Penyusutan Aset Tetap	74,076,460,168	17,508,651,680	7,295,063,040	33,570,853,236	132,451,028,124	*Depreciation*

Informasi segmen geografis Grup adalah sebagai berikut:

The Group geographic segment information is as follows:

	2025 Rp	**2024** Rp	
Total Aset			***Assets Total***
Jawa	4,175,712,038,999	4,775,947,462,258	*Java*
Luar Jawa	2,114,756,377,824	2,418,740,866,620	*Non - Java*
Jumlah	**6,290,468,416,823**	**7,194,688,328,878**	***Total***
Pendapatan			***Revenue***
Jawa	1,927,116,879,401	2,631,225,205,252	*Java*
Luar Jawa	1,658,745,375,734	2,264,799,135,112	*Non - Java*
Jumlah	**3,585,862,255,135**	**4,896,024,340,364**	***Total***
Laba Tahun Berjalan			***Profit for the Year***
Jawa	2,215,458,643	42,975,024,232	*Java*
Luar Jawa	1,906,932,485	21,224,480,769	*Non - Java*
Jumlah	**4,122,391,128**	**64,199,505,001**	***Total***

40. Perikatan dan Perjanjian / *40. Commitments and Agreements*

Grup melakukan perikatan kontrak pendapatan dengan berbagai pihak. Kontrak signifikan pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

The Group has entered into a construction contract with other parties. Significant contracts as December 31, 2025 are as follow:

No./ *No.*	Nama Proyek/ *Name of Project*	Nilai Kontrak/ *Contract Value*	Pemberi Kerja/ *Owner*	Masa Pelaksanaan/ *Contract Period*	Nomor Kontrak/ *Contract Number*
1	KHS PLN 2023 & 2024	397,243,309,250	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	30 September 2024 - 19 Desember 2025 / *December 31, 2024 - December 19, 2025*	0401.Pj/DAN.01.03/F01020000/2023
2	Metro Manila Subway Project CP106	176,064,636,002	PT Colas Rail Philippines	1 Januari 2025 - 31 Desember 2025 / *January 1, 2025 - December 31, 2025*	PR13104762
3	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Akses Utama IKK	158,492,250,000	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	12 Juni 2025 - 12 Juni 2026 / *Juni 12, 2025 - Juni 12, 2026*	IK KRW/CIVIL/MAIN-BRIDGE/WIKA/2025
4	Toll Kataraja Tahap 2 (PI)	88,020,520,000	PT Duta Graha Karya	1 Maret 2025 - 27 September 2025 / *March 1, 2025 - September 27, 2025*	054/DGK/I/2025
5	Toll Betung Jambi Seksi 2B (Simpang Sekayu - Tempino)	84,416,398,500	PT Hutama Karya Infrastruktur	24 Januari 2025 - 24 Januari 2026 / *January 24, 2025 - January 24, 2026*	HKI.SCP/MA.022.33/SPJB.016.348-BETJAM.Z2B/I/2025
6	MMP Nickel Smelter Project	66,670,326,773	PT Mitra Murni Perkasa	21 Februari 2025 - 31 Desember 2025 / *February 21, 2025 - December 31, 2025*	083-1/LGL/MMP-WKB/X/2023
7	Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi 3 Fase 2 Paket 3	60,632,353,700	KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk - PT Waskita Karya (Persero) Tbk - PT Minarta Wahana Tunggal	4 September 2025 - 30 November 2025 / *September 4, 2025 - November 30, 2025*	143/EXT/PP-AK-WSKT-MWT,KSO/2025
8	New Priok Eastern Access (NPEA) (Area Laut) - PO 5	53,676,993,500	PT Pembangunan Perumahan	15 Desember 2025 - 7 Mei 2026 / *December 15, 2025 - May 7, 2026*	0059/PO/325002/XII/2025
9	Toll Kataraja Tahap 2 (BR)	50,729,800,000	PT Duta Graha Karya	1 Maret 2025 - 27 September 2025 / *March 1, 2025 - September 27, 2025*	054/DGK/I/2025
10	Penambahan Rasio Besi Box Girder HBR II	48,532,093,600	PT Girder Indonesia	14 Maret 2025 - 31 Agustus 2025 / *March 14, 2025 - August 31, 2025*	SPMK.HK-04/056/III/2025

Perjanjian Fasilitas Kredit / *Credit Facility Agreement*

Perusahaan / *The Company*

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk / ***PT Bank Mandiri (Persero) Tbk***

Pada tanggal 28 Mei 2025, Perusahaan telah melakukan persetujuan perpanjangan dan tambahan limit fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan surat penawaran pemberian kredit No. CBG.CB5/SIC2.SPPK.231/2025 atas pemberian fasilitas kredit terdiri dari Fasilitas KMK Transaksional sebesar Rp700.000.000.000, Fasilitas *Non-Cash Loan* sebesar Rp1.400.000.000.000, *Global Line* (LC/SKBN) sebesar Rp500.000.000.000, Fasilitas Kredit Investasi (*Refinancing*) I sebesar Rp500,000,000,000, dan Fasilitas Kredit Investasi (*Refinancing*) II sebesar Rp800,000,000,000 dengan tingkat bunga sebesar 8,00% - 8,65% per tahun.

On May 28, 2025, the Company has approved the extension and increase of the credit facility limit with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with the offer credit letter No. CBG.CB5/SIC2.SPPK.231/2025 for the provision of credit facilities consisting of Transactional Working Capital Facility amounting to Rp700,000,000,000, a Non-Cash Loan Facility amounted to Rp1,400,000,000,000, Global Line (LC/SKBN) Facility amounted to Rp500,000,000,000, Investment Credit Facility (Refinancing) I amounted to Rp500,000,000,000, and Investment Credit Facility (Refinancing) II amounted to Rp800,000,000,000, with an interest rate ranging from 8.00% - 8.65% per annum.

Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas sejak 11 Juni 2025 sampai dengan 10 Juni 2026.

The validity of the agreement according to the extension of facilities is from June 11, 2025 until June 10, 2026.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang, persediaan, tanah, dan bangunan (Catatan 5, 9, dan 16).

The loan is pledged by receivebles, inventories, land, and building (Notes 5, 9 and 16).

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

a. *Current Ratio* minimal 100%;
b. *Debt to Equity Ratio* maksimal 300%; dan
c. *Debt Service Coverage* minimal 100%.

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

a. Current Ratio minimum of 100%;
b. Debt to Equity Ratio maximum of 300%; and
c. Debt Service Coverage minimum of 100%.

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has complied all the terms and conditions required by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Pada tanggal 8 Juli 2025, Perusahaan telah melakukan penandatanganan perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan perjanjian fasilitas No. 05/036-3/SP3/CB2.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
On July 8, 2025 the Company entered into a facility agreement with PT Bank Syariah Indonesia Tbk formerly based on the facility agreement No. 05/036-3/SP3/CB2.

Fasilitas kredit yang diberikan berupa Fasilitas Modal Kerja Transaksional sublimit, Fasilitas Bank Garansi dengan limit sebesar Rp200.000.000.000.

The credit facility provided is in the form of a Transactional Working Capital Facility sub-limit, Bank Guarantees Facilities with a limit of Rp200,000,000,000.

Tingkat bunga yang digunakan akan ditentukan dan diatur lebih lanjut pada setiap penarikan pembiayaan melalui akad pembiayaan Musyarakah.

The interest rate used will be further determined and regulated at each withdrawal of financing through a Musyarakah financing agreement.

Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas sejak 28 Juli 2025 sampai dengan 28 Juli 2026.

The validity period of the agreement according to the extension of facilities is from July 28, 2025 until July 28, 2026.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang Perusahaan.

The loan is pledged by the Company's receivables.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:
a. *Current Ratio* minimal 100%;
b. *Debt to Equity Ratio* maksimal 300%; dan
c. *Debt Security Cover Ratio* minimal 100%.

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:
a. Current Ratio minimum of 100%;
b. Debt to Equity Ratio at maximum 300%; and
c. Debt Security Cover Ratio minimum of 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2025 Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

As of December 31, 2025 the Company has complied all the terms and conditions required by PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank)
Pada tanggal 20 Juni 2025, PT Citra Lautan Teduh (CLT) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) mengadakan Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor ("KMKE") dengan nilai plafon pembiayaan sebesar Rp60.000.000.000 dan Fasilitas Penjaminan dengan nilai maksimal pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000. Jangka waktu fasilitas KMKE adalah 12 bulan sejak tanggal perjanjian dan dikenakan bunga JIBOR 3 Months (3M) + 1,78% *per annum*. Fasilitas pinjaman KMKE ini digunakan untuk

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank)
On June 20, 2025, PT Citra Lautan Teduh (CLT) and Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) entered into a Working Capital Export Credit Facility Agreement ("KMKE") with a financing limit (plafond) of Rp60,000,000,000 and a Guarantee Facility with a maximum financing limit of Rp10,000,000,000. The term of the KMKE facility is 12 months from the agreement date and it bears interest at JIBOR 3 Months (3M) + 1.78% per annum. This KMKE loan facility is used to accelerate the payment of the Debtor's trade

percepatan pembayaran piutang usaha debitur kepada pemberi kerja untuk proyek luar negeri yang berorientasi ekspor dan/ atau penunjangan ekspor.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang, persediaan, tanah dan bangunan (Catatan 5, 9, dan 16).

CLT diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:
a. *Current Ratio* minimal sebesar 100%;
b. *Debt to Equity Ratio* maksimal 300%; dan
c. *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, CLT telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank).

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Pada tanggal 20 Maret 2024, Perusahaan telah menandatangani perpanjangan perjanjian pembiayaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan perjanjian No. 042/BN/CBT-VII/III/2024.

Fasilitas jangka panjang yang diberikan berupa Fasilitas *CC Lines iB Wakalah*, Bank Garansi, Bank Garansi iB Wakalah dengan limit sebesar Rp300.000.000 dan Fasilitas Supplier *Financing (SuFi) iB Without Recourse* tanpa limit.

Skema ujrah bagi hasil bersifat floating setiap bulan, sesuai Nota Komitmen Proyeksi Pendapatan/Laba yang dibuat oleh Bank CIMB Niaga dan disetujui oleh Perusahaan. Tingkat ujrah bagi hasil pada tahun 2022 dimulai dari 53,15% untuk Perusahaan dan 46,85% untuk Bank hingga 66,53% untuk Perusahaan dan 33,47% untuk Bank.

Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas sejak 20 Maret 2024 sampai dengan 16 Maret 2025. Perusahaan tidak melakukan perpanjangan atas perjanjian terkait.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang Perusahaan (Catatan 5).

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

receivables from the employer for overseas projects with an export orientation and/or to support export activities.

The loan is pledged by receivebles, inventories, land and building (Notes 5, 9 and 16).

CLT is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:
a. Current Ratio minimum of 100%;
b. Debt to Equity Ratio maximum of 300%; and
c. Debt Service Coverage Ratio minimum of 100%.

As of December 31, 2025, CLT has complied all the terms and conditions required by Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank).

PT Bank CIMB Niaga Tbk
On March 20, 2024, the Company signed an extension of the financing agreement with PT Bank CIMB Niaga Tbk under agreement No. 042/BN/CBT-VII/III/2024.

The long-term facilities provided include the CC Lines iB Wakalah Facility, Bank Guarantee, and Bank Guarantee iB Wakalah with a limit of Rp300,000,000, as well as the Supplier Financing (SuFi) iB Without Recourse Facility with no limit.

The profit sharing ujrah scheme is floating every month, according to the Income/Profit Projection Commitment Note made by Bank CIMB Niaga and approved by the Company. The ujrah profit sharing rate in 2022 starts from 53.15% for Companies and 46.85% for Banks up to 66.53% for the Company and 33.47% for Bank.

The validity period of the agreement according to the extension of facilities is from March 20, 2024 until March 16, 2025. The Company were not renewed related contractual terms.

The loan is pledged by the Company's receivables (Note 5).

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

a. *Current Ratio* minimal 100%;
b. *Debt to Equity Ratio* maksimal 400%; dan
c. *Debt Security Cover Ratio* minimal 120%.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

a. *Current Ratio minimum of 100%;*
b. *Debt to Equity Ratio at maximum 400%; and*
c. *Debt Security Cover Ratio minimum of 120%.*

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has complied all the terms and conditions required by the PT Bank CIMB Niaga.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Pada tanggal 18 November 2024 Perusahaan telah melakukan persetujuan perpanjangan Fasilitas Kredit kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan No. 40/KKO-KO2/SPPK/2024.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
On November 18, 2024 Company has approved the extension of of credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk No. 40/KKO-KO2/SPPK/2024.

Fasilitas yang diberikan berupa Fasilitas KMK R/C Terbatas Switchable Fasilitas *Non Cash Loan* (NCL) dengan limit sebesar Rp125.000.000.000.

The facility provided is in the form of a Limited Switchable KMK R/C Facility, a Non Cash Loan (NCL) facility with a limit of Rp125,000,000,000.

Tingkat bunga yang digunakan berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun.

The interest rate used ranges from 8.75% - 9.00%, per annum.

Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas sejak 23 November 2024 sampai dengan 23 November 2025. Perusahaan tidak melakukan perpanjangan atas perjanjian terkait.

The validity period of the agreement according to the extension of facilities is from November 23, 2024 until November 23, 2025. The Company were not renewed related contractual terms.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang dan persediaan Perusahaan.
Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:
a. *Current Ratio* minimal 100%;
b. *Debt to Equity Ratio* maksimal 200%; dan
c. *Debt Security Cover Ratio* minimal 100%.

The loan is collateralized with the Company's receivables and inventories.
The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:
a. *Current Ratio minimum of 100%;*
b. *Debt to Equity Ratio at maximum 200%; and*
c. *Debt Security Cover Ratio minimum of 100%.*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has complied all the terms and conditions required by the PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Pada tanggal 11 Oktober 2024, Perusahaan telah melakukan persetujuan perpanjangan fasilitas kredit kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan surat penawaran pemberian kredit

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
On October 11, 2024, the Company has approved the extension of the credit facility to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk with the offer credit letter No.COB3/4/113/R.

No.COB3/4/113/R.	
Fasilitas yang diberikan berupa Fasilitas KMK Transaksional sebesar Rp200.000.000.000, dan Fasilitas *Non Cash Loan* sebesar Rp200.000.000.000	*The facility provided consisting of, Transactional KMK Facility amounting to Rp200,000,000,000, and Non-Cash Loan Facility amounting to Rp200,000,000,000*
Tingkat bunga berkisar 8,00% - 8,75% per tahun.	*The interest rate is around 8.00% - 8.75%, per annum.*
Masa berlaku perjanjian sesuai perjanjian fasilitas adalah 9 November 2024 sampai dengan 8 November 2025. Perusahaan tidak melakukan perpanjangan atas perjanjian terkait.	*The validity period of the agreement according to the extension of facilities is from November 9, 2024 until November 8, 2025. The Company were not renewed related contractual terms.*
Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang dan persediaan Perusahaan.	*The loan is collateralized with the Company's receivables and inventories.*
Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: a. *Current Ratio* minimal 100%; b. *Debt to Equity Ratio* maksimal 400%; dan c. *Debt Security Cover Ratio* minimal 100%.	*The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:* *a. Current Ratio minimum of 100%;* *b. Debt to Equity Ratio at maximum 400%; and* *c. Debt Security Cover Ratio minimum of 100%.*
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	*As of December 31, 2025 and 2024, the Company has complied all the terms and conditions required by the PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*

41. *Supply Chain Financing (SCF)*

41. *Supply Chain Financing (SCF)*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah mendapatkan fasilitas SCF yang digunakan untuk membayar tagihan mitra kerja sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024 the Company has obtained the SCF facilities were used to pay working partner's bill as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
Perusahaan/ The *Company*		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	500,000,000,000	500,000,000,000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	200,000,000,000	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	97,000,000,000
Entitas Anak/ *Subsidiaries*		
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	100,000,000,000
PT Citra Lautan Teduh		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	75,000,000,000
Subjumlah/ *Subtotal*	**700,000,000,000**	**772,000,000,000**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Perusahaan/ *The Company*		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	100,000,000,000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	--	150,000,000,000
Entitas Anak/ *Subsidiaries*	**--**	**--**
Subjumlah/ *Subtotal*	**--**	**250,000,000,000**
Jumlah/ *Total*	**700,000,000,000**	**1,022,000,000,000**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah menggunakan fasilitas SCF tersebut sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024 The Company has used its SCF facilities as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
Utang Usaha - *Supply Chain Financing* (Catatan 20)/		
Trade Payable - Supply Chain Financing (Notes 20)		
Perusahaan/ *The Company*		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	122,901,498,310	132,905,972,593
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	16,336,504,380	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	35,465,819,002
Entitas Anak/ *Subsidiaries*		
PT Citra Lautan Teduh		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	1,538,286,694
PT Wika Pracetak Gedung		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	27,878,142,965
Subjumlah/ *Subtotal*	**139,238,002,690**	**197,788,221,254**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Perusahaan/ *The Company*		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	--	58,221,047,840
Subjumlah/ *Subtotal*	**--**	**58,221,047,840**
Jumlah/ *Total*	**139,238,002,690**	**256,009,269,094**

42. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan dan Modal / *Financial Instrument, Financial and Capital Risk Management*

Kategori dan Kelas Instrumen Keuangan / *Categories and Classes Financial Instruments*

	2025 Rp	2024 Rp	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi			***Financial Assets Measured at Amortized Cost***
Kas dan Setara Kas	411,725,808,388	597,554,294,190	*Cash and Cash Equivalent*
Piutang Usaha	776,662,321,368	918,684,918,481	*Trade Receivables*
Piutang Retensi	28,564,924,176	45,266,756,499	*Retention Receivables*
Piutang yang Belum Ditagih	577,618,888,084	923,356,246,641	*Accrued Income*
Tagihan Bruto Pemberi Kerja	71,847,480,675	38,733,579,567	*Gross Amount Due From Customer*
Piutang Lain-lain	12,456,098,469	13,099,021,155	*Other Receivable*
Aset Tidak Lancar Lainnya	22,655,700,000	50,874,310,552	*Other Non- Current Assets*
	1,901,531,221,160	**2,587,569,127,085**	
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)			***Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)***
Investasi Jangka Panjang Lainnya	6,143,595,743	2,500,000,000	*Other Long Term Invesment*
Jumlah	**1,907,674,816,903**	**2,590,069,127,085**	***Total***
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Liabilitas pada Biaya Perolehan Diamortisasi			***Liabilities at Amortized Cost***
Pinjaman Jangka Pendek	10,017,009,920	--	*Short-Term Loans*
Utang Usaha	1,425,371,484,401	1,974,012,150,023	*Trade Payables*
Beban Akrual	587,332,996,246	582,020,283,767	*Accrued Expenses*
Utang Lain-lain	3,339,365,897	1,440,687,071	*Other Payables*
Pinjaman Bank Jangka Panjang	202,671,000,000	466,254,000,000	*Bank Loan Long - Term*
Liabilitas Sewa	--	6,566,084,523	*Lease Liabilities*
Jumlah	**2,228,731,856,464**	**3,030,293,205,384**	***Total***

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan / *Financial Risk Management Policies and Objectives*

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup terekspos terhadap berbagai risiko

Various activities undertaken to the Group's is exposed to various financial risks,

keuangan, termasuk dampak nilai tukar mata uang asing, tingkat harga komoditas dan tingkat suku bunga. Program manajemen risiko keseluruhan yang dimiliki Grup ditujukan untuk menghadapi ketidakpastian harga komoditas dan untuk meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Grup.

including the impact of foreign currency exchange rates, commodity prices and the level of interest rates. Group's overall risk management programs aim to deal with the uncertain price of commodities and to minimize its adverse impact to Group's financial performance.

Manajemen risiko dijalankan oleh Dewan Direksi Grup. Dewan Direksi melakukan identifikasi, evaluasi dan lindung nilai terhadap risiko-risiko keuangan, apabila dianggap perlu. Komite menentukan prinsip manajemen risiko secara keseluruhan, termasuk risiko pasar, kredit dan likuiditas.

Risk management is run by Group's Board of Directors. Board of Directors perform identification, evaluation and hedging of financial risks, if deemed necessary. The Committee determines the overall risk management principles, including market risk, credit risk and liquidity risk.

1. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar mengandung 2 tipe risiko: risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai mata uang asing. Instrumen keuangan yang terpengaruh oleh risiko pasar termasuk kas dan setara kas, piutang usaha dan utang usaha.

1. Market Risk

Market risk is the risk of the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk contains three types of risk: price risk, interest rate risk and foreign currency risk. Financial instruments affected by market risk include cash and cash equivalents, accounts receivable and accounts payable.

a. Risiko suku bunga

Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Grup memiliki pinjaman jangka pendek dengan bunga mengambang. Tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan terjadi secara tiba-tiba dapat berpengaruh terhadap menurunnya laba Grup.

a. Interest rate risk

Cash flow interest rate risk is the risk that future cash flows of a financial instrument fluctuate due to changes in market interest rates. The Group has short-term loans with floating interest. The quite high interest rate that suddenly occurs will affect the decreasing Group's Income.

Pinjaman Grup yang dikenakan suku bunga mengambang untuk pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing - masing sebesar Rp212.688.009.920 dan Rp472.820.084.523.

The Group loans which bear floating interest rates As of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp*212,688,009,920 and Rp472,820,084,523, respectively.*

Dampak fluktuasi suku bunga 100 basis poin terhadap laba sebelum pajak dengan semua variabel lain tetap:

Effect of interest rates fluctuation of 100 basis points to income before tax with all other variables constant:

	2025 Rp	2024 Rp	
Naik 100 bps	(2,126,880,099)	(4,728,200,845)	*Increase 100 bps*
Turun 100 bps	2,126,880,099	4,728,200,845	*Decrease 100 bps*

b. Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko akibat perubahan nilai tukar mata

b. Foreign currency risk

Foreign currency risk rate is the risk of changes in foreign currency

uang asing yang digunakan oleh Perusahaan. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang pengadaan barang dan jasa dalam mata uang USD dan PHP.

exchange rates used by the Company. The Company's exposure to exchange rate fluctuations primarily derived from procurement of debt denominated in USD and PHP.

Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 5% perubahan kurs nilai mata uang asing terhadap laba sebelum pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

Sensitivity analysis of the 5% fluctuation in the foreign exchange rates to profit before tax with another variance considered as constant is as follow:

	2025 Rp	2024 Rp	
Kenaikan 5%	10,634,400,496	23,641,004,226	*Increase 5%*
Penurunan 5%	(10,634,400,496)	(23,641,004,226)	*Decrease 5%*

2. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang dihadapi Grup sebagai akibat wanprestasi dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu pelanggan dan pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

Kebijakan manajemen dalam mengantisipasi risiko kredit yang timbul dari pelanggan adalah sebagai berikut:

a. Grup hanya akan melakukan hubungan usaha dengan pihak ketiga yang diakui, kredibel dan *bankable*;
b. Mempunyai kebijakan untuk penjualan kredit dan semua pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit.

Grup meminimalkan risiko kredit aset keuangan seperti kas setara kas dengan mempertahankan saldo kas minimum dan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana. Eksposur maksimum risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat sebagaimana diungkapkan pada Catatan 5, 6, dan 7. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan.

2. Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss from defaulted third parties. Third parties are referred to the customers and counter parties that fail to discharge their contractual obligations.

Management policies in anticipation of this credit risk arise from the customer are as follows:

a. The Group will only do business relationship with third parties who are recognized, credible and bankable;
b. Have a policy for credit sales and all third parties who will make credit sales have to go through credit verification procedures.

The Group minimise credit risks financial assets such as cash and cash equivalent by maintaining minimum cash balance and select qualified bank for the placement of funds. The maximum exposure to the credit risk is represented by the carrying amount as disclosed in Notes 5, 6, and 7. There is no significant concentration of credit risk.

	2025 Rp	2024 Rp	
Piutang Usaha	903,066,465,367	1,055,726,101,065	*Trade Receivables*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(126,404,143,999)	(137,041,182,584)	*Allowances for Impairment Losses*
Piutang Retensi	30,998,410,100	48,797,123,384	*Retention Receivables*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2,433,485,924)	(3,530,366,885)	*Allowances for Impairment Losses*
Piutang yang Belum Ditagih	583,247,494,913	928,379,844,716	*Accrued Income*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(5,628,606,829)	(5,023,598,075)	*Allowances for Impairment Losses*
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja	72,928,575,054	39,438,452,621	*Gross Amount Due From Customer*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1,081,094,379)	(704,873,054)	*Allowances for Impairment Losses*
Jumlah	**1,454,693,614,303**	**1,926,041,501,188**	***Total***

3. Risiko Likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Grup dan pendanaan jangka pendek - menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel berikut juga merinci ekspektasi jatuh tempo untuk aset keuangan non-derivatif Grup. Tabel disusun berdasarkan jatuh tempo kontrak tak terdiskonto dari aset keuangan termasuk bunga yang akan diperoleh dari aset tersebut. Dicantumkannya informasi aset keuangan non-derivatif diperlukan dalam rangka untuk memahami manajemen risiko likuiditas Grup dimana likuiditas dikelola atas dasar aset dan liabilitas bersih.

3. Liquidity risk

The ultimate responsibility for liquidity risk is in Board of Directors, whom has established liquidity risk management framework suitable for the management of the Group's short - medium and long-term funding as well as and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The following table details the Group's expected maturity for its non-derivative financial assets. The table has been drawn up based on the undiscounted contractual maturities of the financial assets including interest that will be earned on those assets. The inclusion of information on non-derivative financial assets is necessary in order to understand the Group liquidity risk management as the liquidity is managed on a net asset and liability basis.

	Tingkat bunga rata-rata tertimbang efektif/ *Weighted average effective interest rate*	< 1 Tahun/ *< 1Year*	1 - 2 Tahun/ *1 - 2 Years*	2 - 3 Tahun/ *2 - 3 Years*	Jumlah/ *Total*	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
31 Desember 2025						***Desember 31, 2025***
Aset						***Assets***
Tanpa Bunga						*Non-Interest Bearing*
Kas		239.925.800	--	--	239.925.800	*Cash*
Piutang Usaha						*Trade Receivables*
Pihak Berelasi		425.352.962.906	--	--	425.352.962.906	*Related Parties*
Pihak Ketiga		351.309.358.462	--	--	351.309.358.462	*Third Parties*
Piutang Retensi						*Retention Receivables*
Pihak Berelasi		3.757.922.744	--	--	3.757.922.744	*Related Parties*
Pihak Ketiga		24.807.001.432	--	--	24.807.001.432	*Third Parties*
Piutang Lain-lain		12.456.098.469	--	--	12.456.098.469	*Other Receivable*
Piutang yang Belum Ditagih						*Accrued Income*
Pihak Berelasi		419.793.379.813	--	--	419.793.379.813	*Related Parties*
Pihak Ketiga		157.825.508.271	--	--	157.825.508.271	*Third Parties*
Tagihan Bruto Pemberi Kerja						*Gross Amount Due From Customer*
Pihak Berelasi		11.367.704.864	--	--	11.367.704.864	*Related Parties*
Pihak Ketiga		60.479.775.811	--	--	60.479.775.811	*Third Parties*
Instrumen Suku Bunga Variable						*Variable Interest Rate Instrument*
Kas di Bank	1.00% - 2.50%	92.115.882.588	--	--	92.115.882.588	*Cash in Bank*
Instrumen Suku Bunga Tetap						*Fixed Interest Rate Instrument*
Deposito	2.00% - 4.50%	319.370.000.000	--	--	319.370.000.000	*Deposits*
Jumlah		**1.878.875.521.160**	**--**	**--**	**1.878.875.521.160**	***Total***
Liabilitas						***Liabilities***
Tanpa bunga						*Non-interest Bearing*
Utang Usaha						*Trade Payables*
Pihak Berelasi		307.154.770.074	--	--	307.154.770.074	*Related Parties*
Pihak Ketiga		1.118.216.714.327	--	--	1.118.216.714.327	*Third Parties*
Utang Lain-lain		3.339.365.897	--	--	3.339.365.897	*Other Payables*
Beban Akrual		587.332.996.246	--	--	587.332.996.246	*Accrued Expense*
Instrumen Suku Bunga Tetap						*Variable Interest Rate Instrument*
Liabilitas Sewa	8.50% - 10.25%	--	--	--	--	*Lease Liabilities*
Instrumen Suku Bunga Variable						*Variable Interest Rate Interest*
Pinjaman Jangka Panjang	8.00% - 8.75%	68.351.000.000	134.320.000.000	--	202.671.000.000	*Long-term Loan*
Jumlah		**2.094.411.856.464**	**134.320.000.000**	**--**	**2.228.731.856.464**	***Total***

	Tingkat bunga rata-rata tertimbang efektif/ *Weighted average effective interest rate*	< 1 Tahun/ *< 1Year*	1 - 2 Tahun/ *1 - 2 Years*	2 - 3 Tahun/ *2 - 3 Years*	Jumlah/ *Total*	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
31 Desember 2024						***December 31, 2024***
Aset						**Assets**
Tanpa Bunga						*Non-Interest Bearing*
Kas		342,547,717	--	--	342,547,717	*Cash*
Piutang Usaha						*Trade Receivables*
Pihak Berelasi		417,835,737,496	--	--	417,835,737,496	*Related Parties*
Pihak Ketiga		500,849,180,985	--	--	500,849,180,985	*Third Parties*
Piutang Retensi						*Retention Receivables*
Pihak Berelasi		14,699,045,648	--	--	14,699,045,648	*Related Parties*
Pihak Ketiga		30,567,710,851	--	--	30,567,710,851	*Third Parties*
Piutang Lain-lain		13,099,021,155	--	--	13,099,021,155	*Other Receivable*
Piutang yang Belum Ditagih						*Accrued Income*
Pihak Berelasi		660,681,241,810	--	--	660,681,241,810	*Related Parties*
Pihak Ketiga		262,675,004,831	--	--	262,675,004,831	*Third Parties*
Tagihan Bruto Pemberi Kerja						*Gross Amount Due From Customer*
Pihak Berelasi		21,535,434,206	--	--	21,535,434,206	*Related Parties*
Pihak Ketiga		17,198,145,361	--	--	17,198,145,361	*Third Parties*
Instrumen Suku Bunga Variable						*Variable Interest Rate Instrument*
Kas di Bank	1.00% - 2.50%	216,581,746,473	--	--	216,581,746,473	*Cash in Bank*
Instrumen Suku Bunga Tetap						*Fixed Interest Rate Instrument*
Deposito	2.00% - 4.75%	380,630,000,000	--	--	380,630,000,000	*Deposits*
Jumlah		**2,536,694,816,533**	**--**	**--**	**2,536,694,816,533**	***Total***
Liabilitas						***Liabilities***
Tanpa bunga						*Non-interest Bearing*
Utang Usaha						*Trade Payables*
Pihak Berelasi		423,068,116,663	--	--	423,068,116,663	*Related Parties*
Pihak Ketiga		1,550,944,033,360	--	--	1,550,944,033,360	*Third Parties*
Utang Lain-lain		1,440,687,071	--	--	1,440,687,071	*Other Payables*
Beban Akrual		582,020,283,767	--	--	582,020,283,767	*Accrued Expense*
Instrumen Suku Bunga Tetap						*Variable Interest Rate Interest*
Liabilitas Sewa	8.50% - 10.25%	6,566,084,523	--	--	6,566,084,523	*Lease Liabilities*
Instrumen Suku Bunga Variable						*Variable Interest Rate Interest*
Pinjaman Jangka Pendek	5.32% - 7.75%	--	--	--	--	*Short-term Loan*
Pinjaman Jangka Panjang	8.00% - 8.75%	40,000,000,000	426,254,000,000	--	466,254,000,000	*Long-term Loan*
Jumlah		**2,604,039,205,384**	**426,254,000,000**	**--**	**3,030,293,205,384**	***Total***

Jumlah yang dicakup di atas untuk instrumen suku bunga variabel untuk aset dan liabilitas keuangan non-derivatif akan berubah jika perubahan suku bunga variabel berbeda dengan estimasi suku bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan.

The amounts included above for variable interest rate instruments for both nonderivative financial assets and liabilities is subject to change if changes in variable interest rates differ to those estimates of interest rates determined at the end of the reporting period.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Berikut hirarki nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

Below is the fair value hierarchy for financial assets measured at fair value through profit and loss:

	2025 Rp	Tingkat I/ *Level I* Rp	Tingkat II/ *Level II* Rp	Tingkat III/ *Level III* Rp	
Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi					*Fair Value Through Profit or Loss*
Aset Tidak Lancar Lainnya					*Other Non-Current Assets*
PT Wege Solusi Proklamasi	2,500,000,000	--	--	2,500,000,000	*PT Wege Solusi Proklamasi*
PT Waskita Beton Precast Tbk	3,643,595,743	--	--	3,643,595,743	

	2024 Rp	Tingkat I/ *Level I* Rp	Tingkat II/ *Level II* Rp	Tingkat III/ *Level III* Rp	
Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi					*Fair Value Through Profit or Loss*
Aset Tidak Lancar Lainnya					*Other Non-Current Assets*
PT Wege Solusi Proklamasi	2,500,000,000	--	--	2,500,000,000	*PT Wege Solusi Proklamasi*

Manajemen Risiko Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup disyaratkan untuk memelihara tingkat permodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipenuhi oleh entitas. Selain itu, Perusahaan juga dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007, untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipertimbangkan oleh Perusahaan serta telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama periode - periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi total pinjaman berdampak bunga dengan total ekuitas yang

Capital Risk Management

The primary objective of the Group capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Group are required under their respective loan agreements to maintain the level of existing share capital. This externally imposed capital requirement has been complied with by the relevant entities. In addition, the Company are also required by the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Entities, effective August 16, 2007, to allocate and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirements are considered by the Company decided at the Annual General Meeting of shareholders (RUPS).

The Group manages theirs capital structure and makes adjustments to it, if necessary, based on changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods ended December 31, 2025 and 2024.

The Group monitors its capital using gearing ratios, by dividing interest bearing loan to total equity attributable to equity holders of the parent entity. The Company's policy is to

dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kebijakan Perusahaan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran rasio pengungkit Perusahaan terkemuka di Indonesia untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang rasional. Termasuk dalam total pinjaman berdampak bunga adalah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang, utang lain-lain dan utang sewa pembiayaan.

maintain its gearing ratio within the range of gearing ratios of the leading companies in Indonesia in order to secure access to financing at a reasonable cost. Including in interest bearing loan are short-term bank loans and long-term bank loans, other payable and finance lease payable.

Gearing ratios pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Gearing Ratios as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Pinjaman Jangka Pendek	10,017,009,920	--	*Short Term Loans*
Pinjaman Jangka Panjang	202,671,000,000	472,820,084,523	*Long Term Loans*
Jumlah	**212,688,009,920**	**472,820,084,523**	***Total***
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	**3,627,761,326,942**	**3,592,597,196,477**	***Total Equity Atribute to Owner of The Parent Entity***
Gearing Ratio	**5.86%**	**13.16%**	***Gearing ratio***

43. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

43. Reconciliation of Liabilities Arising From Financing Activities

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasian Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

The table below details changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's consolidated statement of cash flows as cash flows from financing activities.

2025

	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Arus Kas (untuk) dari Aktifitas Pendanaan/ *Financing Cash Flow*		Perubahan Transaksi NonKas/ *Non-Cash Changes*	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp
		Penerimaan/ *Receipt* Rp	Pembayaran/ *Payment* Rp	Penambahan Aset Hak-Guna/ *Additional of Right-use-of-Assets* Rp	
Pinjaman Jangka Pendek Pihak Ketiga/ *Short-term Loan Third Parties*	--	30,065,689,600	(20,048,679,680)	--	10,017,009,920
Pinjaman Jangka Panjang/ *Long-term Loan*	466,254,000,000	--	(263,583,000,000)	--	202,671,000,000
Liabilitas Sewa/ *Lease Liabilities*	6,566,084,523	--	(7,132,444,849)	566,360,326	--
Jumlah / *Total*	**472,820,084,523**	**30,065,689,600**	**(290,764,124,529)**	**566,360,326**	**212,688,009,920**

2024

	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Arus Kas (untuk) dari Aktifitas Pendanaan/ *Financing Cash Flow*		Perubahan Transaksi NonKas/ *Non-Cash Changes*	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp
		Penerimaan/ *Receipt* Rp	Pembayaran/ *Payment* Rp	Penambahan Aset Hak-Guna/ *Additional of Right-use-of-Assets* Rp	
Pinjaman Jangka Pendek Pihak Berelasi/ *Short-term Loan Related Parties*	101,187,473,870	19,584,978,813	(120,772,452,683)	--	--
Pinjaman Jangka Panjang/ *Long-term Loan*	275,000,000,000	320,000,000,000	(128,746,000,000)	--	466,254,000,000
Liabilitas Sewa/ *Lease Liabilities*	7,911,096,170	--	(9,613,010,992)	8,267,999,345	6,566,084,523
Jumlah / *Total*	**384,098,570,040**	**339,584,978,813**	**(259,131,463,675)**	**8,267,999,345**	**472,820,084,523**

44. Transaksi Non-Kas / *Non-Cash Transaction*

Pengungkapan tambahan atas aktivitas investasi non kas:

Supplemental disclosures on non-cash investing activities:

	2025 Rp	2024 Rp	
Aktivitas investasi non kas:			*Non cash investing activities:*
Penambahan investasi jangka panjang yang berasal dari konversi piutang usaha	7,920,860,309	--	*Addition of long-term investment through conversion of receivable*
Perolehan aset tetap melalui utang usaha dan beban akrual	--	35,202,941,460	*Addition of Fixed Assets through account payables and accrued expenses*
Penambahan properti investasi yang berasal dari konversi piutang usaha	--	2,583,380,000	*Addition of investment property through conversion of receivable*

45. Kontijensi / *Contingency*

Pemerolehan Aset Tanah

Sehubungan dengan pembelian Lahan seluas 50 Ha di Desa Karangmukti, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat untuk pengembangan Pabrik Produk Beton di Subang, Perusahaan telah melaporkan Pengurus PT Agrawisesa Widyatama ke Bareskrim Mabes POLRI pada tahun 2017 atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Perusahaan dan PT Agrawisesa Widyatama sebagaimana Laporan Polisi No. LP/1342/XII/2017 /Bareskrim per tanggal 7 Desember 2017. Pelaporan ini dilakukan karena PT Agrawisesa Widyatama tidak melakukan pemecahan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 722 seluas 1.996.977 m2 sebagaimana telah diperjanjikan, dan diketahui SHGB tersebut telah diserahkan atau dijaminkan kepada pihak lain.

Acquisition of Land Assets

In relation to the acquisition of approximately 50 hectares of land located in Karangmukti Village, Cipeundeuy District, Subang Regency, West Java Province, intended for the development of a concrete product manufacturing plant in Subang, the Company filed a report against the management of PT Agrawisesa Widyatama with the Criminal Investigation Department of the Indonesian National Police (Bareskrim Mabes POLRI) in 2017 for alleged criminal acts of fraud and/or embezzlement in connection with the sale and purchase agreement entered into between the Company and PT Agrawisesa Widyatama, as evidenced by Police Report No. LP/1342/XII/2017/Bareskrim dated 7 December 2017.The report was filed on the grounds that PT Agrawisesa Widyatama failed to carry out the subdivision of Building Use Right Certificate (SHGB) No. 722 covering an area of 1,996,977 square meters as agreed, and it was subsequently discovered that the SHGB had been transferred and/or pledged as security to another party.

Selanjutnya Atas Laporan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan oleh Perusahaan, Sdr. Muhammad Ali (Direktur Utama PT Agrawisesa Widyatama) terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 jo. 55 KUHP dan dijatuhkan hukuman pidana 3 tahun penjara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 589/Pid.B/2020 /PN Jkt.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 441/PD/2020/PTDKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 571K/PID/2021.

Furthermore, in relation to the Company's report regarding the alleged criminal acts of fraud and/or embezzlement, Mr. Muhammad Ali (President Director of PT Agrawisesa Widyatama) has been lawfully proven and declared guilty of committing a criminal offense pursuant to Article 378 in conjunction with Article 55 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), and was sentenced to three (3) years of imprisonment as stipulated in the Decision of the South Jakarta District Court No. 589/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel in conjunction with the Decision of the Jakarta High Court No. 441/PD/2020/PTDKI in conjunction with the Decision of the Supreme Court No. 571K/PID/2021.

Sdr. Burhanuddin (Komisaris Utama Agrawisesa) terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 jo. 55 KUHP dan dijatuhkan hukuman 3 tahun 10 bulan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1154/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel tanggal 17 Maret 2022 jo. Putusan Pengandilan Tinggi No. 106/PID/2022/PT. DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1177 /K.PID/2022.

Mr. Burhanuddin (President Commissioner of Agrawisesa) has been lawfully proven and declared guilty of committing a criminal offense pursuant to Article 378 in conjunction with Article 55 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), and was sentenced to three (3) years and ten (10) months of imprisonment as stipulated in the Decision of the South Jakarta District Court No. 1154/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel dated 17 March 2022 in conjunction with the Decision of the Jakarta High Court No. 106/PID/2022/PT.DKI in conjunction with the Decision of the Supreme Court No. 1177/K.PID/2022.

Atas tindak lanjut proses Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai bentuk akuntabilitas Perusahaan selanjutnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Subang terhadap PT Agrawisesa Widyatama dan PT Bank QNB Indonesia Tbk selaku Para Tergugat dan terhadap Badan Pertahanan Nasional / Kantor Pertanahan Kabupaten Subang selaku Turut Tergugat sebagaimana Nomor Perkara 58/Pdt.G/2024/PN Sng pada tanggal 11 Desember 2024 dan diputus perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 25 September 2025 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Perusahaan dan menghukum PT Agrawisesa Widyatama dan PT Bank QNB Indonesia Tbk telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatigedaad) serta menyerahkan SHGB 722/Karangmukti untuk selanjutnya dilakukan pemecahan sertifikat hak atas bidang tanah seluas 500.000 m2 dan kemudian hasil pemecahan sertifikat hak atas tanah tersebut diserahkan kepada Perusahaan.

Following the completion of the criminal proceedings which have obtained permanent legal force (inkracht van gewijsde), and as a form of the Company's accountability, the Company subsequently filed a civil lawsuit for unlawful act (perbuatan melawan hukum) before the Subang District Court against PT Agrawisesa Widyatama and PT Bank QNB Indonesia Tbk as Defendants, and against the National Land Agency / Land Office of Subang Regency as Co-Defendant, as registered under Case No. 58/Pdt.G/2024/PN Sng dated 11 December 2024. The case was decided by the Panel of Judges of the Subang District Court on 25 September 2025, which in essence granted the Company's claim and declared that PT Agrawisesa Widyatama and PT Bank QNB Indonesia Tbk had committed an unlawful act (onrechtmatige daad), and ordered the handover of SHGB No. 722/Karangmukti to enable the subdivision of the land certificate covering an area of 500,000 square meters, and subsequently ordered that the resulting subdivided land title certificates be delivered to the Company.

Atas putusan Pengadilan Negeri Subang tersebut, PT Agrawisesa Widyatama dan PT Bank QNB Indonesia Tbk mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, dan pada tanggal 17 November 2025, Pengadilan Tinggi Bandung telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 756/PFT/2025/PT BDG yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 25 September 2025.

Against the decision of the Subang District Court, PT Agrawisesa Widyatama and PT Bank QNB Indonesia Tbk filed an appeal to the Bandung High Court. On 17 November 2025, the Bandung High Court rendered its Decision No. 756/PDT/2025/PT BDG, which in essence affirmed the Decision of the Subang District Court No. 58/Pdt.G/2024/PN Sng dated 25 September 2025.

Kemudian pada tanggal 10 Desember 2025, PT Agrawisesa Widyatama dan PT Bank QNB Indonesia Tbk mengajukan upaya Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 756/PFT/2025/PT BDG Jo. Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sng dan sampai dengan saat ini, upaya hukum tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.

Subsequently, on 10 December 2025, PT Agrawisesa Widyatama and PT Bank QNB Indonesia Tbk filed a cassation appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia against the Decision of the Bandung High Court No. 756/PDT/2025/PT BDG in conjunction with the Decision of the Subang District Court No. 58/Pdt.G/2024/PN Sng. As of the date of this report, the cassation proceeding is still under examination by the Supreme Court.

46. Standar Akuntansi Baru yang Belum Berlaku

46. New Accounting Standards Not Yet Effective

Amendemen, revisi dan penyesuaian tahunan atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan;
- Penyesuaian Tahunan PSAK 107, PSAK 109, PSAK 110, dan PSAK 207; dan
- Revisi PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali terkait ruang lingkup dan penerapan metode penyatuan kepemilikan.

Amendments, revised and annual improvements to standards which are effective for periods beginning on or after January 1, 2026, with early adoption are as follows:

- *Amendments PSAK 109 and PSAK 107 regarding Classification and Measurement of Financial Instruments;*
- *Annual Improvements on PSAK 107, PSAK 109, PSAK 110, dan PSAK 207; and*
- *Revised PSAK 338: Business Combination of Entity Under Common Control regarding the scope and application of the method of pooling of interest.*

Standar baru, revisi dan amandemen serta interpretasi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan;
- PSAK 119 : Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan;
- Amandemen PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan;
- Revisi PSAK 401: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah;
- ISAK 403: Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah Yang Menerapkan SAK Indonesia Untuk Entitas Privat dan SAK Indonesia Untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah;
- PSAK 413: Penurunan Nilai; dan
- PSAK 414: Penurunan Nilai Aset Keuangan Syariah bagi Entitas yang

New, revised and amendment of standards and interpretation of standard which are effective for periods beginning on or after January 1, 2027, with early adoption permitted, are as follows:

- *PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements;*
- *PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures;*
- *Amendment PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures;*
- *Revised PSAK 401: Presentation and Disclosure in Sharia Financial Statements;*
- *ISAK 403: Components of Financial Reports of Sharia Entities That Apply Indonesian SAK for Private Entities and Indonesian SAK for Micro, Small, and Medium Entities;*
- *PSAK 413: Impairment; and*
- *PSAK 414: Impairment of Sharia Financial Assets for Entities Implementing*

Menerapkan SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP).

Indonesian SAK for Private Entities (SAK EP).

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

47. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

47. Management's Responsibility and Approval of The Consolidated Financial Statements

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2026.

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management and were approved by the Directors for issuance on March 26, 2026.

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

DESEMBER 2025

2025

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
Taman Sari Hive Office Lantai 3-5,
Jl. DI Panjaitan Kav. 2, Jakarta 13340

(021) 8192802
sekper@wika-beton.co.id
www.wika-beton.co.id



Annual Report
2025
Laporan Tahunan

PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Tamansari Hive Office Lt.3-5,
Jl. D.I Panjaitan Kav 2,
Jakarta Timur 13340.

Tel : (021) 8192802 (Hunting)

Email : sekper@wika-beton.co.id
marketing@wika-beton.co.id

Website : www.wika-beton.co.id